S A L I N A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
b. bahwa Rencana Kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai landasan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Renja-PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
   a. gambaran tentang Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam 1 (satu) tahun anggaran;
   b. pedoman setiap PD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2026; dan
   c. pedoman PD dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian Program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Renja-PD Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis PD.

BAB III
RENJA-PD

Pasal 3

(1) Renja masing-masing PD Tahun 2026, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   BAB I : Pendahuluan;
   BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Renja-PD Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Rencana Kerja Inspektorat;
d. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
h. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
i. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
j. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
l. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
m. Rencana Kerja Dinas Sosial;
n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
p. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
q. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

t. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
u. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
v. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
w. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
x. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
y. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
z. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
aa. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
bb. Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
cc. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
dd. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
ee. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
ff. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
gg. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
hh. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ii. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
jj. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
kk. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
ll. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti;
mm. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;

qq. Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
uu. Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Samboja;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
aaa. Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
bbb. Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
ccc. Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
ddd. Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;
eee. Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
fff. Rencana Kerja Kota Bangun Darat; dan
ggg. Rencana Kerja Samboja Barat.

(3) Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

Lampiran I	:	Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
Lampiran II	:	Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Lampiran III	:	Rencana Kerja Inspektorat;
Lampiran IV	:	Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran V	:	Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran VI	:	Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran VII	:	Rencana Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah;

Lampiran VIII	:	Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Lampiran IX	:	Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Lampiran X	:	Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XI	:	Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Lampiran XII	:	Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
Lampiran XIII	:	Rencana Kerja Dinas Sosial;
Lampiran XIV	:	Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
Lampiran XV	:	Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Lampiran XVI	:	Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
Lampiran XVII	:	Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
Lampiran XVIII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran XIX	:	Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Lampiran XX	:	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
Lampiran XXI	:	Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
Lampiran XXII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Lampiran XXIII	:	Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Lampiran XXIV	:	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Lampiran XXV	:	Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Lampiran XXVI	:	Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
Lampiran XXVII	:	Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
Lampiran XXVIII	:	Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
Lampiran XXIX	:	Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
Lampiran XXX	:	Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Lampiran XXXI	:	Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
Lampiran XXXII	:	Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Lampiran XXXIII	:	Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Lampiran XXXIV	:	Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Lampiran XXXV	:	Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Lampiran XXXVI	:	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran XXXVII	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
Lampiran XXXVIII	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti;

Lampiran XXXIX	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
Lampiran XL	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
Lampiran XLI	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
Lampiran XLII	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;
Lampiran XLIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
Lampiran XLIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
Lampiran XLV	:	Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;
Lampiran XLVI	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
Lampiran XLVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
Lampiran XLVIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
Lampiran XLIX	:	Rencana Kerja Kecamatan Samboja;
Lampiran L	:	Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
Lampiran LI	:	Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
Lampiran LII	:	Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
Lampiran LIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
Lampiran LIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
Lampiran LV	:	Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
Lampiran LVI	:	Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;

Lampiran LVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
Lampiran LVIII	:	Rencana Kerja Kota Bangun Darat; dan
Lampiran LIX	:	Rencana Kerja Samboja Barat

BAB IV

PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 5

(1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada perubahan RKPD.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja-PD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh PD. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara terdiri atas 3 (tiga) asisten yang masing-masing asisten mengoordinasikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian yang dikepalai oleh kepala bagian.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Renja-PD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, rencana strategis PD dan Renja-PD.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) PD dan sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Rancangan Renja-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam RKA-SKPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026; dan
3. Rancangan Renja-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2026;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

24. Peratutan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
25. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 Tanggal 11 Febuari 2025 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan RKPD tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah :

1. Untuk menetapkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan RKPD Tahun 2026.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2026.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud da Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 melalui analisis terhadap realisasi kinerja realisasi fisik dan realisasi keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja realisasi Rencana Kerja tahun berjalan (tahun 2025) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD yang diharapkan dan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran *output*.

Evaluasi ini selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat diketahui pada Program dan kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, di antaranya:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Secara umum seluruh Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan, dan tidak terdapat Program ataupun kegiatan yang tidak tercapai targetnya di akhir tahun, jika ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuanganya rendah dikarenakan ada efisiensi penggunaan anggaran, namun target fisik dapat tercapai sesuai target.
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Beberapa Program dan kegiatan yang realisasinya memperoleh predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

   Dari seluruh Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Program / kegiatan yang realisasinya diatas 100 % (seratus persen) pada tahun 2024.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/kegiatan;

   Secara umum tidak terdapat Program/ kegiatan yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2024 sehingga tidak terdapat faktor atau perihal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program rencana strategis PD;

   Secara umum target kinerja PD dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan implikasi yang dihasilkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD di buktikan dengan tingginya nilai indeks kualitas pelayanan masyarakat oleh bagian pada Sekretariat Daerah baik secara internal mapun eksternal. Implikasi lainya adalah peningkatan efektifitas koordinasi dan peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sehingga diharapakan dari peningkatan tersebut dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah intensitas kegiatan meningkat secara signifikan, upaya lainya adalah peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis PD s/d Tahun 2024

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			262.410.000	238.624.098				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	75,000,000	64.479.164	85.97	3	7	30%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	30,000,000	29.724.000	99.08	2	8	20%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	157,410,000.00	144.420.934	91.75	3	12	20%
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15		66.523.806.369	62.850.688.361				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634	0	59.593.801.009	56.084.954.901	94.11	634	-	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	100.684.400	98.695.320	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12	335.709.000	301.529.611	89.82	12	-	20%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	50.000.000	44.310.485	88.62	1	4	20%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	521.800.000	502.473.520	96.30	1	4	20%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	50.000.000	47.576.500	95.15	1	4	20%
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			898.213.600	808.211.220				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	13	78.840.000	56.984.400	72.78	80	320	20%
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	126.284.600	114.409.600	90.60	1	4	20%
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	1	60.000.000	48.881.600	81.47	1	4	20%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	142,660,000	116.260.000	81.49	1	4	20%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	490.429.000	471.675.620	96.18	1	4	20%
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			7.292.899.000	7.253.432.265				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3300	3300	6.897.899.000	6.877.192.800	99.70			
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	395.000.000	376.239.465	95.25	1	4	20%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.928.556.000	9.819.285.164				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1305	261	1.433.512.000	1.412.268.700	98.52	261	1,044	20%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360	17110	6.525.000.000	6.518.039.950	99.89	20000	14,360	58%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	255	51	308.344.000	303.574.620	98.45	60	195	24%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367	2265	1.200.000.000	1.199.071.594	99.92	2265	102	96%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634	634	461.700.000	386.330.300	83.68	634	-	100%
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510		36.555.106.029	36.072.779.332				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	70	14	17.340.157.320	17.058.746.292	98.38	14	(4.00)	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	100	19.214.948.709	19.014.033.040	98.95	100	400	20%
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	12		17.666.881.160	17.364.807.436				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	45,000,000	43.648.500	97.00	12	-	20%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	8.700.000.000	8.527.545.139	98.02	12	-	20%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	3.050.069.200	3.022.465.773	99.09	12	-	20%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	5.871.811.960	5.771.148.024	98.29	12	-	20%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	132	222	30.371.596.925	28.636.661.789				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	35	2.233.462.348	2.111.413.810	94.54	35	-	50%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	9	24.601.140.070	23.064.545.560	93.75	9	-	20%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	8	2.231.556.513	2.166.804.219	97.10	8	-	20%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340	170	1.305.437.994	1.293.898.200	99.12	170	-	50%
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	26	1.418.153.965	1.011.187.135				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	24	918,153,965	770.038.180	83.87	12	-	20%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	2	500.000.000	241.148.955	48.23	2	-	20%
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	1165	1128	2.695.778.200	2.512.408.662				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	3	550,000,000	544.851.210	99.06	3	-	20%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	4	400.000.000	365.342.051	91.34	4	-	20%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1	991.690.000	930.914.308	93.87	1	-	20%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	0	400.000.000	338.335.995	84.58	2	4	33%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	354.088.200	332.965.098	94.03	2	-	100%
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5282	10239	18.628.512.191	18.487.569.709				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1000	1000	7.163.744.005	7.161.443.962	99.97	1000	-	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	320	322	8.884.630.900	8.785.121.773	98.88	332	332	100%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950	950	2.580.137.286	2.541.003.974	91.31	1000	4,898	105%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	166	71	1.716.646.245	1.591.041.320				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	75	15	567.176.000	517.868.119	91.31	113	-	20%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60	12	555.860.245	538.331.555	96.85	12	-	20%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	3	593.610.000	534.841.646	90.10	3	12	20%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1820	1812	106.138.867.746	100.461.347.724				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250	50	79.901.151.043	75.802.111.331	94.87	50	(118)	26%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi	160	16	762.000.000	487.915.064	64.03	19	18	20%
						Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5568	1195	25.475.716.703	24.171.321.329	94.88	1262	-	20%
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	212	212	1.383.477.000	1.021.866.782				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1000	200	500.000.000	339.297.200	67.86	200	-	20%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	4	708.477.000	544.005.600	76.79	10	-	20%
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10	2	175,000,000	138.563.982	79.18	6	(4)	20%
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19	25	1.507.560.900	1.499.933.888				
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	17	450,000,000	449.898.379	99.98	12	-	20%
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	528.514.000	523.249.439	99.00	2	(1)	20%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	7	529.046.900	526.786.070	99.87	6	-	20%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185	22	1.889.741.000	1.543.869.308			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	3	440.000.000	361.831.300	82.23	3	-	20%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75	15	642.026.000	534.051.928	83.18	15	-	20%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120	4	807.715.000	647.986.080	80.22	120	-	20%
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155	122	1.641.460.385	1.417.962.812				
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	110	22	750.360.000	595.762.141	79.40	22	-	26%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25	5	631.350.385	569.974.237	90.28	5	-	20%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	210	42	259.750.000	252.226.434	97.10	42	-	20%
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	763	684	2.563.600.000	2.546.430.784				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2500	555	716,200,000	706.667.537	98.67	594	-	24%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10	2	1.022,400,000	1.016.707.458	99.44	4	(3)	20%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	10	825,000,000	823.055.789	99.76	10	-	20%
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27	27	1.097.000.000	1.080.674.000				
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	01	03	2.04	01	Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	75	15	499,000,000	491.075.500	98.41	15	-	20%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	6	374.000.000	365.701.000	97.78	6	-	20%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	6	224.000.000	223.897.500	99.95	6	-	20%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2024 penilaian terhadap capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel TC. 30, adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 masih dalam tahapan pelaksanaan sehingga belum bisa dilakukan penilaian terhadap indikator indikator tersebut, sedangkan proyeksi untuk Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I	I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	Indeks			67.04	69.90	72.76	75.41	N.A	85.95	72.76	75.41	Target terpenuhi
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			n.a	88	89	90	N.A	88.14	89	90	Target terpenuhi
	2 Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			65	70	75	80	N.A	85.1	75	80	Target terpenuhi
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			86	91	96	97	N.A	91.45	96	97	Target terpenuhi
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			92	94	96	97	N.A	94	96	97	Target terpenuhi
	2 Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			77	78	79	81	N.A	79.667	79	81	Target terpenuhi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			86	87	88	89	N.A	87	88	89	Target terpenuhi
	4 Nilai LPPD	Angka/ Nilai			3.3	3.4	3.5	3.6	N.A	0	3.5	3.6	Target terpenuhi
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			81.7	84.7	89.7	91.7	N.A	86.63	89.7	91.7	Target terpenuhi
	2 Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			65.5	68.5	70.5	75.5	N.A	74.5	70.5	75.5	Target terpenuhi
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			77	80	82	85	N.A	87.04	82	85	Target terpenuhi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar, untuk mewujudkan Program pembangunan pemerintah dan untuk mencapai indikator kinerja, meningkatnya pengawasan pelaksanaan *Good Governance* dalam upaya mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

   Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh hasil yang memuaskan dengan tercapainya semua target yang telah ditetapkan hal ini menggambarkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah dalam kategori sangat tinggi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah:
   a. data dan informasi belum tersedia secara utuh dan aktual;
   b. penetapan Program dan kegiatan/sub kegiatan cenderung di dasarkan atas kebiasaan masa *sebelumnya (Business As Usual)*, atau minim inovasi;
   c. kolaborasi dan integrasi kegiatan/sub kegiatan belum terbangun dengan baik;
   d. perencanaan yang tidak fokus, cenderung terbagi rata di masing- masing pejabat struktural;
   e. kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi Pemerintah Daerah;
   f. etika dan moral penyelenggara pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
   g. perubahan struktur PD karena aturan baru pemerintah pusat, berakibat perubahan personalia seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru yang juga memerlukan adaptasi baru bagi seluruh personalia PD;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan

h. dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada Daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu:
   a. peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang administrasi birokrasi Pemerintah Daerah;
   b. etika dan moral penyelenggara pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
   c. belum maksimalnya pelaksanaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sehingga pelayanan dianggap masih belum sesuai harapan masyarakat; dan
   d. dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada Daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
4. Peluang dalam peningkatan pelayanan PD, antara lain:
   a. tahun 2026 ditekankan pada penguatan dan perbaikan pola kerja efektif dan efsisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai media koordinasi dan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab;
   b. adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi Pemerintah Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan;
   c. adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;

d. adanya pelatihan/bimbingan teknis terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, agar etika dan moral penyelenggara pemerintahan Daerah mengalami peningkatan agar mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya, serta memaksimalkan pelaksanaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui SPIP yang melekat, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dapat dicapai; dan

e. adanya kajian dan analisa yang cermat bagi setiap PD teknis dalam menyikapi perubahan produk hukum dan perundang-undangan yang dinamis, terutama menyangkut beberapa kewenangan yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program kegiatan prioritas tahun direncanakan. Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan”, hal hal yang menjadi sasaran kegiatan diantaranya:

a. Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik.
   - Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
   - Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
   - Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis teknologi informasi.

b. Penguatan Sektor Unggulan.
   - Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat.
   - Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak.

d. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan.
   - Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

Tugas dan fungsi PD secara umum dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD tersebut di tahun 2026 diharapkan untuk mampu melaksanakan sebagai berikut :

a. menjalankan fungsi Kebijakan dalam rangka memastikan belanja *mandatory* berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. visi-misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman;
c. penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas;
d. dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi;
e. penyediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan aktual; dan
f. penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat subtansi.

Menanggapi isu isu penting diatas Sekretariat Daerah sebagai PD yang menjalankan fungsi koordinasi, penyusunan kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk:

a. berperan dalam penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi PD;
b. peningkatan kualitas kebijakan yang disusun dan diberlakukan; dan
c. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, baik sebagai PD yang memberikan layanan masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai koordinator dalam memastikan pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4 *Review* terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan Recana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang memuat prioritas Program dan kegiatan dari Renja-PD.

Tujuan penyusunan RKPD tahun 2026 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa Program prioritas pembangunan Daerah memuat Program-Program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan visi dan visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, prioritas nasional, prioritas provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 2026 yang didasarkan pada rencana strategis (renstra) PD tahun 2021-2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut dengan beberapa catatan penting diantaranya :

a. penyesuaian anggaran gaji dari BPKAD yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi gaji tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pemenuhan gaji aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah untuk tahun 2026;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. diperlukan penganggaran *medical cek up* kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, karena belum teranggarkan dalam Renstra-PD tahun 2021-2026;

c. penyesuaian kebutuhan anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam melaksankan tupoksi masing masing sub kegiatan; dan

d. diperlukannya penganggaran peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat serta kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya, karena belum teranggarkan dalam Renstra-PD tahun 2021-2026.

Selanjutnya *review* terhadap rancangan RKPD Sekretariat Daerah tahun 2026 dapat tergambar dalam matrik berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C 31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	105.599.671.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	137.986.171.944	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	280.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	59.237.167.163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	78.624.414.562	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	58.327.312.763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	77.952.614.562	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.684.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187.370.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	492.950.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	149.420.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	78.840.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	39.420.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	142.660.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151.450.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.457.177.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6.775.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1.140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1.140.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2.860.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44360 Paket	4.830.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	100.627.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9401 Dokumen	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1367 Laporan	500.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	131.550.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.165.047.510	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.648.578.190	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.516.469.320	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3.000.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648.578.190	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648.578.190	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.863.488.584	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		13.083.016.920	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.500.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.953.689.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	953.689.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.864.799.384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.624.327.720	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.338.704.778	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah		12.312.172.348	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	812.172.348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	1.312.172.348	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	8.800.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.000.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	340 Unit	900.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340 Unit	1.200.000.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918.153.965	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.972.080.388	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	918.153.965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	972.080.388	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	
Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2.946.620.000	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	1.550.000.000	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokmen	250.000.000	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	300.000.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1.196.620.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	600.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400.000.000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	11.939.561.750	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	19.566.489.536	
Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	4.208.197.350	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	6.911.882.350	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	6.674.364.400	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	10.814.630.900	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1.057.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1.839.976.286	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Nilai	34.289.632.448	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Nilai	77.927.455.400	
Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	1.024.912.245	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	7 Dokumen	1.150.000.000	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	418.600.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	300.000.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	355.162.245	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	300.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	251.150.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	550.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	221 Dokumen	30.831.198.203	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	221 Dokumen	74.818.941.400	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	18.604.473.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	26.698.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	762.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	320.941.400	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10.964.724.703	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	47.600.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	100.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	100.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.025.008.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1005 Dokuemen	1.150.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500.008.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500.000.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	350.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	450.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	200.000.000	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.408.514.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19 Dokumen	808.514.000	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	240.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528.514.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	298.514.000	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	270.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1,5 s.d. 3,5 Nilai	3.646.850.385	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1,5 s.d. 3,5 Nilai	4.181.600.385	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dokumen	718.750.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12 Dokumen	991.250.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	340.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	390.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	231.250.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	351.250.000	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	147.500.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	250.000.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656.100.385	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	706.350.385	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	215.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	285.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	281.350.385	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	281.350.385	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	159.750.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	140.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1.325.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 595 Dokumen	1.730.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	504 Dokumen	759.000.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	521.000.000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	525.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	270 Orang	450.000.000	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7 Dokumnen	754.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	499.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	300.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6	224.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	250.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6	224.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	2 Dokumen	204.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
							Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
TOTAL				143.536.154.083					220.095.227.729	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi di lapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 meliputi 3 (tiga) Program yang dilaksanakan dalam 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) sub-kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi PD Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra-PD tahun 2021–2026, selain itu tidak terdapat usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari PD maupun dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, untuk usulan kegiatan dari masyarakat melalui sisitem informasi pemerintahan daerah (SIPD) belum dapat disajikan karena dalam tahap penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja-PD ini belum dilakukan penghimpunan data usulan dari masyarakat, usulan melalui SIPD baru dibuka setelah proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan forum-PD selesai dilaksanakan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Daerah untuk tahun 2026 sebagai arahan bagi PD dalam menjabarkan Program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Untuk masing- masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dengan fokus yang menyangkut prioritas Program, serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Mempertimbangkan beberapa aspek dalam kebijakan pembangunan baik nasional maupun Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam RKPD tahun 2026, maka penyusunan prioritas Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap *SDGs*, pertumbuhan ekonomi, standar pelayanan minimal, reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2026, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun rencana.
4. Korelasinya terhadap telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
5. Korelasinya terhadap rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pembangunan tahun 2026 ini merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD tahun 2026 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan Program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya Pemerintah Daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan Daerah di tahun 2026. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah: “PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2026 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada penataan dan penguatan kelembagaan dan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik.
    - Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi PD.
    - Penataan manajemen keuangan dan aset Daerah.
    - Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis teknologi informasi.
b. Penguatan Sektor Unggulan.
    - Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
c. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.

d. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan.
   - Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja PD selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh PD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh PD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan PD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Kriteria SMART-C yaitu:
   a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
   b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
   c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
   d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
   e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
   f. *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, dimana Sekretariat Daerah diharuskan untuk mencapai target misi nomor satu pada RPJMD yaitu "Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;", maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas PD, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, penyusunan kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

a. berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
b. peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta; dan
c. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, baik sebagai PD yang memberikan layanan masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Sekrtariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, misi kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekrtariat Daerah diantaranya :

a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya.

2. Pencapaian *SDGs*

Dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memiliki peran untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator *SDGs* berjalan baik di tingkat kabupaten dan terkoordinasi dengan baik pada setiap PD. Sekretariat Daerah memiliki fungsi koordinatif, monitoring dan evaluasi atas pencapaian visi dan misi kepala Daerah. Sejatinya keberhasilan tujuan *SDGs* membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada salah satu PD saja karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainya. Sekretariat Daerah berfungsi lebih kepada upaya mengoordinasikan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.

3. Pencapaian SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk kementerian/lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan Daerah dalam belanja Daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Bagian dari NSPK

1. SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
2. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan Daerah.
4. Dalam bentuk Program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
5. Ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam peraturan pemerintah.
6. Juknis pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya.

Fungsi Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa seluruh PD pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghimpun laporan pelaksanaan SPM yang diampu oleh PD terkait.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2026 jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 (tiga) Program

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub-kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretriat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran Program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegra.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2026 adalah sebesar Rp271.009.924.569,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah).

c. Tabel rencana Program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capain	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai	182.457.420.784	APBD		Nilai	182.557.420.784
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	8 Dokumen	280.000.000	APBD		8 Dokumen	380.000.000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	150.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	150.000.000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	30.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	30.000.000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	200.000.000
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	82.828.584.000	APBD		15 Laporan	82.828.584.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	500 Orang/ Bulan	81.890.784.000	APBD	Menyesuaikan dengan tambahan gaji untuk P3K dan TPP/menunggu hasil rekon	800 Orang/ Bulan	81.890.784.000
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Lapaoran	187.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Lapaoran	187.000.000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	50.000.000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	550.800.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	550.800.000
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	608.510.000	APBD		6 Dokumen	608.510.000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	157.060.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	157.060.000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	151.450.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	151.450.000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	2.204.696.000	APBD		1 Dokumen	2.204.696.000
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	3 paket	1.629.696.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 paket	1.629.696.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	75.000.000
4	1	1	2.05	4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.05	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	2 Kali	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Kali	350.000.000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Layanan	12.440.000.000	APBD		6 Layanan	12.440.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	261 Paket	2.140.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	261 Paket	2.140.000.000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	44360 Paket	7.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	45000 Paket	7.000.000.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	51 paket	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	51 paket	350.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	2.500.000.000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	634 Dokumen	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	634 Dokumen	350.000.000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		21.791.687.190	APBD			21.791.687.190
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	1.516.469.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Unit	1.516.469.000
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	1.587.640.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Unit	1.587.640.000
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Unit	2.648.578.190	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Unit	2.648.578.190
4	1	1	2.07	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	120Unit	5.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	110 Unit	5.000.000.000
4	1	1	2.07	13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bangunan Masjid At Taqwa, Gudang Barang, Gedung Record Center, Kanopi Parkir Kendaraan)	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	11.039.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Unit	11.039.000.000
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara		15.679.000.000	APBD			15.679.000.000
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	45.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	45.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	10.634.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	10.634.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	1.000.000.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	4.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	4.000.000.000
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		19.426.335.594	APBD			19.426.335.594
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	67 Unit	500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	67 Unit	500.000.000
4	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Unit	1.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Unit	1.500.000.000
4	1	1	2.09	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	4.329.873.794	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Bulan	4.329.873.794
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	16 Unit	6.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	16 Unit	6.500.000.000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit	2.202.040.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	15 Unit	2.202.040.000
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	340 Unit	4.394.421.800	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	340 Unit	4.394.421.800
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		2.058.000.000	APBD			2.058.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	1	2.1 1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	24 Orang/ Bulan	1.058.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	24 Orang/ Bulan	1.058.000.000
4	1	1	2.1 1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang	1.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Orang	1.000.000.000
4	1	1	2.1 3		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	3.250.000.000	APBD		12 Dokumen	3.250.000.000
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokmen	550.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokmen	550.000.000
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Laporan	400.000.000
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	1.500.000.000
4	1	1	2.1 3	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	400.000.000
4	1	1	2.1 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	400.000.000
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	21.890.608.000	APBD		3 Kegiatan	21.890.608.000
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	7.161.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	7.161.000.000
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	11.814.630.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	11.814.630.000
4	1	1	2.1 4	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	2.914.978.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	2.914.978.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai	80.138.903.400	APBD		Nilai	107.379.962.000
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	2.461.448.000	APBD		7 Dokumen	2.461.448.000
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	700.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	700.000.000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	700.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	700.000.000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.061.448.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	1.061.448.000
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	221 Dokumen	74.818.941.400	APBD		221 Dokumen	102.060.000.000
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	26.698.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	10 Dokumen	53.060.000.000
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	320.941.400	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	800.000.000
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	47.600.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	7 Dokumen	47.600.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Orang	250.000.000
4	1	2	2.02	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Orang	100.000.000
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	1005 Dokueme n	1.250.000.000	APBD		1005 Dokueme n	1.250.000.000
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	550.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	500 Dokumen	550.000.000
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kasus	450.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	5 Kasus	450.000.000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	250.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	500 Dokumen	250.000.000
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.608.514.000			19 Dokumen	1.608.514.000
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	542.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Dokumen	542.000.000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	548.514.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	548.514.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	6 laporan	518.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	6 laporan	518.000.000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	Kab. Kutai Kartanegara	1,5 s.d. 3,5 Nilai	8.413.600.385	APBD		1,5 s.d. 3,5 Nilai	8.813.600.385

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Perekonomian dan Pembangunan							
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	1.721.500.000	APBD		12 Dokumen	2.121.500.000
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	590.250.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	590.250.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	531.250.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	531.250.000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	600.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	600.000.000
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	200.000.000
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	200.000.000
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	14 Dokumen	1.841.100.385	APBD		14 Dokumen	1.841.100.385
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	950.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	950.000.000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	631.350.385	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	631.350.385
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	259.750.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	259.750.000
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	4 595 Dokumen	3.454.000.000	APBD		4 595 Dokumen	3.454.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	504 Dokumen	1.754.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	504 Dokumen	1.754.000.000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	900.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	900.000.000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	270 Orang	800.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	270 Orang	800.000.000
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumnen	1.397.000.000	APBD		7 Dokumnen	1.397.000.000
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	599.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	599.000.000
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	474.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	474.000.000
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	324.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	324.000.000
TOTAL									271.009.924.569				298.750.983.169

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan PD tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026. Proses penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian:
   1. Kebijakan belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   2. Visi-misi dan Program dedikasi kukar idaman.
   3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
   4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
   5. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan aktual.
   6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat subtansi.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan:

   RPJMD tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra-PD, Renja-PD, RKPD Tahunan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :
   1. PD dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan Program-Program dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, dengan sebaik- baiknya;
   2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
   3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPJMD tahun 2021 – 2026;
   4. PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja-PD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas Program dan kegiatan beserta pendanaannya;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD tahun 2021–2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD tahun 2021–2026 ke dalam Renstra-PD, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, pelaksanaan RPJMD, pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021– 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja Program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan).

c. Rencana tindak lanjut:

Tema pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan”. Sekretariat Daerah sebagai PD yang menjalankan fungsi koordinasi, penyusunan kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk membantu Program peningkatan jangkauan dan kulitas layanan publik melalui penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi PD dengan cara :

a. berperan dalam penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi PD;
b. peningkatan kualitas kebijakan yang disusun dan diberlakukan; dan
c. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, baik sebagai PD yang memberikan layanan masyarakat secara langsung termasuk juga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sebagai koordinator dalam memastikan pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya Renja-PD ini berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi PD. Renja-PD menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja *out put* dan *out come* dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum untuk penyusunan Rencana kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Undang-undang ini secara subtansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Rencana Kerja pada Sekretariat adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD berpedoman pada RKPD, rencana strategis (renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan Program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-PD memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hakekatnya otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris

Dewan secara teknis operasional yang bertugas memberikan pelayanan kepada DPRD dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegar dalam pasal 3 terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;
b. Kepala Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
c. Kepala Bagian Program dan Keuangan;
d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISSASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

a. memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
c. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
d. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan funsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

a. membantu kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan bidang tugasnya melalui sekretaris Daerah;
b. membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
d. memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
e. mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan sekretariat DPRD;
f. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bagian sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

i. merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategis sekretariat DPRD;
k. mengorganisasikan penyusunan Rencana Kerja tahunan sekretariat DPRD;
l. mengoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui sekretaris Daerah ke bagian administrasi Organisasi;
m. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
n. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
o. mengoordinasikan penyusunan program sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada kapala bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, rencana strategis kabupaten, kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
p. merumuskan rencana strategis kebijakan operasional sekretariat DPRD;
q. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
r. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
s. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
t. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

Rencana Kerja PD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah awal kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja PD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan Program kegiatan instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja PD. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan Program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan Program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.2.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KutaiKartanegara 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan Daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja juga untuk menerjemahkan RKPD.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ialah sebagai sebagai

berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahun anggaran 2026 yang meliputi gambaran Program/kegiatan/sub-kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target kinerjanya yang akan dicapai pada tahun 2026.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, rencana strategis PD, dengan RKP dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja PD, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2026), mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi rencana strategis PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

1. realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /kegiatan;
5. implementasi yang timbul terhadap target capaian Program rencana strategis PD.
6. kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian rencana strategis PD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

a. tingkat kinerja pelayanan PD;
b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
c. dampaknya terhadap capaian Program nasional;
d. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
e. isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam Program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *review* terhadap rancangan akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD/rencana strategis PD (tahun 2026);
b. penjelasan mengenai proses;
c. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD; dan
d. melampirkan tabel *review* terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraiakan hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada PD. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

a. penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; dan
c. tabel T-C.32 mengenai usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan;
b. uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan;
c. penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD / rencana strategis baik jenis Program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
d. tabel rencana Program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

a. catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan membahas perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target;

b. kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

c. rencana tindak lanjut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD

Sekretariat DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan keberadaan Sekretariat DPRD sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan- kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja suatu PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis PD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah. Sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2023) dan pelaksanaan capaian tahun 2024 dalam tabel yang dimaksud (tahun n- 1/2024) yang mengacu pada APBD tahun 2024 berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil *input* dan *output* Sekretariat DPRD dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja OPD tahun 2024 dengan *review* hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2024 dan realisasi rencana strategi PD 2021-2026 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

realisasi APBD.

Realisasi dan rekaspitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.

Rekapitulsi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Rencana Strategis

Sekretariat DPRD S/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	85 (A)	73,34 (BB)	77 (BB) Nilai	60,17 (B)	94%	83 (BB)		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	8 Dokumen	80%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	6 Dokumen	60%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			60%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			70%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	6 Dokumen	2 Laporan	5 Laporan	100%			90%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	7 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%			70%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	30	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.680	6504 orang/bulan	2232 Orang/ bulan	1980 Orang/ bulan	85.71%	2310 Orang/ bulan	4377 Orang/ bulan	43%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	19 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		6 Dokumen	50%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		36 Dokumen	60%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	80%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	60%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						1 Dokumen		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		60%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.555	933 Unit	4 Paket	7 Paket	117%	6 Paket	17 Paket	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3 Dokumen	3 Dokumen	133%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	214 orang	94 Orang	43 Orang	46%	168 Orang	305 Orang	110%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85		0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	54 orang	30 Orang	150 Orang	500%	20 Orang	200 Orang	77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6 Paket	600%	1Paket	8 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.140	12084 Jenis	1 Paket	5 Paket	500%	1Paket	7 Paket	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.520	27809 Porsi	2 Paket	3 Paket	150%	2 Paket	7 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.900	3180 Lembar	2 Paket	12 Paket	600%	2 Paket	16 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	191.760	80556 eksemplar	3 Dokumen	13 Dokumen	433%	3 Dokumen	19 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.090	186 Orang/Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35	21 Berkas	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.945	1.389	1.389	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Komponen Instralasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor		6 unit				8 Unit		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 unit				1 paket	150 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.540	626 Unit	308 Unit	312 Unit	101%	308 Unit	770 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.405	2559 Unit	150 Unit	191 Unit	127%	250 Unit	649 Unit	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	36	12	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	36 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	100%	12 Laporan	31 Laporan	60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	62%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1.920	793	793	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235	140 Unit	37 Unit	38 Unit	103%	37 Unit	112 Unit	49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235	189 Unit	37 Unit	47 Unit	127%	37 Unit	121 Unit	51%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 750	898 kali	10 Unit	10 Unit	100%	11 Unit	30 Unit	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	750 1200	1523 Kali/Unit	150 Unit	154 Unit	103%	150 Unit	454 Unit	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2.700	1645 orang/bulan	630 Orang/Unit	529 Orang/ bulan	84%	540 Orang/bulan	1699 Orang/ bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2.600	663 stel	6 stell	6 Stel	100%	6 Pkaet	532 Stel	100%
Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	225	30 orang	45 orang	58 Orang	129%	45 Orang	148 Orang	100%
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	15	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	3 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.745	827 Rapat	12 Laporan	33 Laporan	275%	12 Laporan	57 Laporan	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	20	12 Rumah Tangga	4 Paket	12 Paket	100%	4 Paket	20 Paket	60%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	80	13	16	100%	6%	100%	100%	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50	22 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	140%	1 Dokumen	3 Dokumen	2%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120	9 Raperda	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	45 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	120	11 Raperda	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	100%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40	22 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	8 Dokumen	18 Dokumen	50%
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%			100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	90	8	18	100%	100%	100%	100%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25	12 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25	10 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10	6 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10	4 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10	4 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	4 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	950	254	21	100%	5%	100%	100%	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180	43 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180	43 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180	43 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180	43 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180	7 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10	2 Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45	1 Dokumen					1 Dokumen	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	225	49 Orang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	600	180 Laporan	10 Orang	12 Orang	120%	10 Orang	32 Orang	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	103 Laporan	7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang	21 Orang	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	75	59 Media	2 Dokumen	20 Dokumen	1000%	2 Dokumen	24 Dokumen	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			3 Laporan	12 Laporan	400%	3 Laporan	18 Laporan	100%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10	6 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	500%	2 Dokumen	14 Dokumen	50%
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	9 Kegiatan	3 Dokumen	13 Dokumen	433%	3 Dokumen	19 Dokumen	60%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50	49 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100%	3 Laporan	30 Laporan	100%
Pembahasan Kerja Sama Daerah					1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			1 Dokumen	6 Dokumen	600%	1 Dokumen	8 Dokumen	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	84%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			3 Laporan	2 Laporan	67%	3 laporan	8 Laporan	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	480	184 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan sekretariat DPRD dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi Daerah.

Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Mengingat visi sekretariat DPRD adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Sekretariat DPRD

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Fasilitasi kegiatan DPRD			70 (B)	73 (B)	73 (B)	75 (B)	80,72	85,49 (B)	73 (B)	75 (B)	
2	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai SAKIP			79 (BB)	81 (A)	83 (A)	85 (A) Nilai	75,20 (BB)	60,17 (B)	75 (B)	75 (B)	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
5	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
6	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
8	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	
9	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	1,389 Unit	
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
11	Jumlah Barang Milik Daerah			254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	
				384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	384 Kali	
12	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	
13	Jumlah layanan Administrasi DPRD			3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	
14	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat			16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	16 Perda	
17	Jumlah Rapat Pembahasan			18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	18 Rapat	
18	Jumlah Pengawasan DPRD			190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	190 Kali	
19	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	
20	Persentase Kegiatan yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	
21	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	
22	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kajian terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan kajian terhadap rencana strategis maka berikut diuraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal, indikator kinerja utama sekretariat DPRD dimaksud memberikan panduan langkah-langkah kinerja yang harus dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dalam menetapkan indikator kerja utama pada berbagai tingkatan organisasi.

a. peningkatan peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD yang akuntabel;
b. meningkatan sistem, dan prosedur kerja yang efisien, efektif, sinergis dan akuntabel ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
c. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
d. mendapatkan informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
e. mendapatkan ukuran keberhasilan dalam capaian suatu tujuan untuk perbaikan kinerja; dan
f. keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja-PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang Program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjabaran dari *review* rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disajikan pada tabel T-C.31 berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		85 (A)	74.751.059.139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		85 (A)	74.501.059.139	
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	1.650.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	850.000.000	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	450.000.000	mengubah target capaian kinerja, rasionalisasi pagu
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	400.000.000	mengubah target capaian kinerja, rasionalisasi pagu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik (BSE)

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			penyetaraan seluruh OPD
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			penyetaraan seluruh OPD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			penyetaraan seluruh OPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			penyetaraan seluruh OPD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			penyetaraan seluruh OPD
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	20.676.470.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	20.376.470.758	

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.310	19.419.724.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.310	19.419.724.758	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2		penyetaraan seluruh OPD
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12		penyetaraan seluruh OPD
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	48.118.000	rasionalisasi pagu oleh bappeda

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0	sub kegiatan arahan dari Bappeda
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	858.628.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	858.628.000	
14						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	50.000.000	penambahan sub kegiatan

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1	418.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1	418.250.000	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	mengubah target capaian kinerja
		16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	254.250.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja
		17						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	204.250.000	rasionalisasi pagu oleh bappeda
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.436.065.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.286.065.000	
		18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	311	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	500.000.000	mengubah target capaian kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19						Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	336.065.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	168	336.065.000	mengubah target capaian kinerja
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSr

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	2.758.211.994	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	2.958.211.994	
		23						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	200.000.000	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.028	715.965.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	715.965.994	mengubah target capaian kinerja
		25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.504	1.010.422.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1.010.422.000	mengubah target capaian kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.180	415.924.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	415.924.000	mengubah target capaian kinerja
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38.352	160.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	160.900.000	mengubah target capaian kinerja
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	318.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	318.500.000	mengubah target capaian kinerja
		29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik (BSr Dok

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1.389	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1.389	2.300.000.000	
		31						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan DPRD Periode 2024-2029
		32						Pengadaan Mebel	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1	200.000.000	Pengadaan Mebeleur staf Sekretariat DPRD

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	700.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	700.000.000	
		34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.081	800.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250	800.000.000	
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	8.453.870.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	8.453.870.000	
		35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.870.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.870.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.500.000.000	
		37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		254	1.802.553.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		254	1.802.553.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	311.048.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	311.048.000	mengubah target capaian kinerja
		39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	311.505.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	311.505.000	mengubah target capaian kinerja
		40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	380.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	380.000.000	
	9		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		2	31.802.468.387	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		2	31.802.468.387	
		42	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	540	31.402.018.387	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	540	31.402.018.387	
		43	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	520	320.450.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6	320.450.000	mengubah target capaian kinerja
		44	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	45	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	45	80.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10		Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara		3	4.253.170.000	Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara		3	4.253.170.000	
		45	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	
		46	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2.973.570.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	2.973.570.000	mengubah target capaian kinerja
		47	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	
II			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	30.676.810.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	30.926.810.000	
	11		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.411.700.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.511.700.000	

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		48	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268.750.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	518.750.000	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan
		49	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3.823.500.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	3.823.500.000	mengubah target capaian kinerja
		50	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	381.650.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	231.650.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 1	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	937.800.000	mengubah target capaian kinerja
		5 2	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	
	1 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000	
		5 3	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 4	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik (BSE)

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		55	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	100.000.000	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		56	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	100.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		57	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	50.000.000	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja
		58	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja
	13		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	4.158.500.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	3.658.500.000	

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		59	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		60	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		61	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		62	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BS

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		63	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		64	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	200.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	200.000.000	
		65	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	364.000.000	mengubah target capaian kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik (BSr

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		66	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
	14		Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	5.391.260.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	5.541.260.000	
		67	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	
		68	Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45	1.274.750.000	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	1.274.750.000	mengubah target capaian kinerja
		69	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	1.505.300.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	1.505.300.000	mengubah target capaian kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BS

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	
		71	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	
		72	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	
		73	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	1.974.210.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	2.124.210.000	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah
	15		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100%	3.683.660.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100%	4.083.660.000	

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		74						Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3	500.000.000	kundapil dan koordinasi (undangan)
		75	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	
		76	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.554.175.000	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.454.175.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
	16		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	333.790.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	333.790.000	
		77	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dok (BSI

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197.290.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	197.290.000	mengubah target capaian kinerja
	17		Pembahasan Kerja Sama Daerah					Pembahasan Kerja Sana Daerah	kab. Kutai Kartanegara		100%	100.000.000	
		79						Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	100.000.000	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal
	18		Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	10.647.900.000	Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100%	10.647.900.000	
		80	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7.694.800.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	7.594.800.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD

No			RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		81						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	100.000.000	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang
		82	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
		83	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2.771.100.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	2.771.100.000	mengubah target capaian kinerja
			TOTAL				105.427.869.139	TOTAL				105.427.869.139	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas *(bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan Program/kegiatan dalam Renja-PD. Usulan Program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari musrenbang untuk tahun 2026.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan Program dan kepentingan dari Para Pemangku kepentingan yang dituju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Table T C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Sekretariat DPRD tidak ada usulan Musrenbang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan visi dan misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas Daerah.

Rencana strategis yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, Program dan kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

Visi rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia(Kemendagri) pada tahun 2020-2026 adalah:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2026. Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dalam upaya mendukung terwujudnya visi-misi nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga PD dalam rangka penyusunan RPJMD 2021-2026, menyampaikan visi-misi ke RPJMD, yaitu:

Visi :

‘*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia’*

Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmonis, hidup dengan penuh ketentraman, diselumuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maya Esa.

Misi:

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbagsis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya ALam yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan mengacu kapada visi – Misi RPJMD 2021 – 2026 dengan harapan semua kepala PD dapat menterjemahkan visi-misi dan program dedikasi ke dalam strategi arah kebijakan dan Program prioritas PD, serta melibatkan para akademisi dan data-data yang valid dan aktual dan disampaikan secara sistematis dan dilaporkan secara berjenjang.

Visi dan misi RPJMD yang melekat pada sekretariat DPRD merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola untuk mencapai tujuan, bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara dengan visi sebagai berikut: " Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan ". Visi tersebut dimaksudkan adanya upaya maksimal dari seluruh aparatur untuk lebih profesional di dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang profesional dan berkualitas, sehingga dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas birokrasi profesional untuk menuju *good governance* dengan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan yang akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasai. Tujuan *(goals)* adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

visi organisasai. Tujuan *(goals)* adalah pernyataan umum tentang "ke arah mana" suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran misi, sesuatu *(what)* yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan Program dalam rangaka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus, meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran *(Objectives)* bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya acan sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunya strategis.

Tujuan : Mewujudkan kualitas fasilitsi terhadaf Agenda Kegiatan DPRD

Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021- 2026, visi PD telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa Program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam rencana strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada tahun anggaran 2026 dalam perumusan Program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya Program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana strategi.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada rencana strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Kerja tahunan tahun 2026 dan target kegiatan tahun 2026 mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2026 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 (satu) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub-kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Untuk kegiatan non-generik terdiri dari 1 (satu) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub-kegiatan.

Sehingga seluruhnya berjumlah 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub-kegiatan.

Meskipun demikian dari rencana Program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan Rancangan Rencana Kerja, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkatterhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.
3. Menyesuaikan dengan berita acara kesepakatan *review* Program RPJMD.

Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:

a. prosentase penyelenggara rapat-rapat yang sesuai dengan jadwal;
b. jumlah peraturan perundangan-udangan yang disahkan;
c. persentase anggota DPRD yang puas atas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun perincian kegiatan tahun 2026 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan Program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		kab. Kutai Kartanegara	85 (A)	74.501.059.139	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		85 (A)	74.501.059.139
4	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	12	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	850.000.000
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	8	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja, rasionalisasi pagu	8	450.000.000
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	6	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja, rasionalisasi pagu	6	400.000.000
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD		
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD		
4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD		
4	2	1	2	1	'07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD		
4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	6	20.376.470.758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6	20.376.470.758
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	165	19.419.724.758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		165	19.419.724.758
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	2		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD	2	
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	12		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penyetaraan seluruh OPD	12	
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	48.118.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	rasionalisasi pagu oleh bappeda	1	48.118.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Hasil			
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	2	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	sub kegiatan arahan dari Bappeda	2	0
4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	18	858.628.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	858.628.000
4	2	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	penambahan sub kegiatan	1	50.000.000
4	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	1	418.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	418.250.000
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	164.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	164.000.000
4	2	1	2	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	204.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	rasionalisasi pagu oleh bappeda	1	204.250.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	4	1.286.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	1.286.065.000
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab. Kutai Kartanegara	6	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	6	500.000.000
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	100.000.000
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab. Kutai Kartanegara	168	336.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	168	336.065.000
4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0
4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	20	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20	350.000.000
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	6	2.958.211.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		6	2.958.211.994

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Hasil			
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD	1	200.000.000
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	715.965.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	715.965.994
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	2	1.010.422.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	2	1.010.422.000
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	415.924.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	415.924.000
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	3	160.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	160.900.000
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	12	318.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	12	318.500.000
4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	7	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	136.500.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		kab. Kutai Kartanegara	1.389	2.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1.389	2.300.000.000
4	2	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	8	600.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan DPRD Periode 2024-2029	8	600.000.000
4	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000		Pengadaan Mebeleur staf Sekretariat DPRD	1	200.000.000
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	308	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		308	700.000.000
4	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	250	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		250	800.000.000
4	*2*	*1*	*2*	*8*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*kab. Kutai Kartanegara*	*12*	*8.453.870.000*	*Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*		*12*	*8.453.870.000*
4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	12	3.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		12	3.870.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Hasil			
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	2.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	2.500.000.000
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	5.950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	5.950.000.000
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartanegara	254	1.802.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		254	1.802.553.000
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartanegara	37	311.048.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	37	311.048.000
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab. Kutai Kartanegara	37	311.505.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	37	311.505.000
4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	10	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	800.000.000
4	2	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	150	380.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150	380.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		kab. Kutai Kartanegara	2	31.802.468.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	31.802.468.387
4	2	1	2	15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	45	31.402.018.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45	31.402.018.387
4	2	1	2	15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	kab. Kutai Kartanegara	6	320.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	6	320.450.000
4	2	1	2	15	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	kab. Kutai Kartanegara	45	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45	80.000.000
4	2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD		kab. Kutai Kartanegara	3	4.253.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	4.253.170.000
4	2	1	2	16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	1	2	16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	12	2.973.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	12	2.973.570.000
4	2	1	2	16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	4	1.143.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		4	1.143.100.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Hasil			
4	2	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	30.926.810.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	30.926.810.000
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		kab. Kutai Kartanegara	16	5.511.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		16	5.511.700.000
4	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	518.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan	1	518.750.000
4	2	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	15	3.823.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	15	3.823.500.000
4	2	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	6	231.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	231.650.000
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	kab. Kutai Kartanegara	6	937.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	6	937.800.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran		kab. Kutai Kartanegara	18	1.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	1.050.000.000
4	2	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Hasil			
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		kab. Kutai Kartanegara	190	3.658.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		190	3.658.500.000
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer		1	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				Umum - Dana Bagi Hasil			
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	1	364.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	364.000.000
4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	182.000.000
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	5.541.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	5.541.260.000
4	2	2	2	4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	2	2	4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	1.274.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	1.274.750.000
4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	10	1.505.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	10	1.505.300.000
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	7	295.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	295.750.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	182.000.000
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	159.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	159.250.000
4	2	2	2	4	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	2	2.124.210.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah	2	2.124.210.000
4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		kab. Kutai Kartanegara	100%	4.083.660.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	4.083.660.000
4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	3	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	kundapil dan koordinasi (undangan)	3	500.000.000
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	2	129.485.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	129.485.000
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	3	3.454.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi	3	3.454.175.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Persetujuan Kerja Sama Daerah		
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	333.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	333.790.000
4	2	2	2	6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	197.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	197.290.000
4	2	2	2	7		Pembahasan Kerja Sana Daerah		kab. Kutai Kartanegara	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	100.000.000
4	2	2	2	7	1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal	1	100.000.000
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	10.647.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	10.647.900.000
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	7.594.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	3	7.594.800.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	2	2	8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang	3	100.000.000
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	3	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	182.000.000
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	2.771.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	3	2.771.100.000
TOTAL										105.427.869.139				105.427.869.139

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun yang mengacu kepada rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi PD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, Program dan kegiatan jangka pendek. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada Program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program dan kegiatan. Rencana Kerja berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan Program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 :

1. Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja ini dengan sebaik-baiknya secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bagian maupun pihak-pihak terkait;
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PD menyusun rencana strategi berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan RKPD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap rencana strategi dan Renja-PD;
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada Program dan kegiatan dalam rencana strategis serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 menetapkan 2 (dua) Program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub-kegiatan. Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan tersebut adalah :

1. tetap mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemeritahan yang bersih;
2. meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

target – target sub kegiatan yang ditetapkan; dan

3. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala;

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DRPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Daerah di mana saat ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat, pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*.

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi Pemerintah Daerah. Sebagai prinsip dasar dari *Good Governance* Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam rencana strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

5.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat periode 2021-2026, serta memperhatikan rancangan awal rencana strategis Inspektorat periode 2025-2029.

Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat dalam perencanaan kinerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

5.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

5.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah:

(1) Sebagai penjabaran dari rencana strategis (renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
(2) Menyesuaikan dengan rancangan awal renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029.
(3) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku PD yang melaksanakan

pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

(1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

(2) Sebagai satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar-PD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

(4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan *Good Governance*.

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara aparat pengawas internal dan eksternal.

5.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta sistematika penyusunan Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Dalam bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini memuat Program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

5.5. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja-PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis PD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan penyusunan Program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sahih dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan pencapaian kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2024 telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini. Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Pagu Anggaran yang disediakan untuk Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah sebesar Rp58.686.558.938,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

delapan puluh enam juta lima ratus lima luluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp47.078.757.984,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau tercapai 80,2 % (delapan puluh dua koma dua persen).

Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu nilai SAKIP PD dari target nilai 85 (delapan puluh lima) hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang dilakukan penilaian pada tahun 2024 memperoleh nilai 73,64 (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat) dengan kategori BB (Sangat Baik). Kategori "Sangat Baik" dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 2/3 (dua pertiga) unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam Program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup hasil evaluasi SAKIP Inspektorat kemudian tercapainya target penilaian kapabilitas APIP ke Level 3 (tiga) dari hasil evaluasi penilaian mandiri oleh BPKP yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai dengan standar.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pagu Perubahan yang disediakan pada Program ini sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.808.467.577,00 (empat miliar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau mencapai 41,8% (empat puluh satu persen). Untuk indikator kinerja cakupan penyelenggaraan pengawasan Program penyelenggaraan pengawasan yang ditargetkan 96% (sembilan puluh enam persen) dengan realisasi 103% (seratus tiga persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pagu anggaran perubahan yang disediakan untuk Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) dengan realisasi sebesar Rp2.306.264.672,00 (dua miliar tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau mencapai 61,50% (enam puluh satu koma lima puluh persen). Sedangkan untuk kinerja Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target 75% (tujuh puluh lima persen), persentase PD yang melaksanakan SPIP tercapai 97,2 % (sembilan puluh tujuh koma dua persen) melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan juga adanya komitmen PD diantaranya dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (terdefinisi), juga dalam penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP), pencapaian target LHKASN, serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).

Secara keseluruhan untuk Program pada tahun 2024 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, hanya saja untuk kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah pada sub-kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tidak dilaksanakan karena masih belum ada yang mendesak untuk di pelihara. Rendahnya realisasi 2 (dua) Program utama Insepktorat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Komponen belanja terbesar untuk kedua Program inti tersebut adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, dimana satuan biaya harian dan transportasi yang rendah sehingga realisasinya juga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rendah.

2. Keterbatasan jumlah APIP dan hari/waktu untuk melaksanakan penugasan, sehingga cakupan pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.
3. *Mandatory spending* yang cukup besar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 0,5% dari total APBD, yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah SDM APIP selaku pengguna realisasi anggaran tersebut.

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian renstra-PD s/d Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.1 TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	84,9 Nilai	85 Nilai	73,64 Nilai	86,64	88 Nilai	88 Nilai	98
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100	3 Level	3 Level	100
6.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*30 Dokumen*	*6 Dokumen*	*8 Dokumen*	*8 Dokumen*	*100*	*11 Dokumen*	*25 Dokumen*	*83,33*
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	14 Dokumen	70

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	Laporan	-
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	8 Laporan	80
6.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-
6.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	-	-	1 Berita Acara	Berita Acara	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*100*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*100*
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/ bulan	1209 Orang/ bulan	1260 Orang/ bulan	1133 Orang/ bulan	89,92	1176 Orang/ bulan	1133 Orang/ bulan	89,92
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Realisasi Anggaran									
6.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	Dokumen	-
6.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	Laporan	-
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*100*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*100*
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	-	1 Paket	50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	181 Orang	100 Orang	171 Orang	171	50 Orang	402 Orang	268
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	155 Orang	90 Orang	90 Orang	100	75 Orang	320 Orang	182,86
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	224 Orang	160 Orang	222 Orang	138,75	55 Orang	501 Orang	286,29
6.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100*
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	16

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	8 Paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	50 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	100	50 Laporan	190 Laporan	76
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250 Dokumen	250 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	100	350 Dokumen	1350 Dokumen	108
6.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*400 Unit*	*168 Unit*	*303 Unit*	*301 Unit*	*99,34*	*37 Unit*	*506 Unit*	*126,5*
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	-	6 Unit	120
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	7 Unit	11 Unit	11 Unit	100	-	18 Unit	225

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	400 Unit	155 Unit	290 Unit	288 Unit	99,31	36 Unit	479 Unit	120
6.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	*18 Unit*	*15 Unit*	*13 Unit*	*86,7*	*15 Unit*	*15 Unit*	*83,33*
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	86
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	2 Unit	- Unit	-	2 Unit	2 Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	168 Persen	96 Persen	103,66 Persen	108	96 Persen	123 Persen	127
6.01.02.2.01	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	*Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan*	*70 Dokumen*	*71 Dokumen*	*97 Dokumen*	*99 Dokumen*	*102*	*70 Dokumen*	*99 Dokumen*	*141*
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	4 Laporan	28 Laporan	30 Laporan	107,1	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	15 Laporan	93,75	16 Laporan	16 Laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	41 Laporan	40 Laporan	41 Laporan	103	38 Laporan	38 Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9 Kesepakatan	- Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	100	3 Kesepakatan	6 Kesepakatan	67
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
6.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*19 Dokumen*	*45 Dokumen*	*19 Dokumen*	*20 Dokumen*	*105*	*19 Dokumen*	*19 Dokumen*	*100*
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25	4 Laporan	4 Laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	41 Laporan	15 Laporan	19 Laporan	126,7	15 Laporan	15 Laporan	100
06:01:03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100 Persen	65 Persen	75 Persen	97,2 Persen	129,6	85 Persen	82,4 Persen	82,4
6.01.03.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*100*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*100*
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan	Jumlah Rekomendasi	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Teknis di Bidang Pengawasan	Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun								
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100
6.01.03.2.02	*Pendampingan dan Asistensi*	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*	*83 Dokumen*	*83 Dokumen*	*83 Dokumen*	*80 Dokumen*	*96,4*	*85 Dokumen*	*83 Dokumen*	*100*
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100	58 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	77	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat 0 Daerah	3 Perangkat 8 Daerah	1 Perangkat 0 Daerah	1 Perangkat 0 Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.6. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 telah menargetkan 82% (delapan puluh dua persen_ untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 90,11% (sembilan puluh koma sebelas persen), artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan. Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 74% (tujuh puluh empat persen) tingkat penyelesaiannya menjadi 82,69% (delapan puluh dua koma enam puluh sembilan persen).

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 94 % (Sembilan puluh empat persen) tercapai 86,67% (delapan puluh enam koma enam puluh tujuh persen). Hal tersebut terjadi karena adanya laporan yang berbatas waktu penanganan (pengaduan lelang), sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam tahap penugasan yang bersamaan, dan adanya pengaduan yang masuk diakhir tahun sehingga terbatas waktu untuk melaksanakan tindaklanjut.

Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 (tiga) nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 (tiga) nilai, ini berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 (tiga koma tiga tujuh satu) sehingga memperoleh Level 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) penilaian atas komponen pencapain tujuan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2. 2 TC – 30 Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80	82	84	86	89,22	90,11	84	86	Target Terpenuhi
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	71	74	77	79	76,94	82,69	77	79	Target Terpenuhi
			Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	92	94	96	98	82	86,67	96	98	Target Belum Terpenuhi, Karena ada laporan masuk di akhir tahun
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	4	3	3	3	4	Target Terpenuhi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.7. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawasan dan pembinaan bagi PD lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Implementasi reformasi rirokrasi secara menyeluruh antara lain:
   a) membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan kepala Daerah terhadap PD;
   b) pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
2. Peningkatan pemerataan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) peran Inspektorat adalah mengawal pelaksanaan kegiatan yang terkait persiapan pembangunan ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Masih kurangnya respon PD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan PD;
6. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap Program dan kegiatan di PD;
7. Belum optimalnya manajemen PD dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *Good Governance*;
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh PD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik.

selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu:

1. Faktor Internal
   a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah dan obyek pengawasan, dimana dengan luasan wilayah pengawasan dan jumlah auditan yang terdiri dari 38 (tiga puluh depalan) PD, 20 (dua puluh) kecamatan, 193 (seratus sembilan puluh tiga) desa, dan 32 (tiga puluh dua) puskesmas serta 3 (tiga) rumah sakit sebagai pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 (limar ratus) satuan pendidikan sebagai penerima dana BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point pengawasan kepala Daerah terhadap PD.
   b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin komplek dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus mempersiapkan sumber daya aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yang cukup untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun pendidikan dan pelatihan teknis yang terkait dengan pengawasan.
2. Faktor Eksternal
   a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di PD dimana adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

indikator bahwa SPIP belum diterapkan / diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi PD.

b. Masih tidak optimalnya respon PD terhadap penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan kualitas laporan hasil pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai *consultant partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

5.8. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan 2026 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

   Pada Program ini ada beberapa kegiatan yang sub kegiatannya tidak teranggarkan dikarenakan efisiensi anggaran, adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:

   a. kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD, pada sub-kegiatan pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD.
   b. kegiatan administrasi kepegawaian PD, pada sub-kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan sub-kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah, pada sub-kegiatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

      Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub-kegiatan tersebut antara lain:

      1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
      2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
      3) Reviu Laporan Kinerja.
      4) Reviu Laporan Keuangan.
      5) Pengawasan Desa.
      6) Kerjasama Pengawasan Internal.
      7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

   b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

      Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

      1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
      20 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.

      Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub-kegiatan tersebut adalah:

      1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

   b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

      Pada kegiatan ini ada beberapa sub-kegiatan telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kinerja dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub-kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2. 3 TC – 31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,99 Nilai	37.879.247.807	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,99 Nilai	37.879.247.807	
1	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*6 Dokumen*	*350.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*6 Dokumen*	*350.000.000*	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	100.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara	Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Kutai Kartanegara	Perangkat Daerah			
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	-
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Berita Acara	-	-
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*4 Laporan*	*18.051.055.063*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*4 Laporan*	*18.051.055.063*	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/ bulan	17.771.724.663	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/ bulan	17.771.724.663	Perlu Penambahan Pagu Penyesuaian Jumlah ASN
7	Koordinasi dan Penyusunan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	50.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	-
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	-
3	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*90.800.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*90.800.000*	
10	Penyusunan Perencanaan	Dalam dan Luar	Jumlah Rencana	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan	Dalam dan Luar	Jumlah Rencana Kebutuhan	1 Dokumen	25.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Barang Milik Daerah SKPD			
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	-
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	-
4	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*550.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*550.000.000*	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	SKPD Inspektorat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	SKPD Inspektorat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Paket	-	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	50.000.000	-
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	-	Perlu Pagu Anggaran untuk Peningkatan SDM melalui Bimtek
5	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*770.833.340*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*770.833.340*	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	-
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	-
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	80.000.000	Perlu Penambahan Pagu untuk Pencapaian Target

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	-
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	-
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	50.000.000	-
6	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*23 Unit*	*15.461.784.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*23 Unit*	*15.461.784.000*	
23	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.200.000.000	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	261.784.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	261.784.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12 Bulan*	*2.004.775.404*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12 Bulan*	*2.004.775.404*	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	-
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	-
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.509.775.404	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.509.775.404	
8	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	*600.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	*600.000.000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	-
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250.000.000	-
30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	-
31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	- Unit	-	-
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90,11 Persen	2.850.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90,11 Persen	2.850.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	82,70 Persen	2.500.000.000	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	82,70 Persen	2.500.000.000	
			Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal	*14 Laporan*	*4.750.000.000*			*Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal*	*14 Laporan*	*4.750.000.000*	
32	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	750.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	750.000.000	-
33	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	750.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	750.000.000	-
34	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	750.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	750.000.000	-
35	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.000	-
36	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.000.000.000	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.000.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000	-
38	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	800.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	800.000.000	-
10	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu*	*15 Laporan*	*600.000.000*	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu*	*15 Laporan*	*600.000.000*	
39	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	100.000.000	-
40	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	500.000.000	Perlu Penambahan Pagu untuk Pencapaian Target
III	Program Perumusan		Persentase Perangkat	75-100 Persen	1.850.000.000	Program Perumusan		Persentase Perangkat	75-100 Persen	1.850.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			
11	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*		*Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	*2 Laporan*	*300.000.000*	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*		*Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	*2 Laporan*	*300.000.000*	
41	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	-
42	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	-
12	*Pendampingan dan Asistensi*		*Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan*	*56 Perangkat Daerah*	*1.550.000.000*	*Pendampingan dan Asistensi*		*Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah*	*56 Perangkat Daerah*	*1.550.000.000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintah Daerah								
43	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	750.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	750.000.000	-
44	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	200.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	200.000.000	-
45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	400.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	400.000.000	-
46	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	200.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	200.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah					45.079.247.807	Jumlah				45.079.247.807	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.9. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki usulan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat.

Tabel 2. 4 TC – 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	Nihil

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

5.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program kegiatan dan jenis pelayanan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara bila dikaitkan dengan renstra Kementerian/Lembaga sangat relevan hal ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kebijakan Pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman penganggaran kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

5.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” dan misi “Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara” maka ditetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan. Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menurunnya tingkat korupsi dan temuan mal administrasi dalam pengelolaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keuangan Daerah. Sebagaimana tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 4 (empat) sasaran strategis meliputi:

1) meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan;
2) meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran;
3) meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup Pemerintah Daerah; dan
4) meningkatnya kapabilitas APIP.

Untuk target kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah.

   Seluruh pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja, dan pegawai harus menerapkan semua unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP. Penerapan SPI tersebut perlu terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah. Berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Daerah adalah 3,371 (tiga koma tiga tujuh satu) sehingga memperoleh Level 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) penilaian atas komponen pencapain tujuan. Masing-masing komponen tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

   a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan.

      1. Kualitas Sasaran Strategis Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah Daerah memperoleh skor 4 (empat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut, namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement* (AOI) yaitu:

         - Masih terdapat kualitas indikator sasaran pada pemda dan perangkat daerah yang belum *Specific,*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Measurable, Achievable, Realiable dan Timebound (SMART);

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis PD sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut juga tidak tepat;
- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya (penetapan target di bawah capaian tahun sebelumnya).

2. Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis.

   Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah Daerah memperoleh skor 3 (tiga) pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang memperoleh skor 4 (empat), namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement (AOI)* yaitu:

   - Terdapat sasaran strategis PD yang tidak selaras dengan sasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
   - Terdapat indikator sasaran strategis PD yang tidak berorientasi hasil, tidak spesifik, dan tidak relevan;
   - Masih terdapat sasaran dan indikator Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak berorientasi hasil;
   - Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
   - Belum semua PD menetapkan sasaran Program dan sasaran kegiatan.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas pengawasan melalui pendampingan dan asistensi terhadap mitra strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dan renstra PD tahun 2025-2029 sehingga berimplikasi pada peningkatan capaian kualitas penetapan sasaran strategis dan kualitas pencapaian strategis pada komponen penetapan tujuan maturitas SPIP terintegrasi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses.

Penilaian atas komponen struktur dan proses terdiri dari penilaian terhadap5 (lima) unsur yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Daerah telah memperoleh capaian skor 3 (tiga) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut pada 4 (empat) unsur yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; dan 4) Pemantauan. Sedangkan unsur informasi dan komunikasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,5 (dua koma lima) dan menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa *Area of Improvement* yaitu:

- perlu dibangun kebijakan antikorupsi yang komprehensif meliputi kebijakan, struktur pengelola risiko korupsi dan standar perilaku antikorupsi;
- risiko kemitraan belum dikelola dengan baik;
- saluran pengaduan belum berjalan dengan baik dan sistem *whistleblowing* cenderung rendah;
- belum adanya pedoman reviu yang terstandar;
- pimpinan PD belum melakukan pemantauan secara berkala capaian kinerja dan pemantauan terhadap risiko.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan yang optimal dalam memastikan terwujudnya *good governance* di Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi.

c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan.

Penilaian atas komponen penetapan tujuan terdiri dari penilaian terhadap 4 unsur yaitu: 1) Efektivitas dan efisiensi; 2) Keandalan laporan keuangan; 3) Pengamanan atas Aset; 4) Ketaatan pada peraturan.

1) Efektivitas dan Efisiensi.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP tahun 2023 dan 2024, skor efektivitas dan efisiensi atas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

capaian *outcome* memperoleh skor 3 (tiga) selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedangkan efektivitas dan efisiensi atas capaian *output* mengalami kenaikan capaian dari skor 3 (tiga) pada tahun 2023 menjadi skor 4 (empat) pada tahun 2024, namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement (AOI)* yaitu:

- masih terdapat sasaran strategis Pemerintah Daerah dan perangkat yang tidak tercapai realisasinya;
- masih terdapat sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD yang belum berorientasi hasil;
- terdapat PD yang tidak menyajikan capaian *output* setiap kegiatan.

2) Keandalan Laporan Keuangan.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 (tiga) atau C selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan berulang pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi *Area of Improvement* atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

3) Pengamanan atas Aset.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 (tiga) atau C selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan atas aset pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi *Area of Improvement* atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

4) Ketaatan terhadap Peraturan.

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP tahun 2023 dan 2024, skor ketaatan terhadap peraturan pada tahun 2023 memperoleh skor 3 (tiga) atau C dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi skor 2

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(dua) atau D. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya jumlah temuan ketidakpatuhan auditor eksternal pada LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dalam bentuk *quality assurance* atas tata kelola Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi Inspektorat Daerah telah menetapkan 3 (tiga) strategi utama untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP terintegrasi yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis; 2) Peningkatan Kualitas Pengamanan Aset Daerah; 3) Penghapusan Temuan Berulang atas LKPD.

2. Manajemen Risiko Indeks.

Nilai manajemen risiko indeks adalah ukuran yang mencerminkan tingkat kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategisnya. Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana pendekatan manajemen risiko diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di dalam organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP, yang mencakup penilaian aspek manajemen risiko.

Nilai ini dihitung berdasarkan skor capaian elemen-elemen manajemen risiko yang meliputi:

1) Proses identifikasi risiko.
2) Analisis dan evaluasi risiko.
3) Penerapan mitigasi risiko.
4) Pemantauan dan pelaporan risiko.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Skor akhir biasanya dinilai dalam skala tertentu, misalnya 1–5, yang menggambarkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

   Indeks efektivitas pengendalian korupsi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi korupsi secara efektif. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengendalian korupsi yang diterapkan organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

   - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
   - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

   Indeks ini dihitung berdasarkan evaluasi terhadap:

   1. Kebijakan antikorupsi yang diterapkan.
   2. Keberhasilan Program pengendalian korupsi.
   3. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap pedoman etika.
   4. Penanganan pengaduan korupsi.

   Hasil evaluasi dirangkum dalam bentuk skor yang menunjukkan efektivitas pengendalian korupsi, biasanya dalam bentuk skala 1–100 atau kategori (misalnya: Baik, Cukup, atau Kurang).

4. Nilai Kapabilitas APIP.

   Nilai Kapabilitas APIP adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja Internal *Audit Capability Model (IA-CM)* yang diterapkan secara global. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

   - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menekankan penguatan kapabilitas APIP.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 1634/K/D4/2019 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan enam elemen utama dalam *IA-CM*:

1. Layanan Audit: Kualitas layanan audit yang diberikan APIP.
2. Manajemen Proses Audit: Efektivitas proses audit yang diterapkan.
3. Manajemen Sumber Daya: Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Arah Strategis dan Kepemimpinan: Strategi dan peran kepemimpinan dalam pengawasan.
5. Hubungan dan Budaya Organisasi: Sinergi APIP dengan *stakeholders*.
6. Struktur Tata Kelola: Peran APIP dalam tata kelola organisasi.

Setiap elemen diberi nilai pada skala tertentu (misalnya 1–5), yang kemudian dirata- rata untuk menentukan tingkat kapabilitas APIP (Level 1 hingga Level 5).

- Level 1 *(Initial)*: Fungsi pengawasan bersifat reaktif dan belum terstruktur.
- Level 2 *(Infrastructure)*: Fungsi pengawasan telah memiliki prosedur dasar.
- Level 3 *(Integrated)*: Fungsi pengawasan terintegrasi dalam proses manajemen.
- Level 4 *(Managed)*: Fungsi pengawasan memberikan nilai tambah strategis.
- Level 5 *(Optimized)*: Fungsi pengawasan mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan.

Keempat indikator kinerja ini merupakan komponen penilaian maturitas SPIP Terintegrasi. Selain itu juga keempat indikator kinerja ini sebagai upaya Inspektorat Daerah dalam menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan Progam dan Kegiatan.

Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas pengelolaan pembangunan daerah telah merumuskan Program dan kegiatan periode tahun 2025-2029 dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Daerah.

Pemilihan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi kepala Daerah. Dimana rumusan Program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah dengan menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja tahun 2026 ditetapkan 3 (tiga) Program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang terbagi atas Program prioritas yang merupakan Program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Daerah, dan Program penunjang sebagai program kegiatan yang menopang Program prioritas.

b. Uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terdiri dari:

- *Program Prioritas*.

  Rencana Program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2026 sebanyak 2 (dua) program, adapun Program tersebut sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Program penyelenggaraan pengawasan dengan pagu indikatif sebesar Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub-kegiatan.
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan pagu indikatif sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub-kegiatan.

➢ *Program Penunjang.*

Selain Program prioritas Inspektorat Daerah tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga didukung dengan Program penunjang yaitu Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp44.478.170.252,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub-kegiatan.

c. Program/kegiatan/sub-kegiatan yang dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja serta tidak teranggarkan dikarenakan penyesuaian anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota.

   Pada Program ini ada beberapa kegiatan yang sub-kegiatannya tidak teranggarkan dikarenakan penyesuaian anggaran Daerah, adapun kegiatan tersebut adalah:

   1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD, pada sub kegiatan pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD.
   2) Kegiatan administrasi kepegawaian PD, pada sub-kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan sub-kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3) Kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah, pada sub-kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini terdapat kegiatan yang telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja sub-kegiatan dikarenakan penyesuaian anggaran Daerah, yaitu:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Adapun sub-kegiatan yang dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja tersebut antara lain:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
c. Reviu Laporan Kinerja.
d. Reviu Laporan Keuangan.
e. Pengawasan Desa.
f. Kerjasama Pengawasan Internal.
g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja sub kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran, sub kegiatan tersebut adalah:

a. penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
b. pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja sub

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub-kegiatan tersebut adalah:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Untuk kegiatan ini ada beberapa sub-kegiatan telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan penyesuaian anggaran Daerah, adapun sub-kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan Daerah;
b. pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
c. koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
d. pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4. 1 TC – 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,99 Nilai	37.879.247.807			77,74 Nilai	49.313.417.346
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*		*6 Dokumen*	*350.000.000*			*7 Dokumen*	*450.000.000*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000	APBD Kukar	-	2 Dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD Kukar	-	3 Laporan	150.000.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	- Berita Acara	-	APBD Kukar	-	1 Berita Acara	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*		*4 Laporan*	*18.051.055.063*			*4 Laporan*	*19.272.594.848*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	1176 Orang/ bulan	17.771.724.663	APBD Kukar	-	1778 Orang/ bulan	18.993.264.448

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	2 Laporan	204.330.400	APBD Kukar	-	2 Laporan	204.330.400
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	25.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*		*3 Dokumen*	*90.800.000*			*3 Dokumen*	*115.800.000*
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	1 Laporan	40.800.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	40.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian*		*2 Dokumen*	*550.000.000*			*3 Dokumen*	*3.300.000.000*
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	SKPD Inspektorat	- Paket	-	APBD Kukar	-	- Paket	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	25 Orang	500.000.000	APBD Kukar	-	100 Orang	1.500.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab.	75 Orang	50.000.000	APBD Kukar	-	75 Orang	300.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
		Kutai Kartanegara						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	- Orang	-	APBD Kukar	-	120 Orang	1.500.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6 Layanan*	*770.833.340*			*6 Layanan*	*1.210.000.000*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	15.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	75.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	200.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	3 Paket	80.000.000	APBD Kukar	-	3 Paket	250.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	50.833.340	APBD Kukar	-	1 Paket	60.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	50 Laporan	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	250 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	-	250 Dokumen	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*23 Unit*	*15.461.784.000*			*56 Unit*	*20.250.000.000*
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	2 Unit	800.000.000
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	3 Unit	1.000.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	1 Paket	2.000.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Unit	15.200.000.000	APBD Kukar	Lanjutan Pembangunan	1 Unit	15.200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
						Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	22 Unit	261.784.000	APBD Kukar	-	50 Unit	1.250.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*12 Bulan*	*2.004.775.404*			*12 Bulan*	*3.815.022.498*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	420.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	805.247.094
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	75.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	1.500.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	1.509.775.404	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Tenaga Ahli dan Outsourcing (tenaga keamanan dan kebersihan)	12 Laporan	1.509.775.404
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*		*18 Unit*	*600.000.000*			*20 Unit*	*900.000.000*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD Inspektorat	11 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	11 Unit	250.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	1 Unit	100.000.000	APBD Kukar	-	1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	- Unit	-	APBD Kukar	-	2 Unit	200.000.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		90,11 Persen	2.850.000.000			90,20 Persen	6.150.000.000
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP		82,70 Persen	2.500.000.000			84,00 Persen	4.000.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal*		*14 Laporan*	*4.750.000.000*			*14 Laporan*	*8.500.000.000*
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	6 Laporan	1.500.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	10 Laporan	1.750.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	17 Laporan	750.000.000	APBD Kukar	-	17 Laporan	1.250.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	600.000.000	APBD Kukar	-	5 Laporan	1.000.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	38 Laporan	1.000.000.000	APBD Kukar	-	39 Laporan	1.250.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Kesepakatan	100.000.000	APBD Kukar	-	3 Kesepakatan	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	800.000.000	APBD Kukar	-	4 Dokumen	1.500.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu*		*15 Laporan*	*1.650.000.000*			*19 Laporan*	*1.650.000.000*
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD Kukar	-	4 Laporan	150.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	13 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	15 Laporan	1.500.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		75-100 Persen	1.850.000.000			75-100 Persen	3.400.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*		*2 Laporan*	*300.000.000*			*4 Dokumen*	*650.000.000*
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	150.000.000	APBD Kukar	-	1 Rekomendasi	250.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	150.000.000	APBD Kukar	-	3 Rekomendasi	400.000.000
Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah*		*56 Perangkat Daerah*	*1.550.000.000*			*56 Dokumen*	*3.200.000.000*
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	750.000.000	APBD Kukar	-	56 Perangkat Daerah	1.250.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD Kukar	-	13 Perangkat Daerah	400.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	400.000.000	APBD Kukar	-	3 Kegiatan	800.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD Kukar	-	10 Perangkat Daerah	300.000.000
JUMLAH				*45.079.247.807*				*62.863.417.346*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode tahun ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) Konsultasi (*Consulting*) dan pencegahan korupsi *(Anti Corruption)* terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait *early warning system* (peringatan dini).
3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan konsultasi (*Consulting*) terhadap laporan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawas.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional pengawasan.
6. Mendorong *stakeholder*/masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah mengikuti kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Rencana Kerja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat tahun anggaran 2026.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun strategi yang merupakan langkah sistematis yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara agar Program dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran adalah :

1. Melakukan kegiatan pengawasan, reviu, monitoring dan evaluasi.
2. Melakukan kegiatan konsultasi, pendampingan dan pembinaan.
3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
4. Penyediaan peralatan dan bahan penunjang kinerja pengawasan.
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peran serta pengawasan masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja 2026 ini diharapkan pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan, serta nantinya dapat mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam rencana strategis.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar-sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif Daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan di atas pada tahun 2026 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2025-2029.

Renja-PD merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2026 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan pemilu Serentak tahun 2024, pelaksanaan tugas paskibraka, pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan forum-forum

bentukan pemerintah, fasilitasi pelaksanaan P4GN serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur Program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dengan tema pembangunan "Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan" dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemenuhan dan Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan:
   - Penyediaan sumber daya manusia tenaga kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.
2. Peningkatan Pemenuhan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan:
   - Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi.
3. Pengembangan dan Penguatan Kawasan Ekonomi Potensial yang Terintegrasi dan Berkelanjutan:
   - Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan.
4. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif:
   - Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi PD dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.
5. Penguatan Infrastruktur dan Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik:
   - Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.
6. Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini:

- Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.

7. Penguatan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Infrastruktur Desa yang Berkualitas:
   - Penyediaan RDTR wilayah kecamatan dan tata ruang desa, pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke desa.
8. Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas (keterkaitan wilayah):
   - Penyediaan Integrasi layanan transportasi perhubungan darat maupun air yang aman, berkualitas dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2

Tahun2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud danTujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan untuk meletakan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026;
2. Meletakan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan rencana strategis (renstra) PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi PD

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
b. uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan; dan
c. penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB III PENUTUP

a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
c. rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra). Sebagaimana disebutkan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029, pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator kinerja utama.

Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2025-2029, Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai Program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan data base organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Berikut tabel capaian kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 :

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,75	42,83	67,18%	Hasil Penilaian Mandiri, sambil hasil penilaian dari inspektorat
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	24	14	58,33%	merupakan angka capaian penurunan jumlah konflik dan gejolak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,33	5,22	156,76%	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik dan jumlah peserta melebihi dari target renstra
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,53	6,84	123,69%	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejolak masyarakat dan kejadian konflik pada tahun 2023 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan sutuasi di Kutai Kartanegara kondusif
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,99%	3,12%	157%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,33%	2,06%	155%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,27 %	17,67 %	124%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	11,40%	11,1%	97,37%	Dari target 25 ormas telah terpenuhinya 21 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
					pendaftaran serta pelaporan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 nilai	70,98 nilai	80,66%	Nilai SAKIP hasil reviu Tahun 2023

Secara keseluruhan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024, dengan perhitungan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja realisasinya melebihi target sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target sasaran, dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2024 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Dalam hal pencapaian *output* Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,54 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat persen) dan realisasi keuangan sebesar 91,55 % (sembilan puluh satu koma lima puluh lima persen), untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian target Rencana Kerja dan renstra yang tercapai, tidak tercapai dan melebihi target serta faktor-faktor penyebab dan tindak lanjut terhadap capaian target Program dan kegiatan pada tahun 2024, secara keseluruhan disampaikan sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	88	70,98	80,66	Adanya perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya	Reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	900	710	78,89	Terdapat ASN yang pensiun dan meninggal serta pindah tugas	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tertibnya pelaporan data dan kepangkatan ASN Kesbangpol	Kepatuhan SOP

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	50	66,67	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	100	Tertibnya pelaksanaan layanan	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	29	29	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	38	38	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6	6	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	600	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.500	2.500	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	402	402	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24	24	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	24	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85	85	Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap	Proses pemenuhan kelengkapan administrasi barang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	20	2	10,00	Sebagian kendaraan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional kendaraan secara berkala
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	45	9	20,00	Kelengkapan surat kendaraan untuk pengurusan belum ditemukan	Pengusulan kemudahan administrasi pada Samsat untuk kendaraan dinas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	43	25	58,14	Sebagian peralatan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional peralatan secara berkala
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persen	1,99	3,12	156,78	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3.500	3.500	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.000	1.000	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
III	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persen	14,27	17,67	123,83	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparatur dan masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	32.848	32.848	100	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta serta lokasi pelaksanaan bisa menjangkau daerah pedesaan dan pemukiman perusahaan
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	48	48	100	Parpol telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah menyelesaikan pertanggung jawaban	Peningkatan kapasitas dan pemahaman partai politik terhadap peningkatan pendidikan politik
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	500	500	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan perkembangan politik
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persen	11,40	11,1	97,37	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam	Melakukan sosialisasi peratura perundang-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20	20	100	Dokumen sesuai dengan jumlah dokumen ormas yang terregistrasi	Diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan keberadaan ormas
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300	281	93,67	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peratura perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persen	1,33	2,06	154,89	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Dok/Tri	5	5	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.400	1.400	100	Sikap apatis masyarakat terhadap ketahanan ekososbud dan belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pemahaman ketahanan ekososbud kepada aparatur dan masyarakat
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Laporan	22	22	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan ketahanan ekososbud

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
VI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persen	100	100	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen ketahanan ekonomi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.000	1.000	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Diperlukan analisis yang lebih detail terhadap hasil deteksi dini yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan selanjutnya
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	50	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forkopimda	Peningkatan jalin koordinasi antar instansi vertikal

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam tahun 2024 pencapaian Program kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, tentunya memiliki implikasi terhadap target capaian pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh Program hanya terdapat 1 (satu) Program yang tidak mencapai target, sehingga akan menghambat pencapaian pada akhir renstra;
2. Pada Program lainnya capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja;
3. Secara keseluruhan pada capaian renstra masih baik, karena masih berada pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya pencapaian target; dan
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target.

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan Program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja.

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2024 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Pada program ini dilakukan pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan Jejaring Panca Mandala dan pelaksanaan seleksi dan pusdiklat Paskibraka.
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pagu kegiatan ini mengalami pergeseran dan penambahan terkait untuk keperluan Fasilitasi KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan *workshop* teknis penyelenggaran pemilu tingkat kecamatan tahapan pemilu 2024 dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara serta hibah kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah tahun 2024.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

   Pada Program ini dilakukan pergeseran pagu anggaran dalam sub-kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan fasilitasi Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis serta pembelian test kit narkoba.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

   Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja untuk keperluan pelaksanaan hari bela negara 2024 dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara serta sosialisasi pencegahan radikalisme bersama MUI dan Kemeterian Agama.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2025			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Nilai	95,2	Nilai	87	Nilai	70,98	Nilai	81,59	persen	88	Nilai	70,98	Nilai	78,87	persen
8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	persen	6	dokumen	24	dokumen	80	persen
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	12	dokumen	80	persen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	6	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	12	laporan	80	persen
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	laporan	40	laporan	20	laporan	20	laporan	100	persen	20	laporan	80	laporan	80	persen
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	710	orang/bulan	78,89	persen	900	orang/ bulan	900	orang/ bulan	100	persen
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100	persen	1	laporan	4	laporan	80	persen
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	laporan	36	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	18	laporan	72	laporan	80	persen
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	12	dokumen	80	persen
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	15	laporan	6	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	12	laporan	80	persen
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	persen	4	dokumen	16	dokumen	80	persen
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	orang	100	orang	75	orang	50	orang	66,67	persen	75	orang	225	orang	60	persen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	layanan	12	layanan	6	layanan	6	layanan	100	persen	6	layanan	24	layanan	80,00	persen
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	paket	9	paket	4	paket	4	paket	100	persen	4	paket	17	paket	85	persen
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	145	paket	62	paket	29	paket	29	paket	100	persen	29	paket	120	paket	82,75862	persen
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	152	paket	38	paket	38	paket	38	paket	100	persen	38	paket	114	paket	75,00	persen
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	21	paket	13	paket	6	paket	6	paket	100	persen	5	paket	24	paket	114,29	persen
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1175	laporan	900	laporan	600	laporan	600	laporan	100,00	persen	600	laporan	2100	laporan	178,72	persen
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	11940	dokumen	4440	dokumen	2500	dokumen	2500	dokumen	100,00	persen	2500	dokumen	9440	dokumen	79,06	persen
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	37	unit	205	unit	170	unit	402	unit	236,47	persen	4	unit	611	unit	1651,351	persen
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30	unit	26	unit	20	unit	2	unit	10,00	persen	10	unit	30	unit	100	persen
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	40	unit	26	unit	45	unit	9	unit	20,00	persen	15	unit	40	unit	100	persen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43	unit	38	unit	43	unit	25	unit	58,14	persen	43	unit	43	unit	100	persen
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	2	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	100	persen	2	unit gedung	2	unit gedung	100	persen
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34	Persen	2,19	Persen	1,99	Persen	3,12	Persen	156,78	persen	2,17	Persen	3,12	Persen	133,33	persen
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	48	dokumen/bulan	80	persen
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2550	orang	2550	orang	3500	orang	3500	orang	100,00	persen	2000	orang	8050	orang	315,69	persen
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2000	orang	800	orang	1000	orang	1000	orang	100,00	persen	700	orang	2500	orang	125	persen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75	Persen	14,76	Persen	14,27	Persen	17,67	Persen	123,83	persen	14,51	Persen	17,67	Persen	119,80	persen
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/ bulan	48	dokumen/ bulan	80	persen
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	7020	orang	7021	orang	32848	orang	32848	orang	100	persen	1000	orang	40869	orang	582,18	persen

8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan monev bankeu parpol	16	orang	30	orang	48	orang	48	orang	100	persen	21	orang	30	orang	187,5	persen
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	270	Laporan	52	Laporan	500	Laporan	500	Laporan	100,00	persen	24	Laporan	576	Laporan	213,33	persen
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,4	Persen	9,8	Persen	11,4	Persen	11,1	Persen	97,37	persen	12,9	Persen	11,1	Persen	77,08	persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130	dokumen	38	dokumen	30	dokumen	27	dokumen	90,00	persen	30	dokumen	95	dokumen	73,08	persen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	145	orang	38	orang	300	orang	281	orang	93,67	persen	840	orang	1159	orang	799,31	persen
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58	Persen	1,77	Persen	1,33	Persen	2,06	Persen	154,89	persen	1,45	Persen	2,06	Persen	130,38	persen
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	25	dokumen/triwulan	10	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	100	persen	5	dokumen/triwulan	20	dokumen/triwulan	80	persen
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	3000	orang	3933	orang	1400	orang	1400	orang	100,00	persen	1500	orang	6833	orang	227,77	persen
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud	98	laporan	44	laporan	22	laporan	22	laporan	100	persen	35	laporan	101	laporan	103,06	persen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	persen
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/ bulan	48	dokumen/ bulan	80	persen
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	1550	orang	850	orang	1000	orang	1000	orang	100	persen	800	orang	2650	orang	170,97	persen
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda	250	dokumen	85	dokumen	50	dokumen	50	dokumen	100, 00	persen	50	dokumen	185	dokumen	74,00	persen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 diperoleh dari pembandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	86,16	95,20	70,98

Dari indikator tersebut diatas, bahwa setiap tahun hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, berikut analisis dari indikator tersebut :

a. Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu PD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	29 jenis	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	45 unit	2 unit	20,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	50 orang	66,67%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	25 unit	58,14%

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan;
2. dalam jasa perizinan kendaraan dinas/operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran;
3. dalam penataan arsip PD, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2024 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun 2024 telah terpenuhi. Pada tahun 2025 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Pengadaan dan Pemeliharaaan BMD

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, cukup memadai dalam seluruh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Station Wagon	11	Baik
2	Sepeda Motor	17	Baik
3	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik
4	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	5	Baik
5	Mesin Ketik Listrik	1	Baik
6	Mesin Ketik	7	Baik
7	Lemari Besi/Metal	50	Baik
8	Lemari Kayu	1	Baik
9	Rak Besi	4	Baik
10	Filing Cabinet Besi	24	Baik
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	Baik
12	Locker	9	Baik
13	Laci Box	8	Baik
14	Lemari Kaca	1	Baik
15	Lemari Makan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
17	Mesin Absensi	2	Baik
18	Meja Resepsionis	2	Baik
19	Meja Rapat	5	Baik
20	Tempat Tidur Kayu	2	Baik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
21	Kursi Rapat	8	Baik
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
23	Mesin Cuci	8	Baik
24	Lemari Es	9	Baik
25	A.C. Split	38	Baik
26	Rice Warmer (Rak Kaca)	1	Baik
27	Televisi	14	Baik
28	Loudspeaker	9	Baik
29	Sound System	1	Baik
30	Microphone Floor Stand	1	Baik
31	Tangga Aluminium	2	Baik
32	Dispenser	14	Baik
33	Gordyin/Kray	100	Baik
34	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tralis)	1	Baik
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Canopy)	1	Baik
37	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
38	Hidran Kebakaran	1	Baik
39	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	18	Baik
41	Meja Kerja Pejabat lain-lain	30	Baik
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
43	Meja Rapat Pejabat lainnya	21	Baik
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	14	Baik
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	100	Baik
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Baik
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2	Baik
48	Kursi Rapat Ruangan Data	4	Baik
49	Kursi Rapat Pejabat lainnya	32	Baik
50	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	Baik
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik
52	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	1	Baik
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Baik
54	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	Baik
55	Camera Electronic	3	Baik
56	Slide Projector	7	Baik
57	Video Conference	1	Baik
58	Alat Studio Video Lainnya (Handycame)	2	Baik
59	Mesin Jilid	1	Baik
60	Mesin Potong (Rumput)	1	Baik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
61	Mesin Barcode	5	Baik
62	Alat Studio Lainnya (CCTV)	2	Baik
63	Telephone (PABX)	1	Baik
64	Handy Talky (HT)	4	Baik
65	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)-Ipel (HP)	1	Baik
66	Wireless Amplifier	3	Baik
67	Tabung 02	1	Baik
68	Kunci Sinyal	1	Baik
69	Serial Scanner/Printer	3	Baik
70	Kipas Penggerak Air	3	Baik
71	Internet	1	Baik
72	P.C Unit	29	Baik
73	Lap Top	22	Baik
74	Note Book	3	Baik
75	Hard Disk	8	Baik
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Baik
77	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
78	Peralatan Fitnes	3	Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan karena Pada tahun 2024 pelaksanaan pengadaan keperluan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terpenuhi.

c. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik Daerah dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan barang milik Daerah

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolfing sangat penting, karena cepat lambatnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengajuan revolfing sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan laporan barang milik Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 laporan barang milik Daerah yang dibuat telah tercapai 100% (seratus persen) dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen laporan barang milik Daerah semesteran;
2. 1 (satu) dokumen laporan barang milik Daerah akhir tahun;

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100%, (seratus persen) dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100% (seratus persen).

d. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

1. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana *(cash flow)*

   Pada awal tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat Uang Persediaan (UP) dari bendahara umum Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mencapai batas minimum 30% (tiga puluh persen) dari pagu UP untuk kemudian dilakukan *revolving* atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses *revolving* sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan *revolving* sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke bagian keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 laporan keuangan yang dibuat telah tercapai 100% (seratus persen) dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100% (seratus persen), dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100% (seratus persen.

e. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 tahunan ke perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja.Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

1. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2024 dan juga untuk tahun 2025 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direaliasikan dalam bentuk program dan kegiatan PD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan reviu oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau. Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dibuat RENJA 2025, LKjIP 2023, LPPD 2023 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2024 baik secara manual baik melalui aplikasi E – PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

   Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PD selama tahun 2024 telah dilakukan monitoring oleh tim internal PD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2024 terdapat 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100%, dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100% (seratus Persen)

Tujuan 2 :

Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penanganan konflik dan gejolak masyarakat yang ditindaklanjuti. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari indikator tersebut :

PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK DAN GEJOLAK MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI

Untuk capaian indikator persentase penanganan konflik dan gejolak masyarakat yang ditindaklanjuti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual Daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat aksi unjuk rasa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali aksi, sedangkan pada tahun 2023 aksi unjukrasa sebanyak 26 (dua puluh enam) kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar kebijakan pemerintah, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penlayanan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2024.

Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

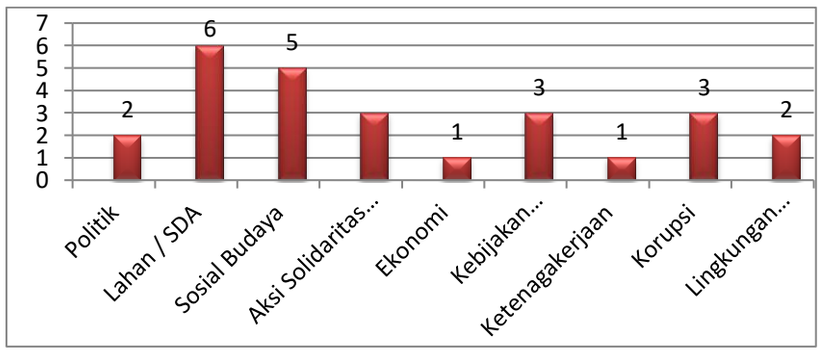

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik							1	2	1			1	5
2	Lahan / SDA	1	2				2			1				6
3	Sosial Budaya			1		1								2
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional					1		1			1			3
5	Ekonomi			1										1
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik			3		1		1						5
7	Ketenagakerjaan					1	1							2
8	Korupsi	1			1	1								3
9	Lingkungan Hidup													0
Jumlah Unjuk Rasa		2	2	5	1	5	3	3	2	2	1	0	1	27

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)			2	1	2		1	1					7
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masy.)					1							1	2
3	Ormas / LSM	1				1			1	2	1		1	7
4	Elemen Masyarakat	2	2	3			2							9
5	Karyawan / Sarikat Pekerja			1		1								2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa			3	2	6	1	5	2	1	2	2	1	2	27

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2024.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial
Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha						1							1
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh													
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat													
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

   Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

   Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan penyediaan data dan informasi aktual serta akurat, sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

   Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang sebagai *leading* sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di Daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan didaerah yaitu dengan dibentuknya:

   1. Nama Forum : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dasar Hukum :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
4. Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nomor 9 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 494/SK-BUP/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan : 1. Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas Daerah;
2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukarkan data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara bersama menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis;
3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidangIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di Daerah;
5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan prefentif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1);
2. Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2);
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3);
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1);
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2);
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2);
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR;
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;
15. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
16. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nama Forum : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;

Tujuan :

1. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
5. Mengoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Keanggotaan : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua);
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 1);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 2);
4. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3);
5. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4);
6. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5);
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris);
8. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1);
9. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2);
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dab Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraaan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;

25. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Nama Forum : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Tujuan :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Forkopimda juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah.
2. Menjalin hubungan kerja antarinstansi pemerintah;
3. Bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi, dan kesepahaman;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Menyelesaikan permasalahan faktual di daerah;
5. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Menjamin pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah;
7. Memfasilitasi hubungan kerja Forkopimda dengan pemerintah daerah;
8. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala Daerah;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah secara periodik;

Tugas : a. Forum

1. menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah;
2. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas Daerah bagi pembangunan daerah, pemerintahan daerah dan stabilitas Daerah;
3. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati atas kondisi yang sangat dibutuhkan Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum;
4. menjadi narasumber pada setiap pertemuan dan rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadan Dini Pemerintah Daerah serta pada forum pertemuan lainnya; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Sekretariat

1. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forum Koordiansi Pimpinan Daerah;
2. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordiansi Pimpinan Daerah; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum Koordiansi Pimpinan Daerah.

Keanggotaan : a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Ketua: Bupati Kutai Kartanegara

Wakil: Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Anggota:
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Komandan Kodim 0906/TGR;
3. Kapolres Kutai Kartanegara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong;

b. Sekretariat

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Analis Kebijakan Ahli Muda;
8. Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kasubag Protokol, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

9. Perencana Sub Koordinator Penyusunan Program, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

   Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan 494/SK-BUP/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

   Tugas dan fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :

   1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini;
   2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
   3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di wilayahnya dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten/Kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Jenis Kegiatan :

1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 (delapan belas) kecamatan.
2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di Daerah.
4. Pembuatan analisis dan rekomendasi *(problem solving)* atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada pimpinan Daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Pembentukan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ditingkat kabupaten dan kecamatan, dimana FKDM ini bertugas di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar infomasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat).

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Tim wasdin) dilakukan setiap bulan dan minimal setiap 3 (tiga) bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota FKDM Kabupaten dan Kecamatan serta Jaring Agen. Hasil Rapat Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal didaerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD dalam kegiatan

1. Pencegahan Konflik;
2. Penghentian / Penyelesaian Konflik
3. Pemulihan Pasca Konflik.

Ketiga, Penyusunan danPembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi

RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

A. PENCEGAHAN
   1. Konflik Sosial
      a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)
      b. SARA (2 RA)
      c. Politik (1 RA)
      d. Ekonomi / Industrial (1 RA)
   2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME
   1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)
   2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme
      a. Sebelum Tahun 2024 (1 RA)
      b. Sejak Tahun 2024 (2 RA)

C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM
   a. Sebelum Tahun 2024 (2 RA)
   b. Sejak Tahun 2024 (2 RA)

D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2024 (1 RA)

E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2024 (1 RA)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pada awalnya ditahun 2013-2014 pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload *(entry data)* melalui website Serambi UKP4 : http://serambi.ukp.go.id. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.

Mulai tahun 2015 hingga tahun 2024 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12.

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	**Masa Pelaporan**	**Evaluasi Timdu Pusat**
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2024	5 Juni 2024
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2024	8 September 2024
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2024	10 Januari 2025

Pada Tahun 2024 pelaporan progres capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital *Google Drive* yang dibangun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital *Google Drive* Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jenis Kegiatan :

1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 20 Kecamatan.
2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadiaan konflik.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul.
5. Penanganan Konflik Sosial yang terjadi dikecamatan, dengan langkah awal penanganan konflik dilakukan aparat pemerintah kecamatan yang kemudian dilaporkan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten.
6. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten nenindaklanjuti

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kejadian konflik yang tidak dapat diselesaikan ditingkat pemerintahan kecamatan.

7. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 218/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Forum Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah;
b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi pembangunan Daerah, pemerintahan Daerah dan stabilitas Daerah;
c. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati atas kondisi yang sangat dibutuhkan Daerah dan/atau masyarakat.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah kabupaten, Forkopimda kabupaten bertugas melaksanakan:

a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan :

a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota;
c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum diwilayah kabupaten / kota;
d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah sangat sulit, karena *output* dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuruan realisasi kegiatan kominda adalah sejauh mana fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024 :

Isu Strategis dan Permasalahan Aktual berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
Ideologi	Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin"	• Jahab, Tenggarong • Sangasanga	• Jumlah pengikut ± 102 orang • Faham ini tidak mengakui pemerintah mempunyai keinginan untuk membentuk Negara sendiri dengan istilah Khilafah • Memiliki Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah Khilafatul Muslimin Pengikut /santri tidak pernah melaporkan keberadaan santri / pengikut kepada pemerintahan setempat (kelurahan) untuk administrasi kependudukan. • Kelompok KM yang berada di Jahab merupakan Amir Wilayah Borneo.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
			• Keberadaan kelompok ini harus diwaspadai
Politik	1. Pemilu Serentak 2024, untuk memilih : • Anggota DPR Pusat • DPD Pusat • DPRD Provinsi • DPRD Kabupaten • Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2. Pilkada Serentak 2024, untuk memilih : • Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2025-2030 • Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	• Suksesi Pimpinan dan pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024. • Adanya upaya mengusai pucuk pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. • Membangun kekuatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024 • Terjadinya konflik antar pendukung caleg maupun maupun pasangan calon perlu di waspadai untuk menghindari terjadinya konflik horisontal.
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	• Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	• Lahan menjadi sumber konflik dan sangat sering terjadi antar warga / kelompok tani dengan perusahaan. • Pada konflik ini sering dimanfaat oleh ormas baik mendukung masyarakat maupun mendukung korporasi
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfatan koridor batubara (eks Tambang)	• Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	• Penggunaan jalan umum untuk kegiatan houling menuju stock file yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak • Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
Sosial Budaya	1. Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	• Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik • Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/ pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain • Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan
	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	• Jumlah pengikut ± 70-80 orang • Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman indentitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.
	2. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	• Jumlah pengikut ± 40-100 orang • Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" • Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. • Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Hankam	Simpatisan Jaringan Teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah) di Indonesia adalah pecahan Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi ke ISIS. Penyebaran faham radikal dan terorisme	• Kecamatan di daerah Pesisir • Tenggarong, • Loa Janan • Loa Duri	• Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 • Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011 • Simpatisan kelompok radikal kanan • mulai tahun 2018 hingga 2024 terdapat 5 (lima) narapidana teroris yang akan berakhir masa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
			pidananya dan kembali kepada masyarakat, sehingga perlu pengawasan dari pihak terkait. • Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara

b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2024 :

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
1.	Aksi Warga Dusun Sikodadi Kel. Mangkurawang Tolak aktivitas Tambang Ilegal (31/1/2024), yang dimotori oleh ibu-ibu yang melakukan aksi penghentian aktivitas tambang yang diduga ilegal, Bukan tanpa alasan, masyarakat setempat kompak menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Karena sudah merasakan dampak buruknya. Mulai dari merusak area persawahan, hingga mengakibatkan banjir di pemukiman warga. Sebanyak 3 titik didatangi oleh warga. Dari 3 lokasi berbeda tersebut, mereka mendapati 3 unit ekskavator yang sedang terparkir di lokasi penambangan. Parahnya lagi, lubang tambang koridoran ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari lahan pertanian warga (ditambang itu berada di	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pekerja. Kemudian meminta aparat keamanan untuk menindaklanjuti temuan dilokasi apakah penambangan ini legal atau tidak, jika ilegal maka ditindak secara hukum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
	kawasan perbukitan di RT 15. Dan langsung bersebelahan dengan sawah warga)		
2.	Konflik lahan antara kelompok tani dengan PT. Budi Duta Agromakmur yang belokasi di Jahab Kecamatan Tenggarong. Dimana masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani merasa lahan garapan mereka dirampas oleh PT. DBA, kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun warga merasa tidak ada tindak lanjut. terlebih saat ini warga merasa dibenturkan dengan Ormas Laskar Boneo yang diduga dibayar oleh PT. BDA. Warga meminta agar PT. BDA untuk menghentikan Land Clearing, dan meminta agar PT. BDA tidak menggunakan ormas untuk mengitimidasi warga, dan meminta difasilitasi untuk membahas masalah ini dengan Bupati. (22/2/2024)	3 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Kemudian meminta kepada aparat keamanan untuk bernegoisasi kepada perusahaan untuk tidak memakasi jasa pengamanan dari ormas yang nantinya akan menjadikan potensi konflik dengan warga. mengkomunkasikan kepada BPN dan OPD dan yang membidangi pertanahan untuk memeriksa keabsahan dokumen lahan yang disengketakan. Pemrintah Daerah melaksanakan Rapat Membahas rencana Identifikasi dam Inventarisir Tanam Tumbuh Waega yang Mengklaim tergusur oleh kegiatam land clering PT Budiduta Agromakmur Di Kec Tenggarong dan Kec Loa Kulu. Rapat dipimpin Asisten 1 setkab Ahmad Taufik Hidayat Si.MM Senin tgl 10 Juni 2024, dengan menghadirkan KODIM, POLRES, Dinas Trannaker, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bag Hukum, Tata Pemerintaham, Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, ATR/BPN. Kesbangpol. Rapat koordinasi dalam rangka penyampaian hasil identifikasi dan inventarisasi tim pemerintah Kab. Kukar pada areal HGU PT. Budi Duta Agromakmur, dipimpin olehBapak Akmad Taufik (Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Kukar) dah dihadiri oleh Akmad Taufik (Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Kukar), Yani Wardhana, S.Sos (Kabag Pemerintahan Kab. Kukar),Aditya sanjaya, ATR/BPN Provinsi, Kapten Inf Slamet Widodo, Danramil 0906-02 Loa kulu, Lettu Inf Siswo, R. Dan unit 0906/ Kkr, Ipda Priyo, Kanit Binmas Polsek Loa kulu, Fauzan (Kasi BPN Kukar),Husni Tamrin, lawyer PT. Budi Duta Agromakmur,Rudianto Sulistyo (Wakil Ketua PDKT Kaltim),Hendrik Tando (Wakil Ketua DAD Kaltim), Matius Kuna (Tim pembebasan Laham), Wardi (Humas PT. BDAM). Dalam apat tersebut disampaikan hasil identifikasi, pengecekan dan inventarisasi di lokasi yang ditunjukan warga , dengan dilakukan ploting area dan pulbaket terhadap lahan yang diakui penuntut. pada area-area yang terjadi land clearing oleh PT. BDAM Tahun 2023/2024. Dan pada area-area tersebut saat ini telah juga ditanami Kelapa Sawit (kecil/baru) oleh PT. BDAM, sehingga terhadap pengakuan tanam tumbuh yang tuntut warga penuntut hampir tidak ada ditemukan adanya bekas tanam tumbuh yang dituntut tersebut. namun Dari 9 bidang klaim lahan yang dilakukan pengecekan oleh Tim

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			pada areal yang ditunjukkan warga penuntut kerusakan land clearing tidak ada di temukan adanya bekas tanam tumbuh yang dituntut tersebut pada area-area LC PT, BDAM, hanya didapati terhadap 3 bidang klaim lahan (3 orang) yang disekitar lahan
3.	Aksi Penolakan warga desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun darat atas aktivitas blasting PT. Kartika Sela bumi Minning (PT.KSM), warga berkeberatan karena banyak rumah warga menjadi retak, warga menuntut kompensasi Rp. 50jt per rumah, dan kompensasi kebisingan dan debu sebesar Rp. 3jt/KK serta meminta perusahaan membantu fasilitas air bersih untuk warga. (29/2/2023) Dalam pertemuan dilapangan, pihak manajemen PT. KSM menyetujui untuk penyediaan air berih, dan meniadakan kegiatan blasting di blok Osor Timur, kemudian tidak bersedia memberkan kompensasi 50jt setiap rumah yang retak , namun perusahaan akan memperbaiki rumah warga yang retak tersebut.	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Mendorong kepada pihak Pemerintah kecamatan Kota Bangun Darat dan Pemdes Kedang Ipil untuk melakukan pertemuan antar perusahaan dan warga untuk mengambil langkah kongkrit untuk atas tuntutan warga dan hal-hal yang akan dipenuhi pihak perusahaan, hal ini untuk mengawal agar tidak terjadi bentrokan yang bisa merugikan warga dan perusahaan.
4.	Dilaksanakan pertemuan dan mediasi atas tututan warga Muara Badak yang berkeinginan agar menjadi perioritas jadi karyawan di PT. CHAS, pertemuan dilaksanakan di café Rindang Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak (3/3/2024).	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Mendorong kepada pihak kecamatan untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan PHSS dan perusahaan kotraktor, agar mengutamakan penerimaan pekerja lokal sesuai keahlian. Pertamuan dihadiri Arpan, S. Sos Camat Muara Badak, AKP Gatot Siswanto, S. Sos Kapolsek, IPTU Lamser Wakapolsek, Serda Zainal Koramil, Nur Sidik, SH Kasi Trantib, Ardiansyah Relation PHSS, Ruly Ketua Asosiasi Operator Kec Muara Badak, Andi Fery Korlap aksi, Bapak Ramadhan Wadan KOTI PP PAC Muara Badak, Irwansyah Bendahara Asosiasi, Adam Malik perwakilan PT CHAS, Dede Maulana perwakilan PT CHAS. adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah : a. Meminta kepada pihak PT chass sebagai USER untuk transparansi terhadap penerimaan tenaga terkhusus untuk orang badak. c. Meminta untuk perlunya pemberitahuan dan informasi kepada pihak asosiasi jika ada perekrutan untuk menghindari adanya orang dalam yang memasukkan orang dari luar muara badak untuk bekerja di perusahaan. d. Terkait recruitment PT. CHAS selalu berkomunikasi dengan pihak Kecamatan e. Terhadap Pihak PT Chas Tidak adanya pemberitahuan atau Follow up dari PT. CHAS tentang Rekruitmen yang telah di proses

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			Lamarannya Kedepannya sesuai skill pelamar. f. Pihak LSM Maupun dari pihak perusahaan Bisa berkoordinasi dengan baik Serta adanya keterbukaan.
5.	Pertemuan dan Mediasi Terkait Permasalahan Adanya Warga yang Protes Terkait Keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pos Pembinaan Umat Pniel KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat (22 Maret 2024).	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga. Mendorong kepada pihak Pemerintah Kelurahan Sungai Merdeka dan kecamatan Samboja Barat serta Polres dan Koramil untuk mendinginkan suasana dan memonitoring perkembangan diwilayah untuk menghindari konflik SARA. Kemudian mendorong dialog bersama FKUB untuk proses perizinan rumah ibadah. Catatan : Sdr. Yusriansyah bahwa ada ibadah dirumah sdr. Andreas Kurata yang diduga tidak mempunyai surat izin sebagai rumah ibadah. Atas laporan tersebut pada hari Kamis 21 Maret 2024, Drs Agus Santosa (Lurah Sungai Merdeka), Aiptu Arold (Bhabinkamtibmas), Sertu Edi Sutrisno (Babinsa) mendatangi lokasi rumah Sdr Andreas Kurata di Jalan Soekarno Hatta KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat, Dan tidak lama kemudian Sdr Yusriansyah bersama.sama dengan 10 (sepuluh) orang warga lainnya tiba di rumah Sdr Andreas Kurata. Lurah Sungai Merdeka menyampaikan bahwa besok hari Jumat tanggal 21 Maret 2024 akan dilaksanakan sosialisasi dan pertemuan terkait keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia di KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat Pukul 20.00 wita bertempat di kantor Lurah Sungai Merdeka Kec Samboja Barat Lurah Sungai Merdeka (Drs Agus) memanggil Sdr Yusriansyah dkk dan dilaksanakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut turut hadir sbb : Drs Agus Santosa (Lurah Sungai Merdeka), 2. Aiptu Arold R (Bhabinkamtibmas Kel Sungai Merdeka), Yusriansyah (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Jumri (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Mustani (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka) Maturidi (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Syahfandi Asnawi (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Baharuddin (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Dalam pertemuan tersebut Sdr Yusriansyah membuat surat Pernyataan bahwa atas permasalahan yang ada dirumah Sdr Andreas Kurata memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setiap warga negara berhak melaksanakan Ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
6.	warga Muara Badak yang bergabung dalam Aliansi Gabungan Rakyat Muara Badak menuntut kesempatan kerja dan Pemberdayaan Pengusaha	1 kejadian	Mediasi Management PT PHSS dan Aliansi Gabungan Rakyat Muara Badak yang dihadiri Forkopimcam dengan pembahasan penyampaian aspirasi tentang kesempatan kerja dan Pemberdayaan Pengusaha lokal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
	lokal dapat bekerjasama dengan PT PHSS		dapat bekerjasama dengan PT PHSS (10/7/2024)
	Konflik lahan Kuburan yang berada di RT.04 Kelurahan Kampung lama Kecamatan Samboja seluas 3,865M2 yang masuk dala SHGB PT. PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA. HEAD OFFICE. Jl. Gunung Pasir, Samboja	1 kejadian	Informasi adanya konflik lahan perkuburan yang berada di RT.04 Kelurahan Kampung lama Kecamatan Samboja seluas 3,865M2 yang masuk dala SHGB PT. PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA disampaikan oleh FKDM Kecamatan Samboja, dari informasi tersebut Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten mengkoordinasikan kepada Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Samboja untuk mendorong kepada Lurah Kampung Lama untuk mengadakan rapat dengan manajemen PT. ENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA untuk membahas hal tersebut. Sehingga pada hari Kamis 25 Juli 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di BPU Kelurahan Kampung Lama dilaksanakan rapat bersama Manajemen PT. PLKK, yang juga dihadiri Ketua RT 01 sampai 08, Pengurus Persatuan Rukun Kematian "Ar Rahman", Tokoh Masyarakat serta Bhabinkamtibmas. dari pertemuan tersebut disepakati untuk lakukan pengukuran ulang oleh BPN Kukar.
	Konflik Kesalahpahaman terkait Sultan Tidak mendapat undangan untuk menghadiri peringatan HUT RI di IKN	1 kejadian	Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kepala Badan Kesbangpol menghadap kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan administrasi persuratan yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol
	Konflik Lahan antara kelompok tani (warga Kelurahan Jahab) dengan PT. Budi Duta Agromakmur yang belokasi di Jahab Kecamatan Tenggarong. Dimana masyarakat warga menyandra 3 (tiga) orang anggota Brimob yang berjaga di perusahaan dan 1 orang karyawan. 4 orang tersebut ditahan dirumah i Rumah Sdr. Syahbudin (Ketua Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM) RT 06 Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dengan tuntutan Membayar sanksi adat dengan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Restorasi : Membayar biaya ritual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , Ritual untuk meminta ampun maaf kepada roh-roh leluhur, roh-roh pengiring dan roh-roh penguasa alam semesta agar bisa menahan murka sehingga tidak terjadi pertumpahan darah atau bencana-bencana sosial lainnya.	1 kejadian	Pihak Kepolisian Polres Kutai Kartanegara melakukan negoisasi untuk melepaskan 4 orang yang telah disandera oleh warga. Setelah upaya Persuasif/Negosiasi tidak berhasil maka Personil Polres Kukar melakukan Tindakan Kepolisian dalam kegiatan tersebut mendapatkan perlawanan dari Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM sehingga Polres Kukar mengamankan 3 Orang Warga yang tergabung Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM karena melakukan perlawanan terhadap Personil Polres Kukar dengan identitas; 1) Ahmadi, Laki - laki, 45 Tahun, Jln Kebun Sari Desa Margahayu RT 03 Kec. Loa Kulu. 2) Jamlus, Laki - laki , 49 Tahun, Alamat Jln Poros Tenggarong Kota Bangun Km 18 RT 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong. 3) Ryan Sofian, Laki - laki , 44 Tahun, Alamat Jln Senyiur RT 35 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Samarinda. ketiga Orang tersebut diamankan di Mapolres Kukar guna proses hukum lebih lanjut.
	Mediasi Pencemaran Limbah yang mengakibatkan Kematian Masal Kerang Dara di Muara badak	1 kejadian	Rapat Mediasi terkait Pencemaran Limbah yang mengakibatkan Kematian Masal Kerang Dara di Kec. Muara Badak dilaksanakan pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			tanggal 31 Desember 2024 di Ruang rapat Kantor Camat. Yang dihadiri Camat Muara Badak (Arfan S. Sos), Kapolsek Muara Badak (Iptu Gatot Siswanto S. Sos),Koramil Muara Badak (Serma Mashudi), DPRD Kab. Kukar (H. Muh. Hidayat), Kepala desa Muara Badak Ilir (Sudarmin), kepala desa Tanjung Limau (Suryandi), DLHK Kukar (Lalu Riyal Hadi, Rido Basuni, Abd Hamid Budiman), DKP Kukar (Andi Nuriawan dan Wahib), Pos Lanal Muara Badak (Sertu Chandra), Pos Polairud Muara Badak (Aipda Agung. S), Ketua PABPDSI Muara Badak (Iskandar) Relation PHSS (Ardiansyah), Enviromental PHSS (Joko Purnomo), Enviromental PHSS (Sigit Hariadi), HSE Drilling PHSS (Pinain Millo), Ketua Budidaya kerang Dara Kec. Muara Badak (Said) beserta ± 50 Anggota. Menurut Said - Ketua Budidaya Kerang Dara sekitar 1 bulan yang lalu para budidaya kerang sudah banyak yang mengeluh bahwa banyaknya kerang dara yang mengalami kematian dan setelah itu banyak terjadi kematian masal pada kerang dara di Muara Badak yang diakibatkan oleh limbah yang diduga dari Pengeboran Sumur RIG di Desa. Tanjung Limau. Selama 5 tahun ini tidak pernah terjadinya kematian masal kerang dara di wilayah Muara badak, dan pada saat ini setelah kami selidiki kami menduga adanya pencemaran limbah dari pengeboran sumur RIG yang sengaja tanggulnya di jebol di daerah Tanjung Limau. Pihak Pertamina PHSS mengakui adanya 1 tanggul dari 3 tanggul yang jebol, dan pihaknya telah mengambil sampel air dilokasi tercermar. dan disepakati akan dilakukan rapat kembali pada tanggal 6/7 Januari 2025.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rekapitulasi Data

Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)													0
2	Penanangan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA				2									2
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat													0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara													0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						1							1
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial													0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)							1						1
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan - Melibatkan Ormas/LSM													- -
	- Hanya Kelompok Masyarakat						2	1		1			1	5
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik													0
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal													
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal													0
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat													0
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter													0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha									1				1
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA													0
16	Rakor Tim Pakem Kukar													0
17	Rakor Penanganan Konflik													
	- Politik													0
	- Lahan SDA / Pertambangan													0
	- Kewaspadaan													0
	- Sosial Budaya												1	1
	- Ketenaga Kerjaan												1	1
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		0	0	0	1	0	3	2	0	2	0	0	3	11

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Partai Politik dan Pemilu	1					1		1	1				4
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	1,99%	1,64%	2,19%	3,12%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,33%	1,25%	1,77%	2,06%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera;
2. terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila;
4. secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordalisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa;
5. meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarinya bangsa;

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan yang dilakukan di 20 (dua puluh) kecamatan yaitu Pembinaan Pembauran Masyarakat, Pembinaan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan, serta sosialisasi FPK dan KPU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis. Dalam hal pencapaian pada indikator ini yang merupakan hal mendasar adalah pada tingkat kehadiran dan pemahaman peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

b. Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesatuan Bangsan dan Politik berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 (dua ratus lima) kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 (seratus delapan puluh enam) kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161 (seratus enam puluh satu), namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 (seratus tujuh puluh) kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 (dua ratus dua puluh empat) kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 (tujuh ratus tiga belas) kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 (empat ratus enam puluh sembilan) kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kasus dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 (tiga ratus delapan belas) kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 (dua ratus lima) kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya Program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialiasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan dinas kesehatan sebagai narasumber. Setelah penyuluhan dilaksanakan tes urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukan negatif dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan tes urin bagi para aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan harapan para aparatur bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh PD untuk dapat melaksanakan tes urin bebas narkoba.

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2022-2024

No.	Jenis Kriminal	2022	2023	2024
1	Narkoba	178	239	164
2	Pembunuhan	3	-	1
3	Kejahatan Seksual	3	2	25
4	Penganiayaan	32	15	9
5	Pencurian	36	16	46
6	Eksploitasi Anak Bawah Umur	25	15	25
7	Premanisme	5	6	10
	JUMLAH	282	293	280

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 13 (tiga belas) kasus dari tahun 2023 dengan target jumlah kasus sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) kasus, penurunan kasus ini merupakan suatu capaian yang cukup baik, untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kasus narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Selain penyakit masyarakat, dalam hal ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB se-Kalimantan Timur serta sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis.

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Cakupan Layanan Pendidikan Politik	14,27%	11,90%	14,76%	17,67%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	11,40%	8,8%	9,8%	11,1%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi pada tahun 2024, sementara 1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari dua indikator tersebut :

a. Indikator I : Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah

Dengan melihat data partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum periode 2015-2024 yang tertinggi terdapat pada pemilihan legislatif dan presiden serentak tahun 2024 sebesar 83,84 % (delapan puluh tiga koma delapan puluh empat persen) karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilihan umum (pemilu) lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dimana menurunnya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golongan putih (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong Daerah yang potensi pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis);
2. kurangnya sosialisasi tentang pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan;
3. metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula); dan
4. kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya.

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% (lima puluh persen) yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

Grafik Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2024

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020	2024	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup 58,93%	Pilkades: 70,06%	Pilgub 60,44	Pileg/Pilpres: 81,24	Pilbup: 57,00	Pileg/Pilpres: 83,84	Pilbup: 71,38

Grafik Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara

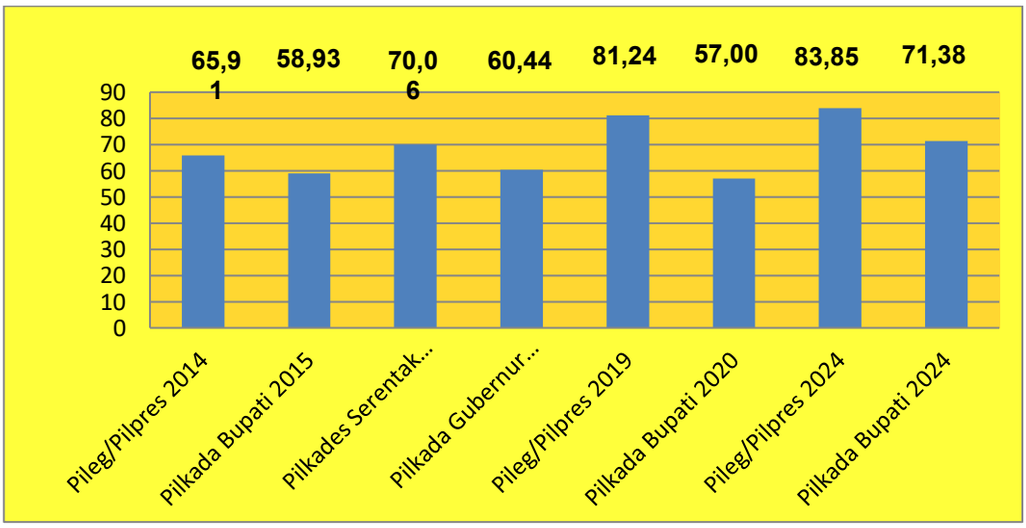

Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.362.024.250,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.362.024.250,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah) atau 100,00 % (seratus persen). Pada tahun 2024 ini pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama diberikan kepada partai politik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hasil pemilu tahun 2019 dengan rincian 7/12 (tujuh per dua belas), nilai 7/12 (tujuh per dua belas) merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2019-2024 yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dihitung dari Januari s/d Juli 2024. Kemudian tahap kedua diberikan kepada partai politik hasil pemilu tahun 2024 dengan rincian 5/12 (lima per dua belas), nilai 5/12 (lima per dua belas) merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2024-2029 yang dimulai pada bulan Agustus 2024 dan dihitung dari Agustus s/d Desember 2024.

Secara keseluruhan untuk partai politik berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara partai politik yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing partai politik, selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap partai politik tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Periode 2019-2024 (Tahap I)

NLAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2019	NILAI PERIODE 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	34.286	7/12 x 130.286.800	76.000.650	Lengkap/Realisasi
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	46.667	7/12 x 177.334.600	103.445.200	Lengkap/ Realisasi
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	45.361	7/12 x 172.371.800	100.550.250	Lengkap/ Realisasi
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13	95.345	7/12 x 362.311.000	211.348.100	Lengkap/ Realisasi
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	20.373	7/12 x 77.417.400	45.160.150	Lengkap/ Realisasi
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	23.250	7/12 x 88.350.000	51.537.500	Lengkap/ Realisasi
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	14.340	7/12 x 54.492.000	31.787.000	Tidak Realisasi
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	16.764	7/12 x 63.703.200	37.160.200	Lengkap/ Realisasi
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	34.071	7/12 x 129.469.800	75.524.050	Lengkap/ Realisasi
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	12.410	7/12 x 47.158.000	27.508.850	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	342.867	1.302.894.600	760.021.950	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan

Periode 2019-2024 (Tahap I)

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2024	NILAI PERIODE 2024	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	29.966	5/12 x 113.870.800	47.446.200	Lengkap/Realisasi
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	59.949	5/12 x 227.806.200	94.919.250	Lengkap/ Realisasi
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	16	145.613	5/12 x 553.329.400	230.553.900	Lengkap/ Realisasi
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	75.106	5/12 x 285.402.800	118.917.800	Lengkap/ Realisasi
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	33.849	5/12 x 128.626.200	53.594.250	Lengkap/ Realisasi
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	19.074	5/12 x 72.481.200	30.200.500	Lengkap/ Realisasi
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	36.731	5/12 x 139.577.800	58.157.400	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	400.288	1.521.094.400	633.789.300	

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% (seratus persen) dan telah tercapai 100% (seratus persen), meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh partai politik. Agar partai politik dan organisasi kemasyarakatan bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan bimbingan teknis bagi bendahara partai politik dan organisasi kemasyarakatn pada tahun berikutnya.

b. Indikator II : Persenstase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan prosentase organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 11,40% (sebelas koma empat puluh persen) dengan realisasi 11,1% (sebelas koma satu persen), dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran organisasi kemasyarakatan telah diperketat sehingga hanya organisasi kemasyarakatan yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan organisasi kemasyarakatannya dan pada tahun ini organisasi kemasyarakatan yang mendaftar sama dengan tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) organisasi kemasyarkatan dan 21 (dua puluh satu) organisasi kemasyarakatan pada tahun 2023, meskipun demikian, ini masih

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) organisasi kemasyarakatan, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran organisasi kemasyarakatannya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari organisasi kemasyarkaatan tersebut, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran organisasi kemasyarakatan telah melalui kementerian dalam negeri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar
tahun 2018 – 2024

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14	2
2.	OKP	-	-	-	-	4		-
3.	LSM	-	2	-	2	-	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1	-
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1	-
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21	27

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar Tahun 2024
(berdasarkan sebaran di kecamatan)

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Lemb. Adat	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	2	-	-	-	-	-	-	2
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-		0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Tenggarong	19	-	-	-	-	-	4	23
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	22	0	0	0	0	0	5	27

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini DenganTarget Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,50 Nilai	42,83	66,40%
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	5,2%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	6,84%	100%

Pengukuran Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 Nilai	70,98 Nilai	80,66	16.559.162.468	14.371.313.864	86,79
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	3.063.010.000	2.715.249.193	88,65
Sasaran Strategis III :				Program :		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,99%	3,12%	156,78	8.778.680.000	7.093.473.122	80,80
				Program :		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,33%	2,06%	154,89	2.603.122.200	2.093.162.395	74,91
Sasaran Strategis IV :				Program :		
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,27%	17,67%	123,83	75.135.281.911	70.936.300.063	94,41
				Program :		
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	11,40%	11,1%	97,37	700.000.000	599.540.000	85,65

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:													
	Indikator Tujuan:													
1	Indeks Harmoni Indonesia			Skor	88,30	88,31	88,32	88,33	88,34	77,08	88,29	88,30	88,31	target tercapai
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):													
1	Persentase penyelesaian konflik			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
2	Indeks Partisipasi Politik			Skor	85,33	86,36	87,04	89,46	91,4	83	83,07	85,33	86,36	target tercapai
II	INDIKATOR PROGRAM:													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	76	77	78	79	80	70,98	75,34	76	77	target tercapai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			Persen	6,22	6,41	6,59	6,77	6,95	5,71	6,04	6,22	6,41	target tercapai
3	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Persen	2,95	3,15	3,35	3,55	3,75	2,19	2,76	2,95	3,15	target tercapai
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan			Persen	1,98	2,13	2,29	2,45	2,61	1,77	1,82	1,98	2,13	target tercapai
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			Persen	18,45	23,30	28,15	33,00	37,86	9,80	13,59	18,45	23,30	target tercapai
6	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
III	INDIKATOR KEGIATAN:													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	5	5	12	12	target tercapai
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	30	30	30	30	30	21	27	30	30	target tidak tercapai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, kajian terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan kajian terhadap renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran PD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas demokrasi daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum optimal	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1.Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 2.Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 3.Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
3		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Masih terdapat parpol dan ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalah tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan;

b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari pengurus barang hanya terdapat 83 % (delapan puluh tiga persen) sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaa sarana dan prasarana;

c. Masih kurangya kompetensi sumber daya aparatur, hal ini karena belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2019	2020	2021	2022	2023
BB	BB	A	AA	BB

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat.

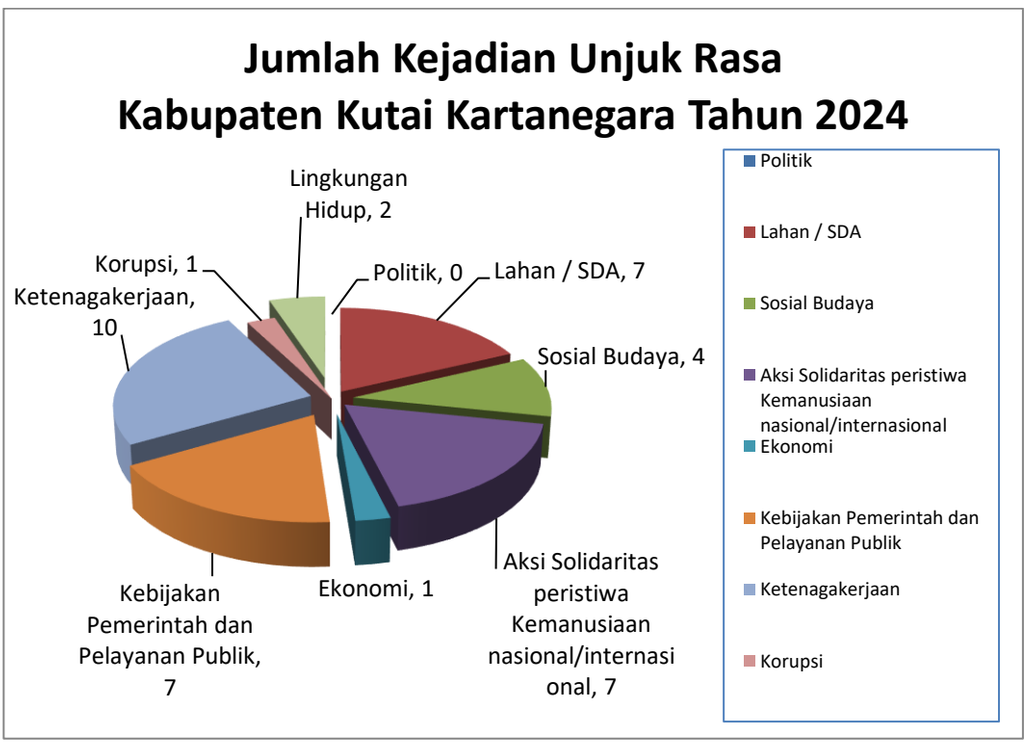

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Data kasus penyakit masyarakat.

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2022 – 2024

No.	Jenis Kriminal	2022	2023	2024
1	Narkoba	178	239	164
2	Pembunuhan	3	-	1
3	Kejahatan Seksual	3	2	25
4	Penganiayaan	32	15	9
5	Pencurian	36	16	46
6	Eksploitasi Anak Bawah Umur	25	15	25
7	Premanisme	5	6	10
	JUMLAH	282	293	280

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

Tahun 2019 – 2024

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ORMAS	4	12	10	8	14	22
2.	OKP	-	-	-	4		
3.	LSM	2	-	2	-	-	-
4.	PAGUYUBAN	3	-	-	-	-	-
5.	AGAMA	1	2	1	3	-	-
6.	PROFESI	-	-	-	-	1	-
7.	LEMBAGA ADAT	-	-	-	-	1	-
8.	YAYASAN	2	2	4	2	5	5
	JUMLAH	12	16	17	17	21	27

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan

Pemilukada Tahun 2015-2024

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020	2024	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup 58,93%	Pilkades 70,06%	Pilgub 60,44	Pileg/Pilpres 81,24	Pilbup 57,00	Pileg/Pilpres 83,84	Pilbup 71,38

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TANTANGAN.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi Daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama.

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkanberbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

antara lain berupa tuduhan"mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagi tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern *(civil society)* yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai "Promotor Pembangunan" berubah menjadi "Pelayan Masyarakat". Perubahan diatas sejalan paradigma *good governance* yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarki dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhi dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan Program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke Daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA),

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

PELUANG

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di Daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa Daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menunjang kinerja SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Deteksi Dini dan Penanganan Konflik dan Gejolak di Masyarakat.

   Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah. Diperlukan penguatan analisis hasil deteksi dini dan kesinambungan langkah koordinasi penanganan potensi terjadinya konflik dan gejolak di Masyarakat.

2. Peningkatan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

   Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pancasila, UUD 1945, wawasan kebangsaan dan semangat bela negara.

3. Peningkatan Kualitas Demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan organisasi kemasyarakatan yang menerapkan kebijakan terbaru, diperlukan langkah penyesuaian dengan kondisi demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian partisipasi politik masyarakat yang telah ada melalui penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai upaya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial serta sub-kegiatan :
   a. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
   b. pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.
2. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta sub kegiatan:
   a. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta sub-kegiatan :
   a. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta sub kegiatan: pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah.
5. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik serta sub-kegiatan :
   a. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Pada RKPD tahun 2026 telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Daerah 2026 dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk pada prioritas ke empat yaitu “Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif” dan ke enam yaitu “Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini”. Dalam rancangan RKPD tahun 2026 ini Perangkat Daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan renstra dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam Renja-PD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsan dan Politik di dalam rancangan RKPD 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prioritas 4 : Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif.

Prioritas 6 : Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini.

SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	STRATEGI DAERAH	KEBIJAKAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Penataan dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	STRATEGI DAERAH	KEBIJAKAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58%
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,40%

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029 telah memuat program beserta pagu indikatif PD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2026 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan Daerah dan kegiatan prioritas terutama kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pelaksanaan tugas paskibraka, pembinaan wawasan kebangsaan dan pancasila, penguatan forum-forum bentukan pemerintah, dan fasilitasi pelaksanaan P4GN.

Dari penjabaran rancangan RKPD tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan PD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif antara rancangan awal dan rancangan yang disebabkan oleh acuan ketersediaan pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang Program dan kegiatan.

Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan RKPD tahun 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	12.671.487.070,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	11.735.028.605,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	750.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	400.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	50.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	1 laporan	150.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	1 laporan	100.000.000,00	
4	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	
5	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.374.176.479,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.926.686.502,00	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.208.536.479,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.761.046.502,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	115.800.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	115.800.000,00	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000,00	
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	198.552.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	50.000.000,00	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143 paket	148.552.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143 paket	-	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	1.040.243.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	790.000.000,00	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000,00	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	35.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	35.000.000,00	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,00	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	800.243.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	550.000.000,00	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	786.688.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100.000.000,00	
21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	634.688.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	152.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	100.000.000,00	utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID dan sarana kearsipan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	605.867.591,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	932.542.103,00	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	224.084.183,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	224.084.183,00	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	380.783.408,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	707.457.920,00	utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	800.160.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	420.000.000,00	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	580.160.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000,00	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,15%	7.000.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,15%	5.560.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	7.000.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	5.560.000.000,00	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.500 orang	6.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	5.400.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 orang	500.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	160.000.000,00	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	6,41%	4.602.304.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	6,41%	4.002.304.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.602.304.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.002.304.000,00	
32	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000 orang	500.000.000,00	kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 orang	3.352.304.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 orang	3.352.304.000,00	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 laporan	150.000.000,00	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	23,30%	700.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	23,30%	200.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 orang	700.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 orang	200.000.000,00	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2,13%	1.850.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2,13%	800.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	1.850.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 dokumen	800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.800 orang	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	870 orang	600.000.000,00	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba
37	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 laporan	350.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 laporan	200.000.000,00	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	2.340.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	1.250.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.340.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	1.250.000.000,00	
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	840.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	220 orang	250.000.000,00	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	1.000.000.000,00	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat
	JUMLAH				29.163.791.070,00	JUMLAH				23.547.332.605,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat usulan Program dan kegiatan yang masuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan visi dan misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas Daerah.

Rencana Strategis yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub-kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, diwujudkan melalui delapan misi, yang dituangkan dalam delapan asta cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari misi pembangunan tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) Program prioritas untuk mencapai misi. Adapun Program prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN tahun 2025 – 2029 tersebut Adalah:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, peningkatan bpjs kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan umkm dan pembangunan ibu kota nusantara;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar-umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dari program prioritas tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di program prioritas ke 3, 6, 16 dan 17.

RKP Tahun 2026 mengusung tema **"**Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	sih kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	rupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan 2. Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025- 2029 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

"Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara"

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran PD sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.1

TUJUAN OPD

MISI 1 RPJMD	JUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berlandaskan Demokrasi Substansial dan Stabilitas Kondusivitas Wilayah	1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni Indonesia

Tabel 3.2

SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasi IT	1. Meningkatnya Wawasan Demokrasi Masyarakat.	Indeks Partisipasi Politik.
	2. Meningkatnya Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	Persentase penyelesaian konflik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Diagram *Impact*

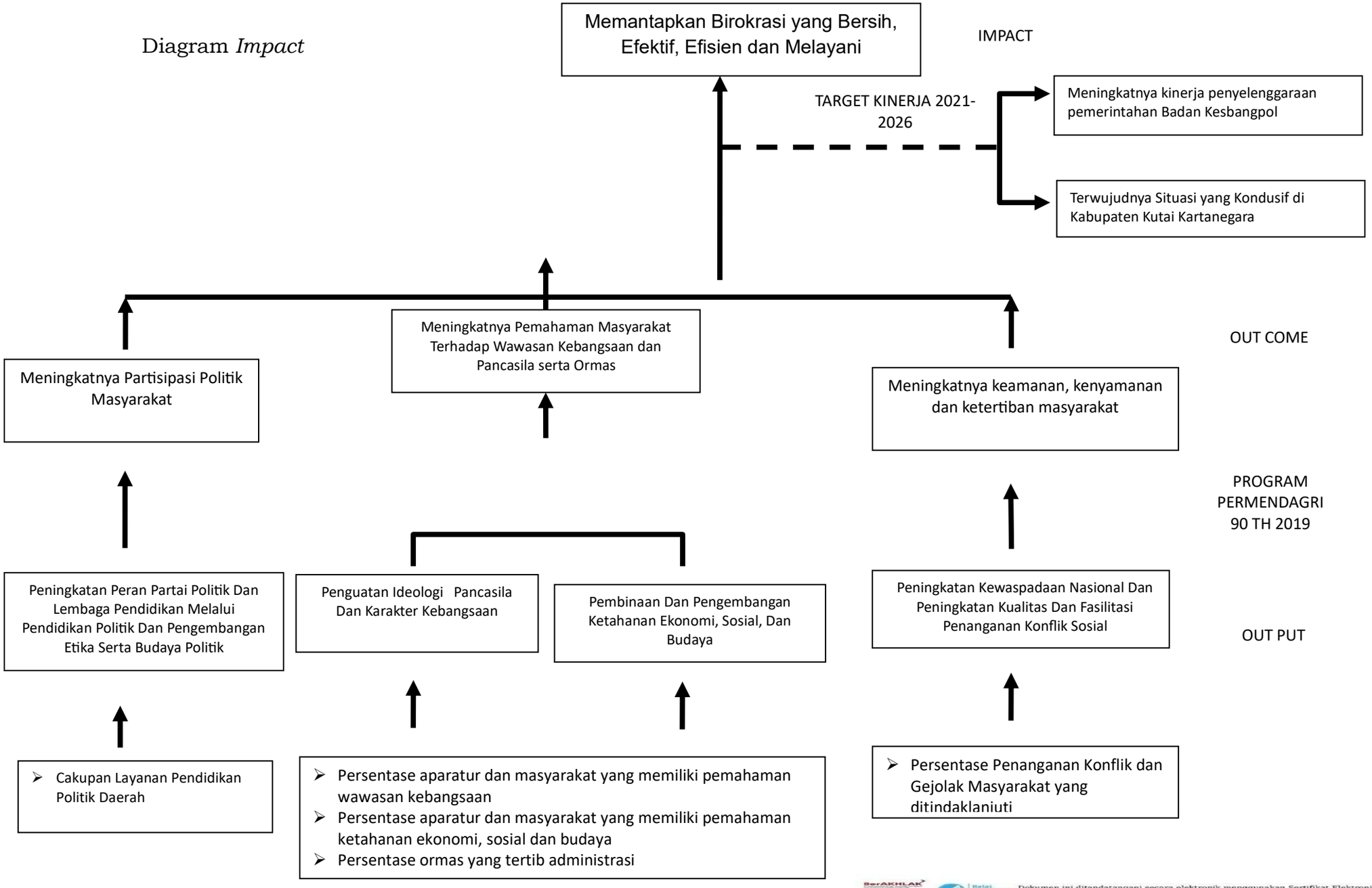

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2025-2029. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa Program dan kegiatan serta sub-kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh Program dan kegiatan serta sub-kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2026 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Cara Hitung
1	Meningkatnya Wawasan Demokrasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Politik	86,36	Indeks partisipasi politik adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti pemilu, kegiatan kampanye, diskusi politik, dan advokasi kebijakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	Meningkatnya Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	Persentase penyelesaian konflik	100	Persentase Penyelesaian Konflik adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah konflik yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu./Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah total konflik yang terjadi

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dan pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana yang telah termuat pada Renstra Badan Kesbangpol tahun 2025-2029, sehingga pada tahun anggaran 2026 dalam perumusan Program dan kegiatan serta sub-kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya Program dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan renstra, sebagai berikut :

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme;
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan, terutama lahan pada lokasi Ibu Kota Nusantara;
3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024;
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat;
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA;
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap pancasila, uud 1945, NKRI, wawasan kebangsaan dan semangat bela negara;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
8. Penguatan forum-forum bentukan pemerintah (FKUB, FPK dan FKDM) serta jejaring Panca Mandala dan organisasi lainnya;
9. Walaupun tidak terdapat pemilu pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap berkomitmen melakukan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat; dan
10. Adanya peraturan baru terhadap pelaksanaan fasilitasi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) dan pembentukan duta pancasila yang dilaksanakan oleh badan kesbangpol.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 dan rencana kerja tahunan tahun 2026 dan target kegiatan tahun 2026 banyak mengalami perubahan baik dari jumlah Program maupun jenis kegiatannya serta sub-kegiatan. Adapun jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 (satu) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub-kegiatan; dan
2. Untuk kegiatan non-generik terdiri dari 5 (lima) Program, 5 (lima) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub-kegiatan;

sehingga seluruhnya berjumlah 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Kemudian penetapan Program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 disesuaikan dengan RKPD tahun 2026 yang memuat Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana dalam hal tersebut Badan Kesbangpol termasuk sebagai PD pendukung dalam Program prioritas yaitu: Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Dari hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terakomodir ke dalam Program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perencanaan tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Program Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganasn konflik dan gejolak di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam		
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah		
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol		
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika	3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari rencana Program dan kegiatan tersebut diatas, tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD hanya terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021.

Adapun perincian kegiatan tahun 2026 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77	11.735.028.605,00	APBD II		78	10.210.478.285,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	400.000.000,00	APBD II		6 dokumen	130.000.000,00
1	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	3 dokumen	150.000.000,00	APBD II		3 dokumen	50.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	50.000.000,00	APBD II		3 laporan	80.000.000,00
3	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Tenggarong, Panji	1 laporan	100.000.000,00	APBD II		-	-
4	8.01.01.2.01.08	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Panji	1 dokumen	50.000.000,00	APBD II		-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8.01.01.2.01.10	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 berita acara	50.000.000,00	APBD II		-	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20 laporan	8.926.686.502,00	APBD II		20 laporan	8.652.912.208,00
6	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	900 orang/bulan	8.761.046.502,00	APBD II		900 orang/bulan	8.517.272.208,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	25.000.000,00	APBD II		1 laporan	20.000.000,00
8	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	18 laporan	115.640.000,00	APBD II		18 laporan	115.640.000,00
9	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 dokumen	115.800.000,00	APBD II		3 dokumen	40.800.000,00
10	8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
11	8.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	50.000.000,00	APBD II		-	-
12	8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	40.800.000,00	APBD II		3 laporan	40.800.000,00
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	50.000.000,00	APBD II		4 dokumen	20.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong, Panji	143 paket	-	APBD II		-	-
14	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	75 orang	50.000.000,00	APBD II		75 orang	20.000.000,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 layanan	790.000.000,00	APBD II		6 layanan	478.383.000,00
15	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	4 paket	5.000.000,00	APBD II		4 paket	5.000.000,00
16	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	29 paket	100.000.000,00	APBD II		29 paket	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	38 paket	35.000.000,00	APBD II		38 paket	25.000.000,00
18	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	5 paket	50.000.000,00	APBD II		5 paket	40.000.000,00
19	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	600 laporan	550.000.000,00	APBD II		225 laporan	308.383.000,00
20	8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	2500 dokumen	50.000.000,00	APBD II		2500 dokumen	50.000.000,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	100.000.000,00	APBD II		100%	90.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	1 unit	-	APBD II	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II	-	-
22	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Panji	18 unit	100.000.000,00	APBD II	utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID dan sarana kearsipan	10 unit	90.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	932.542.103,00	APBD II		12 bulan	508.383.077,00
23	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	12 laporan	1.000. 000,00	APBD II		12 laporan	1.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong, Panji	12 laporan	224.084.183,00	APBD II	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum	12 laporan	126.599.669,00
25	8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	12 laporan	707.457.920,00	APBD II	utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan	12 laporan	380.783.408,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	420.000.000,00	APBD II		100%	290.000.000,00
26	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong, Panji	30 unit	70.000.000,00	APBD II		30 unit	80.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong, Panji	40 unit	110.000.000,00	APBD II		40 unit	110.000.000,00
28	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong, Panji	43 unit	40.000.000,00	APBD II		43 unit	50.000.000,00
29	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong, Panji	2 unit	200.000.000,00	APBD II		2 unit	50.000.000,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3,15%	5.560.000.000,00	APBD II		3,35%	650.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		12 dokumen	5.560.000.000,00	APBD II		12 dokumen	650.000.000,00
30	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	900 orang	5.400.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku	500 orang	400.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	200 orang	160.000.000,00	APBD II	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan	300 orang	250.000.000,00
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		6,41%	4.002.304.000,00	APBD II		6,59%	1.802.894.600,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		12 dokumen	4.002.304.000,00	APBD II		12 dokumen	1.802.894.600,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	1.000 orang	500.000.000,00	APBD II	kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT	460 orang	250.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	21 orang	3.352.304.000,00	APBD II	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024	48 orang	1.402.894.600,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	20 laporan	150.000.000,00	APBD II	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah	24 laporan	150.000.000,00
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		23,30%	200.000.000,00	APBD II		28,15%	200.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		30 dokumen	200.000.000,00	APBD II		30 dokumen	200.000.000,00
35	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	200 orang	200.000.000,00	APBD II	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas	90 orang	200.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan		2,13%	800.000.000,00	APBD II		2,29%	630.000.000,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		12 dokumen	800.000.000,00	APBD II		12 dokumen	630.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	870 orang	600.000.000,00	APBD II	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba	600 orang	500.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	20 laporan	200.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi	18 Laporan	130.000.000,00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100%	1.250.000.000,00	APBD II		100%	1.900.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12 dokumen	1.250.000.000,00	APBD II		12 dokumen	1.900.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	220 orang	250.000.000,00	APBD II	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini	300 orang	400.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	30 dokumen	1.000.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat	50 dokumen	1.500.000.000,00
		JUMLAH				23.547.332.605,00				15.393.372.885,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2026. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2026, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2025-2029 khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2026 secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab Program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2026 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab Program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di renja badan kesbangpol tahun 2026 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja PD.
3. Kepala badan, melalui sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Program dan kegiatan pada setiap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026.

4. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dari rencana Program dan kegiatan tersebut diatas, tidak terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD hanya terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021.

Usulan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Rencana Kerja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja-PD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan; 2) Merumuskan indikator kegiatan; 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang belaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja-PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan Strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis (Renstra) Bappeda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 - 2042
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Rencana Kerja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2026;
b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026; dan
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Recana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Berdasarkan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah ”Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai PD di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Pelaksanaan kegiatan Bappeda tahun 2024 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Bappeda 2024, namun terdapat beberapa Program dan kegiatan yang capaiannya kurang maksimal. Adapun evaluasi terhadap capaian Program/kegiatan tahun 2024 sebagai Berikut :

1) Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, indikator kinerja nilai SAKIP PD, target 88,50 (delapan puluh delapan koma lima puluh) realisasi 72,78 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh delapan) dengan capaian 82,24 % (delapan puluh dua koma dua puluh empat persen).

B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, indikator kinerja persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran Daerah, target 100 (seratus) realisasi 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh empat) dengan capaian 93,74 % (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh empat persen).

C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD, target 100 (seratus) realisasi 94,55 (sembilan puluh empat koma lima puluh lima) dengan capaian 94,55 % (sembilan puluh empat koma lima puluh lima persen);
2. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD, target 100 (seratus) realisasi 93,65 (sembilan puluh tiga koma enam puluh lima) dengan capaian 93,65 % (sembilan puluh tiga koma enam puluh lima persen);
3. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD, target 100 (seratus) realisasi 92,98 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) dengan capaian 92,98 % (sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan persen).

D. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), target 37 (tiga puluh tujuh) dokumen, realisasi 36 (tiga puluh enam) dokumen dengan capaian 97,30 % (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh).

E. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, target 1 (satu) dokumen realisasi 0 (nol) dokumen dengan capaian 0% (nol persen).

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 9 (sembilan) dokumen, realisasi 9 (sembilan) dokumen, capaian 100 % (seratus), pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub-Kegiatan, antara lain :
   a. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
   b. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen); dan
   c. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 6 (enam) laporan, realisasi 6 (enam) laporan, capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub-Kegiatan, antara lain :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen); dan
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 3 (tiga) dokumen, realisasi 3 (tiga) dokumen, capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub-Kegiatan, antara lain : Sub-Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 8 (delapan) dokumen, 175 (seratus tujuh puluh lima) stel pakaian, jumlah ASN 60 (enam puluh) orang, realisasi 8 (delapan) dokumen, 175 (seratus tujuh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh lima) stel pakaian, jumlah ASN 60 (enam puluh) orang dengan capaian 100 % (seratus perse), pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
b. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
c. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan
d. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 8 (delapan) layanan, realisasi 8 (delapan) layanan dengan capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub-Kegiatan, antara lain :
   a. Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
   b. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);
   c. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);
   d. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);
   e. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
   f. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g. Sub-Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen); dan

h. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100 % (seratus persen), realisasi 100 % (seratus persen), capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

a. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan target realisasi capaian 100 % (seratus persen);

b. Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen); dan

c. Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 (dua belas) laporan, realisasi 12 (dua belas) laporan, capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub-Kegiatan, antara lain:

a. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen); dan

b. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen).

8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100 % (seratus persen), realisasi 100 % (seratus persen), capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan target 7 (tujuh) dokumen, 59 (lima puluh sembilan) pendampingan, 2 (dua) kali Pelaksanaan Konsultasi Publik, 3 (tiga) forum PD , 2 (dua) kali Pelaksanaan Musrenbang, realisasi 7 (tujuh) dokumen, 59 (lima puluh sembilan) pendampingan, 2 (dua) kali Pelaksanaan Konsultasi Publik, 3 (tiga) forum PD , 2 (dua) kali Pelaksanaan Musrenbang, dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub-Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

b. Sub-Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

c. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
e. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
f. Sub-Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan
g. Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 4 (empat) masukan, 32 (tiga puluh dua) urusan, 12 (dua belas) layanan data dan informasi, 30 (tiga puluh) orang, realisasi 4 (empat) masukan, 32 (tiga puluh dua) urusan, 12 (dua belas) layanan data dan informasi, 30 (tiga puluh) orang, realisasi capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub-Kegiatan, antara lain :
a. Sub-Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
b. Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);
c. Sub-Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 6 (enam) dokumen, realisasi 6 (enam) dokumen, realisasi capaian 100 % (seratus persen), pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub-Kegiatan antara lain :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Sub-Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan

b. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target 75 (tujuh puluh lima) dokumen realisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen, realisasi capaian 100 % (seratus persen), pada Kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100 % (seratus persen);

b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan

h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

b. Sub-Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

c. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

d. Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

e. Sub-Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

f. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perangkat Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan

g. Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100%

3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target 75 dokumen, realisasi 75 dokumen, realisasi capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub-Kegiatan, antara lain :

a. Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

b. Sub-Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

c. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

d. Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

e. Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

f. Sub-Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen);

g. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen); dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

h. Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100% (seratus persen).

4) Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja.

5) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program/kegiatan/sub-kegiatan antara lain :

a) Keterbatasan kewenangan, terkait dengan regulasi pelaksanaan Program dalam pencapaian target, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;

b) Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Lemahnya koordinasi antar-bidang perencanaan;

d) Hasil evaluasi dan pengendalian belum dipedomani secara optimal;

e) Fungsi dan peran Bappeda belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan

f) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan.

6) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD.

Adanya Permasalahan-permasalahan di atas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja beberapa Program Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021 - 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
   - Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala;
   - Meningkatkan capaian target kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan;
   - Mempertahankan dan berupaya meningkatkan pencapaian target kinerja dengan sebaik-baiknya;
   - Melakukan terobosan dengan menciptakan perencanaan yang inovatif untuk menumbuhkan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
   - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana; dan
   - Perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	90		88,50	72,78	82,24	88,85		
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61	31	9	9	100,00	12	52	85,25
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	13	5	5	100,00	5	23	88,46
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	12	0	0	-	4	16	80,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	2	2	2	100,00	1	5	100,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	30	12	6	6	100,00	6	24	80,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.340	3336	1392	1392	100,00	1.668	6.396	76,69

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1	1	100,00	0	0	#DIV/0!
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	10	4	4	100,00	5	19	76,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	2	-	-	-	1	3	60,00
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30	6	3	3	100,00	6	15	50,00
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00
		Jumlah Pakaian	290	4	175	175	100,00	145	324	111,72
		Jumlah ASN	300	90	60	60	100,00	60	210	70,00
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	290	4	3	3	100,00	145	152	52,41
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	90	60	60	100,00	60	210	70,00
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	3	3	100	1	7	140,00
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	6	4	4	100,00	2	12	80,00
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	3	3	100,00	2	9	90,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	7	4	4	100,00	2	13	86,67

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	4	4	4	100,00	2	10	100,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795	300	109	109	100,00	150	559	70,31
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	325	10	5	5	100,00	65	80	24,62
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	5	5	100,00	5	12	240,00
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	5	0	0	-	0	5	-
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	2	36	36	100,00	5	43	860
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	166	41	41	100,00	14	221	283,33
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105	42	21	21	100,00	21	84	80,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	56	28	28	100,00	28	112	80,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180	65	8	8	100,00	6	79	43,89
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	660	144	13	13	100,00	11	168	25,45
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	96,65	100	93,74	93,74	100	290	290,39
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	123	7	7	7	100,00	24	38	30,89
		Jumlah Pendampingan perencanaan	290	59	59	59	100,00	59	177	61,03

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	10	3	2	2	100,00	2	7	70,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	26	26	26	100,00	3	55	366,67
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	26	26	26	100,00	3	55	366,67
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	2	2	2	100,00	1	5	83,33
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90	36	20	20	100,00	20	76	84,44
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	23	4	3	3	100,00	4	11	47,83

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	25	8	4	4	100,00	5	17	68,00
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	160	64	32	32	100,00	32	128	80,00
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	29	7	11	11	100,00	12	30	103,45
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	1	0	0	-	0	1	100,00
		Jumlah Personil Pembinaan Data	150	112	56	56	100,00	30	198	132,00
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	150	86	56	56	100,00	30	172	114,67
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	14	6	6	100,00	6	26	200,00
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	40	8	2	2	100,00	8	18	45,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
44	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	0	0	0	-	0	0	-
45	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	95,6	100	94,55	94,55	100	290	290,15
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	88,89	100	93,65	93,65	100	283	282,54
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	97,34	100	92,98	92,98	100	290	290,32
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	375	147	75	75	100,00	74	296	78,93
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	22	11	11	100,00	11	33	60,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55	22	11	11	100,00	11	33	60,00
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55	22	11	11	100,00	11	44	80,00
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	60	24	13	13	100,00	13	50	83,33
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	60	24	13	13	100,00	13	50	83,33

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	60	24	13	13	100,00	13	50	83,33
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	15	7	2	2	100,00	1	10	66,67
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185	66	37	36	97,30	37	139	75,14
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	30	12	6	6	100,00	6	18	60,00
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	12	6	6	100,00	6	18	60,00
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	6	6	6	100,00	6	12	40,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	3	1	0	-	1	3	60,00
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	25	10	5	5	100,00	5	15	60,00
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	10	5	5	100,00	5	15	60,00
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	10	5	5	100,00	5	15	60,00
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	3	3	3	100,00	1	6	120,00
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	350	142	75	75	100,00	70	287	82,00
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	6	2	2	100,00	1	9	180,00
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	90	36	20	20	100,00	18	74	82,22
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	36	20	20	100,00	18	74	82,22
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	36	20	20	100,00	18	74	82,22

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	4	1	1	100,00	1	6	120,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Bappeda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

Selanjutnya peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Bappeda mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang perencanaan;
3. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang perencanaan;
4. Penyusunan laporan di bidang perencanaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Kerja tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai. Upaya perbaikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang dilakukan telah menghasilkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya-upaya ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, responsif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun untuk tahun 2026 Bappeda mengangkat Isu Strategis yaitu :

1. Perencanaan Daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui sistem kelembagaan yang produktif, kolaboratif dan akuntabel; dan
3. Keterpaduan perencanaan antara pusat dan Daerah serta sektoral dan kewilayahan/regional.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD diantaranya:

a) Belum optimalnya perumusan sasaran Program/kegiatan/sub kegiatan berbasis kinerja , kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
   - belum tersedianya analisis capaian pembangunan berbasis inidkator kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan; dan
   - belum tersedianya data dan informasi capaian kinerja yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

b) Rendahnya akuntablitas perencanaan dan pengukuran kinerja dalam standard SAKIP, hal ini disebabkan rendahnya kepedulian PD dalam penyediaan standar dokumen berbasis penilaian SAKIP.

c) Masih belum optimalnya fokus kebijakan Daerah terhadap dukungan prioritas nasional dan peningkatan pencapaian IPM masih dibawah rata-rata capaian daerah lainnya, hal ini disebabkan kurangnya Informasi dan data dukung terhadap kebijakan IPM dan dukungan terhadap prioritas nasional.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian Program nasional/internasional seperti NSPK, SPM,SDGs.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Bappeda memiliki konstribusi dalam mendukung dan mengoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian misi pertama, yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (1) meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten; (2) meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah dengan indikator sasaran indeks persepsi anti korupsi; (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik indeks persepsi dengan indikator sasaran kualitas pelayanan publik. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran pertama yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja Bappeda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja Program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. Sasaran Bappeda tahun 2024 “ Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah “ dengan indikator pertama score penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah nilai capaian kinerja 140,42 % (seratus empat puluh koma empat puluh dua persen) dengan kategori sangat baik, hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 2,40 (dua koma empat puluh). Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa langkah yang dilakukan oleh Bappeda antara lain pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang efisiens dan akurat dan penyiapan dokumen

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Inovasi yang akan diusulkan untuk penilaian PPD dengan berkolaborasi bersama PD teknis terkait dan melakukan analisis serta penyaringan inovasi yang mempunyai dampak dan daya ungkit untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk indikator kedua rata-rata capaian indikator sasaran Daerah dengan nilai capaian kinerja 101,40 % (seratus satu koma empat puluh persen), hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 97,34 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh empat) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 96 (sembilan puluh enam). Adanya komitmen dari kepala PD dalam pencapaian target sasaran Daerah yang tertuang dalam perjanjian kinerja serta kolaborasi dan sinergitas dengan instansi/lembaga terkait langsung dengan indikator sasaran merupakan faktor pendukung pencapaian pada indikator kinerja rata-rata capaian sasaran Daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Tabel TC 30 dibawah ini:

TABEL TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8			12	13		14
1	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah			2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	3,37	2,50	2,60	
2	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah			94.00	95.00	96.00	96.50	97	97,34	97,34	97,84	

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahahan Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun tantangan yang dihadapi Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan Daerah dari level nasional, provinsi, kabupaten dan desa;
2. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
3. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan; dan
5. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja Bappeda.

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki beberapa peluang yang harus dioptimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dalam upaya peningkatan aktifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan Daerah;
3. Memperkuat sinergi perencanaan pembangunan Daerah dengan seluruh PD dan seluruh *strakeholder* dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas;
4. Dukungan pembiayaan pembangunan dalam bentuk Program dan kegiatan berasal dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan;
6. Pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan lebih baik.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang stategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu isu strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Isu yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Bappeda :

a) Rendahnya akuntablitas perencanaan dan pengukuran kinerja dalam standar SAKIP.

Capaian SAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 72,78 dan 2023 menunjukan bahwa capaian komponen perencanaan masih menunjukkan nilai yang belum sesuai target yang di tetapkan. kondisi ini tentunya akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran (ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi), inefisiensi anggaran, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Bappeda memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan Daerah efektif, akuntabel, dan berbasis kinerja, sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dan perencanaan pembangunan Daerah memiliki hubungan yang erat dalam memastikan bahwa setiap Program dan kegiatan pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan SAKIP yang baik, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi pembangunan, sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. berdasarkan hal tersebut Bappeda berperan dalam hal :

1. Perencanaan Berbasis Kinerja *(Performance-Based Planning);*
2. Mengoptimalkan Penggunaan Data dalam Perencanaan;
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Antar-PD; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Memantau dan Mengevaluasi Capaian Kinerja Perencanaan;

b) Belum optimalnya fokus kebijakan daerah terhadap dukungan Prioritas Nasional

Agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat, maka kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Program yang dilaksanakan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, sebagai lembaga perencana utama di Daerah, Bappeda memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan daerah selaras dengan prioritas nasional. Bappeda berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan evaluator dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berkontribusi terhadap pencapaian target nasional. Bappeda berperan dalam hal :

- ✓ Menyesuaikan RPJMD & RKPD dengan RPJMN dan RKP;
- ✓ Mengkoordinasikan OPD agar program selaras dengan kebijakan pusat;
- ✓ Mengoptimalkan anggaran daerah agar mendukung program nasional;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap kebijakan Daerah;
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan berbasis kinerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2026, Bappeda melakukan *review* terhadap rancangan RKPD, melakukan analisis kebutuhan ditemukan ada beberapa yang harus dirubah atau ditambah baik target maupun pagu anggaran dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Adanya penyesuaian indikator, target, satuan dan *output* pada sub-kegiatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Efisensi anggaran pada sub-kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
3. Penambahan sub-kegiatan pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD;
4. Penyesuaian pagu pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam rangka mengakomodir gaji dan tunjangan PPPK;
5. Penambahan pagu pada sub-kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur verifikator keuangan;
6. Penambahan pagu pada sub kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada SKPD dalam rangka peningkatan kualitas *output* sub-kegiatan;
7. Penambahan pagu pada sub kegiatan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD dalam rangka peningkatan kualitas *output* sub-kegiatan;
8. Penyesuaian pagu pada sub-kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
9. Penyesuaian pagu pada sub-kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
10. Penyesuaian pagu sub-kegiatan penyediaan bahan logistik kantor;
11. Penyesuaian sub-kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
12. Penambahan pagu sub-kegiatan penyediaan bahan material;
13. Penyesuaian pagu sub-kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
14. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dalam rangka penambahan jumlah dokumen pelaksanaan dukungan sistem yang akan dilaksanakan;
15. Penambahan sub-kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, berdasarkan evaluasi dan inventarisasi BMD bahwa kondisi kendaraan roda dua banyak yang rusak berat;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

16. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan pengadaan mebel dalam rangka pengadaan meubelair ruangan kepala, sekretaris, seluruh kepala bidang perencanaan;
17. Penyesuaian pagu sub-kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
18. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam rangka penambahan belanja pembayaran listrik;
19. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dalam rangka penyediaan penambahan pagu jasa keamanan dan *cleaning service*;
20. Pergeseran pagu sub-kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ke sub-kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam rangka menyesuaikan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Penambahan pagu sub-kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, adanya perubahan status 13 kendaraan jabatan menjadi kendaraan operasional;
22. Penyesuaian pagu sub-kegiatan pemeliharaan mebel;
23. Penambahan pagu pada sub-kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam rangka pemeliharaan taman kantor, rumah dinas jabatan, *lift*, bagunan gedung kantor Bappeda (Renovasi Interior Ruang Pejabat Struktural/Kabid, Renovasi *Rooftop*);
24. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam rangka pemeliharaan komputer/printer, AC, listrik dan pergantian bola lampu, instalasi air, pemeliharaan videotron, travo, *sound sistem*, CCTV, jaringan internet, pemeliharaan publik *address*, PABX;
25. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

26. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
27. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan konsultasi publik;
28. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan forum PD/lintas PD dalam rangka pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (rancangan Rencana Kerja 2027);
29. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota;
30. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
31. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
32. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
33. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
34. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen profil pembangunan daerah;
35. Penambahan pagu pada sub-kegiatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD semester I dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD semester II;
36. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
37. Penambahan sub-kegiatan pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah;
38. Penambahan sub-kegiatan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rangka penerapana sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah;

39. Penanbahan sub-kegiatan pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota;
40. Penambahan anggaran pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan renja perubahan PD;
41. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang pemerintahan dalam rangka asistensi dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan;
42. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang pemerintahan;
43. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dalam rangka penytusunan rencana kebijakan tata kelola kota Tenggarong sebagai pusat budaya daerah dan kebijakan pembangunan daerah berbasisi kawasan (implementasi kawasan pedesaan);
44. Penyesuaian pagu pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan Renja-PD dibawah koordinasi bidang pembangunan manusia;
45. Penambahan anggaran sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang pembangunan manusia dalam rangka asistensi dokumen perencanaan PD bidang pembangunan manusia;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

46. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang pembangunan manusia dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
47. Penambahan anggaran sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dalam rangka penyusunan desain kebijakan transformasi sosial Kutai Kartanegara dan rakor tematik stunting/TPPS, penyusunan RAT kemiskinan;
48. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan Renja-PD dibawah koordinasi bidang perekonomian;
49. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang perekonomian dalam rangka asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD bidang perekonomian;
50. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang perekonomian dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
51. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dalam rangka penyusunan rekomendasi pembangunan kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK);
52. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Rencana Kerja dan perubahan Renja-PD di bawah koordinasi bidang SDA;
53. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang SDA dalam rangka asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD bidang SDA;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

54. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang SDA dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA;
55. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA dalam rangka penyusunan desain kebijakan transformasi ekonomi Kutai Kartanegara;
56. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Rencana Kerja dan perubahan Rencana Kerja PD dibawah koordinasi bidang infrastruktur;
57. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang infrastruktur dalam rangka asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD bidang infrastruktur;
58. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang infrastruktur dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
59. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dalam rangka analisis prioritas pembangunan jaringan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan penelaah standarisasi kebutuhan alokasi perencanaan infrastruktur;
60. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Rencana Kerja dan perubahan Renja-PD dibawah koordinasi bidang Kewilayahan;
61. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang kewilayahan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam rangka asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD bidang kewilayahan;

62. Penyesuaian anggaran pada sub-kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD bidang kewilayahan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan; dan
63. Penambahan anggaran pada sub-kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen analisis kebutuhan infrastruktur 20 (dua puluh) kecamatan yang terkait akses jalan dan jembatan, bangunan kantor pelayan publik, layanan air bersih, terminal, fasilitasi perumahan dan pemukiman, RTH dan sistem energi dan pelaksanaan rakor tematik.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggarong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	25.275.196.453	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggarong	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	35.891.516.980	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	dokumen	550.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dokumen	400.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	150.000.000	Penyusunan Renja 2027, Perubahan Renja 2026,
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	dokumen	0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	100.000.000	Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Per Triwulan
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	1	dokumen	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Laporan	100.000.000	
5							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	dokumen	0	
6							Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000	Berita Acara Hasil Faorum Perangkat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
							yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	17.752.943.365	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	16.992.992.287	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.668	Orang/Bulan	17.419.083.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.860	Orang/Bulan	16.542.992.287	Gaji dan Tunjangan, PPPK
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	308.859.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan	5	Laporan	425.000.000	Penyusunan laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	25.000.000	Penyusunan Laporan Prognosisi Realisasi Anggaran
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	8	dokumen	350.000.000	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen RKBMD, Perubahan RKBMD
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan	1	Laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendali	2	Laporan	100.000.000	Penyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						an Barang Milik Daerah pada SKPD				
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang di rekonsiliasi	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	3	Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	150.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan serta laporan Inventarisasi
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	365.000.000	
			Jumlah Pakaian	0	Stel								
			Jumlah ASN	60	Orang								
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Juumlah laporan Data Pendataan Pegawai	4	dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	4	dokumen	25.000.000	Penyusunan Dok DUK, Pemangku Jabatan, Anjab ABK, SIMPEG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									Administrasi Kepegawaian				
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	JumlahLaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	75.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	JumlahLaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	60.000.000	Penyusunan Dok IKI, PK, SKP, Pakta Integritas
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah pesertai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	280.000.000	Pelaksanaan Bimbingan teknis Tematik
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.754.901.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	2.156.959.800	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan ATK
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan logistik	9	Jenis	450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik	2	Paket	300.000.000	Penyediaan Makan Minum, Logistik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									Kantor yang Disediakan				
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	3.350	Kotak								
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan	2.090	Kotak								
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Cetakan	950	Eksemplar	94.901.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1	Paket	94.901.800	Cetak Banner, spanduk, Kalender, Map,baliho
			Jumlah penggandaan	5.100	Lembar								
			Jumlah Cetakan Kalender	200	Buah								
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaanyang Disediakan	2.500	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	50.000.000	Media Online dan Cetak
			Jumlah Kontrak Advetorial	2	Kali								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
21	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	20	Jenis	45.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	86.250.000	Dalam rangka Material Pameran
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	150	orang/kali	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah arsip pada unit pencipta dan pengolah arsip (UPPA) dan arsip pada unit kearsipan Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) dan Arsip pada unit kearsipan (UK)	65	berkas	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	100.000.000	Data Arsip Inaktif
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pearngkat Daerah	1	Aplikasi	65.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	725.808.000	Video Tematik, KomProfil, Tenaga Ahli dan Websitenten Mwdia, Video

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	197.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	2.328.925.000	
25							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	Unit	1.800.000..000	Pengadaan Kendaraan Roda Dua
26							Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106	Unit	1.200.000.000	Mebel Ruang Kerja Pejabat dan Meja Portabel aula ruang rapat
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan gedung kantor	14	Unit	197.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	132.000.000	Pengadaan Scanner, Pengadaan Internet Portabel Starlink, Pengadaan Mesin Kopi Portabel
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2.272.313.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3.829.920.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									yang disediakan				
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.521.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.800.000.000	Pembayaran Listrik.Air, Telepon, Internet
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	750.413.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.029.920.000	Jasa Cleaning service dan Jasa Keamanan
			Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	Bulan								
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1.997.537.738	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	4.593.657.740	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	239.429.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	8	Unit	205.870.120	Roda empat : 6 unit Roda dua : 2 unit

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	atau Kendaraan Dinas Jabatan						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6									
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233.002.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	208.122.620	Roda Empat : 2 unit Roda Dua : 38 Unit
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3									
32	Pemeliharaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Sofa dan Meja Kerja
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	kali	755.676.838	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	Unit	2.800.000.000	Pemeliharaan gedung kantor, Rumah dinas jabatan, taman,lift, renovasi interior ruang rapat pejabat dan pendukung sarana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													kelistrikan solar panel
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132	kali	719.428.660	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	Unit	1.354.665.000	Komputer/Printer,AC, Listrik dan pergantian Bola Lampu, Instalasi Air, Pemeliharaan Videotron, Travo, Sound Sistem, CCTV, Jaringan Internet, Pemeliharaan Publik Address, PABX
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.212.400.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Skor Penilaian Dokumen Rencana Daerah	100	Persen	3.725.000.000	
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	27	dokumen	2.125.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Dokumen Rencana Daerah Yang Ditetatapkan	4	Regulasi	1.450.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Pendampingan perencanaan	58	Lembaga /OPD								
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali								
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum								
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali								
35	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokumen	600.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	dokumen	200.000.000	Dokumen Ranwal RKPD 2027
36	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD	240.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	450.000.000	Dokumen Telaah Kebijakan Nasional, Provinsi Kaltim, Dokumen Pelaporan Pengusulan Anggaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													melalui pemerintah pusat/provinsi
			Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	dokumen								
37	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Kali	90.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	50.000.000	BA Konsultasi Publik RKPD 2027
38	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3	Forum	45.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	50	Berita Acara	50.000.000	BA Forum PD/Lintas PD
39	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Kali	250.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	150.000.000	BA Musrenbang Kabupaten/Kota
40	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	dokumen	200.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20	Usulan	100.000.000	Usulan Musrenbang kecamatan yang diverifikasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
41	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD)	4	dokumen	700.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	450.000.000	Dokumen RKPD 2027, Dokumen PRKPD 2026
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	Masukan	1.034.900.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Yang dipublikasikan dalam SDI Kukar	2	Dokumen	1.050.000.000	
			Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan								
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	12	layanan data dan informasi								
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancangan Regulasi								
			Jumlah Personil	30	Orang								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Pembinaan Data										
42	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	dokumen	452.500.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencnaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen	400.000.000	Dokumen Analisis Data dan Informasi Pembangunan Tematik dan berbasis Spasial
			Jumlah Dokumen analisis data Kemiskinan	1	dokumen								
43	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tenggarong	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	urusan	480.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tenggarong	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200	Orang	500.000.000	Pendampingan Penyediaan data sektoral dan Spasial
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	12	layanan data dan informasi								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancangan Regulasi								
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang								
44	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	102.400.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	150.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	dokumen	1.052.500.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	8	Laporan	700.000.000	
45	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	8	dokumen	202.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	300.000.000	Laporan pengendalian pelaksanaan RKPD Per Triwulan
46	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan	1	dokumen	150.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggarong	Jumlah Kerja Sama Daerah	5	Kerja Sama	150.000.000	Laporan Pengendalian Pelaksanaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Kerjasama Daerah						yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				Program Kerja sama daerah
47	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	dokumen	700.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	250.000.000	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Semester II, 2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Semester I, 3. Laporan Hasil Monitoring Lapangan Pelaksanaan Program Prioritas, 4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tematik
							Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Diimplementasikan	6	Sistem Informasi	525.000.000	SIPD dan Aplikasi Pendukung
48							Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi	Tenggarong	Jumlah Data dalam Sistem Informasi	6	Dokumen	75.000.000	Pengelolaan data dan Sistem Informasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
							Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				pendukung perencanaan daeraah
49							Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6	Dokumen	150.000.000	Laporan Dukungan Penerapan Aplikasi Pendukung Perencanaan Daerah
50							Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	6	Dokumen	300.000.000	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Penerpaan APLIKASI Perencanaan Pembangunan Daerah
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang	100	Persen	3.109.249.440	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Tenggarong	Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang	25,94	Nilai	4.200.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	PEMBANGUNAN DAERAH		perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD				PEMBANGUNAN DAERAH		Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen				Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	24,45	Nilai		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	Persen				Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	24,42	Nilai		
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	75	dokumen	1.176.750.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana	101	dokumen	1.400.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			RPJMD dan RKPD)						Perangkat daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencnaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang DiKoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	22	dokumen	150.000.000	Laporan pendampingan penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Pemerintahan
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokumen	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	11	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	Laporan	200.000.000	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	Laporan	300.000.000	Penyusunan Rencana Kebijakan Tata Kelola Kota Tenggarong sebagai Pusat Budaya Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah berbasis Kawasan (Implementasi Kawasan Perdesaan)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	dokumen	236.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	13	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen	115.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunna Manusia	13	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunna Manusia
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	300.000.000	Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Sosial KUTAI KARTANEGARA, Rakor Tematik Stunting / TPPS, Penyusunan RAT Kemiskinan
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2	dokumen								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	37	dokumen	977.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	46	dokumen	1.400.000.000	
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	67.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Perekonomian
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	6	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen	6	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Daerah Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Perekonomian				
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	400.000.000	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	90.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang SDA
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah	5	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang SDA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									Bidang SDA				
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokumen	255.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	200.000.000	Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Ekonomi KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70	dokumen	954.999.440	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	dokumen	1.400.000.000	
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Infrastruktur
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna	4	Laporan	150.000.000	Pendampingan Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		n dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur				PD Bidang Infrastruktur
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	dokumen	249.999.620	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re	2	Laporan	350.000.000	Analisis Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan Untuk Mendukung

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				Daerah Bidang Infrastruktur		nja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Penelahaan Standarisasi Kebutuhan alokasi perencanaan Infrastruktur
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	40	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Kewilayahan
72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Kewilayahan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
73	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokumen	249.999.820	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
74	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Laporan	250.000.000	Dokumen Analisis Kebutuhan Infrastruktur 20 Kecamatan yang terkait Akses Jalan dan Jembatan, Bangunan Kantor Pelayanan Publik, Layanan Air Bersih, Terminal, Fasilitas

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													Perumahan dan Permukiman, Ruang Terbuka Hijau dan Sistem Energi serta Pelaksanaan Rakor Tematik
Total Pagu Indikatif						32.596.845.893	Total Pagu Indikatif					38.942.454.827	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas.

   Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

   Misi:
   1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
   2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien

2. Sasaran Strategis.

   Kementrian PPN/Bappenas merumuskan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

   - ✓ Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
   - ✓ Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional;
   - ✓ Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan
   - ✓ Terwujudnya kinerja Kementrian PPB/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

   a. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan:

      - ✓ Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti *(evidence based planning);*
      - ✓ Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan;
      - ✓ Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;
      - ✓ Meningkatkan kualitas pengelolaan prioritas nasional bidang geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- ✓ Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

b. Strategi Nasional:

- ✓ Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045;
- ✓ Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi;
- ✓ Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra Pembangunan;
- ✓ Melakukan koordinasi multi pihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* di tingkat pusat dan di daerah; dan
- ✓ Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Isu Strategis dan Permasalahan.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam Renstra Kementrian PPN/Bappenas mencakup :

- ✓ Perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil.
  Mengoptimalkan rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan
- ✓ Pengelolaan manajemen Kementrian PPN/Bappenas.
  Pengintegrasian antar unit kerja dan meregulasi SOP.

5. Relevansi Renstra Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
  Implikasi terhadap pelayanan Bappeda: Penguatan dan pendampingan proses perencanaan kepada perangkat daerah serta pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
- Daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Implikasi terhadap pelayanan Bappeda: Optimalisasi inovasi dalam proses perencanaan pembangunan agar lebih adaptif dan kreatif terhadap kebutuhan pembangunan.

- Tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien
- Implikasi terhadap pelayanan Bappeda.
  Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses pembangunan.

Relevansi Renstra Bappenas 2020-2024 dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sangat kuat dalam mendukung terlaksananya perencanaan yang berorientasi hasil, optimalisasi inovasi, dan penguatan tata kelola. Melalui program seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, Bappeda bertanggung jawab besar dalam mewujudkan target sasaran pembangunan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka terdapat rumusan tujuan dan sasaran dari PD Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilakasanakan PD, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Pada *logframe* perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani yang merupakan tujuan di dalam RPJMD, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut yaitu " Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah".

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	2,60 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	95,00	96.00	96.50	97.00	Indikator Kinerja Utama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi dan capaian sasaran pembangunan Daerah sebagai salah satu indikatornya.
3. Konsistensi dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026, yaitu " Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah " dan " Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah "

b) Rekapitulasi Program

Dalam Renja tahun 2026 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) Program yaitu: 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan 3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjut 3 (tiga) Program tersebut dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan dan sub-kegiatan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sub-kegiatan. Program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut disusun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif). Kebutuhan dana pagu indikatif dari seluruh Program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut pada Rencana Kerja tahun 2026 sebesar Rp38.942.454.827,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

c) Rumusan Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD tidak ada, seluruh Program dan kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD Tahun 2026

d) Tabel Rencana Program/Kegiatan /Sub Kegiatan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Tenggarong	88,85 (AA)	35.891.516.980	APBD		88,85 (AA)	33.594.591.980
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	8	400.000.000	APBD		10	650.000.000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	2	150.000.000	APBD		3	250.000.000
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tenggarong	4	100.000.000	APBD		4	150.000.000
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	Tenggarong	1	100.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Tenggarong	6	16.992.992.287	APBD		6	18.157.415.474
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		1.860	16.542.992.287	APBD		1.860	17.707.415.474

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tenggarong	5	425.000.000	APBD		5	425.000.000
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Tenggarong	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	8	350.000.000	APBD		8	400.000.000
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	2	100.000.000	APBD		2	100.000.000
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		4	200.000.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	8	365.000.000	APBD		8	525.000.000
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	4	25.000.000	APBD		4	25.000.000
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	JumlahLaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	Tenggarong	4	60.000.000	APBD		4	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Tenggarong	40	280.000.000	APBD		60	400.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Tenggarong	8	2.156.959.800	APBD		8	2.597.161.800
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	2	300.000.000	APBD		2	450.000.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	94.901.800	APBD		1	94.901.800
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tenggarong	2	50.000.000	APBD		2	100.000.000
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tenggarong	4	86.250.000	APBD		4	45.000.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tenggarong	110	600.000.000	APBD		110	700.000.000
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	5	100.000.000	APBD		5	100.000.000
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	4	725.808.000	APBD		5	907.260.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	Tenggarong	100	2.328.925.000	APBD		100	197.500.000
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	Tenggarong	25	996.925.000	APBD		0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tenggarong	106	1.200.000.000	APBD		0	0
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tenggarong	11	132.000.000	APBD		3	197.500.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Tenggarong	12	3.829.920.000	APBD		12	4.135.455.106
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	1.800.000.000	APBD		12	1.800.000.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	2.029.920.000	APBD		12	2.335.455.106
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	persen	Tenggarong	100	4.593.657.740	APBD		100	6.932.059.600
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tenggarong	8	205.870.120	APBD		8	205.870.120
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tenggarong	25	208.122.620	APBD		25	408.122.620
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	Tenggarong	2	25.000.000	APBD		2	50.000.000
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11	2.800.000.000	APBD		4	4.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11	1.354.665.000	APBD		11	2.268.066.860
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Skor Penilaian Dokumen Rencana Daerah	Persen	Tenggarong	100	3.725.000.000	APBD		9	3.175.000.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Dokumen Rencana Daerah Yang Ditetatapkan	Regulasi	Tenggarong	4	1.450.000.000	APBD		4	1.150.000.000
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	3	450.000.000	APBD		3	150.000.000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	59	50.000.000	APBD		59	50.000.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Tenggarong	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Tenggarong	20	100.000.000	APBD		10	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Tenggarong	2	450.000.000	APBD		3	450.000.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Yang dipublikasikan dalam SDI Kukar	Dokumen	Tenggarong	2	1.050.000.000	APBD		2	800.000.000
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencnaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Tenggarong	2	400.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Tenggarong	200	500.000.000	APBD		200	350.000.000
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Tenggarong	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Laporan	Tenggarong	8	700.000.000	APBD		4	700.000.000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Tenggarong	4	300.000.000	APBD		4	300.000.000
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		5	150.000.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Tenggarong	4	250.000.000	APBD		4	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Diimplementasikan	Sistem Informasi	Tenggarong	6	525.000.000	APBD		6	525.000.000
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Tenggarong	6	75.000.000	APBD		6	75.000.000
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	6	150.000.000	APBD		6	150.000.000
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	300.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	Tenggarong	25,94	4.200.000.000	APBD		25,94	6.050.000.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai		24,45		APBD		24,45	
		Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai		24,42		APBD		24,42	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dokumen	Tenggarong	101	1.400.000.000	APBD		76	1.850.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencnaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang DiKoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	22	150.000.000	APBD		11	250.000.000
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	11	150.000.000	APBD		11	250.000.000
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	11	100.000.000	APBD		11	200.000.000
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	2	300.000.000	APBD		2	200.000.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	26	150.000.000	APBD		13	250.000.000
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	13	150.000.000	APBD		13	250.000.000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna Manusia	Laporan	Tenggarong	13	100.000.000	APBD		13	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	3	300.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	Tenggarong	46	1.400.000.000	APBD		37	1.900.000.000
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	12	150.000.000	APBD		6	200.000.000
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Perekonomian	Laporan	Tenggarong	6	150.000.000	APBD		6	250.000.000
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	6	100.000.000	APBD		6	200.000.000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	1	400.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	10	150.000.000	APBD		5	200.000.000
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen	Laporan	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		5	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA								
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	5	100.000.000	APBD		5	200.000.000
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	Tenggarong	100	1.400.000.000	APBD			2.300.000.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	8	150.000.000	APBD		4	250.000.000
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		4	250.000.000
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	4	100.000.000	APBD		4	200.000.000
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	2	350.000.000	APBD		2	450.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	40	150.000.000	APBD		20	250.000.000
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	20	150.000.000	APBD		20	250.000.000
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	20	100.000.000	APBD		20	200.000.000
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	2	250.000.000	APBD		2	450.000.000
	Total Pagu Indikatif					38.942.454.827				42.819.591.980

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan pelaksanaan tahunan dari Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Daerah jangka menengah. Rencana Kerja Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap Program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra PD.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai *leading* sektor yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut:

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahaN. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD.

Secara hierarki penyusunan Renja-PD merupakan produk dasar bagi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PD menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Rencana Kerja BKPSDM tahun 2026 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di BKPSDM pada tahun 2026 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran Program yang mendukung RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Ren Kerja BKPSDM tahun 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Rencana Kerja BKPSDM ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rancangan Rencana Kerja tahun 2026 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di BKPSDM dalam

menentukan prioritas Program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKPSDM untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan BKPSDM, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan Program BKPSDM, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan visi dan misi kepala Daerah terpilih dengan fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun 2026.

1.3.2 Tujuan :

a. Tersedianya dokumen perencanaan BKPSDM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKPSDM tahun 2026 dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.

d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan BKPSDM.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja BKPSDM terdiri dari 5 (lima) bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja-PD, fungsi Renja-PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RenjaPD, keterkaitan rencana strategis (Renstra) PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan Program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum rata-rata capaian kinerja BKPSDM tahun 2024 mencapai 101,53% (seratus satu koma lima puluh tiga persen) dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi” dan realisasi keuangan sebesar Rp26.238.883.745,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dari pagu anggaran Rp30.446.194.842,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 86,18% (delapan puluh enam koma delapan belas persen).

BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Program tahun anggaran 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

   Indikator kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” target kinerja 87,00 (delapan puluh tujuh) dengan realisasi 74,62 (tujuh puluh enam koma enam puluh dua) atau sebesar 85,77% (delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh persen).

   Capaian kinerja di atas merupakan capaian kinerja tahun 2024 dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dibawah target yang ditetapkan. Faktor penghambat capaian kinerja ini antara lain :

   a. Adanya perubahan cara / parameter penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh PD Turun;
   b. Kurangnya koordinasi antar bidang; dan

c. Sistim tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub-kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh BKPSDM adalah 100% (seratus persen) dan 88,66% (delapan puluh delapan koma enam puluh enam persen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD, target kinerja 20 (dua puluh) dokumen, dengan realisasi 20 (dua puluh) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target yang ditetapkan.
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD, target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 100% (seratus persen) dari target kinerja.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 15 (lima belas) dokumen, dengan realisasi 15 (lima belas) dokumen atau 100,% (seratus persen) dari target kinerja.
   - Evaluasi Kinerja PD, target kinerja 3 (tiga) dokumen, dengan realisasi 3 (tiga) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 15 (lima belas) laporan, dengan realisasi 15 (lima belas) laporan atau 100% (seratus persen) dari target kinerja.
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 1190 orang/bulan (seribu seratus sembilan puluh orang per bulan), dengan realisasi 874 orang/bulan (delapan ratus tujuh puluh empat orang per bulan) atau 73,45% (tujuh puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari target kinerja.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 (satu) laporan, dengan realisasi 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target kinerja 12 (dua belas) laporan, dengan realisasi 12 (dua belas) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen atau target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, target kinerja 30 (tiga puluh) orang, dengan realisasi kinerja 15 (lima belas) paket atau target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 50 % (lima puluh persen) dari target kinerja; dan
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 (lima puluh orang) orang, dengan realisasi 25 (dua puluh lima orang atau 50 % (lima puluh persen) dari target kinerja.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 8 (delapan) layanan, dengan realisasi 8 (delapan) layanan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 (satu) paket, dengan realisasi 1 (satu) paket atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 3 (tiga) paket, realisasi kinerja 3 (tiga) paket atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 3 (tiga) paket, dengan realisasi 3 (tiga) paket atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Bahan/Material, target kinerja 2 (dua) paket, realisasi kinerja 1 (satu) paket atau 50 % (lima puluh persen) dari target kinerja;
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi kinerja 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 (empat ratus lima puluh) dokumen, realisasi 450 (empat ratus lima puluh) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja; dan
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi kinerja 2 (dua) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100% (seratus persen), dengan realisasi kinerja 100% (seratus persen);
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 15 Unit, realisasi 15 Unit atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi kinerja 12 bulan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 1 (satu) laporan, dengan realisasi 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 (dua belas) laporan, dengan realisasi 12 (dua belas) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 (satu) laporan, dengan realisasi 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja; dan
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 (dua belas) laporan, dengan realisasi 12 (dua belas) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 15 (lima belas) unit, dengan realisasi 15 unit atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 15 (lima belas) unit, dengan realisasi 15 (lima belas) unit atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

2. Program Kepegawaian Daerah :

Indikator kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah yaitu "Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara" target kinerja 94 % (sembilan puluh empat persen) dengan realisasi 100 % (seratus persen) atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,1% (sembilan puluh sembilan koma satu persen). Capaian kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2024 melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini yaitu :

a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terbaru yang disesuaikan dengan SOTK PD yang menjadi dasar penyusunan *Bezetting* dan *Existing* pegawai sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan jabatan baik jabatan administrasi maupun jabatan fungsional.
b. Persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terhadap usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2024 sebesar 5.776 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) formasi.
c. Tersedianya anggaran dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan rekrutmen PPPK tahun 2024.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, target kinerja 1.262 (seribu dua ratus enam puluh dua) ASN, dengan realisasi 6.264 (enam ribu dua ratus enam puluh empat ASN atau 496,55% (empat ratus sembilan puluh enam koma lima puluh lima persen) dari target.

Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN melebihi target yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN adalah 100% (seratus persen), dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 1 (satu) lembaga, dengan realisasi 1 lembaga atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 2 (dua) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja; dan
- Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 1 (satu) laporan, dengan realisasi 1 (satu) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, target kinerja 2.583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) ASN, dengan realisasi 3.706 (tiga ribu tujuh ratus enam) ASN atau 143,48% (seratus empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dari target;

Faktor Pendukung capaian Target kinerja untuk Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, antara lain disebabkan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang sering berubah dari Kementerian PANRB.

Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 1 (satu) dokumen, realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja; dan
- Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, target kinerja 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) ASN, dengan realisasi 9.846 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam) ASN atau 827,29% (delapan ratus dua puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari target;

Faktor Pendukung capaian Target kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN kurang dari target kinerja, antara lain disebabkan :

1. Adanya perubahan metode/media pelatihan dari metode konvensional ke metode/media *online*;
2. Adanya jatah uji kompetensi gratis dari BKN yang semula dianggarkan 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) ASN, oleh BKN diberi jatah 4.000 (empat ribu) ASN tanpa dipungut biaya, sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun rincian capaian kinerja untuk sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan *Assesment Center*, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 12.093 (dua belas ribu sembilan puluh tiga) ASN, dengan realisasi 11.762 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua) ASN atau 97,26% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam persen) dari target;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Target kinerja untuk Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

1. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) masih rendah;
2. PNS belum memahami penyusunan SKP sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022; dan
3. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah.

Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

1. Perlunya ketegasan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak menyampaikan SKP PNS pada BKPSDM.
2. Perlu diadakan bimbingan secara berkelanjutan pada manajemen kinerja khususnya terhadap penyusunan SKP.

Capaian kinerja sub-kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 1 (satu) laporan, dengan realisasi kinerja 5 (lima) laporan atau 500 % (lima ratus persen) dari target kinerja;
- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 348 (tiga ratus empat puluh delapan) orang, dengan realisasi kinerja 1.102 (seribu seratus dua) orang atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 35 (tiga puluh lima) dokumen, dengan realisasi kinerja 23 (dua puluh tiga) dokumen atau 65 % (enam puluh lima persen) dari target kinerja.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional” target kinerja 26,00% (dua puluh enam persen) dengan realisasi 50,57% (lima puluh koma lima puluh tujuh persn) atau sebesar 194,50% (seratus sembilan puluh empat koma lima puluh persen) dari target.

Capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja Program ini antara lain :

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/lembaga/ penyelenggara pelatihan;
b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) JP pertahun
c. Tersedianya *Human Capital Development Plan*, meskipun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara;
d. Anggaran pengembangan kompetensi yang semakin meningkat;
e. Adanya kegiatan pelatihan menggunakan media *Online* (Daring); dan
f. Tersedianya ruang belajar di beberapa Perangkat Daerah sebagai tempat pengembangan kompetensi.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, target kinerja 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) ASN, dengan realisasi 6.533 (enam ribu lima ratus tiga puluh tiga) ASN atau 833,29 % (delapan ratus tiga puluh tiga persen) dari target kinerja;
    - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahkonkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) ASN, dengan realisasi 6.533 (enam ribu lima ratus tiga puluh tiga) ASN atau 833,29 % (delapan ratus tiga puluh tiga persen) dari target kinerja.
b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, target kinerja 6 (enam) laporan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan realisasi 6 (enam) laporan atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, target kinerja 12 (dua belas) orang, dengan realisasi 17 (tujuh belas) orang atau 141,67% (seratus empat puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari target kinerja; dan
- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 5 (lima) laporan, dengan realisasi 5 (lima) laporan 100 % (seratus persen) dari target kinerja.

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 pada tabel II.1 (T-C.29) sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (11 + 12 + 13 + 15)/10
5	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN																		
05.03	KEPEGAWAIAN																		
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80	61	65	70	75	80	80	42,45	54,94	75,42	80		-		-	72,00%
		Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	90	80	82	85	87	90	90	76,33	84,54	88,06	87		-		-	92,20%
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,89	85	86	87	88	89	89	84,94	92,7	74,62	75,36		-		-	94,48%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	110	24	23	24	23	23	227	153	20	10	9		-		-	80,62%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	7	6	7	6	6	64	42	2	3	3	1	33,33		33	75,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	15	15	15	15	15	150	106	15	5	5		-		-	84,00%
5.03.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2	2	2	2	2	13	5	3	2	1		-		-	76,92%
5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	89	15	15	15	15	15	164	116	15	15	15		-		-	89,02%
5.03.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	6480	1080	1080	1080	1080	1080	11880	9679	1407	874	1260	234	18,57		19	102,64%
5.03.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	1	100,00		100	100,00%
5.03.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	12	12	120	84	12	12	12	3	25,00		25	92,50%
5.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	2		-		-	85,00%
5.03.01.2.03.05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	2		-		-	85,00%
5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	1	2	2	3	2	13	6	1	2	2		-		-	69,23%
5.03.01.2.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	111	0	0	30	30	30	201	0	0	15	30		-		-	7,46%
5.03.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	50	50	50	50	50	280	120	1	25	50		-		-	52,14%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	7	7	8	8	8	46	21	7	8	8		-		-	78,26%
5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	1	3		-		-	72,22%
5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	3	3		-		-	83,33%
5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen											127		-		-	
5.03.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	0	0	2	2	2	9	0	0	1	1		-		-	11,11%
5.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	1		-		-	66,67%
5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	2	1	1		-		-	100,00%
5.03.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	450	450	450	450	450	3250	1900	47	450	450		-		-	73,75%
5.03.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	-	1	2	3			6	0	3	2	-		-		-	83,33%
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		-		-	100,00%
5.03.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											1		-		-	
5.03.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	1	1	1	9	7	142	15	1		-		-	607,41%
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		-		-	100,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	12	10	12		-		-	94,44%
5.03.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	60	12	12	12	12		-		-	60,00%
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	12	15		-		-	92,08%
5.03.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	15	15		-		-	95,05%
05.03.02		Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91,5	92	93	94	95	96	96	89,13	99,97	100	100		-		-	100,38%
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1407	1058	1147	1262	1365	1306	7545	3463	3183	6264	1365		-		-	171,11%
5.03.02.2.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1		-		-	90,00%
5.03.02.2.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	2	1	1	7	3	2	1	1		-		-	85,71%
5.03.02.2.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	6	1	1	0	1	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.01.08			Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	2	1	1	1	7	3	1	1	1		-		-	71,43%
5.03.02.2.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	2	0	0	0	5	4	0	2	0		-		-	120,00%
5.03.02.2.01.11			Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	1	1	1	1	1	7	3	2	1	1		-		-	85,71%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.02.2.01.12			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	2	1	1	1	1	7	3	2	1	1		-		-	85,71%
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2510	2790	2928	2583	2495	2473	15779	13939	2568	3706	2495		-		-	128,10%
5.03.02.2.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	2	2	2	2	1	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.02.02			Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	2	1	2	1	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.02.03			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	2	2	2	1	2	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.03		Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	680	560	560	560	360	360	3080	1737	749	9846	360		-		-	400,39%
5.03.02.2.03.01			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	285	380	380	380	180	180	1785	1023	566	1	180		-		-	89,08%
5.03.02.2.03.02			Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	1	1	1	1	1	9	5	2	1	3		-		-	88,89%
5.03.02.2.03.04			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	63	100	100	100	100	100	563	186	127	1	100		-		-	55,77%
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	13514	13084	12607	12093	11491	10854	73643	36395	8540	11762	11491		-		-	76,99%
5.03.02.2.04.01			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	1	1	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.04.03			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	1	1	1	5	10	6	1	1	1		-		-	80,00%
5.03.02.2.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	n/a	348	348	348	348	348	1740	365	176	5	348		-		-	31,38%
5.03.02.2.04.08			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	60	15	15	17	20	20	147	77	2	1	1		-		-	54,42%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.02.2.04.09			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15	35	35	30	30	30	175	43	2	23	30		-		-	38,86%
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	15,94	18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	26,64	39,98	29,64	50,57	24,64		-		-	451,16%
5.04.02.2.01		Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	6533	550		-		-	365,42%
5.04.02.2.01.03			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	6533	550		-		-	365,42%
5.04.02.2.02		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	673	120	122	112	106	112	1245	1023	502	747	106		-		-	182,49%
5.04.02.2.02.03			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	5	0	12	12	6	12	47	16	13	747	6		-		-	1651,06 %
5.04.02.2.02.07			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	6	5	4	5		-		-	150,00%

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.1 Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2024, terdapat satu Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana target kinerja 87 dan realisasi 74,62.

Faktor penghambat capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini antara lain sebagai berikut:

a. Adanya perubahan cara / parameter Penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh OPD Turun;
b. Kurangnya koordinasi antar bidang; dan
c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (97,26%)

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (86,89%)
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (50,00%)
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (50,00%)
d. Penyediaan bahan Logistik (33,33%)
e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (83,33%)
f. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (65,71%)

2.1.2 Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
n. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
r. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
s. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
t. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN
u. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
v. Pengelolaan Data Kepegawaian
w. Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
x. Pengelolaan Mutasi ASN
y. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN
z. Pengelolaan Promosi ASN
aa. Pengelolaan Assesment Center
bb. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
ö. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
aa. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
bb. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
ff. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

gg. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

ee. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

ff. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan

2.1.3 Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Kepegawaian Daerah (108,67%)
b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (194,50%)

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (496,35%);
b. Mutasi dan Promosai ASN (143,48%)
c. Pengembangan kompetensi Teknis (825,13%)
d. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (141,67%)

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai (500,00%)
b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum (833,29%)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Lemahnya koordinasi antar bidang;
c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
d. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online
e. Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin
g. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
h. Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan.
i. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah
j. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat
k. Proses penerimaan ASN tahun 2024 yang belum selesai dan menunggu penerbitan NIP PPPK
l. SOP belum sesuai dengan aplikasi
m. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan
n. Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar
o. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa
p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman tidak memuat tentang PNS penerima Beasiswa Tematik
q. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
r. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet
s. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (e-RPJMD, SIPD, SIMDA Keuangan, e-Pantau);
b. Penggunaan Teknologi ZOOM sebagai salah satu media Pelatihan/Bimbingan Teknis secara Daring
c. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
e. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI

Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
c. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
d. Penggunaan SIMPEG-Idaman yang terintegrasi dengan SIasn
e. Penerapan SIASN secara tepat guna dan tepat waktu;
f. Proses layanan berbasis online dan papperless;
g. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, yang berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
h. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
i. Tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian; dan
j. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 dan rencana kerja perubahan tahun 2023.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja Program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Untuk capaian sasaran strategis tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Capaian IKU Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	80	76,3	95,4	82	84,5	103	85	88,1	104	Meningkat
Rata-rata Capaian Kinerja						82	84,5	103	85	88,1	104	

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 antara lain:

1. Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian yang memudahkan pemberian layanan kepada seluruh ASN
2. Tersedianya aplikasi survei Kukar yang memudahkan pelaksanaan survei
3. Pengembangan kompetensi ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
4. Komitmen seluruh ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh ASN.

Meskipun target kinerja Indikator Kinerja Utama sudah tercapai, tetapi masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
   a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
   b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan oleh ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih lemah.
3. Kualitas Sarana dan Prasarana yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain disebabkan :
   a. Posisi layanan berada di lantai 3 (tiga), dan fasilitas *lift* kurang maksimal (sering mengalami kendala teknis) sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
   b. Belum adanya ruang runggu yang representati bagi ASN.

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan evaluasi dan revisi SOP layanan kepegawaian;
3. Memberikan kesempatan dalam peningkatan kompetensi terkait *Service Excellent;*
4. Mengoptimalkan fungsi website BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Peremajaan data ASN secara berkala (setiap ada perubahan data ASN) melali aplikasi SIMPEG-Idaman;
6. Meningkatkan peran atasan langsung dalam memverifikasi dokumen layanan kepegawaian;
7. Meningkatkan kompetensi teknis bagi pejabat pelaksana; dan
8. Mengusulkan anggaran untuk membangun ruang tunggu yang representatif bagi ASN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur PD dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.3 (T-C.30) berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.3 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	Indikator Tujuan BKPSDM													
1	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	42,45	54,94	75,42	80,00	90,00	Target kinerja tidak tercapai
	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM													
	Setingkat Impact													
1	Indeks Sistim Merit			80	82	85	87	89	76,33	84,54	88,06	87,00	89,00	
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi													
	Indikator Kinerja Kunci		.											
1			Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	82	84	86	88	90	46,68	58,14	50,31	58,25	59,00	Target kinerja tidak tercapai
	Indikator Kinerja Program													
	Setingkat *Outcome*													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	84,94	92,7	74,62	75,36	88,00	
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	89,13	99,97	100,00	100,00	95,00	
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	22,76	29,64	50,57	24,64	24,64	
	Indikator Kinerja Kegiatan													

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19,00	20,00	10,00	9,00	23,00	
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16,00	12,00	12,00	15,00	12,00	
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645,00	3.183,00	6.264,00	1.365,00	1.365,00	
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8.143,00	2.568,00	3.706,00	2.495,00	2.495,00	Target kinerja tidak tercapai
11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322,00	749,00	9.846,00	360,00	360,00	
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11.438,00	8.540,00	11.762,00	11.491,00	11.491,00	Target kinerja tidak tercapai
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280,00	610,00	6.533,00	550,00	200,00	
14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116,00	502,00	747,00	106,00	106,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu –Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian yaitu:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM;
i. Penguatan UPTD Tenggarong Seberang sebagai salah satu sarana pengembangan Komptensi ASN di lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara;
j. Peningkatan pemberian beasiswa bagi ASN yang mendapatkan Ijin tugas belajar;
k. Fasilitas rumah dinas dan perjalanan dinas bagi ASN yang dimutasi ke kecamatan terjauh karena kebutuhan organisasi;
l. Pelatihan ASN prapensiun selambat-lambatnya 5 (ima) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
m. Peningkatan layanan pemberian tanda jasa sesuai periode waktu, SOP dan usulan dari PD dan kecamatan yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditentukan dan disosialisasikan;
n. Peningkatan frekuensi sosialisasi tata cara pengisian/penginputan SKP sampai ke tingkat kecamatan; dan
o. Optimalisasi rencana penyebaran kebutuhan ASN baik di OPD maupun di ke kecamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terkait prioritas Program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada tahun 2026, BKPSDM akan memaksimalkan fungsi gedung pendidikan dan latihan yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pelatihan konvensional (tatap muka) yang diselenggarakan oleh BKPSDM sepenuhnya akan menggunakan gedung pendidikan dan Latihan tersebut guna memaksimalkan realisasi anggaran dan memaksimalkan jumlah ASN yang dapat mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbungan teknis lainya. Rehab gedung dan penambahan fasilitas untuk pelatihan akan dilaksanakan di kegiatan tahun anggaran 2025.

Akhir tahun 2024 BKPSDM telah mengembangkan aplikasi BANKOM yang terintegrasi dengan SIMPEG Idaman, dimana dengan aplikasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan layanan berbasis digital yang diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi efisiensi dan kualitas layanan kepegawaian di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya. Integrasi dengan SIMPEG Idaman dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen data pegawai hingga administrasi kepegawaian.

Untuk penguatan manajemen kinerja berbasis sistem merit, BKPSDM akan mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan PD, melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional serta mengoptimalkan manajemen talenta.

Rincian kebutuhan anggaran pada tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana Tabel TC.31 *Review* terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11,00	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEPEGAWAIAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	89 Nilai	13.792.806.535,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,85 Nilai	43.478.859.981,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	185.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	435.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,00	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	10.494.641.295,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	12.509.777.677,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 Orang	10.344.641.295,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200 Orang/Bulan	12.334.777.677,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	100.000.000,00	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	120.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	100.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	100.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	50.000.000,00	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.136.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.162.824.450,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	Jenis	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	81.962.250,00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4500	Porsi	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	94.862.200,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	317439	Unit	200.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	200.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277	Buku	21.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	127	Dokumen	21.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Jenis	75.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	75.000.000,00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Orang	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	125.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rapat	315.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	315.000.000,00	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Berkas	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Dokumen	100.000.000,00	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Laporan	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	150.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	387.750.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	21.869.113.000,00	
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-				3	Unit	21.869.113.000,00	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	287.750.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	133	Unit	-	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	120	Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1.119.415.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.980.144.854,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	170.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.354.144.854,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	827.415.240,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	504.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12	Unit	325.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	18 Unit	4.302.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	325.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1 Unit	65.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	3.912.000.000,00	
	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen	3.215.000.000,00	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen	9.033.000.000,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1306 ASN	1.325.000.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1306 ASN	813.000.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	661 ASN	450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	40.000.000,00	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	645 SK	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	45.000.000,00	
4	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1142 ASN	500.000.000,00	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000,00	
6	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2999 Data	100.000.000,00	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0 Dokumen	60.000.000,00	
7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	70 Buku	100.000.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	70 Laporan	68.000.000,00	
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2473 ASN	525.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2473 ASN	420.000.000,00	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	316 SK	125.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	150.000.000,00	
2	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2007 SK	200.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	150.000.000,00	
3	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	150 ASN	200.000.000,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	120.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	360 PNS	825.000.000,00	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	360 PNS	7.000.000.000,00	
1	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	180 ASN	100.000.000,00	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang	600.000.000,00	
2	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	80 ASN	350.000.000,00	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	ASN	375.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124	Orang	5.100.000.000,00	
4	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	30	Orang	500.000.000,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	10854	ASN	540.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	10854	ASN	800.000.000,00	
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	50.000.000,00	
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10854	ASN	125.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	500.000.000,00	
3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	75.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	50.000.000,00	
4	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	ASN	90.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	Orang	50.000.000,00	
5	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Kasus	100.000.000,00	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	Surat	50.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	300 Dokumen	50.000.000,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26.64	Persen	2.130.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	27,85 Persen	6.950.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200	ASN	400.000.000,00	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200 ASN	3.200.000.000,00	
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	400.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3000 Orang	3.000.000.000,00	
3	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	112 ASN	1.730.000.000,00	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	112 ASN	3.750.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12	ASN	230.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	6 Orang	1.000.000.000,00	
2	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	Peserta	1.500.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	2.750.000.000,00	
	JUMLAH					19.137.806.535,00	JUMLAH				59.461.859.981,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM tahun anggaran 2026, tidak terdapat usulan Program maupun kegiatan dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengakomodir usulan Program dan kegiatan masyarakat.

Tabel II-5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tidak ada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik Program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari RPJMD. Sinkronisasi antara Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Renstra BKPSDM 2025-2029, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Renstra kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Renstra terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Efektif, dan Terpercaya". Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

a. menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik-*digital bureaucracy*;
b. membangun sumber daya aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global;
c. mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel;
d. menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas;
e. mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani; dan
f. meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

a. penguatan implementasi manajemen ASN;
b. penataan kelembagaan dan proses bisnis;
c. reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
d. transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara Program Kementerian PAN-RB dengan Program BKPSDM, yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, Program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan oleh BKN adalah "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong" untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

a. pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
b. penyelenggaraan manajemen ASN;
c. penyimpanan informasi pegawai ASN;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN; dan
e. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Renstra BKPSDM tahun 2025-2029 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya aparatur;
b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, Program pelayanan administrasi ASN dan Program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

a. Mewujudkan sumber daya aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Mewujudkan kebijakan administrasi negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis *evidence* dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten;
c. Mewujudkan inovasi administrasi negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada Renstra LAN diketahui bahwa Program dan kegiatan peningkatan Program pendidikan kedinasan ASN dan Program pembinaan dan pengembangan aparatur dalam rencana strategis BKPSDAM Kabupaten Kutai Kartanegara, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BKPSDM, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional” yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

a. meningkatkan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
b. menyelenggarakan sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri; dan
c. mengembangkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Renstra kementerian dan lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat pemerintah pusat atau nasional yang terkait dengan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
b. penataan ASN sesuai dengan formasi;
c. peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
d. pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

e. optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
f. teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
g. optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
h. peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1 (satu) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program PD.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggungjawab.

Sasaran : Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel III-1. Tujuan dan Sasaran Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN		TARGET RENJA TAHUN 2026
	URAIAN	INDIKATOR	
Meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggungjawab		Indeks Profesionalitas ASN	81
	Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif	Indeks Sistem Merit	0,62
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	89

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
2. pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Daerah;
4. penguatan manajemen kinerja BKPSDM berbasis sistem merit; dan
5. penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan kebutuhan PD.

Dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 59 (lima puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp59.461.859.981,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Kegiatan dan sub-kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2026 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan sub-kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, PD penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 difokuskan untuk mendukung Program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Program dedikasi KUKAR IDAMAN TERBAIK. Dalam upaya mendukung Program dedikasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program ASN Kukar Terbaik.

Program ASN Kukar Terbaik yang terdapat dalam Kegiatan *“Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”*, “Program Kepegawaian Daerah” dan “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia” yang merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TERBAIK untuk abdi negara di Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjalankan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK secara optimal, dengan fokus pada perbaikan kapasitas SDM Aparatur, melalui implementasi merit sistem pada jenjang karir yang disertai dengan peningkatan tambahan penghasilan pegawai dan melakukan perbaikan tata kelola tenaga honor lokal salah satunya penyesuaian terhadap UMK yang berkeadilan bersandar pada perhitungan beban kerja yang realistis dan faktual. Selain daripada itu diperkuat dengan peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan utama beasiswa tugas belajar kepada ASN potensial mulai jenjang S1, S2 dan S3. Disisi lain dalam upaya meningkatkan keahlian ASN, diperkuat dengan optimalisasi pelayanan pendidikan dan latihan kepegawaian, tahap awal didukung dengan skema kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

Selanjutnya BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara diberi amanat sebagai salah satu PD yang mengampu Program digitalisasi pelayanan publik yang ditujukan untuk membangun *mindset* dan *culturset* tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Program tersebut terdapat dalam sub Kegiatan “Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian” dengan aplikasi Simpeg Idaman yang terintegrasi dengan Si-ASN BKN, sub kegiatan “Peningkatan kapasitas kinerja ASN”, “Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN”, “Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan” dan sub Kegiatan “Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum” yang didukung dengan aplikasi “BANKOM (Pengembangan Kompetensi)”. Dalam Program ini peranan BKPSDM untuk menempatkan aparatur sesuai kebutuhan PD sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2026 disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis dengan skala prioritas agar tujuan dan sasaran strategis dapat diwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya, kerja keras dan sinergitas dari seluruh PD, mengingat saat ini nilai indeks profesionalitas ASN masih sangat rendah. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM telah tercermin dalam Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang disusun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Semua kegiatan dan sub-kegiatan yang berada dibawah Program “Program Kepegawaian Daerah” dan Program “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia” berisi kegiatan dan sub-kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dimana salah satu tujuan akhirnya adalah meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggung jawab.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan tahun anggaran 2026, sebagaimana telah kami uraikan dalam isu strategis adalah sbb:

1. penguatan UPTD Tenggarong Seberang sebagai salah satu sarana pengembangan komptensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. peningkatan pemberian beasiswa bagi ASN yang mendapatkan Ijin tugas belajar;
3. fasilitas rumah dinas dan perjalanan dinas bagi ASN yang dimutasi ke kecamatan terjauh karena kebutuhan organisasi;
4. pelatihan asn prapensiun selambat lambatnya 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
5. peningkatan layanan pemberian tanda jasa sesuai periode waktu, SOP dan usulan dari PD dan kecamatan yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditentukan dan disosialisasikan;
6. peningkatan frekuensi sosialisasi tata cara pengisian/penginputan SKP sampai ke tingkat kecamatan; dan
7. optimalisasi rencana penyebaran kebutuhan ASN baik di PD maupun di kecamatan.

Keeanam isu strategis diatas sebagaimana telah kami angkat dalam kegiatan Forum PD adalah faktor penyebab ketidaksesuaian dengan rancangan awal RKPD baik jenis Program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegera dapat dilihat pada Tabel IV-1 (Tabel TC-33).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6,00 (7)		(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03.	KEPEGAWAIAN								
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77,85 Nilai	43.478.859.981,00			78,5 Nilai	27.862.488.989,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23 Dokumen	435.000.000,00			23 Dokumen	535.000.000,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	3 Dokumen	65.000.000,00	DBH		6 Dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	10 Laporan	55.000.000,00	PAD		15 Dokumen	55.000.000,00
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Laporan	65.000.000,00	DBH		2 Dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	1 Dokumen	-	DBH		1 Dokumen	50.000.000,00
5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Data	200.000.000,00	DBH		1 Data	250.000.000,00
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000,00	DBH		1 Berita Acara	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15	Laporan	12.509.777.677,00	-		15	Laporan	10.519.641.295,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1200	Orang/Bulan	12.334.777.677,00	DBH		1080	Orang	10.344.641.295,00
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000,00	DBH		1	Laporan	50.000.000,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	18	Laporan	100.000.000,00	DBH		12	Laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	1	Dokumen	25.000.000,00	DBH		1	Laporan	25.000.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		5	Dokumen	120.000.000,00	-		2	Dokumen	120.000.000,00
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	2	Dokumen	25.000.000,00	DBH		2	Laporan	25.000.000,00
5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000,00	DBH		1	Laporan	50.000.000,00
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2	Laporan	45.000.000,00	DBH		2	Laporan	45.000.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2	Dokumen	100.000.000,00	-		2	Dokumen	50.000.000,00
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar	30	Orang	50.000.000,00	DBH				-
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	50	Orang	50.000.000,00	DBH		30	Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kukar	8	Layanan	1.162.824.450,00	-		50	Orang	6.610.858.400,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	81.962.250,00	DBH		8	Layanan	5.474.858.400,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	94.862.200,00	DBH		37	Jenis	150.000.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	200.000.000,00	DBH		4500	Porsi	150.000.000,00
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kukar	127	Dokumen	21.000.000,00	DBH		317439	Unit	200.000.000,00
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar	1	Paket	75.000.000,00	DBH		1277	Buku	21.000.000,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	1	Laporan	125.000.000,00	DBH		2	Jenis	75.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	315.000.000,00	DBH		5	Orang	125.000.000,00
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	450	Dokumen	100.000.000,00	DBH		100	Rapat	315.000.000,00
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	1	Dokumen	150.000.000,00	DBH		450	Berkas	100.000.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kukar	100	Persen	21.869.113.000,00	-		1	Laporan	4.338.858.400,00
5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3	Unit	21.869.113.000,00	PAD		100	Persen	2.169.429.200,00
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	133	Unit	-	-	Hasil FPD: Kelengkapan SAPRAS gedung DIKLAT	133	Jenis	1.146.082.000,00
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	120	Unit	-	DBH	Hasil FPD: Kelengkapan SAPRAS gedung DIKLAT	120	Paket	1.023.347.200,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	2.980.144.854,00	-		12	Bulan	3.603.560.094,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	1 Laporan	22.000.000,00	DBH		12 Bulan	22.000.000,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar	12 Laporan	2.354.144.854,00	DBH	Hasil FPD: Listrik, Air dan Internet Gedung DIKLAT	12 Bulan	2.354.144.854,00
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	12 Laporan	100.000.000,00	DBH		12 Bulan	400.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	12 Laporan	504.000.000,00	DBH		12 Bulan	827.415.240,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		18 Unit	4.302.000.000,00	-		12 Unit	5.390.000.000,00
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar	15 Unit	325.000.000,00	DBH		15 Unit	325.000.000,00
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kukar	1 Unit	65.000.000,00	DBH		1 Unit	65.000.000,00
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kukar	2 Unit	3.912.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Pemeliharaan gedung DIKLAT TGR SEBERANG	2 Paket	5.000.000.000,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara		96 Persen	9.033.000.000,00			96 Persen	14.165.000.000,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan		1306 ASN	813.000.000,00	-		1306 ASN	2.050.000.000,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000,00	DBH	Proses penyusunan rencana kebutuhan ASN memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi apakah jumlah pegawai yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan	1 Dokumen	100.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	1 Dokumen	40.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Proses pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	661 ASN	450.000.000,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kukar	1 Dokumen	45.000.000,00	DBH	Proses pemberhentian ASN harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta kebijakan terkait. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait (BKN, instansi terkait lainnya) memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mematuhi prosedur yang berlaku	645 SK	100.000.000,00
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kukar	1 Lembaga	250.000.000,00	DBH	Untuk mendukung pengembangan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan lembaga KOPRI	1142 ASN	500.000.000,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1 Dokumen	300.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Efisiensi dalam Pengelolaan Data Kepegawaian (Mutasi, Pengembangan Kompetensi dan Pemberian Tanda Jasa), Meningkatkan Akurasi dan Keandalan Data, Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan, Pengelolaan Data yang Lebih Terorganisir, Mempermudah Pelaporan dan Analisis Kinerja, Keamanan Data yang Lebih Terjamin, Mempermudah Integrasi	1 Laporan	650.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

							dengan Sistem Lain, Mendukung Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan		
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kukar	0 Dokumen	60.000.000,00	DBH	untuk memastikan bahwa data kepegawaian dalam suatu instansi atau organisasi dapat dikelola dengan baik, akurat, dan efisien, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi	2999 Data	100.000.000,00
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	70 Laporan	68.000.000,00	DBH	Untuk memastikan bahwa proses pengelolaan data kepegawaian, penggunaan informasi, dan penerapan sistem informasi yang ada berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi	70 Buku	150.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan		2473 ASN	420.000.000,00	-		2473 ASN	1.100.000.000,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kukar	4 Dokumen	150.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Memastikan bahwa Penempatan ASN berdasarkan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Kebutuhan Organisasi dalam rangka meningkatkan Kinerja Organisasi serta memberikan motivasi kerja guna Meningkatkan Layanan kepada masyarakat di	4 Laporan	500.000.000,00

							Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kukar	1 Dokumen	150.000.000,00	DBH	Memastikan bahwa seluruh ASN mengerti dan memahami bahwa Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat merupakan sebuah Penghargaan dan motivasi yang diberikan karena memiliki kinerja yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi dan kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	200.000.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kukar	3 Dokumen	120.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Sistem Merit melalui Manajemen Talenta sebagai tindaklanjut peraturan dan ketentuan yang berlaku.	3 Dokumen	400.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		360 PNS	7.000.000.000,00	-		5 Laporan	10.200.000.000,00
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kukar	9000 Orang	600.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Kewajiban pengembangan kompetensi bagi ASN sesuai UU No. 20 Tahun 2023 2. Rasio Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi: 50,31% (3.139/6.239) 3. PNS Pangkat	9000 ASN	2.150.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

							Golongan: Pengatur Tingkat I (II/d) masa kerja di atas 4 tahun sebanyak 1.417 Orang 4. PNS Pangkat Golongan: Juru Tingkat I (I/d) masa kerja di atas 4 tahun sebanyak 23 Orang		
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	2 Dokumen	800.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. JPT Pratama yang lowong harus segera diisi agar kinerja perangkat daerah bisa dioptimalkan 2. Persiapan pembangunan manajemen talenta	2 Dokumen / 1000 Orang	1.950.000.000,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kukar	124 Orang	5.100.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN Kab. Kutai Kartanegara mengingat Rasio Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi: 50,31% (3.139/6.239) 2. Rencana pemberian beasiswa PNS Tugas Belajar dengan pola TUNTAS 3. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nomor: B-10265/DINKES/SKRT-UTK/800.1.6/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal USULAN DAN ROADMAP PERMOHONAN BEASISWA TEMATIK DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029	124 ASN	5.100.000.000,00
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kukar	30 Orang	500.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Rasio Pejabat Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 50,32% (316/628)	60 Orang	1.000.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		10854 ASN	800.000.000,00	-		10854 ASN	815.000.000,00
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Peraturan Bupati Tentang Manajemen Kepegawaian yang harus di revisi sesuai dengan Perubahan Perundangan Terbaru dari Pemerintah Pusat	1 Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Dokumen	500.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Mengevaluasi Seluruh Sasaran Kinerja Pegawai ASN; 2. Sosialisasi Peraturan Perundangan Ke Seluruh ASN yang tersebar di 59 Perangkat Daerah	10854 ASN	300.000.000,00
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Pemeringkatan Predikat SKP ASN di 59 Perangkat Daerah; 2. Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja ASN berdasarkan Jabatan; 3. Pembinaan Kepada ASN secara teknis	1 Dokumen	75.000.000,00
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kukar	300 Orang	50.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan di 59 Perangkat Daerah; 2. Mendata PNS yang berpotensi untuk diberikan penghargaan Satyalenca di 59 Perangka Daerah; 3. Melakukan koordinasi terkait usulan penghargaan Satyalencana ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta	348 ASN	90.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kukar	1 Laporan	100.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan di 59 Perangkat Daerah; 2. Melakukan Sidang Pelanggaran Disipilin ASN; 3. Melakukan koordinasi terkait Aplikasi IDIS Ke Kanreg BKN Wilayah VIII Banjarbaru dan BKN Jakarta	20 Kasus	200.000.000,00
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kukar	300 Dokumen	50.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan di 59 Perangkat Daerah; 2. Melakukan koordiansi ke Perangkat Daerah	300 Orang	50.000.000,00
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		27,85 Persen	6.950.000.000,00			26.64 Persen	8.930.000.000,00
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis		200 ASN	3.200.000.000,00	-		3 Laporan	3.700.000.000,00
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per orang setiap tahun bagi PNS dan 24 JP bagi PPPK berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN	450 Orang	3.000.000.000,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kukar	3000 Orang	3.000.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Perlunya perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara sistematis dan terstruktur.	1 Dokumen	350.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	DBH	Hasil FPD: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah1 no 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:2	1 Dokumen	350.000.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		112 ASN	3.750.000.000,00	-		2 Laporan	5.230.000.000,00
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	6 Orang	1.000.000.000,00	DBH		12 ASN	230.000.000,00
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kukar	6 Laporan	2.750.000.000,00	DBH	Hasil FPD: 1. PPPK Tahun 2024 yang wajib melaksanakan orientasi sebanyak 3.876 2. Pejabat Administrator yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 36 Orang 3. Pejabat Pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 494 Orang	6 Laporan	5.000.000.000,00
	JUMLAH				59.461.859.981,00				50.957.488.989,00

BAB V
PENUTUP

Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, Program dan penganggaran tahunan. Ren-ja PD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Resntra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi RKPD.

Jika dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan upaya rasionalisasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas. Berkaitan dengan kaidah pelaksanaan, sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf BKPSDM secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM tahun 2026 adalah akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 dengan memperhatikan saran, informasi dan data-data dari masing-masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal PD maupun di lingkup Pemerintah Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN RISET DAERAH

BAB 1
PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan PD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan BRIDA merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional di bidang penguatan riset dan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan daya saing Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan BRIDA Kabupaten dimaksudkan untuk menjadi penghubung *(bridging institution)* antara Pemerintah Daerah, dunia akademik, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga hasil-hasil penelitian dan inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan publik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Kerja BRIDA ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada rencana strategis (Renstra) BRIDA, RKPD, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Rencana Kerja ini memuat Program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas di bidang riset dan inovasi, yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Rencana Kerja BRIDA merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, Program, kegiatan, dan sub-kegiatan strategis dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Renstra BRIDA, RKPD, serta kebijakan nasional di bidang riset dan inovasi. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi Daerah, BRIDA berperan penting dalam menyediakan basis pengetahuan yang akurat, mendorong penerapan teknologi tepat guna, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Penyusunan Renja-PD ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis Daerah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Rencana Kerja BRIDA disusun secara partisipatif melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah, forum konsultasi publik, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan pembangunan Daerah, mampu memberikan solusi berbasis riset, serta mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahtera.

Rencana Kerja BRIDA Kabupaten/Kota disusun sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah. Rencana ini menjadi pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan BRIDA pada periode tahun anggaran berjalan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja lembaga.

Seluruh Program diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data ilmiah, mendorong kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta memfasilitasi inovasi masyarakat yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja utama, serta tantangan strategis di bidang riset dan inovasi. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan jumlah penelitian terapan, penerapan inovasi inovasi Daerah melalui pendampingan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan BRIDA dapat berperan optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, pelayanan publik yang lebih efektif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BRIDA tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2026;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komite Inovasi Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
23. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021,Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-645/BAPP/065.11/03/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja BRIDA tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BRIDA yaitu :

a. mewujudkan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara ke dalam rencana kegiatan pembangunan melalui Kutai Kartanegara IDAMAN;
b. sebagai acuan BRIDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misinya.
c. merumuskan program dan kegiatan BRIDA selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja BRIDA tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 yang sudah terinput pada aplikasi e-pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub-kegiatan, secara capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen).
   b) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, secara umum terget kinerja tercapai 100% (seratus persen).
   c) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, secara umum terget kinerja tercapai 100% (seratus persen).
   d) Program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, secara umum terget kinerja tercapai 100% (seratus persen).
   e) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi, secara umum terget kinerja tercapai 100% (seratus persen).
2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2026 (n), sehingga realisasi capaian target Rencana Kerja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Rencana Kerja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari Program-Program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan, sehingga BRIDA dapat mengetahui Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya

3. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator masukan *(input),* keluaran *(output)* dan hasil *(outcome).* Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**95**	**62,65**	**84**	**90,45**	108%	87 (A)	90,45	95%
5	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	**11**	**11**	11	100%	11	33	60%
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	60%
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	8	8	8	100%	8	24	60%
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	35	7	7	**7**	100%	7	21	**60%**
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5450	1090	1090	1002	92%	1090	3182	58%
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30	6	6	6	100%	6	18	60%
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	35	7	7	7	100%	7	21	**60%**
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	6	6	6	100%	6	18	60%
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	30	**6**	6	**6**	100%	6	18	60%
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	28	10	4	40%	10	42	84%

		2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	5	5	5	100%	5	**15**	60%
		5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	35	**7**	**7**	**7**	100%	7	**21**	**60%**
		5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	22	2	2	100%	31	**55**	73%
		5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	14	2	2	100%	11	**27**	49%
		5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	5	3	3	100%	4	**12**	75%
		5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	2	0	0%	2	**2**	20%
		5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2145	417	143	140	98%	256	**813**	38%
		5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	185	37	37	37	100%	37	**111**	60%
		5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	**3**	60%
		5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	**12**	**12**	**12**	100%	12	**36**	**60%**
		5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	48	48	48	100%	48	**144**	60%
		5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1920	384	384	384	100%	384	**1152**	60%
		5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1215	**244**	243	**243**	100%	243	**730**	**60%**
		5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	32	31	26	84%	31	**89**	56%
		5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1060	212	212	212	100%	212	**636**	60%

			5	**05**	**02**			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100**
			5	**05**	**02**	**2.01**		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**7**	**4**	**7**	**7**	100%	**1**	**12**	**171%**
			5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1		3	3	100%		**3**	300%
			5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1		6	6	100%		**6**	600%
			5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1					1	**1**	100%
			5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	3					**3**	300%
			5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1							
			5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian tentang pengembangan bidang badan usaha milik desa	1	1					**1**	100%
			5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
			5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	10	1	10	10	100%	3	14	140%
			5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1		1	1	100%		1	100%
			5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1	1				1	2	200%
			5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1							
			5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1							
			5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	5		9	9	100%	2	11	220%
			5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1							
			5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
			5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
			5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		1	1	100%		**1**	100%
			5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1		1	1	100%		**1**	100%
			5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1					1	**1**	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	1	1	100%		2	200%
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1							
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1							
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100%**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi**	**5**	**2**	**2**	**2**	100%	**1**	**5**	**100%**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1					1	1	100%
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1							
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	1	1	100%		2	200%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1					1	100%
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1		1	1	100%		1	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran.

Sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada bahwa BRIDA yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan badan yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam penelitian dan pengembangan sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh BRIDA tahun 2026. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

" Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah "

Adapun indikator sasaran yang ditetapkan BRIDA pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan
2. Indeks inovasi daerah.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, maka pada Renstra tahun 2021-2026 BRIDA yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dirumuskanlah tujuan, sasaran, dan Program sebagai alat ukur keberhasilan perangkat daerah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	CARA HITUNG
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah			Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah	Jumlah Rekomendasi yang menjadi rujukan Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Jumlah rekomendasi Yang dihasilkan X 100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2		Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Kelitbangan yang Termanfaatkan oleh Stakeholder / Jumlah Kelitbangan Yang dihasilkan X 100
				Indeks Inovasi Daerah	skor indeks inovasi dikeluarkan oleh kemendagri
3			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai dikeluarkan oleh Inspektorat
4			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Sosial Dan Kependudukan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Jumlah OPD yang memiliki Inovasi dalam tahun perencanaan / Jumlah OPD di Pemerintahan Kutai Kartanegara X100

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu menjabarkan Definisi Operasional dari Indikator tersebut, ada pun definisi operasional adalah sebagai berikut :

- Definisi operasional pemanfaatan hasil kelitbangan adalah kemanfaatan suatu hasil kelitbangan (rekomendasi) untuk membuat pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktivitas, efektivitas dan meningkatkan kinerja pekerjaan, pemanfaatan tidak serta merta digunakan pada saat rekomendasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dihasilkan dengan catatan, bisa saja dua atau tiga tahun berjalan selama belum ada rekomendasi baru yang dihasilkan dari judul/tema riset yang sama sebagai rujukan dalam membuat kebijakan yang meyesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu yang berkembang. Contoh Definisi Pemanfaatan:

Kegiatan Tahun 2021	Hasil dan Rekomendasi	Masa Renstra 2021-2026	
		PD Penerima Manfaat	Tahun
Bidang Pemerintahan dan pengkajian peraturan			
Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Syarat Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, SDM, SDA memenuhi kriteria dan syarat pemekaran wilayah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memanfaatkan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengajukan Usulan Ke DPRD Kukar dan selanjutnya DPRD Kukar telah mensyahkan sesuai Perda Nomor : untuk disyahkan menjadi 2 kecamatan baru	2024

- definisi operasional indeks inovasi daerah adalah penilaian yang dikeluarkan oleh kementrian dalam negeri dengan cara hitung IID = skor total : skor total maksimum x 100 dengan keterangan skor total maksimum diperoleh dari penjumlahan skor maksimal indikator satuan pemerintah daerah (SPD) dengan skor maksimal indikator satuan inovasi daerah (SID). Skor total maksimum adalah 250 (dua ratus lima puluh) dan skala IID adalah 0 s.d 100 (nol sampai dengan seratus). Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud akan digunakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah dua sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, Program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sampai dengan Tahun ke 5 (lima) Renstra Tahun 2025-2029 pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC - 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah			28,6	33,4	100	100	28,6	33,3	100	100	adanya perubahan target pada indikator tujuan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Inovasi Daerah			36,64	41,38	55,85	57	41,38	55,85	59,93	60,01	adanya perubahan target pada indikator sasaran ke-2 hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	84	87	91	62,65	90,45	88	91	
5	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	
6	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
7	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
8	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	
9	Jumlah Pelayanan administrasi umum			7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			432 Orang / Bulan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	397 Orang / Bulan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
11	Jumlah Barang Milik Daerah			244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	
12	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Dokumen cakupan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
14	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan			100	100	100	100	100	100	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
15	Bidang Sosial Dan Kependudukan			100	100	100	100	100	-	100	100	
16	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah, bahwa BRIDA merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah, di bidang riset dan inovasi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 peraturan bupati tersebut tersebut, BRIDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

i. pelaksanaan administrasi badan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Program dan kegiatan Renja-PD tahun 2024, serta capaian kinerja Renstra PD sampai dengan tahun berjalan, yaitu :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	Belum tersediannya rekomendasi yang menjadi salah satu bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Renstra tidak seluruhnya dapat difasilitasi dalam hal penganggaran
		Rekomendasi yang dihasilkan tidak semuanya termanfaatkan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan yang disusun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan kebutuhan perangkat daerah lainnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti yang tersedia belum sesuaidengan kebutuhan Jabatan Fungsional peneliti berdasarkan kepakaran	Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti berkurang dikarenakan terjadi mutasi / pindah ke jabatan strutural
			Rendahnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional peneliti
			Peningkatan Kapasitas kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya dapat difasilitasi (Peningkatan SDM)
2	Terbatasnya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung kelitbangan atau referensi perumusan kebijakan yang diperlukan pemengku kepentingan	Publikasi ilmiah yang ada belum memenuhi standar akreditasi secara nasional	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan publikasi mandiri dan berkala
		Belum termanfaatkannya publikasi mandiri dan berkala oleh masyarakat	Kurangnya sosialisasi manfaat publikasi mandiri dan berkala

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian Program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja utama dan belanja utama PD BRIDA akan berdampak kepada internal maupun eksternal BRIDA, pada analisis risiko terdapat penyebab risiko dan skala risiko sehingga akan menghasilkan area dampak seperti beban keuangan Daerah, penurunan reputasi, sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi, kecelakaan kerja, ganggugan terhadap layanan organisasi dan penurunan kinerja, dengan level dampak seperti: 1) tidak signifikan; 2) minor; (3) moderat; 4) signifikan; 5) sangat signifikan. Untuk mengetahui level dampak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal yang telah dibuat seperti pada surat instruksi dan surat edaran BRIDA tersebut serta pengendalian yang lain yang mendukung atas evaluasi tersebut.

Dari berbagai opsi penanganan risiko yang telah dipilih memiliki dampak risiko seperti pada surat edaran kepala BRIDA tersebut terdapat area dampak yang harus dilakukan rencana tindak pengendalian yang dibuatkan secara terpisah dari manajemen risiko. Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan capaian tujuan organisasi terhadap pemenuhan target yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

diperjanjikan perlu dikomunikasi dan dikonsultasikan antar kegiatan dan pimpinan, komunikasi dan konsultasi tersebut dapat berupa :

1. rapat berkala kelitbangan dan memaksimalkan tim kelitbangan ;
2. rapat insidentil ;
3. *focused group discussion* ;
4. forum pengelola risiko; dan
5. pelaksanaan pra seminar hasil dan seminar hasil.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah.
   1. *Good governance* yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
   2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 dalam bentuk 23 (dua puluh tiga) Program Dedikasi belum maksimal di laksanakan oleh PD diantaranya ;
      a. program pertanian berbasis kawasan;
      b. program hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan pangan;
      c. program usaha kecil dengan pinjaman tanpa bunga (0 %);
      d. program desa ramah lingkungan; dan
      e. program kukar peduli lingkungan.
   3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
   4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
   5. Hasil-hasil/*outcome* penelitian yang belum semua dimanfaatkan oleh PD yang ada sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan; dan
   6. Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang Daerah;

A. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah:
   1) Misi 1 adalah memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani dengan prioritas kegiatan di bidang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintahan dan pengkajian peraturan (*Review* peraturan daerah dan peraturan bupati yang tidak sesuai dengan perkembangan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan kecamatan/kelurahan/desa.

2) Misi 2 adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya, prioritas kegiatan dibidang sosial budaya kemasyarakatan (survei kepuasan publik, pengembangan situs kerajaan dan budaya, kajian penurunan angka kemiskinan, kajian peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal).
3) Misi 3 adalah memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif prioritas kegiatan dibidang ekonomi pembangunan (strategis peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan lumbung pangan masyarakat, kajian optimalisasi hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan pangan).
4) Misi 4 adalah meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah prioritas dibidang sosial budaya dan kemasyarakatan serta bidang ekonomi dan pembangunan (indeks kualitas layanan infrastuktur dasar menyangkut konektivitas sarana dan pasarana dasar layanan publik antar wilayah, keterlibatan pekerja lokal dalam pembangunan, optimalisasi pembangunan kawasan wisata, desa ramah lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan);
5) Misi 5 adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan prioritas dibidang inovasi Dearah (penguatan inovasi Daerah, pemanfaatan tehnologi tepat guna, optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang, inventarisasi, sosialisasi dan pedaftaran atas karya seni, karya budaya, kuliner ke kemenkum untuk mendapat hak atas kekayaan intelektual)

B. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1) penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan penambahan 11 (sebelas) sub-kegiatan;
2) penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan kependudukan penambahan 10 (sepuluh) sub-kegiatan;
3) penelitian dan pengembangan di sub-bidang ekonomi pembangunan penambahan 9 (sembilan) sub-kegaiatan; dan
4) pengembangan inovasi dan teknologi penambahan 2 (dua) sub-kegiatan.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Akhir dan Renstra PD pada Tahun 2026

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BRIDA untuk pelaksanaan Program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel, sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

BRIDA merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan Daerah yang ikut mendukung keberhasilan Program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di BRIDA akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di BRIDA membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada. Konsep sinergitas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk BRIDA sangat minim sementara Program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Adapun pagu anggaran pada rancangan awal sebesar Rp29.600.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah). Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat BRIDA secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap *Review* rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel TC-31 Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	91	Nilai	14.150.000.000,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	91 Nilai	12.371.429.048	
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	750.000.000,-	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	273.600.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	103.600.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	70.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7	Dokumen	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7 Dokumen	10.098.231.787	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BRIDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090	Orang / Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BRIDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang / Bulan	9.951.441.787	Adanya penambahan PNS dari Dinas ESDM sebanyak 19 orang
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6	Laporan		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	146.790.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	7	Dokumen		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	90.000.000	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	BRIDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	6	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan	BRIDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	6 Laporan	50.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
1.3.2	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	40.000.000	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	155.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	305.000.000	
1.4.1							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BRIDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000	Permendagri no 11 tahun 2020, Aparatur BRIDA sudah lebih dari 5 tahun belum pernah mengadakan pengadaan pakaian dinas
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	95.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BRIDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95.000.000	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BRIDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	60.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BRIDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7	Pelayanan	500.000.000,	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7 Pelayanan	662.736.962	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BRIDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BRIDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	71.081.000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BRIDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BRIDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124.450.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BRIDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BRIDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.002.325	
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45.883.637	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	Laporan	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BRIDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	300.000.000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BRIDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37	Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BRIDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61.320.000	
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BRIDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BRIDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BRIDA	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	700.000.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BRIDA	Jumlah Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	806.860.299	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BRIDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BRIDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.915.728	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BRIDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BRIDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	747.944.571	Penambahan THL dari Pelimpahan Dinas SDM sebanyak 5 orang
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BRIDA	Jumlah Barang Milik Daerah	243	Unit	500.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BRIDA	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	243 Unit	135.000.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	65.000.000	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	70.000.000	
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	100	Persen	Rp	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	100	Rp 11.884.210.000,00	
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	Dokumen	4.700.000.000,-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	1.949.660.000	
2.1.1							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	400.000.000	penelaahan saran dan tanggapan dari Prof. Ince Raden(Unikarta) dalam forum konsultasi publik dan Pokir DPRD, berisi 2 Tema Kajian dengan Judul : 1. Review Perda tentang Perlindungan lahan pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												2. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan (Lanjutan pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Loa Kulu) Untuk mensuport Kinerja OPD antara lain : 1. Distanak 2. DKP 3. Disbun 4. DisPMD 5. Kec. TGR Seberang 6. Kec. Loa Kulu Program Dedikasi : 1. Program Pertanian berbasis kawasan 2. Program Pemantapan Konektivitas Wilayah

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	Laporan	125.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	500.000.000	1. Review Peraturan Bupati tentang Tata Kelola BUMDes atas Destinasi wisata dan Desa Wisata Berwawasan lingkungan, hal ini sangat penting agar BUMDes mampu bersaing dan kompetisi sebagai penyedia Barang dan Jasa Kajian pemetaan konflik tanah dan efektifitas 2. administrasi pertanahan untuk mensuport kinrja PD 1. BPMD 2. Disperindag 3. Dinas Koperasi dan UMKM Program Dedikasi : Program Usaha Kecil Idaman Program Kukar Kreatif Idaman
2.1.3							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	509.660.000	1. Kajian Determinan permasalahan Program fasilitasi perumahan rakyat Fasilitasi pemanfaatan tanah, gedung aset daerah 2. untuk disewakan kepada pihak ketiga sebagai salah satu PAD 3. Evaluasi sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) terhadap pembangunan dan kemajuan Desa Untuk mensuport PD : 1. BPKAD 2. BKPSDM 3. DPPPA
2.1.4 **2.1.5**							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan 2 Laporan	140.000.000 400.000.000	1. Penerbitan buletin dan jurnal ilmiah 2. Riset cepat dan FGD penelaahan saran dan tanggapan dari hero suprapto(Unikarta) dalam forum konsultasi publik, Berisi 2 Tema Kajian dengan judul : 1. Fasilitasi Pembuatan Perbup Insentif bagi Industri yang bergerak disektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Pangan Evaluasi Kebijakan legal audit atas Produk Hukum 2. Daerah Kab.Kukar yang terkait dengan 23 Program Kukar idaman diantaranya : 1. Program Hilirisasi Produk Pertanian 2. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) yang bertujuan untuk mensuport Kinerja OPD antara lain : 1. Disnakertrans 2. Distanak 3. DPMPTSP 4. Disbun 5. Disperindag 6. Diskop dan UMKM Program Dedikasi : Program Hilirisasi Produk Pertanian Program Pembangunan Pertanian Berbasis kawasan
2.2	penelitian dan pengembangan	Kabupaten Kutai	Jumlah Dokumen penelitian dan	2	Dokumen	3.000.000.000,-	penelitian dan	Kabupaten Kutai	Jumlah Dokumen penelitian dan	2 Dokumen	3.750.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kartanegara	pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan				pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kartanegara	pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan			
2.2.1							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	800.000.000	Lanjutan kajian determinan kemiskinan dan penanggulangannya perspektif pendidikan, untuk mensuport PD : 1. Diknas 2. Dinsos 3. Disnakertrans Program Dedikasi : Program Kukar Bebaya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	500.000.000	Kajian Determinan terhadap penyakit masyarakat (perempuan dan Anak), usulan dari DPPPA
2.2.2							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 Dokumen	600.000.000	1. Kajian pengaruh APK dan APM terhadap angka pengangguran terbuka 2. Lanjutan Kajian Kerajaan Kutai Ing Martadipura di desa Jembayan Kec. Loa Kulu. Untuk mensuport PD : 1. Diknas 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Perkim Program Dedikasi : Kukar Bebaya
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	150.000.000	Kajian analisis dampak pelaksanaan event pariwisata
2.2.3							Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	450.000.000	Survei angka harapan hidup (Terkait indeks kesehatan) 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. Diknas Program Dedikasi : Program Peduli Kesehatan
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	250.000.000	Kajian pengaruh pembangunan IKN terhadap daya serap dan peningkatan ketenagakerjaaan khususnya tenaga kerja lokal untuk mensuport PD : 1. Disnakertrans
2.2.5	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	1 Dokumen	1.000.000.000	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur sejauh mana kineja PD terhadap kepuasan pelayanan publik. 2. Indeks Kebahagian 3. Indeks Infrastruktur Untuk mensuport PD. : 1. Seluruh PD di Kab Kukar 2. Seluruh UPTD di Kab. Kukar
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Dokumen	3.850.000.000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	3.053.820.000	
2.3.1							Penelitian dan	Kabupaten Kutai	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan	2 Dokumen	400.000.000	1. Fasilitasi Tataniaga produksi usaha koperasi dan UKM di

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

							Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kartanegara	Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Ibukota negara dan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi 2. Program usaha kecil idaman (Kredit Kukar Idaman) penelaahan terhadap saran Dr. Agung Satrio N (UGM) dalam forum konsultasi publik untuk mensuport PD : 1. Disperindag 2. Diskop dan UMKM 3. Dinas Pariwisata

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	125.000.000	Kajian potensi kredit kukar idaman dengan bunga 0 % terhadap tumbuh sentra-sentra baru perekonomian untuk mensuport PD : 1. Disperindag 2. Diskop UMKM Program Dedikasi Program usaha kecil Idaman
2.3.3							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 dokumen	1.628.820.000	1.Kajian efektifitas fasilitasi sarana produksi komoditas pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Fasilitasi Interkonekting lumbung pangan masyarakat 2. (LPM) dengan pelaku/ketingkat pasar. Pengembangan basis data kelitbangan pertumbuhan 3. PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 4. Kajian tataniaga pemasaran hasil pertanian padi/beras dikabupaten Kutai Kartanegara. Studi kelayakan pembangunan industri pakan ternak 5. skala kecil berbasis potensi bahan baku lokal. 6. Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani Tindak lanjut terhadap saran dan tanggapan dari hero suprapto (unikarta) dan penelaahan terhadap saran Prof ince raden (Unikarta) dalam forum konsultasi publik : Program dedikasi : 1. Program Pembangunan pertanian berbasis Kawasan
2.3.4							Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasilPenelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	350.000.000	Penguatan kapasitas kelembagaan Nelayan dalam 1. rangka Peningkatan NTN. 2. Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Nelayan. Tindak lanjut terhadap saran dan tanggapan dari hero suprapto (unikarta) dalam forum konsultasi publik untuk mensuport PD. 1. DKP
2.3.5							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	300.000.000	Kajian Kualitas anak sungai Mahakam sebagai bahan baku air bersih untuk mensuport PD. 1. PDAM 2. DLHK
2.3.6							Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250.000.000	Kajian Perumahan Rakyat dalam rangka mitra IKN bagi Pengusaha UKM untuk mensuport PD : 1. Dinas Perkim 2. DPTR Program dedikasi : Program Fasilitasi Perumahan Rakyat

2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	1	Dokumen	3.900.000.000,-	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	**3.130.730.000**	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta Program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada rancangan awal Rencana Kerja BRIDA telah dilakukan diskusi dan pembahasan melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja-PD sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil kesepakatan tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan dari akademisi/kelompok masyarakat/*stakeholder* terhadap pelaksanaan Program/kegiatan yang direncanakan. Usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel TC-32 Rencana Kerja BRIDA sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1		1. Tingginya kasus sengketa kepemilikan lahan terutama disektor perumahan, perkebunan dan pertambangan 2. perlu tindak lanjut hasil riset cepat pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan kecamatan Loa Kulu	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Review Perda tentang Perlindungan lahan pertanian **2.** Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan (Lanjutan pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Loa Kulu)
2		1. BUMDes belum mampu bersaing dalam mengikuti pelelangan dikarenakan Bentuk/Wujud BUMDes belum jelas. 2. Kurangnya minat investor dibidang Pertanian, Perkebunan dikarenakan permasalahan lahan.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Review Peraturan Bupati tentang Tata Kelola BUMDes atas Destinasi wisata dan Desa Wisata Berwawasan lingkungan **2.** Kajian pemetaan konflik tanah dan efektifitas administrasi pertanahan
3		1. Kurangnya minat investor dibidang Perumahan dan Pemukiman dan kurang termanfaatkannya Program dedikasi Program fasilitasi Perumahan Rakyat. 2. Aset tanah Pemkab Kukar belum sepenuhnya termanfaatkan guna menghasilkan PAD. 3. Tata kelola Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) belum sepenuhnya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	**Paket Pekerjaan:** Kajian Determinan permasalahan **1.** Program fasilitasi perumahan rakyat Fasilitasi pemanfaatan tanah, gedung **2.** aset daerah untuk disewakan kepada pihak ketiga sebagai salah satu PAD **3.** Evaluasi sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) terhadap pembangunan dan kemajuan Desa
4		belum terfasilitasinya riset cepat dalam menindaklanjuti isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat, belum terfasilitasinya Peningkatan Kafasitas dan Kapabilitas peneliti berupa kredit poin, belum terfasilitasinya publikasi hasil-hasil kelitbangan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	11 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** FGD **2.** Riset Cepat **3.** Penerbitan Buletin Ilmiah
5		1. Kurangnya minat investor dikarenakan Belum ada insentif atau kemudahan berinvestasi untuk bidang	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Fasilitasi Pembuatan Perbup Insentif bagi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Pertanian, Perikanan, peternakan dan pangan. 2. terdapat 79 Klaster Perda dan Perbup yang telah tidak sesuai dengan perubahan zaman.			Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Industri yang bergerak disektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Pangan Evaluasi Kebijakan legal audit atas **2.** Produk Hukum Daerah Kab.Kukar
6		hasil pembangunan tahun 2024 belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan masih rendahnya capaian penurunan angka kemiskinan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** Lanjutan kajian determinan kemiskinan **1.** dan penanggulangannya perspektif pendidikan
7		tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Kukar sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 sudah mencapai 28 Kasus aduan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian Determinan terhadap penyakit masyarakat (perempuan dan Anak)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
8		1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah SD dan SLTP berdampak pada tingginya angka pengangguran dan Kemiskinan. 2. Situs karajaan Kutai Ing Martadipura didesa Jembayan berada diwilayah pemukinan dikhawatirkan akan hilang	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian pengaruh APK dan APM terhadap angka pengangguran terbuka **2.** Lanjutan Kajian Kerajaan Kutai Ing Martadipura di desa Jembayan Kec. Loa Kulu
9		Angak Harapan Hidup (AHH) Kab. Kukar tahun 2024 rata- rata 72,65 Tahun sementara Provinsi Kaltim 74,62 tahun, Nasional 73.5 tahun atau urutan 8 dari Kab./Kota di Kaltim. Tingkat Kesehatan Kab. Kukar berada di urutan 6 sekaltim	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Survei angka/umur harapan hidup
11		Keberadaan IKN masih jauh dari harapan dalam penyerapan tenaga kerja Lokal, hal ini apakah dikarenakan kompetensi tenaga kerja lokal yang rendah atau upah tenaga kerja dari luar lebih rendah dari tuntutan upah tenaga kerja lokal atau ada faktor penyebab lainnya	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian pengaruh pembangunan IKN terhadap daya serap dan peningkatan ketenagakerjaaan khususnya tenaga kerja lokal
12		1. sampai saat ini belum ada road map tentang sentra perekonomian baru dikarenakan Kab. Kukar menjadi mitra IKN. 2. Pemanfaatan Program dedikasi Program usaha kecil idaman dikarenakan kurangnya sosialisasi pemanfaatan Program tersebut	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Fasilitasi Tataniaga produksi usaha koperasi dan UKM di Ibukota negara dan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tumbuhnya pusat- pusat ekonomi baru **2.** Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi Program usaha kecil idaman (Kredit Kukar Idaman)
13		1. Survey tengtang NTP Kab. Kukar terakhir dilakukan pada tahun 2019 2. belum ada interkonekting dari lahan pertanian dengan LPM.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Evaluasi kebijakan subsidi untuk peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dalam rangka nilai tukar petani

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		3. PD belum secara berkala dan mandiri melakukan PDRB. 4. Belum maksimalnya tentang Tataniaga pemasaran hasil pertanian khususnya Padi dan Beras. 5. Banyaknya potensi yang dimiliki kecamatan samboja maupun samboja barat baik dibidang sosial maupun ekonomi yang perlu dipetakan untuk mempermudah perencanaan pemberdayaan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.					**2.** fasilitasi interkonekting dari lumbung pertanian ketingkat pasar **3.** Pengembangan Basis Data Kelitbangan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan **4.** Kajian Tataniaga pemasaran hasil pertanian padi/beras dikabupaten kutai kartanegara **5.** Kajian Pemetaan Sosial Ekonomi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan petani, perkebunan dan peternakan dikecamatan samboja barat **6.** Kajian Pemetaan Sosial Ekonomi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan petani, perkebunan dan peternakan dikecamatan samboja
14		Petani dan Nelayan kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar solar	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasilPenelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Nilai Tukar Nelayan (NTN)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
18		kualitas air dianak sungai makahakam saat ini sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan limbah bahan kimia yang dibuang secara langsung ke anak sungai	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian Kualitas anak sungai Mahakam sebagai bahan baku air bersih
19		Program dedikasi Fasilitasi Perumahan rakyat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh investor pengembang pemukiman dan masih kurangnya sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian Perumahan Rakyat dalam rangka mitra IKN bagi Pengusaha UKM
20		1. kurangnya Pemanfaatan tehnologi tepat guna mengakibatkan rendahnya hasil produksi dan tingginya biaya produksi. 2. Anak sungai mahakam didesa muara Enggelam sangat efektif dalam budidaya perikanan dan mempunyai potensi yang mampu mengawetkan produk olahan kayu tetapi 3. Kurang dimanfaatkannya tehnologi terintegrasi mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. kurangnya pengetahuan tidak termanfaatkan secara maksimal 4. belum termanfaatkannya tehnologi disektor hulu berakibat Hilirisasi produk pertanian dan perkebunan masih terhambat. 5. Mahalnya hanga Pestisida, Herbisida. 6. Terdapat 13 Kultifar yang sudah lolos uji kematangan dan terdapat 30 jenis padi lokal unggul yang perlu di uji untuk menjadi Kultifar 7. belum termanfaatkannya secara maksimal tanaman endemik khas Kab. Kukar untuk bahan Kosmetik	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Tehnologi tepat Guna untuk Peningkatan Kualitas lahan Pertanian **2.** Implementasi Sceince Technopark **3.** Fasilitasi tehnologi terintegrasi dibidang pertanian, perkebunan dan Pangan **4.** Fasilitasi tehnologi disektor hulu **5.** Fasilitasi Pemanfaatan racun upas **6.** Fasilitasi Pemutihan 13 Kultifar Padi unggul **7.** Fasilitasi pemanfaatan buah lokal sebagai bahan kosmetik
21		1. Pada tahun 2022 peringkat Kab. Kukar diposisi 77 Kab Inovatif 2. Kurangnya minat Kaum Milenial berusaha dibidang pertanian. 3. Belum semua PD membuat inovasi sesuai dengan perjanjian kinerja, satu PD satu Inovasi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Pekan inovasi kaum milenial bidang pertanian **2.** Pekan inovasi daerah
22		Produk Karya seni khas, hak cipta Karya seni, Lambang Budaya, Adat istiadat belum sepenuh terinventarisir serta belum didaftarkan pada Kementerian/Lembaga	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Inventarisasi dan Pendaftaran haki

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar tercapainya sinergitas kegiatan kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis BRIDA tetap memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai ujung tombak pengembangan dunia kelitbangan di tanah air serta tetap memperhatikan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya peningkatan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dan perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya dalam menentukan Kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020-2026, maka pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan harus diarahkan kepada meningkatnya produktivitas invensi dan inovasi untuk memperkuat transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi sesuai sasaran strategis. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dimaknai oleh keahlian sumber daya manusia dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang oleh pembangunan faktor *input* (kelembagaan, sumber daya dan jaringan).

adapun untuk memaknai daya saing bangsa adalah kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan (LPNK, LPK, badan usaha, perguruan tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkanlah misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menjawab permasalahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan uraian sebagai berikut :

a. Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya riset, dan penciptaan inovasi melalui peningkatan kualitas sdm iptek, penguatan transformasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan berlandaskan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan daya saing.
b. peningkatan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Renstra BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara juga tetap memperhatikan rencana strategis BRIDA Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling men-*support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan yang diharapkan dapat mengetahui kelebihan/kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan yang mempunyai kekurangan/kelemahan. Adapun tujuan BRIDA adalah “meningkatnya kinerja penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan Daerah“, sedangkan indikator tujuan BRIDA adalah “persentase rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan senagai salah satu bahan penyusunan kebijakan Daerah “.

Hal tersebut dimaksudkan agar BRIDA mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada satu sasaran pun atau aktivitas yang tertunda atau tidak tercapai. Perumusan tujuan yang ditetapkan oleh BRIDA diupayakan untuk mengikuti kriteria keberhasilan perumusan yaitu :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1) aksestabilitas, yang berarti tujuan dapat diterima oleh berbagai pihak dalam lingkungan BRIDA;
2) fleksibilitas, yakni mudah untuk disesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat;
3) dapat diukur, yaitu berarti tujuan dapat dinyatakan secara nyata dan jelas;
4) motivator, sebagai pendorong bagi kinerja yang terpenuhi yang berarti tujuan cukup jelas namun masih dalam batasan untuk dapat dicapai;
5) kesesuaian dengan rumusan visi dan misi kepala Daerah; dan
6) mudah dipahami.

Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan BRIDA pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) melaksanakan kegiatan kelitbangan di bidang Pemerintahan Daerah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi Daerah;
2) merumuskan hasil akhir kelitbangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
3) mempublikasikan hasil-hasil kelitbangan melalui jurnal penelitian dan buletin serta media massa cetak dan media massa audio visual; dan
4) menyampaikan hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat (pemangku kepentingan).

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Brida Kabupaten Kutai Kartanegara adalah " meningkatnya kinerja kelitbangan dalam pengguatan inovasi Daerah " sedangkan Indikator sasaran terdiri dari :

1. persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan
2. indeks inovasi daerah.

Dari dua indikator tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk target kinerja oleh masing-masing bidang sebagai berikut

1) tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan Daerah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi daerah sesuai kebutuhan Daerah;

2) termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan Daerah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi Daerah sesuai kebutuhan Daerah;
3) tersedianya *data base* Daerah;
4) terlaksananya kajian mandiri, tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan;
5) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaksanaan kerja organisasi;
6) terpeliharanya sarana dan prasarana organisasi.
7) terpenuhinya kebutuhan tenaga jabatan fungsional peneliti yang memadai;
8) meningkatnya kapasitas keilmuan dan kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai;
9) terwujudnya pelayanan keuangan yang lebih cepat dan akurat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;
10) terwujudnya koordinasi internal dan lintas lembaga yang efektif;
11) meningkatnya tingkat kematangan inovasi Daerah; dna
12) meningkatnya kinerja tim kelitbangan.

Sasaran BRIDA merupakan bagian konsep berkesinambungan (integral), tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategik. Sasaran fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 P rogram dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah –kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, visi dan misi Bupati yaitu Program Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri (IDAMAN), RPJMD, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menyusun Program dan kegiatan BRIDA Tahun 2026 tetap memperhatikan upaya-upaya meningkatnya kinerja kelitbangan dalam penguatan inovasi Daerah dengan indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan indeks inovasi Daerah serta meningkatnya akuntabilitas kinerja PD dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja BRIDA.

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 dengan pagu indikatif berdasarkan Renstra periode Tahun 2025-2029 BRIDA sebesar Rp37.660.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota :

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	9 Dokumen	11.270.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	4 Dokumen	125.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	6 Dokumen	300.000.000
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Kutai Kartanegara	7 Pelayanan	1.000.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	12 Bulan	765,000,000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kutai Kartanegara	1 Unit	500.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	242 Unit	400.000.000
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian peraturan	Kutai Kartanegara	29 Dokumen	6.400.000.000
10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kutai Kartanegara	13 Dokumen	7.000.000.000
11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kutai Kartanegara	9 Dokumen	4.350.000.000
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Kutai Kartanegara	5 Dokumen	4.800.000.000

c. Rumusan Program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Rancangan akhir Rencana Kerja BRIDA telah difinalisasi melalui forum pendampingan penggunaan aplikasi SIPD-RI dan verifikasi kegiatan/sub-kegiatan prioritas rancangan akhir Renja-PD tahun 2026 dalam aplikasi SIPD-RI dan E-RPJMD. Terdapat perbedaan antara rumusan rancangan akhir BRIDA terhadap rancangan awal RKPD, hal ini dipengaruhi adanya analisis yang dilakukan oleh BRIDA pada saat penyusunan rancangan akhir serta adanya usulan paket pekerjaan dari *stakeholder* terkait yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mempercayakan kepada BRIDA untuk melakukan penelitian/pengkajian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh *stakeholder*. Selain itu juga adanya *mandatory* dari Pemerintah Daerah yang berdampak pada berubahnya rancangan akhir Rencana Kerja BRIDA tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

Sebagai gambaran dari rumusan Program dan kegiatan sesuai rancangan akhir RKPD, maka data dapat dilihat pada tabel TC-33 rencana Program dan kegiatan PD Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2025 BRIDA dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**		**100**	**Persen**	**Rp 15,110,000,000.00**
5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**5**	**Laporan**	**750,000,000**
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	450,000,000
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	150,000,000
5	05	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	50,000,000
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**9**	**Dokumen**	**11,270,000,000**
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	APBD		70	Orang/Bulan	11,000,000,000
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Brida	APBD		6	Laporan	170,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	APBD		1	Dokumen	50,000,000
5	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**4**	**Dokumen**	**125,000,000**
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	APBD		1	Dokumen	75,000,000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	50,000,000
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	APBD		2	Laporan	50,000,000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		-	-	-
5	**05**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**6**	**Dokumen**	**300,000,000**
2	05	01	2,05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fu	Brida	APBD		20	Orang	200,000,000
2	05	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	APBD		70	Orang	100,000,000
5	**05**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan administrasi umum**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**7**	Pelayanan	**1,000,000,000**
5	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Brida	APBD		3	paket	300,000,000
5	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	150,000,000
5	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	50,000,000
5	05	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	75,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	APBD		88	Laporan	300,000,000
5	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	APBD		37	Dokumen	75,000,000
5	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	APBD		1	Dokumen	50,000,000
5	**05**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**12**	**Bulan**	**765,000,000**
5	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Brida	APBD		12	Bulan	65,000,000
5	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Brida	APBD		12	Bulan	700,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**1**	**Unit**	**500,000,000**
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Brida	APBD		1	paket	500,000,000
5	**05**	**01**	**2,08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**242**	**Unit**	**400,000,000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		APBD		30	Unit	300,000,000
5	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Brida	APBD		212	Unit	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**		**100**	**Persen**	**Rp 22,550,000,000.00**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**29**	**Dokumen**	**6,400,000,000**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Kajian tentang pembentukan desa baru Tanjung Limau Muara Badak; b.Kajian tentang pembentukan desa Loa Janan Ulu dan Loa Janan Ilir; c.Kajian tentang pembentukan desa baru Lamin Telihan; d.Kajian tentang pembentukan desa baru Kelurahan Loa Ipuh Darat; e.Kajian Pemekaran Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu; f.Kajian Kebijakan Pemerintah Terhadap Insfrastruktur Olaharaga di Kabupaten Kutai Kartanegara; g.Kajian Kebijakan Sinergi Litbang dan Sektor swasta untuk daya saing produk local di Kabupaten Kutai Kartanegara; h.Kajian Kebijakan Pengelolaan Alur Sungai dan Pesisir untuk Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara; i.Kajian tentang Tapal Batas Desa Kecamatan Loa Kulu dan Kota Bangun Darat; j.Kajian Kebijakan Pemerintah terhadap penyediaan Sarana Prasarana untuk Rumah Singgah ODJG di Kabupaten Kutai Kartanegara.	10	Dokumen	2,050,000,000
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Kajian kebijakan pemerintah peran pasar tradisional dan modern dalam peningkatan perekonomian lokal b.Kajian tentang kebijakan Pemerintah terkait Transportasi Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara; c.Kajian Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Parkir; d.Kajian Evaluasi Implementasi SK Guru dengan Honor Sekolah.	4	Dokumen	1,100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Kajian penataan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; b.Kajian penataan tanah ulayat di Kabupaten Kutai Kartanegara.	2	Dokumen	500,000,000
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Kajian Kebijakan Efektivitas (Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Desa	1	Dokumen	150,000,000
5	05	02	2.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Kajian Kebijakan Tentang Tenaga Perencana Keuangan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara; b.Kajian kebijakan tentang Kualitas Pelayanan di Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara; c.Kajian Kebiajkan pemerintah terhadap pemberian Insentif terhadap petugas Posyandu dan Kader Posyandu; d.Kajian Kebijakan Peran Aparatur Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.	4	Dokumen	900,000,000
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Kajian tentang tenaga teknis akuntan dalam pengelolaan dana desa	1	Dokumen	250,000,000
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Model Bumdes Yang Berkelanjutan dan Berbasis Teknologi; b.Kajian kebijakan pemerintah peran Bumbes mengembangkan ekonomi desa yang berbasis pada potensi local; c.Kajian Kebijakan terhadap Dampak Usaha Keramba di sungai Mahakam	3	Dokumen	600,000,000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a.Pengelolaan jurnal Badan Riset dan Inovasi Daerah; b.Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Literasi Budaya dan Bahasa dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.	2	Dokumen	350,000,000
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Kajian kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja lokal terdampak perusahaan swasta	1	Dokumen	200,000,000
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	300,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**13**	**Dokumen**	**7,000,000,000**
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	20 Kecamatan	APBD	1. Survei Indeks Kebahagiaan 2. Survei IKLI 3. Survei Indeks Pembangunan Hukum 4. Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama 5. Survei IKM terhadap Implementasi Program Bupati Kutai Kartanegara 6. Survei/Kajian IDSD 7. Survei Indeks Ketimpangan Gender 8. Survei Indeks Pembangunan Kebudayaan	6	Dokumen	1,200,000,000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Dikbud	Jumlah Dokumen	Sebaran Situs di Muara Kaman	APBD	1. Deliniasi dan Zonasi Cagar Budaya di Muara Kaman 2. Ekskavasi 3. Pelestarian, Pengamanan dan Pengembangan 4. Pemetaan Potensi, Minat, Bakat Siswa Kelas 9 & 12 serta OMD 5. Determinan APS dan strategi penanggulangannya 6. Kajian akses pendidikan dan kualitas pendidikan diperkotaan dan wilayah terpencil 7. Kajian Dampak Sosial ekonomi dari Kemiskinan, stunting dan Pendidikan	4	Dokumen	4,800,000,000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Kesehatan	Jumlah Dokumen	6 Kecamatan	APBD	1. Kajian Evaluatif Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting 2. Survei Indeks Harapan Hidup	2	Dokumen	600,000,000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen	12 Kecamatan	APBD	1. Kajian Dampak Kependudukan serta Model Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 2. Survei Indeks Kesejahteraan Sosial 3. Kajian Evaluatif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Kutai Kartanegara	1	Dokumen	400,000,000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Pariwisata	Jumlah Dokumen	Kec. Tenggaroang Seberang	APBD	1. Pengembangan Potensi Wisata Alam Air Terjun di Tenggarong Seberang			
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**	**Kukar**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**9**	**Dokumen**	**4,350,000,000**
5	**05**	**02**	**2.04**	**01**	**Penelitian dan Pengembangan ESDM**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan ESDM**	**Kukar**	**APBD**		**2**	**Dokumen**	**1,150,000,000**
					Analisis Karakteristik Tingkat Kesuburan tanah pada Lahan Pasca Tambang	Jumlah Dokumen Analisis Karakteristik Tingkat Kesuburan tanah pada Lahan Pasca Tambang	Kukar	APBD	Untuk mengetahui keseuai lahan pengembangan komoditi pertanian pada lahan Eks Tambang.	1	Laporan	650,000,000
					Kajian Pemanfaatan lubang bekas tambang (Void) untuk penyediaan bahan baku air bersih.	Jumlah Dokumen Kajian Pemanfaatan lubang bekas tambang (Void) untuk penyediaan bahan baku air bersih.	Kukar	APBD	Tempat tampungan bahan baku air bersih (Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, karena ketiga lokasi tesebut tidak tersedia air permukaan yang cukup/**Masukan dari Kepala PDAM saat Forum Lintas Perangkat Daerah**).	1	Laporan	500,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	**05**	**02**	**2.04**	**02**	**Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**Kukar**	**APBD**		**1**	**Laporan**	**600,000,000**
					Kajian sistem Pengembangan Transportasi Pedesaan	Kajian sistem Pengembangan Transportasi Pedesaan	Kukar	APBD	Usulan dari **Sekretaris Dinas Perhubungan saat Forum Lintas Perangkat Daerah.**	1	Laporan	600,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan**	**Kukar**	**APBD**		**1**	**Laporan**	**350,000,000**
					Penyusunan Dokumen Indeks Komoditi Kelautan dan Perikanan (Nilai Tukar Nelayan, Nilai Pembudidaya dan Nilai Usaha Perikanan).	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Indeks Komoditi Kelautan dan Perikanan (Nilai Tukar Nelayan, Nilai Pembudidaya dan Nilai Usaha Perikanan).	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dislutkan.**	1	Laporan	350,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**	**Kukar**	**APBD**		**4**	**Laporan**	**1,850,000,000**
					Kajian Subsidi Input dan atau Output Kepada Petani/Pekebun Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun.	Jumlah Dokumen Kajian Subsidi Input dan atau Output Kepada Petani/Pekebun Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun.	Kukar	APBD	Usulan dari **Dinas Pertanian dan Peternakan saat Forum Lintas Perangkat Daerah (Dasar kebijakan pemberian bantuan/insentif kepada petani/pekebun).**	1	Laporan	500,000,000
					Survei Pola Distribusi Pangan Utama (Beras) di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah Dokumen Survei Distribusi Pangan Utama (Beras) di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Kukar	APBD	Usulan dari **Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan saat Forum Lintas Perangkat Daerah (Dasar untuk menganalisis/ menghitung ketersediaan pangan utama di Kukar).**	1	Laporan	500,000,000
					Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani (NTP Komoditi Pertanian dan Perkebunan).	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani (NTP Komoditi Pertanian dan Perkebunan).	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dinas Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Peternakan.**	1	Laporan	350,000,000
					Survei Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutaanan.	Jumlah Dokumen Survei Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutaanan.	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dislutkan, IKU Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan**	1	Laporan	500,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM**	**Kukar**	APBD		**1**	**Laporan**	**400,000,000**
					Survei Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlag Dokumen Survei Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dinas Pariwisata.**	1	Laporan	400,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**5**	**Dokumen**	**4,800,000,000**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Penyusunan Policy Brief dan Monev Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah; b. Melaksanakan Penelitian Pemanfaatan Cangkang Sawit setara Batubara sebagai energi alternatif; c. Melaksanakan penelitian tentang Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang; d. Melaksanakan penelitian tentang Pemanfaatan kolam eks tambang (void) sebagai bahan baku air minum; e. Melaksanakan Penelitian penggunaan sorgum menjadi bioethanol sebagai energi alternatif; f. Melaksanakan Penelitian terkait potensi desa untuk mewujudkan one village one product (salah satunya permintaan dari Desa Purwajaya terkait kandungan kunyit hitam); g. Melaksanakan penelitian pemuliaan padi gunung yang lebih adaftif dengan produktifitas tinggi.	1	Dokumen	2,100,000,000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Pembuatan mesin hasil kegiatan penelitian terkait pengolahan cangkang sawit dan sorgum sebagai energi alternatif; b. Pembuatan mesin pengolahan hasil kegiatan penelitian terkait potensi desa One Village One Product; c. Melaksanakan kegiatan penerapan hasil penelitian pemuliaan padi gunung yang lebih adaftif dengan produktifitas tinggi.	1	Laporan	1,000,000,000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa, ASN dan Kelompok Masyarakat (Bidang Pendidikan, Perempuan dan Difabel, Pemuda dan Mahasiswa); b. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah; c. Mengikuti Lomba Inovasi Tingkat Nasional; d. Mengikuti Lomba Inovasi Tingkat Provinsi; e. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.	1	Laporan	1,200,000,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah; b. Pembaharuan aplikasi https://inovasi.kukarkab.go.id/; c. Pembuatan video inovasi; d. Publikasi inovasi dan hasil penelitian.	1	Laporan	300,000,000
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah; b. Fasilitasi pendaftaran HAKI.	1	Laporan	200,000,000
											Total Pagu	**Rp 37,660,000,000**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

a. Catatan penting :

Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang dibutuhkan dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan pengelola administrasi kegiatan sampai dengan laporan akhir kegiatan, maka kegiatan kelitbangan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BRIDA.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Pelaksananaan kegiatan dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

a. judul kegiatan berdasarkan *idea consep paper* (ICP);
b. dilanjutkan dengan pembuatan kerangka acuan kegiatan;
c. pembuatan rencana kerja anggaran;
d. pembuatan dokumen perencanaan anggaran;
e. pembuatan surat keputusan pejabat kuasa penguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
f. pembuatan surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan;
g. penunjukan tenaga peneliti;
h. pengajuan proposal;
i. kesepakatan kerjasama kegiatan;
j. pelaksanaan kegiatan (pengambilan data, pembuatan *draft* laporan hasil, laporan hasil, pra seminar dan seminar, laporan akhir); dan
k. penyampaian rekomendasi ke pemangku kepentingan.

c. Rencana tindak lanjut

Untuk memastikan keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan target dan indikator yang sudah ditetapkan, maka diperlukan evaluasi dan monitoring di setiap kegiatan secara periodik. Diharapkan seluruh aparatur BRIDA memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kerja tahun 2026 dan sebaik-baiknya menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, singkronisasi, harmonisasi, sinergitas dan efektifitas dalam melaksanakan Kegiatan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen RKPD perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rancangan awal Renja-PD. Dokumen tersebut merupakan dokumen rancangan awal perencanaan kerja PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, yaitu pemungutan pendapatan asli Daerah (PAD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah tersebut disusun dalam dokumen perubahan rancangan Rencana Kerja Bapenda, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda untuk mencapai target kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda.

Rancangan awal Rencana Kerja Bapedan tahun 2026 disusun untuk menjabarkan perubahan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap Program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Bapenda tahun 2026, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang mengalami perubahan pelaksanaan pekerjaan, target kinerja serta anggaran pada tahun anggaran 2026 yang bertujuan untuk:

1. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan Program dan kegiatan;
2. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

3. memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi Program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. memastikan konsistensi arah kebijakan PD dengan rumusan pelaksanaannya melalui Program/kegiatan; dan
5. mendukung prioritas Bupati pada rancangan awal kerja Pemerintah Daerah dengan tugas badan pendapatan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 disusun sesuai dengan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan TW II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :
  a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  b. uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
  c. penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
  d. tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP
- a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun ke-5 (lima) Renstra Bapenda tahun 2021-2026, dimana proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Bapenda tahun 2026, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan RKPD 2026. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Program dan kegiatan serta sub-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator Program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Bapenda tahun 2026, maka dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 dengan menilai capaian realisasi indikator Program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator Program dan kegiatan tahun 2026. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Dengan rincian capaian kinerja masing-masing Program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Program penunjang urusan pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan indicator nilai sakip perangkat daerah belum memenuhi target kinerja yang ada pada dokumen renstra dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Program pengelolaan keuangan Daerah dengan indikator kinerja ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat telah memenuhi target dengan capaian target untuk 2024.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

   Program pengelolaan pendapatan Daerah dengan indikator kinerja presentasi pertumbuhan pajak Daerah telah memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya.

Tercapainya target kinerja Program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah disebabkan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan maupun ain-lain pendapatan Daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan Daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan Daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. PAD merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Bapenda harus melakukan upaya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi Daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bapeda telah melaksanakan berbagai Program dan kegiatan serta sub-kegiatan selama tahun 2025. Penetapan target pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada data potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta realisasi

penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun sebelumnya.

Target dan realisasi capaian kinerja pelayanan Bapenda dengan indikator pertumbuhan pajak Daerah sesuai dengan target Renstra Bapenda 2021 – 2026 sesuai dengan Tabel terlampir (Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDA R NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATA N ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHU N 2023	TAHU N 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Pajak Daerah			7,52%	8,43%	9,66%	11,33%	7,52%	24,13%	24,13%	24,13%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

Dokumen rancangan awal Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telahaan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang menjadi urusan Bapenda. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Program yang menjadi kewenangan Bapenda dalam mendukung visi misi Kepala daerah menjadi Prioritas utama dalam Rencana Kerja Bapenda, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dapat diwujudkan.

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Estimasi kebutuhan pagu dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub-kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp50.222.297.941,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

C. Rumusan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan visi Bapenda seperti yang tertuang, maka Program dan kegiatan serta sub-kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda tahun 2026 sesuai tabel terlampir (Tabel T-C.33).

Tabel (T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BAPENDA	100%	47.869.914.921			100%	44.045.408.422
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	BAPENDA	100%	850.000.000			100%	850.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	6 Dokumen	450.000.000	APBD		2 Dokumen	450.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Penyelengaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelengaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Pelaksanaan Forum PD berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Ranka Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah BA Pelaksanaan Forum PD berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Ranka Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	BAPENDA	1 BA	50.000.000	APBD			50.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Renja PD								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BAPENDA		32.478.348.637	APBD			34.703.842.138
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	264 Orang	41.364.932.357	APBD		330 Orang	41.364.932.357
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA	1 Laporan	300.000.000	APBD		15 Orang	250.000.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		BAPENDA		200.000.000	APBD			100.000.000
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	4 Dokumen	200.000.000	APBD		4 Dokumen	100.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BAPENDA		350.000.000,00	APBD			200.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	11 Dokumen	100.000.000	APBD		238 Orang	100.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	30 Orang	250.000.000	APBD		30 Orang	100.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		BAPENDA		2.800.000.000	APBD			2.800.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1 Paket	500.000.000	APBD		30 Paket	200.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	Dokumen	-	APBD		Dokumen	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4.054 Paket	500.000.000	APBD		4054 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	1 Paket	200.000.000	APBD		45 Paket	200.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	1.000 Paket	1.500.000.000	APBD		1000 Paket	2.000.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	1000 Dokumen	100.000.000	APBD		1000 Dokumen	100.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BAPENDA		6.000.000.000	APBD			200.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 unit	4.000.000.000	APBD		1 unit	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 unit	2.000.000.000	APBD		1 unit	200.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BAPENDA		3.041.566.284	APBD			3.041.566.284
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 Laporan	1.500.000.000	APBD		12 Laporan	1.500.000.000
			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	3 Laporan	150.000.000	APBD		2 Lapora	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	58 Laporan	1.391.566.284	APBD		58 Laporan	1.391.566.284
			Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		BAPENDA		2.150.000.000	APBD			2.150.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	6 Unit	650.000.000	APBD		6 Unit	650.000.000
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA	100 Unit	500.000.000	APBD		100 Unit	500.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	5 unit	1.000.000.000	APBD		5 unit	1.000.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BAPENDA		7.250.000.000,00	APBD			7.250.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		7.250.000.000,00	APBD			7.250.000.000,00
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	350.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	3 Laporan	750.000.000	APBD		3 Laporan	750.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	3746 Laporan	1.650.000.000	APBD		3746 Laporan	1.650.000.000
			Pengolahan,Pemeliharaa n dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	BAPENDA	180.000 Laporan	400.000.000	APBD		180.000 Laporan	400.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pajak Daerah							
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	160.000 Objek pajak	500.000.000	APBD		160.000 Objek pajak	500.000.000
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	11.000 Dokumen	250.000.000	APBD		11.000 Dokumen	250.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	7491 Layanan	500.000.000	APBD		7491 Layanan	500.000.000
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	180.000 Dokumen	350.000.000	APBD		180.000 Dokumen	350.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	1000 Dokumen	500.000.000	APBD		1000 Dokumen	500.000.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Dokumen	350.000.000	APBD		80 Dokumen	350.000.000
			Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	100 Dokumen	200.000.000	APBD		100 Dokumen	200.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	100 Laporan	500.000.000	APBD		100 Laporan	500.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak	BAPENDA	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				611.000.000				611.000.000
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	BAPENDA			APBD			
				Realisasi Penerimaan DBH Pusat							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	BAPENDA	95.78%	611.000.000	APBD		95.78%	611.000.000
			Jumlah				64.967.496.641				64.967.496.641

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan Daerah khususnya presentase pertumbuhan wajib pajak yang menjadi indikator utama Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Kartanegara

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan pagu anggaran tidak sesuai kebutuhan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencan Kerja yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kutai Kartanegara visi dan misi Kepala Daerah, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh seluruh aparatur Bapenda. Apabila didalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda tahun 2026 berpedoman pada:

1. Renstra Bapenda tahun 2021-2026;
2. permasalahan dan tantangan yang dihadapi; dan
3. RPJMD tahun 2021-2026.

C. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program di masing-masing bidang untuk tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang-bidang dalam melaksanakan Program dan kegiatan, sehingga Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026,

Dokumen Rencana Kerja 2026 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Bapenda. Rencana Kerja 2026 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat struktural dan seluruh staf Bapenda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ; dan

c. RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan PD menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, Program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-PD yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Renja-PD. Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-PD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat Program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan Program dan kegiatan sesuai skala prioritas Daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target renstra PD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Renja-PD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, Program dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja-PD dapat dijadikan pedoman dalam menyusun RKA-SKPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-PD BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026.
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kertanegara tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Renja-PD BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

a. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan Program ;
c. Menyelaraskan Program dengan penganggaran ;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; dan

e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra PD.

Sedangkan, tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Renstra ke dalam Program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan Program kegiatan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran PD

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V : Penutup

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan *review* terhadap hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan Program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja Program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daaerah (DPA-PD) tahun berjalan.

Untuk capaian Program, kegiatan dan sub-program sampai dengan Triwulan II sampai dengan saat ini telah mecapai rata-rata 60% (enam puluh persen) progres pelaksanaan dan 44,50 % (empat puluh empat koma lima puluh persen) capaian realisasi keuangan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis *Acrual*. Penganggaran berbasis *Acrual* merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Program kegiatan. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelola keuangan dan aset Daerah sebagai bagian dari PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) "*Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, fesien dan Melayani.*" sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yaitu:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas BPKAD	Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai	BPKAD
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD
		Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Kesesuaian Pengelolaan BMD, sesuai Peraturan Perundang-undangan	BPKAD

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel T-C. 29.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29

Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	70,99 Nilai	73 Nilai	69,50 Nilai	100	75 Nilai	69,50 Persen	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	12 Dokumen	60	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	Dokumen	60	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	Dokumen	60	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	Dokumen	60	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	Dokumen	60	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	Laporan	60	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	Laporan	60	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku									
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	100	168 orang/ Bulan	504 orang/ Bulan	60	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	40 Dokumen	60	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2750 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	100	550 Dokumen	2200 Dokumen	60	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	48 Laporan	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD K									
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	16 Unit	60	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	200 Paket	200 Paket	200 Paket	100	200 Paket	400 Paket	100	
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	36 Dokumen	60	
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 Orang	60	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	245 unit	49 unit	49 unit	49 unit	100	49 unit	196 unit	60	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4 Paket	60	
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4 Paket	60	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 :Laporan	150 Laporan	150 :Laporan	150 :Laporan	100	150 :Laporan	600 :Laporan	60	
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	48 Laporan	60	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	48 Laporan	60	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	24 Unit	60	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	80 Unit	60	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	100	60 Unit	240 Unit	60	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	12 Unit	60	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase aparatur perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran									
34	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
35	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	290 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	100	58 Dokumen	232 Dokumen	60	
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	290 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	100	58 Dokumen	232 Dokumen	60	
38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Daerah tentang Penjabaran APBD										
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	60	
42	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
44	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
45	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
46	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	580 Orang	116 Orang	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	464 Orang	60	
	Koordinasi dan Pengelolaan	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Perbendaharaan Daerah	pengelolaan perbendaharaan daerah									
		Persentase Transaksi Non Tunai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
47	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
48	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	
49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	48 Dokumen	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
50	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50000 Dokumen	10000 Dokumen	10000 Dokumen	10000 Dokumen	100	10000 Dokumen	40000 Dokumen	60	
52	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1160 Orang	232 Orang	232 Orang	232 Orang	100	232 Orang	811 Orang	60	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP									
53	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan		
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	60	
55	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	12 Laporan	60	
56	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	12 Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
57	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	60	
58	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	580 Orang	116 Orang	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	464 Orang	60	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	24 Laporan	60	
60	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	40 Laporan	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		bagi Hasil Kabupaten/Kota									
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik	0,9 Persen	0,9 Persen	0,9 Persen	0,85 Persen	100	0,9 Persen	0,85 Persen	100	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
61	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	60	
62	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	
63	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
64	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	
65	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	
66	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	60	
67	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	
68	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT.

2.2.1. *Strength* (kekuatan)

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara serta rancangan peraturan bupati tentang pejabaran APBD/perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup; dan
4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. *Weaknes* (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (ego sektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu Program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja ;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelola keuangan dan aset Daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
5. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

2.2.3. *Opportunity* (peluang)

1. Berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi PD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelola keuangan Daerah ;
2. Adanya kewajiban untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi sehingga dapat menjaga konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi; dan
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelola keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PD dilingkungan Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. *Treath* (ancaman)

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Semangat yang berlebihan *(euphoria)* terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Pemerintah Daerah dan DPRD, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang; dan
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
8	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Transaksi Non Tunai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Isu–isu atau permasalahan–permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor–faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dalam pengelola keuangan;
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelola keuangan di masing-masing PD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor–faktor yang mempengaruhi anatara lain :

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendididkan tentang pengelola keuangan.
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelola keuangan daerah.
3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan Program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau Program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel T-C. 31, sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026.

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	KEUANGAN						KEUANGAN						
02,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah			533.409.557.437,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah			1.007.077.032.688,00	
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	77	Nilai	38.651.964.497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	77	Nilai	151.237.263.014,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100	%	484.135.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100	%	250.000.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3	Dokumen	116.860.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3	Dokumen	150.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1	Dokumen	61.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1	Dokumen	0.00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1	Dokumen	45.780.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1	Dokumen	0,00	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1	Dokumen	61.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1	Dokumen	0,00	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi \Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*	1	Dokumen	45.780.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi \Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	1	Dokumen	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						*Realisasi Kinerja SKPD*				
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4	Laporan	69.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4	Laporan	50.000.000,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	4	Laporan	83.035.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	4	Laporan	50.000.000,00	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1	Dokumen	0,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1	Dokumen	0.00	*diperlukan dukungan pendanaan*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	BA	0,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	BA	0,00	*diperlukan dukungan pendanaan*
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100	%	22.044.084.353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100	%	144.683.168.934,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	168	orang / Bulan	20.899.422.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	168	orang / Bulan	143.617.892.934,00	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	10	Dokumen	151.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	10	Dokumen	0,00	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	600	Dokumen	67.930.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	600	Dokumen	67.930.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1	Dokumen	62.062.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1	Dokumen	62.062.000,00	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1	Laporan	91.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1	Laporan	50.000.000,00	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD*	1	Dokumen	42.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD*	1	Dokumen	42.000.000,00	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis*	12	Laporan	648.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis*	12	Laporan	648.284.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Prognosis Realisasi Anggaran*				Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Prognosis Realisasi Anggaran*				
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	80.966.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	%	100.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	%	170.000.000,00	
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	1	Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	1	Dokumen	35.000.000,00	
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1	Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	35.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Daerah pada SKPD										
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	50.000.000,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100	%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100	%	50.000.000,00	
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah.	1	Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah.	1	Dokumen	25.000.000,00	*diperlukan dukungan pendanaan*
X.XX.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000,00	*diperlukan dukungan pendanaan*
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	100	%	545.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	100	%	230.000.000,00	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	4	Dokumen	40.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	4	Dokumen	30.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	200	Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	200	Paket	0	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1	Dokumen	80.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	20	0rang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	20	0rang	100.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100	%	2.117.918.220	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100	%	1.334.569.680,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	65	Paket	476.474.720,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	65	Paket	0,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	1	Paket	124.989.680,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan*	1	Paket	124.989.680,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			yang Disediakan						*Penggandaan yang Disediakan*				
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	Paket	184.580.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	Paket	184.580.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	100	Laporan	781.296.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	100	Laporan	700.000.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1	Dokumen	251.857.820,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1	Dokumen	175.000.000,00	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	-	1	Dokumen	298.720.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	-	1	Dokumen	150.000.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*			253.399.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*			253.399.800,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	6	Unit	151.851.400,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	6	Unit	151.851.400,00	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Peralatan dan \Mesin Lainnya yang Disediakan*	18	Unit	101.548.400,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Unit Peralatan dan \Mesin Lainnya yang Disediakan*	18	Unit	0,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	65	Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	65	Unit	0,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	100	%	12.399.394.124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	100	%	2.789.640.000,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.039.640.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.039.640.000,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	12	Laporan	10.359.754.124,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	12	Laporan	750.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			perangkat daerah						perangkat daerah				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	%	708.033.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	%	1.408.033.000,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	500.000.000,00	*diperlukan dukungan pendanaan, untuk pemeliharaan.*
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	200.000.000,00	*diperlukan dukungan pendanaan, untuk pemeliharaan.*
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Unit	101.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Unit	101.860.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	3	Unit	606.173.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	3	Unit	606.173.000,00	
5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (lihat lagi Program ini di ERPJMD)	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	%	492.628.055.350	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (lihat lagi Program ini di ERPJMD)	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	%		
			Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%				Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%		
			Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%				Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%	4.020.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%	3.400.000.000,00	
			Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%				Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%				Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	%				*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	100	%		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	1	Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	1	Dokumen	150.000.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	1	Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	1	Dokumen	150.000.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	60	Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	60	Dokumen	250.000.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah DPA-SKPD yang \Diverifikasi*	60	Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah DPA-SKPD yang \Diverifikasi*	60	Dokumen	250.000.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Perubahan \DPA-SKPD*	60	Dokumen	135.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Perubahan \DPA-SKPD yang Diverifikasi*	60	Dokumen	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			yang Diverifikasi										
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	60	Dokumen	135.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	60	Dokumen	0,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	1	Dokumen	800.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	1	Dokumen	800.000.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	1	Dokumen	800.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	1	Dokumen	800.000.000,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan*	1	Dokumen	300.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan*	1	Dokumen	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	1	Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	1	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	1	Dokumen	500.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	1	Dokumen	300.000.000,00	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	1	Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	1	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	116	Orang	300.000.000,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	116	Orang	300.000.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%	1.080.911.910,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%	1.080.911.910,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%				Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	%				*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	100	%		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	1	Dokumen	79.545.455,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	1	Dokumen	79.545.455,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	1	Dokumen	60.000.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	1	Dokumen	60.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	12	Dokumen	213.075.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	12	Dokumen	150.000.000,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	1	Dokumen	85.700.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	1	Dokumen	50.000.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	10000	Dokumen	49.982.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	10000	Dokumen	49.982.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	180	Orang	592.609.455,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	180	Orang	300.000.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Transaksi Non Tunai	100	%	1.308.733.126,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Transaksi Non Tunai	100	%	1.022.711.800,00	
			Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%				Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%		
			Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100	%				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	1	Laporan	162.712.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	1	Laporan	162.712.000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	2	Dokumen	50.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	2	Dokumen	50.000.000	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	2	Laporan	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	2	Laporan	60.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota*	3	Laporan	599.999.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	3	Laporan	400.000.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1	Dokumen	199.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota*	1	Dokumen	199.999.800,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	1	Dokumen	0,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1	Dokumen	0,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	120	Orang	236.021.526	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	120	Orang	150.000.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa*	100	%	486.218.410.314	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa*	100	%	845.998.592.069,00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12	Laporan	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12	Laporan	27.827.637.058,00	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil*	12	Laporan	476.218.410.314	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	12	Laporan	818.170.955.011,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Kabupaten/Kota										
5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	2.129.537.590	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	5.068.938.350,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%	2.129.537.590	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%	5.068.938.350,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%		
			Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1	Dokumen	345.866.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1	Dokumen	300.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1	Dokumen	0,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1	Dokumen	0,00	*Diperlukan ntambahan Dana untuk kelanjutan Penyusunan Standar BMD.*
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1	Dokumen	100.000.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	0,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	125.000.000,00	*Diperlukan tambahan dana.*
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	1	Laporan	230.800.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	1	Laporan	150.000.000,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jakarta dan Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	163.746.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jakarta dan Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	150.000.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1	Laporan	414.187.240	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1	Laporan	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	749.938.350	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	1	Laporan	3.668.938.350,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	58	PD	75.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	58	PD	75.000.000,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	1	Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	1	Laporan	50.000.000,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	180	Orang	0,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	180	Orang	150.000.000,00	*Diperlukan ntambahan m dana untuk Pembinaan Pengelola BMD.*
JUMLAH TOTAL						533.409.557.437	JUMLAH TOTAL					1.007.077.032.688,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perencanaan Program dan kegiatan tahun 2026 tidak melakukan pengumpulan usulan Program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan 4 (empat) pilar utama, yaitu penguatan *local taxing power*, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: Tertib, Efisien; Ekonomis; Efektif; Transparan; dan Bertanggung Jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Renstra 5 (lima) tahunan, antara lain :

Tujuan :
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sasaran :
- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD
- Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran :
- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD.
- Ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan.
- Meningkatnya PD dalam menyampaikan LK tepat Waktu.
- Presentase Ketepan Waktu Penerbitan SP2D.
- Meningkatnya PD dalam pengelolaan Aset dengan Baik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain; menyusun rancangan APBD/perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Programnya bersifat regular, mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Daerah, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset Daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Tahun 2026 yang menjadi pelaksanaan sub-kegiatan prioritas adalah terkait pengamanan aset Pemerintah Daerah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Dalam melaksanakan Renstra BPKAD telah disusun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, terdapat 3 (tiga) Program Kegiatan, 13 (tiga belas(kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub-kegiatan dengan nilai total pagu aggaran sebesar Rp535.809.557.437 ,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh ripiah), sebagaimana tercantum dalam tabel T-C. 33, sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	KEUANGAN										
02,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	77	Kali	39.896.964.497,00	APBD		80	Nilai	43.997.542.144,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	BPKAD Kab. Kukar	100	%	484.135.000,00	APBD		100	%	484.135.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	116.860.000,00	APBD		3	Dokumen	116.860.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	61.560.000,00	APBD		1	Dokumen	61.560.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	45.780.000,00	APBD		1	Dokumen	45.780.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	61.560.000,00	APBD		1	Dokumen	61.560.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	45.780.000,00	APBD		1	Dokumen	45.780.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi \Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	4	Laporan	69.560.000,00	APBD		4	Laporan	69.560.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	4	Laporan	83.035.000,00	APBD		4	Laporan	83.035.000,00
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	0,00	APBD		1	Dokumen	0,00
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	BA	0,00	APBD		1	BA	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Kab. Kukar	100	%	22.044.084.353,00	APBD		100	%	26.144.662.000,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	BPKAD Kab. Kukar	168	orang/ Bulan	20.899.422.353,00	APBD		12	bulan	25.000.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	BPKAD Kab. Kukar	10	Dokumen	151.860.000,00	APBD		10	Lapor an	151.860.000,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	600	Dokumen	67.930.000,00	APBD		600	Dokumen Verifikasi	67.930.000,00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	62.062.000,00	APBD		1	Dokumen	62.062.000,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	91.560.000,00	APBD		1	Dokumen	91.560.000,00
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	42.000.000,00	APBD		1	Lapor an	42.000.000,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	648.284.000,00	APBD		12	bulan	648.284.000,00
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	80.966.000,00	APBD		12	bulan	80.966.000,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	220.000.000,00	APBD		100	%	220.000.000,00
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	35.000.000,00		*Optimalisasi Pengelolaan BVMD SKPD*	1	Dokumen	35.000.000,00
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	35.000.000,00	APBD	*Optimalisasi Pengelolaan BVMD SKPD*	1	Laporan	35.000.000,00
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000,00	APBD	*Optimalisasi Pengelolaan BVMD SKPD*	1	Laporan	50.000.000,00
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	50.000.000,00	APBD		100	%	50.000.000,00
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD	*Optimalisasi Pendapatan Retribusi*	1	Dokumen	25.000.000,00
5,02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah.	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD	*Optimalisasi Pendapatan Retribusi*	1	Dokumen	25.000.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	545.000.000,00	APBD		100	%	545.000.000,00
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	BPKAD Kab. Kukar	4	Dokumen	40.000.000,00	APBD		4	Dokumen	40.000.000,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	BPKAD Kab. Kukar	200	Paket	200.000.000,00	APBD		0	stel	200.000.000,00
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	80.000.000,00	APBD		1	Dokumen	80.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	50.000.000,00	APBD		3	Dokumen	50.000.000,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	BPKAD Kab. Kukar	20	0rang	175.000.000,00	APBD		20	0rang	175.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.117.918.220,00	APBD		100	%	2.117.918.220,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	65	Paket	476.474.720,00	APBD		65	unit	476.474.720,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	1	Paket	124.989.680,00	APBD		2083	Porsi	124.989.680,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	1	Paket	184.580.000,00	APBD		1	Paket	184.580.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	100	Laporan	781.296.000,00	APBD		100	Kali	781.296.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	251.857.820,00	APBD		1	Doku men	251.857.820,00
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Diokumen	298.720.000,00	APBD		1	Websi te	298.720.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	BPKAD Kab. Kukar			378.399.800,00	APBD				378.399.800,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	6	Unit	151.851.400,00	APBD		6	Unit	151.851.400,00
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	18	Unit	101.548.400,00	APBD		18	Unit	101.548.400,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	BPKAD Kab. Kukar	25	Unit	125.000.000,00	APBD	*Penunjang Operasioanl BPKAD*	25	Unit	125.000.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	BPKAD Kab. Kukar	100	%	12.399.394.124,00	APBD		100	%	12.399.394.124,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	2.039.640.000,00	APBD		12	bulan	2.039.640.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	10.359.754.124,00	APBD		12	bulan	10.359.754.124,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.708.033.000,00	APBD		100	%	1.708.033.000,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab. Kukar	6	Unit	500.000.000,00	APBD	*Pengadaan BBM dan Pemeliharaan*	12	bulan	500.000.000,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab. Kukar	20	Unit	500.000.000,00	APBD	*Pengadaan BBM dan Pemeliharaan*	12	bulan	500.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD Kab. Kukar	60	Unit	101.860.000,00	APBD		60	unit	101.860.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab. Kukar	3	Unit	606.173.000,00	APBD		12	Bulan	606.173.000,00
5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (lihat lagi Program ini di ERPJMD)	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	BPKAD Kab. Kukar	100	%	492.928.055.350,00	APBD		100	%	492.928.055.350,00
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah		100	%				100	%	
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD		100	%				100	%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	4.320.000.000,00	APBD		100	%	4.320.000.000,00
		Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik		100	%				100	%	
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran		100	%				100	%	
		Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran		100	%				100	%	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		1	Dokumen	200.000.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		1	Dokumen	200.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	BPKAD Kab. Kukar	60	Dokumen	250.000.000,00	APBD		60	Dokumen	250.000.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	BPKAD Kab. Kukar	60	Dokumen	250.000.000,00	APBD		60	Dokumen	250.000.000,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang \Diverifikasi*	BPKAD Kab. Kukar	60	Dokumen	135.000.000,00	APBD		60	Dokumen	135.000.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan \DPA-SKPD yang Diverifikasi*	BPKAD Kab. Kukar	60	Dokumen	135.000.000,00	APBD		60	Dokumen	135.000.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000,00	APBD		1	Dokumen	800.000.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000,00	APBD		1	Dokumen	800.000.000,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	300.000.000,00	APBD		1	Dokumen	300.000.000,00
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan*		1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		1	Dokumen	200.000.000,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	500.000.000,00	APBD		1	Dokumen	500.000.000,00
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	250.000.000,00	APBD		1	Dokumen	250.000.000,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	116	Orang	300.000.000,00	APBD	*Pembinaan Aparatur yang menangani Anggaran.*	116	Orang	300.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.080.911.910,00	APBD				1.080.911.910,00
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi		100	%						
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP		100	%						
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	79.545.455,00	APBD		1	Dokumen	79.545.455,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	60.000.000,00	APBD		1	Dokumen	60.000.000,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	BPKAD Kab. Kukar	12	Dokumen	213.075.000,00	APBD		12	Dokumen	213.075.000,00
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	85.700.000,00	APBD		1	Dokumen	85.700.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	BPKAD Kab. Kukar	10000	Dokumen	49.982.000,00	APBD		10000	Dokumen	49.982.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	180	Orang	592.609.455,00	APBD		180	Orang	592.609.455,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.308.733.126,00	APBD		100	%	1.308.733.126,00
		Persentase Transaksi Non Tunai		100	%				100	%	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu		100	%				100	%	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan		100	%				100	%	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	162.712.000,00	APBD		1	Laporan	162.712.000,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	50.000.000,00	APBD		2	Dokumen	50.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	BPKAD Kab. Kukar	2	Laporan	60.000.000,00	APBD		2	Laporan	60.000.000,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	BPKAD Kab. Kukar	3	Laporan	599.999.800,00	APBD		3	Laporan	599.999.800,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	199.999.800,00	APBD		1	Dokumen	199.999.800,00
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	0,00	APBD	Belum tersedia anggaran	1	Dokumen	0,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	120	Orang	236.021.526,00			120	Orang	236.021.526,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	BPKAD Kab. Kukar	100	%	486.218.410.314,00	APBD		100	%	486.218.410.314,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	10.000.000.000,00	APBD		1	Laporan	10.000.000.000,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	193	Laporan	476.218.410.314,00	APBD		193	Laporan	476.218.410.314,00
5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.554.537.590,00	APBD		100	%	2.429.537.590,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.554.537.590	APBD		100	%	2.429.537.590,00
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan		100	%				100	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD		100	%				100	%	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD		100	%				100	%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	345.866.000,00	APBD		1	Dokumen	345.866.000,00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	0,00	APBD	Belum tersedia anggaran	1	Dokumen	0,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	125.000.000,00	APBD	*Optimalisasi Pengelolaan BVMD SKPD*	1	Laporan	0,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	230.800.000,00	APBD		1	Laporan	230.800.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	Jakarta dan Kutai Kartanegara	1	Laporan	163.746.000,00	APBD		1	Laporan	163.746.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	414.187.240,00	APBD		1	Laporan	414.187.240,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	749.938.350,00	APBD		1	Laporan	749.938.350,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	BPKAD Kab. Kukar	58	PD	75.000.000,00	APBD		58	PD	75.000.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000,00			1	Laporan	50.000.000,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	BPKAD Kab. Kukar	180	Orang	300.000.000,00		*Pembinaan Aparatur yang menangani BMD SKPD*	180	Orang	300.000.000,00
JUMLAH						*535.379.557.437,00*	*TOTAL*				*539.355.135.084,00*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memuat tentang Program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2026. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur BPKAD yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Organisasi PD lainnya khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas aparatur di seluruh PD, terkait dengan pelaporan keuangan dan aset PD dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dikompilasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan dan kehandalan atas laporan keuangan, agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka akan dilaksanakan pembinaan terhadap sumber daya aparatur di seluruh PD, sehingga mampu menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub-kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi SIPD.

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh PD di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan terhadap Program dan kegiatan pada RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani Program, kegiatan dan sub-kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun Kedua RPJMD 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni“:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Sebagai langkah upaya penyempurnaan matrik struktur Program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari

penyusunan ini akan di implementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 .

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 , peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2045; dan
21. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 , adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2026;
2. Meletakan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. *Review* Terhadap rancangan Akhir RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD
4.1. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
4.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
4.3. Rumusan Program Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD
4.4. Rencana Program dan Kegiatan

Bab V Penutup
5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja PD BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam Program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh PD yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun n-2 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2024 :

Tabel. T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	-																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			91,847,604,876		38,371,178,639		27,134,005,652		-				40,568,496,589				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,250,000,000		864,526,200		450,000,000		-				864,526,200				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	1,000,000,000	14	396,742,400	7	200,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	396,742,400	40.00 %	39.67 %	BPBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	500,000,000	24	184,159,300	12	100,000,000			0.00 %	0.00 %	24.00	184,159,300	40.00 %	36.83 %	BPBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	750,000,000	5	283,624,500	2	150,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	283,624,500	20.00 %	37.82 %	BPBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,282,940,126		22,713,785,589		13,546,694,126	-	-	-	-	-	22,713,785,589	-		-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5,280	46,082,940,126	2470.00	21,841,109,819		13,125,745,126			0.00 %	0.00 %	2470.00	21,841,109,819	46.78 %	47.40 %	BPBD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	70	400,000,000	21.00	159,861,500		86,000,000			0.00 %	0.00 %	21.00	159,861,500	30.00 %	39.97 %	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	1,800,000,000	32.00	712,814,270		334,949,000			0.00 %	0.00 %	32.00	712,814,270	53.33 %	39.60 %	BPBD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			850,000,000		-		150,000,000	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	450	850,000,000	0.00	-		150,000,000			0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,990,000,000		362,963,900		138,025,000	-	-	-	-	-	362,963,900	-		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	450	850,000,000	550.00	192,590,900					0.00 %	0.00 %	550.00	192,590,900	122.22%	22.66 %	BPBD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	450	550,000,000	0.00	-		72,025,000			0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sistem Informasi Kepegawaian																
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	290,000,000	250.00	170,373,000		66,000,000			0.00 %	0.00 %	250.00	170,373,000	83.33 %	58.75 %	BPBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	300,000,000	0.00	-					0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,577,500,000		1,861,572,401		834,040,000	-	-	-	-	-	1,861,572,401	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	52,500,000	200.00	20,977,000		10,500,000			0.00 %	0.00 %	200.00	20,977,000	40.00 %	39.96 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,500	550,000,000	5700.00	264,242,770		173,540,000			0.00 %	0.00 %	5700.00	264,242,770	67.06 %	48.04 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	600	310,000,000	120.00	49,840,000		-			0.00 %	0.00 %	120.00	49,840,000	20.00 %	16.08 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14,450	475,000,000	4850.00	167,091,000		100,000,000			0.00 %	0.00 %	4850.00	167,091,000	33.56 %	35.18 %	BPBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	37,500	425,000,000	10500.00	104,908,000		50,000,000			0.00 %	0.00 %	10500.00	104,908,000	28.00 %	24.68 %	BPBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,950	290,000,000	0.00	-		-			0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	1,650,000,000	86.00	1,063,307,557		350,000,000			0.00 %	0.00 %	86.00	1,063,307,557	49.14 %	64.44 %	BPBD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	475,000,000	225.00	115,346,074		75,000,000			0.00 %	0.00 %	225.00	115,346,074	45.00 %	24.28 %	BPBD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	350,000,000	24.00	75,860,000		75,000,000			0.00 %	0.00 %	24.00	75,860,000	40.00 %	21.67 %	BPBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,000,000,000		1,838,697,137		6,025,000,000	-	-	-	-	-	4,036,015,087	-		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	360	10,500,000,000	75.00	2,197,317,950		-		-	0.00 %	0.00 %	75.00	2,197,317,950	20.83 %	20.93 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	360	600,000,000	0.00	-		-		-	0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung	7	3,500,000,000	3.00	1,385,484,007		-		-	0.00 %	0.00 %	3.00	1,385,484,007	42.86 %	39.59 %	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1,285	2,900,000,000	61.00	453,213,130		6,025,000,000			0.00 %	0.00 %	61.00	453,213,130	4.75%	15.63 %	BPBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,817,164,750		8,378,358,023		4,302,915,806	-	-	-	-	-	8,378,358,023	-		-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4,950	35,000,000	65.00	4,940,000		-		-	0.00 %	0.00 %	65.00	4,940,000	1.31%	14.11 %	BPBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	720	1,330,000,000	156.00	445,224,369		300,000,000			0.00 %	0.00 %	156.00	445,224,369	21.67 %	33.48 %	BPBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,020	19,452,164,750	2616.00	7,928,193,654		4,002,915,806			0.00 %	0.00 %	2616.00	7,928,193,654	20.09 %	40.76 %	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,080,000,000		2,351,275,389		1,687,330,720	-	-	-	-	-	2,351,275,389	-	-	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	440	3,200,000,000	154.00	1,850,765,589		1,272,860,000			0.00 %	0.00 %	154.00	1,850,765,589	35.00 %	57.84 %	BPBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	300	440,000,000	95.00	179,400,000		75,000,000			0.00 %	0.00 %	95.00	179,400,000	31.67 %	40.77 %		
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	10	2,440,000,000	4.00	321,109,800		339,470,720			0.00 %	0.00 %	4.00	321,109,800	40.00 %	13.16 %		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			39,825,297,588		13,257,472,650		4,099,895,550		-				13,257,472,650				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3,255,000,000	86	595,789,761	85	1,000,000,000	65	-	76.47 %	0.00 %	151.00	595,789,761		18.30 %	BPBD	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara	1,500	3,255,000,000	187.00	595, 789,761		1,000,000,000			0.00 %	0.00 %	187.00	595,789,761	12.47 %	18.30 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya																
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			11,780,148,794		5,469,807,722		1,499,895,550	-	-	0.00 %	0.00 %	0.00	5,469,807,722		46.43 %	BPBD	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	750	2,400,000,000	150.00	223,172,000		650,000,000			0.00 %	0.00 %	150.00	223,172,000	20.00 %	9.30%	BPBD	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	220	1,987,574,397	87.00	2,247,812,397		149,999,750			0.00 %	0.00 %	87.00	2,247,812,397	39.55 %	113.09%	BPBD	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	850	2,255,000,000	202.00	187,500,000		149,895,800			0.00 %	0.00 %	202.00	187,500,000	23.76 %	8.31%	BPBD	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	1,750,000,000	8.00	282,206,648		150,000,000			0.00 %	0.00 %	8.00	282,206,648	32.00 %	16.13 %	BPBD	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan Pasca Bencana Kab/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	160	400,000,000	5.00	97,404,000		150,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	97,404,000	3.13%	24.35 %	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	10	2,987,574,397	87.00	2,431,712,677		250,000,000			0.00 %	0.00 %	87.00	2,431,712,677	870.00%	81.39 %	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			12,642,574,397		3,722,153,047		1,100,000,000		-	0.00 %	0.00 %	0.00	3,722,153,047		29.44 %	BPBD	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5	250,000,000	3.00	100,000,000		100,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	100,000,000	60.00 %	40.00 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	160	600,000,000	1.00	148,673,020		150,000,000			0.00 %	0.00 %	1.00	148,673,020	0.63%	24.78 %	BPBD	
	Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	220	6,987,574,397	204.00	2,595,630,237		400,000,000			0.00 %	0.00 %	204.00	2,595,630,237	92.73 %	37.15 %	BPBD	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70	3,255,000,000	89.00	608,519,740		250,000,000			0.00 %	0.00 %	89.00	608,519,740	127.14%	18.69 %	BPBD	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	1,150,000,000	3.00	197,993,050		100,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	197,993,050	60.00 %	17.22 %	BPBD	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	160	400,000,000	1.00	71,337,000		100,000,000			0.00 %	0.00 %	1.00	71,337,000	0.63%	17.83 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu																
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			12,147,574,397		3,469,722,120		500,000,000		-	0.00 %	0.00 %	0.00	3,469,722,120		28.56 %	BPBD	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	70	2,255,000,000	5.00	140,139,400		80,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	140,139,400	7.14%	6.21%	BPBD	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	25	2,250,000,000	6.00	273,538,000		80,000,000			0.00 %	0.00 %	6.00	273,538,000	24.00 %	12.16 %	BPBD	
	Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	160	2,400,000,000	3.00	147,445,000		80,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	147,445,000	1.88%	6.14%	BPBD	
	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	220	4,987,574,397	88.00	2,800,501,447		130,000,000			0.00 %	0.00 %	88.00	2,800,501,447	40.00 %	56.15 %	BPBD	
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	70	255,000,000	5.00	108,098,273		130,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	108,098,273	7.14%	42.39 %	BPBD	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			17,000,000,000		4,417,100,005		3,527,541,280		-				4,417,100,005				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			9,000,000,000		2,342,362,607		1,613,336,280		-				2,342,362,607				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	3,250,000,000	14.00	813,444,440		525,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	813,444,440	23.33 %	25.03 %	BPBD	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60	1,250,000,000	14.00	237,255,000		150,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	237,255,000	23.33 %	18.98 %	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah	350	2,250,000,000	124.00	769,650,060		600,729,000			0.00 %	0.00 %	124.00	769,650,060	35.43 %	34.21 %	BPBD	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait																
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50	1,250,000,000	10.00	223,166,216		137,607,280			0.00 %	0.00 %	10.00	223,166,216	20.00 %	17.85 %	BPBD	
	Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	35	1,000,000,000	7.00	298,846,891		200,000,000			0.00 %	0.00 %	7.00	298,846,891	20.00 %	29.88 %	BPBD	
	Investigasi Kejadian Kebakaran			250,000,000		100,000,000		-		-				100,000,000				
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang di teliti dan diuji	5	250,000,000	2	100,000,000	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %	2.00	100,000,000	40.00 %	40.00 %	BPBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			6,500,000,000		1,583,427,370		1,764,205,000	-	-				1,583,427,370				
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	35	1,500,000,000	6.00	282,787,000		200,000,000			0.00 %	0.00 %	6.00	282,787,000	17.14 %	18.85 %	BPBD	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	35	1,750,000,000	4.00	277,420,000		324,205,000			0.00 %	0.00 %	4.00	277,420,000	11.43 %	15.85 %	BPBD	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	200	3,250,000,000	25.00	1,023,220,370		1,240,000,000			0.00 %	0.00 %	25.00	1,023,220,370	12.50 %	31.48 %	BPBD	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi			1,250,000,000		391,310,028		150,000,000	-	-				391,310,028				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 5enja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Membahayakan Manusia																	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1,500	1,250,000,000	380.00	391,310,028		150,000,000			0.00 %	0.00 %	380.00	391,310,028	25.33 %	31.30 %	BPBD	
				148,672,902,464		56,045,751,294		34,761,442,482		-				58,243,069,244				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD merumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh Adalah sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.30.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana*		*Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana*	*77,50*	*78*	*78,90*	*79,50*	*77,50*	*78*	*78,90*	*79,50*	*81*	
	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	5,11%	8,11%	100%	100%	5,11%	3,00%	12,11%	15,11%	15,11%	
	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,55%	10,55%	100%	100%	5,55%	10,55%	13,55%	16,55%	16,55%	
	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	-	2	2	2	-	2	2	2	2	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana, hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara profesional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di Daerah karena yang akan merasakan dampak dari penanganan penanggulangan bencana di Daerah nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar pastisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di Daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal. Meskipun BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih berpedoman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hinggi sendimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
    1. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
    2. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
    3. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.
    4. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
b. Aspek Kelembagaan
    1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
    2. BPBD relatif baru berdiri beberapa tahun, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
    3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll.
    4. Fungsi penanggulangan bencana yang berpindah dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Aspek Ketugasan:

1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan *respon time* serta tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsif sehingga menimbulkan dampak yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
7. Laporan Data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Rancangan awal Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara perlu penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) BPBD dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan pagu anggaran PD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel *review* terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.415.591.573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				31.457.726.714
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.665.591.573	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		26.257.726.714
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	250.000.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150.000.000
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	100.000.000
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.365.510.239
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/ bulan	4.130.875.098	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	13.874.510.239
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	360.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	6 laporan	45.000.000
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				250.000.000
1	05	01	2,03	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	100.000.000
1	05	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	150.000.000
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				825.000.000
1	05	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	75.000.000
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi*	10 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi*	15 Orang	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Peraturan Perundang-Undangan					*Peraturan Perundang-Undangan*		
1	05	01	2,05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	50 Orang	150.000.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	5 Dokumen	75.000.000
1	05	01	2,05	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	240 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	115 Orang	375.000.000
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.020.500.000
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10.500.000
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	155.000.000
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	32.500.000	Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	155.000.000
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	100.000.000
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350.000.000
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75.000.000
1	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	75.000.000
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.104.000.000
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	4 Unit	2.250.000.000
1	05	01	2,07	12	Pengadaan Mebel	Tenggarong	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Mebel	Tenggarong	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	445.000.000
1	05	01	2,07	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	120 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	120 Unit	1.150.000.000
1	05	01	2,07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Unit	259.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Unit	1.259.000.000
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.252.716.475

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50 Laporan	3.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50 Laporan	7.500.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	129.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	300.000.000
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.945.216.475	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.945.216.475
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.940.000.000
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	1.650.000.000
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	205.000.000
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	85.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.200.000.000
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				450.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000
1	05	03	2,01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.000.000
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.250.000.000
1	05	03	2,02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*	100 Unit	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*	100 Unit	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2,02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000
1	05	03	2,02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	150.000.000
1	05	03	2,02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	4 Kawasan	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	4 Kawasan	150.000.000
1	05	03	2,02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	25 Orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	25 Orang	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2,02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	250.000.000
1	05	03	2,02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	2 laporan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	2 laporan	100.000.000
1	05	03	2,02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	3 Kawasan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	3 Kawasan	150.000.000
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2.150.000.000
1	05	03	2,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	2 Dokumen	150.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling	2 Dokumen	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	750.000.000
1	05	03	2,03	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal*	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal*	1 Dokumen	250.000.000
1	05	03	2,03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	25 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	25 Orang	350.000.000
1	05	03	2,03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000
1	05	03	2,03	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000
1	05	03	2,03	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan	1 Dokumen	100.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	1 Dokumen	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.350.000.000
1	05	03	2,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	100.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	10 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	10 Laporan	150.000.000
1	05	03	2,04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi*	10 Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi*	10 Orang	250.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2,04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	150.000.000
1	05	03	2,04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	10 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	10 Kegiatan	100.000.000
1	05	03	2,04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	10 Laporan	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	10 Laporan	100.000.000
1	05	03	2,04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	2 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	2 Dokumen	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RANCANGAN RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2,04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	150.000.000
					Jumlah				*11.415.591.573*	*Jumlah*				*31.457.726.714*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, di situ ada proses timbal balik dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan adalah tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang adalah proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakarakat, pemerintah mengharuskan di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten dan Musrenbang provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara digelar dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan provinsi, selain untuk mempertajam indikator kinerja Program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, serta guna menyepakati prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas Daerah serta pendanaannya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat tahun 2026 hasil dari Musrenbang BPBD menyepakati usulan kegiatan dari kecamatan yaitu :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
Pelatihan Relawan BALAKARCANA dan Masyarakat Peduli Api (MPA)						
1	Ardiansyah Kembang Janggut	ID SIPD: 2248750 Pelatihan BALAKARCANA bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan peran serta Masyarakat/Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api dalam penanggulangan bencana #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan peran serta Masyarakat/Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api dalam penanggulangan bencana	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
2	SAIMANSYAH Teluk Bingkai	ID SIPD: 2265802 Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, pelatihan relawan BALAKARCANA dan MPA di desa dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan relawan-relawan yang handal dan siap menghadapi bencana atau kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DESA TELUK BINGKAI KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak bencana. Selain itu, pelatihan ini juga dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
4	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373582 Perlu nya peningkatan kapasitas/pelatihan tim Relawan Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Liang Ulu #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk	2	Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				pengetahuan kelompok Relawan Balakarcana dan MPA		pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
8	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2296690 Pelatihan Tanggap Darurat Bencana #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Dr. Nazir RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pelatihan Relawan BALAKARCANA dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya kebakaran. Pelatihan tanggap darurat bencana di Jl. Dr. Nazir RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
9	HUMAIDI Lebak Cilong	ID SIPD: 2068667 Masih banyak yang belum tau tentang bahaya nya api #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	lebak cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Relawan Peduli Api Desa	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
11	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190875 Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekosistem, dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif melalui keterlibatan masyarakat. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JALAN AHMAD YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU KODE POS 75552, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
13	SHOLIMIN Karang Tunggal	ID SIPD: 2316595 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Karang Tunggal, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Lanjut	1	Prioritas Catatan : Pelatihan Relawan kami setujui dengan catatan menambah Pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)						
1	Ardiansyah Kembang Janggut	ID SIPD: 2248794 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran untuk mendukung peran serta Masyarakat/Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api dengan membantu penyediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: SUDAH TERBENTUK MASYARAKAT PEDULI API, LUASNYA LAHAN KBK	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
2	Sis Budinyoto Loa Sakoh	ID SIPD: 2215045 Belum tersedianya perlengkapan pemadam kebakaran yang lengkap dan memadai sehingga terkendala saat melakukan pertolongan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Loa Sakoh RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Alat blm memadai	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
3	JUNAIDI Genting Tanah	ID SIPD: 2048358 permohonan pengadaan mobil DAMKAR #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Genting Tanah, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: KAWASAN PEMUKIMAN PADAT DAN JARAK ANTARA RUMAH BERDEKATAN	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
5	SISKA RIZKI AMALIA Semayang	ID SIPD: 2293476 Untuk mengatasi kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah desa #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Semayang , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik материал maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.		
6	Tommy, S.Sos,M.Pd Tuana Tuha	ID SIPD: 2287503 Belum adanya alat pemadam kebakaran yang lengkap #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Olah Raga 1 RT.011, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik материал maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
7	SAIMANSYAH Teluk Bingkai	ID SIPD: 2265993 Dengan pengadaan alat pemadam kebakaran yang memadai dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi, desa dapat menjadi lebih aman dan terhindar dari risiko kebakaran yang merugikan. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DESA TELUK BINGKAI KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik материал maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.	4	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
8	SUPYAN NOOR Pela	ID SIPD: 2064856 Pengadaan alat pemadam kebakaran menjadi sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran. Dalam banyak kasus, kebakaran yang cepat ditanggulangi dengan alat yang tepat dapat menghindari penyebaran api lebih lanjut, meminimalkan kerusakan, serta menyelamatkan nyawa dan properti. Alat pemadam kebakaran yang memadai juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan yang berlaku di berbagai sektor, baik di gedung- gedung #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan,Jembatan Ulin Rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk Penunjang Penaggulangan Bencana	1	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
10	Rapi""i, S.Sos Loleng	ID SIPD: 2371237 Belum ada alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Belum ada alat pemadam kebakaran di Desa	3	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
11	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373605 Perlunya alat pemadam kebakaran menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran.	4	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
13	SEGER SANTOSO Sarinadi	ID SIPD: 2220092 Minimnya Alat Pemadam Kebakaran Sehingga ketika Terjadi Kebakaran Pemernitah Desa dan Masyarakat Kekurangan Alat Bantu Pemadam #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
18	SADARUDDIN K Salo Palai	ID SIPD: 2274556 Belum tersedianya perlengkapan alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: P	2	Prioritas Catatan : Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan dapat disetujui dengan Catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026
30	EKO IRWANSYAH Bunga Jadi	ID SIPD: 2346896 Belum adanya alat yang memadai di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Bunga jadi Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Diusulkan.....Tanda Tangan Proposal segera dilenkapi	7	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
32	Suwandi Batuq	ID SIPD: 1956250 Untuk mengantisipasi terjadi kebakaran pemukiman atau lahan pertanian , hutan di desa batuq. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Batuq, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pengadaan alat pemadam kebakaran di Desa Batuq sangat penting untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran pemukiman, lahan pertanian, dan hutan, serta meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
33	MADI Muara Enggelam	ID SIPD: 2236732 Sering terjadi kebakaran di hutan sehingga sulit di jangkau oleh relawan kebakaran maka dari itu memerlukan alat pemadam kebakaran dan perahu beserta ces #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Muara Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
34	EDI SURIYONO Lebak Mantan	ID SIPD: 2268812 BELUM TERPENUHINYA ALAT PEMADAM KEBAKARAN DESA LEBAK MANTAN #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JL DANYANG SUDI RT 3 DUSUN TANAH HARAPAN , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
35	HUMAIDI Lebak Cilong	ID SIPD: 2153780 daerah rawan kebakaran dan juga padatnya rumah penduduk yang jauh dari jangkawan air #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Lebak Cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
38	AGUS DINA FITRIANI, SP Sari Jaya	ID SIPD: 2225176 Perlunya Pengadaan Mobil Pemadam #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Pengadaan Mobil Pemadam	2	Prioritas Catatan : OPD Pelaksanaanya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
40	AGUS DINA FITRIANI, SP Sari Jaya	ID SIPD: 2225182 Perlunya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla) #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	4	Prioritas Catatan : Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan disetujui dengan catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026
48	Eko Cahyono, S. Pi Mekar Jaya	ID SIPD: 2261356 Masih kurangnya sarana dan prasarana Masyarakat Peduli API di Desa Mekar Jaya #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
49	SYAIBE Sanggulan	ID SIPD: 2321085 Kawasan pemukiman yang semakin padat, bangunan rata-rata terbuat dari kayu, yang mudah terbakar, rawan terjadi musibah kebakaran, untuk mengantisipasi musibah kebakaran, perlu kesiap siagaan dan peralatan yang memadai, berupa alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
50	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190657 Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran, diperlukan pengadaan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar keselamatan dan kebutuhan di lokasi tertentu. Dengan adanya alat pemadam kebakaran yang memadai, diharapkan potensi kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JALAN AHMAD YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU KODE POS 75552, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat	4	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
54	Isnaniah S, SH., MH Panji	ID SIPD: 2057757 Masih kurangnya alat pemadam Kebakaran seperti pompa air, selang dan lain2 di Balakarcana kel.Panji. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Stadion Timur RT 10 , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: perlunya peralatan pendukung untuk menunjang kinerja balakrcana dikelurahan panji dalam menanggulangi kebakaran	1	Prioritas Catatan : Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran dapat disetujui dengan catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
56	Yahya Embalut	ID SIPD: 2253699 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RT.08 Dusun Pulau Yupa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	1	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
57	SHOLIMIN Karang Tunggal	ID SIPD: 2316543 untuk mendukung peran serta masyarakat peduli api dalam membantu penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Karang Tunggal, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
58	Hermi Kuaria Loa Ulung	ID SIPD: 2309811 Meningkatkan efisiensi: dalam penanggulangan bencana.Meningkatkan efektifitas: dalam menyelamatkan korban bencana.Meningkatkan keselamatan: relawan dan korban bencana.Meningkatkan kepercayaan: masyarakat terhadap BPBD dan relawan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Kantor Desa RT.010 Desa Loa Ulung, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	3	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
59	Kuswara Suka Maju	ID SIPD: 2210286 perlu adanya penambahan alat pemadam kebakaran untuk team Damkar Desa Suka Maju #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Raya Samarinda - Sebulu RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	5	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi BNPB sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi "Bangsa yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar-kementerian, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Menindaklanjuti kebiajakan nasional bidang penanggulangan bencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategis meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan di atas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah BPBD. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel. 5

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

STRATEGI	KEBIJAKAN
A. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana 2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan 4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana 5. Meningkatkan Komitmen DPRD Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan	Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunandan meninternalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
B. Meningkatkan Pengkajian Risko dan Perencanaan Terpadu 1. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana	Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
C. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 1. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat 2. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan 3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 4. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS 5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana 6. Melaksanakanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 7. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana 8. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat	Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasionional
D. Meningkatkan penanganan tematik kawasan rawan bencana 1. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB 2. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana 3. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam PRB
E. Peningkatan efektivitas pencegahan 1. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman	
F. Pengembangan system pemulihan bencana 1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur dan Pelayanan Publik pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat	
G. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana 1. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana 2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini 3. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana 4. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat 5. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat	Melibatkan Masyarkat dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Daerah dalam kegiatan Kantor BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran sebagai berikut: meningkatnya kualitas pelayanan informasi pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi 1 : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan 1 : Meningkatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran:

a. Meningkatnya sarana berupa perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran;
b. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang bersertifikasi; dan
c. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan unsur pendidik dan pelajar untuk mengantisipasi ancaman bencana.

Tujuan 2 : Meningkatkan pencegahan, pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadi ancaman bencana, dengan sasaran:

a. Ketersediaan data/informasi kebencanaan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
c. Meningkatnya pengendalian operasional penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
d. Mengurangi resiko kebakaran dengan revisi/rehabilitasi instalasi listrik; dan
e. Jenis potensi bencana.

Misi 2 : Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tujuan : Meningkatkan upaya tanggap darurat bencana, dengan sasaran:
a. Meningkatnya efektititas penanganan kedaruratan bencana; dan
b. Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana.

Misi 3 : Meningkatkan upaya perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali prasarana, sarana kelembagaan pemerintahan/masyarakat pada wilayah pascabencana.

Tujuan 1 : Percepatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat (kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi) pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran:
a. Berfungsinya kembali sarana/prasarana (fasilitas umum) dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana;
b. Terbangunnya hunian sementara bagi korban bencana; dan
c. Meningkatnya penanganan keadaan darurat secara cepat dan tepat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas Pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:

a. Meningkatnya peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di SKPD penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana aparatur SKPD penanggulangan bencana Daerah;
d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas instansi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

a. Mendukung tercapainya target indikator capaian kinerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk “Menurunkan Risiko Bencana”;
b. Mendukung terwujudnya target kinerja Pemerintah Daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
d. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang PenerapanStandar Pelayanan Minimal.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) Program utama dan sebagai wujud dari tanggung jawab yang harus

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dilaksanakan. Apabila Program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka Program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika Program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Adapun Program kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rumusan Program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal dikarenakan:

a. Renja-PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun;

b. Renja-PD berfungsi sebagai panduan operasional untuk implementasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Renja-PD berisi rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran;
d. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN;
e. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan Daerah; dan
f. RKPD disusun berdasarkan visi, misi, dan Program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4.4. Rencana program dan kegiatan

Hasil pemetaan terhadap Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja BPBD tahun anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tabel – TC 33 sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Rancangan

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			31.120.411.934					25.259.000.875	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.120.411.934					25.259.000.875	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.120.411.934					25.259.000.875	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	75 Nilai	25.595.411.934				75 Nilai	19.709.000.875	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100%	1.025.000.000				100%	1.050.000.000	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Dokumen	450.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	12 Data	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Data	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 BeritaAcara	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 BeritaAcara	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi Keuangan tepat Waktu*	100%	8.610.284.400				100%	8.596.284.400	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	735 Orang/bulan	8.070.284.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		735 Orang/bulan	8.070.284.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	90.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Dokumen	86.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	35.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	360.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	360.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	4 Dokumen	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	350.000.000				100%	275.000.000	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	6 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Laporan	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	505.000.000			-	100%	680.000.000	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	125 Paket	180.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		125 Paket	380.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	10 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	25 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor*	100%	890.000.000			-	100%	945.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	45 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	45 Paket	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	120 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	120 Paket	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	100 Paket	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	100 Paket	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	750 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	750 Paket	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1100 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1100 Paket	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Paket	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	40 Laporan	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	40 Laporan	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	6 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah	100%	8.952.411.059			-	100%	3.750.000.000	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	3 Unit	1.002.411.059	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Unit	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	75 Unit	3.400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	*Hasil Kesepakatan Usulan Masyarakat dengan Perangkat Daerah sebanyak 16 Paket* :ID SIPD: 2248750ID SIPD: 2265802ID SIPD: 2373582ID SIPD: 2296690ID SIPD: 2293476ID SIPD: 2287503ID SIPD: 2265993ID SIPD: 2064856ID SIPD:	75 Unit	1.300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2371237ID SIPD: 2373605ID SIPD: 2220092ID SIPD: 2346896ID SIPD: 1956250ID SIPD: 2236732ID SIPD: 2268812ID SIPD: 2153780			
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	200 Unit	4.550.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	200 Unit	3.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan urusan Kantor	100%	2.212.716.475			-	100%	2.212.716.475	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	10 Laporan	7.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	7.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	260.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	260.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.945.216.475	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	1.945.216.475	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik*	100%	3.050.000.000			-	100%	2.200.000.000	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	75 Unit	2.600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	75 Unit	1.600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	120 Unit	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	120 Unit	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Unit	450.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	✓ *Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana* ✓ *Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* ✓ *Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana* ✓ *Persentase* Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	5.525.000.000				21,1 Persen	5.550.000.000	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana*	100 persen	200.000.000				21.11 Layanan	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*	200 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		200 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	100 persen	1.725.000.000				50 Persen	1.800.000.000	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*	275 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		275 Unit	375.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladikesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		500 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Keluarga	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	4 Kawasan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Kawasan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	25 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Orang	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	12 laporan	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 laporan	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	7 Kawasan	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Hasil Kesepakatan Masyarakat dengan ID ID SIPD: 2248750ID SIPD: 2265802ID SIPD: 2373582ID SIPD: 2296690ID SIPD: 2068667ID SIPD: 2190875	7 Kawasan	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana*	100 Persen	1.950.000.000				100 Persen	2.000.000.000	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	*Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas*	2 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	7879 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7879 Orang	650.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	30 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Orang	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	7879 Orang	650.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7879 Orang	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu*	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah LaporanPelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota*	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase* Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	1.650.000.000			-	-	1.550.000.000	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	2 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	2 Dokumen	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	4 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	15 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	4 Kegiatan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Kegiatan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	30 Laporan	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	30 Laporan	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H				31.120.411.934					25.259.000.875	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
P E N U T U P

Rancangan Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan PD tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026. Proses penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
   1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
   2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
   3. Jumlah sumber daya aparatur bersertifikasi yang terbatas menjadikan kendala BPBD Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di Daerah.
   4. Intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
   5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

   Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD merumusan dan penetapan

kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

c. Rencana tindak lanjut

Renja-PD BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil musrenbang Kabupaten. Penyempurnaan matrik Renja-PD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah target setting dari pencapaian indikator kinerja.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses Penyusunan Renja-PD tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum PD oleh masing-masing PD dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan tema pembangunan “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan” dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan.
   - Penyediaan SDM tenaga kesehatan dan integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program nasional makan bergizi gratis.
2. Peningkatan Pemenuhan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan.
   - keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin

keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi.

3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan.
   - Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan
4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif.
   - Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.
5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik.
   - Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.
6. Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini.
   - Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi
7. Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas.
   - Penyediaan RDTR wilayah kecamatan dan tata ruang desa, pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke desa.
8. Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan wilayah).
   - Penyediaan integrasi layanan transportasi perhubungan darat maupun air yang aman, berkualitas dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai satu dokumen perencanaan Renja-PD akan digunakan sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan Tahun 2026 dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025;
2. Mengetahui perencanaan Program, kegiatan dan pagu anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026;

3. Menyelaraskan Program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan; dan
4. Menyesuaikan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Renja-PD akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
- 1.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
- 41. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 melalui analisa terhadap kinerja *output* dan kinerja keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan keuangan yang telah direalisasi.

Dalam rangka memajukan masyarakat melalui pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program-program strategis. Dalam menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini didukung Bantuan Operasional Kabupaten (BOS Kab) yang bersumber dari APBD dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBN. Selain hal tersebut ditunjang dengan pembangunan sarana prasana lembaga/sekolah PAUD. Pelaksanakaan Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang menyasar untuk peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP ditunjang dengan BOS Kabupaten (dana bersumber dari APBD) dan BOS Reguler (dana bersumber dari APBN). Selain hal tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana lembaga/sekolah SD dan SMP.

Program peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berupa peningkatan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan seperti pelatihan dan lain-lainnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Program pengembangan nilai budaya, Program pengelolaan keragaman budaya, Program pengelolaan kekayaan budaya, dan Program pelestarian cagar budaya dan budaya daerah, yang bertujuan untuk pembinaan seni budaya, perlindungan karya seni, melestarikan museum benda- benda situs/cagar budaya, dan peningkatan kerjasama dalam pengelolaan budaya. Pembangunan sarana prasarana dari tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan non formal/kesetaraan telah dilaksanakan termasuk penambahan sarana bagi satuan pendidikan/sekolah yang masih kekurangan. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, serta mengembangkan kualitas pendidik dan lembaga

pendidikan melalui akreditasi satuan pendidika dan sertifikasi pendidik.

1. Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.

   Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing kategori diatas secara umum antara lain adalah:

   a. Capaian indikator kinerja yang realisasinya di bawah target disebabkan antara lain:
      1) Turunnya capaian angka partisipasi murni (APM) SD dan SMP. Hal ini dimungkinkan karena dasar perhitungan yang membentuk angka APM SD dan SMP tersebut berfluktuatif.
      2) Pada Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun faktor penyebabnya antara lain adalah:
         a) Banyak anak pindah sekolah menjelang ujian nasional;
         b) Belum terpenuhinya ketersediaan sekolah dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata di setiap desa, letak geografis wilayah yang berjauhan dan akses yang tidak memadai; dan
         c) Masih banyaknya kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai.
      3) Pada Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain adalah:
         a) Banyak pendidik dan tenaga kependidikan masih melaksanakan proses perkuliahan; dan
         b) Banyaknya pendidik yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berpengaruh terhadap kualitas tenaga pendidik.
      4) Pada program pelestarian cagar budaya dan budaya daerah antara lain adalah :
         a) Masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian situs- situs cagar budaya;
         b) Masih rendahnya minat masyarakat khususnya pelajar dalam mengikuti program kesenian Daerah; dan
         c) Kurangnya pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah yang mengangkat seni budaya Daerah.

b. Capaian indikator kinerja yang realisasinya melebihi target didukung antara lain:
   1) Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
   2) Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa per kelas; dan
   3) Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat- syarat akademis dan Penilitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

2. Implikasi terhadap capaian Program dalam Renstra.

Dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Bagi Program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target pada 2024, kemungkinan pada tahun 2025 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Sebaliknya untuk Program dan kegiatan yang melebihi target, maka di tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada tahun 2025 harus ada penyesuaian angka indikator dimasing-masing Program kegiatan;
b. Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program prioritas, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan Laboratorium, Pembangunan Ruang Kantor, Pembangunan Toilet, pembangunan pagar, pembangunan UKS, pembangunan perpustakaan, pembangunan gudang, pembangunan lapangan upacara/ area olahraga sekolah, pengadaan meubelair dan lain-lainnya. selain kegiatan fisik, kegiatan nonfisik seperti sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi dan pendidikan profesi guru (PPG), perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode

5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2025, potensi tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 60%-80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen). Pada Program wajib belajar pendidikan dasar, pencapaian Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di atas 100% (seratus persen), tapi juga ada yang di bawah 100% (seratus persen), sementara indikator kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya mencapai 50% (lima puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen) pada akhir tahun 2024, dan untuk dua indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir tahun 2025. Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil tahun 2021 terhadap target tahun 2025 (Renstra periode 5 tahun) dapat dilihat pada Tabel T-C. 29.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	67	72	69	95,83	73	73	92
X	XX	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	40	Dokumen	16	8	8	100	8	32	80
X	XX	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	4	2	2	100	2	8	80
	XX	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80
	XX	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80
X	XX	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	15	Dokumen	6	3	3	100	3	12	80
X	XX	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1	2,01	8	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	0	0	0	0	1	1	50
X	XX	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	359542	1. Dokumen 2. Orang/Bulan	143932	71894	71894	100	71894	287.720	80,02
X	XX	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	359460	Orang/Bulan	114260	71.892	71.892	100	71.892	258.044	71,79
X	XX	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	72	Dokumen	28	14	14	100	14	56	77,78
X	XX	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	1	1	1	100	1	4	80,00
X	XX	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	dokumen	1	1	1	100	1	4	80,00
X	XX	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	4820	Dokumen	1928	964	964	100	964	3.856	80
X	XX	1	2,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	180	Laporan	72	36	36	100	36	144	80

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4640	Dokumen	1856	928	928	100	928	3712	80
X	XX	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	3595	orang	1438	719	719	100	719	2.876	80,00
X	XX	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2540	orang	1016	508	508	100	508	2.032	80
X	XX	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	350	orang	140	70	70	100	70	280	80
X	XX	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	215	orang	86	43	43	100	43	172	80
X	XX	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang dilatih	490	Peserta	196	98	98	100	98	392	80
X	XX	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	115929	Buah	21.097	23708	23708	100	23708	70.713	61
X	XX	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	125	buah	894	5792	5792	100	5792	13.372	10697,6

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	814	buah	2208			100		4.416	542,51
X	XX	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	22500	Buah	1465	80	80	100	80	3.090	13,73
X	XX	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	77500	Lembar	33040	58717	58717	100	58717	183.514	236,79
X	XX	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	3500	Media		336	336	-	336	672	19,2
X	XX	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	400	orang		0	0	-	0	-	0
X	XX	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1090	orang	359			100		718	65,87
X	XX	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penataan arsip keuangan	10000	buah		2000	2000	-	2000	4.000	40
X	XX	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	140	unit	20	268	268	100	268	316	225,71

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	140	unit	65	268	268	100	268	666	475,71
X	XX	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	31475	Bulan/Orang	6135	73848	73848	100	73848	153.831	488,74
X	XX	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	20	Bulan / Rekening	4	4	4	100	4	16	80
X	XX	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	800	Unit				-		-	0
X	XX	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis Lainnya	30655	Orang	6297	75336	75336	100	75336	163.266	532,59
X	XX	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	2640	Unit	528	137	137	100	137	1.247	47,23

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	50	Buah	7	9	9	100	9	32	64
X	XX	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2400	Unit	10	1	1	100	1	22	0,92
X	XX	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	150	Unit	285	90	90	100	90	750	500
X	XX	1	2,09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangan	15	Sistem	3	2	2	100	2	10	66,67
X	XX	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	25	Unit	1	35	35	100	35	72	288

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	90,71	Presentase	85,86	87	87	100	87	87	95,91
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	89,71	Presentase	84,86	86	86	100	86	86	95,86
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	83,92	Presentase	78,72	80,6	80,6	100	80,6	80,6	96,04

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetraan (Angka Indeks Max 7)	69,28	Presentase	64,08	65,98%	65,98%	100	65,98%	65	94,49
						Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	15000	orang	2204	3000	3000	73,47	3000	5.204	34,69
1	1	2	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	93,89%	Presentase	88,86	90,38%	90,38%	100	90,38%	91	9658,89
						Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	89,60%	Presentase	84,57	86,09%	86,09%	100	86,09%	86	9632,98
						Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	96,18%	Presentase	91,15	92,67%	92,67%	100	92,67%	93	9671,77
						Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	86,60%	Presentase	81,57	83,09%	83,09%	100	83,09%	83	9613,34
						Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,18%	Presentase	94,15	95,67%	95,67%	100	95,67%	96	9687,75
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	77,18%	Presentase	72,15	73,67%	73,67%	100	73,67%	74	9541,73
						Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	90,03%	Presentase	85	86,52%	86,52%	100	86,52%	87	9635,69

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	87,03%	Presentase	82	83,52%	83,52%	100	83,52%	84	9616,24
1	1	2	2,01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	31	ruang	52	27	27	167,74	27	106	341,94
1	1	2	2,01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang kantor yang dibangun	20	Ruang	6	1	1	100	1	9	45
1	1	2	2,01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kesehatan siswa SD yang dibangun	8	ruang	3	12	12	100	12	30	375
1	1	2	2,01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	43	ruang	10	15	15	23,26	15	43	100
1	1	2	2,01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	58	unit	15	16	16	100	16	52	89,66
1	1	2	2,01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	29	ruang	29	13	13	100	13	58	200
1	1	2	2,01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang kantor yang direhab	3	ruang	3			100		3	100
1	1	2	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas/mess sekolah yang direhab	4	rumah	4			100		10	250
1	1	2	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubel sekolah	7764	set	14360	11215	11215	184,96	11215	38.923	501,33
1	1	2	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	10000	Siswa	2000	2000	2000	100	2000	5.063	50,63

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			4050			-		5.579	-
1	1	2	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik							-		-	-
						Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	7300	Siswa		120	120	-	120	14.430	197,67
						Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	5200	Siswa		120	120	-	120	240	4,62
						Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek Fasililator	400	Peserta		90	90	-	90	180	45
						Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	400	sekolah		115	115	-	115	230	57,5
						Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek Pembelajaran	500	Peserta		90	90	-	90	180	36
1	1	2	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online	2195	Sekolah	439	473	473	100	473	1.861	84,78
1	1	2	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				634			100		634	-
						Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	1820	Siswa		310	310	-	310	1.740	95,6

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan pendidikan	100	Sekolah		200	200	-	200	400	400
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba GEMA	500	Siswa		126	126	-	126	252	50,4
1	1	2	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Menjadi PPPK SD	640	Orang		0	0	-	0	-	0
1	1	2	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							-		-	-
						Jumlah Guru SD Yang Mendapatkan Beasiswa Kualifikasi S-1	990	Orang		0	0	-	0	-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	270	Orang		99	99	-	99	228	84,44
						Jumlah Guru SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	394	Orang		153	153	-	153	306	77,66
						Jumlah Guru SD yang memiliki keterampilan guru inklusif	120	Orang		0	0	-	0	-	0
1	1	2	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							-		-	-
						Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	120	Sekolah	120	29	29	120	29	178	148,33
						Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	160	Sekolah	160			160		160	100
1	1	2	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima BOS Kabupaten	470580	Siswa	472	92.805	92.805	100	92.805	279.226	59,34
1	1	2	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							-		-	-
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SD	2360	Sekolah	472	472	472	100	472	1.889	80,04
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS SD	2360	Sekolah	472	472	472	100	472	1.416	60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	91,32%	persentase	86,29	87,81%	87,81%	100	87,81%	88	9643,66
						Standar isi Pendidikan SMP	86,89%	persentase	81,86	83,38%	83,38%	100	83,38%	84	9615,3
						Standar proses Pendidikan SMP	93,89%	persentase	88,86	90,38%	90,38%	100	90,38%	91	9658,89
						Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	81,75%	persentase	76,72	78,24%	78,24%	100	78,24%	78	9578,53
						Standar pengelolaan Pendidikan SMP	94,46%	persentase	89,43	90,95%	90,95%	100	90,95%	91	9662,15
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	77,75%	persentase	72,72	74,24%	74,24%	100	74,24%	74	9546,56
						Standar pembiayaan Pendidikan SMP	88,32%	persentase	83,29	84,81%	84,81%	100	84,81%	85	9624,76
						Standar penilaian Pendidikan SMP	82,46%	persentase	77,43	78,95%	78,95%	100	78,95%	79	9583,88
1	1	2	2,02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	22	Ruang	5	1	1	100	1	8	36,36
1	1	2	2,02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Bangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	4	Ruang	12	0	0	300	0	13	325
1	1	2	2,02	6	Pembangunan Laboratorium	Terbangunnya gedung/ruang laboratorium	9	Ruang	21	0	0	100	0	36	400

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SMP	23	unit	20	1	1	166,67	1	28	121,74
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kantor yang direhab			2			100		45	-
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang yang direhabiitasi						-		3	-
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah ruang yang direhabiitasi						-		6	-
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana yang direhabiitasi						-		2	-
1	1	2	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubel sekolah	6060	Set	24	9396	9396	100	9396	23.296	384,42
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang diadakan			5			100		6	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	5075	Siswa		0	0	-	0	1.141	22,48
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			987			32.900,00		24.728	-
1	1	2	2,02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik							-		-	-
						Jumlah Nilai Rata-Rata KKM Peserta Didik Kelas VIII	48500	Peserta	5200			100		10.400	21,44
						Jumlah Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP	38800	Peserta				-		-	0
						Peningkatan literasi Membaca Peserta Didik Jenjang SMP	580	Sekolah				-		-	0
						Jumlah perangkat pembelajaran guru pada masing-masing mata pelajaran Jenjang SMP	6400	orang				-		-	0
						Aplikasi AKM Kelas, Jumlah Video Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah yang Baik	5	Sistem				-		-	0
1	1	2	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							-		-	-

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online	285	Sekolah	90	89	89	100	89	358	125,61
						Jumlah Peserta Didik yang Memiliki Kartu Indonesia Pintar	32704	Siswa		4142	4142	-	4142	8.284	25,33
1	1	2	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							-		-	-
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	1500	Siswa	510	487	487	100	487	1.994	132,93
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	750	Siswa		172	172	-	172	344	45,87
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	400	Siswa		68	68	-	68	136	34
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	300	Siswa		247	247	-	247	494	164,67

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	100	Sekolah		3	3	-	3	6	6
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter	800	Siswa		216	216	-	216	432	54
1	1	2	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							-		-	-
						Jumlah Guru SMP yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	550	Guru				-		-	0
						Jumlah Guru Agama Islam yang memiliki Kompetensi Dalam Pelaksanaan GEMA	200	orang				-		-	0
						Jumlah Tenaga Laboran SMP	150	Orang				-		-	0
						Jumlah Tenaga Pustakawan SMP	150	Orang				-		-	0
						Jumlah Tenaga Operator SMP	120	Orang				-		-	0
						Jumlah Guru SMP yang memiliki keterampilan guru inklusif	40	orang				-		-	0
						Jumlah Guru SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	75	orang	15	-	-	100	-	30	40

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Kepala SMP yang mengikuti seleksi Kepsek Unggulan	105	orang				-		-	0
						Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Diklat Calon Kepsek Unggulan	120	orang				-		-	0
1	1	2	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	408	Sekolah		46	46	-	46	92	22,55
1	1	2	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS Kabupaten	205000	Siswa	41268	25.491	25.491	100	25.491	133.518	65,13
1	1	2	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							-		-	-
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SMP	975	sekolah	201	143	143	100	143	688	70,56
						Peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS SMP/MTs	780	sekolah		143	143	-	143	286	36,67

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	90,78%	Persentase	82,89	87,27%	87,27%	100	87,27%	85	9325,3
						Standar Isi Pendidikan PAUD	92,53%	Persentase	84,64	89,02%	89,02%	100	89,02%	86	9341,85
						Standar Proses Pendidikan PAUD	99,44%	Persentase	91,55	95,93%	95,93%	100	95,93%	93	9401,48
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	44,79%	Persentase	36,9	41,28%	41,28%	100	41,28%	38	8473,01
						Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	74,93%	Persentase	67,04	71,42%	71,42%	100	71,42%	68	9141,61
						Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	93,80%	Persentase	85,91	90,29%	90,29%	100	90,29%	88	9353,46
						Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	84,50%	Persentase	76,61	80,99%	80,99%	100	80,99%	78	9260,3
						Standar Penilaian Pendidikan PAUD	88,10%	Persentase	80,21	84,59%	84,59%	100	84,59%	82	9298,69
1	1	2	2,03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang dibangun	15	ruang	8	8	8	100	8	32	213,33

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sekolah yg dibangun Toilet/wc siswa	21	Unit	1	22	22	100	22	46	219,05
1	1	2	2,03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi	5	sekolah	1	7	7	100	7	16	320
					Pengadaan Mebel PAUD							-		-	-
						Jumlah Meja guru yang tersedia	750	buah		24	24	-	24	48	6,4
						Jumlah kursi guru yang tersedia	750	buah		24	24	-	24	48	6,4
						Jumlah kursi siswa yang tersedia	2000	buah		240	240	-	240	480	24
						Jumlah Meja siswa yang tersedia	800	set	70	40	40	100	40	220	27,5
						Jumlah Rak Buku yang tersedia	400	buah		8	8	-	8	16	4
						Jumlah Rak Tempat Minum Anak yang tersedia	400	buah		8	8	-	8	16	4
						Jumlah Rak Tas Anak yang tersedia	400	buah		2	2	-	2	4	1
						Jumlah Lemari File yang tersedia	160	buah		8	8	-	8	16	10
						Jumlah Papan Tulis yang tersedia	400	buah		8	8	-	8	16	4

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			728			100		1.456	-
1	1	2	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan	120	paket / sekolah				-		-	0
1	1	2	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							-		-	-
						Jumlah Peserta	800	peserta	240	200	200	100	200	880	110
						Jumlah Peserta	500	peserta		316	316	-	316	632	126,4
						Jumlah Peserta	500	peserta		125	125	-	125	250	50
						Jumlah Peserta	800	peserta		170	170	-	170	340	42,5
						Jumlah Peserta	240	peserta				-		240	100
						Jumalah Masyarakat yang mengikuti parenting	500	orang				-		-	0
						Jumlah Peserta	2256	Siswa				-		-	0
1	1	2	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD							-		-	-
						Jumlah orang tua dari keluarga	1000	Peserta	100			100		200	20
						Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	400	Peserta				-		-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							-		-	-
						Jumlah Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	2264	Orang		495	495	-	495	586	25,88
						Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	40	Orang		9	9	-	9	18	45
						Jumlah Guru PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	50	Orang	15	90	90	100	90	210	420
1	1	2	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							-		-	-
						Jumlah lembaga yang dibina	200	Lembaga		0	0	-	0	-	0
						Jumlah lembaga yang diakreditasi	200	Lembaga		66	66	-	66	132	66
1	1	2	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	97235	siswa	25236	16551	16551	100	16551	83.574	85,95
1	1	2	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	2820	PAUD	564	1.146	1.146	100	1.146	2.274	80,64
					Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf	99,99	persentase	99,95	99,96%	99,96%	100	99,96%	102	101,96

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,04		Nonformal/Kesetaraan	Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	69,67%	persentase	64,64	66,16%	66,16%	100	66,16%	66	9470,78
						Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	73,57%	persentase	68,54	70,06%	70,06%	100	70,06%	70	9509,43
						Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	73,53%	persentase	68,5	70,02%	70,02%	100	70,02%	70	9509,06
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	66,48%	persentase	61,45	62,97%	62,97%	100	62,97%	63	9435,79
						Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	68,24%	persentase	63,21	64,73%	64,73%	100	64,73%	65	9455,5
						Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	68,53%	persentase	63,5	65,02%	65,02%	100	65,02%	65	9458,65
						Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	63,33%	persentase	58,3	59,82%	59,82%	100	59,82%	60	9407,23
						Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	68,38%	persentase	63,35	64,87%	64,87%	100	64,87%	65	9457,02
1	1	2	2,04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang yang dibangun	20	ruang				-		-	0
1	1	2	2,04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Sapras utilitas	12	ruang	4			100		8	66,67

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	2	2,04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang yang direhab	17	ruang				-		-	0
1	1	2	2,04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah meubel	1000	set	105			100		210	21
1	1	2	2,04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Siswa	12	paket				-		-	0
1	1	2	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	1000	Siswa	0	2087	2087	-	2087	4.174	417,4
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			525			100		1.050	-
1	1	2	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang dibina	10540		300			100		600	5,69
						jumlah siswa yang mengikuti ujian	4500	orang		1300	1300	-	1300	2.600	57,78
						Jumlah peserta yang dibina	100	Lembaga				-		100	100
						Jumlah peserta yang dibina	200	orang				-		200	100
						Jumlah peserta yang dibina	2000	orang				-		-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah peserta yang dibina	800	orang				-		-	0
						Jumlah peserta yang dibina	2700	orang		40	40	-	40	80	2,96
						Jumlah peserta yang dibina	240	orang				-		-	0
1	1	2	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							-		-	-
						Jumlah peserta yang dibina	160	Lembaga				-		-	0
						Jumlah peserta yang dibina	200	orang				-		-	0
						Jumlah peserta yang dimonev	120	orang				-		-	0
1	1	2	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang dibina	400	Lembaga				-		-	0
1	1	2	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	12870	orang	2574	154	154	100	154	5.302	41,2
1	1	2	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	450	lembaga	20	100	100	100	100	140	31,11

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	100%	Presentase	10			100		10	1000
1	1	3	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	1	dokumen	1	1	1	100	1	2	200
						Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1	dokumen	1	1	1	100	1	2	200
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	1	dokumen	1	1	1	100	1	2	200
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1	dokumen	1	1	1	100	1	2	200
1	1	3	2,01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP	10	dokumen	9			100		18	180
1	1	3	2,01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal SD dan SMP	10	dokumen	9			100		18	180
1	1	3	2,01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal SD dan SMP	8000	Eksemplar				-		-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	3	2,01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru SD dan SMP dalam mengimplementasi pembelajaran muatan lokal	120	orang				-		-	0
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase terpenuhinya jumlah guru	97%	Persentase				-		-	0
1	1	4	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	01:15	rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 10	100	1 : 10	0	280
						Rasio Guru dengan Peserta didik SD	01:24	rasio	1 : 16	1 : 16	1 : 16	100	1 : 16	0	271,43
						Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	01:26	rasio	1 : 16	1 : 16	1 : 16	100	1 : 16	0	265,12
1	1	4	2,01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen analisis peta mutu dan jumlah guru yang dihasilkan	16	dokumen				-		-	0
1	1	4	2,01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang ditata	1000	orang				-		-	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan izin operasional	100%	Persentase	100			100		100	10000
1	1	5	2,01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	57	dokumen		64	64	-	64	64	112,28
1	1	5	2,01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi	112	lembaga				-		-	0
1	1	5	2,01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang dimonitoring	120	lembaga				-		-	0
1	1	5	2,02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	100	dokumen	80	100	100	100	100	182	182
1	1	5	2,02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi	700	lembaga	100			100		200	28,57

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	5	2,02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang dimonitoring	600	lembaga				-		-	0
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	100%	Persentase				-		-	0
1	1	6	2,01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD	300	sekolah	80	160	160	100	160	240	80
						Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	106	sekolah	30	60	60	100	60	90	84,91
						Jumlah penutur muda bahasa daerah	4060	orang	1100	2200	2200	100	2200	3.300	81,28
						Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	5	kali kegiatan	5	5	5	100	5	10	200
1	1	6	2,01	1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4000	Eksemplar				-		-	0
1	1	6	2,01	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengangkat bahasa dan sastra daerah sebagai mata pelajaran	0	Kegiatan				-		-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	6	2,01	3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan publikasi	8	Kegiatan				-		-	0
1	1	6	2,01	4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tokoh yang diberikan penghargaan	8	orang				-		-	0
1	1	6	2,01	5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku yang di distribusikan	12000	Eksemplar				-		-	0
1	1	6	2,01	6	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba	1600	orang				-		-	0
1	1	6	2,01	7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah modul dan bahan ajar yang didistribusikan	12000	Eksemplar				-		-	0
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	110	Event	2			100		2	1,82
						Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100%	Persentase	100	100	100	100	100	200	20000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	2	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	15	kegiatan	5	10	10	100	10	20	133,33
2	22	2	2,02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang di lindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan .	9	Kegiatan	3			100		6	66,67
								set				-		-	-
								set				-		-	-
								set				-		-	-
2	22	2	2,02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Dibina	80	orang		20	20	-	20	40	50
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	80%	presentase	50			100		50	6250
2	22	3	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahtera an masyarakat dan pelakunya	15	kegiatan	8	10	10	100	10	26	173,33

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	3	2,01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tersedianya Penggiat/ pelaku kesenian yang berkualitas	200	Orang	127	126	126	127	126	253	126,5
2	22	3	2,01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah pelaku kesenian yang dibina dan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar	90	orang	0	60	60	-	60	60	66,67
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presetase Sejarah lokal yang dilestarikan	78,67%	persentase				-		-	0
2	22	4	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	20	kegiatan	8	12	12	100	12	20	100
2	22	4	2,01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	120	orang		1	1	-	1	2	1,67
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	100%	persentase	100			100		100	10000
						Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	19,6	persentase	0			-		-	0
						Presentase Museum yang dikelola oleh Pemda (2 Museum)	100%	persentase	100			100		100	10000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi ( )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	5	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	20	cagar budaya	8	12	12	100	12	20	100
2	22	5	2,01	2	Penetapan Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya	9	Kawasan	8	8	8	100	8	24	266,67
2	22	5	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	20	cagar budaya	8	12	12	100	12	20	100
2	22	5	2,02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya di lindungi yang sudah ditetapkan	20	buah	8	12	12	100	12	28	140
2	22	5	2,02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang dil kembangkan	32	buah				-		-	0
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase musuem yang dikelola	78,67%	persentase						-	0
2	22	6	2,01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	museum	2	2	2	100	2	4	200
2	22	6	2,01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	8	Titik				-		-	0
2	22	6	2,01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang di revitalisasi	8	Bangunan / Gedung				-		-	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah berdasarkan laporan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) urusan, yaitu urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Indikator kinerja utama urusan pendidikan dan kebudayaan meliputi :

1. Nilai SAKIP PD target nilai 69,00 (enam puluh sembilan), capaian nilai 70,00 (tujuh puluh);
2. Rata-rata lama sekolah target 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) tahun capaian 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) tahun;
3. Harapan lama sekolah target 13,61 (tiga belas koma enam puluh satu) tahun capaian 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) tahun ; dan
4. Indeks kebudayaan target 90% (sembilan puluh persen) prosentase capaian 53,23 % (lima puluh tiga koma dua puluh tiga persen) prosentase;

No	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Prosentase jumlah anak yang sudah tamat atau sedang belajar
1	Pendidikan anak usia dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	$PAUD = \frac{18.297}{29.356} x\ 100\% = 62,33\%$
2	Pendidikan dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	$SD = \frac{92.846}{94.357} x\ 100\% = 98,40\%$ $SMP = \frac{39.734}{44.038} x\ 100\% = 90,23\%$
3	Pendidikan kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	$Kesetaraan = \frac{135.843}{172.990} x\ 100\% = 78,53\%$

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target realisasi
		Indikator	Skor Max	
1	PAUD	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	100%	91.95%
		2) Standar Isi	100%	92.99%
		3) Standar Proses	100%	98.75%
		4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	66.35%
		5) Standar Sarana & Prasarana	100%	79.12%
		6) Standar Pengelolaan	100%	94.37%
		7) Standar Pembiayaan	100%	86.25%
		8) Standar Penilaian Pendidikan	100%	89.59%
2	SD	1) Standar kompetensi lulusan	100%	95.35%
		2) Standar isi	100%	90.77%
		3) Standar proses	100%	96.21%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	88.06%
		5) Standar pengelolaan	100%	98.78%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	79.35%
		7) Standar pembiayaan	100%	70.35%
		8) Standar penilaian	100%	88.20%
3	SMP	1) Standar kompetensi lulusan	100%	92.35%
		2) Standar isi	100%	91.21%
		3) Standar proses	100%	94.49%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	87.78%
		5) Standar pengelolaan	100%	98.63%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	81.35%
		7) Standar pembiayaan	100%	89.64%
		8) Standar penilaian	100%	88.78%
4	Pendidik an	1) Standar kompetensi lulusan	100%	70.96%
	Kesetara an			
		2) Standar isi	100%	74.65%
		3) Standar proses	100%	76.01%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	70.04%
		5) Standar pengelolaan		70.44%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	68.80%
		7) Standar pembiayaan	100%	72.12%
		8) Standar penilaian	100%	70.07%

Rincian capaian indikator IKU, IKK dan SPM sebagai hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

N O	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IK K	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IK U	67	69	71	74	75	70	72	74	75	
2	Rata-rata lama sekolah		IK U	9,23	9,24	9,25	9,26	9,26	9,25	9,25	9,25	9,26	
3	Harapan Lama Sekolah		IK U	13,6	13,61	13,62	13,64	13,64	13,64	13,63	13,63	13,64	
4	Angka Partisipasi Kasar PAUD			79,31%	79,32%	79,33%	81,89%	81,89%	80,31%	79,33%	79,33%	81,89%	
5	Angka Partisipasi Kasar SD			102%	101,09%	100,31%	100,00%	100,00%	105,13%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Angka Partisipasi Murni SD			97,13%	97,25%	97,37%	99,37%	99,37%	98,27%	97,37%	97,37%	99,37%	
7	Angka Partisipasi Sekolah SD			100,90%	100,85%	100,81%	100,00%	100,00%	99,88%	100,81%	100,81%	100,00%	
8	Angka Putus Sekolah SD			465	398	278	0	0	278	278	278	0	
9	Angka Partisipasi Kasar SMP			100,76%	100,55%	100,34%	100,00%	100,00%	107,95%	100,34%	100,34%	100,00%	
10	Angka Partisipasi Murni SMP			77,91%	78,03%	78,15%	78,15%	78,15%	80,15%	79,25%	79,25%	78,15%	
11	Angka Partisipasi			100%	100,20%	100,19%	100,00%	100,00%	98,93%	100,19%	100,19%	100,00%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

N O	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IK K	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Sekolah SMP												
12	Angka Putus Sekolah SMP			418	338	258	258	0	258	258	258	0	
13	Angka Melek Huruf			99,95	0,9996	99,97%	99,97%	99,97	99,96%	99,97	99,97	99,97	
14	Indeks Kebudayaan		IKU	88,00%	90%	91,00%	91%	95	53,23%	91	91	95	
15	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan			88,00%	90%	91,00%	91%	95	89%	91	91	95	
16	Indeks Pendidikan Mutu Pendidikan			82,02%	84,48%	83,45%	83,45%	86,23%	84,74%	83,45%	83,45%	86,23%	
	Prosentase jumlah anak berdasarkan umur yang sudah tamat atau sedang belajar pada jenjang/jenis Pendidikan												
17	Pendidikan anak usia dini	SPM		94,34	94,84	95,34	95,84	96,89	62,33%	95,34	95,34	96,89	
18	Pendidikan dasar	SPM		100	100	100	100	100	90,23%	100	100	100	
19	Pendidikan kesetaraan	SPM		50,5	58,5	63	63	92,9	78,53%	91	91	92,9	
20	Kemampuan Literasi SD	SPM			56,12			62,29	57,3			62,29	Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan,
21	Kemampuan Literasi SMP	SPM			68,94			76,68	70,08			76,68	Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/202 4 Tanggal 16 Februari 2024
22	Kemampuan Numerasi SD	SPM			41,94			46,39	43,86			46,39	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

N O	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IK K	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
23	Kemampuan Numerasi SMP	SPM			68,29			71,47	62,61			71,47	
24	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	SPM			100			100	60,51			100	
25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SPM			100			100	99,69			100	
26	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	SPM			100			100	18,1			100	
27	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	SPM			48,4			48,43	47,37			48,43	
28	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	SPM			73,9			75,16	73,06			75,16	
29	Iklim Inklusivitas SD	SPM			58,71			63,01	53,59			63,01	
30	Iklim Inklusivitas SMP	SPM			58,51			64,41	56,46			64,41	
31	Iklim Keamanan SD	SPM			72,93			78,44	70,87			78,44	
32	Iklim Keamanan SMP	SPM			70, 53			75,81	69,72			75,81	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

N O	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IK K	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
33	Iklim Kebinekaan SD	SPM			70,99			79,34	70,8			79,34	
34	Iklim Kebinekaan SMP	SPM			68,8			77,89	73,12			77,89	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

1) Keberadaan lembaga PAUD (formal dan non formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
2) Belum maksimalnya akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
3) Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
4) Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu tidak penting, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke sekolah dasar sekalipun usianya masih belum cukup;
5) Pengadaan peralatan untuk pengelolaan dana BOP/BOS;
6) Transformasi digital dalam bidang pendidikan; dan
7) Transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar.

b. Layanan Pendidikan Dasar.

1) Masih terdapat sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sekolah sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
2) Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D-IV;
3) Masih terdapat guru SD dan SMP yang kualifikasi S1/D4 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampunya;
4) Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan guru PNS SD mata pelajaran pendidikan jasmani;
5) Banyaknya jabatan kepala sekolah pada satuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pendidikan SD yang belum definitif dikarenakan belum terpenuhinya syarat calon kepala sekolah;

6) Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
7) Masih banyak sekolah dasar yang kekurangan ruang kelas dan belum memiliki perpustakaan, ruang kepala sekolah/ guru dan TU, ruang UKS;
8) Masih terdapat SMP yang belum memiliki lab komputer dan lab bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
9) Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas;
10) Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki guru mata pelajaran;
11) Pengadaan peralatan untuk pengelolaan dana BOP/BOS;
12) Transformasi digital dalam bidang pendidikan; dan
13) Transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah Dasar.

c. Layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
   1) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan non-formal masih kurang;
   2) Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non-formal;
   3) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non-formal;
   4) Masih banyak penduduk usia produktif yang belum mempunyai keterampilan dan kemandirian;
   5) Belum adanya pemetaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan non-formal.

d. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup.
   1) Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
   2) Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menyelenggarakan Pendidikan keterampilan dan pelatihan;

3) Belum optimalnya akses UPT sanggar kegiatan belajar bagi masyarakat;
4) Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
5) Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih kurang;
6) Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;
7) Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan kecakapan hidup.

e. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan.

1) Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2) Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
3) Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; dan
5) Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntuan pekerjaan yang semakin kompleks.

f. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

1) Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi minimal Baik (B);
2) Belum adanya sekolah dasar unggulan disetiap kecamatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3) Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan;
4) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan; dan
5) Belum adanya pemetaaan dan penataan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Layanan Pelestarian Kebudayaan
1) Indeks Kebudayaan belum mencapai angka 88% (delapan puluh delapan persen), yaitu baru 49,08% (empat puluh sembilan koma delapan persen);
2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
3) Banyaknya Situs cagar kebudayaan yang belum dilakukan penetapan;
4) Masih Rendahnya Pelestarian kesenian daerah.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Dengan dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung untuk periode tahun 2021- 2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”. Sedangkan misi yang telah ditetapkan adalah:

1) Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3) Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4) Meningkatkan kualitas layanan struktur dasar dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

konektivitas antar wilayah;

5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam implementasi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, terdapat 2 (dua) misi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1) Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani yang tertuang dalam Program Kukar Bebaya;
2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya, yang tertuang dalam Program:
   a. Program 1000 (seribu) guru sarjana.

      Program 1000 (seribu) guru sarjana merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan beasiswa guru yang belum mencapai pendidikan standar S1 ditambah dengan beasiswa bagi calon guru yang berasal dari penduduk lokal yang bersedia menjadi guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 (seribu) guru, selama periode kepemimpinan.

   b. Program Beasiswa Kukar Idaman.

      Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat siswa/siswi/dan mahasiswa/mahasiswi Kutai Kartanegara untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah(regular dan stimulant), dengan target 1.000 (seribu) orang di perguruan tinggi skema tematik, 100 (seratus) santri lanjut perguruan tinggi, 4.000 (empat ribu) orang bantuan stimulan mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 (seribu) orang beasiswa di pesantren, dan 3.000 (seribu) orang bantuan stimulan siswa/siswi SD/SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.

   c. Program Gerakan Etam Mengaji Idaman (GEMA Idaman)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan,yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategi memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa sekolah dasar sekolah menengah pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 (lima puluh) rumah ibadah pertahun

d. Program Kukar Berbudaya.

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kutai Kartanegara, dengan menetapkan Tenggarong sebagai kota warisan budaya, dengan menonjolkan kesan Tenggarong sebagai kota sejarah dan budaya yang ramah dan moderen.

3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur.

1) Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020- 2024

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, sejalan Rencana dengan itu, visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

a) beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia;
b) mandiri;
c) bernalar kritis;
d) berkebhinekaan global;
e) gotong royong; dan
f) kreatif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang maha esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Mandiri Pelajar Indonesia.

Merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(3) Bernalar kritis.

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(4) Berkebinekaan global.

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(5) Bergotong royong.

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(6) Kreatif.

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

2) Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Renstra pembangunan pendidikan tahun 2019- 2023 yang mengusung visi: Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Cerdas, Berkualitas dan Punya Daya Saing.

Sedangkan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

a. mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
b. mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;
c. mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
d. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta pengembangan bahasa; dan
e. mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

4. Penentuan Isu-Isu strategis

Penentuan Isu, asumsi dan prioritas strategis berdasarkan identifikasi permasalahan, telahaan visi dan misi Bupati Kutai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kartanegara terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan dating adalah sebagai berikut:

1) Isu Strategis
   a) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
   b) Penyelenggaraan pendidikan dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
   c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   d) Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih di bawah rata-rata provinsi/nasional;
   e) Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
   f) Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup *(life skill)* yang mencakup kecakapan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;

g) Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan;

h) Belum adanya wadah pengembangan seni budaya bahasa dan sastra daerah;

i) Pelestarian sejarah dan warisan budaya yang saat ini sudah termaktub dalam *road map* dan tahap penyempurnaan;

j) Belum adanya pusat kebudayaan masyarakat melayu kutai;

k) Belum optimalnya penulisan sejarah lokal;

l) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya; dan

m) Transformasi digital dalam bidang pendidikan merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, memudahkan aksesibilitas, serta membantu siswa mempersiapkan diri dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital.

2) Asumsi dan Prioritas Strategis.

Asumsi dan prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dianalisa berdasarkan analisa SWOT yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan. Beberapa asumsi dan prioritas strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;

b) Peningkatan layanan kepastian dan jaminan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

c) Perluasan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus disetiap sekolah dengan memaksimalkan peran kelas inklusi;

d) Peningkatan layanan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal;

e) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;

f) Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup *(life skill)* yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;

g) Peningkatan penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur dalam melaksanakan pendidikan.

h) Penyediaan wadah dan pusat kebudayaan masyarakat Melayu Kutai.

i) Penyelenggaraan even-even kesenian daerah dari tingkat lokal sampai nasional.

j) Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kartanegara tahun 2026 dijabarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah Daerah yang memuat prioritas Program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, prioritas nasional, prioritas provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dan perkiraan kondisi tahun 2023 serta prospek tahun 2024 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) 2. Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS) 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 5) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 6) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 7) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN PendidikanDasar	100 100 91.71)90.71 85.02 70.38 3000	Persentase	1.449.169.943.551	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) 2. Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS) 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 5) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 6) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 7) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	100 100 91.71 90.71 85.02 70.38 3000	Persentase	1.871.059.295.701	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	920.213.719.384	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	1.324.483.719.384	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13	Dokumen	775.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13	Dokumen	775.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	225.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	225.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja			1	Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja			1	Dokumen	150.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja Perubahan			1	Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja Perubahan			1	Dokumen	75.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7	Laporan	100.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah			2	Laporan	100.000.000	Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah			2	Laporan	100.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	50.000.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			2	Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			2	Dokumen	50.000.000	
9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	Data	250.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	Data	250.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			161	Data	250.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			161	Data	250.000.000	
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	50.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Berita Acara	Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Berita Acara	Berita Acara	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	7	Dokumen	911.432.878.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1.311.802.878.744	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71892	Orang/ bulan	910.832.878.744	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71892	Orang/bulan	1.310.832.878.744	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta PPPK			71892	Orang/ bulan	910.832.878.744	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta PPPK			71892	Orang/bulan	1.310.832.878.744	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	-	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun			2	Laporan	50.000.000	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun			2	Laporan	50.000.000	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	500.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	770.000.000	
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan			2	Laporan	500.000.000	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan			2	Laporan	770.000.000	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2	Dokumen	150.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	79	Dokumen	670.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	79	Dokumen	770.000.000	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen RKBMD 2027			1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen RKBMD 2027			1	Dokumen	20.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	150.000.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1	Laporan	150.000.000	
19	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	72	Laporan	450.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	72	Laporan	450.000.000	
	Inventerisasi dan Pengawasan			72	Laporan	450.000.000	Inventerisasi dan Pengawasan			72	Laporan	450.000.000	
20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	150.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	150.000.000	
	Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2	Laporan	150.000.000	Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2	Laporan	150.000.000	
21	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	-	
22	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	791	Dokumen	290.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	791	Dokumen	690.000.000	
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	-	
24	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
25	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560	Dokumen	70.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560	Dokumen	170.000.000	
	Pendistribusian SK Kenaikan Pangkat JFT dan JFU			560	Dokumen	70.000.000	Pendistribusian SK Kenaikan Pangkat JFT dan JFU			560	Dokumen	170.000.000	
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	
27	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70	Dokumen	70.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70	Dokumen	170.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan Tindakan			70	Dokumen	70.000.000	Monitoring dan Evaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan Tindakan			70	Dokumen	170.000.000	
28	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5	Orang	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5	Orang	-	
29	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	-	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	-	
30	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	5	Orang	-	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	5	Orang	-	
31	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	-	
32	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	150.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Mengenai E- Kinerja Pegawai			45	Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Mengenai E- Kinerja Pegawai			45	Orang	150.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
33	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	Orang	200.000.000	
	Bimbingan Teknis Nasional Tentang Angka Kredit , Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru			25	Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Nasional Tentang Angka Kredit , Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru			25	Orang	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	1255	Dokumen	1.872.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	1255	Dokumen	2.072.000.000	
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	297.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	297.000.000	
	Penyediaan Komponen Listrik			1	Paket	297.000.000	Penyediaan Komponen Listrik			1	Paket	297.000.000	
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	600.000.000	
	Pengadaan Alat Tulis Kantor			4	Paket	600.000.000	Pengadaan Alat Tulis Kantor			4	Paket	600.000.000	
36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	-	
37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000	
	Pengadaan Alat Kebersihan			1	Paket	150.000.000	Pengadaan Alat Kebersihan			1	Paket	150.000.000	
38	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100.000.000	
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1	Paket	100.000.000	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1	Paket	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	700	Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	700	Dokumen	-	
40	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	-	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	-	
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	100.000.000	
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100	Laporan	100.000.000	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100	Laporan	100.000.000	
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436	Laporan	475.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436	Laporan	675.000.000	
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			436	Laporan	475.000.000	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			436	Laporan	675.000.000	
43	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5	Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5	Dokumen	150.000.000	
44	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	143	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	143	Unit	3.100.000.000	
45	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	Unit	350.000.000	
46	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	550.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
47	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	700.000.000	
48	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	550.000.000	
49	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	Unit	150.000.000	
50	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20	Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20	Unit	100.000.000	
51	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	250.000.000	
52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	Unit	200.000.000	
53	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	6139	Laporan	3.483.840.640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	6139	Laporan	3.583.840.640	
54	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	2.200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	2.200.000.000	
	Pembayaran Air, Listrik, Internet, Telpon			4	Laporan	2.200.000.000	Pembayaran Air, Listrik, Internet, Telpon			4	Laporan	2.200.000.000	
55	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4	Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4	Laporan	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131		1.233.840.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131		1.233.840.640	
	Gaji THL Administrasi dan THL Guru/TU			12	Laporan	908.840.640	Gaji THL Administrasi dan THL Guru/TU			12	Laporan	908.840.640	
	Jasa Kebersihan dan Keamanan			12		325.000.000	Jasa Kebersihan dan Keamanan			12		325.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	546	Unit	1.690.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	546	Unit	1.690.000.000	
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	1.055.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	1.055.000.000	
	Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20	Unit	1.055.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20	Unit	1.055.000.000	
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	960	Unit	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	960	Unit	135.000.000	
	Pembayaran Pajak dan Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			960	Unit	135.000.000	Pembayaran Pajak dan Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			960	Unit	135.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	Unit	-	
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3	Unit	-	
61	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	-	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	-	
62	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	250.000.000	
	Perbaikan Peralatan Kantor (AC, Printer, Komputer dan Lain-lainnya)			31	Unit	250.000.000	Perbaikan Peralatan Kantor (AC, Printer, Komputer dan Lain-lainnya)			31	Unit	250.000.000	
62	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap			3	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap			3	Unit	25.000.000	
62	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Unit	-	
63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	225.000.000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	225.000.000	
			yang Dipelihara/Direhabilitasi						yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ruang Serba Guna			5	Unit	225.000.000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Ruang Serba Guna			5	Unit	225.000.000	
64	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
65	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) 2. Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS) 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 5) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 6) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 7) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	100 100 91.71 90.71 85.02 70.38 3000	Persentase	525.436.224.167	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) 2. Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS) 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 5) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 6) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 7) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	100 100 91.71 90.71 85.02 70.38 3000	Persentase	543.055.576.317	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar 3) Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 5) Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar 7) Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar 8) Standar penilaian	93.94 89.65 96.23 86.65 98.53 76.23 90.08 87.08	Persentase	222.428.790.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar 3) Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 5) Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar 7) Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar 8) Standar penilaian	93.94 89.65 96.23 86.65 98.53 76.23 90.08 87.08	Persentase	224.428.790.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Pendidikan Sekolah Dasar						Pendidikan Sekolah Dasar				
66	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	6.500.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	6.500.000.000	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 005 Muara Badak			1	Unit	6.500.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 005 Muara Badak			1	Unit	6.500.000.000	
67	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	1.750.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	1.750.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN sdn 016 sanga sanga			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN sdn 016 sanga sanga			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 015 salok api laut muara badak			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 015 salok api laut muara badak			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 004 tenggarong seberang			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 004 tenggarong seberang			1	Ruang	500.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 023 Tenggarong Seberang			1	Ruang	250.000.000	Lanjutan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 023 Tenggarong Seberang			1	Ruang	250.000.000	
68	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	400.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SDN 026 Sebulu			1	Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SDN 026 Sebulu			1	Ruang	400.000.000	
69	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	Ruang	3.500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	Ruang	3.500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 025 Kota Bangun			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 025 Kota Bangun			1	Ruang	500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 026 Kota Bangun III			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 026 Kota Bangun III			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 026 Sebulu			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 026 Sebulu			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 018 Muara Jawa			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 018 Muara Jawa			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 004 Loa Janan			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 004 Loa Janan			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 017 Muara Jawa			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 017 Muara Jawa			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 017 Sebulu			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 017 Sebulu			1	Ruang	500.000.000	
70	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	Unit	3.964.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	Unit	3.964.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 033 Kota Bangun			1	Unit	300.000.000	Pembangunan Pagar SDN 033 Kota Bangun			1	Unit	300.000.000	
	Pembangunan Toilet Murid SDN 024 Loa Janan			1	Unit	300.000.000	Pembangunan Toilet Murid SDN 024 Loa Janan			1	Unit	300.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 007 Marang Kayu			1	Unit	264.000.000	Pembangunan Toilet SDN 007 Marang Kayu			1	Unit	264.000.000	
	Pembangunan Toilet SDN 001 Sebulu			1	Unit	250.000.000	Pembangunan Toilet SDN 001 Sebulu			1	Unit	250.000.000	
	Semenisasi Halaman SDN 010 Desa Buluk Sen Tabang			1	Unit	250.000.000	Semenisasi Halaman SDN 010 Desa Buluk Sen Tabang			1	Unit	250.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 034 Muara Kaman			1	Unit	300.000.000	Pembangunan Pagar SDN 034 Muara Kaman			1	Unit	300.000.000	
	Pembangunan Halaman SD 035 Tenggarong			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Halaman SD 035 Tenggarong			1	Unit	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 040 Bukit Merdeka			1	Unit	250.000.000	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 040 Bukit Merdeka			1	Unit	250.000.000	
	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 027 Muara Kaman Ilir			1	Unit	200.000.000	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 027 Muara Kaman Ilir			1	Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 003 Sebulu			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Pagar SDN 003 Sebulu			1	Unit	200.000.000	
	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 011 Desa Makarti			1	Unit	200.000.000	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 011 Desa Makarti			1	Unit	200.000.000	
	Pembuatan Jembatan Sekolah SDN 024 Desa Santan Ulu			1	Unit	200.000.000	Pembuatan Jembatan Sekolah SDN 024 Desa Santan Ulu			1	Unit	200.000.000	
	Penimbunan Halaman sekolah SDN 0180 Marangkayu			1	Unit	200.000.000	Penimbunan Halaman sekolah SDN 0180 Marangkayu			1	Unit	200.000.000	
	Pembuatan pagar sekolah SDN 023 marangkayu			1	Unit	200.000.000	Pembuatan pagar sekolah SDN 023 marangkayu			1	Unit	200.000.000	
	Penimbunan Halaman SDN.005 Kel.Dondang Kec. Muara Jawa			1	Unit	200.000.000	Penimbunan Halaman SDN.005 Kel.Dondang Kec. Muara Jawa			1	Unit	200.000.000	
	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 003 Sebulu			1	Unit	200.000.000	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 003 Sebulu			1	Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar SDN 007 Sebulu			1	Unit	250.000.000	Pembangunan Pagar SDN 007 Sebulu			1	Unit	250.000.000	
71	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	-	
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
75	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	6	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	6	Unit	2.000.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 012 MUARA KAMAN			1	Unit	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 012 MUARA KAMAN			1	Unit	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN 011 MUARA WIS			1	Unit	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN 011 MUARA WIS			1	Unit	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 029 Loa Kulu			1	Unit	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 029 Loa Kulu			1	Unit	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 011 LOA KULU			1	Unit	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 011 LOA KULU			1	Unit	500.000.000	
76	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1500	Paket	3.735.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1500	Paket	3.735.000.000	
	Pengadaan Meubelair Siswa SD			58	Paket	3.735.000.000	Pengadaan Meubelair Siswa SD			58	Paket	3.735.000.000	
77	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket	-	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket	-	
78	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4	Paket	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4	Paket	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Sekolah			1	Paket	50.000.000	Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Sekolah			1	Paket	50.000.000	
79	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	
80	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489	Peserta Didik	750.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489	Peserta Didik	750.000.000	
	Penyelenggaraan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)			364	Peserta Didik	350.000.000	Penyelenggaraan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)			364	Peserta Didik	350.000.000	
	Pembinaan Karakter Siswa			25	Peserta Didik	50.000.000	Pembinaan Karakter Siswa			25	Peserta Didik	50.000.000	
	Pelaksanaan GEMA Idaman Tingakt SD			100	Peserta Didik	350.000.000	Pelaksanaan GEMA Idaman Tingakt SD			100	Peserta Didik	350.000.000	
81	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160	Orang	70.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160	Orang	70.000.000	
	Sosialisasi Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru			160	Orang	70.000.000	Sosialisasi Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru			160	Orang	70.000.000	
82	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	480	Orang	1.550.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	480	Orang	1.550.000.000	
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Program Beasiswa S1 bagi Guru			150	Orang	800.000.000	Program Beasiswa S1 bagi Guru			150	Orang	800.000.000	
	Pendidikan Profesi Guru (PPG)			90	Orang	300.000.000	Pendidikan Profesi Guru (PPG)			90	Orang	300.000.000	
	Pendampingan Guru Penggerak dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			60	Orang	300.000.000	Pendampingan Guru Penggerak dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			60	Orang	300.000.000	
	Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompentensi Guru Inklusi SD			30	Orang	150.000.000	Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompentensi Guru Inklusi SD			30	Orang	150.000.000	
83	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2411	Satuan Pendidika n	250.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2411	Satuan Pendidikan	250.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			2411	Satuan Pendidika n	250.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			2411	Satuan Pendidikan	250.000.000	
84	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	107252	Satuan Pendidika n	94.865.390.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	107252	Satuan Pendidikan	94.865.390.000	
				449	Satuan Pendidikan	41.118.080.000				449	Satuan Pendidikan	41.118.080.000	
				121	Satuan Pendidikan	30.365.625.000				121	Satuan Pendidika n	30.365.625.000	
				449	Satuan Pendidikan	23.381.685.000				449	Satuan Pendidikan	23.381.685.000	
85	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	944	Orang	44.598.400.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	944	Orang	44.598.400.000	
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah			944	Orang	250.000.000				944	Orang	500.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembayaran Insentif Non PNS			3044	Orang	44.348.400.000				3044	Orang	44.348.400.000	
86	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4	Ruang	-	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4	Ruang	-	
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
88	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	13	Unit	-	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	13	Unit	-	
89	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10	Orang	-	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10	Orang	-	
90	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26	Orang	1.000.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26	Orang	1.000.000.000	
				26	Orang	1.000.000.000				26	Orang	1.000.000.000	
91	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40	Konten Digital	200.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40	Konten Digital	200.000.000	
				40	Konten Digital	200.000.000				40	Konten Digital	200.000.000	
92	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567	Orang	300.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567	Orang	300.000.000	
				567	Orang	300.000.000				567	Orang	300.000.000	
93	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	400	Dokumen	300.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	400	Dokumen	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
				400	Dokumen	300.000.000				400	Dokumen	300.000.000	
94	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Dokumen	350.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Dokumen	350.000.000	
				900	Dokumen	350.000.000				900	Dokumen	350.000.000	
95	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50	Komunitas	150.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50	Komunitas	150.000.000	
				50	Komunitas	150.000.000				50	Komunitas	150.000.000	
96	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	6	Paket	-	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	6	Paket	-	
97	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	-	
98	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4	Ruang	-	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4	Ruang	-	
99	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20000	Buku	200.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20000	Buku	200.000.000	
				20000	Buku	200.000.000				20000	Buku	200.000.000	
100	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12679	Paket	500.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12679	Paket	500.000.000	
				449	Paket	500.000.000				449	Paket	500.000.000	
101	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	70	Ruang	26.780.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	70	Ruang	26.780.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 022 Tenggarong Seberang			3	Ruang	1.140.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 022 Tenggarong Seberang			3	Ruang	1.140.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 014 kenohan			6	Ruang	3.600.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 014 kenohan			6	Ruang	3.600.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 019 Samboja			4	Ruang	1.800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 019 Samboja			4	Ruang	1.800.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 015 salok api laut muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 015 salok api laut muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sd muhammadiah 1 sebulu			3	Ruang	1.140.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sd muhammadiah 1 sebulu			3	Ruang	1.140.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 008 desa bukit raya tenggarong seberang			3	Ruang	1.140.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 008 desa bukit raya tenggarong seberang			3	Ruang	1.140.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru Fillial sdn 001 muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru Fillial sdn 001 muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 012 Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara			4	Ruang	1.800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 012 Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara			4	Ruang	1.800.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 019 muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 019 muara badak			4	Ruang	1.800.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 011 tenggarong seberang			3	Ruang	1.140.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 011 tenggarong seberang			3	Ruang	1.140.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 027 kota bangun 3			4	Ruang	2.160.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 027 kota bangun 3			4	Ruang	2.160.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDK Arnoldus J Loa Janan			4	Ruang	1.520.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDK Arnoldus J Loa Janan			4	Ruang	1.520.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 010 muara wis			6	Ruang	3.240.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 010 muara wis			6	Ruang	3.240.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 015 sanga-sanga			6	Ruang	2.700.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru sdn 015 sanga-sanga			6	Ruang	2.700.000.000	
102	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	Unit	-	
103	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	107	Orang	850.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	107	Orang	850.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100	Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100	Orang	500.000.000	
	Fasilitasi Guru Kandidat Sekolah Referensi Google			7	Orang	350.000.000	Fasilitasi Guru Kandidat Sekolah Referensi Google			7	Orang	350.000.000	
104	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2671	Satuan Pendidikan	1.250.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2671	Satuan Pendidikan	1.250.000.000	
	Penyelenggaran Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan			478	Satuan Pendidikan	950.000.000	Penyelenggaran Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan			478	Satuan Pendidikan	950.000.000	
	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)						Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)						
	Fasilitasi Pembelajaran berbasis digital			400	Satuan Pendidikan	300.000.000	Fasilitasi Pembelajaran berbasis digital			400	Satuan Pendidikan	300.000.000	
105	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	70	Ruang	23.870.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	70	Ruang	23.870.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 011 anggana"			4	Ruang	1.800.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 011 anggana"			4	Ruang	1.800.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 013 kembang janggut"			3	Ruang	1.620.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 013 kembang janggut"			3	Ruang	1.620.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 026 muara badak"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 026 muara badak"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 009 muara jawa"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 009 muara jawa"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 001 sanga sanga"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 001 sanga sanga"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 008 sidomulyo anggana"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 008 sidomulyo anggana"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 001 kenohan"			3	Ruang	1.620.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 001 kenohan"			3	Ruang	1.620.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 017 bakungan"			3	Ruang	1.140.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 017 bakungan"			3	Ruang	1.140.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 005 sebuntal"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 005 sebuntal"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 021 suka damai muara badak"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 021 suka damai muara badak"			3	Ruang	1.350.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 002 muara kembang"			3	Ruang	1.620.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 002 muara kembang"			3	Ruang	1.620.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 006 muara aloh"			3	Ruang	1.620.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 006 muara aloh"			3	Ruang	1.620.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 014 handil baru darat"			3	Ruang	1.350.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 014 handil baru darat"			3	Ruang	1.350.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 018 loa janan"			3	Ruang	1.140.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sdn 018 loa janan"			3	Ruang	1.140.000.000	
	Lanjutan Pembangunan dan Rehab total SDN 004 Tenggarong			1	Ruang	500.000.000	Lanjutan Pembangunan dan Rehab total SDN 004 Tenggarong			1	Ruang	500.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 016 Muara Kaman"			3	Ruang	1.620.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 016 Muara Kaman"			3	Ruang	1.620.000.000	
	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 011 Loa Kulu"			3	Ruang	1.140.000.000	"Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 011 Loa Kulu"			3	Ruang	1.140.000.000	
	Lanjutan "Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 016 Loa Kulu"			2	Ruang	600.000.000	Lanjutan "Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 016 Loa Kulu"			2	Ruang	600.000.000	
106	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	4	Ruang	-	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	4	Ruang	-	
107	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4	Ruang	-	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4	Ruang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
108	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000	Peserta Didik	950.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000	Peserta Didik	950.000.000	
	Bantuan Stimulan Biaya pendidikan sekolah dasar program beasiswa kukar idaman			2000	Peserta Didik	950.000.000	Bantuan Stimulan Biaya pendidikan sekolah dasar program beasiswa kukar idaman			2000	Peserta Didik	950.000.000	
109	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1232	Paket	3.746.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1232	Paket	3.746.000.000	
	pengadaan media pembelajaran alat peraga pendidikan literasi dan numerasi			7	Paket	3.746.000.000	pengadaan media pembelajaran alat peraga pendidikan literasi dan numerasi			7	Paket	3.746.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP 2) Standar isi Pendidikan SMP 3) Standar proses Pendidikan SMP 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP 5) Standar pengelolaan Pendidikan SMP 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 7) Standar pembiayaan Pendidikan SMP 8) Standar penilaianPendidikan SMP	9237 8794 9494 8280 9551 7880 8937 8351	Persentase	153.318.418.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP 2) Standar isi Pendidikan SMP 3) Standar proses Pendidikan SMP 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP 5) Standar pengelolaan Pendidikan SMP 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 7) Standar pembiayaan Pendidikan SMP 8) Standar penilaian Pendidikan SMP	9237 8794 9494 8280 9551 7880 8937 8351	Persentase	168.937.770.150	
110	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10	Unit	-	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10	Unit	-	
111	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	700.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	1.700.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru SMPN 1 Samboja			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru SMPN 1 Samboja			1	Ruang	500.000.000	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Ruang Guru SMPN 9 Kota Bangun			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru SMPN 9 Kota Bangun			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru SMPN 8 Muara Kaman			1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Guru SMPN 8 Muara Kaman			1	Ruang	500.000.000	
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMPN 8 Muara Kaman			1	Ruang	200.000.000	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMPN 8 Muara Kaman			1	Ruang	200.000.000	
112	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	Ruang	-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	Ruang	-	
113	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	
114	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	Ruang	1.200.000.000	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	Ruang	1.200.000.000	
	Pembangunan Laboratorium SMPN 6 Samboja			1	Ruang	600.000.000	Pembangunan Laboratorium SMPN 6 Samboja			1	Ruang	600.000.000	
	Pembangunan Laboratorium SMPN 8 Tenggarong			1	Ruang	600.000.000	Pembangunan Laboratorium SMPN 8 Tenggarong			1	Ruang	600.000.000	
115	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	
116	Pembangunan Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	5	Unit	-	Pembangunan Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	5	Unit	750.000.000	
	Pembangunan Asrama Guru			1	Unit	-	Pembangunan Asrama Guru		Jumlah Asrama yang dibangun	1	Unit	750.000.000	
117	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	11	Unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	11	Unit	-	
118	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10	Unit	-	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10	Unit	-	
119	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	-	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
120	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11	Unit	3.325.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11	Unit	3.725.000.000	
	Pembangunan Pelataran SMPN 9 Tenggarong			1	unit	200.000.000	Pembangunan Pelataran SMPN 9 Tenggarong			1	unit	200.000.000	
	Pembangunan Pelataran Halaman SMPN 3 Muara Wis			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Pelataran Halaman SMPN 3 Muara Wis			1	Unit	200.000.000	
	Semenisasi Halaman Upacara SMPN 3 Muara Muntai			1	Unit	200.000.000	Semenisasi Halaman Upacara SMPN 3 Muara Muntai			1	Unit	200.000.000	
	Pengurukan Lapangan SMPN 3 Sanga Sanga			1	Unit	200.000.000	Pengurukan Lapangan SMPN 3 Sanga Sanga			1	Unit	200.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 3 Muara Wis			1	Unit	195.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 3 Muara Wis			1	Unit	195.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 3 Muara Muntai			1	Unit	195.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 3 Muara Muntai			1	Unit	195.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 7 Muara Kaman			1	Unit	195.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 7 Muara Kaman			1	Unit	195.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 2 Muara Wis			2	Unit	400.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 2 Muara Wis			2	Unit	400.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 4 Muara Wis			1	Unit	195.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 4 Muara Wis			1	Unit	195.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 1 Kenohan			2	Unit	400.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 1 Kenohan			2	Unit	400.000.000	
	Rehabilitasi Toilet SMPN 2 Muara Muntai			4	Unit	800.000.000	Rehabilitasi Toilet SMPN 2 Muara Muntai			4	Unit	800.000.000	
	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SMPN 1 Muara Badak Ilir			1	Unit	120.000.000	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SMPN 1 Muara Badak Ilir			1	Unit	120.000.000	
	Pembangunan Pagar SMPN 4 Kota Bangun			1	Unit	225.000.000	Pembangunan Pagar SMPN 4 Kota Bangun			1	Unit	225.000.000	
	Pembangunan Toilet SMP IT AL IHSAN			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Toilet SMP IT AL IHSAN			1	Unit	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
121	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang	7.750.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang	8.750.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 1 Samboja			2	Ruang	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2	Ruang	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Kenohan			4	Ruang	1000000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Kenohan			4	Ruang	1000000000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 1 Kenohan			3	Ruang	750000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 1 Kenohan			3	Ruang	750000000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Muara Wis			3	Ruang	750000000	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Muara Wis			3	Ruang	750.000.000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Muara Muntai			3	Ruang	750000000	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Muara Muntai			3	Ruang	750000000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Muara Muntai			5	Ruang	1250000000	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Muara Muntai			5	Ruang	1250000000	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Muara Muntai			6	Ruang	1500000000	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Muara Muntai			6	Ruang	1500000000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 1 Tabang			6	Ruang	1500000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 1 Tabang			6	Ruang	1500000000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 5 Loa Janan			3	Ruang	750000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 5 Loa Janan			3	Ruang	750000000	
122	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
123	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	
124	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	
125	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	Ruang	-	
126	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	
127	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	
128	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	
129	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	-	
130	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	234	Paket	1.690.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	234	Paket	1.690.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah			26	Paket	1.690.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah			26	Paket	1.690.000.000	
131	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket	-	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket	-	
132	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	207	Paket	3.125.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	207	Paket	3.125.000.000	
	Pengadaan Alat Olahraga Sekolah			25	Paket	3.125.000.000	Pengadaan Alat Olahraga Sekolah			25	Paket	3.125.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
133	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	
134	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3015	Peserta Didik	2.960.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3015	Peserta Didik	2.960.000.000	
	Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik			3015	Peserta Didik	2.960.000.000	Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik			3015	Peserta Didik	2.960.000.000	
135	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2069	Peserta Didik	3.475.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2069	Peserta Didik	3.475.000.000	
	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)			300	Peserta Didik	625000000	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)			300	Peserta Didik	625000000	
	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)			460	Peserta Didik	750000000	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)			460	Peserta Didik	750000000	
	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)			300	Peserta Didik	750000000	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)			300	Peserta Didik	750000000	
	Pelaksanaan Lomba GEMA Idaman Tingkat SMP			300	Peserta Didik	600000000	Pelaksanaan Lomba GEMA Idaman Tingkat SMP			300	Peserta Didik	600000000	
	Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI)			400	Peserta Didik	750000000	Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI)			400	Peserta Didik	750000000	
136	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	817	Orang	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	817	Orang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
137	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	817	Orang	5.495.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	817	Orang	5.495.000.000	
	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru SMP			397	Orang	1820000000	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru SMP			397	Orang	1.820.000.000	
	Penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran			605	Orang	1125000000	Penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran			605	Orang	1.125.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi Sekolah Menengah Pertama			30	Orang	1350000000	Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi Sekolah Menengah Pertama			30	Orang	1.350.000.000	
	Pendidikan Profesi Guru SMP			80	Orang	400000000	Pendidikan Profesi Guru SMP			80	Orang	400.000.000	
	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama			25	Orang	800000000	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama			25	Orang	800.000.000	
138	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162	Satuan Pendidikan	400.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162	Satuan Pendidikan	400.000.000	
	Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah			162	Satuan Pendidikan	400.000.000	Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah			162	Satuan Pendidikan	400.000.000	
139	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	76089	Satuan Pendidikan	59.989.018.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	76089	Satuan Pendidikan	59.989.018.400	
	Pemberian Dana BOSKAB			212	Satuan Pendidikan	24339240000	Pemberian Dana BOSKAB			212	Satuan Pendidikan	24.339.240.000	
	BOSKAB Afirmasi			120	Satuan Pendidikan	18000000000	BOSKAB Afirmasi			120	Satuan Pendidikan	18.000.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengadaan Seragam			207	Satuan Pendidikan	17649778400	Pengadaan Seragam			207	Satuan Pendidikan	17.649.778.400	
140	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3945	Orang	31.239.400.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3945	Orang	44.258.751.750	
	Bimtek Penggunaan ARKAS 40 Jenjang SMP			621	Orang	1350000000	Bimtek Penggunaan ARKAS 40 Jenjang SMP			621	Orang	1.350.000.000	
	Bimtek Perpajakan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Jenjang SMP/MTs			621	Orang	850000000	Bimtek Perpajakan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Jenjang SMP/MTs			621	Orang	850.000.000	
	Pembayaran Insentif Non PNS			1867	Orang	29039400000	Pembayaran Insentif Non PNS			1867	Orang	42.058.751.750	
141	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	
142	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	817	Orang	-	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	817	Orang	-	
143	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	192	Orang	4.500.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	192	Orang	4.500.000.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			192	Orang	4.500.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			192	Orang	4.500.000.000	
144	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100	Konten Digital	200.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100	Konten Digital	200.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100	Konten Digital	200.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100	Konten Digital	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
145	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	162	Orang	300.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	162	Orang	300.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			162	Orang	300.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			162	Orang	300.000.000	
146	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	Dokumen	900.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	Dokumen	900.000.000	
	Penyelenggaraan Rakor Jenjang Pendidikan SMP			1	Dokumen	350000000	Penyelenggaraan Rakor Jenjang Pendidikan SMP			1	Dokumen	350000000	
	Penyelenggaraan SPMB SMP			1	Dokumen	550000000	Penyelenggaraan SPMB SMP			1	Dokumen	550000000	
147	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen	-	
148	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	360	Komunita s	150.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	360	Komunitas	150.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			360	Komunita s	150.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			360	Komunitas	150.000.000	
149	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	162	Kegiatan	300.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	162	Kegiatan	300.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,			162	Kegiatan	300.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,			162	Kegiatan	300.000.000	
	kekerasan, dan intoleransi						kekerasan, dan intoleransi						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
150	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	24	Ruang	-	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	24	Ruang	-	
151	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	434	Satuan Pendidikan	400.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	434	Satuan Pendidikan	400.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			434	Satuan Pendidikan	400.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			434	Satuan Pendidikan	400.000.000	
152	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24	Ruang	14.320.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24	Ruang	13.770.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Tenggarong			2	Ruang	760000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Tenggarong			2	Ruang	760.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Muara Muntai			2	Ruang	1080000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Muara Muntai			2	Ruang	1.080.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Muara Muntai			2	Ruang	1080000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Muara Muntai			2	Ruang	1.080.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Muara Kaman			4	Ruang	2160000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Muara Kaman			4	Ruang	2.160.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Muara Badak			3	Ruang	1.550.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Muara Badak			3	Ruang	1.550.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Muara Kaman			3	Ruang	1.550.000.000				3	Ruang	1.550.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Samboja			4	Ruang	1800000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Samboja			4	Ruang	1.800.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 7 Muara Kaman			3	Ruang	1620000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 7 Muara Kaman			3	Ruang	1.620.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Muara Kaman			3	Ruang	1620000000	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Muara Kaman			3	Ruang	1.620.000.000,00	
	Lanjutan pembangunan Ruang Kelas Baru di MTS Baiturrahman Sebulu			1	Ruang	550000000	Lanjutan pembangunan Ruang Kelas Baru di MTS Baiturrahman Sebulu			1	Ruang	550.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
153	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	600	Orang	6.400.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	600	Orang	6.400.000.000	
			Pendidikan yang dilaksanakan						Pendidikan yang dilaksanakan				
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			600	Orang	6.400.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			600	Orang	6.400.000.000	
154	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	45	Buku	2.000.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	45	Buku	2.000.000.000	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			45	Buku	2.000.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			45	Buku	2.000.000.000	
155	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24	Paket	-	
156	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1	Unit	-	
157	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	-	
158	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	24	Ruang	-	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	24	Ruang	-	
159	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1	Ruang	-	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1	Ruang	-	
160	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	324	Paket	2.500.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	324	Paket	2.500.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga IPA Untuk SMP Swasta			10	Paket	2.500.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga IPA Untuk SMP Swasta			10	Paket	2.500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
161	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	24	Paket	-	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	24	Paket	-	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD 2) Standar Isi Pendidikan PAUD 3) Standar Proses Pendidikan PAUD 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 5) Standar Sarana Prasarana Pendidikan PAUD	91.83 94.58 98.69 45.84 75.98	Persentase	123.328.588.167	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD 2) Standar Isi Pendidikan PAUD 3) Standar Proses Pendidikan PAUD 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 5) Standar Sarana Prasarana Pendidikan PAUD	91.83 94.58 98.69 45.84 75.98	Persentase	123.328.588.167	
			6) Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD 7) Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD 8) Standar Penilaian Pendidikan PAUD	94.85 85.55 89.15					6) Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD 7) Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD 8) Standar PenilaianP endidikan PAUD	94.85 85.55 89.15			
162	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	Unit	4.925.434.667	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	Unit	4.925.434.667	
	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	400.000.000	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	400.000.000	
	Pembangunan Pagar TK Negeri 2 Tenggarong Seberang			1	Unit	400.000.000	Pembangunan Pagar TK Negeri 2 Tenggarong Seberang			1	Unit	400.000.000	
	Pembangunan Toilet TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	236.926.667	Pembangunan Toilet TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	236.926.667	
	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Tenggarong Seberang			1	Unit	538.129.000	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Tenggarong Seberang			1	Unit	538.129.000	
	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Muara Badak			1	Unit	626.625.500	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Muara Badak			1	Unit	626.625.500	
	Pembangunan Pagar TK Tunas Harapan Kota Bangun			1	Unit	250.000.000	Pembangunan Pagar TK Tunas Harapan Kota Bangun			1	Unit	250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Anggana			1	Unit	435.257.000	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Anggana			1	Unit	435.257.000	
	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Sebulu			1	Unit	488.496.500	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Sebulu			1	Unit	488.496.500	
	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	200.000.000	
	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Sebulu			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Area Bermain TK Negeri 1 Sebulu			1	Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	450.000.000	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Unit	450.000.000	
	Pemasangan Paving Blok Halaman TK TPA Nurussalam			1	Unit	250.000.000	Pemasangan Paving Blok Halaman TK TPA Nurussalam			1	Unit	250.000.000	
	Pembangunan Pagar TK Harapan Bersama			1	Unit	200.000.000	Pembangunan Pagar TK Harapan Bersama			1	Unit	200.000.000	
	Pembangunan Pagar Beton TPA Nurussalam			1	Unit	250.000.000	Pembangunan Pagar Beton TPA Nurussalam			1	Unit	250.000.000	
163	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540	Paket	120.000.000	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540	Paket	120.000.000	
	Pengadaan Mebel TK Negeri 1 Muara Kaman			4	Paket	120.000.000	Pengadaan Mebel TK Negeri 1 Muara Kaman			4	Paket	120.000.000	
164	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1540	Paket	-	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1540	Paket	-	
165	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1540	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1540	Paket	-	
166	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1540	Peserta Didik	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1540	Peserta Didik	-	
167	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	497	Orang	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	497	Orang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
168	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	497	Orang	2.900.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	497	Orang	2.900.000.000	
	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru PAUD			461	Orang	2.200.000.000	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru PAUD			461	Orang	2.200.000.000	
	Diklat Kepala Sekolah PAUD			50	Orang	350.000.000	Diklat Kepala Sekolah PAUD			50	Orang	350.000.000	
	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAUD			25	Orang	350.000.000	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAUD			25	Orang	350.000.000	
168	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1502	Satuan Pendidikan	3.100.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1502	Satuan Pendidikan	3.100.000.000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Akreditasi PAUD (Peningkatan capaian SPM PAUD)			80	Satuan Pendidikan	450.000.000	Pendampingan dan Fasilitasi Akreditasi PAUD (Peningkatan capaian SPM PAUD)			80	Satuan Pendidikan	450.000.000	
	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat dan Adiwiyata jenjang PAUD (Lingkungan Aman)			100	Satuan Pendidikan	700.000.000	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat dan Adiwiyata jenjang PAUD (Lingkungan Aman)			100	Satuan Pendidikan	700.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggara Satuan PAUD (PP-PAUD)			300	Satuan Pendidikan	700.000.000	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggara Satuan PAUD (PP-PAUD)			300	Satuan Pendidikan	700.000.000	
	Pendampingan Sekolah Inklusi jenjang PAUD (Ingkungan Inkusif)			120	Satuan Pendidikan	700.000.000	Pendampingan Sekolah Inklusi jenjang PAUD (Ingkungan Inkusif)			120	Satuan Pendidikan	700.000.000	
	Fasilitasi PAUD Holistik Integratif			120	Satuan Pendidikan	550.000.000	Fasilitasi PAUD Holistik Integratif			120	Satuan Pendidikan	550.000.000	
169	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20635	Satuan Pendidikan	39.150.000.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20635	Satuan Pendidikan	39.150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)			563	Satuan Pendidikan	8.750.000.000	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)			563	Satuan Pendidikan	8.750.000.000	
	BOSKAB Afirmasi			40	Satuan Pendidikan	4.000.000.000	BOSKAB Afirmasi			40	Satuan Pendidikan	4.000.000.000	
	Seragam Sekolah PAUD			25000	Satuan Pendidikan	26.400.000.000	Seragam Sekolah PAUD			25000	Satuan Pendidikan	26.400.000.000	
170	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564	Orang	47.754.065.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564	Orang	47.754.065.000	
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah			563	Orang	500.000.000	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah			563	Orang	500.000.000	
	Pembayaran Insentif Non PNS			2925	Orang	47.254.065.000	Pembayaran Insentif Non PNS			2925	Orang	47.254.065.000	
171	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	12	Unit	-	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	12	Unit	-	
172	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	567	Orang	-	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	567	Orang	-	
173	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	567	Orang	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	567	Orang	-	
174	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100	Konten Digital	450.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100	Konten Digital	450.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100	Konten Digital	450.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100	Konten Digital	450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
175	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567	Orang	200.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567	Orang	200.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			567	Orang	200.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			567	Orang	200.000.000	
176	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300	Dokumen	300.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300	Dokumen	300.000.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			300	Dokumen	300.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			300	Dokumen	300.000.000	
177	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300	Dokumen	450.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300	Dokumen	450.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			300	Dokumen	450.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			300	Dokumen	450.000.000	
178	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	Ruang	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	Ruang	-	
179	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	780	Komunitas	150.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	780	Komunitas	150.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			780	Komunitas	150.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			780	Komunitas	150.000.000	
180	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	Ruang	5.650.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	Ruang	5.650.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Loa Janan			2	Ruang	760.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Loa Janan			2	Ruang	760.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru KB Melati Mekar Muara Muntai			1	Ruang	540.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru KB Melati Mekar Muara Muntai			1	Ruang	540.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Kenohan			1	Ruang	540.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Kenohan			1	Ruang	540.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Tunas Melati Sanga-Sanga			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas TK Tunas Melati Sanga-Sanga			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 1 Loa Kulu			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Mekar Sari Tenggarong Seberang			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas TK Mekar Sari Tenggarong Seberang			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Kota Bangun			1	Ruang	1.080.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Kota Bangun			1	Ruang	1.080.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 2 Loa Janan			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 2 Loa Janan			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 3 Sebulu			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 3 Sebulu			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 2 Muara Kaman			1	Ruang	380.000.000	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 2 Muara Kaman			1	Ruang	380.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru RA Misbahul Khair, Kel. Loa Tebu			1	Ruang	250.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru RA Misbahul Khair, Kel. Loa Tebu			1	Ruang	250.000.000	
	Pembangunan Ruang Belajar RA AL-FALAH			1	Ruang	200.000.000	Pembangunan Ruang Belajar RA AL-FALAH			1	Ruang	200.000.000	
181	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	Paket	-	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	Paket	-	
182	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	12	Ruang	-	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	12	Ruang	-	
183	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	Ruang	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	Ruang	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
184	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Peserta didik	-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Peserta didik	-	
185	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000	Buku	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000	Buku	-	
186	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
187	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	-	
188	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah	2	Ruang	-	
			Direhabilitasi sedang/berat						Direhabilitasi sedang/berat				
189	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	380	Orang	850.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	380	Orang	850.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			80	Orang	850.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			80	Orang	850.000.000	
190	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	7.580.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	7.580.000.000	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri 2 Marangkayu			1	Unit	7.580.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri 2 Marangkayu			1	Unit	7.580.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
191	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	49385	Paket	7.360.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	49385	Paket	7.360.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			49385	Paket	7.360.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			49385	Paket	7.360.000.000	
192	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	-	
193	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	2	Ruang	-	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	2	Ruang	-	
194	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	
195	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	696.460.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	696.460.000	
	Rehabilitasi Pagar TK Negeri 04 Tenggarong			1	Unit	348.230.000	Rehabilitasi Pagar TK Negeri 04 Tenggarong			1	Unit	348.230.000	
	Rehabilitasi Pagar TK Negeri 02 Sebulu			1	Unit	348.230.000	Rehabilitasi Pagar TK Negeri 02 Sebulu			1	Unit	348.230.000	
196	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	641	Paket	6.725.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	641	Paket	6.725.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			641	Paket	3.400.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			641	Paket	3.400.000.000	
	Alat Peraga Digital			15	Paket	3.225.000.000	Alat Peraga Digital			15	Paket	3.225.000.000	
	Permohonan Bantuan APE (Alat Permainan Edukatif)			1	Paket	100.000.000	Permohonan Bantuan APE (Alat Permainan Edukatif)			1	Paket	100.000.000	
197	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9182	Satuan Pendidikan	400.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9182	Satuan Pendidikan	400.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			9182	Satuan Pendidikan	400.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			9182	Satuan Pendidikan	400.000.000	
198	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
199	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	Ruang	217.628.500	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	Ruang	217.628.500	
	Rehabilitasi Ruang Guru TK Negeri 1 Anggana			1	Ruang	217.628.500	Rehabilitasi Ruang Guru TK Negeri 1 Anggana			1	Ruang	217.628.500	
200	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	-	
201	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	-	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1) Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan 2) Standar Isi Pendidikan Kesetaraan 3) Standar Proses Pendidikan Kesetaraan 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan 5) Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan 6) Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan 7) Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan 8) Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	70.72 74.62 74.58 67.53 69.29 69.58 64.38 69.43		26.360.428.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1) Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan 2) Standar Isi Pendidikan Kesetaraan 3) Standar Proses Pendidikan Kesetaraan 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan 5) Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan 6) Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan 7) Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan 8) Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	70.72 74.62 74.58 67.53 69.29 69.58 64.38 69.43		26.360.428.000	
			9) Angka Melek Huruf	99.98					9) Angka Melek Huruf	99.98			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
202	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3151	Peserta Didik	3.350.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3151	Peserta Didik	3.350.000.000	
	Beasiswa Stimulan Kukar Idaman			1800	Peserta Didik	1.700.000.000	Beasiswa Stimulan Kukar Idaman			1800	Peserta Didik	1.700.000.000	
	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Lanjut			300	Peserta Didik	400.000.000	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Lanjut			300	Peserta Didik	400.000.000	
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket A			300	Peserta Didik	350.000.000	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket A			300	Peserta Didik	350.000.000	
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket B			300	Peserta Didik	350.000.000	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket B			300	Peserta Didik	350.000.000	
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C			451	Peserta Didik	550.000.000	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C			451	Peserta Didik	550.000.000	
203	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55	Orang	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55	Orang	-	
204	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55	Orang	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55	Orang	-	
205	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135	Satuan Pendidikan	400.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135	Satuan Pendidikan	400.000.000	
	Verifikasi Validasi Data Calon Peserta Didik			54	Satuan Pendidikan	200.000.000	Verifikasi Validasi Data Calon Peserta Didik			54	Satuan Pendidikan	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan Manajemen Berbasis sekolah jenjang pendidikan kesetaraan (Pendampingan akreditasi satuan pendidikan)			81	Satuan Pendidikan	200.000.000	Pengelolaan Manajemen Berbasis sekolah jenjang pendidikan kesetaraan (Pendampingan akreditasi satuan pendidikan)			81	Satuan Pendidika n	200.000.000	
206	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11800	Satuan Pendidik n	7.724.810.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1180 0	Satuan Pendidikan	7.724.810.000	
	BOSKAB			37	Satuan Pendidikan	2.189.810.000	BOSKAB			37	Satuan Pendidikan	2.189.810.000	
	BOSKAB AFIRMASI			37	Satuan Pendidika n	5.535.000.000	BOSKAB AFIRMASI			37	Satuan Pendidikan	5.535.000.000	
207	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54	Orang	1.605.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54	Orang	1.605.000.000	
	Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah			54		450.000.000	Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah			54		450.000.000	
	Pembayaran Insentif Non PNS			106		1.155.000.000	Pembayaran Insentif Non PNS			106		1.155.000.000	
208	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20	Unit	-	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20	Unit	-	
209	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	35	Orang	-	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	35	Orang	-	
210	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60	Orang	150.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60	Orang	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)			60	Orang	150.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)			60	Orang	150.000.000	
211	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	54	Konten Digital	75.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	54	Konten Digital	75.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			54	Konten Digital	75.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			54	Konten Digital	75.000.000	
212	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60	Orang	125.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60	Orang	125.000.000	
	Bimtek pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan			60	Orang	125.000.000	Bimtek pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan			60	Orang	125.000.000	
213	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27	Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27	Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi			27	Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi			27	Dokumen	150.000.000	
214	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	27	Dokumen	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	27	Dokumen	-	
215	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	15	Komunita s	-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	15	Komunita s	-	
216	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35	Kegiatan	140.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35	Kegiatan	140.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			35	Kegiatan	140.000.000	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			35	Kegiatan	140.000.000	
217	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	60	Orang	-	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	60	Orang	-	
218	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	Paket	-	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5	Paket	-	
219	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5	Ruang	-	Penataan Ruang/Sudut Baca		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5	Ruang	-	
220	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	Peserta Didik	-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	Peserta Didik	-	
221	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3	Paket	75.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3	Paket	75.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			3	Paket	75.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			3	Paket	75.000.000	
222	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10788	Buku	1.717.618.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10788	Buku	1.717.618.000	
	Pengadaan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			10788	Buku	1.717.618.000	Pengadaan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			10788	Buku	1.717.618.000	
223	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	
224	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	Ruang	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	Ruang	-	
225	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	Paket	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
226	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit	-	
227	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	354	Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	354	Orang	500.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Bidang Pendidikan			354	Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Bidang Pendidikan			354	Orang	500.000.000	
228	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	
229	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	15	Unit	-	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	15	Unit	-	
230	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3	Paket	-	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3	Paket	-	
231	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14665	Peserta Didik	6.110.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14665	Peserta Didik	6.110.000.000	
	Asesmen Nasional Berbasis Komputer			1000	Peserta Didik	300.000.000	Asesmen Nasional Berbasis Komputer			1000	Peserta Didik	300.000.000	
	Uji Kompetensi Kesetaraan			600	Peserta Didik	360.000.000	Uji Kompetensi Kesetaraan			600	Peserta Didik	360.000.000	
	Kegiatan Belajar Mengajar Kesetaraan			7150	Peserta Didik	450.000.000	Kegiatan Belajar Mengajar Kesetaraan			7150	Peserta Didik	450.000.000	
	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Dasar			100	Peserta Didik	350.000.000	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Dasar			100	Peserta Didik	350.000.000	
	BIMTEK Tutor Keaksaraan			100	Peserta Didik	500.000.000	BIMTEK Tutor Keaksaraan			100	Peserta Didik	500.000.000	
	Pendidikan, Kursus dan Latihan Keterampilan / Kewirausahaan			300	Peserta Didik	800.000.000	Pendidikan, Kursus dan Latihan Keterampilan / Kewirausahaan			300	Peserta Didik	800.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	TOT Instruktur			100	Peserta Didik	300.000.000	TOT Instruktur			100	Peserta Didik	300.000.000	
	Fasilitasi Kelembagaan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)			65	Peserta Didik	250.000.000	Fasilitasi Kelembagaan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)			65	Peserta Didik	250.000.000	
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-A			300	Peserta Didik	300.000.000	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-A			300	Peserta Didik	300.000.000	
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-B			1500	Peserta Didik	1.000.000.000	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-B			1500	Peserta Didik	1.000.000.000	
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-C			2300	Peserta Didik	1.500.000.000	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-C			2300	Peserta Didik	1.500.000.000	
232	Pembangunan Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	Pembangunan Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	
233	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	48	Paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	48	Paket	-	
234	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3	Unit	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3	Unit	-	
235	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3	unit	2.783.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3	unit	2.783.000.000	
	Pembangunan Pagar SKB Loa Janan			1	unit	675.000.000	Pembangunan Pagar SKB Loa Janan			1	unit	675.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Muara Jawa			1	unit	380.000.000	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Muara Jawa			1	unit	380.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Muara Kaman			1	unit	380.000.000	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Muara Kaman			1	unit	380.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Sebulu			1	unit	448.000.000	Lanjutan Pembangunan Pagar SKB Sebulu			1	unit	448.000.000	
	Pembangunan Pagar SKB Anggana			1	unit	900.000.000	Pembangunan Pagar SKB Anggana			1	unit	900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
236	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3	Ruang	-	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3	Ruang	-	
237	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	3	Ruang	-	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	3	Ruang	-	
238	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5	Paket	300.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5	Paket	300.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			5	Paket	300.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			5	Paket	300.000.000	
239	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	
240	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	
241	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5	Ruang	-	
242	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	5	Ruang	-	
243	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	
244	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	Persentas e	1.720.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	Persentas e	1.720.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD 2) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1 1	Dokumen	1.720.000.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD 2) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1 1	Dokumen	1.720.000.000	
			3) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD 4) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1 1					3) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD 4) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1 1			
245	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	587	Dokumen	-	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	587	Dokumen	-	
246	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4151	Buku	670.000.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4151	Buku	670.000.000	
	Pengadaan Buku Teks Muatan Lokal			4151	Buku	670.000.000	Pengadaan Buku Teks Muatan Lokal			4151	Buku	670.000.000	
247	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215	Orang	1.050.000.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215	Orang	1.050.000.000	
	Bimtek Guru Kurikulum Muatan Lokal			215	Orang	1.050.000.000	Bimtek Guru Kurikulum Muatan Lokal			215	Orang	1.050.000.000	
248	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2500	Buku	-	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2500	Buku	-	
249	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	100	Dokumen	-	Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	100	Dokumen	-	
250	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1000	Dokumen	-	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1000	Dokumen	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah DokumenPenetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2003	Dokumen	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah DokumenPenetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2003	Dokumen	-	
251	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	-	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	-	
252	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1000	Buku	-	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1000	Buku	-	
253	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	1000	Buku	-	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	1000	Buku	-	
254	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1	Dokumen	-	Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1	Dokumen	-	
255	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	-	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	-	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	75,5 97	1. Nilai 2.Persentase	450.000.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1) 75,5 2) 97	1. Nilai 2.Persentase	450.000.000	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1) Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD 2) Rasio Guru dengan Peserta didik SD 3) Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	81 81 81	Rasio	450.000.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1) Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD 2) Rasio Guru dengan Peserta didik SD 3) Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	81 81 81	Rasio	450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
256	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	819	Dokumen	150.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	819	Dokumen	150.000.000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			819	Dokumen	150.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			819	Dokumen	150.000.000	
257	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1696	Laporan	300.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1696	Laporan	300.000.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1696	Laporan	300.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1696	Laporan	300.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100	Persentas e	530.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100	Persentase	530.000.000	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	58	Dokumen	80.000.000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	58	Dokumen	80.000.000	
258	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28	Dokumen	35.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28	Dokumen	35.000.000	
	Survey ke lapangan terkait penerbitan ijin pendirian sekolah			12	Dokumen	35.000.000	Survey ke lapangan terkait penerbitan ijin pendirian sekolah			12	Dokumen	35.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
259	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30	Dokumen	45.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30	Dokumen	45.000.000	
	Survey ke lapangan terkait penerbitan ijin pendirian sekolah			15	Dokumen	45.000.000	Survey ke lapangan terkait penerbitan ijin pendirian sekolah			15	Dokumen	45.000.000	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal	100	Dokumen	450.000.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal	100	Dokumen	450.000.000	
260	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	150	Dokumen	250.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	150	Dokumen	250.000.000	
	Diselenggarakan oleh Masyarakat		yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Diselenggarakan oleh Masyarakat		yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150	Dokumen	250.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150	Dokumen	250.000.000	
261	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	563	Dokumen	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	563	Dokumen	200.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			563	Dokumen	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			563	Dokumen	200.000.000	
262	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	250	Dokumen	-	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	250	Dokumen	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	91	Persentase	820.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	91	Persentase	820.000.000	
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD 2) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP 3) Jumlah penutur muda bahasa daerah 4) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	240 106 3460 5	Sekolah Sekolah Orang Kali	820.000.000	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD 2) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP 3) Jumlah penutur muda bahasa daerah 4) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	240 106 3460 5	Sekolah Sekolah Orang Kali	820.000.000	
263	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1000	Bahasa	-	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1000	Bahasa	-	
264	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan	2	Orang	20.000.000	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan	2	Orang	20.000.000	
			Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan						Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan				
	Pemberian Plakat dan Uang Pembinaan untuk Tokoh Bahasa dan Sastra Kutai Kartanegara			2	Orang	20.000.000	Pemberian Plakat dan Uang Pembinaan untuk Tokoh Bahasa dan Sastra Kutai Kartanegara			2	Orang	20.000.000	
265	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3550	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3550	Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Modul Bahan Ajar Bahasa Kutai			1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Modul Bahan Ajar Bahasa Kutai			1	Dokumen	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
266	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku- buku berbahasa daerah		Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	3000	Buku	100.000.000	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku- buku berbahasa daerah		Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	3000	Buku	100.000.000	
	Penyusunan buku berbahasa daerah			5	Buku	100.000.000	Penyusunan buku berbahasa daerah			5	Buku	100.000.000	
267	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah		Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	1000	Buku	100.000.000	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah		Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	1000	Buku	100.000.000	
	Penyusunan/Pemukhtahiran Kamus Bahasa Daerah Kutai			1	Buku	100.000.000	Penyusunan/Pemukhtahiran Kamus Bahasa Daerah Kutai			1	Buku	100.000.000	
268	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota		Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	1150	Orang	250.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota		Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	1150	Orang	250.000.000	
	Bimtek Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan			100	Orang	250.000.000	Bimtek Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan			100	Orang	250.000.000	
269	Fasilitasi media publik berbahasa daerah		Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	602	Media	250.000.000	Fasilitasi media publik berbahasa daerah		Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	602	Media	250.000.000	
	Penerbitan Majalah Berbahasa Kutai			1	Media	250.000.000	Penerbitan Majalah Berbahasa Kutai			1	Media	250.000.000	
270	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah		Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1	Judul	-	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah		Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1	Judul	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100	Persentase	14.290.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100	Persentase	54.875.800.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100	Persentase	9.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100	Persentase	35.600.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1) Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Persentase Desa Budaya yang Aktif	30 100	Event Persen	4.000.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1) Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Persentase Desa Budaya yang Aktif	30 100	Event Persen	27.100.000.000	
271	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30	Objek	3.500.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30	Objek	26.200.000.000	
	Festival Budaya Erau			1	Objek	3.500.000.000	Festival Budaya Erau			1	Objek	10.000.000.000	
	Festival Tunas Bahasa Ibu			1	Objek		Festival Tunas Bahasa Ibu			1	Objek	650.000.000	
	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)			5	Objek		Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)			5	Objek	650.000.000	
	Fasilitasi Event Budaya Daerah			20	Objek		Fasilitasi Event Budaya Daerah			20	Objek	10.000.000.000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana kelompok seni / Paguyuban			5	Objek		Fasilitasi Sarana dan Prasarana kelompok seni / Paguyuban			5	Objek	1.500.000.000	
	Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)			1	Objek		Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)			1	Objek	1.000.000.000	
	Pembangunan Lamin Adat Dayak Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu			1	Objek		Pembangunan Lamin Adat Dayak Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu			1	Objek	2.400.000.000	
272	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	Orang	500.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	Orang	900.000.000	
	Pemilihan Duta Budaya			20	Orang	500.000.000	Pemilihan Duta Budaya			20	Orang	900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	Kegiatan	5.500.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	Kegiatan	8.500.000.000	
273	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	3	Objek	5.500.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	3	Objek	8.500.000.000	
	Pemajuan Tradisi Budaya		Pengembangan dan Pemanfaatan				Pemajuan Tradisi Budaya		Pengembangan dan Pemanfaatan				
	Hibah Erau Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura			1	Objek	4.500.000.000	Hibah Erau Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura			1	Objek	5.000.000.000	
	Festival Budaya Mecaq Undat Tabang			1	Objek	250.000.000	Festival Budaya Mecaq Undat Tabang			1	Objek	500.000.000	
	Fasilitasi Acara Mecaq Undat Lung Anai			1	Objek	500.000.000	Fasilitasi Acara Mecaq Undat Lung Anai			1	Objek	500.000.000	
	Festival Nutuk Beham			1	Objek	250.000.000	Festival Nutuk Beham			1	Objek	500.000.000	
	Festival Budaya Erau Sabintulung			1	Objek		Festival Budaya Erau Sabintulung			1	Objek	1.000.000.000	
	Festival Budaya Mecaq Undat Lung Sungai Bawang			1	Objek		Festival Budaya Mecaq Undat Lung Sungai Bawang			1	Objek	500.000.000	
	Festival Budaya Mecaq Undat Lekaq Kidau			1	Objek		Festival Budaya Mecaq Undat Lekaq Kidau			1	Objek	500.000.000	
274	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	30	Laporan	-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	30	Laporan	-	
275	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	Sertifikat	-	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	Sertifikat	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	75,5	Persentase	390.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	75,5	Persentase	5.625.800.000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	Kegiatan	390.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	Kegiatan	5.625.800.000	
276	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3286	Orang	190.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3286	Orang	2.689.500.000	
	GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)	Kota Bangun		50	Orang	190.000.000	GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)	Kota Bangun		50	Orang	190.000.000	
	Pemilihan Putra-Putri Duta Tari Kukar	Kutai Kartanegara		20	Orang		Pemilihan Putra-Putri Duta Tari Kukar	Kutai Kartanegara		20	Orang	343.700.000	
	Mahakarya Sendratari Putri Karang Melenu	Kutai Kartanega ra		150	Orang		Mahakarya Sendratari Putri Karang Melenu	Kutai Kartanega ra		150	Orang	1.000.000.000	
	GBN (Gita Bahana Nusantara)	Kutai Kartanega ra		20	Orang		GBN (Gita Bahana Nusantara)	Kutai Kartanega ra		20	Orang	250.000.000	
	Festival Sastra	Kutai Kartanega ra		20	Orang		Festival Sastra	Kutai Kartanega ra		20	Orang	250.000.000	
	Bioskop Keliling (Bioling) Tabang	Tabang		300	Orang		Bioskop Keliling (Bioling) Tabang	Tabang		300	Orang	150.000.000	
	Bioskop Keliling (Bioling) Kembang Janggut	Kembang Janggut		300	Orang		Bioskop Keliling (Bioling) Kembang Janggut	Kembang Janggut		300	Orang	126.450.000	
	Bioskop Keliling (Bioling) Kenohan	Kenohan		300	Orang		Bioskop Keliling (Bioling) Kenohan	Kenohan		300	Orang	126.450.000	
	Bioskop Keliling (Bioling) Kota Bangun	Kota Bangun		300	Orang		Bioskop Keliling (Bioling) Kota Bangun	Kota Bangun		300	Orang	126.450.000	
	Bioskop Keliling (Bioling) Muara Wis	Muara Wis		300	Orang		Bioskop Keliling (Bioling) Muara Wis	Muara Wis		300	Orang	126.450.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
277	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	60	Sertifikat	200.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	60	Sertifikat	200.000.000	
	Bimbingan Teknis SDM Seniman			16	Sertifikat	200.000.000	Bimbingan Teknis SDM Seniman			16	Sertifikat	200.000.000	
278	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	127	Lembaga	-	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	127	Lembaga	2.736.300.000	
	Fasilitasi Pengembangan Keterampilan Lembaga Kesenian	Kutai Kartanega ra		30	Lembaga		Fasilitasi Pengembangan Keterampilan Lembaga Kesenian	Kutai Kartanega ra		30	Lembaga	350.000.000	
	Fasilitasi Tenaga Pendukung Kesenian dan Kebudayaan	Kutai Kartanega ra		100	Lembaga		Fasilitasi Tenaga Pendukung Kesenian dan Kebudayaan	Kutai Kartanega ra		100	Lembaga	536.300.000	
	Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Hulu	Kota Bangun		30	Lembaga		Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Hulu	Kota Bangun		30	Lembaga	350.000.000	
	Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Tengah	Tenggaro ng		30	Lembaga		Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Tengah	Tenggaro ng		30	Lembaga	350.000.000	
	Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Pesisir	Muaraba dak		30	Lembaga		Ekspresi Budaya Lembaga Kesenian Tradisional Zona Pesisir	Muaraba dak		30	Lembaga	350.000.000	
	Festival Pekan Kesenian Daerah	Kutai Kartanega ra		20	Lembaga		Festival Pekan Kesenian Daerah	Kutai Kartanega ra		20	Lembaga	500.000.000	
	Anugrah Kebudayaan Kutai Kartanegara	Kutai Kartanega ra		5	Lembaga		Anugrah Kebudayaan Kutai Kartanegara	Kutai Kartanega ra		5	Lembaga	300.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	76,28	Persentase	500.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	76,28	Persentase	1.400.000.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	3	Dokumen	500.000.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	3	Dokumen	1.400.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
279	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20	Orang	-	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20	Orang	250.000.000	
	Bimbingan Teknis SDM penulisan sejarah			20	Orang	-	Bimbingan Teknis SDM penulisan sejarah			20	Orang	250.000.000	
280	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	Unit	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	Unit	-	
281	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2	Dokumen	500.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2	Dokumen	1.150.000.000	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			2	Dokumen	500.000.000	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			2	Dokumen	500.000.000	
	Pameran Edukasi dan Lomba			0	0	-	Pameran Edukasi dan Lomba			1	Paket	650.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 100	Persentase	3.900.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 100	Persentase	11.150.000.000	Peraturan utama tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu, ada juga peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022
													tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara (Perda) No 14 Tahun 2014 Tentang Cagar Budaya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	37	Objek	150.000.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	37	Objek	1.825.000.000	Penetapan cagar budaya adalah proses pemberian status cagar budaya kepada suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
282	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7	Objek	-	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7	Objek	625.000.000	Pendaftaran cagar budaya adalah proses resmi untuk mencatat dan mendokumentasikan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dianggap memiliki nilai sejarah, budaya, atau ilmu pengetahuan yang penting. Proses ini bertujuan untuk melindungi dan Melestarikan warisan budaya bangsa
	Identifikasi dan Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya			7	Objek	-	Identifikasi dan Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya			7	Objek	275.000.000	Paket kegiatan ini sebelum 7 objek ini didaftarkan akan dilakukan Identifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa objek-objek yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan dapat diidentifikasi, didokumentasikan, dan dilindungi sebagai cagar budaya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB)			7	Objek	-	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB)			7	bjek	350.000.000	Paket kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasik an, dan mendaftarkan benda, bangunan, struktur, atau situs yang memiliki nilai budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan sebagai cagar budaya. (Dapobud dan Registrasi Nasional/Regnas)
283	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30	Objek	150.000.000	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30	Objek	1.200.000.000	30 Objek Cagar Budaya, yang akan ditetapkan
	Penetapan Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		Jumlah Objek Cagar Budaya ditetapkan	7	Objek	150.000.000	Penetapan Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		Jumlah Objek Cagar Budaya ditetapkan	7	Objek	150.000.000	Tahun 2026 akan di tetapkan 7 Objek Cagar Budaya melalui Sidang Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten
	Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten (TACB)			7	Objek		Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten (TACB)			7	Objek	350.000.000	Paket kegiatan ini kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim ahli yang ditugaskan untuk melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap benda, bangunan, struktur, atau situs yang diduga merupakan cagar budaya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sidang Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)			7	Objek		Sidang Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)			7	Objek	350.000.000	Paket kegiatan Sidang Penetapan Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk menetapkan suatu objek yang diduga cagar budaya sebagai cagar budaya. Ini melibatkan kajian, penelitian, dan sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua TACB untuk memastikan kelayakan objek tersebut sebagai cagar budaya.
	Sosialisasi Cagar Budaya yang telah ditetapkan			30	orang		Sosialisasi Cagar Budaya yang telah ditetapkan			30	orang	350.000.000	Paket kegiatan sosialisasi cagar budaya adalah serangkaian acara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan cagar budaya. Kegiatan ini bisa mencakup berbagai aktivitas seperti seminar, lokakarya, pameran, pemutaran film, serta kegiatan edukasi dan kampanye di media sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian cagar budaya di daerah mereka

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	16	Objek	3.750.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	16	Objek	9.325.000.000	Pengelolaan cagar budaya adalah serangkaian upaya untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, baik yang bersifat benda, bangunan, struktur, maupun kawasan, serta situsnya. Pengelolaan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari registrasi, pelestarian, hingga pemanfaatan cagar budaya, dengan tujuan menjaga keberlanjutan nilai- nilai budaya dan sejarah
284	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12	Objek	-	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12	Objek	2.375.000.000	Perlindungan cagar budaya adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai penting. Ini mencakup berbagai tindakan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau hilangnya cagar budaya, baik yang bersifat benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan, baik di darat maupun di air.

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Inventarisasi dan pendokumentasian, situs,Bangunan,Kawasan, struktur dan Benda Cagar Budaya			16	Dokumen	-	Inventarisasi dan pendokumentasian, situs,Bangunan,Kawasan, struktur dan Benda Cagar Budaya			16	Dokumen	350.000.000	Paket kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian cagar budaya adalah untuk mendokumentasikan dan merekam data cagar budaya secara detail, baik dalam bentuk verbal maupun piktorial, sebagai dasar untuk pelestarian di masa depan. Dengan kata lain, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi lengkap mengenai cagar budaya, termasuk kondisi, sejarah, dan nilai-nilainya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pelestarian.
	Edukasi dan Sosialisasi Pelestarian Objek Cagar Budaya			30	orang	-	Edukasi dan Sosialisasi Pelestarian Objek Cagar Budaya			30	orang	500.000.000	Paket kegiatan edukasi dan sosialisasi
													pelestarian cagar budaya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan apresiasi kepada peserta didik terhadap cagar budaya, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pelestariannya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengadaan Peralatan Drone dan GPS			2	Unit	-	Pengadaan Peralatan Drone dan GPS			2	Unit	350.000.000	Paket kegiatan Pengadaan peralatan drone dan GPS untuk cagar budaya melibatkan pembelian dan persiapan perangkat drone dan GPS yang akan digunakan dalam kegiatan pemetaan dan survei di area cagar budaya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, termasuk pemetaan situs, dokumentasi, dan pemantauan kondisi. (1 unit Drone dan 1 unit GPS)
	Pemeliharaan Objek Cagar Budaya			3	Objek	-	Pemeliharaan Objek Cagar Budaya			3	Objek	1.000.000.000	Paket kegiatan pengadaan alat dan bahan pemeliharaan rutin cagar budaya adalah untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan cagar budaya. Hal ini mencakup upaya pencegahan kerusakan, perbaikan kerusakan yang ada, serta pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi fisik dan nilai-nilai yang terkandung dalam cagar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengadaan Buku Cagar Budaya			300	Buah Buku	-	Cetak Buku Cagar Budaya			300	Buah Buku	175.000.000	Paket kegiatan Pengadaan buku cagar budaya adalah untuk mendokumentasik an, melestarikan, dan menyebarkan informasi tentang warisan budaya yang berharga. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai identitas bangsa.
285	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2	Objek	3.750.000.000	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2	Objek	5.650.000.000	Pengembangan cagar budaya adalah upaya untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui berbagai kegiatan seperti penelitian, revitalisasi, pemetaan dan konservasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian cagar budaya, memperkuat nilai- nilai penting yang terkandung di dalamnya, dan menjadikannya sumber pembelajaran, daya tarik wisata, serta sarana pemberdayaan masyarakat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Revitalisasi Rumah Besar			1	Objek	1.350.000.000	Revitalisasi Rumah Besar			1	Objek	1.350.000.000	Paket kegiatan revitalisasi rumah besar adalah serangkaian upaya untuk menghidupkan kembali, memulihkan, dan melestarikan rumah besar yang ditetapkan sebagai cagar budaya, dengan tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Revitalis asi ini tidak hanya berfokus pada pemugaran fisik, tetapi juga pada pemanfaatan potensi nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.
	Pembangunan Lamin Adat Tabang			1	Objek	2.400.000.000	Pembangunan Lamin Adat Tabang			1	Objek	2.400.000.000	
	Pemetaan Objek Cagar Budaya			95	Objek	-	Pemetaan Objek Cagar Budaya			95	Objek	350.000.000	Paket kegiatan ini adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data cagar budaya dalam bentuk peta, baik analog maupun digital. Tujuannya adalah untuk mendokumentasik an lokasi, kondisi, dan lingkungan situs cagar budaya, serta mendukung upaya pelestarian, terutama dalam perencanaan pemugaran.

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Revitalisasi Magazijn dan Atap Lengkung Kec. Loa Kulu			1	Objek	-	Revitalisasi Magazijn dan Atap Lengkung Kec. Loa Kulu			1	Objek	1.100000.000	Paket kegiatan revitalisasi magazijn dan atap lengkung cagar budaya Loa Kulu adalah proses pemulihan dan perbaikan kembali bangunan bersejarah yang dikenal sebagai "magazijn" (gudang) dan atap lengkung di kawasan cagar budaya Loa Kulu. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk menjaga kelestarian warisan budaya, memperbaiki kerusakan, dan mengembalikan fungsi bangunan agar dapat dimanfaatkan kembali.
	Fasilitasi Pemindahan Objek Cagar Budaya Kapal Kertanegara ke Museum Kayu			1	Objek	-	Fasilitasi Pemindahan Objek Cagar Budaya Kapal Kertanegara ke Museum Kayu			1	Objek	450.000.000	Paket kegiatan pemindahan objek cagar budaya yaitu Kapal Kertanegara mencakup serangkaian tindakan untuk Memindahkan benda atau situs cagar budaya dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan tujuan pelestarian dan perlindungan. Kegiatan ini melibatkan identifikasi, dokumentasi, perencanaan, serta pelaksanaan memindahan yang hati-hati dan sesuai prosedur, termasuk pengamanan dan registrasi cagar budaya di lokasi baru.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
286	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	Objek	-	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	objek	1.300.000.000	Paket kegiatan pemanfaatan cagar budaya adalah serangkaian upaya untuk mendayagunakan benda, bangunan, atau situs cagar budaya untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Kegiatan ini harus selaras dengan tujuan pelestarian, sehingga tidak merusak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pemanfaatan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, keagamaan dan edukasi bagi masyarakat.
	Wisata Edukasi Cagar Budaya			3	kali	-	Wisata Edukasi Cagar Budaya			3	kali	550.000.000	Paket kegiatan Mengembangkan paket wisata edukasi peserta didik dan mengajak pengunjung untuk belajar tentang sejarah dan cagar budaya di Kutai Kartanegara
	Penyelenggaraan Event Budaya di Lokasi Cagar Budaya			3	kali	-	Penyelenggaraan Event Budaya di Lokasi Cagar Budaya			3	kali	750.000.000	Paket kegiatan penyelenggaraan event budaya dilokasi cagar budaya, berbagai kegiatan budaya di situs, seperti festival, pertunjukan seni, seminar, lokakarya, atau kegiatan edukasi lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	76,28	Persentase	800.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	76,28	Persentase	7.175.000.000	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum: Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan museum, termasuk pemanfaatan museum untuk berbagai kepentingan.
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	Kegiatan	800.000.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	Kegiatan	7.175.000.000	Pengelolaan museum adalah serangkaian kegiatan terencana dan terorganisir yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi museum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan koleksi, perawatan, hingga kegiatan edukasi dan pemasaran.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
287	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	15	Unit	-	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1	Unit	1.600.000.000	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi museum, baik benda, bangunan, maupun struktur, baik yang termasuk cagar budaya maupun bukan, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan rekreasi. Tujuanny a adalah untuk menjaga kelestarian koleksi, meningkatkan nilai dan informasinya, serta mengkomunikasika nnya kepada masyarakat.
	Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi			1	Dokumen	-	Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi			1	Dokumen	250.000.000	Paket kegiatan inventarisasi dan dokumentasi koleksi serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencatat, mendokumentasik an, dan mengelola koleksi secara sistematis. Ini mencakup pencatatan data bibliografis, pemberian nomor inventaris, serta pemeliharaan dan pelestarian koleksi agar mudah diakses dan dilacak.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Digitalisasi & katalogisasi koleksi			1	Paket	-	Digitalisasi & katalogisasi koleksi			1	paket	250.000.000	Paket kegiatan Digitalisasi dan katalogisasi koleksi permuseuman adalah proses mengubah informasi koleksi museum dari bentuk fisik menjadi format digital, serta mendata dan mengklasifikasikan koleksi tersebut agar mudah diakses dan dikelola.
	Pameran Temporer Koleksi			1	4	-	Pameran Temporer Koleksi			1	4	750.000.000	
	Program Edukasi & wisata budaya berbasis koleksi.			1	Paket	-	Program Edukasi & wisata budaya berbasis koleksi.			1	Paket	350.000.000	
288	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	3	Orang	-	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	3	Orang	700.000.000	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Permuseuman			25	Orang	-	Bimbingan Teknis Pengelolaan Permuseuman			25	Orang	350.000.000	
	Studi Banding Pengelolaan Permuseuman			6	Kali	-	Studi Banding Pengelolaan Permuseuman			6	Kali	350.000.000	
289	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	Unit	-	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	Unit	1.100.000.000	
	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Museum			1	paket	-	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Museum			1	paket	350.000.000	
	Penyelenggaraan Event di Museum			4	Event	-	Penyelenggaraan Event di Museum			4	Event	750.000.000	
290	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2	Unit	300.000.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2	Unit	1.175.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan						
N O	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pemeliharaan Situs Muara Kaman			1	Unit	300.000.000	Pemeliharaan Situs Muara Kaman			1	Unit	-	
	Pemelliharaan taman dan area luar museum			1	Paket	-	Pemelliharaan taman dan area luar museum			1	Paket	300.000.000	
	Peralatan keamanan museum			1	Paket	-	Peralatan keamanan museum			1	Paket	250.000.000	
	Pemeliharaan gedung dan ruang pamer			1	Paket	-	Pemeliharaan gedung dan ruang pamer			1	Paket	275.000.000	
	Jasa Kebersihan dan keamanan museum kayu			1	Paket	-	Jasa Kebersihan dan keamanan museum kayu			1	Paket	350.000.000	
291	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2	Unit	500.000.000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2	Unit	2.600.000.000	
	Revitalisasi Museum Muara Kaman			1	Unit	500.000.000	Revitalisasi Museum Muara Kaman			1	Unit	-	
	Perbaikan atap dan plafon gedung museum kayu			1	Paket	-				1	Paket	450.000.000	
	Penataan ulang tata letak pamer			1	Paket	-				1	Paket	250.000.000	
	Penyediaan fasilitas ramah difabel			1	Paket	-				1	Paket	250.000.000	
	Pembangunan Gudang Museum			1	Paket	-				1	Paket	750.000.000	
	Pembangunan Musholla di area Museum kayu			1	Paket	-				1	Paket	450.000.000	
	Revitalisasi Rumah Adat Kutai di area Museum Kayu			1	Paket	-				1	Paket	450.000.000	
TOTAL						1.463.459.943.551						1.925.935.095.701	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui adanya adanya musrenbang di kecamatan dan forum PD antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak kecamatan serta *stakeholder* lainnya. Adanya beberapa usulan Program dan kegiatan masyarakat yang kurang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perlu adanya keselarasan terhadap sasaran target yang ingin dicapai. Berdasarkan usulan Program dan kegiatan masyarakat sebagaimana dirumuskan di atas, adalah sebagaimana tertera dalam Tabel TC-32 di bawah.

Tabel TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pembangunan Pelantaran halam SMP 3 Muara Wis	Muara Wis	Jumlah Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah yang telah dibangun	300m2	Muara Wis (ID SIPD: 2328861)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	belum tersedianya pagar sehingga perlu dibangun pagar agar anak-anak terawasi dan aman	Kembang Janggut		80 M2	ID SIPD: 2219824
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pagar sdn 033 kota bangun	Kota Bangun Darat			ID SIPD: 2314628
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pembangunan Toilet Murid SDN 024	Loa Janan			ID SIPD: 2277644

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pembangunan Toilet di SDN 007 Marang Kayu	MARANGKAYU			ID SIPD: 2238241
	Lanjutan Pembangunan Pagar Tk Negeri 02 Muara Badak	Muara Badak			ID SIPD: 2252324
	Lanjutan pembangunan Pagar SKB Muara Jawa	Muara Jawa			ID SIPD: 2253368
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Semenisasi Halaman Upacara SMP Negeri 3 MUara Muntai	Muara Muntai		300m2	ID SIPD: 2199775
	Semenisasi Halaman Sekolah TK Negeri 01 Samboja	Samboja			ID SIPD: 2279689
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pengurukan Lapangan SMPN 03 Sanga Sanga	Sanga Sanga		300m2	ID SIPD: 2221575
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pembangunan Toilet SDN 001 Sebulu	Sebulu			ID SIPD: 2234036
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Semenisasi halaman sekolah SDN 010 Desa Buluk Sen Tabang	Tabang			ID SIPD: 2342723
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	Pembangunan Pagar Sekolah SD 034	Muara Kaman			ID SIPD: 2286789

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan kebijakan nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Adanya kebijakan khusus dari kementerian yang membidangi pendidikan tentang program transisi PAUD ke SD, program sekolah penggerak, program guru penggerak dan transpormasi digitalisasi pendidikan.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tiak tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatankegiatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

a. Tujuan

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan;

2. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan; dan
3. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dalam urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas; dan
2. meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Garis besar faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Rumusan Program dan kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan pada Renja-P tahun 2026 sesuai dengan RKPD;
2. adanya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan;
3. Program transisi PAUD ke SD;
4. Program sekolah penggerak;
5. program guru penggerak;
6. transformasi digitalisasi pendidikan;
7. penanganan kemiskinan melalui Program pendidikan kesetaraan paket a, b dan c serta pendidikan kecakapan hidup;
8. penanganan *stunting* melalui program pelaksanaan kelas *parenting*;
9. adanya upaya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di daerah 3T (pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di setiap kecamatan);
10. adanya upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah;
11. adanya peningkatan partisipasi pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih adalah: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Sedangkan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pariwisata dan ekonomi kreatif;

4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan termaktub dalam misi 2 yaitu “Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya”. Yang termasuk dalam program prioritas dalam urusan pendidikan adalah upaya peningkatan pencapaian SPM bidang pendidikan dan Program KUKAR IDAMAN. Dimana Program KUKAR IDAMAN bisa mengungkit capaian SPM. Adapun strategi dan sasaran yang terkait dengan urusan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Program bea siswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi;
2. Program 1000 (seribu) guru sarjana, hal ini untuk menaikan SPM standar pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Program Kampong Pintar dan Perpustakaan Kampong; dan
4. Program Gerakan gemar mengaji (GEMA).

Sedangkan prioritas agenda kegiatan di Bidang Pendidikan antara lain:

1. peningkatan kualitas sekolah dari sisi sarana prasrana dan kualitas tenaga pendidik sehingga mampu memperoleh akreditasi/pengakuan yang baik;
2. pengawasan dan pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan yang sudah berjalan agar tepat sasaran dan efektif;
3. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada;
4. peningkatan kualitas dan sarana pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja;
5. penguatan pendidikan life skills (kecakapan hidup) yang mencakup aspek kecakapan personal (budi pekerti/akhlak), sosial;
6. pembuatan kelas inklusi/sekolah berkebutuhan khusus; dan
7. penghargaan terhadap siswa berprestasi;

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010- 2014, kebijakan pendidikan nasional

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

diarahkan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan Rencana dengan itu, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk Insan Indonesia yang cerdas komprehensif.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1 mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
2 mewujudkan akses yang meluas, merata,dan berkeadilan;
3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
4 mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan
5 mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Misi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental yang dapat dilihat dari tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1 menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2 mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3 menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4 memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajaryang kondusif agar anak nyaman belajar;
5 memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6 membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7 menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Renstra pembangunan pendidikan yang mengusung visi: Terwujudnya SDM Kaltim yang bertaqwa, unggul dan berbudaya melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Sedangkan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina mutu dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan manajemen pendidikan.
4. Membina dan mengembangkan generasi muda, olahraga, bahasa, seni, dan budaya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75	Nilai	1.481.991.939.641,00			76	Nilai	1.581.991.939.641,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		8	Dokumen	11.300.000.000,00			8	Dokumen	11.300.000.000,00
1.01.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2	Dokumen	800.000.000,00			2	Dokumen	800.000.000,00
1.01.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		3	Data	3.350.000.000,00			3	Data	3.350.000.000,00
1.01.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Berita Acara	600.000.000,00			2	Berita Acara	600.000.000,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	Dokumen	3.600.000.000,00			3	Dokumen	3.600.000.000,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
	SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	Laporan	1.850.000.000,00			7	Laporan	1.850.000.000,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	Laporan	1.100.000.000,00			2	Laporan	1.100.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		71894	Dokumen	1.329.665.371.249,00			71894	Dokumen	1.429.665.371.249,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71892	Orang/bulan	1.326.690.371.249,00			71892	Orang/bulan	1.426.690.371.249,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	900.000.000,00			2	Laporan	900.000.000,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		2	Laporan	1.100.000.000,00			2	Laporan	1.100.000.000,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2	Dokumen	975.000.000,00			2	Dokumen	975.000.000,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah		76	Dokumen/Laporan	975.000.000,00			Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	0	975.000.000,00
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokumen				1	Dokumen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
						25.000.000,00					25.000.000,00
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	Laporan	50.000.000,00			1	Laporan	50.000.000,00
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		72	Laporan	450.000.000,00			72	Laporan	450.000.000,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	Laporan	450.000.000,00			2	Laporan	450.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah		773	Dokumen/Orang	750.000.000,00			773	Dokumen/Orang	750.000.000,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		560	Dokumen	150.000.000,00			560	Dokumen	150.000.000,00
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		70	Dokumen	200.000.000,00			70	Dokumen	200.000.000,00
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45	Orang	150.000.000,00			45	Orang	150.000.000,00
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		98	Orang	250.000.000,00			98	Orang	250.000.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah		19	Paket/Dokumen/Laporan	7.440.000.000,00			19	Paket/Dokumen/Lapo ra n	7.440.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	50.000.000,00			1	Paket	50.000.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	Paket	600.000.000,00			4	Paket	600.000.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	300.000.000,00			1	Paket	300.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	Paket	100.000.000,00			2	Paket	100.000.000,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		700	Dokumen	90.000.000,00			700	Dokumen	90.000.000,00
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100	Laporan	100.000.000,00			100	Laporan	100.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		436	Laporan	1.000.000.000,00			436	Laporan	1.000.000.000,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5	Dokumen	500.000.000,00			5	Dokumen	500.000.000,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4	0	4.700.000.000,00			4	0	4.700.000.000,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah		30	Unit	390.000.000,00			30	Unit	390.000.000,00
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30	Unit	390.000.000,00			30	Unit	390.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah		6139	Laporan	127.431.568.392,00			6139	Laporan	127.431.568.392,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	Laporan	3.945.090.028,00			4	Laporan	3.945.090.028,00
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	Laporan	100.000.000,00			4	Laporan	100.000.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6131	Laporan	123.386.478.364,00			6131	Laporan	123.386.478.364,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan		1026	Unit	4.040.000.000,00			1026	Unit	4.040.000.000,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20	Unit	1.055.000.000,00			20	Unit	1.055.000.000,00
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		960	Unit	135.000.000,00			960	Unit	135.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		31	Unit	500.000.000,00			31	Unit	500.000.000,00
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		3	Unit	25.000.000,00			3	Unit	25.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12	Unit	2.325.000.000,00			12	Unit	2.325.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 2) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 5) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar				868.509.388.667,00					868.509.388.667,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar 3) Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 5) Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar 7) Standar Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar 8) Standar Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar		92.94 88.65 95.23 85.65 98.23 76.23 89.08 86.08	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	420.916.463.533,00			92.94 88.65 95.23 85.65 98.23 76.23 89.08 86.08	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	420.916.463.533,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		900	Dokumen	700.000.000,00			900	Dokumen	700.000.000,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	Unit	-			0	Unit	-
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala		4	Ruang				4	Ruang	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
		Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1.500.000.000,00					1.500.000.000,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	400.000.000,00			2	Ruang	400.000.000,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		9	Ruang	3.585.000.000,00			9	Ruang	3.585.000.000,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		13	Unit	3.875.000.000,00			13	Unit	3.875.000.000,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	Ruang	-			0	Ruang	-
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		6	Unit	3.000.000.000,00			6	Unit	3.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1500	Paket	2.550.000.000,00			1500	Paket	2.550.000.000,00
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		4	Paket	5.250.000.000,00			4	Paket	5.250.000.000,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2000	Peserta Didik Peserta Didik	950.000.000,00			2000	Peserta Didik Peserta Didik	950.000.000,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		1232	Paket	99.682.154.082,00			1232	Paket	99.682.154.082,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		489	Peserta Didik	750.000.000,00			489	Peserta Didik	750.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		160	Orang	240.000.000,00			160	Orang	240.000.000,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		480	Orang	3.455.000.000,00			480	Orang	3.455.000.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		2411	Satuan Pendidikan	1.450.000.000,00			2411	Satuan Pendidikan	1.450.000.000,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		107252	Satuan Pendidikan	180.993.375.000,00			107252	Satuan Pendidikan	180.993.375.000,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		944	Orang	550.000.000,00			944	Orang	550.000.000,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			26	0	5.000.000.000,00			26	0	5.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			12679	0	19.117.958.000,00			12679	0	19.117.958.000,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			40	0	350.000.000,00			40	0	350.000.000,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			567	0	600.000.000,00			567	0	600.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			2671	0	3.225.000.000,00			2671	0	3.225.000.000,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga			50	0				50	0	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
	Kependidikan					350.000.000,00					350.000.000,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			7	0	350.000.000,00			7	0	350.000.000,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			70	0	33.429.844.138,00			70	0	33.429.844.138,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			70	0	36.452.080.713,00			70	0	36.452.080.713,00
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			4	0	2.200.000.000,00			4	0	2.200.000.000,00
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1	0	6.500.000.000,00			1	0	6.500.000.000,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			12679	0	3.169.750.000,00			12679	0	3.169.750.000,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			400	0	1.241.301.600,00			400	0	1.241.301.600,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP 2) Standar isi Pendidikan SMP 3) Standar proses Pendidikan SMP 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP 5) Standar pengelolaan Pendidikan SMP 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 7) Standar pembiayaan Pendidikan SMP 8) Standar penilaian Pendidikan SMP		90.37 85.94 92.94 80.80 93.51 76.80 87.37 81.51	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen persen	240.458.997.000,00			90.37 85.94 92.94 80.80 93.51 76.80 87.37 81.51	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen persen	240.458.997.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		5	Ruang	1.357.946.000,00			5	Ruang	1.357.946.000,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		7	Ruang	1.354.097.000,00			7	Ruang	1.354.097.000,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		2	Ruang	1.810.450.000,00			2	Ruang	1.810.450.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		11	Unit	2.902.500.000,00			11	Unit	2.902.500.000,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		234	Paket	3.636.500.000,00			234	Paket	3.636.500.000,00
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		207	Paket	29.602.505.000,00			207	Paket	29.602.505.000,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3015	Peserta Didik	2.960.000.000,00			3015	Peserta Didik	2.960.000.000,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		324	Paket	31.264.800.000,00			324	Paket	31.264.800.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		2069	Peserta Didik	3.925.000.000,00			2069	Peserta Didik	3.925.000.000,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		817	Orang	5.820.000.000,00			817	Orang	5.820.000.000,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		162	Satuan Pendidikan	1.150.000.000,00			162	Satuan Pendidikan	1.150.000.000,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		76089	Satuan Pendidikan	101.492.466.000,00			76089	Satuan Pendidikan	101.492.466.000,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS		3945	Orang				3945	Orang	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
		Sekolah Menengah Pertama				2.200.000.000,00					2.200.000.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			24	-	9.754.356.000,00			24	-	9.754.356.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			10	-	2.705.673.000,00			10	-	2.705.673.000,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			45	-	16.875.000.000,00			45	-	16.875.000.000,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SMP			600	-	6.400.000.000,00			600	-	6.400.000.000,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP			360	-	1.600.000.000,00			360	-	1.600.000.000,00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SMP			162	-	647.704.000,00			162	-	647.704.000,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SMP			192	-	9.200.000.000,00			192	-	9.200.000.000,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			2	-	600.000.000,00			2	-	600.000.000,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan Konten digital untuk pendidikan			100	-	600.000.000,00			100	-	600.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			434	-	1.850.000.000,00			434	-	1.850.000.000,00
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			162	-	750.000.000,00			162	-	750.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD		189.83	Persen				189.83	Persen	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
		2) Standar Isi Pendidikan PAUD 3) Standar Proses Pendidikan PAUD 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 5) Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD 6) Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD 7) Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD 8) Standar Penilaian Pendidikan PAUD		91.58 98.49 43.84 73.98 92.85 83.55 87.15	Persen Persen Persen Persen Persen Persen persen	122.415.883.334,00			91.58 98.49 43.84 73.98 92.85 83.55 87.15	Persen Persen Persen Persen Persen Persen persen	122.415.883.334,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		12	Ruang	5.362.160.000,00			12	Ruang	5.362.160.000,00
1.01.02.2.03.0047	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		9164	Peserta Satuan Pendidikan	2.900.000.000,00			9164	Peserta Satuan Pendidikan	2.900.000.000,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		9	Unit	3.040.634.667,00			9	Unit	3.040.634.667,00
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	Unit	435.257.000,00			2	Unit	435.257.000,00
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	Unit	829.401.667,00			2	Unit	829.401.667,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		1540	Paket	2.990.500.000,00			1540	Paket	2.990.500.000,00
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		641	Paket	23.798.083.000,00			641	Paket	23.798.083.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		497	Orang	3.975.000.000,00			497	Orang	3.975.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		1502	Satuan Pendidikan	2.750.000.000,00			1502	Satuan Pendidikan	2.750.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		20635	Satuan Pendidikan	54.594.847.000,00			20635	Satuan Pendidikan	54.594.847.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		564	Orang	250.000.000,00			564	Orang	250.000.000,00
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1	-	7.580.000.000,00			1	-	7.580.000.000,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			49385	-	7.360.000.000,00			49385	-	7.360.000.000,00
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			780	-	1.450.000.000,00			780	-	1.450.000.000,00
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			567	-	600.000.000,00			567	-	600.000.000,00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			380	-	2.650.000.000,00			380	-	2.650.000.000,00
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100	-	450.000.000,00			100	-	450.000.000,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			300	-	450.000.000,00			300	-	450.000.000,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			300	-	950.000.000,00			300	-	950.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan 2) Standar Isi Pendidikan Kesetaraan 3) Standar Proses Pendidikan Kesetaraan 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan		68.72 72.62 72.58 65.53	Persen Persen Persen Persen	84.718.044.800,00			72.62 72.58 65.53 67.29	Persen Persen Persen Persen	84.718.044.800,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
		5) Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan		67.29	Persen				67.58	Persen	
		6) Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan		67.58	Persen				62.38	Persen	
		7) Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan		62.38	Persen				67.43	Persen	
		8) Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan		67.43	Persen				99.98	Persen	
		9) Angka Melek Huruf		99.98	Persen					Persen	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		3	Paket	75.000.000,00			3	Paket	75.000.000,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		14665	Peserta Didik	9.860.000.000,00			14665	Peserta Didik	9.860.000.000,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		48	set Paket	9.971.680.800,00			48	set Paket	9.971.680.800,00
1.01.02.2.04.0052	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		3	unit	675.000.000,00			3	unit	675.000.000,00
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3.151	Peserta Didik	4.350.000.000,00			3.151	Peserta Didik	4.350.000.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		135	Satuan Pendidikan	400.000.000,00			135	Satuan Pendidikan	400.000.000,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		11800	Satuan Pendidikan	22.717.240.000,00			11800	Satuan Pendidikan	22.717.240.000,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		54	Orang	200.000.000,00			54	Orang	200.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			354	-	2.300.000.000,00			354	-	2.300.000.000,00
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			35	-	140.000.000,00			35	-	140.000.000,00
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			54	-	200.000.000,00			54	-	200.000.000,00
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			60	-	250.000.000,00			60	-	250.000.000,00
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			5	-	625.000.000,00			5	-	625.000.000,00
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			15	-	29.586.506.000,00			15	-	29.586.506.000,00
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			10788	-	2.717.618.000,00			10788	-	2.717.618.000,00
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			60	-	300.000.000,00			60	-	300.000.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			27	-	350.000.000,00			27	-	350.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)		100	Persen	6.420.000.000,00			100	Persen	6.420.000.000,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD 2) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang		1 1	Dokumen Dokumen				1 1	Dokumen Dokumen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
		pendidikan SMP 3) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD 4) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP		1 1	Dokumen Dokumen	6.420.000.000,00			1 1	Dokumen Dokumen	6.420.000.000,00
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		587	Dokumen	3.700.000.000,00			587	Dokumen	3.700.000.000,00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		4151	Buku	670.000.000,00			4151	Buku	670.000.000,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		215	Orang	2.050.000.000,00			215	Orang	2.050.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase terpenuhinya jumlah guru		95	Persen	6.640.000.000,00			95	Persen	6.640.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD 2) Rasio Guru dengan Peserta didik SD 3) Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	80 80 80		Rasio Rasio Rasio	8.640.000.000,00			80 80 80	Rasio Rasio Rasio	8.640.000.000,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		819	Dokumen	4.090.000.000,00			819	Dokumen	4.090.000.000,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1696	Laporan	4.550.000.000,00			1696	Laporan	4.550.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional		100	Persen	2.950.000.000,00			100	Persen	2.950.000.000,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar		61	Dokumen	50.000.000,00			61	Dokumen	50.000.000,00
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		28	Dokumen	35.000.000,00			28	Dokumen	35.000.000,00
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		30	Dokumen	15.000.000,00			30	Dokumen	15.000.000,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal		100	Dokumen	2.900.000.000,00			100	Dokumen	2.900.000.000,00
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		950	Dokumen	2.050.000.000,00			950	Dokumen	2.050.000.000,00
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		550	Dokumen	850.000.000,00			550	Dokumen	850.000.000,00
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran		90	Persen	9.860.000.000,00			90	Persen	9.860.000.000,00
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	1) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD 2) Terlaksanannya program		240 106	Sekolah Sekolah				240 106	Sekolah Sekolah	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP 3) Jumlah penutur muda bahasa daerah 4) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah		3460 5	Orang Kali	9.860.000.000,00			3460 5	Orang Kali	9.860.000.000,00
1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun		1000	Kamus	100.000.000,00			1000	Kamus	100.000.000,00
1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		602	Publikasi	2.000.000.000,00			602	Publikasi	2.000.000.000,00
1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan		2	Orang	20.000.000,00			2	Orang	20.000.000,00
1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi		3000	Buku	120.000.000,00			3000	Buku	120.000.000,00
1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		1150	Peserta Didik	3.900.000.000,00			1150	Peserta Didik	3.900.000.000,00
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun		3550	Dokumen	3.720.000.000,00			3550	Dokumen	3.720.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1) Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Persentase Desa Budaya yang Aktif		30 100	Event Persen	26.875.000.000,00			30 100	Event Persen	26.875.000.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					23.875.000.000,00					23.875.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		30	Objek	21.125.000.000,00			30	Objek	21.125.000.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		60	Orang	2.750.000.000,00			60	Orang	2.750.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya		13	Kegiatan	3.000.000.000,00			13	Kegiatan	3.000.000.000,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		1	Objek	3.000.000.000,00			1	Objek	3.000.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif		75	Persen	4.450.000.000,00			75	Persen	4.450.000.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya		13	Kegiatan	4.450.000.000,00			13	Kegiatan	4.450.000.000,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	umlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		3286	Orang	750.000.000,00			3286	Orang	750.000.000,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi		60	Sertifikat	950.000.000,00			60	Sertifikat	950.000.000,00
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			127	Lembaga	2.750.000.000,00			127	Lembaga	2.750.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan		75,98	. Persen	950.000.000,00			75,98	Persen	950.000.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal		16	Kegiatan	950.000.000,00			16	Kegiatan	950.000.000,00
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		2	Dokumen	950.000.000,00			2	Dokumen	950.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target 2026		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1) Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara 2) Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial 3) Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda		100 14.57 100	Persen Persen Persen	4.750.000.000,00			100 14.57 100	Persen Persen Persen	4.750.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan		16	Lokasi	750.000.000,00			16	Lokasi	750.000.000,00
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		30	Objek	750.000.000,00			30	Objek	750.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan		16	Lokasi	4.000.000.000,00			16	Lokasi	4.000.000.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		2717	Objek	1.500.000.000,00			2717	Objek	1.500.000.000,00
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		2	Objek	2.500.000.000,00			2	Objek	2.500.000.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase museum yang dikelola		75,98	. Persen	2.600.000.000,00			75,98	. Persen	2.600.000.000,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum		2	Lokasi	2.600.000.000,00			2	Lokasi	2.600.000.000,00
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		2	Unit	200.000.000,00			2	Unit	200.000.000,00
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		9	Unit	2.400.000.000,00			9	Unit	2.400.000.000,00
TOTAL						2.415.996.328.308,00		TOTAL			2.515.996.328.308,00

BAB V
PENUTUP

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan PD tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026, prosesn penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD.

Renja-PD menuangkan perencaan strategis yang bersifat operasional dalam menerjemahkan tugas dan fungsi PD. Renja-PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkan lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini mengedapankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan di Daerah, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh

PD untuk menyusun rencana kerja tahunan PD yang disebut Renja-PD. Dari hasil penyusunan RKPD tersebut, menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai salah satu bentuk pengendalian dan evaluasi, dan menjadi satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah untuk menjamin konsistensi dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja-PD mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap PD setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja disusun sebagai bagian dari perencanaan tahunan PD Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini penting karena melibatkan penentuan prioritas, program-program kesehatan yang akan dijalankan, alokasi anggaran, serta target pencapaian yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Latar belakang pembuatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu beberapa hal penting meliputi:

1. Kebutuhan masyarakat.

   Analisis atas kondisi kesehatan masyarakat menjadi dasar untuk menentukan prioritas Program;

2. Kebijakan nasional dan Daerah.

   Rencana Kerja harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah terkait kesehatan. Hal ini memastikan bahwa program program yang dijalankan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target kesehatan nasional.

3. Evaluasi tahun sebelumnya.

Meninjau capaian tahun sebelumnya untuk mengevaluasi keberhasilan Program yang sudah dijalankan serta menentukan program mana yang perlu ditingkatkan atau diubah strateginya.

4. Ketersediaan Anggaran.

Pembuatan Rencana Kerja juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Hal ini berarti merencanakan Program yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan pencapaian.

5. Partisipasi *stakeholder*.

Proses ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ahli kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan yang memadai.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, Dinas Kesehatan dapat merumuskan Rencana Kerja yang tidak hanya realistis tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD tahun 2025-2029, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun untuk dapat mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan kesehatan agar selaras dan berkesinambungan, dan dapat dijadikan acuan yang berisi Program dan kegiatan secara sistematis serta sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara terarah dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan operasional, yaitu mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Investasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara memiliki maksud dan tujuan yang penting dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah maksud dan tujuan utama dari encana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;

A. Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan Daerah selama satu tahun. Rencana Kerja ini menyajikan acuan penentuan Program kegiatan tahun 2026 yang telah dibahas dalam rangkaian forum musyawarah Perencanaan baik ditingkat kecamatan maupun Daerah.

B. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan tujuan pembangunan ke dalam program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2026;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun anggaran 2026;
3. Menciptakan kepastian dan sinergis perencanaan Program kegiatan dan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan antar-sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
5. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* Dinas Kesehatan tahun 2024. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*. Sementara itu input lain seperti sumber daya manusia, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB);
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI);
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM); dan
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PD di Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024, melaksanakan 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 153 (seratus lima puluh tiga) sub-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp852.170.806.461,00 (delapan ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp756.813.957.234,58 (tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima puluh delapan rupah) atau sebesar 89 % (delapan puluh sembilan persen).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 dan pencapaian Renstra tahun2021-2026 secara keseluruhan diperlihatkan pada tabel TC-29 berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	79,5 Nilai	79,5 Nilai	75,57 Nilai	95,06	80 Nilai	Nilai	
1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	Dokumen	
1.02 . 01 . 2.01 . 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	11 Dokumen	1
1.02 . 01 . 2.01 . 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	4 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	0
1.02 . 01 . 2.01 . 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	1 Laporan	9 Laporan	2
1.02 . 01 . 2.01 . 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0
1.02 . 01 . 2.01 . 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral DaerahyangTelahDikumpulkanda n	5 Data	Data	0 Data	0 Data	0	1 Data	1 Data	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3 Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.01 . 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkanBidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yangDiampudalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	Berita Acara	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	1 Berita Acara	0
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penysunan laporan keuanngan	15 Laporan	Laporan	4 laporan	4 Laporan	100	4 laporan	Laporan	
1.02 . 01 . 2.02 . 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17560 Orang /bulan	1890 Orang /bulan	35588 Orang /bulan	26754 Orang /bulan	75	2520 Orang /bulan	31164 Orang /bulan	2
1.02 . 01 . 2.02 . 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.02 . 01 . 2.02 . 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	7 Laporan	1
1.02 . 01 . 2.02 . 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	40 Laporan	2
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dan penysunan laporan aset BMD	20 Laporan	Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	100	2 Dokumen	Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.03 . 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	0
1.02 . 01 . 2.03 . 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	17 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	0 Laporan	18 Laporan	1
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Pakaian Dinas, Pendataan, Pengolahan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	32 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokumen	
1.02.01.2.05. 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	105 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	7 Unit	0
1.02.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	1 Paket	0
1.02.01.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahanan Administrasi Kepegawai	5 Dokumen	11 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1 Dokumen	24 Dokumen	5
1.02.01.2.05. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	34 Dokumen	21 Dokumen	62	1 Dokumen	24 Dokumen	5
1.02.01.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	2 Dokumen	34 Dokumen	16 Dokumen	47	1 Dokumen	19 Dokumen	4
1.02.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	595 Orang	300 Orang	49 Orang	16	0 Orang	644 Orang	1
1.02.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	50 Orang	64 Orang	10 Orang	16	64 Orang	124 Orang	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	445 Orang	197 Orang	128 Orang	123 Orang	96	64 Orang	384 Orang	1
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik, Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	40 Dokumen	Dokumen	8 layanan	8 layanan	100	8 layanan	Dokumen	
1.02 . 01 . 2.06 . 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	12 Paket	2
1.02 . 01 . 2.06 . 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	14 Paket	3
1.02 . 01 . 2.06 . 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	14871 kotak/porsi (Paket)	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	14873 Paket	2975
1.02 . 01 . 2.06 . 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4 Paket	1
1.02 . 01 . 2.06 . 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	250 Dokumen	250 Dokumen	50
1.02 . 01 . 2.06 . 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	908 orang ; Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	910 Laporan	182
1.02 . 01 . 2.06 . 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	48 Laporan	10

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.06 . 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	33 berkas / dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	35 Dokumen	7
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan, Kendaraan Dinas Lapangan, Mebel dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	737 Unit	Unit	25 unit	25 Unit	100	22 unit	47 Unit	
1.02 . 01 . 2.07 . 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0
1.02 . 01 . 2.07 . 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	100	1 Unit	6 Unit	0
1.02 . 01 . 2.07 . 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	10 Unit	1
1.02 . 01 . 2.07 . 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	712 Unit	51 Unit	20 Unit	20 Unit	100	0 Unit	71 Unit	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Laporan	Laporan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	Laporan	
1.02 . 01 . 2.08 . 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	11 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	13 Laporan	3
1.02 . 01 . 2.08 . 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	16 Laporan	3
1.02 . 01 . 2.08 . 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	9 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	11 Laporan	2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.08 . 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	14 Laporan	3
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas lapangan, Pembayaran pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	250 Unit	Unit	95 Unit	95 Unit	100	95 Unit	Unit	
1.02 . 01 . 2.09 . 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	189 unit	95 Unit	7 Unit	7	6 Unit	202 Unit	7
1.02 . 01 . 2.09 . 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	105 unit	106 Unit	7 Unit	7	10 Unit	122 Unit	2
1.02 . 01 . 2.09 . 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	29 Unit	20 Unit	18 Unit	90	25 Unit	72 Unit	1
1.02 . 01 . 2.09 . 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	5 unit	3 Unit	4 Unit	133	1 Unit	10 Unit	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	27 Puskesmas	32 Unit Kerja	118,52	30 Puskesmas	32 Unit Kerja	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32 Unit Kerja	32 Unit Kerja	32 Unit Kerja	32 Unit Kerja	100	32 Unit Kerja	96 Unit Kerja	3
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting		Persen	14,6 Persen	15,7 Persen	107,53	14,1 Persen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Keluarga sehat		Persen	0,35 Persen	0,36 Persen	102,86	0,4 Persen		
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi		Persen	0,75 Persen	0,91 Persen	121,33	0,76 Persen		
		Indeks Pelayanan kesehatan balita		Persen	0,76 Persen	0,76 Persen	100,00	0,77 Persen		
		Indeks Pelayanan Penyakit menular		Jumlah	0,61 Jumlah	0,91 Jumlah	149,18	0,63 Jumlah		
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular		Jumlah	0,5 Jumlah	0,98 Jumlah	196,00	0,52 Jumlah		
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan		Persen	0,88 Persen	0,9 Persen	102,27	0,89 Persen		
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer		Persen	0,4 Persen	0,86 Persen	215,00	0,43 Persen		
		Indeks Perilaku kesehatan		Persen	0,47 Persen	0,52 Persen	110,64	0,48 Persen		
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama		Persen	Persen	Persen	#DIV/0!	31,25 Persen		
		Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	94 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Prevalensi Stunting pada balita	14 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Prevalensi Wasting pada balita	7,5 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (treatment success rate)	95 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Angka Kasus PD3I	0 Jumlah	Jumlah				Jumlah	Jumlah	
		Angka Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan	855 Jumlah	Jumlah				Jumlah	Jumlah	
		Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	100 Persen	Persen				Persen	Persen	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana di FASKES Pemerintah dan Jaringannya	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar			76 Persen	75 Persen	98,68	78 Persen		
		Persentase Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu.	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
		Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
		persentasi puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan	100 Persen	Persen				Persen	Persen	
1.02 . 02 . 2.01 . 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	6 Unit	1 Dokumen / Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	2 Unit	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.01 . 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	12 Unit	15 Unit	14 Unit	93	3 Unit	29 Unit	15
1.02 . 02 . 2.01 . 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	40 Unit	65 Unit	14 Unit	14 Unit	100	10 Unit	89 Unit	2
1.02 . 02 . 2.01 . 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	10 Unit	14 unit	6 Unit	6 Unit	100	8 Unit	28 Unit	3
1.02 . 02 . 2.01 . 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	0 Unit	202 Unit	665 Unit	329	8 Unit	673 Unit	67
1.02 . 02 . 2.01 . 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	16 Unit	43 unit	13 Unit	10 Unit	77	4 Unit	57 Unit	4
1.02 . 02 . 2.01 . 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	22 Unit	37 unit	11 Unit	8 Unit	73	13 Unit	58 Unit	3
1.02 . 02 . 2.01 . 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	11 Unit	8 Unit	5 Unit	3 Unit	60	3 Unit	14 Unit	1
1.02 . 02 . 2.01 . 0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, Ipal, SAP)		116 unit				0		0
1.02 . 02 . 2.01 . 0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu		2248 Paket / Unit				0		0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.01 . 0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	255 Unit	12 Paket / Unit	44 Unit	44 Unit	100	33 Unit	89 Unit	0
1.02 . 02 . 2.01 . 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	14 Unit	10 Paket / Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	11 Unit	1
1.02 . 02 . 2.01 . 0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan		7 Paket				0		0
1.02 . 02 . 2.01 . 0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumalh BHP yang diadakan		10 Paket				0		0
1.02 . 02 . 2.01 . 0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu		26 Paket				0		0
1.02 . 02 . 2.01 . 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2750 Unit	349 Paket	400 Unit	400 Unit	100	2 Unit	751 Unit	0
1.02 . 02 . 2.01 . 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	15 Unit	Unit	0 Unit	0 Unit	0	7 Unit	7 Unit	0
1.02 . 02 . 2.01 . 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	600 Paket	5 Paket	10 Paket	10 Paket	100	1075 Paket	1090 Paket	2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.01 . 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	891100 Keluarga	Keluarga	165354 Keluarga	165354 Keluarga	100	165386 Keluarga	330740 Keluarga	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									0
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan			100 Persen	100 Persen	100	100 Persen		0
		Persentase KB Aktif			66 Persen	68 Persen	103	68 Persen		0
		Imunisasi Dasar lengkap (IDL)			94 Persen	90 Persen	96	94,6 Persen		0
		Persentase Persalinan di tolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	98 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Persentase K4	94 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Persentase remaja puteri mendapat TTD	95 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS	98 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana	90 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Persentase ASI Eksklusif	80 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Cakupan penemuan kasus Tuberculosis (treatment coverage)	91 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100 Persen	Persen				Persen	Persen	0
		Akses Sanitasi Layak dan Aman	83,9 Persen	Persen				Persen	Persen	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sarana Air Minum dilakukan pengawasan sesuai standar	100 Persen	Persen				Persen	Persen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71424 Orang	12826 Orang	13528 Orang	11991 Orang	89	13072 Orang	37889 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68176 Orang	12283 Orang	12913 Orang	11541 Orang	89	13058 Orang	36882 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64931 Orang	9020 Orang	12298 Orang	11169 Orang	91	27436 Orang	47625 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329592 Orang	54587 Orang	61719 Orang	53295 Orang	86	62179 Orang	170061 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	748567 Orang	272061 Orang	140378 Orang	138785 Orang	99	141016 Orang	551862 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2813275 Orang	507751 Orang	526813 Orang	489728 Orang	93	506000 Orang	1503479 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293015 Orang	48817 Orang	59237 Orang	51225 Orang	86	56316 Orang	156358 Orang	1

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.02 . 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	315492 Orang	56932 Orang	57987 Orang	57987 Orang	100	82260 Orang	197179 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90540 Orang	24087 Orang	16641 Orang	16641 Orang	100	50000 Orang	90728 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4711 Orang	897 Orang	867 Orang	867 Orang	100	892 Orang	2656 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	77143 Orang	10483 Orang	23722 Orang	23722 Orang	100	24418 Orang	58623 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	117293 Orang	17553 Orang	17465 Orang	17465 Orang	100	28980 Orang	63998 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	160 Dokumen	5 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100	32 Dokumen	69 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	160 Dokumen	1 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100	1 Dokumen	34 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	139 Dokumen	11 Dokumen	7 Dokumen	64	836 Dokumen	982 Dokumen	10

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.02 . 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	40 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	13 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	133	154 Dokumen	180 Dokumen	5
1.02 . 02 . 2.02 . 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	334 Dokumen	334 Dokumen	67
1.02 . 02 . 2.02 . 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	160 Dokumen	61 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	63 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	225 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	103 Dokumen	108 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1052236 Orang	Orang	0 Orang	Orang	0	12000 Orang	12000 Orang	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1745 Orang	Orang	0 Orang	Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		10 Dokumen				0		0
1.02 . 02 . 2.02 . 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	120	42 Dokumen	64 Dokumen	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	140 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100	128245 Dokumen	128329 Dokumen	917

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 02 . 2.02 . 0028	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	320 Paket	20 Paket	64 Paket	56 Paket	88	100 Paket	176 Paket	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		16 unit						0
1.02 . 02 . 2.02 . 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	320 Dokumen	128 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	100	64 Dokumen	288 Dokumen	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	6 Dokumen	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	180 Unit	32 Puskesmas	8 Unit	11 Unit	138	1 Unit	44 Unit	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21 Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu	5 unit	unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
1.02 . 02 . 2.02 . 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4224 Orang	100 Orang	1020 Orang	1214 Orang	119	1464 Orang	2778 Orang	1
1.02 . 02 . 2.02 . 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4161 Orang	25 Orang	288 Orang	182 Orang	63	153 Orang	360 Orang	0
1.02 . 02 . 2.02 . 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	375 Orang	1 Dokumen	100 Orang	350 Orang	350	500 Orang	851 Orang	2
1.02 . 02 . 2.02 . 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	33 Dokumen	33 Dokumen	7
1.02 . 02 . 2.02 . 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	13001 Dokumen	13001 Dokumen	2600
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Prosentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	100 Persen	Persen	30 Faskes	32 Faskes	107	Persen	Persen	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	160 Dokumen	42 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	47 Dokumen	0
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes yang diawasi dan ditindaklanjuti perizinan	100 Unit	Unit	100 Persen	100 Persen	100	Unit	Unit	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	657 Unit	1306 Unit	75 Unit	131 Unit	175	125 Unit	1562 Unit	2
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	20 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	0
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	155 Dokumen	53 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100	1 Dokumen	75 Dokumen	0
1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas	100							
1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	160 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.02.03.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Minimal	100 Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	100,00	Persen	75 Persen	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiiliki Izin Praktik/Kerja	100 Persen	Persen	1500 izin	1869 izin	125	Persen	1869 Persen	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5 Dokumen	256 Dokumen	1200 Dokumen	1869 Dokumen	156	2500 Dokumen	4625 Dokumen	925

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Buku	Buku	75 persen	100 persen	133	Buku	Buku	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	37 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	44 Dokumen	82 Dokumen	16
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	67 Orang	44 Orang	28 Orang	64	54 Orang	149 Orang	0
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	100 Persen	Persen	80 orang	135 orang	169	Persen	135 Persen	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang	447 Orang	150 Orang	135 Orang	90	400 Orang	982 Orang	196
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman yang sesuai Standar	100 Persen	Persen	100 persen	100 Persen	100,00	Persen	100 Persen	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Jumlah sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	100 Persen	Persen	100 persen	100 persen	100	Persen	Persen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	450 Dokumen	50 Dokumen	60 Dokumen	76 Dokumen	127	75 Dokumen	201 Dokumen	0
1.02.04.2.01.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sarana						0
1.02.04.2.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		57 Sarana						0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	100 Persen	Persen	15 sertifkat	15 sertifkat	100	Persen	Persen	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	900 Dokumen	55 Dokumen	80 Dokumen	147 Dokumen	184	280 Dokumen	482 Dokumen	1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100							
1.02.04.2.04.0001	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	JumlahDokumenHasilPengendalian danPengawasansertaTindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat PengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5211 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	942 Dokumen	942 Dokumen	0
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		100							
1.02.04.2.05.0001	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	JumlahDokumenHasilPengendalian danPengawasansertaTindakLanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1402 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	253 Dokumen	253 Dokumen	0
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	100 Persen	Persen	25 Persen	25 Persen	100	35 Persen	Persen	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	300 Unit	53 Unit	50 Unit	53 Unit	106	150 Unit	256 Unit	1
1.02.04.2.06.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Dokumen				0		0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan GERMAS aktif	95 Persen	Persen	34 Persen	52 Persen	152,94	36 Persen	Persen	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55 Persen	Persen	40 Persen	69 Persen	173	50 Persen	Persen	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	105 Dokumen	121 Dokumen	6
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		70 Persen	Persen	50 Persen	100 Persen	200	55 Persen	Persen	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	24 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	155 Dokumen	181 Dokumen	36

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2025)	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	Persen	34 Persen	49 Persen	144	36 Persen	Persen	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	28 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	36 Dokumen	68 Dokumen	3

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penggunaan anggaran.

2.2.1. Pencapaian IKU Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ada 4 (empat) indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	13	113
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	201	111
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Persen	0,68	0,89
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85	86,94

Dari tabel pencapain IKU diatas bahwa semua target yang direncanakan sudah mencapai target ditetapkan.

a. Angka Kematian Bayi.

Angka kematian bayi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah angka kematian bayi di suatu wilayah mengindikasikan semakin baiknya program kesehatan mereka.

Gambar 2.1

Grafik Jumlah Kematian Bayi tahun 2021-2024

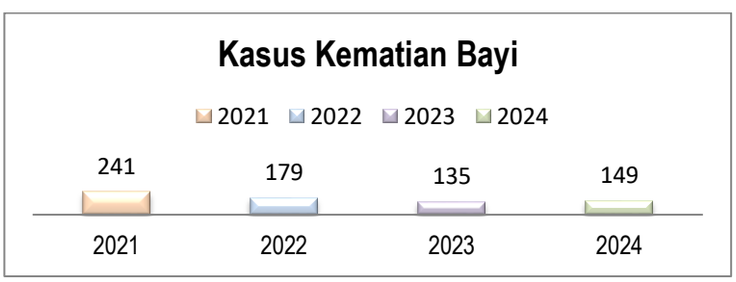

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah kematian bayi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan kasus kematian bayi.

Beberapa faktor pendukung menurunya angka kematian bayi adalah sebagai berikut :

1. Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Pendanaan yang memadai terkait penurunan angka kematian bayi;
3. Peningkatan Kapasitas Dokter Umum Puskesmas;
4. *Duckling* bidan;
5. Didukung oleh SK AMP dan pelaksanaan AMP pada setiap kasus kematian;
6. Pelayanan dokter spesialis anak dan spesialis obgyn ke kecamatan secara berkala;
7. *Duck and duckling* anak terfokus;
8. Pelayanan bersalin dan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar;
9. Sistem rujukan berjalan baik (*hotline* dan *logbook* rujukan).
10. *Feedback rujukan neonatal*;
11. AMP-SR tingkat puskesmas dan triwulan kabupaten; dan
12. Adanya dukungan organisasi profesi, puskesmas, rumah sakit dan lintas sektor terkait.

Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam mencapai target penurunan angka kematian yaitu:

1. Kondisi geografis dimana masyarakat susah untuk mencapai akses fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Kapasitas dan keterlibatan dokter umum dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir tidak maksimal;
3. Kapasitas dan fasilitas RSUD Kurang untuk menangani bayi kecil (BBLR dan prematur) terkait NICU, obat dan alat;
4. Kendala diluar sistem layanan kesehatan (masyarakat luar/pindah yg tidak mempunyai KK (terutama jaminan kesehatan); dan
5. Keterbatasan tenaga dokter spesialis (SpOG, SpA, Anestesi).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target global *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 (tujuh puluh) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup pada tahun 2030. Tahun 2024 jumlah kematian ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan angka kematian ibu sebesar 111 (seratus sebelas) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup.

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Kematian Ibu tahun 2019-2023

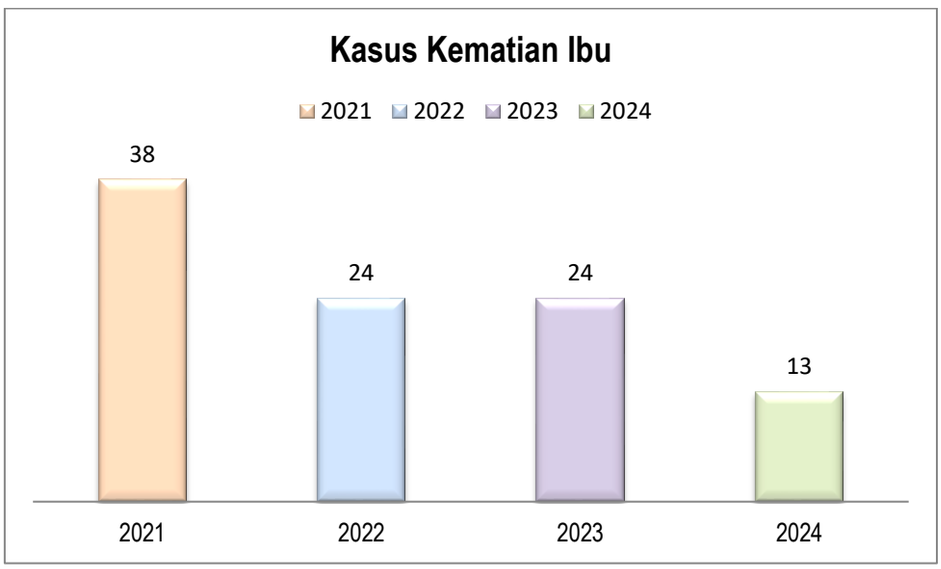

Dibandingkan dengan target Angka Kematian ibu Tahun 2024 yang sebesar 201 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian ibu tahun 2024 jauh dibawah target yang di tetapkan, Hal ini dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun faktor pendukung menurunnya angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan / anggaran yang mencukupi;
2. Adanya dukungan organisasi profesi, puskesmas, rumah sakit dan lintas sektor terkait;
3. Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Di dukung oleh SK AMP dan pelaksanaan AMP pada setiap kasus kematian;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Pelayanan dokter spesialis kebidanan;
6. *Duck and duckling* maternal terfokus; dan
7. *Skrining* ibu hamil (srikandie dan indeks rujukan);
8. Pelayanan bersalin sesuai dan pelayanan nifas sesuai standar;
9. Sistem rujukan berjalan baik (*Hotline* Dan *Logbook* Rujukan);
10. *Feedback* rujukan;
11. Pelatihan *blended learning* dokter umum;
12. Pelatihan gadar matneo; dan
13. Pendanaan/anggaran yang mencukupi.

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat yang mempengaruhi penurunan AKI yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi geografis yang mempengaruhi akses terhadap fasyankes kesehatan;
2. Kapasitas dan keterlibatan dokter umum dalam pelayanan kebidanan tidak maksimal;
3. Kendala diluar sistem layanan kesehatan (Masyarakat luar/pindah yang tidak mempunyai KK (terutama jaminan kesehatan); dan
4. Keterbatasan tenaga dokter Spesialis (SpOG, SpA, Anestesi).

c. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

Dalam menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan disusunlah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Ada 24 (dua puluh empat) indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio dokter/Puskesmas, dan rasio bidan/desa.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar 0,89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen), yang telah melampau target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan yaitu sebesar 0,68 % (nol koma enam puluh delapan persen). Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari dukungan komitmen dan integritas manajemen dan penyelenggara kegiatan, selain itu adanya sinkronisasi data dan kolekting data yang sudah semakin baik, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat. Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam pencapaian indeks pembanguanan kesehatan masyarakat (IPKM). Dimana kualitas dan ketertiban penginputan data dan bahan yang masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas data yang diperoleh untuk menghasilkan nilai IPKM.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 86,94 % (delapan puluh enam koma sembilan puluh empat persen), hal ini telah melebihi target yang telah di tetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan yang hanya sebesar 85 % (delapan puluh lima persen). Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini tidak terlepas dari peran serta fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana seluruh puskesmas telah terakreditasi. melakukan survey kepuasan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu jaringan internet yang kadang lambat sehingga mengganggu proses pelayanan, waktu pelayanan menjadi lebih lama.

Tabel 2. 2.

Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

SUMBER DANA	ALOKASI	REALISASI	%
APBD	Rp 747.712.804.399	Rp 673.911.274.370,42	90%
BLUD	Rp 44.408.254.498	Rp 38.195.163.563,16	86%
DAK	Rp 60.049.747.564	Rp 44.707.519.301,00	74%
Total	Rp 852.170.806.461	Rp 756.813.957.234,58	89%

Dilihat dari realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan masih masuk katagori baik. Dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Realisasi keuangan untuk DAK Non Fisik tahun 2024 sebesar 56% sedangkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

realisasi keuangan untuk DAK Fisik sebesar 97% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan pencapaian kinerja keuangan yang bersumber dana APBD sudah termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan realisasi baik dengan 90%. Sumber dana BLUD Alokasi anggaran adalah realisasi pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar 86 %.

2.2.2. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja bidang kesehatan ditandai juga melalui indikator SPM sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) indikator dalam SPM, melingkupi pelayanan kesehatan dalam daur kehidupan *(continuum of care)* dan penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel TC-30 berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SPM																
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,17%	91,96%	91,36%	88,64%		100%	
2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	103,71%	94,53%	95,46%	89,38%		100%	
3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	120,30%	97,24%	93,13%	90,82%		100%	
4	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,21%	84,39%	87,66%	86,35%		100%	
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,89%	100,00%	99,01%	98,62%		100%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,15%	91,94%	94,24%	92,96%		100%	
7	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,20%	90,59%	90,24%	86,47%		100%	
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	22,20%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,42%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	
10	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,20%	100,84%	100,00%	100,00%		100%	
11	Presentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,25%	138,38%	100,00%	100,00%		100%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,36%	108,98%	100,00%	100,00%		100%	
IKU																
1	Menurunnya Angka Kematian Bayi			15	13	13	13	12	12		13	11	13			
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu			233	215	208	201	193	196		187	96	111			
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)			0	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72		0,64	0,75	0,89			
4	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	80	82,5	85	87,5	90		85	82,6	86,94			
IKK																
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk										0,16%	1,07%	0,76%			
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi										100%	100%	100%			
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										91,96%	91,36%	88,64%			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										94,53%	95,46%	89,38%			
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										97,24%	93,13%	90,82%			
6	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar										84,39%	87,66%	86,35%			
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100,00%	99,01%	98,62%			
8	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar										91,94%	94,24%	92,96%			
9	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar										90,59%	90,24%	86,47%			
10	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100,00%	100,00%	100,00%			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										100,00%	100,00%	100,00%			
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar										100,84%	100,00%	100,00%			
13	Presentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar										138,38%	100,00%	100,00%			
14	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar										108,98%	100,00%	100,00%			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2.3. Faktor-faktor penghambat upaya pencapaian kinerja

a. Kondisi geografis sehingga menghambat masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan tertentu sehingga upaya pencapaian program dan SPM belum bisa berjalan optimal. Selain ketersediaan SDM, kompetensi SDM yang adapun masih kurang khususnya petugas puskesmas pembantu;
c. Intergrasi antar lintas sektor, antar lintas Program dan jaringannya dan jejaring belum berjalan maksimal;
d. Jumlah sasaran yang besar serta tingginya target yang harus dicapai belum sebanding dengan sumber daya yang tersedia; dan
e. Keterlibatan *stakeholder* dan lintas sektor belum berjalan secara maksimal dalam pelaksanaan Program kesehatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan upaya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada saat ini sudah dilaksanakan melalui program kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
2. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
3. Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi;
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti : penduduk miskin, lansia, dan masyarakat marginal lainnya;
6. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh, terutama stunting;
7. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta pendistribusian sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi kesehatan;
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, Program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
10. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan urban-rural masih terjadi dan belum terjadi perbaikan secara signifikan. Sehingga perlu pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah;
11. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal, termasuk pembudayaan gerakan masyarakat sehat;
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dalam lingkungan yang sehat dan berPHBS;
13. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi, untuk menunjang Program Indonesia Sehat dan pendekatan Keluarga (PIS-PK);
14. Ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang terbatas; dan
15. Pengaturan terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta belum baik.

2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD

Dengan memperhatikan rancangan awal RKPD yang ada dengan kebutuhan yang diperlukan, terlihat bahwa masih sejalan dengan Program, kegiatan dan target yang ingin dicapai, secara Program sudah mengakomodir semua program namun secara kegiatan perlu adanya pemecahan atau penambahan sub kegiatan sehingga target *output* bisa lebih terukur.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				331.372.153.116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.327.442.538.847	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01 Nilai	198.184.403.116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01 Nilai	884.010.047.948	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Dokumen	975.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	225.000.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp50.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						RSUD ABADI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkanBidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkanBidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	133.951.759.157	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	100 Laporan	463.974.476.593	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3512 Orang /bulan	132.592.111.017	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3512 Orang /bulan	260.347.398.940	Gaji dan Tunjangan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD AM PARIKESIT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		117.062.833.902	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46.419.893.228	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38.528.078.570	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD AM. IDRIS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	450.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	909.648.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	750.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD AM PARIKESIT	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	300.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	181.271.953	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	260.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Laporan	350.000.000	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	150.000.000	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	200.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	100.000.000	
1.02.01.2.04						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000	
1.02.01.2.04.0001						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.04.0007						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.075.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Dokumen	950.000.000	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	175.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahanan Administrasi Kepegawai	1 Dokumen	200.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahanan Administrasi Kepegawai	1 Dokumen	100.000.000	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	100.000.000	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	800.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	250.000.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	50.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.700.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Layanan	2.552.639.814	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	100.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	100.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket	150.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
							RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	175.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	950.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	350.139.814	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	450.000.000	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	350.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	100.000.000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	52.500.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	500.000.000	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2.500.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	500.000.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1.500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	10.260.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 bulan	54.146.383.705	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	10.000.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.750.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	6.200.000.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	1.800.000.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	150.000.000	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	8.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	5.828.666.116	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD AM PARIKESIT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.429.899.949	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.069.044.120	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13.449.023.520	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas lapangan, Pembayaran pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	100 Persen	1.245.749.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas lapangan, Pembayaran pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	100 Unit	9.350.000.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	500.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1.200.000.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	300.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	645.749.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.000.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	500.000.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	35 Unit Kerja	40.501.894.959	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	35 Unit Kerja	351.191.547.836	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	40.501.894.959	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	351.191.547.836	Infrastruktur
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Badak Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.165.679.685	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Badak Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.165.679.685	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Handil Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.125.962.995	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Handil Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.125.962.995	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jonggon Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	779.839.649	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jonggon Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	779.839.649	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kahala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	704.288.268	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kahala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	704.288.268	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kembang Janggut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.083.387.641	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kembang Janggut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.083.387.641	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bangun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.707.785.108	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bangun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.707.785.108	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Duri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.324.812.859	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Duri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.324.812.859	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Ipuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.781.265.706	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Ipuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.781.265.706	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Kulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.960.969.720	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Kulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.960.969.720	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Mangkuraw ang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.580.267.404	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Mangkuraw ang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.580.267.404	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Jawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.887.494.476	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Jawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.887.494.476	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Muntai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	907.795.797	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Muntai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	907.795.797	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Perangat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	623.922.984	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Perangat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	623.922.984	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rapak Mahang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.393.725.387	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rapak Mahang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.393.725.387	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rimba Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.144.947.379	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rimba Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.144.947.379	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samboja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.966.472.844	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samboja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.966.472.844	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sanga Sanga	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.260.143.115	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sanga Sanga	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.260.143.115	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sebulu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.911.942.195	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sebulu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.911.942.195	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sungai Mariam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.835.593.280	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sungai Mariam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.835.593.280	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Teluk Dalam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.301.203.875	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Teluk Dalam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.301.203.875	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	377.593.767	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	377.593.767	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ritan Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.411.275	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ritan Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.411.275	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Janan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.635.115.493	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Loa Janan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.635.115.493	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Badak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.471.537.072	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Badak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.471.537.072	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Marang Kayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.483.118.994	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Marang Kayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.483.118.994	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Kaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.044.980.337	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Kaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	894.633.214	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Wis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	398.729.968	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Muara Wis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	398.729.968	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Batuah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	891.420.540	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Batuah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	891.420.540	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sungai Merdeka	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.008.358.809	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sungai Merdeka	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.008.358.809	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sebulu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.336.525.668	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sebulu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.336.525.668	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bunga Jadi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	885.010.812	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bunga Jadi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	885.010.812	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Separi III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	952.591.857	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Separi III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	952.591.857	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD AM PARIKESIT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	237.540.000.000	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12.000.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	61.300.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				130.125.750.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				429.827.490.899	
		Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	8,08 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	8,08 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	36,5 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	36,5 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	26,85 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	26,85 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84,5 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	83 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	83 Persen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase lanjut usia yang mandiri	77 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase lanjut usia yang mandiri	77 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	11,4 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	11,4 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan penemuan kasus TB	80 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan penemuan kasus TB	80 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	92 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	92 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Wasting pada balita	9 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Prevalensi Wasting pada balita	9 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Angka Kasus PD3I	6 Jumlah			Kab. Kutai Kartanegara	Angka Kasus PD3I	6 Jumlah		
		Kab. Kutai Kartanegara	Angka Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan	5385 Jumlah			Kab. Kutai Kartanegara	Angka Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan	5385 Jumlah		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	100 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	100 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	70 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	70 Persen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	80 Persen	29.019.500.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	80 Persen	224.305.292.749	
								Persentase Fssilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu.	100 Persen		
								Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Persen		
								Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan RSUD	100 Persen		
								persentasi puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan	100 Persen		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	2.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	-	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	5.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	11.300.000.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	11 Unit	2.000.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	11 Unit	9.575.922.000	Infrastruktur
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 Unit	5.500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	700.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	4.450.000.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.504.500.000	Pengembangan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	7.732.500.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	1.200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	1.500.000.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	1.200.000.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	600.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	300.000.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	55 Unit	5.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	55 Unit	11.935.532.000	Infrastruktur
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	3 Unit	500.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	3 Unit	500.000.000	Infrastruktur

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	501 Unit	550.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	501 Unit	400.000.000	Infrastruktur
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	500.000.000	
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	3.500.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	60.000.000.000	Infrastruktur

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Rumah Sakit					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD AM PARIKESIT	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	92.446.338.749	
	Pengembangan Rumah Sakit					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	200.000.000	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	110 Paket	5.000.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	110 Paket	16.000.000.000	Infrastruktur

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	174980 Keluarga	465.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	174980 Keluarga	765.000.000	Program Keluarga Peduli Kesehatan; Konfergensi Penanganan Stunting
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				97.981.250.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				204.190.198.150	
		Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	100 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Persalinan di tolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	96 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase KB Aktif	70 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase K4	92 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	95 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase remaja puteri mendapat TTD	80 Persen		
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS	92 Persen		
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana	82,5 Persen		
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase ASI Eksklusif	65 Persen		
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase KK Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	100 Persen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Sarana Air Minum dilakukan pengawasan sesuai standar	84 Persen		
							Kab. Kutai Kartanegara	Persentase RS, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya KesehatanMayarakat sesuai dengan standar	100 Persen		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13990 Orang	2.500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13990 Orang	2.296.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13354 Orang	1.000.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13354 Orang	1.038.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12718 Orang	256.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12718 Orang	336.850.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64561 Orang	205.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64561 Orang	458.319.000	SPM Bidang Kesehatan; Penunjang Penurunan Stunting
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	147205 Orang	410.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	147205 Orang	473.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552234 Orang	600.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552234 Orang	270.000.000	SPM Bidang Kesehatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56576 Orang	410.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56576 Orang	724.880.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61846 Orang	525.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61846 Orang	400.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17748 Orang	525.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17748 Orang	834.040.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	925 Orang	650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	925 Orang	445.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18688 Orang	650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18688 Orang	1.805.000.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21134 Orang	650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21134 Orang	742.500.000	SPM Bidang Kesehatan;
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	32 Dokumen	450.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	32 Dokumen	185.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	32 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	32 Dokumen	150.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	1.500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	8.700.000.000	Penanganan Stunting
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	180.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	200.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	1.000.000.000	Penanganan Stunting
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000	Penanganan Stunting
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	32 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	32 Dokumen	200.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45 Dokumen	450.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	206102 Orang	450.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	206102 Orang	300.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	342 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	342 Orang	50.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	200.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28 Dokumen	43.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28 Dokumen	103.474.324.800	Program Nasional
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	64 Paket	120.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	64 Paket	120.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	50.000.000	Penunjang SPM Bidang Kesehatan dan Penanganan Stunting
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.000.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	43.800.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen	32.000.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen	31.944.284.350	Penunjang SPM Bidang Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Badak Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Badak Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Batuah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	638.581.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Batuah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	638.581.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Handil Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Handil Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jonggon Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	938.705.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jonggon Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	938.705.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kahala	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kahala	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kota Bangun	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.254.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kota Bangun	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.254.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Duri	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Duri	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Janan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	809.534.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Janan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	809.534.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Kulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Kulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mangkuraw ang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mangkuraw ang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Marangkayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	928.073.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Marangkayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	928.073.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Badak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Badak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Jawa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Jawa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Kaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.277.162.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Kaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.221.446.350	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Muntai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Muntai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Wis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Wis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perangat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perangat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rapak Mahang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rapak Mahang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.348.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ritan Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ritan Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Samboja	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Samboja	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	851.441.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	922.395.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	803.220.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	803.220.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Separi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	919.790.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Separi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	919.790.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Mariam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Mariam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.206.208.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.349.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	993.349.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.064.302.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.135.255.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	750.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	350.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	36 Unit	500.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	36 Unit	250.000.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	150.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	30.000.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	500.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	500.000.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang	150.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang	900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	725 Orang	150.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	725 Orang	810.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	150.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	53.000.000	
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	50.000.000	
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	100.000.000	
1 02 02 2.02 .48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	300.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	100 Persen	1.200.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	100 Faskes	207.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	32 Dokumen	1.200.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	32 Dokumen	207.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	100 Persen	1.625.000.000	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	100 Persen	1.125.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	157 Unit	350.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	157 Unit	350.000.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	1.000.000.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	500.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	31 Dokumen	275.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	31 Dokumen	275.000.000	
1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas	100 Persen	300.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas	100 Persen	-	
1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	32 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	32 Dokumen	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 Persen	1.650.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 Persen	4.350.000.000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1/1000				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1/1000		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	100 Persen				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	100 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100 Persen				Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100 Persen		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiiliki Izin Praktik/Kerja	100 izin	350.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiiliki Izin Praktik/Kerja	100 izin	350.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	350.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	350.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun	1 persen	950.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun	1 persen	3.500.000.000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Buku Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	350.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Buku Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	3.250.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	500.000.000	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	150.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	100 orang	350.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	100 orang	500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahSumberDayaManusiaKesehatanTingkatDaerahKabupaten/KotayangDitingkatkanMutu dan Kompetensinya	150 Orang	350.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahSumberDayaManusiaKesehatanTingkatDaerahKabupaten/KotayangDitingkatkanMutu dan Kompetensinya	150 Orang	500.000.000	Peningkatan Pendidikan SDM Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 persen	750.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 persen	730.000.000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	72 persen				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	72 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	76 persen				Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	76 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	76 persen				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	76 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	91 persen				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	91 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 persen				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 Persen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Jumlah sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	100 persen	150.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Jumlah sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	100 persen	80.000.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen	80.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	100 sertifkat	150.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	100 sertifkat	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	170 Dokumen	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	170 Dokumen	75.000.000	Penunjang Penanganan Stunting
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Sertifikat Sanitasi Laik Higiene yang dilakukan pengawasan	100 Persen	150.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Sertifikat Sanitasi Laik Higiene yang dilakukan pengawasan	100 Persen	250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.04.01	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasanserta TindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	990 Dokumen	150.000.000	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasanserta TindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	990 Dokumen	250.000.000	Penunjang Penanganan Stunting
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	100 Persen	150.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	100 Persen	250.000.000	
1.02.04.2.05.01	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindakLanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	266 Dokumen	150.000.000	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindakLanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	266 Dokumen	250.000.000	Penunjang Penanganan Stunting

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	100 Persen	150.000.000	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	100 Persen	75.000.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	55 Unit	150.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	55 Unit	75.000.000	Penunjang Penanganan Stunting
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif)	35 Persen	662.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif)	35 Persen	8.525.000.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 Persen	250. 000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 Persen	6.900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	250.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	5.400.000.000	Penunjang Penanganan Stunting
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD DAYAKU RAJA	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	1.500.000.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	2 Persen	150.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	2 Persen	300.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	300.000.000	Penunjang Penanganan Stunting
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kader posyandu strata madya	20 Persen	262.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kader posyandu strata madya	20 Persen	1.325.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	262.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1.325.000.000	Peningkatan pendidikan kader posyandu dan Penunjang Penanganan Stunting
					331.372.153.116					1.327.442.538.847	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan yang bersifat kuratif medik, perbaikan dan peningkatan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, bantuan-bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, seperti perbaikan gizi, penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat, termasuk juga pemagaran sarana kesehatan dan pavingisasi halaman.

Pada Rancangan Awal Renja ini belum memuat usulan dari masyarakat, karena belum adanya data yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan proses Musrenbang yang baru akan dilaksanakan.

TC-3.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Sangkuliman, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Prioritas : Pengadaan dilaksanakan di tahun ini dari usulan anggaran wakil Bupati ke Dinkes, teralokasi untuk pengadaan ambulance desa Sangkuliman Kec. Kota Bangun
		Desa Karya Jaya, Kec. Samboja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Prioritas : Pengadaan dilaksanakan di tahun ini dari usulan anggaran wakil Bupati ke Dinkes, teralokasi untuk pengadaan ambulance desa Karya Jaya, Kec. Samboja
		Desa Senoni Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Prioritas : Pengadaan tahun ini melalui dana Pokir Anggota DPRD ke Dinkes, teralokasi untuk pengadaan ambulance desa Senoni Kecamatan Sebulu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Beloro Dusun Ngadang, Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Prioritas : Pengadaan Tahun ini dari usulan anggaran wakil Bupati ke Dinkes, teralokasi untuk pengadaan ambulance desa Beloro Dusun Ngadang, Kecamatan Sebulu
		Kec. Anggana, Kec. Kembang Janggut, Kec. Kota Bangun, Kec. Kota Bangun Darat, Kec. Loa Janan, Kec. Loa Kulu. Kec. Marangkayu, Kec. Muara Badak, Kec. Muara Jawa, Kec. Muara Kaman, Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Samboja, Kec. Sanga-Sanga Kec. Sebulu , Kec. Tenggarong, dan Kec. tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit	Belum Prioritas : Saat ini pemenuhan kebutuhan pengadaan ambulance masih diperuntukkan untuk kebutuhan RS, puskesmas dan puskesmas pembantu, untuk keperluan rujukan dan pelayanan bisa berkoordinasi dengan puskesmas/puskesmas pembantu setempat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	desa sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Super Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Prioritas Catatan : Akan di Alokasikan dan Dilaksanakan Tahun 2025
		Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Prioritas Catatan : Akan di Alokasikan dan Dilaksanakan Tahun 2026
		Dusun Giri Mulya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Suka Damai, Dusun Gunung Mekar, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Prioritas Catatan : Dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Kelurahan Dondang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review dan perlu kajian kelayakan, karena sudah ada Pusban disekitarlokasi
		Desa Menamang Kiri, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Kesehatan Lainnya yang Dibangun		dilaksanakan Tahun 2026
		Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan di Alokasikan dan Dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Tani Baru Muara Ilo Selatan RT 17, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Loa Sakoh RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Kelekat,RT.004. Kabupaten Kutai Kartanegara,Kecamatan Kembang Janggut., Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Sangkuliman, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Dikerjakan di Murni Tahun 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Liang Jl, Panglima Suta Kanan RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review aset, apakah sudah menjadi milik Dinas Kesehatan
		DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Suka Bumi RT 05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review keberadaan Pusban, bangunan sudah pernah direhab dan tidak ditempati, petugas bekerja di tempat lama
		Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review keberadaan Pusban, bangunan sudah pernah direhab dan tidak ditempati, petugas bekerja di tempat lama
		Kota Bangun II (Lokasi Markas PMI Puskesmas Rimba Ayu), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review keberadaan Pusban terkait dengan PMI (Bukan aset Dinkes)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Purwajaya Dusun Mekar Beringin Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Dikerjakan Tahun 2025
		Loa Duri Ulu RT.16 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Jembayan Tengah Jalan Habib Tunggang Parangan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Pangempang RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Tanjung limau PUSKESMAS MUARA BADAK, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Tanah Datar RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Dikerjakan tahun 2025
		Desa Sungai Bawang jln.anyeq apui, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Review keberadaan Pusban dan studi pendahuluan
		Desa Sungai Bawang jln.anyeq apui, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Dikerjakan Tahun 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Kelurahan Muara Jawa Ilir Jl. Pelita Handil 8 RT.0120, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Muara Jawa Ilir RT.020 Jl. Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		desa teratak RT.004 kec.muara kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Perian RT 009, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : akan dilakukan studi kelayakan terkait pembangunan puskesmas baru
		Desa Muara Leka Rt.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		DESA SEBEMBAN RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Sanipah RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Bukit Merdeka Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Pusban Kel. Jawa Jl. Diponegoro RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Sanga Sanga Muara RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Rehab Polindes Ngadang RT 012, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : Bukan kewenangan Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Selerong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Selerong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		Desa Tanjung Batu RT. 04 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Separi, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Desa Loa Sakoh RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Rencana dikerjakan pada APBD P 2025
		RT.08 Dusun Pulau Yupa, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Belum Prioritas Catatan : bukan kewenangan dinas kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Desa Muara Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		Tanjung Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Super Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026
		DUSUN HANDIL PANGULU RT 3 DESA SANTAN ILIR , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Prioritas Catatan : Akan dialokasikan dan dilaksanakan Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan misi pembangunan pertama dan kedua yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

   Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sesuai dengan misi pertama pembangunan yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah dengan indikator :

   a. predikat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   b. indeks kepuasan masyarakat; dan
   c. indeks partisipasi masyarakat.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

   Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sesuai dengan misi kedua pembangunan yaitu Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :

   a. angka harapan hidup
   b. angka kematian ibu melahirkan
   c. angka kematian bayi

3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah. Meningkatnya kerjasama *coorporate social responsibility* (CSR) dalam pembangunan Daerah, dengan indikator cakupan fasilitasi CSR.

Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara 2025 s/d 2029 adalah :

“terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan”

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:

1. terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 yang ditetapkan adalah sejalan dengan pembangunan kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

A. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Tujuan Renstra yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan lima tahun ke depan, dengan mengacu pada kewenangan yang telah diatur dalam RPJMD.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029:
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indikator Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029:
Usia Harapan Hidup.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B. Sasaran.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029:
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN
			2025
1	2	3	4
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		**Usia Harapan Hidup**	**74,3**
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan khususnya ibu dan anak	**Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)**	**15**
		Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	**185**
		Prevalensi Status Gizi Balita Stunting	**141**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87,5**

Indikator Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak
1. Jumlah Kematian Ibu (AKI)
2. Jumlah Kematian Balita
3. Prevalensi Status Gizi Balita Stunting

Indikator Sasaran 3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat provinsi dan Musrenbang tingkat nasional, Rencana Kerja yang dibuat mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumber daya yang ada.

Rencana pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2026 yang dilakukan disesuaikan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam Program dan kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) Program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 168 (seratus enam puluh delapan) subkegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan;
   2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan 3 (tiga) subkegiatan;
   3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan;
   4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah aparatur dengan 6 (enam) subkegiatan;
   5. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan 8 (delapan) subkegiatan;
   6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan 3 (tiga) subkegiatan;
   7. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 4 (empat) subkegiatan;
   8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 4 (empat) subkegiatan; dan
   9. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dengan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota upaya kesehatan masyarakat dengan 14 (empat belas) subkegiatan;
   2. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota dengan 68 (enam puluh delapan) subkegiatan;
   3. Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dengan 1 (satu) subkegiatan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan 3 (tiga) subkegiatan; dan
5. Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan 1 (satu) subkegiatan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten /kota dengan 1 (satu) subkegiatan;
2. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota dengan 3 (tiga) subkegiatan; dan
3. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) subkegiatan.

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan 1 (satu) subkegiatan;
2. Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga dengan 1 (satu) sub kegiatan;
3. penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan dengan 1 (satu) subkegiatan;
4. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga dengan 1 (satu) subkegiatan; dan
5. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga dengan 1 (satu) subkegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

E. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota dengan 1 subkegiatan;
2. Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) subkegiatan; dan
3. Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tingkat daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) subkegiatan.

c. Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja.

Pada penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2026 tidak ada subkegiatan baru.

d. Rencana program dan Kegiatan

Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini adalah kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja bidang kesehatan, terutama IKU, SDG's, SPM dan target-target RPJMD dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati dan Pemerintah Daerah. Untuk lebih lengkap rumusan rencana Program dan kegiatan yang memuat program dan kegiatan untuk semua sumber dana, dapat dilihat pada tabel yang kami sajikan dibawah ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.327.442.538.847	APBD			Rp2.238.392.884.469
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	80 Nilai	884.010.047.948	APBD		80 Nilai	Rp961.394.668.049
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	975.000.000	APBD		100 Persen	Rp2.000.000.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	225.000.000	APBD		9 Dokumen	Rp800.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	6 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	Rp350.000.000
1.02.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	4 Laporan	Rp50.000.000	APBD			
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	Rp500.000.000
1.02.01.2.01.08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	100.000.000				
1.02.01.2.01.09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000
1.02.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	250.000.000	APBD		1 Data	Rp250.000.000
1.02.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkanBidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	Rp50.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	463.974.476.593	APBD		100 Persen	Rp478.938.688.320
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	3512 Orang /bulan	260.347.398.940	APBD		3512 Orang /bulan	Rp475.954.040.180
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD AM PARIKESIT		117.062.833.902				
1.02.01.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI		46.419.893.228				
1.02.01.2.02.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD DAYAKU RAJA		38.528.078.570				
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	Rp850.000.000
1.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	20 Laporan	750.000.000	APBD		20 Laporan	Rp2.109.648.140
1.02.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD AM PARIKESIT	1 Laporan	300.000.000	APBD			
1.02.01.2.02.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	181.271.953	APBD			
1.02.01.2.02.10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD ABADI	3 Laporan	260.000.000	APBD			
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	1 Laporan	Rp25.000.000	APBD		1 Laporan	Rp25.000.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	350.000.000	APBD		100 Persen	Rp950.000.000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	6 Laporan	150.000.000	APBD		7 Laporan	Rp650.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	1 Laporan	50.000.000	APBD			
1.02.01.2.03.07	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD			
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	Rp300.000.000
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	Rp20.000.000				Rp20.000.000
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	Rp10.000.000				Rp10.000.000
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	Rp10.000.000				Rp10.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	950.000.000	APBD		100 Persen	4.380.000.000
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	-	APBD		35 Unit	Rp150.000.000
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RSUD ABADI	0 Paket	-	APBD		0 Paket	Rp300.000.000
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahanan Administrasi Kepegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp200.000.000
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp350.000.000
1.02.01.2.05.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	2 Dokumen	50.000.000				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100.000.000	APBD		4	Dokumen	Rp350.000.000
1.02.01.2.05.06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	2	Dokumen	50.000.000					
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	150	Orang	250.000.000	APBD		250	Orang	Rp2.480.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD DAYAKU RAJA	50	Orang	250.000.000					
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	25	Orang	-	APBD		25	Orang	Rp50.000.000
1.02.01.2.05.11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD DAYAKU RAJA	25	Orang	50.000.000					
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Orang	-	APBD		90	Orang	Rp500.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	2.552.639.814	APBD		100	Persen	Rp5.152.500.000
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12	Paket	100.000.000	APBD		12	Paket	Rp250.000.000
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	11	Paket	100.000.000	APBD				
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2	Paket	200.000.000	APBD		2	Paket	Rp750.000.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DINKES						1	Paket	Rp350.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	1 Paket	200.000.000			1 Paket	Rp200.000.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSUD AM PARIKESIT					1 Paket	Rp200.000.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	RSUD AM PARIKESIT					1 Paket	Rp400.000.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	30 Paket	100.000.000			1 Paket	Rp300.000.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	200.000.000	APBD		2 Paket	Rp450.000.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	5000 Paket	150.000.000				
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	200.000.000	APBD		2 Paket	Rp540.000.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	12 Paket	150.000.000				
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	Rp200.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	14 Laporan	350.139.814	APBD		15 Laporan	Rp1.700.000.000
1.02.01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	30 Laporan	100.000.000				
1.02.01.2.06.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	12 bulan	450.000.000				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100.000.000	APBD		2	Dokumen	Rp462.500.000
1.02.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RSUD DAYAKU RAJA	1	Dokumen	52.500.000					
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	500.000.000	APBD		100	Persen	14.500.000.000
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-	APBD		0	Unit	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-	APBD		5	Unit	Rp2.000.000.000
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	4	Unit	500.000.000	APBD		0	Unit	Rp8.500.000.000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara						4	Unit	Rp500.000.000
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	RSUD AM PARIKESIT						1	Unit	Rp8.000.000.000
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-	APBD		120	Unit	Rp4.000.000.000
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara						120	Unit	Rp1.000.000.000
1.02.01.2.07.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA						100	Unit	Rp1.000.000.000
1.02.01.2.07.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RSUD AM PARIKESIT						2	Unit	Rp2.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	54.146.383.705	APBD		100 100	77.593.784.770
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	13 Laporan	10.000.000	APBD		13 Laporan	Rp19.750.000
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	9.750.000				
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	6.200.000.000	APBD		27 Laporan	Rp12.200.000.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	1.000.000.000				
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD ABADI	13 Laporan	1.800.000.000				
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	13 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	Rp450.000.000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	200.000.000				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	14 Laporan	5.828.666.116	APBD		14 Laporan	Rp64.924.034.770
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD AM PARIKESIT	1 Laporan	19.429.899.949				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD DAYAKU RAJA	12 Laporan	6.069.044.120				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD ABADI	13 Laporan	13.449.023.520				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas lapangan, Pembayaran pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	9.350.000.000	APBD		100 Persen	Rp9.790.000.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	7 Unit	250.000.000	APBD		93 Unit	Rp650.000.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	RSUD DAYAKU RAJA	1 Unit	100.000.000				
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara	7 Unit	150.000.000	APBD		43 Unit	Rp1.870.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RSUD DAYAKU RAJA	16 Unit	500.000.000				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	18 Unit	150.000.000	APBD		12 Unit	Rp2.020.000.000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RSUD DAYAKU RAJA	12 Unit	1.200.000.000				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RSUD ABADI	1 Unit	300.000.000				
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	4 Unit	1.000.000.000	APBD		7 Unit	Rp4.750.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSUD DAYAKU RAJA	12 Unit	500.000.000			12	Rp500.000.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSUD ABADI	1 Unit	5.200.000.000				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	Kab. Kutai Kartanegara	35 Unit Kerja	351.191.547.836	APBD		36 Unit Kerja	368.069.694.959
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Kutai Kartanegara	35 Unit Kerja	351.191.547.836	APBD		36 Unit Kerja	40.501.894.959
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Badak Baru	1 Unit Kerja	1.165.679.685	APBD		1 Unit Kerja	1.165.679.685
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Handil Baru	1 Unit Kerja	1.125.962.995	APBD		1 Unit Kerja	1.125.962.995
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jonggon Jaya	1 Unit Kerja	779.839.649	APBD		1 Unit Kerja	779.839.649
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kahala	1 Unit Kerja	704.288.268	APBD		1 Unit Kerja	704.288.268
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kembang Janggut	1 Unit Kerja	1.083.387.641	APBD		1 Unit Kerja	1.083.387.641
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bangun	1 Unit Kerja	1.707.785.108	APBD		1 Unit Kerja	1.707.785.108
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Loa Duri	1 Unit Kerja	1.324.812.859	APBD		1 Unit Kerja	1.324.812.859
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Loa Ipuh	1 Unit Kerja	1.781.265.706	APBD		1 Unit Kerja	1.781.265.706
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Loa Kulu	1 Unit Kerja	1.960.969.720	APBD		1 Unit Kerja	1.960.969.720
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mangkurawang	1 Unit Kerja	1.580.267.404	APBD		1 Unit Kerja	1.580.267.404
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Muara Jawa	1 Unit Kerja	1.887.494.476	APBD		1 Unit Kerja	1.887.494.476

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Muara Muntai	1 Unit Kerja	907.795.797	APBD		1 Unit Kerja	907.795.797
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Perangat	1 Unit Kerja	623.922.984	APBD		1 Unit Kerja	623.922.984
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Rapak Mahang	1 Unit Kerja	2.393.725.387	APBD		1 Unit Kerja	2.393.725.387
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Rimba Ayu	1 Unit Kerja	1.144.947.379	APBD		1 Unit Kerja	1.144.947.379
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Samboja	1 Unit Kerja	1.966.472.844	APBD		1 Unit Kerja	1.966.472.844
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sanga Sanga	1 Unit Kerja	1.260.143.115	APBD		1 Unit Kerja	1.260.143.115
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sebulu II	1 Unit Kerja	1.911.942.195	APBD		1 Unit Kerja	1.911.942.195
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sungai Mariam	1 Unit Kerja	1.835.593.280	APBD		1 Unit Kerja	1.835.593.280
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Teluk Dalam	1 Unit Kerja	1.301.203.875	APBD		1 Unit Kerja	1.301.203.875
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tabang	1 Unit Kerja	377.593.767	APBD		1 Unit Kerja	377.593.767
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Ritan Baru	1 Unit Kerja	569.411.275	APBD		1 Unit Kerja	569.411.275
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Loa Janan	1 Unit Kerja	1.635.115.493	APBD		1 Unit Kerja	1.635.115.493
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Muara Badak	1 Unit Kerja	1.471.537.072	APBD		1 Unit Kerja	1.471.537.072
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Marang Kayu	1 Unit Kerja	1.483.118.994	APBD		1 Unit Kerja	1.483.118.994
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Muara Kaman	1 Unit Kerja	894.633.214	APBD		1 Unit Kerja	1.044.980.337
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Muara Wis	1 Unit Kerja	398.729.968	APBD		1 Unit Kerja	398.729.968

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Batuah	1 Unit Kerja	891.420.540	APBD		1 Unit Kerja	891.420.540
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sungai Merdeka	1 Unit Kerja	1.008.358.809	APBD		1 Unit Kerja	1.008.358.809
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sebulu I	1 Unit Kerja	1.336.525.668	APBD		1 Unit Kerja	1.336.525.668
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bunga Jadi	1 Unit Kerja	885.010.812	APBD		1 Unit Kerja	885.010.812
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Separi III	1 Unit Kerja	952.591.857	APBD		1 Unit Kerja	952.591.857
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		RSUD AM. PARIKESIT	2 Unit Kerja	237.540.000.000			1 Unit Kerja	Rp254.167.800.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		RSUD ABADI	1 Unit Kerja	12.000.000.000			1 Unit Kerja	Rp61.400.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		RSUD DAYAKU RAJA	1 Unit Kerja	61.300.000.000			1 Unit Kerja	Rp12.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		RSUD AM. IDRIS					1 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				429.827.490.899	APBD		100	1.260.065.216.420
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Kab. Kutai Kartanegara	8,08 Persen				8,08 Persen	
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	36,5 Persen				36,5 Persen	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Kab. Kutai Kartanegara	26,85 Persen				26,85 Persen	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				85 Persen	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	84,5 Persen				85,5 Persen	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Kab. Kutai Kartanegara	85 Persen				89 Persen	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				100 Persen	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Kab. Kutai Kartanegara	83 Persen				83 Persen	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				100 Persen	
		Persentase lanjut usia yang mandiri	Kab. Kutai Kartanegara	77 Persen				79 Persen	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Kab. Kutai Kartanegara	11,4 Persen				10,40% Persen	
		Cakupan penemuan kasus TB	Kab. Kutai Kartanegara	80 Persen				85 Persen	
		Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	Kab. Kutai Kartanegara	92 Persen				92 Persen	
		Prevalensi Wasting pada balita	Kab. Kutai Kartanegara	9 Persen				9 Persen	
		Angka Kasus PD3I	Kab. Kutai Kartanegara	6 Jumlah				6 Jumlah	
		Angka Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	5385 Jumlah				5385 Jumlah	
		Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				100 Persen	
		Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	Kab. Kutai Kartanegara	70 Persen				70 Persen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				224.305.292.749	APBD			992.727.191.420
		Persentase Fssilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu.	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen		APBD		100 Persen	
		Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen		APBD		100 Persen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan RSUD	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen		APBD		100 Persen	
		persentasi puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen		APBD		100 Persen	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit	-	APBD		0 Unit	Rp -
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	11.300.000.000	APBD	Infrastruktur	1 Unit	Rp13.000.000.000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	11 Unit	9.575.922.000	APBD	Infrastruktur	10 Unit	Rp12.200.000.000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	RSUD DAYAKU RAJA	4 Unit	5.500.000.000				
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	4.450.000.000	APBD	Infrastruktur	11 Unit	Rp4.300.000.000
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	7.382.500.000	APBD	Infrastruktur	1 Unit	Rp3.000.000.000
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD DAYAKU RAJA					1 Unit	Rp500.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		RSUD DAYAKU RAJA					1 Unit	Rp200.000.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	4 Unit	1.500.000.000	APBD	Infrastruktur	4 Unit	Rp2.500.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Kab. Kutai Kartanegara	4 Unit	1.200.000.000	APBD	Infrastruktur	4 Unit	Rp1.420.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Fasilitas Kesehatan Lainnya							
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	300.000.000	APBD	Infrastruktur	3 Unit	Rp1.850.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	55 Unit	12.285.532.000	APBD	Infrastruktur dan Penunjang SPM	255 Unit	Rp133.702.071.430
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	500.000.000	APBD	Infrastruktur	3 Unit	Rp250.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	501 Unit	400.000.000	APBD	Infrastruktur	576 Unit	Rp20.050.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD ABADI	1 Unit	500.000.000				

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	60.000.000.000	APBD	Infrastruktur	4 Unit	Rp772.290.119.990
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD AM PARIKESIT	1 Unit	92.446.338.749				
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD ABADI	1 Unit	200.000.000				
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	110 Paket	16.000.000.000	APBD	Infrastruktur, Penunjang SPM dan Penanganan Stunting	137 Paket	Rp27.000.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	174980 Keluarga	765.000.000	APBD	Program Keluarga Peduli Kesehatan; Konfergensi Penanganan Stunting	178.180 Keluarga	Rp465.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				204.190.198.150	APBD			Rp261.546.025.000
		Persentase Persalinan di tolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	96 Persen				97 Persen	
		Persentase K4	Kab. Kutai Kartanegara	92 Persen				93 Persen	
		Persentase remaja puteri mendapat TTD	Kab. Kutai Kartanegara	80 Persen				85 Persen	
		Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS	Kab. Kutai Kartanegara	92 Persen				94 Persen	
		Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana	Kab. Kutai Kartanegara	82,5 Persen				85 Persen	
		Persentase ASI Eksklusif	Kab. Kutai Kartanegara	65 Persen				70 Persen	
		Persentase KK Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				100 Persen	
		Persentase Sarana Air Minum dilakukan pengawasan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	84 Persen				90 Persen	
		Persentase RS, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya KesehatanMayarakat sesuai dengan standar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen				100 Persen	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	13990 Orang	2.296.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	14264 Orang	Rp2.850.000.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	13354 Orang	1.038.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	13615 Orang	Rp1.320.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	12718 Orang	336.850.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	12967 Orang	Rp370.550.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	64561 Orang	458.319.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan; Penunjang Penurunan Stunting	65826 Orang	Rp1.350.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	147205 Orang	473.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	150088 Orang	Rp477.700.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	552234 Orang	270.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	564482 Orang	Rp5.750.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	56576 Orang	724.880.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	57684 Orang	Rp902.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	61846 Orang	400.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	63217 Orang	Rp725.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	17748 Orang	834.040.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	18142 Orang	Rp1.575.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	925 Orang	445.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	945 Orang	Rp700.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	18688 Orang	1.805.000.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	15723 Orang	Rp4.580.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	21134 Orang	742.500.000	APBD	SPM Bidang Kesehatan;	23247 Orang	Rp1.231.175.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	32 Dokumen	185.000.000	APBD		32 Dokumen	Rp550.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	32 Dokumen	150.000.000	APBD		32 Dokumen	Rp450.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	20 Dokumen	8.700.000.000	APBD	Penanganan Stunting	21 Dokumen	Rp12.050.000.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	8 Dokumen	200.000.000	APBD		8 Dokumen	Rp650.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Dokumen	1.000.000.000	APBD	Penanganan Stunting	24 Dokumen	Rp5.500.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Penanganan Stunting	2 Dokumen	Rp865.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	32 Dokumen	200.000.000	APBD		32 Dokumen	Rp500.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	45 Dokumen	450.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	45 Dokumen	Rp1.600.000.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	206102 Orang	300.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	210139 Orang	Rp1.000.000.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	342 Orang	50.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	349 Orang	Rp200.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	200.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	12 Dokumen	Rp1.100.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	28 Dokumen	103.474.324.800	APBD	Program Nasional	28 Dokumen	Rp126.329.600.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Kutai Kartanegara	64 Paket	120.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	64 Paket	Rp140.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan dan Penanganan Stunting	1 Dokumen	Rp1.000.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	43.800.000.000	APBD		1 Dokumen	51.500.000.000
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		RSUD AJI MUHAMMAD IDRIS					1 Dokumen	45.000.000.000
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		RSUD AM PARIKESIT					1 Dokumen	6.500.000.000
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							1 Dokumen	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	32 Dokumen	31.944.284.350	APBD	Penunjang SPM Bidang Kesehatan	32 Dokumen	32.000.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Badak Baru	1 Dokumen	1.064.302.000	APBD		1 Dokumen	1.064.302.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Batuah	1 Dokumen	638.581.000	APBD		1 Dokumen	638.581.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bunga Jadi	1 Dokumen	1.135.255.000	APBD		1 Dokumen	1.135.255.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Handil Baru	1 Dokumen	1.206.208.000	APBD		1 Dokumen	1.206.208.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jonggon Jaya	1 Dokumen	938.705.000	APBD		1 Dokumen	938.705.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kahala	1 Dokumen	922.395.000	APBD		1 Dokumen	922.395.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kembang Janggut	1 Dokumen	1.206.208.000	APBD		1 Dokumen	1.206.208.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kota Bangun	1 Dokumen	1.135.254.000	APBD		1 Dokumen	1.135.254.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Duri	1 Dokumen	851.441.000	APBD		1 Dokumen	851.441.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Ipuh	1 Dokumen	851.441.000	APBD		1 Dokumen	851.441.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Janan	1 Dokumen	809.534.000	APBD		1 Dokumen	809.534.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Kulu	1 Dokumen	1.206.208.000	APBD		1 Dokumen	1.206.208.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mangkurawang	1 Dokumen	993.348.000	APBD		1 Dokumen	993.348.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Marangkayu	1 Dokumen	928.073.000	APBD		1 Dokumen	928.073.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Badak	1 Dokumen	922.395.000	APBD		1 Dokumen	922.395.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Jawa	1 Dokumen	993.348.000	APBD		1 Dokumen	993.348.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Kaman	1 Dokumen	1.221.446.350	APBD		1 Dokumen	1.277.162.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Muntai	1 Dokumen	1.206.000.000	APBD		1 Dokumen	1.206.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Wis	1 Dokumen	1.064.302.000	APBD		1 Dokumen	1.064.302.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perangat	1 Dokumen	851.441.000	APBD		1 Dokumen	851.441.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rapak Mahang	1 Dokumen	993.348.000	APBD		1 Dokumen	993.348.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu	1 Dokumen	851.441.000	APBD		1 Dokumen	851.441.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ritan Baru	1 Dokumen	922.395.000	APBD		1 Dokumen	922.395.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Samboja	1 Dokumen	851.441.000	APBD		1 Dokumen	851.441.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanga-Sanga	1 Dokumen	922.395.000	APBD		1 Dokumen	922.395.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu I	1 Dokumen	1.135.255.000	APBD		1 Dokumen	1.135.255.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu II	1 Dokumen	803.220.000	APBD		1 Dokumen	803.220.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Separi III	1 Dokumen	919.790.000	APBD		1 Dokumen	919.790.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Mariam	1 Dokumen	1.206.208.000	APBD		1 Dokumen	1.206.208.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Merdeka	1 Dokumen	993.349.000	APBD		1 Dokumen	993.349.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tabang	1 Dokumen	1.064.302.000	APBD		1 Dokumen	1.064.302.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Teluk Dalam	1 Dokumen	1.135.255.000	APBD		1 Dokumen	1.135.255.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	350.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp750.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	36 Unit	250.000.000	APBD		37 Unit	Rp750.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Kutai Kartanegara	6 Laporan	30.000.000	APBD		4 Laporan	Rp80.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	Rp800.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Orang	900.000.000	APBD		800 Orang	Rp150.000.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	725 Orang	810.000.000	APBD		855 Orang	Rp150.000.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	53.000.000	APBD	Hibah KPAD	75 Orang	Rp150.000.000
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp400.000.000
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp550.000.000
1 02 02 2.02 .48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp500.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	207.000.000	APBD		100 Persen	4.667.000.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	32 Dokumen	207.000.000	APBD		32 Dokumen	2.367.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		RSUD DAYAKU RAJA	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp100.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		RSUD ABADI	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp500.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		RSUD AM PARIKESIT	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp1.700.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	1.125.000.000	APBD		100	Unit	1.125.000.000
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara	157	Unit	350.000.000	APBD		125	Unit	Rp350.000.000
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	4	Unit	500.000.000	APBD		4	Unit	Rp500.000.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	31	Dokumen	275.000.000	APBD		31	Dokumen	Rp275.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	4.350.000.000	APBD		100	Persen	12.073.000.000
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Kab. Kutai Kartanegara	1/1000					1/1000		
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen				100	Persen	
		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen				100	Persen	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiiliki Izin Praktik/Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	350.000.000	APBD		100	Persen	350.000.000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	350.000.000	APBD		1	Dokumen	350.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Buku	3.500.000.000	APBD		1	Buku	1.300.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun							
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Buku Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	3.250.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp700.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	Rp500.000.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	100 orang	500.000.000	APBD		100 Persen	10.423.000.000
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	150 Orang	500.000.000	APBD	Peningkatan Pendidikan SDM Kesehatan	684 Orang	Rp10.423.000.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	730.000.000	APBD		100 Persen	1.060.000.000
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	72 persen				74 persen	
		Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	Kab. Kutai Kartanegara	76 persen				77 persen	
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Kab. Kutai Kartanegara	76 persen				77 persen	
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	91 persen				92 persen	

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen				100 persen	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Jumlah sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	80.000.000	APBD		100 Persen	220.000.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	85 Dokumen	80.000.000	APBD		90 Dokumen	220.000.000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	Kab. Kutai Kartanegara	100 sertifkat	75.000.000	APBD		100 Persen	190.000.000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	170 Dokumen	75.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	180 Dokumen	190.000.000
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Sertifikat Sanitasi Laik Higiene yang dilakukan pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	250.000.000	APBD		100 Persen	250.000.000

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.04.01	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasanserta TindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	990 Dokumen	250.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	1040 Dokumen	250.000.000
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	250.000.000	APBD		100 Persen	250.000.000
1.02.04.2.05.01	PengendaliandanPengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindakLanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	266 Dokumen	250.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	280 Dokumen	250.000.000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	75.000.000	APBD		100 Persen	150.000.000
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	55 Unit	75.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	60 Unit	Rp150.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	35 Persen	8.525.000.000	APBD		45 Persen	3.800.000.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	19 Persen	6.900.000.000	APBD		21 Persen	2.950.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	5.400.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	3 Dokumen	Rp2.950.000.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD DAYAKU RAJA	2 Dokumen	1.500.000.000				
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Kab. Kutai Kartanegara	2 Persen	300.000.000	APBD		2 Persen	300.000.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	300.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	2 Dokumen	300.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	Kab. Kutai Kartanegara	20 Persen	1.325.000.000	APBD		30 Persen	550.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.325.000.000	APBD	Penunjang Penanganan Stunting	1 Dokumen	550.000.000
					1.327.442.538.847				2.238.392.884.469

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas penbangunan bidang Kesehatan yang berpedoman pada Renstra tahun 2025-2029 dengan memperhatikan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Agenda Pembangunan SDG's *(Sustainable Development Goals)*.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut:

1. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
2. penurunan prevalensi stunting;
3. masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti TB paru, demam berdarah, dan penyakit menular iainnya yang harus dilakukan pengawasan secara lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini sehingga tidak menjadi wabah;
4. perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi; dan
5. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja ini, berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan Dinas Kesehatan dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Kaidah Pelaksanaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2026. Rencana Kerja merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam bidang Kesehatan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subjek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 dan Renja-PD tahun 2026, tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan Renstra tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan langkah awal penyusunan R-APBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan Renja-PD tahun 2026 yang menggambarkan keterkaitan Program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2026 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:
    a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan anggaran Program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup);
    b) Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2026, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/Daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;

c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas Pemerintah Daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; dan

d) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD tahun anggaran 2026 dari masing-masing PD, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan Daerah.

4. Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Rencana Kerja tahun 2026 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan Daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta Program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2026 wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2026 yaitu dengan menetapkan 5 (lima) Program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 174 (seratus tujuh puluh empat) sub kegiatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No

900.1.5.5-3406 Tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2026;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daeah (RKA/DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026; dan
3. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimana mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial merupakan PD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para PMKS.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun

berjalan.

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Dinas Sosial dan Rencana Kerja Dinas Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah beberapan kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
17. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
18. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With*

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata -4- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah abupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2043;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2043;
49. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah :

1. mengintegrasikan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dalam rencana strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan Program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
2. menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan; dan
4. terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan Program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.3 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial memuat penjelasan terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS SOSIAL berisikan masalah atau tantangan utama yang dihadapi oleh DINAS SOSIAL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yang meliputi aspek pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, koordinasi antar instansi, serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Isu-isu ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DINAS

SOSIAL, seperti pengelolaan anggaran, SDM, kebijakan, serta sistem pengawasan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD memuat penjelaskan tentang proses evaluasi, penelaahan, dan analisis terhadap rancangan awal RKPD oleh pihak terkait, baik internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal, untuk memastikan kesesuaian, kelayakan, dan keselarasan rancangan tersebut dengan tujuan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat memuat proses evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap usulan Program atau kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, untuk menilai kelayakan, kesesuaian, dan prioritas usulan tersebut dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Langka-langka penelaahan mulai dari verifikasi kelayakan usulan, analisis kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, evaluasi anggaran dan sumber daya, partisipasi masyarakat dan identifikasi potensi dampak sosial dan lingkungan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasionan memuat tentang proses sistematis dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat nasional guna menilai efektivitas, relevansi, dampak, serta implikasinya terhadap berbagai sektor dan kelompok masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah memuat rumusan tentang hasil akhir yang ingin dicapai dalam

satu tahun oleh perangkat daerah, bersifat umum, strategis, dan menjadi pedoman bagi kebijakan serta perencanaan daerah berdasarkan isu-isu strategis serta sasaaran yang merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang menjadi langkah konkret dalam mencapai tujuan, serta digunakan sebagai dasar dalam menyusun Program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan kata lain, tujuan memberikan arah kebijakan, sedangkan sasaran menerjemahkannya ke dalam target yang lebih konkret dan dapat diukur dalam pelaksanaan Program tahunan perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan memuat uraian garis besar mengenai Program dan kegiatan, meliputi :

- Jumlah Program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RENJA, baik jenis Program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Didalam Penutup memuat catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut .

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024 melalui analisis terhadap kinerja *output* dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja *output* akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran *output*.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu PD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

   Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2024 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Daerah. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengubahan perilaku PMKS dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 7 (tuhuh) Program yang meliputi:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanangan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; dan
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian program-program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD target 6 (enam) Dokumen; realisasi 6 (enam) Dokumen (100%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD target 12 (dua belas) Laporan; realisasi 12 (dua belas) Laporan (100%)
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 8 (delapan) Laporan; realisasi 8 (delapan) Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan PD

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 1.106 (seribu seratus enam) Orang/Bulan; realisasi 913 (sembilan ratus tiga belas) Orang/Bulan (82,55%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD target 12 (dua belas) Laporan; realiasi 12 (dua belas) Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD Target 4 (empat) Laporan; realisasi 3 (tiga) Laporan (75%)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada PD Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian target 2 (dua) Dokumen; realisasi 2 (dua) Dokumen (100%)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 157 (seratus lima puluh tujuh) Paket; realisasi 157 (seratus lima puluh tujuh) Paket (100%)
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan target 15 (lima belas) Orang; realisasi 15 (lima belas(Orang (100%)

Kegiatan : Administrasi Umum PD

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 5 (lma) Paket; realisasi 5 (lima) Paket (100%)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 20 (dua puluh) Paket; realisasi 20 (dua puluh) Paket (100%)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Taget 8 (delapan) Paket Realisasi 8 (delapan) Paket (100%)
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan target 4 (empat) Paket; Realisasi 4 (empat) Paket (100%)
5. Penyediaan Bahan/Material target 10 (sepuluh) Paket; realisasi 9 (sembilan) Paket (90%)
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD target 200 (dua ratus) Laporan; realisasi 121 (seratus dua puluh satu) Laporan (60,50%)
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD target 500 Dokumen; Realisasi 360 Dokumen (72%)
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada PD target 3 (tiga) Dokumen; realisasi 3 (tiga) Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel target 215 (dua ratus lima belas) Unit; realisasi 215 (dua ratus lima belas) Unit (100%)
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 200 (dua ratus) Unit; realisasi 200 Unit (100%)
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 2 (dua) Unit; realisasi 2 (dua) Unit (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 3 (tiga) Laporan; realisasi 3 (tiga) Laporan (100%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 12 (dua belas) Laporan; realisasi 12 (dua belas) Laporan (100%)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 12 (dua belas) Laporan; realisasi 12 (dua belas) Laporan (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 7 (tujuh) Unit; realisasi 7 (tujuh) Unit (100%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 29 (dua puluh sembilan) Unit; realisasi 29 (dua puluh sembilan) Unit (100%)
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 78 (tujuh puluh delapan) Unit; realisasi 78 (tujuh puluh delapan) Unit (100%)
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 5 (lima) Unit; realisasi 4 (empat) Unit (80%)
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 41 (empat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh satu) Unit; realisasi 41 (empat puluh satu) Unit (100%)

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang target 1 (satu) Dokumen; realisasi 1(satu) Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target 60 (enam puluh) Orang; realisasi 60 (enam puluh) Orang (100%)
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota target 20 (dua puluh) Orang; realisasi 20 (dua puluh) Orang (100%)
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Lembaga; realisasi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Lembaga (100%)
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) target 5 (lima) Sertifkat; realisasi 5 (lima) Sertifikat (100%)

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Kegiatan : Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

target 5 (lima) Orang; realisasi 12 (dua belas) Orang (240%).

d. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Sub Kegiatan :

1. penyediaan permakanan target 800 (delapan ratus) orang; realisasi 815 (delapan ratus lima belas) orang (101%).
2. penyediaan sandang target 200 (dua ratus) orang; realisasi 188 (seratus delapan puluh delapan) orang (94%).
3. penyediaan alat bantu target 150 (seratus lima puluh) orang; realisasi 90 orang (60%)
4. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target 50 (lima puluh) orang; realisasi 83 (delapan puluh tiga) orang (166%)
5. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial target 118 (seratus delapan belas) orang; realisasi 153 (seratus lima puluh tiga) orang (129 %).
6. pemberian layanan kedaruratan target 50 (lima puluh) orang; realisasi 25 (dua puluh lima) orang (50%)
7. pemberian layanan rujukan target 100 (saratus) orang; realisasi 100 (seratus) orang (100%)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan :

1. pemberian layanan kedaruratan target 75 (tujuh puluh lima) orang; realisasi 96 (sembilan puluh enam) orang (128%).
2. penyediaan permakanan target 200 (dua ratus) orang; realisasi 80 (delapan puluh) orang (40%)
3. penyediaan sandang target 200 (dua ratus) orang; realisasi 80 (delapan puluh) orang (40%)
4. penyediaan alat bantu target 20 (dua puluh) orang; realisasi 20 (dua puluh) orang (100%)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial target 100 (seratus) orang; realisasi 80 (dua puluh) orang (80%)
6. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target 100 (seratus) orang; realisasi 49 (empat puluh sembilan) orang (49%).
7. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota target 2 (dua) dokumen; realisasi 2 (dua) dokumen (100%).

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar target 25 Orang; realisasi 25 Orang (100%).

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) Orang; realisasi 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) Orang (100%).
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 40.919 (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) Keluarga; realisasi 40.919 (empa puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) Keluarga (100%).
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga target 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) KK; realisasi 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) KK (100%)
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat target 75 (tujuh puluh lima) Orang; realisasi 75 (tujuh puluh lima) Orang (100%)

f. Program Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan target 1.500 (seribu lima ratus) KK;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

realisasi 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) KK (156%); dan

2. Penyediaan Sandang target 1.500 (seribu lima ratus) KK; realisasi 1.946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) KK (129%)

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana target 4 (empat) Desa; realisasi 4 (empat) Desa (100%).
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana target 25 (dua puluh lima) Orang; realisasi 24 (dua puluh empat) Orang (96%).

g. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota target 2 (dua) Dokumen; realisasi 2 (dua) Dokumen (100%);
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota target 2 (dua) Makam; realisasi 2 (dua) Makam (100%)

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD tahun 2024 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial **Lembar : 1**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	92,45	81	67,46	83,28	82	85,00	80,31
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	40	28	6	6	100,00	2	36	90,00
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	120	72	12	12	100,00	12	96	80,00
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	18	8	4	4	100,00	4	16	88,89
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20	12	2	2	100,00	2	16	80,00
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	44	24	8	8	100,00	8	40	90,91
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial — Lembar : 2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	93,3	88	90	102,27	90	90	95,74
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	250	50	50	50	100,00	50	150	60,00
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	93,3	88	90	102,27	90	90	95,74
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial													Lembar : 3	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	7650	5568	1468	1439	98,02	1250	8257	107,93
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	1557	645	595	405	68,07	695	1745	112,07
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100	89,59	100	89,59	89,59	100	93,06	93,06
						Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99	94	96,6	97	100,41	98	96,33	97,31

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial — Lembar : 4

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25	25	25	25	100,00	25	25	100,00
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	20	4	4	4	100,00	4	4	20,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib bidang sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan Program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	78,00	79,00	81,00	82,00	84,00	83,48	92,45	67,49	82,00	82,50	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	SPM / IKK Outcome	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	SPM / IKK Outcome	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani PMKS yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebesar 97,68 % (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) dari target sebesar 97 % (sembilan puluh tujuh persen) atau tercapai 100,70% (seratus koma tujuh puluh persen). Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 dimana dari target pelayanan terhadap PMKS sebesar 96 % (sembilan puluh enam persen) tercapai sebesar 98,72% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) atau tingkat persentase 102,87% (seratus dua koma delapan puluh tujuh persen). Khusus untuk penanganan kelompok sasaran yang masuk dalam SPM terlayani 100 % (seratus persen) sama seperti pada tahun 2023 terlayani sebesar 100% (seratus persen). Namun dari jumlah kelompok sasaran yang harus dilayanani dan yang terlayani mengalam penurunan, dimana pada tahun 2023 jumlah PMKS yang ada dan yang terlayani sebanyak 15.188 (lima belas ribu koma seratus delapan puluh delapan) orang. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah PMKS yang harus dilayani dan yang terlayani tersisa sebanyak 6.462 (enam ribu empat ratus enam puluh dua) orang. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dan berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada PMKS tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel:

Identifikasi Permasalahan

Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingkat akurasi data yang masih rendah.
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingan-nya.	a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampinganya bagi fakir miskin belum tersedia anggarannya. b. Belum tersedia tenaga funsinoal pendamping sosial.
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosial fungsional
Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam konsisi rusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantar diluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Belum optimalnya peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial b. Kuantitas dan kualitas PSKS yang masih kurang

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memeiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berikut :

1. Perlunya *Updating* data pemerlu pelayanan terutama basis data terpadu yang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan;
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan; dan
4. Kurang tersedianya regulasi Daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum Program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan Program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan Program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
	Program Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS)	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi	Regulasi dan Program penguatan PSKS dari Kemensos maupun dinas sosial
	Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Kapasitas SDM internal yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas	Tenaga pendamping sosial terbatas atau tidak sesuai	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
			kualifikasi Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen Program sosial	
		Masih belum optimalnya peningkatan keberfungsian sosial secara menyeluruh	Belum optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi	Faktor individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, pendidikan dan keterampilan serta motivasi / kepercayaan diri
				Faktor keluarga dengan memberikan suport dan keharmonisan
				Faktor lingkungan sosial / masyarakat yang inklusif dan suportif serta nilai / norma sosial yang positif
		Belum tersedianya panti panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarkat
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data yang tidak akurat atau tidak mutakhir	Kendala geografis dan aksesibilitas wilayah	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat soal pentingnya DTKS	
		Kapasitas SDM internal yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen Program sosial kualifikasi	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen Program sosial	
		Belum meratanya bantuan sosial dan layanan jaminan sosial yang diberikan	Belum optimalnya koordinasi antara instansi / lembaga	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
	Program Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Masih sulitnya akses distribusi bantuan korban bencana	Akses geografis yang sulit	Kesiapan logistik pangan dan sandang
			Masih kurangnya kuantitas dan kualitas relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tersedianya relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Memperhatikan beberapa Program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja *(outcome)* dan Program yang disajikan. Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa Program, dipandang perlu juga untuk Program kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial agar terjadi pula keselarasan antara Program pemerintah pusat dan Daerah. Program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Adapun Program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

   Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasif, motovatif, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelnggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasarannya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran Program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompok rentan.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sasaran Program ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumber daya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 akan banyak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang diahadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan latihan fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis.

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial;
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
4. Kurangnya sinergi *stakeholders* dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan Program. Strategi ini sejalan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi IDAMAN TERBAIK. Adapun kebijakan dan Program tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

   Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program prioritas berikut ini :

   a. Program Pembinaan Anak Terlantar.

      Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

   b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

   c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

   Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program prioritas :

   a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

      Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan.
c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial.
d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030. Selanjutnya RKPD tahun 2026 dijabarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas Program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah termasuk PD di lingkup Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa Program prioritas pembangunan Daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak- hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan visi dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, prioritas nasional, prioritas provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2026 serta prospek tahun 2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**37.118.380.499**				**37.118.380.499**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	**15.387.210.499**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	**15.387.210.499**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Nilai SAKIP	75 Nilai	**600.000.000**		Tercapainya Nilai SAKIP	75 Nilai	**600.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	**12.413.587.375**		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	**12.413.587.375**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	12 Laporan	275.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	12 Laporan	275.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	15 Laporan	**200.000.000**		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	15 Laporan	**200.000.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	25.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	**150.000.000**		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	**150.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Waskat ASN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	100.000.000	Dalam rangka memenuhi target 20 JP per tahun bagi PNS
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	**424.357.200**		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	**424.357.200**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.110.200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.110.200	Lampu untuk kebutuhan Kantor, Aula, Gedung RTPC dan LBK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.247.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.247.000	Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makan Minum Beseprah, Makan dan Minum Pawai, Logistik Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Cetak Map Dinas, Lembar Disposisi
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Bahan Material Pameran, Pawai, dll

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**815.315.296**		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**815.315.296**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	565.315.296	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	565.315.296	P1 = Wajib dan Mengikat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	**783.950.628**		Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	**783.950.628**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.950.628	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.950.628	Mobil Dapur Umum 1 Unit, Trcuk. Pick Up dan Operasional Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50.000.000	Pemeliharaan service komputer, printer, dll
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	Pemeliharaan AC, Peralatan Kantor, Gedung, dll

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**		**7.058.800.000**		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	0	**7.058.800.000**	
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**					0		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	**75.000.000**		Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	**75.000.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	**6.983.800.000**		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	**6.983.800.000**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga	480.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga	480.000.000	Karang Taruna, LKS
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	79 Orang	868.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79 Orang	868.800.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	75.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga	4.466.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga	4.466.000.000	PUSKESSOS

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	944.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	944.000.000	PSM, PEKSOS, TKSK
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	150.000.000	
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah		Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	25 Lembaga	**0**		Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	25 Lembaga	**0**	
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	25 Lembaga	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		25 Lembaga	0	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan**	100 Persen	**25.000.000**		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	**25.000.000**	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100 Persen	**25.000.000**		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100 Persen	**25.000.000**	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	5 Orang	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	5 Orang	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	100 Persen	**5.693.370.000**		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 Persen	**5.693.370.000**	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
		Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas							
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	**5.118.370.000**		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	**5.118.370.000**	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	3.575.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	3.575.850.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	287.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	287.520.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	30 Orang	150.000.000		Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	30 Orang	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	595 Orang	**575.000.000**		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS	595 Orang	**575.000.000**	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	25 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	80 Persen	**3.904.000.000**		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	80 Persen	**3.904.000.000**	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi							
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin							
		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar							
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi							
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan							

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	**850.000.000**		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	**850.000.000**	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	850.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	850.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	**3.054.000.000**		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	**3.054.000.000**	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	119540 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	119540 Orang	200.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	30 Orang	250.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	2.504.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	500 Orang	2.504.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan	100.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persen	**1.550.000.000**		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persen	**1.550.000.000**	
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya							
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial							

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	**100 Persen**	**900.000.000**		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	**900.000.000**	
Penyediaan Makanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	500.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	**550.000.000**		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	**550.000.000**	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	350.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	350.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	**100.000.000**	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	**100.000.000**	
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	100 Persen	**3.500.000.000**		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 Persen	**3.500.000.000**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	**3.500.000.000**		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	**3.500.000.000**	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.150.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.150.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Perisitiwa Merah Putih
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam	350.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam	350.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Perisitiwa Merah Putih
				37.118.380.499				**37.118.380.499**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi di lapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 meliputi 7 (Tujuh) Program yang dilaksanakan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan, dan 76 (Tujuh Puluh Enam) sub kegiatan. Adapun target sasaran dan target *output* yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	120 orang/	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
			Melayu	Bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	8 Laporan	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,	1 Paket	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	Perlengkapan Kantor	Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Barang	Melayu		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	3 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	2 Paket	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	10 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	2 Unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	3 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	70 Unit	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	1 Unit	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Lembaga	
2	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
4	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub Program Graduasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	
5	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak	Kab. Kutai Kartanegara,	3 Orang	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Orang	
		Jumlah Orang yang	Kab. Kutai	30 Orang	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
11	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	25 Orang	
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	10 Orang	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
11	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119540 Orang	
2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kabupaten/Kota			
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Usulan	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	
5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kotadar urat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja, Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Muara Kaman, Sebulu	12 Desa/ Kelurahan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Orang	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	91 Makam	

Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran pihak legislatif yang terkait dalam rangka peningkatkan pelayanan urusan bidang sosial yang telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2026 yaitu :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2290591 Permohonan : Bantuan Sarana Prasarana Alat Musik Gereja GKII Permasalahan : belum memiliki alat musik yang memadai untuk sarana prasarana didalam Gereja GKII Pulau Pinang. Lokasi : Tersedia Alamat : Desa Pulau Pinang, RT.01 #OPD: Dinas Sosial		Desa Pulau Pinang, RT, 01, Kab. Kutai Kartanegara	Alat Musik	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : Usulan belum dapat dipenuhi karena : 1. tidak sesuai dengan kamus usulan OPD 2. Dinsos tidak memberikan pembinaan dan bantuan ke beragaman umat beragama 3. Mungkin bisa dialihkan ke OPD pengampu terkait perihal permohonan usulaan ini (Kesra/Kesbangpol/ Dispora)
2	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2252118 Rehab Dinding dan Atap Panti Asuhan Raudatul Amin #OPD: Dinas Sosial		RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Rehab Dinding dan Atap	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : Usulan belum dapat dipenuhi karena : 1. Persayaratan belum dilengkapi 2. sesuaikan dengan kamus usulan OPD (rehab sederhana)
3	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2237574 memohon pengadaan sarana dan prasarana Tenda untuk Desa Segihan #OPD: Dinas Sosial		Desa Segihan Kecamatan Sebulu	Tenda	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : usulan belum bisa disetujui karena : 1. Persyaratan belum lengkap/tidak ada 2. Tidak sesuai dengan kamus usulan yang ada di OPD 3. Dinsos memberikan pemberdayaan pada kelembagaan dalam hal ini melalui karang taruna desa bukan langsung ke desa
4	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2364520 bantuan sarana prasarana panti asuhan marhamah kukar #OPD: Dinas Sosial		Dusun Marangan RT. 08 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Prasarana Panti Asuuhan	1 Paket	Untuk pekerjaan panti asuhan bukan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Sarana Prasarana dimaksud dalam kamus usulan berupa perabot/meubelair, tempat tidur, dll

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh infomasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Target Kemiskinan di bawah 4,5 % – 5 %	1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Isu strategis Kemensos mengenai *Care Economy* (ekonomi perawatan) untuk lansia dan disabilitas. Amanat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di daerah. Pentingnya	1. Belum optimalnya pelayanan dasar perlindungan sosial. 2. Fasilitas public yang belum optimal bagi semua kalangan, terutama lansia dan penyandang disabilitas.	1. Keterbatasan SDM, anggaran dan kapasitas daerah 2. Masih kurangnya fasilitas care center (pusat perawatan) terutama untuk lansia dan disabilitas 3. DTKS belum menggambarkan	1. Kesadaran dan komitmen pemerintah daerah 2. Kolaborasi seluruh stakeholder. 3. Penguatan peran Pekerja Sosial dan Pendamping

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Lansia dan Disabilitas	3. Belum terintegrasinya pelayanan publik	populasi lansia dan disabilitas secara valid	
3	Tuntutan profesionalisme dalam pelayanan sosial.	1. Kurangnya tenaga kesejahteraan sosial (Pekerja Sosial, TKSK) untuk pendataan dan pendampingan PMKS	1. Tidak-seimbangan antara beban kerja dan kapasitas SDM serta rewards / penghasilan yang diberikan. 2. Belum optimalnya penerapan standar etika dan kompetensi. 3. Belum optimalnya penguatan peran lembaga sosial dan perlindungan sosial	1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis dari Kemensos 2. Regulasi dan kebijakan pendukung terkait pelayanan kesejahteraan sosial 3. Kolaborasi antara LSM, Perguruan Tinggi dengan Komunitas
4	Pergeseran paradigma dari bantuan sosial (*charity*) ke pemberdayaan (*empowerment*) untuk mengurangi ketergantungan. Pentingnya Dimensi Keberdayaan Ekonomi dan Peranan Sosial dalam IKESOS.	1. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. 2. Belum optimalnya pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarkaat berbudaya maju	1. Mentalitas ketergantungan pada bantuan. 2. Rendahnya kapasitas SDM penerima bantuan 3. Keterbatasan akses terhadap modal dan peluang usaha. 4. Design Program pemberdayaan yang kurang kontekstual. 5. Monitoring dan evaluasi terhadak Program pemberdayaan yang belum optimal	1. Kebijakan Nasional Program Graduasi. 2. Komitmen pemerintah daerah untuk peningatkan pemberdayaan 3. Perubahan mindset masyarakat terutama dari kaum muda yang memiliki potensi diri 4. Dukungan lembaga swadaya / masyarakat serta dunia usaha / CSR
5	Sekolah Rakyat	1. Belum adanya regulasi atau kebijakan daerah yang jelas. 2. Keterbatasan SDM dan tenaga pendidik yang terlatih	1. Belum terintegrasi-nya data anak rentan dengan Sekolah Rakyat. 2. Belum optimalnya integrasi lintas sektoral 3. Masih adanya potensi tumpang tindih tupoksi dengan instansi / lembaga lain	1. Kebutuhan riil dari masyarakat marginal. 2. Mandar perlindungan untuk kelompok rentan. 3. Komitmen pengurangan ketimpangan sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timurdiperoleh informasi tabel sebagai berikut:

Tabel:

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimatan Timur

Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosia yang masih kurang. 2. Rendahnya pemahaman tentang profesi sebagai Pekerja Sosial dan Pendamping	1. Konsentarasi tenaga sosial yang belum menyebar secara merata. 2. Belum adanya sistem pemantauan yang efektif untuk menilai keberhasilan penguatan kapasitas	1. Tersedianya pelatihan, sertifikasi dan pendidikan formal bagi pekerja sosial. 2. Kemitraan dan Kolaborasi
2	Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosial yang masih kurang. 2. Fasilitas rehabilitasi dan pusat layanan sosial yang masih belum memadai. 3. Koordinasi antara lembaga yang masih belum optimal. 4. Data dan informasi yang belum terpadu. 5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitas dan perlindungan sosial.	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosial yang 2. Koordinasi antara lembaga yang masih belum optimal	1. Komitemen Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan 2. Kemitraan dan kolaborasi multi-sektor 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan	1. Kurangya data akurat dan terpadu terkait potensi kelompok rentan yang akan diberdayakan 2. Kapasitas SDM yang terbatas 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinerga antar lembaga 4. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap keberhasilan dan dampak Program pemberdayaan secara sistematis	1. Data sasaran yang kurang lengkap menyebabkan Program kurang tepat sasaran 2. Tumpang tindih Program dan kurang sinergi antar lembaga terkait. 3. Lokasi geografis sulit dijangkau dan sosialisasi Program kurang maksimal. 4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pogram pemberdayaan yang belum tersedia dengan baik	1. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung Program pemberdayaan 2. Komitmen dan kapasitas SDM Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 3. Kemitraan multi-sektor 4. Kelompok sasaran yang aktif dan termotivasi untuk mengikuti Program pemberdayaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja PD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh PD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh PD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan PD;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
    a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
    b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
    c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
    d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
    e) *TimeBound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
    f) *continously improve (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati dirumuskan dalam tabel berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2025 (target)	2025 (realisasi)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya	Rata-rata persentase penurunan PMKS Potensial per tahun	Persen	6,60%	6,60%	8,70%	10,80%	12,20%	14,60%	16,80%	16,80%
			Persentase PMKS (Sasaran SPM) yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Bupati yang dibebankan kepada Dinas Sosial adalah " Memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar perlindungan sosial ".

Selanjutnya dari 17 (tujuh belas) Program prioritas / dedikasi KUKAR IDAMAN TERBAIK terdapat 1 (satu) Program yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu Program KUKAR ETAM SEJAHTERA dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera berupa bantuan pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa Program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Data Terpadu Sosial Eknomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS yang merupakan pengembangan dari DTKS Kementerian Sosial RI.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja, karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan jaminan hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh *stakeholder* terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan dan harapanya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berarti sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, Data P3KE dan Data REGSOSEK menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasionan (DTSEN).

Pemadanan DTKS, P3KE, dan REGSOSEK menjadi DTSEN adalah langkah strategis pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis data tunggal, valid, dan terintegrasi nasional. Hal ini akan mempercepat penurunan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses layanan sosial.

5. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, diantaranya :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Hal tersebut dilaksanakan dalam hal ketersediaan anggaran PD telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2026 jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 (tujuh) Program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran Program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegra untuk kegiatan yang bersifat pendampingan dan ada juga yang terfokus ke satu kecamatan atau desa jika jenis kegiatanya bersifat pelatihan ketrampilan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada rancangan awal Rencana Kerja tahun 2026 adalah sebesar Rp 37.118.380.499,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Kode					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**37.118.380.499**				**37.118.380.499**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75 Nilai	**15.387.210.499**			80 Nilai	**17.067.210.499**
1	**06**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tercapainya Nilai SAKIP		75 Nilai	**600.000.000**			80 Nilai	**785.000.000**
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Dokumen	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	3 Dokumen	150.000.000
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	20.000.000
1	06	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	40.000.000
1	06	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	6 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	175.000.000
1	06	01	2,01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
1	06	01	2,01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Data	150.000.000
1	06	01	2,01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Berita Acara	50.000.000
1	06	01	2,01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
1	**06**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	**12.413.587.375**			20 Laporan	**12.413.587.375**
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	120 Orang/Bulan	12.063.587.375
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	275.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	275.000.000
1	06	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**06**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		15 Laporan	**200.000.000**			15 Laporan	**200.000.000**
1	06	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	25.000.000
1	06	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	100.000.000
1	**06**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial		**2 Dokumen**	**150.000.000**			**2 Dokumen**	**550.000.000**
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	153 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		200 Paket	250.000.000
1	06	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	2 Dokumen	50.000.000
1	06	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Orang	150.000.000
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		15 Orang	100.000.000
1	**06**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial		8 Layanan	**424.357.200**			8 Layanan	**528.307.828**
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	5.110.200	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	8.307.828
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	59.247.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	75.000.000
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Paket	150.000.000
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Paket	60.000.000
1	06	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Paket	50.000.000
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	35.000.000
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		10 Laporan	100.000.000
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	30.000.000
1	06	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	20.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**06**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan						100 Persen	**75.000.000**
1	06	01	2,07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan						5 Unit	75.000.000
1	**06**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	**815.315.296**			12 Bulan	**915.315.296**
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	350.000.000
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	565.315.296	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	565.315.296
1	**06**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial		100 Persen	**783.950.628**			100 Persen	**1.600.000.000**
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		6 Unit	150.000.000
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Unit	83.950.628	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Unit	150.000.000
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	70 Unit	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		70 Unit	100.000.000
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Unit	600.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Unit	1.200.000.000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial			**7.058.800.000**			88 Persen	**7.358.800.000**
						Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial							
1	**06**	**02**	**2,02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan		50 Orang	**75.000.000**			50 Orang	**75.000.000**
1	06	02	2,02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	75.000.000
1	**06**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 Persen	**6.983.800.000**			100 Persen	**7.158.800.000**
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Lembaga	480.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		285 Lembaga	480.000.000
1	06	02	2,03	07	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		200 Aduan	75.000.000
1	06	02	2,03	08	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		25 Orang	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	02	2,03	10	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Orang	868.800.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		79 Orang	868.800.000
1	06	02	2,03	12	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	75.000.000
1	06	02	2,03	13	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	4.466.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		237 Lembaga	4.466.000.000
1	06	02	2,03	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	944.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	944.000.000
1	06	02	2,03	15	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	150.000.000
1	**06**	**02**	**4,04**		**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	**Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota**	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)			**75.000.000**
1	06	02	4,04	01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	75.000.000
1	**06**	**02**	**4,05**		**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.**	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)			**50.000.000**
1	06	02	4,05	01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	50.000.000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		100 Persen	**25.000.000**	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	**50.000.000**
						Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani							
1	**06**	**03**	**2,01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100 Persen	**25.000.000**	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	**50.000.000**
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Orang	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Orang	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100 Persen	**5.693.370.000**			100 Persen	**5.888.370.000**
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
						Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
						Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas							
						Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia							
1	**06**	**04**	**2,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti		2109 Orang	**5.118.370.000**			2109 Orang	**5.313.370.000**
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	3.575.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	355 Orang	3.575.850.000
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	287.520.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	100 Orang	287.520.000
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang	400.000.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	200.000.000
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	70 Orang	300.000.000
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang	75.000.000
1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang	25.000.000
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	75.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	150.000.000
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	30 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	75.000.000
1	06	04	2,01	15	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	30 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	150.000.000
1	**06**	**04**	**2,02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		595 Orang	**575.000.000**			595 Orang	**575.000.000**
1	06	04	2,02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	30.000.000
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	100 Orang	150.000.000
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Orang	30.000.000
1	06	04	2,02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	10 Orang	40.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Orang	40.000.000
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	15 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	25.000.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		80 Persen	**3.904.000.000**			100 Persen 85 Persen	**4.629.000.000**
						Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi							
						Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin							
						Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar							
						Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi							
						Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan							
1	**06**	**05**	**2,01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Terpeliharanya anak-anak terlantar		25 Orang	**850.000.000**			40 Orang	**1.000.000.000**
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	850.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	40 Orang	1.000.000.000
1	**06**	**05**	**2,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		100 Persen	**3.054.000.000**			100 Persen	**3.629.000.000**
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119540 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		118345	200.000.000
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	750.000.000
1	06	05	2,02	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	2.504.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		500 Orang	2.504.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	05	2,02	08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Usulan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1200 Usulan	175.000.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		100 Persen	**1.550.000.000**			100 Persen	**1.800.000.000**
						Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya							
						Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial							
1	**06**	**06**	**2,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani		**100 Persen**	**900.000.000**			**100 Persen**	**1.150.000.000**
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1500 Orang	750.000.000
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1500 Orang	150.000.000
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	75 Orang	75.000.000
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	150 Orang	75.000.000
1	06	06	2,01	07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Unit	100.000.000
1	**06**	**06**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		4 Desa	**550.000.000**			4 Desa	**550.000.000**
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa	350.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	4 Desa	350.000.000
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	19 Orang	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**06**	**06**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	4 Desa	**100.000.000**			4 Desa	**100.000.000**
1	06	06	2,02	03	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		19 Orang	100.000.000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik		100 Persen	**3.500.000.000**			100 Persen	**325.000.000**
1	**06**	**07**	**2,01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100 Persen	**3.500.000.000**			100 Persen	**325.000.000**
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	3.150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	0
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	91 Makam	350.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Makam	325.000.000
TOTAL									**37.118.380.499**				**37.118.380.499**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026, proses penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, P3KE, RESOSEK menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergitas *stakeholders* dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Pelaksanaan RKPD dalam urusan sosial mengacu pada sejumlah kaidah yang bersifat normatif, strategis, dan operasional**,** guna menjamin bahwa Program dan kegiatan yang dijalankan mampu mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan berkeadilan dengan memperhatikan khaidah-khaidah :

1. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat.

   Seluruh Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan taraf hidup kelompok rentan dan marginal, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, fakir miskin, korban bencana, dan penyandang masalah sosial lainnya.

2. Akurasi dan Keadilan Sasaran.

   Pelaksanaan kegiatan harus berbasis pada data yang valid dan mutakhir, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar intervensi sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pemberdayaan dan Partisipatif.

   Kegiatan didorong untuk tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, dengan pendekatan partisipatif, berbasis komunitas, dan mendukung transformasi dari bantuan menjadi pemberdayaan.

4. Responsif terhadap Isu dan Kebutuhan Aktual.

   Program sosial harus mampu merespon perubahan sosial, bencana, kondisi ekonomi, dan dinamika masyarakat, termasuk memperhatikan isu-isu strategis nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, *care economy*, dan perlindungan kelompok rentan.

5. Sinergi dan Integrasi Lintas Sektor.

   Pelaksanaan RKPD bidang sosial harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lain, lembaga vertikal, dunia usaha, serta organisasi sosial masyarakat untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan hasil.

6. Akuntabilitas dan Transparansi.

   Seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi anggaran, dan pelaporan berbasis hasil *(outcome-based)* yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan administratif.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.

   Kegiatan harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala, untuk menilai efektivitas Program, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

8. Berbasis Inovasi dan Teknologi.

   Penggunaan teknologi informasi dan pendekatan inovatif didorong dalam pelaksanaan kegiatan sosial, baik dalam pelayanan, pendataan, pelatihan, maupun penyaluran bantuan.

9. Mendorong Kesetaraan dan Inklusi Sosial

   Semua kegiatan harus menjunjung prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan nondiskriminasi, agar tidak ada kelompok yang tertinggal sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, P3KE, RESOSEK menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
4. Sinergitas antar stakeholders dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja PD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)-nya. Dokumen tersebut memuat visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti dengan menyusun sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan, indikator kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berikutnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum PD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh tim verifikasi Kabupeten Kutai Kartanegara. Pembahasannya mencakup :

1. penyelarasan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan usulan Program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
2. penajaman indikator dan target kinerja Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
3. penyelarasan Program dan kegiatan antar PD Pemerintah Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum; dan
4. penyesuaian pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2026 merupakan penjabaran Program / kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025-2029, mengacu pada Program/kegiatan RKPD tahun 2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur 2026. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P.115/DPU/100.3/3/2025 tentang Pembentukan TimPenyusun Renja TA 2026di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas; dan
2. menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi;

Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Daerah;
2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum selama tahun 2026;
3. mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang memadai di Daerah.
4. menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang

telah ditetapkan.

5. Mensinergikan dan mensikronisasikan program-program nasional, provinsi dan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Evaluasi Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra PD Tahun Lalu.

Memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2027 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dimaksudkan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum agar pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu tidak terulang kembali pada tahun anggaran yang berjalan saat ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran PD.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD agar dapat dicapai.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD.

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab V : Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2024, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran, ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2026 Dinas Pekerjaan Umum mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Pada tahun 2023 persentase realisasi angggaran sebesar 76,03% (tujuh puluh enam koma tiga persen), sedangkan tahun 2024 sebesar 88,38% (delapan puluh delapan koma tiga puluh delapan persen), rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 4**.** Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran sebesar 12,35% (dua belas koma tiga puluh lima persen) hal ini disebabkan karena kurang optimalnya serapan anggaran dikarenakan adanya penumpukan penagihan pada akhir tahun sehingga berpotensi menjadi utang, hal ini dapat dilihat pada tabel T-C. 29.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50	65,44	70,25	81,40	1,16	75,00	75	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	5	5		5	3	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100	100	100	100	100	0	0	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	21,43	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	352	352	352	100	352	352	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100	100	100	100	100	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	2500	2500	2500	100	2500	65	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	5	29	0	5	29	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	1	1	0	1	0	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	1	1	0	1	0	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	0	0	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	400	440	400	400	100	350	0	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bimbingan teknis implementasi peratuiran perundang undangan	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	65	19		65	0	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	100	100	100	100	100	100	0	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	7	7	100	7	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0	0	2	1	50	1	0	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Laporan penyelenggara rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	0	100	100	100	100	100	0	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	0	0	2	2	100	2	0	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	5	3	60	1	0	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	3	35	116	3	0	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100	1	0	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	3	35	116	3	0	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (unit)	40	0	22	22	100	22	0	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	25	4	25	625	4	0	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	100	100	100	100	100	100	0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	1	1	100	1	0	
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,85	0.85	0,85	0,85	0,85	0,85		
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,08	0.08	0,08	0,08	0,08	0		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten								
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi	90,75	0	0	0	0		0	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya	8	8	8	8	100		0	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2	2	2	2	100		0	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	1	1	1	1	100		0	
1.03.02.2.01.31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah check dam yang direhabilitasi	1	1	1	1	100		0	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20000	20000	20000	20000	100		0	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	16	2	2	100		0	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20000	20000	24,10	24,10	100		0	
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai	6000	6000	6000	6000	100		0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5	0	5	2	0		0	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0	1	2	2	100		0	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	85	78	0	64,09			0	
1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5	0	1	1	100		0	
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	3	0	0	0	0		0	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	14600	2400	2400	2400	100		0	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	40000	17827	17827	17827	100		0	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	60000	15000	15000	15000	100		0	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	4	4	4	100		0	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	100	100	100	100		0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	0	100	150	150	100		0	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	0	100	2500	2500	100		0	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	62,23	62,23	62,23	65,71	100		0	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	350	100	100	100	100		0	
		Jumlah bangunan gedung yang dapat digunakan	276	0	0	0	0		0	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah dokumen IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	16	100	100	100	100		100	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang dapat digunakan	16	16	16	16	100		14	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85	85	85	70	100		70,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	20	56	56	34	100		34	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	4		32	34	100		34	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara	16	23	23	23	100			
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	8	8	8	100			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	65,13		65,13	65,49	100,55			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	1428,38		1428,38	1436,37	100,56			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	19	38	2	2	100			
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan	Luasan lahan yang dibebaskan	0,8	0	0	0	0			
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	4	1	1	1	100			
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	86,26	184	33,94	33,94	100			
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	848,8	4000	4000	4000	100			
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	12	2	2	2	100			
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	730,74	5797	5797	5797	100			
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	563,54	400	400	400	100			
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan	0	1	1	1	100			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknis, Pengelolaan Pengendalian								
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2197,32	3430	3430	3430	100			
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang memiliki lebar dibawah standar	0	5227	5,227	5,227	100			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	2	5	1	0	100			
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat	3	9	0	0	100			
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	0	1	1	1	100			
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan	0	5	0	0	100			
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipantau dan dievaluasi	0	100	100	100	100			
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang diawasi	0	100	100	100	100			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100	90	100	90	90			
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	100	124	200	200	82,67			
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi	100	124	1	1	82,67			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	0	1	1	1	100			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	1	1	1	100			
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	17	10	10	100			
1.03.11.2.02.0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi	0	1	1	1	100			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Adanya perbedaan indikator subkegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan PD Dinas Pekerjaan Umum, dapat dilihat pada tabel T-C. 30 sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70,25	70,5	71,25	72,50	81,4				
	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0	0	0	0	3	5	5	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			100	100	100	100	100	0	1	1	
	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0	0	0	0	0	352	336	336	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0	0	0	0	4	12	12	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai			100	100	100	100	100	29	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0	0	0	29	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	0	1	2	2	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadaka			400	400	400	400	400	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0	0	0	0	0	272	50	50	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase bimbingan teknis implementasi peratuiran perundang undangan			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	0	0	19	30	30	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Administrasi umum Perangkat			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan bahan logistik kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0	0	0	0	25	25	25	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penata usahaan arsip dinamis pada SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	0	0	0	0	10000	1000	1000	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	15	15	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	25	25	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	0	0	0	3	3	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	32			Renstra DPU 2021-2026
	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0	0	0	0	0	35	36	36	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	5	5	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	35	12	12	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Barang Milik Daerah (unit)			22	22	22	40	22		22	22	Renstra DPU 2021-2026
	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan											
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0	0	0	0	0	25	87	22	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			0	0	0	0	0	0	18	18	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	0	0	0	0	0	2	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya			100	100	100	100	100	25,9	3	3	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	0	0	0	0	3	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		78,00	0,78	0,80	0,82	0,85	0,85	0,64	0,74	0,79	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		6,10	0,03	0,05	0,06	0,08	0,08	0	0	0	Tidak Ada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman		1,46	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04		0	0	Tidak Ada Pantai dalam Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten											
	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi			0	0	0	90,75	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya			0	0	0	8	8	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			0	0	0	2	2	0	0	0	
	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi			0	0	0	0	1	0	0	0	
	Jumlah check dam yang direhabilitasi			1	0	0	1	1	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			50000	50000	50000	50000	20000	0	7200	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			0	0	0	0	16	0	2	4	
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			0	0	0	0	20000	0	5000	2000	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Panjang bangunan pengaman pantai			1500	1500	1500	1500		0	0	1500	Renstra DPU 2021-2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			1	1	1	1	0	0	0	1	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			0	0	0	0	2	0	1	0	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik			78	80	82	85	64,09	64,09	74	79	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			8	0	0	0	1	0	1	1	
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			0	1	1	1	0	0	0	0	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			2500	3200	3200	3200	2400	0	6000	1600	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			10000	10000	10000	10000	17827	0	0	1875	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			15000	15000	15000	15000	15000	0	8238	5000	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			0	0	0	0	4	0	0	0	
	Panjang saluran drainase yang dibangun			0	0	0	0	150	0	0	0	
	Panjang saluran drainase yang dipelihara			0	0	0	0	2500	0	3000	0	
	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100	61,86	61,39	61,64	61,88	62,23	65,71	65,96	66,21	
	Jumlah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			50	50	50		100	100	100	100	Renstra DPU 2021-2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah bangunan gedung yang dapat digunakan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah dokumen IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG			4	4	4	4	100	100	100	100	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah bangunan yang dapat digunakan			4	2	2	3	16	14	2	2	Renstra DPU 2021-2026
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		100	65,75	66,22	66,67	67,11	65,50	70,00	70,25	70,50	
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten			2	2	2	2	56	34	2	2	
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata			1	1	1	1	33	34	2	2	Pekerjaan Lanjutan belum bisa menyelesaikan 1 kawasan
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara			1	1	1	1	23	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota			0	0	0	0	8	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		73,5	64,22	64,66	64,95	65,13	65,49	65,49	65,97	69,25	Proyeksi pada Tahun 2025 dan 2026 akan dapat dicapai apabila capaian Tahun 2023 sebesar 78,895 Km yang seluruhnya merupakan Ruas Jalan sesuai SK, dan capaian Tahun 2025 dan 2026 berturut-turut 73 Km dan 72 Km (Ruas Jalan sesuai SK).
	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten			1407,92	1418,03	1424,39	1428,38	1436,37	1436,37	1449,28	1521,28	Data ini dengan berdasarkan data Kondisi Mantap Per Tahun 2023 sebesar 59,0089 %
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis			4	3	3	3	38	0	2	2	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun											
	Luasan lahan yang dibebaskan			0	0,6	0	0		0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Jembatan yang Diganti			0	1	1	1	1	0	1	2	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			1	0,6	1,4	2	184	8,95	50	50	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,00/Km adalah Rp. 500.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 500.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			4	3	3	3	4000	1	4	3	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp. 4.000.000.000,00/Km dengan lingkup pekerjaan berupa overlay struktural aspal adalah Rp. 16.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 12.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			2	2	2	2	2	0	2196,94	2196,94	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			0,9	1	1	1	5797	5,36	10	10	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 7.500.000.000,00/Km adalah Rp. 75.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 75.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			2	2	2	2	400	0	2	2	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 2.000.000.000,00/Km adalah Rp. 4.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 4.000.000.000,00 Tahun 2026
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			1			0	1	0	0	0	
	Panjang jalan yang dibangun			0,4	0,2	0	0	3430	0	5	5	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Panjang jalan yang memiliki lebar dibawah standar			0	0	0	0	5,227	0	2	2	
	Jumlah jembatan yang dibangun			1	1	0	0	5	0	1	2	
	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat			0	0	0	0	9	236	0	0	Indikator ini telah diuraikan pada indikator penggantian Jembatan sehingga proyeksi di isi 0 (Nol) Jembatan
	jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang			0	0	0	0	1	113	2	2	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 75.000.000.000,00/Km apabila pelebaran dilakukan bersamaan dengan perbaikan darainase jalan yang menjadi pelebaran perkerasan adalah Rp. 150.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 150.000.000.000,00 Tahun 2026
	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan			0	0	0	0	5	52	5	5	
	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipantau dan dievaluasi			0	0	0	0	100	0	100	100	
	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang diawasi			0	0	0	0	100	60	100	100	
	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)		100	100	100	100	100	90	50	100	100	
	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan			20	20	20	20	124	58	200	100	
	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi			20	20	20	20	124	5	10	10	
	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat			3	3	3	3	1	0	1	1	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			1	1	1	1	1	0	1	0	
	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1	1	1	1	17	150	300	400	
	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi			0	0	0	0	17	0	50	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tugas pokok dan fungsi

Dasar hukum keberadaan Dinas Pekerjaan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lembaga teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sedangkan fungsinya :

1. perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. pembinaan dan pelaksanan teknis di bidang pekerjaan umum;
4. pembinaan unit pelaksanan teknis dinas;
5. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang pekerjaan umum, selanjutnya, tugas pokok pada dinas pekerjaan umum diuraikan ke dalam masing-masing sub-unit kerja.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum relatif kurang terutama tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan pada bidang Bina marga, bidang sumber daya air, dan bidang cipta karya meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tenaga teknis yang dibutuhkan dan sebagian lagi harus lebih disesuaikandan lebih ditingkatkan lagi. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum sangat besar, sudah sewajarnyalah bila SDM pada dinas ini lebih diperkuat dan ditingkatkan.

c. Prasarana dan Saran

Nilai SDM yang relatif baik tersebut tidak akan mencapai kinerja yang maksimal jika tidak ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, misalnya fasilitas IT yang cukup memadai, sarana bagi tenaga pengawas/koordinator lapangan, perencanaan banyak yang tidak lagi berupa *blue print* ataupun hardcopy, pengarsipan yang belum tertata dengan baik. Oleh karenanya sebagai organisasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu lebih ditingkatkan sehingga kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dapat meningkat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

c. Sumber Dana.

Disamping dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegaa, APBN (DAK), Bantuan Provinsi (BANKEU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit), dari ketiga anggaran tersebut diharapkan anggarannya tersedia karena anggaran tersebut sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dana, suatu kegiatan dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Rencana Kerja tahunan harus menyesuaikan dengan kemampuan APBDnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja-PD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimum yang disyaratkan sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan Program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan atau rogram kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM				126.680.395.056					712.181.023.485	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	51.680.395.056	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	47.644.658.111	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	1.350.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	475.000.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	400.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	200.000.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	100.000.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	5 Data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	91 Data	75.000.000	Satu Data (BECIK)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	43.789.018.771	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	44.019.658.111	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	42.189.018.771	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4760 orang	43.294.658.111	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	850.000.000					-	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 laporan	650. 000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	650.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 Persen	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 Persen	125.000.000	
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	50.000.000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	100.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD semester 1	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	75.000.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	200.000.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	300.000.000					-	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	397 orang	600.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	397 orang	200.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.949.614.676	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	995.000.000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	100.000.000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	60.000.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai	Jumlah Paket Peralatan dan	5 paket	714.614.676	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan	5 paket	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kartanegara	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	500.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	200.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	100.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	235.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	235.000.000	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	300.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	100.000.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	1.316.385.324	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	555.000.000	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 unit	517.111.200	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 unit	235.000.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	50.000.000						
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	749.274.124	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	320.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.675.376.285	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	945.376.285	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	400.000.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	230.000.000						
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	500.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	50 kali	550.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	50 kali	375.000.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	100.000.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	175.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,825	15.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		45.312.170.934	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0675				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten			
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0325				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastrukstur Pengendali Banjir Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi		9.050.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastrukstur Pengendali Banjir Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi	11,33 Persen 1307 Ha	30.769.618.598	
1.03.02.2.01.0026						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,75 KM	2.218.367.168	
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	0 lembaga	500.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	500.000.000	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 Km	1.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	3,76 Km	875.201.250	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 unit	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	1.100.000.000	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 Km	2.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	17,07 Km	5.820.408.163	
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 Km	650.000.000	Peningkatan Tanggul Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	2,248 Km	1.050.490.400	
1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0 Km	900.000.000	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1,886 Km	10.830.151.617	
1.03.02.2.01.0119						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air baku	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	14 Titik	5.875.000.000	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan	0 dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan	1 Dokumen	1.500.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengaman Pantai yang Disusun			Lahar, dan Pengaman Pantai		Pengaman Pantai yang Disusun			
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 unit	2.000.000.000						
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 dokumen	500.000.000						
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi		6.450.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	284,80 Ha	14.542.552.336	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 Km	2.500.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	12,53 Km	4.245.283.500	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 Km	1.000.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,76 Km	3.520.420.000	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 Km	1.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,85 Km	1.278.200.000	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	650.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6,63 Km	3.498.648.836	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis	Kab. Kutai	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi	3 dokumen	500.000.000	Penyusunan Dukungan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi	3 Dokumen	1.500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bidang Irigasi dan Rawa	Kartanegara	dan Rawa yang Disusun			bidang Irigasi dan Rawa		dan Rawa yang Disusun			
1.03.02.2.02.0051	Pembangunan Bendung Irigasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 unit	300.000.000						
1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 unit	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	500.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				48.750.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Sistem Drainase		4.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Sistem Drainase	360 Ha	48.750.000.000	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem drainase perkotaan	2.000.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	43.000.000.000	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem drainase perkotaan	2.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Sistem drainase perkotaan	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Sistem Drainase Perkotaan	750.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Penataan Bangunan Gedung	69.38 Persen	8.384.885.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Penataan Bangunan Gedung		20.993.501.200	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah		Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan		8.384.885.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah		Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan	3 Unit	20.993.501.200	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	14 Bangunan Gedung	6.984.885.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	16 Bangunan Gedung	19.993.501.200	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	100.000.000	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30 orang	350.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30 Orang	200.000.000	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	205 dokumen	900.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	700.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bangunan Gedung melalui SIMBG					
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85.00 Persen	16.615.115.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		136.699.437.240	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata		16.615.115.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	10 Unit	136.699.437.240	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	6 Kawasan	16.165.115.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	15 Kawasan	136.699.437.240	
1.03.09.2.01.0011	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1 orang	450.000.000						
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	64,95	25.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	65,133 Persen	408.616.256.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kondisi Baik Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		25.000.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kondisi Baik Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	1.211,244 KM 65,133 Persen	408.616.256.000	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 dokumen	800.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	9.600.000.000	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Kutai	Panjang Jalan/Jembatan	1 Km	2.500.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan/Jembatan	2.196,94 Km	2.500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kartanegara	yang Disurvey Kondisinya					yang Disurvey Kondisinya			
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,2 Km	500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,5 Km	3.000.000.000	
1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0,2 Km	150.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	8,5 Km	200.000.000	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0,2 Km	2.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang jalan yang dibangun	2,1 Km	21.000.000.000	
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,2 Km	1.000.000.000						
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,2 Km	1.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,5 Km	10.000.000.000	
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter	1.000.000.000	Penggantian Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	45 Meter	25.000.000.000	
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1 Meter	800.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	270 Meter	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2 Km	3.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 Km	58.000.000.000	
1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	0,2 Km	150.000.000						
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Meter	600.000.000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20 Meter	700.000.000	
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 unit	500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 Km	1.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,36 Km	14.277.031.000	
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	1 Meter	10.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang jembatan yang dibangun	35 Meter	262.439.225.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100	5.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100	4.165.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	310 Orang	3.800.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat	200 Orang	2.590.000.000	
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 dokumen	200.000.000	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	310 Orang	2.000.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	310 Orang	1.070.000.000	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	200.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	100.000.000	
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan		Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara	30 Orang	200.000.000	Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara		Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara	30 Orang	270.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan			
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 dokumen	200.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	150.000.000	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	220 Orang	1.000.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	220 Orang	800.000.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat		800.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat Jumlah Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	3 Buah 1 Layanan	1.025.000.000	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	500.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	650.000.000	
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	100.000.000	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	200.000.000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	275.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		400.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Pengawasan, Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen 1 Laporan	550.000.000	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	75 Paket pekerjaan	100.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	75 Paket Pekerjaan	250.000.000	
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	75 Bangunan Konstruksi	100.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	75 Bangunan Konstruksi	100.000.000	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	40 Lembaga	100.000.000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	40 Lembaga	100.000.000	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	75 Badan Usaha	100.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	75 Badan Usaha	100.000.000	
Total Pendanaan:					126.680.395.056					712.181.023.485	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum akan menambah usulan Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Pemerintah Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat Daerah, sehingga semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif dan akan langsung diteruskan ke masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musrenbang yang akan melibatkan seluruh *Stakeholder* pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan ke depannya.

Adapun usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kamus Usulan	Usulan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
1	Normalisasi Sungai di Kawasan Pertanian	Normalisasi sungai, rt 12 menuju rt 19 Dusun sari Mulya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan	Normalisasi/Restorasi Sungai	Loa Janan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,47 Km	Pokir ID 1451502
2	Pembangunan Sumur Bor Air Bersih	Pembuatan Sumur Bor, Plus Kwh Listrik, dan Menara Tandon, RT.04 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Barat	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Samboja Barat	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	Pokir ID 1475891
3	Pembangunan Sumur Bor Air Bersih	Pembuatan Sumur bor, Rt.12 Km.34 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Barat	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Samboja Barat	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	Pokir ID 1452429
4	Pembangunan Sumur Bor Air Bersih	Pengadaan Sumur Bor Ds Loleng2 Desa Loleng kecamatan kota bangun darat	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Bangun Darat	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	Pokir ID 1351917
5	Pembangunan Sumur Bor Air Bersih	Pembuatan Sumur bor Jalan Gn Dup Rt 07 Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja Barat	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Samboja Barat	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	Pokir ID 1331834
6	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi Kantor Desa Rebaq Rinding	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Muara Muntai	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2016136
7	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehab BPD Desa Suka Bumi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bangun Darat	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2184021
8	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan,	Rehab Lamin Adat Desa Sungai Bawang	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	Muara Badak	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2264900

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Kamus Usulan	Usulan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
	kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)		Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		
9	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi Kantor Desa Desa Kelekat	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kembang Janggut	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2252860
10	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi Kantor Desa Muara Kaman Ilir	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Muara Kaman	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2090915
11	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi BPU Desa Pendingin	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sangasanga	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2315936
12	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi Kantor Desa Loa Duri Ulu	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Loa Janan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2279977
13	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi BPU Desa Jembayan	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2108020
14	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehab BPU Desa Sebulu Ilir	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sebulu	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Hasil Musrembang Kecamatan, No ID 2250052
15	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik ((kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabang	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tabang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Pokir ID 1344508
16	Peningkatan, Rekonstruksi Jalan dan Penanganan Longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Rekonstruksi Jalan kota Bangun -muara wis 1	Rekonstruksi Jalan	Muara Wis	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 Km	Musrenbang Kecamatan (Lanjutan)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Kamus Usulan	Usulan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
17	Peningkatan, Rekonstruksi Jalan dan Penanganan Longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Rekonstruksi Jalan kota Bangun -muara wis 2		Muara Wis	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 Km	Musrenbang Kecamatan (Lanjutan)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara, penyelenggaraan otonomi daerah, perubahan iklim dan efisiensi aparat Dinas Pekerjaan Umum adalah isu strategis utama yang menjadi perhatian di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendorong tingginya arus urbanisasi menuju daerah perkotaan. Sudah sama-sama dipahami bahwa kota adalah mesin pertumbuhan ekonomi sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Sehingga sudah menjadi wajar apabila daerah-daerah perkotaan selalu memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk yang berada di luar kota tersebut. Dinas Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 (delapan belas) wilayah kecamatan dan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 3,92% (tiga koma sembilan puluh dua persen) per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 645.817 (enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) jiwa (data tahun 2014) dengan kepadatan penduduk rata-rata 24 (dua puluh empat) jiwa/km2 (sumber KutaiKartanegara.com).

Tingkat urbanisasi yang tinggi ini belum disertai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan *(backlog)* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata dan menjangkau semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari sisi otonomi daerah, sejak bergulirnya pada tahun 1998, hingga saat ini. Melalui otonomi, pemerintahan daerah memiliki

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keleluasan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya sendiri, namun kemampuan daerah untuk melakukan pengelolaannya tidaklah merata pada semua daerah. Ada daerah yang memiliki kemampuan yang sudah sangat baik dan memadai dalam mengelola daerahnya, namun masih banyak daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat rendah dalam pengelolaan daerahnya. Hal ini membawa masalah tersendiri, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan daerahnya.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan yang terencana secara matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien.

Beranjak pada isu yang mulai merebak hangat di kalangan dunia internasional, yaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim, pola pembangunan pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan pada tuntutan untuk mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, seperti emisi gas rumah kaca dan kegiatan yang mendorong deforestasi.

Dari sisi internal Dinas Pekerjaan Umum, kapasitas dan kemampuan institusi ke-PU-an haruslah ditingkatkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel. Untuk itu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good government haruslah terus dilaksanakan di lingkungan instansi ke-PU-an di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penggalian isu strategis tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, tahun 2021-2026 merupakan periode RPJMD keempat dimana mengusung visi terwujudnya kutai kartanegara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang sejahtera dan berbahagia.

Berdasarkan arah pembangunan periode RPJMD yang menjadi titik berat yaitu :

1. menuju masyarakat kutai kartanegara yang sejahtera dan bahagia;
2. dukungan persiapan pembangunan IKN;
3. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
4. penataan infrastruktur Daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional;
5. pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan; dan
6. percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan.

Frase utama arah pembangunan periode RPJMD tersebut kemudian dirumuskan menjadi tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalian permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi Bupati melalui visi dan misinya.

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonimi kreatif;
4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; dan
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 (enam) aspek, yaitu ;

a) arah kebijakan pengembangan kawasan strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
b) arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. pengembangan kawasan perkotaan difokuskan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik potensi ekonomi dan budaya lokal;

c) arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;

d) arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;

e) arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana; dan

f) arah kebijakan dan strategi tata kelola pemerintahan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan peningkatan kapasitas keuangan daerah;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan Pekerjaan Umum jangka menengah adalah meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dengan sasaran pembangunan infrastruktur jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya aksebilitas jalan Daerah;
2. meningkatnya kondisi bangunan negara dalam kondisi baik;
3. meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi; dan
4. meningkatnya kualitas layanan irigasi dan penanganan banjir.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi Program, kegiatan dan sub-kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah, dan prioritas PD maupun untuk pemenuhan pelayanan PD dalam menyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
   1. mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029;
   2. mempedomani RKPD tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029;
   3. mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025-2029 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   4. Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Dinas Pekerjaan Umum yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan Program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Adaya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan;
3. Jumlah Sub Kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebanyak 81 (delapan puluh satu) sub-kegiatan;
4. Jumlah Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 sebesar Rp2.744.701.540.075,83 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Rumusan Program dan kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. adanya tambahan sub kegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan;
2. adanya penyesuaian indikator, target dan satuan pada sub kegiatan.

d. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel T-C-33.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM				712.181.023.485				2.459.232.280.027
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75	47.644.658.111				75.647.073.971
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 persen	475.000.000				1.300.000.000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 dokumen	200.000.000	APBD		4 Dokumen	400.000.000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 laporan	100.000.000	APBD		5 Laporan	400.000.000
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	91 Data	75.000.000	APBD		91 Data	250.000.000
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	44.019.658.111			100 Persen	46.697.073.971
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4760 orang	43.294.658.111	APBD		4760 orang	45.297.073.971
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-			12 Laporan	850.000.000
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	650.000.000	APBD		12 Laporan	450.000.000
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminsitrasi BMD pada Perangkat Daerah		100 Persen	125.000.000			100 Persen	150.000.000
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	50.000.000
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD semester 1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	75.000.000	APBD		2 laporan	100.000.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	200.000.000			100 Persen	3.300.000.000
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		397 orang	200.000.000	APBD		397 orang	3.000.000.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	995.000.000			100 Persen	8.200.000.000
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 paket	60.000.000	APBD			1.500.000.000,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	300.000.000	APBD			2.500.000.000
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	200.000.000	APBD			1.500.000.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	100.000.000	APBD			200.000.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 laporan	235.000.000	APBD			1.500.000.000
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 dokumen	100.000.000	APBD			1.000.000.000
1.03.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 persen	555.000.000				2.000.000.000
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		11 unit	235.000.000	APBD			1.500.000.000
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				APBD			500.000.000
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 unit	320.000.000	APBD			-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	900.000.000				12.000.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	400.000.000	APBD			3.000.000.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				APBD			2.000.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	500.000.000	APBD			7.000.000.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		50 kali	375.000.000				2.000.000.000
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		22 unit	100.000.000	APBD			500.000.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22 unit	175.000.000	APBD			500.000.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	100.000.000	APBD			1.000.000.000
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,825	45.312.170.934				375.433.666.127
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		0,0675					
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		0,0325					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastrukstur Pengendali Banjir Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi		11,33 Persen 1307 Ha	30.769.618.598				52.924.066.303
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi		1 Unit	1.000.000.000	APBD			
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		7,75 KM	2.218.367.168	APBD			1.258.942.000
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		3 Lembaga	500.000.000	APBD			900.000.000
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		3,76 Km	875.201.250	APBD			139.444.515
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 Unit	1.100.000.000	APBD			1.500.000.000
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		17,07 Km	5.820.408.163	APBD			14.075.189.388
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		2,248 Km	1.050.490.400	APBD			1.050.490.400
1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi		1,886 Km	10.830.151.617	APBD			32.000.000.000
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		14 Titik	5.875.000.000	APBD			
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1 Dokumen	1.500.000.000	APBD			2.000.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Luas Daerah Irigasi Kewenangan		284,80 Ha	14.542.552.336				322.509.599.824

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi							
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		12,53 Km	4.245.283.500	APBD			11.653.712.500
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1,76 Km	3.520.420.000	APBD			197.944.714.920,65
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,85 Km	1.278.200.000	APBD			17.816.294.706,49
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		6,63 Km	3.498.648.836	APBD			91.094.877.696,84
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		3 Dokumen	1.500.000.000	APBD			3.500.000.000
1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		4 Unit	500.000.000	APBD			500.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				48.750.000.000				45.993.944.589
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Sistem Drainase		360 Ha	48.750.000.000				45.993.944.589
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		5 Sistem Drainase Perkotaan	43.000.000.000	APBD			13.500.000.000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		2 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	APBD			25.000.000.000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		10 Sistem Drainase Perkotaan	750.000.000	APBD			7.493.944.589,20
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung			20.993.501.200				8.384.885.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan		3 Unit	20.993.501.200				8.384.885.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		16 Bangunan Gedung	19.993.501.200				6.984.885.000
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		1 Dokumen	100.000.000				150.000.000
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		30 Orang	200.000.000				350.000.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		100 Dokumen	700.000.000				900.000.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		85 Persen	136.699.437.240				16.165.115.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata		10 Unit	136.699.437.240				16.165.115.000
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan		15 Kawasan	136.699.437.240				16.165.115.000
1.03.09.2.01.0011	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan							
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan			408.616.256.000				1.930.807.595.340
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kondisi Baik Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		1.211,244 KM 65,133 Persen	408.616.256.000				1.930.807.595.340

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		12 Dokumen	9.600.000.000	APBD			9.450.000.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		2.196,94 Km	2.500.000.000	APBD			2.500.000.000
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		0,5 Km	3.000.000.000	APBD			3.000.000.000
1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		8,5 Km	200.000.000	APBD			200.000.000
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun		2,1 Km	21.000.000.000	APBD			147.000.000.000
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		1,5 Km	10.000.000.000	APBD			10.000.000.000
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian		45 Meter	25.000.000.000	APBD			240.000.000.000
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi		270 Meter	1.000.000.000	APBD			1.200.000.000
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		4 Km	58.000.000.000	APBD			934.657.595.340
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		20 Meter	700.000.000	APBD			1.300.000.000
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		2 Jembatan	900.000.000	APBD			1.500.000.000
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		0,36 Km	14.277.031.000	APBD			80.000.000.000
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun		35 Meter	262.439.225.000	APBD			500.000.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)		100 Persen	4.165.000.000			100 Persen	6.800.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat		200 Orang	2.590.000.000			310 Orang	4.797.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	310 Orang	1.070.000.000	APBD		310 Orang	2.140.000.000
1.03.11.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	40 Lembaga	100.000.000	APBD		40 Lembaga	200.000.000
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang	270.000.000	APBD		30 Orang	335.000.000
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Kutai Kartanegara	220 Orang	800.000.000	APBD		220 Orang	1.622.000.000,
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat Jumlah Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan		3 Buah 1 Layanan	1.025.000.000			3 Buah 1 Layanan	1.053.000.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	650.000.000	APBD		2 Dokumen	650.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	5 Orang	100.000.000	APBD		5 Orang	128.000.000
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Layanan Informasi	275.000.000	APBD		1 Layanan Informasi	275.000.000
1.03.11.2.04	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Pengawasan, Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Dokumen 1 Laporan	550.000.000			1 Dokumen 1 Laporan	950.000.000
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kab. Kutai Kartanegara	75 Paket Pekerjaan	250.000.000	APBD		75 Paket Pekerjaan	250.000.000
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Kutai Kartanegara	75 Bangunan Konstruksi	100.000.000	APBD		75 Bangunan Konstruksi	250.000.000
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Kutai Kartanegara	40 Lembaga	100.000.000	APBD		40 Lembaga	200.000.000
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	75 Badan Usaha	100.000.000	APBD		75 Badan Usaha	250.000.000
T O T A L					712.181.023.485				2.459.232.280.027

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mendukung tercapainya target pembangunan Daerah tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD tahun 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dan mengacu pada RKPD, diantaranya memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja tahun 2026 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja PD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 khususnya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

a. Sinergi Regulasi : diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2022-2026 . selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan

b. Sinergi Perencanaan : dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehinggah terwujud sinkronisasai antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan Program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya Peraturan Menteri Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur, maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas).

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh

melalui bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
3. Menerapkan *reward and punishment system* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.
7. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Renja-PD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD. Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan Dokumen yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun menggunakan metode berbasis data dan bukti-bukti yang valid, yaitu berisi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan autcome yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Recana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan ini menyajikan analisis mendalam tentang potensi daerah, isu-isu strategis, rekomendasi arah kebijakan dan Program prioritas. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan periode pertama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju Tangguh Berbudaya 2045.

RKPD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada RPJMD, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya muwujudkan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, Renja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja DPKP tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tahun 2005 – 2025);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahui 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

   Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah DPKP Tahun 2026 adalah :

   a. menetapkan dokumen rencana yang memuat Program dan kegiatan tahun 2026, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja DPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026;
   b. melakukan sinkronisasi terhadap program-Program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026; dan

c. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program kegiatan tahun 2026.

2. Tujuan:

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DPKP tahun 2026 adalah :

a. Mewujudkan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara dalam rencana kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun;

b. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPKP, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2026; dan

c. merencanakan pedoman dalam penyusunan Program, kegiatan dan subkegiatan, sebagai dasar dalam penyusunan RKA, sebelum di tetapkan menjadi DPA DPKP tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RencN Kerja DPKP tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindaklanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU,PP,Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengidentifikasi Program-Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV : RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V : PENUTUP

a. Catatan Penting

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja DPKP tahun 2024 berdasarakan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
      1) Target 92 % (sembilan puluh dua persen), realisasi 80,20 % (delapan puluh koma dua puluh persen), atau 87,17 % (delapan puluh koma tujuh velas persen) dari target kinerja.
      2) Persentase penyediaan SPAM perdesaan Target 1,03 % (satu koma nol tiga persen), realisasi 1,02 % (satu koma nol dua persen), atau 99,03% (sembilan puluh sembila koma tiga puluh tiga persen) dari target kinerja.
   b. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Indikator pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik, target 4,48 % (empat koma empat puluh delapan persen), realisasi 0,99% (nol koma sembilan puluh sembilan persen), atau 2,10% (dua koma sepuluh persen) dari target kinerja.
   c. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
      1) Indikator persentase rumah tidak layak huni (RTLH), target 7 % (tujuh persen), realisasi 1,36 % (satu koma tiga puluh enam persen), atau 19,42 % (sembilan belas koma empat puluh dua persen).
      2) Jumlah pelaksanaan bedah rumah KUKAR IDAMAN, target 517 (lima ratus tujuh belas) unit, realisasi 617 (enam ratus tujuh belas) unit, atau 119 % (seratus sembilan belas persen) dari target kinerja.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi / melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

      Indikator Nilai SAKIP PD, target 71,50 % (tujuh puluh satu koma lima puluh persen), realisasi 71,08 % (tujuh puluh satu koma nol delapan persen), atau 100% (seratus persen) dari target kinerja.
   b. Program Pengembangan Perumahan
      1) Indikator cakupan layanan perumahan layak huni bagi korban bencana, target 100 % (seratus persen), realisasi 100 % (seratus persen), atau 100% (seratus persen) dari target kinerja.
      2) Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program pemerintah kabupaten, target 100 % (seratus persen), realisasi 100 % (seratus persen), 100% (seratus persen) dari target kinerja.
   c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Indikator persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, target 86,70 % (delapan puluh enam koma tujuh puluh persen), realisasi 89,10 % (delapan puluh sembila koma sepuluh persen), atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
   d. Program Kawasan Permukiman. Indikator persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (sepuluh hektar) yang ditangani, target 47,72 % (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen), realisasi 77,42 % (tujuh puluh tujuh koma empat puluh dua persen), atau 100 % (seratus persen) dari target kinerja.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Program /kegiatan antara lain;
   a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum.
      1) Adanya Penyesuaian data BNBA (dimana capaian untuk rumah tangga berakses air bersih bukan jaringan perpipaan didasarkan pada BNBA.

2) Data penduduk mengikuti tahun berjalan dan jumlah jiwa sebagai pembagi rata-ratanya menjadi 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adanya perubahan terhadap cara hitung terhadap indikator pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik.

4. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya target Program Renstra PD.

Beberapa hal yang diharapkan dari hasil pelaksanaan Program/kegiatan yang telah dilakukan dapat membawa dampak yang positif pada pencapaian tujuan dan sasaran DPKP. Implementasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD dapat mencakup berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan adanya target yang jelas, perangkat daerah dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien karena adanya panduan dan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja: Proses pengukuran dan evaluasi kinerja menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki.

b. Inovasi dan Pengembangan: Adanya target capaian memacu perangkat daerah untuk mencari solusi dan inovasi baru dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan target yang jelas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program dapat lebih terjamin.

5. Kebijakan / tindakan perencanaa dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

a. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat

melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

b. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3/tiga bulan sekali) dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja Program/kegiatan/subkegiatan; dan

c. Tetap konsisten mengawal ketercapaian Program/kegiatan melalui evaluasi dokumen perencanaan, pengendalian kegiatan dan SPIP.

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Triwulan IV tahun 2024 DPKP Kutai Kartanegara.

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95	90,7 Persen	92,16 Persen	88,7	96,25	93,58 Persen	273,02	2,87
		2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	1,48	0,7 Persen	1,03 Persen	1,02	99,03	1,26 Persen	2,98	2,01
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	19	4 Paket	6 Paket	6	100	4 Paket	14	0,74
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	45 Dokumen	0	0	-	0	45	#DIV/0!
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	250	250 Ltr/Detik	0	0	0	0	250	1

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya SPAM berbasis masyarakat	32,5	1.743 SR	0	0	0	0	1.743	53,63
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	230 Ltr/Detik	0	0	0	0	230	#DIV/0!
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan kapasitas SPAM Perdesaan	13	5,35 Ltr/Detik	0	0	0	0	5,35	0,41
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan Rumah yang terlayani melalui permanfaat Idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	0	50 SR	0	0	0	0	50	#DIV/0!
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.Jumlah Tandon 2. jumlah lahan yang tersedia	1000 5	6.975 Rmh tangga	0	0	0	0	6.975	6,94
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.Jumlah Rumah Sambungan 2.Panjang Pipa Terpasang	1500 3000	5.486 SR	0	0	0	0	5.486	5,46
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	0	7221 Unit	7221	100	0	7221	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sitem Penyediaan Air minum(SPAM) yang ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	25 Lembaga	25	100	0	26	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0	0	25 Dokumen	25	100	1 Dokumen	26	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3	0	63 Ltr/Detik	62,2	99	170 Ltr/Detik	232,2	77,4
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0	0	0	20 Desa	20	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	65 Ltr/detik	65	100	27,5 Ltr/Detik	92,5	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	1721 SR	1721	100	7230 SR	8951	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0	0	0 Rumah Tangga	0	0	2 Unit	2	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.03.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	20 Penyelenggara	20	100	0	20	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	0	1 Unit	1	100	0	1	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0039	Penyediaan Sub Sitem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan tangki Septik sesuai dengan Standar	0	0	991 Rumah Tangga	991	100	0	991	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	42 Orang	42	100	0	42	#DIV/0!
1.03.03.2.01.0041	Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik(SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana,Strategis dan teknis sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0	0	15 Dokumen	15	100	0	15	#DIV/0!
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	85 Persen	86,7 Persen	89,1	103	88,3 Persen	262,4	2,92
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	285	51 unit	1009 unit	1009	100	51 unit	1111	3,90
1.03.05.2.01.01	penyusunan Rencana Kebijakan,Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	8	51 unit	0	0	0	0	51	6,38
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	60	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	81	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	80	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	4	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	4	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	120	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	400	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30	0	0 0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	20 Penyelenggara	20	100	0	20	#DIV/0!
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	100	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	0	1 Unit	1	100	0	1	1
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sitem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan tangki Septik sesuai dengan Standar	0	0	1009 Rumah Tangga	1009	100	388 Rumah Tangga	1397	0
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	35	0	42 orang	42	100	121 Orang	163	4,66

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik(SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0	0	15 Dokumen	15	100	4 Dokumen	19	#DIV/0!
1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	16	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	71 Nilai	71,5 Nilai	88,9	124	72 Nilai	231,9	3,20

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9 Dokumen	9 Dokumen	9	100	9 Dokumen	27	1
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	9 Dokumen	5 Dokumen	5	100	9 Dokumen	23	0,92
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	0	2 Laporan	2	100	1 Laporan	3	0,6
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	0	3 Laporan	3	100	3 Laporan	6	0,4
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1	0
1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral daerah	JumlahData statistik Sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Data	1	#DIV/0!
1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Berita Acara	1	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	4 Laporan	5 Laporan	5	100	4 Laporan	13	0,65
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12180	2397 Orang/Bulan	1907 Orang/Bulan	1907	100	2400 Orang/Bulan	6704	0,55
1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	168 Dokumen	168	100	0	168	#DIV/0!
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1 Laporan	1 Laporan	1	100	1 Laporan	3	0,6
1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70	0	2 Dokumen	2	100	14 Dokumen	16	0,23
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	0	12 Laporan	12	100	12 Laporan	24	2
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	3	0,6
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebijakan,Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1	#DIV/0!
1.04.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0	0	1 Laporan	1	0,2
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	1 Laporan	1	100	1 Laporan	3	3
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2	100	1 Dokumen	5	0,5
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaet pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	0	1 Paket	0	0	0	0	1	#DIV/0!
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	3	0,6
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	0	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	2	0,4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	0	0	0	0	25 Orang	25	#DIV/0!
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7 Layanan	7 Layanan	100	0	7 Layanan	114	3,26
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225	1 Paket	1 Paket	1	100	1 Paket	3	0,01
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12500	0	1 Paket	1	100	1 Paket	2	0,0
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	755500	0	1 Paket	1	100	1 Paket	2	0,0
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31670	0	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	2	0,0
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325	0	250 Laporan	250	100	125 Laporan	375	1,15
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1250	0	568 Dokumen	568	100	250 Dokumen	818	0,65
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	0,2
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	40	25 Unit	250 Unit	250	100	10 Unit	285	7,125

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	6 Unit	0	0	0	0	0	0
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	10 unit	250 Unit	250	100	10 Unit	270	6,75
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12 Bulan	12 Bulan	12	100	12 Bulan	36	0,6
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12 Laporan	12 Laporan	12	100	12 Laporan	36	0,6
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	0	12 Laporan	12	100	12 Laporan	24	0,4
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	575	118 Unit	55 unit	55	100	118 Unit	291	0,51
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	180	31 unit	55 unit	55	100	45 Unit	131	0,73
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	245	0	0	0	0	0	0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	0	178 Unit	178	100	30 Unit	208	1,39
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	2 Unit	2	100	2 Unit	4	2
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1 Unit	1	100	1 Unit	2	2
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100 Persen	100 Persen	100	100	100 Persen	300	3
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program pemerintah kabupaten	100	100 Persen	100 Persen	100	100	100 Persen	300	3
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	67	2 Dokumen	12 Dokumen	12	100	15 Dokumen	29	0,43

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	22	4 Dokumen	0	0	#DIV/0!	0	4	0,18
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5	0	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	2	0,4
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	20	0	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	2	0,1
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5	0	0	0	0	1 Dokumen	1	0,2
1.04.02.2.01.0005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	10	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	5	0	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	2	0,4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	4 Dokumen	4	100	0	4	#DIV/0!
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	0	1 Dokumen	1	100	2 Dokumen	3	3
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	4 Dokumen	4	#DIV/0!
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	4	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1	100	1 Kegiatan	2	0,5
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	4	0 Orang	30 Orang	30	100	30 orang	60	15
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	0	0	1 Dokumen	1	100		1	#DIV/0!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	157	6 Unit	24 Unit	24	100	19 Unit	49	0,31
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25	5 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0	0	5 unit Rumah	10	2
1.04.02.2.03.0002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0 Unit Rumah	100	0	0	100	#VALUE!
1.04.02.2.03.0005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	132	0	0	0	0	0	0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	10	0	2 Unit Rumah	2	100	0	2	0,2
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	24 Unit Rumah	24	100	30 Unit Rumah	54	#DIV/0!
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	1 Dokumen	0	100	0	0	101	#VALUE!
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	0	1 Dokumen	4 Dokumen	4	100	1 Dokumen	6	#DIV/0!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	1 Laporan	1	100	1 Laporan	2	#DIV/0!
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67	37,3 Persen	42,72 Persen	79,7		48,19 Persen	165,14	3,08
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perizinan,Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	2 Dokumen	2	100	0	2	#DIV/0!
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	0	0 Laoparan	0	0	0	0	#DIV/0!
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	3	0,6
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	0	0	1 Laoparan	1	100	0	1	#DIV/0!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	5	2 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	4	0,8
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	10	0	4,89 Ha	4,89	100	2 Ha	6,89	68,9
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	10 Unit Rumah	29 Unit Rumah	29	100	20 Unit Rumah	59	0,59
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10		4,89 Ha	4,89	100	2 Ha	6,9	0,69
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	2585	518 Unit	517 Unit	78,4		517 Unit	1113,4	0,43
		2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,1	7 Persen	6,7 Persen			6,4 Persen	13,4	2,20
01.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	2585	1010 Unit Rumah	593 Unit Rumah	593	100	517 Unit Rumah	2120	0,82

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.04.04 .2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2585	1010 Unit Rumah	593 unit Rumah	593	100	517 unit	2120	0,82
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11	4,69 Persen	4,48 Persen	0,99	22	4,29 Persen	9,97	2,43
01.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	19,68	7,88 Persen	11,81 Persen	11,81	100	15,75 Persen	35,44	1,80
01.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	19	10 Dokumen	2 Dokumen	2	100	1 Dokumen	13	0,68
01.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1285	0	117 Lokasi	117	100	79 Lokasi	196	0,15
01.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja - PD tahun (2024)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	0	1 Laporan	1	100	1 Laporan	2	#DIV/0!
01.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana,sarana dan utilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pelayanan Daerah dalam Rencana Kerja biasanya mencakup beberapa aspek untuk menilai kinerja dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh PD. Pada capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terapkan pada urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintah lainnya daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar daerah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM juga diposisikan untuk menjawab Isu-isu Krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, Khususnya dalam pelayanan dasar agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan pengampu SPM terkait.

Berikut adalah jenis-jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas:

a. Jenis pelayanan dasar yang dilaksananken oleh Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum:
   1) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
   2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
b. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
   1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/Standar NASIONAL	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok Air minum sehari-hari	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	89,32	90,74	92,16	93,58	95	82,18	100	100	100	
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	83,37	85	86,7	88,34	90	83.48	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Hunian untuk penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.3.1 Tugas DPKP membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, DPKP mempunyai kewenangan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Capaian kinerja DPKP dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja Program/kegiatan. Beberapa indikator kinerja yang digunakan meliputi rasio publikasi kegiatan pemerintah, standar kepuasan masyarakat, dan indeks reformasi birokrasi.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Beberapa faktor tersebut antara lain:

- Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik:

  Seluruh OPD wajib mematuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan untuk menciptakan pelayanan yang prima dan profesional.

- Tantangan dan hambatan:

  PD sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi mereka, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Terdapat berbagai macam permasalahan yang berkembang, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.

Kebutuhan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku Daerah bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mengalir air limbah, baik dari perusahaan maupun dari limbah domestik.

Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gambaran umum kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan yang diraih. Dalam upaya melanjutkan tugas pokok dan fungsi pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, masih banyak permasalahan yang dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan Program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara, maka hasil identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penanganan terhadap Rumah terdampak bencana / relokasi Program Pemerintah	Kurangnya Identifikasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana atau Kawasan Non-Hunian	Minimnya Kurangnya Identifikasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana atau Kawasan Non-Hunian pendataan dan pemetaan yang komprehensif terhadap kawasan bencana
		Belum tersusunnya rencana strategis untuk penanganan kawasan rawan bencana, termasuk mitigasi risiko dan solusi relokasi yang jelas	lemahnya integrasi antar RT/RW dengan kebijakan mitigasi bencana di tingkat kabupaten
		Tidak adanya rencana yang terintegrasi untuk menangani relokasi masyarakat akibat Program pemerintah	Kurangnya Koordinasi lintas sektor dalam merancangf Program relokasi
		Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan persiapan menghadapi potensi ancaman di kawasan rawan bencana	Rencahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana di kawasantempat tinggalnya
		Tidak tersediannya regulasi yang mengatur secara rinci langkah-langkah penanganan, mitigasi, dan relokasi rumah di kawasan rawan bencana maupun akibat Program pemerintah	Tidak adanya dukungan politik yang kuat untuk mengesahkan regulasi terkait
2	Adanya permukiman kumuh	Ketersediaan data permukiman kumuh optimal	Sistem pendataan permukiman kumuh belum mencakup seluruh area dengan tingkat keakuratan yang memadai
		penataan wilayah permukiman belum berjalan secara optimal	Tidak adanya rencana tata ruang yang komprehensif dan kurangnya alokasi sumber daya untuk penataan wilayah
3	Daya Dukung Lingkungan belum sehat	Ketersediaan database lingkungan sehat (PSU, SPAM, dan SPAL) belum tersedia	Belum adanya sistem terpadu untuk pengumpulan dan pengelolaan data terkait PSU (Prasarana Sarana UMUM),SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), dan SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah)
		Infrastruktur lingkungan seperti air bersih,sanitasi dan pengelolaan limbah belum memadai	Anggaran pemerintah untuk infrastruktur dasar masih terbatas dan prioritas alokasi tidak merata di semua wilayah
4	Belum terlaksananya proses sertifikasi bagi pengembangan perumahan	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersetruktur dan jelas untuk proses sertifikasi	Belum selesainya penyusunan regulasi yang diperlukan

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi

Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

masyarakat di Daerah. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat dirasakan:

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:
   - peningkatan ekonomi: pencapaian visi ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi angka kemiskinan; dan
   - layanan kesehatan dan pendidikan: visi dan misi yang fokus pada peningkatan layanan publik dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan.

b. Pembangunan Infrastruktur:
   - infrastruktur fisik: perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas; dan
   - infrastruktur digital: peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan.

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan:
   - transparansi dan akuntabilitas: kebijakan yang mendukung transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; dan
   - efisiensi birokrasi: reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses dan mengurangi hambatan administratif dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

d. lingkungan yang lebih baik.

2.3.4. Tantangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Tantangan berdasarkan kondisi dan capaian kinerja DPKP.

   Tantangan bagi DPKP, sebagai berikut:

   1) belum optimalnya penanganan terhadap rumah terdampak bencana dan relokasi, termasuk kurangnya perencanaan dan pendataan yang memadai terhadap kebutuhan hunian layak;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2) banyak rumah yang belum teridentifikasi, terutama di kawasan rawan bencana dan kawasan non-hunian;
3) ketersediaan data permukiman kumuh belum optimal; dan
4) ketersediaan database lingkungan sehat (PSU, SPAM, dan SPAL) belum tersedia.

Tantangan diatas menjadi aspek utama dalam belum optimalnya pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman.

b. Peluang Berdasarkan kondisi dan capaian kinerja DPKP.

Peluang bagi DPKP, sebagai berikut :

1) luasnya cakupan wilayah kerja yang meliputi seluruh kecamatan dan desa;
2) tersedianya berbagai program nasional yang mendukung pembangunan di tingkat kota/kabupaten;
3) meningkatnya kewenangan daerah dalam mengembangkan program di bidang perumahan dan permukiman; dan
4) adanya akses pendanaan pembangunan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.3.5. Formulasi isu-isu berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan telaahan dokumen perencanaan strategis, DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam periode perencanaan ini. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

a. kurangnya akses terhadap rumah layak huni akses terhadap rumah layak huni masih menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah terpencil, rumah layak huni harus memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan kesehatan;
b. tantangan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh kawasan ini sering ditandai oleh kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar teknis, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya fasilitas sanitasi dan kesehatan lingkungan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pada daerah pesisir sungai;

c. ketimpangan akses terhadap air bersih dan layak minum kondisi ini terjadi akibat distribusi infrastruktur yang belum merata, terbatasnya sumber daya, serta kurang optimalnya pengelolaan air, penyediaan akses yang memadai terhadap air bersih dan layak minum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi risiko masalah kesehatan;

d. keterbatasan penyediaan prasarana dan utilitas umum kurangnya ketersediaan fasilitas ini berdampak langsung pada produktivitas ekonomi, kualitas lingkungan, serta kesejahteraan sosial. peningkatan kapasitas infrastruktur dan utilitas umum memerlukan perencanaan strategis serta alokas sumber daya yang memadai untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 memuat Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rancangan RKPD. *Review* terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil perbandingan tidak terdapat perbedaan indikator, namun pada target dan pagu indikatif terdapat beberapa perbedaan yang dikarenakan:

a. adanya penambahan pada sub kegiatan;
b. adanya penambahan pagu indikatif; dan
c. adanya perubahan target capaian.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kegiatan/Sub Kegiatan yang baru ditambah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	87,65	Persen	24.525.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	5	Liter/Dtk	24.525.000.000	
			Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	110	Liter/Dtk		
			Jumlah Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	1.714	Sambungan Rumah		
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	3	Unit	9.000.000.000	Sepatin/Muara Pantuan/Tani : Pembangunan Bak Penampung Air Hujan dan Pendukung. Prinsip Pem. Desa, mendukung dan berdasarkan usulan Pem. Desa ('- SPM Bidang PUPR - Stunting)
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	Dokumen	1.900.000.000	SPM_3 (SPM Bidang PUPR) - P3-16 (Program air bersih desa)
3	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40	Desa	600.000.000	Pemenuhan Terhadap Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Pengelola SPAM Perdesaan(SPM_3 (SPM Bidang PUPR)
4	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5	unit	9.450.000.000	1. Peningkatan Layanan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan mencakup pada pekerjaan pemasangan jaringan pipa (JDU) dan Sambungan Rumah. 3. Termasuk biaya jasa konsultan pengawasan/supervisi.
5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	91	unit	3.275.000.000	*Pemenuhan Terhadap peralatan alat Lab pendukung IPA SPAM perdesaan, Pemenuhan Terhadap Peralatan Aerator-Ejector, Preumatic dan Coagulation pada sistem pengelolaan air bersih*
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	40	Lembaga	300.000.000	*Fokuskan pada pengelolaan kwalitas air bersih dan manajemen bisnis pada SPAM Perdesaan*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persen	600.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat	1.685	Rumah	600.000.000	
1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	Unit	600.000.000	*IPLT perlu direhab sedang*
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	Persen	1.830.000.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	200.000.000	
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	116	Data	100.000.000	
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	10	persen	30.000.000	
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	30.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	100.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	100.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	7	Unit	1.500.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1.500.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program pemerintah kabupaten	100	Persen	36.276.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15	Dokumen	200.000.000	
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150.000.000	*Pemenuhan penerapan SPM (Lokus Bantaran sungai Tenggarong, Kecamatan Tenggarong)*
2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	50.000.000	*Lokasi Kukar, antisipasi jika terjadi Bencana*
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi	50.000.000	
1	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1	Dokumen	50.000.000	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	94	Unit	35.926.000.000	
1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25	Unit Rumah	6.250.000.000	Pemenuhan penerapan SPM
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	12	Unit Rumah	100.000.000	
3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	64	Unit Rumah	29.576.000.000	Pemenuhan penerapan SPM
4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilaksanakan	2	Koordinasi	100.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	100.000.000	*Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang SIPERUM*
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani		Persen	1.875.000.000	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	350.000.000	
1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1	Kelompok Masyarakat	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	250.000.000	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	1	Ha	1.525.000.000	
1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	Dokumen	100.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Laporan	75.000.000	
3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	unit	1.350.000.000	*Untuk Rumah Jalur Hijau, yang berkenan untuk pindah dari lokasi kumuh dengan syarat memilki lahan pribadi*
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani		Persen	4.450.000.000	
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	380	unit Rumah	4.450.000.000	
1	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	30	unit Rumah	4.250.000.000	*Perbup Nomor 44 Tahun 2024.*
2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150	Orang	100.000.000	*Target : Aparatur desa dan tokoh masyarakat*
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	150	Orang	100.000.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman yg Memiliki PSU layak		Persen	300.000.000	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	300.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
2	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6	Laporan	200.000.000	*Menggunakan Pihak Ketiga, untuk perhitungan PSU di Pengembang*
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase individu dan badan hukum yang telah tersertifikasi dan terregistrasi secara resmi.	14	Persen	75.000.000	
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	Koordinasi	75.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	Laporan	75.000.000	Peraturan Bupati di rencanakan di tetapkan Tahun 2025
			Jumlah			*69.931.000.000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C. 31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	95 Persen 1,48 Persen	11.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	87,65 Persen	130.828.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4 Paket	11.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	5 liter/Dtk	130.828.000.000	
								Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	110 liter/Dtk		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
								Jumlah Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	1714 Sambungan Rumah		
1						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	3 Unit	9.000.000.000	Sepatin/Muara Pantuan/Tani : Pembangunan Bak Penampung Air Hujan dan Pendukung. Prinsip Pem. Desa, mendukung dan berdasarkan usulan Pem. Desa ('- SPM Bidang PUPR - Stunting)
2						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	1.900.000.000	SPM_3 (SPM Bidang PUPR) - P3-16 (Program air bersih desa)
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik 3	4.000.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	110 Liter/Detik	28.495.000.000	1. Pemenuhan capaian kebutuhan dasar 2. Peningkatan kwalitas air bersih dengan pembangunan WTP lengkap kaps. 5 lpd dan perluasan jaringan perpipaan untuk meningkatkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
											layanan masyakat.
4						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40 Desa	600.000.000	Pemenuhan Terhadap Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Pengelola SPAM Perdesaan(SPM_3 (SPM Bidang PUPR)
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	257,5 Liter/Detik	5.500.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5,00 Liter/Detik	4.200.000.000	1. Peningkatan Layanan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 2. Pembangunan WTP lengkap Kaps. 2,5 Lpd di Dusun Mekarsari karena jarak Dusun jauh dengan lokasi SPAM eksisting sehingga tidak memungkinkan jika di satukan menjadi satu sistem.(- SPM_3 (SPM Bidang PUPR) - P3-16 (Program air bersih desa)
6						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 unit	9.450.000.000	1. Peningkatan Layanan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan mencakup pada pekerjaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
											pemasangan jaringan pipa (JDU) dan Sambungan Rumah. 3. Termasuk biaya jasa konsultan pengawasan/supervisi.
7	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1500 SR	1.500.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.714 SR	73.608.000.000	1. Pemasangan sambungan rumah dilakukan pada SPAM Perkotaan dan perdesaan. 2. Termasuk biaya jasa konsultan pengawasan/ supervisi. 3. Selain Data P3KE atau DTKS juga menyasar pada SPAM exsisting terbangun yang masih memiliki iddle capacity.
8						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	91 unit	3.275.000.000	Pemenuhan Terhadap peralatan alat Lab pendukung IPA SPAM perdesaan, Pemenuhan Terhadap Peralatan Aerator-Ejector, Preumatic dan Coagulation pada sistem pengelolaan air bersih

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
9						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Lembaga	300.000.000	Fokuskan pada pengelolaan kwalitas air bersih dan manajemen bisnis pada SPAM Perdesaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,3 Persen	6.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	77.427.500.000	
1			Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	51 Unit	6.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat	1.685 Rumah	77.427.500.000	
1						Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	600.000.000	IPLT perlu direhab sedang
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M^3/Hari	700.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M^3/Hari	-	
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	15 M^3/Hari	1.484.947.500	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	0 M^3/Hari	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
								Perkotaan yang dibangun			
4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30 Rumah Tangga	168.750.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	111 Rumah Tangga	250.000.000	Penyedotan rutin (SPM)
5	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	100 M³/Hari	750.000.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M³/Hari	11.000.000.000	Pembangunan Baru IPLT (SPM)
6	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 unit	675.000.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit		
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	1.500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	- Unit		
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 orang	310.651.250	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150 Orang	150.000.000	
9	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	20 Penyelenggara	110.651.250	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Penyelenggara	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Dikembangkan Kapasitasnya					Ditingkatkan Kapasitasnya			
10	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0 Rumah Tangga	0	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	1685 Rumah Tangga	63.727.500.000	Data P3KE, (Kemiskinan - Stunting - SPM), Lanjutan dari bedah rumah (, Peruntukan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perdesaan,
11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	17 Dokumen	1.700.000.000	Lokus 17 Kecamatan (Penyusunan perencanaan MCK berdasarkan atas lokasi/kawasan)
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 nilai	54.108.812.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 Persen	32.882.935.757	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	475.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
								Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	
4						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
5						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	116 Data	100.000.000	
6						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	Kab. Kutai	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	1 Berita Acara	50.000.000	

Realisasi Kinerja
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
						Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kartanegara	Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Laporan	20.901.952.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.796.331.853	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400 Orang/bulan	20.451.952.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2114 Orang/bulan	21.371.331.853	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumnen	25.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	12 Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	12 Laporan	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100 persen	80.000.000	
1						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	30.000.000	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	150.000.000	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1 Dokumen	25.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Penilaian Kinerja Pegawai					Penilaian Kinerja Pegawai			
3						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.206.759.005	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	975.000.000	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	151100 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6334 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	301.759.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	350.000.000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	250 Dokumen	130.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	250 Dokumen	150.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
		Kartanegara	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Kartanegara	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	7 Unit	1.800.000.000	
1						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000	Pengadaan mobil Skylift untuk pemeliharaan LPJU
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	300.000.000	Pengadaan alat untuk uji volume pekerjaan, alat ukur debit air
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	29.425.100.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	4.506.603.904	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	934.342.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.500.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.490.758.604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.006.603.904	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	118 Unit	2.100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	113 Unit	3.100.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1.900.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	100.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan Penyediaan Perumahan Layak Huni bagi korban bencana dan bagi terdampak relokasi Program pemerintah	100 Persen	7.536.384.560	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program pemerintah kabupaten	100 Persen	43.201.000.000	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	14 Dokumen	1.250.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	1.850.000.000	
1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	6 Dokumen	500.000.000	Penambahan lokasi rencana relokasi
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen	250.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	200.000.000	Hasil Rapat Pembahasan Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD 2026
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana	1 Dokumen	300.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena	1 Dokumen	50.000.000	Hasil Rapat Pembahasan Belanja Standar Pelayanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			Minimal (SPM) pada RKPD 2026
4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	500.000.000	
5						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	*Pemenuhan penerapan SPM (Lokus Bantaran sungai Tenggarong, Kecamatan Tenggarong)*
6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	
7	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen	400.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
8						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000	Lokasi Kukar, antisipasi jika terjadi Bencana
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1 Kegiatan	100.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Sosialisasi	50.000.000	
1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1 Orang	100.000.000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	- Orang		Hasil Rapat Pembahasan Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD 2026
2						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jembayan Tengah, Jembayan Dalam	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	50.000.000	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	33 Unit	6.186.384.560	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	94 Unit	41.201.000.000	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot	5 Unit Rumah	275.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			yang Terehabilitasi					a yang Terehabilitasi			
2						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 Unit Rumah	6.250.000.000	Pemenuhan penerapan SPM
3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	2 Unit Rumah	836.384.560	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	94 Unit Rumah	5.000.000.000	Lahan relokasi terindikasi terjadi longsor dengan luasan 2 Ha, dengan 6 titik longsor yang di tangani 3 titik longsor (pembangunan penahan tanah)
4						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	12 Unit Rumah	100.000.000	
5						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	64 Unit Rumah	29.576.000.000	Pemenuhan penerapan SPM
6	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	28 Unit Rumah	5.150.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	Unit Rumah		perubahan nomenklatur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
4						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilaksanakan	2 Koordinasi	100.000.000	
1						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000.000	Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang SIPERUM
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67 Persen	1.113.615.440	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Persen	4.875.000.000	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	500.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	600.000.000	
1	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang	1 Dokumen	250.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
			Tersusun/Terevi ew /Terlegalisasi					Tersusun/Terevi ew/ Terlegalisasi			
2						Pembentukan/Pembina an Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000	-
3						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	250.000.000	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area kawasan permukiman yang ditingkatkan	2 Ha	613.615.440	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	1 Ha	4.275.000.000	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	263.615.440	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit Rumah	1.250.000.000	
2						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	100.000.000	
3						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraa n Pemugaran/Per	1 Laporan	75.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
								emajaan Permukiman Kumuh			
4						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 unit	1.350.000.000	Untuk Rumah Jalur Hijau, yang berkenan untuk pindah dari lokasi kumuh dengan syarat memilki lahan pribadi
5	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	350.000.000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	1.500.000.000	
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Persen	10.340.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Persen	40.300.000.000	
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 Rumah	10.340.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	380 unit Rumah	40.300.000.000	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	517 Unit Rumah	10.340.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	350 unit Rumah	35.850.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
2						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	30 unit Rumah	4.250.000.000	Perbup Nomor 44 Tahun 2024.
3						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang	100.000.000	Target : Aparatur desa dan tokoh masyarakat
4						Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	150 Orang	100.000.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11 Persen	1.350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman yg Memiliki PSU layak	Persen	52.286.250.000	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	19,68 Persen	1.350.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Perumahan	52.286.250.000	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	500.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	1.050.000.000	Data jalan Lingkungan keseluruhan, baik yang di bangun oleh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
											kecamatan maupun desa, ntuk menyiapkan perencanaan dalam pengusulan anggaran (Bankeu), 40 Km dalam kondisi rusak berat di Tgr Sbrng.
2						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.000.000	
3						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6 Laporan	200.000.000	Menggunakan Pihak Ketiga, untuk perhitungan PSU di Pengembang
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	257 Lokasi	850.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	122 Lokasi	50.936.250.000	
8						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN		Persentase individu dan badan hukum yang telah tersertifikasi	14 Persen	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	
						REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		dan terregistrasi secara resmi.			
1						Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Koordinasi	75.000.000	
1						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	75.000.000	Peraturan Bupati di rencanakan di tetapkan Tahun 2025
	Jumlah				91.448.812.417					381.875.685.757	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh DPKP merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Daerah. Dokumen Rencana Kerja DPKP didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan Program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kabupaten Kutai kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman yg Memiliki PSU layak		
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		
1	ID SIPD 1435809 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT
2	ID SIPD 1313712 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman jalan Am. sangaji gang 4 Rt 004 Kelurahan Baru	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT
3	ID SIPD 1313918 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman jalan selimpat Rt 018 Kelurahan Panji	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT
4	ID SIPD 1314392 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jalan Surakrta 2 RT 12 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	ID SIPD 1325201 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jalan Etam Gang Lapangan RT 10 Keluaran Jahab Kecamatan Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT
6	ID SIPD 1325294 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jalan Triyu 1 Gang Rahmat RT 54 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
7	ID SIPD 1412638 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Jl.Mangkuraja Gang. Kadi Rt.24 Kelurahan Loa Ipuh	Tenggarong		1 Lokasi	UNIT
8	ID SIPD 1412867 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan permukiman Jl.Arsapati 5 Gang.Rabang 3 Rt.77 Kelurahan Loa Ipuh	Tenggarong		1 Lokasi	KM
9	ID SIPD 1414850 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan permukiman Jl.Sangkulirang Gang.03 Rt.01 kelurahan Maluhu	Tenggarong		1 Lokasi	KM
10	ID SIPD 1414924 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan permukiman gang lapangan Rt.10 Kelurahan Jahab	Tenggarong		1 Lokasi	KM
11	ID SIPD 1311093 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan permukiman Jalan Gang HantuDusun Bahagia, Desa Sanggulan	Sebulu		1 Lokasi	KM
12	ID SIPD 1387091 Pengaspalan Jalan (panjang 200 meter x lebar 4 meter) Jalan Gunung Penetak RT. 64 Kelurahan Loa Ipuh	Tenggarong		1 Lokasi	KM
13	ID SIPD 1334795 Peningkatan Jalan di Gang Logam RT. 13 Desa Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang		1 Lokasi	KM
14	ID SIPD 1334969 Pembangunan Jembatan Gang Logam RT. 13 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang	Tenggarong Seberang		1 Lokasi	UNIT
15	ID SIPD 1481302 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tenggarong Seberang		1 Lokasi	UNIT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang				
16	ID SIPD 1274123 Pengaspalan Gang Amal RT 16 Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
17	ID SIPD 1274226 Peningkatan badan jalan Gang Berkah RT 10 Maluhu Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
18	ID SIPD 1376058 Drainase jalan Lingkungan Gg.Bersama RT.11 Kel. Baru Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
19	ID SIPD 1376126 Drainase jalan Lingkungan Gg.Kutai Kiri-Kanan RT.3 Kel. Timbau Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
20	ID SIPD 1376608 Lanjutan Pembangunan Parit Drainase Jl. Akhmad Dahlan RT.2 (Perbatasan RT.2 dan RT.3) Kel. Baru, Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
21	ID SIPD 1377220 Pembuatan Parit Kiri & Kanan Jl.Jelawat RT. 4 Kel, Timbau Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
22	ID SIPD 1393363 Semenisasi gang Keminting RT 5 Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
23	ID SIPD 1393520 Semenisasi Gang di Tambak Rel Dalam RT 14 Kelurahan Baru Kec. Tenggarong	Tenggarong		1 Lokasi	KM
24	ID SIPD 1436361 Pengurukan jalan desa Desa Sumber Sari RT. 04 Kecamatan Loa Kulu	Loa Kulu		1 Lokasi	KM
25	ID SIPD 1436399 Pengurukan Jalan Desa Rempanga RT 01 Kecamatan Loa Kulu	Loa Kulu		1 Lokasi	KM
26	ID SIPD 1436427 Pembuatan Badan Jalan RT06 Desa Rempanga Kec. Loa kulu	Loa Kulu		1 Lokasi	KM
27	ID SIPD 1436442 Pembuatan Badan Jalan RT 07 Desa Rempanga Kec. Loa kulu	Loa Kulu		1 Lokasi	KM
28	ID SIPD 1436487 Lanjutan pengurukan tanah kas Desa Jembayan Tengah Kec. Loa kulu	Loa Kulu		1 Lokasi	KM
29	ID SIPD 1437106 Pembuatan badan jalan RT 09 Dusun Donomulyo desa sungai payang	Sungai Payang		1 Lokasi	KM
30	ID SIPD 1437127 Lajutan pengurukan jalan pertanian dusun tegal	Loa Janan Ulu		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	anyar desa loa janan ulu kec. Loa janan				
31	ID SIPD 1437135 Pengurukan jalan brahim RT 26 dusun tegal anyar desa loa janan ulu kec. Loa janan	Loa Janan Ulu		1 Lokasi	KM
32	ID SIPD 1437183 Pembuatan Drainase Di Depan SD 023 RT 05 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan	Loa Janan Ulu		1 Lokasi	KM
33	ID SIPD 1449959 Pengurukan Jalan RT 08 Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu	Jembayan Tengah		1 Lokasi	KM
34	ID SIPD 1449977 Lanjutan Pengurukan Lahan Kantor Desa Jonggon Kec. Loa Kulu	Jonggon Desa		1 Lokasi	KM
35	ID SIPD 1450020 Pengurukan Badan Jalan Desa Jongkang Kec. Loa Kulu	Jongkang		1 Lokasi	KM
36	ID SIPD 1310608 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kahala Ilir Menuju Dusun Pendamaran P : 1000 M L :6 M Kecamatan Kenohan	Kenohan		1 Lokasi	KM
37	ID SIPD 1456540 Pelebaran Jl.Moh.Sidik Rt 017 Desa Kota Bangun Ulu	Kota Bangun Ulu		1 Lokasi	KM
38	ID SIPD 1500347 Semenisasi Jalan masyarakat L : 4M P:500M Kecamatan Tabang	Tabang		1 Lokasi	KM
39	ID SIPD 1113171 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Setia Raya Gang 4 RT 052 Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong	Loa Ipuh		1 Lokasi	KM
40	ID SIPD 1392840 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rajawali RT. 09 Kelurahan Sukarame Tenggarong	Sukarame		1 Lokasi	KM
41	ID SIPD 1393027 Drainase jalan Lingkungan Jalan Rezeki Etam RT. 11 Kelurahan Timbau	Timbau		1 Lokasi	KM
42	ID SIPD 1405934 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 01 RT. 25 Kelurahan Timbau	Timbau		1 Lokasi	KM
43	ID SIPD 1421736 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan DI Panjaitan Gang 4 RT. 03 Kelurahan Loa Ipuh	Loa Ipuh		1 Lokasi	KM
44	ID SIPD 1422470 Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Jalan Langsat Kelurahan Bukit Biru	Bukit Biru		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	ID SIPD 1423470 Drainase jalan Lingkungan Jalan Pesut Gang Waduk RT. 7 Kelurahan Timbau	Timbau		1 Lokasi	KM
46	ID SIPD 1423811 Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Jalan Sopoyono RT. 5 Kelurahan Timbau	Timbau		1 Lokasi	KM
47	ID SIPD 1461266 Drainase jalan Lingkungan Jalan Bengkinang RT. 12 Kelurahan Loa Tebu	Loa Tebu		1 Lokasi	KM
48	ID SIPD 1461553 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Cempedak Gang Todak RT. 07 Kelurahan Panji	Panji		1 Lokasi	KM
49	ID SIPD 1464622 Drainase jalan Lingkungan Jalan Gunung Sari Gang Kubur RT. 19 Kelurahan Panji	Panji		1 Lokasi	KM
50	ID SIPD 1464647 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Jaong ke Jalan Rangga Yuda RT. 18 Kelurahan Mangkurawang	Mangkurawang		1 Lokasi	KM
51	ID SIPD 1464804 Drainase jalan Lingkungan RT. 04 Kelurahan Sukarame	Sukarame		1 Lokasi	KM
52	ID SIPD 1505017 Drainase jalan Lingkungan Gang Kenanga RT. 5 Kelurahan Panji	Panji		1 Lokasi	KM
53	ID SIPD 1505054 Drainase jalan Lingkungan RT. 18 Kelurahan Panji	Panji		1 Lokasi	KM
54	ID SIPD 1452452 Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Utama) Solar Panel Kec. Loa Janan	Loa Janan		1 Lokasi	UNIT
55	ID SIPD 1230517 Drainase jalan Lingkungan Jl. Manunggal rt. 21 Desa Tanjung Limau Koordinat : -0.312331, 117.438177	Tanjung Limau		1 Lokasi	KM
56	ID SIPD 1231168 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan Jl. Cokroaminoto Rt. 23, 24, 25, 26 Desa Gas Alam Badak 1 Kec. Muara BAdak Koordinat : -0.326741, 117.434879	Gas Alam Badak I		1 Lokasi	UNIT
57	ID SIPD 1238530 Drainase jalan Lingkungan Jl. Perintis Gg. Polmas Rt. 11 Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak Koordinat : -0.331028, 117.419127	Badak Baru		1 Lokasi	KM
58	ID SIPD 1416828 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan Jl. Bina Karya 2 Desa	Muara Badak Ulu		1 Lokasi	UNIT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Muara Badak Ulu Muara Badak Koordinat : -0.354694, 117.433513				
59	ID SIPD 1469401 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan Jl. Gas Alam Rt. 02 Desa Batu-batu Muara Badak Koodinat : -0.333289, 117.385032	Batu-Batu		1 Lokasi	UNIT
60	ID SIPD 1314254 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa jembayan RT 17, kec loa kulu	Jembayan		1 Lokasi	KM
61	ID SIPD 1500435 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan loa duri ilir gang manggis	Loa Duri Ilir		1 Lokasi	KM
62	"ID SIPD 1438960 Lanjutan Pembangunan Jembatan Titian Ulin Kuburan Muslimin Rt.01 Desa Muara Wis kec. Muara wis"	Muara Wis		1 Lokasi	KM
63	ID SIPD 1346265 Pembuatan Jembatan Jalan Perjuangan RT.01 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat	Sungai Merdeka		1 Lokasi	KM
64	ID SIPD 1432042 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Sollar Sell/Tenaga Surya) Kecamatan Loa Janan	Loa Janan		1 Lokasi	UNIT
65	ID SIPD 1427300 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Makam Sepuh Desa Manunggal jaya	Loa Janan		1 Lokasi	KM
66	ID SIPD 1440961 Pembangunan dan peningkatan badan jalan jln. Am Husain GG. 05 RT. 06 Desa Loa Lepu	Manunggal Jaya		1 Lokasi	KM
67	ID SIPD 1440970 Pembangunan dan peningkatan badan jalan jln. Idris GG. 06 RT. 06 Desa Loa Lepu	Loa Lepu		1 Lokasi	KM
68	ID SIPD 1467367 Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman, jl. Bengsang Gg Bengsang 5 Rt 5 Loa lepu Tgr seberang	Loa Lepu		1 Lokasi	KM
69	ID SIPD 1208612 Pengurugan jalan Jl. Masdar RT. 10 Desa Kutai Lama	Loa Lepu		1 Lokasi	KM
70	ID SIPD 1209099 Lanjutan Pengaspalan Jalan Veteran Jalan Veteran Rt.4 Desa Anggana Kec. Anggana	Kutai Lama		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	ID SIPD 1211722 Lanjutan Semenisasi Jalan Jembatan Rt.12 Desa Anggana Kec. Anggana	Anggana		1 Lokasi	KM
72	ID SIPD 1212081 Lanjutan Semenisasi Jalan RT 15 Desa Sidomulyo Kec. Anggana	Anggana		1 Lokasi	KM
73	ID SIPD 1212175 Semenisasi jembatan Rt 14 Desa Handil Terusan Kec. Anggana	Sidomulyo		1 Lokasi	KM
74	ID SIPD 1366177 PERMOHONAN LANJUTAN PENGERJAAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT 12 MUARA BADAK ILIR JL. DERMAGA BARU RT 12 DESA MUARA BADAK ILIR, KEC. MUARA BADAK	Handil Terusan		1 Lokasi	KM
75	ID SIPD 1366244 PERMOHONAN LANJUTAN JEMBATAN ULIN SAMPING GUDANG H SOMPE MUARA BADAK ILIR RT 07 JL. KAPITAN RT 07 DESA MUARA BADAK ILIR, KEC. MUARA BADAK	Muara Badak Ilir		1 Lokasi	KM
76	ID SIPD 1366313 PERMOHONAN LANJUTAN PENGERJAAN JEMBATAN ULIN BELAKANG RUMAH MUSAH MUARA BADAK ILIR RT 15 JL. KAPITAN TOKO LIMA RT 07 DESA MUARA BADAK ILIR, KEC. MUARA BADAK	Muara Badak Ilir		1 Lokasi	KM
77	ID SIPD 1394894 PERMOHONAN LANJUTAN PENGERJAAN JALAN JEMBATAN ULIN SAMPING RUMAH AGUS MUARA BADAK ILIR RT 04 JL. M JAFAR RT 04 DESA MUARA BADAK ILIR, KEC. MUARA BADAK	Muara Badak Ilir		1 Lokasi	KM
78	ID SIPD 1431685 PERMOHONAN PENGERJAAN SEMENISASI JEMBATAN ULIN GG TK JEND SUDIRMAN RT 12 JL. MANUNGGAL RT 12 DESA TANJUNG LIMAU, KEC. MUARA BADAK	Muara Badak Ilir		1 Lokasi	KM
79	ID SIPD 1490829 PERMOHONAN PENGERJAAN SEMENISASI GANG DESA MUARA BADAK ILIR RT 09 JL. GG BELANAK RT 09 DESA MUARA BADAK ILIR KEC. MUARA BADAK	Muara Badak Ilir		1 Lokasi	KM
80	ID SIPD 1446993 Pembangunan Drainase RT. 11 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Batuah		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	ID SIPD 1447063 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Batuah		1 Lokasi	KM
82	ID SIPD 1447088 Pembangunan Drainase RT.3 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Batuah		1 Lokasi	KM
83	ID SIPD 1447137 Pembangunan Drainase RT.6 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Batuah		1 Lokasi	km
84	ID SIPD 1456038 Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan di Jalan Harapan Jaya Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu	Jembayan Tengah		1 Lokasi	KM
85	ID SIPD 1487487 Pembangunan Drainase RT.06 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu	Margahayu		1 Lokasi	KM
86	ID SIPD 1487527 Pembangunan Drainase RT. 08 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu	Margahayu		1 Lokasi	KM
87	ID SIPD 1487548 Pembangunan Drainase RT. 11 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu	Margahayu		1 Lokasi	KM
88	ID SIPD 2273037 Peningkatan Badan Jalan Mappadendang RT 7 Kelurahan Salok Api Darat Kec.Samboja Barat	Salok Api Darat		1 Lokasi	KM
89	ID SIPD 2239908 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Soekarno- Hatta RT.06 Kelurahan Sungai Merdeka Kec.Samboja Barat	Sungai Merdeka		1 Lokasi	KM
90	ID SIPD 2320358 Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Badan Jalan Gang Karya I RT 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kec.Samboja Barat Kab. Kutai Kartanegara	Sungai Merdeka		1 Lokasi	KM
91	ID SIPD 1419586 Pembuatan Pagar Kuburan RT. 03 Desa Margahayu	Margahayu		1 Lokasi	METER
92	ID SIPD 1446550 Pembuatan drainase jalan lingkungan RT.015 Desa Sambera Baru	Sambera Baru		1 Lokasi	KM
93	ID SIPD 1266709 Lanjutan Pengaspalan Pengaspalan lanjutan RT 5 Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu	Sanggulan		1 Lokasi	KM
94	ID SIPD 1300383 Semenisasi Jembatan Ulin di RT 5 RT 5 Desa Sanggulan kecamatan Sebulu	Sanggulan		1 Lokasi	KM
95	ID SIPD 1466985 Pembuatan Jembatan Ulin Jalan Setia Tani Gang Usaha Tani Kelurahan	Salok Api Darat		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat				
96	ID SIPD 1434295 Pemasangan Lampu Penerangan Solar Cell Jalan gunung ilas RT. 36 kelurahan timbau	Timbau		1 Lokasi	UNIT
97	ID SIPD 1455474 Pengadaan LPJU solarcell Jl. Loa ipuh gg. Dewi citra rt.19 kel.loa ipuh Tenggarong	Loa Ipuh		1 Lokasi	UNIT
98	ID SIPD 1455483 Pengadaan LPJU solarcell Lingkungan RT 20 kelurahan maluhu kec Tenggarong	Maluhu		1 Lokasi	UNIT
99	ID SIPD 1455500 Pengadaan LPJU solarcell gang chiko Rt.14 kelurahan timbau kec. Trnggarong	Timbau		1 Lokasi	UNIT
100	ID SIPD 1228962 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan GG. PUNCAK RT 12 DESA GAS ALAM BADAK I	Gas Alam Badak I		1 Lokasi	UNIT
101	ID SIPD 1280870 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan DESA GAS ALAM BADAK 1 RT 26	Gas Alam Badak I		1 Lokasi	UNIT
102	ID SIPD 1281866 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan DESA GAS ALAM BADAK 1 RT 09	Gas Alam Badak I		1 Lokasi	UNIT
103	ID SIPD 1283024 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan DESA GAS ALAM BADAK 1 RT 19	Gas Alam Badak I		1 Lokasi	UNIT
104	ID SIPD 1479442 Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin RT.7 Desa Muara Aloh Kec. Muara Muntai	Muara Aloh		1 Lokasi	KM
105	ID SIPD 1250761 Lanjutan pembangunan Jalan Jembatan Ulin Gang Mangga Jl. Mulawarman I RT. 001 Kecamatan Kota Bangun	Kota Bangun		1 Lokasi	KM
106	ID SIPD 1361376 Pembuatan Drainase Jl.Kangen Gang Tahfidz Rt. 20 Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun	Kota Bangun Ulu		1 Lokasi	KM
107	ID SIPD 1448020 Pembangunan/peningkatan jalan jembatan ulin perumahan dan	Muara Wis		1 Lokasi	KM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	permukiman Jln.Jelawat RT 005 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis				
108	ID SIPD 1448063 Pembangunan/peningkatan jalan jembatan ulin perumahan dan permukiman Jln Biawan Rt 007 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis	Muara Wis		1 Lokasi	KM
109	ID SIPD 1313622 Pembangunan Jembatan Ulin antar Jalan di Desa Long Belet Haloq. P:106m L:3m, Tinggi:2m Desa Long Beleh Haloq	Long Beleh Haloq		1 Lokasi	KM
110	ID SIPD 1460684 Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan Rawa Guna RT.03 Kelurahan Wonotirto,	Wonotirto		1 Lokasi	KM
111	ID SIPD 1462064 Rehab Jembatan GG Keluarga RT. 007 Kelurahan Handil Baru Darat	Handil Baru		1 Lokasi	KM
112	ID SIPD 1240376 Rehabilitasi Jembatan menjadi Jembatan Besi Desa Selerong RT.09 Kecamatan Sebulu	Selerong		1 Lokasi	UNIT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjangh, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang tersebut menyebutkan 5 (lima) tujuan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Yaitu :

1. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integritas, singkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah:
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan:
4. optimalisasi partisipasi masyarakat ; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berikut beberapa kebijakan nasional tahun 2026 yang relevan dengan kewenangan DPKP, terutama dalam mendukung penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan:

1. Program Nasional 3 (tigag) Juta Rumah.

   Program ini diperkuat melalui penandatanganan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri (Menteri Perumahan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum) pada akhir tahun 2024, Program ini berlanjut hingga 2026 dengan target penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Prioritas SPAM dan Sanitasi.

   Dalam RPJMD Kukar 2021-2026, tahun 2026 menjadi momentum penyelesaian prioritas seperti :

   a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. sistem air limbah domestik; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. penanganan kawasan kumuh dan RTLH.

3. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.

Kebijakan ini mendukung SDGs : kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. DPKP memiliki kewenangan langsung dalam :

a. peningkatan kualitas kawasan kumuh; dan
b. relokasi warga dari zona rawan bencana atau sanitasi buruk.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja - PD

a. Tujuan adalah pernyataan hasil atau kondisi yang diinginkan oleh DPKP dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini disusun berdasarkan penyelesaian isu-isu strategis, dengan fokus pada mendukung visi dan misi pembangunan Daerah, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan Program prioritas DPKP. Tujuan DPKP Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan ini difokuskan pada penciptaan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Dengan pelaksanaan Program yang terarah dan berbasis data, DPKP bertujuan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah. Implementasi tujuan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan.

b. Sasaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan Program dan kegaitan secara terukur, realistis, dan terarah guna mencapai hasil yang sesuai dengan rencana strategis pembangunan Daerah. Sasaran ini juga menjadi tolak ukur pencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Sasaran DPKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. meningkatnya jumlah hunian layak, layanan sanitasi, dan penyediaan air minum perpipaan, untuk mendukung lingkungan yang sehat dan berkelanjutan; dan
2. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran-sasaran ini diharapkan dapat memberikan hasil yang konkret dalam upaya peningkatan jumlah hunian layak, layanan sanitasi, serta penyediaan air minum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dan Sasaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan Program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak pada peningkatan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran ini dirancang untuk mencapai hasil yang nyata melalui indikator kinerja utama yang terukur. Rencana target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No	Tujuan	Sasaran	indikator Tujuan/Sasaran
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik, keterjangkauan biaya, dan keberlanjutan lingkungan serta sosial sesuai dengan ketentuan daerah.
1		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, digunakan secara layak, dan tidak mencemari lingkungan sekitar.
2		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, digunakan secara layak, dan tidak mencemari lingkungan sekitar.
3		Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh penyedia resmi (PDAM atau UPTD SPAM).
4		Rasio Permukiman Layak Huni	Persentase kawasan permukiman yang memenuhi kriteria kelayakan huni berdasarkan aspek fisik, lingkungan, dan legalitas sesuai standar teknis dan ketentuan daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Seluruh Program dan kegiatan yang telah disusun oleh DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan serta administrasi pemerintahan Daerah, dengan indikator yang jelas dan terukur, serta pendanaan yang direncanakan akan mendukung pelaksanaan Program yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan harapan Program ini mampu menjawab tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sinergi antara pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan :

1). Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam mencapai tujuan tersebut dengan fokus pada peningkatan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan jabaran atas visi dan misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi kewenangan DPKP adalah sebagai berikut:

a. Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam 20 tahun kedepan (2025-2030) dapat dirumuskan sebagai berikut: “KUKAR IDAMAN TERBAIK : Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi tersebut mengandung (5) lima elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan.

b. Untuk mencapai Visi tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru nonekstraktif;
3. terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayah yang berkeadilan;

Sesuai tugas dan fungsinya DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara mengarah pada pencapaian unsur visi "Kukar Tangguh dan Kukar Berkelanjutan". Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas, yaitu "Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan"

Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP), IUP yang menjadi acuan bagi DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup:

1. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan menekankan pada penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun keberlanjutan. Ini mencakup upaya untuk memastikan ketersediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui Program subsidi perumahan maupun kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan perumahan rakyat. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses hunian yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Rumah tangga dengan akses sanitasi layak indikator rumah tangga dengan akses sanitasi layak berfokus pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan infrastruktur sanitasi yang memadai, seperti fasilitas toilet dan sistem pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik di setiap kawasan permukiman. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit, dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat untuk warganya.

3. Cakupan layanan air minum layak perpipaan indikator cakupan layanan air minum layak perpipaan menyoroti pentingnya distribusi air bersih yang dikelola secara efisien melalui sistem perpipaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses air minum yang merata bagi seluruh rumah tangga, sehingga mendukung kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, khususnya di wilayah yang sulit memperoleh akses langsung terhadap sumber air bersih

Ketiga indikator tersebut mencerminkan komitmen DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengutamakan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan wilayah yang tangguh, seimbang, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat mandat untuk melaksanakan Program Prioritas yang telah dijabarkan pada RPJMD Teknokratik sebagai berikut.

1. Program Etam Sejahtera, Program ini bertujuan untuk perbaikan kondisi kawasan permukiman yang tidak layak huni dengan meningkatkan kualitas fisik dan infrastruktur permukiman minimal 500 (lima ratus) unit pertahun.
2. Program Permukiman Idaman Terbaik, Program ini di prioritaskan pada:
   - penetaan permukiman tepi sungai,
   - fasilitasi kerjasama dengan pengembang perumahan yang terjangkau bagi korban bencana/relokasi dan masyarakat yang termasuk kategori berpendapataan rendah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan program terang kampongku dan program air bersih desa.

2). Pencapaian SDGs,

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh DPKP, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

3). Pengentasan Kemiskinan,

Peran DPKP dalam menurunkan angka stunting dan pengentasan kemiskinan sangat strategis, terutama melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa peran kunci sesuai kewenangannya:

a. Penyediaan Rumah Layak huni (RTLH)

DPKP bertanggung jawab membangun atau merehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi RLH. Akses terhadap hunian yang sehat dan aman sangat penting dalam mencegah stunting, karena lingkungan tempat tinggal yang buruk dapat memicu penyakit dan kekurangan gizi.

b. Peningkatan Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan faktor krusial dalam mencegah stunting dan penyakit menular. Disperkim Kukar, misalnya, memprioritaskan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan fasilitas sanitasi di wilayah-wilayah rawan.

4. Relokasi dan Penataan Kawasan Permukiman.

Dalam kasus bencana atau kawasan kumuh, DPKP dapat melakukan relokasi dan penataan ulang permukiman agar masyarakat tinggal di lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

5. Pencapaian SPM.

Pencapaian SPM sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa semua warga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

negara mendapatkan hak-hak dasar mereka. Sebagai PD pengampu SPM urusan Pekerjaan Umum (rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi serta rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik) serta SPM urusan Perumahan Rakyat (penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak Program pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didukung dengan Program :

1. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; dan
3. pengembangan perumahan.

6. Pemberdayagunaan potensi ekonomi Daerah.

Potensi ekonomi daerah bisa dioptimalkan melalui beberapa langkah strategis, diantaranya dengan pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan jembatan, juga bisa membantu memperlancar arus barang dan jasa.

4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan.

Rencana Kerja DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Studi Renstra DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Kerja, DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa Program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

4.3 Program dan Kegiatan.

Dalam tahun anggaran 2026 program kegiatan yang akan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya yaitu sebanyak 8 (Delapan) Program, 19 (sembilan velas) kegiatan,78 (tujuh puluh delapan) Sub-Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp381.875.685.757,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan lima tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun Tabel T.C 33 dan Program Kegiatan & Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel T.C 33

Program Kegiatan & Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RKPD TAHUN 2026	PAGU ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
1	ProgramPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 130.828.000.000	Rp. 332.210.000.000
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 77.427.500.000	Rp. 57.500.000.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.882.935.757	Rp. 44.608.509.342
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 43.201.000.000	Rp. 49.991.000.000
5	Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.875.000.000	Rp. 7.300.000.000
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 40.300.000.000	Rp. 33.600.000.000
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Rp. 52.286.250.000	Rp. 309.063.125.000
8	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kaasan Permukiman	Rp. 75.000.000	Rp. 750.000.000
JUMLAH		*Rp.* 381.875.685.757	Rp. 835.022.634.342

Ketidak sesuaian antara rumusan Program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD dapat terjadi karena adanya penambahan pada sebagaian Program dan kegiatan di dapat dari hasil musrenbang dan prioritas DPKP yang tertuang dalam studi pendahuluan DPKP.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar									381.875.685.757					835.022.634.342
1.03	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								208.255.500.000					389.710.000.000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten		87,65 Persen	130.828.000.000			87,65	Persen	332.210.000.000
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		5 Liter/Dtk	130.828.000.000			5	Liter/Dtk	332.210.000.000
						Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		110 Liter/Dtk				110	Liter/Dtk	
						Jumlah Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		1714 Sambung Rumah				1714	Sambung Rumah	
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	9.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Sepatin/Muara Pantuan/Tani : Pembangunan Bak Penampung Air Hujan dan Pendukung. Prinsip Pem. Desa, mendukung dan berdasarkan usulan Pem. Desa ('- SPM Bidang PUPR - Stunting)	3	Unit	9.000.000.000
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.900.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	SPM_3 (SPM Bidang PUPR) - P3-16 (Program air bersih desa)	2	Dokumen	3.600.000.000
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110 *Liter/Detik*	28.495.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Pemenuhan capaian kebutuhan dasar 2. Peningkatan kwalitas air bersih dengan pembangunan WTP lengkap kaps. 5 lpd dan perluasan jaringan	110	Liter/Detik	60.955.000.000

BerAKHLAK Kementerian PANRB bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											perpipaan untuk meningkatkan layanan masyakat.		
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Desa	600.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemenuhan Terhadap Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Pengelola SPAM Perdesaan(SPM_3 (SPM Bidang PUPR)	40 Desa	1.980.000.000
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00 *Liter/Detik*	4.200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Layanan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 2. Pembangunan WTP lengkap Kaps. 2,5 Lpd di Dusun Mekarsari karena jarak Dusun jauh dengan lokasi SPAM eksisting sehingga tidak memungkinkan jika di satukan menjadi satu sistem.(- SPM_3 (SPM Bidang PUPR) - P3-16 (Program air bersih desa)	5,00 Liter/Detik	7.200.000.000
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 unit	9.450.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Layanan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan mencakup pada pekerjaan pemasangan jaringan pipa (JDU) dan Sambungan Rumah. 3. Termasuk biaya jasa konsultan pengawasan/supervisi.	5 unit	9.450.000.000
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.714 SR	73.608.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Pemasangan sambungan rumah dilakukan pada SPAM Perkotaan dan perdesaan. 2. Termasuk biaya jasa konsultan pengawasan/ supervisi. 3. Selain Data P3KE atau DTKS juga menyasar pada SPAM exsisting terbangun yang masih memiliki iddle capacity.	1.714 SR	236.450.000.000
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 unit	3.275.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemenuhan Terhadap peralatan alat Lab pendukung IPA SPAM perdesaan, Pemenuhan Terhadap Peralatan Aerator-Ejector,	91 unit	3.275.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											Preumatic dan Coagulation pada sistem pengelolaan air bersih		
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Lembaga	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Fokuskan pada pengelolaan kwalitas air bersih dan manajemen bisnis pada SPAM Perdesaan	40 Lembaga	300.000.000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persen	77.427.500.000			Persen	57.500.000.000
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat		1.685 Rumah	77.427.500.000			1.685 Rumah	57.500.000.000
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	IPLT perlu direhab sedang	1 Unit	600.000.000
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 M³/Hari	-	DANA BAGI HASIL (DBH		0 M³/Hari	-
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		0 M³/Hari	-	DANA BAGI HASIL (DBH			
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111 Rumah Tangga	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penyedotan rutin (SPM)	111 Rumah Tangga	250.000.000
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 M³/Hari	11.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pembangunan Baru IPLT (SPM)	20 M³/Hari	11.000.000.000
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		150 Orang	350.000.000
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	1685 Rumah Tangga	63.727.500.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Data P3KE, (Kemiskinan - Stunting - SPM), Lanjutan dari	1685 Rumah Tangga	45.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Semua Kel/Desa				bedah rumah (, Peruntukan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perdesaan,		
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	1.700.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Lokus 17 Kecamatan (Penyusunan perencanaan MCK berdasarkan atas lokasi/kawasan)	17 Dokumen	300.000.000
1.04					Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				173.620.185.757				445.312.634.342
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100 Persen	32.882.935.757			100 Persen	44.608.509.342
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	475.000.000			6 Dokumen	575.000.000
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	100.000.000
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	50.000.000
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	75.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Laporan	75.000.000
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	116 Data	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		116 Data	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Semua Kel/Desa						
1	04	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Berita Acara	50.000.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	21.796.331.853			100 Persen	20.901.952.728
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2114 Orang/bulan	21.371.331.853	DANA BAGI HASIL (DBH)		2114 Orang/bulan	20.451.952.728
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	50.000.000
1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumnen	25.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Dokumnen	50.000.000
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	350.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	350.000.000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		100 persen	80.000.000			100 persen	250.000.000
1	04	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	50.000.000
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	150.000.000			100 persen	200.000.000
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		15 Orang	100.000.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	975.000.000			100 persen	4.175.000.000
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	1.500.000.000
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	250.000.000
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	500.000.000
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	75.000.000
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Laporan	350.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		125 Laporan	800.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		250 Dokumen	1.000.000.000
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		0 Dokumen	50.000.000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		7 Unit	1.800.000.000			7 Unit	2.050.000.000
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengadaan mobil Skylift untuk pemeliharaan LPJU	1 Unit	1.850.000.000
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengadaan alat untuk uji volume pekerjaan, alat ukur debit air	6 Unit	200.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	4.506.603.904			12 Laporan	12.106.556.614
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	6.826.137.080
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.006.603.904	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	5.280.419.534
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		113 Unit	3.100.000.000			113 Unit	4.350.000.000
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit	1.900.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		60 Unit	1.900.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		Unit	1.200.000.000
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Unit	150.000.000
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	1.000.000.000
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	100.000.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program pemerintah kabupaten		Persen	43.201.000.000			Persen	49.991.000.000
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		15 Dokumen	1.850.000.000			15 Dokumen	3.050.000.000
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penambahan lokasi rencana relokasi	6 Dokumen	450.000.000
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Hasil Rapat Pembahasan Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD 2026	1 Dokumen	250.000.000
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Hasil Rapat Pembahasan Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD 2026	1 Dokumen	300.000.000
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	1 Dokumen	500.000.000	DANA BAGI		1 Dokumen	1.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Susun, dan Rumah Khusus	Kecamatan, Semua Kel/Desa			HASIL (DBH)			
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemenuhan penerapan SPM (Lokus Bantaran sungai Tenggarong, Kecamatan Tenggarong)	1 Dokumen	500.000.000
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Dokumen	400.000.000
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Lokasi Kukar, antisipasi jika terjadi Bencana	1 Dokumen	50.000.000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Sosialisasi	50.000.000			1 Sosialisasi	100.000.000
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- orang	-				
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau bangunan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- orang	-				
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab		128 Unit	41.201.000.000			128 Unit	46.541.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Rumah	275.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit Rumah	275.000.000
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit Rumah	6.250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemenuhan penerapan SPM	25 Unit Rumah	6.250.000.000
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 Unit Rumah	5.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Lahan relokasi terindikasi terjadi longsor dengan luasan 2 Ha, dengan 6 titik longsor yang di tangani 3 titik longsor (pembangunan penahan tanah)	94 Unit Rumah	10.340.000.000
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Rumah Tangga	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Rumah Tangga	100.000.000
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Unit Rumah	29.576.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemenuhan penerapan SPM	98 Unit Rumah	29.576.000.000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilaksanakan		1 Koordinasi	100.000.000			1 Koordinasi	300.000.000
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang SIPERUM	1 Dokumen	300.000.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani		Persen	4.875.000.000			Persen	7.300.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas		1 Dokumen	600.000.000			1 Dokumen	650.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kawasan Permukiman Kumuh							
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	250.000.000
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Kelompok Masyarakat	150.000.000
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	250.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area		1 Ha	4.275.000.000			1 Ha	6.650.000.000
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 unit Rumah	1.250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 unit Rumah	1.250.000.000
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	150.000.000
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Dokumen	-				
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 unit	1.350.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Untuk Rumah Jalur Hijau, yang berkenan untuk pindah dari lokasi kumuh dengan syarat memilki lahan pribadi	20 unit	2.650.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	1.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Ha	2.500.000.000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani		Persen	40.300.000.000			Persen	33.600.000.000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi		380 unit Rumah	40.300.000.000			380 unit Rumah	33.600.000.000
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 unit Rumah	35.850.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		350 unit Rumah	29.000.000.000
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 unit Rumah	4.250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Perbup Nomor 44 Tahun 2024.	30 unit Rumah	4.250.000.000
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Target : Aparatur desa dan tokoh masyarakat	150 Orang	150.000.000
1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		150 Orang	200.000.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman yg Memiliki PSU layak		Persen	52.286.250.000			Persen	309.063.125.000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	52.286.250.000			Perumahan	309.063.125.000
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	1.050.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Data jalan Lingkungan keseluruhan, baik yang di bangun oleh kecamatan maupun desa, ntuk menyiapkan	2 Dokumen	1.200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Semua Kel/Desa				perencanaan dalam pengusulan anggaran (Bankeu), 40 Km dalam kondisi rusak berat di Tgr Sbrng.		
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	100.000.000
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Kelompok	-
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Menggunakan Pihak Ketiga, untuk perhitungan PSU di Pengembang	6 Laporan	200.000.000
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122 Lokasi	50.936.250.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		122 Lokasi	307.563.125.000
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase individu dan badan hukum yang telah tersertifikasi dan terregistrasi secara resmi.		13,95 Persen	75.000.000			13,95 Persen	750.000.000
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		1 Koordinasi	75.000.000			1 Koordinasi	750.000.000
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peraturan Bupati di rencanakan di tetapkan Tahun 2025	1 Laporan	750.000.000
					Jumlah				381.875.685.757				835.022.634.342

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, Program, kegiatan, sub-kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   1. Penyusunan Rencana Kerja DPKP tahun 2026 berpedoman pada Renstra DPKP tahun 2025-2029. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukan *revieu* terhadap Renstra.
   2. Perumusan Program, kegiatan dan sub-kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja DPKP pada Prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan Daerah.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
   1. Rencana Kerja DPKP ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan (DPA) tahun 2026.
   2. Seluruh unsur Aparatur sipil Negara DPKP berkewajiban untuk melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
   3. Setiap unsur Aparatur Sipil di lingkungan DPKP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan dengan evaluasi secara berkala.

c. Rencana Tindak Lanjut
   1. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan tugas perencanaan yang semakin komplek dengan

diadakannya pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja.

2. Seluruh Aparatur di lingkungan DPKP perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan Program, kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
3. Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya perubahan dengan perpedoman pada ketentuan yang berlaku dan perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap PD diwajibkan untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu PD yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, yaitu yang bertanggung jawab kepada Bupati untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi Bupati tersebut disusun dalam dokumen Rencana Kerja DPPR yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja utama Bupati.

Rencana Kerja DPPR Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap Program dan kegiatan tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja DPPR adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
g. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang;
h. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja DPPR adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dilingkup DPPR dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk merumuskan Program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPR tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DPPR adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

- 4.1 Program Dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja DPPR tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan capaian Renstra. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pertanahan dan urusan penataan ruang tahun 2024, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPPR tahun 2026, melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra urusan pertanahan dan penataan ruang berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja urusan pertanahan dan penataan ruang tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah realisasi keuangan Program dan kegiatan DPPR tahun 2024, disampaikan realisasi capaian kinerja dari 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan pada tahun 2024, hasil capaian terendah yaitu dari Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Sedangkan untuk capain yang tinggi tersebar di beberapa Program dan kegiatan. Adapun penjelasan Program kegiatan berdasarkan memenuhi target atau tidaknya, dijelaskan pada uraian di bawah ini :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan beberapa Program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Program ini terdiri dari terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Sub kegiatan tidak memenuhi target dari target 9 (sembilan) pengadaan tanah yang dilaksanakan DPPR tercapai 7 (tujuh) lokasi yang berhasil dilaksanakan sedangkan 2 (dua) lokasi tidak tercapai

disebabkan adanya kendala yang mempengaruhi capaian indikator yaitu harga yang tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan ditambah masalah data dukung administrasi kependudukan ahli waris yang kurang dan memerlukan proses persidangan serta administrasi hibah dan waris yang tidak dapat dibuktikan sehingga hanya dapat terealisasi 77,78 % (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) yaitu dengan anggaran sebesar Rp13.317.050.756,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dari total pagu Rp34.731.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Delapan (8) kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan, dan semua Sub kegiatan dapat memenuhi target capaian dengan anggaran Rp. 12,594,409,917 terserap 73% yaitu Rp. 11,712,408,036.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Pada Program ini dijalankan dengan Dua (2) sub kegiatan kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100% (seratus persen), karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja DPPR sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus/sengketa tanah negara sudah berjalan dengan baik. dengan anggaran terealisasi 99.63 % (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) yaitu sebesar Rp 323.185.007,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh rupiah) dari total pagu Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.

Pada Program ini terealisasi 59,32 % (lima puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) yaitu

dengan anggaran sebesar Rp400.411.174,00 (empat ratus juta empat ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dari total pagu Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

d. Program Penatagunaan Tanah Pada Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian terealisasi 86,82 % (delapan puluh enam koma delapan puluh dua persen) dengan realisasi Rp380.264.010,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu sepuluh rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah ini dijalankan dengan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian dan terealisasi 74,62% (tujuh puluh empat koma enam puluh dua persen) dengan anggaran terealisasi Rp298.487.715,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dari total pagu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

f. Program Penetapan Tanah Ulayat.

Pada Program Penetapan Tanah Ulayat Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 15% (lima belas persen), terealisasi 96,30% (sembilan puluh enam koma tiga puluh persen) dengan anggaran terealisasi Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari total pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.1.3 Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini dijalankan dengan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, walaupun terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya namun semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100% (seratus persen), dengan anggaran Rp4.946.570.500,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terserap 91,20% (sembilan puluh satu koma dua puluh persen) yaitu Rp 2.301.297.655,00 (dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

b. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong ini dijalankan dengan 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 94,06% (sembilan puluh empat koma enam persen), dengan anggaran terealisasi Rp1.035.144.658,00 (satu miliar tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dari total pagu Rp 1.100.548.464,00 (satu miliar seratus juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapaianya, Terpenuhinya, Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. kesalahan dalam penganggaran RKA/DPA dan kode rekening pada sistem SIPD;
2. kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target; dan
3. efisiensi anggaran.

Adapun tercapianya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. penyusunan target rencana kinerja sesuai dengan target Renstra dinas;
2. ketersediaan dana yang sesuai dengan anggaran kas;

3. waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target program/kegiatan;
5. motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja; dan
6. pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra PD.

1. dengan tercapaianya target capaian program renstra maka peningkatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah telah ditarget setiap tahunnya untuk mengalami peningkatan;
2. kegiatan pembinaan administrasi pertanahan di desa/kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan taget, harapannya dengan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2013;
3. penyelesaian sengketa pertanahan memperkecil rasio sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. tersusunnya dokumen RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
5. tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
2. koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait seperti pihak kementerian ATR/BPN dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan;

3. optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak desa dan masyarakat umum.
4. adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas PD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir :

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2024

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
01. 03. 12	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85	70	70	70	96.99	80	220	2.59
01. 03. 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	100	9	9	9	100	4	22	0.22
01. 03. 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	-	-	-	100	-	-	0.00
01. 03. 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	6	1	1	1	100	-	2	0.33

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Penetapan RRTR Kabupaten/Kota								
01. 03. 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2	4	4	4	100	-	8	4.00
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2	-	-	-	-	1	1	0.50
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	-	-	-	-	1	1	0.50
1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0	-	-	-		1	1	0.00
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0	-	-	-		1	1	0.00
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Jumlah pemangku	2	-	-	-	-	-	0	0.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	pedoman Bidang Penataan ruang	kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi								
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2	-	-	-	-	4	4	2.00
01. 03. 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	25				-	27.29	27.29	1.09
01. 03. 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3	1	1	1	100	1	3	1.00
01. 03. 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	1	1	1	0	1	3	3.00
01. 03. 12 2.02 05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	-	-	-	0	1	1	0.00
01. 03. 12 2.02 06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang	0	-	-	-	0	20	20	0.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
01. 03. 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	25				-	5.03	5.03	0.20
01. 03. 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	20	20	20	100	-	40	2.00
01. 03. 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	100	1	1	1	100	-	2	0.02
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1	-	-	-	-	10	10	10.00
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	-	-	-	-	1	1	1.00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
01. 03. 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	25				-	3.77	3.77	0.15
01. 03. 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	1	1	1	100	-	2	2.00
01. 03. 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	1	1	1	100	-	2	2.00
01. 03. 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100	20	20	20	100	10	50	0.50
01. 03. 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	1	100	1	3	3.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RT	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	40	-	-	-	-	20	20	0.50
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	-	1	1	1	1	2	2.00
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2	-	-	-	-	0	0	0.00
2 10 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	75	75	75	100	77	227	2.91
2 10 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	75	7	7	7	100	5	19	0.25
2 10 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	45	5	5	5	100	3	13	0.29

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Perangkat Daerah								
2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	0	0	0	0	3	3	1.00
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	25	2	2	2	100	2	6	0.24
2 10 01. 2.01 .0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1.00
2 10 01. 2.01 .0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	1	0	0	0	0	1	1	1.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Lingkup Perangkat Daerah								
2 10 01. 2.01 .0010	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1.00
2 10 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	60	2	2	2	100	2	6	0.10
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372	74	74	74	1	1	149	0.40
2 10 01. 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	1	1	1.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 01. 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	10	2	2	2	1	1	5	0.50
2.10.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0	1	1	1.00
2 10 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	5	2	2	2	100	2	6	1.20
2 10 01. 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	1	1	1.00
2 10 01. 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	1	1	1.00
2 10 01. 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	2	2	1	2	6	1.20

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	1	1	1	100	1	3	1.50
2 10 01. 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	-	-	-	100	1	1	0.20
2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	408	134	156	156	1	118	408	1.00
2.10.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	30	30	30	100	30	90	1.00
2 10 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	7	21	0.60
2 10 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	1	1	1	100	1	3	0.07
2 10 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5	1	1	1	100	3	5	1.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Kantor yang Disediakan								
2 10 01. 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	0.60
2 10 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100	2	4	0.80
2 10 01. 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	1	1	1	100	1	3	0.75
2.10.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	1	1	1	100	1	3	0.75
2 10 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	1	1	1	100	15	17	0.23
2 10 01. 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	3	0.60
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	100	51	51	51	100	23	125	1.25

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.10.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	1	1	1	100	2	4	0.80
2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	50	50	50	50	100	15	115	2.30
2 10 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100	12	36	0.60
2 10 01. 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	5	5	5	100	60	70	1.17
2 10 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	0.60
2 10 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	61	16	16	16	100	46	78	1.28
2 10 01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan	30	11	11	11	100	11	33	1.10

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
2 10 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	4	4	4	100	4	12	0.40
2 10 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	2	2	2	100	1	5	1.00
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	30.00	0	0	0	0	30	30	1.00
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	75	0	0	0	0	-	0	0.00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0	-	0	0.00
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	5	0	0	0	0	-	0	0.00
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	100	80	80	80	100	95	255	2.55
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	114	23	23	23	100	4	50	0.44

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	6	0.60
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	104	21	21	21	100	2	44	0.42
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	90	58.3	75	58.3	77.78	85	201.676	2.24
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	7	9	7	77.78	5	19	0.73

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	-	-	-	0	-	0	0.00
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	7	9	7	77.78	8	22	1.10
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	100	86	86	86	100	95	267	2.67
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah	18	4	4	4	100	4	12	0.67

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		kebelbihan maksimum								
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	-	2	0.40
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	-	2	0.50
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	1	1	1	100	1	3	0.60
3 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses	4	1	1	1	100	1	3	0.75

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
4 10 06 2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	1	1	1.00
2 10 06 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	2	2	2	100	2	6	0.67
2 10 06 2.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	5	1	1	1	100	1	3	0.60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3 10 06 2.02 02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	-	-	2	0.50
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	75	30	30	30	100	60	120	1.60
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	12	1	1	1	100	3	5	0.42
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	0.60

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3 10 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	-	-	-	-	1	1	0.25
02.10.07.2.01.00 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	3	-	-	-	-	1	1	0.33
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	75	60	60	60	100	70	190	2.53
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0.60
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0.60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	9	2	2	2	100	2	6	0.67
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4	1	1	1	100	1	3	0.75
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0.60
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	86	83	83	83	100	85	251	2.92
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	9	2	2	2	100	2	6	0.67
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	1	1	1	100	1	3	0.60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	4	1	1	1	100	0	2	0.50
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	80	77	77	77	100	79	233	2.91
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7	3	3	3	100	3	9	1.29
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	0.60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3 10 10 2.01 02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4	1	1	1	-	1	3	0.75
4 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	1	1	1	-	1	3	1.50
02.10.10.2.01.00 05	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Keluaran Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	2	-	-	-	-	1	1	0.5

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 .Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA -PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	-
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	60%	80%	85%	90%	-
3	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	-	-	83%	86%	90%	95%	100%	86%	90%	95%	100%	-
4	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	82%	83%	84%	85%	86%	83%	84%	85%	86%	-
5	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	-	-	55%	60%	65%	70%	75%	68%	65%	70%	75%	-
6	Persentase ketaatan terhadap RTRW	-	-	65%	70%	75%	80%	85%	96,99%	75%	80%	85%	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	90%	90%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2024, target penanganan sengketa tanah garapan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total pengaduan yang difasilitasi. Berkat koordinasi yang efektif, respons cepat, serta pendekatan mediasi yang optimal, seluruh pengaduan yang masuk telah ditangani dengan baik. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu mencapai 100% (seratus persen) dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas mekanisme fasilitasi pengaduan, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta komitmen dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan secara adil dan tepat waktu. Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa tanah semakin meningkat, sekaligus menjadi pijakan untuk perbaikan kebijakan serta peningkatan layanan pertanahan di masa mendatang.

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	90%	86%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, target kinerja tercapai 100% (seratus persen) dikarenakan dukungan kecamatan dan desa sangat membantu didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan serta peran aktif PD lain yang sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	84%	83%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target kinerja tercapai karena pada tahun 2024, target penyediaan tanah untuk masyarakat ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen), dan target ini berhasil dicapai sepenuhnya dengan capaian kinerja 100% (seratus persen). Keberhasilan ini ditunjukkan dengan diperolehnya calon objek tanah negara yang dapat diusulkan sebagai tanah pertanian dalam proses pemberian izin membuka tanah. Selanjutnya, proses ini akan dilanjutkan dengan pengusulan kriteria calon subjek izin membuka tanah, yang disesuaikan dengan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian ini memastikan bahwa penyediaan tanah berjalan sesuai dengan perencanaan tata ruang, sehingga pemanfaatannya lebih terarah dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80%	75%	80%	Sedang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, target meningkatnya penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah sebesar 80% (delapan puluh persen) dan realisasinya 75% (tujuh puluh persen) atau capaian kinerja sebesar 93,75 % (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen). Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi banyak faktor yang mempengaruhi berhasilnya indikator ini antara lain sudah tersedianya dokumen perencanaan dan mendapat dukungan dari masyarakat dan aparat Pemerintah/OPD (Desa dan Kecamatan) yg memerlukan tanah. Namun terdapat juga factor

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penghambat dari indikator ini antara lain Dari 8 Lokasi pembebasan tanah terdapat 3 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan :

- pengadaan lahan Pelabuhan wisata pangempang lahan yang diajukan/dimohon PD lokasinya bergeser dan fungsi/peruntukannya tidak sesuai dengan permohonan awal, dipermohonan awal untuk pelabuhan wisata selama proses pengadaan tanah berubah menjadi untuk sarana dan prasarana dermaga wisata pangempang;
- pengadaan akses jalan pelabuhan Muara Badak ilir harga yang ditetapkan KJPP tidak sesuai harapan warga; dan
- pengadaan perluasan Kantor Camat Tabang harga yang ditetapkan KJPP tidak sesuai harapan warga.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	65%	66%	113%	Sangat Tinggi

Target Tahun 2024 sebesar 65% dan terrealisasi 65 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kriteria Tinggi, Target kinerja tercapai karena terpenuhinya data persyaratan permohonan pengajuan sertipikat aset pemda di kantor ATR/BPN sehingga dalam prosesnya dapat memenuhi target.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75	96.59	138%	Sangat Tinggi

Program penyelenggaraan penataan ruang, indikator kinerja Program penyelenggaraan penataan ruang tahun 2024 yaitu Persentase ketaatan terhadap RTRW dengan persentase sebesar 128,7 % (seratus dua puluh delapan koma tujuh persen), berhasilnya pencapaian sasaran Program ini selain karena komitmen pimpinan juga peran serta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

semua *stakeholder* dilingkup DPPR juga didukung dengan adanya supervisi dan pendampingan dari Kementerian ATR serta sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Tingginya animo Masyarakat terkait pengurusan kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PPKPR) dan sudah ada 6 (enam) RDTR yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati serta sedang diproses pada sistem aplikasi OSS, ada 3 (tiga) yang masih dalam proses pengajuan persetujuan substansi ATR/BPN , ada 7 (tujuh) sudah penyesuaian dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021, selebihnya masih dalam proses penyusunan materi teknis. Sedangkan faktor penghambat program ini yaitu:

1. Kurangnya SDM yang memahami terkait penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu diperbanyak bimtek dan pelatihan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang;
3. Kurangnya fasilitas pendukung penyelengaraan penataan ruang;
4. Keterbatasan ketersediaan anggaran penyelengaraan penataan ruang; dan
5. Adanya perubahan regulasi yang cepat tanpa adanya sosialisasi/pemberitahuan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Pengertian isu strategis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra-PD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan Program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD.

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. proses sertipikasi aset tanah milik pemerintah Daerah;
2. belum terintegrasi sebaran peta bidang tanah SKPT dengan sertipikat hak atas tanah;
3. belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing desa/kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
4. tindak lanjut penyusunan RDTR berupa penetapan peraturan bupati tentang RDTR dan integrasi RDTR ke dalam OSS.
5. percepatan penyelesaian identifikasi dan inventarisasi penguasaaan tanah masyarakat pada kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penguatan hak.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DPPR dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPPR memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

DPPR mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar/yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

DPPR mempunyai fungsi :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Program kerja dan administrasi di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan pengawasan,monitoring dan Evaluasi di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Penyusunan laporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah;
4. Bidang Penatagunaan Tanah;
5. Bidang Penanganan dan pengendalian Administrasi pertanahan;
6. Bidang Tata Ruang;
7. Kelompok Jabatan fungsional dan Pelaksana; dan
8. UPTD.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis;
2. belum dimilikinya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) per wilayah;
3. adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan;
4. perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah melalui penerbitan SKPT dan PBB;
7. perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan dibeberapa kecamatan/desa dan ex HGU di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;

8. belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian Program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPPR berpegang pada visi dan misi PD yang telah dibuat dan disepakati, yaitu sebagai berikut :

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

- Masyarakat yang sejahtera, batasan pengertian sejahtera yaitu kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- Masyarakat yang berbahagia, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara juga merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu KUKAR IDAMAN. Idaman secara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). KUKAR IDAMAN adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi Daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPPR sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan penataan ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, DPPR mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penataan ruang; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPPR terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPPR berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. Pencapaian Misi I **:** Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

   Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

   Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

   Sasaran : Meningkatnya penataan,penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. Pencapaian Misi IV **:** Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

   Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

   Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan.

   Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

1. penyelesaian sertifikasi lahan aset Pemerintah Daerah;
2. meyelesaikan dokumen rencana tata ruang wilayah di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan; dan
4. mengembangkan sarana dan prasarana sistem informasi geografi (SIG) pertanahan dan penataan ruang.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD DPPR merupakan langkah awal bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan tahunan yang berisi Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan, tugas dan fungsi DPPR.

Pada rancangan Rencana Kerja tahun 2025 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan Program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan Rencana Kerja tahun 2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas Program dan kegiatan, indikator kinerja Program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran Program/kegiatan DPPR, yang dilakukan melalui tahapan :

1. membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. penjelasan mengenai proses tersebut; dan
3. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 DPPR disajikan dalam tabel terlampir.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. TC-31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				16,179,655,600.00					49,714,753,689.00	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2,300,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5,075,000,000.00	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				900,000,000.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1,150,000,000.00	
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	550,000,000.00	Dokumen Kebijakan Perda/Perkada terkait tata ruang (biaya tenaga ahli untuk penyusunan Dokumen Kebijakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				Perda/Perkada terkait tata ruang)
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
3	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000.00	Dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang telah melalui proses harmonisasi dan fasilitasi (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)
4	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0 Publikasi	-		Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
5	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
6	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Laporan	250,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Laporan	200,000,000.00	Laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (belanja honorarium narasumber dan Seminar KIT)
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah				2,100,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
7	Penyusunan Peta Dasar					Penyusunan Peta Dasar					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	0 Peta	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	300,000,000.00	
8	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,600,000,000.00	Dokumen materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(biaya tenaga ahli untuk penyusunan RDTR)
9	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang					Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	-	Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM bidang Tata Ruang (Seminar Kit dan Honorarium Narasumber)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
11	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	200,000,000.00	Penambahan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				450,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1,125,000,000.00	
12	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	300,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	350,000,000.00	Pelaksanaan Pelayanan Permohonan KKPR dan Pengenalan KKPR
13	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					
			Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	-			Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	700,000,000.00	Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
14	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	150,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	75,000,000.00	Dokumen materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(biaya tenaga ahli untuk penyusunan RDTR)
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				550,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah				700,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
15	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kasus	150,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kasus	150,000,000.00	
16	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	150,000,000.00	Pelaksanaan Pelayanan Permohonan KKPR dan Pengenalan KKPR
17	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR					Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	15 Kasus	150,000,000.00	Pembaruan dan Peningkatan Aplikasi Sistem Informsi dan Komunikasi Penataan Ruang
18	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK					Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK					
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 Dokumen	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250,000,000.00	
19	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal					Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal					
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 Berita Acara	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,894,855,936.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,317,021,505.00	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500,000,000.00	
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150,000,000.00	Penyusunan Dokumen Ranwal RENJA 2027, Dokumen RENJA 2027, RENJA Perubahan 2026.
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	50,000,000.00	Penyusunan Laporan Manajemen Resiko, Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau), LKJIP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000.00	Laporan Evaluasi Renstra dan Renja
23	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	Fasilitasi pelaksanaan validasi data Sektoral Daerah
24	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	0 Data	-		Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	150,000,000.00	Satu Data (BECIK)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
25	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,000.00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,229,050,452.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,404,869,505.00	
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	7,979,050,452.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	11,104,869,505.00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	250,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	250,000,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
29	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Realisasi Anggaran					Realisasi Anggaran					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125,000,000.00	
30	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000.00	Laporan Penilaian Barang Milik Daerah
32	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang					Rekonsiliasi dan Penyusunan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah pada SKPD					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50,000, 000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50,000,000.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan kekurangan Honor BMD Rekonsiliasi Aset
8	Administras Kepegawaian Perangkat Daerah				-	Administras Kepegawaian Perangkat Daerah				225,000,000	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Pelaksanaan Paket Pakaian Olahraga Lengkap untuk 118 Orang
34	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	-		Kab. Kutai Kartanegara,	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	25,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
35	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	200,000,000	Pelaksanaan Pelatihan Mandiri yang akan disesuaikan denga Kebutuhan pada Tahun Berjalan
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah				755,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				901,310,000.00	
36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66,410,000.00	
29	Penyediaan Peralatan dan					Penyediaan Peralatan dan					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor					Perlengkapan Kantor					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	105,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000.00	Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	210,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	219,900,000.00	Paket Bahan Logistik Kantor, Paket Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Paket Makanan dan Minuman Rapat
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000.00	Paket Cetak, Paket Penggandaan/Fotocopy
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perundang-undangan					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	
25	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	150,000,000.00	Kebutuhan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan, Bulan Ramadhan, Event Erau serta Pameran Merah Putih Sanga2
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	230,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	250,000,000.00	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kaltim
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Paket Penataan Arsip Dinamis Statis melalui Jasa Pihak Ketiga
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,742,000,000.00	
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0Unit	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	72,000,000.00	Pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk pejabat eselon IV /pejabat fungsional. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 655.115.000 dan Operasional Rp 44.885.000
29	Pengadaan Meubel					Pengadaan Meubel					
			Jumlah Meubelair yang diadakan	0 Unit	-		Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah Meubelair yang diadakan	110 Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0Unit	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	-	
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,670,000,000.00	Tersedianya Gedung Kantor Baru Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (perencanaan bangunan gedung kantor)
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,418,305,484.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,016,342,000.00	
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	215,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	522,342,000.00	Penyediaan Jasa : Air, Listrik, Telepon, Innternet dan TV Berlangganan (5 Laporan x 12 Bulan) dan Paket Penambahan Daya Listrik
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1,203,305,484.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,494,000,000.00	Penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2024 dan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317,500,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				402,500,000.00	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67,500,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67,500,000.00	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	250,000,000.00	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	85,000,000.00	Pentingnya Pemeliharaan untuk peralatan kantor perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dari peralatan kantor dan berpengaruh kepada kinerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pegawai selama bekerja. Seperti AC, PC, Laptop, Printer dan lainnya
III	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				300,000,000.00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				1,600,000,000.00	
13	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000.00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,600,000,000.00	
37	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota					Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota					
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	-		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	-	Untuk melakukan inventarisasi kasus pertanahan dan memantau kasus sesuai dengan tipologinya di arapan kecamatan, desa, dan kelurahan, diperlukan beberapa kajian dan penggunaan aplikasi tertentu.
38	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan					Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	600,000,000.00	Diperlukan data dukung kasus permasalahan pertanahan dari Desa , Kelurahan dan Kecamatan sehingga diperlukan arapan nan sistem manajemen pengaduan sengketa tanah arapan terintergrasi di Kecamatan
40	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,000,000,000.00	
IV	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				350,000,000.00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				22,972,732,184.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000.00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				22,972,732,184.00	
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.Pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau Perum Korpri Rp3.200.000.000
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	350,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	22,972,732,184.00	2. Pengadaan tanah Kantor Desa Jembayan Ilir Rp6.200.000.000
											3. Pengadaan lahan Perluasan Sarana Olah Raga Sebulu Rp. 1.200.000.000,- (luasan 4800 m)
											4. . Pengadaan lahan Tempat Pengembangan Obyek Wisata Kedang Ipil Kecamatan Kota

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Bangun Darat luas 1 ha Rp. 700.000.000,-
											5. Pengadaan lahan Tempat Parkiran dan panggung Budaya Wisata Kedang Ipil Kecanatan Kota Bangun Darat luas 1 ha Rp. 700.000.000,-
											6. Pengadaan Tanah Akses Jalan Pelabuhan Kec. Muara Badak Rp. 4.000.000.000
											7. Pengadaan Tanah Relokasi Tanah Longsor Kec. Loa Janan 2 Ha Rp. 4.000.000.000
											8. Pengadaan Tanah Relokasi Tanah Longsor Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut 2 Ha Rp. 3.000.000.000
											9. Pengadaan Tanah Relokasi Korban Banjir Jembayan Tengah Kec. Loa kulu Rp 4.348.732.184
											10. Pengadaan Lahan untuk IPAL Kec. Tenggarong 1,5 Ha Rp. 6.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											11. Pengadaan Lahan untuk Damkar 300 m2 (daerah-daerah rawan becana kebakaran hutan Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun darat, ,Marangkayu, Muara Badak, Anggana) Rp 3.000.000.000
V	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				600,000,000.00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				650,000,000.00	
15	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah					Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	Belum diperolehnya dan diketahuinya Objek Redistribusi Tanah
43	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	200,000,000.00	Belum diketahuinya tanah Objek dan Subyek TORA
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1					Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(satu) Kabupaten/Kota					1 (satu) Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	
45	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah					Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	Belum diperolehnya dan diketahuinya Calon subyek penerima Redistribusi Tanah
16	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000.00	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000.00	
46	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan					Inventarisasi Tanah Kelebihan					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000.00	Belum diketahuinya Calon Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
47	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000.00	Belum diketahuinya syarat dan ketentuan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				834,799,664.00	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				950,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				100,000,000.00	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				100,000,000.00	
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	100,000,000.00	
18	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				734,799,664.00	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				850,000,000.00	
52	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	300,000,000.00	Inventarisasi dan Identifikasi tanah aset pemda
53	Pemanfaatan Tanah Kosong					Pemanfaatan Tanah Kosong					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	634,799,664.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	550,000,000.00	Paket Dokumen Tanah Pemda (Fasilitasi Sertifikat Tanah pemda)
VII	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				200,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				500,000,000.00	
19	Penerbitan Izin Membuka Tanah				200,000,000.00	Penerbitan Izin Membuka Tanah				500,000,000.00	
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	200,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	500,000,000.00	1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan/penggunaan tanah berbasis IMT/SKPT 2. Peta sebaran SKPT sebagai dasar analisis dan identifikasi wilayah kerja 3.Draft konsep dan rekomendasi pengembangan sistem E-SKPT dan/atau E-Administrasi Pertanahan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				400,000,000.00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				650,000,000.00	
20	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				650,000,000.00	
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	250,000,000.00	
56	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	350,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi, penelitian lapangan dan pengambilan titik sample dan Pengolahan dan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul					Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul					
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1 Dokumen	100,000,000.00		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1 Dokumen	50,000,000.00	Koordinasi, Identifikasi dan Inventarisasi keberadaan Tanah Timbul
TOTAL					16,179,655,600.00					49,714,753,689.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2026 berasal dari usulan Kecamatan dan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan Program dan kegiatan selanjutnya akan diakukan verifikasi ulang menyesuaikan dengan tujuan, indikator, dan lokasi Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan juga memperhatikan dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional merupakan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Hal yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemisikinan, infrastruktur, ketahanan pangan, iklim usaha dan investasi, lingkungan hidup, hukum dan keamanan Provinsi yang terkait dengan pembangunan Daerah.

Kebijakan yang dibuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan tindak lanjut kebijakan Kabupaten Kutai kartanegara dalam pengaturan dan pengelolaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Tabel III.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	Nasional		
	PENATAAN RUANG		
1	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Meningkatkan pembinan kelembagaan penataan ruang		
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang		
4	Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataaan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur		
	PERTANAHAN		
1	Membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Reforma agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan Pemberdayaan masyarakat		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapau melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui Program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan tersebut maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran merupakan salah satu dasar penilaian kinerja sehingga memicu organisasi untuk berupaya se optimal mungkin untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran tabel III.2 berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tebel III.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase ketaatan terhaPdap RTRW	65	70	75	80	85

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Kukar Idaman tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupatern Kutau kartanegara. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu “terwujudnya tertib administrasi pertanahan, meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan, terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan dan meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan sesuai arahan pola ruang.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah.

Sejalan dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan visi DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Program dan kegiatan yang dirancang DPPR tahun 2026 sebagaimana yang pada tabel di bawah ini berikut dengan perkiraan maju tahun 2027 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						**49.714.753.689,00**							**73.054.689.898,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.075.000.000,00**							**6.950.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**5.075.000.000,00**							**6.950.000.000,00**	
1.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**5.075.000.000,00**						-	**6.950.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Indeks Perencanaan Tata Ruang*	-			4 Persen	1.150.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	1.350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Pelaksanaan Tata Ruang*	-			19.09 Persen	2.100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	2.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Pemanfaatan Tata Ruang*	-			5.03 Persen	1.125.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	1.450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				12 Layanan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata keloia pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				2 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata keloia pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Pengendalian Tata Ruang*	-			3.75 Persen	700.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	1.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				10 Kasus	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				15 Kasus	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**44.639.753.689,00**							**66.104.689.898,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**44.639.753.689,00**							**66.104.689.898,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.317.021.505,00**						-	**26.504.689.858,00**	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Evaluasi*	-			15 Dokumen	500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	-			12 Laporan	11.404.869.505,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	9.834.840.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		9.534.840.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			2 Dokumen	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 Layanan	901.310.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	1.121.310.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		66.410.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	219.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		219.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 persen	1.742.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	11.116.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	72.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.670.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		10.516.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	2.016.342.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	1.880.038.960,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	522.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		522.342.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.494.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		1.357.696.960,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah*	-			46 Unit	402.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	402.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		67.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**1.000.000.000,00**						**-**	**1.050.000.000,00**	

BerAKHLAK Kementerian Negara banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			23 Dokumen	1.600.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	1.050.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**22.972.732.184,00**						**-**	**36.000.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			5 Dokumen	22.972.732.184,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	36.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11 Dokumen	22.972.732.184,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		36.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**650.000.000,00**						**-**	**500.000.040,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum*	-			4 Dokumen	350.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	300.000.040,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		40,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen	300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.02.0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
5.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**950.000.000,00**						-	**250.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BerAKHLAK berorientasi pelayan membanggakan bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	-			2 Kegiatan	850.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
6.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						**500.000.000,00**						-	**850.000.000,00**	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT*	-			2 Dokumen	500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
7.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**650.000.000,00**						-	**950.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi*	-			1 Dokumen	650.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	950.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							**49.714.753.089,00**							**73.054.089.898,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPPR Ruang Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah PD dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati.

Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja tahun 2026 antara lain perumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja DPPR pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja DPPR akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPR tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA dan DPA dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil *review* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kabupaten serta evaluasi Provinsi.

c. Rencana tindak lanjut

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja setiap triwulan;
2. Jika hasil evaluasi dan pengendalian memunjukkan adanya penyesuaian terhadap target dan sasaran maka dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
3. Perubahan akan dimuat dalam perubahan Rencana Kerja DPPR.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud Renja-PD dalam hal ini adalah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-1383/065.11/BAPP/2025 Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat daerah Tahun 2026.

Keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, yaitu: penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, kemudian dalam penyusunan Rencana Kerja tersebut harus terintegrasi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, serta memperhatikan Rencana Kerja

Kementerian Perhubungan dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, maka selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Ddaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 60 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah rencana kerja Dinas Perhubungan yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun pada tahun 2026, dengan melanjutkan Program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan Program pembangunan tahun 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan pemerintahan *good governance* dan akuntabilitas pelayanan publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

Kemudian Rencana Kerja ini bertujuan untuk:

a. memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada tahun 2026;
b. menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya; dan
c. membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini, secara garis besar susunan dan uraian pokok bahasan dalam penulisannya adalah terdiri dari bagian dan bab sebagai berikut:

BAB I : Bagian Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangakat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat: telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menguraikan Program dan Kegiatan

BAB V : Bagian Penutup yang menguraikan tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 (n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan baru berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan dan atau realisasi APBD Dinas Perhubungan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/kegiatan; dan
5. implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD;

Selanjutnya untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2025 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel berikut Tabel T-C. 29.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2024	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2024			Target Program & Kegiatan Renja th.2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2025)	
					Target Renja th.2024	Realisasi Renja th.2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program & kegiatan s/d th.2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	NILAI IKM	79	100%	100%	100%	100%	100%	3	4%
2.15.01	Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	83	93%	80	74,44	93%	100%	76	92%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	4%	100	4,0	4%	100	104	104%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	5	4	80%	5	13	3
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	4	3	75%	4	11	4

2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5	5	5	100%	1	11	6
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100%	100	100	100%	100	201	2
2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385	385	385	385	100%	385	1.155	3,0
2.15.01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporann Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	3
2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase	100	100	100	100	100%	100	300	3
2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	4	100	4	4%	100	107	215
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	385	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	100%	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05.04	Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	-	#DIV/0!
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	100%	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	20	20	20	100%	20	60	2
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20	4	4	4	100%	4	12	1
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	11%	100	11	11%	100%	12	0
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	7	7	7	100%	7	21	11

2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3	9	3
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15	15	15	100%	15	45	45
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10	10	10	100%	10	30	15
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas i SKPD	35	40	40	40	100%	40	120	3
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	2	1	50%	2	5	5
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase	100%	0%	100%	0	0%	100%	1	1
2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	121,5	100	121,5	122%	100	343	3

2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	5	5	5	100%	5	15	3
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	238	238	238	100%	238	714	3
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	10%	100	9,67	10%	100	110	1
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	15	15	15	100%	15	45	2
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	17	17	17	100%	17	2	0
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167	20	20	20	100%	20	60	0
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	3	2	2	2	100%	2	6	2
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1	1	1	1	100%	1	3	3

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Direhabilita si								
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1	7	3	3	100%	3	13	13
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase	32,41	19713%	30	217,79	726%	100	515	16
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	6875%	100%	6875%	6875%	100%	139	1
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Perencanaan ATCS)	31968	150	150	150	100%	150	450	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	250	0	1	0	0%	0	1	0
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1456	120	120	120	100%	120	360	0
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	261	5	5	5	100%	5	15	0
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase	100	3%	100	2,5	3%	100	103	1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	1	8	8	100%	8	17	#DIV/0!
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	2	2	2	100%	2	6	3
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase	100	4%	100	3,5	4%	100	104	1
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	5	15	15	7	47%	15	37	7

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase	100	170360%	100%	170360%	170360%	100%	3.408	34
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12	4	4	4	100%	4	12	1
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	4	4	4	100%	4	12	2
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	8	8	8	100%	8	24	#DIV/0!
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.400	17000	17000	17000	100%	17000	51.000	4
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	0	1	0	0%	1	1	#DIV/0!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	28	20	20	20	100%	20	60	2
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	0	-	-
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	180%	100	179,75	180%	100	282	3
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5	15	15	13	87%	15	43	9
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	90	702	702	702	100%	702	2.106	23

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	6	10	10	3	30%	10	23	4
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	3	3	1	33%	3	7	7
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	0%	10	0	0%	10	10	1
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase	20	0%	20	0	0%	20	20	1

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	0	4,5	0	0%	4,5	5	5
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota	Prosentase	100%	0%	0	0	0%	1	1	1

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0	0	0	0%	1	1	#VALUE!
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	6	3
02:15:03	Program Penglolaan Pelayaran	Prosentase	52	21%	1	2,6	260%	100	103	2
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	100	5%	100	5	5%	100	105	1
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6	5	5	5	100%	100	110	18

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Prosentase	100	0%	100	2	0%	100	102	1
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		100	0%	100	0	0%	100	100	1
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#VALUE!
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	1%	100	1	1%	100	101	1
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2		1	1	100%	0	1	1
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	25	0%	100	0	0%	100	100	4
2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	0	1	1	1	100%	0	2	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10	0	0	0	0%	0	-	-
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	100%	100	6,7	100%	100	108	1
2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2	1	2	2	100%	1	4	2
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2	7	7	2	29%	100%	10	5
2.15.03.2.13.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	10	18	18	16	89%	100	134	13

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tahun NSPK , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota			0,07	0,378	0,611	0,632	0,639	0,07	0,378	0,611	0,632	
2.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota			0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,39	0,39	0,38	0,37	
3.	Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur (IKLI)						84					84	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80	82	85		80,9			
5.	Nilai SAKIP					82	84	84		55,85			
6	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ			30,41	32,41	34,41	36,41	38,41	30,41		34,41	36,41	
7	Cakupan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100		100	100	
8	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-		-	-	
9.	**Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan**			100	100	100	100	100	100		100	100	
	a. Jumlah Prasarana jalan yang dibangun			32116	31967	32028	31913	31912	1001		32028	31913	
	b. Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan			250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	a. Jumlah Rambu Lalu Lintas			879	879	879	879	879	200		879	879	
	c. Panjang Marka Jalan			19760	19760	19760	19760	19760	800		19760	19760	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	d. Jumlah Paku Jalan/Marka			10032	10032	10032	10032	10032	0		10032	10032	
	e. Jumlah Guadril			1240	1240	1240	1240	1240	0		1240	1240	
	f. Jumlah Deliniator			-	-	-	-	-	-		-	-	
	g. Jumlah Traffic Cone			200	50	50	-	-	-		50	-	
	h. Jumalh Traffic Light			1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	i. jumlah Road Baririer												
	j. jumlah Cermin Cembung												
	k. Jumlah Papan nama jalan												
	l. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk **urusan (RPPJ)**												
	m. Panjang ZOOSS			-	1	-	1	-	-	1	-	1	
	n. Jumlah Warning Light			2	2	2	-	-	2	2	2	-	
	o. Jumlah ATCS			1	0	-	-	-	1	0	-	-	
	p. Jumlah Pelican Cross			0	1	-	-	-	0	1	-	-	
10.	Jumlah lahan parkir			1	1	1	1	1	1		1	1	
11.	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)			250	250	250	250	250					
12.	Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)												
13.	Jumlah Halte			1	1	1							
14.	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara			1456	1456	1456	1456	1456	1506	1456			
15.	Jumlah Rambu Lalu Lintas			150	150	150	150	150	150	150	150	150	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Penyelenggaraan LLAJ).
   a) belum kebijakan dari pejabat yang berwenang tentang jaringan trayek angkutan pedesaan yang mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   b) belum terlayaninya beberapa wilayah kecamatan dengan angkutan penumpang umum trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) perintis;
   c) belum terpenuhinya prasarana dan perlengkapan jalan di ruas jalan tertentu didalam wilayah kabupaten kutai kartanegara (rambu lalu lintas, *Traffig Ligth*, marka jalan, papan nama jalan, LPJU, JPO, Halte);
   d) belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   e) belum adanya terminal penumpang tipe C di beberapa kecamatan;
   f) belum adanya terminal khusus angkutan barang dikota Tenggarong maupun di kecamatan;
   g) belum optimalnya pengeloaan dan penyelenggraan perparkiran di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   h) penyelengaraan dan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini dilakukan oleh beberapa PD sehingga menyulitkan dishub untuk melakukan pembinaan, pengembangan serta menyusun arah dan kebijakan perparkiran; dan
   i) belum tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan;
2) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Pengelolaan Pelayaran).

   Belum disusun dan ditetapkannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 1.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		SURVEY INDEX KEPUASAN MASYRAKAT	NILAI IKM	80	37.856.326.672,00	APBD	02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		SURVEY INDEX KEPUASAN MASYRAKAT	NILAI IKM	80	37.856.326.672,00	APBD	
			Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Prosentase	31,24						Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Prosentase	31,24			
			Prosentase Ketersedian Perlengkap Jalan	Prosentase	3,17						Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Prosentase	3,17			
			Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	27						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	27			
			Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	25						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	25			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.851.810.484,00		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.851.810.484,00		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Prosentase	100	1.100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Prosentase	100	Rp 1.100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit dan 1 unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit dan 1 unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan yann Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Tangga Arung dan kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Tangga Arung dan kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Prosentase	100	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Prosentase	100	250.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	50.000.000,00	APBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	JumlahLaporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Koa	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Koa	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Koa	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab Kukar				100,000,000.00								100,000,000.00	APBD	
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	90 uit	400.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	90 uit	400.000.000,00	APBD	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan–permasalahan dalam hal penyelenggaraan transportasi beserta perlengkapan dan penunjangnya.

Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat adalah proses pengkajian, evaluasi, dan verivikasi terhadap usulan Program dan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat baik melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang diselenggaraan di Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, guna memastikan bahwa usulan tersebut :

1. sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah/ provinsi / nasional;
2. dapat dilaksanakan (*feasible*) dari sisi teknis, anggaran dan waktu;
3. tidak tumpang tindih dengan Program / kegiatan yang sudah ada;
4. memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelaahan ini dilakukan guna :

a. menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan RKPD;
b. menjamin usulan yang masuk terdata, terdokumentasi, dan dipertimbangkan secara objektif;
c. memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai APBD atau APBN benar-benar berdampak dan tepat sasaran.

Berikut usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (masyarakat) dari hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) disajikan pada tabel 2 berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Progran Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan					
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota			Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan		
	1.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong	Jl. Cempaka, Mawar 2, Mawar 3, Dahlia, Flamboyan, Pandan, Anggrek dan Taman Ulin (RT 05. RT 12. RT 13), Kel. Sukarame		106 unit	Musrenbang
	2.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 1	Jalan Poros Mangkurawang - Loa Tebu, Kel. Loa Tebu		100 unit	Musrenbang
	3.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 2	Bukit Harapan RT.004, Kel. Loa Ipuh Darat		120 unit	Musrenbang
	4.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 3	Jl. .Ahmad Dahlan 1 RT.009, Kel. Sukarame		120 unit	Musrenbang
	5.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 4	RT.35 Kel. Melayu		120 unit	Musrenbang
	6.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 5	Jalan Kumala dan Betutu RT.43 Kel. Melayu		120 unit	Musrenbang
	7.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 6	Jalan Danau Semayang RT.11 Kel. Melayu		120 unit	Musrenbang
	8.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 7	Jalan Mawar 2 Rt 13, Kel. Sukarame		120 unit	Musrenbang
	9.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 8	Jl. Lamin Datu, Jl. Usaha Tani, JL. Tani Harapan, Gang Mandiri, Gang 1, Gang 2, Gang 3, Gang Arjuna, Kel. Mangkurawang		120	Musrenbang
	10.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong 9	Taman Ulin Rt 13, Kel. Sukarame		121	Musrenbang
	11.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang	RT.03 Desa Kerta Buana		121	Musrenbang
	12,	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang 1	RT.13 Dusun Rinjani Indah, Desa Kerta Buana		121	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	13.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang 2	Desa Suka Maju		121	Musrenbang
	14.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang 3	Desa Tanjung Batu		121	Musrenbang
	15.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang 4	Desa Loa Pari RT. 07		121	Musrenbang
	16.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Tenggarong Seberang 5	RT. 27 Dusun Sumber Rejo, Desa Bangun Rejo		90	Musrenbang
	17.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kembang Janggut	Desa Genting Tanah		205	Musrenbang
	18.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kembang Janggut 1	Desa Kembang Janggut		205	Musrenbang
	19.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kembang Janggut 2	Bukit Layang Rt.03, Desa Bukit Layang		205	Murenbang
	20.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kenohan	Desa Teluk Bingkai		105	Murenbang
	21.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kenohan 1	Desa Semayang		105	Murenbang
	22.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kota Bangun	Jl. P. Suta Kanan RT. 01 - RT. 10 (Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka) Desa Liang Ulu		105	Murenbang
	23.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kota Bangun 1	Jl. Hasbullah Hasyari, Desa Kota Bangun Ilir		105	Murenbang
	24.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kota Bangun Darat	Desa Sari Nadi		105	Murenbang
	25.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Kota Bangun Darat 1	Desa Sedulang		105	Murenbang
	26.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan	Desa Purwajaya		105	Murenbang
	27.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 1	RT 01 Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan		105	Murenbang
	28.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 2	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01, Desa Loa Duri Ulu		105	Murenbang
	29.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 3	Sepanjang Jalan Desa, Desa Loa Duri Ilir		105	Murenbang
	30.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 4	Sepanjang Jalan PT EX HIMA, Desa Loa Duri Ilir		105	Murenbang
	31.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 5	Dusun 4, Desa Loa Duri Ilir		105	Murenbang
	32.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 6	RT.19 Desa Loa Duri Ulu		105	Murenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	33.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 7	Dusun Karya Tani, Desa Batuah		105	Murenbang
	34.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Janan 8	Dusun Karya Makmur, Desa Batuah		102	Murenbang
	35.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Kulu	Jl. H. Masdamsi, Jl. Jend.Sudirman, Jl. Yos Sudarso, Desa Loa Kulu Kota		101	Murenbang
	36.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Loa Kulu 1	RT 1 sampai RT 6, Desa Sepakat		101	Murenbang
	37.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Muara Badak	Jl. Poros Saliki-Salo Palai dan Nilam, RT .003 - Desa Gas Alam Badak I		126	Murenbang
	38.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Muara Badak 1	RT.04,RT.05 dan RT.06, Desa Batu-Batu		86	Murenbang
	39.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Muara Badak 2	Desa Gas Alam Badak I		86	Murenbang
	40.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Muara Kaman	Jln. Reformasi II Desa Benua Puhun		203	Murenbang
	41.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja	Desa Beringin Agung		122	Murenbang
	42.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja 1	Jl. Balikpapan Handil II RT 05 - RT 07, Kel. Teluk Pemedas		122	Murenbang
	43.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja 2	Jl. Karya RT.003, Kel. Wonotirto		122	Murenbang
	44.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja 3	RT. 008, Kel. Sanipah		122	Murenbang
	45.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja 4	RT.06, Kel. Sungai Seluang		122	Murenbang
	46.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja 5	RT 012, RT 010, Kel. Sungai Seluang		122	Murenbang
	47.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat	Jl. Soekarno Hatta Km 38 Kel. Sungai Merdeka		122	Murenbang
	48.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 1	Jl. Merdeka RT02, Kel. Sungai Merdeka		122	Murenbang
	49.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 2	Jl. Sungai merdeka dan Jl. Soekarno Hatta km 38, Kel. Sungai Merdeka		122	Murenbang
	50.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 3	Jl. Karya Polewali KM 48 RT 13, Kel. Bukit Merdeka		122	Murenbang
	51.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 4	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 07, Kel. Bukit Merdeka		122	Murenbang
	52.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 5	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 11, Kel. Bukit Merdeka		122	Murenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	53.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 6	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 22, Kel. Bukit Merdeka		122	Murenbang
	54.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 7	Jl. Soekarno-Hatta KM 49 RT 21, Kel. Bukit Merdeka		122	Murenbang
	55.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Samboja Barat 8	Jl. Setia Tani RT 6, Kel. Salok Api Darat		122	Murenbang
	56.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Sanga-sanga	Sangasanga Muara, Kel. Sangasanga Muara		203	Murenbang
	57.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Sebulu	Desa Sebulu Ulu		203	Murenbang
	58.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Muara Muntai	Jalan Poros Muara Aloh Ke Muara Leka, Desa Muara Aloh		110	Murenbang
	59.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Muara Muntai 1	Jl.. Pangeran Hidayatullah, Desa Pulau Harapan		105	Murenbang
	60.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kec. Muara Uwis	RT.01, Desa Muara Enggelam		161	Murenbang
2.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
	1.	Pembangunan Halte Sekolah	Kec. Loa janan,Loa kulu,marang kayu,Muara Badak,Sang-sanga,Kembang Janggut	Pembangunan Halte Sekolah	20	Murenbang
	2.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Tenggarong,Loa kulu,Loa Janan,Kota Bangun,Muara Muntai,Koba Darat,Kembang Janggut,Tabang,Muara Badak,Marang Kayu,	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	30	Murenbang
II.	Program Pengelolaan Pelayaran					
1.	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun		
	1.	Pembangunan Dermaga apung/HDPE Desa Pela	Kecamatan Kota Bangun		1	Murenbang
	2.	Pembangunan Dermaga apung/HDPE Desa Muara Enggelam	Kecamatan Muara Wis		1	Murenbang
	3.	Pembangunan Dermaga Tambatan Kapal Nelayan Desa Sepatin RT.19	Kecamatan Anggana		1	Murenbang
	4.	Lanjutan Pembangunan Dermaga Desa Kelekat	Kecamatan Kembang Janggut		1	Murenbang
	5.	Pembangunan Dermaga Desa Genting Tanah	Kecamatan Kembang Janggut		1	Murenbang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	6.	Pembangunan Dermaga penyeberangan Desa Long belah haloq	Kecamatan Kembang Janggut		1	Murenbang
	7.	Pembangunan Dermaga Desa Sebelimbingan	Kecamatan Kota Bangun		1	Murenbang
	8.	Pembangunan Dermaga penyeberangan Desa Loa Duri Ulu	Kecamatan Loa janan		1	Murenbang
	9.	Lanjutan Pembangunan Dermaga Desa Kersik	Kecamatan Marangkayu		1	Murenbang
	10.	Pembangunan Dermaga Apung HDPE Desa Jantur	Kecamatan Muara Muntai		1	Murenbang
	11.	Pembangunan Dermaga Desa Pulau Harapan RT 02	Kecamatan Muara Muntai		1	Murenbang
	12.	Pembangunan Dermaga Langgar AL-Kautsar Desa	Kecamatan Muara Muntai		1	Murenbang
	13	Pembangunan Dermaga Desa Kayu Batu RT 02	Kecamatan Muara Muntai		1	Murenbang
	14.	Pembangunan DermagaMasjid Nur Hidayah Desa Sebemban	Kecamatan Muara Wis		1	Murenbang
	15.	Pembangunan Dermaga Kelurahan Jawa RT 02	Kecamatan Sanga Sanga		1	Murenbang
	16.	Pembangunan Dermaga Desa Selerong RT.001	Kecamatan Sebulu		1	Murenbang
	17.	Pembangunan Dermaga Desa Selerong RT 010	Kecamatan Sebulu		1	Murenbang
	18.	Pembangunan Dermaga Desa Beloro RT.012	Kecamatan Sebulu		1	Murenbang
	19	Pembangunan Dermaga Desa Selerong RT.008	Kecamatan Sebulu		1	Murenbang
	20.	Pembangunan Dermaga Desa Embalut RT.06	Kecamatan Tenggarong seberang		1	Musrenbang
	21.	Pembangunan Dermaga SMA Desa Jantur	Kecamatan Muara Muntai		1	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaan Daerah. Dalam hal ini peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik *(good governance).*

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, RTRW dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan kedepannya terdapat permasalahan sebagai berikut :

3.1.1. Aksesibiltas

a. belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan;
b. masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi; dan
c. kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai.

3.1.2. Kinerja Pelayanan

a. menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi *online;*
b. belum adanya penyuluhan / perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemadu yang diharapkan;
c. belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan; dan
d. belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

3.1.3. Keselamatan dan Keamanan

a. belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi;
b. belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
c. belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi; dan
d. belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur ka dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.1.4. Restrukturisasi dan Reformasi

Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan badan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan.

3.1.5. Teknologi

a. terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
b. belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan; dan
c. masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
   a. belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, dan lampu penerangan jalan;
   b. masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan;
   c. rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
   d. belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang *over dimensi* dan *over loading* (ODOL) dijalan;
   e. masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
   f. belum tersedianya rencana induk transportasi jalan Provinsi Kalimantan Timur;
   g. belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
   h. belum optimalnya penggunaan angkutan umum; dan
   i. masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Bidang Pelayaran
   a. belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar untuk kapal-kapal angkutan SDP;
   b. masih terdapat ketidak samaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal-kapal SDP;
   c. minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal-kapal yang berlayar di laut dan SDP;
   d. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;
   e. masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;
   f. kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;
   g. masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;
   h. belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal-kapa lAngkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;
   i. masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
   j. rendahnya kesadaran badan usaha kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperairan untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;
   k. lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan bidang pelayaran di Kalimantan Timur.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi, ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2025–2029, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari visi dan misi Bupati serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Jadi berdasarkan permasalahan dan dipadukan dengan telaahan terhadap visi dan misi Bupati serta telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (2025–2029), dalam mencapai misi ke 5 (lima) Bupati Kutai Kartanegara yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan” adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan kualitas transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus bidang perhubungan yang telah dituangkan didalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut : “Terwujudnya kualitas layanan transportasi yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

selamat, aman, nyaman, terintegrasi, dan mendukung konektivitas wilayah serta kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara."

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari misi ke 5 (lima) Bupati Kutai Kartanegara dalam menciptakan infrastruktur Kabupaten yang berkualitas dan representatif.

3.1.2. Sasaran

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tahunan, sampai 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Adapun sasaran strategis Dinas Perhubungan sebelum penyelarasan kinerja RPJMD dalam upaya pencapaian tujuan *"*Terwujudnya kualitas layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terintegrasi, dan mendukung konektivitas wilayah serta kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara*"*, terdiri dari 4 (empat) sasaran yaitu :

1. meningkatnya ketersediaan dan kualitas simpul transportasi darat dan sungai;
2. meningkatnya integrasi dan konektivitas antarmoda transportasi;
3. meningkatnya kinerja lalu lintas jalan; dan
4. meningkatnya keselamatan transportasi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2025-2029 sebelum adanya penyelarasan kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025 - 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN TAHUN 2024	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan, Peningkatan Konektivitas, Peningkatan Kinerja Lalu Lintas, dan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan.	Terwujutnya kualitas layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terintegrasi, dan mendukung konektivitas wilayah serta kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas simpul transportasi darat dan sungai.	Persentase terminal tipe C dan pelabuhan pengumpan lokal yang berfungsi	25 % (terminal) dan 76,47 % pelabuhan	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	
					78 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	
		2. Meningkatnya integrasi dan konektivitas antarmoda transportasi	Junlah trayek yang aktif jumlah simpul antarmoda yang terhubung.	9 trayek	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
				35 lintas	0,602	0,639	0,616	0,623	0,637	0,644	
				Rasio	0,632	0,669	0,646	0,653	0,667	0,674	
		3. Meningkatnya kinerja lalu lintas	Rasio V/C pada ruas utama	0,48 (V/C)	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	
		4. Meningkatnya keselamatan transportasi	Jumlah perlengkapan keselamatan jalan (LPJU, Rambu, Zoss)	2.966 LPJU	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	
				158 Rambu	170	185	200	215	230	250	
				21 Zoss	23	26	30	34	38	42	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-Program pada Dinas Perhubungan ini tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi Bupati yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dasar dalam menetapkan Program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisa dari visi dan misi Bupati serta telaahan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ini disesuaikan untuk penyelarasan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      a) penyusunan dokumen perencanaan PD;
      b) koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
      c) evaluasi kinerja PD;
      d) penyelenggaraan validata pendukung statistik sektoral Daerah;
      e) pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah Rencana Kerja 2026; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f) pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a) penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
   b) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
   c) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD; dan
   d) penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada PD.
   a) penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah;
   b) pengamanan barang milik Daerah PD;
   c) koordinasi dan penilaian barang milik Daerah PD; dan
   d) rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada PD.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD.
   a) penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi Daerah; dan
   b) pelaporan pengelolaan retribusi Daerah.
5. Administrasi Kepegawaian PD.
   a) pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
   b) monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
   c) pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
   d) bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
6. Administrasi Umum PD.
   a) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   b) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   c) penyediaan peralatan rumah tangga;
   d) penyediaan bahas logistik kantor;
   e) penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   f) penyediaan bahan/material;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD;
h) penatausahaan arsip dinamis pada PD; dan
i) dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada PD.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a) pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
   b) penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
   b) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
   c) pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
   d) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
   e) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaranan gedung kantor dan bangunan lainnya;
   f) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
   a) pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota;
   b) pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota;
   c) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
   d) rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
   a) revitalisasi terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) ; dan
   b) penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Parkir
   a) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitasi parkir kewenangan kabupaten/kota;
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
   a) penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
   b) registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
   c) penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
   d) pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
   e) koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
   a) pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota;
   b) pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS);
   c) forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
   d) pengadaan dan pemasalah perlengkapan kalan dalam rangka manajemen dan rekayasi lalu lintas;
   e) penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; dan
   f) penyelenggaraan sistem manajemen transportasi cerdas.
6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
   a) koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin.
7. Penyediaan Angkutan Umum dan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   a) pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan Pelayaran.

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
   a) pembangunan pelabuhan pengumpan loka.
2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasioan Pelabuhan Sungai dan Danau.
   a) pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
   b) pembangunan dermaga sungai dan danau;
   c) Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau; dan
   d) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
3. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal.
   a) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

Dengan demikian rancangan awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Program sebanyak 3 (tiga) Program, kegiatan sebanyak 9 (sembilan) program dan sub-kegiatan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub-kegiatan, terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota ada 9 (sembilan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp46.345.726.331,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan ada 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub-kegiatan dengan pagu anggaran Rp62.274.035.525,00 (enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan Program Pengelolaan Pelayaran ada 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp6.475.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun tahun 2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah–langkah strategis, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan Program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu.

Strategi adalah langkah–langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Adapun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) rumusan arah kebijakan, sebagaimana berikut :

1. Sasaran Strategis 1 :

   “ Meningkatnya ketersediaan dan kualitas simpul transportasi darat dan Sungai ”.

   Adapun strategi yang diterapkan sebagai berikut :

   a. penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi berbasis kebutuhan wilayah dan potensi pertumbuhan kawasan, khususnya wilayah hinterland dan kawasan ekonomi strategis;
   b. pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah secara optimal, terutama lahan strategis untuk pembangunan terminal tipe C dan pelabuhan pengumpan lokal;
   c. peningkatan kualitas dan fungsi operasional terminal serta dermaga, melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), penyediaan fasilitas dasar, serta pemenuhan aspek keselamatan dan aksesibilitas; dan
   d. Sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam mendukung Program prioritas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

nasional terkait konektivitas antarwilayah dan pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

2. Sasaran Strategis 2 :

"Meningkatnya integrasi dan konektivitas antarmoda transportasi."

Adapun strategi yang diterapkan sebagai berikut:

a. pengembangan jaringan trayek dan lintasan layanan transportasi umum, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dengan simpul transportasi utama seperti terminal, pelabuhan, dan kawasan industri;
b. Integrasi sistem informasi dan jadwal antarmoda, guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan peralihan moda transportasi oleh pengguna jasa;
c. Revitalisasi simpul-simpul antarmoda untuk mendukung integrasi fisik dan operasional, termasuk penyediaan halte, rambu penunjuk arah, dan akses pedestrian;
d. kolaborasi antar pelaku transportasi (operator, komunitas, BUMD) untuk mewujudkan jaringan layanan terintegrasi berbasis kebutuhan masyarakat; dan
e. pengembangan jaringan trayek dan lintasan layanan transportasi umum, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dengan simpul transportasi utama seperti terminal, pelabuhan, dan kawasan industri.

3. Sasaran Strategis 3 :

"Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan."

Adapun strategi yang diterapkan sebagai berikut :

a. penguatan manajemen lalu lintas berbasis data dan teknologi, melalui pengembangan sistem monitoring lalu lintas (misal ATCS sederhana), pemetaan titik kemacetan, dan penerapan pengaturan lalu lintas berbasis waktu dan lokasi;
b. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan, terutama yang menjadi koridor utama penghubung pusat-pusat kegiatan serta akses ke terminal dan pelabuhan;
c. Penataan parkir dan zona kendaraan angkutan, untuk mengurangi potensi hambatan pada ruas-ruas jalan strategis; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Pengembangan kebijakan demand management, seperti pengaturan jam operasional kendaraan angkutan barang dan penguatan rekayasa lalu lintas lokal.

4. Sasaran Strategis 4:

“Meningkatnya keselamatan transportasi.”

Adapun strategi yang diterapkan sebagai berikut:

a. Peningkatan jumlah dan kualitas perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan umum (LPJU), rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pembatas, dan zona selamat sekolah (zoss);

b. Peningkatan kapasitas pengawasan dan inspeksi keselamatan transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang berdampak terhadap lalu lintas;

c. Edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, melalui kampanye keselamatan transportasi di sekolah, komunitas, dan ruang publik; dan

d. Peningkatan jumlah dan kualitas perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan umum (LPJU), rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pembatas, dan zona selamat sekolah (zoss).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor transportasi sebagaimana dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, maka diperlukan penetapan arah kebijakan yang berfungsi sebagai landasan operasional pelaksanaan Program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Arah kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang perhubungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta dijabarkan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025–2029, khususnya pada misi pembangunan Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur, konektivitas wilayah, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan transportasi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Secara substantif, arah kebijakan ini berfungsi sebagai jembatan antara kerangka strategis (strategi pembangunan sektor transportasi) dan perencanaan operasional tahunan (Rencana Kerja), sehingga menjamin keterpaduan pelaksanaan Program dengan hasil pembangunan yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah, tantangan sektoral, keterkaitan antar wilayah dalam kawasan strategis IKN, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi.

Dengan demikian, arah kebijakan ini akan menjadi pijakan penting dalam menentukan prioritas intervensi, pengelolaan sumber daya, dan penguatan sinergi lintas sektor guna mendukung terwujudnya sistem transportasi yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun arah kebijakan :

1. peningkatan ketersediaan dan kualitas simpul transportasi yang layak, aman, dan mendukung konektivitas wilayah;
2. pengembangan konektivitas dan integrasi antarmoda untuk mendukung efisiensi layanan transportasi publik;
3. penguatan manajemen lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi dan data pergerakan; dan
4. penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan dan edukasi keselamatan.

Adapun rumusan rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DINAS PERHUBUNGAN				115.094.761.856,00				115.094.761.856,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				115.094.761.856,00				115.094.761.856,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				115.094.761.856,00				115.094.761.856,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				46.345.726.331,00				46.345.726.331,00
2	15	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100 %	700.000.000,00	DBH		100 %	700.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Dokumen	150.000.000,00	DBH		2 Dokumen	150.000.000,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Laporan	50.000.000,00	DBH		1 Laporan	50.000.000,00
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Laporan	150.000.000,00	DBH		2 Laporan	150.000.000,00
2	15	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Dokumen	50.000.000,00	DBH		1 Dokumen	50.000.000,00
2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Data	250.000.000,00	DBH		1 Data	250.000.000,00
2	15	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Berita Acara	50.000.000,00			2 Berita Acara	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	24.032.994.331,00			100 %	24.032.994.331,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	383 Org/Bulan	23.632.994.331,00			383 Org/Bulan	23.632.994.331,00
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Laporan	25.000.000,00			1 Laporan	25.000.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	12 Laporan	350.000.000,00	DBH		12 Laporan	350.000.000,00
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Dokumen	25.000.000,00	DBH		1 Dokumen	25.000.000,00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi barang milik daerah		100 %	275.000.000,00			100 %	275.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Dokumen	25.000.000,00			1 Dokumen	25.000.000,00
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Dokumen	150.000.000,00	DBH		1 Dokumen	150.000.000,00
2	15	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Laporan	50.000.000,00	DBH		1 Laporan	50.000.000,00
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Laporan	50.000.000,00	DBH		1 Laporan	50.000.000,00
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 %	150.000.000,00			100 %	150.000.000,00
2	15	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Laporan	100.000.000,00	DBH		1 Laporan	100.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Dokumen	50.000.000,00	DBH		1 Dokumen	50.000.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	450.000.000,00			100 %	450.000.000,00
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Dokumen	25.000.000,00	DBH		1 Dokumen	25.000.000,00
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Dokumen	25.000.000,00	DBH		1 Dokumen	25.000.000,00
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	30 Orang	300.000.000,00	DBH		30 Orang	2
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	20 Orang	100.000.000,00	DBH		20 Orang	100.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.535.000.000,00			100 %	1.535.000.000,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Paket	100.000.000,00	DBH		2 Paket	100.000.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	3 Paket	185.000.000,00	DBH		3 Paket	185.000.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	3 Paket	100.000.000,00	DBH		3 Paket	100.000.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	4 Paket	550.000.000,00	DBH		4 Paket	550.000.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Paket	100.000.000,00	DBH		2 Paket	100.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Paket	50.000.000,00	DBH		2 Paket	50.000.000,00
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Paket	50.000.000,00	DBH		2 Paket	50.000.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Paket	200.000.000,00	DBH		2 Paket	200.000.000,00
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Laporan	200.000.000,00	DBH		2 Laporan	200.000.000,00
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Paket	150.000.000,00	DBH		1 Paket	150.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	100	300.000.000,00	DBH		100	300.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	15 uNIT	300.000.000,00	DBH		15 uNIT	300.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	16.346.724.000,00			100 %	16.346.724.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	5 Laporan	14.745.000.000,00	DBH	Pembayaran Rekening Listrik PJU yang dipasang	5 Laporan	14.745.000.000,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Laporan	1.601.724.000,00	DBH		2 Laporan	1.601.724.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	2.556.008.000,00			100 %	2.556.008.000,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	23 Unit	200.000.000,00	DBH		23 Unit	200.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	31 Unit	1.300.000.000,00	DBH		31 Unit	1.300.000.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	167 Unit	105.000.000,00	DBH		167 Unit	105.000.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Unit	250.228.000,00	DBH		2 Unit	250.228.000,00
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Unit	600.780.000,00	DBH		1 Unit	600.780.000,00
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Unit	100.000.000,00	DBH		1 Unit	100.000.000,00
2	15	02	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat		100 %	62.274.035.525,00			100 %	62.274.035.525,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota		100 %	30.687.530.000,00			100 %	30.687.530.000,00
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	5 Unit	1.417.830.000,00	DBH		5 Unit	1.417.830.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1.898 Unit	24.369.700.000,00	DBH	Usulan Musrenbang	1.898 Unit	24.369.700.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota		100 %	30.687.530.000,00			100 %	30.687.530.000,00
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	5 Unit	1.417.830.000,00	DBH		5 Unit	1.417.830.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1.898 Unit	24.369.700.000,00	DBH	Usulan Musrenbang	1.898 Unit	24.369.700.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	720 Unit	2.000.000.000,00	DBH		720 Unit	2.000.000.000,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	3.410 Unit	2.900.000.000,00	DBH		3.410 Unit	2.900.000.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal tipe c		100 %	4.100.000.000,00			100 %	4.100.000.000,00
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	3 Unit	4.100.000.000,00	DBH		3 Unit	4.100.000.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100 %	150.000.000,00			100 %	150.000.000,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	2 Laporan	150.000.000,00	DBH		2 Laporan	150.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksanannya pengujian kendaraan bermotor	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	100 %	4.400.000.000,00	DBH		100 %	4.400.000.000,00
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Unit	3.300.000.000,00	DBH		1 Unit	3.300.000.000,00
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Unit	3.300.000.000,00	DBH		1 Unit	3.300.000.000,00
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1500 Unit	250.000.000,00	DBH		1500 Unit	250.000.000,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	7000 Dokumen	200.000.000,00	DBH		7000 Dokumen	200.000.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	20 Unit	550.000.000,00	DBH		20 Unit	550.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Laporan	100.000.000,00	DBH		1 Laporan	100.000.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya manajemen dan rekayasa lalu lintas		100 %	18.286.505.525,00			100 %	18.286.505.525,00
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	6 Laporan	1.000.000.000,00	DBH		6 Laporan	1.000.000.000,00
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	19 Unit	3.835.000.000,00	DBH	Usulan Musrenbamg	19 Unit	3.835.000.000,00
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	5 Laporan	1.000.000.000,00	DBH		5 Laporan	1.000.000.000,00
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	6 Dokumen	9.151.505.525,00	DBH	Usulan Musrenbamg	6 Dokumen	9.151.505.525,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	5 Laporan	500.000.000,00	DBH		5 Laporan	500.000.000,00
2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	4 Unit	2.800.000.000,00	DBH		4 Unit	2.800.000.000,00
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya analisis dampak lalu lintas		100 %	100.000.000,00			100 %	100.000.000,00
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Kukar Kec. Tenggarong/ Timbau	1 Laporan	100.000.000,00	DBH		1 Laporan	100.000.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum dan jasa angkutan orang/barang		100 %	4.550.000.000,00			100 %	4.550.000.000,00
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	2 Laporan	1.200.000.000,00	DBH		2 Laporan	1.200.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	11 Unit	3.350.000.000,00	DBH		11 Unit	3.350.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektifitas sungai danau dan penyeberangan		100 %	6.475.000.000,00			100 %	6.475.000.000,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		100 %	100.000.000,00			100 %	100.000.000,00
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab.Kukar, Ma.Badak, Ma. Badak Ilir	1 Unit	100.000.000,00	DBH		1 Unit	100.000.000,00
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		100 %	6.300.000.000,00			100 %	6.300.000.000,00
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Unit	200.000.000,00	DBH	Usulan Musrenbang	1 Unit	200.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	3 Unit	2.450.000.000,00	DBH	Usulan Musrenbang	3 Unit	2.450.000.000,00
2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	3 Unit	3.500.000.000,00	DBH		3 Unit	3.500.000.000,00
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Laporan	150.000.000,00	DBH		1 Laporan	150.000.000,00
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya penerbitan izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		100 %	75.000.000,00			100 %	75.000.000,00
2	15	03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Kukar. Semua Kec, Desa/Kel.	1 Laporan	75.000.000,00	DBH		1 Laporan	75.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis PD (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan ekternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin PD beserta jajarannya dalam merealisasikan visi dan misi Bupati yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana diatasnya adalah Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sesuai dengan realisasi kebutuhan anggaran untuk pencapaian program-program yang ditetapkan yang dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu untuk pemenuhan unsur kegiatan rutin (administrasi dan operasional rutin), kegiatan operasional (pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan rehabilitasi) dan kegiatan untuk investasi (pemenuhan sarana dan prasarana). Adapun secara keseluruhan dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, antara lain sebagai berikut:

1. perlunya dilakukan percepatan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang harus sesegera mungkin dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ditetapkan; dan
2. apabila ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2027 tidak sesuai dengan kebutuhan, maka penentuan program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2026 harus berdasarkan skala prioritas.

Adapun beberapa kaidah–kaidah pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, serta Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama–sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 dengan sebaik–baiknya, serta berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Renstra;
2. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2026, masing–masing Bidang, Sub Bagian dan Seksi, serta UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dan tahun berjalan Rencana Kerja 2025;
3. Penentuan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 harus berdasarkan skala prioritas;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tugas–tugas lainnya, seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sesuai visi Bupati yaitu : “terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan “ diamanatkan lima misi pembangunan Kutai Kartanegara dan DPPPA masuk pada misi ke pertama yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial”. Dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kutai Kartanegara DPPPA adalah sebagai PD pendukung yang juga menpunyai tanggung jawab terhadap terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah, memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan terstruktur dalam meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak dan pemberdayaan kelompok rentan, sehingga berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara: “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DPPPA tahun 2026 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

13) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode tahun2025-2029.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPPA Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.

2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur DPPA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.

3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan Program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan Program dan kegiatan DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dab Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENACANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPPA ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh PD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Renja-PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis perangkat daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan, laporan kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/Program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di tetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besarnya indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah di tetapkan. Capaian analisis kinerja pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini di lakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2026 Rencana Kerja DPPPA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra PD pada tahun tersebut sebanyak 7 (tujuh) Program terdiri dari dari 1 (satu) Program generik dengan *outcome* yang ingin dicapai sebanyak 1 (satu) indikator *outcome* dan 6 (enam) Program wajib dengan *outcome* yang ingin dicapai sebanyak 6 (enam) indikator *outcome* dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp28.475.488.947,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2024 dan realisasi Renstra DPPPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja program nilai sakip PD tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp13.622.200.063,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu enam puluh tiga rupiah) dan realisasinya Rp11.892.156.653,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta serratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 87,30% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh persen) dari target kinerja.
2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja program adalah persentase ARG belanja langsung APBD tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp9.060.321.884,00 (Sembilan miliar enam puluh juta tiga ratu dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan realisasinya Rp8.446.174.632,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta serratus tujuh puluh empat

ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 93,22% dari target kinerja.

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak indicator kinerja program adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasinya Rp230.582.968,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau 94,18 % (sembilan puluh satu koma delapan belas persen) dari target kinerja.

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) indikator kinerja program adalah persentase kabupaten layak anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar serratus tiga puluh juta rupiah) dan realisasinya Rp.996.002.742,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau 88,14 % (delapan puluh delapan koma empat belas persen) dari target kinerja.

5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.327.816.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasinya Rp 1.162.455.849,00 (satu miliar serratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 87,55% (delapan puluh tujuh koma lima puluh lima persen) dari target kinerja.

6) Program Perlindungan Perempuan indikator kinerja cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.769.431.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu) realisasinya Rp1.440.437.056,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) atau 81,41% (delapan puluh satu koma empat puluh satu persen) dari target kinerja. Kendala yang dihadapi:

   a. waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah;
   b. jangkauan pendampingan jauh dari perkotaan;
   c. jaringan telekomukikasi yang kurang lancar; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. solusi/rekomendasinya mengkoordinasikan secara intens dengan pihak terkait supaya penjadwalan sesuai rencana.

7) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator kinerja persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.315.700.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasinya capaian kinerja sebesar Rp1.059.752.324,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau 80,55% (delapan puluh koma lima puluh lima persen) dari target kinerja. Kendala yang dihadapi adalah:

a. waktu pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terhadap pelayanan perlindungan khusus anak;
b. letak geografis yang jauh dalam penjangkauan kasus yang belum didukung dengan tenaga professional yang masih kurang; dan
c. solusi/rekomendasinya rencana anggaran kas tiap triwulan, penambahan tenaga professional dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh DPPPA sebesar Rp28.475.488.947,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp.6.954.892.544,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapa ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau 24,42% (dua puluh empat koma empat puluh dua persen) sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan indikator kinerja program adalah persentase ARG belanja langsung APBD target 16,10% (enam belas koma sepuluh persen);
2. Program pengelolaan sistem data gender dan anak indikator persentase PD yang memiliki data gender 58,62% (lima puluh delapan koma enam puluh dua persen);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Program peningkatan kualitas keluarga indikator kinerja persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak target 50% (lima puluh persen);
4. Program perlindungan perempuan indikator kinerja cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan target 100% (seratus persen)
5. Program pemenuhan hak anak (PHA) indikator kinerja program adalah persentase kabupaten layak anak target 75,00% (tujuh puluh lima persen); dan
6. Program perlindungan khusus anak indikator kinerja persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100% (seratus persen).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.1 (TC_29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	76,6	70,76	76,45	58,89	77,03	76,5	206,15	68,72
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34	6	9	9	100	6	19	55,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	14	2	6	6	100	6	14	57,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	6	6	100	6	16	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	120	24	24	24	100	24	72	60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	60	12	12	12	100	12	36	60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	4	12	60
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5	1	1	1	100	1	3	60
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	53	53	53	100	20	126	63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7	7	7	7	7	21	60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	20	1	1	100	20	60	60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	2	2	100	12	36	60
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5000	1000	1000	1000	100	1000	3000	60
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10560	2112	2112	2112	100	2112	6336	60
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27	1	1	1	100	1	3	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265	53	53	53	100	53	159	60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30	0	16	16	100	16	32	55
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	5	15	15	100	15	15	80
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	75
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	8	8	100	12	36	60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175	35	8	8	100	35	105	26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	4	4	100	12	36	60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140	28	34	34	100	28	84	60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	125	28	28	28	93,33	25	81	64,8

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	2	3	3	100	2	6	60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	3	3	100	1	3	60
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	26,49	22	16	8,48	69,65	12,18	29,14	110
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	155	52	4	4	260	56	124	80
	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100	1	3	50
	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24	1	1	1	100	1	3	12
	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan	275	51	51	56	100	56	163	59

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275	56	6	6	100	56	112	40
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	150	30	28	28	80	30	98	65
	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	20	20	20	62,5	9	49	49
	2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	105	21	28	28	75	21	70	66

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota									
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	85	27	28	28	0	22	77	93
	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	100	2	28	28	0	2	32	32
	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	20	20	20	0	20	20	100
	2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	5	1	1	0	1	7	33,33
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	100	19,23	28,85	19,23	66,67	12,18	50,64	50,64
	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	15	2	6	6	66,67	2	10	66

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	1	3	6	100	3	10	67
	2.08.05.2.01.01 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	15	1	3	3	33,33	3	7	47
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	40	1	20	20	0	1	22	55
	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	1	1	1	0	1	3	15
	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	5	5	0	0	5	25
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	160	41	50	50	100	41	132	83

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	500	50	50	50	100	50	150	30
	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	6	6	6	100	6	18	60
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	75	2	20	20	100	2	24	80
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	60	15	15	15	100	15	45	75
	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160	40	40	40	100	40	120	75
	2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	20	0	1	1	100	1	3	15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	95	14	2	2	100	14	42	44,21
	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	22	22	22	100	11	55	92
	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	0	2	2	100	2	4	40
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	515	90	110	110	100	110	210	41
	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	500	152	50	50	100	100	302	60

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	325	60	60	60	100	100	220	68
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	135	25	25	25	100	25	75	56
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	50	10	8	8	0	30	48	96
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	75	30	2	2	100	2	34	45
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	250	50	50	50	100	30	130	52
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	3500	710	730	710	97,26	750	1450	62
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	60	6	30	30	100	10	46	77

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	140	4	30	30	100	28	62	44
	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13	2	1	2	125	4	8	62
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	28	4	3	3	20	4	11	39
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500	100	100	100	100	100	300	60
	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	1	1	1	100	1	4	33
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	5	2	1	1	100	2	5	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	60
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100	5,56	11,11	5,56	50	5,56	16,68	16,68
	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5	1	3	3	100	1	5	100
	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2	3	3	100	2	7	140
	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	18	1	5	5	100	1	7	16,67
	2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang	65	3	5	5	100	3	9	39

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapat Advokasi dan Pendampingan								
	2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60	0	20	20	100	20	40	67
	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14	1	2	2	100	1	4	29
	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	4	1	3	3	100	1	5	125
	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7	0	3	3	100	0	2	43

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dasar pembentukan DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

DPPPA, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPPA mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan multi sektor, diharapkan Pemerintah Daerah memiliki kerangka hukum mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/*trafficking*, sebanyak 4 (empat) kasus tahun 2017, 1 (satu) kasus tahun 2022 dan 8 (delapan) kasus tahun 2023.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian daerah dan kepolisian resor, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di Daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022 kasus yang didampingi berjumlah 65 (enam puluh lima) kasus dan tahun 2023 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kasus, tahun 2024 sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kasus.

Untuk penanganan korban tindak perdagangan orang dan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu maka perlu dibentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta penyediaan wadah Advokasi, sosialisasi dan koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan perempuan dan anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2025-2029 dengan Misi “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” adapun sasaran yang ingin dicapai meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dengan indikator kinerja utama DPPPA sebagai berikut :

a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);
b. Persentase Anggaran Responsif Gender Daerah; dan
c. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah, maka DPPPA akan memberikan pelayanan yang maksimal dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegata tahun 2025-2029. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.2 tentang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
1	2	3	4	5					6					7	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,40	74,90	58.89			100,00	100,00
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			16,95	16,00	16,10	16,15	16,20	0,06	4.87	18.74			100,00	100,00
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten			0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,21	100	100			100,00	100,00
4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)			0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	6,18	7.2	7.90			100,00	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Peran DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh DPPA adalah:

1. belum optimalnya anggaran responsif gender di masing-masing PD;
2. masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih;
3. belum terpenuhinya pelayanan penanganan kasus sesuai dengan SPM;
4. belum optimalnya para pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang responsif anak;
5. kurangnya pemahaman *stakeholder* terhadap hak-hak anak;
6. kelembagaan PUG di PD belum optimal;
7. kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat pembinaan;

Dari permasalahan diatas DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan koloborasi dan dukungan instansi terkait dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang penddikan, kesehatan, politik, hukum, social dan ekonomi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 (sepuluh) kabupaten/kota pengembang kota/ kabupaten kota layak anak, maka barkaitan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan Program pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan pengembangan pelayanan PD:

a. ketersediaan dan kemudahan jangkauan lembaga kesejahteraan anak;
b. jumlah pojok asi yang memadai dan layak, di tempat umum (bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
c. ketersediaan rumah tangga dengan akses air bersih;
d. ketersediaan kawasan tanpa asap rokok;
e. tersedianya sekolah yang ramah anak;
f. ketersediaan dan kemudahan jangkauan lembaga kesejahteraan anak;
g. tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
h. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
i. tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
j. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka DPPA menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program perlindungan perempuan dengan indikator persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif;
2. Program perlindungan anak dengan indikator persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif;
3. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator persentase anggaran responsif gender (ARG);
4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan indikator persentase PD yang memiliki profil gender dan anak tingkat kabupaten;
5. Program pemenuhan hak anak (pha) dengan indikator capaian nilai kabupaten layak anak; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Program peningkatan kualitas keluarga dengan indikator pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka DPPA perlu menyusun Renstra. Dokumen Renstra PD DPPPA tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra PD dijabarkan setiap tahun kedalam Renja-PD sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dilihat Indikator kinerja kunci DPPA sesuai denga Renstra tahun 2025-2029 seperti dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Sasaran Strategis	**Indikator Kineja Utama**
1. Menurunnya kekerasan dalam rumah tangga	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**
2. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pembangunan	**Peresntase Anggaran Responsif Gender Daerah**
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sesuai Renstra
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	KET
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Kutai Kartanegara	Nilai Sakip Perangkat Daerah	58,9	Persen	10.944.373.547	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Kutai Kartanegara	Nilai Sakip Perangkat Daerah	58,89	Persen	##########		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	550.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	850.000.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	150.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	350.000.000	Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	50.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	150.000.000	Musrenbang kecamatan dan capaian kinerja	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	100.000.000	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	100.000.000	Monev, dan epantau	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	100.000.000	4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	100.000.000	SDI	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	data	150.000.000	5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	data	150.000.000	SDI	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	Dokumen	6.908.364.933	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	Dokumen	6.993.364.933		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/ bulan	6.717.168.933	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/ bulan	6.717.168.933		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	50.000.000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	100.000.000	Penyusunan laporan keuanagan (LKPD)	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan	116.196.000	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan	126.196.000	Honorarium PA,KPA, PPK,BP,BPP	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000	9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Laporan keuangan Prognosis	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	Laporan	45.258.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	Laporan	75.000.000		
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan	8.500.000	10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan	20.000.000		
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan	21.758.000	11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan	30.000.000		
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	15.000.000	12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	25.000.000		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	754.724.250	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	750.000.000		
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	orang	500.000.000	13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	orang	500.000.000		
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	254.724.250	14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	250.000.000		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	490.614.400	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	760.653.800		
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	31.873.600	15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	80.000.000		
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	200.000.000	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	200.000.000		
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.500.000	17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	18.500.000		
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	20.000.000	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	20.000.000		
19	Penyediaan Bahan /Material	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	100.000.000	19	Penyediaan Bahan /Material	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	100.000.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	38.087.000	20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	50.000.000		
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	52.153.800	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	252.153.800	Perjadin Kadis dan Sekretaris	
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	40.000.000	22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	40.000.000		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengadaan barang milik daerah	50	Unit	400.000.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengadaan barang milik daerah	50	Unit	1.500.000.000		
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	unit	250.000.000	24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	unit	250.000.000		
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	unit	150.000.000	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	unit	150.000.000		
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	0	unit	-	26	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	8	unit	1.100.000.000	Eselon III tidak punya mobdin karena rusak berat	3 unit mobil dinas Eselon III dan 5 unit motor dinas ut JF
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3	Laporan	1.050.635.964	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3	Laporan	1.050.635.964		
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	350.000.000	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	350.000.000		
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	40.000.000	28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	40.000.000		
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	660.635.964	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	660.635.964		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	27	Unit	744.776.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	27	Unit	744.776.000		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	unit	72.740.000	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	unit	72.740.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	22.036.000	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	22.036.000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	650.000.000	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	650.000.000	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,1	Persen	1.400.000.000	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,1	Persen	1.650.000.000	
9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	56	Lembaga	250.000.000	9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	56	Lembaga	400.000.000	
34	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	75.000.000	34	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	100.000.000	IKU OPD
35	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	Laporan	75.000.000	35	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2	Laporan	150.000.000	IKU OPD
36	2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	28	Lembaga	100.000.000	36	2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	56	Lembaga	150.000.000	IKU OPD
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	28	Organisasi	1.050.000.000	10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	28	Organisasi	1.150.000.000	
37	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	28	Lembaga	950.000.000	37	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	28	Lembaga	950.000.000	
38	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi	20	orang	50.000.000	38	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang	20	orang	50.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					
39	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	20	orang	50.000.000	39	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	60	orang	150.000.000		
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	28	lembaga	100.000.000	11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	28	lembaga	100.000.000		
40	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	28	Lembaga	50.000.000	40	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	28	Lembaga	50.000.000		
41	.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	Dokumen	50.000.000	41	.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	Dokumen	50.000.000		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Persen	925.000.000	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Persen	925.000.000		
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2	Dokumen	125.000.000	12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2	Dokumen	125.000.000		
42	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	75.000.000	42	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	75.000.000		
43	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan	10	lembaga	50.000.000	43	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan	10	lembaga	50.000.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota					pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota					
13	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekersan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	600.000.000	13	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekersan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	600.000.000		
44	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	500.000.000	44	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	500.000.000		
45	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	100.000.000	45	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	100.000.000		
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	6	Layanan	200.000.000	14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	6	Layanan	200.000.000		
46	2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10	Lembaga	50.000.000	46	2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10	Lembaga	50.000.000		
47	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30	orang	100.000.000	47	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30	orang	100.000.000		
48	2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	dokumen	50.000.000	48	2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	dokumen	50.000.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

								Kewenangan Kabupaten/Kota							
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	50	Persen	300.000.000	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	50	Persen	300.000.000		
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	6	Lembaga	150.000.000	15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	6	Lembaga	150.000.000		
49	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10	Lembaga	100.000.000	49	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10	Lembaga	100.000.000		
50	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	50.000.000	50	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	50.000.000		
16	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak			150.000.000	16	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak			150.000.000		
51	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	20	orang	75.000.000	51	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	20	orang	75.000.000		
52	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	20	orang	75.000.000	52	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	20	orang	75.000.000		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	81,03	Persen	50.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	81,03	Persen	50.000.000	
17	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dlam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	2	Dokumen	50.000.000	17	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dlam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	2	Dokumen	50.000.000	
53	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	50.000.000	53	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	50.000.000	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	750	Nilai	275.000.000	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	750	Nilai	425.000.000	
18	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	125.000.000	18	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	125.000.000	
55	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	75.000.000	55	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	75.000.000	
56	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	50.000.000	56	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	50.000.000	
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	150.000.000	19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

57	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20	Orang	50.000.000	57	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	40	Orang	100.000.000	iku opd	
58	2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	58	2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	100.000.000	iku opd	
59	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	10	Lembaga	50.000.000	59	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	20	Lembaga	100.000.000	iku opd	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Persen	1.200.000.000	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Persen	1.500.000.000		
20	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	150.000.000	20	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	250.000.000		
60	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2	dokumen	100.000.000	60	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2	dokumen	100.000.000		
61	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	50.000.000	61	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	laporan	150.000.000	iku opd	
21	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	200	orang	900.000.000	21	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	200	orang	1.200.000.000		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

62	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100	orang	700.000.000	62	Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100	orang	900.000.000	iku opd	
63	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	100.000.000	63	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	100.000.000	iku opd	
66	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	100.000.000	66	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50	orang	200.000.000	iku opd	
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	2	Dokumen	150.000.000	22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	2	Dokumen	250.000.000		
67	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10	Lembaga	100.000.000	64	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10	Lembaga	100.000.000		
68	2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	65	2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	150.000.000	IKU OPD (sasaran OPD, Ormas dan Dunia Usaha)	
			Jumlah			15.094.373.547				Jumlah			17.774.430.697		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Melalui strategi nasional (stranas) percepatan pengarus utamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada 2 (dua) permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat nasional dan Daerah yaitu :

a. penguatan dasar hukum; dan
b. penguatan koordinasi baik antar sesama instansi penggerak maupun antar penggerak dengan instansi pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilihat :

1) belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan;
2) belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai indeks pembangunan gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh:

(1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Daerah.

(2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi.

(3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.

(4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor/ PD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangaan gender:

    a. Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;

    b. Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;

    c. Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPPA ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun Renstra DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah;
c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/s*takeholder* mengenai PUG;
d. Rendahnya tingkat pendidikan;
e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;
i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;
k. Kebijakan daerah belum *responsive gender;*
l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

a) masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
b) telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
c) telah adanya program pengentasan kemiskinan;
d) telah adanya komitmen kepala Daerah mengenai PUG;
e) telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak; dan
f) telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA;

Di bidang partisipasi anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan tahun 2016 terbentuk forum anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam peroses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat nasional maupun di Daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2013 melibatkan forum anak dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selain itu Kementerian PPPA juga mengikutsertakan forum anak daerah dalam konferensi tingkat asia yang di laksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan kabupaten / kota layak anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas PD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 (seratus sebelas) orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang. Ini menunjukan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.

Permasalahan sosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektoral, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkotika yang dibina dikalapas Kelas IIB Tenggarong pada tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan tahun 2015 sebanyak 15 (lima velas) orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan, di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh *(broken home)*.

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

a. Non-Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama,paham politik,asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainya.
b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.
d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

proses pembahasan dan pengembalian keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABDH) dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian PPPA RI pada Tahun 2006 bersama 4 (empat) Kabupaten/Kota menjadi kabupaten menuju kota layak anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang zona bebas pekerja anak. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PPPA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RepubIik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten /Kota lainnya menganugrahkan kabupaten kutai kartanegara sebagai kabupaten kota layak anak di tingkat pratama dari 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya kabupaten layak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengembangan Layak Anak (KLA).

2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD / SLTP / MTS / Pesantren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh tim koordinasi penanganan masalah sosial perempuan dan anak di tingkat kabupaten kutai kartanegara. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 Kementerian PPPA menggagas tersusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama 9 (Sembilan) K/L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

a. Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
b. Jumlah anak 29% - 35% (dua puluh sembilan persen sampai dengan tiga puluh lima persen) dari total penduduk, tidak bisa diabaikan;
c. Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;
d. Embrio sumber daya manusia yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan
e. Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, dikriminasi,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perlakuan salah.

Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat Pratama dan tahun 2020-2023 kategori Madya dan Tahun 2024 mendapatkan Kategori Madiya dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintergrasikan kedalam Program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2025-2029. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

DPPA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan	Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi	Ketimpangan pembangunan berbasis gender	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG 5: Gender Equality	RPJMN: Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Rendahnya IPG dan IDG Kalimantan Timur	Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi
Pengembangan UPTD PPA dan PPATBM di wilayah kabupaten	Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kerentanan sosial akibat kekerasan berbasis gender	Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	RAN PPA, RAN TPPO, dan RANHAM	Tingginya angka kekerasan di Kutai Kartanegara	Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Penyediaan layanan perlindungan sosial berbasis masyarakat	Kesenjangan Akses terhadap Layanan Perlindungan Sosial	Aksesibilitas layanan dasar untuk kelompok rentan	Agenda inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan global	Penguatan sistem perlindungan sosial nasional	Belum meratanya layanan sosial di wilayah desa dan terpencil	Kesenjangan Akses terhadap Layanan Perlindungan Sosial
Fasilitasi keluarga tangguh dan ramah anak dalam pembangunan desa	Degradasi Lingkungan dan Dampaknya pada Kelompok Rentan	Ketahanan lingkungan dan pengaruhnya pada perempuan dan anak	Perubahan iklim dan dampak sosial terhadap kelompok rentan	PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Tingginya kerentanan bencana banjir dan kebakaran lahan	Degradasi Lingkungan dan Dampaknya pada Kelompok Rentan
Edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Forum Anak dan DRPPA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Perubahan nilai sosial dan budaya terkait kesetaraan	Kampanye global untuk kesetaraan dan anti-kekerasan gender	Permendagri 67/2011 tentang PUG di daerah	Masih kuatnya budaya patriarkal dan relasi kuasa timpang	Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Penguatan sistem kesiapsiagaan sosial berbasis komunitas	Ketahanan Sosial di Tengah Perubahan Ekonomi dan Bencana	Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan krisis	Transformasi sosial menuju masyarakat tangguh dan adaptif	Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Dampak relokasi IKN terhadap perubahan sosial dan beban kelompok rentan	Ketahanan Sosial di Tengah Perubahan Ekonomi dan Bencana

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2026 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 7 (tujuh) Program. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPPA ada perubahan terhadap indikator Program:

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada Belanja langsung APBD dibagi jumlah Seluruh Anggaran Belanja Langsung X100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD X100%
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO X100%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif DIBAGI Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus X100%
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Jumlah 5 klaster penilaian KLA dari Kementrian PPPA
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk DIBAGI Jumlah Kecamatan X100

c. Rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal.

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Renstra DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi dari penetapan pagu indikatif terdapat beberapa perubahan dalam penyusunan renja akhir tahun 2026, yaitu adanya Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang saat ini sedang dalam proses usulan untuk pembangunan gedung sebagai bentuk pelayanan DPPPA kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	70,76	10.944.373.547	APBD		70,76	12.568.234.733
2	8	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	9 dokumen	550.000.000	APBD		9 dokumen	700.000.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150.000.000	APBD	Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA	3 dokumen	250.000.000
2	8	1	2	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	3 dokumen	50.000.000	APBD	Musrenbang, pendampingan SPIP, LKJiP, LPPD, Sakip, Rakor DPPA	3 dokumen	100.000.000
2	8	1	2	6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	100.000.000	APBD	Monev kegiatan dinas, Pendampingan Epantau	1 laporan	100.000.000
2	8	1	2	7		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	100.000.000	APBD	data SDI	1 laporan	100.000.000
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	150.000.000	APBD	data SDI	1 dokumen	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab.Kutai Kartanegara	3 dokumen	6.908.364.933	APBD		3 dokumen	6.987.168.933
2	8	1	2			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang/bulan	6.717.168.933	APBD	Gaji ASN, TPP	40 orang/bulan	6.717.168.933
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000	APBD	Honor PA, KPA, PPK, bendahara pengeluaran, LK, Manajemen RTP, rapat kerja keuangan	1 laporan	100.000.000
2	8	1	2	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	2 laporan	116.196.000	APBD	laporan keuangan	2 laporan	120.000.000
2	8	1	2	7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	25.000.000	APBD	laporan prognosis keuangan	1 dokumen	50.000.000
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	3 laporan	45.258.000	APBD		3 laporan	75.000.000
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	8.500.000	APBD	inventarisasi kebutuhan BMD	1 laporan	20.000.000
2	8	1	2			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	21.758.000	APBD		1 laporan	30.000.000
2	8	1	2	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	15.000.000	APBD	Laporan BMD, inventaris aset, rapat kerja urusan BMD, Rekon BMD	1 laporan	25.000.000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	754.724.250	APBD		1 dokumen	750.000.000
2	8	1	2,1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	500.000.000	APBD	Bimtek arsip, bimtek manajemen pelayanan dan RB, bimtek IT / Statistik, bimtek	40 orang	500.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												perencanaan, bimtek program keuangan,		
2	8	1	2,1			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	254.724.250	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan PPA dan peraturan perundangan lainnya	40 orang	250.000.000
2	8	1	2,1	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab.Kutai Kartanegara	8 layanan	490.614.400	APBD		8 layanan	760.653.800
2	8	1	2,1	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	31.873.600	APBD	Alat Tulis Kantor	1 paket	80.000.000
2	8	1	2,1	9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	200.000.000	APBD	Makan minum rapat dan peralatan rumah tangga	1 paket	200.000.000
2	8	1	2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	8.500.000	APBD	Kalender, Map, Souvenir, Marchandise	1 paket	18.500.000
2	8	1	2,1	2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	20.000.000	APBD	Perpustakaan anak dan perempuan, pojok baca	1 dokumen	20.000.000
2	8	1	2,1	4		Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	100.000.000	APBD	Pameran Merah Putih, Erau dll (homestay, sewa stand, design pameran, makan minum pameran, doorprize)	1 paket	100.000.000
2	8	1	2,1	5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	38.087.000	APBD		1 laporan	50.000.000
2	8	1	2,1	6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	52.153.800	APBD	Fasilitasi Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubag, ASN, JF	1 laporan	252.153.800
2	8	1	2,1	7		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	40.000.000	APBD	Tata kelola arsip	1 dokumen	40.000.000
2	8	1	2,1	8		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab.Kutai Kartanegara	50 unit	400.000.000	APBD		50 unit	1.500.000.000
2	8	1	2,1	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Kab.Kutai Kartanegara	30 unit	250.000.000	APBD	Mebeuleir	30 unit	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
2	8	1	2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	20 unit	150.000.000	APBD	Komputer, Printer, Laptop	20 unit	150.000.000
2	8	1	2,1	9		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	unit	-	APBD	Kendaraan dinas mobil kabid dan mobil pelayanan serta mobil angkut pickup, sepeda motor	unit	1.100.000.000
2	8	1	2,1	10		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	6 laporan	1.050.635.964	APBD		6 laporan	1.050.636.000
2	8	1	2,1	11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	350.000.000	APBD	Listrik dan Wifi MPPA	1 laporan	350.000.000
2	8	1	2,1	2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	40.000.000	APBD	Perawatan peralatan komputer, AC, sound system, printer, mesin foto copy dll	1 laporan	40.000.000
2	8	1	2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	660.635.964	APBD	Honorarium THL, tenaga ahli progremer, statistik, IT, Jurnalis, CS, Satpam, Psikolog Klinis, Konselor	1 laporan	660.636.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab.Kutai Kartanegara		744.776.000	APBD			744.776.000
2	8	1	2,1	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kutai Kartanegara	30 unit	72.740.000	APBD		30 unit	72.740.000
2	8	1	2,1	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kutai Kartanegara	4 unit	22.036.000	APBD		4 unit	22.036.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	8	1	2,1	4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	3 unit	650.000.000	APBD	Rehab gedung serba guna, untuk forum anak dan satgas PPA (ex gedung BKKBN)	3 unit	650.000.000
2	8	1	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kab.Kutai Kartanegara	16,10 persen	1.400.000.000	APBD		16,10 persen	950.000.000
2	8	1	2,1	1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	56 perangkat daerah	250.000.000	APBD		56 perangkat daerah	500.000.000
2	8	1	2,1	2		2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	75.000.000	APBD	Pelaksanaan penyusunan RAD PUG (Lokus Tenggarong) IKU OPD	1 dokumen	150.000.000
2	8	1	2,1	9		2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	75.000.000	APBD	Pembentukan tim Pokja PUG kab. Kukar berdasarkan SK Bupati. IKU OPD	1 laporan	150.000.000
2	8	2				2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab.Kutai Kartanegara	28 lembaga	100.000.000	APBD	Pendampingan penyusunan PPRG (GBS dan GAP). IKU OPD	28 lembaga	200.000.000
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	28 organisasi	1.050.000.000	APBD		28 organisasi	450.000.000
					3	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang	Kab.Kutai Kartanegara	28 lembaga	950.000.000	APBD	Rakor lembaga/organisasi perempuan (DW) kab. Kukar.	28 lembaga	150.000.000

							politik, hukum, sosial dan ekonomi							
2	8	2	2	2	8	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	50.000.000	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhum dan sosek.	50 orang	150.000.000
2	8	2	2	2	9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	50.000.000	APBD	Pelatihan tata kelola layanan pemberdayaan perempuan. (Lokus Tenggarong)	50 orang	150.000.000
2	8	2	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	28 lembaga	100.000.000	APBD		0	-
2	8	2	2	3	7	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	28 lembaga	50.000.000	APBD		0	-
2	8	2	2	3	8	.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD		0	-
2	8	3	2	1		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Kab.Kutai Kartanegara	100 persen	925.000.000	APBD		100 persen	1.000.000.000
2	8	2	2	2	2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	125.000.000	APBD		2 dokumen	250.000.000
2	8	3	2	1	4	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	8	3	2	1	6	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	50.000.000	APBD		10 lembaga	150.000.000
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekersan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	6 layanan	600.000.000	APBD		6 layanan	600.000.000
2	8	3	2	2	8	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	500.000.000	APBD	IKU OPD	50 orang	500.000.000
2	8	3	2	2	8	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	100.000.000	APBD	IKU OPD	50 orang	100.000.000
2	8	3	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	6 layanan	200.000.000	APBD		6 layanan	150.000.000
						2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	50.000.000	APBD		0	-
2	8	3	2	1		2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Kab.Kutai Kartanegara	30 orang	100.000.000	APBD	Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi SDM, ASN, UPT P2TP2A, Tenaga Teknis profesional pada DP3A. (Lokus Samarinda / Balikpapan)	50 orang	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	8	3	2	1	1	2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD		0	-
2	8	3	2	1	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	Kab.Kutai Kartanegara	50 persen	300.000.000	APBD		50 persen	400.000.000
2	8	3	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Kab.Kutai Kartanegara	6 lembaga	150.000.000	APBD		6 lembaga	300.000.000
2	8	3	2	2	1	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	100.000.000	APBD		10 lembaga	150.000.000
2	8	3	2	2	2	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	50.000.000	APBD		10 lembaga	150.000.000
2	8	3	2	3		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	150.000.000	APBD		40 orang	100.000.000
2	8	3	2	3	1	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	75.000.000	APBD		30 orang	100.000.000
2	8	3	2	3	2	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	75.000.000	APBD		0	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	8	3	2	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Kab.Kutai Kartanegara	16,07 persen	50.000.000	APBD		16,07 persen	100.000.000
2	8	3	2	3	4	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dlam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2	8	4				2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2	8	4	2	1		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Kab.Kutai Kartanegara	690 nilai	275.000.000	APBD		690 nilai	650.000.000
2	8	4	2	1	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	125.000.000	APBD		2 dokumen	200.000.000
2	8	4	2	1	2	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	75.000.000	APBD		10 lembaga	200.000.000
2	8	4	2	1	3	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	-
2	8	4	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas	Kab.Kutai Kartanegara	4 dokumen	150.000.000	APBD		4 dokumen	450.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	4	2	2	1	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	50.000.000	APBD	IKU OPD	40 orang	150.000.000
2	8	4	2	2	2	2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD	IKU OPD	1 dokumen	150.000.000
2	8	4	2	2	3	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	50.000.000	APBD	IKU OPD	10 lembaga	150.000.000
2	8	4	2	3		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Kab.Kutai Kartanegara	100 persen	1.200.000.000	APBD		100 persen	1.400.000.000
2	8	4	2	3	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	150.000.000	APBD		2 dokumen	300.000.000
2	8	5				2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	100.000.000	APBD	IKU OPD	2 dokumen	100.000.000
2	8	5	2	1		2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000	APBD	IKU OPD	1 laporan	200.000.000
2	8	5	2	1	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang	Kab.Kutai Kartanegara	200 orang	900.000.000	APBD		200 orang	950.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota							
2	8	5	2	1	2	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	100 orang	700.000.000	APBD	IKU OPD	100 orang	700.000.000
2	8	6				2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	100.000.000	APBD	IKU OPD	50 orang	100.000.000
2	8	6	2	1		2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	100.000.000	APBD	IKU OPD	50 orang	150.000.000
2	8	6	2	1	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	150.000.000	APBD		2 dokumen	150.000.000
2	8	6	2	1	2	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab.Kutai Kartanegara	10 lembaga	100.000.000	APBD		10 lembaga	-
2	8	6	2	2		2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000	APBD	IKU OPD	1 dokumen	150.000.000
								Jumlah		15.094.373.547		Jumlah		17.068.234.733

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026. Adapun proses penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
   1. kondisi sarana dan prasarana yang ada di DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat;
   2. keadaan kantor yang masih belum refresentatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak;
   3. ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi;
   4. banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau; dan
   5. mall pelayanan perempuan dan anak (MPPA) yang masih memerlukan bangunan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

   Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden Repubik Indonesia melalui Kementerian PPPA RI pada tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Dalam menentukan

arah jalannya organisasi salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

1. Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (PPATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
2. Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mendorong PD baik PD di tingkat Kabupaten maupun PD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak
4. Mendorong Pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah tahun 2026 merupakan dokomen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan Program DPPKB yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari RPJMD periode 2021- 2026.

Rencana Kerja DPPKB tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPPKB untuk tahun kelima periode Renstra DPPKB 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKB Tahun 2026 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang di selaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renja DPPKB Tahun 2026 mengacup ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2026. Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai

Kartanegara memuat Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan Rencana Kerja;
2. penyusunan rancangan awal Rencana Kerja DPPKB yang berpedoman pada Renstra DPPKB, evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan;
3. penyusunan rancangan Rencana Kerja berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1383/065.1/Bapp/ 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
4. pembahasan rancangan Rancangan DPPKB dalam forum PD DPPKB untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, Program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja DPPKB tahun 2026 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja dan arah garis kebijakan terkait yang dirumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025– 2045; dan
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja DPPKB tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPPKB yaitu:

1. menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPPKB sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah;
2. untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur DPPKB dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur;
3. untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan Program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun; dan
4. memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan Program dan kegiatan DPPKB.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja DPPKB tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksuddan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA–PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dank

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

b. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja Program/kegiatan pada tahun 2024 secara keseluruhan capaian fisik rata-rata 96,6% (sembilan puluh enam koma enam persen) dan realisasi keuangan rata-rata 86,2% (delapan puluh enam koma dua persen).

a. Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan realisasi anggaran dan fisik sebesar 100 % (seratus persen);
2. program pembinaan keluarga berencana (KB) dengan ealisasi anggaran dan fisik sebesar 100 % (seratus persen);
3. Program pengendalian penduduk dengan realisasi anggaran dan fisik sebesar 91,3 % (sembilan puluh satu koma tiga persen); dan
4. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan realisasi anggaran dan fisik sebesar 94,0 % (sembilan puluh empat persen).

untuk rekapitulasi capaian sebagaimana dalam tabel T-29.

b. Penjelasan Analisis Keuangan.

Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan Program/kegiatan pada tahun 2024 secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp34.505.040.734,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) di realisasikan sebesar Rp29.745.372.305,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah).

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target anggaran sebesar Rp12.586.475.734,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh

ratus tiga puluh empat rupiah), terealisasi sebesar Rp 10.490.836.057,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) atau tercapai sekitar 83,4 % (delapan puluh tiga koma empat persen);

2. Program pengendalian penduduk dengan target anggaran sebesar Rp4.273.671.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.3.672.498.148,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar 85,9% (delapan puluh lima koma sembilan persen);
3. Program pembinaan keluarga berencana dengan target anggaran sebesar Rp10.473.414.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp8.880.592.960,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 84,8% (delapan puluh empat koma delapan persen); dan
4. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan target anggaran sebesar Rp7.171.450.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp6.701.445.140,00 atau sekitar 93,4 % (sembilan puluh tiga koma empat persen).

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKB dan Pencapaian RENSTRA DPPKB s/d Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10	85,10	85,10	61,24	71,96	85,10	231,44	2,72
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	885,00	177,00	177,00	177,00	100,00	177,00	531,00	0,60
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	3,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	200,00	69,00	57,00	40,00	70,18	57,00	166,00	0,83
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	100,00	32,00	20,00	20,00	100,00	20,00	72,00	0,72
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	200,00	-	40	40	100,00	40	80,00	0,40
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	100,00	-	20	20	100,00	20	40,00	0,40
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	200,00	12,00	57,00	40,00	70,18	40,00	92,00	0,46
									-	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuanagan perangkat daerah yang akuntabel	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	826,00	14,00	14,00	100,00	14,00	854,00	12,20
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah waktu penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	0,80
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,18

	1.2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	4,00	0,80
											-	
	1,3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LAporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di lakukan Penatausahaan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN**	**340,00**	**68,00**	**68,00**	**68,00**	**100,00**	**1,00**	137,00	**0,40**
	1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-		-			-	
	1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	70,00	20,00		-	-		20,00	0,29
											-	
	1,5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100,00**	**100,00**	**42**	**100,00**	**238,10**	**42**	242,00	**2,42**
	1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	150,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	0,60
	1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang di sediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,60
											-	
	1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggndaan	134.310,00	225,00	26.862	26.862,00	100,00	26.862	53.949,00	0,4017
											-	
	1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Koran	2.200,00	960,00	960	440,00	45,83	960	2.360,00	1,07
	1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750,00	150,00	170	150,00	88,24	150	450,00	0,60
	1.5.6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah	135,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	69,00	0,51
	1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	59,00	7,00	7	7,00	100,00	7	21,00	0,36

	1.6.2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
	1.6.3			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan sarana Prasarana gedung Kantor	75,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	1,20
												-	
	1,7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan**	**60,00**	**12,00**	**12**	**12,00**	**100,00**	**12**	36,00	**0,60**
	1.7.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.2			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenga Pendukung Non PNS	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
												-	
	1,8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah barang milik daerah	763,00	171,00	171,00	171,00	100,00	171,00	513,00	0,67
	1.8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinzn Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	55,00	11,00	11	11,00	100,00	11	33,00	0,60
												-	
	1.8.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinzn Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan	800,00	160,00	160	160,00	100,00	160	480,00	0,60
												-	
	1.8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	5,00	1,00	1,00	-	-	1,00	2,00	0,40
												-	
	2		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	50,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	90,00	1,80
					Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	3,00
	2,1		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1,00	70,00	1,00	1,00	100,00	1,00	72,00	72,00
				Penyelerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembanguna keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen	4,00				-		-	-
	2.1.1			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	3,00
	2.1.2			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah sekolah/perguruan tinggi	30,00	3,00	3	6,00	200,00	3	12,00	0,40
	2.1.3			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Materi	175,00	3,00	3	35,00	1.166,67	3	41,00	0,23

	2.1.4			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta	400,00	40,00	40	40,00	100,00	40	120,00	0,30
												-	
	2,2		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	100,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	210,00	2,10
	2.2.1			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Data	4,00	1,00	1	1,00	100,00	1	3,00	0,75
	2.2.2			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil	500,00	100,00	100	100,00	100,00	100	300,00	0,60
	2.2.3			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	45.000,00	5.500,00	5500	5.000,00	90,91	5500	16.000,00	0,36
	2.2.4			Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Faskes yang terdata	215,00	43,00	43	43,00	100,00	43	129,00	0,60
												-	
	3		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara moderen	77,25	77,15	77,15	77,15	100,00	77,15		
					Persentase peserta KB baru	15,23	15,13	15,13	15,13	100,00	15,13	45,39	2,98
					Cakupan angka (unmet need)	10	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	3,60
					persentase apseptor MKJP	16,16	16,05	16,05	16,05	100,00	16,05	48,15	2,98
					Persentase drop out (BO)	11,92	12,32	12,32	12,32	100,00	12,32	36,96	3,10
												-	
	3,1		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Terlaksananya kegitaan advokasi dan KIE	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.1			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan hari besar dan pameran	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.2			Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE)program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sarana KIE	25,00	2,00	2,00	2,00	200,00	2,00	6,00	0,24
	3.1.3			Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah sarana KIE	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	3.1.4			Promosi dan KIE proram KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik dan media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi	20,00				-		-	-
	3.1.5			Penggunaan media masa cetak,elektronik,dan media lain nya sesuai keaifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah Media	13,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,23
	3.1.6			Pelaksanaan Mekanisme oprasional Program KKBPK melalui rapat koordinas (Rakorcam) rapat koordinasi desa (Rakordes),dan minilokakarya	Jumlah Peserta	540,00	108,00	108,00	108,00	100,00	108,00	324,00	0,60
	3.1.7			Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan di balai penyuluhan KB	90,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	0,60
	3,2		**Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Terlaksana nya kegiatan oprasional KB dilapangan	1185		237	237	100,00	237	474,00	0,40
												-	
	3.2.1			Pembinaan IMP dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang di bina	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3.2.2			Penyediaan sarana pendukung opeasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung	281	5	5	5	100,00	5	15,00	0,05

	3.2.3			Penguatan pelaksanaan penyuluhan,pergerakan,pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga beencana /prnyuluh lapangan keluarga berencana PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	345	69	69	69	100,00	69	207,00	0,60
	3.2.4			Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3,3		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.1			Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Faskes	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.2			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontarepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Apseptor MKJP	3.500,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2.100,00	0,60
	3.3.3			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	15,00	5,00	5	3,00	60,00	3,00	11,00	0,73
	3.3.4			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Apseptor yang dilayani	1.920,00	1.600,00	1600	320,00	20,00	320,00	2.240,00	1,17
												-	
	3,4		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	80,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	180,00	2,25
	3.4.1			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	190,00	38,00	38	38,00	100,00	38,00	114,00	0,60
	3.4.2			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	3.4.3			Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
												-	
	4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**									-	
					Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	7348	65,31	65,31	65,31	100,00	65,31	195,93	0,03
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	9197	72,97	72,97	72,97	100,00	72,97	218,91	0,02
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	64,63	57,32	57,32	57,32	100,00	57,32	171,96	2,66

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,67
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,50
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73,18	56,09	**56,9**	56,00	98,42	56,00	168,09	2,30
											-	
	4,1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40,15	30,72	30,72	30,72	100,00	30,72	92,16	2,30
											-	
	4.1.1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	164,00	54,00	54,00	54,00	100,00	54,00	162,00	0,99
											-	
	4.1.2		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih	695,00	215,00	215,00	75,00	34,88	75,00	365,00	0,53
	4.1.3		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok	1.470,00	50,00	50,00	132,00	264,00	132,00	314,00	0,21

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	4.1.4			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	750,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	450,00	0,60
	4.1.5			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,33
	4.1.6			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung I Bangga	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	1,00
												-	
	4,2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	90,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,67
	4.2.1			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	48,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	1,13
	4.2.2			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	516,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	360,00	0,70
	4.2.3			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta	241,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	0,35

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan diukur dengan menggunakan indikator indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.2.1. Pencapaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara ada 4 (empat) indikator, yaitu nilai SAKIP, menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49) tahun, cakupan *stakeholder* yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA, indeks pembangunan. Pencapaian IKU DPPKB tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	85,40	61,24
2	MenurunnyaAngka KelahiranTotal (TFR) per WUS (15-49 tahun	Persen	2,16	2,24
3	Cakupanstakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	Persen	40	44,06
4	IndeksPembangunan	Persen	59,00	66,96

Dalam kondisi umum,pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB sebagai PD urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,25	85,40	85,55	86,70	85,25	85,40	85,55	86,70	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		70,00	75,00	75,00	85,00	70,00	75,00	75,00	85,00	
7	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		35,00	40,00	45,00	50,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
8	Tersedianya dokumen grand design kependudukan		-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
9	Angka Total Fertility Rate (TFR)		2,18	2,16	2,14	2,12	2,20	2,16	2,14	2,12	
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		77,19	77,20	77,22	77,25	77,19	77,20	77,22	77,25	
11	Cakupan Pelayanan KB Baru		15,15	15.17	15.20	15,23	15,15	15.17	15.20	15,23	
12	Menurunnya angka Drop Out (DO)		12,22	12,12	12,12	11,92	12,22	12,12	12,12	11,92	
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		11,50	11,00	10,50	10,00	11,50	11,00	10,50	10,00	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		16,08	16,10	16,13	16,16	16,08	16,10	16,13	16,16	
15	Indek Pembangunan Keluarga		58,50	59,00	59,50	65,00	58,50	59,00	59,50	65,00	
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		3,00	5,00	7,00	9,00	3,00	5,00	7,00	9,00	
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		66,67	77,78	88,89	100,00	66,67	77,78	88,89	100,00	
18	Cakupan Keluarga Akseptor Yang Terlibat Dalam Kelompok Ketahanan Keluarga		4,10	4,15	4,20	4,25	4,10	4,15	4,20	4,25	
19	Cakupan PUS Perserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri		60,82	64,65	70,26	73,18	60,82	64,65	70,26	73,18	
20	Cakupan Keluarga Anggota BKB Yang Ber-KB		67,25	69,78	71,31	73,48	67,25	69,78	71,31	73,48	
21	Cakupan Keluarga Anggota BKL Yang Ber-KB		58,15	59,36	61,32	64,63	58,15	59,36	61,32	64,63	
22	Cakupan Keluarga Anggota BKR Yang Ber-KB		76,13	80,93	84,98	91,97	76,13	80,93	84,98	91,97	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk,laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah data dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. pembangunan kependudukan dan KB di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana baik secara regional dan nasional khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi;
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan; dan
3. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat sehingga menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Beberapa Permasalahan yang di hadapi oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan " mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing "yaitu:

1) Mempertahankan Angka Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,24 pada tahun 2024, dan ada beberapa faktor yang membuat TFR tinggi antara lain :
   a. akses pelayanan keluarga berencana yang terbatas;
   b. kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal;
   c. kurangnya sarana dan prasarana media KIE; dan
   d. kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2) Belum optimalnya basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar *stakeholder* yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar *stakeholder.*

3) Belum optimalnya pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduuduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:
   a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB;
   b. meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan stakeholder dalam Program KKBPK;
   c. meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana; dan
   d. meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga.

Selanjut nya beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. peningkatan penyelenggaraan penunjang urusan pada DPPKB;
2. peningkatan kualitas basis data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK);
3. peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
4. penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK;
5. peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA);
6. pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA);
7. penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok;
8. ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-PPKS,UPPKS/UPPKA); dan
9. Peningkatan promosi dan sosialiasi Program KKBPK.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2026 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Penyusunan RKPD mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang memuat prioritas Program dan kegiatan dari Renja-PD.

Tujuan penyusunan RKPD tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan Pemerintah Daerah termasuk PD di lingkup Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program prioritas pembangunan Daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan visi dan misi RPJMD, prioritas nasional, prioritas provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dan perkiraan kondisi tahun 2026 serta prospek tahun 2026, maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 di tetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Usulan RENJA RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tenggarong			**16.788.954.484**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tenggarong			**9.983.093.076**
2.14.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000
2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	151.563.686	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	151.583.686
2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	30.000.000
2.14.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12 Laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12 Laporan	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	8.217.390.798	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	7.872.622.612,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000
2.14.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Dokumen	
2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	200.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000
2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	
2.14.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
2.14.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong			
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	225.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	112 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
2.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong			
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	100.000.000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	60.000.000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.999.800
2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	75.000.000
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	93.403.400
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	275.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
2.14.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong			
2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	680.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
2.14.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tenggarong	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Alat Besar	Tenggarong	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	37.582.000
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.250.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	100.000.000
2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
2.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong			
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong			
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	128 unit	97.901.578
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	50.000.000
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kab.Kutai Kartanegara**			**3.010.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kab.Kutai Kartanegara**			**900.000.000**
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana		
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	15 Satuan Pendidikan	50.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	15 Satuan Pendidikan	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.02.2.02.0012 2.14.02.2.01.0012	Advokasi dan Pengumpulan Data Keluarga Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Laporan 10 Laporan	1.000.000.000 50.000.000	Advokasi dan Pengumpulan Data Keluarga Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Laporan 10 Laporan	150.000.000 50.000.000
2.14.02.2.02.0015 2.14.02.2.01.0013	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dihentuk Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	25 unit 10 Laporan	60.000.000 50.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dihentuk Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	25 unit 10 Laporan	60.000.000 150.000.000
2.14.02.2.02.0018 2.14.02.2.01.0020 2.14.02.2.02.0020	Pemantauan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara Kab.Kutai Kartanegara.	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	500.000.000 250.000.000 50.000.000	Pemantauan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kab.Kutai Kartanegara. Kab.Kutai Kartanegara Kab.Kutai Kartanegara.	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000 250.000.000 50.000.000
2.14.02.2.01.0023 2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab.Kutai Kartanegara.	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan	250.000.000 **3.425.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab.Kutai Kartanegara.	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan	40.000.000 **2.075.000.000**
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab.Kutai Kartanegara	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab.Kutai Kartanegara	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan		
2.14.02.2.02.0002 2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana Prasarana Penyuluhan Bangga Kencana	Kab.Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana Prasarana Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen 20 laporan	50.000.000 250.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana Prasarana Penyuluhan Bangga Kencana	Kab.Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana Prasarana Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	100.000.000
2.14.02.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	100.000.000
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara.	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara.	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.000.000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen	75.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen	100.000.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	250.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	100.000.000
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	700.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	10.000.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	27 Organisasi	50.000.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	237 Organisasi	30.000.000
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	54 laporan	75.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	75.000.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara			
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2589 orang	900.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 unit	250.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	150 unit	900.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	75.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	75.000.000
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 orang	150.000.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20 Laporan	150.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20 Laporan	100.000.000
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	2689 Orang	10.000.000
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 organisasi	100.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	50.000.000
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kutai Kartanegara	Jumlah DASHAT di Kampung KB	50 unit	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kutai Kartanegara	Jumlah DASHAT di Kampung KB	50 unit	100.000.000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kutai Kartanegara	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	75 kampung	50.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kutai Kartanegara	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	95 kampung	200.000.000
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Dokumen	75.000.000					
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kab.Kutai Kartanegara**			**6.449.100.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kab.Kutai Kartanegara**			**4.134.800.000**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara			
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	150.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	150.000.000
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 kegiatan	200.000.000	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 kegiatan	75.000.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan	75.000.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	200.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	50.000.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	150.000.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300 orang	500.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120 Orang	150.000.000
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 orang	150.000.000	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 laporan	100.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	100.000.000
2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	200.000.000	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	150.000.000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	300 orang	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1127 Orang	2.000.000.000
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	25.000.000
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 kelompok	600.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	151 Kelompok	824.800.000
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 laporan	100.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	35.000.000
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	30 kelompok	275.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	15 Kelompok	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara			
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1431 laporan	1.500.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	25.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	477 laporan	1.574.100.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	25.000.000
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	150.000.000	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	50.000.000
	T O T A L				**29.673.054.484**					**17.092.893.076**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini ada usulan masyarakat khusus penentuan perumusan Program dan kegiatan kelompok kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang PD tingkat Provinsi dan Musrenbang Daerah serta mengakomodir usulan dari kecamatan dan kelurahan/desa.

Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah keluarga berencana dan keluarga sejahtera atau Program KKBPK, maka di perlukan penguatan Program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis DPPKB yang harus bermuara pada isu srategis Kutai Kartanegara yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya.

USULAN 2025

NO	KAMUS USULAN	KECAMATAN	JUMLAH	DIPROSES
1	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Sebemban,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
2	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Desa Muara Enggelam,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
3	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
4	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggaranya program keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan psesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagai mana diketahui bahwa DPPKB ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Sususan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja. Rencana Kerja disusun berdasarkan Program yang terencana, terarah serta terukur yang di harapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan dengan visi Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka ada rencana aksi untuk dilakukan *review* dokumen Renstra DPPKB sehingga akan terjadi perubahan terhadap indikator sasaran Renstra. Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai DPPKB dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra DPPKB ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, Program dan kegiatan Renstra PD yang merupakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Renja-PD untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetap kan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026.

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Beberapa isu penting pembangunan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik ditingkat Nasional, Regional maupun ditingkat daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi;
2. perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan;
3. upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan; dan
4. DPPKB dalam menghadapi berbagai isu penting tersebut telah menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagaimana diuraikan dalam tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPPKB

VISI (RPJMD)	:	Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
MISI (RPJMD)*	:	Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Indeks pembangunan berwawasan kependudukan		Meningkatnya peransta	Meningkatkan koordinasi	Peningkatan kualitas basis
		keholder dalam Program	sinkronisasi, harmonisasi	data Kependudukan, Keluarga
		Kependudukan Ke	kebijakan antar stakeholder	Berencana dan Pembangunan
		Berencanadan	dalam ProgramKKBPK	Keluarga (KKBPK)
		Pembangunan Keluarga (KKBPK)		
		Menurun nya Angka	Meningkatkan	Peningkatan akses dan
		kelahiran total (TFR) per	kualitas pelayanan	pelayanan KB yang merata
		WUS (15-49tahun)	Keluarga Berencana	dan berkualitas
				Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK
				Peningkatan kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
		Meningkatnya	Meningkatkan pembinaan	Peningkatan jumlah kelompok
		Pemberdayaan Keluarga	kelompok ketahanan	ketahanan keluarga (BKB,
			keluarga	BKR,BKL,PIK-R,PPKS, UPPKS/UPPKA)
				Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,PPKS, UPPKS/UPPKA)
				Penyediaan sarana Danprasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-R,PPKS, UPPKS/UPPKA)
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahyang Berkualitas dan melayani	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun beberapa indikator Program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 yang mengacu pada target Renstra tahun 2021-2026 pada DPPKB adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA-PD		TARGETKINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIRPERIODERENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pengendalian Kependuduk dan keluarga Berencana		IndekPembangunan Keluarga	Angka	-	57.00	57.50	58.50	60.00	63.00	65.00	65.00
		Meningkatnya peran Stakeholder dalam Program KKBPK	Cakupan stakeholde ryang Terliba tdalam Program KKBPK	Persen	-	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
		Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49tahun)	Total FertilityRate(TFR)	Angka	2.24	2.22	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12	2.12
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Cakupan Keluarga Aksep or Yang Terlibat Dalam Kelompok Ketahanan Keluarga	Persen	-	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	4.25	4.25

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

Pencapai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

1. DPPKB merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang di berikan kewenangan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, berusaha memberikan pelayanan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang di sebabkan ada nya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kurangnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Belum optimalnya basis Data Kependudukan, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder
	Masih tingginya angkaTotal Fertility Rate (TFR) diKabupaten Kutai Kartanegara	Akses pelayanan yang kurang
		Kuantitas dan kualitas Tenaga penyuluh KB dan Petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal
		Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE
	Kurangnya pemberdayaan keluarga	Belum optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya sarana Dan prasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020, maka Program pada PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 sebanyak 1 (satu) Program generik dan 3 (tiga) Program teknis. dengan perincian dapat dilihat dari tabel kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan tahun 2026.
2. Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegra untuk kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu kecamatan atau desa jika jenis kegiatanya bersifat pelatihan ketrampilan.

4.3 Rumusan Program Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

Rumusan Program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan yang termuat pada Studi Pendahuluan Renstra 2025-2029 DPPKB baik itu terkait dengan rumusan indikator, target serta pagu indikatif sudah sesuai berdasarkan rumusan yang ada pada Renstra.

4.4 Adapun Rumusan Terkait Rencana Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tatget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laju Pertumbuhan Penduduk		**1,42**				**1,40**	
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan		**82,70**				**85,40**	
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun							
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)**		**2,19**				**2,18**	
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		**25,00**				**24,60**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**900.000.000**				
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana	Kab. Kutai kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		55%	
2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				APBD		1 dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00

2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab.Kutai Kartanegara	15 Satuan Pendidikan	50.000.000	APBD		30 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara	10 Laporan	50.000.000	APBD		10 organsasi	100.000.000,00
2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab.Kutai Kartanegara	10 Laporan	150.000.000	APBD		10 organisasi	150.000.000,00
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Kegiatan	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Kegiatan	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Kegiatan	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Kegiatan	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 dokumen	250.000.000,00
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00
2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Tenggarong			APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00

2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab.Kutai Kartanegara.	12 Kegiatan	40.000.000	APBD		12 Kegiatan	100.000.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan	Kab. Kutai kartanegara					55%	
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Tenggarong			APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	350.000.000,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Dokumen	250.000.000,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab.Kutai Kartanegara.	25 unit	60.000.000	APBD		30 Unit	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Laporan	250.000.000,00
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Tenggarong			APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Laporan	350.000.000,00
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab.Kutai Kartanegara.			APBD		1 Dokumen	100.000.000,00

2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**						**80,30**	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)						**9,60**	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri						**10,40**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**2.075.000.000**				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kutai Kartanegara			APBD		1 Laporan	100.000.000
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara			APBD		1 Laporan	100.000.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara			APBD		20 laporan	375.000.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kutai Kartanegara	20 Laporan	100.000.000	APBD		1 laporan	250.000.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000	APBD		5 Dokumen	150.000.000

2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kutai Kartanegara	3 Dokumen	100.000.000	APBD		5 Dokumen	100.000.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	5 Organisasi	100.000.000	APBD		3 Organisasi	75.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Kutai Kartanegara			APBD			
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kutai Kartanegara			APBD		20 unit	150.000.000
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kutai Kartanegara	237 Orang	10.000.000	APBD		237 orang	700.000.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	237 Organisasi	30.000.000	APBD		10 organisasi	200.000.000
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	1 Laporan	75.000.000	APBD		1 laporan	150.000.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Kutai Kartanegara						
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kutai Kartanegara			APBD		1 laporan	100.000.000

2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kutai Kartanegara			APBD		2689 Orang	938.054.000
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kutai Kartanegara			APBD		1 Laporan	75.000.000
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara			APBD		1 Dokumen	75.000.000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	150 unit	900.000.000	APBD		1 unit	500.000.000
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kutai Kartanegara			APBD		50 Orang	75.000.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kutai Kartanegara	1 Laporan	75.000.000	APBD		4 Laporan	150.000.000
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kutai Kartanegara	20 orang	150.000.000	APBD		30 Orang	450.000.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	20 Laporan	100.000.000	APBD		20 Laporan	200.000.000
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kutai Kartanegara	2689 Orang	10.000.000	APBD		75 Orang	300.000.000
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kutai Kartanegara			APBD		12 Kab/Kota	75.000.000
2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara			APBD		30 Orang	150.000.000
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kutai Kartanegara			APBD		150 Orang	100.000.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kutai Kartanegara						

2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara			APBD		38 organisasi	150.000.000
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kutai Kartanegara			APBD		4 laporan	1.500.000.000
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kutai Kartanegara	50 unit	100.000.000	APBD		100 kampung	200.000.000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara	95 kampung	200.000.000	APBD		237 kampung	350.000.000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**							
		Indeks Pengasuhan Remaja						**91,80**	
		Indeks Lansia Berdaya						**59,10**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**4.134.800.000**				
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Dokumen	225.000.000

2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab.Kutai Kartanegara	50 Keluarga	150.000.000	APBD		50 Keluarga	150.000.000
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kab.Kutai Kartanegara	2 kegiatan	75.000.000	APBD		70 Persen	75.000.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab.Kutai Kartanegara	2 Laporan	75.000.000	APBD		2 Laporan	75.000.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Kutai Kartanegara	50 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	50.000.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	10 Unit	150.000.000	APBD		10 Unit	150.000.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	120 Orang	150.000.000	APBD		120 Orang	150.000.000
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	50 Orang	100.000.000	APBD		50 Orang	100.000.000
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab.Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000
2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		Orang	-

2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab.Kutai Kartanegara	1127 Orang	2.000.000.000	APBD		1127 Orang	2.000.000.000
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab.Kutai Kartanegara	151 Kelompok	824.800.000	APBD	151 Kelompok		824.800.000
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab.Kutai Kartanegara	15 Kelompok	150.000.000	APBD		15 Kelompok	150.000.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								

2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		Organisasi	-
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Laporan	150.000.000
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		68 Organisasi	215.000.000
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		3 Laporan	175.000.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab.Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD		80 Persen	25.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD		1431 Orang	25.000.000

2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
2.14.04.3.03	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)								
2.14.04.3.03.0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		44 Kelompok	150.000.000
2.14.04.3.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		10 Unit	100.000.000
2.14.04.3.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Kab.Kutai Kartanegara			APBD		1 Kegiatan	150.000.000
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.983.093.076**				
2.14.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong			APBD		42 Dokumen	535.000.000,00
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	250.000.000,00
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong			APBD		12 Laporan	25.000.000,00
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	12 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	100.000.000,00
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000,00
2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 data	151.583.686	APBD		1 Data	100.000.000,00

2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	30.000.000	APBD		1 Berita Acara	35.000.000,00
2.14.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Tenggarong			APBD		Dokumen	0,00
2.14.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Tenggarong	12 Laporan				12 Dokumen	8.500.000.000,00
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	14 Orang/Bulan	7.872.622.612,00	APBD		55/Org/Bln	8.265.000.000
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong			APBD		1 Laporan	20.000.000,00
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	12 Laporan	250.000.000	APBD		12 Laporan	200.000.000,00
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong			APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
2.14.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Dokumen					
2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 dokumen	25.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000,00
2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong			APBD		Dokoumen	0,00
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan	30.000.000	APBD		4 laporan	250.000.000,00
2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan		APBD		4 Laporan	250.000.000,00
2.14.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong			APBD		110 Paket	225.000.000,00
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong			APBD		35 Orang	250.000.000,00
2.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	4 paket	100.000.000	APBD		6 Paket	200.000.000,00
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	4 paket	60.000.000	APBD		6 Paket	150.000.000,00
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	3 Paket	19.999.800	APBD		4 Paket	25.000.000,00
2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tenggarong	5 Paket	75.000.000	APBD		7 paket	350.000.000,00
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tenggarong			APBD		10 Laporan	50.000.000,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	40 Laporan	93.403.400	APBD		40 Laporan	300.000.000,00
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong			APBD		4 Dokumen	350.000.000,00
2.14.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong			APBD		1 Unit	150.000.000,00
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tenggarong			APBD		1 Unit	680.000.000,00
2.14.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Tenggarong	2 Unit	37.582.000	APBD		Unit	0,00
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong			APBD		25 Unit	200.000.000,00
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	7 unit	100.000.000	APBD		10 Unit	1.000.000.000,00
2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong			APBD		30 Unit	200.000.000,00
2.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong			APBD		Laporan	0,00
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	420.000.000	APBD		12 Laporan	600.000.000,00
2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong			APBD		12 Laporan	150.000.000,00

2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	220.000.000	APBD		12 Laporan	500.000.000,00
2.14.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong			APBD		15 Unit	100.000.000,00
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	128 unit	97.901.578	APBD		85 Unit	175.000.000,00
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	5 unit	50.000.000	APBD		10 Unit	200.000.000,00
2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong			APBD		2 Unit	75.000.000,00
	T O T A L				**17.092.893.076**				**17.918.054.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan salah satu rencana pencapaian kinerja tahun ke-5 (lima) urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan Indikator Kinerja Utama adalah:

a. nilai akuntabilitas kinerja DPPKB;
b. angka total fertility rate (TFR) per WUS (15-49 tahun) dan ASFR; dan
c. *mCPR*, *unmeed need* dan indeks pembangunan keluarga (iBangga).

Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan PD tahunan yang berlandaskan RKPD tahun 2026. Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian:
    1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPPKB perlu melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga.
    2. Angka Total Fertility Rate (TFR) dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu:
        - Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun.
        - Angka peserta KB Baru.
        - Angka unmetneed
        - Penggunaan MKJP
        - Persentase angka drop-out akseptor
    3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi PD serta sarana prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
    4. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa di bina oleh1orang PKB/PLKB.
    5. Percepatan Penurunan STUNTING di wilayah LOKUS STUNTING masih tinggi.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan

kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh DPPKB sebagai salah satu PD dilingkup Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja DPPKB.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu di tetapkan Program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat di laksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan Program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil Musrenbang Daerah. Penyempurnaan matrik Renja-PD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, subtansi dari penyusunan Rencana Kerja tahunan adalah target dan pencapaian indikator kinerja.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembentukan Dispora merupakan langkah strategis dalam rangka implementasi otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Dispora memiliki tanggung jawab dalam mengelola dua urusan utama, yaitu kepemudaan dan keolahragaan. Urusan kepemudaan meliputi pengembangan kapasitas, pemberdayaan, dan pembinaan generasi muda agar menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Hal ini penting karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan pembangunan daerah dan bangsa. Urusan keolahragaan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga, penciptaan budaya olahraga di masyarakat, dan pembinaan atlet untuk meraih prestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kedua urusan ini secara

langsung maupun tidak langsung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Rencana Kerja PD tahun 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan PD untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen perencanaan Dispora tahun 2026, Renja-PD mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan PD dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Rencana Kerja;
b. penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;
c. penyusunan rancangan Rencana Kerja;
d. forum PD/lintas PD;
e. penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan
f. penetapan Rencana Kerja.

Dalam penyusunannya Rencana Kerja Dispora mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dispora tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dispora dan pada akhirnya Rencana Kerja digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional/DBON;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan

Pemerintan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025– 2045
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan Dispora di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Kerja Dispora tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dispora secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Evaluasi kegiatan Dispora tahun 2024 didasarkan pada pencapaian *output* (keluaran) dari masing- masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran Program. Hasil evaluasi Program dan kegiatan tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dispora memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas kepemudaan Dan Olahraga s/d tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Output)	Targent Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11(10/4)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	72	74	73	98.38	75	75	100
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484	118	118	118	100.00	118	118	100
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	6	5	5	100.00	9	9	100
219.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	140	-	35	-	0.00	-	-	0.00
219.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	-	20	-	0.00	-	-	0.00
219.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	140	-	35	-	0.00	-	-	0.00
219.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	80	-	20	-	0.00	-	-	0.00

219.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	-	2	-	0.00	1	1	100
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	3	1	2	200.00	3	3	100
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	472	72	71	71	100.00	71	71	100
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,624	1,104	1,104	1,104	100.00	1,104	1,104	100
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	91	-	1	3	300.00	1	1	100
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	3	1	-	0.00	-	-	0.00
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40	-	10	-	0.00	-	-	0.00
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	165	32	30	30	100.00	42	42	100
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	-	1	-	0.00	1	1	100
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	92	-	17	17	100.00	17	17	100
219.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	5	250.00	-	-	0.00
219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	-	0.00	1	1	100
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	-	12	12	100.00	16	16	100
219.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	-	1	3	300.00	-	-	0.00

219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	-	2	-	0.00	2	2	100
219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	-	0.00	1	1	100
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	-	0.00	1	1	100
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	37	7	7	12	171.43	7	7	100
219.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	680	697	1	-	0.00	1	1	100
219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	2	1	4	400.00	1	1	100
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	3	20	-	0.00	1	1	100
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160	340	40	323	807.50	40	40	100
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	8	8	8	100.00	8	8	100
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	5	4	4	100.00	1	1	100
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	204	34	34	34	100.00	1	1	100
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	35	20	20	100.00	1	1	100
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9,000	1,504	1,500	2,554	170.27	1	1	100
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	210	32	30	30	100.00	1	1	100
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,570	303	300	300	100.00	300	300	100
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,700	900	450	1,000	222.22	450	450	100
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	8	2	10	500.00	2	2	100

219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	47	8	8	8	100.00	8	8	100
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	80	7	25	357.14	7	7	100
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	13	1	-	0.00	1	1	20.00
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	100
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	100
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	100
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18.30	3.08	3.08	3.08	100.01	3.08	3.08	100
219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180	41	30	32	106.67	30	30	100
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	20	20	52	260.00	20	20	100
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	16	2	4	200.00	2	2	100
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	8	1	-	0.00	1	1	100
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81.71	74.39	76.83	76.83	100.00	79.27	79.27	100
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	100	100	100	100.00	100	100	100
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1,600	2	300	1,050	350.00	5	5	100

	Tingkat kabupaten/kota									
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	420	805	80	107	133.75	275	275	100
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	46	10	10	65	650.00	20	20	100
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100	20	20	51	255.00	20	20	100
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	500	101	100	153	153.00	370	370	100
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300	12	40	30	75.00	60	60	100
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	22	61	4	35	875.00	150	150	100
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	63.41	47.78	53.66	53.66	100.00	0.00	0.00	0.00
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	15	9	1	1	100.00	-	-	0.00
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	260	75	40	144	360.00	-	-	0.00
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	35.85	34.20	34.66	34.66	99.99	35.41	35.41	100
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	21.05	21.05	21.05	99.99	21.05	21.05	100
2.19.03. 2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	69	108	9	57	633.33	7	7	100

	perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	180	40	40	80	200.00	40	40	100
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12	7	2	4	200.00	4	4	100
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	5	-	1	-	0.00	1	1	100
2.19.03.2.02.0006	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	7	4	1	304	30400.00	1	1	100
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	46.45	48.75	49.75	0.00	52.50	52.50	100
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	462	300	100	390	390.00	100	100	100
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	800	1,185	-	20	#DIV/0!	20	20	100
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	228	66	52	60	115.38	52	52	100
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	400	126	80	80	100.00	40	40	100
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di	5	1	1	-	0.00	1	1	100
	kabupaten/kota	kabupaten/kota								
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	3.51	3.51	3.51	100.04	3.51	3.51	100.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	16	-	2	-	0.00	1	1	100
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100.00	1	1	100
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0095	0.0082	0.0095	0.0095	99.68	0.0095	0.0095	100.00
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5	5	1	2	200.00	3	3	100
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	9	3	2	11	550.00	10	10	100
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	350	1	80	80	100.00	10	10	100
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	21	21	5	5	100.00	5	5	100
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	18	31	3	6	200.00	7	7	100
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	11.86	13.11	13.11	100.01	14.36	14.36	100
2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	2	1	2	200.00	1	1	100
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5	1	1	1	100.00	1	1	100
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	320	60	60	60	100.00	60	60	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	9	2	2	2	100.00	2	2	100
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	20	3	3	3	100.00	5	5	100
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13	3	3	3	100.00	3	3	100
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	9	2	2	2	100.00	2	2	100
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	30	4	5	5	100.00	5	5	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan tabel T-C.29 capaian indikator Program tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 98,38 % (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan persen);
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 100 % (seratus persen);
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 100 % (seratus persen); dan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100 % (seratus persen).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan Progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra-PD adalah:

1. terhadap indikator program yang tidak tercapai akan ditindak lanjuti dengan peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kepada PD;
2. penyesuaian nomenklatur Program/kegiatan serta indikator dan target kinerja menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas kepemudaan dan olahraga;
3. penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4. menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
5. meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan; dan
6. melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Analisis kinerja pelayanan Dispora didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70	72	74	75	77	85.5	72.78	75	80	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	118	118	118	118	6	118	118	118	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			43	71	71	71	71	43	71	71	71	
4	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			12	17	17	17	17	12	17	17	17	
5	Jumlah Dokumen			0	2	2	2	2	0	2	2	2	
6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			5	7	7	7	7	5	7	7	7	
7	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			7	8	8	8	8	7	8	8	8	
9	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	
11	Persentase Pengembangan Kepemudaan			71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	81.71%	71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	
12	Persentase Pembinaan Kepemudaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif			43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	63.41%	43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga			34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	35.85%	34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	
15	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi			17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	
16	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina			42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	54.67%	42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	
18	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan			10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	
19	Persentase masyarakat yang berolahraga			0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	0.0095%	0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	
20	Cakupan pembinaan kepramukaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif			9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	15.61%	9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	
22	Persentase Pemuda Mandiri		IKK	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	0.32%	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	
23	Persentase Pemuda yang Berorganisasi		IKK	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	5%	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	
24	Jumlah Prestasi Olahraga		IKK	5	6	7	8	9	5	6	7	8	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel tersebut dapat dilihat data indikator kinerja tujuan dan sasaran dari dinas kepemudaan dan olahraga beserta angka target yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja tahunan. Target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya indikator kinerja tersebut arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil pembangunan berupa *outcome* dan benefit dapat diukur akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Adanya atlet pelajar yang berprestasi ini dapat menggambarkan kinerja Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimulai dari Program pembibitan atau *talent scouting* bagi atlet pelajar dan penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga.
3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang menurun salah satunya disebabkan karena perubahan bobot penilaian yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN-RB untuk penilaian SAKIP tahun 2024, dan tahun 2025 belum dilaksanakan evaluasi SAKIP.
4. Atlet berprestasi melampaui target dikarenakan meningkatnya prestasi atlet dilihat dari perolehan medali dikejuaraan *single event* maupun *multi event* baik kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang, permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga, hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Provinsi serta hasil telaahan RTRW dan KLHS yang dikaitkan dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah pada dokumen RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

a. Bidang Kepemudaan:
   1. Perlunya optimalisasi pembinaan dan pengembangan pemuda yang unggul dan berdaya saing pada aspek kewirausahaan; dan
   2. Terbatasnya akses pemuda untuk mewujudkan pola hidup sehat melalui sarana dan prasarana olahraga yang mendukung aktivitas rekreasi, tantangan, petualangan, dan wisata;

b. Bidang Kepramukaan:
   1. Masih perlunya pembentukan karakter, nilai-nilai revolusi mental, dan kepemimpinan generasi muda melalui kepramukaan; dan
   2. Perlunya peningkatan partisipasi kepramukaan oleh generasi muda dalam rangka menyambut bonus demografi dan Indonesia Emas 2045;

c. Bidang Pembudayaan Olahraga:
   1. Perlunya peningkatan tingkat capaian partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga untuk membangun budaya hidup sehat; dan
   2. Masih terbatasnya penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam event olahraga tradisional, rekreasi, dan tantangan;

d. Bidang Prestasi Olahraga:
   1. Masih perlunya pembinaan olahraga yang berkelanjutan untuk mencapai prestasi nasional di bidang olahraga pendidikan, rekreasi, dan olahraga prestasi;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Masih kurangnya penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga kompetitif untuk mendukung pencapaian prestasi atlet daerah; dan
3. Pekan Olahraga Tingkat Provinsi akan diadakan pada tahun 2026 dimana sebagai tuan rumah adalah kabupaten paser.

Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan Program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagaimana tabel diatas, yaitu :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara:
   a) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
      - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan;
      - Kegiatan kepemudaan dirasakan masih minim dikarenakan tidak semua anggaran kegiatan khusus kepemudaan menyentuh ke beberapa wilayah di kecamatan/desa;
      - Kelangkaan prasarana gedung kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang; dan
      - Prestasi pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional, namun tidak semua bisa terakomodir pemuda-pemudi yang mempunyai talenta maupun prestasi dikarenakan terbatasnya anggaran kegiatan yang disediakan.
   b) Urusan keolahragaan, pelayanan keolahragaan mulai menunjukkan peningkatan setelah beberapa tahun terpuruk dikarenakan adanya pandemi sehingga beberapa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penyelenggaraan/even mulai dari tingkat nasional maupun internasional mulai diselenggarakan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keterbatasan kebijakan pelayanan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara karena ada beberapa kegiatan terutama pada pelatihan kewirausahaan yang juga berkaitan dengan Program/kegiatan PD lainnya seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sama halnya dengan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda berkaitan juga dengan Program yang ada pada BNN.

Secara struktur organisasi, saat ini Dispora telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di tahun berikutnya diharapkan Dispora bisa meningkatkan kapasitas baik dari kecepatan, ketepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Program di Dispora.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program nasional/internasional, seperti *SDGs (Sustainable Development Goals)*.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045,dan juga visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : “Terwujudnya Pondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”. Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif;
3. terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Dampak terhadap capaian Program nasional/internasional, seperti *SDGs (Sustainable Development Goals)* yaitu:

a. Kegiatan P4GN (pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) melalui kegiatan penyululuhan pencegahan, penangulangan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran kalangan pelajar SMP/MTs/SMA/SMK/MA, dengan peserta 100 (serratus) orang;
b. standar pelayanan minimal pada Dispora di implementasikan pada aplikasi simpora (sistem peminjaman sarana dan prasarana olahraga) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya mempermudah dalam pelayanan sarana dan prasarana olahraga; dan
c. melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di kecamatan dan bersekala nasional berupa komplek olahraga areal stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang dan Komplek Olahraga Stadion Rondong Demang di Tenggarong.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara.

a) Tantangan :

1) Tantangan internal Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara.

- sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

2) Tantangan eksternal.

- jumlah pemuda yang meningkat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara:
- luasnya wilayah pembinaan pemuda;
- penanganan pemuda belum tertangani secara optimal;
- tingkat pengguna narkoba dikalangan pemuda maupun remaja harus didukung dengan data di masing-masing kecamatan dan juga BNN;
- masih kurangnya atlet berprestasi;
- kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta;
- kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga;
- kurangnya data yang diperoleh terkait jumlah orang/atlit ataupun persentase pada program/kegiatan; dan
- kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.

b) Peluang :

- luasan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang parsial;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- adanya wadah bagi pemuda dalam membentuk pemuda yang mandiri melalui Klinik WPM;
- banyaknya jumlah usia muda/pelajar;
- adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan Daerah;
- Adanya KONI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga;
- Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Adanya pembinaan terhadap pemuda.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat didukung oleh sumber daya manusia usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Peran Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:

a. Peningkatan daya saing tenaga kerja pemuda (16-30 Thn) di pasaran dan dunia kerja.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sekitar 806.964 (delapa ratus enam ribu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sembilan ratus enam puluh empat) jiwa, dan sekitar 204.088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan) jiwa adalah penduduk berusia 16-30 tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar sebagai penggerak pembangunan. Daya saing pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda. Jumlah pemuda tersebut merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja.

b. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan.

Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

c. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Budaya olahraga dimasyarakat belum optimal dan masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana terbuka (prestasi, tradisional, rekreasi, wisata, tantangan dan pertualangan) yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat.

d. Lemahnya manajemen keolahragaan, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu.

e. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), DBON merupakan Program pembangunan olahraga jangka panjang 2021-2045 yang mencakup : olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Salah satu target dari DBON yakni

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indonesia mampu meraih prestasi terbaik di olimpiade tahun 2044.

f. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur tahun 2026 akan diselenggarakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

g. Pelaksanaan Porprov Korpri Kaltim ke-4 di Kutai Timur yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2026.

h. Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) V Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Kabupaten Paser.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas Program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD sebagaimana tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	24,477,575,305	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	43,227,575,305	
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118	1,150,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118	1,150,000,000	
219.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	400,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	400,000,000	SESUAI
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	SESUAI
2.19.01. 2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	200,000,000	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1	200,000,000	SESUAI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

								Statistik Sektoral Daerah			
2.19.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		50,000,000	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	50,000,000	SESUAI
2.19.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		400,000,000	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	400,000,000	SESUAI
219.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	50,000,000	SESUAI
			Daerah								
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	71	11,919,065,226	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	71	11,919,065,226	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	11,519,065,226	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	11,519,065,226	SESUAI
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	25,000,000	SESUAI
		Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Seberang	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	42	350,000,000	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Seberang	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	42	350,000,000	SESUAI
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		25000000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25000000	SESUAI
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		95,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	95,000,000	
2.19.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		25,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	25,000,000	SESUAI
219.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		70,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	70,000,000	SESUAI
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen		50,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2	50,000,000	
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		25,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	25,000,000	SESUAI
219.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi		25,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	1	25,000,000	SESUAI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Daerah					Daerah			
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		375,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	7	525,000,000	
219.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribu Kelengkapan		100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	250,000,000	-Bertambah 150 Juta untuk Pengadaan pakaian dinas PPPK
219.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25,000,000	SESUAI
219.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50,000,000	SESUAI
219.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100,000,000	SESUAI
219.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,095,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,295,000,000	
219.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		70,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	70,000,000	SESUAI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

								Bangunan Kantor yang Disediakan			
219.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		120,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	120,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		45,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		45,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		70,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	70,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	SESUAI
219.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	45,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2450	245,000,000	-Bertambah 200 Juta untuk Jasa Penyusunan Arsip Kantor

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	SESUAI
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	12	500,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	16	2,000,000,000	
2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	1,600,000,000	-Bertambah 1,5 M untuk Pengadaan Mobil Dinas Ess 3
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	200,000,000	SESUAI
2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	100,000,000	SESUAI
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	100,000,000	SESUAI
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5,518,189,164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	7,118,189,164	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	SESUAI
219.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,518,189,164	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3,118,189,164	-Bertambah 800 Juta untuk Cleaning Service Komplek Olahraga -Bertambah 800 Juta untuk Security Komplek Olahraga
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.08	3,775,320,915	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.25	19,075,320,915	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	SESUAI
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	SESUAI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	SESUAI
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	3,215,320,915	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	18,515,320,915	-Bertambah 100 Juta untuk Perencanaan Perbaikan Sekretariat Kepemudaan, Olahraga Dan Kepramukaan (Zona Pesisir) -Bertambah 100 Juta untuk Perencanaan Perbaikan Sekretariat Kepemudaan, Olahraga Dan Kepramukaan
											(Zona Tengah) Bertambah 100 Juta untuk Perencanaan Perbaikan Sekretariat Kepemudaan, Olahraga Dan Kepramukaan (Zona Hulu) Bertambah 15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											M untuk Penyelesaian Rehab Sarana Olahraga (Gedung PABSI, Gedung Anggar, Gedung Silat)
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81.71	4,450,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81.71	11,900,000,000	
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	4,050,000,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	8,600,000,000	
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		2,000,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	4	3,150,000,000	-Bertambah 1 M untuk Binlat Kedinasan lainya -Bertambah 150 Juta untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	200	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	275	1,800,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Kegiatan Sekam Sharing dan Home Sharing -Bertambah
											500 Juta untuk Fasilitasi wirausaha mengikuti kegiatan expo dan pameran
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	200,000,000	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	35	500,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Kegiatan-kegiatan dalam memperingati hari sumpah pemuda
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	4	800,000,000	-Bertambah 200 Juta untuk Seleksi Jambore Pemuda Daerah (JPD) -Bertambah 200 Juta untuk Pemilihan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Kreativitas Pemuda -Bertambah 200 Juta untuk Pemilihan Pemuda Berprestasi
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	150,000,000	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	220	550,000,000	-Bertambah 100 Juta untuk Pemilihan duta anti narkoba -Bertambah 300 Juta untuk Penyelengaraan Festival Keratif Pemuda Ramadhan ke-3
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60	500,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Seleksi Pertukaran Pemuda Tingkat Provinsi
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4	300,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24	1,300,000,000	-Bertambah 1 M untuk Seleksi Musrenbang pada 20 Kecamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	63.41	400,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	63.41	3,300,000,000	
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		300,000,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2	2,800,000,000	-Bertambah 2,5 M untuk Kegiatan KNPI
219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2	500,000,000	-Bertambah 400 Juta untuk Pencapaian IKK Kementrian dalam Ekonomi Mandiri
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	35.85	10,550,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	35.85	61,400,000,000	
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitas	21.05	1,300,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	18,800,000,000	
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan,	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di		1,200,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di	34	18,700,000,000	-Bertambah 1 M untuk Pengadaan Peralatan Pendukung Olahraga NPCI dan SoINA 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		tingkat kabupaten/kota yang tersedia			pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		tingkat kabupaten/kota yang tersedia			-Bertambah 500 Juta untuk Pengadaan alat Marchingband (Ponpes) -Bertambah 10 M untuk Pengadaan Peralatan Tanding untuk
											Porprov 2026 -Bertambah 2 M untuk Pengadaan Peralatan Tanding untuk BAPOR KORPRI 2026 -Bertambah 4 M untuk Musrenbang pada 20 Kecamatan
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	40	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	40	100,000,000	SESUAI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan			100.00	3,250,000,000	Penyelenggaraan			100.00	33,450,000,000	
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai kartanegara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	9	2,850,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	13	4,650,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Kejuaraan Bupati cup Bulutangkis 2025 / Haornas -Bertambah 200 Juta untuk Kejuaraan Bupati Cup Minisoccer 2025 -Bertambah 300 Juta untuk Kejuaraan Bupati cup Bola Volly 2025 / Haornas -Bertambah 1 M untuk mengadakan kejuaraan maupun perlombaan olahraga
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan	40	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan	40	100,000,000	SESUAI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			oleh Satuan Pendidikan Dasar		Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	40	200,000,000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1840	28,600,000,000	-Bertambah 800 Juta untuk Mengikuti Kejuaraan Peparprov dan SoINA -Bertambah 1,6 M untuk Mengikuti Kejuaraan BAPOR -Bertambah 25 M untuk TC dan Mengikuti PORPROV 2026 -Bertambah 1 M untuk Fasilitasi Mengikuti Kejuaraan Olahraga
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	2,650,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	4,350,000,000	
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	250,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	250,000,000	SESUAI
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	40	400,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Penghargaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	berjasa dalam memajukan Olahraga					berjasa dalam memajukan Olahraga					Olahragawan Berprestasi
219.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1	2,000,000,000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2	3,000,000,000	-Bertambah 1 M untuk Tambahan PELATDA PPLPD
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80	600,000,000	-Bertambah 400 Juta untuk Peningkatan Tenaga Keolahragaan
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	2,650,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	4,350,000,000	
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	250,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	250,000,000	SESUAI
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	40	400,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Penghargaan Olahragawan Berprestasi
219.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	1	2,000,000,000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan	2	3,000,000,000	-Bertambah 1 M untuk Tambahan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			PELATDA PPLPD
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80	600,000,000	-Bertambah 400 Juta untuk Peningkatan Tenaga Keolahragaan
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	2,650,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	4,350,000,000	
219.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	SESUAI
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,200,000,000	
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	200,000,000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	200,000,000	SESUAI
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1,000,000,000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1,000,000,000	SESUAI
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0095	2,150,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0095	3,600,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi	1	100,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi	1	100,000,000	SESUAI
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3	900,000,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	6	1,750,000,000	-Bertambah 300 Juta untuk Event Balap Ketinting ERAU -Bertambah 200 Juta untuk Ramadhan Street Run -Bertambah 350 Juta untuk Fasilitasi Olahraga WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	100,000,000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	100,000,000	SESUAI
219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	50,000,000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	50,000,000	SESUAI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	pengembangan, dan pengawasan					pengembangan, dan pengawasan					
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5	1,000,000,000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	6	1,600,000,000	-Bertambah 600 Juta untuk Fasilitasi Olahraga Rekreasi lainnya
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,300,000,000	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,300,000,000	
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	2,300,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	2,300,000,000	
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	80	150,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	80	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	SESUAI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	6	700,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	6	700,000,000	SESUAI
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	150,000,000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	700,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	700,000,000	SESUAI
					41,777,575,305					**118,827,575,305**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun 2026. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kecamatan dan forum PD Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
Pelatihan Kewirausahaan		Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara		10	
Pelatihan Kewirausahaan		Desa tuana tuha , Kab. KutaiKartanegara		10	
Pelatihan Kewirausahaan		Semayang		10	
Pelatihan Otomotif dan Perbengkelan Mobil (KELOMPOK PEMUDA)		Desa Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun Darat		10	
Pelatihan Barbershop		Desa Kota Bangun I		5	
Pelatihan Barista		Desa Kota Bangun I		5	
Pelatihan bagi karang taruna		Desa Kota Bangun I		5	
Pelatihan Kewirausahaan		desa suka bumi, Kab. Kutai kartanegara		5	
Pelatihan Kewirausahaan		desa suka bumi, Kab. Kutai kartanegara		5	
Pelatihan sablon Karang taruna		desa suka bumi, Kab. Kutai kartanegara		5	
Pelatihan Sablon Bagi Pemuda / Karang Taruna		Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat		10	
Pelatihan Kewirausahaan		Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara		10	
Pelatihan Kewirausahaan		Desa Santan Ilir		5	
Pelatihan Kewirausahaan		JL.Samarinda-Bontang Km.63 RT.004		5	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelatihan Kewirausahaan	Jl. Syamsuddin. HA RT. 001	5	
	Pelatihan Kewirausahaan	Jl. Mahakam Ilir RT.3 Muara Kembang	5	
	Pelatihan Perbengkelan dan Sablon	Gunung Pasir Muara Jawa Ulu	10	
	Pelatihan Sablon Karang Taruna Kel Muara Jawa Ulu	Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	5	
	Pelatihan Perbengkelan Karang Taruna Kel Muara Jawa Ulu	Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	5	
		Desa Menamang Kiri, Kab. Kutai Kartanegara	5	
	Pelatihan kewirausahaan dalam bidang perbengkelan, sablon, barista, babershop, dan laundry.	Desa Batuq, Kab. Kutai	15	
	pelatihan kewirausahaan dalam bidang Barbershop	Desa Batuq, Kab. Kutai	5	
	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda usia 16-30 tahun - perbengkelan, sablon, barista, babershop, laundry	Sebemban, Kab. Kutai	10	
	Pelatihan kewirausahaan (Cuci Sepatu)	Jl. Karya RT.001 Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	10	
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Sanga-Sanga Dalam RT 19, Kab. Kutai Kartanegara	10	
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Ds.Bila talang Karang Taruna Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	5	
	peningkatan kewirausahan bagi kelompok warga desa sidomulyo tabang	Desa Sidomulyo kecamatan tabang, Kab. Kutai Kartanegara	5	
	Pelatihan kewirausahan Karang Taruna Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong	Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong	5	
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Jalan Gerbang Dayaku, Jalan Kejawi, Jalan Amelia 1,2 & 3, jalan Pisang, Jalan Durian, jalan Jeruk, Jalan Rambutan , Kab. Kutai Kartanegara	5	
	Pelatihan aneka keterampilan bagi masyarakat	Jahab RT 01, Kab. Kutai	5	
	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Sangkuliman, Kab. Kutai Kartanegara	5	
	Pelatihan bengkel idaman motor Rt 02	Suka Bumi RT 02, Kab. Kutai	5	
	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun Darat	5	
	Pelatihan Barista Coffe Kel Muara Jawa Ulu	Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	5	
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			
	Bantuan Sarana dan Prasarana Kelompok Usaha Bersama KUB " CAHAYA	RT. 09, Muara Badak Ulu	1 unit	
	Peralatan Perbengkelan	GUNUNG PASIR Muara Jawa Ulu	1 unit	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Perlunya Pengadaan Alat Laundry	Pendingin KUB Pertiwi, Kab. Kutai	1 unit	
		Desa Sidomulyo kecamatan tabang, Kab. Kutai Kartanegara	1 unit	
	penyediaan peralatan perbengkelan, sablon, barista, babershop, loundry	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	5 unit	
	Penyediaan sarana/alat bengkel bagi pemuda	Desa Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun	5 unit	
	Sarana Usaha Loundry	Desa Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun	1 unit	
	Sarana Usaha Barista kopi	Desa Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun	1 unit	
	Penyediaan Sarana Prasaran Kelembagaan Kepemudaan Muara Jawa (KNPI Muara Jawa)	Muara Jawa Ulu, HANDIL, Kab. Kutai Kartanegara	1 unit	
	Bantuan Sarana dan prasarana Pemuda usia 16-30 tahun - perbengkelan, sablon, barista, babershop, laundry	Sebemban, Kab. Kutai	10 unit	
	Bantuan Soundsystem Karang Taruna	RT 06 Kelurahan Tanjung Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	1 unit	
	Perlunya Pengadaan Alat Perbengkelan Kelompok Sukses Bersama	Pendingin	1 unit	
	Perlunya Pengadaan Alat Pencucian Motor dan Mobil	Pendingin Karang Taruna	1 unit	
	Perlunya Pengadaan Alat Laundry	KUB Matahari, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	1 unit	
	Bantuan Soundsystem	Jl. Sri Bangun RT. 019 Desa Kota Bangun Ulu Dusun Melati, Kab. Kukar	1 unit	
219.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
	perlengkapan olahraga bulutangkis	Kutai Lama RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	
	Pengadaan perlengkapan olahraga prestasi di desa	Ds. Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	
	Kurangnya peralatan olahraga	Jembayan Tengah Jalan Habib Tunggang Parangan, Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	
	Kurangnya peralatan olahraga	Desa Menamang Kanan RT004, Kelurahan MENAMANG KANAN, Kecamatan MUARA KAMAN,	1 Paket	
	Pembangunan Lapangan Voly	Jl.Gajah Mada RT.01 Muara Muntai Ilir,	30 M2	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kab. Kutai Kartanegara		
	Pengadaan perlengkapan olahraga prestasi	Ds. Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03	1 Paket	
	perlengkapan olahraga salah satunya Jaring Pnahan Bola,bola,jersey pemain,serta lampu Sorot .turnamen	Beloro Perlengkapan Olahraga Volly RT 5, Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	
	Rehab Lapangan Bola Desa Muara Pantuan	RT 11 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	3800 M2	
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	
	Pelatih Sepak Bola untuk Para Pemuda agar bisa jadi juara.	Sebemban Dan Dusun Kuyung,	2 orang	
219.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	
	pengadaan Tenda darurat untuk memfasilitasi kegiatan pramuka.	Lapangan Tunas Agung Desa Giri Agung , Kab. Kutai Kartanegara	2 unit	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

Dalam perumusan tujuan dan sasaran PD selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 serta rancangan awal Renja-PD tahun 2025 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMD 2025-2029. Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : “Terwujudnya Pondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”. Dalam upaya mencapai visi maka disusun Misi Pembangunan dengan semangat terbaik yaitu:

1. terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif;
3. terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD.

a. tujuan jangka menengah dispora Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pembangunan dan prestasi olahraga; dan
b. sasaran jangka menengah Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai sebagai berikut :
   1. meningkatnya pembangunan kepemudaan; dan
   2. meningkatnya pembangunan keolahragaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: "Mewujudkan Masyarkat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia". Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; dan
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

b) Dukungan terhadap *SDGs* terkait dengan kegiatan penyuluhan anti narkotika dan obat-obatan terlarang yaitu dengan mengusung tema pemuda bersatu dan bangkit begitu juga dengan rencana aksi Pemerintah Daerah sesuai dengan visi RPJPD yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera sehingga dalam pengentasan kemiskinan maka akan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari.

c) Pendayagunaan potensi ekonomi Daerah berupa pelatihan dan keterampilan dibidang kewirausahaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d) Menciptakan masyarakat yang sehat dengan Pembudayaan olahraga.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

a) Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026:
- Program : 4 (empat)
- Kegiatan : 17 (tujuh belas)
- Sub Kegiatan : 73 (tujuh puluh tiga)

b) Sifat penyebaran lokasi dan kegiatan yaitu terletak pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menitik beratkan pada kategori desa tertinggal, desa miskin. Dalam hal ini diberikan langsung kepada masyarakat guna membantu masyarakat khususnya dalam bidang kepemudaan dan dalam bidang olahraga.

c) Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya bisa dilihat pada tabel T-C 33 sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	75	25,394,615,063	APBD		76	37,715,483,312
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong **Seberang**	118	600,000,000	APBD		118	600,000,000
219.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	3	150,000,000	APBD		3	150,000,000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
2.19.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
2.19.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
2.19.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
219.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Tenggarong Seberang**	**71**	**12,787,294,148**	**APBD**		71	**12,787,294,148**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	1104	12,387,294,148	APBD		1.104	12,387,294,148
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	42	350,000,000	APBD		42	350,000,000
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Tenggarong Seberang**	**2**	**95,000,000**	**APBD**		2	**95,000,000**
2.19.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	1	70,000,000	APBD		1	70,000,000
219.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Tenggarong Seberang**	**2**	**50,000,000**	**APBD**		2	**50,000,000**
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Tenggarong Seberang**	**7**	**175,000,000**	**APBD**		7	**175,000,000**
219.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong Seberang	2	-	APBD		1	-
219.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
219.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong Seberang	20	0	APBD		20	0
219.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Tenggarong Seberang	40	100,000,000	APBD		40	100,000,000
219.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tenggarong Seberang**	**10**	**930,000,000**	**APBD**		10	**930,000,000**
219.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	70,000,000	APBD		1	70,000,000
219.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	120,000,000	APBD		1	120,000,000
219.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	45,000,000	APBD		1	45,000,000
219.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	45,000,000	APBD		1	45,000,000
219.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	0	APBD		3	0
219.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	300	250,000,000	APBD		300	250,000,000
219.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	2450	100,000,000	APBD		450	100,000,000
219.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
219.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Tenggarong Seberang**	**16**	**100,000,000**	**APBD**		12	**100,000,000**
2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	7	0	APBD		3	0
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	7	0	APBD		7	0
2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	0	APBD		1	0
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Tenggarong & Tenggarong Seberang**	**12**	**6,682,000,000**	**APBD**		**12**	**7,118,189,164**
219.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	4,000,000,000	APBD		12	4,000,000,000
219.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	2,682,000,000	APBD		12	3,118,189,164
219.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tenggarong**	**3.25**	**3,975,320,915**	**APBD**		**3**	**15,860,000,000**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintahan Daerah		**& Tenggarong Seberang**						
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong Seberang	30	300,000,000	APBD		30	300,000,000
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong Seberang	20	60,000,000	APBD		20	60,000,000
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong & Tenggarong Seberang	1	100,000,000	APBD		1	200,000,000
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong & Tenggarong Seberang	5	3,515,320,915	APBD		2	15,300,000,000
219.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Pengembangan Kepemudaan**	**Kutai Kartanegara**	**81.71**	**6,350,000,000**	**APBD**		**81.71**	**4,450,000,000**
219.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Kepemudaan**	**Kutai Kartanegara**	**100**	**4,950,000,000**	**APBD**		**100**	**4,050,000,000**
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	4	1,000,000,000	APBD		2	2,000,000,000
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kutai Kartanegara	275	1,300,000,000	APBD		200	1,000,000,000
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kutai Kartanegara	35	100,000,000	APBD		20	200,000,000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kutai Kartanegara	4	200,000,000	APBD		1	200,000,000
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kutai Kartanegara	220	300,000,000	APBD		100	150,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kutai Kartanegara	60	200,000,000	APBD		30	200,000,000
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	24	1,850,000,000	APBD		4	300,000,000
219.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**	**Kutai Kartanegara**	**63.41**	**1,400,000,000**	**APBD**		63.41	**400,000,000**
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	2	1,150,000,000	APBD		1	300,000,000
219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	2	250,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga**	**Kutai Kartanegara**	**35.85**	**48,185,000,000**	**APBD**		35.85	**10,550,000,000**
219.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi**	**Kutai Kartanegara**	**21.05**	**14,800,000,000**	**APBD**		**21.05**	**1,300,000,000**
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	34	14,725,000,000	APBD		7	1,200,000,000
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	40	75,000,000	APBD		40	100,000,000
219.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga**	**Kutai Kartanegara**	**100.00**	**25,885,000,000**	**APBD**		100.00	**3,250,000,000**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	13	3,285,000,000	APBD	9	9	2,850,000,000
219.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1840	22,400,000,000	APBD		40	200,000,000
219.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Atlet Lokal Yang Dibina**	**Kutai Kartanegara**	**54.67**	**4,150,000,000**	**APBD**		54.67	**2,650,000,000**
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kutai Kartanegara	100	150,000,000	APBD		100	250,000,000
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kutai Kartanegara	40	100,000,000	APBD		20	100,000,000
219.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	2	2,800,000,000	APBD		1	2,000,000,000
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kutai Kartanegara	80	1,025,000,000	APBD		40	200,000,000
219.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	75,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan**	**Kutai Kartanegara**	**3.51**	**1,400,000,000**	**APBD**		3.51	**1,200,000,000**
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Kutai Kartanegara	1	1,100,000,000	APBD		1	200,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	1	300,000,000	APBD		1	1,000,000,000
219.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase masyarakat yang berolahraga**	**Kutai Kartanegara**	**0.0095**	**1,950,000,000**	**APBD**		0.0095	**2,150,000,000**
219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	6	450,000,000	APBD		3	900,000,000
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	5	50,000,000	APBD		5	50,000,000
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	6	1,250,000,000	APBD		5	1,000,000,000
219.04	**Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Cakupan pembinaan kepramukaan**	**Kutai Kartanegara**	**100**	**1,170,000,000**	**APBD**		100	**2,300,000,000**
219.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif**	**Kutai Kartanegara**	**15.61**	**1,170,000,000**	**APBD**		15.61	**2,300,000,000**
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	150,000,000
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	80	75,000,000	APBD		80	150,000,000
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Kutai Kartanegara	2	100,000,000	APBD		2	150,000,000
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	6	300,000,000	APBD		6	700,000,000
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	3	75,000,000	APBD		3	150,000,000
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	2	70,000,000	APBD		2	150,000,000
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	5	350,000,000	APBD		5	700,000,000
					81,099,615,063				55,015,483,312

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Dispora tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Dispora tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Dispora tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran PD, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dispora tahun 2026 secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026.

c. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan PD yang selanjutnya disebut Renja-PD tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan Daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan Program dan kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DTTK):

a. Meningkatnya perencanaan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan;
b. Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang produktif dan berdaya saing di tingkat nasional;
c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan informasi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan baru: dan
d. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

Hal tersebut untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi serta untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sebagai dokumen rencana tahunan PD, RKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendorong penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Rencana Kerja DTTK merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan Program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
b. Rencana Kerja merupakan acuan DTTK untuk memasukkan Program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dengan perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
c. Rencana Kerja DTTK ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan DTTK untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2026 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja DTTK harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah, yang antara lain :

a. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan Program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berjalan;
b. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD harus selaras dengan Program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
c. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil *(outcome)* indikator kinerja keluaran *(output)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan Program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatar belakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Renja -PD) tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi,serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan Program PD yang telah mengakomodir usulan hasil musrenbang dari tiap Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan. Rencana Kerja akan digunakan bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembagunan nasional, provinsi dan Daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan Program kerja DTTK agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah sebagai standar ukuran capaian keberhasilan DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RPJMD DTTK pada tahun 2026.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 DTTK melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 44 (Empat Puluh Empat) subkegiatan sebagaimaana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sejumlah Rp 52.590.180.033,- (lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah). dalam pelaksanaan Program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk Program DTTK tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja DTTK sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh sekretariat dan sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Alokasi anggaran sebesar Rp15.094.099.333,00 (lima belas miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp12.552.570.451,00 (dua belas miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 82,16 % (delapan puluh dua koma enam belas persen) dan sisa anggaran sebesar Rp2.541.528.882,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta

lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini merupakan salah satu penunjang Program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara ”Kukar Siap Kerja” yang dilaksanakan oleh DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Program penunjang ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta kegiatan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil ketiganya diampu oleh bidang pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja. Pagu dari Program ini adalah Rp16.052.340.000,00 (enam belas miliar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp11.567.169.818,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 72,05% (tujuh puluh dua koma nol lima persen). Adapun rincian subkegiatan yang termasuk Program ini adalah sebagai berikut :

a. subkegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan klaster kompetensi dengan pagu anggaran sebesar Rp15.952.340.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp11.512.773.618,00 (sebelas miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 72,17% (tujuh puluh dua koma tujuh belas persen) target 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) orang, dengan capaian 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) orang atau 100% target tercapai.

b. subkegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan realisasi Rp21.335.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 85,34% (delapan puluh lima koma tiga puluh empat persen) dan sisa anggaran sebesar Rp3.665.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

c. sub kegiatan pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan realisasi Rp21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 84,96% (delapan puluh empat koma sembilan puluh enam persen) dan sisa anggaran sebesar Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan tenaga kerja ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan, dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah, yang di ampu oleh bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain : pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja serta 5 (lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.672.399.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp7.715.264.852,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atau 88,96 % (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen). Adapun rincian subkegiatan yang termasuk Program ini adalah sebagai berikut :

a. sub kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja dengan anggaran sebesar Rp75.000.0000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi Rp67.403.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau 89,87% (delapan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen).

b. sub kegiatan pelayanan antar kerja dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp46.950.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus

lima puluh rupiah) atau 93,90% (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh persen).

c. sub kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp93.399.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi Rp88.286.200,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau 94,52% (sembilan puluh empat koma lima puluh dua persen).

d. sub kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan pagu anggaran Rp8.254.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan realisasi Rp7.330.916.252,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atau 88,81 % (delapan puluh delapan koma delapan puluh satu persen).

e. sub kegiatan job fair/bursa kerja dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan realisasi Rp181.709.400,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) atau 90,85% (sembilan puluh koma delapan puluh lima persen)

4. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Program perencanaan tenaga kerja ini bertujuan untuk memastikan pihak swasta/perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta menyediakan dasar yang lebih baik untuk merencanakan pengembangan pencari kerja yang memanfaatkan sikap pekerja secara optimal dan tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja Daerah, yang di ampu oleh bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain : penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp94.394.740,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau 94,39% (sembilan puluh empat koma tiga puluh sembilan persen) Adapun

rincian subkegiatan yang termasuk Program ini adalah sebagai berikut :

a. sub kegiatan fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro dengan anggaran sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah) dengan realisasi Rp94.394.740,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau 94,39% (sembilan puluh empat koma tiga puluh sembilan persen).

5. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial merupakan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dimana Program ini diampu oleh bidang hubungan industrial. Pagu Program ini sebesar Rp11.271.341.700,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi Rp9.912.045.830,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau 87,94% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen). Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota dengan 7 (tujuh) subkegiatan yaitu:

a. sub kegiatan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp41.725.000,00 (empat puluh satu juta koma tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 83,45% (delapan puluh tiga koma empat puluh lima persen).

b. sub kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 362.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp254.749.080,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sembilan ribu delapan puluh rupiah) atau 70,37% (tujuh puluh koma tiga puluh tujuh persen).

c. sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp39.098.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembillan puluh delapan ribu rupiah) atau 78,19% (tujuh puluh delapan koma sembilan belas persen)

d. sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 42.125.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 84,25% (delapan puluh empat koma dua puluh lima persen).

e. sub kegaiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp29.675.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 59,35% (lima puluh sembilan koma tiga puluh lima persen).

f. subkegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp41.386.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 82,72% (delapan puluh dua koma tujuh puluh dua persen).

g. sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dengan pagu anggaran sebesar Rp10.609.341.700,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp9.429.412.350,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 88,87% (delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), subkegiatan ini merupakan salah salah program bupati untuk membantu masyarakat miskin dalam pembayayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada masyarakat bukan penerima upah yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut ini rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra PD disajikan dalam tabel 1. T-C.29 dan tabel 1.1 realisasi tahun 2024 DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 1 T-C.29 Rekapitulasi Evalusi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH	73,00	Persen	81,80	71,50	71,29	100	73,00	226	3,10
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Dokumen	8	8	8	100	3		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	5	5	5	100	3	13	87
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	3	3	3	100	3	9	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	Orang/ Bulan	14	14	14	100	73	101	122
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	Laporan	1	4	4	100	1	6	120

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara									
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	1	1	100	1	3	60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara									
6	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi	1	Dokumen	0	1	1	100	1	2	200
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	15	Dokumen	3	3	3	100	1	7	47
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	5	5	3	60	5	13	130
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	73	Orang	55	73	0	0	83	138	189
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan	35	Orang	8	35	18	51	40	66	189

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
11	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	146	Paket	0	146	146	100	0	146	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum									
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2	1	1	100	1	4	80
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3	5	5	100	1	9	300
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	0	3	3	100	1	4	80
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Serta Rapat/Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	5	Paket	1	1	1	100	1	3	60
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	20	Paket	8	3	3	100	4	15	75
17	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	Paket	0	4	2	50	2	4	40

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
18	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	12	12	12	100	1	25	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	87	Laporan	24	87	87	100	57	168	193
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan									
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	110	Unit	0	102	100	98	3	103	94
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	1	1	1	100	0	2	29
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sapras pendukung gedung dan bangunan	199	Unit	199	1	1	100	0	200	101
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara									
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	Unit R2/R4	21	24	18	75	24	63	263
28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1	Paket	0	0	0	0	1	1	100
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	22,43	Persen	15,38	18,59	22,90	123	20,50	59	262
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan									
30	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	2082	Orang	348	535	535	100	507	1.390	67
31	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	50	LPTKS	4	20	6	30	0	10	20
32	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	70	Unit	0	65	65	100	0	65	93
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia									
33	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang dibina	15	Lembaga	11	15	15	100	15	41	273

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Produktif									
34	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil	25	UMKM	25	25	25	100	25	75	300
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data rencana tenaga kerja daerah									
35	Penyusunan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlsh perusahaan yang menyusun RTK mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	15	15	15	100	15	45	300
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,37	Persen	8,02	8,39	13,75	164	10,37	32	3,10
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja									
36	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan	35	Orang	13	0	0	0	30	43	123
37	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja	25	Kecamatan	18	0	0	0	25	43	172
38	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Kesempatan Kerja	775	Orang	378	579	579	100	705	1.662	214

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
39	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75	Orang	0	50	50	100	0	50	67
40	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaam	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	75	Orang	0	10	10	100	0	10	13
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja									
41	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	5	Event	2	2	2	100	60	64	1.280
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan									
42	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	20	Perusahaan	20	20	20	100	10	50	250

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online									
43	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20	Perusahaan	0	0	0	0	10	10	50
44	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	Laporan	2	2	2	100	2	6	100
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan									
45	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	50	Perkara	15	15	15	100	15	45	90

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
46	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	405	Perkara	125	100	100	100	80	305	75
47	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	24	6	6	100	6	36	600
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	Lembaga	1	1	1	100	1	3	60
49	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	35.000	35.440	35.440	100	48.729	119.169	336
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	4	Dokumen	2	2	1	50	2	5	125
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans									
50	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk	5	Kawasan	1	1	1	100	1	3	60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi									
51	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	3	Kawasan	2	2	2	100	1	5	167
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan									
52	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	Kepala Keluarga	21	30	30	100	40	91	182
53	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukiman	1	1	1	100	15	17	113

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah			15.094.099.333	12.552.570.451	82,16
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			450.000.000	321.931.554	71,54
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	350.000.000	259.613.054	74,17
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.000.000	62.318.500	62,31
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			10.139.876.880	8.653.286.357	85,33
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/ Bulan	9.989.876.880	8.533.818.557	85,42
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	150.000.000	119.467.800	79,64
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			82.200.000	65.600.000	79,80
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	82.200.000	65.600.000	79,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			385.000.000	274.428.570	71,28
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	32.338.741	79,64

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	30.000.000	27.550.000	91,83
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	100.000.000	66.601.135	66,60
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83	Orang	50.000.000	30.706.051	61,41
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	155.000.000	117.232.643	75,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			959.700.000	804.551.417	83,83
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.700.000	29.151.000	98,15
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	50.000.000	29.403.700	58,80
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	13.360.400	26,72
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	180.000.000	163.190.850	90,66
15	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	Paket	75.000.000	36.194.000	48,25
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000	15.514.500	62,05
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	57	Laporan	450.000.000	420.495.567	93,44
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			1.601.000.000	1.145.504.250	71,54

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	1.601.000.000	1.145.504.250	71,54
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1.100.280.522	1.002.596.053	91,12
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000	3.990.000	99,75
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	229.827.998	199.040.685	86,60
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000	79.325.000	79,32
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	766.452.524	720.240.368	93,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			376.041.931	284.672.250	75,70
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	276.041.931	188.499.350	68,28
24	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	96.172.900	96,17
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya			16.052.340.000	11.567.169.818	72,05
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			15.952.340.000	11.512.773.618	72,17
25	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	577	Orang	15.952.340.000	11.512.773.618	72,17

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	kerja berdasarkan klaster kompetensi						
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			25.000.000	21.335.000	85,34
26	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	25.000.000	21.335.000	85,34
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktivitas			25.000.000	21.240.000	84,96
27	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	25.000.000	21.240.000	84,96
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja			100.000.000	94.394.740	94,39
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			100.000.000	94.394.740	94,39
28	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota	15	Orang	100.000.000	94.394.740	94,39
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri			8.672.399.000	7.715.264.852	88,96
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			8.472.399.000	7.533.555.452	88,91
29	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30	Orang	75.000.000	67.403.000	89,.87
30	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Orang	50.000.000	46.950.000	93,90
31	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30	Orang	93.399.000	88.286.200	94,52

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	705	Orang	8.254.000.000	7.330.916.252	88,81
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			200.000.000	181.709.400	90,85
33	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	60	Orang	200.000.000	181.709.400	90,85
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial			11.271.341.700	9.912.045.830	87,94
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			462.000.000	330.349.480	71,50
34	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10	Perusahaan	50.000.000	41.725.000	83,45
35	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	362.000.000	254.749.080	70,37
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			10.809.341.700	9.581.696.350	88,64

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	Perkara	50.000.000	39.098.000	78,19
37	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80	Perkara	50.000.000	42.125.000	84,25
38	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	50.000.000	29.675.000	59,35
39	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	50.000.000	41.386.000	82,72
40	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	10.609.341.700	9.429.412.350	88,87
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan			1.100.000.000	664.909.600	60,44
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			1.100.000.000	664.909.600	60,44
41	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigras	1	Kawasan	800.000.000	534.359.100	66,79
42	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	300.000.000	130.550.500	43,51

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi			300.000.000	284.095.500	94,69
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000	284.095.500	94,69
43	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40	Kepala Keluarga (KK)	150.000.000	138.697.000	92,46
44	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukiman	150.000.000	145.398.500	96,93
JUMLAH					52.590.180.033	42.790.450.791	81,36

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan tabel diatas pagu anggaran sebesar Rp52.590.180.033,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp42.790.450.791,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 81,36% (delapan puluh satu koma tiga puluh enam persen). Diharapkan tahun 2025 persentase penyerapan anggaran lebih baik dari tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan DTTK adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

DTTK yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Distransnaker, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok:

"Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja."

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati tersebut, DTTK menyelenggarakan fungsi:

1. merumuskan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang transmigrasi dan tenaga kerja; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Indikator Kinerja Utama (IKK) urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2010 tentang indikator kinerja kunci (IKK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. urusan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga) indikator kunci, yaitu:

1. Urusan Ketenagakerjaan.
    a. Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi dengan rumusan pencari kerja yang dilatih dibagi dengan data awal renstra dikali 100 (seratus).
    b. Pencari kerja yang terdaftar ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100 (seratus).
2. Urusan Ketransmigrasian
    a. Perencanaan penyediaan pencadangan lahan rencana kawasan transmigrasi dengan target 3 (tiga) rencana kawasan pengembangan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja seperti pada Tabel 2 T-C.30 berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber : RENSTRA 2025– 2030

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (input) =(IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	4,22	4,85	5,82	6,7	7,7	8,85	22,9	22,77	4,22	4,85	
2	Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal		Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	2,11	2,21	2,43	2,91	3,34	3,84	13,7	18,86	2,11	2,21	
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan		Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan		Indeks Transmigrasi	25	35	50	75	90	100	1	4	2	25	
5	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.80	72.00	72.30	73.00	73.50	74.00	81,80	71,50	71,76	72	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DDTK tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DDTK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. pembangunan ibu kota nusantara (IKN);
3. percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif;
4. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. peningkatan eksebilitas dan konektivitas infrastruktur;
7. regulasi penetapan kawasan dan pemanfaatan HPL transmigrasi; dan
8. tahapan rencana penyusunan RKT belum sepenuhnya dapat di tindaklanjuti di Daerah.

Isu tersebut yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan tugas fungsi DTTK bila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, dan terhadap capaian Program nasional di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkait dengan capaian indicator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaanya adalah oleh PD sesuai pelimpahan kewenagan yang diberikan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DDTK pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga dengan Program/kegiatan provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah masih kurangnya sumber daya aparatur utamanya makin berkurang tenaga fungsional seperti pengantar kerja dan mediator serta masih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

belum adanya tenaga fungsional instruktur pelatihan. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS/ASN biasa. Selain hal tersebut ada juga permasalahan yang dihadapi sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya koordinasi antara DDTK dengan PD dan antar PD;
2. Kurangnya sumber daya manusia perencanaan dan pengelola data .
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program-Program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
5. Penduduk usia kerja atau angkatan kerja meningkat tidak diimbangi dengan peluang kerja;
6. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat;
7. Rendahnya keterampilan/vokasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif;
8. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia;
9. Kurang keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai *hinterland* dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi; dan
10. Pembangunan dipedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya insfrastruktur (jalan, jembatan sarana dan prasarana).

Hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Masih rendahnya partisipasi perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenga kerja dan lowongan kerja yang tersedia;
3. Kurangnya tenaga kerja fungsional instruktur; dan
4. Perubahan regulasi tentang tata cara perencanaan Kawasan transmigrasi (Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2021).

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi kepala Daerah

Belum Optimalnya koordinasi dan pencapaian target Program Bupati Kutai Kartanegara antara DTTK dengan PD dan antar-PD mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan yaitu jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan jumalah tenaga kerja ditempatkan. Kekurangan SDM tenaga kerja fungsional instruktur ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja PD seperti yang telah ditargetkan, sehingga pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja menjadi tidak optimal. Di samping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan Program-Program sektoral untuk dapat fokus pada pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan di pasar kerja, serta tidak tercapainya target capaian Program kukar siap kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD urusan ketransmigrasian, masih adanya 12 (dua belas) lahan HPL yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan transmigrasi lokal, tetapi kewenangan pemanfaatan lahan ada pada kementerian yang membidangi transmigrasi sehingga Daerah tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Tersusunya dokumen rencana kawasan transmigrasi di kecamatan Kota Bangun dan kecamatan Tabang tetapi kenyataannya sampai saat ini belum diterbitkannya penetapan rencana kawasan transmigrasi tersebut sehingga tidak dapat dilaksanakan tahap berikutnya,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan ketenagakerjaan yaitu fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara memiliki sumber daya manusia (SDM) yang rendah atau belum memiliki keahlian untuk memasuki pasar kerja, angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara saai ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau *low skill* sehingga kurang dapat bersaing dengan pekerja di luar wilayah Kutai Kartanegara. Data Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara menunjukkan dari 392.275 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) orang angkatan kerja saat ini terdapat 376.150 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh) orang yang bekerja, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 16.125 (enam belas ribu seratus dua puluh lima) orang yang mencari pekerjaan/pengangguran. Dari data tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Tantangan lain dalam meningkatkan pelayanan PD adalah masuknya Investasi di berbagai bidang di Ibu Kota Negara mengakibatkan banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan persaingan berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara signifikan.

Peluang-Peluang *(opportunities)* dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan DTTK, antara lain sebagai berikut:

a. Program tranmigrasi membantu mengurangi kepadatan penduduk di kota besar dan meningkatkan pembangunan daerah terpencil;
b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Terbukanya kasempatan bagi tenaga kerja yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah keterampilan dan skill tenaga kerja sasuai dengan pasar kerja dan melakukan pelatihan bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi pencari kerja dalam bersaing mendapatkan pekerjaan
d. Akses informasi yang semakin cepat, tepat dan mudah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3.4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk urusan ketransmigrasian untuk segera menindaklanjuti proses penetapan rencana kawasan transmigrasi yang sudah ada. Untuk urusan Ketenagakerjaan peluang kesempatan kerja yaitu memperbanyak pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing pencari kerja. Untuk kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga dapat berwirausaha mandiri. untuk dapat berwirausaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan paska pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya menyerap tenaga kerja non formal.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Tahun 2025-2029 disusun suatu Rencana Kerja setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal Rencana Kerja di aplikasi perencanaan SIPD RI yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin ke dalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Rencana Kerja. Adapun rincian *Review* terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan hasil analisi kebutuhan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,00	21.813.041.898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,00	15.039.494.450	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.100.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	550.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	350.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
4	Penyelenggaraan walidata pendukung stastistik sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Satistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan walidata pendukung stastistik sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Satistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik SektoralDaerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik SektoralDaerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	9.687.370.252	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	10.689.842.450	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Aparatur	68 Orang	9.437.370.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Aparatur	68 Orang	10.439.842.450	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	150.000.000	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	50.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	150.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Milik Daerah pada SKPD					Milik Daerah pada SKPD			
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	1.120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	185.000.000	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Orang	350.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Orang	-	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	40.000.000	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	70.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	25.000.000	
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	370.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	1.430.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	410.000.000	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
26	Penyediaan Bahan/Material	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.000.000	
29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	51 Unit	4.668.319.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Unit	1.190.000.000	
31	Pengadaan Mebel	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 Unit	100.000.000	
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	1.950.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	990.000.000	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	10 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	10 Unit	100.000.000	
34	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	-	
35	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	1 Unit	-	
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	34 Unit	575.719.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	34 Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	2 Unit	1.192.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	2 Unit	-	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.659.232.646	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.088.492.000	
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.235.232.646	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	666.492.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	4 Jenis	1.948.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	4 Jenis	826.160.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000	
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000	
44	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	271.960.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	100.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	25,69	7.196.220.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	25,69	4.150.000.000	
I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	6.996.220.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	400 orang	4.020.000.000	
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	6.996.220.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	4.020.000.000	
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi	Lembaga	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi	Lembaga	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	-	
II	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	50.000.000	
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	50.000.000	
III	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Dokumen	-	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Dokumen	-	
5	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dokumen	-	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dokumen	-	
IV	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	50.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	30.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
6	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	30.000.000	
V	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktivitas	25 Persen	100.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	
7	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktifitas	1 Dokumen	100.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktifitas	1 Dokumen	50.000.000	
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100%	150.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100%	75.000.000	
I	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	75.000.000	
1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,76 %	6.450.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,76 %	3.405.000.000	
I	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	5.900.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	3.030.000.000	
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	150.000.000	
2	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	150.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	70.000.000	
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	200.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	120.000.000	
4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	250.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	450 Orang	5.000.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	450 Orang	2.490.000.000	
II	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin LPTKS	2 Dokumen	100.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin LPTKS	2 Dokumen	50.000.000	
6	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	100.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	50.000.000	
III	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	300.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	250.000.000	
7	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	250.000.000	
IV	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang terlindungi	50 Orang	150.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang terlindungi	50 Orang	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8	Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	150.000.000	Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	75.000.000	
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100%	18.550.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100%	10.600.000.000	
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	20 Perusahaan	1.850.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	60 Perusahaan	350.000.000	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	15 Perusahaan	500.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	60 Perusahaan	100.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Terdaftar di WLKP Online					Terdaftar di WLKP Online			
2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	500.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	60 Perusahaan	100.000.000	
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	850.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	150.000.000	
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	16.700.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	10.250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	2.800.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	150.000.000	
5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	500.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	
6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	500.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	500.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	150.000.000	
8	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	12.400.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	9.650.000.000	
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	72,73	1.050.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	72,73	100.000.000	
I	Program Perencanaan Kawasan		Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	1 Dokumen	1.050.000.000	Program Perencanaan Kawasan		Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	1 Dokumen	100.000.000	
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	-	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	150.000.000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	50.000.000	
3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7981.89 Ha	600.000.000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7981.89 Ha	-	
4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	300.000.000	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	50.000.000	
JUMLAH					55.209.261.898	JUMLAH				33.369.494.450	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pada tabel 3 (tiga) tersebut Rancangan Akhir RKPD Program dan Kegiatan terdapat 6 (enam) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan dengan pagu anggran sebesar Rp55.209.261.898,00 (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi 63 (enam puluh tiga) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp33.369.494.450,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empar ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang meningkat dari pagu akhir RKPD , uraian penambahan pagu anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Pagu anggaran Program penunjang urusan pemerintah daerah sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp 21.813.041.898,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupau) kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp 15.039.494.450,00 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat empat ratus lima puluh rupiah). Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

   - kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran menjadi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
   - kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang semula pagu anggaran Rp9.687.370.252,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan mengalami kenaikan menjadi Rp10.439.842.450,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) kenaikan tersebut disebabkan penyesuaian penambahan PPPK.
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan pagu anggaran berkurang menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebelumnya memiliki pagu sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Penurunan pagu disebabkan sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, selain itu sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang semula pagu anggaran Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah memiliki pagu sebesar Rp4.668.319.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh miliar rupiah) pengurangan pagu disebabkan optimalisasi pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp1.659.232.646,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp1.088.492.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) penurunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tersebut disebabkan sebagian non ASN sudah berubah status menjadi PPPK.

- kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang semula Rp1.948.120.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp826.160.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

2. Program Hubungan Industrial.

Pagu anggaran Program hubungan industrial sesuai rancangan RKPD adalah sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah). Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp16.700.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program perencanaan tenaga kerja sesuai dengan rancangan RKPD adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan tersebut pagu anggaran menjadi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pagu Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai rancangan RKPD adalah sebesar Rp7.196.220.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah di analisis kebutuhan menjadi Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil analisis kebutuhan terdapat kegiatan yang mengalami penurunan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut:

- kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang semula Rp6.996.200.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah).
- kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta yang semula Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Setelah dilakukan analisi kebutuhan tidak mengalami kenaikan dan penurunan.
- kegiatan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil yang semula Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- kegiatan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota yang semula Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dilakukan hasil analisi kebutuhan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program penempatan tenaga kerja sesuai rancangan RKPD adalah sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil analisis kebutuhan bertambah menjadi Rp3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- pada kegiatan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota mengalami penurunan semula sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp 3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

- kegiatan penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- kegiatan pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pada Program perencanaan kawasan transmigrasi sesuai rancangan RKPD sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- kegiatan Program perencanaan kawasan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari kecamatan dan kelurahan/desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DTTK telah diakomodir dalam Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DTTK tahun 2026. Berdasar hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan DTTK, telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaahan Renstra kementerian/lembaga dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka disusunlah Program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sesuai dengan kamus usulan yang sudah disampaikan kepada pihak kecamatan dan desa untuk mempermudah dalam pengusulan Program dan kegiatan yang sesuai dengan Program dan kegiatan DTTK tahun 2026 dan selanjutnya di usulkan dalam selanjutnya di entri dalam aplikasi SIPD RI. Proses selanjutnya di verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya dari hasil verifikasi Bappeda dalam aplikasi SIPD tugas DTTK memverivikasi usulan masyarakat dalam SIPD sesuai dengan kamus usulan guna penentuan apakah usulan tersebut akan ditindak lanjuti atau di kembalikan kepada masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sesuai isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi DTTK adalah Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan di bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja maka disusunlah Program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	320 Orang	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
1	Pelatihan Diksar Gada Pratama	Kabupaten Kutai Kartanegara		100 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pelatihan Ahli K3 Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pelatihan Foklift	Kabupaten Kutai Kartanegara		15 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pelatihan Instrumen Level 1	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
6	Pelatihan Operator Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pelatihan Scafolding	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pelatihan Welder 4G	Kabupaten Kutai Kartanegara		15 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pelatihan Welder 3G	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	249 Orang	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja		
1	Pembekalan Tata Boga	Kecamatan Muara Jawa		98 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
		Kecamatan Muara Jawa (Muara Jawa Tengah)			
		Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu)			
		Kecamatan Loa Kulu (Loh Sumber)			
		Kecamatan Sebulu (Selerong)			
		Kecamatan Kota Bangun Seberang			
		Kecamatan Kenohan (Teluk Bingkai)			
		Kecamatan Marangkayu (Sebuntal dan Semangko)			
		Kecamatan Samboja (Handil Baru)			
2	Pembekalan Menjahit	Kecamatan Muara Jawa		51 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
		Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu)			
		Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ulu)			
		Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ilir)			
		Kecamatan Muara Jawa (Muara Kembang)			
		Kecamatan Muara Jawa (Muara Jawa Tengah)			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
3	Pembekalan Tata Rias	Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu) Kecamatan Anggana (Sidomulyo) Kecamatan Muara Kaman (Teratak)		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pembekalan Membatik	Kecamatan Samboja Barat (Bukit Merdeka)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pembekalan Pertukangan	Kecamatan Tenggarong (Rapak Lambur) Kecamatan Muara Kaman (Muara Kaman Ilir) Kecamatan Muara Kaman (Teratak) Kecamatan Muara Kaman (Cipari Makmur)		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pembekalan Bengkel Motor	Kecamatan Marangkayu (Semangko)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pembekalan Barber Shop	Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ulu)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) prioritas Nasional ke 4 (empat) memperkuat pembangunan smber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas. serta prioritas 6 (Enam) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, DTTK memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan diperjelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait dengan adanya evaluasi terhadap kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kondisi aktual di lapangan serta potensi dampak yang dapat dicapai. Serta menelaah strategi yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Nasional dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan yang ada di tingkat regional atau lokal.

Keselarasan dengan Renstra Kementerian/Lembaga
1. Pengembangan SDM unggul melalui pelatihan berbasis kompetensi.
2. Penyediaan lapangan kerja layak untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
3. Penguatan hubungan industrial yang harmonis dan pelindungan tenaga kerja.
4. Pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi lokal.
5. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan.
6. Optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara eksplisit kebijakan DTTK tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek sumber daya manusia, berupa:

1. Urusan Ketenagakerjaan.
   a. meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. perluasan kesempatan kerja melalui padat karya;
c. meningkatkan informasi lowongan kerja;
d. optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerimaan tenaga kerja;
e. optimalisasi informasi lowongan kerja dan tidak lanjut dari Program yang telah dijalankan;
f. meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
g. meningkatkan pelayanan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
h. peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
i. penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis:
   - meningkatnya perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama (PKB);
   - menurunnya perselisihan hubungan industrial (HI);
   - meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah; dan
   - meningkatnya lembaga kerja sama (lks) bipartit yang berfungsi.

2. Urusan Ketransmigrasian.
   a. Telah dilaksanakanya penyempurnaan penyusunan rencana kawasan transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun, dan penyusunan rencana kawasan Kecamatan Tabang. Untuk RKT Kecamatan Kota Bangun menunggu hasil penilaian dari tim Pusat untuk penetapan rencana kawasan transmigrasi.
   b. Setelah adanya penetapan RKT dari pemerintah pusat akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tata ruang satuan kawasan permukiman (RTSKP).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan DTTK adalah sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	
4.	Program Hubungan Industrial	APBD	Bidang Hubungan Industrial
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	Bidang Transmigrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan ini berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan diarahkan untuk mendukung visi dan misi pembangunan Daerah.

1. meningkatkan peluang kerja bagi pencari kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang kompetitif, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar;
2. meningkatkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* Program PD. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan Program dan kegiatan secara terukur dan terarah.

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing di tingkat nasional. Capaian hasil diukur dengan indikator persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi.
2. meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan informasi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan baru. Capaian hasil diukur dengan indikator persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pekerjaan melalui akses informasi pasar kerja online, bursa kerja, dan kegiatan pendukung lainnya.

3. meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pemerintah kabupaten kutai kartanegara dengan perusahaan. Capaian hasil diukur dengan indikator persentase fasilitasi penanganan perselisihan hubungan industrial.
4. meningkatnya perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Capaian hasil diukur dengan indikator persentase ketersediaan fasilitas infrastruktur penunjang di kawasan transmigrasi.
5. meningkatnya kualitas pelayanan publik. Capaian hasil diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan visi DTTK tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi		Tingkat Kesempatan Kerja	96,92	97,59	97,23	97,54	97,83
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	4,85	5,82	6,70	7,70	8,85
		Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	2,21	2,43	2,91	3,34	3,84
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kesempatan		'Indeks Transmigrasi	25	35	50	75	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi							
		'Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Transmigrasi	0,00	23,89	24,10	30,51	21,50
			Pertumbuhan Luasan Lahan yang dimanfaatkan melalui IPT	3,20%	3,50%	3,52%	3,52%	3,55%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	91,40	91,50	91,55	91,68	91,72
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72.00	72.30	73.00	73.50	74.00

Untuk mencapai misi DTTK telah ditetapkan Indek Kinerja Utama (IKU) sebagai alat mengukur sekaligus pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian dengan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

a. meningkatnya pelaksanaan transmigrasi;
b. persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja[
c. persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya;
d. persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri; dan
e. jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program dan kegiatan Rencana Kerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, rencana Program dan kegiatan tahun anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, dengan Visi : "terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.", dan Misi ke-1 yaitu “terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, dengan program prioritas pembangunan daerah”, “PROGRAM ETAM SEJAHTERA”.

4.2 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian, kajian usulan Program/kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan perubahan Renja-PD terdahulu.

Bertolak pada visi, misi tujuan dan Program yang dilaksanakan RPJMD tahun 2025-2029 secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (DTTK) maupun aspek eksternal (masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta maupun nasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.3 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DTTK tahun anggaran 2026 terdiri atas 6 (Enam) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan, dan 63 (Enam Puluh Tiga) sub kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran DTTK sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

  Sasaran Program : Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

  Pagu Anggaran: Rp15.039.494.450,00 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

  Kegiatan :

  a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

  b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

     Pagu Anggaran : Rp10.689.842.450,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

  c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

  d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

  e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).

  f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

  g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

     Pagu Anggaran : Rp1.088.492.000.00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu Anggaran : Rp826.160.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja.

Pagu Anggaran: Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pagu Anggaran : Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah).

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pagu Anggaran : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

Pagu Anggaran : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

d) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Program Perencanaan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal.

Pagu Anggaran: Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Kegiatan :

a) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Pagu Anggaran : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

- Program Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal

Pagu Anggaran: Rp. 3.405.000.000,-

Kegiatan :

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pagu Anggaran : Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Pagu Anggaran : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Program Hubungan Industrial

Sasaran Program : Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan Antara Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dengan Perusahaan

Pagu Anggaran : Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah)

Kegiatan :

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pagu Anggaran : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Kegiatan :

a) Program Perencanaan Kawasan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pagu Anggaran : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur DTTK dapat disusun Program dan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah, Program urusan wajib dan Program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 5 T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	100,00	15.039.494.450	APBD		100,00	16.325.417.208
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	6 Dokumen	550.000.000	APBD		6 Dokumen	800.000.000
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	200.000.000
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	3 Laporan	100.000.000	APBD		3 Laporan	300.000.000
4		Penyelenggaraan walidata pendukung stastistik sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Satistik Sektoral Daerah	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
5		Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik SektoralDaerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	1 Data	200.000.000	APBD		1 Data	150.000.000
6		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	50.000.000
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	4 Laporan	10.689.842.450	APBD		4 Laporan	9.640.024.562
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur	DTTK Kab. Kukar	68 Orang	10.439.842.450	APBD		68 Orang	9.440.024.562
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	DTTK Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Keuangan Akhir Tahun SKPD								
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DTTK Kab. Kukar	4 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
10		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	3 Laporan	100.000.000	APBD		3 Laporan	150.000.000
11		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-
12		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-
13		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DTTK Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
IV		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	7 Laporan	185.000.000	APBD		7 Laporan	450.000.000
14		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DTTK Kab. Kukar	96 Orang	-	APBD		96 Orang	-
15		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DTTK Kab. Kukar	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	-
16		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
17		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
18		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DTTK Kab. Kukar	12 Orang	70.000.000	APBD		12 Orang	150.000.000
19		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DTTK Kab. Kukar	96 Orang	25.000.000	APBD		96 Orang	50.000.000
20		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DTTK Kab. Kukar	25 Orang	-	APBD		25 Orang	150.000.000
V		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTTK Kab. Kukar	10 Layanan	410.000.000	APBD		10 Layanan	1.330.000.000
21		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	200.000.000
24		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000
25		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	4 Paket	20.000.000	APBD		4 Paket	150.000.000
26		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	150.000.000
27		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DTTK Kab. Kukar	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DTTK Kab. Kukar	12 Laporan	110.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
29		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
30		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DTTK Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	DTTK Kab. Kukar	2 Unit	1.190.000.000	APBD		51 Unit	1.420.000.000
31		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	3 Unit	100.000.000	APBD		3 Unit	-
32		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	3 Unit	990.000.000	APBD		3 Unit	-
33		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	10 Unit	100.000.000	APBD		10 Unit	200.000.000
34		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-
35		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	1.000.000.000
36		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	34 Unit	-	APBD		34 Unit	220.000.000
37		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	DTTK Kab. Kukar	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTTK Kab. Kukar	12 Bulan	1.088.492.000	APBD		12 Bulan	1.659.232.646
38		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DTTK Kab. Kukar	1 Laporan	2.000.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
39		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	12 Laporan	350.000.000	APBD		12 Laporan	350.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
40		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	70.000.000
41		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DTTK Kab. Kukar	12 Laporan	666.492.000	APBD		12 Laporan	1.235.232.646
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	DTTK Kab. Kukar	4 Jenis	826.160.000	APBD		4 Jenis	876.160.000
42		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DTTK Kab. Kukar	6 Unit	248.160.000	APBD		6 Unit	248.160.000
43		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DTTK Kab. Kukar	11 Unit	28.000.000	APBD		11 Unit	28.000.000
44		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	DTTK Kab. Kukar	2 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
45		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DTTK Kab. Kukar	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	-
46		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DTTK Kab. Kukar	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	250.000.000
47		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DTTK Kab. Kukar	38 Unit	100.000.000	APBD		38 Unit	250.000.000
II		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	25,69	4.150.000.000	APBD		26,49	5.600.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
IX		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	400 orang	4.020.000.000	APBD		300 orang	5.500.000.000
48		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	400 Orang	4.020.000.000	APBD		300 Orang	5.500.000.000
49		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	Lembaga	-			Lembaga	-
50		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Unit	-	APBD		Unit	-
X		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	50.000.000	APBD		15 Lembaga	-
51		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	50.000.000	APBD		15 Lembaga	-
XI		Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-			Dokumen	-
52		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-			Dokumen	-
XII		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	30.000.000	APBD		Perusahaan	-
53		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	30.000.000	APBD		25 Perusahaan	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XIII		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Persen	50.000.000	APBD		25 Persen	100.000.000
54		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan Program peningkatan produktifitas	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
III		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100%	75.000.000	APBD		100%	-
XIV		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	-
55		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	75.000.000	APBD		20 Orang	-
IV		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	10,76%	3.405.000.000	APBD		26,85%	2.500.000.000
XV		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	Kab. Kutai Kartanegara	2 Layanan	3.030.000.000	APBD		2 Layanan	2.050.000.000
56		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	150.000.000	APBD		60 Orang	-
57		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	70.000.000	APBD		60 Orang	150.000.000
58		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	120 Orang	120.000.000	APBD		120 Orang	200.000.000
59		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang	200.000.000	APBD		30 Orang	200.000.000
56		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	450 Orang	2.490.000.000	APBD		680 Orang	1.500.000.000
XVI		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	100.000.000
60		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Kutai Kartanegara	5 Lembaga	50.000.000	APBD		5 Lembaga	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Sesuai dengan Aturan yang Berlaku							
XVII		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Kab. Kutai Kartanegara	1 Event	250.000.000	APBD		1 Event	200.000.000
61		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	250.000.000	APBD		100 Orang	200.000.000
XVIII		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang terlindungi	Kab. Kutai Kartanegara	Orang	75.000.000	APBD		Orang	150.000.000
62		Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	75.000.000	APBD		50 Orang	150.000.000
V		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.600.000.000	APBD		100%	11.574.700.000
XIX		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Kab. Kutai Kartanegara	60 Perusahaan	350.000.000	APBD		20 Perusahaan	600.000.000
63		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Kutai Kartanegara	60 Perusahaan	100.000.000	APBD		15 Perusahaan	100.000.000
64		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Kutai Kartanegara	60 Perusahaan	100.000.000	APBD		5 Perusahaan	100.000.000
65		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Peserta Jamsostek serta Pengupahan							
XX					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	150 Perusahaan	10.250.000.000	APBD		150 Perusahaan	10.974.700.000
66					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000	APBD		50 Perkara	200.000.000
67					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000	APBD		100 Perkara	150.000.000
68					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	6 Asosiasi	150.000.000	APBD		6 Asosiasi	150.000.000
69					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	1 Lembaga	150.000.000	APBD		1 Lembaga	150.000.000
70					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	48.729 Orang	9.650.000.000	APBD		48.729 Orang	10.324.700.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VI		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara	72,73	100.000.000	APBD		81,82	1.200.000.000
XXI		Program Perencanaan Kawasan	Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	1.200.000.000
71		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
72		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kawasan	50.000.000	APBD		1 Kawasan	300.000.000
73		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	7981.89 Ha	-	APBD		7981.89 Ha	600.000.000
74		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
JUMLAH						33.369.494.450				37.200.117.208

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja DTTK Tahun 2026, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Program daan kegiatan yaitu sebesar Rp33.369.494.450,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan perkiraan maju rencana tahun 2027 sebesar Rp37.200.117.208,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja DTTK tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program prioritas pembangunan daerah urusan tenaga kerja, yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dan Studi pendahuluan Renstra DTTK tahun 2026-2029.

Renja-PD tahun 2026, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DTTK tahun anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam Program prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tentang arah kebijakan, Program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan perkiraan maju tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasiil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat Pelaksanaan sehingga target kinerja rencana strategis DTTK dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana karena itu prosedur standar pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana harus diselengarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara untuk *proofing* (membuktikan) kinerja dan untuk inproving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian Program.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap subkegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainya, baik dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra DTTK dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, yang memuat Program kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2026, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut ;

1. Rencana Kerja mengacu pada :
    a. program pembangunan nasional;
    b. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
    c. studi pendahuluan Renstra DTTK tahun 2025-2029;
    d. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026;
    e. hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya; dan
    f. berdasarkan Program kegiatan atau kamus usulan serta hasil Musrenbang yang berasal dari masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
    a. sasaran dan indikator kinerja DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara;
    b. Program dan kegiatan;
    c. indikator kinerja;
    d. rencana tingkat capaian (target); dan
    e. pagu indikatif dan perkiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja DTTK tahun 2026, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam studi pendahuluan Renstra DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

5.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan oleh DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut :

1. penetapan prioritas pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. peningkatan partisipasi aktif Masyarakat/swasta dalam Program pembangunan urusan ketenagekerjaan dan ketransmigrasian ;
3. pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DTTK Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029; dan
4. Adanya Upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan eva;uasi rencana kerja.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka perencanaan pembangunan di Daerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana pembangunan tahunan untuk Kabupaten/Kota disebut RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka PD membuat Renstra dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra PD.

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Renstra-PD dan sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja-PD merupakan acuan atau pedoman bagi PD untuk memasukkan Program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja DPMD tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kera tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan; Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan Program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja DPMD Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di

Desa/Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2025 (tahun berjalan) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMD Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMD Kutai Kartanegara tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN

berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran RenJA-PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN :

Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2026.

BAB V PENUTUP :

Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DPMD TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD :

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMD tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 yang sudah terinput pada aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
   a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen);
   b) Program penataan desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen);
   c) Program peningkatan kerjasama desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen);
   d) Program administrasi pemerintahan desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 16 (enam belas) subkegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen).
   e) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100% (seratus persen).
2. Realisasi Program/kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   a) Program administrasi pemerintahan desa dengan capaian kinerja Program sebesar 99,0% (sembilan puluh sembilan persen). Adapun kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,0% (sembilan puluh sembilan persen).
2. Sub-Kegiatan: fasilitasi manajemen pemerintahan desa dengan capaian kinerja sebesar 85% (delapan puluh lima persen), dimana indikator sub-kegiatan adalah : jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa dengan target 37 (tiga puluh tujuh) dokumen, namun capaian kinerja yang terealisasi adalah hanya 21 (dua puluh satu) dokumen, ada 16 (enam belas) dokumen yang belum teralisasi yaitu pembentukan klinik desa di 16 (enam belas) kecamatan yang belum terbentuk.

3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :

Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja secara signifikan PD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada DPMD. Kemudian perlunya peningkatan sumber daya manusia, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan penyusunan Program kerja PD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85	87,7	82	66,7	81,34	75	229,40	2,70
2	*13*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	300,00	3,00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	6	4	4	100	3	13	0,27
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						3	3	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						SKPD								
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	5	5	100	1	9	
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1	1	
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						1	1	
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	1	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	60	12	12	12	100	12	36	0,60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13910	2682	1582	1217	76,93	2142	6041	0,43
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	1	
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	14	12	12	100	12	38	0,63
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	1	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	5	5	100	10	16	3,20
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	5	5	100	3	8	1,60
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil						1	1	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6	6	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	91	20	110	550	40	241	2,41
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	112	112	
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	222	277	165	183	110,91	60	520	2,34
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	17	17	100	588,24	76,27	193,27	1,93
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	8	10	10	100	1	19	6,33
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	3	2	2	100	1	6	6,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1	53	4	4	100	4	61	61,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perundang-Undangan yang Disediakan								
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	12	12	100	12	36	36,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930	249	186	240	129,03	200	689	0,74
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	2	50	50	100	4	56	4,31
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	112	112,00	100	312	3,12
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			9	9	100	5	14	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135	207	175	9	5,14	5	221	1,64
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	20	100	500	100	300	3,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	2	2	2	100	1	5	5,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3	4	4	100	1	8	8,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	12	11	91,67	12	35	35,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	65	20	22	110	23	110	1,10
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95	4	5	5	100	6	15	0,16
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	3	3	100	25	28	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	415	149	66	82	124,24	65	296	0,71

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	0	0	0,00	1	2	2,00
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	3	3	100	0	3	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86	5,18	10	11	110	25,91	42,09	1,08
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	193	15	27	23	85,19	27	65	0,34
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19	13	3	3	100	8	24	1,26
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	10	2	2	100	193	205	20,50
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	50	19	32	22	68,75	193	234	4,68
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21	9	3	1	33,33	7	17	0,81

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50	3	3775	3775	100	23896	27674	553,48
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	10	100	100	100	100	310	3,10
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	193	13	57	57	100	52	122	0,63
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	10	12	12	100	7	29	5,80
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20	2	6	8	133,33	0	10	0,50
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	3	5	5	100	7	15	1,50
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	95	67,1	95	95	100	90	252,1	2,65
						Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	50	5	30	30	100	10	45	0,90
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193	180	193	193	100	193	566	2,93

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40	8	8	26	325	0	34	0,85
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30	3	14	8	57,14	11	22	0,73
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	140	1	1	1	100	2	4	0,03
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150	50	40	42	105	389	481	3,21
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	193	116	32	32	100	58	206	1,07
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75	14	14	14	100	0	28	0,37
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	193	198	82	82	100	23	303	1,57
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	1	23	23	23	100	24	70	70,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Desa								
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5	20	43	43	100	1	64	12,80
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2	21	43	43	100	3	67	33,50
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	125	20	54	55	101,85	1	76	0,61
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	640	1257	1540	1540	100	55	2852	4,46
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75	39	15	9	60,00	19	67	0,89
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	20	20	20	100	19	59	59,00
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3	0	1	2	200	1	3	1,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	10	2	18	18	100	3	23	2,30

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Kelurahan								
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	300	3,00
						Persentase Posyandu Aktif	70,35	91,8	70	86,8	124	70	248,6	3,53
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	3826	5	823	4721	573,63	4721	9447	2,47
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	2	1	1	100	6	9	1,80
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	5	19	18	19	105,56	22	60	12,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2590	10426	7775	7697	99,00	3480	21603	8,34
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300	26	1392	1392	100	168	1586	5,29
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15	4	3	3	100	4	11	0,73
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	8	3	3	100	1	12	4,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	4	1	1	100	4	9	0,60
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	0	1	1	0,00	1	2	0,40
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25	9	9	9	100	6	24	0,96

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMD yang tertuang dalam Renstra DPMD Tahun 2021-2026 maka analisis kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan Renstra DPMD tertuang dalam capaian sasaran strategis tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar			10	10	31,67	35,42	48,3	29,59	35,13	47,92	35,42	48,3	
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			10	100	0	0	0	100	100	100	0	0	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			10	14,3	14,3	21,76	22,8	31,63	35,13	52,08	14,3	14,3	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			77	80	82	75	72	87,7	66,74	78,65	75	85	
4	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa			1,55	5,18	10	25,91	19,42	2	5	10	25,91	38,86	
5	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa			100	100	100	100	18,51	100	100	100	100	100	
6	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik			50	70	95	90	95	50	67	95	90	95	
	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa			10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	
7	Prosentase Posyandu Aktif			45,22	51,51	70	70	70	49	92	87	100	70,35	
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. TINGKAT PELAYANAN DPMD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
c. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Mengoordinir penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Kemudian pada Renstra DPMD tahun 2021-2026 dilakukan *review* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu:

1) nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
2) persentase desa yang memiliki tata ruang desa;
3) persentase realisasi kesepakatan kerjasama desa;
4) persentase desa tertib administrasi pemerintahan dalam kategori baik;
5) pertumbuhan pendapatan bumdesa;
6) persentase posyandu aktif; dan
7) persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Secara struktur organisasi, saat ini DPMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
    2) Subbagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Penataan Desa;
d. Bidang Kerjasama Desa;
e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
h. UPTD.

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi- fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek sumber daya manusia dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DPMD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum Optimalnya penataan Desa	1	Masih banyak Desa yang tidak memiliki kejelasan Batas-Batas Desa	1	Belum tersedianya data tata wilayah desa
	2	Belum optimalnya Pengaturan Tata Ruang Desa	2	Belum adanya regulasi mekanisme Penyusunan Tata Ruang Desa
	3	Belum semua Desa menetapkan kewenangan lokal berskala desa	3	Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perdes kewenangan lokal desa
	4	Belum semua Desa terpenuhi sarana dan prasarana Desa	4	Belum tersedianya data yang valid sarana prasarana yang dimiliki Desa
Belum Optimalnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	1	Belum optimalnya peran Kecamatan dan BKAD terhadap kerjasama desa	1	Belum optimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap BKAD
	2	Belum Optimalnya Peran Pihak Ketiga melaksanakan kerjasama antar desa	2	Belum optimalnya Data kerjasama desa dengan pihak ketiga.
	3	Belum terfasilitasinya pembangunan di dalam kawasan perdesaan.	3	Belum terpetakannya Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan
			4	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi dan Akuntabel	1	Masih terdapat Desa yang belum tertib Administrasi	1	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD
			2	Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman
			3	Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
			4	Belum tertibnya Kepala Desa menyampaikan Laporan Kepala Desa
			5	Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
	2	Belum Optimalnya Pengembangan BUMDesa dan meningkatkan PADes	6	Belum optimalnya Pembinaan dan Pendampingan terhadap BUMDesa
	3	Belum optimalnya pendampingan pelaksanaan program prioritas Nasional dan Daerah	7	Belum optimalnya terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
	4	Masih Terdapat Batas Desa yang belum selesai	8	Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas
Belum optimalnya peran Lembaga	1	Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga	1	Masih banyak Masyarakat Adat yang belum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat dalam pembangunan Desa		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		teridentifikasi
			2	Belum maksimalnya pendataan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan
			3	Belum tersedianya data LKD dan LAD yang valid
			4	Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
			5	Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
			6	Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
			7	Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
			8	Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
			9	Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DPMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi;
2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia DPMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;
3) Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perubahan kebijakan perencanaan Daerah;

4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efesien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.

3. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030,Visi Kutai Kartanegara adalah:

"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Penjabaran MISI Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sector pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakteri dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara, DPMD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dimana DPMD memiliki peranan terhadap tercapainya misi Kabupaten

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kutai Kartanegara yang tertuang RPJMD tahun 2025-2029. Keterkaitan peran DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak sebagaimana visi dan misi yang menjadi arah kebijakan DPMD terletak pada:

a. Misi 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
b. Misi 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
c. Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Disamping beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Visi dan Misi Bupati. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut:

a) Pentingnya peran DPMD yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa; DPMD selaku *leading sector* pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
c) DPMD memiliki peranan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu dengan tema : “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan “.

5. FORMULASI ISU-ISU PENTING :

- Pentingnya peran DPMD yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DPMD dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung DPMD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa;

- Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- DPMD selaku *leading sector* pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yangmengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa;
- Pentingnya peningkatan sumber daya manusia pada DPMD. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMD saat ini mengalami regenerasi. peralihan aparatur sipil negara yang disebabkan oleh habis masa kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi DPMD sebagai *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil terhadap rancangan awal rkpd dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Tenggarong*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*	*72 Nilai*	*16.929.730.193*	*PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Tenggarong*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*	*72 Nilai*	*18.368.474.493*	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	725.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	725.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggaron	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggaron	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko, Evaluasi Kinerja setiap Triwulan dan Penyusunan Laporan LKjIP

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	Pemenuhan Data sektoral 20 Kecamatan
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.240.280.193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.240.280.193	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/Bulan	13.990.280.193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/Bulan	13.990.280.193	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	12 Laporan	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	100.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	100.000.000	
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	
12	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas,Pakaian Adat Erau, Pakaian Miskat
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas ASN 170 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	781.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.618.194.300	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	820.694.300	Penyediaan ATK, Makan Minum rapat , Natura, Alat listrik, Cendra mata dan alat kantor lainnya
18	Penyediaan Barang Cetakan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Baner/ Spanduk, Jilid,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	dan Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan			Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan			Potocopy dan Cetak Map
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ,Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota Kebutuhan dalam rangka koordinasi dan konsultasi SKPD
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	Perjalanan Dinas Biasa dan Sapras Kearsipan
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	157.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	157.500.000	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan,Jasa Publikasi Surat Kabar Media Online Spesifikasi : Iklan Media Online Kategori Berita Online Lokal
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	82,25 Persen	232.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	82,25 Persen	235.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	82.950.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	85.000.000	Motor Vario 160 2 Unit
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	338 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	338 Unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	700.000.000	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	300.000.000	Pembayaran Listrik, Air, dan Internet Rumah Dinas Jabatan serta Internet, Jasa Sampah OPD
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan pada kegiatan pameran Merah Putih Sanga-sanga , acara HUT RI, Kegiatan Erau dan Acara Keagamaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	300.000.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	100.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	154 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	154 Unit	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggaron	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	PENATAAN DESA	kab kutai kartanega ra	Persentase Peningkatan Penataan Desa	19,42 Persen	400.000.000	PENATAAN DESA	kab kutai kartanega ra	Persentase Peningkatan Penataan Desa	19,42 Persen	4.650.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	kab kutai kartanega ra	Jumlah Penyelenggara an Penataan Desa	33 Desa	400.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	kab kutai kartanega ra	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	33 Desa	1.850.000.000	
31	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipil,Kedang Murung, Tunjungan, Tanjung Harapan, Saliki ,Purwajaya ,Kel. Loa Ipuh Darat	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabung-an dan Perubahan Status Desa	7 Desa	100.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipil,Kedang Murung, Tunjungan, Tanjung Harapan, Saliki ,Purwajaya ,Kel. Loa Ipuh Darat	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	7 Desa	250.000.000	Pendampingan Rencana Pemekaran Desa dan Desa Persiapan
32	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	193 Desa	50.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	193 Desa	300.000.000	Pendampingan Penyusunan Pola Ruang Desa
33	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan-nya	200 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	200 Desa	200.000.000	Penataan Kewenangan Lokal Desa
34	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	8 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1. Desa. Muara Badak Ilir, 2. Desa Sungai Payang, 3. Desa Jembayan,	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	8 Desa	150.000.000	Penamaan Kode Desa Definitif

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
							4. Desa,Loa Duri Ulu, 5. Desa Sepatin, 6. Desa Bangun Rejo. 7. Desa Kembang Janggut dan 8 Kel. Makurawang				
35	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2200 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Sidomulyo, Muai, Semayang, Kota Bangun III, Kedang Murung, Loa Duri Ulu, Jembayan Tengah, Santan Ulu, Kel. Dondang, Tanjung Limau, Cipari Makmur, Perian, Sebemban, Selerong, Muara Ritan, Suka Maju, Kel.Sanipah, Tani Bhakti, Kel. Pendingin, Kel.Maluhu	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	3.750.000.000	Pembangunan Gerbang Batas Desa di 20 Desa. ID SIPD: 2223517.ID SIPD: 2250988 ID SIPD: 2300299 ID SIPD: 2266774 ID SIPD: 2176311 ID SIPD:2256013 ID SIPD: 2320851 ID SIPD: 1961310 ID SIPD: 2250383 ID SIPD: 2246336 ID SIPD: 2288025 ID SIPD: 2007989 ID SIPD: 2208981 ID SIPD: 2069975 ID SIPD: 2327419, ID SIPD : 2291368, ID SIPD : 2241313, ID SIPD : 2225859, ID SIPD : 2090749, ID SIPD: 2378285
	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kec.Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Persentase Peningkatan Frekuensi Kerja sama antar Desa	18,51 Persen	450.000.000	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kec.Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Persentase Peningkatan Frekuensi Kerja sama antar Desa	18,51 Persen	800.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kec.Tenggarong Seberang, Se bulu, Muara Kaman, Mara ngkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa	16 Desa	450.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kec.Tenggarong Seberang, Se bulu, Muara Kaman, Mara ngkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa	16 Desa	800.000.000	
36	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam hal kerjasama antar desa serta perlunya pembinaan di dalam kerjasama antar desa
37	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	250.000.000	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga
38	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Badak, Muara Muntai, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	1. Pendampingan dalam Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan di 5 Kawasan yang sudah terbentuk 2. Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Ekowisata Separi Sejahtera

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	kab kutai kartanega ra	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	95 Persen	4.627.386.468	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	kab kutai kartanegara	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	95 Persen	24.276.693.870	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kab kutai kartanega ra	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa	201 Desa	4.627.386.468	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kab kutai kartanegara	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	201 Desa	24.276.693.870	
39	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200.000.000	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa
40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dan Konvergensi stunting
41	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	250.000.000	Pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
42	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	44 Dokumen	2.837.386.468	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	44 Dokumen	7.885.720.910	Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kades, Perangkat Desa dan BPD
43	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Samarinda	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang	150.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Samarinda	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang	200.000.000	Konvergensi stunting
44	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarog	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	150.000.000	Mengevaluasi Peraturan Desa terkait SOTK Desa sebanyak 25 Desa
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	800.000.000	Pengembangan Kawasan Perdesaan
46	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemerintahan Desa untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya sebanyak 25

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
											Desa
47	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	250.000.000	Pendampingan Penginputan Data Profil Desa pada Aplikasi EPDESKEL sebanyak 200 Desa
48	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	12.258.472.960	Fasilitasi Pendamping Desa dan Lokal Desa untuk mengawal program Nasional,Provinsi maupun Kabupaten
49	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	250.000.000	Pelatihan Operator untuk penggunaan Aplikasi SIPADES
50	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Samarinda	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	120.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Samarinda	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	300.000.000	Pelatihan peningkatan kapasitas Anggota BPD
51	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	500.000.000	Pembinaan terhadap Pemerintah Desa terkait Batas Desa yang rawan konflik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
52	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	382.500.000	Pelatihan terhadap Kepala Desa untuk pemahaman penyusunan Laporan Kepala Desa
53	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	250.000.000	Pelatihan Kepala Desa terkait Pemahaman Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
54	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	400.000.000	Konvergensi stunting
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	kab kutai kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdaya-an dan Pendayaguna-an Lembaga Kemasyarakat-an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyeleng-garaan Pembangunan Desa/Kelurah-an	95 Persen	1.205.000.000	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	kab kutai kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	95 Persen	103.502.845.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	kab kutai kartanegara	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaa n Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	246 Lembaga	1.205.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	kab kutai kartanegara	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	246 Lembaga	103.502.845.000	
55	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	100.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	350.000.000	Untuk melakukan monev hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
56	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.000.000.000	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD/K dan LAD/K (Posyandu/RT/PKK /Kara ng Taruna/LPM dan Lembaga Adat di 15 Desa) dan Pembinaan Posyandu terhadap Tim Pembina Posyandu yang baru terbentuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4918 Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4954 Lembaga	11.254.930.000	1. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan RT = 3.194 x 3 penggurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) x 12 bulan 2. Peningkatan Kapasitas bagi: a. 816 Kader Posyandu b. 237 Wakil Ketua Karang Taruna Desa/Keluraha n c. 237 Wakil Ketua LPM Desa/Kelurahan d. 237 Sekretaris TP PKK Desa/Kelurahan e. 193 Ketua Lembaga Adat Desa f. 20 Lembaga Posyandu dan 20 RT berpartisipasi dalam Lomba Posyandu dan RT
58	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	260 Unit	120.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2776 Unit	84.574.468.000	1. Pembangunan 88 unit Sekretariat/Gedung Posyandu (20 Zona Tengah, 37 Zona Pesisir, 31 Zona Hulu) (IDSIPD:2281224,22056 20,2247471,196397 4,22 81155,2287540,235 4745 ,2354604,2354717,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	dan Masyarakat Hukum Adat										2365 642,2373547,23735 49,2 373550,2321790,22 6746 3,2338236,2338259 ,233 8272,2338291,2320 223, 2320245,2320261,2 3382 98,2327023,222376 9,23 26517,2297753,222 6374 ,2008357,2311909, 2345 777,245829,226439 7,22 60905,2266068,227 4673 ,2183978,2239160, 2284 000,2276613,23205 42,2 330295,2244023,22 4409 0,2246396,2347309 ,234 7280,2307355,2362 860, 2127977,2020422,2 1321 82,2377359,239002 3,22 08959,2216850,196 6302 ,2041803,2320446, 2363 886,2363824,23638 24,2 363859,2234366,22 3439 4,2234429,234515, 2240 684,2240779,22406 68,2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
											363844,2092467,222359 3,2092473,2184022 ,231 9441,2314484,2218 838, 2252132,2189549,2 3442 24,2355789,225628 3,23 00472,2372421,219 7081 ,2309424,2301294 2. Fasilitasi Sarana Prasarana Sekretariat/Gedung Posyandu = 968 Unit (88 Lemari, 440 Meja dan 440 Kursi) 3. Pemasangan 88 Kwh Listrik 4. Fasilitasi kelengkapan sarana prasarana posyandu (816 Laptop dan 816 Printer)
59	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	700.000.000	1. Pelatihan Pengembangan Usaha Kewirausahan Ekonomi Pedesaan (75 Orang) di Desa Bukit Layang 2. Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di 2 Desa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
60	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	1.552.747.000	1. Pelaksanaan event TTG Kabupaten 2. Mengikuti event TTG Provinsi dan Nasional 3. Peningkatan kapasitas Inovator (58 Ketua Posyantek) 4. Pembinaan Posyantek (58 anggota Posyantek dan 20 Kecamatan)
61	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	300.000.000	1. Pencanangan BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pelaksanaan Lomba BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mengikuti Pencanangan dan Lomba BBGRM Tk. Provinsi Kalimantan Timur
62	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
63	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	245.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	3.300.000.000	1. Pelaksanaan event HKG PKK Kabupaten 2. Mengikuti event HKG PKK Provinsi dan Nasional 3. Mengikuti Jambore PKK Nasional 4. Pelaksanaan Rakor PKK Kabupaten 5. Mengikuti Rakor PKK Provinsi dan Nasional 6. Fasilitasi operasional Sekretariat TP. PKK Kabupaten
64	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,d an Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga, dan Kelompok Masyarakat	4 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,da n Kelompok Masyarakat	4 Keluarga	270.700.000	1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan 2. Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
	TOTAL				23.612.116.661					151.598.013.363	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan *leading sector* yang mengkoordinir aspirasi tersebut.

2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaimana tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten serta Renstra PD terkait.

2.5.3 Diantara usulan yang telah diklasifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembidangan urusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo , Anggana Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
2	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	RT 03 Muai-Long beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
3	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Loa Sakoh RT 01 s/d RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)
4	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Semayang, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
5	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Lamin Pulut RT.01, RT.02 & RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
6	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Dokumen pendukung (proposal,foto,koordinat) segera dilengkapi)
7	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	JL. RANCANG RIMBA AYU RT.010, Kedang Murung Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat segera dilengkapi
8	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada
9	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa sari Nadi - Lebahulaq, Desa Sari Nadi - Suka Bumi, Desa Sari Nadi - Benua Baru , dan Desa Sari Nadi - Poros Jalan , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPM Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

10	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Kota Bangun I, Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPM Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada
11	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Ronggo Lawe RT. 001, Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
12	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Gang Barokah RT. 001,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
13	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Sunan Kalijaga RT. 002,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Foto dan koordinat segera dilengkapi
14	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Dusun Bangun Sari Jalan Simpang 3 Samping Puskesmas Rimba Ayu, Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
15	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Pendidikan RT. 004,Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
16	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Loa Duri RT.06 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)
17	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Purwajaya RT. 21 Dusun sari mulya B, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
18	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Ali Husen RT 010 Tudungan,Jemba yan Tengah Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
19	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Habib Tunggang Parangan, Jembayan Tengah Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
20	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Mulyo Pranoto Rt 08, Loh Sumber Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
21	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan R.Ismanun RT.02, Sumber Sari Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

22	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Santan ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
23	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
24	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Kampung Sidodadi RT. 11,Tanjung Limau Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
25	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Badak Mekar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi proposal,foto dan koordinat
26	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Samarinda - Muara Kaman, RT. 001 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal,foto dan koordinat
27	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	SEDULANG, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal,foto dan koordinat
28	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jl Awang Long,Panca Jaya Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal,foto dan koordinat
29	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Lebaho Ulaq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Lengkapi usulan dengan Proposal,foto dan koordinat
30	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jl.Dr,Soetomo RT 001 Blok C, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
31	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Perbatasan Selerong - Senoni, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
32	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	JALAN MANUNGGAL RT 003 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
33	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jl. Poros Selerong - Benua Puhun, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
34	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jl. Abd. Riso RT 15, Sebulu Ulu Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
35	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	JALAN MANUNGGAL RT 003 DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
36	PENATAAN	Jl. P. Antasari RT 007 ,	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah	6 Unit	Prioritas DPMD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Manunggal Daya, Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Penyelenggaraan Penataan Desa		
37	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	DESA MUARA RITAN, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal,foto dan koordinat segera dilengkapi
38	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Muara pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD Proposal / Dok. Pendukung,foto dan koordinat segera dilengkapi
39	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Jalan Bukit Indah RT.012 Dusun Sido Dadi,Suka Maju Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
40	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Desa Bangun Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
41	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	Batas Desa RT 20, Dusun Sidomakmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
42	PENATAAN DESA/Penyeleng garaan Penataan Desa	RT 015 Desa Bukit Raya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Penataan Desa/Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Unit	Prioritas DPMD
43	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Paimin RT 11,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
44	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
45	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PULAU PINANG RT 007, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
46	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan,	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
47	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
48	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Teluk Muda RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
49	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan olahraga 1 RT 010 Desa Tuana Tuha, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
50	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Panglima Suta Kanan RT. 010, Liang Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
51	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Pangliam Suta Kanan RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

52	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Panglima Suta Kanan RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
53	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Stadion RT. 020 Desa Kota Bangun Ulu Dusun Melati, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
54	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa sumber sari RT 007 dan 012, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
55	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Bukit Makmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
56	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Giri Mulya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
57	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Dusun Jambu Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
58	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Bukit Makmur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
59	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Kebon Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
60	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 3, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
61	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 5 Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
62	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Posyandu Bahagia 6, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
63	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang	Dusun Ujung Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
64	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
65	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 19 Dusun V Desa Bakungan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
66	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Duri Ulu RT.16 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
67	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 5, Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
68	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gang Swarga 03 RT.006 Desa Jembayan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

69	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Habib Tunggang parangan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
70	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rt 016 dusun pelita, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
71	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Gunung Petung RT 003, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
72	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 17 Dusun 2 Desa Sebuntal , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
73	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	rt.004, Santan Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
74	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
75	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.001, Tanah Datar Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
76	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Erna, RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
77	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Badak Mekar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
78	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 23 , Gas Alam Badak I Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
79	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 003, Salo Palai Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
80	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang	RT.025, Badak Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
81	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Kapitan Toko Lima, RT. 09, Muara Badak Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
82	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.025, Badak Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
83	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.011 Jl. Martadinata Handil 8, Muara Jawa Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
84	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.020 Jl. Pelita Handil 8, Muara Jawa Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
85	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

86	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
87	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan M. Hatta RT. 028 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
88	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Muara Jawa Ilir , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
89	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Mekar Baru dan Dusun Mekar Sari, Kupang Baru Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
90	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	SABINTULUNG, RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
91	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Jl. Belimbing blok B RT. 002, Bunga Jadi Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
92	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
93	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. K.H Agus Salim RT.005, Rebaq Rinding Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
94	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jln. Pangeran Hidayatullah rt.02, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
95	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.010 , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
96	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Muara Leka Dusun Leka 1 RT.08 Kec.Muara Muntai Kab.Kutaikartaneg ara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
97	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang	lebak cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
98	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Kuyung RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
99	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Dahlia Kelurahan Handil Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
100	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	bukit samboja indah RT 07, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
101	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
102	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl Poros rt 1 , Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

103	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlan mErdeka RT 05, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
104	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Soekarno- Hatta KM 41 RT 19, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
105	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 19, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
106	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 02, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
107	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta KM 42, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
108	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Jalan Sungai Merdeka , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
109	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlan Sungai Merdeka RT 02, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
110	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno Hatta km 38 RT 09, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
111	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Gg Langgar RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
112	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
113	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta Km 38 Rt 17, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
114	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang	Jalan Soekarno Hatta KM 36 RT 06, Kab. Kutai	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kartanegara	Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
115	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT 3, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
116	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno - Hatta RT 10 , Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
117	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Bppn-Handil II Margo Mulyo RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
118	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Mawar, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
119	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.09, Sari Jaya Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

120	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu se Kelurahan Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
121	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 08, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
122	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Mawar, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
123	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Kenanga, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
124	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Beringin, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
125	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Posyandu Dahlia, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
126	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK Pendingin, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
127	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Melati, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
128	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT.01, Sari Jaya Kab. Kutai	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
129	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sangasanga muara, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
130	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
131	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang	PKK Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
132	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu Kenanga, Pendingin Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
133	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Giri Agung Jl Samarinda - muara kaman.KM.52 RT.16, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
134	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Harapan Jaya RT 016, Sanggulan Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
135	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Ulin, RT 11 Sebulu Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
136	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl.Syahran R Rt.005, Segihan Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

137	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sebulu Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
138	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	JALAN GUNUNG DADEH RT 010, Sebulu Ilir Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
139	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
140	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
141	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
142	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Perum Griya Tambak Rel RT. 017 Kelurahan Baru Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
143	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bukit Harapan KM.19 RT.004, Loa Ipuh Darat Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
144	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RT. 21 Bukit Biru, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
145	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PEMBANGUNAN POSYANDU MAWAR 8 RT.38 KELURAHAN MELAYU (RT.38 KELURAHAN MELAYU), Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
146	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rawa Indah RT.004 Desa Loa Ulung, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2
147	PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberday aan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Sadewa RT.006 Dusun Sido Rejo, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan/Jumla h Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Prioritas Catatan : 1. Melampirkan SK Penetapan Lembaga Posyandu 2. Pastikan Lahan memiliki Surat kepemilikan Aset / Surat Hibah dengan ukuran lahan minimal 10 x 10 M2

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RPJMN 2025-2029 adalah tahapan ketiga dari RPJPN 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tadi, RPJMN 2025-2029, disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden terpilih, dengan menggunakan rancangan teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 adalah menjadi landasan menentukan arah pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Untuk menuju arah RPJMN 2025-2045 mewujudkan Indonesia Emas 2045, arah pembangunan ini mewujudkan melalui tiga sasaran: penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, pembangunan 5 (lima) tahun ke depan harus melakukan beberapa transformasi yang dilakukan melalui RPJMN diantaranya transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, transformasi pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dan transformasi kesinambungan pembangunan. Agenda satu tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah 2025-2029 juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2025-2029 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana pada periode 2025-2029 pembangunan Daerah difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, yaitu upaya untuk mewujudkan stabilitas di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Agar dapat mencapai Visi "KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: pusat pangan, pariwisata, industri hijau, sejahtera, dan berkelanjutan" diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu fasilitas pelayanan, infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam periode ini pula, berbagai terobosan-terobosan inovatif mulai diimplementasikan seperti: diversifikasi ekonomi nonekstraktif; implementasi *smart government*; sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana pembangunan nasional. Dengan memberikan fondasi yang kuat, tangguh, dan kokoh, serta keselarasan dengan arah pembangunan pada level regional maupun nasional, diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara siap untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, untuk kemudian melanjutkan pembangunan pada periode berikutnya.

a. Kukar Maju:

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan potensi perekonomian tertinggi di Indonesia. Hal ini harus mampu di optimalkan untuk kepentingan masyarakat Kutai Kartananegara. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemajuan Kutai Kartanegara dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan, maka makna Kukar Maju diadopsi sebagai representasi dari masyarakat Kutai Kartanegara yang memiliki pendapatan tinggi setara dengan negara maju, Sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tingkat nasional, karena ditopang oleh bonus demografi sampai 2045, ditambah potensi migrasi tenaga terampil akibat dampak dari keberadaan IKN.

b. Kukar Tangguh:

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta penopang perekonomian nasional yang dapat

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

diandalkan. Kukar Tangguh merupakan representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian stabil dan kuat karena adanya pergeseran struktur ekonomi menuju perekonomian yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam ekstratif, melainkan perekonomian non ekstraktif, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh juga memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

c. Kukar Berbudaya:

Merupakan representasi dari identitas Daerah yang berdiri di atas sejarah panjang peradaban 2 (dua) kerajaan hingga menjadi seperti hari ini dengan tetap berdampingan dengan alam dan sangat menjunjung tinggi keberagaman. Komitmen Kukar Berbudaya terletak pada pelestarian, pengembangan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan manusia yang berakhlak mulia. Upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya, mempromosikan keanekaragaman budaya, dan konservasi kekayaan biologis. Pembangunan berbudaya harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dengan menghormati dan memperkaya identitas budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sembari menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa melupakan jati diri Daerah, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaju mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2045.

d. Kukar sebagai Pusat Pangan:

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi, distribusi, dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan dan inovatif. Langkah strategis yang diambil mencakup pengembangan pertanian terintegrasi hulu-hilir, modernisasi pertanian melalui skema *smart farming* dan *smart fishing*, intensifikasi pertanian, pengembangan infrastruktur logistik, dan promosi industri pengolahan pangan yang ramah lingkungan. Selain itu, visi ini juga mencakup aspek kedaulatan pangan dan pengembangan agrowisata (*agrotourism*) untuk meningkatkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kesejahteraan masyarakat dan mendukung pariwisata perdesaan yang khas.

e. Kukar sebagai Pusat Pariwisata:

Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan beragam untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencakup pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mempromosikan kekayaan dan keunikan Kutai Kartanegara, serta penguatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan sektor. Selain atraksi dan infrastruktur, perlu diperhatikan terkait pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi yang juga menjadi faktor esensial terhadap kualitas pariwisata yang ditawarkan, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan sektor jasa. Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari skema pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata ekologis yang berbasis konservasi keanekaragaman hayati hujan hutan tropis dan didukung oleh kekayaan sosial-budaya masyarakat Kalimantan.

f. Kukar sebagai Pusat Industri Hijau:

Posisi geografis yang strategis, serta kepemilikan cadangan sumber daya alam yang tinggi, maka harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka diperlukan hilirisasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui skema industrialisasi. Akan tetapi industrialisasi tersebut juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendorong perkembangan industri yang ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya ekonomis maju tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

g. Kukar yang Sejahtera:

Prinsip pada visi ini merupakan perwujudan mandat konstitusi yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, pada visi ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mewujudkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh elemen, dengan meminimalisir kemiskinan, khususnya dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem. Disamping itu, pendapatan masyarakat wilayah ini pada 2045 harus setara dengan wilayah-wilayah pada negara maju. Disamping itu, seluruh hak dasar warga negara dapat terpenuhi baik secara pendidikan, kesehatan, maupun hak untuk hidup layak dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

h. Kukar yang Berkelanjutan:

Maksud dari visi berkelanjutan adalah segala arah pembangunan yang memanfaatkan sumber daya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat pula dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya. Hal ini sangat terkait dengan pengelolaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan kapasitas lingkungan hidup wilayah Kutai Kartanegara dalam mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, visi ini menjadi penyeimbang bagi berbagai aktivitas sosial ekonomi dengan aktivitas konservasi lingkungan.

Dalam Rangka Menjamin Keberhasilan Visi maka disusun 8 Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.

Misi ini dilakukan untuk mengimplementasikan transformasi sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan dengan menyasar kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitas dan nilai penghidupannya. Pemenuhan hak warga negara untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan berkualitas, dan mendapatkan perlindungan sosial yang layak dapat terselesaikan dalam misi ini, sehingga setiap penduduk Kutai Kartanegara dapat berkembang dan berdaya saing secara global.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non- ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Misi ini merupakan implementasi dari transformasi ekonomi yang akan dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang dilakukan adalah menggeser struktur ekonomi dari dominasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sektor ekstraktif atau eksploitatif sumber daya alam, menjadi sektor ekonomi non ekstraktif yang bersih dan dapat menyentuh banyak elemen masyarakat. Akan tetapi, pergeseran ini juga harus diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

   Misi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang bermakna sebuah perbaikan sistem tata Kelola pemerintahan yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan. Digitalisasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini yang dimaknai sebagai kata cerdas dalam misi ini. Reformasi birokrasi yang sederhana dan terintegrasi harus segera dilakukan, serta kemampuan birokrasi yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan di masa depan.

4. Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh.

   Misi ini merupakan landasan atau pondasi dari kondisi yang harus diwujudkan untuk dapat melaksanakan transformasi. Berbagai transformasi tidak dapat dilakukan tanpa stabilitas politik dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara harus dilibatkan dalam menjaga stabilitas tersebut. Disamping itu, kekuatan persaudaraan budaya yang dilandasi oleh Pancasila dapat menjadi kekuatan masyarakat Kutai Kartanegara dalam mewujudkan misi ini.

5. Mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal.

   Misi ini juga merupakan landasan kedua yang harus dilakukan untuk seluruh upaya transformatif. Selain kestabilan ekonomi-politik Kutai Kartanegara, juga perlu dipastikan bahwa untuk mewujudkan upaya transformatif harus dilakukan dengan dasar mewujudkan ketahanan sosial-budaya dan ekologi. Segala hak warga negara dari masyarakat Kutai Kartanegara harus terpenuhi terlebih dahulu, serta kondisi ekologis harus stabil dan tidak memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan, sehingga dapat mengganggu upaya transformatif sebagaimana yang dimaksud di atas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.

   Misi ini dilakukan sebagai upaya dalam menyusun kerangka implementasi dari agenda transformatif pada misi sebelumnya. Sama halnya seperti manusia dalam kehidupan sosial, karakter wilayah juga memiliki karakteryang sama. Wilayah tidak bisa hidup sendiri, sebuah wilayah akan saling berinteraksi untuk memenuhi segala kehidupan, sebagaimana memenuhi asas komplementaritas. Oleh karena itu, misi ini dilakukan untuk segala aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter regional, dan setiap wilayah harus diperlakukan dengan tema-tema tertentu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Disamping itu, Kabupaten Kutai Kartanegara ini harus mampu juga memanfaatkan relasi antar wilayah baik pada skala di dalam Provinsi Kalimantan Timur, maupun secara nasional dan internasional.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau.

   Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan berbagai upaya transformasi. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara merata, khususnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat Kutai Kartanegara. Selaras dengan hal tersebut, penyediaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan mempertimbangkan agenda transformasi pada misi sebelumnya, serta tetap mempertimbangkan aspek inovasi hijau yang menekankan pada optimalisasi sumber daya yang ada, tanpa menyisakan sumber daya pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan.

8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.

   Misi terakhir ini merupakan prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yang harus diwujudkan dalam segala upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai elemen harus dapat bersinergi, bukan hanya peran pemerintah semata dalam mewujudkan agendapembangunan. Begitu juga pemerintah harus membuka peluang aktivitas elemen non-pemerintahan dapat berpartisipasi dalam berbagai hal. Serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sifat berkesinambungan harus dapat diimplementasikan dalam segala nilai pembangunan. RPJPN 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :

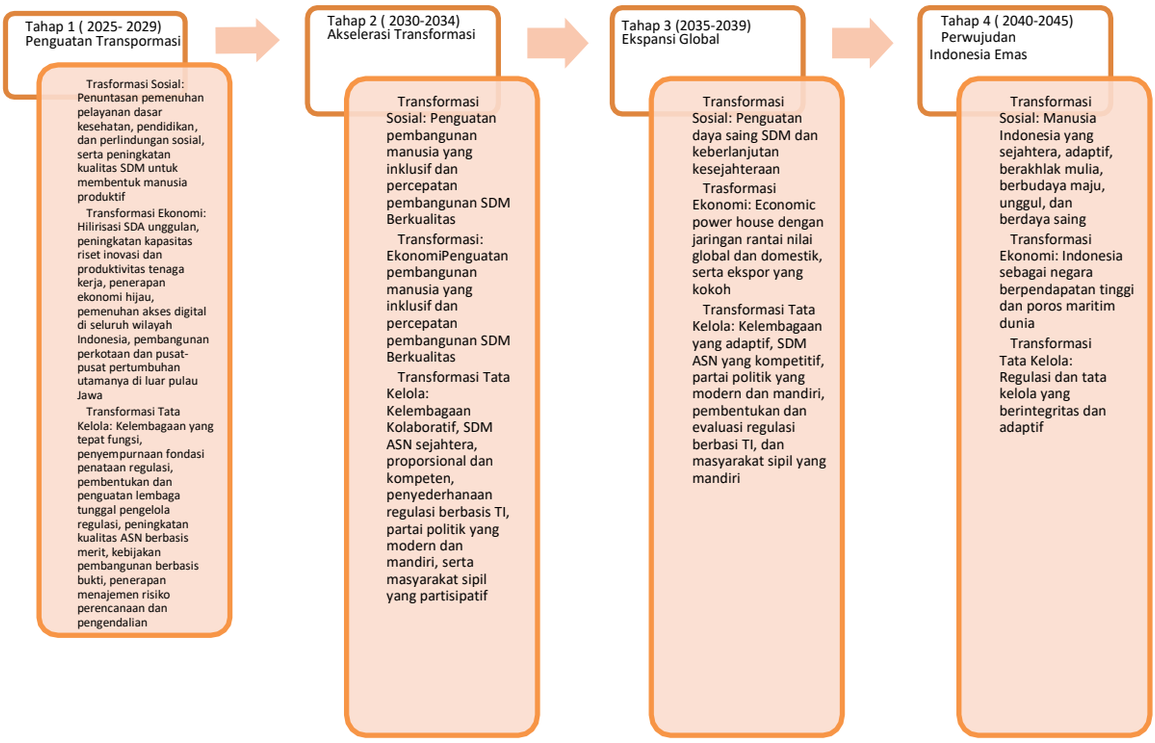

Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, Renstra-PD serta Renja-PD. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan 1 (satu) RPJMN dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

TABEL 3.1 HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif 2. Penuntasan stunting,eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis 3. Pemenuhan dan Pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun 6. Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah 7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		9. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 10. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 11. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas 12. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat 13. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi
2	Transformasi Ekonomi	1. Pembangunan dan Pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing 2. Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan 3. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan 4. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi 5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan 6. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman 8. Industrialisasi koperasi 9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai *industry domestic* dan global
		10. Peningkatan produktivitas BUMD 11. Penguatan Ekonomi dan keuangan Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi global 12. Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal, dan berwawasan lingkungan 13. Pembangunan ekosistem digital 14. Penguatan pembangunan Kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan 15. Pengembangan ekonomi maritime
3	Transformasi Tata Kelola	1. Optimalisasi regulasi daerah, termasuk proses pra- regulasi yang memadai 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 3. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat 4. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga 5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi 6. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas 2. Peningkatan stabilitas demokrasi di setiap level pemerintahan dan masyarakat 3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah 4. Penguatan pengendalian inflasi daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan Pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada Lembaga-lembaga adat 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya 4. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya 6. Pengembangan diverifikasi pangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		7. Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi
		8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang 9. Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal 10. Optimalisasi Potensi Energi Terbarukan 11. Penguatan upaya mempertahankan ekosisitem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi 12. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan 13. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana 14. Pengembangan *natural based solution* untuk kebakaran hutan 15. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana 16. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 17. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia 18. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi berbagai bidang pembangunan 19. Penguatan pengarustamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 20. Pembangunan bending/bendungan 21. Pembangunan irigasi baru 22. Pengendalian banjir 23. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 24. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
6	Implementasi ransformasi	1. Peningkatan kualitas penataan ruang 2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria 3. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 5. Pengembangan moda kereta api 6. Pengembangan angkutan sungai 7. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif 8. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan 9. Pemerataan terhadap akses hunian layak 10. Penanganan kawasan permukiman kumuh
		11. Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman 12. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 13. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten 14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan 17. Pengembangan pembiayaan inovatif 18. Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dan sasaran PD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kerjasama dan Kolaborasi dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Penataan Tata Kelola Desa	Pendampingan Desa Persiapan dan penamaan Kode Desa
				Penataan Wilayah Desa
				Penetapan dan pendampingan identifikasi potensi kewenangan Desa
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa
			Mendorong Desa untuk melakukan Kerjasama antar Desa maupun dengan Pihak Ke Tiga dan Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Memfasilitasi Kesepakatan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
				Penyusunan Dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
			Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Penyusunan Draft Perbub ADD, BHPRD, APBDesa, SILTAP, Barang dan Jasa, Keuangan Desa, SOTK, Pilkades, dan Desa Persiapan
				Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Pembekalan Tim Kecamatan Evaluasi APBDesa
				Pemberian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
				Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
				Pendampingan BUMDesa dalam mengelola Unit Usaha
				Pengembangan Klinik Konsultasi Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Analisis Data IDM/ID
				Peningkatan Kapasitas Pendekar
				Fasilitasi Penegasan Batas Desa
				Penyusunan Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
				Pendataan Tingkat Perkembangan Desa melalui Aplikasi EPDesKel dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
			Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengembangan Ekonomi Desa	Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengembangan Ekonomi Desa
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua RT, Kader Posyandu, PKK, LPM dan Karang Taruna serta Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
				Pelaksanaan Lomba RT Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
				Pembangunan Gedung Posyandu
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang berstandart
				Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin
				Pelatihan Kewirausahaan di Perdesaan , Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan
				Pendampingan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
				Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat baik Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
				Memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

TABEL 3.2

SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Status Desa Mandiri (%)
	Meningkatnya Kerjasama dan kolaborasi dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Program dan kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMD tahun anggaran 2026 dapat disampaikan dengan analisis kebutuhan dan pertimbangan kebijakan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/ kegiatan Tahun 2026 adalah pencapaian target kinerja PD yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama), IKK (Indikator Kinerja Kunci), indikator Program dan kegiatan serta hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum PD, yang tentunya mengarah kepada tema dan prioritas pembangunan tahun 2026 yaitu : " Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan " dengan Prioritas Pembangunan : pertama Pengembangan dan penguatan Kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang ke dua penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa berkualitas. Dimana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Adapun Program kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2026 terdiri dari 5 (lima) Program yaitu: Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, Program penataan desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan, Program kerjasama desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan, Program administrasi pemerintahan desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 16 (enam belas) subkegiatan serta Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan. dimana jumlah keseluruhan Program dan kegiatan pada DPMD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada tahun anggaran 2026 yaitu 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan.

c. Rumusan Program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Kerja tahun 2026 sesuai dengan yang termuat pada studi pendahuluan Renstra 2025-2029 DPMD baik itu terkait dengan rumusan indikator, target serta pagu indikatif sudah sesuai berdasarkan rumusan yang ada pada Renstra.

d. Adapun rumusan terkait rencana Program, kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		78 Nilai	18.753.414.441			80 Nilai	23.718.705.182
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	575.000.000			100 Persen	600.000.000
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026	2 Dokumen	150.000.000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko, Evaluasi Kinerja setiap Triwulan dan Penyusunan Laporan LKjIP	3 Laporan	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Data	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemenuhan Data sektoral 20 Kecamatan	1 Data	200.000.000
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	50.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel		12 Laporan	16.467.676.941			12 Laporan	15.496.769.182
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	2142 Orang/Bulan	16.217.676.941	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2142 Orang/Bulan	15.091.354.782
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum -		1 Laporan	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Dana Bagi Hasil			
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	305.414.400
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah		2 Laporan	50.000.000			2 Laporan	105.000.000
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	30.000.000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan		100 Persen	100.000.000			100 Persen	1.460.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	170 Paket	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengadaan Pakaian Dinas,Pakaian Adat Erau, Pakaian Miskat	170 Paket	510.000.000
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong	170 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kapasitas ASN 170 orang	170 Orang	950.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	660.000.000			100 Persen	2.116.306.000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	208.806.000
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan ATK, Makan Minum rapat , Natura, Alat listrik, Cendra mata dan alat kantor lainnya	1 Paket	1.000.000.000
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Baner/ Spanduk, Jilid, Potocopy dan Cetak Map	1 Paket	100.000.000
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong	4 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ,Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak	3 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Tenggarong	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer	Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota	12 Laporan	450.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Umum - Dana Bagi Hasil	Kebutuhan dalam rangka koordinasi dan konsultasi SKPD		
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	200 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perjalanan Dinas Biasa dan Sapras Kearsipan	500 Dokumen	150.000.000
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	4 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan,Jasa Publikasi Surat Kabar Media Online Spesifikasi : Iklan Media Online Kategori Berita Online Lokal	4 Dokumen	157.500.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		82,25 Persen	0			4,32 Persen	472.178.000
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	2 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Unit	217.375.000
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	338 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 Unit	254.803.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	400.000.000			100 Persen	1.005.782.000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembayaran Listrik, Air, dan Internet Rumah Dinas Jabatan serta Internet, Jasa Sampah OPD	12 Laporan	205.782.000
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Laporan	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	Dana	Penyediaan jasa peralatan	1 Laporan	800.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	dan perlengkapan pada kegiatan pameran Merah Putih Sanga-sanga , acara HUT RI, Kegiatan Erau dan Acara Keagamaan		
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		17 Persen	500.737.500			100 Persen	2.462.670.000
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong	33 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		33 Unit	366.790.000
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	3 Unit	275.737.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	270.760.000
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tenggarong	98 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		154 Unit	125.120.000
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	200.000.000
2	13	01	2.09	00011	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	1.500.000.000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa		19,42 Persen	2.550.000.000			15,16 Persen	56.450.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan	Jumlah		33 Desa	2.550.000.000			10 Desa	56.450.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa							
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kedang Ipil,Kedang Murung,Tunjungan ,Tanjung Harapan,Saliki,Purwajaya,Kel. Loa Ipuh Darat	7 Desa	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Rencana Pemekaran Desa dan Desa Persiapan	8 Desa	300.000.000
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Kutai Kartanegara	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Penyusunan Pola Ruang Desa	200 Desa	1.000.000.000
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Kutai Kartanegara	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penataan Kewenangan Lokal Desa	200 Desa	5.000.000.000
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1. Desa. Muara Badak Ilir, 2. Desa Sungai Payang, 3. Desa Jembayan, 4.Desa,Loa Duri Ulu, 5. Desa Sepatin, 6. Desa Bangun Rejo. 7.Desa Kembang Janggut dan 8 Kel. Mangkurawang	8 Desa	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penamaan Kode Desa Definitif	8 Desa	150.000.000
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Desa Sidomulyo,Muai,Semayang,Kota Bangun III,Kedang Murung,Loa Duri Ulu,Jembayan Tengah, Santan Ulu,Kel. Dondang,Tanjung Limau, Cipari Makmur,Perian, Sebemban,Seleron g,Muara Ritan,Suka Maju,Kel. Sanipah,Tani Bhakti,Kel. Pendingin,Kel. Maluhu	20 Unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembangunan Gerbang Batas Desa di 20 Desa. ID SIPD: 2223517.ID SIPD: 2250988 ID SIPD: 2300299 ID SIPD: 2266774 ID SIPD: 2176311 ID SIPD:2256013 ID SIPD: 2320851 ID SIPD: 1961310 ID SIPD: 2250383 ID SIPD: 2246336 ID SIPD: 2288025 ID SIPD: 2007989 ID SIPD: 2208981 ID	200 Unit	50.000.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											SIPD: 2069975 ID SIPD: 2327419, ID SIPD : 2291368,ID SIPD : 2241313, ID SIPD : 2225859,ID SIPD :		
											2090749, ID SIPD: 2378285		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		24,26 Persen	435.000.000			24,26 Persen	1.550.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerja sama antar Desa		33 Desa	435.000.000			33 Desa	1.550.000.000
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkayu,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	5 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam hal kerjasama antar desa serta perlunya pembinaan di dalam kerjasama antar desa	5 Dokumen	500.000.000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkayu,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	5 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan Pagu Indikatif dikarenakan masih banyaknya Desa yang akan di fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga	4 Dokumen	300.000.000
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Tenggarong Seberang,Sebulu, Muara Kaman,Marangkayu,Muara Badak,Muara Muntai,Kembang Janggut	3 Dokumen	210.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pendampingan dalam Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan di 5 Kawasan yang sudah terbentuk 2. Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Ekowisata Separi Sejahtera	5 Dokumen	750.000.000
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang		84 Persen	21.194.043.870		3.	88 Persen	26.154.193.870

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Ditingkatkan Kapasitasnya							
						Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		82,4 Persen			4.	86,8 Persen	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		193 Desa	21.194.043.870			200 Desa	26.154.193.870
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	7 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dan Konvergensi stunting	7 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18 Kecamatan	15 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tenggarong, Samarinda dan 16 Kecamatan	24 Dokumen	7.285.720.910	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kades, Perangkat Desa dan BPD	44 Dokumen	7.885.720.910
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Samarinda	58 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Konvergensi stunting	58 Orang	200.000.000
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara			Dana Transfer Umum - Dana Bagi		40 Laporan	500.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Hasil			
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tenggarong	10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengevaluasi Peraturan Desa terkait SOTK Desa sebanyak 25 Desa	15 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	18 Kecamatan	23 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Dokumen	800.000.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tenggarong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Pemerintahan Desa untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya sebanyak 25 Desa	101 Laporan	2.000.000.000
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenggarong	25 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyelesaian Kasus penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 Laporan	130.000.000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Kecamatan	18 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pendampingan Penginputan Data Profil Desa pada Aplikasi EPDESKEL sebanyak 200 Desa	18 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Tenggarong	1 Dokumen	12.058.472.960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Fasilitasi Pendamping Desa dan Lokal Desa untuk mengawal program Nasional,Provinsi maupun Kabupaten	1 Dokumen	12.258.472.960
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18 Kecamatan	54 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan Operator untuk penggunaan Aplikasi SIPADES	54 Dokumen	230.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan	Jumlah Anggota BPD	Samarinda	60 Orang	100.000.000	Dana	Pelatihan peningkatan	60 Orang	350.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					Kapasitas Anggota BPD	yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	kapasitas Anggota BPD		
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	18 Kecamatan	15 Desa	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan terhadap Pemerintah Desa terkait Batas Desa yang rawan konflik	15 Desa	150.000.000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tenggarong, Kecamatan	37 Laporan	179.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan terhadap Kepala Desa untuk pemahaman penyusunan Laporan Kepala Desa	38 Laporan	200.000.000
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenang an Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong, Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelatihan Kepala Desa terkait Pemahaman Penugasan Urusan/Kewenang an Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	50 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Kecamatan	18 Dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Konvergensi stunting	18 Dokumen	400.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)		80 Persen	23.939.127.200			80 Persen	40.981.735.000
						Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan		15,73 Persen				15,85 Persen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Masyarakat Hukum Adat							
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		4695 Lembaga	23.939.127.200			4695 Lembaga	40.981.735.000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Untuk melakukan monev hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	300.000.000
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD/K dan LAD/K (Posyandu/RT/PKK/Karang Taruna/LPM dan Lembaga Adat di 15 Desa) dan Pembinaan Posyandu terhadap Tim Pembina Posyandu yang baru terbentuk	2 Dokumen	1.000.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	4010 Lembaga	2.274.167.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan RT = 3.194 x 3 penggurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) x 12 bulan 2. Peningkatan Kapasitas bagi: a. 816 Kader	4947 Lembaga	11.030.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Posyandu b. 237 Wakil Ketua Karang Taruna Desa/Kelurahan		
											c. 237 Wakil Ketua LPM Desa/Kelurahan d. 237 Sekretaris TP PKK Desa/Kelurahan e. 193 Ketua Lembaga Adat Desa f. 20 Lembaga Posyandu dan 20 RT berpartisipasi dalam Lomba Posyandu dan RT		
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Ds.Pulau Pinang,Kembang Janggut,Long Beleh Haloq,Teluk Muda,Tuana Tuha,Liang,Kota Bangun Ulu,Liang Ulu,Sumber Sari,Kota Bangun III,Kota Bangun II,Sari Nadi,Jantur,Rebaq Rinding,Pulau Harapan,Jantur Selatan,Muara Leka,Sebemban,M uara Pedohon,Bakunga n,Loa Duri Ulu,Loa Duri Ilir,Jembayan,Jem bayan Tengah,Margahay u,Rempanga,Kupa ng Baru,Bunga Jadi,Giri Agung,Sanggulan, Sebulu Ulu,Sebulu Ilir,Loa Ulung,Suka Maju,Kel. Baru,Loa Ipuh Darat,Bukit Biru,Melayu, Ds Sidomulyo,Sebunt al,Santan	1643 Unit	18.614.960.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pembangunan 88 unit Sekretariat/Gedun g Posyandu (20 Zona Tengah, 37 Zona Pesisir, 31 Zona Hulu) (IDSIPD:2281224, 2205620,2247471, 1963974,2281155, 2287540,2354745, 2354604,2354717, 2365642,2373547, 2373549,2373550, 2321790,2267463, 2338236,2338259, 2338272,2338291, 2320223,2320245, 2320261,2338298, 2327023,2223769, 2326517,2297753, 2226374,2008357, 2311909,2345777, 245829,2264397,2 260905,2266068,2 274673,2183978,2 239160,2284000,2 276613,2320542,2 330295,2244023,2	300 Unit	22.631.735.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

							Ilir,Kersik,Tanah Datar,Saliki,Badak Mekar,Gas Alam Badak I,Salo Palai,Badak Baru,Kel. Muara Jawa Ilir,Muara				244090,2246396,2 347309,2347280,2 307355,2362860,2 127977,2020422,2 132182,2377359,2 390023,2208959,2 216850,1966302,2 041803,2320446,2 363886,2363824,2 363824,2363859,2 234366,2234394,2 234429,234515,22		
							Jawa Pesisir, Handil Baru,Amborawang Darat,Amborawan g Laut,Sungai Merdeka,Pendingi n,Sari Jaya				40684,2240779,22 40668,2363844,20 92467,2223593,20 92473,2184022,23 19441,2314484,22 18838,2252132,21 89549,2344224,23 55789,2256283,23 00472,2372421,21 97081,2309424,23 01294 2. Fasilitasi Sarana Prasarana Sekretariat/Gedun g Posyandu = 968 Unit (88 Lemari, 440 Meja dan 440 Kursi) 3. Pemasangan 88 Kwh Listrik 4. Fasilitasi kelengkapan sarana prasarana posyandu (816 Laptop dan 816 Printer)		
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelatihan Pengembangan Usaha Kewirausahan Ekonomi Pedesaan (75 Orang) di Desa Bukit Layang 2. Pelatihan	3 Dokumen	550.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Pengembangan Usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di 2 Desa		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelaksanaan event TTG Kabupaten 2. Mengikuti event TTG Provinsi dan Nasional 3. Peningkatan kapasitas Inovator (58 Ketua Posyantek) 4. Pembinaan Posyantek (58 anggota Posyantek dan 20 Kecamatan)	2 Laporan	700.000.000
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pencanangan BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pelaksanaan Lomba BBGRM Tk. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mengikuti Pencanangan dan Lomba BBGRM Tk. Provinsi Kalimantan Timur	4 Laporan	300.000.000
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelaksanaan event HKG PKK Kabupaten 2. Mengikuti event HKG PKK Provinsi dan Nasional 3. Mengikuti Jambore PKK Nasional 4. Pelaksanaan Rakor	5 Dokumen	4.000.000.000

											PKK Kabupaten 5. Mengikuti Rakor PKK Provinsi dan Nasional 6. Fasilitasi operasional Sekretariat TP. PKK Kabupaten		
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga,Warga,dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga,d an Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	40 Keluarga	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan 2. Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	4 Keluarga	270.000.000
TOTAL PAGU									66.871.585.511				148.854.634.052

Berdasarkan Tabel T-C. 33. di atas, bahwa yang penunjang Program nasional dan provinsi yaitu: program penurunan stunting, program kemiskinan dan program pengembangan pembangunan kawasan perdesaan berada pada program administrasi pemerintahan desa, program peningkatan kerjasama desa dan program pemberdayaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat .

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja 2026 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

a. CATATAN PENTING

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka merencanakan pembangunan Daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan pada lingkungan DPMD dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara DPMD dengan PD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun melalui Rencana Kerja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga beberapa catatan penting yaitu:

1. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja PD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat *grass root*. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara waktu pelaksanaan Musrenbang Desa dengan Musrenbang kecamatan;
2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi simultan antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah tersusun; dan
3. Menciptakan *good and clean goverment* dengan melakukan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

langkah-langkah penciptaan legalitas pelaksanaan Program dan kegiatan yang dinaungi oleh payung atau produk hukum.

b. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur DPMD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dimana Rencana Kerja tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPMD, seluruh aparatur DPMD secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026; dan
4. Tata cara penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. RENCANATINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya, diantaranya adalah :

1. Menjaga konsistensi aparatur dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan rencana Program dan kegiatan PD maupun Program prioritas dan Program Dedikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja PD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada PD;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik

dengan PD yang lain dalam pelaksanaan Program kegiatan lintas PD guna menghindari friksi-friksi dan *miscommunication* dalam lingkungan PD serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis; dan

4. Melakukan *pressure* (tekanan) terhadap Pemerintah Desa khususnya dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan, BUMDes dan BUMDesma dalam upaya pengembangan ekonomi unggulan desa, dan kerja sama desa. Untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa sehingga hasilnya mampu mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja-PD memuat Program, kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan RKPD. Dalam rangka penyusunan Renja-PD, PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan akhir;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum PD/lintas PD; dan
e. penetapan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(DKPS) Kabupaten Kutai Kartanegara memuat rancangan Program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Rencana Kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka DPKS Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PD pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh DKPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja yang disusun menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Renstra DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu penyusunan RKPD tahun 2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi, dan kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;

t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;

u. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;

v. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Kerja DKPS Kutai Kartanegara tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DKPS Kutai Kartanegara tahun 2025.

Sedangakan tujuan disusunnya Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
4. *Review* Terhadap Rancangan Akhir RKPD
5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD.

Pelaksanaan Program/kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 dilaksanakan melalui Program/kegiatan yang ke dalam program/kegiatan non urusan dan program/kegiatan urusan wajib. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020). Secara umum rata-rata capaian kinerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 mencapai 83,86% (delapan puluh tiga koma delapan puluh enam persen) dan realisasi keuangan Rp17.785.325.873,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran Rp21.207.163.978,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

DKPS melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2024 yaitu nilai SAKIP PD dengan nilai target 84 (A) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 87,98% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen). Tidak tercapainya target kinerja karena kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
2. pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan tetapi belum memuat realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester);
3. hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat

eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*; dan

4. pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh DKPS adalah 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, target kinerja 4 (empat) laporan, dengan realisasi 4 (empat) laporan (100,00%) penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD ada 4 (empat) laporan yaitu: laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM), laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan/semesteran/tahunan.
b. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, target kinerja 2 (dua) laporan, dengan realisasi 2 (dua) laporan (100,00%);
c. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, target kinerja 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 1 (satu) dokumen (100,00%);
d. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, target kinerja 100 (seratus) ASN yang mengikuti bimbingan teknis, dengan realisasi kinerja 100 (seratus) ASN (100,00%) dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, target kinerja 15 (lima belas) ASN, dengan realisasi 15 (lima belas) ASN (100,00%);
e. kegiatan administrasi umum perangkat daerah, target kinerja 6 (enam) layanan, dengan realisasi 6 (enam) layanan (100,00%):
    - penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, target kinerja 3 (tiga) paket, dengan realisasi 3 (tiga) paket (100,00%);

- penyediaan bahan logistik kantor, target kinerja 1 (satu) paket, realisasi kinerja 1 (satu) paket (100,00%);
- penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target kinerja 3 (tiga) paket, dengan realisasi 3 (tiga) paket (100,00%);
- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target kinerja 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) dokumen, dengan realisasi 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) dokumen (100%);
- penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd, target kinerja 160 (seratus enam puluh) laporan, dengan realisasi kinerja 160 (seratus enam puluh) laporan (100%); dan
- penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dokumen, dengan realisasi 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dokumen (100%)

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi kinerja 120 unit (100,00%)

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100%)

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk tahun 2024 yaitu:

1. Persentase kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 99,28% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) atau capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen). target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan realisasinya 68,39% (enam puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen) atau capaian kinerja sebesar 69,08% (enam puluh sembilan koma

nol delapan persen). Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
b. Kurangnya regulasi yang mengatur pentingnya kepemilikan KIA terkhusus pada saat penerimaan siswa baru; dan
c. Perlunya meningkatkan inovasi-inovasi dalam peningkatan pencapaian target KIA.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program pencatatan sipil tahun 2024 yaitu :

1. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan persen) atau capaian kinerja sebesar 100,68% (seratus koma enam puluh delapan persen) dari target kinerja.
2. Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim dengan target sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan realisasinya 100% (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen). Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase pelayanan penerbitan akta kematian dengan target sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 100% (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 101% (seratus satu persen). target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2024, yaitu : persentase layanan informasi dan inovasi administrasi kependudukan dengan target sebesar 100% (seratus persen) dan realisasinya 1005 (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen). Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Indikator kinerja Program pengelolaan profil kependudukan tahun 2024 yaitu persentase penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan dengan target sebesar 100% (seratus persen) dan realisasinya 100% (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen). Target kinerja tercapai dan tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (RENJA-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target RENJA_PD Tahun 2024	Realisasi RENJA_PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Nilai**	**90**	**86**	**86**	**93,22**	**102,3**	**88**	**94,35**	**107,22%**
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**Persen**	**100**	**99,36**	**100**		**99,36**	**100**	**99,60**	**100%**
2.12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88(A)**	**93,35 (A)**	**84(A)**	**73,91(BB)**	**87,98**	**86(A)**	**74,58 (BB)**	**86,72%**
2.12 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24**	**4**	**4**	**4**	**100,00%**	**10**	**20**	**83,33%**
2.12 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**3**	**3**	**100,00%**
2.12 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	4	4	4	100,00%	3	20	83,33%
2.12 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**Laporan**	**10**	**2**	**2**	**2**	**100,00%**	**2**		**0,00%**

2.12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	474	100	100	100	100,00%	100	300	63,29%
2.12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	1	1	1	100,00%	1	4	400,00%
2.12	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**		**0,00%**
2.12	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.12	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Dokumen**	**20**	**4**	**4**	**4**	**100,00%**	**4**		**0,00%**
2.12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	200	100	100	100,00%	100	375	75,00%
2.12	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	15	15	15	0,00%	15	45	60,00%
2.12	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Layanan**	**30**	**6**	**6**	**6**	**100,00%**	**6**		**0,00%**
2.12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
2.12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2.12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100,00%	3	6	40,00%
2.12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	54000	2.125	10800	10800	100,00%	10800	12.925	23,94%
2.12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	186	160	160	100,00%	160	443	55,38%
2.12	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	375000	75.000	75.000	75.000	100,00%	75000	150.097	40,03%
2.12	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**556**	**95**	**95**	**95**	**100%**	**95**		0,00%
2.12	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25	6	6	6	100,00%	6	13	52,00%
2.12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	10	10	10	0,00%	10	30	66,67%
2.12	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	468	75	75	75	100,00%	75	250	53,42%
2.12	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	4	4	4	125,00%	4	16	88,89%
2.12	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Laporan**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**		**0,00%**
2.12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.12	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**45**	**9**	**9**	**9**	**100,00%**	**9**		**40,00%**
2.12	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	8	8	8	100,00%	8	16	40,00%
2.12	01	2	09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	0,00%	1	2	40,00%
2.06	**01**	**06**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**2. Persentase Kepemilikan KTP-el**	**Persen**	**99**	**99,14**	**99**	**99,14**	**100,14%**	**99**		**0,00%**
2.06	**01**	**06**				**3. Persentase Kepemilikan KIA**	**Persen**	**99**	**48,45**	**50**	**48,45**	**96,90%**	**90**		**0,00%**
2.12	**02**	**2**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan**	**Dokumen**	**1.002.008**	**98.365**	**200.002**	**200.002**	**100,00%**	**200.002**		**0,00%**
2.12	02	2	01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2004	1	1	1	100,00%	1	4	0,20%
2.12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	950.000	98.363	200.000	200.000	100,00%	200.000	498.363	52,46%
2.12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	50004	1	1	1	100,00%	1	4	0,01%
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**	**Persen**	**99**	**96,33**	**97**	**96,33**	**99,31%**	**99**		**0,00%**
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	**Persen**	**99**	**91,54**	**88**	**91,54**	**104,02%**	**95**		**0,00%**
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	**Persen**	**99**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**99**		**0,00%**
2.12	**03**	**2**	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan**	**Dokumen**	**10204**	**851**	**1101**	**1101**	**100,00%**	**1101**		**0,00%**
2.12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5200	850	1100	1100	100,00%	1100	2.350	45,19%
2.12	03	2	01	01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dokumen	5004	1	1	1	100,00%	1	4	0,08%
2.12	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan**	**Laporan**	**604**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**		**0,00%**
2.12	03	2	02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	604	1	1	1	100,00%	1	4	0,66%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**99,16**	**99,16%**	**100**		**0,00%**
2.12	04	2	01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan**	**Dokumen**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		**0,00%**
2.12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	55	11	11	11	100,00%	11	44	80,00%
2.12	04	2	02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**		**0,00%**
2.12	04	2	02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	8,89%
2.12	04	2	03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi**	**Laporan**	**204**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**		**0,00%**
2.12	04	2	03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	204	1	1	1	100,00%	1	4	1,96%
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**		**0,00%**
2.12	05	2	01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan**	**Dokumen**	**14**	**2**	**2**	**2**	**28,57%**	**2**		**17,78%**
2.12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	1	1	1	100,00%	1	4	44,44%
2.12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara

DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Renstra DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dan proyeksi untuk tahun 2025 dan 2026 kami sajikan dalam bentuk Tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Target Nasional
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	93,22 (Sangat Baik)	94,16 (Sangat Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	84 (A)	73,91 (BB)	88 (A)	88 (A)	
4			Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	99%	99%	98,52%	99%	99%	
5			Persentase Kepemilikan KIA	50%	70%	90%	99%	99%	90%	74,48%	99%	99%	
6			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97%	98%	99%	99%	99%	99%	99,17%	99%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	85%	90%	95%	99%	99%	95%	64,65%	99%	99%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan									**98,38%**	**90,48%**	**100%**	**100%**	

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Target kinerja indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025 sebesar 88 (Sangat Baik) dan realisasinya 94,16 (Sangat Baik) atau capaian kinerja sebesar 93,45% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rekomendasinya adalah :

a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 94,16 (sembilan puluh empat koma enam belas). Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tergolong “Sangat Baik” diatas untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan;

b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

   - Prosedur, produk, kompetensi petugas layanan mapupun perilaku petugas pelayanan :

     Sebenarnya media komunikasi, saran dan masukan sudah disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses atau keterbatasan pengetahuan mauun informasi maka hal-hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat, begitupun indikasi sub penilaian yang dirasa kurang lainnya.

2. Target kinerja indikator persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tahun 2025 sebesar 100% (seratus persen) dengan realisasinya 100% (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen), target kinerja tercapai dari yang 13 (tiga belas) ditargetkan, adapun persentase kekurangan dari pemenuhan pelayanan tersebut dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang disyaratkan.

3. Target kinerja nilai SAKIP PD tahun 2025 dengan nilai 86 (BB) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 85,94% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pada DKPS;
- pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan tetapi belum memuat realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*;
- Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

4. Target kinerja indikator persentase kepemilikan KTP-el tahun 2025 sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 98,52% (568.333) atau capaian kinerja sebesar 99,48% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen). Target kinerja belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih ada perekaman pemula yang belum dilaksanakan.
5. Target kinerja indikator persentase kepemilikan KIA tahun 2025 sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 74,48% (176.982) atau capaian kinerja sebesar 70,50% (tujuh puluh koma lima puluh persen). Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait pencetakkan KIA, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola pencetakkan KIA diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIAnya masih rendah.
6. Target Kinerja indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun pada tahun 2025 sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 99,17% (250.406) atau capaian kinerja sebesar 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen). Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan akta kelahiran usia 0-18, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola penerbitan akta kelahiran usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih rendah.

7. Target kinerja indikator persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim tahun 2025 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan realisasinya 64,65% (17.780) atau capaian kinerja sebesar 68,05% (enam puluh delapan koma nol lima persen). Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belum maksimalnya pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen akta perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
8. Target kinerja indikator persentase pelayanan penerbitan akta kematian tahun 2025 sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan realisasinya 100% (seratus persen) atau capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen).
9. Target kinerja indikator kinerja tahun 2025 persentase layanan informasi dan inovasi administrasi kependudukan sebesar 100% (seratus persen) dan realisasinya 100% (seratus persen) dengan capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen), hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk cetak digital, media sosial/*website*, dan inovasi berupa vitamin bertenaga, layanan *online*, bunga desaku target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra DPKS tahun 2021-2026. Dalam mencapai solusi permasalahan yang ada yakni dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak hati bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil untuk memperoleh dokumen tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terdapat 4 (empat) cakupan:

1. Cakupan Kepemilikan/ Perekaman KTP-el

   Besaran jumlah KTP-el yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembanding jumlah wajib KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara, mengalami kenaikan dari target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan ketersediaan Blanko KTP elektronik yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitannya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran untuk Anak Usia 0-18 Tahun

   Realisasi Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dikarenakan adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh akta kelahiran. Dalam upaya untuk terus meningkatkan agar masyarakat Kutai Kartanegara memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Cakupan Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA)

   Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA) di dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara *three in one* yakni bayi baru lahir di rumah sakit langsung memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan online Dimana masyarakat dalam pengurusan akta lahir mendapatkan Akta Kelahiran, perubahan KK, dan KIA. Dan pelayanan ini juga bisa melalui narahubung Kesehatan yang berada di Rumah Sakit maupun Puskesmas.

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Menurunkan pembuatan Akta Kematian atas peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat karena kegunaan Akta kematian berkaitan dengan Hak Waris dan dihapusnya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat dan adanya Kerjasama pembuatan melalui Akta Kematian Online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan jemput bola dalam pembuatan akta kematian online Dimana masyarakat cukup membuat permohonan melalui jaringan "Daring".

Dari permasalahan yang ada disetiap tahun akan adanya faktor-faktor pendukung guna mencapai target yang diharapkan, dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah untuk mendorong pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

1. Kemajuan teknologi menuntun respon kebijakan yang antipatif, adaptif, dan cepat dan lompatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan digital/ daring, pelayanan publik yang cepat dan akurat.
2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan menuju Satu Data
3. Penguatan Tata Kelola Kependudukan, dengan peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peritiwa penting dan percepatan kepemilikan dokumen penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum terlaksana secara maksimal pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melalui daring, masyarakat masih ada yang belum memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diatur dalam Permendagri 119 Tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.
2. Rata-rata pelayanan per hari di tenant Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik maupun secara daring adalah sebanyak 800 s/d 1000 permohonan per hari dengan beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara daring yaitu pengambilan KTP-el, pencatatan perkawinan dan pelayanan konsultasi dan pengaduan, maka masyarakat masih datang secara langsung ke Mall Pelayanan Publik.
3. Gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada saat ini dipandang belum representatif baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruang pelayanan pengambilan KTP-el yang saat ini dilakukan di area ruang pelayanan perekaman. Ketersediaan ruang parkir yang minim juga turut mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang datang berpelayanan.
4. Adanya penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, penyalahgunaan dokumen kependudukan banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai motif seperti menghindari blokir oleh Bank, maupun sebagai motif untuk melakukan kejahatan lainnya.
5. Belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan. Masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.

6. Terbatasnya jumlah SDM pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berjumlah 63 PNS dan 34 PPPK yang masih memerlukan tambahan personal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hambatan dan kendala pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Perekaman Biometrik di Rumah Sakit/tidak procedural, Kesadaran perekaman bagi pemula E-KTP, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah berdasarkan target Renstra, Cakupan Aktivasi IKD masih rendah, Tidak maksimalnya Pelayanan pencetakan KTP di Kecamatan, Belum optimalnya bagi masyarakat lansia dalam mengurus Dokumen Akta Perkawinan Non Muslim, Kurang optimalnya pengembangan Sistem pendukung pelayanan, Minimnya hak akses OPD dalam pemanfaatan data kependudukan *by name by address* (BNBA).

Tentu saja tidak mudah mengatasi berbagai masalah dan harus selalu mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait segala jenis pelayanan kependudukan yang sudah bisa di akses melalui offline dan juga online.

Faktor-faktor pendorong kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dukungan logistik KTP-el yang didapat melalui proses hibah dengan Pemerintah Pusat, logistik KIA, peralatan perekaman KTP-el dan KIA yang mencukupi.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs *(suistanable Development Goals)*.

a. Terpenuhinya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuat rasa nyaman.
c. Pola pelayanan jemput bola yang akan menghasilkan inovasi pelayanan.
d. Masyarakat merasa puas akan layanan yang diberikan.
e. Tertib administrasi kependudukan menuju penduduk yang berkualitas. Dalam upaya pencapaian target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan selalu menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan:
   a. Pertumbuhan penduduk yang akan terjadi peningkatan cukup tinggi sebagai dampak IKN.
   b. Peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan.
   c. Pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat kewenangan Tunggal.
   d. Dukungan pemerintah kabupaten atas rencana peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
   e. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan “DARING”.
   f. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lain.
2. Peluang:
   a. Adanya dukungan nasional tentang penerapan KTP-el.
   b. Kerjasama dengan instansi lain.
   c. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (GISA).
   d. Permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/ gratis.
   e. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa dicetak secara mandiri dengan kertas A4 80 gram.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 yang Direncanakan

Dari analisis perkembangan dan masalah kependudukan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pencatatan sipil dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah:

a. Masalah status kewarganegaraan, Disdukcapil Kukar terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur. Permasalahan ini muncul dari permohonan dokumen kependudukan oleh masyarakat yang memiliki dokumen keimigrasian tetapi belum terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem.
b. Peningkatan pelayanan di tingkat desa, meskipun sudah ada upaya untuk mendekatkan pelayanan kependudukan ke masyarakat, masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang prosedur pengurusan dokumen. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan mandiri.
c. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Pelayanan online “DARING” belum familiar di masyarakat tertentu.
e. Peningkatan jangkauan pelayanan masyarakat/ jemput bola.

Formulasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 yakni:

a. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
b. Peningkatan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
c. Data Kependudukan yang Terintegrasi pada semua Lembaga publik.

Untuk menghadapi formulasi isu-isu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan dalam mensukseskan DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN untuk PELAYANAN PUBLIK, maka pada Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

a. Melakukan pencetakan KIA di seluruh Kecamatan.
b. Penambahan sarana dan prasaran bagi Narahubung Desa/Kelurahan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Pelatihan petugas pelayanan untuk melayani masyarakat yang berkebutuhan khusus.

d. Percepatan Layanan Dokumen Kependudukan berbasis Digitalisasi.

e. Percepatan aktivasi IKD dengan semua *stakeholder* terkait

f. PKS untuk hak akses NIK.

g.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Review terhadap rancangan Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai hasil analisis kebutuhan Tahun 2026 dengan memperhatikan kegiatan skala prioritas kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai table berikut:

Tabel TC.31

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	16.629.596.801,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	21.986.385.074,00	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%					Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	15.464.596.801,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	19.326.385.074,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	300.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	500.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	150.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	150.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	200.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1Laporan	100.000.000,00	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1Laporan	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**2 Laporan**	**11.394.113.305,00**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**2 Laporan**	**12.629.806.192,00**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	11046.573.305,00	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	12.282.266.192,00	Penambahan Pagu bagi calon P3K
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	50.000.000,00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	50.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	297.540.000,00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	297.540.000,00	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**25.000.000,00**	**3**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	25.000.000,00	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	75.000.000,00	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**4 Dokumen**	**100.000.000,00**	**4**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**4 Dokumen**	**400.000.000,00**	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	0 paket	0,00	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100.000.000,00	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000,00	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000,00	Diperlukan Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Layanan**	**2.189.807.600,00**	**5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Layanan**	**3.586.578.882,00**	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1000.000.000,00	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1611578.882,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	33.750.000,00	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	150.000.000,00	Diperlukan Penambahanan Jumlah Rincian Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	700.000.000,00	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	750.000.000,00	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 50.000 keping
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	25.000.000,00	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	25.000.000,00	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	331057.600,00	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	850.000.000,00	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65.000 Dokumen	100.000.000,00	16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	200.000.000,00	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Unit**	**620.000.000,00**	**6**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Unit**	**890.000.000,00**	
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	270.000.000,00	
18	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	18	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	500.000.000,00	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	500.000.000,00	
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	70.000.000,00	20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	70.000.000,00	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Laporan**	**766.265.896,00**	**7**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Laporan**	**1.025.000.000,00**	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355.000.000,00	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355.000.000,00	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	361265.896,00	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	570.000.000,00	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**9 Unit**	**69.410.000,00**	**8**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**9 Unit**	**220.000.000,00**	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49.410.000,00	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	120.000.000,00	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1Unit	20.000.000,00	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1Unit	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	295.000.000,00	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	750.000.000,00	
			3. Persentase Kepemilikan KIA	90%	100.000.000,00				3. Persentase Kepemilikan KIA	90%	300.000.000,00	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	200.002 Dokumen	395.000.000,00	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	200.002 Dokumen	1.050.000.000,00	
27	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	110.000.000,00	27	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	350.000.000,00	
28	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	185.000.000,00	28	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	400.000.000,00	
29	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	100.000.000,00	29	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	300.000.000,00	
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%	200.000.000,00	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%	250.000.000,00	
			5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	120.000.000,00				5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	200.000.000,00	
			6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	100.000.000,00				6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	200.000.000,00	
10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	300.000.000,00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	450.000.000,00	
30	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	200.000.000,00	30	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1000 Dokumen	200.000.000,00	
31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	100.000.000,00	31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	250.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	120.000.000,00	11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	200.000.000,00	
32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	120.000.000,00	32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	200.000.000,00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	250.000.000,00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	800.000.000,00	
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	150.000.000,00	12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	450.000.000,00	
33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	50.000.000,00	33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	250.000.000,00	Diperlukan Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25% (27.000 orang) dari Total Perekaman (523.121 org)
34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11Dokumen	100.000.000,00	34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11Dokumen	200.000.000,00	
13	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000,00	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	150.000.000,00	
35	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	50.000.000,00	35	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	150.000.000,00	
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	50.000.000,00	13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	200.000.000,00	
36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	50.000.000,00	36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	200.000.000,00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100.000.000,00	V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	150.000.000,00	
15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	100.000.000,00	15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	150.000.000,00	
37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	50.000.000,00	37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	110.000.000,00	PROGRAM DISAPA
38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1Dokumen	50.000.000,00	38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1Dokumen	50.000.000,00	
				Jumlah	16.629.596.801,00					Jumlah	21.986.385.074,00	

Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk membandingkan rancangan akhir (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakannya musyawarah antar PD dengan pemangku kepentingan, dan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pada rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 20.129.551.038,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Publuh Satu Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan analisa kebutuhan Rp. 21.595.962.824,00 (Dua Puluh

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan melalui website: layanan-online-dukcapil.kukarkab.go.id. Melalui website tersebut akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan mutu pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan dari masyarakat melalui musrenbang, tetapi melalui Forum PD dengan memperhatikan PD pendukung pelayanan (Kecamatan se-Kutai Kartanegara) dan lintas sektor yang lain.

Tabel 2.5 (TC.32)

Tidak ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

   Pada hakekatnya adalah upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

   a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
   b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa *(out of product, out of sale, out of warranty)*; dan
   c. Memetakan kondisi database kependudukan untuk persiapan penerapan identitas kependudukan digital (IKD).

2. Dukungan DKPS dalam Program Pencegahan Stunting.

   a. DKPS bekerja sama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan Program keluarga sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, DKPS juga memastikan setiap anak usia 0-18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
   b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

stunting, kedepan banyak Program prioritas pemerintah yang memerlukan datakependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.
   a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan; dan
   b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
   a. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen);
   b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen);
   c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 60% (enam puluh perse) di tahun 2025;
   d. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan memiliki buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% (lima puluh persen) kompleks pemakaman memiliki BPP;
   e. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 15 (lima belas) PD;
   f. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten sebanyak 15 (lima belas) PD;
   g. Membuat inovasi tiap semester minimal 1 (satu) inovasi, setahun 2 (dua) inovasi;
   h. Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 30% (tiga puluh pesen) dari total capaian perekaman.
5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2. Tujuan dan Sasaran DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka DKPSl Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indikator kinerja tujuannya adalah indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka DKPS Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah meningkatnya pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan indikator kinerja sasarannya adalah persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai tujuan meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil kutai kartanegara dengan sasaran meningkatnya pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan indikator kinerja sasarannya adalah persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Rencana Kerja DKPS Kutai Kartanegara Tahun 2026 berisi Program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan :

a. pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara;
b. berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional; dan
c. peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan DKPS Kutai Kartanegara.

Program, kegiatan dan subkegiatan DKPS Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program prioritas Bupati terpilih dan kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD adalah sebesar Rp20.129.551.038,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah) untuk rencana prakiraan maju tahun 2024 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp21.595.962.824,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam Renstra DKPS Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, terdapat beberapa subkegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rencana Kerja (Program/kegiatan/subkegiatan) DKPS Kutai Kartanegara Tahun 2026 untuk lebih jelasnya rumusan rencana Program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	HASIL ANALISA KEBUTUHAN	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		90	(Baik)	16.629.596.801,00	16.629.596.801,00			90	(Baik)	21.986.385.074,00
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		100	Persen					100	Persen	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		88	(A)	15.464.596.801,00	15.464.596.801,00			88	(A)	19.326.385.074,00
2	12	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00			8	Dokumen	500.000.000,00
2	12	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tenggarong	3	Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD		3	Dokumen	150.000.000,00
2	12	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	4	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		4	Laporan	200.000.000,00
2	12	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Tenggarong	1	Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		1	Laporan	150.000.000,00
2	12	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel		2	Laporan	11.394.113.305,00	11.394.113.305,00			2	Laporan	12.629.806.192,00
2	12	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	95	Orang/Bulan	11.046.573.305,00	11.046.573.305,00	APBD		100	Orang/Bulan	12.282.266.192,00
2	12	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	50.000.000,00
2	12	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	1	Laporan	297.540.000,00	297.540.000,00	APBD		1	Laporan	297.540.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	**12**	**01**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**		**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**	**75.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**75.000.000,00**
2	**12**	**01**	**2**	**05**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	APBD	Fasilitasi Hibah Laptop RT	1	Laporan	75.000.000,00
2	**12**	**01**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**		**4**	**Dokumen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**4**	**Dokumen**	**400.000.000,00**
2	12	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	0	Paket	0,00	0,00			1	Paket	200.000.000,00
2	12	01	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	100	Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		100	Orang	100.000.000,00
2	12	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	0	Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Penambahanan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK	35	Orang	100.000.000,00
2	**12**	**01**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**6**	**Layanan**	**2.189.807.600,00**	**1.914.807.600,00**			**6**	**Layanan**	**3.586.578.882,00**
2	**12**	**01**	**2**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	2	Paket	1.000.000.000,00	725.000.000,00	APBD		3	Paket	1611.578.882,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1	Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	APBD	Diperlukan Penambahanan Jumlah Rincian Belanja Pengadaan Stand Bazar	1	Paket	150.000.000,00
2	12	01	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	2	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 100.000 keping	3	Paket	750.000.000,00
2	12	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong	0	Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD		10800	Dokumen	25.000.000,00
2	12	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	160	Laporan	331057.600,00	331057.600,00	APBD		160	Laporan	850.000.000,00
2	12	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	65000	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		75000	Dokumen	200.000.000,00
2	**12**	**01**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**95**	**Unit**	**620.000.000,00**	**820.000.000,00**			**80**	**Unit**	**890.000.000,00**
2	**12**	**01**	**2**	**01**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	2	Unit	0,00	200.000.000,00	APBD	Sewa kendaraan dinas operasional kantor	6	Unit	270.000.000,00
2	12	01	2	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tenggarong	0	Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		10	Unit	50.000.000,00
2	12	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	15	Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	APBD		60	Unit	500.000.000,00
2	12	01	2	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	1	Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD		4	Unit	70.000.000,00
2	**12**	**01**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**		**12**	**Laporan**	**766.265.896,00**	**791.265.896,00**			**12**	**Laporan**	**1.025.000.000,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	12	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	0,00	25.000.000,00	APBD	Belanja Pengiriman Blangko KTP-el	12	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	355.000.000,00	355.000.000,00	APBD	Belanja sewa bandwith 350jt	12	Laporan	355.000.000,00
2	12	01	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer	12	Laporan	75.000.000,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	361265.896,00	361265.896,00	APBD	Jasa Tenaga Teknis Multimedia 3 Orang, Penjaga Keamanan 4 Orang	12	Laporan	570.000.000,00
2	**12**	**01**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**9**	**Unit**	**69.410.000,00**	**69.410.000,00**			**9**	**Unit**	**220.000.000,00**
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	APBD	Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor	16	Unit	120.000.000,00
2	12	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD		1	Unit	100.000.000,00
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**2. Persentase Kepemilikan KTP-el**		**99**	**Persen**	**295.000.000,00**	**295.000.000,00**			**99**	**Persen**	**750.000.000,00**
						3. Persentase Kepemilikan KIA		**90**	**Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**99**	**Persen**	**300.000.000,00**
2	**12**	**02**	**2**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan**		**200.002**	Dokumen	**395.000.000,00**	**395.000.000,00**			**200.002**	Dokumen	**1.050.000.000,00**
2	12	02	2	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	APBD		1	Dokumen	350.000.000,00
2	12	02	2	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150.000	Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	APBD		200.000	Dokumen	400.000.000,00
2	12	02	2	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		1	Laporan	300.000.000,00
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**		**99**	**Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**99**	**Persen**	**250.000.000,00**
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		**95**	**Persen**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**			**95**	**Persen**	**200.000.000,00**
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		**99**	**Persen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**			**99**	**Persen**	**200.000.000,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	**12**	**03**	**2**			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan**		**1101**	**Dokumen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**			**1301**	**Dokumen**	**450.000.000,00**
2	12	03	2	01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	1100	Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	APBD		1300	Dokumen	200.000.000,00
2	12	03	2	02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		1	Layanan	250.000.000,00
2	**12**	**03**	**2**			**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan**		**1**	**Laporan**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**200.000.000,00**
2	12	03	2	01		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**		**100**	**Persen**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**			**100**	**Persen**	**800.000.000,00**
2	**12**	**04**	**2**			**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan**		**12**	**Dokumen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**			**12**	**Dokumen**	**450.000.000,00**
2	12	04	2	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25% (127.000 orang) dari Total Perekaman	1	Dokumen	250.000.000,00
2	12	04	2	02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD	Penambahan Pagu Anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi PKS ke seluruh OPD	11	Dokumen	200.000.000,00
2	**12**	**04**	**2**			**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**1**	**Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**150.000.000,00**
2	12	04	2	01		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	150.000.000,00
2	**12**	**04**	**2**			**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi**		**1**	**Laporan**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**200.000.000,00**
2	12	04	2	05		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	**12**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**		**100**	**Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**100**	**Persen**	**160.000.000,00**
2	**12**	**05**	**2**			**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan**		**2**	**Dokumen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**2**	**Dokumen**	**160.000.000,00**
2	12	05	2	01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	**PROGRAM DISAPA**	1	Dokumen	110.000.000,00
2	12	05	2	02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	50.000.000,00
										Jumlah	**16.629.596.801,00**	**16.629.596.801,00**				**Jumlah**	**21.986.385.074,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DKPS tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Renstra DKPS tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, kegiatan dan sub kegiatan DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara, RPJMD tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, serta merupakan kesinambungan dari RKPD Pemerintah Daerah.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026, mengacu kepada Renstra DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil. Apabila terjadi ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada Program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/kegiatan/sub kegiatan dengan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada Rencana Kerja DKPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tidak dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi mengakomodir standar pelayanan minimal pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Penambahan pagu sub kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun *mindset* dan *culturset* tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. PD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
4. PD Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, kegiatan, sub kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja-PD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas Program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD tahun 2021-2026 ke dalam Renstra PD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Renja-PD Tahun 2026 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan RKPD tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke SIPD 2026 menyesuaikan dengan pagu dan target Renstra 2026 PD.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Renstra-PD dan sesuai arahan operasional dalam RKPD;

2. Renja-PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan Program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026; dan
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja PD yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik:
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Diskominfo tahun 2026.

Sedangakan tujuan disusunnya Rencana Kerja Diskominfo tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo tahun 2026 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo tahun 2024 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Diskominfo 2024, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2025. Adapun Evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2024 sebagai Berikut :

a. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

b. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan: Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD.

Sub Kegiatan :

a. penyusunan dokumen perencanaan PD target 3 (tiga) dokumen realisasi 3 (tiga) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
b. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD target 7 (tujuh) dokumen realisasi 7 dokumen atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. penyediaan gaji dan tunjangan ASN target 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) orang/bulan realisasi 766 (tujuh ratus enam puluh enam) orang/bulan atau tercapai 86,26% (delapan puluh enam koma dua puluh enam persen);
b. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD target 4 (empat) laporan realisasi 4 (empat) laporan atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. administrasi barang milik Daerah pada PD target 4 (empat) laporan realisasi 4 (empat) laporan atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi target 14 (empat belas) orang realisasi 14 (empat belas) orang atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor target 1 (satu) paket realisasi 1 (satu) paket atau tercapai 100% (seratus persen);
b. penyediaan bahan logistik kantor target 1 (satu) paket realisasi 1 (satu) paket atau tercapai 100% (seratus persen);
c. penyediaan barang cetakan dan penggandaan target 1 (satu) paket realisasi 1 (satu) paket atau tercapai 100% (seratus persen);
d. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd target 74 (tujuh puluh empat) laporan realisasi 72 (tujuh puluh dua) laporan atau tercapai 97,30% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh persen); dan
e. penatausahaan arsip dinamis pada SKPD target 1 (satu) dokumen realisasi 1 (satu) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya target 3 (tiga) unit realisasi 3 (tiga) unit atau tercapai 100% (seratus persen); dan
b. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya target 25 (dua puluh lima)

unit realisasi 25 (dua puluh lima) unit atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

a. penyediaan jasa surat menyurat target 1 (satu) laporan realisasi 1 (satu) laporan atau tercapai 100% (seratus persen);
b. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik target 1 (satu) laporan realisasi 1 (satu) laporan atau tercapai 100% (seratus persen); dan
c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor target 3 (tiga) laporan realisasi 3 (tiga) laporan atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

a. penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan target 22 (dua puluh dua) unit realisasi 22 (dua puluh dua) unit atau tercapai 100% (seratus persen);
b. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya target 1 (satu) unit realisasi 1 (satu) unit atau tercapai 100% (seratus persen); dan
c. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya target 16 (enam belas) unit realisasi 16 (enam belas) unit atau tercapai 100% (seratus persen).

2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik target 1 (satu) dokumen realisasi 1 (satu) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);

b. monitoring opini dan aspirasi publik target 2 (dua) dokumen realisasi 2 (dua) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah target 2 (dua) dokumen realisasi 2 (dua) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik target 3 (tiga) dokumen realisasi 3 (tiga) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
e. pengelolaan media komunikasi publik target 73 (tujuh puluh tiga) dokumen realisasi 73 (tujuh puluh tiga) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
f. pelayanan informasi publik target 5 (lima) dokumen realisasi 5 (lima) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
g. layanan hubungan media target 254 (dua ratus lima puluh empat) layanan realisasi 254 (dua ratus lima puluh empat layanan atau tercapai 100% (seratus persen);
h. kemitraan dengan pemangku kepentingan target 100 (seratus) dokumen realisasi 100 (seratus) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
i. manajemen komunikasi krisis target 1 (satu) dokumen realisasi 1 (satu) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
j. penguatan tata kelola komisi informasi di daerah target 1 (satu) dokumen realisasi 1 (satu) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen); dan
k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas target 6 (enam) dokumen realisasi 6 (enam) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen).

3. Program pengelolaan aplikasi informatika.

Kegiatan: Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah target 3 unit realisasi 3 (tiga) unit atau tercapai 100% (seratus persen);
b. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik target 1 (satu) unit realisasi 1 (satu) unit atau tercapai 100% (seratus persen);
c. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas target 2 (dua) dokumen realisasi 2 (dua) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
d. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah target 10 (sepuluh) dokumen realisasi 10 (sepuluh) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
e. pengelolaan *government chief information officer (GCIO)* target 6 (enam) dokumen realisasi 6 (enam) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);
f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE target 1 (satu) dokumen realisasi 1 (satu) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah target 59 (lima puluh sembilan) unit realisasi 59 (lima puluh sembilan) unit atau tercapai 100% (seratus persen).

4. Program penyelenggaraan statistik sektoral.

Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. koordinasi & sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral target 4 (empat) dokumen realisasi 4 (empat) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);

b. membangun metadata statistik sektoral target 2 (dua) dokumen realisasi 2 (dua) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen);

c. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoraltarget 114 (seratus empat belas) orang realisasi 114 (seratus empat belas) orang atau tercapai 100% (seratus persen); dan

d. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah target 2 (dua) dokumen realisasi 2 (dua) dokumen atau tercapai 100% (seratus persen).

5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota target 1 (satu) laporan realisasi 1 (satu) laporan atau tercapai 100% (seratus persen);

b. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik target 1 (satu) laporan realisasi 1 (satu) laporan atau tercapai 100% (seratus persen); dan

c. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota target 1 (satu) perangkat daerah realisasi 1 (satu) perangkat daerah atau tercapai 100% (seratus persen).

Kegiatan: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota

Sub Kegiatan:

a. operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota target 1 (satu) perangkat daerah realisasi 1 (sau) perangkat daerah atau tercapai 100% (seratus persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. program penyelenggaraan statistik sektoral

Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi target 114 (saratus empat belas) orang realisasi 122 (seratus dua puluh dua) orang atau tercapai 107,02% (seratus tujuh koma nol dua persen)

d. Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

Indikator yang belum tercapai sesuai dengan target antara lain indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran) yaitu Indeks SPBE dan indikator program penunjang yaitu nilai SAKIP PD, penyebabnya antara lain :

- Tim koordinasi SPBE belum berfungsi optimal dimana seharusnya tim koordinasi SPBE berfungsi sebagai tim pengarah TIK yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE;
- Belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek. Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja;
- Perbedaan persepsi sasaran desa *blankspot;*
- Masih kurangnya pemahaman terkait data dukung, masih kurangnya data dukung dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra PD.

Adanya permasalahan-permasalahan diatas, berimplikasi kepada masih rendahnya capaian terhadap indikator tujuan dan sasaran yang menjadi indeks yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo tahun 2021 - 2026.

2) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

- Mendorong peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sehingga Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya mengintervensi terhadap peningkatan indikator;
- Menyelaraskan pengganggaran pada aspek manajemen SPBE dan audit TIK dengan penerapan dokumen Peta Rencana SPBE. Selain itu perlu segera disusun secara formal pedoman pelaksanaan manajemen dan audit SPBE;
- Melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE serta melakukan pengaturan agar penyusunan DPA/RKA perangkat daerah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK;
- Pengadaan jaringan internet selain pemerintahan desa;
- Mempelajari data dukung serta memperbaiki arsip dan dokumentasi kegiatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	13	3	3	100,00	3	19	86,36
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	51	20	7	7	100,00	10	37	72,55
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	4.560	1.826	888	766	86,26	888	3.480	76,32
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	7	4	4	100,00	2	13	76,47

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	75	76	14	14	100,00	10	100	133,33
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	110	76	2	2	100,00	1	79	71,82
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	6	1	1	100,00	1	8	80,00
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	425	221	75	72	96,00	50	343	80,71

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	57	48	1	2	200,00	2	52	91,23
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	7	3	3	100,00	2	12	600,00
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	397	186	25	25	100,00	93	304	326,88
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	8	3	3	100,00	4	15	78,95
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	124	57	22	22	100,00	22	101	81,45
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	5	1	1	100,00	3	9	33,33
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	157	150	16	16	100,00	3	169	107,64

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	02:01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	10	4	2	2	100,00	1	7	70,00
2	16	2	02:01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	38	32	2	2	100,00	2	36	94,74
2	16	2	02:01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	13	7	2	2	100,00	2	11	84,62
2	16	2	02:01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	35	16	8	8	100,00	3	27	77,14

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	0,08402778	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	85	6	3	3	100,00	8	17	20,00
2	16	2	02:01	06	Pelayanan Informasi PubliK	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	25	10	5	5	100,00	5	20	80,00
2	16	2	0,08402778	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	641	310	254	254	100,00	74	638	99,53
2	16	2	02:01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	670	370	100	100	100,00	100	570	85,07
2	16	2	02:01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	16	2	02:01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	600	100	-	-	-	120	220	36,67

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	02:01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	2	02:01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	218	12	6	6	100,00	100	118	54,13
2	16	3	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Dokumen	30	3	6	6	100,00	-	9	30,00
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	7	2	3	3	100,00	1	6	85,71
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	9	4	1	1	100,00	2	7	77,78

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	3	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	18	7	2	2	100,00	4	13	72,22
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	40	26	10	11	110,00	10	47	117,50
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	90	66	6	6	100,00	6	78	86,67
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	65	60	1	1	100,00	2	63	96,92

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	224	83	59	59	100,00	59	201	89,73
2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	14	6	4	4	100,00	2	12	85,71
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	607	265	114	122	107,02	114	501	82,54
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	16	6	2	2	100,00	4	12	75,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	20	2	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	462	116	114	114	100,00	116	346	74,89
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	74	36	2	2	100,00	-	38	51,35
2	20	2	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	Dokumen	7	2	1	1	100,00	1	4	57,14
2	21	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	1	-	-	-	1	2	66,67
2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	15	12	1	1	100,00	1	14	93,33
2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	21	2	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Layanan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama Diskominfo yaitu Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih dibawah target yang ditetapkan. Peningkatan ini dikarenakan tersedianya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Dokumen Peta Rencana SPBE Nomor 318 /SK-BUP/HK/2023, tersedia anggaran untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan pengembangan aplikasi, serta pemanfaatan aplikasi umum/aplikasi berbagi pakai.

Berikut capaian kinerja pelayanan Diskominfo tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE			3,00	3,10	3,15	3,22	3,29	2,54	3,09	3,22	3,29	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			3,10	3,15	3,20	3,11	3,16	1,40	2,20	3,11	3,16	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
3	Indeks Domain Layanan SPBE			2,96	3,01	3,06	3,40	3,45	3,51	3,88	3,40	3,45	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,25	3,30	3,35	3,20	3,25	1,00	1,82	3,20	3,25	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			3,05	3,10	3,15	3,14	3,25	3,30	3,60	3,14	3,25	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	84,00	86,00	88,00	91,00	93,95	68,17	88,00	91,00	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			10,00	18,97	37,93	75,86	100,00	37,93	56,89	75,86	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21	10	10	16	16	10	10	Capaian sesuai dengan target kinerja
12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	Capaian sesuai dengan target kinerja
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	3	4	4	Capaian sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	5	Capaian sesuai dengan target kinerja
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Capaian sesuai dengan target kinerja
18	Jumlah Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			840	840	840	840	840	840	840	840	840	Capaian sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government			58	58	58	58	58	58	56	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja
21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			58	58	58	58	58	58	58	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			11	11	11	11	14	11	11	11	14	Capaian sesuai dengan target kinerja
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
			1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo										
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		73,00	75,00	85,00	85,00	73,91	87,50	85,00	85,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70,43	71,22	71,91	71,91	70,43	69,37	71,91	71,91	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			6. Tingkat keamanan informasi pemerintah		55,60	57,80	58,00	58,00	55,60	54,88	58,00	58,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat kinerja pelayanan Diskominfo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya yang signifikan dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai standar kinerja yang optimal.

Salah satu capaian positif yang patut diapresiasi adalah upaya Diskominfo dalam mengembangkan infrastruktur TIK, seperti perluasan jaringan internet di pedesaan dan penyediaan layanan *e-government*. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan hambatan yang dhadapi Diskominfo antara lain :

- Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi optimal dimana seharusnya tim koordinasi SPBE Berfungsi sebagai tim pengarah TIK yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE;
- Belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE
- Penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek. Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja.
- Perbedaan persepsi sasaran desa *blankspot*.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;			
1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan 2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah 3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT 4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi 4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Diskominfo antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum optimalnya fungsi pengelolaan komunikasi dan informasi publik secara komperhensif;
- Belum optimalnya pendataan statistik sektoral.

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Dsikominfo antara lain :

- Adanya peluang pengadaan SDM IT;
- Adanya peluang peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- Adanya peluang optimalisasi fungsi pengelolaan komunikasi dan informasi publik secara komperhensif;
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektoral secara komperhensif.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dari penjabaran isu-isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- Perlunya rekruitmen tenaga ahli baik dari it, persandian, statistik, maupun tenaga ahli desain grafis;
- Mendorong peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sehingga Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya mengintervensi terhadap peningkatan indikator kinerja;
- Menyelaraskan pengganggaran pada aspek manajemen SPBE dan audit TIK dengan penerapan dokumen peta rencana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

SPBE. Selain itu perlu segera disusun secara formal pedoman pelaksanaan manajemen dan audit SPBE;

- Segera melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE serta melakukan pengaturan agar penyusunan DPA/RKA PD dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK;
- Pengadaan Jaringan Internet selain pemerintahan desa.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	15.984.481.540	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,00 Nilai	28.584.422.466	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	500.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	
3						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Perangkat Daerah
4						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung
5						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	81 Data	100.000.000	Fasilitasi Pengumpulan Data Sektoral Perangkat Daerah
6						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.006.217.716	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	10.772.522.466	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/Bulan	10.361.230.302	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	411.292.164	Tambahan Honor Pengelola Keuangan (PA,KPA,BP, BPP,PPK SKPD)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	125.000.000	
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	125.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	700.000.000	
10						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	700.000.000	Pelatihan ASN 43 Org

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	800.000.000	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (belanja alat tulis kantor, kertas, tinta dll) Bendera, Tisu, Gorden
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Belanja Makan Minum Rapat, Tamu & Natura
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Belanja Cetak Baliho / Spanduk / Banner, Fotocopy - Pengadaan Map Kop dan Kalender
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Luar Daerah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	200.000.000	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	-	
17						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
18						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.005.100.000	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1 Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	14.000.000.000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Ahli, Tenaga Tenis OPD, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Iuran jaminan/asuransi, jasa pengelolaan sampah,
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	28 Unit	681.800.000	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	381.800.000	Pemeliharaan kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 dan 4
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.605.357.333	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.155.000.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.155.000.000	
27	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	1 Persen	50.000.000	
28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	1.000.000.000	Untuk keperluan operasional outsourching pengelolaan aplikasi dan agent call center, petugas 24 jam, 3 shift , terdiri dari 6 orang petugas call center selama satu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tahun anggaran
29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Diseminasi Informasi	Tenggarong	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2 Persen	100.000.000	
30	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Konten	Kukar	Jumlah Konten Informasi Publik	850 Konten	85.000.000	
31	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelayanan Informasi PubliK	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Informasi PubliK	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	200.000.000	
33	Layanan Hubungan Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	530.357.333	Relasi Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 laporan	100.000.000	
34	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Tenggarong, Ma Badak, Ma Muntai, Loa Janan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan PemangkuKepentingan	200 Dokumen	300.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kukar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Komunitas	200.000.000	
35	Manajemen Komunikasi Krisis	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	
36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Kaman	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tenggarong	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	70.000.000	
38						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	150.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	20.558.588.170	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	-	
39	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	20.558.588.170	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tenggarong	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Spbe Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Serta Penyusunan Rencana Dan Anggaran Spbe Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	300.000.000	
41	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	Penyediaan Akses Internet	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	56 Perangkat Daerah	12.851.309.328	1. Mengakomodir Usulan Musrenbang 2. Persiapan Program Internet Desa Gratis
42	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tenggarong	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum Spbe	Tenggarong	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1Aplikasi	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tenggarong, Jakarta	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	50.000.000	
44	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jakarta, Tenggarong	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tenggarong, Jakarta	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	275.000.000	
45	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Lamin Telihan, Desa Sepatin, Menamang Kiri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1.265.278.842	-	-	-	-	-	
46	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Yogyakarta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Samarinda, Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong, Jakarta, Yogyakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	100.000.000	
48						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	56 Perangkat Daerah	6.807.278.842	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.281.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	1.450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	2.281.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	2.281.000.000	
49	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	750.000.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	150.000.000	
50	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Yogyakarta, Samarinda	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yangTerintegrasi	130 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	170 Orang	300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tenggarong	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	450.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Tenggarong	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	1.381.000.000	Kerjasama dengan BPS dalam rangka Pendampingan penyusunan dokumen statistik sektoral daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2.148.650.000)
52					-	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	350.000.000	
53						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tenggarong	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 Persen	100.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				850.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.485.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	850.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	1.485.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	650.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	1.335.000.000	
54	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Yogyakarta	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	150.000.000	
55	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	150.000.000	
56	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	56 Perangkat Daerah	985.000.000	Penyusunan Indeks KAMI, Belanja pengadaan Lisensi Antivirus, Lisensi Penetration Testing Keamanan Informasi & Perangkat Scanning Tool Keamanan Informasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	50.000.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	150.000.000	
58	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	150.000.000	
	Total				32.923.666.543					55.064.010.636	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Untuk tahun 2026 Diskominfo belum ada usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Dusun Malong, Kab. Kutai Kartanegara Kenohan	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini. Dan untuk pembangunan BTS atau Menara Telekomunikasi bukan kewenangan Diskominfo melainkan kewenangan dari ISP (Internet Service Provider)
2	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	DUSUN HANDIL PANGULU RT 03 DESA SANTAN ILIR , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
3	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Jl. Mulawarman RT. 03 Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Masaping RT.12 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
5	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	desa santan ilir, Kab. Kutai Kartanegara Marang Kayu	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
6	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	salo cella RT 001, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
7	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	jln.anyeq apui, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
8	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	RT. 006 dan RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindak lanjuti pada tahun 2026, dengan catatan terdapat penambahan anggaran karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu, diperlukan aset lahan desa dengan ukuran 30 x 30 meter serta ketersediaan listrik PLN yang beroperasi 24 jam untuk mendukung pembangunan Tower Repeater.

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Dusun Mekar Sari RT.005 dan RT.006, Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater.Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
10	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Desa Liang Buaya, Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
11	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	BELAKANG KANTOR DESA JANTUR SELATAN, JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 , Kab. Kutai Kartanegara Muara Muntai	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
12	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Desa Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara Muara Wis	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
13	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Jalan Gerbang Dayaku, Jalan Kejawi, Jalan Amelia 1,2 & 3, jalan Pisang, Jalan Durian, jalan Jeruk, Jalan Rambutan , Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Bukit Jaya KM.27 RT.006, Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
15	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Bensamar RT.009, Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Berikut adalah analisis mendalam terhadap beberapa kebijakan nasional Kominfo yang relevan:

1. Kebijakan Transformasi Digital
   - Tujuan: Mendorong percepatan transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan sosial.
   - Implementasi:
     - Pengembangan infrastruktur digital, seperti jaringan internet cepat (Palapa Ring) dan satelit multifungsi SATRIA-1.
     - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
   - Tantangan:
     - Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.
     - Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah terpencil.
   - Peluang:
     - Peningkatan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
     - Kolaborasi dengan swasta dan lembaga internasional untuk mempercepat transformasi digital.
2. Kebijakan Literasi Digital
   - Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan produktif.
   - Implementasi:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang mencakup empat pilar: *digital skills, digital ethics, digital safety,* dan *digital culture*.
- Pelatihan dan workshop literasi digital di berbagai daerah.

- Tantangan:
  - Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat pedesaan.
  - Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menjangkau seluruh wilayah.
- Peluang:
  - Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan materi literasi secara masif.
  - Kolaborasi dengan komunitas lokal dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan program.

3. Kebijakan Keamanan Siber
   - Tujuan: Melindungi data dan sistem informasi nasional dari ancaman siber.
   - Implementasi:
     - Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga khusus yang menangani keamanan siber.
     - Penyusunan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk melindungi privasi masyarakat.
   - Tantangan:
     - Meningkatnya serangan siber yang semakin canggih dan kompleks.
     - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber.
   - Peluang:
     - Pengembangan teknologi keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI).
     - Peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan ancaman siber.

BerAKHLAK banggo melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Kebijakan Pengembangan Ekosistem Startup Digital
   - Tujuan: Mendorong pertumbuhan startup digital sebagai penggerak ekonomi digital.
   - Implementasi:
     - Program 1.000 Startup Digital yang memberikan pendampingan dan pendanaan bagi startup baru.
     - Pembangunan pusat inovasi digital seperti Jakarta *Digital Valley* dan Bandung Techno Park.
   - Tantangan:
     - Persaingan global yang ketat dalam industri startup.
     - Keterbatasan akses pendanaan dan mentor bagi startup di daerah.
   - Peluang:
     - Peningkatan investasi dari *venture capital* dan investor asing.
     - Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk mendorong inovasi.
5. Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran dan Konten Digital
   - Tujuan: Meningkatkan kualitas konten siaran dan digital yang edukatif, informatif, dan menghibur.
   - Implementasi:
     - Regulasi tentang standar konten siaran dan digital melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
     - Program siaran edukatif seperti TV Edukasi dan konten digital berbasis kebudayaan.
   - Tantangan:
     - Maraknya konten negatif dan hoaks di platform digital.
     - Kurangnya pengawasan terhadap konten yang beredar di media sosial.
   - Peluang:
     - Pemanfaatan teknologi AI untuk memfilter konten negatif.
     - Kolaborasi dengan platform media sosial untuk meningkatkan kualitas konten.

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Kebijakan Pengembangan *Smart City*
   - Tujuan: Mendorong pembangunan kota cerdas berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
   - Implementasi:
     - Program 100 *Smart City* yang melibatkan berbagai kota di Indonesia.
     - Pengembangan aplikasi *smart city* untuk layanan transportasi, kesehatan, dan lingkungan.
   - Tantangan:
     - Keterbatasan anggaran dan infrastruktur di daerah.
     - Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi *smart city*.
   - Peluang:
     - Pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* dan big data untuk pengelolaan kota.
     - Kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembiayaan dan pengembangan teknologi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Diskominfo menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Program pengelolaan aplikasi informatika;
4. Program penyelenggaraan statistik sectoral;
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Diskominfo adalah ”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Rencana Kerja Diskominfo adalah :

1. meningkatnya kualitas domain tata kelola SPBE;
2. meningkatnya kualitas domain layanan SPBE;
3. meningkatnya kualitas domain manajemen SPBE; dan
4. meningkatnya kualitas domain kebijakan internal SPBE.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 adalah Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara 2025 - 2045:

”Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Untuk mencapai visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam sasaran RPJPD. Dalam sasaran RPJPD, Diskominfo memiliki 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan sasaran RPJMD antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. meningkatnya kualitas domain tata kelola SPBE;
2. meningkatnya kualitas domain layanan SPBE;
3. meningkatnya kualitas domain manajemen SPBE; dan
4. meningkatnya kualitas domain kebijakan internal SPBE.

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Progam yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Program pengelolaan aplikasi informatika;
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral; dan
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari 5 (lima) Program diatas, selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Diskominfo sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program/kegiatan tersebut pada tahun 2026 sebesar Rp55.064.010.636,00 (lima puluh lima milyar enam puluh empat juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

c) Rumusan Program dan kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :
   a. adanya penyesuaian output indikator sub kegiatan;
   b. adanya perubahan nomenklatur subkegiatan yang ada di SIPD;
   c. adanya pemetaan nomenklatur subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD;
   d. adanya tambahan subkegiatan baru menyesuiakan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan; dan
   e. adanya usulan musrenbang kecamatan.

d) Tabel rencana Program dan kegiatan sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC-33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,29 Nilai				3,29 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,16 Nilai				3,16 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,45 Nilai				3,45 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,25 Nilai				3,25 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		3,25 Nilai				3,25 Nilai	
xxx	[URUSAN] X NON URUSAN								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75,00 Nilai	28.584.422.466			77,00 Nilai	38.348.117.716
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	500.000.000			10 Dokumen	550.000.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	4 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	81 Data	100.000.000	APBD		1 Data	150.000.000
2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	50.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	10.772.522.466			2 Laporan	11.106.217.716
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	1078 Orang/bulan	10.361.230.302	APBD		888 Orang/bulan	10.694.925.552
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	4 Laporan	411.292.164	APBD		4 Laporan	411.292.164
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	125.000.000			2 Dokumen	125.000.000
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan	125.000.000	APBD		2 Laporan	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	700.000.000			1 Dokumen	1.530.000.000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	-	-	APBD		3 Paket	580.000.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	43 Orang	700.000.000	APBD		80 Orang	950.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	800.000.000			5 Layanan	1.600.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	250.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong, Luar Daerah	68 Laporan	200.000.000	APBD		75 Laporan	400.000.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	350.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	-			100 Persen	5.800.000.000
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		6 Unit	2.200.000.000
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		7 Unit	1.300.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Salinan dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		1 Unit	300.000.000
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		50 Unit	2.000.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	15.005.100.000			12 Bulan	16.405.100.000
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	5.100.000	APBD		1 Laporan	5.100.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	1.000.000.000	APBD		1 Laporan	2.400.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3 Laporan	14.000.000.000	APBD	Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Ahli, Tenaga Tenis OPD, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Iuran jaminan/asuransi, jasa pengelolaan sampah,	3 Laporan	14.000.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		28 Unit	681.800.000			100 Unit	1.231.800.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	20 Unit	381.800.000	APBD		22 Unit	381.800.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	-	-	APBD		1 Unit	550.000.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	8 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	2.155.000.000			100 Persen	13.805.357.333
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.155.000.000			840 Informasi dan Komunikasi Publik	13.805.357.333
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	100.000.000	APBD		5 Laporan	100.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Kutai Kartanegara	50 Komunitas	200.000.000	APBD		50 Komunitas	200.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, Dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Permohonan	200.000.000	APBD		5 Permohonan	300.000.000
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Tenggarong	1 Persentase	50.000.000	APBD		1 Persentase	75.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Tenggarong	10 Rekomendasi	1.000.000.000	APBD		12 Rekomendasi	1.900.000.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Kutai Kartanegara	2 Persentase	100.000.000	APBD		2 Persentase	200.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Tenggarong	1 Media	100.000.000	APBD		20 Media	10.530.357.333
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Tenggarong	850 Konten	85.000.000	APBD		850 Konten	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	150.000.000			16 Orang	200.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100 Persen	20.558.588.170			100 Persen	19.833.827.670
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD		58 OPD	20.558.588.170			58 OPD	19.833.827.670
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	6.807.278.842	APBD		56 Perangkat Daerah	4.487.278.842
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Tenggarong	2 Layanan	50.000.000	APBD		2 Layanan	75.000.000
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Tenggarong	1 Aplikasi	75.000.000	APBD		1 Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi Dan Fasilitasi Promosi Literasi Spbedan/Atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	12.851.309.328	APBD	1. Mengakomodir Usulan Musrenbang 2. Persiapan Program Internet Desa Gratis"	56 Perangkat Daerah	14.121.548.828
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Spbe Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Serta Penyusunan Rencana Dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	450.000.000
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Tenggarong	1 Dokumen	275.000.000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.281.000.000				3.598.650.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100 Persen	2.281.000.000			100 Persen	3.598.650.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58 OPD	2.281.000.000			58 OPD	3.598.650.000
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Tenggarong	100%	150.000.000	APBD		100 Persen	250.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Tenggarong	100%	350.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Tenggarong	100%	1.381.000.000	APBD		100 Persen	2.698.650.000
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Tenggarong	170 Orang	300.000.000	APBD		130 Orang	200.000.000
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Tenggarong	100%	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.485.000.000				3.285.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		100 Persen	1.485.000.000			18,97 Persen	3.285.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		56 OPD	1.335.000.000			56 OPD	3.085.000.000
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tenggarong	12 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	1.100.000.000
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Tenggarong	2 Laporan	150.000.000	APBD	-	2 Laporan	700.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Tenggarong	56 Perangkat Daerah	985.000.000	APBD	Penyusunan Indeks KAMI, Belanja pengadaan Lisensi Antivirus, Lisensi Penetration Testing Keamanan Informasi & Perangkat Scanning Tool Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1.135.000.000
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	150.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	Tenggarong	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	200.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		komunikasi sandi pemerintah Daerah.							
TOTAL					55.064.010.636	-			78.870.952.719

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Diskominfo tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Diskominfo yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Diskominfo, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Diskominfo tahun 2026 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026, yang mengacu kepada Rencana Strategis Diskominfo dan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.

4.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan

RPJPD tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra-PD, Renja-PD, RKPD Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. PD dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045;
4. PD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya dengan berpedoman pada RPJPD tahun 2025-2045 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja-PD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas Program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD tahun 2025-20456, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJPD tahun 2025-2045 ke dalam Renstra PD, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, pelaksanaan RPJMD, pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. RPJPD tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja tahun 2026 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja-PD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagai yang

telah ditetapkan dalam RKPD. Renja-PD disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
b. pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
d. penyusunan laporan di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai dengan urusan kearsipan dan perpustakaan yang dilaksanakan mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan perubahan kebutuhan masyarakat yaitu :

a. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
b. peningkatan kualitas layanan;
c. pemenuhan kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
d. peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar;
e. pengelolaan sumber daya yang optimal;
f. meningkatkan peran arsip dan perpustakaan dalam pembangunan daerah;
g. sosialisasi dan pendidikan masyarakat; dan
h. tantangan di era globalisasi.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah untuk meningkatkan kinerja, kualitas layanan, dan pengelolaan sumber daya yang optimal guna mendukung tujuan pendidikan, penelitian, dan pembangunan Daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan memformulasikan secara linear atas perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga dilakukan perumusan indikator kinerja Program dan kegiatan yang lebih terukur guna akselerasi pencapaian Visi dan Misi daerah sesuai dengan RPJMD.

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Renja-PD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017tentangTataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerahserta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegaratahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 62 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026;
b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rancangan Rencana Kerja (RENJA), maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja-PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari Program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tingkat realisasi capaian kinerja Renja-PD tahun 2024 sebesar 202,99 % (dua ratus dua koma sembilan puluh sembilan persen) atau sangat tinggi, sedangkan target anggaran Renja-PD tahun 2024 sebesar Rp33.667.300.885,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan realisasinya sebesar Rp30.503.105.001,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juga seratus lima ribu satu rupiah) atau sebesar 90,60 % (sembilan puluh koma enam puluh persen) atau sangat tinggi, serta diproyeksi untuk realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 dapat terealisasi optimal.

Realisasi target capaian urusan kearsipan tentang sasaran

Renstra ’terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional’ dengan indikator ‘tingkat ketersediaan arsip’ tidak tercapai karena kurang didukung data dan informasi dalam menentukan target yang menyesuaikan dengan metode penilaian Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) serta sedangkan urusan perpustakaan target sasaran renstra terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat dengan indikator ‘indeks pembangunan literasi masyarakat’ telah mencapai target, sehingga diharapkan peningkatan pembangunan gedung perpustakaan desa dan sarana prasarana perpustakaan sehingga pengunjung dapat lebih meningkat di tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang realisasinya memenuhi target kinerja hasil/keluaran karena telah sesuai yang direncanakan;
2. faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Progam/kegiatan adalah kerjasama, koordinasi dan konsolidasi antara semua pemangku kepentingan;
3. implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD yakni capaian indikator Program kearsipan prosentase SKPD tentang tata kelola arsip PD 83,05 % (delapan puluh tiga koma nol lima persen) dan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan nilai 62,52 (lima enam puluh dua koma lima puluh dua);
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran sub-kegiatan yang perlu diambil untuk mempertahankan hasil capaian adalah perlu menjaga kerjasama yang baik serta selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi berjenjang pada PD.

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 Kabupaten kutai kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja -PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	95	72	72	132	73	73	1.0
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	36	12	12	100	12	60	0.75
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	9	3	3	100	3	15	0.83
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6	3	1	1	100	0	4	0.67
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6	2	1	1	100	0	3	0.50
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	12	4	4	100	3	19	0.79
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	8	3	3	100	2	13	0.72
2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	0	1	1	0.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1	1	0.00
2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1	1	0.00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25	15	5	5	100	5	25	1.00
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	570	285	95	95	100	95	475	0.83
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3	1	1	100	1	5	0.83
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	9	3	3	100	3	15	0.83
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3	1	1	100	1	5	0.83
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	3	1	1	100	1	5	1.00
2.24.01.2.03,0005	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	1	1	0.00
2.24.01.2.03,0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	1	1	0.00
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	3	1	1	100	1	5	0.83
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10	3	1	1	100	1	5	0.50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	650	260	0	0	0	1	261	0.40
2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52	601	12	12	100	12	625	12.02
2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelaatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	30	0	0	0	50	80	80.00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	24	8	8	100	8	40	1.00
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90	33	1	1	100	1	35	0.39
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	320	151	1	0	0	8	159	0.50
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165	98	1	1	100	1	100	0.61
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	411960	164784	1	1	100	1	164786	0.40
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	29900	15160	1	1	100	1	15162	0.51
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	10	1	1	100	1	12	2.00
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1224	600	200	200	100	200	1000	0.82
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9000	4500	1	1	100	1	4502	0.50
2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	1	1	100	1	3	0.00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	36	12	12	100	12	60	1.00
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720	144	1	1	100	1	146	0.20
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	36	1	1	100	12	49	0.68

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	36	13	13	100	12	61	0.85
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1090	654	218	218	100	218	1090	1.00
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	13	4	4	100	6	23	0.96
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	18	6	6	100	12	36	1.00
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1060	708	206	206	100	206	1120	1.06
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	14	2	2	100	4	20	1.54
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	46.98	26.29	32.08	32.86	102	42.34	42.34	1.54
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.64	1.26	1.26	1.26	100	2.18	2.18	2.54
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	234	132	48	48	100	48	228	0.97
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :Information Technology Service Management)	2	4	2	2	100	2	8	4
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590	46090	46590	46590	100	46590	139270	2.99
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	4	1	1	100	2	7	1.17

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150	102	34	34	100	100	236	1.57
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan PadaSatuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8	13	3	3	100	12	28	3.50
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	14	2	2	100	6	22	1.38
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	15	12	2	2	100	7	21	1.40
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1250	750	250	250	100	300	1300	1.04
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	25	15	5	5	100	5	25	1.00
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	12	4	4	100	4	20	1.00
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8	3	1	1	100	12	16	2.00
2.23.02.2.02.0004	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10	6	2	2	100	12	20	2.00
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	18	6	3	3	100	3	12	0.67

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan								
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	15	9	3	3	100	3	15	1.00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100	40%	40%	40%	100	80%	80	0.80
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	25	10	5	5	100	5	20	0.80
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25	10	5	5	100	5	20	0.80
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	9	4	2	2	100	200	206	22.89
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1500	900	300	300	100	300	1500	1.00
2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1648	900	300	300	100	200	1400	0.85
2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	1500	900	300	300	100	200	1400	0.93
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100	100
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101	2000	60.101	60.101	100	60.101	2120	0.03
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10137	1000	1	1000	100	1	2001	0.20
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	57964	1000	1	1000	100	1	2001	0.03
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	58	20	4	4	100	4	28	0.48

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24500	24	24	24	100	24000	24048	0.98
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		24500	24	24000	24000	100	25000	49024	2.00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	58	58	58	100	58	174	3.00
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1800	300	5	5	100	4	309	0.17
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100	50	65	65	100	95	210	2.10
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	5000	1000	1	1000	100	1	2001	0.40
2.24.03.2.01.0001	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000	2000	1000	1000	100	1000	4000	0.80
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	2100	500	500	500	100	500	1500	0.71
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2100	500	500	500	100	0	1000	0.48
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	5000	1000	1	1000	100	1	2001	0.40
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500	1500	500	500	100	2	2002	0.80

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500	1000	500	500	100	500	2000	0.80
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	2100	500	500	500	100	500	1500	0.71
2.24.03.2.04.0002	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3500	1500	500	500	100	500	2500	0.71
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	2500	500	500	500	100	500	1500	0.60
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	2500	1000	500	500	100	500	2000	0.80
2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	51	24	12	12	100	12	48	0.94
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan daftar dan Penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	51	24	12	12	100	12	48	0.94

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan), *Output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang mengambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
- Indikator Keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik;
- Indikator Hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan *input* sebaiknya untuk mendapatkan *output* secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, seberapa besar *output* akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena *output* merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian atau penilaian.

Ditambahkan lagi dengan seluruh Program/kegiatan ditahun 2026 belum dapat diidentifikasi dikarenakan sedang berjalan dan seperti biasa tentunya sedikit ada perubahan-perubahan di pertengahan tahun. Melihat kondisi yang ada ini maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya menjabarkan Program kerja yang sedang berjalan atau dalam proses pengerjaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Analisis Kinerja *Output*

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 6 (enam) program dan 20 (dua puluh) kegiatan di tahun 2024 hasil realisasi keseluruhan diangka 90,60% (sembilan puluh koma enam puluh persen). Hal ini tentu merupakan proses pekerjaan yang sangat baik. Dalam hal ini pula tentunya program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nanti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sejalan dengan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan termaktud dalam RKPD di tahun 2026. diharapkan pula tentunya ada peningkatan dan perbaikan-perbaikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersungguh- sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Analisa keuangan disini sama halnya dengan analisa kinerja *output*, artinya pengukuran serapan anggaran keuangan yang dituangkan dalam kegiatan belum dapat diketahui dengan jelas, maka dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengambil perbandingan tahun sebelumnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja PelayananDinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	62.50	63.30	63.50	64.00	52.50	62.52	68.17	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah melebihi target
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah		Persentase PD yang menerapkan Pengelolan arsip kategori B	50.00	75.00	100.00	100.00	50.00	83.92	93.22	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah melebihi target
3	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat	14	15	16	17	20.15	56.94	62.52	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah melebihi target
4	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional		Tingkat Ketersediaan Arsip	85.00	90.00	95.00	100.00	75.00	75.00	83.05	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 kurang tercapai karena salah satu instrumen perhitungannya tidak memenuhi target

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya *cakupan OPD yang menerapkan tingkat ketersediaan arsip* terlihat dari target Renstra PD dan kemudian dijabarkan dengan realisasi capaian dimana untuk tahun 2024 target Renstra sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dengan realisasi capaian sebesar 83,05 % (delapan puluh tiga koma nol lima persen) dimana hal tersebut belum memenuhi target renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk tahun 2025 sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dan diharapkan realisasi untuk tahun 2025 bisa tercapai sesuai target dari Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat target Renstra sebesar 15 (lima belas) realisasi capaian sebesar 62,52 % (enam puluh dua koma lima puluh dua persen) dimana hal tersebut sudah memenuhi target Renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun tingkat pelayanan dengan parameter pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya Program kegiatan tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan fasilitas perpustakaan yang lebih baik dari tahun berjalan seperti, *pembuatan kartu anggota, penelusuran buku dengan komputerisasi* dan efektifnya perpustakaan keliling serta perpustakaan digital (ikukar).

Untuk proyeksi tahun 2025 dengan parameter pengunjung perpustakaan juga mengalami peningkatan, Melihat dari kondisi yang ada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meyakinkan adanya peningkatan yang lebih baik dari target yang ditentukan, dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia serta membuat inovasi-inovasi yang baru.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1) Permasalahan pokok urusan perpustakaan rendahnya budaya baca masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

merupakan permaslahan pokok yang terjadi pada urusan perpustakaan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja pembinaan dan pengelolaan perpustakaan serta belum optimalnya dilaksanakannya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Adapun yang menjadi masalah pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Akses: Perpustakaan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau koleksi yang diperlukan oleh pengguna karena keterbatasan dana atau kebijakan pengelolaan.
2. Kualitas Koleksi: Koleksi yang tersedia mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau minat pengguna, atau kualitasnya mungkin rendah.
3. Teknologi dan Sistem Manajemen Perpustakaan (SMP): Kekurangan dalam sistem manajemen perpustakaan atau kurangnya integrasi dengan teknologi modern bisa menjadi kendala. Ini bisa termasuk sistem katalog yang tidak efisien, perangkat lunak yang usang, atau infrastruktur IT yang kurang memadai.
4. Infrastruktur Fisik: Fasilitas fisik perpustakaan mungkin tidak memadai, termasuk ruang yang terlalu kecil, kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi yang cukup, atau kurangnya ruang untuk acara atau program.
5. Pengelolaan Koleksi: Koleksi mungkin tidak dikelola dengan baik, termasuk masalah seperti kurangnya pembaruan, inventarisasi yang tidak tepat, atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pengguna.
6. Kurangnya Promosi dan Pendidikan Pengguna: Pengguna mungkin tidak menyadari sumber daya atau layanan yang tersedia di perpustakaan, atau mungkin tidak tahu cara mengakses atau memanfaatkannya.
7. Kurangnya Keberlanjutan: Perpustakaan mungkin mengalami kesulitan keuangan atau keberlanjutan jangka panjang karena kurangnya pendanaan atau dukungan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Ketidaksetaraan Akses: Beberapa anggota masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses perpustakaan karena keterbatasan fisik atau keuangan, atau karena kurangnya aksesibilitas bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah.
9. Kurangnya Keterlibatan Komunitas Dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial: Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program perpustakaan atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa menjadi masalah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perpustakaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi pengguna.

2) Permasalahan Pokok Urusan Kearsipan

Masalah yang terkait dengan urusan kearsipan juga dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa akar permasalahan umum dalam pengelolaan arsip.

Adapun yang menjadi permasalahan pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kebijakan dan Prosedur: Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan arsip sangat penting. Kurangnya kebijakan yang tepat dan prosedur yang disusun dengan baik dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan arsip, termasuk masalah seperti penyimpanan yang tidak teratur, pemeliharaan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengakses arsip yang diperlukan.
2. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personel, atau infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola arsip dengan efektif dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kurangnya ruang penyimpanan yang memadai, kurangnya pelatihan staf, dan kurangnya perangkat lunak atau teknologi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang diperlukan.

3. Teknologi dan Sistem Manajemen Arsip (SMA): Teknologi yang usang atau kurangnya implementasi sistem manajemen arsip (SMA) yang tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur, mengelola, dan mengakses arsip dengan efisien. Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik atau tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah dalam pencarian dan pengambilan arsip.
4. Kurangnya Keterampilan dan Kesadaran: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan kurangnya keterampilan dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan arsip juga dapat menjadi masalah. Pelatihan yang kurang atau kurangnya kesadaran akan kebijakan dan prosedur yang ada dapat menyebabkan kesalahan atau kecenderungan untuk mengabaikan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip.
5. Penyimpanan Fisik yang Tidak Tepat: Penyimpanan arsip fisik yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, serta risiko kerusakan atau kehilangan arsip akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai (belum adanya depot arsip).
6. Masalah Kepatuhan dan Privasi: Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kebijakan privasi, seperti GDPR *(General Data Protection Regulation)* di Eropa, atau ketidakpatuhan terhadap standar-standar arsip yang diatur oleh lembaga pemerintah atau industri tertentu dapat menyebabkan risiko hukum dan reputasi bagi organisasi.
7. Masalah Penghapusan: Kebijakan penghapusan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten dapat menyebabkan penumpukan arsip yang tidak perlu, meningkatkan biaya penyimpanan, dan menyulitkan pengelolaan arsip secara keseluruhan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Perubahan Teknologi dan Kebutuhan Bisnis: Perubahan dalam teknologi atau kebutuhan bisnis dapat menyebabkan tantangan baru dalam pengelolaan arsip, termasuk integrasi data dari berbagai sumber atau format, serta kebutuhan untuk mengelola arsip digital dengan efektif.
9. Risiko Bencana: Kurangnya perencanaan mitigasi risiko bencana atau kurangnya langkah-langkah pemulihan bencana yang sesuai dapat meningkatkan risiko kehilangan arsip penting akibat bencana alam atau insiden lainnya.
10. Masalah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi: Kurangnya dukungan atau kesadaran dari puncak kepemimpinan, serta budaya organisasi yang tidak mendukung praktik pengelolaan arsip yang baik, juga dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, PD perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan arsip mereka, serta mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan praktik pengelolaan arsip dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian strategis program nasional/internasional, SPM dan MDGS.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045 : Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan, untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif ;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Adapun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masuk pada misi :

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

Dampak terhadap capaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional :

1. tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan/ tokoh nasional;
2. peningkatan gemar membaca;
3. meningkatkan penataan dan penguatan organisasi kearsipan;
4. penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
5. terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional;
6. penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
7. meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan;
8. peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis tik melalui perpustakaan digital;
9. peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar; dan
10. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :

- Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Kearsipan: Banyak organisasi atau individu yang kurang menyadari pentingnya kearsipan dan dampak positifnya terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Akibatnya, sering kali kurangnya dukungan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan kearsipan.
- Kurangnya Sumber Daya: Penyelenggaraan kearsipan membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang cukup. Tantangan ini dapat berupa keterbatasan anggaran untuk pelatihan staf, peralatan dan infrastruktur kearsipan yang memadai, serta kurangnya personel yang terlatih dalam manajemen arsip.
- Teknologi dan Sistem Informasi yang Usang: Banyak organisasi masih mengandalkan sistem kearsipan tradisional yang belum diperbarui atau diintegrasikan dengan teknologi informasi modern. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas, pengelolaan, dan keamanan arsip.
- Ruang Fisik yang Terbatas: Penyimpanan fisik arsip dapat menjadi masalah, terutama di organisasi yang memiliki ruang kantor terbatas. Keterbatasan ruang dapat menyebabkan kesulitan dalam menyimpan dan mengelola arsip secara efisien.
- Ketidakpatuhan Terhadap Kebijakan dan Standar Kearsipan: Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang kebijakan dan standar kearsipan yang berlaku dapat menyebabkan ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kehilangan atau penggunaan arsip yang tidak efisien.
- Kesulitan dalam Pengelolaan dan Retensi Data Elektronik: Dengan meningkatnya penggunaan data elektronik, organisasi sering kali menghadapi kesulitan dalam pengelolaan dan retensi data elektronik. Tantangan ini termasuk penentuan metode penyimpanan yang aman dan kebijakan retensi data yang efektif.
- Risiko Keamanan dan Privasi: Perlindungan terhadap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keamanan dan privasi data arsip sangat penting, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan *cyber*. Tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data arsip meliputi kebocoran data, akses yang tidak sah, dan penyalahgunaan data.

- Kehilangan dan Kerusakan Arsip: Kerusakan atau kehilangan arsip dapat terjadi karena berbagai faktor seperti bencana alam, kebakaran, banjir, atau kesalahan manusia. Tantangan ini menekankan perlunya strategi pemulihan bencana dan perlindungan arsip yang efektif.
- Keterbatasan dalam Aksesibilitas Informasi: Kearsipan yang tidak terorganisir dengan baik atau kurangnya metadata yang memadai dapat menghambat aksesibilitas informasi yang penting dan menghambat produktivitas organisasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam manajemen kearsipan, termasuk investasi dalam pelatihan staf, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan kebijakan yang jelas, dan pematuhan terhadap standar kearsipan yang berlaku.

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :

1. Keterbatasan Anggaran: Banyak perpustakaan mengalami keterbatasan anggaran, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperbarui koleksi, memperbaiki infrastruktur, atau menyediakan layanan tambahan.
2. Perubahan Teknologi: Perkembangan teknologi terus berubah dengan cepat, mempengaruhi cara orang mengakses dan menggunakan informasi. Perpustakaan harus terus mengikuti perkembangan ini untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna.
3. Perubahan Kebutuhan Pengguna: Kebutuhan pengguna perpustakaan dapat berubah seiring waktu. Perpustakaan harus mampu menyesuaikan layanan dan koleksinya untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang berkembang dari pengguna mereka.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Persaingan dengan Sumber Informasi Digital: Sumber informasi digital seperti internet dan platform daring menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi. Perpustakaan harus berinovasi dalam menyediakan nilai tambah yang berbeda untuk tetap relevan bagi pengguna.
5. Isu Literasi Informasi: Keterampilan literasi informasi menjadi semakin penting di era digital ini. Perpustakaan mungkin dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan literasi informasi di antara pengguna mereka.
6. Diversifikasi Kebutuhan Pengguna: Pengguna perpustakaan berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kebutuhan yang beragam. Menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan semua pengguna dapat menjadi tantangan tersendiri.
7. Aksesibilitas dan Inklusivitas: Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dan fasilitas mereka dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas dan kelompok-kelompok yang kurang mampu.
8. Pemeliharaan dan Pengembangan Koleksi: Memelihara koleksi perpustakaan yang relevan dan bermanfaat sambil menghadapi keterbatasan ruang dan anggaran merupakan tantangan tersendiri.
9. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan staf yang terlatih dan berkualitas menjadi kunci dalam penyelenggaraan perpustakaan yang efektif. Mengembangkan staf dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan modern juga merupakan tantangan.
10. Pengelolaan Data dan Privasi: Perpustakaan sering menyimpan informasi sensitif tentang pengguna mereka. Menjaga privasi dan keamanan data menjadi tantangan penting dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang holistik, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta kreativitas dan fleksibilitas dalam menjawab perubahan lingkungan yang dinamis.

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kelancaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Peluang Penyelenggaran Urusan Kearsipan :
  - Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahan dan pembangunan;
  - Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional memberi ruang yang lebih luas dalam penerapan teknologi dan informasi dalam rangka penyelenggaraan sistem dan simpul jaringan informasi kearsipan nasional; dan
  - Ketersediaan arsip yang *autentik* dan *relliable* merupakan keharusan dalam akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*.
- Peluang Penyelenggaran Urusan Perpustakaan :
  - Paradigma global (pola/pandangan umum) dalam penyelenggaraan informasi dan ilmu pengetahuan memberikan peluang bagi untuk melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat informasi, edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis teknologi informasi;
  - Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, dan melestarikan budaya setempat (*local culture*) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - Perpustakaan sebagai agen perubahan perlu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan kultural lainnya.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Kearsipan dan Perpustakaan

1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera menyusun dan menetapkan empat pilar instrumen pengelolaan arsip dinamis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Meminta Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB untuk menyediakan formasi Arsiparis bagi kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja kearsipan di lingkungannya;
3. Mendorong Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung penguatan kelembagaan, anggaran dan SDM Semua jenis perpustakaan agar peran dan fungsi perpustakaan dalam perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan sebagai hak masyarakat semakin maksimal;
4. Mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang perpustakaan agar penguatan literasi sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas SDM Indonesia Kutai Kartanegara yang termaktub dalam RPJPD Tahun 2025-2045 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memasukkan penguatan budaya literasi sebagai arah kebijakan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan revitalisasi dan pembangunan insfrastruktur fasilitas layanan perpustakaan sebgai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang didukung melalui skema pendanaan APBD setiap tahun.
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya penguatan budaya literasi masyarakat melalui

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengembangan perpustakaan dan diseminisasi bahan bacaan terapan dengan memanfaatkan TIK dan sarana dan prasarana lainnya secara luas, serta mendorong masyarakat terus melakukan gerakan sosial mendukung aktivitas pegiat literasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan harus mengarah pada upaya peningkatan literasi masyarakat dan tertib arsip di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara holistik, integratif dan spasial dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis tertib arsip.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Pelaksanaan rancangan Rencana Kerja 2026 tentu harus dengan tingkat analisa dan evaluasi yang komprehensif mulai dari telaahan terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan Renstra Pemerintah Daerah, model analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu apa yang didapat sesuai dengan tupoksi PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, melihat dari interprestasi yang ada maka untuk mendukung Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2026 perlu membuat rancangan awal RKPD. Tentunya dalam penyusunan Program kegiatan di tahun 2026, harus mengacu dari Renstra yang ada ditambah dengan masukan dari masyarakat.

Terhadap rancangan RKPD tahun 2026 yang telah disusun, sudah melalui hasil telaahan yang komprehensif dari pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,24,02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	23,466,718,194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	17,178,409,853	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	1,000,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	550,000,000	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150,000,000	
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50,000,000	
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100,000,000	
2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000	
2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Kukar	Pelaksanaan Pengumpulan Data	1 Data	250,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Kukar	Pelaksanaan Pengumpulan Data	1 Data	200,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Statistik Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah			Statistik Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah			
2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan	11,328,286,537	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan	12,881,510,628	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang	11,128,286,537	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	12,681,510,628	
2.24.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kukar	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	
2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	137,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	105,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.01.2.03,0005	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25,000,000	
2.24.01.2.03,0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	82,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	
2.24.01.2.03,0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1,075,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	45,000,000	
2.24.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	300,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	-	
2.24.01.2.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	375,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25 Orang	-	
2.24.01.2.06.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	400,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	45,000,000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 layanan	4,116,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 layanan	843,704,800	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1,516,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	350,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	167,509,800	
2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	181,195,000	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	550,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	180,000,000	
2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	90,000,000	
2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	-	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 laporan	4,110,431,657	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 laporan	2,572,694,425	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-	
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	586,091,705	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	586,091,705	
2.24.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,524,339,952	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,986,602,720	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kukar	Jumlah Barang Milik Daerah	132	1,700,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kukar	Jumlah Barang Milik Daerah	228	180,500,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40,500,000	
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40,000,000	
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	300,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	100,000,000	
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	800,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	-	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	46.98	14,100,000,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34	6,695,000,000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.54	3,750,000,000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7.24	2,035,000,000	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpusta-kaan	250,000,000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	100,000,000	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah	7 Perpusta-kaan	1,300,000,000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Perpustakaan	910,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 Layanan	250,000,000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	100,000,000	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	200,000,000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	75,000,000	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	300,000,000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	150,000,000	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,000,000	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	52965 Eksemplar	500,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	52965 Eksemplar	250,000,000	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	2 Dokumen	250,000,000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	1500 Dokumen	100,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Perpustakaan	500,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Perpustakaan	250,000,000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	10,350,000,000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	4,660,000,000	
2.23.02.2.02.0006	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	250,000,000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	60,000,000	
2.23.02.2.02.0007	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11 Perpustakaan	9,450,000,000	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21 Perpustakaan	150,000,000	
2.23.02.2.02.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	200,000,000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	4,200,000,000	
2.23.02.2.02.0009	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	300,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	150,000,000	
2.23.02.2.02.0010	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan	3 Orang	150,000,000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	3 Orang	100,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Didukung Kegiatannya					Dipilih dan Didukung Kegiatannya			
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	80%	1,050,000,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	60%	255,000,000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5 Naskah	600,000,000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5 Naskah	150,000,000	
2.23.03.2.01.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	200,000,000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	100,000,000	
2.23.03.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	130 Orang	400,000,000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	200 Orang	50,000,000	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300 Eksemplar	450,000,000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300 Eksemplar	105,000,000	
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksemplar	300,000,000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	200 Eksemplar	75,000,000	
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2000 Eksemplar	150,000,000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	200 Eksemplar	30,000,000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	2,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	450,000,000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101 Berkas	1,200,000,000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	64101 Berkas	300,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2000 Berkas	200,000,000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	50,000,000	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 Berkas	200,000,000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	50,000,000	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	800,000,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	200,000,000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24500 Arsip	400,000,000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24000	75,000,000	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	400,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	75,000,000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD	400,000,000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD	75,000,000	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	400,000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	75,000,000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100%	625,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95%	410,000,000	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kukar	Jum;lah arsipyang dilindungidan diselamatkan sesuai dengan NSPK	500 Berkas	100,000,000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kukar	Jum;lah arsipyang dilindungidan diselamatkan sesuai dengan NSPK	500 Berkas	50,000,000	
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi	500 arsip	100,000,000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi	500 arsip	50,000,000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1000 Arsip	150,000,000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1000 Arsip	75,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					
2.24.03.2.01.0004	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	150,000,000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	75,000,000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	1000 Berkas	200,000,000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	1000 Berkas	200,000,000	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	100,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	100,000,000	
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	100,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	100,000,000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100,000,000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	50,000,000	
2.24.03.2.04.0001	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100,000,000	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	75,000,000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	35,000,000	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	75,000,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	35,000,000	
2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	150,000,000	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	35,000,000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12 Arsip	150,000,000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12 Arsip	35,000,000	
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5 Arsip	150,000,000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5 Arsip	35,000,000	
					41,391,718,194					25,023,409,853	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program kegiatan diperoleh dari rapat keseluruhan bidang/sub bidang internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Setelah hasil dari rapat kerja dicapai kemudian dituangkan kedalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di tahun 2026. Untuk hal penelaahan usulan Program masyarakat kegiatan masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentu memiliki beberapa program kegiatan, khususnya tentang Program pembinaan perpustakaan yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sehingga hal tersebut menjadikan rujukan adanya penambahan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dapat masuk dan terwakilkan melalui Program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026, maka difinalisasi melalui Musrenbang di Kecamatan. Usulan Program/kegiatan dari masyarakat meliputi 21 (dua puluh satu) usulan pembangunan tempat/ gedung perpustakaan kelurahan/ desa dan 10 (sepuluh) usulan sarana prasarana perpustakaan digital guna menunjang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan usulan Program/kegiatan masyarakat sangat penting sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan berbudaya baca.

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut	1	Belum tersedianya sarana prasarana perpustakaan desa dimana sangat di butuhkan untuk anak-anak maupun warga setempat untuk menambah pengetahunan
		Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan digital bagi Desa/Kelurahan
		Desa Kersik Kecamatan Marang Kayu	1	Desa Kersik belum memiliki Sarana dan Prasarana perpustakaan digital
		Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman	1	Dibutuhkanya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan perpustakaan
		Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai	1	Bantuan Sapras Perpustakaan Digital Desa Kayu Batu
		Desa Perian Kecamatan Muara Muntai	1	Belum adanya perpustakaan di desa sehingga daya tarik dalam membaca juga kurang
		Kelurahan Sanga- sanga Dalam Kecamatan sanga-sanga	1	Bangunan Ada, Fasilitas Pendukung Belum Ada
		Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang	1	Pembangunan rumah digital di perpustakaan desa bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi digital
		Desa Rampak Lambur Kecamatan Tenggarong	1	Desa telah memiliki bangunan perpustakaan, namun masih memerlukan sarana prasarana guna menunjang perpustakaan digital
		Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Sebagai salah satu Desa terbaik dalam digitalisasi desa, Bhuana Jaya perlu mengembangkan potensi yang ada dengan mengadakan sarana dan prasarana perpustakaan digital desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		21	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun	1	Gedung Rusak Berat
		Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun	1	tidak ada perpustakaan desa
		Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	1	Belum ada gedung perpustakaan
		Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun	1	Belum ada Perpustakaan di Desa
		Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Gedung perpustakaan desa belum ada
		Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Belum memiliki perpustakaan desa. Melihat tingginya minat baca anak-anak dan masyarakat maka perpustakaan tersebut sangat diperlukan
		Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu	1	Belum ada gedung khusus untuk perpustakaan desa
		Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu	1	Tidak adanya perpustakaan menyebabkan literasi membaca sangat kurang. Terlebih jika terdapat perutakaan desa maka akan lebih meningkatkan IDM Desa
		Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu	1	Tidak ada Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan Sebagai Tempat/Sumber Layanan Informasi Utama adalah layanan informasi tentang kehidupan dan sejarah, layanan informasi umum, sebagai pusat belajar mengajar masyarakat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat
		Desa Kersik Kecamatan Marang Kayu	1	Belum Memiliki Gedung Perpustakaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak	1	Kondisi gedung sudah tua dan banyak kerusakan
		Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak	1	Sebagai tempat/sumber layanan informasi, tempat belajar masyarakan dalam meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat
		Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman	1	Kurang nya Sarana dan Prasarana Pendukung Kurang nya Perhatian Masyarakat akan efek rendah nya minat baca generasi muda
		Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis	1	Kuranganya tempat baca yang terbukan untuk masyarakat menjadikan masyarakat kurang minat untuk membaca yang tujauannya mempecerdas baca masyarakat
		Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat	1	Belum tersedianya gedung perpustakaan untuk minat baca di lingkungan kelurahan
		Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga	1	Kurangnya Fasilitas Umum yaitu Pembangunan Perpustakaan
		Desa Giri Agung Kecamatan Muara Kaman Sebulu	1	Untuk meningkatkan Perpustakaan Desa Giri Agung perlu Bangunan gedung Perpusytakaan Desa Giri Agung yang standar maksimal guna dapat menampung Koleksi dan Pengunjung lebih banyak dan menjadi referensi pengetahuan masyarakat dan Pelajar yang ada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang	1	Dana yang tersedia Tidak Mencukupi untuk melakukan pembangunan
		Desa Bukit Biru Kecamatan Tenggarong	1	Belum ada tersedianya gedung perpustakaan
		Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah harus diperjuangkan dengan maksimal. termasuk pembangunan perpustakaan desa
		Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu	1	Pembangunan rumah digital di perpustakaan desa bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi digital

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan implikasi kepada Daerah untuk melaksanakan pendekatan baru dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah akan dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai lembaga kearsipan Daerah dan sebagai penyelenggara perpustakaan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan di Daerah dan peningkatan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam pengelolaan dan penataan kearsipan dalam gerakan nasional sadar tata arsip (GNSTA) telah menjadi inspirasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam memprioritaskan pengelolaan dan penataan arsip Daerah, sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam meningkatkan nilai budaya baca masyarakat melalui gerakan literasi untuk kesejahteraan telah memberi semangat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat serta layanan literasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan (Pasal 1 Angka 49 Permendagri 86/2017). Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kutai Kartanegara Misi 1 “Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan dan sasaran urusan Perpustakaan yang ingin dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ PD yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD (Pasal 1 Angka 50 Permendagri 86/2017).

Sesuai dengan Misi ke-3 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Kutai Kartanegara Misi 3 “Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan dan sasaran urusan kearsipan yang ingin dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tujuan	:	meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan kualitas tata kelola pengarsipan Daerah;
Indikator	:	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;
Indikator	:	nilai tingkat kegemaran membaca (TGM);
Sasaran	:	meningkatnya ketersediaan arsip yang akuntabel;
Indikator	:	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja;
Sasaran	:	meningkatnya kesadaran literasi masyarakat; dan
Indikator	:	indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mencerminkan Rencana Kerja dan kegiatan dalam rangka mencapai misi tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025-2029. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan perencanaan untuk pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitas yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran strategis akan dijadikan parameter/tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran dan pendanaan kegiatan maupun Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi melalui :

   Program pembinaan perpustakaan dengan kegiatan :

   - pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota;
   - pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

   Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan kegiatan:

   - pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota;
   - pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional melalui :

   program pengelolaan arsip dengan kegiatan :

   - pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota;
- pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.

program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan kegiatan :

- pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota;
- penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan;
- autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota;
- pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang.

Program perizinan penggunaan arsip dengan kegiatan :

- pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota.

Serta program penunjang yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, antara lain sebagai berikut :

program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan:

- perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- administrasi keuangan perangkat daerah;
- administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- administrasi umum perangkat daerah;
- penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Rincian Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakanan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustkaaan Tahun 2026

Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Data Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9
2,24,02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kukar	74	17,178,409,853		73.5	23,466,718,194
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	11	550,000,000		11	1,000,000,000
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	3 Dokumen	150,000,000		3 Dokumen	450,000,000
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	3 Laporan	50,000,000		3 Laporan	50,000,000
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	2 Laporan	100,000,000		2 Laporan	150,000,000
2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kukar	1 Data	200,000,000		1 Data	250,000,000
2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Kukar	-	-		1 Berita Acara	50,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kukar	5	12,881,510,628		14	11,328,286,537
2.24.01.2.02,0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	85 orang/bulan	12,681,510,628		85 orang/bulan	11,128,286,537
2.24.01.2.02,0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kukar	1 Dokumen	-		1 Dokumen	
2.24.01.2.02,0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	1 Laporan	25,000,000		1 Laporan	25,000,000
2.24.01.2.02,0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kukar	12 Laporan	150,000,000		12 Laporan	150,000,000
2.24.01.2.02,0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kukar	1 Laporan	105,000,000		3 Laporan	137,000,000
2.24.01.2.03,0005	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	1 laporan	25,000,000		1 laporan	25,000,000
2.24.01.2.03,0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	1 Laporan	50,000,000		1 Laporan	82,000,000
2.24.01.2.03,0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	1 Laporan	30,000,000		1 Laporan	30,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kukar	2 laporan	45,000,000		2 laporan	1,075,000,000
2.24.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kukar	1 Paket	-		1 Paket	300,000,000
2.24.01.2.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kukar	25 Orang	-		25 Orang	375,000,000
2.24.01.2.06.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	130 Orang	45,000,000		130 Orang	400,000,000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	8 layanan	843,704,800		9 Laporan	4,116,000,000
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	75,000,000		1 Paket	200,000,000
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	-		1 Paket	1,516,000,000
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	100,000,000		1 Paket	400,000,000
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	1 Paket	50,000,000		1 Paket	150,000,000
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kukar	1 Dok	167,509,800		1 Dok	350,000,000
2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kukar	1 Paket	181,195,000		1 Paket	400,000,000
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	350 Laporan	180,000,000		350 Laporan	550,000,000
2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	1 Dok	90,000,000		1 Dok	250,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	-	-		1 Dok	300,000,000
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kukar	12 laporan	2,572,694,425		12 laporan	4,110,431,657
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	-	-		-	-
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kukar	12 Laporan	586,091,705		12 Laporan	586,091,705
2.24.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kukar	12 Laporan	1,986,602,720		12 Laporan	3,524,339,952
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kukar	228	180,500,000		140	1,700,000,000
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kukar	6 Unit	40,500,000		6 Unit	300,000,000
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kukar	6 Unit	40,000,000		6 Unit	300,000,000
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kukar	120 Unit	100,000,000		120 Unit	300,000,000
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kukar	8 Unit	-		8 Unit	800,000,000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Kukar	46.98	6,695,000,000		11.09	7,350,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Kukar	2.54	2,035,000,000		7.88	3,450,000,000
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	3 Perpustakaan	100,000,000		3 Perpustakaan	250,000,000
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kukar	7 Perpustakaan	910,000,000		5 Perpustakaan	1,000,000,000
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kukar	48 layanan	100,000,000		48 layanan	250,000,000
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	6 Perpustakaan	75,000,000		6 Perpustakaan	200,000,000
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	100 Orang	150,000,000		100 Orang	300,000,000
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	2 Dokumen	100,000,000		2 Dokumen	200,000,000
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kukar	52965 Eksemplar	250,000,000		52965 Eksemplar	500,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	1500 Dokumen	100,000,000		1500 Dokumen	250,000,000
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kukar	2 Perpustakaan	250,000,000		2 Perpustakaan	500,000,000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kukar	5 kali	4,660,000,000		5 kali	3,900,000,000
2.23.02.2.02.0006	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kukar	4 Lokus	60,000,000		4 Lokus	250,000,000
2.23.02.2.02.0007	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	11 Perpustakaan	150,000,000		6 Perpustakaan	3,000,000,000
2.23.02.2.02.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kukar	12 Orang	4,200,000,000		12 Orang	200,000,000
2.23.02.2.02.0009	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	3 Perpustakaan	150,000,000		3 Perpustakaan	300,000,000
2.23.02.2.02.0010	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kukar	3 Orang	100,000,000		3 Orang	150,000,000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	kukar	100%	255,000,000		100	1,050,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	Kukar	5 Naskah	150,000,000		36	600,000,000
2.23.03.2.01.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kukar	5 Eksemplar	100,000,000		5 Eksemplar	200,000,000
2.23.03.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	200 Orang	50,000,000		200 Orang	400,000,000
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Kukar	300 Eksemplar	105,000,000		6553	450,000,000
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kukar	200 Eksemplar	75,000,000		2000 Eksemplar	300,000,000
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kukar	200 Eksemplar	30,000,000		2001 Eksemplar	150,000,000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	Kukar	100	450,000,000		100	2,000,000,000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Kukar	64101 Berkas	300,000,000		493685 Berkas	1,200,000,000
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kukar	1000 Berkas	50,000,000		1000 Berkas	200,000,000
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kukar	50 Berkas	50,000,000		1000 Berkas	200,000,000
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	1 Laporan	200,000,000		1 Laporan	800,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Kukar	24000	75,000,000		60779	400,000,000
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kukar	50 Arsip	75,000,000		50 Arsip	400,000,000
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kukar	58 OPD	75,000,000		59 OPD	400,000,000
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	2 Laporan	75,000,000		7 Laporan	400,000,000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	Kukar	100	410,000,000		100	625,000,000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jum;lah arsipyang dilindungidan diselamatkan sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Arsip	50,000,000		500 Arsip	100,000,000
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikas	Kukar	500 arsip	50,000,000		500 Arsip	100,000,000
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Kukar	1000 Arsip	75,000,000		500	150,000,000
2.24.03.2.01.0004	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	500 Arsip	75,000,000		500 Arsip	150,000,000
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	Kukar	1000 Berkas	200,000,000		501	200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kecamatan dan Desa/Kelurahan							
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	1 Daftar	100,000,000		1 Daftar	100,000,000
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500 Arsip	100,000,000		500 Arsip	100,000,000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Arsip	50,000,000		500 Arsip	100,000,000
2.24.03.2.04.0001	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	500 Arsip	50,000,000		500 Arsip	100,000,000
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Arsip	35,000,000		1 berkas	75,000,000
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kukar	500 Arsip	35,000,000		1 Daftar	75,000,000
2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Kukar	100%	35,000,000		100%	150,000,000
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/ kota	Kukar	12 Arsip	35,000,000		43 Arsip	150,000,000
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	5 Arsip	35,000,000		10 Arsip	150,000,000
					25,023,409,853			34,641,718,194

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kukar	10	1,300,000,000	Mengakomodir hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah tentang pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital	5	1,000,000,000
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kukar	48	250,000,000		48	250,000,000
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	6	200,000,000		6	200,000,000
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	100	300,000,000		100	300,000,000
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kukar	2	200,000,000		2	200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kukar	52,965	500,000,000		52,965	500,000,000
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	1500	250,000,000		1500	250,000,000
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Kukar	2	500,000,000		2	500,000,000
	2.23.02.2.02	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kukar	5	10,350,000,000		5	3,900,000,000
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kukar	3	150,000,000		3	150,000,000
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kukar	3	300,000,000		3	300,000,000
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	21	9,450,000,000	Mengakomodir hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah tentang pembangunan gedung perpustakaan desa/kelurahan	6	3,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kukar	12	200,000,000		12	200,000,000
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kukar	4	250,000,000		4	250,000,000
2	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Kukar	100	1,050,000,000		100	1,050,000,000
	2.23.03.2.01	*Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Naskah Kuno	Kukar	36	600,000,000		41	600,000,000
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kukar	200	400,000,000		200	400,000,000
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	5	200,000,000		5	200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.23.03.2.02	*Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Kukar	6553	450,000,000		8553	450,000,000
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	2000	300,000,000		2000	300,000,000
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	2000	150,000,000		2000	150,000,000
3	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	Kukar	100	2,000,000,000		100	2,000,000,000
	2.24.02.2.01	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Kukar	493685	1,200,000,000		493685	1,200,000,000
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kukar	100000	200,000,000		100000	200,000,000
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kukar	100000	200,000,000		100000	200,000,000
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	1	800,000,000		1	800,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.02.2.02	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Kukar	60779	400,000,000		60829	400,000,000
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kukar	50	400,000,000		50	400,000,000
	2.24.02.2.03	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah OPD yang memasukan arsip dalam dalam SIKN melalui JIKN	*Kukar*	59	400,000,000		59	400,000,000
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	7	400,000,000		7	400,000,000
4	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Kukar	100	625,000,000		100	625,000,000
	2.24.03.2.01	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Kukar	500	150,000,000		500	150,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	500	150,000,000		500	150,000,000
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai NSPK		500	100,000,000		500	100,000,000
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.03	*Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	Jumlah arsip yang diselamatkan dengan NSPK	Kukar	501	200,000,000		501	200,000,000
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	1	100,000,000		1	100,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.04	*Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.05	*Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	Jumlah arsip statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Kukar	1	75,000,000		1	75,000,000
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kukar	1	75,000,000		1	75,000,000
5	2.24.00	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Kukar	100	150,000,000		100	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.04.2.01	*Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	kukar	43	150,000,000		53	150,000,000
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	10	150,000,000		10	150,000,000
6	2.24.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kukar	73.5	23,466,718,194		74	23,466,718,194
	2.24.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kukar	*11*	*1,000,000,000*		*11*	*1,000,000,000*
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	3	450,000,000		3	450,000,000
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	3	50,000,000		3	50,000,000
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	2	150,000,000		2	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	1	50,000,000		1	50,000,000
	2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kukar	1	250,000,000		1	250,000,000
	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	1	50,000,000		1	50,000,000
	2.24.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	Kukar	*14*	*11,328,286,537*		*14*	*11,328,286,537*
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kukar	*85*	*11,128,286,537*		*85*	*11,128,286,537*
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	1	25,000,000		1	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kukar	12	150,000,000		12	150,000,000
	2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	1	25,000,000		1	25,000,000
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	Kukar	*3*	*137,000,000*		*3*	*137,000,000*
	2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	*1*	*25,000,000*		*1*	*25,000,000*
	2.24.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	*1*	*82,000,000*		*1*	*82,000,000*
	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	1	30,000,000		1	30,000,000
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kukar	*2*	*1,075,000,000*		*2*	*1,075,000,000*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kukar	1	300,000,000		1	300,000,000
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kukar	25	375,000,000		25	375,000,000
	2.24.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	130	400,000,000		130	400,000,000
	2.24.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kukar	*9*	*4,116,000,000*		*9*	*4,116,000,000*
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kukar	1	200,000,000		1	200,000,000
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	1	1,516,000,000		1	1,516,000,000
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kukar	1	400,000,000		1	400,000,000
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	1	150,000,000		1	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kukar	1	350,000,000		1	350,000,000
	2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kukar	1	400,000,000		1	400,000,000
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	350	550,000,000		350	550,000,000
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	1	250,000,000		1	250,000,000
	2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	1	300,000,000		1	300,000,000
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	Kukar	12	4,110,431,657		12	4,110,431,657
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	0	-		0	-
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kukar	12	586,091,705		12	586,091,705

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kukar	12	3,524,339,952		12	3,524,339,952
	2.24.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	Kukar	*140*	*1,700,000,000*		*140*	*1,700,000,000*
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kukar	6	300,000,000		6	300,000,000
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kukar	6	300,000,000		6	300,000,000
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kukar	120	300,000,000		120	300,000,000
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kukar	8	800,000,000		8	800,000,000
JUMLAH						41,391,718,194			34,641,718,194

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Prioritas Program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun anggaran 2026 adalah kegiatan atau subkegiatan yang mendukung digitalisasi layanan dibidang perpustakaan dan kearsipan. Juga sebagai upaya jawaban atas tuntutan zaman atas teknologi dan informasi sudah selayaknya jika digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan harus segera diwujudkan. Tetapi jika ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan demi terwujudnya digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, Program, kegiatan dan subkegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini terdapat analisis kebutuhan dana/anggaran yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 6 (enam) Program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan/sub kegiatan. O*utput* dan *outcome* yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Daerah. Adanya Rencana Kerja yang terukur diharapkan target capaian indikator kinerja kunci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 ini dapat tercapai. Dalam pencapaian target juga harus didukung penuh dengan dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan Daerah dan gerakan budaya baca masyarakat serta menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, PD menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada RKPD, Rencana Strategis (Renstra) PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 ini disusun secara bersinergi dan terintegrasi antara prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

Renja-PD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai salah satu PD yang bertugas membantu Bupati

dalam perumusan kebijakan Daerah terkait kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya dengan harga yang terjangkau.

Sebagai dokumen rencana tahunan PD, maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Program Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan Dinas Ketahanan Pangan untuk memasukkan Program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun 2026.
3. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra PD.
3. Program/kegiatan dalam Renja-PD harus selaras dengan Program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program/kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran *(output),* indikator kinerja hasil *(outcome)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan KeuanganDaerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045
16. Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan; dan
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan Ketahanan Pangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 mempunyai tujuan :

a. memberikan acuan Dinas Ketahanan Pangan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya.
b. merumuskan Program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan selama tahun anggaran 2026.
c.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan t ahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar subsantsi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunanRAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturanpemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal Renja-PD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunannasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan sasaran PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Renstra-PD.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan.
3) Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan Program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, serta hambatan danpermasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan pada APBD perubahan dianggarkan sebesar Rp29.397.030.598,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp26.331.694.504,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat rupiah) atau 89,57% (delapan puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen), dari total alokasi yang ada. Pagu Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Realisasi Anggaran tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai Sakip)	12.492.237.462,00	10.608.929.584,00	84,92
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung) Sesuai Kebutuhan)	5.200.000.000,00	5.036.192.280,00	91,98
3.	Meningkatnya Skore Pola Panga Harapan	Konsumsi Energi dan protein Perkapita (Skore PPH Konsumsi)	8.650.000.000,00	8.093.339.806,00	94,59
		TOTAL	26.269.272.863,00	24.582.064.568,00	89,57

Evaluasi Hasil Pelaksanatan Rencana Kerja serta Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2 (TC 29) sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1	Bidang Ketahanan Pangan									
0,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	66,94	**79**	66,94	**84,73**	**80**	**80**	**98,77**
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80	55 Dokumen	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**100,00**	**16 Dokumen**	**55 Dokumen**	**68,75**
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	18 Dokumen	60,00
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	25	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	25 laporan	100,00
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	25 laporan	100,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						1 Data	1 Data	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00
000.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	60	48 Dokumen	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100,00**	**12 Laporan**	**60 Laporan**	**100,00**
000.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270	214 Orang Bulan	56 Orang/bulan	52 Orang/bulan	92,86	56 Orang/bulan	270 Orang/Bulan	100,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100,00
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60	48 Laporann	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	100,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
000.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	60	48 Dokumen	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100,00**	**12 Laporan**	**60 Laporan**	**100,00**
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 laporan	1 laporan	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**10.000,00**	7000 dokumen	2000 Dokumen	**2000 Dokumen**	**100,00**	2000 Dokumen	**9000 Dokumen**	**90,00**
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	**1 Dokumen**	**100,00**	1 Dokumen	2 Dokumen	**100,00**
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**		122 Unit	18 Unit	18 Unit	**100,00**	104	226	**100,00**
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	**100,00**
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	**100,00**
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						100 Unit	100 Unit	**100,00**
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		122 Unit	18 Unit	18 Unit	100,00	0	**122**	**100,00**
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	**100,00**
000.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	60	48 Bulan	**12 Bulan**	12 Bulan	**100,00**	**12 Bulan**	60 Bulan	**100,00**
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 laporan	1 laporan	100,00
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	48 Laporann	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	100,00
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**100,00**	6 Dokumen	12 Dokumen	**100,00**
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						170 Paket	170 Paket	**100,00**
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	**100,00**
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00	25 Orang	45 Orang	**100,00**
000.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	60	36 Bulan	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00**	**12 Bulan**	**50 Bulan**	**83,33**
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**10,00**	7 Paket	1 paket	**1 Paket**	**100,00**	2 Paket	**9 Paket**	**90,00**
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**10 Paket**	12 Paket	4 Paket	**4 Paket**	**100,00**	1 Paket	**13 Paket**	**100,00**
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**15 Paket**	12 Paket	3 Paket	**2 Paket**	**66,67**	1 Paket	**13 Paket**	**86,67**
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1250,00**	910 Laporan	250 Laporan	**200 Laporan**	**80,00**	120 Laporan	**1120 Laporan**	**89,60**

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	16 Laporann	4 Laporan	4 Laporan	100,00	12 Laporan	28 Laporan	**60,00**
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	**100,00**
000.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang***	150	118 Unit	**30**	**30**	**100,00**	**30 Unit**	**148**	98,67
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	6 Unit	2 Unit	0	-	2 Unit	8 Unit	80,00
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	112 Unit	28 Unit	27 Unit	96,43	28 Unit	140	100,00
2,9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	49	35 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00	11 Unit	46 Unit	93,88
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	*Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	49	35 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00	11 Unit	46 Unit	93,88
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	33	33 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00	15 unit	48	100,00
2.09.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisai Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	16	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	5 Unit	16	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	2225 Kkal/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari	2150 Kkal/Kap/Hari	2021 Kkal/Kap/Hari	94,00	1970 Kkal/Kap/Hari	2021 Kkal/Kap/Hari	94,00
		Kecukupan Konsumsi Protein	57,25 Gram/Kap/Hari	61,4 Gram/Kap/Hari	57 Gram/Kap/Hari	65,1 Gram/Kap/Hari	114,21	61,4 Gram/Kap/Hari	65,10 Gram/Kap/Hari	114,21
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	<5	5	4,5	90,00	5	5	100,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan						2 unit	2 unit	100,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						100 keluarga	100 keluarga	100,00
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10	2 lapopran	2 laporan	2 laporan	100,00	7 laporan	9 Laporan	90,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal						4 Laporan	4 Laporan	100,00
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50,00	2 Unit	4 Unit	80,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	10	5 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	50,00	2 Dokumen	7 Dokumen	70,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	10	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	6 Dolumen	60,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Tersebar 18 Kecamatan**	250	308 Ton	125 Ton	121,5 Ton	97,20	150 Ton	316 Ton	126,40
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250	318 Ton	150 ton	121,5 Ton	102,67	150 ton	316 ton	126,40

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Ton	53 Ton					53 Ton	100,00
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	**Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan**	150 Kelompok	93 Kelompok	23 Kelompok	23 Kelompok	100,00	32 Kelompok	125 Kelompok	83,33
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	8 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 dokumen	100,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150	93 Laporann	23 laporan	23 laporan	100,00	32 Laporan	125 Laporan	83,33
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	20,00	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	20 Laporan	100,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	25,00	43 Desa	19 Desa	19 Desa	100,00	19 Desa	62 Desa	172,00
2.09.04.2.01	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	4,00	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 dokumen	100,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta analisis Ketahanan dan kerentanan Pangan (Peta FSVA)	4,00	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 dokumen	100,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Berkurangnya Jumlah Desa Yang Terindikasi Rawan pangan	25,00	43 Desa	5 Desa	19 Desa	380,00	5,00	39 Desa	156,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	45 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100,00	21 Dokumen	39 Dokumen	156

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	2 laporan	10 laporan	100
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**	95	95,35	91	95,35	104,78	91	95,35	**104,78**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Keamanan Pangan Segar**	95	97	89,00	97	108,99	95,00	97,00	**102,11**
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	20 Dokumen	40 Dokumen	**100,00**
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	20 Dokumen	21 Dokumen	**100,00**
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	12 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100,00	1 Dokumen	13 Dokumen	**100,00**
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	20 Laporan	21 Dokumen	**100,00**
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20 Dokumen	13 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	8 Dokumen	21 Dokumen	**105,00**
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk sertifikasi	4 Sertifikat	2 Sertifikat				1 Sertifikat	1 Sertifikat	**75,00**
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari hasil evaluasi terhadap tabel TC 29 diatas, diketahui bahwa masih terdapat Program dan kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja/keluaran. Dan beberapa kegiatan capaian kinerjanya telah melebihi target yang di tetapkan, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Dari 5 Program yang ada pada dinas ketahanan pangan terdapat satu Program yang belum mencapai target yang telah di tetapkan, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat, untuk indikator kecukupan konsumsi energi masih belum tercapai, dari target yang ditetapkan sebesar dengan indikator angka kecukupan energi 2150 Kkal/Kap/Hari tercapai sebesar 2021 Kkal/Kap/Hari = 94,00 % (sembilan puluh empat persen).
2. Dari 13 (tiga belas) kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang belum tercapai target yang di tetapkan, yaitu kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan kabupaten/kota. Dari target yang ditetapkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit sampai dengan akhir periode Renstra baru tercapai sebanyak 46 (empat puluh enam) unit, untuk itu perlu dilakukan percepatan dan penambahan anggaran untuk dapat merealisasikan target sampai dengan akhir periode Renstra.
3. Dengan tidak tercapainya target tahunan yang ditetapkan, maka harus dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun anggaran berikutnya.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tidak tercapainya target, adanya penganggaran untuk memberikan sosialisasi secara lebih luas tentang konsumsi pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), serta tambahan anggaran untuk penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan untuk pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan perjanjian kinerja pada tahun 2024, indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan telah ditentukan target dan cara pengukurannya sebagaimana tabel 3 berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	Total Skore Hasil penilaian Dari Tim Inspektorat Kabupaten
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah	1. Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	134	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita Pertahun)x 100%
	2.Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Score	98,59	Dihitung menggunakan data ketersedian energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat.
	3. Ketersediaan Energi dan Proten Perkapita - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein	 Kkal/kap/ hari Gram/kap/ hari	 2458 80,20	Dihitung Melalui Perhitungan Neraca Bahan Makanan
Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi.	Skore	86	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024, masih terdapat indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

- persentase ketersediaan pangan utama (beras/ jagung sesuai kebutuhan) dari target yang ditetapkan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) hanya tercapai 102,95% (seratus dua koma sembilan puluh lima persen).
- skor pola pangan harapan ketersediaan, dari target yang ditetapkan sebesar 98,59 (sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan) tercapai 94,12 (sembilan puluh empat koma dua belas).

Meskipun ada indikator yang tingkat capaian kinerjanya masih di bawah 100 (seratus) dalam arti target kinerja tidak tercapai, tetapi tingkat capaian kinerja sudah termasuk dalam kategori Baik (diatas 90%). Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 4 dibawah ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	Nilai	78	88,89	113,96	79	66,94	84,73	Menurun
Meningkatkan Ketersedaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	130	118,46	91,12	134	102,95	76,83	Menurun
	Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skore	97,89	92,83	94,83	98,59	94,20	95,47	Menurun
	Ketersediaan energi dan protein Perkapita								
	- Ketersediaan Energi	Kkal/Kap /Hari	2378	2779	116,86	2458	2546	103,58	Menurun
	Ketersediaan Protein	Gram/ Kap/Hari	79,81	104,4	130,81	80,20	84,77	105,70	Menurun
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Desa	5	44	880	20	20	100	Meningkat
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	Persen	91	98	107,69	95	97	102,11	Meningkat
Meningkatnya Skore Pola Pangan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	Skore	84	88,46	105,31	86	93,80	109,07	Meningkat

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan sebagaimana tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras).
   a. Persentase ketersediaan pangan utama (beras/ jagung sesuai kebutuhan).

      Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 mencapai 102,95% (seratus dua koma sembilan puluh lima persen) dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada kelebihan sebanyak 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) dari kebutuhan. Pada tahun 2024 target indikator ketersediaan pangan utama sebesar 137% (seratus tiga puluh tujuh persen) tercapai sebesar 102,95% (seratus dua koma sembilan puluh lima persen) dengan persentase capaian sebesar 76,83% (tujuh puluh enam koma delapan puluh tiga persen).

      Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 untuk ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan sebesar 15,51% (lima belas koma lima puluh satu persen) dimana capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 118,46% (seratus delapan belas koma empat puluh enam persen).

   b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

      Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 98,59 (sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan). Sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar 94,12 (sembilan puluh empat koma dua belas) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen).

      Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen), dimana pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 94,83% (sembilan puluh empat koma delapan puluh tiga persen).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi tahun 2024 sebesar 93,80 (sembilan puluh tiga koma delapan puluh) dari target tahun 2024 sebesar 88,00 (delapan puluh delapan) atau dengan capaian sebesar 109,07% (seratus sembilan koma nol tujuh persen). Secara Rinci Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Tahun2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 30 (Tabel 5) berikut ini :

Tabel : T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)			129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	118,46	**102,95**	110,00	110,00	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya 118
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan)			96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	92,83	94,12	94,12	94,12	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya kisaran 92 - 93
3	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita :												Indikator Sasaran
	- Ketersediaan Energi			2372,00	2378,00	2458,00	2458,00	2458,00	2779,00	2546,00	2546,00	2546,00	
	- Ketersediaan Protein			79,42	79,84	115,00	115,00	115,00	104,40	84,77	84,77	84,77	
4	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore Pola pangan harapan PPH Konsumsi)			82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	88,46	93,80	93,80	93,80	Indikator Sasaran, Untuk Skore PPH Meskipin Belum Ideal Cenderung Meningkat Tiap tahun
5	Cakupan sarana dan Prasarana Pendukung Kemandirian pangan			9,00	10,00	20,00	20,00	20,00	13,00	11,00	11,00	11,00	Indikator Program
6	Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein												
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)			2050,00	2150,00	2175,00	2200,00	2200,00	1970,00	2021,00	2021,00	2021,00	Indikator Program, Kecukupan Konsumsi Energi Cenderung tidak Tercapai Target yang ditetapkan, yang membutuhkan
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/kap/hari)			55,50	57,00	57,10	57,20	57,20	61,40	65,10	60,00	60,00	Indikator Program
7	Penaganan Kerawanan Pangan Pada Daerah Yang Terindikasi Rawan Pangan			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	44,00	20,00	20,00	20,00	Indikator Program
8	Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)			90,77	91,00	95,00	95,00	95,00	95,35	97,00	95,00	95,00	Indikator Program

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.

Pembagunan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dinyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian penyesuaian terhadap Program dan kegiatan dalam pembangunan ketahanan pangan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan utama pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

1) Aspek Ketersediaan Pangan , meliputi :

a) `Pertumbuhan penduduk yang meningkat sehingga memerlukan penyediaan pangan yang meningkat;

b) Ketersediaan umbi- umbian, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan kacang masih relatif rendah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk memenuhi ketersediaan energi dan skor PPH ketersediaan;

c) Skor PPH ketersediaan mengalami penurunan 1,5% (satu koma lima persen) pada 2019 – 2024 serta capaian skor PPH ketersediaan masih di bawah skor PPH konsumsi pangan pada tahun 2024;

d) Terdapat 21 (dua puluh sati) desa rentan rawan pangan prioritas 2 (dua) dan 3 (tiga). Belumadanya sinergitas kinerja diantara PD terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan, yang terdiri dari 6 (enam) indikator kerawanan pangan sesuai peta FSVA (akses jalan, akses air bersih, penyediaan sarana dan prasarana (toko/warung), tenaga kesehatan, pemberdayaan/ penanganan penduduk tidak sejahtera, lahan pertanian);

e) Belum tersedianya data pemantauan ekspor dan impor pangan;

f) Belum tersedianya data pemantauan dan pengelolaan susut pangan untuk meningkatkan efisiensi sistem pangan sekaligus menjaga ketersediaan pangan Daerah; dan

g) Sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan masih belum memadai terutama apabila dihadapkan dalam rangka mempersiapkan Kutai Kartanegara sebagai penyangga IKN.

2) Aspek Keterjangkauan Pangan, meliputi :

a) Pangsa pengeluaran pangan terbesar diperuntukkan bagi makanan dan minuman jadi;

b) Persentase ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2023 sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) dan pada tahun 2024 turun menjadi 8,06% (delapan koma nol enam persen), termasuk dalam kategori permasalahan sedang (*moderate*); dan

c) Masih terdapat fluktuasi harga pangan.

3) Aspek Pemanfaatan Pangan :

a) Konsumsi energi pada komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang- kacangan, gula, serta sayur dan buah masih belum memenuhi rekomendasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

konsumsienergi ideal menurut kelompok pangan;

b) Belum idealnya pola pangan harapan masyarakat, yang ditunjukkan oleh konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah masih relatif rendah;

c) Konsumsi sayur dan buah per hari belum mencapai rekomendasi konsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan serat harian;

d) Masih terdapat masalah gizi balita (*stunting, wasting,* dan *underweight*) yang memerlukan penanganan dan perhatian;

e) Adanya keterbatasan kemampuan pengembangan sumber pangan lokal dan pengolahan bahan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif.

f) Pengetahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) yang masih rendah, karena kurangnya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui media yang bisa digunakan.

g) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan, terutama pangan segar, sehingga masih terdapat produk pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi.

3. Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara

Sebagaimana visi dan misi Bupati Kutai Kartanegra Tahun 2021-2026 dengan visinya “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia”, Dalam hal ini urusan Ketahanan Pangan berperan untuk mendukung misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya. Misi tersebut diintegrasikan kedalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya :

a. Sarana dan prasarana kemandirian pangan dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mendukung ketersediaan pangan masih belum optimal, masih belum tersedianya peta jalan tentang sarana pendukung kemandirian pangan.

b. Penanganan daerah rawan pangan dan rentan rawan pangan dengan berbagai penyebab yang bervariasi, yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Penanganan daerah rawan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukanintervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

c. Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin,serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

d. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan Masyarakat modern yang peduli Kesehatan.

Untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan produksi pangan segar harus didorong dengan sistem yang aman sehingga produk pangan segar yang aman dikonsumsi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan Diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu keamanan pangan.

e. Kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan yang masih belum beragam bergizi seimbang dan aman, kecenderungan memenuhi konsumsi energi dari sumber pangan beras, dan belum bisa beralih ke sumber pangan alterlatif berbasis sumber daya lokal yang harganya relatif lebih mahal dari pada mengkonsumsi beras.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan penganekaragaman pangan lokal;
2. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta organisasi masyarakat, kelompok wanita, yang memudahkan untuk sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pangan beragam berigizi, seimbang dan aman (B2SA);
3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan;
4. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman; dan
5. Masih terbuka peluang pengembangan usaha dan Pengolahan Pangan Lokal yang belum dikelola dengan baik.

5. Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut :

1) Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan peta FSVA tahun 2023, untuk prioritas 2 (dua) dan 3 (tiga) sebanyak 21 (dua puluh satu) desa. Kondisi ini sudah lebih baik dari tahun sebelum. Beberapa faktor penyebab, belum terpenuhinya infrastruktur dasar pedesaan (jalan), potensi sumber daya yang kurang memadai, belum adanya sarana air Bersih, Kurangnya tenaga kesehatan, masih terdapat keluarga prasejahtera. Masih kurangnya sinergisitas dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Karena kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan secara Parsial.

2). Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih belum sesuai dengan standar yang dala Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Kondisi ini bukan berarti kekurangan pangan, tetapi masih kurangnya keberagaman konsumsi pangan yang akan tercermin dalam angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

3) Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Saat ini masih terdapat penggunaan bahan kimia yang melebihi ambang batas, walaupun tidak banyak, masih ditemukannya pangan segar yang mengandung bahan kimia melebihi batas minimal residu (BMR). Akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen pangan segar asal tumbuhan akan bahaya penggunaan bahan kimia yang melebihi batas minimal residu (BMR).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Masih sangat sedikit produk pangan segar (beras) yang sudah tergistrasi, dan produk pangan segar yang sudah bersertifikat juga masih sangat sedikit.

4) Sarana dan prasarana dalam mendukung kemandirian pangan, masih perlunya ketersediaan lantai jemur dalam meningkatkan kualitas produksi pangan dalam pengeringan, serta lumbung pangan masyarakat yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Masih diperlukan pemetaan kebutuhan sarana pendukung kemandirian pangan.

5) Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi Pangan.

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 merupakan rancangan Program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan perkiraan kebutuhan. Setelah dilakukan *review* dan analisa kebutuhan,terdapat perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap rencana yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) subkegiatan dengan pagu sebesar Rp10.877.786.621,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Setelah dilakukan *review* dan analisa maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan menjadi 5 (lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 52.868.585,612,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dilakukan untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN karena adanya pengangkatan tenaga honor menjadi PPPK, fasilitas penunjang program penunjang urusan pemerintah kabupaten kota berupa sub kegiatan untuk penunjang penyelenggaraan satu data indonesia, serta untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya penyesuaian Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian anggaran gaji ASN sesuai dengan hasil rekonsiliasi gaji dengan BPKAD karena kenaikan gaji pegawai dan mutasi pegawai masuk ke Dinas Ketahanan Pangan, Serta pengangkatan tenaga harian lepas menjadi PPPK.
2. Untuk penyelenggaraan satu data indonesia kutai kartanegara pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta subkegiatan dalam rangka administrasi barang milik Daerah.
3. Untuk menunjang sarana pendukung Program penunjang urusan kabupaten/kota yaitu kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan pengadaan barang milik Daerah seperti laptop dan komputer sebagai sarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
4. Penambahan subkegiatan dan anggaran dalam rangka rencana aksi penurunan stunting sesuai yang telah di masukkan dalam aksi bangda kementerian dalam negeri.
5. Anggaran untuk menunjang tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka stabilisasi harga Pangan untuk pengendalian inflasi, penyediaan dan pengembangan pangan lokal, pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan (lumbung pangan) agar bisa berperan dalam menunjang ketersediaan pangan masyarakat dan bisa berperan dalam pengembangan ekonomi di desa.

   Secara Lengkap dapat dilihat dalam Tabel 6 Matrik TC 31 sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN

(TC-31)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**KAB KUTAI KARTANEGARA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**75,00**	**7.677.786.621,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**75,00**	**11.775.265.612,00**	
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KAB KUTAI KARTANEGARA**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**15 Dokumen**	**350.000.000,00**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**15 Dokumen**	**500.000.000,00**	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen yang disusun Renja Tahun 2027 dan Renja Perubahan 2026, anggaran Mengikuti Anggaran Tahun 2025
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Terdapat 5 Dokumen yang harus disusun Untuk kegiatan ini, Anggaran Untuk Pembinaan sosialisasi dll
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Kegiatan Untuk Melaksankan Analisis permasalahan capaian kinerja melalui hasil E Pantau Tri Wulan 1,2,3 ,4 dan Laporan Akhir Pagu mengikuti Pagu tahun 2025
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Sub Kegiatan Baru tahun 2025) Untuk Pemenuhan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000,00	Untuk Pemenuhan Dokumen Pada Satu Data Indonesia Kukar. atau Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) (Sub Kegiatan baru dilaksanakan tahun 2025)
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Untuk Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Tahun 2027
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12 Laporan**	**6.423.737.861,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12 Laporan**	**9.111.593.556,00**	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	8.886.593.556,00	Menyesuaikan Dengan Hasil Rekon Gaji dan Tambahan Gaji Untuk P3K
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Meneruskan Kegiatan yang telah ditepkan di Tahun 2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Tambahan Anggaran Karena Kepeluan Untuk 2 Bendahara Pembantu dan Dua Kuasa Pengguna Anggaran
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Meneruskan Kegiatan yang telah ditepkan di Tahun 2025
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**40.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**200.000.000,00**	
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Meneruskan Kegiatan yang telah ditepkan di Tahun 2025
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Meneruskan Kegiatan yang telah ditetapkan di Tahun 2025
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	
2.09.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Meneruskan Kegiatan yang telah ditepkan di Tahun 2025
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**5 Dokumen**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**5 Dokumen**	**145.000.000,00**	
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	Anggaran diusulkan sama dengan Tahun tahun sebelumnya, karena banyaknya Informasi Kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Perangkat daerah melalui Sistem Informasi Kepegawaian
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	120.000.000,00	Perlunya Diklat Bagi ASN dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM dan Kompetensi SDM sesuai dengan kualifikasinya
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**530.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**690.000.000,00**	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	140.000.000,00	Untuk Pemenuhan Kebutuhan ATK dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	Diusulkan dalam Rangka Pemenuhan kebutuhan Alat Rumah Tangga Kantor (Korden, Media Displai dll)
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor (Untuk Penyediaan bahan Makan Minum Rapt, bahan Logistik untuk Kebersihan Kantor)
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	50.000.000,00	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	150.000.000,00	Diusulkan Naik mengingat banyaknya Kegiatan dan Undangan yang harus dihadiri olej Perangkat daerah
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	75.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	50.000.000,00	Diusulkan Bertambah dalam rangka Penyelesaian Penataan Arsip Tahun2 Sebelum adanya kebijan penataan arsip
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Diusulkan sebagaimana tahun tahun sebelumnya dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**229 Unit**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**229 Unit**	**310.217.000,00**	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	310.217.000,00	Pengadaan Peralatan Kantor (Laptop, Printer dll) sebagai pendukung Pelayanan Operasional Kantor yang semuanya Berbasis Elektronik serta Pengadaan Peralatan kantor Untuk Pendukung 3 Lokasi Kawasan Pertanian terpadu
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**184.048.760,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**568.455.056,00**	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000,00	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.048.760,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	458.455.056,00	Dianggarkan Kembali Untuk Calon P3K Karena SK Pengangkatannya masih belum keluar sampai saat ini.
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***	**28 Unit**	**150.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***	**28 Unit**	**250.000.000,00**	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit	50.000.000,00	Diiusulkan Untuk Pemeliharaan Dinas Jabatan sesuai dengan SSH yang ada.
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	100.000.000,00	Diusulkan karena selama ini biaya Pemeliharaan Kendaraan yang ada belum sesuai dan tidak bisa mngcover semua kendaraan Dinas yang ada
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000,00	Diusulkan untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, Komputer dll) yang selama ini belum pernah ada biaya pemeliharaannya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	28,59	700.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	28,59	15.770.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Tersediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	2 Unit	700.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Tersediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	90 Unit	15.770.000.000,00	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	10 Kecamatan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	10 Kecamatan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	80 unit	10.770.000.000,00	Usulan tambahan anggaran untuk Pembangunan Lantai jemur UV, lantai Jemur Biasa, Lantai Jemur Portabel dan Rice Milling Unit (RMU) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian (terutama untuk pengeringan) hasil pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian Berbasis kawasan, serta dalam rangka mendukung Pengendalian Inflasi, dengan lokasi Mengakomodir dari Usulan Masyarakat di Musrenbang, Serta Untuk 3 Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu.
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	5 Unit	5.000.000.000,00	Diusulkan untuk membangun Lumbung Pangan Masyarakat, dalam Rangka Mendukung Pemerintah dalam Rangka pembangunan Pertanian dalam arti Luas, serta dalam rangka pengendalian Inflasi dengan mengakomodir Usulan yang disampaikan melalui Musrenbang, serta pembangunan Lumbung pada 3 Lokasi kawasan Pertanian Terpadu.
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1. Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) 2. Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari)	1. 2074 2. 61,86	1.650.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1. Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) 2. Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari)	1. 2074 2. 61,86	19.087.960.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	< 10%	225.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	< 10%	8.322.960.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1.080.000.000,00	Dalam Rangka Pendukung Program Pemerintah Untuk mendukung ketersediaan pangan agar tidak bergantung pada Beras, pengembangan dan Penyediaan pangan Lokal di 15 Lokasi, 3 diantaranya di lokasi Kawasan Pertanian Terpadu
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	100.000.000,00	Diusulkan Untuk Menjamin Pelaksanaan Distribusi Pangan yang lancar guna mendukung Pengendalian Inflasi
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	250 Kel	150.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Pembinaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 Laporan		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 Laporan	4.730.460.000,00	Usulan Tambahan anggaran untuk Sub Kegiatan baru, Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Peringatan Hari Pangan Seluruh Dunia, Serta Untuk Gerakan menanam Cabe dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta subsidi Selisih Harga dari produsen ke konsumen dalam Rangka Gerakan pangan Murah
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	6 Laporan		Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	6 Laporan	350.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, melalui Pembinaan UMKM Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha = Berupa Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal B2SA) Bagi UMKM dan bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal, termasuk Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal di 3 Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	100.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	1.362.500.000,00	Diusulkan Dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan Distibusi Pangan Poktan / Gapoktan dalam mengelola Lumbung Pangan termasuk pemberian modal kerja berupa Gabah, peltihan manajemen , dan pelatihan teknis serta subsidi selisih harga produsen dan Konsumen dalam rangka pemenuhan Beras Untuk GPM, sehingga bisa berkembang dan turut berperan dalam pengendalian inflasi
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan		Informasi Stok Pangan			Pemantauan Stok Pangan		Informasi Stok Pangan	2 Dokumen	50.000.000,00	Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen maka dilakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan strategis, Diusulkan untuk mengetahu stok pangan dan keluar masuknya bahan pangan, yang berpengaruh untuk mengetahu kondisi pangan di daerah
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	7 Kecamatan (Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Anggana).	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	7 Kecamatan (Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Anggana).	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	150.000.000,00	Laporan Harga pangan sebagai bahan untuk mengetahui potensi terjadinya Inflasi, melalui Pemantauan harga dilakukan secara Mingguan (setiap hari Rabu pagi) selama 12 bln (Jan-Des). Honor enumerator thn ini hanya tersedia 6 bln untuk 1 orang saja. Penambahan anggaran untuk: tambahan honor enumerator, SPPD panggil rapat koordinasi dari Petugas Kecamatan, bantuan paket data internet, perjalanan dinas, dll. (Sama dengan Anggaran tahun 2025)
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kegiatan ini baru diusulkan. Daerah dituntut untuk melaporkan kondisi pangan di daerah ke pemerintah pusat dan diperlukan untuk mengetahui prognosa Pangan di daerah
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah koordinasi dansinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah koordinasi dansinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	100.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll, dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di daerah
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUTAI KARTANEGARA	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUTAI KARTANEGARA	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	150.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Cadanagan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan**	**50 Ton**	**600.000.000,00**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Cadanagan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan**	**300 Ton**	**9.305.000.000,00**	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	50 Ton	600.000.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	150Ton	1.900.000.000,00	Sesuai dengan Rekomendasi BPKP dalam evaluasi Cadangan Pangan, maka harus menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan rumus hitungan yang ada di Permentan No 11 Tahu 2018 Disamping itu juga dalam sebagai kegiatan Pengendalian inflasi. Pengadaan Beras Untuk Cadangan Pangan dan Penyaluran sesuai kebutuhan (Pengadaan Beras Cadangan Pangan 200 Ton =
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	150Ton	150.000.000,00	Usulan Anggaran untuk biaya penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah yang sedang membutuhkan
2.09.03.2.02.08	Penguatan Lumbung Pangan masyarakat	Kecamatan sebulu, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Loa Janan, Samboja, Tabang, Marang Kayu	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Terfasilitasi	16 Unit		Penguatan Lumbung Pangan masyarakat		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Terfasilitasi	16 Unit	7.255.000.000,00	Usulan Anggaran untuk biaya penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah yang sedang membutuhkan
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**825.000.000,00**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**1.460.000.000,00**	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	110.000.000,00	Penyusunan Dokumen Direktori Konsumsi Pangan dalam Rangka Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	30 Laporan	600.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	32 Laporan	1.300.000.000,00	Bantuan Saprodi untuk 9 Kelompok Wanita (PKK dan dasawisma), Gerakan Makan Telor dan Minum Susu Untuk Anak Sekolah SD dalam Rangka Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan, Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Pangan Lokal berupa Pelatihan pembuatan madu Analog, Sosialisasi dan Pemberian Menu B2SA Kepada Balita Usia Dua Tahun (BADUTA) Kader Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Pondok Pangan Etam Untuk penanggu- langan Kemiskinan serta Pembinaan Peserta Festival pangan Lokal
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	1 laporan	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	1 laporan	50.000.000,00	Pembinaan dan Evaluasi Konsumsi Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Prosentase Desa/Kelurahan Rawan pangan**	**5 Desa**	**400.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Prosentase Desa/Kelurahan Rawan pangan**	**5,90**	**2.200.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan**	**1 Dokumen**	**200.000.000,00**	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	200.000.000,00	Peta Rawan Pangan Sebagai Dasar Untuk Intervensi Penanganan Rawan Pangan (penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan Peta Rawan pangan (Peta FSVA) Kab Kutai Kartanegara untuk Mengetahui Daerah yang terindikasi Rentan Rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. UU 18 tahun 2012, Pasal 114 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenanganan Kabupaten/Kota**	**20 Desa**	**300.000.000,00**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenanganan Kabupaten/Kota**	**20 Desa**	**2.000.000.000,00**	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	1.800.000.000,00	Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 1, 8 M. Pada tahun 2025 diajukan dengan anggaran yang sama untuk dapat melakukan intervensi pada daerah yang rentan rawan pangan sebanyak 21 Desa. Selain itu agar Program Penanganan Kerawanan Pangan berjalan sesuai target dan sasaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Peta SKPG diperlukan untuk mengetahui situasi pangan dan Gizi di Daerah (Untuk deteksi dini kemungkinan terjadinya masalah pangan dan Gizi), dalam menentukan Intervensi baik jangka Pendek, menengah, maupun jangka panjang
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	**93,46**	**300.000.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	**93,46**	**4.035.360.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman**	18 Kec	300.000.000,00	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman**	18 Kec	4.035.360.000,00	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen	350.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan di Fokuskan Pada daerah Penghasil Pangan Segar : Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segaran Asal Tanaman) Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) Pengawasan keamann PSAT pre market dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian: a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll); Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	18 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	75.000.000,00	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	18 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	18 Dokumen	350.000.000,00	Pembinaan Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Mendapatkan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar dengan cara melakukan fasilitasi : Pengawasan Keamanan PSAT Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat.. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting.
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Laporan	3.000.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran digunakan untuk Penyediaan sarana Pengujian Keamanan Pangan (rapit Test), Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling, serta pengadaan sarana Penunjang Laboratorium Mini di 3 Lokasi kawasan Pertanian Terpadu. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	18 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	4 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	18 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	18 Laporan	50.000.000,00	Tambahan Anggaran digunakan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di 20 Kecamatan yang bertujuan mengiden-tifikasi serta memverifikasi data base petani hortikultura/produsen/retail/ warung/umkm dan Koordinasi Instansi Pembina di Provinsi Kaltim
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	50.000.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	285.360.000,00	Tambahan Anggaran diajukan dalam Penguatan Kelembagaan pangan Segar dengan Menyusun SOP tentang kebijakan di Bidang Keamanan Pangan serta pembentukan OKKPD Penguatan Kelembagaan pangan, Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
					10.727.786.621,00					**52.868.585.612,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program dan kegiatan dari masyarakat baik yang disampaikan langsung melalui SIPD RI, yang merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Untuk tahun 2026 terdapat beberapa usulan masyarakat di kecamatan yang masuk dalam Program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan.

Tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodir dalam Renja-PD, usulan yang bisa diterima sebatas yang sesuai dengan Program dan kegiatan prioritras PD, serta mendukung Program prioritas kepala Daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Sehingga Program dan kegiatan usulan masyarakat yang sesuai prioritas PD akan dibuat skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 (T-C 32).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL : TC-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1. Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan					
1.	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jl. Mulawarman I, Gang Bunghur, RT.005 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2143135)**	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Lumbung Pangan yang ada Kondisinya sudah rusak Berat, Lokasi berada di Zona Utara yang merupakan Fokus pengembangan Pariwisata dan Pusat Pangan
2	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2212885)**	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Lumbung Pangan yang ada Kondisinya sudah rusak Berat, Lokasi berada di Zona Utara yang merupakan Fokus pengembangan Pariwisata dan Pusat Pangan
3	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	RT.09 Desa Mulawarman Kec Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2314903)**	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Lokasi Sesuai dengan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian dan belum ada Lumbung Pangan yang di Bangun di desa tersebut
4	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	RT 005 Desa Bukit Raya, Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2314903)**	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Lokasi Sesuai dengan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian dan belum ada Lumbung Pangan yang di Bangun di desa tersebut
5	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2281598)**	Pembuatan Percetakan Sawah Kelompok		Tidak bisa dipenuhi karena Bukan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan
2. Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur					
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jalan Diponegoro Desa Sidomulyo RT 12 Kec Anggana Kab Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2278037)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur diperlukan oleh kelompok Tani dalam Meningkatkan Kualitas Beras yang di hasilkan.
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2212908)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Belum adaLantai Jemur yang di bangun, Lokasi berada di Zona Utara yang merupakan Fokus pengembangan Pariwisata dan Pusat Pangan
3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jalan Bina Tani RT. 003 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kab Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2257002)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian
4	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Rt.10&11 dusun ajjalang Desa Santan Ilir Kecamatan Marang KayuKab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2264178)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian
5	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Sebemban RT. 005 Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2337319)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Belum adaLantai Jemur yang di bangun, Lokasi berada di Zona Utara yang merupakan Fokus pengembangan Pariwisata dan Pusat Pangan
6	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jl. Ulin Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2237470)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian (akan di tinjau Kembali dalam Menentukan skala Prioritas)
7	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jl. Pertanian Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2237703)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian (akan di tinjau Kembali dalam Menentukan skala Prioritas)
8	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara **(ID SIPD: 2279389)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian (akan di tinjau Kembali dalam Menentukan skala Prioritas)
9	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	RT.07 Desa Mulawarman Kec Tenggarong Seberang **(ID SIPD: 2311023)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian (akan di tinjau Kembali dalam Menentukan skala Prioritas)
10	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	RT.03 Desa Mulawarman Kec Tenggarong Seberang **(ID SIPD: 2311029)**	Tersedianya Lantai Jemur	1 Unit	Lantai Jemur sangat di butuhkan Petani dalam Pengolhan Pasca Panen. Lokasi Merupakan Lima Kawasan Pembangunan Pertanian (akan di tinjau Kembali dalam Menentukan skala Prioritas)
3. Pengadaan Gabah Untuk Pengisian Lumbung Pangan sebagai Modal Kerja					
1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara (ID SIPD: 2212944)	Bantuan Gabah Untuk Modal Kerja	1 paket	Belum bisa diterima, karena Lumbung yang ada Kondisinya masih Rusak Berat
2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jalan Gerbang Dayaku Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara(ID SIPD: 2317687)	Bantuan Gabah Untuk Modal Kerja	1 Paket	Bantuan Bisa diberikan Karena Bangunan Lumbung sudah ada, baru dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk Mendukung Lumbung Pangan dalam Berperan dalam Ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah Desa)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga sampai dengan perseorangan/individu.

Sesuai dengan visi misi Bupati periode 2021 - 2025, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah Pemantapan pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan transformasi Pembangunan. Dalam misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Sesuai dengan fokus dan sasaran pembangunan Kabupaten

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kutai Kartanegara Tahun 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas ketahanan pangan; dan
2. meningkatkan ketahanan pangan Daerah.

Tujuan Rencana Kerja tersebut diharapkan mampu mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan. Tujuan tersebut akan dijabarkan melalui sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas ketahanan pangan target nilai tahun 2026 sebesar 70 (tujuh puluh).
2. Ketersediaan pangan utama (beras/jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2025 sebesar 110% (seratus sepuluh persen).
3. Meningkatnya pencapaian skor PPH ketersediaan dengan target skor tahun 2025 sebesar 95 (sembilan puluh lima).
4. Meningkatnya ketersediaan pangan Daerah, yang ditunjukkan dengan tercapainya ketersediaan energi sesuai standar sebesar 2400 kkal/kapita/hari, serta ketersediaan protein sebesar 110 gram/perkapita/hari pada tahun 2025.
5. Menurunnya jumlah desa/kelurahan yang terindikasi rawan bangan sebanyak 18 (delapan belas) desa untuk tahun 2025.
6. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan skor PPH pada tahun 2025 sebesar 88 (delapan puluh delapan).
7. Tercapainya tingkat keamanan pangan segar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2026.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C. 28.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun (0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir tahun
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	66,94	70	75	80	85	90	90
2	Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan (Prevalensi of Under Nourishment -PoU)	9,72	7,82	7,65	7,47	7,3	7,12	7,12
3	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	102,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,12	95,29	96,46	97,63	98,80	100,00	100,00
5	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2546	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	84,77	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
6	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	93,80	95,00	96,20	97,40	98,60	99,80	99,80
7	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6,10	16,51	28,59	16,75	14,59	17,46	100,00
8	Kecukupan Konsumsi Energi dan Kecukupan konsumsi Protein							
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hai	2021	2.061	2.074	2.087	2.100	2100,00	2.100,00
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita	65,10	63,48	61,86	60,24	58,62	57,00	57,00
9	Prosentase Produksi Pangan Lokal							
10	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan	7,30	6,75	5,90	5,06	4,22	3,38	3,38
11	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	97,00	93,44	93,46	93,58	93,66	93,66	93,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung visi misi Bupati menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negerii Nomor 050 Tahun 2024 dapat diwujudkan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi :
   - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi kedua misi 2 :“Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia YangBerakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya”.
   - Prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026 (prioritas 3) pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan; dengan fokus membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan.
   - Pengentasan kemiskinan pada Daerah rawan dan rentan rawan pangan.
   - Peningkatan kualitas konsumsi pangan Daerah dengan pemberdayaan masyarakat.
   - Peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan Daerah.
   - Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
   - Pencapaian tugas pokok dan fungsi PD.
   -

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Sesuai hasil analisis terhadap program dan kegiatan, serta memperhatikan usulan masyarakat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 sebanyak 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan, dengan rencana anggaran yang telah disusun sebesar Rp52.868.585.612,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), secara garis besar dapat diuraikan sebagai mana tabel 9 berikut :

TABEL 9

RINGKASAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.775.265.612,00**
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	100.000.000,00
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.111.593.556,00**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.886.593.556,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	150.000.000,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000,00
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.775.265.612,00**
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**145.000.000,00**
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000,00
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**690.000.000,00**
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**310.217.000,00**
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	310.217.000,00
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**568.455.056,00**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.455.056,00
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.000.000,00**
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**15.770.000.000,00**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	15.770.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	10.770.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**19.087.960.000,00**
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.322.960.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.080.000.000,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.000.000,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150.000.000,00
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4.730.460.000,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350.000.000,00
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	1.362.500.000,00
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	50.000.000,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	100.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	150.000.000,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**9.305.000.000,00**
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	150.000.000,00
2.09.03.2.02.05	Penguatan Lumbung Pangan masyarakat	7.255.000.000,00
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**1.460.000.000,00**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	110.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.300.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	50.000.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**2.200.000.000,00**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**200.000.000,00**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	200.000.000,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2.000.000.000,00**
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	200.000.000,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**4.035.360.000,00**
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4.035.360.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	350.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	3.000.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	50.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	285.360.000,00
		52.868.585.612,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Semua Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini telah disesuaikan dengan Program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, demikian juga untuk pagu anggarannya. Namun demikian akan dilaksanakan sinkronisasi dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, disusun sekala prioritas sehingga rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Rencana anggaran pada Rencana Kerja sebesar Rp52.868.585.612,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rnam ratus dua belas rupiah) dengan prioritas :

- Pembayaran gaji ASN dan PPPK;
- Kegiatan generik (operasional kantor);
- Program pendukung penanggulangan kemiskinan;
- Pendukung penanggulangan inflasi;
- Rencana aksi penurunan stunting;
- Pelaksanaan Renstra PD; dan
- Mendukung Program Bupati pengembangan kawasan pertanian terpadu.

Rencana Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 10 (TC 33) sebagaimana berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL : 10

Tabel TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**79**	**11.775.265.612,00**	**80**	**20.309.048.760,00**
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		15 Dokumen	**500.000.000,00**	15 Dokumen	1.000.000.000,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	350.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	5 Laporan	50.000.000,00	5 Laporan	100.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	5 Laporan	100.000.000,00	5 Laporan	200.000.000,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Data	100.000.000,00	1 Data	250.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**		**12 Laporan**	**9.111.593.556,00**	**12 Laporan**	**15.375.000.000,00**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUTAI KARTANEGARA	85 Orang/bulan	8.886.593.556,00	85 Orang/bulan	15.000.000.000,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		12 Dokumen	**200.000.000,00**	12 Dokumen	210.000.000,00
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**		**5 Dokumen**	**145.000.000,00**	**5 Dokumen**	**350.000.000,00**
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB KUTAI KARTANEGARA	30 Orang	120.000.000,00	30 Orang	300.000.000,00
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**12 Bulan**	**690.000.000,00**	**12 Bulan**	**1.500.000.000,00**
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Paket	140.000.000,00	2 Paket	100.000.000,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	5 Paket	50.000.000,00	5 Paket	300.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB KUTAI KARTANEGARA	60 Laporan	50.000.000,00	60 Laporan	100.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	300 Laporan	150.000.000,00	300 Laporan	450.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	2000 Dokumen	50.000.000,00	2000 Dokumen	200.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**		**229 Unit**	**310.217.000,00**	**229 Unit**	**1.000.000.000,00**
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	100 Unit	310.217.000,00	100 Unit	1.000.000.000,00
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**		**12 Bulan**	**568.455.056,00**	**12 Bulan**	**224.048.760,00**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB KUTAI KARTANEGARA	12 Laporan	458.455.056,00	12 Laporan	114.048.760,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***		**28 Unit**	**250.000.000,00**	**28 Unit**	**650.000.000,00**
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	150.000.000,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB KUTAI KARTANEGARA	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	500.000.000,00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB KUTAI KARTANEGARA	50 Unit	100.000.000,00	50 Unit	100.000.000,00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		**28,59**	**15.770.000.000,00**	**28,59**	**20.750.000.000,00**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		90 Unit	**15.770.000.000,00**	90 Unit	20.750.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Kecamatan	95 unit	10.770.000.000,00	80 unit	10.750.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	10 Kecamatan	13 Unit	5.000.000.000,00	10 Unit	10.000.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1. Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) 2. Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari)**		**1. 2074 2. 61,86**	**19.087.960.000,00**	**1. 2074 2. 61,86**	**24.895.460.000,00**
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)		< 10%	8.322.960.000	< 10%	11.305.460.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Laporan	1.080.000.000,00	1 Laporan	3.600.000.000,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUTAI KARTANEGARA	250 Kel	150.000.000,00	250 Kel	500.000.000,00
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Laporan	4.730.460.000,00	2 Laporan	3.030.460.000,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	KAB KUTAI KARTANEGARA	9 Laporan	350.000.000,00	6 Laporan	2.000.000.000,00
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	KAB KUTAI KARTANEGARA	17 Unit	1.362.500.000,00	17 Unit	1.000.000.000,00
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	KAB KUTAI KARTANEGARA	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	7 Kecamatan (Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Anggana).	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	150.000.000,00
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dansinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUTAI KARTANEGARA	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadanagan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan**		**200 Ton**	**9.305.000.000,00**	**300 Ton**	**10.650.000.000,00**
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	200 Ton	1.900.000.000,00	200 Ton	2.500.000.000,00
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	200 Ton	150.000.000,00	200 Ton	150.000.000,00
2.09.03.2.02.05	Penguatan Lumbung Pangan masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Terfasilitasi	KAB KUTAI KARTANEGARA	16 Unit	7.255.000.000,00	16 Unit	8.000.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**1.460.000.000,00**		**2.940.000.000,00**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	32 Laporan	1.300.000.000,00	32 Laporan	2.700.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Kutai Katanegara	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	130.000.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prosentase Desa/Kelurahan Rawan pangan**		**5,90**	**2.200.000.000,00**	**5,90**	**2.400.000.000,00**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan**		**1 Dokumen**	**200.000.000,00**	**1 Dokumen**	**300.000.000,00**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenanganan Kabupaten/Kota**		**20 Desa**	**2.000.000.000,00**	**20 Desa**	**2.100.000.000,00**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026(N)			Rencana Tahun 2027(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8 Dokumen	1.800.000.000,00	8 Dokumen	1.800.000.000,00
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)		**93,46**	**4.035.360.000,00**	**93,46**	**2.700.000.000,00**
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman		18 Kec	4.035.360.000,00	18 Kec	2.700.000.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18 Kecamatan	18 Dokumen	350.000.000,00	18 Dokumen	350.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	18 Kecamatan	18 Dokumen	350.000.000,00	18 Dokumen	350.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	3.000.000.000,00	1 Laporan	1.500.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	18 Kecamatan	18 Laporan	50.000.000,00	18 Laporan	150.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	285.360.000,00	2 Dokumen	350.000.000,00
					52.868.585.612,00		**71.054.508.760,00**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terutama peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan nya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

   Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kutai Kartanegara visi dan misi Kepala Daerah, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh *stakeholder.* Apabila didalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

   Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 berpedoman pada :

   1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2024;
   2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi;
   3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
   4) Sesuaikan dengan Tema RKPD Tahun 2026 “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Prioritas (3) Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan; dengan Fokus Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program di masing-masing bidang untuk tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang bidang dalam melaksanakan Program dan kegiatan, sehingga Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari 3 (tiga) tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Recana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanian dan peternakan Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPDTahun 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan serta sejalan dengan visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kartanegara; Pemerintahan Kabupaten Kutai;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang:
Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU, berisi tentang :
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, *Review* Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang :
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Berisi tentang :
Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2024 sebesar Rp218.866.459.793,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) Program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) subkegiatan. Sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2023 anggaran bertambah menjadi Rp244.200.990.859,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri dari 7 (tujuh) Program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) subkegiatan. Dari pagu Rencana Kerja perubahan tersebut, sebesar Rp696.227.970,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) merupakan belanja nonurusan dan Rp24.638.303.096,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) merupakan belanja urusan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp215.087.694.836,00 (dua ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) atau 88,08 % (delapan puluh delapan koma nol delapan persen) sedangkan realisasi fisik sebesar 100% (seratus persen).

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2023 didukung oleh 7 (tujuh) Program, dimana terdapat Program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan	Luas Tanam Padi (Ha)	40.641,30	29.307,80	72,11 %
		Luas Tanam Jagung (Ha)	13.000,00	1.658,70	12,76 %

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sarana Pertanian	Luas Tanam Palawija	45,00	14,00	31,11 %
		Luas Tanam Hortikultura (Ha)	27.781,65	14.827,22	53,37 %
		Peningkatan Populasi Ternak Besar (Ekor)	36.157,00	16.198,00	44,80 %
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil (Ekor)	18.441,00	12.836,00	69,61 %
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas (Ekor)	16.975.000	19.370.909	114,11 %
2	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (persen)	3,00	2,40	80,00 %
3	Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	90,00	80,00	88,89 %

2. Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,00	64,00	100,00 %
2	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	95,00	98,00	103,16 %
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5,00	5,00	100,00 %
3	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	90,00	90,85	100,94 %

3. Realisasi Program yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun (meter)	20.000	43.307	216,54 %
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun (unit)	23	22	95,65 %

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja Program :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Faktor penyebab target Program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain :
   1. Input produksi kurang maksimal terutama pupuk (karena alokasi pupuk subsidi tidak mencukupi kebutuhan dan harga pupuk non subsidi cukup mahal).
   2. Terjadi musim kemarau yang cukup panjang, sehingga kebutuhan air untuk setor pertanian tidak tercukupi dan menyebabkan terjadinya penurunan luas tanam yang cukup signifikan serta gagal panen (puso).
   3. Adanya pilihan pekerjaan dan peluang usaha lainya yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar.
   4. Adanya pembatalan pengembangan jagung oleh investor.
   5. Khusus tanaman palawija (Porang) harga jual produksi sejak tahun 2022 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.
   6. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh dan luasnya wilayah kerja serta jumlah kelompok tani yang banyak dan waktu terbatas.
   7. Kemampuan pengurus kelompok tani melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk setiap kegiatan.
   8. Kemampuan kelompok dalam bekerjasama dengan mitra usaha yang mendukung kegiatan usaha tani

b. Faktor penyebab target program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain :
   1. Nilai SAKIP sesuai target disebabkan oleh karena motivasi dan kerjasama internal jajaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang semakin tinggi, pengetahuan dan pemahaman pegawai semakin baik serta pendampingan dari Inspektorat dan BPKP Kalimantan Timur.
   2. Tersedianya sarana (daging segar, susu, telur, produk olahan dan produk hewan) pengendalian daging dan produk olahan sehingga aman, sehan, utuh dan halal untuk di konsumsi masyarakat dan terbebasnya dari gizi buruk (stunting) khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Tersedianya sarana pengendalian OPT.

c. Sedangkan faktor penyebab target Program melebihi target kinerja Program adalah :

1. Pekerjaan perkerasan jalan usaha tani dan pembuatan pembangunan embung berjalan relatif lancar dan cepat karena cuaca yang mendukung (kondisi panas), bahan/material dan peralatan kerja relatif tersedia serta tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam penyiapan lokasi. Selain itu sistem pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan usaha tani adalah swaklola dengan Kodim 0906/Kutai Kartanegara dan Kodim 0908/Bontang serta dukungan dari Lembaga petani dan pemerintah desa yang cukup baik.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD.

Dengan adanya capaian Program Renstra PD pada tahun 2024 implikasi yang timbul adalah diperlukannya : (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi, dan (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

a) Peningkatan penyediaan sarana produksi tanaman dan hortikultura berupa benih, pupuk, pestisida dan alat/mesin pertanian.

b) Peningkatan penyediaan prasarana pertanian, terutama prasarana irigasi dan konektivitas jaringan irigasi antara primer, sekunder dan tersier.

c) Penyediaan sumber-sumber air irigasi yang berasal dari air tanah.

d) Peningkatan penyuluhan pertanian dan pengembangan petani milenial.

e) Pengembangan kemitraan usaha pertanian yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil pertanian.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun capaian kinerja dari Program dan kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan diimplementasikan melalui kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.29. rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2024, dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan		66 Nilai	66 Nilai	68 Nilai	68 Nilai		69 Nilai		
3.27.01.2.01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	13	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen		13 Desember		
3.27.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2	0	0	0	0	2	200
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	-	0	0	0	0	-	-
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	-	0	0	0	0	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	-	1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	2	3	3	100	1	6	200
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	85	85						-	-
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481	Orang/ Bulan	481	481	481	100	481	1.443	300
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	Dokumen	34	15	15	100	34	83	553
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	1	1	100	1	3	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	-	16	16	100	200	216	1.350
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen						-	-
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	-					-	-
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	481	Paket	-	481	481	100	481	962	200
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481	Dokumen	-	481	481	100	481	962	200
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	25	10	10	100	25	60	600
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	10	15	15	100	10	35	233

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan						-	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	5	7	7	100	5	17	243
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	130	20	20	100	130	280	1.400
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	10	4	4	100	10	24	600
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	4	3	3	100	4	11	367
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000	Dokumen	100	2.000	2.000	100	100	2.200	110
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Laporan	400	400	400	100	220	1.020	255
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650	Dokumen	10	650	650	100	10	670	103

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50	Unit	-	-	-			-	-
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	1	1	100	1	2	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan						-	-
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	200
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	250	12	12	100	12	274	2.283
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67	12	12	100	12	91	758

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75	12	12	100	12	99	825
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	340	Unit						-	-
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	-	2	2	100	2	4	200
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	215	Unit	2	2	2	100	150	154	72
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	222	215	215	100	5	442	589
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit	5	75	75	100	33	113	235
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	4180248	Ha						-	-
		Luas Tanam Jagung	20000	Ha	39.867,18	40.254,24	40.254,24	100		80.121	401
		Luas Tanam Palawija (porang)	55	Ha	3.000,00	7.500,00	7.500,00	100		10.500	19.091

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Luas Tanam Hortikultura	292782436	Ha	25,00	35,00	35,00	100		60	
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	37061	Ekor	26.197,87	26.987	26.987	100		53.185	144
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	1844030	Ekor						-	-
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17414000	Ekor	34.416,00	35.275	35.275	100		69.691	0
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	10984	Unit						-	-
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	5	Laporan	15.936.000,00	16.415.000	16.415.000	100	5	32.351.005	647.020.100
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								-	
		Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	3	Unit	-	-	-		3		-
		Jumlah Alsintan yang diadakan	3012	Unit	-	5	5	100	3247	3.252	108
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1300	Ha	28	7	7	100	1300	1.335	103
		pengadaan benih padi	3600	Ha	-	-	-		3600		-
		Pengembangan Tanaman Jagung	3000	Ha	-	5	5	100		5	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Luasan Palawija (Porang)	14	Ha	40	5	5	100		45	321
		Pengembangan Tanaman Hortikultura	50	ha	-	5	5	100	100	105	210
		Pengadaan Alsintan Rotavator (POKIR)								-	
		Pengadaan Alsintan (Musrenbang)			-	-	-			-	
		Pengadaan Green House			-	-	-			-	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	31	Komoditi	-	-	-			-	-
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5	VUB	-	5	5	100	3	8	160
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5	Dokumen	-	5	5	100	5	10	200
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5	Dokumen	-	5	5	100	5	10	200
			15.000.000		-	-	-			-	-
			1.741.000		-	-	-			-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	2	Jenis	-					-	-
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4	Laporan		4	4	100	4	8	200
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4	Laporan	850 1000	322	322	100	4		-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan	2	Data Pengawasan	30000 50000						-
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2	Ekor		2	2	100	15	17	850
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2	Dokumen		2	2	100	100	102	5.100
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	2	Ekor		2	2	100	50	52	2.600
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1	Ton		1	1	100	1	2	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	3	Laporan	1	3	3	100	15	19	633
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322	Ekor						-	-
		Tersedianya Hijauan Pakan ternak	2	Stek/Pols						-	-
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								-	
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	92	Ekor	10	20	20	100	92	122	133
		Pengadaan bibit Ternak Kambing	160	Ekor	15	23	23	100	200	238	149
		Pengadaan bibit Ternak Kerbau	20	Ekor	33	33	33	100	20	86	430
		Pengadaan bibit Ternak babi	50	Ekor	3	5	5	100	50	58	116
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2	Ton	5	5	5	100	15000	15.010	750.500
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	12500	Meter	-	1	1	100		1	0
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1	Dokumen						-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**		**5**	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	Dokumen		1	1	100	1	2	200
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18	Laporan	10	18	10	55,55555556	24	44	244
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	97	Unit						-	-
3.27.03.2.02.01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	10000	Unit		12500	12500	100	12500	25.000	250
3.27.03.2.02.02	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	21	Unit		23	23	100	23	46	219
3.27.03.2.02.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	12500	Unit		33000	33000	100	20000	53.000	424
3.27.03.2.02.04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Unit	80	5	5	100	5	90	2.250
3.27.03.2.02.06	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	19	Unit	-	33	33	100	33	66	347

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	-	1	1	100	1	2	200
3.27.03.2.02.08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit		15	15	100	15	30	1.500
3.27.03.2.02.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara			-	3	3	100		3	
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	30	Unit	-	-	-		33	33	110
		Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	30	Unit					3	3	10
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan pagar pembatas	25000	Meter	-	2	2	100	4500	4.502	18
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	23	Unit	-	2	2	100		2	9
		Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	11	ha						-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	96	Persen	-	1	1	100		1	1
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong daging telur susu	5	Jumlah/Jenis Produk Hewan	-	2	2	100		2	40
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	persen						-	-
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65	Laporan		65	65	100	80	145	223
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150	Laporan	18 3000	2000	2000	100	80		-
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2	Laporan	-	2	2	100	80	82	4.100
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	2	Jenis	-	-	-			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3	Laporan	-	3	3	100	3	6	200
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2	Jenis						-	-
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2	Laporan		2	2	100	2	4	200
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2	Laporan	-	2	2	100	2	4	200
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3	Jenis						-	-
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7	Laporan	-	35	35	100	40	75	1.071
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30	Laporan		15	15	100	200	215	717
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70	Dokumen		15	15	100	15	30	43

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95	Persen						-	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	2400	Ha						-	-
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000	Ha	18	5	5	100	3000	3.023	151
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	200	Ha	-	313	313	100	313	626	313
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	18	Ha	-	2	2	100	2	4	22
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	95	Laporan	95 Laporan	5	5	100	6	16	17

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	200	Laporan	200 Laporan	400	400	100	400	1.200	600
	Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35	Rekomendasi	35 Reko-mendasi						-
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Surat	20 Surat						-
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	20	Laporan	20 Laporan	40	40	100	40	120	600
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	15	Dokumen	15 Dokumen						-
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	15	Dokumen	15 Dokumen	2	2	100	2	6	40
	Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani naik kelas	4	Persen	4 Persen						-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	95	Persen	95 Persen						-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25							-	-
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP Posluhtan Taman Teknologi Pertanian dan Peternakan) Penyuluhan	73	Kelembagaan Penyuluh	73 Kelembagaan Penyuluh	73	73	100	26	172	236
		Pertanian Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Rapat Teknis BPP	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	100	Orang	100 Orang	100	100	100	100	300	300
		Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	100	Orang	100 Orang	100	100	100	100	300	300
		Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	80		80	80	80	100	70	230	288
		Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	6	P4S	6 P4S	6	6	100	5	17	283

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	**Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**	**Tingkat Realisasi (%)**		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1	TTP	1 TTP	1	1	100	1	3	300
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya								-	
		Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	2743	Kelembagaan Petani	2743 Kelembagaan Petani	2743	2743	100	2510	2.743	100
		Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani	2550	Kelompok Tani Dewasa	2550 Kelompok Tani Dewasa	2550	2550	100	2500	2.743	108
		Pembinaan dn Penumbuhan Kelompok Wanta Tani	195	Kelompok Wanita Tani	195 Kelompok Wanita Tani	135	135	100	180	2.743	1.407
		Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	40	Kelompok Taruna Tani	40 Kelompok Taruna Tani	40	40	100	40	2.743	6.858
		Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug Peda dan Penas)	1	KTNA	1 KTNA	1	1	100	1	2.743	274.300
		Pembinaan dan penumbuhan Asosiasi Petani	2	Asosiasi Petani	2 Asosiasi Petani	2	2	100	2	2.743	137.150
		Pembinaan dan Penumbuhan Gapoktan	170	Gapoktan	170 Gapoktan	170	170	100	165	2.743	1.614

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Lomba Asah Terampil Petani	195	Kelompok Tani	195 Kelompok Tani	135	135	100	180	2.743	1.407
		Kontes Produk Pertanian	40	Kelompok Tani	40 Kelompok Tani	40	40	100	35	2.743	6.858
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Kelembagaan Penyuluhan	5 Kelembagaan Penyuluhan	5	5	100			-
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	19	BPP	19 BPP	13	13	100	13	39	205
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	80	Posluhdes	80 Posluhdes	80	80	100	19	179	224
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S)	6	P4S	6 P4S	6	6	100	5	17	283

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tama Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1	TTP	1 TTP	1	1	100	1	3	300
		Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	5	Posluhdes	5 Posluhdes	5	5	100	5	15	300
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk								-	
		Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani								-	
		Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	179	Kios Saprodi	179 Kios Saprodi	173	173	100	164	510	285
		Pengembangan dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	126	LKMA	126 LKMA	126	126	100	121	373	296
		Pengembangan dan penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	37	UPJA	37 UPJA	37	37	100	32	106	286

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran pada Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2021 s/d 2026 yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. meningkatnya produktivitas komoditas pertanian;
2. meningkatnya produksi komoditas pertanian;
3. meningkatnya produksi peternakan; dan
4. meningkatnya kesejahteraan petani.

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel T-C.30. pencapaian kinerja pelayanan dinas pertanian dan peternakan dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Produktivitas (Ton/Ha)											
	Padi			3,79	3,96	4,16	4,39	4,34	4,45	4,56	4,69	
	Jagung			5,81	6,08	6,38	6,74	5,09	5,10	5,40	6,00	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau yang cukup panjang, sehingga tanaman tidak optimal pertumbuhannya
2	Produksi (Ton)											
	Padi			118.705,80	119.815,20	120.924,60	122.034,00	115.103	127.937	129.125	131.500	
	Jagung			54.246	86.895	131.463	199.317	7.673	8.542	10.750	11.850	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau yang panjang, sehingga terjadi penurunan luas tanam dan sebagian mengalami gagal panen
	Palawija (Porang)			385	540	715	910	0	0	0	0	Target tidak tercapai karena petani tidak tertarik menanam porang yang harga kurang menjanjikan
	Hortikultura			108.320	110.126	112.008	113.960	70.490	78.680	112.008	113.960	Target tidak tercapai karena kemarau yang panjang, sehingga terjadi penurunan luas tanam dan mengalami gagal panen
3	Produksi (Kg)											
	Daging			14,317,000	14,603,000	15,000,000	15.200.000	20.350.720	28,069,290	29,750,000	30.900.000	
	Telur			1,641,000	1,691,000	1,741,000	1.794.000	3.820.404	2.451.881	2,620,900	2.892.500	
4	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan			101.07	104.11	107.44	111,09	101,61	104.11	106.44	107,09	Data Statistik (BPS) NTP tanaman pangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perencanaan pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Isu-isu penting akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, adapun isu strategis PD adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	
Penentuan	Isu-Isu Strategis
Alih Fungsi Lahan Pertanian	Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka. Sehubungandengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yangstrategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaanpangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi dari lahan pertanian. Perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas sumberdaya lahan menurun. Luas lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan baru sangat terbatas, banyak petani yang bekerja di luar sektor pertanian (alih profesi) karena memiliki upah kerja yang cukup menjanjikan, adanya eksploitasi lahan yang cukup luas di bidang pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan Sebagian lahan pertanian tidak dapat ditanamai sebagi dampak dari kegiatan terrsebut (lahan menjadi cepat banjir apabila terjadi hujan dan menjadi cepat kering apabila terjadi panas serta menurunnya kwalitas air dan media tanam).
Perubahan Iklim	Terjadinya kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun air bawah tanah yang cenderung berkurang. Pada sisi lain perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergeseran musim tanam, munculnya serangan OPT, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	lain sebagainya, yang akan berdampak pada penurunan hasil produksi tanaman yang diusahakan pada tahun berjalan. Menghadapi perubahan iklim dalam kaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman diperlukan beberapa langkah yang sesuai. Kajian komperehensif dampakperubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukanlangkah yang tepat bagi pemerintah maupun petani. Selain itu diperlukan peningkatanpemahaman agro ekosistem oleh petani sehingga lebih cermat mengamati dan menyikapi perubahan yang ada.
Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar, dan permodalan serta perlindungan usaha tani	Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan penyerapan pembiayaan usaha kecil dibidang pertanian terutama tanaman pangan relatif rendah. Disisi lain kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang relatif rendah juga merupakan faktor pembatas dalam penyusunan proposal dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Sehingga perlu upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan agar memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang paling umum terjadi dalam usaha, terutama bagi usaha kecil seperti usahatani. Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Dalam usaha tani permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks antara lain karena persyaratan untuk memperoleh kredit formal sulit dipenuhi oleh petani, risiko usaha tani yang tinggi, dan adanya tenggang waktu lama untuk menunggu hasil. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai sistem kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan.
Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana	Kebijakanpengembangan kawasan pertanian untuk memproduksi komoditas unggulan yang berbasis klaster, dimana pendekatan ini dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif system maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Peraturan Menteri Pertanian No 50 Tahun 2012 merupakan upaya untuk mewujudkan pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan secara berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan kinerja pengembangan komoditas yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (multiple cropping system dan crop livestock system), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan. Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu hamparan kawasan sentra produksi yang berskala ekonomis mensyaratkan suatu pendekatan yang berbentuk klaster (cluster). Mengingat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan masih sangat terbatas kalaupun tidak dapat dikatakan masih relatif belum ada, maka pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan perlu dilakukan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat esesial bagi system produksi pertanian. Air bagi pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, melainkan juga sangat menentukan potensi perluasan areal tanam (ekstensifikasi), luas areal tanam, intensitas pertanaman (IP), serta kualitas hasil.Pengelolaan sumberdaya air adalah aktivitas perencanaan, pengembangan, distribusi, dan pengaturan agar sumberdayaair digunakan secara optimum dalam memenuhi berbagai keperluan. Embung dan waduk merupakan bangunan air yang banyak dibangun sebagai salah satu solusi dalam berbagai masalah yang berhubungandengan sumber daya air, baik pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian. Pembangunan waduk, embung dan jaringan irigasi memang mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Kondisi saat ini menunjukkan masih terbatasnya jumlah waduk dan embung serta pengelolaan irigasi masih belum optimal.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara	Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi, meskipun Target RPJMD belum sepenuhnya tercapai. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2010 adalah 7,65 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,14 triliun rupiah. Pembangunan pertanian masih jalan ditempat, dan belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku produksi, seperti petani, pekebun, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku lainnya terkait.Kedepan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur jalan usaha tani merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Saat ini jaringan jalan produksi dan jalan usahatani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, alat dan mesin pertanian kesulitan keluar masukke daerah pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Peranan infrastruktur Pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program khususnyaprogram peningkatan nilai tambah. Infrastruktur Pertanian khususnya jalan usaha tanimerupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem jalan usaha tani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan). Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai/terdapat jalan usaha tani yang memadai sehingga dapat menghambat masyarakat tani dalam berusaha dilahannya. Didalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan terdapat klausul jalan khususnya yaitu jalanyang pembangunan dan pembinaannya merupakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	tanggung jawab departemen terkait. Unsur yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non pertanian. Nilai pendapatan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta hargajual. Hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan. Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani, atau sebaliknya. Pengetahuan secara mendalam tentang perilaku nilai tukar petani, dampak pembangunan, dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan ke depan.
Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Jagung, Palawija dan Hortikultura	Kondisi produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya karena belum sepenuhnya diterapkannya aplikasipaket teknologi sesuai anjuran. Disisi lain perlu dilakukan upaya peningkatan mutumelalui penerapan GAP (Good Agriculture Practice). Selain itu untuk mengurangi biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan air maka perlu diterapkan teknologi pertanian organik yangramah lingkungan, penerapan system pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar, optimalisasi lahan dan konservasi di lahan kering.
Produksi dan kualitas Ternak ruminansia masih rendah	Populasi ternak ruminansia masih rendah dikarenakan tingkat kepemilikan ternak masih sedikit, mutu pakan ternak rendah, tingkat kematian masih tinggi dan masih sering terjadi serangan penyakit. Mutu genetic cenderung menurun dikarenakan terjadi kawin dalam (inbreeding).

Tantangan:

1. Kemampuan petani dalam penerapan paket teknologi masih rendah.
2. Infrastruktur & prasarana pengembangan pertanian belum memadai.
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.
4. Dampak perubahan fenomena iklim dan gangguan OPT terhadap peningkatan produksi.
5. Kurangnya minat pemuda untuk kegiatan usaha tani.

peluang:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Pengembangan pertanian tanaman pangan merupakan skala prioritas dalam program kukar idaman (inovatif, daya saing dan mandiri).
3. Memiliki potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan.
4. Peluang pasar dan kemitraan agribisnis cukup besar.
5. Tersedia sumberdaya kelompok masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian.
6. Adanya Program percepatan modernisasi pertanian.

Sedangkan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dalam perumusan Program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan adalah :

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan					
	Mengembangkan Pertanian berbasis kawasan					
	Perbaikan sistem pertanian dari hulu sampai hilir					
	Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura					
Peningkatan Produksi Daging dan Telur serta Populasi Ternak	Mengembangkan peternakan pola integrasi					
	Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis					
	Penerapan Teknologi Peternakan					
Meningkatkan manajemen usaha tani dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditas pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya petani					
	Mempermudah akses permodalan					
	Hilirisasi produk pertanian					

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja dan Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Renja-PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD tahun 2022-2026 serta urusan pertanian dan peternakan, maka fungsi dan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Proyek strategis pembangunan Daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala Daerah terpilih, setiap proyek strategis Daerah dijabarkan kedalam Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing PD melalui "Program Dedikasi KUKAR IDAMAN" dengan proyek strategis pembangunan Daerah bagi Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2021-2026 yaitu pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berbasis kawasan, dengan jenis komoditas yang dikembangkan adalah padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. adapun kawasan yang sudah ditetapkan adalah mencakup 5 (lima) kawasan, dengan luas keseluruhan + 8.093,06 Ha (kurang lebih delapan ribu sembilan puluh tiga koma nol enam hektar), terdiri dari :

1. Kawasan Pertanian Kecamatan Sebulu-Muara kaman dengan luasan sebesar 1.519,4154 Ha (seribu lima ratus sembilan belas koma empat ribu seratus lima puluh empat hektar);
2. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong – Loa Kulu dengan luasan sebesar 1.193,1352 Ha (seribu seratus sembilan puluh tiga koma seribu tiga ratus lima puluh dua hektar);
3. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang I dengan luasan sebesar 2.010,2623 Ha (dua ribu sepuluh koma dua ribu enam ratus dua puluh tiga hektar);
4. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang II dengan luasan sebesar 2.295,3461 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima koma tiga ribu empat ratus enam puluh satu hektar);
5. Kawasan Pertanian Kecamatan Marangkayu dengan luasan sebesar 1.081,3645 Ha (seribu delapan puluh satu koma tiga ribu enam ratus empat puluh lima hektar);

Kegiatan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun 2025 terhadap 5 (lima) kawasan tersebut maupun diluar kawasan antara lain meliputi :

a. Pembangunan jaringan irigasi tersier usaha tani 39 unit (39 unit x 500 meter = 19.500 Meter);
b. Pembangunan embung pertanian (embung kecil) sebanyak 28 Unit;
c. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 120 unit (500 meter x 120 unit = 60.000 meter);
d. Pembangunan DAM Parit 12 unit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

e. Penyediaan sarana produksi berupa pupuk, benih tanaman, pestisida.
f. Pendampingan dan Penyuluhan Pertanian.
g. Penyediaan Hewan ternak dan Obat Hewan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renja awal dan hasil analisis kebutuhan, maka pada Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2025, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perubahan pada Program, kegiatan, maupun sub kegiatan.
2. Terdapat Program/kegiatan/sub kegiatan yang besarannya perlu penambahan yaitu :
   a. Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian (4 sub egiatan);
   b. Kegiatan pembangunan prasarana pertanian (6 subkegiatan);
   c. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian (3 subkegiatan);
3. Terdapat Program/kegiatan/sub kegiatan yang besarannya berkurang yaitu :
   a. Kegiatan pembangunan prasarana pertanian (3 subkegiatan);
   b. Kegiatan pengembangan prasarana pertanian (1 sub kegiatan);

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. *Revie*w terhadap rancangan akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	68 Nilai	66.822.181.827	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	68 Nilai	100.670.072. 028	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 Dokumen	785.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	700.000.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	6 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Dokumen	300.000.000	Menyesuaikan kebutuhan pagu
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Laporan	1 Dokumen	35.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Laporan	200.000.000	Menyesuaikan kebutuhan pagu
3.27.01.2.01.09						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20 Kecamatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	17 Laporan	56.004.043.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	14 Laporan	92.389.571. 669	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Kecamatan	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	481 Orang	55.335.606.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Kecamatan	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	7.672 Orang/ Bulan	91.449.571.669	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Kecamatan	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Orang	360.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Kecamatan	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	580.000.000	Tambahan pagu sub keg

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	48.437.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan	16 Laporan	260.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	360.000.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.065.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	56.065.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.03.03						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.03.05						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.03.07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3.27.01.2.04						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	
3.27.01.2.04.07						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 Kecamatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.053.167.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	308.471.000	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18 Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	481 Stell	481.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18 Kecamatan	Jumlah Administrasi Pegawai	481 Orang	481.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	51.740.000	Menyesuaikan kebutuhan pagu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18 Kecamatan	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	74.936.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Kecamatan	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	240.500.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Kecamatan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	16.231.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Kecamatan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	16.231.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.626.122.755	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.645.975.700	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Kecamatan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	47.076.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Kecamatan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	47.076.700	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Kecamatan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	776.582.055	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Kecamatan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	350.000.000	Menyesuaikan kebutuhan pagu
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Kecamatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	245.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Kecamatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	260.000.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18 Kecamatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1). 3 Buku 2). 3 Lembar 3). 3 Buah	49.475.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Kecamatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.475.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18 Kecamatan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan	2.000 Eksemplar	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 Kecamatan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan	2.486 Dokumen	174.000.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	400 Orang/ Tugas	418.565.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	250 Laporan	550.000.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18 Kecamatan	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	650 Berkas	65.424.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Kecamatan	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	650 Dokumen	215.424.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50 Unit	992.350.480	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	14 Unit	1.470.587.480	
Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1 Unit	300.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	528.237.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	300.000.000	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	492.350.480	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	642.350.480	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.772.757.592	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.013.684.179	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jada Surat Menyurat	12 Bulan	1.991.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	654.084.564	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.194.540.581	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	95.832.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	95.832.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.518.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	723.311.598	Menyesuaikan kebutuhan pagu
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	340 Unit	1.532.676.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	364 Unit	1.871.782.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	2 Unit	139.106.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	2 Unit	278.212.000	Tambahan pagu sub keg

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	215 Unit	698.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	250 Unit	698.570.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	75 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	75 Unit	400.000.000	Tambahan pagu sub keg
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	48 Unit	495.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi	37 Unit	495.000.000	
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Luas Tanam Padi	42.577 Ha	13.540.000.000	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Luas Tanam Padi	29.990 Ha	51.545.987. 500	
			Luas Tanam Jagung	30.000 Ha				Luas Tanam Jagung	0 Ha		
			Luas Tanam Palawija (porang)	65 Ha				Luas Tanam Palawija	2.740 Ha		
			Luas Tanam Hortikultura	30.201 Ha				Luas Tanam Hortikultura	15.125 Ha		
			Populasi Ternak Besar	37.988 Ekor				Populasi Ternak Besar	16.500 Ekor		
			Populasi Ternak Kecil	18.901 Ekor				Populasi Ternak Kecil	13.012 Ekor		
			Populasi Ternak Unggas	17.938.000 Ekor				Populasi Ternak Unggas	19.470.700 Ekor		
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*	*152 Paket*	*1.904.050.000*	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*	*154 Paket*	*41.301.087. 500*	
3.27.02.2.01.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18 Kecamatan	Jumlah Kawasan Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi	5 Kawasan	200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Kecamatan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	200.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	7 Laporan	9.010.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Kecamatan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	8 Laporan	41.101.087.500	
		18 Kecamatan	Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	3 Ha	430.000.000						Rincian sub keg tidak dilaksanakan
		18 Kecamatan	Jumlah Alsintan yang diadakan	3.012 Unit	3.250.000.000		14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Handtraktor	30 Unit	1.251.750.000	
							14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Handtraktor Rotary	10 Unit	500.000.000	
							14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Cultivator	30 Unit	630.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Handsprayer	1.000 Unit	1.000.000.000	
							14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Traktor Roda Empat	5 Unit	1.251.750.000	
							14 Kecamatan	Pengadaan Alsintan Power Thresher	30 Unit	925.000.000	
		18 Kecamatan	Jumlah Saprodi yang diadakan	1.300 Ha	2.500.000.000		15 Kecamatan	Pengadaan pupuk (organik dan non organik) dan pembenahan tanah	2.500 Ha	25.000.000.000	
		18 Kecamatan	Jumlah Luasan benih padi yang diadakan	3.500 Ha	1.080.000.000		9 Kecamatan	Pengadaan Benih Padi	2.500 Ha	1.700.000.000	
		18 Kecamatan	Jumlah Luasan Benih Jagung	3.000 Ha	750.000.000		20 Kecamatan	Jumlah Luasan Saprodi Jagung	100 Ha	693.000.000	
		18 Kecamatan	Jumlah Luasan Palawija (Porang)	14 Ha	500.000.000						Rincian sub keg tidak dilaksanakan
		18 Kecamatan	Jumlah Luasan Benih Hortikultura	50 Ha	500.000.000		15 Kecamatan	Pengadaan Benih Hortikultura	25 Ha	1.500.000.000	
							12 Kecamatan	Pembangunan Green House	12 Unit	5.832.000.000	
							12 Kecamatan	Pembuatan Hidroponik	12 Unit	120.000.000	
							20 Kecamatan	Administrasi Perkantoran (AP) 2,5%	30 Unit	697.587.500	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	36 Komoditi	600.000.000						
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	5 Komoditi	200.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Komoditi	200.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Komoditi	200.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pengawasan	2 Jenis	150.000.000						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	18 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	4 Dokumen	75.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Rekomendasi Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	4 Dokumen	75.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengendalian dan pengawasan	2 Data Pengawasan	275.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengendalian dan pengawasan	2 Data Pengawasan	220.000.000	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	18 Kecamatan	Jumlah sosialisasi	25 Pelaku Usaha Peternakan	55.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	18 Kecamatan	Jumlah Benih dan Bibit yang diuji	100 Sampel	55.000.000	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	20 Kecamatan	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	55.000.000	
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	18 Kecamatan	Peredaran Benih/bibit ternak yang diawasi	50 Dokumen SKKH	55.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	18 Kecamatan	Fasilitasi Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Fasilitasi	55.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	18 Kecamatan	Jumlah Pengawasan	15 Kali	55.000.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 Kecamatan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2 Laporan	55.000.000	
3.27.02.2.05.07						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	20 Kecamatan	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	50 Laporan	55.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.02.2.05.08						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	20 Kecamatan	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	20 Laporan	55.000.000	Sub kegiatan baru

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322 Ekor	3.305.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yan Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Tersedianya Benih/Bibit Ternak	312 Ekor	2.905.000.000	
			Tersedianya Hijauan Pakan ternak	15.000 Stek/Pols				Tersedianya Hijauan Pakan ternak	15.000 Stek/ Pols		
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	18 Kecamatan	Pengadaan bibit Ternak Sapi	92 Ekor	1.105.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
		18 Kecamatan	Pengadaan bibit Ternak Kambing	160 Ekor	800.000.000						
		18 Kecamatan	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	20 Ekor	800.000.000						
		18 Kecamatan	Pengadaan bibit Ternak babi	50 Ekor	500.000.000						
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	18 Kecamatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	15.000 Stek/Pols	100.000.000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 Kecamatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	1 Ton	100.000.000	
3.27.02.2.06.03						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 Kecamatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	312 Ekor	2.805.000.000	Sub kegiatan baru

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	10.500 Meter	26.461.000.000	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	19.500 Meter	59.037.500. 000	
			2. Jumlah Embung Yang di Bangun	19 Unit				2. Jumlah Embung Yang di Bangun	9 Unit		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1 Dokumen	1.000.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1 Dokumen	800.000.000	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	18 Kecamatan	Luas Lahan LP2B/KP2B.LCP2B yang dikembangkan	1 Ha	800.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	18 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24 Laporan	200.000.000	
3.27.03.2.01.15						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	1 Dokumen	600.000.000	Sub Keg Baru
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	139 Unit	25.461.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	164 Unit	58.237.500. 000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	18 Kecamatan	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi	7.500 Meter	6.900.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Embung Petanian	19 Unit	4.611.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	20 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Embung Petanian	15 Unit	8.062.500.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18 Kecamatan	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	10.500 Meter	10.900.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20 Kecamatan	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	40 Unit	10.900.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan Dam Parit	3 Unit	900.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	20 Kecamatan	Jumlah Pembangunan Dam Parit	*40 Unit*	*15.600.000.000*	
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Pintu Air	19 Unit	800.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	20 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Pintu Air	*40 Unit*	*2.200.000.000*	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	18 Kecamatan	Rumah potong hewan higienis dan terjamin. (Rehabiitasi dan pemeliharaan)	1 Unit	200.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	18 Kecamatan	Jumlah Pembang-unan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2 Unit	400.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	20 Kecamatan	Jumlah Pembangu-nan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1 Unit	400.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	35 Unit	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	20 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	5 Unit	750.000.000	
		18 Kecamatan	Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	35 Unit	100.000.000						
		18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan pagar pembatas	30.000 Meter	200.000.000						
		18 Kecamatan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	28 Unit	50.000.000						
		18 Kecamatan	Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	11 Ha	200.000.000						
3.27.03.2.02.10						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	20 Kecamatan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	25 Unit	20.125.000.000	Sub Keg Baru
3.27.03.2.02.15						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	20 Kecamatan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	200.000.000	Sub Keg Baru

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.04	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	97 Persen	975.000.000	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5 Jenis	700.000.000	
								Persentase Derajat Kesehatan Ternak	97 Persen		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	250.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	250.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	18 Kecamatan	Persentase Derajat Kesehatan Ternak pada masyarakat	65 Persen	100.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Kecamatan	Terlaksananya Pengambilan Sample Darah untuk Uji Jembrana dan Brucellosis	150 Ekor	50.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	18 Kecamatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	100.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	20 Kecamatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	100.000.000	
3.27.04.2.01.05						Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	20 Kecamatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	20 Wilayah	100.000.000	Sub Keg Baru
3.27.04.2.01.08						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	Sub Keg Baru
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan	2 Jenis	200.000.000						
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	18 Kecamatan	Identifikasi Resiko Penyakit hewan dan keamanan Produk Hewan	3 Kasus	100.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	18 Kecamatan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	2 Jenis	100.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2 Jenis	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2 Jenis	300.000.000	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	18 Kecamatan	Pengiriman Sampel Produk Peternakan	2 Sampel	100.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20 Kecamatan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	100.000.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	18 Kecamatan	Jumlah Unit Pelayanan	2 Unit	200.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 Kecamatan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	200.000.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3 Jenis	225.000.000	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3 Jenis	150.000.000	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	18 Kecamatan	Unit Usaha yang didampingi	7 Unit	75.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	18 Kecamatan	Pengawasan sampel produk asal hewan (Bakso, Adonan dr penggilingan, dll) dari cemaran bahan yang tak ASUH (aman sehat utuh dan halal)	30 Sampel	75.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 Kecamatan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30 Laporan	75.000.000	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	18 Kecamatan	Mengujikan sampel produk asal hewan (Bakso, Adonan dr penggilingan, dll) dari cemaran bahan yang tak ASUH (aman sehat utuh dan halal)	70 Sampel	75.000.000					-	
3.27.04.2.04.10						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	20 Kecamatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	7 Unit Usaha	75.000.000	Sub Keg Baru

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Luas Pengendalian OPT Pertanian	2.400 Ha	3.050.000.000	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Luas Pengendalian OPT Pertanian	2.400 Ha	2.250.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas Pengendalian OPT Pertanian	2.400 Ha	3.050.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas Pengendalian OPT Pertanian	2.400 Ha	2.250.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Terkendalinya Serangan OPT Pertanian	2.000 Ha	1.100.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2.100 Ha	1.100.000.000	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Luas lahan Pertanian yang di kelola	200 Ha	500.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2.000 Ha	500.000.000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Brigade Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan Pertanian	18 Kelompok	300.000.000						Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	18 Kecamatan	Persentase penangulangan Derajat Kesehatan Ternak pada masyarakat	95 Persen	150.000.000	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	20 Kecamatan	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5 Laporan	150.000.000	
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	18 Kecamatan	Luas Lahan Replanting	200 Ha	1.000.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.05.2.01.06						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	20 Kecamatan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6 Laporan	500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35 Reko-mendasi	400.000.000	Perizinan Usaha Pertanian		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35 Reko-mendasi	150.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Surat	250.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Surat	100.000.000	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	20 Pelaku	250.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.06.2.01.05						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	20 Kecamatan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	10 Laporan	100.000.000	Sub Keg Baru
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	15 Dokumen	150.000.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	10 Dokumen	50.000.000	
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	18 Kecamatan	Jumlah rekomendasi	15 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	20 Kecamatan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10 Dokumen	50.000.000	
3.27.07	Penyuluhan Pertanian		Cakupan kelompok tani naik kelas	5 Persen	7.800.000.000	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	4 Persen	14.849.000. 000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan Lembaga Petani yang dibina	100 Persen	7.800.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan Lembaga Petani yang dibina	100 Persen	14.849.000. 000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP, Posluhtan, Taman Teknologi Pertanian dan P4S) yang di bina dan ditumbuhkan	73 Kelembagaa n Penyuluhan	3.000.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	20 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	3.374.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan / pendampingan/penumbuhan	2,743 Kelem-bagaan Petani	2.200.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	20 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani yang mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/ penumbuhan	3.249 Unit	2.675.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Kelem-bagaan Penyuluhan	2.000.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	3.800.000.000	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani	18 Kelem-bagaan Ekonomi Petani	300.000.000						Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sekolah Lapang	100 Orang	300.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	20 Unit	*3.900.000.000*	
3.27.07.2.01.08						Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	20 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 Unit	500.000.000	Sub Keg Baru
3.27.07.2.01.09						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	20 Kecamatan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	600.000.000	Sub Keg Baru
Total					119.048.181.827					222.082.659.528	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian dan Peternakan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dan Peternakan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) tahun 2026, agar didalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2026 disamping hasil survey ke lapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Adapun Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dprd kabupaten kutai kartanegara tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Sub Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
A	Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)								
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	17 Unit & 7 Paket	2.063.900.000	
	2189901	Pembangunan Green House (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Sebulu	Sebulu Ilir			1 Unit	450.000.000	Musrenbang
	2340123	Pembangunan Green House (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Sebulu	Giri Agung			1 Unit	450.000.000	Musrenbang
	2049373	Pembangunan Green House (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Tenggarong	Panji			1 Unit	450.000.000	Musrenbang
	2352071	Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Muara Wis	Sebemban RT. 001			1 Unit	10.000.000	Musrenbang
	2264176	Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Samboja Barat	RT 04, Bukit Merdeka			1 Unit	10.000.000	Musrenbang
	2090942	Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Sanga Sanga	Pendingin	KWT Srikandi Pendingin		1 Unit	10.000.000	Musrenbang
	2090968	Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Sanga Sanga	Pendingin	KWT Melati		1 Unit	10.000.000	Musrenbang
	2317456	Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Tenggarong Seberang	RT.01 Embalut			1 Unit	10.000.000	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
	2247445	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Kenohan	Kahala Ilir RT.07	Harapan Etam		1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2309219	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Kota Bangun Darat	Desa Kota Bangun I			1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2090990	Pengadaan Alsintan berupa Power Threser (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sanga Sanga	Pendingin	KT Sumber Berkat		1 Unit	37.000.000	Musrenbang
	2090981	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sanga Sanga	Pendingin	KT Sumber Berkat		1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2279946	Pengadaan Alsintan berupa Power Threser (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sebulu	Segihan			1 Unit	37.000.000	Musrenbang
	2274846	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sebulu	Manunggal Daya			1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2279716	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sebulu	Segihan			1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2210317	Pengadaan Alsintan berupa Traktor Roda Empat Pengadaan Alsintan berupa Power Threser (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Tenggarong Seberang	RT.001 Suka Maju			1 Unit	278.900.000	Musrenbang
	2310593	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal,			1 Unit	46.000.000	Musrenbang
	2275918	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Kota Bangun Darat	Kota Bangun I			1 Paket	5.000.000	Musrenbang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
	2321523	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Loa Janan	Purwajaya			1 Paket	5.000.000	Musrenbang
	2226251	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Loa Kulu	RT 008 Jembayan Tengah			1 Paket	5.000.000	Musrenbang
	2090931	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sanga Sanga	Pendingin	KT Karya Tani		1 Paket	5.000.000	Musrenbang
	2090964	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sanga Sanga	Pendingin	KWT Melati		1 Paket	5.000.000	Musrenbang
	2236805	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sebulu	Lekaq Kidau			1 Paket	5.000.000	Musrenbang
	2210370	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Tenggarong Seberang	RT.001, Suka Maju			1 Paket	5.000.000	Musrenbang
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	2.093 Ekor	4.400.000.000	
	2274192	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Kota Bangun Darat	Kota Bangun I			300 Ekor	100.000.000	Musrenbang
	2268482	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Sebulu	Sanggulan			300 Ekor	100.000.000	Musrenbang
	2296050	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Sebulu	Senoni			300 Ekor	100.000.000	Musrenbang
	2136518	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Tenggarong Seberang	Kerta Buana			300 Ekor	100.000.000	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
	2296789 Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	KWT Kencana		300 Ekor	100.000.000	Musrenbang
	2411850 Pengadaan Bibit Ternak Itik	Sebulu	RT.05 Tanjung Harapan			300 Ekor	100.000.000	Musrenbang
	2367951 Pengadaan bibit Ternak Kambing	Kota Bangun	RT. 011 Liang			25 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2139473 Pengadaan bibit Ternak Kambing	Loa Kulu	RT 006, Jembayan Tengah			25 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2267038 Pengadaan bibit Ternak Kambing	Sebulu	Manunggal Daya	Karya Bersama		25 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2292738 Pengadaan bibit Ternak Kambing	Loa Janan	RT 24, Loa Duri Ilir			25 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2326659 Pengadaan bibit Ternak Kambing	Loa Janan	Purwajaya	Desa Purwajaya		25 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2307831 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Kembang Janggut	Kelekat			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2372752 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Kota Bangun	RT. 02 Liang Ulu			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2246142 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Kota Bangun Darat	RT. 001, Kota Bangun II	Sido Makmur		12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2279741 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Loa Janan	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2288303 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Loa Janan	Tani Harapan			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2173546 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Muara Wis	Muara Wis			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2363469 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Samboja	RT. 018, Sanipah			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
	2007301 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Samboja Barat	RT.007, Salok Api Laut			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2265163 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Samboja Barat	Bukit Merdeka			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2252967 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Sebulu	Giri Agung			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2268893 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Sebulu	Segihan			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2299245 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2304857 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	Sri Rejeki		12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
	2310154 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Tenggarong Seberang	Loa Bukit RT.008			12 Ekor	200.000.000	Musrenbang
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				Jumlah Pembangunan Dam Parit	1 Unit	390.000.000	
	2252752 Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian	Sebulu	Giri Agung			1 Unit	390.000.000	Musrenbang
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000	
	2373779 Pembangunan Pintu Air pada saluran tersier di Kawasan Pertanian	Sebulu	Manunggal Daya	Langgeng		1 Unit	50.000.000	Musrenbang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliha-raan kandang	6 Unit	1.500.000.000	
	2372550 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Kota Bangun	RT. 02 Liang Ulu			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
	2275497 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Muara Badak	RT. 002, Salo Palai			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
	2369434 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Muara Muntai	Muara Leka Rt.04			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
	2328536 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Muara Wis	Sebemban RT. 003			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
	2364334 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Muara Wis	Enggelam RT. 001			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
	2271770 Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	Loa Janan	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01			1 Unit	250.000.000	Musrenbang
6	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Sekolah Lapang Kelom-pok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	55.000.000	
	2337510 Pelatihan Kelompok Tani	Loa Kulu	Loh Sumber			1 unit	20.000.000	Musrenbang
	2090950 Pelatihan Kelompok Tani	Sanga Sanga	Pendingin	Mitra Tunas		1 unit	15.000.000	Musrenbang
	2257754 Pelatihan Kelompok Tani	Sebulu	Giri Agung			1 unit	20.000.000	Musrenbang
	Total						8.458.900.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
B	Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara							
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	2 Unit	56.000.000	
	1147115 Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	Sebulu	Desa Beloro			1 Unit	10.000.000	Pokok Pikiran
	1309260 Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Sebulu	RT 10 Desa Sanggulan			1 Unit	46.000.000	Pokok Pikiran
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	624 Ekor	600.000.000	
	1209404 Pengadaan Bibit Ternak Ayam					300 Ekor	100.000.000	Pokok Pikiran
	1325258 Pengadaan Bibit Ternak Itik	Sebulu	Tanjung Harapan			300 Ekor	100.000.000	Pokok Pikiran
	1156528 Pengadaan bibit Ternak Sapi	Loa Kulu	sumber Sari rt 08			12 Ekor	200.000.000	Pokok Pikiran
	1209318 Pengadaan bibit Ternak Sapi					12 Ekor	200.000.000	Pokok Pikiran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurah-an/Desa	Kelompok Tani				
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.170.000.000	
	1218941 Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian	Loa Kulu	RT. 15 Marga-hayu			1 Unit	390.000.000	Pokok Pikiran
	1218946 Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian	Loa Kulu	RT. 14 Marga-hayu			1 Unit	390.000.000	Pokok Pikiran
	1218953 Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian	Loa Kulu	RT. 07 Marga-hayu			1 Unit	390.000.000	Pokok Pikiran
	Total						1.826.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020–2024 menegaskan tujuan, sebagai berikut :

1. meningkatnya pemantapan ketahanan pangan;
2. meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
3. terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan peternakan secara nasional, menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas Program, lintas pelaku dan lintas kementerian/lembaga dalam membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan pertanian dan peternakan saat ini dan kedepan termasuk dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi terhadapsub sektor pertanian dan peternakan.

Untuk mendukung visi presiden dan wakil presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2020-2024, maka Kementerian Pertanian menetapkan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024 yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan pertanian.
2. Memberikan pelayanan berkualitas di bidang perencanaan, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk pencapaian Misi (3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka ditetapkanlah tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Tujuan tersebut di ukur dengan indikator tujuan pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produktivitas padi dan jagung;
2. Meningkatnya produksi komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produksi Padi, Jagung, Palawija dan hortikultura;
3. Meningkatnya produksi peternakan, dengan indikator sasaran produksi daging dan telur; serta
4. Meningkatnya kesejateraan petani, dengan indikator sasaran Nilai Tukar Petani (NTP).

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2026. Tujuan Rencana Kerja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Peternakan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Rencana Kerja. Dari tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan periode 2026 sebagai pendukung pembangunan Daerah pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman pangan dan hortikultura	Persen	2,97
			Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persen	0,35
		1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	B
			2 Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100
		2 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	1 Padi	Ton/Ha	4,39
			2 Jagung	Ton/Ha	6,74
		3 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Padi	Ton	122.034
			2 Jagung	Ton	199.317
			3 Palawija	Ton	910
			4 Hortikultura	Ton	113.960
		4 Meningkatnya Produksi Peternakan	1 Daging	Kg	15.200.000
			2 Telur	Kg	3.980.900
		5 Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	111.09

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

Program pembangunan pertanian berbasis kawasan merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi di Daerah, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infratsruktur wilayah.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN Pembangunan Petanian Berbasisis Kawasan adalah :

a. Terwujudnya penetapan kawasan sentra pertanian.
b. Bertambahnya jumlah embung yang dibangun.
c. Bertambahnya jumlah *check* DAM (DAM parit) yang dibangun.
d. Bertambahnya panjang jalan pertanian yang dibangun.
e. Bertambahnya areal tanam jagung.
f. Bertambahnya jaringan irigasi tersier yang dibangun.
g. Bertambahnya pintu air tersier yang dibangun.

Sedangkan indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN Pembangunan Petanian Berbasisis Kawasan adalah :

a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (padi dan jagung);
b. Meningkatnya kesejahteraan petani yang dikur dari nilai tukar petani

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra), Dinas Pertanian dan Peternakan merencanakan beberapa Program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan kepada masyarakat. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 direncanakan berjumlah 7 (tujuh) Program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 85 (delapan puluh lima) subkegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp159.008.487.666,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ribu enam puluh

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

enam rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam Aplikasi SIPD-RI. Kemendagri.go.id Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan maju Tahun 2027 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan		68 Nilai	70.652.087.666	68 Nilai	99.353.669.847
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		9 Dokumen	550.000.000	9 Dokumen	800.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	20 Kecamatan	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	300.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Kecamatan	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	200.000.000
3.27.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20 Kecamatan	1 Data	50.000.000	1 Data	50.000.000
3.27.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Kecamatan	1 Data	100.000.000	1 Data	200.000.000
3.27.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Kecamatan	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel		14 Laporan	66.828.686.368	14 Laporan	92.289.571.669
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	20 Kecamatan	7.672 Orang/ Bulan	66.086.686.368	7.672 Orang/ Bulan	91.449.571.669
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Kecamatan	12 Dokumen	580.000.000	12 Dokumen	580.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	20 Kecamatan	1 Laporan	162.000.000	1 Laporan	260.000.000
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	200.000.000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000
3.27.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 Kecamatan	1 Dokumen	20000.000	1 Dokumen	20.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	151.231.000	3 Dokumen	308.471.000
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Kecamatan	481 Dokumen	25.000.000	481 Dokumen	51.740.000
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Kecamatan	25 Orang	110.000.000	25 Orang	240.500.000
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Kecamatan	15 Orang	16.231.000	15 Orang	16.231.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	627.076.700	7 Layanan	1.495.551.700

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Kecamatan	7 Paket	47.076.700	7 Paket	47.076.700
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Kecamatan	20 Paket	-	20 Paket	350.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Kecamatan	4 Paket	200.000.000	4 Paket	260.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Kecamatan	3 Paket	30.000.000	3 Paket	49.475.000
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan	20 Kecamatan	2.486 Dokumen	-	2.486 Dokumen	74.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	20 Kecamatan	250 Laporan	250.000.000	250 Laporan	550.000.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	20 Kecamatan	650 Dokumen	100.000.000	650 Dokumen	165.000.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		14 Unit	-	14 Unit	992.350.480
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Kecamatan	11 Unit	-	11 Unit	300.000.000
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	20 Kecamatan	1 Unit	-	1 Unit	200.000.000
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	20 Kecamatan	2 Unit	-	2 Unit	492.350.480
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	1.223.311.598	12 Bulan	1.715.048.998
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 Kecamatan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	895.905.400
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Kecamatan	12 Laporan	-	12 Laporan	95.832.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	20 Kecamatan	12 Laporan	723.311.598	12 Laporan	723.311.598
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		364 Unit	1.126.782.000	364 Unit	1.532.676.000
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	20 Kecamatan	7 Unit	278.212.000	2 Unit	139.106.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	20 Kecamatan	250 Unit	698.570.000	250 Unit	698.570.000
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	20 Kecamatan	78 Unit	150.000.000	75 Unit	200.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	20 Kecamatan	37 Unit	-	37 Unit	495.000.000
3.27.02	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi		29.990 Ha	52.492.400.000	29.990 Ha	6.575.000.000
		Luas Tanam Jagung		0 Ha		0 Ha	
		Luas Tanam Palawija		2.740 Ha		2.740 Ha	
		Luas Tanam Hortikultura		15.125 Ha		15.125 Ha	
		Populasi Ternak Besar		16.500 Ekor		16.500 Ekor	
		Populasi Ternak Kecil		13.012 Ekor		13.012 Ekor	
		Populasi Ternak Unggas		19.470.700 Ekor		19.470.700 Ekor	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan		6.310 Unit	41.057.400.000	3.569 Unit	3.450.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.2.01.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*20 Kecamatan*	*1 Laporan*	*150.000.000*	*1 Laporan*	*200.000.000*
3.27.02.2.01.02	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung*	*20 Kecamatan*	*19 Laporan*	*40.907.400.000*	*8 Laporan*	*3.250.000.000*
		Pendampingan Penggunaan sarana produksi dan Produktifitas Jagung	20 Kecamatan	1 Laporan	693.000.000	300 Ha	3.250.000.000
		Pendampingan Penggunaan sarana produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura selain padi dan jagung	20 Kecamatan	1 Laporan	17.669.400.000		
		Pendampingan penggunaan sarana pertanian untuk pengingkatan Produksi Komoditas Padi di dalam Kawasan	20 Kecamatan	1 Laporan	17.605.000.000		
		Pendampingan penggunaan sarana pertanian untuk pengingkatan Produksi Komoditas Padi di luar Kawasan	6 Kecamatan	1 Laporan	340.000.000		
		Pengadaan Alsintan Hand Traktor (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	20 Kecamatan	1 Laporan	200.000.000		
		Pembangunan Green House (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)-Pokir	Sanipah	1 Laporan	200.000.000		
		Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	Sanggulan	1 Laporan	50.000.000		
		Pembuatan Hidroponik (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)-Pokir	Salok Api Laut	1 Laporan	100.000.000		
		Pengadaan Alsintan berupa Traktor Roda Empat Pengadaan Alsintan berupa Power Threser (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	Salok Api Laut	1 Laporan	100.000.000		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengadaan Alsintan Hand Traktor (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	Samboja Barat	1 Laporan	100.000.000		
		Pengadaan Alsintan berupa Cultivator (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	Muara Jawa Ilir	1 Laporan	100.000.000		
		Pengadaan Alsintan berupa Cultivator (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)-Pokir	Manunggal Jaya	1 Laporan	150.000.000		
		Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian-Pokir	20 Kecamatan	3 Laporan	600.000.000		
		Pengadaan Pupuk Majemuk	20 Kecamatan	1 Laporan	*2.136.000.000*		
		Pengadaan Pupuk Tunggal	20 Kecamatan	1 Laporan	*864.000.000*		
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan		2 Data Pengawasan	105.000.000	2 Data Pengawasan	220.000.000
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	20 Kecamatan	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	55.000.000
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 Kecamatan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	55.000.000
3.27.02.2.05.07	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	20 Kecamatan	50 Laporan	25.000.000	50 Laporan	55.000.000
3.27.02.2.05.08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	20 Kecamatan	20 Laporan	25.000.000	20 Laporan	55.000.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yan Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak		3.029 Ekor	11.330.000.000	312 Ekor	2.905.000.000
		Tersedianya Hijauan Pakan ternak		15.000 Stek/Pols		15.000 Stek/Pols	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	20 Kecamatan	1 Ton	100.000.000	1 Ton	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		3.029 Ekor	11.230.000.000	312 Ekor	2.805.000.000
		Pengadaan Bibit Ternak	*20 Kecamatan*	*312 Ekor*	*2.805.000.000*	*312 Ekor*	*2.805.000.000*
		Pengadaan Bibit Ternak Ayam (Musrenbang)	*Senoni, Sanggulanm Kerta Buana, Kota Bangun I*	*1.500 Ekor*	*500.000.000*		
		Pengadaan Bibit Ternak Itik (Musrenbang)	*Tanjung Harapan*	*300 Ekor*	*100.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Kambing (Musrenbang)	*Jembayan Tengah, Purwajaya, Loa Duri Ilir, Manunggal Daya, Liang*	*125 Ekor*	*1.000.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi (Musrenbang)	*20 Kecamatan*	*168 Ekor*	*2.800.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Mangkurawang*	*12 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Itik	*Loa Ipuh*	*300 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Ayam	*Loa Ipuh*	*1050 Ekor*	*350.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Senoni*	*15 Ekor*	*250.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Ayam	*Sanggulan*	*600 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Kambing	*Bukit Pariaman*	*25 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Kambing	*Loa Tebu, Loa Ipuh Darat*	*13 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Tenggarong*	*11 Ekor*	*175.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muara Wis, Kota Bangun Darat*	*12 Ekor*	*200.000.000*		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengadaan bibit Ternak Ayam	*Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muara Wis, Kota Bangun Darat*	*300 Ekor*	*100.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Sanipah*	*12 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Sumber Sari*	*12 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Ambarawang Darat*	*12 Ekor*	*200.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Ayam	*Loa Duri Ilir*	*1500 Ekor*	*500.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Manunggal Jaya, Loa Lepu*	*24 Ekor*	*400.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Itik	*Tanjung Harapan*	*800 Ekor*	*100.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Bukit Raya*	*12 Ekor*	*150.000.000*		
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	*Lebak Mantan*	*12 Ekor*	*200.000.000*		
3.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun		20.000 Meter	23.805.000.000	19.500 Meter	26.261.000.000
		2. Jumlah Embung Yang di Bangun		15 Unit		9 Unit	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	800.000.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20 Kecamatan	24 Laporan	100.000.000	24 Laporan	200.000.000
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	20 Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	600.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun		178 Unit	23.455.000.000	90 Unit	25.461.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Embung Petanian	20 Kecamatan	15 Unit	5.500.000.000	9 Unit	4.611.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	20 Kecamatan	40 Unit	3.500.000.000	39 Unit	10.900.000.000
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Dam Parit		44 Unit	-	6 Unit	900.000.000
		Pembangunan Dam Parit	*20 Kecamatan*	*40 Unit*	-	*6 Unit*	*900.000.000*
		Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian (Musrenbang)	*Sebulu*	*1 Unit*	-		
		Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian (Pokok Pikiran)	*Loa Kulu*	*3 Unit*	-		
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Pintu Air		41 Unit	-	20 Unit	800.000.000
		Pembangunan Pintu Air	*20 Kecamatan*	*40 Unit*	-	*20 Unit*	*800.000.000*
		Pembangunan Pintu Air pada saluran tersier di Kawasan Pertanian (Musrenbang)	*Sebulu*	*1 Unit*	-		
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	20 Kecamatan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	400.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang		11 Unit	1.200.000.000	5 Unit	750.000.000
		Pembangunan Kandang	20 Kecamatan	2 Unit	250.000.000	5 Unit	750.000.000
		Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak (Musrenbang)	20 Kecamatan	3 Unit	750.000.000		
		Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	20 Kecamatan	1 Unit	200.000.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	20 Kecamatan	25 Unit	12.855.000.000	9 Unit	6.900.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	20 Kecamatan	15 Unit	12.075.000.000		
		Pembangunan Dam Parit Skala Kecil di Kawasan Pertanian	Batuah	2 Unit	780.000.000		
3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	20 Kecamatan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan		5 Jenis	505.000.000	5 Jenis	700.000.000
		Persentase Derajat Kesehatan Ternak		97 Persen		97 Persen	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		100 Persen	175.000.000	100 Persen	250.000.000
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	20 Kecamatan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000
3.27.04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	20 Kecamatan	20 Wilayah	25.000.000	20 Wilayah	100.000.000
3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20 Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner		2 Jenis	230.000.000	2 Jenis	300.000.000
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	20 Kecamatan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	100.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 Kecamatan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet		3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	150.000.000
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 Kecamatan	30 Laporan	50.000.000	30 Laporan	75.000.000
3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	20 Kecamatan	7 Unit Usaha	50.000.000	7 Unit Usaha	75.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	1.675.000.000	95 Persen	2.250.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian		2.400 Ha	1.675.000.000	2.400 Ha	2.250.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20 Kecamatan	2.100 Ha	800.000.000	2.100 Ha	1.100.000.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20 Kecamatan	2.000 Ha	300.000.000	2.000 Ha	500.000.000
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	20 Kecamatan	5 Laporan	75.000.000	5 Laporan	150.000.000
3.27.05.2.01.06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	20 Kecamatan	6 Laporan	500.000.000	6 Laporan	500.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan		35 Rekomendasi	150.000.000	35 Rekomendasi	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		10 Surat	100.000.000	10 Surat	100.000.000
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Kecamatan	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	100.000.000
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak		10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	50.000.000
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	20 Kecamatan	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	50.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		4 Persen	9.729.000.000	4 Persen	7.800.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina		100 Persen	9.729.000.000	100 Persen	7.800.000.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Kecamatan	19 Unit	1.374.000.000	19 Unit	3.000.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	20 Kecamatan	3.049 Unit	1.500.000.000	3.249 Unit	2.200.000.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Kecamatan	19 Unit	1.800.000.000	19 Unit	1.000.000.000
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		13 Unit	3.955.000.000	20 Unit	1.300.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang*	*20 Kecamatan*	*10 Unit*	*3.900.000.000*	*20 Unit*	*1.300.000.000*
		Pelatihan Kelompok Tani (Musrenbang)	*Loa Kulu, Sanga Sanga, Sebulu*	*3 Unit*	*55.000.000*		
3.27.07.2.01.08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	20 Kecamatan	3 Unit	500.000.000	5 Unit	150.000.000
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	20 Kecamatan	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	150.000.000
Jumlah					159.008.487.666		143.089.669.847

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh stakeholder yang terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung pembangunan embung pertanian, sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua bidang dalam lingkup dinas, sekretariat maupun kelompok jabatan fungsional.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten tahun 2026 ini adalah merupakan penjabaran dari Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai manajerial yaitu sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan.
2. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten tahun 2026 adalah perencanaan yang bersifat *top down dan bottom up*

planning sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha sektor pertanian baik petani, lembaga petani, pengusaha sektor pertanian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaanya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian *(organizing),* pelaksanaan itu sendiri *(actuating)* dan evaluasi *(controlling),* berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan rencana tindak lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (internal) dan elemen di luar Dinas Pertanian dan Peternakan, keterlibatan elemen internal tersebut sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional.
2. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku usaha pertanian baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sektor pertanian.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk urusan Perkebunan pada dasarnya berbasiskan sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui *(renewable resources)*. Selain itu subsektor perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan secara umum maupun devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan subsektor perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi Daerah saat ini, maka arah pengembangan subsektor perkebunan lima tahun ke depan adalah menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sosial budaya dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan pasar dunia, mengingat produk- produk perkebunan yang dihasilkan sebagian besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan untuk berkembang, subsektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional dan Daerah termasuk penanganan

permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional subsektor perkebunan juga telah memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spasial melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijakan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (renstra) Dinas Perkebunan tahun 2021-2026 diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa Program pembangunan perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan Daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan andalan yang dikaitkan dengan Program pengembangan agroindustri dan agribisnis. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana Kerja sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan; dan
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 Tentang RKPD Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah :

1. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
2. Membuat dan menetapkan indikator-indikator Pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja PD.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor Perkebunan di Daerah.
4. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan untuk satu tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan

peningkatan pendapatan.

3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rencana Kerja.

BAB II Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;

Dalam bab ini memuat perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra-PD, juga analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dan *review* terhadap Rancangan RKPD/Renstra-PD.

BAB III Tujuan Dan Sasaran PD;

Dalam bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan apa tujuan dan sasaran Renja-PD.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan PD;

Dalam Bab ini memuat Program dan Kegiatan.

BAB V Penutup;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Usulan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2024 sebesar Rp51.093.574.257,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari 35 (tiga puluh lima) subkegiatan, 14 (empat belas) kegiatan dalam 6 (enam) Program. Alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan tahun 2024 sebesar Rp57.993.178.573,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari 35 (tiga puluh lima) subkegiatan, 14 (empat belas) kegiatan dalam 6 (enam) Program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan tahun 2024 anggaran berkurang menjadi Rp55.393.439.772,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan subkegiatan bertambah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, kegiatan bertambah menjadi 15 (lima belas) kegiatan dengan jumlah program sebanyak 6 (enam) Program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp45.384.400.753,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 81,93% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga persen) sedangkan realisasi fisik sebesar 96,15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen).

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 didukung oleh 6 (enam) Program, dimana terdapat Program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Penunjang Urusan				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	73,72	93,91%
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.720	31.585	109,98%
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	268.526	222.940	83,02%
		3. Luas Areal Karet (Ha)	17.958	17.543	97,69%
		4. Luas Areal Lada (Ha)	3.427	1.879	54,83%
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.301	6.796	93,08%
		6. Luas Areal Kopi (Ha)	110	105	95,59%
		7. Luas Areal Kakao (Ha)	95	141	148.05%
		8. Luas Areal Aren (Ha)	248	266	107,24%
		9. Luas Areal Kelor (Ha)	9	0	0 %
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.000 Meter	4.636,5 Meter	115.91%
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit	1 Unit	25%
4	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	207 Surat (STDB)	103,5%
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	20 Surat (PUP)	16 Surat (PUP)	80%

2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	56%	56%	100%
2	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	14,63 %	14,63 %	100%

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program :

Faktor penyebab target Program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain. Ada perubahan tatacara penilaian Sakip pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2023, sehingga nilai seluruh PD mengalami penurunan, adanya pengurangan luas IUP di kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, sehingga terjadinya penurunan luas pada areal kelapa sawit pada perusahaan besar swasta, dan alih fungsi lahan pada komoditi karet, lada, kelapa dalam dam kopi, serta banyaknya bibit kelor kelor yang mati karena terserang hama penyakit. kemudian susahnya untuk mendapatkan lokasi pembangunan embung dikarenakan pekebun enggan untuk menghibahkan lahan yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

akan dibangun embung ke kelompok tani. Sedangkan capaian jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian Usaha Perkebunan (PUP) disebabkan oleh adanya perusahaan yang belum siap untuk dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) ditambah dengan terbatasnya tenaga penilai PUP yang dimiliki dinas.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja para penyuluh yang ada di lapangan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan serta terjadinya persentase penurunan gangguan organisasi pengganggu tanaman perkebunan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD dengan adanya capaian Program Renstra PD pada tahun 2024 implikasi yang timbul adalah diperlukannya :
   (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas perkebunan;
   (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi; dan
   (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas perkebunan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
   1) Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan.
   2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan.
   3) Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenia.
   4) Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan.

Adapun capaian kinerja dari Program dan kegiatan pembangunan perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PerkebunanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	86,00	78,50	73,72	93,91	79,00	79,76	100,33
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*45 Dokumen*	*28 Dok*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*100,00*	*6 Dokumen*	*41 Dokumen*	*91,11*
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	16 Dokumen	106,66
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	10 Laporan	100,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	14 Laporan	70,00
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*75 Laporan*	*45 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*100,00*	*14 Laporan*	*74 Laporan*	*98,66*
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan	2.352 Orang/ bulan	1.719 Orang/ bulan	73,09	2.352 Orang/ bulan	4.107 Orang/ bulan	80,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75 laporan	*45 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*100,00*	*12 Laporan*	*72 Laporan*	*96,00*
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100,00*	*5 Dokumen*	*9 Dokumen*	*180*
	6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00
	4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	100,00	*1 Dokumen*	*3 Dokumen*	*60,00*
	9 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	100,00	1 Dokumen	*3 Dokumen*	*60,00*
	5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*10 Dokumen*	*7 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*100,00*	*3 Dokumen*	*12 Dokumen*	*120,00*
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	534 Paket	379 Paket	-	-	-	267 Paket	646 Paket	120

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	121 Orang	53 Orang	22 Orang	22 Orang	100,00	30 Orang	105 Orang	86,77
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	45 Orang	15 Orang	40 Orang	266,67	40 Orang	125 Orang	166,66
	6) Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*35 Layanan*	*20 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100,00*	*6 Layanan*	*32 Layanan*	*91,42*
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	20 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	-	*27 Layanan*	*77,14*
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket	95 Paket	30 Paket	30 Paket	100,00	30 Paket	155 Paket	88,57
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	28 Paket	13 Paket	13 Paket	100,00	17 Paket	58 Paket	116
	16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	10 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	18 Paket	78,26
	17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	25.200 Eksemplar	3.000 Eksemplar	-	-	-	-	3.000 Eksemplar	11,90
	18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.460 Laporan	1.888 Laporan	660 Laporan	803 Laporan	121,67	375 Laporan	3.066 Laporan	124,63
	19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.760 Dokumen	2.697 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2.699 Dokumen	39,92
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*60 Bulan*	*36 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100,00*	*12 Bulan*	*60 Bulan*	*100,00*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	*60 Bulan*	*100,00*
	21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	*60 Bulan*	*100,00*
	22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	*60 Bulan*	*100,00*
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*624 Unit*	*295 Unit*	*102 Unit*	*119 Unit*	*116,67*	*56 Unit*	*470 Unit*	*75,32*
	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	611 Unit	284 Unit	99 Unit	116 Unit	117,17	53 Unit	453 Unit	74,14
	24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 unIt	17 Unit	130,76
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28.880 Ha	30,433 Ha	28.720Ha	31.585,10 Ha	109,98	28.795 Ha	31.733 Ha	109,88
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346.255 Ha	199,736 Ha	268.526 Ha	226,462,18 Ha	83,02	307.390 Ha	224.250 Ha	64,76
		3. Luas Areal Karet	18.033 Ha	18.080 Ha	17.958 Ha	17.543 Ha	97,69	17.988 Ha	17.689 Ha	98,09
		4. Luas Areal Lada	3.452 Ha	3.016 Ha	3.427 Ha	1.878,95Ha	54,83	3.442 Ha	1.887 Ha	54,67
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.311 Ha	6.886 Ha	7.301 Ha	6.795,97Ha	93,09	7.306 Ha	6.810 Ha	93,14
		6. Luas Areal Kopi	125 Ha	109 Ha	110 Ha	105,15 Ha	95,59	115 Ha	166 Ha	92,40
		7. Luas Areal Kakao	100 Ha	122 Ha	95 Ha	140,65 Ha	148,05	95 Ha	169 Ha	169,00
		8. Luas Areal Aren	253 Ha	251 Ha	248 Ha	265,95 Ha	107,33	248 Ha	270 Ha	106,52
		9. Luas Areal Kelor	9 Ha	3,50 Ha	0 Ha	0 Ha	0	9 Ha	0 Ha	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*	*1.284 Paket*	*1.944 Paket*	*713 Paket*	*777 Paket*	*108,00*	*560 Paket*	*3.281 Paket*	*255,52*
	25 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	92 Laporan	85 Laporan	37 Laporan	40 Laporan	108,00	25 Laporan	150 Laporan	163,04
	10) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan*	*6 Komoditi*	*2 Komoditi*	*1 Komoditi*	*1 Komoditi*	*100,00*	*1 Komoditi*	*4 Komoditi*	66,66
	26 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	20.000 Meter	10.500 Meter	4.500 Meter	4.636,5 Meter	103,00	3.512 Meter	18.648 Meter	93,24
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	50,00	3 Unit	9 Unit	45,00
	11) Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan*	*8 Dokumen*	*3 Dok*	-	-	-	*1 Dokumen*	*4 Dokumen*	50,00
	27 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	*2* Laporan	-	-	-	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3 Dokumen	1 Dok	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	12) Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun*	*50 Unit*	*38 Unit*	*62 Unit*	*43 Unit*	69,35	*23 Unit*	*104 Unit*	208,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	24 Unit	7 Unit	29,16	1 Unit	10 Unit	125,00
	30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	100,00	3 Unit	11 Unit	45,00
	31 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian lainnya	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	40 Unit	21 Unit	9 Unit	9 Unit	133,33	7 Unit	37 Unit	92,50
	32 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	25 Unit	12 Unit	26 Unit	21 Unit	80,76	2 Unit	35 Unit	140,00
	33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	4 Unit	80,00
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	72%	56%	56,00%	100,00	38,67,00%	56,00%	94,74
	13) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*	*1.200 Ha*	*520 Ha*	*240 Ha*	*240 Ha*	*100,00*	*260 Ha*	*1.020 Ha*	*85,00*
	34 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	560 Ha	212 Ha	120 Ha	120 Ha	100,00	130 Ha	462 Ha	82,50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	35 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24.200 Ha	22.650 Ha	23.200 Ha	22.200 Ha	100,00	23.800 Ha	23.800 Ha	98,34
	36 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130 Ha	240 Ha	100 Ha	100 Ha	100,00	100 Ha	440 Ha	338,46
5	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	1.000 Surat (STDB)	562 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	207 Surat (STDB)	103,50	200 Surat (STDB)	969 Surat (STDB)	96,90
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)	31 Surat (PUP)	20 Surat (PUP)	16 Surat (PUP)	80,00	10 Surat (PUP)	57 Surat (PUP)	121,27
	14) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dib*	*1.047 Pelaku*	*592 pelaku*	*220 pelaku*	*223 pelaku*	*101,36*	*210 pelaku*	*1.025 pelaku*	*97,89*
	37 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1.047 Laporan	387 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	391 Laporan	37,34
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	9,76%	14,63%	14,63%	100,63	19,62%	19,62%	78,29
	15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelompok Tani yang dibina*	*241 Lembaga*	*120 Lembaga*	*46 Lembaga*	*46 Lembaga*	*100,00*	*47 Lembaga*	*211 Lembaga*	*154,35*
	38 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Unit	112 Unit	46 Unit	46 Unit	100,00	47 Unit	372 Unit	160,34
	39 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	9 Unit	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	88,89

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja- PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	40 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	
Capaian Kinerja					Tahun 2024 Predikat "Sangat Baik"		96,15	Prakiraan s/d Tahun 2025 Predikat "Baik"		88,63

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sasaran pada Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 s/d 2026 yang telah ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) Sasaran, yaitu :

1. meningkatnya produksi komoditas perkebunan;
2. meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan; dan
3. meningkatnya kesejahteraan pekebun.

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874	283.472	291.773	349.921,40	383.145,61	416.369,81
	2. Produksi Sawit PBS (Ton)	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404	2.733.200	3.071.285	3.112.418,37	3.159.820,54	3.207.222,71
	3. Produksi Karet (Ton)	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992	10.365	10.293	13.290,76	14.753,61	16.216,45
	4. Produksi Lada (Ton)	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694	2.490	2.690	1.936,36	1.935,66	2.028,10
	5. Produksi Kelapa (Ton)	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525	2.619	3.456	3.640,35	4.150,84	4.661,33
	6. Produksi Kopi (Ton)	8	14	23	40	65	10	11,06	13,08	14,62	16,17
	7. Produksi Kakao (Ton)	34	39	48	66	84	31	30,25	28,93	48,69	68,45
	8. Produksi Aren (Ton)	392	446	510	584	671	410	394,54	469,14	498,83	528,51
	9. Produksi Kelor (Ton)	6	8	12	13	13	0,5	0,5	0	0	0
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698	12.947	12.818	13.702,77	14.081	14.459
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	1.713	17.540	18.330	18.580	19.630	15.523	16.286	16.108,98	14.696	14.891
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	943	978	1.017	1.059	1.106	1.006	993	1.238,64	979	1.471
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)	639	700	768	845	929	950	1.035	1.272,46	1.433	1.594
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	441	472	509	552	603	482	652	699,19	708	916
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	311	420	517	617	767	357	356	384,76	383	392
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	681	718	747	806	940	776	817	826,69	852	878
	8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080	2.876	2.702	2.711,82	2.630	2.712
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571	1.000	1.000	0	0	0
3	NTP Perkebunan (Nilai)	98	100	102	104	106	158	167	208,28	190	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tahun 2026 adalah merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021-2026, dan telah dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan perkebunan yang harus tertangani dalam periode 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

   Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daya dukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dipastikan akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan IKN itu sendiri, seperti kebutuhan komoditi lada, kelapa dalam, kopi, kakao dan aren.

2. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Dan Andalan Perkebunan

   Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah. Dimana komoditi yang menjadi komoditi unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, karet, lada dan kelapa dalam, sedangkan komoditi andalan perkebunan adalah kopi, kakao dan aren. Disamping juga melakukan peningkatan perlindungan tanaman, dan penanggulangan bencana serta gangguan usaha perkebunan

3. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan.

   Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan luas kebun inti dan plasma dari luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Dan Peningkatan Mutu Serta Nilai Tambah Produk Perkebunan.

   Penguatan kelembagaan, kemitraan dan peningkatan mutu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

serta nilai tambah produk perkebunan dilakukan melalui penguatan penyuluhan perkebunan dalam melakukan pendampingan kepada pekebun dan pengembangan pekebun milenial, serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan.

Keempat isu strategis tersebut memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai jual hasil perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan sub sektor perkebunan. Isu strategis tersebut menjadi titik tolak dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kabupaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dari hasil capaian kinerja pembangunan perkebunan pada periode lima tahun sebelumya disebabkan oleh “Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan, serta rendahnya Pendapatan dan kesejahteraan pekebun”. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.1.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan tahun 2021-20126

No	Masalah Pokok	Masalah (Penyebab Masalah Pokok)	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan	1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah	1. Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi
			2. Penggunaan bibit yang tidak nggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun
			3. Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan
			4. Tanaman yang usianya sudah di atas 25 tahun (karet)
			5. Gangguan OPT Endemis
			6. Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen
			7. Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa Dalam (pintu air)
			8. Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam
			9. Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai
			10. Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao.
			11. Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas
		2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal.	1. Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
			2. Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
			3. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
2	Pendapatan/ kesejahteraan pekebun masih rendah	1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	1. Kurangnya baiknya penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
			2. Mutu produk yang masih rendah
			3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil
			4. Masih rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemaasaran produk
			5. Masih tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul (masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan)
			6. Masih kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
			7. Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada
		2. Skala usaha yang masih rendah	Keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikan lahan yang lebih luas

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3.2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan pada tahun 2026 yang merupakan tahun kelima periode Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

1) Tersedianya kompetensi tenaga kerja.
2) Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan.
3) Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan.
4) Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan.
5) Selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah di bidang perkebunan.

2.3.3. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa tantangan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan pada tahun 2026 yang merupakan tahun kelima periode Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

1) Persaingan kualitas produk perkebunan;
2) Kondisi infrastruktur kurang menunjang;
3) Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan;
4) Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning;*
5) Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas; dan
6) Alih fungsi lahan perkebunan ke sektor lainya seperti tambang.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara maka dirumuskanlah beberapa program dan kegiatan prioritas pada tahun 2026, perumusan program dan kegiatan ini juga guna mendukung tema yang telah ditentukan dalam RKPD Kabupaten Kartanegara tahun 2026 yaitu : “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang berkelanjutan”.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perkebunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dimana visi pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah : “mewujudkan masyarakat kutai kartanegara yang sejahtera dan berbahagia”. Dari visi RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah dalam mensukseskan Misi ke 3, yaitu : "Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Proyek strategis pembangunan Daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala Daerah terpilih, setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing PD melalui “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN” dengan proyek strategis pembangunan daerah bagi Dinas Perkebunan tahun 2021-2026 yaitu pembangunan pertanian berbasis kawasan pada kawasan unggulan komoditas perkebunan berupa komoditi kelapa sawit, karet lada dan kelapa dalam, kemudian kawasan andalan komoditas perkebunan berupa komoditi kopi, kakao dan aren dan pembangunan 20 unit embung, serta pembangunan 20.000 meter jalan produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap RKPD dalam rangka mendukung “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN”, maka pada tahun 2026 akan dilaksanakan subkegiatan yaitu :

1. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dengan target 10 Ha (sepuluh hektar) luas pengadaan bibit & herbisida, 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) luas pengadaan pupuk, 62 paket jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen dan 45 (empat puluh lima) orang jumlah pekebun miskin yang mendapatkan bantuan.
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, dengan target pembangunan 5 (lima) unit, pembangunan,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air 2 (dua) unit, dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya 1 (satu) unit.

3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani 2 (dua) unit.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. *Review* terhadap RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31. Review Terhadap RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	NON URUSAN (GENERIK)				30.989.257.862	NON URUSAN (GENERIK)				30.893.857.862	
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	30.989.257.862	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	30.893.857.862	
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*9 Dokumen*	*640.274.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*7 Dokumen*	*606.274.000*	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	320.898.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	320.898.000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	84.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 34.000.000 dialihkan ke sub keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	235.376.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	235.376.000	
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*14 Laporan*	*25.966.263.862*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*15 Laporan*	*25.966.263.862*	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.464 Orang/bulan	25.738.143.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.414 Orang/bulan	25.738.143.862	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	228.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	228.120.000	
3.27.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*131.660.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*286.660.000*	
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Sub kegiatan baru Pengamanan Aset Pemda , pagu Rp.91.500.000 Tambahah Pagu dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pagu Sebesar 34.000.000 Tambahah Pagu dari sub keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Pagu sebesar 24.500.000 tambahan dari sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Perundang-undangan
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	81.660.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	86.660.000	Tambahan peserta, tambahan pagu Rp. 5.000.000 dari sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3.27.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
3.27.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*270.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*342.414.000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	282.414.000	Tambahan peserta, tambahan pagu Rp. 82.414.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	60.000.000	Penyesuain pagu sebesar Rp. 10.000.000 dialihkan ke sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*7 Layanan*	*1.257.810.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*7 Layanan*	*1.125.000.000*	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	13.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	40.000.000	Perbaharuan Instalasi Listrik Kantor Dinas Perkebunan, tambahan pagu Rp. 26.690.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	385.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	170.000.000	Penyesuaian pagu, pagu sebesar 2.910.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu sebesar 30.000.000 dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pagu sebesar 55.000.000 dialihkan ke sub keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pagu sebesar Rp. 5.000.000 dialihkan ke sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pagu sebesar 25.000.000 dialihkan ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian, Pagu sebesar 70.400.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	55.000.000	Tambahan pagu sebesar Rp. 30.000.000 dari sub kek Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	70.000.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	5.400 Eksemplar	54.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 24.500.000 dialihkan ke sub keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	610.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	605.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 5.000.000 dialihkan ke sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	155.000.000	Pengadaan Sekat, Folder, Box Arsip dan Belanja Modal (Rak Arsip) dan jasa pihak ketiga , tambahan pagu sebesar Rp. 55.000.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	*1 Persen*	-	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*1 Persen*	*840.000.000*	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	180.000.000	Sewa Kendaraan 1 Unit, tambahan pagu sebesar 177.090.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, tambahan Pagu sebesar 2.910.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	390.000.000	Sub Kegiatan Baru pengadaan 1 unit mobil, tambahan pagu sebesar 390.000.000 dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	270.000.000	Sub keg baru untuk belanja modal, Tambahan Pagu sebesar pagu 270.000.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*1.998.250.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*1.002.246.000*	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	Tambahan pagu Rp.10.000.000cdari sub keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dan tambahan pagu sebesar 5.000.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.518.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	507.246.000	Penyesuaian Pagu, pagu sebesar 91.500.000 dialihkan ke Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pagu Sebesar 82.414.000 dialihkan ke Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Pagu sebesar 390.000.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pagu sebesar 270.000.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pagu sebesar 177.090.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah*	*130 Unit*	*700.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah*	*56 Unit*	*700.000.000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	400.000.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	
3.27	URUSAN PERTANIAN				6.268.250.000	URUSAN PERTANIAN				6.363.650.000	
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.880	2.288.250.000	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.880	2.263.250.000	
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	346.255				2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	346.255		
			3. Luas Areal Karet (Ha)	18.033				3. Luas Areal Karet (Ha)	18.033		
			4. Luas Areal Lada (Ha)	3.452				4. Luas Areal Lada (Ha)	3.452		
			5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.311				5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.311		
			6. Luas Areal Kopi (Ha)	125				6. Luas Areal Kopi (Ha)	125		
			7. Luas Areal Kakao (Ha)	100				7. Luas Areal Kakao (Ha)	100		
			8. Luas Areal Aren (Ha)	253				8. Luas Areal Aren (Ha)	253		
			9. Luas Areal Kelor (Ha)	9				9. Luas Areal Kelor (Ha)	9		
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*	*152 Paket*	*2.038.250.000*	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*	*193 Paket*	*2.138.250.000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*6 Laporan*	*2.038.250.000*	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*7 Laporan*	*2.138.250.000*	Tambahan pagu sebesar 100.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			Luas pengadaan bibit & herbisida	*10 Ha*	176.500.000			*Luas pengadaan bibit & herbisida*	*10 Ha*	216.500.000	
			Luas pengadaan pupuk	*76 Ha*	358.000.000			*Luas pengadaan pupuk*	*76 Ha*	358.000.000	
			Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	*62 Paket*	307.000.000			*Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen*	*62 Paket*	307.000.000	
			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	*45 Orang*	600.000.000			*Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan*	*45 Orang*	600.000.000	
		Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut	*Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas*	*17 Ha*	100.000.000			*Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas*	*5 Ha*	60.000.000	
		Kembang Janggut	*Jumlah pengadaan benih*	*5.000 Buah*	396.750.000			*Jumlah pengadaan benih*	*12.000 Buah*	396.750.000	
		Loa Kulu	*Luas Demfarm Tanaman Perkebunan*	*4 Ha*	100.000.000			*Luas Demfarm Tanaman Perkebunan*	*2 Ha*	200.000.000	Tambahan pagu sebesar 100.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.02.2.01	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1 Komoditi*	*250.000.000*	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan*	*1 Komoditi*	*125.000.000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kabupaten/Kota			
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Dokumen	125.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0	-	Belum dapat dilaksnakan, pagu sebesar 125.000.000 dialihkan ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3.27.02.2.01.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.800 Meter	2.680.000.000	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	2.255 Meter	2.580.000.000	
			2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit				2. Jumlah Embung Yang Dibangun	0 Unit	-	
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	*Pengembangan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	150.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Loa Kulu dan Kota Bangun (kakao)	-	-	-	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Rp. 150.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun*	*5 Unit*	*2.380.000.000*	*Pembangunan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun*	*9 Unit*	*2.430.000.000*	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Marang Kayu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	500.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Sebulu, Muara Badak	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	Tidak dilanjutkan , pagu sebesar 275.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani , dan pagu sebesar 125.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air, dan pagu sebesar 100.000.000 dialihkan ke sub keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	1.680.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Loa Kulu, M. Badak, M. Kayu, Tenggarong	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.955.000.000	Tambahan pagu Rp.275.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Samboja, Muara Jawa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	125.000.000	Tambahan pagu Rp.125.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Muara Kaman	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	250.000.000	Tambahan pagu Rp.150.000.000 dari sub keg Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	450.000.000	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	400.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*	*280 Ha*	*450.000.000*	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*	*280 Ha*	*400.000.000*	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	140 Ha	150.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	140 Ha	200.000.000	Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Perkebunan untuk untuk pengadaan sarana penunjang
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24.200 Ha	150.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24.200 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu dialihkan ke sub keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sevesar 50.000.000
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	150.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu sebesar 50.000.000 dialihkan ke sub Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian		*1) Jumlah Penerbitan STDB*	200 Surat (STDB)	250.000.000	Perizinan Usaha Pertanian		*1) Jumlah Penerbitan STDB*	200 Surat (STDB)	450.000.000	
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	3 Surat (PUP)				*2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)*	3 Surat (PUP)		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.06.2.01	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina*	*203 Pelaku*	*250.000.000*	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina*	*203 Pelaku*	*450.000.000*	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	250.000.000						perubahan nama sub kegiatan , pagu dialihkan ke sub kegiatan baru sebesar 250.000.000 ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3.27.06.2.01.05						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	450.000.000	Tambahan pagu Rp. 250.000.000 dari sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 da sub keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Tambahan pagu sebesar 125.000.000. dari sub keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Hewan/ Tanaman, Tambahan pagu sebesar 25.000.00 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.07	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	*24,60%*	600.000.000	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	*24,60%*	670.400.000	
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*		*Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina*	*48 Lembaga*	*600.000.000*	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*		*Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina*	*48 Lembaga*	*670.400.000*	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	400.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	350.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Rp. 50.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	150.000.000						Belum dapat dilaksanakan, pagu sebesar 150.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.27.07.2.01.09						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	320.400.000	Kegiatan Baru, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota, Tambahan pagu sebesar 150.000.000 dari sub keg Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, Tambahan pagu sebesar 70.400.000 dari Sub Keg Penyediaan Peralatan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Perlengkapan Kantor
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	20 Orang	50.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen			Belum dapat dilaksanakan, pagu 50.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Total					37.257.507.862					37.257.507.862	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perkebunan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perkebunan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen RKPD tahun 2026, agar di dalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2026 disamping hasil survey ke lapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Adapun Musrenbang serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)						1.900.000.000	
I.	Pembangunan Prasarana Pertanian				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	12 Unit	1.900.000.000	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	1.600.000.000	
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Loa Kulu	Jembayan Tengah			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2273153
	2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Loa Janan	Tani Harapan			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2274985
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Muara Muntai	Muara Leka			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2065485
	4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Muara Badak	Batu-Batu			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2295919
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Kembang Janggut	Loa Sakoh			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2215359
	2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Loa Kulu	Jembayan Tengah			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2226031
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Muara Muntai	Muara Leka			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2337029
	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Pokir)						4.400.000.000	
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	42 Paket	4.400.000.000	
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Luas pengadaan bibit & herbisida	191 Ha	2.037.500.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	1	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Muntai,Muara Wis,Kota Bangun,Kota Bangun Darat,Kenohan,Kembang Janggut dan Tabang	Kab. Kutai Kartanegara	kelompok tani sawit Dapil VI		20 Ha	250.000.000	Erwin, ID SIPD : 1192550
	2	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Kembang Janggut		Kelompok Tani Barokah Kawan		15 Ha	175.000.000	H.DONI IKHWANI, ID SIPD : 1416253
	3	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Bumi Mulawarman		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321485
	4	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Mulawarman		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321518
	5	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Jempet		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321592
	6	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering	KT. Telok Sebuaya		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321627
	7	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Menamang Kiri	KT. Mau Membangun		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321655
	8	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir	KT. Tanjong Selonjok		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321729
	9	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir	KT. Pondok Lesong 2		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321754
	10	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Tenggarong	Kelurahan Loa Tebu	Poktan Karya Potai		10 Ha	100.000.000	Desman Minang Endianto, S.H.I., M.H ID SIPD : : 1393312
	11	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Manamang Kiri,	KT. MOU Membangun Menamang		20 Ha	200.000.000	HENDRA, ID SIPD : 1427850
						Luas pengadaan pupuk	130 Ha	1.600.000.000	
	1	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	Sebulu	Desa Beloro	Kelompok Tani Sawit LUAH Beloro		20 Ha	200.000.000	Muhammad Idham, ID SIPD : 1159761
	2	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	Tenggarong Seberang	Desa Manunggal jaya	KT. Tani Sejahtera		20 Ha	200.000.000	SUGENG HARIADI, ID SIPD : 1491492
	3	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	- Marang Kayu	- Desa Santan - Desa Santan Ulu) - Desa Santan Ilir	- KT. Handil Dua Nusantara Tani Rt.08 - KT. Tandan Berduri		90 Ha	1.200.000.000	Madinah ID Usulan >> 1427559 , 1427592 , 1427764 , 1439840 , 1447157 , 1472102

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				- KT. Ladang Berkah - KT. Handil Dua Makmur - KT. Maju Sejahtera				
					Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	30 unit	262.500.000	
	1 Alat Pemeliharaan Perkebunan (Pokir)	Sebulu	Sanggulan	Kelompok Tani Daya Benua		10 Unit	75.000.000	Muhammad Idham, ID SIPD : 1309289
	2 Alat Pemeliharaan Perkebunan (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Putra Tani		20 Unit	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1322423
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	400.000.000	
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Muara Jawa	Kelurahan Teluk Dalam			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1225012
	2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Muara Jawa	Kelurahan Teluk Dalam Rt. 06			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1225054
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Sanga Sanga	Sanga Sanga Muara Rt. 06			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1244211
	4 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Loa Janan	Desa Loa Duri Seberang			1 Unit	100.000.000	HAIRENDRA, SE, ID SIPD : 1338155
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	-
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Pintu Air Kebun (Pokir)	Samboja Barat	Kelurahan Amborawang Laut			1 Unit	100.000.000	Nasrullah, ID SIPD : 1321779
Total Keseluruhan Musrenbang dan Pokir							6.300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

"Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan"

Dimana Visi nya Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mendukung Visi dari Kementrian Pertanian yaitu mewujudkan sistem pertanian *bio-industry* berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029 mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah :

1. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
2. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
3. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;
5. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
6. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Dari beberapa Misi tersebut menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam beberapa hal sesuai dengan misi tersebut diatas, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi salah satu subsektor dalam meningkatkan penghasilan dibidang pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2026. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun 2026 masih terkait dengan program-program prioritas dan strategis nasional di bidang perkebunan. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan masih menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan tebu rakyat menuju swasembada gula nasional 2030 juga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai. Direktorat Jenderal Perkebunan juga berupaya mempercepat program prioritas perkebunan nasional dengan mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan;
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan;
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan;
4. Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efsien;
5. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas;
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang salin bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan.

Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efsiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice (GAP).*

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut.

Pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebiakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan :

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
2. Efsiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
3. Efsiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahandan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2026. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Rencana Kerja. Dari tujuan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan periode 2026 sebagai pendukung pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	4,10
		1. Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	302.874
			2 Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3.665.404
			3 Produksi Karet	Ton	10.992
			4 Produksi Lada	Ton	2.694
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	3.525
			6 Produksi Kopi	Ton	65
			7 Produksi Kakao	Ton	84
			8 Produksi Aren	Ton	671
			9 Produksi Kelor	Ton	13
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	15.698
			2 Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	19.630
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.106
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	929
			5 Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	603
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	767
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	940
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	4.080
			9 Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.571
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	106

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 s/d 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan tahun 2026. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Dinas Perkebunan tahun 2021 s/d 2026 merencanakan beberapa Program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan kepada masyarakat. Secara garis besar, belanja Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui Rencana Kerja Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

Kode	Program	Anggaran
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	19.569.757.625
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.625.000.000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.005.000.000
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	350.000.000
Total		30.199.757.625

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Program dan kegiatan Dinas Perkebunan tahun 2026 direncanakan berjumlah 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 30.199.757.625,00 (tiga puluh miliar seratur sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tuju ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Rencana Kerja Tahun 2026, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan rencana Program dan kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027, dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,5	19.569.757.625	80	36.239.197.862
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	250.000.000	7 Dokumen	636.274.000
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	320.898.000
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan luar daerah	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	80.000.000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Laporan	50.000.000	2 Dokumen	235.376.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 Laporan	16.372.251.273	15 Laporan	30.966.263.862
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	1.414 Orang/bulan	16.144.131.273	1.414 Orang/bulan	30.738.143.862
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Dinas Perkebunan	14 Laporan	228.120.000	14 Laporan	228.120.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Semesteran SKPD					
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	296.660.000
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	86.660.000
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	210.000.0000	2 Dokumen	370.000.000
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan luar daerah	30 Orang	150.000.000	30 Orang	300.000.000
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dinas Perkebunan	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	565.000.000	7 Layanan	1.215.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	7 Paket	40.000.000	7 Paket	60.000.000
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	30 Paket	100.000.000	30 Paket	200.000.000
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	17 Paket	55.000.000	17 Paket	60.000.000
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 Paket	70.000.000	4 Paket	80.000.000
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	Dinas Perkebunan	-	-	1 Dokumen	40.000.000
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	610.000.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	165.000.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Perkebunan	1 Persen	280.000.000	1 Persen	900.000.000
3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	-	-	1 Unti	400.000.000
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	1 Unit	180.000.000	1 Unti	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Perkebunan	7 Unit	100.000.000	7 Unti	300.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.017.506.352	12 Bulan	1.095.000.000
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	95.000.000
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	522.506.352	12 Laporan	600.000.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		56 Unit	700.000.000	56 Unit	730.000.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perkebunan	53 Unit	400.000.000	53 Unit	410.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perkebunan	3 Unit	300.000.000	3 Unit	320.000.000
		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28,880 Ha		31.733	
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		346.255 Ha		224.250	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3. Luas Areal Karet (Ha)		18.033 Ha	4.625.000.000	17.689	2.650.000.000
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.452Ha		1.887	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.311 Ha		6.810	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		125 Ha		116	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		100 Ha		169	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		253 Ha		270	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi		10 Paket	4.500.000.000	`10 Paket	2.500.000.000
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*22 Laporan*	4.500.000.000	7 Laporan	2.500.000.000
		Luas pengadaan bibit & herbisida		-	-	12 Ha	256.500.000
		Luas pengadaan pupuk		-	-	78 Ha	398.000.000
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen		-	-	65 Paket	388.750.000
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan		45 Orang	600.000.000	45 Orang	800.000.000
		Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas		-	-	5 Ha	60.000.000
		Jumlah pengadaan benih		-	-	12.000 Buah	396.750.000
		Luas Demfarm Tanaman Perkebunan		-	-	2 Ha	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Tenggarong (Kelurahan Loa Tebu), Poktan Karya Potai*	*10 Ha*	100.000.000		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Muntai,Muara Wis,Kota Bangun,Kota Bangun Darat,Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang, kelompok tani sawit Dapil VI*	*20 Ha*	*250.000.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Kembang Janggut, Kelompok Tani Barokah Kawan*	*15 Ha*	*175.000.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Manamang Kiri), KT. MOU Membangun Menamang*	*20 Ha*	200.000.000		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu, KT. Bumi Mulawarman*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu, KT. Mulawarman*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman(Desa Muara Kaman Ulu), KT. Jempet*	*18 Ha*	*187.500.000*		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering), KT. Telok Sebuaya*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Menamang Kiri), KT. Mau Membangun*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ilir), KT. Tanjong Selonjok*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan bibit & herbisida	*Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ilir), KT. Pondok Lesong 2*	*18 Ha*	*187.500.000*		
		Luas pengadaan pupuk	*Sebulu (Desa Beloro ,Kelompok Tani Sawit LUAH Beloro*	*20 Ha*	200.000.000		
		Luas pengadaan pupuk	*Tenggarong Seberang (Desa Manunggal Jaya), KT. Sejahtera*	*20 Ha*	200.000.000		
		Luas pengadaan pupuk	- *Marang Kayu (*Desa Santan Tengah) KT. Handil Dua Nusantara Tani Rt.08 - *Marang Kayu (*Desa Santan Tengah), KT. Tandan Berduri - Marang Kayu (Desa Santan Tengah) KT. Ladang Berkah	*90 Ha*	1.200.000.000		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			- *Marang Kayu (Dusun Handil Dua Rt.08 Desa Santan Tengah) KT. Handil Dua Makmur* - *Marang Kayu (Desa Santan Ulu)* - *Marang Kayu (Desa Santan Ilir) KT. Maju Sejahtera*				
		Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	*Sebulu (Desa Sanggulan), Kelompok Tani Daya Benua*	*10 Unit*	75.000.000		
		Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	*Muara Kaman(Desa Muara Kaman Ulu), KT. Putra Tani*	*20 Unit*	*187.500.000*		
3.27.02.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Komoditi	125.000.000	1 Komoditi	150.000.000
3.27.02.2.01.02	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kukar	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun		4.500 Meter	5.005.000.000	2.500 Meter	2.800.000.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasaran Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Kukar	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun		23 Unit	4.905.000.000	10 Unit	2.650.000.000
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		9 Unit	3.555.000.000	6 Unit	2.000.000.000
			Loa Kulu, M. Badak, M. Kayu, Muara Kaman	5 Unit	1.955.000.000		
			Loa Kulu (Jembayan Tengah)	1 unit	400.000.000		
			Loa Janan (Tani Harapan)	1 unit	400.000.000		
			Muara Muntai (Muara Leka)	1 unit	400.000.000		
			Muara Badak (Batu-Batu)	1 unit	400.000.000		
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		5 Unit	300.000.000	2 Unit	150.000.000
			Samboja, Muara Jawa	2 Unit	100.000.000		
			Samboja Barat (Kelurahan Amborawang Laut)	2 Unit	100.000.000		
			Jalan lekuk seribu RT 08 Kelurahan Amborawang Laut				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	100.000.000		
3.27.03.2.02.0 009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kukar	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000
3.27.03.2.02.0 010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang direhabilitasi		8 Unit	800.000.000	2 Unit	00.000.000
			Marang Kayu	1 Unit	100.000.000		
			Kembang Janggut (Loa Sakoh)	1 unit	100.000.000		
			Loa Kulu (Jembayan Tengah)	1 unit	100.000.000		
			Muara Muntai (mUara Leka)	1 unit	100.000.000		
			Muara Jawa (Kelurahan Teluk Dalam)	1 Unit	100.000.000		
			Muara Jawa (Kelurahan Teluk Dalam Rt. 06)	1 Unit	100.000.000		
			Sanga Sanga (Sanga Sanga Muara Rt. 06)	1 Unit	100.000.000		
			Loa Janan (Desa Loa Duri Seberang)	1 Unit	100.000.000		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		20,00%	400.000.000	15,00%	500.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan		240 Ha	400.000.000	300 Ha	500.000.000
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kukar	140 Ha	200.000.000	140 Ha	200.000.000
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Kukar	24.200 Ha	100.000.000	24.400 Ha	150.000.000
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kukar	100 Ha	100.000.000	100 Ha	150.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB		100 Surat (STDB)	250.000.000	200 Surat (STDB)	450.000.000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		3 Surat (PUP)		3 Surat (PUP)	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina		103 Pelaku	250.000.000	203 Pelaku	450.000.000
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan	Kab. Kukar	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	450.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Izin Usaha Pertanian	Diawasi					
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		24,63%	350.000.000	25, 62%	700.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina		37 Lembaga	350.000.000	47 Lembaga	700.000.000
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	37 Unit	250.000.000	47 Unit	350.000.000
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sanga Sanga, Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	350.000.000
Total					30.199.757.625		43.339.197.862

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh *stakeholder* yang terkait dengan subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas, Sekretariat maupun Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 ini adalah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Perkebunan.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai manajerial yaitu Sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Perkebunan.
2. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 adalah perencanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang bersifat *top down dan bottom up planning* sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha subsektor perkebunan baik petani, lembaga petani, pengusaha subsektor perkebunan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang didalamnya telah berisi sinkronisasi dan sinergitas dari semua perencanaan yang menjadi dokumen acuan baik RKPD, RPJMD, RPJPD, RPJMN dan RPJPN.
4. Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaanya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian *(organizing)*, Pelaksanaan itu sendiri *(actuating)* dan evaluasi *(controlling),* berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan rencana tindak lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Perkebunan (internal) dan elemen di luar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterlibatan elemen internal tersebut Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Bidang Produksi, Bidang Usaha dan Penyuluhan, Bidang Perlindungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat akan melakukan pengorganisasian *(organizing)* dan Evaluasi *(controlling)* dalam pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku usaha perkebunan baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sub sektor perkebunan.

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja-PD. Penyusunan Rencana Kerja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun Anggaran 2026 proses teknokratik, politik, partisipatif dan *top down-bottom up* dan secara substansi bersifat holistik, integratif, tematik, dan

spasial serta mengacu pada pendekatan " *Money Folllow Program*" berbasis tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta visi dan Misi RPJMD 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 adalah :

1. Landasan Idieologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Sedangakan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKKAT DAERAH,

berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

berisi tentang : Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2025.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 memuat 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) subkegiatan dengan jumlah pagu Rp580,901,792,188,00 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Hasil pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan sebesar Rp523.350.683.842,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau mencapai 90,09% (sembilan puluh koma nol sembilan persen), sehingga masih terdapat SILPA sebesar Rp57.551.108.346,00 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah); dan
2. Realisasi fisik kegiatan rata-rata mencapai 98,6% (sembilan puluh delapan koma enam persen).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2024 cukup baik. Terdapat beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebab adanya SILPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti sisa kontrak, sisa perjalanan dinas pada beberapa subkegiatan yang jika diakumulasikan memberikan silpa yang cukup besar, kurang cermat dalam penetapan standar satuan harga serta juga ketidak cermatan dalam pengalokasian gaji dan tunjangan. SILPA Dinas Kelautan dan Perikanan secara rinci sebagai berikut :

1. Silpa perjalanan dinas pada beberapa subkegiatan yang diakumulasikan sebesar Rp2.020.691.758,00 (dua miliar dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah rupiah);
2. Ketidak cermatan dalam pengalokasian gaji dan tunjangan bagi ASN Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga alokasi gaji dan tunjangan ASN lebih besar Rp2.328.942.621,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
3. Sisa lelang dan silpa beberapa sub kegiatan khusus pada rekening belanja persediaan yang diserahkan/dijual kepada masyarakat dengan nilai kurang lebih Rp32.188.937.896,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Silpa perjalanan dinas yang cukup besar tersebut dari perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota, bahwa hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sebelum pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas termasuk dalam komponen belanja yang sudah diestimasikan dalam dokumen awal perencanaan, jadi seharusnya SILPA pada komponen belanja ini bisa dimimalisir.

Sisa lelang dari beberapa paket kegiatan juga memberi kontribusi yang besar dari jumlah SILPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan seperti paket pada subkegiatan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap dan subkegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota. Selain itu, pada beberapa sub kegiatan juga terdapat sisa anggaran yang tidak mampu direalisasikan 100% (seratus persen).

Sumber pendanaan Program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF –CF);* dan
3. dana insentif fiskal.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel TC.29 :

Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan S/D Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	NON URUSAN (GENERIK)									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai	Nilai 74	Nilai 75	Nilai 69.82	93	Nilai 70.0	Nilai 70.0	88
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	36 Dokumen	Dokumen 3	Dokumen 3	Dokumen 3	100	Dokumen 6	Dokumen 6	17
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6 Dokumen	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	#DIV/0!	Dokumen 1	Dokumen 1	17

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	- Data	- Data	- Data	-	1 Data	1 Data	17
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Berita Acara	- Berita Acara	- Berita Acara	- Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	17
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen Renstra dan Renja)	10 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3 Dokumen	1 Dokumen	10

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	7 Dokumen	Dokumen -	Dokumen 1	Dokumen 1	100	Dokumen 1	Dokumen 1	14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Dokumen 1	Dokumen 1	Dokumen 1	100	Dokumen 2	Dokumen 22	367
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.	3 Dokumen	Dokumen 3	Dokumen 120	Dokumen 120	100	Dokumen 7	Dokumen 7	233
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	972 Orang	Orang 120	Orang 120	Orang 120	100	Orang 162	Orang 162	17

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD.	92 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen	18 Dokumen	20
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	7 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	14
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	9
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	14

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	6 Laporan	Laporan -	Laporan 1	Laporan 1	-	Laporan 1	Laporan 1	17
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi.	7 Laporan	Laporan -	Laporan -	Laporan -	-	Laporan 1	Laporan 1	14
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan.	15 Laporan	Laporan -	Laporan -	Laporan -	-	Laporan -	Laporan -	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	6 Dokumen	Dokumen 1	Dokumen 1	Dokumen 1	100	Dokumen 1	Dokumen 1	17

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Retribusi Daerah yang Akuntabel.	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	14
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	27 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	15
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	972 Paket	210 Paket	-	-		- Paket	- Paket	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	6 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	17
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	6 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100	1 Sistem	1 Sistem	17
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	6 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	17

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	260 Orang	10 Orang	50 Orang	50 Orang	100	10 Orang	10 Orang	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	660 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	100	162 ASN	162 ASN	25
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	17 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Paket	1 Paket	6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	192 Jenis	128 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	3 Paket	3 Paket	2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Disediakan.	150 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100	1 Paket	1 Paket	1

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	60 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	1 Paket	1 Paket	2
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan BacaanPeraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan.	12,918 Buku	2,184 Buku	3,222 Buku	3,222 Buku	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.	311 Rapat	90 Rapat	30 Rapat	30 Rapat	100	30 Rapat	30 Rapat	10
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta Pada Unit Kearsipan (UK).	32 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	100	6 Berkas	6 Berkas	19

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	26 Unit	Unit -	Unit -	Unit -	-	Unit 2	Unit 2	8
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan.	20 Unit	Unit 6	Unit -	Unit -	-	Unit 10	Unit -	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumllah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan.	3 Unit	Unit 7	Unit 2	Unit 2	100	Unit 5	Unit -	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit 2	Unit -	Unit -	#DIV/0!	Unit 2	Unit -	#DIV/0!
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit 2	Unit -	Unit -	#DIV/0!	Unit 1	Unit -	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Jenis	90 Jenis	90 Jenis	90 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Waktu penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	17
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	2 Bulan	3
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134 layanan	64 layanan	64 layanan	64 layanan	100	64 layanan	20 layanan	15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.	90 Persen	Persen 2	Persen 3	Persen 3	100	Persen 90	Persen 90	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak.	19 Unit	Unit 23	Unit 23	Unit 23	-	Unit 23	Unit 23	121

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan.	60 Unit	19 Unit	19 Unit	19.0 Unit	100	21 Unit	21 Unit	35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	261 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	17 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100	2 Unit	1 Unit	6
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	17

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN									
		Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	52 %	5 %	8 %	8 %	100	8 %	8 %	15
		Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.	522 Nilai	510 Nilai	500 Nilai	500 Nilai	100	103.5 Nilai	104.0 Nilai	20
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	149,134 Ton	99,124 Ton	86,520 Ton	116,850 Ton	135	120,000 Ton	120,000 Ton	80
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	15,577 Nelayan	5,285 Nelayan	1,870 Nelayan	2,814 Nelayan	150	2290 Nelayan	2,290 Nelayan	15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Tangkap	45 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	4
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	108 Unit	8 Unit	5 Unit	5 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4
	Penyediaan Sarana Usaha Perikananan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	51,582 Unit	8,130 Unit	2,450 Unit	4,690 Unit	191	2,771 Unit	2,771 Unit	5
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	8,570 Orang	250 Orang	400 Orang	405 Orang	101	650 Orang	650 Orang	8
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	4,420 Orang	1,830 Orang	1,824 Orang	1,824 Orang	100	500 Orang	500 Orang	11

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1,600 KUB	91 KUB	100 KUB	100 KUB	100	50 KUB	50 KUB	3
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2,550 Orang	100 Orang	350 Orang	350 Orang	100	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	3.921569
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	4 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	#DIV/0!	2 Unit	2 Unit	50
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan	- Layanan	- Layanan	- Layanan	#DIV/0!	3 Layanan	3 Layanan	75

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	5,500 Tanda Daftar Kapal Perikanan	638 Tanda Daftar Kapal Perikanan	5,000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	20	500 Tanda Daftar Kapal Perikanan	500 Tanda Daftar Kapal Perikanan	9.090909
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5,500 Rekomendasi	638 Rekomendasi	5,000 Rekomendasi	1,000 Rekomendasi	20	500 Rekomendasi	500 Rekomendasi	9.090909
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	50 Kapal	Kapal	Kapal -	Kapal -	#DIV/0!	Kapal 5	Kapal 5	10
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan	2 Dok	Dok 1	Dok -	Dok -	#DIV/0!	Dok 1	Dok 1	50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kabupaten/Kota								
	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	1,400 Rekomendasi	- Rekomendasi	- Rekomendasi	#DIV/0!	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	289,385 Ton	182,827 Ton	165,721 Ton	206,328 Ton	125	207,881 Ton	207,881 Ton	71.83535
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	380 Kelompok	100 Kelompok	100 Kelompok	105 Kelompok	105	50 Kelompok	50 Kelompok	13.15789
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	165 Kelompok	18 Kelompok	35 Kelompok	30 Kelompok	86	15 Kelompok	15 Kelompok	9.090909

BerAKHLAK Kementerian PAN-RB bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengembangan Kapasitas								
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	520 Kelompok	100 Kelompok	100 Kelompok	87 Kelompok	87	50 Kelompok	50 Kelompok	9.615385
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	550 Kelompok	30 Kelompok	200 Kelompok	139 Kelompok	70	100 Kelompok	100 Kelompok	18.18182

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	850 Kelompok	Kelompok 46	Kelompok 100	Kelompok 30	30	Kelompok 500	Kelompok 500	58.82353
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	1,000 TDPI	TDPI 212	TDPI 2,000	TDPI 568	28	TDPI 1,000	TDPI 1,000	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Terlayani dalam Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK).	1,000 Orang	212 Orang	2,000 Orang	568 Orang	28	1,000 Orang	1,000 Orang	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	58,591 Pembudidaya	8,848 Pembudidaya	1,130 Pembudidaya	10,228 Pembudidaya	905	2,078 Pembudidaya	2,100 Pembudidaya	3.584142
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	5.882353
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	82 Unit	35 Unit	100 Unit	94 Unit	94	27 Unit	27 Unit	32.92683

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,864 Unit	Unit 800	Unit	Unit 575	#DIV/0!	Unit 8,389	Unit 8,400	65.29781
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	11 Dok	Dok 1	Dok 1	Dok 1	100	Dok 1	Dok 1	9.090909
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	7 Dok.	Dok. 2	Dok. -	Dok. -	#DIV/0!	Dok. -	Dok. -	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	#DIV/0!	Dokumen -	Dokumen -	0
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Unit	Unit -	Unit -	Unit -	#DIV/0!	Unit -	Unit -	0
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	46 Unit	Unit -	Unit -	Unit -	#DIV/0!	Unit -	Unit -	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	2,750 Ha	Ha -	Ha -	Ha -	#DIV/0!	Ha 2,750	Ha 2,750	100
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan	20 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	#DIV/0!	Laporan 3	Laporan 3	15
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	270 Pelau Usaha	Dokumen 1	10 Pelau Usaha	1 Pelau Usaha	10	3 Pelau Usaha	3 Pelau Usaha	1.111111
	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	35 Unit	Unit -	Unit -	Unit -	#DIV/0!	Unit	Unit	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelau Usaha	Dokumen 2	Pelau Usaha	Pelau Usaha	#DIV/0!	50 Pelau Usaha	50 Pelau Usaha	100
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	600 Pelau Usaha	Pelau - Usaha	Pelau 100 Usaha	Pelau 34 Usaha	34	100 Pelau Usaha	Pelau 100 Usaha	16.66667
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	250 Orang	Orang -	Orang -	Orang -	#DIV/0!	Orang	Orang	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	60 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	#DIV/0!	Unit	Unit	0
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	- Angka	Angka	Angka	Angka	#DIV/0!	Angka	Angka	#DIV/0!
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	31,907 Ton	23,900 Ton	25,095 Ton	50 Ton	0	25,000 Ton	2,550 Ton	7.991967
		Nilai Produksi Perikanan	24,096 Milyar Rupiah	10,207 Milyar Rupiah	9,390 Milyar Rupiah	10,978 Milyar Rupiah	117	12,515 Milyar Rupiah	12,600 Milyar Rupiah	52.28995
		Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	2,037 Ton	1,606 Ton	1,650 Ton	1,687 Ton	102	1,800 Ton	1,850 Ton	90.84058
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	1,010 Tanda Daftar Usaha.	Tanda Daftar Usaha.	Tanda Daftar Usaha.	Tanda Daftar Usaha.	#DIV/0!	10 Tanda Daftar Usaha.	10 Tanda Daftar Usaha.	0.990099

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Dokumen	Dokumen -	Dokumen -	Dokumen -	#DIV/0!	Dokumen -	Dokumen -	#DIV/0!
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomendasi	Rekomendasi -	Rekomendasi -	Rekomendasi -	#DIV/0!	Rekomendasi -	Rekomendasi -	#DIV/0!

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	41 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2.439024
	Pelaksanaann Verifiiasi Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usha dan Tingkat Risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Kepmen 050 5889	235 Rekomendasi	- Rekomendasi	- Rekomendasi	- Rekomendasi	#DIV/0!	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	2.12766

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	105 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	#DIV/0!	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	14.28571
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	105 Unit Usaha	Unit - Usaha	Unit - Usaha	Unit - Usaha	#DIV/0!	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	14.28571

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	500 POKLAHSAR.	200 POKLAHSAR.	25 POKLAHSAR.	150 POKLAHSAR.	600	50 POKLAHSAR.	50 POKLAHSAR.	10
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600 Ton	50 Ton	50 Ton	50 Ton	100	100 Ton	100 Ton	16.66667
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	370 Pelau Usaha	115 Pelau Usaha	80 Pelau Usaha	50 Pelau Usaha	63	50 Pelau Usaha	50 Pelau Usaha	13.51351

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 cukup baik, namun diharapkan kedepannya bagi subkegiatan yang belum atau kurang mendapatkan alokasi anggaran (Program, kegiatan dan sub kegiatan non urusan/generik) dapat menjadi perhatian secara bersama untuk pengalokasian ataupun penambahan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan. Penyelenggaran pembangunan kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2024, memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan PDRB Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS Kutai Kartanegara, PDRB sektor kelautan dan perikanan tumbuh sebesar 13% (tiga belas persen). Pada sektor budidaya ikan, semakin naiknya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi yang semakin tinggi adalah salah satu faktor utamanya disamping terjadinya penurunan harga jual komoditi udang windu yang sangat siknifikan karena dampak dari antidumping yang diterapkan oleh Asosiasi Udang Amerika yang memberikan kebijakan untuk mengenakan bea masuk tambahan terhadap udang yang diimpor dengan harga lebih rendah dari harga normal di negara pengekspor, sehingga berdampak terhadap eksportir dan importir penurunan volume dan pendapatan ekspor, kenaikan harga untuk produk udang, masalah ketergantungan pasokan. ini menjadi persoalan dalam lesunya ekspor udang beku sedangkan tujuan ekspor uidang beku Indonesia adalah Eropa dan Amerika.

2) Indeks Nilai Tukar (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Berdasarkan hasl kajian Universitas Mulawarman kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara keseluruhan untuk perairan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pesisir dan laut mengalami peningkatan dari tahun 2023. Berdasarkan nilai total penerimaan, diperoleh INTN pada tahun 2024 sebesar 100,62 (seratus koma enam puluh dua), mengalami peningkatan 0,62 (nol koma enam puluh dua) poin, yang mencerminkan bahwa daya beli nelayan, meningkat sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dibandingkan dengan tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa nelayan mendapatkan nilai tukar yang lebih baik dari hasil perikanan tangkap, sedangkan indeks nilai tukar nelayan untuk perairan umum dan darat mengalami peningkatan dari tahun 2023, menjadi 100,67 (seratus koma enam puluh tujuh). Terjadi peningkatan sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) poin, yang mencerminkan bahwa daya beli nelayan, meningkat sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) dibandingkan dengan tahun 2023. Nelayan di perairan umum telah memiliki tingkat kesejahteraan yang baik berdasarkan indikator nilai tukar. Secara agregat, Indek Nilai Tukar Nelayan (INTN) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100,645 (seratus koma enam ratus empat puluh lima), mengalami peningkatan 0,645 (nol koma enam ratus empat puluh lima) poin dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pada tahun 2024 relatif lebih baik dari tahun sebelumnya.

Indek Nilai Tukar Pembudidaya (INTPi) ikan air tawar secara keseluruhan mengalami kenaikan. Berdasarkan nilai total penerimaan, diperoleh NTPi pada tahun 2024 sebesar 100,056, mengalami peningkatan 0,056 poin. Peningkatan NTPi selama kurun waktu 2023 - 2024, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan usaha perikanan, dalam membiayai kegiatan budidaya ikan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga pembudidaya, namun demikian masih berada kondisi yang minimal. Hal ini dibuktikan oleh nilai INTPi yang mengalami pergeseran positif sebesar 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) untuk total penerimaan dan 0,694 (nol koma enam ratus sembilan puluh empat) poin, untuk penerimaan dari usaha perikanan. Pergeseran positif nilai INTPi, menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan pembudidaya secara global dari aspek ekonomi, jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, Indek Nilai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tukar Pembudidaya (INTPi) ikan, udang dan rumput sango sango, di wilayah perairan pesisir, secara keseluruhan mengalami kenaikan. NTPi pada tahun 2024 sebesar 100,049 (seratus koma nol empat puluh sembilan), mengalami kenaikan 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) poin. Peningkatan NTPi 2023 - 2024, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir, dalam membiayai usaha perikanan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga pembudidaya. Kemampuan rumah tangga pembudidaya masih berada pada kondisi yang minimal. Pergeseran positif nilai INTPi, menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan pembudidaya secara global dari aspek ekonomi, jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. INTPi untuk kegiatan perikanan budidaya di wilayah perairan umum, darat dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100,054 (seratus koma nol lima puluh empat), mengalami peningkatan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) poin dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan pembudidaya di wilayah Kutai Kartanegara, baik untuk komoditi perikanan perairan umum dan darat maupun komoditi perikanan perairan pesisir.

3) Nilai Produksi Perikanan.

Nilai produksi perikanan berdasarkan Data Statistik Kelautan dan Perikanan tahun 2024 memperlihatkan keadaan yang baik terjadi peningkatan nilai produksi sebesar 22,2% (dua puluh dua koma dua persen), pada tahun 2023 nilai produksi sebesar Rp10.327.714.920,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) meningkat sebesar Rp2.294.216.477,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tahun 2024 menjadi Rp 12.621.931.397,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Program dedikasi fasilitasi 25.000 (dua puluh lima ribu) nelayan dan pembudidaya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi yang berdampak juga kepada peningkatan nilai produksi, pemberian BLT juga dianggap memberikan dampak terhadap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kemampuan daya beli BBM dan pakan walaupun belum dilakukan kajian secara langsung terhadap kemungkinan tersebut tetapi memasukkan BLT kedalam varaibel salah satu penentu meningkatnya nilai produksi dianggap pantas sebagai asumsi.

4) Produksi Perikanan Tangkap.

Data statistik perikanan tangkap 2024 memperlihatkan data yang cukup baik pada aspek produksi. Dari target yang ditetapkan, angka produksi perikanan tangkap 2024 diatas angka target, yaitu dari 104.689 (seratus empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) ton target menjadi 116.654,4 (seratus enam belas ribu enam ratus lima puluh empat koma empat) ton realisasi. Pencapaian ini dimungkinkan karena peran aktif pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dengan kebijakan pendistribusian BBM bersubsisdi langsung ke sentra nelayan, khususnya di wilayah pesisir. Disamping hal itu, adanya Program bantuan langsung tunai untuk membantu biaya operasional serta distribusi sarana penangkapan ikan yang cukup masih kepada nelayan menambah gairah nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil tangkapannya.

5) Produksi Perikanan Budidaya.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 208.073 (dua ratus delapan ribu tujuh puluh tiga) ton dari raget yang ditetapkan sebesar 207.881 (dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) ton. Dukungan penuh pada pemberian bantuan bibit udangh windu masih belum mampu meningkatkkan produksi sektor budidaya udang windu yang diharapakn dampak memberikan dampak ganda dengan memberikan peningkatan produksi dan nilai produksi dan ekspor.

6) Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan.

Pada tahun 2024, dalam kegiatan pengawasan sumber daya ikan, terdapat beberapa pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap illegal (setrum) yang didapati melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan setrum. Juga ditemukan penggunaan alat tangkap ikan sawaran yang masuk kedalam alat tangkap illegal. Kinerja yang cukup baik dalam upaya menurunkan kegiatan aktifitas *illegal fishing* dipengaruhi oleh

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

upaya sistematis dan terkoordinir oleh beberapa *stakeholders*, seperti hadirnya Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, peran aktif aparat desa, kecamatan, polisi pamong praja dan pihak kepolisian dalam kegiatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat serta upaya penggantian alat tangkap illegal dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

7) Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu pelaku usaha perikanan yang juga mengalami perbaikan dengan adanya pertumbuhan produksi. Jika dilihat dari angka capaian terhadap angka target yang ditetapkan. Pencapaian ini cukup berdampak positif pada tingkat kesejahteraan pelaku usaha, jika dibandingkan pada kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Produksi olahan hasil perikanan hingga saat ini belum cukup berkembang, terlihat dari jenis olahan yang masih bertahan pada olahan ikan kering, amplang, kerupuk ikan.

8) Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ekspor produk hasil perikanan, hingga saat ini masih terus berlangsung dengan komoditi yang masih sama yaitu udang beku, kepiting bakau, dan ikan betutu. Pertumbuhan ekspor di tahun 2024 mengalami penurunan yang tinggi, terutama pada komoditi udang windu. Berlimpahnya produksi udang di Negara India dengan harga yang lebih murah berdampak pada secara langsung pada komoditi udang di Indonesia. Dengan harga yang turun, pelaku ekspor dalam negeri harus menurunkan harga beli dari produsen udang agar dapat bertahan. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya permintaan komoditi udang dipasar Dunia sebagai akibat dari tidak stabilnya ekonomi Dunia akibat perang yang terjadi di negara eropa yang merupakan salah satu tujuan utama ekspor komoditi udang..

9) Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Fasilitasi pelaku usaha perikanan yang dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan merupakan salah satu target yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2024, terdapat sejumlah 13.042 (tiga belas ribu empat puluh dua) pelaku usaha perikanan mendapatkan sarana produksi dari Pemerintah Daerah dari beberapa sumber pendanaan. Upaya ini berdampak positif bagi kegiatan penagkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan, namun kurang optimal untuk menumbuhkan gairah bagi pelaku usaha budidaya karena harga jual komoditi ikan hasil budidaya cenderung stagna bahkan mengalami penurunan yang tinggi pada komoditi tertentu seperti komoditi udang.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)			10	12,5	13	13.5	14,00	11	12,5	13	14	
2	Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN), Indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (INTPI)			101,5	102	103	104	105	100.37	100 100	100.6 100.04	101 101	
3	Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rp.)			7.386	8.31	9.39	10.658	12,150	4.093	10.327	12.621	13,000	
4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			82.400	86.520	95.172	104.689	115,158	82.905.7	86,520	116.654,4	118,000	
5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			150.656	165.721	185.608	207.881	232,827	140.228.9	165.721	208.073	209,000	
6	Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan (%)			92	93	95	98	100	92	93	95	98	
7	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)			22,672	23,900	25,095	26,350	27,668	23	23,900	29,397	30,000	
8	Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan (Ton)			1,530	1,607	1,687	1,771	1,860	1,352	1,607	1,771	2,000	
9	Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan.			5000	5000	5000	5000	5000	8.066	9.356	13.042	15,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

1. Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah hanya memiliki 5 kewenangan untuk urusan kelautan dan perikanan, yaitu pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaaan kawasan buidaya ikan dan izin budidaya ikan. Terbitnya Undang-Undang tersebut, disikapi dengan dibentuknya PD yang baru dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada kewenangan tersebut di atas sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan, yang didalamnya memuat program kegiatan serta sasaran terukur yang akan dicapai.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kelautan da perikanan mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memerlukan penyesuaian dalam internal Dinas Kelautan dan Perikanan, termasuk didalamnya penyesuaian terhadap Program dan kegiatan.

2. Penetapan Ibu Kota Negara.

Penetapan Ibu Kota Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan berdampak besar bagi kawasan-kawasan penyangga seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak dimaksud harus dipandang sebagai peluang, khususnya bagi pembangunan kelautan dan perikanan sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa permasalahan maupun hambatan yang dihadapi, diantaranya :

a. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan terkait dengan keterampilan dan adopsi teknologi perikanan yang menyebabkan terbatasnya tingkat produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
b. Masih perlunya peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.
c. Penurunan potensi sumberdaya ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), lebih tangkap *(overfishing),* penggunaan alat tangkap terlarang *(*misalnya pemboman, penggunaan *mini trawl),* penggunaan bahan peledak, *electrical fishing*/penyetruman dan pencemaran limbah industri serta limbah rumah tangga.
d. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu, misalnya bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan.
e. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal.
f. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum mampu mengeksploitasi/mengakses WPP 713 seperti keterbatasan armada penangkapan, PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan jumlah sumberdaya manusia aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g. Sebagian nelayan laut masih dikategorikan masyarakat kurang sejahtera yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan masih tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan *one day fishing*, dengan area penangkapan pada perairan pantai yang kondisi sumberdaya ikannya sudah *over fishing*.

h. Kerusakan lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya di kawasan hulu dan pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan berakibat pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.

i. Konflik nelayan dan tindak pidana perikanan yang secara umum disebabkan karena menurunnya sumberdaya perikanan dan kelautan, penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang, perebutan daerah penangkapan *(fishing ground),* pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan/penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan isu nelayan luar atau andon.

4. Visi Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah aerah (RPJMD)

"KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

Visi tersebut diintegrasikan dalam Draft Renstra Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, sehingga target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu instrument pencapaian Visi Rancangan Teknokratik RPJMD.

5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Daerah perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan dimaksud, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan kelautan dan perikanan di Daerah yakni: *Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Millennium Development Goals* Kelautan dan Perikanan, *Sustainable Development Goals* Kelautan dan Perikanan, *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).* Selain itu, terdapat pula berbagai fakta internasional dan regional, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presidan, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, (5) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Hal penting lain yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan adalah :

a. Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan, dimana wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kawasan Delta Mahakam yang merupakan kawasan strategis dalam aspek lingkungan pesisir serta berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Sumberdaya perikanan darat di wilayah ini memiliki spesies mamalia Pesut Mahakam *(Orcaella brevirostris)* yang merupakan jenis yang paling langka di dunia.
b. Globalisasi ekonomi (misal MEA dan APEC) semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi, terlihat dari gejala adanya *over exploitasi* serta timbulnya beberapa dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas industri dan rumah tangga di hulu maupun di wilayah pesisir.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan awal RKPD/ Rancangan Awal Renstra PD

Rancangan awal RKPD/ dokumen rancangan awal Renstra-PD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja-PD. Dalam proses penyempurnaan melalui analisis dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan, dikaitkan dengan visi rancangan teknokratik RPJMD 2025-2030 serta urusan kelautan dan perikanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan terkait erat dengan pencapaian RPJMD tahun rencana sebelumnya.

Rancangan awal RKPD juga difokuskan untuk mendukung Kutai Kartanegara menajdi pusat produksi pangan khususnya pangan ikan, ini juga sejalan dengan visi rancangan awal RPJMD. Pembangunan juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan produksi dan produktifitas dalam hal peningkatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

infrastruktur sarana pendukung seperti TPI, UPI, BBI serta peningkatan mutu nilai tambah dalam pemenuhan standar mutu dan keamanan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Studi Pendahuluan Renstra PD dapat dilihat pada Tabel TC.31.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC .31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	NON URUSAN (GENERIK)						NON URUSAN (GENERIK)						
			Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	8.5	%				Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	9.2	%		
			Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	104	Nilai				Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	104	Nilai		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.5	Nilai	27,126,399,081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.5	Nilai	31,447,666,957	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	6	Dokumen	1,200,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	6	Dokumen	1,900,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	150,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50,000,000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen Renstra dan Renja)	1	Dokumen	350,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen Renstra dan Renja)	3	Dokumen	1,250,000,000	Penambahan 1,000,000,000 untuk Penyusunan Roadmap Hilirisasi Rumput Laut Keamatan Muara Badak
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	50,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	350,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	250,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.	22	Dokumen	16,478,500,957	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.	22	Dokumen	16,373,500,957	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	162	Orang	16, 003,500,957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	162	Orang	16,003,500,957	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester-an	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD.	18	Dokumen	450,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD.	18	Dokumen	350,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	1	Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	-	Dokumen	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	55,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	185,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	35,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	1	Laporan	25,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	1	Laporan	75,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi.	1	Laporan	30,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi.	1	Laporan	50,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan.	3	Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan.	3	Laporan	25,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	1	Dokumen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	1	Dokumen	10,000,000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah laporan Retribusi Daerah yang Akuntabel.	1	Laporan	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah laporan Retribusi Daerah yang Akuntabel.	1	Laporan	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	5	Dokumen	775,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	5	Dokumen	1,037,186,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	486	Paket	462,186,000	Pakaian Dinas ASN terakhir diadakan tahun 2021, dengan adanya penambahan ASN P3K maka penyediaan pakaian dinas menjadi kebutuhan
							Pakaian Waskat			*162*		*158,436,000*	
							Pakaian Miskat			*162*		*178,200,000*	
							Baju Batik			*162*		*125,550,000*	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	1	Dokumen	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	1	Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1	Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1	Sistem	25,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	1	Dokumen	25,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Laporan Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	1	Dokumen	25,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	100	Orang	700,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	50	Orang	500,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110	ASN	1,352,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110	ASN	1,560,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	3	Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	3	Jenis	20,000,000	Penambahan Gedung Kerja baru (TPI dan Hatcherry) berdampak pada peningkatan kebutuhan kelsitrikan terutama lampu penerangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	3	Paket	500,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	3	Paket	500,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan.	2	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Disediakan.	25	Jenis	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	10	Unit	75,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Bahan BacaanPeraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan.	2153	Dokumen	42,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Bahan BacaanPeraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan.	2,153	Buku	65,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1	Laporan	100,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1	Laporan	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Dalam Daerah dan Di Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.	40	Rapat	450,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Dalam Daerah dan Di Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.	54	Rapat	650,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Arsip Pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta Pada Unit Kearsipan (UK).	6	Berkas	150,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	2	Unit	5,550,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	2	Unit	8,000,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan.	0	Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan.	-	Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumllah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan.	1	Unit	450,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumllah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan.	-	Unit	-	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	3,000,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	3,000,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2,100,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5,000,000,000	
			Dokumen Perencanaan	1	Dok	100,000,000							
			Pembangunan Perluasan Gedung Kantor Dinas Kabupaten Tahap 1	*1*	*Unit*	*2,000,000,000*			*Pembangunan Perluasan Gedung Kantor Dinas Kabupaten*	*1*	*Unit*	*5,000,000,000*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Jenis	775,898,124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Jenis	1,201,480,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Periode Waktu penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.	12	Bulan	350,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Periode Waktu penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.	12	Bulan	350,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	12	Bulan	25,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	12	Bulan	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	layanan	400,898,124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	layanan	801,480,000	Alokasi Untuk :1. Security 10 Orang x Rp. 3,867,000 x 12 bln (kantor 4 Orng, Hatcherry 4 Org, BBI 2 Org)2. Cleaning Service 8 Orang x Rp. 3,515,000 x 12 bln (Kantor 5 Org, Rumah Jabatan 1 Org, BBI 2 Org)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.	90	Persen	940,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.	90	Persen	1,180,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak.	19	Unit	115,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak.	19	Unit	190,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan.	60	Unit	295,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan.	60	Unit	210,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	261	Unit	250,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	261	Unit	230,500,000	Pemeliharaan terhadap peralatan kerja dan mesin - mesin
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	3	Unit	230,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	3	Unit	450,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	1	Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	1	Unit	100,000,000	
	URUSAN						URUSAN						
			Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	9	%				Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	9.0	%		
			Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.	103.5	Nilai				Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.	103.50	Nilai		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	122692.742	Ton	89,850,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	122,693	Ton	107,705,000,000	Rata2 Pertumbuhan Produksi Tangkap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	2404.5525	Nelayan	55,350,000,000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	2,405	Nelayan	91,830,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Kukar.	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Tangkap	7	Dokumen	350,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Kukar.	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Tangkap	10	Dokumen	1,420,000,000	
								Kabupaten Kukar.	*Penyediaan Data Statistik Perikanan Tangkap*	*1*	*Dokumen*	*120,000,000*	
								Kabupaten Kukar.	*Fasilitasi Pendataan KUSUKA*	*1*	*Dokumen*	*100,000,000*	
								Kabupaten Kukar.	*Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan*	*6*	*Dokumen*	*200,000,000*	
								Desa Pela & Sangkuliman Kec. Kota Bangun, da Kecamatan Muara Badak	*Potensi Perikanan Tangkap Calon Kalamo (Calon Kampung Nelayan Modern)*	*1*	*Dokumen*	*1,000,000,000*	
									Stock SDI di perairan pesisir		*Dokumen*		
									Dokumen Perencanaan Pembangunan Galangan Kapal	*1*	*Dokumen*	*1,000,000,000*	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Samboja dan Kecamatan Anggana.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8	Unit	5,000,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Samboja dan Kecamatan Anggana.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	72	Unit	63,100,000,000	
								Kecamatan Muara Badak, Marangkayu	TPI Terbangun	1	*Unit*	50,000,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Sungai Meriam	Kantor TPI	1	*Unit*	2,000,000,000	
								Kecamatan Muara Badak,Marangkayu ,Anggana dan Kota Bangun	SPBN Terbangun	1	*Unit*	-	
								Kec. Samboja dan Kec. Anggana.	*IPAL TPI Terbangun*	*3*	*Unit*	*4,000,000,000*	
									Fender Untuk Dermaga TPI	*60*	*Unit*	*600,000,000*	
								Tanjung Sembilang, Kelurahan Muara Sembilang, Kec. Samboja dan Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana	*Jumlah Unit Jetty Terbangun*	*4*	*Unit*	*2,000,000,000*	*Nelayan*
								Muara Badak, Marangkayu, Anggana dan Kota Bangun	*Jumlah Unit cold storage terbangun.*	*1*	*Unit*	*2,000,000,000*	
								Kec. Muara Badak, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak.	*Jumlah Unit Pabrik Es terbangun.*	*1*	*Unit*	*2,500,000,000*	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikananan Tangkap	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu.	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1250	Unit	50,000,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikananan Tangkap	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu.	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	7,910	Unit	27,310,000,000	
									Kapal	200	Unit	8,000,000,000	
									Perahu	200	Unit	3,600,000,000	
									Mesin Diesel	250	Unit	3,750,000,000	
									Mesin Ketinting	500	Unit	7,000,000,000	
									Gillnet	1,000	Piss	1,000,000,000	
									Kawat Loket	1,000	Roll	500,000,000	
									Rakkang	2,000	Buah	160,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
									Bubu Lipat	1,000	Buah	800,000,000	
									Cool Box	1,000	Unit	2,000,000,000	
									Life Jacket	500	Buah	250,000,000	
									Kompas	150	Unit	30,000,000	
									Fish Finder	50	Unit	100,000,000	
									GPS	50	Unit	100,000,000	
									Gear Box	10	Unit	20,000,000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	1650	Orang	32,800,000,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	1,650	Orang	14,275,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	500	Orang	31,500,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	850	Orang	13,325,000,000	Nelayan dilatih.
									Pelatihan pembuatan perahu fiber	*100*	Orang	*200,000,000*	
									Pelatihan pembuatan bubu lipat	*100*	Orang	*150,000,000*	
									Pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan (SKN)	*100*	Orang	*150,000,000*	
									Pelatihan perbaikan mesin kapal/ketinting	*100*	Orang	*150,000,000*	
									Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	*100*	Orang	*25,000,000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
									Pelatihan Penginderaan Jarak Jauh	*100*	Orang	*150,000,000*	
									Jumlah Sarana Penangkapan Ikan Didistribusikan Untuk Nelayan Miskin	*250*	*Unit*	*12,500,000,000*	*Nelayan Miskin*
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50	KUB	300,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	300	KUB	450,000,000	
								Kabupaten Kutai Kartanegara	*Papan Nama Kelompok*	*100*	*KUB*	*150,000,000*	
								Kabupaten Kutai Kartanegara	*Akta Notaris / Badan Hukum KUB*	*100*	*KUB*	*250,000,000*	
								Kabupaten Kutai Kartanegara	*Buku Administrasi Kelompok*	*100*	*KUB*	*50,000,000*	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100	Unit Usaha	1,000,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	500	Orang	500,000,000	
		Kabupaten Kutai Kartanegara						*Kabupaten Kutai Kartanegara*	*Pihak Perbankan (KKI dan KUR)*	*300*		*300,000,000*	
									BPJS Nelayan (BPJS Ketenaga Kerjaan)				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
		Kabupaten Kutai Kartanegara						*Kabupaten Kutai Kartanegara*	*Sertifikasi Lahan Nelayan*	*100*	*Orang*	*100,000,000*	
									Jumlah Peserta Rembug Nelayan	*100*	*Orang*	*100,000,000*	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	3	Unit	500,000,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	3	Unit	450,000,000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja.	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	Layanan	500,000,000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja.	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	Layanan	450,000,000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	1000	Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,050,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	1,000	Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,050,000,000	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kutai Kartanegara.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dok	50,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kutai Kartanegara.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	Rekomendasi	1,000,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,000	Rekomendasi	1,000,000,000	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	10	Kapal	150,000,000	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	10	Kapal	100,000,000	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	50,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	50,000,000	
	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	1000	Rekomendasi	100,000,000	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10	Reko-menda-si	50,000,000	Rata2 Pertumbuhan Produksi Budidaya
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	220770.725	Ton	115,605,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	220,771	Ton	647,591,044,768	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah POKDAKAN Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	380	Kelompok	4,705,000,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah POKDAKAN Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan	380	Kelompok	6,350,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15	Kelompok	455,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30	Kelompok	500,000,000	Pembudidaya Miskin.
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	50	Kelompok	250,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	100	Kelompok	850,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Muara Kaman, Kota Bangun. UPT Perikanan Tersertifikasi	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100	Kelompok	1,000,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Muara Kaman, Kota Bangun. UPT Perikanan Tersertifikasi	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100	Kelompok	1,000,000,000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500	Kelompok	3,000,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150	Kelompok	4,000,000,000	Pembudidaya dilatih.
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	1000	TDPI	200,000,000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	1,000	TDPI	1,000,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Pembudidaya Ikan Terlayani dalam Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK).	1000	Orang	200,000,000	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	Jumlah Pembudidaya Ikan Terlayani dalam Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK).	1,000	Orang	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	9329.74	Pembudidaya	110,700,000,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	9,330	Pembudidaya	640,241,044,768	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokumen	350,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	250,000,000	
									Penyediaan Data Statistik Perikanan Tangkap	*7*	*Dokumen*	*150,000,000*	
									Fasilitasi Pendataan KUSUKA	*500*	*Dokumen*	*100,000,000*	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	30,000,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	Unit	50,366,200,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.	*Pembangunan Hatcherry Muara Badak*	*1*	*Unit*	*25,000,000,000*	
								Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.	*Pemeliharaan Hatcherry Muara Badak*	*1*	*Unit*	*500,000,000*	
								BBI Tirtamina Perjiwa dan BBI Tirtajaya Sangasanga	*Penyediaan Induk Ikan Bagi BBI dan UPR*	*800*	*Kg*	*744,800,000*	
								Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.	*Penyediaan Induk Udang Bagi Hatcheryy dan HSRT*	*50*	*Pasang*	*71,000,000*	
								BBI Tirtamina Perjiwa dan BBI Tirtajaya Sangasanga	*Penyediaan Pakan Ikan Bagi BBI dan UPR*	*8,000*	*Kg*	*310,400,000*	
								Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.	*Penyediaan Pakan Udang Bagi Hatcheryy dan HSRT*	*2,900*	*Kg*	*1,740,000,000*	
								Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong.(Kawasan Loa Jukut).	*Normalisasi Kolam Pembesaran BBI Tenggarong Seberang dan BBI Sanga Sanga*	*2*	*Unit*	*2,000,000,000*	
								Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong.(Kawasan Loa Jukut).	*Pembangunan Kolam dan Saluran Unit Pembenihan Rakyat*	*10*	*Unit*	*5,500,000,000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong.(Kawasan Loa Jukut).	*Rehabilitasi Kolam dan Saluran Unit Pembenihan Rakyat*	*10*	*Unit*	*3,500,000,000*	
								Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Badak.	*Jumlah Unit HSRT Terbangun*	*1*	*Unit*	*1,000,000,000*	
								Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Badak.	*Jumlah Unit HSRT direhabilitasi*	*-*	*Unit*	*-*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Tenggarong Seberang.	*Panjang Jalan Produksi Terbangun*	*-*	*Meter*	*-*	
								Kec. Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	*Pengadaan Excavator*	*1*		*10,000,000,000*	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja, Sanga-Sanga dan Muara Badak.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1778	Unit	80,000,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja, Sanga-Sanga dan Muara Badak.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,995	Unit	559,801,700,000	
								Kutai Kartanegara.	*Benih Ikan dan Udang*	##########	*ekor*	*12,650,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Muara Badak, Anggana, Marangkayu	*Benur*	###### ###	*ekor*	*400,000,000,000*	*Menurut statistik 2024 Total LUas Tambak Aktif Muara Badak, Anggana, Marangkayu ialah 52653.08 Ha, kebutuhan benur untuk per Ha ialah sebanyak 500,000 ekor atau padat tebar 50 ekor/ m2. jika luasan tambak 52.653,08 Ha x 500,000 ekor maka kebutuhan benur untuk tambak aktfi di 3 kecamatan ialah 26.326.540.000 ekor dan jika dikalikan dengan harga kontrak benur saat ini sebesar Rp. 90/ ekor maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.369.388.600.000. Usul tambah sebesar Rp. 400M ialah untuk penyediaan 2M ekor benur dengan target luasan 4.000 ha*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Muara Badak, Anggana, Marangkayu	*Probiotik*	*100,000*	*Botol*	*18,500,000,000*	*untuk menambah tingkat kehidupan benur*
								Muara Badak, Anggana, Marangkayu	*Pakan Udang*	*1,600,000*		*40,000,000,000*	*Untuk mengarahkan pembudidayaan ke semi intensif untuk hasil yang lebih positif, dengan asumsi harga pakan udang 25,000/kg*
									Keramba	*250*	*Unit*	*8,750,000,000*	
									Keramba Jaring Apung	*250*	*Unit*	*3,000,000,000*	
									Sistem Instalasi Budidaya Kolam Terpal	*200*	*Unit*	*1,844,000,000*	
								samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	*Pakan Ikan*	*250,000*	*Kg*	*9,700,000,000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	*Sistem Instalasi Budidaya Kolam Filter*	*75*	*Unit*	*3,750,000,000*	
								samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	*Mesin pakan*	*1*	*Unit*	*3,500,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	*Mesin pakan Mandiri*	*5*	*Unit*	*2,000,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu.	*Sistem Pembangunan Instalasi Bioflok*	*2*	*Unit*	*400,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu.	*Induk Ikan*	*2,000*	*ekor*	*1,862,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu.	*Rumput Laut*	*1,500,000*	*Kg*	*23,250,000,000*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Tenggarong Seberang.	*Jumlah Unit Mesin Pompa Air*	*100*	*Unit*	*1,069,700,000*	
								Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu.	*Panjang Tanggul Tambak diperbaiki*	*60,000*	*Meter*	*10,500,000,000*	
								Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu.	*Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki*	*80*	*Unit*	*8,800,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Mesin Penyedot Lumpur Didistribusikan*	-	*Unit*	-	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Panjang Plastik PDE Didistribusikan*	*50,000*	*Meter*	*5,562,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Pipa Paralone Didistribusikan*	*300*	*Unit*	*450,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Kincir Air Didistribusikan*	*125*	*Unit*	*2,125,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Unit Pompa Dap Didistribusikan*	*-*	*Unit*	*-*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Unit Genset Didistribusikan*	*5*	*Unit*	*625,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Kapur Didistribusikan*	*10,000*	*Kg*	*201,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Saponin Didistribusikan*	*10,000*	*Kg*	*355,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Pupuk Cair Didistribusikan*	*1,000*	*Liter*	*133,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Persiapan dan Pematangan Lahan*	*5*	*Ha*	*125,000,000*	
								Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	*Jumlah Cool Box Didistribusikan*	*50*	*Unit*	*150,000,000*	
								Kec. Muara Badak,	*Kebun Bibt Rumput Laut*	*5*	*Unit*	*500,000,000*	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Anggana, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Tenggarong, Muara Badak,	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	Dok	350,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Anggana, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Tenggarong, Muara Badak,	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	Dok	400,000,000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Wilayah Pesisir (Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Anggana dan Muara Jawa).	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Wilayah Pesisir (Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Anggana dan Muara Jawa).	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2	Dok.	600,000,000	
									Jumlah Dokumen Profil Kawasan Budidaya Rumput Laut	*1*	*Dok*	*100,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
									Jumlah Dokumen Tata Ruang Budidaya Ikan (Budidaya Tambak)	*1*	*Dok.*	*500,000,000*	
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	400,000,000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10	Unit	651,965,480	
								Loa Kulu, Muara Badak, Marang Kayu, Kota Bangun	*Penyediaan Tenaga Teknis Terampil Sebagai Pendamping Pembinaan Kelompok di Lapangan (Jasa Tenaga Informasi dan Tekhnologi)*	*10*	*Orang*	*451,965,480*	
									Pembiunaan dan Pemantauan	10	*Pokdakan*	200,000,000	
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan		Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Loa Kulu dan Muara Badak	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	12	Unit	27,771,179,288	
									DED Pembangunan Laboratorium	*2*	*Dokumen*	*1,000,000,000*	
									Pembangunan Laboratorium	*1*		*25,000,000,000*	
									Peralatan Laboratorium	*1*	*Paket*	*1,000,000,000*	
									Bahan Uji laboratorium	*1*	*Paket*	*500,000,000*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
									Penyediaan Tenaga Teknis Terampil Sebagai Laboran (Jasa Tenaga Laboratorium)	*6*	*Orang*	*271,179,288*	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luasan Kawasan Konservasi	2750	Ha	10,500,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luasan Kawasan Konservasi	2,750	Ha	4,950,000,000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan	3	Laporan	10,500,000,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan	3	Laporan	4,950,000,000	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50	Pelau Usaha	500,000,000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50	Pelau Usaha	500,000,000	
	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	4	Unit	100,000,000	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	7	Unit	100,000,000	
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20	Pelau Usaha	300,000,000	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10	Pelau Usaha	100,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100	Pelau Usaha	3,000,000,000	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100	Pelau Usaha	1,000,000,000	
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	600	Orang	600,000,000	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	50	Orang	250,000,000	
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	18	Unit	6,000,000,000	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	12	Unit	3,000,000,000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka Konsumsi Ikan		Angka	26,650,000,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka Konsumsi Ikan		Angka	6,765,000,000	
			Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	26250	Ton				Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	26,250	Ton		
			Nilai Produksi Perikanan	14267.0088	Milyar Rupiah				Nilai Produksi Perikanan	14,267	Milyar Rupiah		
			Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1845	Ton				Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1,845	Ton		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	200	Tanda Daftar Usaha.	800,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	200	Tanda Daftar Usaha.	650,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	0	Dokumen		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	1	Dokumen	100,000,000	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	Rekomendasi		Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	200	Rekomendasi	50,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	8	Dokumen	400,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	8	Dokumen	400,000,000	
	Pelaksanaann Verifiiasi Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usha dan Tingkat Risiko		Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Kepmen 050 5889	5	Rekomendasi	400,000,000	Pelaksanaann Verifiiasi Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usha dan Tingkat Risiko		Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Kepmen 050 5889	30	Rekomendasi	100,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	17	Unit Usaha	600,000,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	17	Unit Usaha	565,000,000	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	Unit Usaha	600,000,000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	17	Unit Usaha	565,000,000	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	100	POKLAHSAR.	25,250,000,000	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	50	POKLAHSAR.	5,550,000,000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	Ton	10,000,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Ton	300,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100	Pelau Usaha	15,250,000,000	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50	Pelau Usaha	5,250,000,000	
	J U M L A H					269,731,399,081						798,458,711,725	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan memberi ruang untuk mengakomodir Usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui badan legislatif (anggota DPRD), LSM, Akademisi, maupun lintas PD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat kecamatan selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan forum PD maupun Musrenbang Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan usulan dari hasil Musrenbang PD di tingkat Kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang tercermin pada Program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan Program kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat kecamatan maupun Daerah yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, disampikan dalam table TC.32 di bawah.

Tabel TC.32.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Rencana 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.				
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
1		Semayang, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	500 Roll	Musrenbang RKPD
2		JL. RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	500 Roll	Musrenbang RKPD
3	KUB " BIRU LAUT	Desa Muara Badak Ulu RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Dari	100 Roll	Musrenbang RKPD
4	Kelompok Usaha Bersama (KUB) " TIGER BS "	Desa Muara Badak Ulu RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Rakkang Tancap	2,000 buah	Musrenbang RKPD
5	POKDAKAN " KERAMAT ABADI "	Desa Muara Badak Ulu RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong	300 Piss	Musrenbang RKPD
6	Kelompok Usaha Bersama (KUB) " ARMAN ABADI "	Desa Muara Badak Ulu Rt. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Rakkang Tancap	2,000 buah	Musrenbang RKPD
7	RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
8	KUB Handil Setia	RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
9	KUB Sinar Nilam	RT.03 Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
10	KUB Sinar Laut Jaya	Desa Muara Kembang Jl. Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
11	KUB Amanah Rakyat Kembang Jaya	Desa Muara Kembang Jalan Mahakam Ilir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
12	KUB Sinar Laut Jaya	Desa Muara Kembang Jl.Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
13		Desa Muara Kembang Jl. Mahakam tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Moderenisasi alat tangkap	1 Paket	Musrenbang RKPD
14	kelompok tunas Karya RT.01	Desa Muara Kembang RT.01 Kelurahan Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jala/ Gillnet	20/ 300 Unit/ Pcs	Musrenbang RKPD
15	KUB Batuah RT.02	RT.02 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jala/ Gillnet	20/ 300 Unit/ Pcs	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
16	KUB Kembang Makmur Bersama	RT.07 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
17	KUB Muara Pegah Jaya Abadi	Desa Muara Kembang RT.11 Muara Pegah, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
18		Desa Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
19		Desa Jantur Selatan Jl.Raya SUngai Jantur RT.003, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
20		Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
21	KUB Putra Berlayar	RT. 017 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong/ Sea Lion	300 Piss	Musrenbang RKPD
22	KUB Sinar Laut Utama	RT. 017 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong/ Sea Lion	300 Piss	Musrenbang RKPD
23	KUB Intan Permata	RT. 020 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong/ Sea Lion	300 Piss	Musrenbang RKPD
24	KUB Mattiro Bombang	RT. 018 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong/ Sea Lion	300 Piss	Musrenbang RKPD
25	Mallusetasi	Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring lingkar benang R/2inci	1 Paket	Musrenbang RKPD
26	KUB Putra Laut	RT. 018 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
27	KUB Bintang Laut	RT. 020 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Gondrong/ Sea Lion	300 Piss	Musrenbang RKPD
28	KUB Kuda Laut	RT. 007 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Jaring Milenium 15 Bantal merek momo, tali pelampung 20 Kg 1 Bantal, Tima Lengkap	1 Paket	Musrenbang RKPD
29		Desa Tabang Lama RT.002, Kab. Kutai Kartanegara	Gillnet/ Jaring Insang	300 Piss	Musrenbang RKPD
30		genting tanbah RT 001, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
31	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kahoy Kadep	Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
32	Kelompok Usaha Bersama DANAU TERATAI	Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
33	KUB Danau TUNAS MUDA	Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
34	KUB MAJU BERSAMA	Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
35		Desa Kupang Baru Dusun Mekar Baru dan Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
36		SEDULANG, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
37		Desa Kayu Batu, Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
38		Kel. Sanipah RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Rakkang/ Rengge	2000/ 300	buah/ piss
39		Desa Embalut RT.08 Dusun Pulau Yupa, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Tempirai	250 Roll	Musrenbang RKPD
40		Desa Loa Sakoh RT 01 s/d RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
41		Desa Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
42	KUB DANAU TERATAI	Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
43		JL.RANCANG RIMBA AYU RT.008 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
44		Desa Liang, Jl. Awang Long RT.007, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
45		JL.H.M BAKREI RT.004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
46		JL.H.M BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
47		JL.H.M BAKRIE RT.005 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
48		JL.H.M BAKRIE RT.012 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
49		JL.H.M BAKRIE RT.012 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
50		JL.H.M BAKRIE RT.005 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
51	KELOMPOK USAHA BERSAMA "SEMPURNA ABADI JAYA"	Desa Liang, Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
52	KELOMPOK USAHA BERSAMA "LIANG BERSATU"	Desa Liang, Jl. Awang Long RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
53		Desa Liang, Jl. Panglima Suta Kanan RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
54	Kelompok Usaha Bersama Kelompok Nelayan Bersatu	Jl. Mulawarman RT.01 Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
55	KELOMPOK USAHA BERSAMA "USAHA ETAM"	Desa Liang Ulu, JL. AWANG LONG RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
56	Kelompok Usaha Bersama (KUB) "USAHA BERSAMA"	RT. 08, Dusun Danau Lipan Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	13 Unit 13 Unit	Musrenbang RKPD
57	Kelompok Usaha Bersama (KUB) "LOA HAJI BERSINAR"	RT. 09, Dusun Danau Lipan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
58		desa teratak RT.003 Kec.muara kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
59	KUB Berkah Mandiri	JL.P.Hidayatullah RT 04 Desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
60	"Nelayan Tangkap LESTARI INDAH BERSAMA"	Muara Muntai Ilir Seberang RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
61	Kelompok "HARAPAN KITA"	Jl. Dewi sartika RT.02 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
62	Kelompok "NELAYAN BERSATU" Desa Kayu Batu	Jl. Dewi Sartika RT. 06 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
63		Jl. Jend. A. Yani RT. 12 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
64	kelompok nelayan BERSAMA	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.007, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
65	Kelompok "BERKAH JAYA"	Jl. Dewi Sartika RT.01 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
66	Kelompok Etam Betulungan A	Jl. Kampung Baru RT. 09 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
67	kelompok nelayan BATULUNGAN	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
68	Kelompok Nelayan Lepok Mbengay	Jalan Dewi Sartika RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
69	Kelompok Nelayan MERAH DELIMA	Jl. Dewi Sartika RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
70		Jl.Raya Sungai Jantur RT.004 Desa Jantur Selatan , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
71	Kelompok Nelayan Ulaq Bende Desa Kayu Batu	Jl. Dewi Sartika RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
72	Kelompok Nelayan BERKAH BERSAUDARA	Jl.Raya Sungai Jantur RT.010 Desa Jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
73	Kelompok Nelayan Danau Bemben	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
74	Kelompok Nelayan JEMPANG	Jl.Raya SUngai Jantur RT.002 Desa Jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
75		Jl. Dewi Sartika RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
76	Kelompok Nelayan "JANSEL BERSATU B"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
77	Kelompok Nelayan "JANTUR BERSATU A"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.004 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
78	Kelompok Nelayan "Jalan Sama Baimbai "	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.010 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
79	Kelompok Nelayan "INGIN MAJU SEJAHTERA"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.011 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
80	Kelompok Nelayan "SETIA KAWAN "	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.002 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
81	Kelompok "MAHAPUTRA MAHAKAM"	Jl. Dewi Sartika RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
82	Kelompok "LOA BUJUR"	Jl. Dewi Sartika RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
83	Kelompok "TERATAI JAYA"	Jl. Dewi Sartika RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
84	kelompok nelayan mandiri	Desa Rebaq Rinding, Jl. K.H Agus Salim RT.003, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
85		Jl. Jend. A. Yani RT. 007 Desa Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
86		Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
87	KUB Luah Usaha Bersama	DUSUN KUYUNG, Sebemban RT.006, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
88	Kelompok Keliran Maju	Jln. Biawan RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
89	KUB Belut Super	Desa Sebemban RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
90	KUB Maju Bersama	Desa Sebemban RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
91	KN Danau Kelancangan	Desa Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
92	KUB Kalan Hui Pulut	Desa Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
93	KUB Danau Saluran Jaya	Sebemban, Dusun Kuyung RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
94	KUB Kuyung Mandiri	Sebemban, Dusun Kuyung RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
95	KUB Talok Gera	Desa Sebemban RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
96	KN Danau Belejong	Desa Sebemban RT.003, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
97	KN Luah Usaha Bersama	Dusun Kuyung RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
98	KUB Danau Blumma Sura	Dusun Kuyung RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
99	Kelompok Luah Monen	Sebemban RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
100	KUB Jembatan Satu	Sebemban Rt. 001, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
101		Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
102	KELOMPOK BERSAMA ETAM MAJU	JALAN ABDULLAH RT 009 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
103		segihan, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
104		JALAN PEMUDA RT 007 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber	10 Unit	Musrenbang RKPD
105		JLN WANGSA RT 001 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Kawat Tempirai	10 Unit 250 Piss	Musrenbang RKPD
106		Desa Kelekat,RT.008, Kab Kutai Kartanegara, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
107	Kelompok Nelayan Etam	Desa kahala ILir, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
108	KUB KAHOY KADEP	Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
109		JL.DANAU MURUNG RT.006 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
110		Jl. Jend. Sudirman RT. 003 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
111		JL.H.M BAKRIE RT.012 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
112	KELOMPOK USAHA BERSAMA "NELAYAN CAHAYA IDAMAN"	Jl. P. Suta Kanan RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
113		Jl. Panglima Suta Kanan RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
114	Kelompok Usaha Bersama Kelompok Nelayan Bersatu	Jl. Mulawarman RT.01 Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
115		Desa Liang, Jl. Panglima Suta Kanan RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
116		Dusun Mekar Baru dan Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
117	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Odah Etam	Muara Kaman Ulu, RT. 017, Dusun Delta Mahakam, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
118	kelompok nelayan CEMERLANG C	jl.raya sungai jantur RT.004 Desa jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
119	Kelompok Nelayan, NELAYAN JANSEL	Jl.Raya Sungai Jantur RT.011 Desa Jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
120		Jl. Jend. A. Yani RT. 009 Desa Muara Muntai Ulu Kec. MuaraMuntai, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
121	Kelompok "MAJU BERSAMA"	Jl. dr. Nazir RT. 06 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
122	Kelompok " ANUGRAH NELAYAN "	Jl. Dewi Sartika RT.01 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
123	Kelompok Biawan Manau	Jl. Dewi Sartika RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
124	Kelompok Tanjung Berhala	Jl. Dewi Sartika RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
125	Kelompok Budi Bersatu	Jl. Dewi Sartika RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
126	Kelompok Luah Preyan	Sebemban RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
127	KUB JEMBATAN SATU	Desa Sebemban RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
128	Kl Nelayan Danau Kelancangan	Desa Sebemban RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
129	Kl KUB Jembatan Satu	Desa Sebemban RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
130	KUB Rangas Tunggal Jaya -1	Desa Sebemban, Dusun Kuyung RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
131	KUB Danau Mahakam Tuha	Dusun Kuyung RT.006, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Fiber Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang RKPD
132	KN Danau Karya Besama	Dusun Kuyung RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
133	KN Prean	Desa Sebemban RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
134	KN Sarang Kojo	DUSUN KUYUNG RT.006, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
135	KUB Danau Tabengan Tihang	Dusun Kuyung RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
136		Sebemban RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	10 Unit	Musrenbang RKPD
137		KUB Pesut Bahari Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Kapal	10 Unit	Musrenbang RKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1		PULAU PINANG RT 007, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ika Lele Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
2		Desa Hambau, RT. 015 Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Baung Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
3		Jalan Jembatan Ulin RT 006 Desa Pela, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
4		Jalan Jembatan Ulin RT 005 Desa Pela, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
5		Jalan Jembatan Ulin Poros Pela RT 006, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
6	POKDAKAN "BENAUNG"	Desa Liang Ulu JL. AWANG LONG RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
7	POKDAKAN Bangun Sejahtera	Desa Sedulang, Kobdar Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
8		DESA KOTA BANGUN I LAHAN RT.007 / RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
9		Gapokan Desa Purwajaya, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Gurame Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
10	POKDAKAN Teman Tanpa Syarat	Loa Kulu Kota Jl. Yos Sudarso RT.17, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
11		Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Udang Probiotik	500000 ekor 200 Botol	Musrenbang RKPD
12		Desa Santan Ulu - 0.000168 Long 117.352268 RT.7 , Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
13		Desa Kupang Baru Dusun Mekar Baru dan Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Spiloka Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
14		jalan pembangunan RT.005 desa teratak Kec.muara kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Patin Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
15	Pokdakan Mina Idaman	Jl. Srigunting RT.002 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ika Lele Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
16		Muara Aloh Danau Teluk Ginantan, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Spiloka Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
17	kelompok '' Mitra Sejahtera ''	Desa Batuq RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
18	Kelompok "KERAMBA MAHAKAM"	Jl. Dewi Sartika RT.06 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
19	POKDAKAN Mekar Melati	Kel. Pendingin, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Nila Bibit Lele Pakan	25000 ekor 25000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
20	POKDAKAN Karang Taruna	Kel. Pendingin, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Nila Bibit Lele Pakan	25000 ekor 25000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
21		Desa Segihan, Jln.Syahran R Rt.001, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Nila Bibit Patin Pakan	25000 ekor 25000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
22		Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
23		Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Benih Ikan Pakan	25000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
24	Pokdakan Sipakaraja	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Benur Nener	500000 ekor 100000 ekor	Musrenbang RKPD
25		Desa Santan Ulu 0.000197° Long 117.352274 RT.17, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal Bibit Lele Pakan Ikan	10 Unit 20000 ekor 2500 Kg	Musrenbang RKPD
26	POKDAKAN SEMARING	Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
27		Desa Loa Duri Ilir, RT 24, Kab. Kutai Kartanegara	mesin ekstruder pencetak pakan ikan apung	1 Unit	Musrenbang RKPD
28		Gapokan Desa Purwajaya, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
29		Desa Loa Kulu Kota, Jl. Yos Sudarso RT.17 (POKDAKAN Teman Tanpa Syarat), Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
30		Jl.Raya Sungai Jantur RT.004 Desa Jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
31	Kelompok "IDAMAN TERBAIK"	Jl. Dewi Sartika RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
32		Jln.Pangeran Hidayatullah rt.03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
33	Kelompok Wanita	Desa Rebaq Rinding, Jl. K.H Agus Salim RT.003, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
34	Kelompok Wanita	Desa Rebaq Rinding, Jl. K.H Agus Salim RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
35		Desa Rebaq Rinding, Jln.Pangeran Hidayatullah rt.01, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
36		Desa Rebaq Rinding, Jl. K.H Agus Salim RT.002, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
37	Kelompok Wanita	Desa Rebaq Rinding, Jl. K.H Agus Salim RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
38		Jl. Jend. A. Yani RT. 011 Desa Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000 Kg	Musrenbang RKPD
39		Desa Embalut, RT.04 Dusun Teluk Tepen, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Pakan Ikan	30000 ekor 3000 Kg	Musrenbang RKPD
40	pokdakan bina karya	Desa Loa Pari RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Pakan Ikan	30000 ekor 3000 Kg	Musrenbang RKPD
41	pokdakan Lepan Jaya	Desa Loa Pari RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Pakan Ikan	30000 ekor 3000 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
42	pokdakan Podo Makmur	Desa Loa Pari RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Pakan Ikan	30000 ekor 3000 Kg	Musrenbang RKPD
43	pokdakan Joyo Makmur	Desa Loa Pari RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Pakan Ikan	30000 ekor 3000 Kg	Musrenbang RKPD
44	Eks Tambang	Desa Sedulang , Kab. Kutai Kartanegara	KJA Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
45	Kelompok Budidaya Ikan BERKAH BERSAMA	Jl.Raya Sungai Jantur RT.008 Desa Jantur Selatan, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
46		Jl. Jend. A. Yani RT. 009 Desa Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
47		Jl. Jend. A. Yani RT. 008 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
48	Kelompok "WANITA MAHAKAM MANDIRI "	Jl. Dewi Sartika RT.06 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
49	Kelompok Pokdakan Maju Bersama	Jl. Kampung Baru RT. 09 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
50	Kelompok "MEMBAWA BERKAH"	Desa Kayu Batu, Jl. Dewi Sartika RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
51		Jl.Raya Sungai Jantur RT.011 Desa Jantur Selatan ., Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
52	Kelompok "SUNGAI MAHAKAM "	Desa Kayu Batu, Jl. Dewi Sartika RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
53		Jl.Raya Sungai Jantur RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
54	kelompok MAHAKAM JAYA MAKMUR	Desa Kayu Batu, Jl. Dewi Sartika RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
55		Jl. Pangeran Antasari RT. 003 Desa Muara Muntai Ulu kec. muara muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
56	KUB Wanita Maju	Jln.Pangeran Hidayatullah rt.01, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
57		Jl. Jend. A. Yani RT. 011 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
58	Kelompok Budi Daya Mitra ALD	Jl.P.Hidayatullah RT 05, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
59	KUB KASIH BUNDA	JL.P.Hidayatullah RT 04 Desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
60	KUB IBU MANDIRI	Jln.Pangeran Hidayatullah rt.01, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
61	KUB IBU BAHAGIA	Jln.Pangeran Hidayatullah rt.04, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
62	Kelompok Budi Daya Bunga Tulip	Pulau Haapan RT 04, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
63	KUB HARAPAN BUNDA	Jln.Pangeran Hidayatullah rt.05, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
64	KUB BUNGA DAHLIA	Jln.Pangeran Hidayatullah rt.07, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
65		Desa Jantur Baru, Jl. Kampung Baru RT. 08, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
66		Desa jantur Baru, Jl. Kampung Baru RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
67	Kelompok Budi Daya Ikan Cahaya Mentari	Jl.P.Hidayatullah RT 05 Desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
68	Kelompok Budi Daya Anggrek Merah	Jl.P.Hidayatullah RT 06 Desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
69	Kelompok Budi Daya Permai Indah	Jl.P.Hidayatullah RT 01 Desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Pulau Harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
70	Kelompok Budidaya "BINA USAHA B"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.002 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
71	Kelompok Budidaya "SUNGAI BUNTUT"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.012 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
72	Kelompok Budidaya "BINA USAHA A"	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.002 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
73		Desa Kayu Batu, Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
74	POKDAKAN Bina Usaha Bersama	Desa Kayu batu, Jl. Dewi Sartika RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
75	Kelompok Keramba jaya mandiri	Muara Wis, Jln. Jelawat RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
76	Kelompok Lancang Kuning	Sebemban RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
77		Desa Sebemban, DUSUN KUYUNG RT.007, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
78	KELOMPOK (KELOMPOK LOA BENGAU)	JALAN WANGSA RT 004 SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU (EX LOKASI LONGSOR), Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
79		Desa Embalut, RT.02 Dusun Teluk Tepen, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
80	Pokdakan Nila Barokah	Desa Loa Pari, Desa Loa Pari RT. 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
81	Pokdakan Mahakam Maju Bersama	Desa Loa Pari, Desa Loa Pari RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Keramba Ulin Bibit Ikan Pakan	10 Unit 50000 ekor 5000 Kg	Musrenbang RKPD
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1		desa suka bumi, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Pembesaran	1 Paket	Musrenbang RKPD
2		Desa Makarti, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Pemijahan	1 Paket	Musrenbang RKPD
3		Jalan Srigunting, Rt. 002 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam UPR	1 Paket	Musrenbang RKPD
4	Pokdakan Mina Idaman	Jl. Srigunting, RT.002 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Beton	10 Unit	Musrenbang RKPD
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	POKLAHSAR Sumber Harapan	RT. 006 Kuala samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
2	POKLAHSAR Amanah Bersama Pesisir	RT.018 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3	POKLAHSAR Muara Sejati Pesisir	RT.018 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
4	POKLAHSAR Sumber Sari Laut	RT.018 Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
5	CAHAYA MENTARI PAGI	RT.007 Kuala samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
6	KARYA INDAH PESISIR	RT.007 Kuala samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
7	POKLAHSAR BUNDA PESISIR	RT.003 Kuala samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Coolbox Jaring Dari	10 Uni 20 Roll	Musrenbang RKPD
8	Polakshar.Sumber Sejahtera abadi	Kel. Samboja Kuala , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
9	Putri Pesisir Kuala Samboja	Samboja Kuala , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
10	Sinar Rembulan Kuala Samboja	Samboja Kuala , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
11	Matahari Pagi Samboja	Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
12	Seribu Dinar	Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
13	Putri Makassar Samboja	Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
14	Kejora Kampung Makassar	Kuala Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
15		Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD
16	Kelompok Pengelolah dan Pemasar (POKLAHSAR) " BERKAH REZKY JAYA"	Desa Muara Badak Ulu, RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD
17		Desa Kayu Batu, Jl. Dr. Nazir RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD
18	POKLAHSAR Mutiara Laut	RT.018 Kuala samboja, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD
19	Poklahsar Sumber rejeki	Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD
20	Poklahsar Jalur Mekar Sari	Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
21	Poklahsar Maju Bersama	Kel.Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD
22	Poklahsar Indah Berkarya Maju	Kel.sangasanga muara , Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	10 Unit	Musrenbang RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
23	Karya Cemerlang Muara	Sangasanga Muara, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	1 Paket	Musrenbang RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional merupakan bagian penting untuk diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan. Agenda Pembangunan Nasional tercermin dari Visi Presiden Yaitu : ***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***.

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 8 (delapan) misi pembangunan, dengan 2 (dua) misi menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sesuai dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yaitu:

1. penangkapan ikan terukur berbasis kuota; dan
2. pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;

Visi Misi Presiden yang kemudian diselaraskan dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut disederhanakan dalam arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung implementasi ekonomi biru, yaitu :

1. *Vocational Goes to Actor (VOGA).*

   Penguatan implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 terkait Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.

2. Pendidikan.

   Penguatan satuan pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan yang ada agar dapat langsung terserap pada industri kelautan dan perikanan baik nasional maupun manca negara serta program kampus utama Politeknik AUP dengan kuota penerimaan 100% (seratus persen) bagi Anak Pelaku Utama (APU) di sektor kelautan dan perikanan guna mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

3. Pelatihan dan Penyuluhan.

   Mendukung dan turun ke lokasi-lokasi prioritas pengembangan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kampung Perikanan Budidaya, Kampung Nelayan Maju, serta pelabuhan-pelabuhan yang menjadi prioritas dalam penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

4. *Smart Fisheries Village (SFV).*

Konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna, yang merupakan perpaduan antara pendidikan, pelatihan dan inkubasi bisnis sebagai percontohan dari sisi pemanfaatan serta optimalisasi aset UPT lingkup BRSDMKP.

Dalam tatanan implementasi, kebijakan nasional tersebut tertuang dalam Program prioritas nasional yaitu Kebijakan Ekonomi Biru Untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan**.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mencermati tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, serta mengacu pada target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan Daerah yang tertuang dalam Studi Pendahuluan RENSTRA Kelautan dan Perikanan 2025-2029, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel . Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja sasaran
2	Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan		Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	9,2 %
		Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	104

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026, Rencana Program dan kegiatan Tahun Rencana 2026 disusun dengan memperhatikan :

a. Pencapaian Visi dan Misi rancangan teknokratik RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029; khusunya pada Program kesejahteraan sosial yaitu fasilitasi pengembangan usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 (seribu) penduduk pertahun dan Program pembangunan pertanian berbasis kawasan dengan target fasilitasi sarana dan prasarana nelayan & pembudidaya perikanan produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.
b. Pengembangan perikanan air payau juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renstra. Dalam rangka mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai sentra perikanan Kalimantan Timur, pengembangan udang windu dan rumput laut menjadi perhatian arah pengembangan.
c. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah termuat dalam studi pendahuluan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029.
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
f. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional, khususnya pada program prioritas nasional yaitu mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, yang oleh kementerian kelautan dan perikanan diterjemahkan ke dalam program penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g. 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan:
   1. Kedaulatan;
   2. Keberlanjutan; dan
   3. Kesejahteraan.

h. Proses Analisis Hasil Evaluasi.

i. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 direncanakan berjumlah 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) subkegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp798.458.711.725,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2026, secara rinci dsampaikan dalam tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	NON URUSAN (GENERIK)								
		Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan		9.2 %				9.8 %	
		Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan		104 Nilai				104.5 Nilai	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Nilai Sakip Perangkat Daerah		70.5 Nilai	31,447,666,957	APBD II.		72.5 Nilai	27,010,480,957
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.		6 Dokumen	1,900,000,000	APBD II.		6 Dokumen	900,000,000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	50,000,000	APBD II.		1 Dokumen	50,000,000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Data	250,000,000	APBD II.		1 Data	250,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Berita Acara	50,000,000	APBD II.		1 Berita Acara	50,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen Renstra dan Renja)	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Dokumen	1,250,000,000	APBD II.	Penambahan 1,000,000,000 untuk Penyusunan Roadmap Hilirisasi Rumput Laut Keamatan Muara Badak	2 Dokumen	250,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	50,000,000	APBD II.		1 Dokumen	50,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	250,000,000	APBD II.		Dokumen	250,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.		22 Dokumen	16,373,500,957	APBD II.		22 Dokumen	16,398,500,957
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	162 Orang	16,003,500,957	APBD II.		162 Orang	16,003,500,957

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Dokumen	20,000,000	APBD II.		3 Dokumen	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	18 Dokumen	350,000,000	APBD II.		18 Dokumen	350,000,000
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	0 Dokumen	-	APBD II.		1 Dokumen	25,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6 Dokumen	185,000,000	APBD II.		6 Dokumen	185,000,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	35,000,000	APBD II.		1 Dokumen	35,000,000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Laporan	75,000,000	APBD II.		1 Laporan	75,000,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Laporan	50,000,000	APBD II.		1 Laporan	50,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Laporan	25,000,000	APBD II.		3 Laporan	25,000,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.		1 Dokumen	10,000,000	APBD II.		1 Laporan	10,000,000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Retribusi Daerah yang Akuntabel.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Laporan	10,000,000	APBD II.		1 Laporan	10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.		5 Dokumen	1,037,186,000	APBD II.		5 Dokumen	575,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		486 Paket	462,186,000	APBD II.	Pakaian Dinas ASN terakhir diadakan tahun 2021, dengan adanya penambahan ASN P3K maka penyediaan pakaian dinas menjadi kebutuhan	- Paket	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	25,000,000	APBD II.		1 Dokumen	25,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Sistem	25,000,000	APBD II.		1 Sistem	25,000,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Dokumen	25,000,000	APBD II.		1 Dokumen	25,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	50 Orang	500,000,000	APBD II.		50 Orang	500,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan		110 ASN	1,560,000,000	APBD II.		162 ASN	1,560,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Jenis	20,000,000	APBD II.	Penambahan Gedung Kerja baru (TPI dan Hatcherry) berdampak pada peningkatan kebutuhan kelsitrikan terutama lampu penerangan	3 Jenis	20,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Paket	500,000,000	APBD II.		32 Jenis	500,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	25 Jenis	50,000,000	APBD II.		25 Jenis	50,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	10 Unit	75,000,000	APBD II.		10 Unit	75,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan BacaanPeraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	2153 Buku	65,000,000	APBD II.		2,153 Buku	65,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu		1 Laporan	50,000,000	APBD II.		1 Laporan	50,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.	Di Dalam Daerah dan Di Luar Daerah	54 Rapat	650,000,000	APBD II.		54 Rapat	650,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta Pada Unit Kearsipan (UK).	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	6 Berkas	150,000,000	APBD II.		6 Berkas	150,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan		2 Unit	8,000,000,000	APBD II.		1 Unit	5,000,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	- Unit	-	APBD II.		Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumllah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	- Unit	-	APBD II.		Unit	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	3,000,000,000	APBD II.		Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Unit	5,000,000,000	APBD II.		Unit	5,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 Jenis	1,201,480,000	APBD II.		5 Jenis	1,201,480,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Waktu penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	12 Bulan	350,000,000	APBD II.		12 Bulan	350,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	12 Bulan	50,000,000	APBD II.		12 Bulan	50,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	18 layanan	801,480,000	APBD II.	Alokasi Untuk :1. Security 10 Orang x Rp. 3,867,000 x 12 bln (kantor 4 Orng, Hatcherry 4 Org, BBI 2 Org)2. Cleaning Service 8 Orang x Rp. 3,515,000 x 12 bln (Kantor 5 Org, Rumah Jabatan 1 Org, BBI 2 Org)	18 layanan	801,480,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.		90 Persen	1,180,500,000	APBD II.		90 Persen	1,180,500,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	19 Unit	190,000,000	APBD II.		19 Unit	190,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	60 Unit	210,000,000	APBD II.		60 Unit	210,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	261 Unit	230,500,000	APBD II.	Pemeliharaan terhadap peralatan kerja dan mesin - mesin	261 Unit	230,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3 Unit	450,000,000	APBD II.		3 Unit	450,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1 Unit	100,000,000	APBD II.		1 Unit	100,000,000
	URUSAN					APBD II.			
		Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan		9 %		APBD II.		10 %	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
		Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.		Nilai 104		APBD II.		Nilai 104	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		Ton 122,693	107,705,000,000	APBD II.		Ton 128,827	53,957,500,000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.		2404.5525 Nelayan	91,830,000,000	APBD II.		Nelayan 2,525	38,220,000,000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Tangkap	Kabupaten Kukar.	10 Dokumen	1,420,000,000	APBD II.		Dokumen 9	1,420,000,000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kecamatan Samboja dan Kecamatan Anggana.	72 Unit	63,100,000,000	APBD II.		Unit 8	8,000,000,000
	Penyediaan Sarana Usaha Perikananan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu.	7910 Unit	27,310,000,000	APBD II.		9860 Unit	28,800,000,000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan		1650 Orang	14,275,000,000	APBD II.		Orang 1,625	14,237,500,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	850 Orang	13,325,000,000	APBD II.		825 Orang	13,287,500,000
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	300 KUB	450,000,000	APBD II.		300 KUB	450,000,000
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	500 Orang	500,000,000	APBD II.		500 Orang	500,000,000
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi		3 Unit	450,000,000	APBD II.		3 Unit	450,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja.	3 Layanan	450,000,000	APBD II.		3 layanan	450,000,000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan		1000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,050,000,000	APBD II.		1,000 Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,000,000,000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara.	1 Dok	50,000,000	APBD II.		Dok	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman,	1000 Rekomendasi	1,000,000,000	APBD II.		1,000 Rekomendasi	1,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
			Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.						
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar		10 Kapal	100,000,000	APBD II.		10 Kapal	50,000,000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	1 Dok	50,000,000	APBD II.		Dok	-
	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	10 Rekomendasi	50,000,000	APBD II.		10 Rekomendasi	50,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		220770.725 Ton	647,591,044,768	APBD II.		236,225 Ton	481,981,044,768
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan		380 Kelompok	6,350,000,000	APBD II.		380 Kelompok	6,350,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Wilayah Kutai Kartanegara	30 Kelompok	500,000,000	APBD II.	Pembudidaya Miskin.	30 Kelompok	500,000,000
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	100 Kelompok	850,000,000	APBD II.		100 Kelompok	850,000,000
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Muara Kaman, Kota Bangun. UPT Perikanan Tersertifikasi	100 Kelompok	1,000,000,000	APBD II.		100 Kelompok	1,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.	150 Kelompok	4,000,000,000	APBD II.	Pembudidaya dilatih.	150 Kelompok	4,000,000,000
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan		1000 TDPI	1,000,000,000	APBD II.		1,000 TDPI	1,000,000,000
	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Terlayani dalam Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK).	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara	1000 Orang	1,000,000,000	APBD II.		1,000 Orang	1,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
			Muntai, Kembang Janggut, Tabang.						
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.		9329.74 Pembudidaya	640,241,044,768	APBD II.		9,610 Pembudidaya	474,631,044,768
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	2 Dokumen	250,000,000	APBD II.		2 Dokumen	250,000,000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11 Unit	50,366,200,000	APBD II.		10 Unit	25,568,200,000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja, Sanga-Sanga dan Muara Badak.	13995.0425 Unit	559,801,700,000	APBD II.		11,137 Unit	445,489,700,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kec. Anggana, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Tenggarong, Muara Badak,	2 Dok	400,000,000	APBD II.		2 Dok	400,000,000
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Wilayah Pesisir (Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Anggana dan Muara Jawa).	2 Dok.	600,000,000	APBD II.		2 Dok	600,000,000
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	400,000,000	APBD II.		2 Dok	400,000,000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		10 Unit	651,965,480	APBD II.		10 Unit	651,965,480
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia		12 Unit	27,771,179,288	APBD II.		8 Unit	1,271,179,288
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi		2750 Ha	4,950,000,000	APBD II.		2,750 Ha	4,950,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan		3 Laporan	4,950,000,000	APBD II.		3 Laporan	4,950,000,000
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.	50 Pelau Usaha	500,000,000	APBD II.		50 Pelau Usaha	500,000,000
	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun	7 Unit	100,000,000	APBD II.		7 Unit	100,000,000
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		10 Pelau Usaha	100,000,000	APBD II.		10 Pelau Usaha	100,000,000
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		100 Pelau Usaha	1,000,000,000	APBD II.		100 Pelau Usaha	1,000,000,000
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk		50 Orang	250,000,000	APBD II.		50 Orang	250,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun		12 Unit	3,000,000,000	APBD II.		12 Unit	3,000,000,000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		74 Angka	6,765,000,000	APBD II.		78 Angka	7,780,000,000
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		26250 Ton		APBD II.		27,563 Ton	
		Nilai Produksi Perikanan		14267.0088 Milyar Rupiah		APBD II.		16,264 Milyar Rupiah	
		Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan		1845 Ton		APBD II.		1,891 Ton	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan		200 Tanda Daftar Usaha.	650,000,000	APBD II.		200 Tanda Daftar Usaha.	750,000,000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka		1 Dokumen	100,000,000	APBD II.		- Dokumen	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		200 Rekomendasi	50,000,000	APBD II.		200 Rekomendasi	50,000,000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Wilayah Kutai Kartanegara	8 Dokumen	400,000,000	APBD II.		8 Dokumen	450,000,000
	Pelaksanaann Verifiiasi Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usha dan Tingkat Risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Kepmen 050 5889		30 Rekomendasi	100,000,000	APBD II.		50 Rekomendasi	250,000,000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	17 Unit Usaha	565,000,000	APBD II.		19 Unit Usaha	630,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.	17 Unit Usaha	565,000,000	APBD II.		19 Unit Usaha	630,000,000
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.		50 POKLAHSAR.	5,550,000,000	APBD II.		70 POKLAHSAR.	6,400,000,000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	100 Ton	300,000,000	APBD II.		100 Ton	400,000,000
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	50 Pelau Usaha	5,250,000,000	APBD II.		60 Pelau Usaha	6,000,000,000
					798,458,711,725				575,679,025,725

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 merupakan periode kedua dalam pelaksanaan rencana strategis periode 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi seperti yang tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 dan merupakan kewenangan kelautan dan perikanan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 ini merupakan pedoman/acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta cerminan dari RKPD tahun 2026 dalam mewujudkan rencana teknokratik RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanantahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh peran dan tanggungjawab seluruh komponen organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta *stakeholder* yang terkait.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM merupakan merupakan Rencana Kerja tahunan yang paralel dengan RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Renja-PD. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional tersebut maka setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD. Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD,

sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja-PD.

Renja-PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengopersionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunya amat bertanggung jawab dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kutai Kertanegara tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;

17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2026; dan
18. Surat Edaran Nomor : B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati.

2. Tujuan

Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan dokumen perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan tujuan dan sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan/dikemukakan Rencana Kerja pendanaan Program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Renja-PD tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja tahun ke-V yang merupakan turunan dari rencana strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026.

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong diantaranya keterhambatan beberapa kerbatasan cara berinovasi dari sumber daya mananusia yang ada, *maping* data yang belum maksimal, dan belum terdapat penyusunan roadmap yang pasti untuk menajankan Program kegiatan yang ada. yang menjadi pendorong adalah terlaksanya seluruh Program kegiatan sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/Program/kegiatan.

Maka dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025

Dinas Koperasi dan UKM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN									
2.17				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	85,40	73,00	61,54	84%	77	77	96,25%
	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	20	11	4	4	100%	4	19	95,00%
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian	15	9	3	3	100%	3	15	100,00%
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	0	0	0	0%	2	2	100,00%
01	2	01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung StatistikSektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
01	2	01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik SektoralDaerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
01	2	01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulana	Jumlah Dokumen Laporan	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	318	142	0	0	0%	0	142	44,65%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	60	30	30	100%	30	120	80,00%
	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi	60	30	0	0	0%	0	30	50,00%
	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	54,77%	75,09%	100,00%	75,09%	85,31%	85,31%	85,31%
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	48	24	12	12	100%	12	48	100,00%
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumalah ATK	225	135	45	45	100%	45	225	100,00%
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	95	57	19	19	100%	13	89	93,68%
						Jumlah Porsi Makan dan	4000	2100	800	800	100%	346	3246	81,15%
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan	41	30	9	9	100%	2	41	100,00%
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan	1160	696	250	250	100%	150	1096	94,48%
	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada	27	23	2	2	100%	2	27	100,00%
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	8	4	2	2	100%	2	8	100,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	55,97%	74,84%	100,00%	74,84%	93,71%	93,71%	93,71%
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	89	30	30	100%	30	149	93,71%
	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	46,14%	68,12%	100,00%	68,12%	70,30%	70,30%	70,30%
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	436	218	218	100%	0	654	66,67%
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60,36%	80,13%	100,00%	80,13%	99,55%	99,55%	99,55%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	75	12	12	100%	12	99	79,20%
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	80	30	30	100%	30	140	100,00%
	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	3332	1100	1100	100%	1080	5512	100,00%
2.17	02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	75,6%	45,90%	53,30%	0,00%	0%	60,70%	60,70%	80,34%
2.17	*02*	*2*	*01*		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.17	*02*	*2*	*01*	*01*	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	0	0	0%	10	10	20,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	27,24%	21,40%	23,25%	23,25%	100,00%	27,24%	27,24%	100,00%
2.17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	83,87%	67,89%	75,88%	75,88%	100,00%	83,87%	83,87%	100,00%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	150	175	175	100%	200	200	100,00%
						Jumlah Koperasi yang didampingi	30	15	25	25	100%	30	30	100,00%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	275	275	275	100%	325	325	100,00%
						Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	25	15	5	5	100%	25	25	100,00%
2.17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	18,52%	7,41%	11,11%	11,11%	100,00%	18,52%	18,52%	100,00%
2.17	04	2	*01*		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	150	160	160	100%	180	180	100,00%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	75	80	80	100%	90	90	100,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	75	80	80	100%	90	90	100,00%
2.17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100,00%
2.17	*05*	*2*	*01*		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	405	180	90	60	67%	10	250	61,73%
2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	432	300	180	60%	60	672	82,96%
2.17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	4,66%	2,92%	6,36%	218%	3,89%	3,89%	79,98%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	4,86%	3,14%	2,92%	4,00%	137%	3,89%	3,89%	79,98%
2.17	*06*	*2*	*01*		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60	40	50	50	100%	60	60	100,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17	*06*	*2*	*01*	*01*	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	60	40	50	50	100%	60	60	100,00%
2.17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	9,77%	2,38%	1,99%	2,85%	143%	1,99%	7,22%	73,91%
2.17	*07*	*2*	*01*		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	5504	2261	1121	1121	100,00%	1121	4503	81,81%
2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	2	1	1	100%	1	4	133,33%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	20	20	20	100%	30	70	87,50%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	240	240	240	100%	140	620	88,57%
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	1140	480	480	100%	480	2100	87,50%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	420	240	240	100%	240	900	75,00%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses	640	320	120	120	100%	120	560	87,50%
						Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	3	3	3	100%	7	13	100,00%
2.17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM	1,4%	1,35%	1,10%	1,09%	99,09%	1,40%	1,40%	100,00%
2.17	*08*	*2*	*01*		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	1700	1081	320	320	100%	320	1721	101,24%
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akases Pemasaran	600	263	120	120	100%	120	503	83,83%
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	818	200	200	100%	200	1218	110,73%
						Jumlah Event yang diikuti	17	11	10	10	100%	7	17	100,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2026 sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja koperasi dan UKM;
2. meningkatnya UMKM wirausaha baru;
3. meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi; dan
4. meningkatnya produktifitas dan kualitas usaha mikro

Pada tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapati dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 8 (delapan) kegiatan 21 (dua puluh satu) subkegiatan yang berisikan kegiatan rutin perkantoran pada setiap PD, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 61,54 (enam puluh satu koma lima puluh empat).

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

   Program pelayanan izin usaha simpan pinjam ada 1 (satu) kegiatan, 1 (datu) subkegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah, capaiannya rata-rata 0% dikarenakan adanya regulasi perizinan simpan pinjam sebagaimana Surat Edaran Nomor 11 tahun 2022 tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022.

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.

   Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi ada 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) subkegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya 100% (seratus persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

   Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi ada 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) subkegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya 100% (seratus persen).

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian.

   Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian ada 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) subkegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan rata-rata pencapaianya Program 60 %(enam puluh persen).

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.

   Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi ada 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) subkegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaianya 100 % (seratus persen).

7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) ada 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan, adapun kegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya 100% (seratus persen).

8. Program Pengembangan UMKM.

   Program pengembangan pengembangan UMKM dengan 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) subkegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

serta desain dan teknologi, dengan tingkat capaianya 100 % (seratus persen).

Capaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Koperasi yang berkualilas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	8,87%	50,63%	13,00%	13,00%	Naiknya pesersentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	12,01%	73,82%	12,59%	12,59%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	73	77	80	85,40	85,40	73	77	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,53%	82,59%	82,62%	82,64%	82,67%	82,49%	83,05%	82,62%	82,64%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,23%	18,96%	20,98%	21,40%	23,35%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%	29,19%	11,11%	14,81%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	68,10%	75,60%	66,67%	0,00%	60,74%	60,74%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	3,76%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
10	Persentase meningkatnya Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	4,66%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
11	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	42,23%	0,44%	0,94%	0,94%	
12	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	3,01%	2,38%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
13	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	1,10%	1,40%	0,70%	1,35%	0,85%	0,85%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP;
b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP-koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi;
c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM;
d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM;
e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku);
f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi;
g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan;
h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga;
i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan;
j. Rendahnya kualitas SDM pembina, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi;
k. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga keuangan mikro (LKM);
l. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kutai Kartanegara; dan
m. Belum ada wadah/forum untuk menaungi urusan UMKM yang menjadi binaan tiap-tiap PD.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.3 (T.C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	Rancangan Awal					Hasil Analisa					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /	Lokasi	Indikator Program/	Target Capaia	Kebutuhan Dana/Pag	Program / Kegiatan /	Lokasi	Indikator Program/	Target Capaia	Kebutuhan Dana/Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Diskop-	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	77	11,811,087,4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Diskop-	Persentase Penyediaan Jasa	77	2,195,435,394	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokume	290,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	200,000,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen	Diskop-	Jumlah Dokumen	2 Dokume	100,000,00	Penyusunan Dokumen	Diskop-	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokume	150,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	190,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	50,000,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang	2 Laporan	9,087,184,077	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang	2 Laporan	10,139,437,534	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	1050 Orang/ bulan	8,982,740,094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/ bulan	10,034,993,551	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	104,443,983	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	104,443,983	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	93,926,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	50,000,000	
1.3.1	Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Rencana Milik Daerah SKPD	1 Laporan	93,926,000	Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	
1.4	Administrasi	Diskop-UKM	Persentase Perangkat Daerah	100%	25,000,000	Administrasi	Diskop-UKM	Persentase Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,000,000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	75,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan			Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan			
1.5	Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Perangkat Daerah	100%	557,512,000	Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Daerah	100%	432,398,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72,398,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72,398,000	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskop-UKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Diskop-UKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	25,000,000	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,064,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150,000,000	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	75,050,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	25,000,000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	249,294,920	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	299,648,000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	299,648,000	Belanja kendaraan dinas Jabatan untuk mengganti kendaraan jabatan Ess II, Ess III dan Ess IV, JF Pengawas (Kendaraan sudah tua dan sering rusak sedang-berat)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Belum ada Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Picup)
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pembangunan UMKM Center di 5 Kecamatan
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	249,294,920	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	pengadaan sarana dan Prsarana UMKM Center

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	912,298,592	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	478,080,000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152,859,432	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225,000,000	Kenaikan daya dan Beban pemabayaran Listrik, Air, Internet
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	759,439,160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253,080,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	495,871,860	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	545,871,860	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	180,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	180,700,000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	80,000,000	Perwatan berupa 27 AC, 20 Pinter, 22 PC/Laptop, 1 Genset

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 Unit	285,171,860	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	285,171,860	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab Kutai Kartanegara	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	27.24%	550,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab Kutai Kartanegara	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	27.24%	1,250,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Kutai Kartanegara	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	83,87%	550,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Kutai Kartanegara	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	83,87%	1,250,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	225,000,000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	1,100,000,000	Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa/kelurahan (Kopdes Merah Putih)
2.1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	325,000,000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	120 Unit Usaha	150,000,000	
3	PROGRAM PENILAIAN KOPERASI	Kartanegara	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18.82%	220,000,000	PROGRAM PENILAIAN KOPERASI	Kartanegara	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18.82%	865,000,000	
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Unit Usaha	220,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	120 Unit Usaha	865,000,000	
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	85Unit Usaha	130,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	65,000,000	
3.1.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	85 Unit Usaha	90,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	90 Unit Usaha	800,000,000	1 Penghargaan Koperasi atas penilaian kesehatannya 2 Peringatan Hari Koperasi Nasional
4	PERKOPERASIAN	Kartanegara	Persentase Pengrus petihan perkoperasian	100.00%	300,000,000	PERKOPERASIAN	Kartanegara	Persentase Pengrus memiliki sertfikat petihan perkoperasian	100.00%	650,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	10 Koperasi	300,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	75 Koperasi	650,000,000	
4.1.1	Peningkatan Pemahaman Koperasi	1 Kota Bangun, 2 Marangkayu Tenggarong, 6 Muara Badak	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 orang	300,000,000	Peningkatan Koperasi	1 Kota Bangun, 2 Marang Tenggarong, 6 Muara Badak	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	650,000,000	1 Usulan Munrenbang Kecamatan 2 Faslitasi Penignkatan Kapabilitas Pengurus/pengawas KOPDESKEL Merah Putih
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab Kutai Kartanegara	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4.86%	900,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab Kutai Kartanegara	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4.86%	230,000,000	
			Persentase meningkatnya Omzet Koperasi	4.86%				Persentase meningkatnya Omzet Koperasi	4.86%		
5.1	Pemberdayaan dan Kabupaten/Kota		Koperasi		900,000,000	Pemberdayaan dan Kabupaten/Kota				230,000,000	
5.1.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	100,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.1.2	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	20 Unit Usaha	150,000,000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	-	
5.1.3	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	200,000,000	Peningkatan Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 Unit Usaha	130,000,000	
5.1.4	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	100,000,000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	100,000,000	
5.1.5	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30 Unit Usaha	150,000,000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	-	
5.1.6	Pemberdayaan Koperasi Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai	Koperasi dengan Kabupaten/Kota	30 Unit	200,000,000	Pemberdayaan Koperasi Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutai	Koperasi dengan Kabupaten/Kota	0 Unit	-	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab Kutai Kartanegara	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1.99%	2,280,004,943	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab Kutai Kartanegara	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1.99%	3,205,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	16.190 UMKM	2,280,004,943	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	16.190 UMKM	3,205,000,000	
6.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	130,004,943	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	130,000,000	
6.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	720 Unit Usaha	350,000,000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	720 Unit Usaha	950,000,000	-Tambahan dari Usulan Musrenbang (9 Desa/Kelurahan) - Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	150 Orang	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	150 Orang	250,000,000	Program Usaha Kecil Idaman
6.1.4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15000 Unit Usaha	1,000,000,000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15000 Unit Usaha	1,000,000,000	Program Usaha Kecil Idaman
6.1.5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	300 Orang	500,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	300 Orang	875,000,000	Penyesuaian hitungan nilai per peserta (Rp 5000000)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Omzet UMKM	1.40%	2,190,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Omzet UMKM	1.40%	8,690,000,000	
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	920 Unit Usaha	2,190,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	940 Unit Usaha	8,690,000,000	
7.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	465,000,000	Pengembangan Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	4,915,000,000	-Program Usaha Kecil Idaman - Fasilitasi Penguatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM melalui UMKM Center (Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat untuk alat dan mesin produksi) Lokasi : 5 Kecamatan (Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman) - Penguatan Kapasitas Pengelola Klinik dan Manajemen Bisnis UMKM Center - Fasilitasi Promosi Produk UMKM dan Event UMKM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah yang Difasilitasi	360 Orang	725,000,000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah yang Difasilitasi	360 Orang	725,000,000	Program Usaha Kecil Idama
7.1.3	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	500,000,000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	1,350,000,000	Pendampingan usaha mikro (Kliknik UMKM) dalam mengembangkan dan mengakselerasi bisnis, mereferensi ide bisnis ,mencari peluang permodalan, mengatur finansial dengan baik dan berinovasi serta pelayanan pendampingan, pemberdayaan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											pengembangan UMKM di Kecamatan
7.1.4	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400 Unit Usaha	500,000,000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400 Unit Usaha	1,700,000,000	Program Usaha Kecil Idama
	JUMLAH				18,251,092,392					27,085,435,394	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat forum PD, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja-PD, perbedaan terebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian *output* serta jumlah target kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada SIPD-RI sebagai bahan pembahaan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahaan forum PD dan pembahaan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM, usulan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 3.2) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Desa Santan Tengah - 0.01168135545702 7871, 117.46628668507502, Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jl. Kapitan Toko Lima RT. 10, Kec, Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jalan Ahmad Sifa RT 13 Kelurahan Dondang Lat .0.7731255° , Long 117.2287015° p.2, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan				
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Loa Duri Ulu RT.05 Kecamatan Loa Janan,	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kersik, Kecamatan Marang		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kelurahan Tama Pole, Kec. Muara Jawa Kab.		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/
4	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Sidomulyo, Kec. Anggana Kab.		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut , Kab. Kutai		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
6	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
7	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan,		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
8	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	RT. 16 Dusun II Desa Sebuntal ,		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
9	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jl. Karya Jaya RT.004 Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja,		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhdap Usaha	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
11	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	RT 17 Dusun II Desa Sebuntal , Kab. Kutai		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Gabungan Kelompok (Istri Nelayan), pendingin, Sanga- sanga, Kab. Kutai		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah,
13	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Pokdakan Mekar Melati, pendingin, Sanga-sanga, Kab.		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah,
14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	JL. anggana Rt.15 kel. panji, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah,
15	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Dusun Rapak Rejo Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang,		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah,
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha				
1	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
2	Pengembangan Usaha Mikro	RT 005 Dusun Jambu Rejo, Kec. Kota Bangun Darat Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
3	Pengembangan Usaha Mikro	Lokasi Pembangunan Pasar Desa Kota Bangun II, Kec. Kota Bangun Darat, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
4	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
5	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
6	Pengembangan Usaha Mikro	rt 07, Desa Muara Badak ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	Pengembangan Usaha Mikro	Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
8	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Muara Kaman Ilir RT 9, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Promosi Produk UMKM
9	Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Rapak Rejo, Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang,		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistis ke arah desentralistik.

Dikaitkan dengan urusan di bidang koperasi dan UKM maka pemberdayaan koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia *(pro poor).* Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional *(pro growth).* Keberadaan koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Keberadaan koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekatipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa koperasi dan UKM merupakan pemimpin perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM.

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan fokus kontribusi PDB sektor koperasi, mewujudkan koperasi model baru dan modern, pertumbuhan *Start-Up* berbasis koperasi;
2. Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan fokus, kontribusi PDB di sektor UMKM, nilai ekspor UMKM, nilai investasi UMKM, UKM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

naik kelas, pertumbuhan tenaga kerja UMKM, rasio kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut : Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD.

3.2.1 Tujuan.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan fokus pembangunan tahun 2026 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2026 dengan tujuan meningkatnya produktifitas melalui pemberdayaan dan penguatan kualitas koperasi dan UMKM. Indikator yang digunakan yaitu meningkatkan kulalitas koperasi dan meningkatkan usaha mikro menjadi wirausaha. Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun. Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

3.2.2 Sasaran.

Berdasarkan tujuan tersebut maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2026 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;
2. Sasaran Kedua, Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indikator Persentase Koperasi Aktif;
3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Table 13.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2026

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2020)	INDIKATOR					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM**	**Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya**	**Persentase**	**4%**	**7%**	**10%**	**13%**	**16%**	**19%**	**19%**
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	**Persentase**	11,54%	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	**13,28%**
	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP UKM	Nilai	67.76	68,00	70,00	73,00	77,00	80,00	80,00
	2 Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%	**82%**
	3 Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	0,23%	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	3,20%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 dengan fokus/tema pembangunan Kutai Kartanegara "Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan";
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih:

Dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai regulasi dan memastikan sinkronisasi substansi dan proses dalam penyusunan Renja-PD dimana Program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai amanat bertanggung jawab dalam menyusun Program, yang berpedoman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah.

Dalam mencapai target perangkat daerah yang termuat pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjalankan tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perumusan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah dengan rincian dan jumlah Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM; dan
8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Table 1.4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2026 DAN TAHUN MAJU 2027

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Diskop-UKM	77	12,195,435,394			77.00	20,852,561,719
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencanam Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	4 Dokumen	200,000,000	APBD		4 Dokumen	400,000,000
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Dokumen	150,000,000	APBD		2 Dokumen	200,000,000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	2 Laporan	50,000,000	APBD		2 Dokumen	200,000,000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Laporan	10,139,437,534	APBD		2 Dokumen	16,413,827,639

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Diskop-UKM	1260 Orang/bulan	10,034,993,551	APBD	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	1260 Orang/bulan	16,213,827,639
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104,443,983	APBD		1 Laporan	200,000,000
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Diskop-UKM	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	175,000,000
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	175,000,000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	400,000,000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM	0 Paket	-	APBD	Penyesuaian satuan dan SHS PDH	90 Paket	200,000,000
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	4 Orang	50,000,000	APBD		80 Orang	200,000,000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	432,398,000	APBD		100%	1,350,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10,000,000	APBD		2 Paket	50,000,000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72,398,000	APBD		2 Paket	100,000,000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	75,000,000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	100,000,000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	84 Dokumen	25,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	100 Laporan	150,000,000	APBD		150 Laporan	450,000,000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	100 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	5 Dokumen	25,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Diskop-UKM	100%	299,648,000	APBD		100%	249,294,920
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Diskop-UKM	3 unit	299,648,000	APBD	Belanja kendaraan dinas Jabatan untuk mengganti kendaraan jabatan Ess II, Ess III dan Ess IV, JF Pengawas (Kendaraan sudah tua dan sering rusak sedang-berat)		
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Diskop-UKM	0 Unit	-	APBD	Belum ada Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman	0 Unit	-	APBD	Pembangunan UMKM Center di 5 Kecamatan		
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	0 unit	-	APBD	pengadaan sarana dan Prsarana UMKM Center	20 unit	249,294,920
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	478,080,000	APBD		100%	984,439,160

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	12 Laporan	225,000,000	APBD	Kenaikan daya dan Beban pemabayaran Listrik, Air, Internet	12 Laporan	225,000,000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	12 Laporan	253,080,000	APBD		12 Laporan	759,439,160
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	545,871,860	APBD		100%	880,000,000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	12 unit	180,700,000	APBD		12 unit	300,000,000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	70 unit	80,000,000	APBD	Perwatan berupa 27 AC, 20 Pinter, 22 PC/Laptop, 1 Genset	70 unit	80,000,000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	3 Unit	285,171,860	APBD	Penyesuian SHS tenaga kebersihan	3 Unit	500,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Kutai Kartanegara	27.24%	1,250,000,000	APBD		27.24%	1,000,000,000
2.17.03.02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	83,87%	1,250,000,000	APBD		83.87%	1,000,000,000
2.17.03.02.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	200 Unit Usaha	1,100,000,000	APBD	Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa/ kelurahan (Kopdes Merah Putih)	200 Unit Usaha	500,000,000
2.17.03.02.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	150,000,000	APBD	Pendampingan , pemeriksaan , pengawasan Koperasi memenuhi kewajiban	325 Unit Usaha	500,000,000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	18.82%	865,000,000	APBD		18.82%	1,500,000,000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	865,000,000	APBD		200 Unit Usaha	1,500,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	30 Unit Usaha	65,000,000	APBD		100 Unit Usaha	500,000,000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	90 Unit Usaha	800,000,000	APBD	1. Penghargaan Koperasi atas penilaian kesehatanny a 2.	100 Unit Usaha	1,000,000,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertfikat petihan perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	100.00%	650,000,000			100.00%	300,000,000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	75 Koperasi	650,000,000	APBD		10 Koperasi	300,000,000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Kota Bangun,2. Marang Kayu,3. Kenohan, 4. Muara Jawa,5. Tenggarong,6. Muara Badak.	300 orang	650,000,000	APBD	1. Usulan Munrenbang Kecamatan 2. Faslitasi Sertifikasi profesi perkoperasian (BNSP)	180 orang	300,000,000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	4.86%	230,000,000	APBD		4.86%	1,900,000,000
		Persentase meningkatnya Omzet Koperasi		4.86%				4.86%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	10 Koperasi	230,000,000	APBD		60 Koperasi	1,900,000,000
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan EkonomiLainnya	Kab. Kutai Kartanegara	0 Keluarga	-	APBD		30 Keluarga	300,000,000
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit Usaha	-	APBD		20 Unit Usaha	300,000,000
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kab. Kutai Kartanegara	10 Unit Usaha	130,000,000	APBD		30 Unit Usaha	300,000,000
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kab. Kutai Kartanegara	30 Unit Usaha	100,000,000	APBD		30 Unit Usaha	200,000,000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit Usaha	-	APBD		100 Unit Usaha	800,000,000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1.99%	3,205,000,000	APBD		1.99%	2,700,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	16.190 UMKM	3,205,000,000	APBD		1.260 UMKM	2,700,000,000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	130,000,000	APBD		40 Unit Usaha	200,000,000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga- sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	720 Unit Usaha	950,000,000	APBD	-Tambahan dari Usulan Musrenbang (9 Desa/Kelurahan) - Fasilitasi Sertifikasi	720 Unit Usaha	500,000,000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	150 Orang	250,000,000	APBD		200 Orang	500,000,000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15000 Unit Usaha	1,000,000,000	APBD		15.000 Unit Usaha	1,000,000,000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga- sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	300 Orang	875,000,000	APBD	Penyesuaian hitungan nilai per peserta (Rp.5.000.000)	300 Orang	500,000,000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	1.40%	8,690,000,000	APBD		1.40%	3,300,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	940 Unit Usaha	8,690,000,000	Apbd		920 UMKM	3,300,000,000
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	150 UnitUsaha	4,915,000,000	Apbd	-Program Usaha Kecil Idaman-Fasilitasi Penguatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM melalui UMKM Center (Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat untuk alat dan mesin produksi)Lokasi : 5 Kecamatan (Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman)-Penguatan Kapasitas Pengelola Klinik dan Manajemen Bisnis UMKM Center-Fasilitasi Promosi Produk UMKM dan Event UMKM	150 UnitUsaha	1,500,000,000
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	360 Orang	725,000,000	Apbd	Program Usaha Kecil Idaman	360 Orang	800,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	30 Unit Usaha	1,350,000,000	Apbd	Pendampingan usaha mikro (Kliknik UMKM) dalam mengembangkan dan mengakselerasi bisnis, mereferensi ide bisnis ,mencari peluang permodalan, mengatur finansial dengan baik dan berinovasi serta pelayanan pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kecamatan	10 Unit Usaha	500,000,000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, Sumber DayaManusia, serta Desain danTeknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia, SertaDesain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	400 Unit Usaha	1,700,000,000	Apbd	Program Usaha Kecil Idaman	400 Unit Usaha	500,000,000
	JUMLAH				27,085,435,394				31,552,561,719

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil tahun 2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan RPJMD. Renja-PD yang merupakan perencanaan Program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk menjamin keberhasilan Program/kegiatan Renja-PD merupakan implementasi dari Renstra-PD (Program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur;
3. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selain menjadi Program/kegiatan selama tahun 2026 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Program di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil tahun 2026 merupakan Program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur pada periode tahun 2026. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta pelaksanaan mendukung indikator kinerja utama sesuai dengan RPJMD.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Renja-PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Rencana Kerja juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran Renja PD tahunan tahun 2026, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, Program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang optimal.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan embangunan Daerah dalam bidang kepariwisataan berkewajiban menyusun Rencana Kerja tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan Program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang disebut RKPD Dinas Pariwisata, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Pariwisata disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara : 1) perencanaan; 2) penganggaran; 3) pelaksanaan; 4) pengawasan.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Dinas Pariwisata membuat dan memiliki Rencana Kerja Dinas Pariwisata, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas Pariwisata, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05013708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2022.

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

2. Tujuan :

Untuk merumuskan target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata, proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pariwisata dengan dokumen RKPD Dinas Pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pariwisata, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

3.2 dan sasaran Renja Dinas Pariwisata

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pariwisata.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memberikan Penjelasan mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
   - Jumlah Program dan kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RENJA Dinas Pariwisata, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dinas pariwisata tahun lalu dan capaian renstra dinas pariwisata

Evaluasi Pelaksanaan capaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja semester II Dinas Pariwisata tahun 2024 yang selanjutnya juga akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja semester II Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024 dengan hasil - hasil sebagai berikut :

1. Target kinerja yang di rencanakan dalam dokumen Rencana Kerja pada tahun 2024 dapat tercapai sebesar 94,5 % (sembilan koma lima persen) sedangkan target realisasi anggaran sebesar 71 % (tujuh puluh satu persen).
2. Dari dokumen laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dapat diambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil penghambat pelaksanaan Rencana Kerja, misalnya membuat susunan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja berpengaruh pada penilaian kinerja dinas (LKjIP Dinas Pariwisata).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Dan Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pariwisata s/d Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2025	
				Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Urusan Pilihan Pariwisata								
Bidang Pariwisata								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB74)						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1904	1632	1904	1632	85,71	1632	85,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	53	70	53	75,71	53	75,71
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7	5	7	140	7	140

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2025	
				Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	100
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	3	4	3	75	3	75
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	14	14	100	14	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100	4	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	219	219	219	219	100	219	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	20	25	20	80	20	80
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	330	330	330	330	100	330	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	289	289	289	289	100	289	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PRESEN TASI DTW YANG MEMENUHI AKSESBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	65.76%						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2025	
				Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	100	4	4
Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	18	32	18	32	177,78	18	32
Pemberdayaan Masyrakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13	13	13	13	100	13	13
Penerapan Destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7	7	7	7	100	7	7
Penyediaan layanan pendaftaran Usaha Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	2	2
pembinaan dan pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2	2	2	2	100	2	2
Program Pemasaran Pariwisata	OKUPANSI	32,28						
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8	8	8	8	100	8	8,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	20	20	20	20	100	20	20,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	2	2	2	100	2	2,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	4	4	4	100	4	4,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	6%						
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9	9	9	9	100	9	9,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2025	
				Target Renja-PD Tahun 2024	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	7	7	7	7	100	7	7,00
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1	1	1	100	1	1,00
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	1	1	1	100	1	1,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PERTU MBUHA N PELAKU EKRAF	7						
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	20	20	20	20	100	20	20,00
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	20	20	20	20	100	20	20,00
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40	40	40	40	100	40	40,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	25	29	25	29	116	25	29,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*100*	100	100	100	100	100	100,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	20	20	20	100	20	20,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel .TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai Sakip Perangkat daerah		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	70	72	73	74	75	80	43,90	80	80
Persentase DTW yang memenuhi Aksesbilitas, Amenitas dan Atraksi			23,28%	26,28%	29,28%	32,28%	35,28%	64,81	65,00	64,81	64,81
Persentase Okupansi			59,14%	61,87%	63,81%	65,76%	68,09%	62%	34,00	62%	62%
Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi			7%	7%	7%	7%	7%	4%	4,00	4%	4%
Pertumbuhan Pelaku Ekraf		Kunjungan Wisatawan	4%	4%	5%	6%	7%	7%	8,21	7%	7%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, yaitu:

a. Tugas

Dinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan yang akan datang, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata :

1. Penetapan sebagian wilayah Kutai Kartanegara menjadi lokasi ibu kota negara;
2. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata Daerah dan ekonomi kreatif;
3. Digitalisasi promosi pariwisata, yang aktif dan berkesinambungan;
4. Pemenuhan destinasi wisata masyarakat millenial, dan digital;
5. Wadah untuk penampilan produk kreatif;
6. Peningkatan kelembagaan pariwisata, sertifikasi usaha jasa dan profesi;
7. Peningkatan dan optimalisasi kelembagaan dinas.

2.4 *Review* terhadap rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata 2026 berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata 2021-2026 dengan mempertimbangkan visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun juga berpedoman kepada Renstra Dinas Pariwisata 2021-2026.

Pada dasarnya yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan dalam hal ini tentu untuk mendukung Dinas Pariwisata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.31

Review Terhadap Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kukar	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB75)	19.293.043.795,00	(BB75)	23.027.335.968,00	3.734.292.173	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen		7 Dokumen			
PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	550.000.000	550.000.000	
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	50.000.000	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	150.000.000	-200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	-	Penyusunan LPPD, LKJIP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	100.000.000	-50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	14.969.807.441	129 Orang/bulan	19.103.265.968	4.133.458.527	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	377.520.000	12 Laporan	377.520.000	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan		2 Laporan			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	70.660.000	1 Laporan	30.000.000	- 40.660.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kukar							
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan		5 Layanan			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	209.769.650	2 Paket	200.000.000	- 9.769.650	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	97.770.000	12 Paket	200.000.000	102.230.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	2 Paket	200.000.000	100.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	40 Laporan	200.000.000	-	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	112.500.000	1 Dokumen	50.000.000	- 62.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.083.992	12 Laporan	850.000.000	244.916.008	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.574.062.712	12 Laporan	-	- 1.574.062.712	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan		12 Bulan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	150.200.000	47 Unit	277.000.000	126.800.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	26.120.000	9 Unit	175.000.000	148.880.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	149.550.000	173 Unit	149.550.000	-	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Kukar	PRESEN TASI DTW YANG MEMENUHI AKSESBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	68,09%	5.080.000.000	68,09%	15.720.243.168	10.640.243.168	
Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota			0	-		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola						
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			7	5.200.000.000		
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			2	1.925.000.000		
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola					-	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Muara Badak (pantai pangempang)	Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			1	75.000.000	75.000.000	program dan kegiatan kerja sama daerah pemerintah daerah tahun 2025 sampai dengan 2026
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4	950.000.000	1	5.270.243.168	4.320.243.168	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			0	-		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yang dikelola	4		4		-	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4	3.225.000.000	4	2.350.000.000	- 875.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	100.000.000	1	100.000.000	-	
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5	430.000.000	10	575.000.000	145.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	175.000.000			- 175.000.000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya			1	-		
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Pariwisat a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	10		10		-	
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kab. Kukar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	5	100.000.000	10	50.000.000	- 50.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi						
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota		Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021			5	125.000.000		
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	5	100.000.000	25	50.000.000	- 50.000.000	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)			5	-		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Kukar	OKUPANSI	35,28%	1.125.000.000	35,28%	6.575.000.000	5.450.000.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	11		11		-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	350.000.000	4	1.100.000.000	750.000.000	Rp. 350.000.000 terdiri dari output : 1. Pameran Pariwisata Dalam Daerah Rp. 100.000.000 2. Pameran Pariwisata Luar Daerah Rp. 100.000.000 3. Pengadaan Bahan Promosi Cetak Brosur, kalender, pamflet, Rp. 100.000.000 4. Kegiatan Dialog Wisata Rp. 50.000.000 Perlu tambahan anggaran untuk kegiatan Penguatan Promosi Pariwisata antara lain : 1. Pengadaan Souvenir dan Cinderamata eksklusif Pariwisata daerah Rp. 200.000.000 2. Pembuatan Konten Video Promosi Bekerjasama dengan Konten Kreator Kukar Rp. 200.000.000 3. Penguatan Media Online (IG dan FB Visiting) bekerjasama dengan Jasa Digital marketing Nasional dan Internasional Rp. 100.000.000 4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak (Papan Iklan / baliho dan media informasi cetak) Rp. 100.000.000 5. Pembuatan Video Promosi Event dan DTW Kukar Rp. 200.000.000 6. Tambahan untuk kegiatan dialog wisata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
								dengan melibatkan Duta wisata, Saka Pariwisata dan Influencer / Youtuber Kukar Rp. 50.000.000 7. Tambahan Untuk Pameran Pariwisata Luar Daerah Rp. 200.000.000 8. Workshop Konten Kreator (pembentukan komunitas konten kreator kukar sekaligus lomba Video Konten Promosi Wisata Kukar) Rp. 300.000.000 9. Pengadaan Perlengkapan Pameran / expo Virtual Reality VR Headset Metaverse (Explore Virtual Tourism Experience) Termasuk pembuatan Video Virtual Rp. 350.000.000 10. Penguatan promosi Pariwisata Dalam Negeri Kukar melalui event APKASI Otonomi Expo Rp. 200.000.000 11. Penguatan Promosi Pariwisata Luar Negeri melalui Event International Mask Festival di Kota Solo Rp. 200.000.000 12. Penguatan Promosi Pariwisata Luar Negeri melalui event Toursm Kukar Road To Bali berlokasi di TIC Pariwisata Kaltim Rp. 300.000.000 (Pangsa Pasar Wisatawan Mancanegara di Bali)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		125.000.000	1	4.625.000.000	4.500.000.000	Rp. 125.000.000 fasilitasi kegiatan Kukar Travel Road Show bersama mitra pariwisata (ASITA, PHRI, ASPPI, PUTRI, Forum Pokdarwis) untuk melaksanakan table top antara buyer dan seller dalam rangka mempromosikan paket wisata yang ada di kab.kutai kartanegara perlu tambahan anggaran untuk fasilitasi kegiatan pemasaran lainnya antara lain : 1. Fasilitasi Event Promosi Wisata Sejarah Kota Juang Pameran Merah Putih Sanga Sanga Rp. 700.000.000 untuk Fasilitasi Panggung Expo dan seni pertunjukan selama kegiatan berlangsung. (Arahan Bupati agar kegiatan yang menjadi agenda event rutin terjadwal setiap tahun dapat dibantu pembiayaannya melalui OPD terkait). 2. Fasilitasi Event Promosi Festival Kota Raja dalam rangka memeriahkan HUT Tenggarong Rp. 500.000.000 untuk pembiayaan Produksi panggung, seni pertunjukan dan kegiatan lomba tradisional Kutai.(agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 3. Fasilitasi Event Promosi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
								Lomba Miskat, Lomba Jepen dan Lomba Kuliner Khas Kutai berkerjasama dengan TP PKK Kab. Kukar Rp. 450.000.000 untuk pembiayaan Uang Hadiah Lomba, Konsumsi, Piala, Jasa juri lomba dan Talent pengisi Acara dan belanja perlengkapan kegiatan. (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 4. Event Promosi Kukar Festival Budaya Nusantara (KFBN ex. TIFAF) merupakan Festival Pertunjukan Seni rakyat yang diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya sebagai identitas bangsa . Melalui event ini diharapkan menjadi daya tarik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara untuk datang ke Kutai Kartanegara dengan menampilkan para pelaku seni musik, tari dan adat istiadat serta tradisi yang unik yang akan menjadi ikonik di tanah air. Rp. 2.500.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 5. Fasilitasi Event Promosi Festival Tuah Himba Rp. 700.000.000 Dalam rangka untuk mempromosikan kawasan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
								Bundaran Tuah Himba dan Kawasan Puja Sera sebagai lokasi sentral aktivitas UMKM dan sebagai ikon baru yg akan menjadi kebanggaan kutai kartanegara (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 6. Fasilitasi Event Promosi "Eroh Bebaya" bekerjasama dengan IPM Kukar di Yogyakarta Rp. 350.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 7. Fasilitasi Event Promosi "Etam Begenjoh" bekerjasama dengan KPMKK Kota Malang Rp. 350.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 8. Fasilitasi Event Promosi "Festival Danau Semayang" bekerjasama dengan Pokdarwis B3 Desa Wisata Pela Rp. 200.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 9. Fasilitasi Event Pomosi "Festival Topeng Nusantara" berkolaborasi Kesenian Tari Topeng Keraton Kutai Kartanegara dan SIPA Solo Rp. 700.000.000 (lanjutan Event yg sudah terlaksana di tahun 2023) 10. Fasilitasi Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kukar

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
								bekerjasama dengan DPC ADWINDO Kukar Rp. 450.000.000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	250.000.000	2	250.000.000	-	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	400.000.000	4	600.000.000	200.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Kukar	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	7%	4.200.000.000	7%	13.650.000.000	9.450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	3		5		-	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1	750.000.000	5	4.750.000.000	4.000.000.000	Fasilitasi ruang kreatif 5 kecamatan
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	3		9		-	
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Kukar	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1	250.000.000	1	100.000.000	- 150.000.000	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1	50.000.000	1	200.000.000	150.000.000	
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf	1	150.000.000	1	-	- 150.000.000	
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1	3.000.000.000	6	8.600.000.000	5.600.000.000	Fasilitasi Bantuan Pelaku Ekraf, Fasilitasi Pelaku Ekraf, Pekan Kreatif Daerah, SOE, Fasilitasi Eks Tanjung, Fasilitasi Ruang Pelayan Publik
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Kukar	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	7%	5.920.000.000	7	3.000.000.000	- 2.920.000.000	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Kukar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	34		34		-	-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	200.000.000	1	50.000.000	- 150.000.000	-
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kukar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50	500.000.000	25	250.000.000	- 250.000.000	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Bertambah/(Bekurang)	Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
2	3	4	5	6	10	11		12
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	1.000.000.000	25	500.000.000	- 500.000.000	-
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	500.000.000	1	500.000.000	-	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	2.000.000.000	25	750.000.000	- 1.250.000.000	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	20		20		-	-
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	500.000.000	25	250.000.000	- 250.000.000	-
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	320.000.000	1	150.000.000	- 170.000.000	-
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	40	400.000.000	30	300.000.000	- 100.000.000	-
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50	500.000.000	25	250.000.000	- 250.000.000	-
				35.618.043.795		61.972.579.136	26.354.535.341,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana Program prioritas.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2026 sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memajukan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah diantaranya :

1. Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F); dan
2. Program Kukar Kreatif IDAMAN

Guna mewujudkan pengelolaan pariwisata untuk perubahan transformasi struktur ekonomi Daerah, maka usulan Program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Usulan Program Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program PengembanganEkonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kecamatan Marang Kayu	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			Fasilitasi pendaftaran HKI pelaku ekraf (Merk, PATEN, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang)/ Musrenbang
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					
	Fasilitasi Penguatan Kekayaan intelektual					
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kota Bangun, Loa janan, Marang kayu, muara badak, Sebulu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Pelatihan Keselamatan dan Keamanan Pada Objek Wisata Alam Bagi POKDARWIS / Musrenbang
	Pengelolaan Destinasi	Kota bangun, Marang				Pelatihan pengelolaan Homestay

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Pariwisata Kabupaten/Kota	kayu, Muara Badak				Bagi POKDARWIS / Musrenbang
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Bangun, Tabang, Tenggarong	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Workshop Manajemen produksi seni pertunjukkan (Seni Tari) / Musrenbang
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar	Kota Bangun, Marang Kayu, Muara Jawa, Tabang,				Workshop pengolahan kreasi Kriya (Kerajinan Tangan) / Musrenbang
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Loa Janan, marang kayu, Muara Badak, Sebulu,				Workshop pengolahan kreasi Kuliner Kekinian / Musrenbang
		Kenohan , Kota Bangun, Loa Kulu, Marang kayu, Muara Muntai, Sebulu, ,				Workshop Photoghraphy /Musrenbang
		Kenohan, Kota Bangun, Marang kayu, Sebulu,				Workshop Videoghraphy / Musrenbang

Dari usulan tersebut akan di sinergikan dengan Program yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Program sebagai berikut :

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
2. Program pemasaran pariwisata;
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pelaksanaan program-program tersebut akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan dan selaku penunjang daya saing pariwisata daerah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata,pelaku ekonomi kreatif, komunitas dan forum peduli pariwisata daerah serta kegiatan masyarakat lainnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis *(strategic goals)* Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi Dinas Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Sasarannya adalah 1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi; 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi ; 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ; 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Dinas Pariwisata yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata berdasarkan Visi dan Misi sesuai dokumen RPJMD 2018 – 2023 yaitu : "Terwujudnya destinasi pariwisata Kaltim yang memiliki nilai banding/ berdaya saing" sehingga kepariwisataan Kalimantan Timur baik daya tarik wisata , SDM maupun stakeholders beserta kelembagaannya mempunyai kompetensi yang tinggi. Indikator tujuan tersebut adalah " jumlah destinasi berdaya saing" yang siap dipromosikan untuk menarik kunjungan wisatawan. Memperbaiki konektifitas antar destinasi diartikan sebagai langkah dalam upaya mewujudkan destinasi wisata Kalimantan Timur yang siap jual dengan memperbaiki komponen 3A

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam pembangunannya, yaitu Aksesibilitas, Atraksi, dan Aminitasnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua *stakeholders* yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para *tour n' travel* dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan – perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramuwisata dan lain-lainnya. Para *stakeholders* ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya. Destinasi berdaya saing diatrikan sebagai strategi pengembangan destinasi yang memiliki nilai banding secara potensi dengan destinasi yang ada di Indonesia, dengan harapan Kalimantan Timur juga siap bersaing dalam hal potensi destinasi kelas dunia bagian dari Pesona Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata antara lain adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan; dan
2. Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif.

Indikator Sasaran:

1. Jumlah kunjungan wisatawan; dan
2. Presentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif.

Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan pemerintah desa; dan
2. Penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas Daerah.

Kebijakan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Menyelenggarakan 100 (seratus) festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta geliat industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, *souvenir* dan *homestay*.
2. Memaksimalkan penyelenggaraan even kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di kecamatan yang berbeda dengan tema tertentu serta memfasilitasi penyelenggaraan berupa anggaran dan komunitas kreatif bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, serta mengkurasi bersama konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

4.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan proritas Dinas Pariwisata yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 terdiri dari 5 (Lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan dalam rangka mensinergikan dengan RKPD Dinas Pariwisata tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kukar	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB75)	23.027.335.968,00	APBD		(BB75)	23.560.269.073,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen		APBD		7 Dokumen	
PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	550.000.000	APBD		2 Data	600.000.000
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	450.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	APBD	Penyusunan LPPD, LKJIP	3 Laporan	150.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	150.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	19.103.265.968	APBD		129 Orang/bulan	17.099.866.711	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	377.520.000	APBD		12 Laporan	377.520.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan		APBD		2 Laporan		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kukar				APBD				
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000	APBD		20 Orang	50.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan		APBD		5 Layanan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	APBD		2 Paket	359.769.650	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	APBD		12 Paket	250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	APBD		2 Paket	200.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	APBD		40 Laporan	300.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	112.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		APBD		12 Bulan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	850.000.000	APBD		12 Laporan	850.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	1.674.062.712	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan		APBD		12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	277.000.000	APBD		47 Unit	277.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	175.000.000	APBD		9 Unit	175.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	149.550.000	APBD		173 Unit	149.550.000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Kukar	PRESEN TASI DTW YANG MEMENUHI AKSESBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	68,09%	15.720.243.168	APBD		68,09%	18.500.000.000	
Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota			APBD				
Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	1	-	APBD		1	400.000.000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola			APBD				
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	7	5.200.000.000	APBD		7	5.200.000.000	
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2	1.925.000.000	APBD		2	2.000.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola			APBD				
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Muara Badak (pantai pangempang)	Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1	75.000.000	APBD	PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2026	1	150.000.000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	5.270.243.168	APBD		1	5.400.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30	-	APBD		30	200.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yang dikelola	4		APBD		4		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4	2.350.000.000	APBD		4	3.000.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	575.000.000	APBD		10	500.000.000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD				
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	1	-	APBD		1	300.000.000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Pariwisat a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	10		APBD		10		
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kab. Kukar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	10	50.000.000	APBD		10	250.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	20	-	APBD		20	200.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota									
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota		Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	5	125.000.000	APBD		5	150.000.000	
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	25	50.000.000	APBD		25	150.000.000	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	5	-	APBD		5	500.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Kukar	OKUPANSI	35,28%	6.575.000.000	APBD		35,28%	10.425.000.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	11		APBD		11		
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	1.100.000.000	APBD	Rp. 350.000.000 terdiri dari output : 1. Pameran Pariwisata Dalam Daerah Rp. 100.000.000 2. Pameran Pariwisata Luar Daerah Rp. 100.000.000 3. Pengadaan Bahan Promosi Cetak Brosur, kalender, pamflet, Rp. 100.000.000 4. Kegiatan Dialog Wisata Rp. 50.000.000 --- Perlu tambahan anggaran untuk kegiatan Penguatan Promosi Pariwisata antara lain : 1. Pengadaan Souvenir dan Cinderamata eksklusif Pariwisata daerah Rp. 200.000.000 2. Pembuatan Konten Video Promosi Bekerjasama dengan	4	2.750.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Konten Kreator Kukar Rp. 200.000.000 3. Penguatan Media Online (IG dan FB Visiting) bekerjasama dengan Jasa Digital marketing Nasional dan Internasional Rp. 100.000.000 4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak (Papan Iklan / baliho dan media informasi cetak) Rp. 100.000.000 5. Pembuatan Video Promosi Event dan DTW Kukar Rp. 200.000.000 6. Tambahan untuk kegiatan dialog wisata dengan melibatkan Duta wisata, Saka Pariwisata dan Influencer / Youtuber Kukar Rp. 50.000.000 7. Tambahan Untuk Pameran Pariwisata Luar Daerah Rp. 200.000.000 8. Workshop Konten Kreator (pembentukan komunitas konten kreator kukar sekaligus lomba Video Konten Promosi Wisata Kukar) Rp. 300.000.000 9. Pengadaan Perlengkapan Pameran / expo Virtual Reality VR Headset Metaverse (Explore Virtual Tourism Experience) Termasuk pembuatan Video Virtual Rp. 350.000.000 10. Penguatan promosi Pariwisata Dalam Negeri Kukar melalui event APKASI Otonomi Expo Rp. 200.000.000 11. Penguatan Promosi			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Pariwisata Luar Negeri melalui Event International Mask Festival di Kota Solo Rp. 200.000.000 12. Penguatan Promosi Pariwisata Luar Negeri melalui event Toursm Kukar Road To Bali berlokasi di TIC Pariwisata Kaltim Rp. 300.000.000 (Pangsa Pasar Wisatawan Mancanegara di Bali)			
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	4.625.000.000	APBD	Rp. 125.000.000 fasilitasi kegiatan Kukar Travel Road Show bersama mitra pariwisata (ASITA, PHRI, ASPPI, PUTRI, Forum Pokdarwis) untuk melaksanakan table top antara buyer dan seller dalam rangka mempromosikan paket wisata yang ada di kab.kutai kartanegara ---------- perlu tambahan anggaran untuk fasilitasi kegiatan pemasaran lainnya antara lain : 1. Fasilitasi Event Promosi Wisata Sejarah Kota Juang Pameran Merah Putih Sanga Sanga Rp. 700.000.000 untuk Fasilitasi Panggung Expo dan seni pertunjukan selama kegiatan berlangsung. (Arahan Bupati agar kegiatan yang menjadi agenda event rutin terjadwal setiap tahun dapat dibantu pembiayaannya melalui	1	7.025.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						OPD terkait). 2. Fasilitasi Event Promosi Festival Kota Raja dalam rangka memeriahkan HUT Tenggarong Rp. 500.000.000 untuk pembiayaan Produksi panggung, seni pertunjukan dan kegiatan lomba tradisional Kutai.(agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 3. Fasilitasi Event Promosi Lomba Miskat, Lomba Jepen dan Lomba Kuliner Khas Kutai berkerjasama dengan TP PKK Kab. Kukar Rp. 450.000.000 untuk pembiayaan Uang Hadiah Lomba, Konsumsi, Piala, Jasa juri lomba dan Talent pengisi Acara dan belanja perlengkapan kegiatan. (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 4. Event Promosi Kukar Festival Budaya Nusantara (KFBN ex. TIFAF) merupakan Festival Pertunjukan Seni rakyat yang diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya sebagai identitas bangsa . Melalui event ini diharapkan menjadi daya tarik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara untuk datang ke Kutai Kartanegara dengan			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						menampilkan para pelaku seni musik, tari dan adat istiadat serta tradisi yang unik yang akan menjadi ikonik di tanah air. Rp. 2.500.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 5. Fasilitasi Event Promosi Festival Tuah Himba Rp. 700.000.000 Dalam rangka untuk mempromosikan kawasan Bundaran Tuah Himba dan Kawasan Puja Sera sebagai lokasi sentral aktivitas UMKM dan sebagai ikon baru yg akan menjadi kebanggaan kutai kartanegara (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 6. Fasilitasi Event Promosi "Eroh Bebaya" bekerjasama dengan IPM Kukar di Yogyakarta Rp. 350.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 7. Fasilitasi Event Promosi "Etam Begenjoh" bekerjasama dengan KPMKK Kota Malang Rp. 350.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 8. Fasilitasi Event Promosi "Festival Danau Semayang" bekerjasama dengan Pokdarwis B3 Desa Wisata Pela Rp. 200.000.000 (agenda event rutin terjadwal setiap tahun) 9. Fasilitasi Event			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Pomosi "Festival Topeng Nusantara" berkolaborasi Kesenian Tari Topeng Keraton Kutai Kartanegara dan SIPA Solo Rp. 700.000.000 (lanjutan Event yg sudah terlaksana di tahun 2023) 10. Fasilitasi Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kukar bekerjasama dengan DPC ADWINDO Kukar Rp. 450.000.000			
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	250.000.000	APBD		2	250.000.000	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	600.000.000	APBD		4	400.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Kukar	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	7%	13.650.000.000	APBD		7%	7.800.000.000	
Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	5		APBD		3		
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	5	4.750.000.000	APBD		5	2.250.000.000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	9		APBD		3		
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Kukar	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1	100.000.000	APBD		1	250.000.000	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1	200.000.000	APBD		1	150.000.000	
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf	1	-	APBD		1	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	6	8.600.000.000	APBD		6	5.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Kukar	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	7	3.000.000.000	APBD	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang	7	5.920.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Kukar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	34		APBD	-	34		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	50.000.000	APBD	-	1	200.000.000	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kukar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	25	250.000.000	APBD	-	50	500.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25	500.000.000	APBD	-	50	1.000.000.000	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	500.000.000	APBD	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang	1	500.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25	750.000.000	APBD	Nilai sudah sesuai dengan usulan saat musrenbang	100	2.000.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	20		APBD	-	20		
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25	250.000.000	APBD	-	50	500.000.000	
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	150.000.000	APBD	-	1	320.000.000	
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	30	300.000.000	APBD	-	40	400.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	25	250.000.000	APBD	-	50	500.000.000	
				61.972.579.136				66.205.269.073	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pariwisata dalam tahun 2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia Dinas Pariwisata, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka merencanakan pembangunan Daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pariwisata.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah. Proses ini memungkinkan kebijakan masa depan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia di tingkat Daerah. Agar upaya ini dapat optimal, rencana pembangunan tersebut perlu dirumuskan dan disusun dalam rencana kerja dari Program dan kegiatan yang terukur.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan di dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dengan memperhatikan Rencana Kerja, pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dapat dievaluasi terkait pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan Program dan kegiatan untuk tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan lebih baik, dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun berjalan harus disertai dengan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh PD selaku penyusun Rencana Kerja. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan kinerja, yang lebih dikenal sebagai Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini menjadi alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis pencapaian target Program dan kegiatan, penilaian kinerja pelayanan dinas, *review* rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, serta penelaahan kebijakan nasional di bidang perindustrian dan perdagangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pasar Tradisional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045; dan
18. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara urusan pilihan yang diampu PD dengan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD;
b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RKPD.
c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Adapun tujuan penyusunan agar dapat menjabarkan rencana Program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi

pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam:

a) menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
b) menyusun penilaian kinerja tahunan (LKJiP).
c) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
d) untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
e) untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Restra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis PD

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan serta mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah anggaran kegiatan tahun 2024 Rp95.754.933.606,00, terbagi untuk 8 (delapan) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp28.922.622.606,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), yang terealisasi sebesar Rp23.923.561.434,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp44.498.729.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 41.609.654.023,00 (empat puluh satu miliar enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp398.454.760,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp293.072.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

anggaran sebesar Rp15.678.582.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terealisasi sebesar Rp14.716.985.961,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp2.508.728.655,00 (dua miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
7. Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp1.809.541.722,00 (satu miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp437.276.305,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah).

Jumlah realisasi keuangan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp85.697.274.860,00 (delapan puluh lima dengan persentase capaian anggaran sebesar 89,50% (delapan puluh sembilan koma lima puluh persen).

Pengukuran kinerja dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Disperindag	Predikat Akuntabilitas Kinerja Disperindag	Nilai	78	48
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	4,10	0,97
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persen	4,30	100
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100	35

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	24,25
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	69,87	100
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	80	80,92
	Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	Nilai	87	72,27
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e- commerce/market place	Persen	20	50

Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian capaian indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih belum mencapai target yang telah direncanakan. Dari total sembilan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdapat empat (4) indikator yang realisasinya belum mencapai target, yaitu: predikat akuntabilitas kinerja disperindag, pertumbuhan nilai investasi sektor industri kecil menengah pengolahan non migas, persentase sentra IKM berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif, dan indeks kualitas layanan perdagangan (pasar).

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi kurang maksimalnya pencapaian indikator kinerja tersebut di antaranya dapat dijabarkan sebagai:

1. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

   Beberapa faktor yang menghambat usaha IKM di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah lemahnya kapasitas serta perencanaan anggaran bisnis dari pelaku IKM, kurangnya modal/ pembiayaan usaha, peralatan dan sarana/ prasarana IKM yang belum memadai, serta kurangnya akses pemasaran produk IKM untuk meningkatkan penjualan dan kapasitas produksi.

2. Belum Optimalnya Tata Kelola Perdagangan Besar dan Eceran

   Beberapa faktor yang membuat tata kelola perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal adalah:

   - kurang optimalnya sosialisasi/ edukasi regulasi toko modern;
   - kurangnya kesadaran pedagang mengenai manfaat tera ulang;
   - belum meratanya keberadaan pasar tradisional;
   - perlunya UPTD Pasar;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- perlunya digitalisasi (e-retribusi dll);
- kurangnya layanan jasa pengantaran menuju wilayah terpencil; dan
- belum mempunyai pelabuhan perdagangan.

Selanjutnya, evaluasi untuk Program PD tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum mencapai target yang telah direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran 2024 sebesar 90,8% (sembilan puluh koma delapan persen) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp85.697.274.860,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) atau mencapai 89,50% (delapan puluh sembilan koma lima puluh persen) dari total pagu anggaran Rp95.754.933.606,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah). Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pencapaian Renstra PD tahun 2024 menurut indikator program dapat dilihat dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	77,00	78,00	48,29	61,91	85,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31	6	6	6	100			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	5		1	1	100			
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	1	1	1	100			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	5	1	1	1	100			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	40	8	8	1	12,50			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	16	3	3	3	100			
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	12	12	12	100			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	6.800,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00	100,00			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen perencanaan dan Unit Sentra pengembangan industri	8	2	2	1	50	1		
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	3	1	1	1	100			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100	100	100		0			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98,25	84,00	88,65		0,00			
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)									
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,1	0,0	0,06		0,00			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,1	0,0	0,06		0,00			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Indsutri Nasional	Persentase IKM yang masuk dalam SINAS	24,95	3,87	4,64	4,64	100	5,80		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatakan informasi industri secara lengkap dan terkini	221	95	44	139	315,91			
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	100	100	22,05	22,05	100		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ijin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	289	12	68	23	33,82			
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	256	17	52	12	23,08			
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	21	12	11	4	36,36			
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba luar Negeri yang diterbitkan	15	2	3	0	0			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86,00	54,00	65,00	12,50	19,23	75,00		
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	18,74	3,35	3,62	56,90	1571,82	4,22		
		Indeks Kualitas Pasar	67,00	53,00	58,00	74,30	128,10	67,00		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	20	11	5	21	420			
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5	5	5	5	100			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga antar waktu	3,52	3,67	3,62	3,52	97,24	3,67		
		Persentase pupuk bersubsidi yang di awasi	98,57	98,04	98,21	90,00	91,64	98,57		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	3,52	13	13	13	100			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	75,00	50,00	58,33	58,33	100			
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	422,73	4.414,00	84.546,00	6.627,00	7,84			
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan eksport produk unggulan	100	100	100	24,23	24,23	100		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	5	100	1	12	1200			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31,25	27,50	28,00	38,96	139,14	30,00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	94,92	34,00	19,06	42,00	220,36			
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di toko/ritel modern	99,04	97,60	98,56	97,42	98,84	98,81		
	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	90	100	70					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Untuk menganalisis kinerja pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengampu dua urusan pilihan yang belum mempunyai SPM, maka untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan Program dan kegiatan pada urusan perindustrian dan perdagangan, indikator kinerja pelayanan disesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2024	2025	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah		Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	3,50%	3,70%	4,10%	4,80%	0,97%	4,80%	
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	3,50%	3,80%	4,30%	4,70%	100%	4,70%	
			Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100%	100%	100%	100%	35%	100%	
2	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan		Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2%	2%	2%	2%	203,18%	2%	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42,52%	55,84%	69,87%	84,25%	100%	84,25%	
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	65	75	80	85	80,92	85	
			Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	77,00	82,00	87,00	92,00	72,27	92	
			Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e- commerce/market place	20%	20%	20%	20%	50%	20%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan, kajian pencapaian Renstra, dan telaah masalah dan faktor penghambat, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam lingkup implementasi Program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang industri dan perdagangan, beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- mendorong penerapan ekonomi hijau dan terbentuknya industri hijau yang mengedepankan industri energi terbarukan;
- belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas dan pemerataan jaringan internet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum adanya *feasibility study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* dari pembangunan pabrik dan sentra berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas;
- belum optimalnya pemanfaatan peluang ekspor langsung karena belum ada pelabuhan perdagangan;
- terbatasnya akses transportasi di jalur distribusi barang yang belum memadai;
- belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan belum terbentuknya UPTD Pasar; dan
- harga barang pokok dan ketersediaan stok barang kebutuhan di pasar rakyat yang masih fluktuatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana beberapa Program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan perdagangan telah direncanakan pada RKPD tahun 2026, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026.

Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 menjadi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026, dibutuhkan penyesuaian Rencana Kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan Program dan kegiatan tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian Program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing Program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C. 31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	Nilai	33.843.773.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	Nilai	38.220.997.518	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	Dokumen	1.150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	Dokumen	800.000.000	
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	1	dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	1	dokumen	50.000.000	
3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3	data	500.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3	data	400.000.000	
3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanN Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1	berita acara	100.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1	berita acara	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah				Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah				
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	150.000.000	
3.31.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	laporan	50.000.000	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Perdagangan	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Perdagangan	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan	100.000.000	Penyediaan data melalui aplikasi
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1	Laporan	15.363.240.339	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1	Laporan	15.363.240.339	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	orang/bln	14.877.516.739	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	orang/bln	14.877.516.739	
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	laporan	435.723.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	laporan	435.723.600	
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	1	dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	1	dokumen	25.000.000	
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Dokumen	100.000.000	
3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Dinas Perindustrian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	laporan	50.000.000	
	Milik Daerah Pada SKPD	dan Perdagangan	Barang Milik Daerah pada SKPD				Milik Daerah Pada SKPD	dan Perdagangan	Barang Milik Daerah pada SKPD				
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	1	laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	1	laporan	50.000.000	
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdaganga n	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	dokumen	50.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdaganga n	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	dokumen	50.000.000	
3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	25.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	25.000.000	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	603.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	228.000.000	
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	375.000.000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	
3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	153.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	153.000.000	
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	orang	75.000.000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	1.987.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	1.218.294.000	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	75.000.000	
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	Dinas Perindustrian	Jumlah Paket Peralatan dan	1	paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan	Dinas Perindustrian	Jumlah Paket Peralatan dan	1	paket	368.294.400	
	Perlengkapan Kantor	dan Perdagangan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Perlengkapan Kantor	dan Perdagangan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	250.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

								Perdagangan					
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	75.000.000	
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	75.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	0	
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	300.000.000	
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	262.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	100.000.000	
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	50.000.000	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis Pengadaan	2.020.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Jenis Pengadaan	1.195.750.000	
3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit	1.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit	0	pembelian 3 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

													thn 2010 yang lalu
3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dinas Perindustrian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit Truk Sampah	630.750.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dinas Perindustrian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit Truk Sampah	630.750.000	
	Operasional atau Lapangan	dan Perdagangan	atauLapangan yang Disediakan				Operasional atau Lapangan	dan Perdagangan	atauLapangan yang Disediakan				
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	475.000.000	
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit		90.000.000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12	Bulan	11.299.733.743	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12	Bulan	17.475.309.050	
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2.024.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2.024.000	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	2.063.308.450	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	2.486.308.450	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	laporan	9.234.401.293	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	14.986.976.600	Kebutuhan pagu untuk petugas keamanan UPP pasar diantaranya : Pasar Mangkurawan g dan Tangga Arung 44 org, pasar Loa Kulu 8 org, Pasar Sanga-sanga 12 org, Pasar Wonotirto 4 org, pasar kuala samboja 12 org dan Sentra IKM Rumput Laut
													Muara Badak 10 org. Petugas kebersihan pasar yaitu Pasar Mangukaraw a ng dan Tangga Arung 80 org, pasar Loa Kulu 10 org, Pasar Sanga-sanga 10 org Pasar Kuala samboja dan wonotirto 14 org, Cleaning Service gedung kantor Disperidag 6 org

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah	1600	unit	1.219.549.710	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah	1600	unit	1.219.549.710	
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	141.233.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	141.233.100	
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	unit	378.316.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	unit	378.316.610	
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilit asi	4	unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilit asi	4	unit	500.000.000	
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5	unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5	unit	100.000.000	
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5	unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5	unit	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	Persen	205.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 84	Persen dokumen	160.000.000 100.000.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	84	dokumen	85.000.000	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	1	dokumen	100.000.000	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78 100	Surat TDG Persen	35.000.000 160.000.000	Penguatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	78	Surat TDG	35.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	84	dokumen	100.000.000	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dokumen	35.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dokumen	35.000.000	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	21	dokumen	85.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	21 dokumen		25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	1 dokumen	25.000.000	
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	4	dokumen	-	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	0	dokumen	-	
3.30.02.2.04.0001	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	-	dokumen	-	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	-	dokumen	-	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86,00	persen	3.531.260.977	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86,00	persen	20.250.000.000	
			Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,22	persen				Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,22	persen		
			Indeks Kualitas Pasar	67,00	nilai				Indeks Kualitas Pasar	67,00	nilai		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	5,00	unit	3.331.260.977	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	5,00	unit	20.050.000.000	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	unit	2.331.260.977	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8	unit	19.050.000.000	1.Pembangun a n/RevitalisaP a sar Desa dan Kecamatan. 2. Revitalisasi Pasar 3. Pembanguna n Pasar Unggas dan Pasar Hewan di Mangkurawa n g 3 4. Pembanguna n pasar penyangga Lokasi di Bukit Biru, Triu dan Maluhu. 5. Pembanguna n Kawasan Pergudangan di Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong.
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkuraw ang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	unit	1.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkuraw ang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	unit	1.000.000.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00	unit UPP	200.000.000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00	unit UPP	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian	Pasar Wonotirto	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1	dokumen	200.000.000	Pembinaan dan Pengendalian	Pasar Wonotirto	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1	dokumen	200.000.000	
	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	dokumen	-	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	dokumen	-	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,52	Persen	995.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,52	Persen	2.360.000.000	
			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,57	Persen				Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,57	Persen		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13	Jenis	300.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13	Jenis	210.000.000	
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	laporan	100.000.000	Penguatan Sinkronisasi dan Ketersediaan Bapokting LPG 3 kg Pada Tingkat Pangkalan Dan Pengecer

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	laporan	50.000.000	Penguatan koordinasi dengan daerah produksi Bahan pokok
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau	1	laporan	100.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau	4	laporan	60.000.000	
	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	75,00	Persen	475.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	75 Persen		1.800.000.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	200.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	laporan	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	laporan	50.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	laporan	100.000.000	Peningkatan Koordinasi Dengan Penyedia sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	225.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	laporan	1.500.000.000	Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	89.091	Ton	220.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	89.091	Ton	350.000.000	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	dokumen	50.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20	dokumen	100.000.000	Penguatan Pengawasan Legalitas Perizinan Pada Distributor, Agen, Dan Kios
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	1	laporan	35.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	4	laporan	100.000.000	Penguatan Pengawasan Pengadaan Pupuk Dan pestisida Bersubsidi Pada Tingkat Distributor
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	laporan	135.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	laporan	150.000.000	Penguatan PengawasanP e nyaluran Penggunaan Pupuk Pada Agen dan Kios

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			dengan Realisasi Minimal 90%						dengan Realisasi Minimal 90%				Penyalur
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00	Persen	950.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00	Persen	850.000.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	15	MoU	950.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	15	MoU	850.000.000	
3.30.05.2.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pelaku Usaha	-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pelaku Usaha	-	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8	Pelaku Usaha	400.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8	Pelaku Usaha	400.000.000	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samboja,Kota Muara Badak	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8	Pelaku Usaha	200.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samboja,Kota Muara Badak	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8	Pelaku Usaha	200.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pelaku Usaha	200.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pelaku Usaha	100.000.000	Misi Dagang produk ekspor dalam rangka menjalin kerjasama yang menghasilkan transaksi bisnis antar pelaku usaha dengan pihak pengusaha
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	150.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	150.000.000	
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4	Pelaku Usaha	-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4	Pelaku Usaha	-	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31,00	Persen	500.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31,00	Persen	1.200.000.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	20,00	Persen	500.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	20,00	Persen	1.200.000.000	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.500	unit	350.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.500	unit	850.000.000	Peningkatan peralatan kemetrologian dan fasilitasi tera tera ulang
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	orang	150.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	orang	350.000.000	Peningkatan Pengawasan Metrologi Legal/Barang Dalam kemasan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	99,04	persen	600.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	99,04	persen	550.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	90,00	persen	600.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	90 persen		550.000.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25	UMKM	250.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20	UMKM	400.000.000	Peningkatan pembinaan dan pembelian produk lokal
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30	UMKM	350.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	UMKM	150.000.000	Program Dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"
3.30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	dokumen	-	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	dokumen	-	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00	dokumen	14.300.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00	dokumen	1.450.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1,00	Sentra IKM	14.300.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1,00	Sentra IKM	1.450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	200.000.000	Reviuw dokumen RPIK
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	dokumen	0	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian"
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	13.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	dokumen	0	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian"Diperlukan penambahan pagu dalam rangka penyelesaian pabrik minyak makan merah terintegrasi berbahan baku kelapa sawit dan peralatan.
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	dokumen	750.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	dokumen	1.450.000.000	2 dokumen mengakomodir pelaksanaan 700.000.000 Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) dan 750.000.000 mengakomodir usulan pelatihan,bant uan peralatan dan fasilitasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

													sertifikasi Halal dari masyarakat
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	100.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	100.000.000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100	Persen	-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100	Persen	-	
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98,25	Persen	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98,25	Persen	-	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,01	Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,01	Persen		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,01	Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,01	Persen		
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	dokumen	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	dokumen	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	7,74	Persen	450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	7,74	Persen	400.000.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	56	IKM	450.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	56	IKM	400.000.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	dokumen	200.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	dokumen	200.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	1	dokumen	-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	1	dokumen	-	
	Kabupaten/Kota melalui SIINas		Kabupaten/Kota Melalui SIINas				Kabupaten/Kota melalui SIINas		Kabupaten/Kota Melalui SIINas				
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	dokumen	250.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen		200.000.000	Fasilitasi perijinan bagi pelaku IKM dalam rangka percepatan kepatuhan pelaporan IKM pada aplikasi SIINAS
			Jumlah			55.375.034.769			Jumlah			65.440.997.518	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program pembangunan bidang perdagangan dan industri antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak, dan pembangunan Daerah pada bidang perindustrian perdagangan yang tersinergi dengan pembangunan nasional akan menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi. Rencana kerja memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang disusun sesuai tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus berpedoman pada rencana strategis pada tingkat nasional dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI memiliki beberapa tujuan yang saling beririsan dan melengkapi. Penggabungan tujuan dari kedua kementerian yang relevan dapat dituangkan menjadi:

1. Peningkatan kinerja ekspor produk industri pengolahan non-migas dan jasa;
2. Peningkatan tenaga kerja di sektor Industri; dan
3. Peningkatan konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, serta peningkatan pasar produk dalam negeri.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024 juga menjabarkan beberapa sasaran strategis dari Kementerian Perdagangan RI, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa.
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bertanggung jawab.

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.
5. Optimalnya peranan pasar berjangka komoditas (pbk), sistem resi gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional.
7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional ini, Kementerian Perindustrian RI menyusun beberapa strategi yang harus di tempuh, yaitu sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan wilayah pengembangan industri (WPI) serta mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
5. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. melakukan pembangunan industri hijau;
8. melakukan pembangunan industri strategis;
9. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. meningkatkan kerja sama internasional bidang industri.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

Sesuai dengan studi pendahuluan rencana strategis tahun 2025-2029, telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB; dan
2. Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran.

B. Sasaran

1. meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah;
2. meningkatnya jumlah sentra industri kecil menengah; meningkatnya kualitas tata kelola perdagangan; dan
3. terkendalinya laju inflasi Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai pada pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam tahap rumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD. Selanjutnya sasaran akan dicapai dalam penjabaran serangkaian kebijakan yang merupakan strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Rumusan rencana Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara secara detail dapat dilihat pada tabel T.C-33 berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,00	Nilai	38.220.997.518			85,00	Nilai	23.884.610.769
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7	Dokumen	800.000.000			7	Dokumen	575.123.500
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	50.000.000	APBD				
3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	data	400.000.000	APBD				
3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanN Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	berita acara	50.000.000	APBD				
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	150.000.000	APBD		1	dokumen	267.623.500

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	50.000.000	APBD		5	laporan	157.500.000
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	100.000.000	APBD	Penyediaan data melalui aplikasi	1	laporan	150.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		1	Laporan	15.935.094.358			1	Laporan	14.158.627.507
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114	orang/bln	15.534.094.358	APBD		124	orang/bln	13.697.903.907
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	25.000.000	APBD		1	laporan	25.000.000
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	350.000.000	APBD		1	laporan	435.723.600
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2	Dokumen	100.000.000			1	Dokumen	135.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	35.000.000
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	100.000.000
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	50.000.000	APBD		2	dokumen	20.000.000
3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	10.000.000
3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	10.000.000
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		1	Dokumen	228.000.000			1	Dokumen	337.500.000
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	0	APBD		1	paket	200.000.000
3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	orang	153.000.000	APBD		6	orang	67.500.000
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	orang	75.000.000	APBD		15	orang	70.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		8	Layanan	1.218.294.000			8	Layanan	1.574.625.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	75.000.000	APBD		1	paket	75.000.000
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	368.294.400	APBD		1	paket	140.000.000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	paket	250.000.000	APBD		2	paket	237.000.000
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	paket	75.000.000	APBD		1	paket	75.000.000
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	0	APBD			dokumen	10.125.000
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	laporan	300.000.000	APBD			laporan	850.000.000
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	100.000.000	APBD		1	dokumen	112.500.000
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	50.000.000	APBD		1	dokumen	75.000.000
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4	Jenis Pengadaan	1.195.750.000			3	Jenis Pengadaan	840.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	unit	0	APBD	pembelian 3 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari thn 2010 yang lalu	0	unit	-
3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Unit Truk Sampah	630.750.000	APBD		1	Unit Truk Sampah;	550.000.000
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	475.000.000	APBD		2	unit	200.000.000
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	90.000.000	APBD		4	unit	90.000.000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		12	Bulan	17.475.309.050			12	Bulan	4.899.185.052
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	2.024.000	APBD		1	laporan	6.000.000
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	laporan	2.486.308.450	APBD		1	laporan	650.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	14.986.976.600	APBD	Kebutuhan pagu untuk petugas keamanan UPP pasar diantaranya : Pasar Mangkurawang dan Tangga Arung 44 org, pasar Loa Kulu 8 org, Pasar Sanga-sanga 12 org, Pasar Wonotirto 4 org, pasar kuala samboja 12 org dan Sentra IKM Rumput Laut Muara Badak 10 org. Petugas kebersihan pasar yaitu Pasar Mangukarawang dan Tangga Arung 80 org, pasar Loa Kulu 10 org, Pasar Sanga-sanga 10 org	2	laporan	4.243.185.052
								Pasar Kuala samboja dan wonotirto 14 org, Cleaning Service gedung kantor Disperidag 6 org			
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah		1600	unit	1.219.549.710			1600	unit	1.219.549.710
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	unit	141.233.100	APBD		40	unit	141.233.100
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53	unit	378.316.610	APBD		13	unit	378.316.610

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	500.000.000	APBD		5	unit	500.000.000
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	unit	100.000.000	APBD		1	unit	100.000.000
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	unit	100.000.000	APBD		1	unit	100.000.000
3:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan		100	Persen	160.000.000			100	Persen	500.000.000
3.30.02.2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan		84	dokumen	100.000.000			84	dokumen	100.000.000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	1	dokumen	100.000.000		Penguatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	80	dokumen	100.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun		78	Surat TDG	35.000.000			78	Surat TDG	100.000.000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	18 Kec	1	dokumen	35.000.000	APBD		52	dokumen	100.000.000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan		21	dokumen	25.000.000			21	dokumen	150.000.000
3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		1	dokumen	25.000.000			17	dokumen	150.000.000
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan		0	dokumen	-			4	dokumen	150.000.000
3.30.02.2.04.0001	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		-	dokumen	-			4	dokumen	150.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola		86,00	persen	20.250.000.000			86,00	persen	21.616.024.000
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)		4,22	persen				4,22	persen	
		Indeks Kualitas Pasar		67,00	nilai				67,00	nilai	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola		5,00	unit	20.050.000.000			5,00	unit	21.116.024.000
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kukar	8	unit	19.050.000.000	APBD	1.Pembangunan/RevitalisaPasar Desa dan Kecamatan. 2. Revitalisasi Pasar 3. Pembangunan Pasar Unggas dan Pasar Hewan di Mangkurawang 3 4. Pembangunan pasar penyangga Lokasi di Bukit Biru, Triu dan Maluhu. 5. Pembangunan Kawasan Pergudangan di Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong.	2	unit	20.916.024.000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	1	unit	1.000.000.000	APBD		1	unit	200.000.000
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan		5,00	unit UPP	200.000.000			5,00	unit UPP	500.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	1	dokumen	200.000.000	APBD		2	dokumen	300.000.000
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	0	dokumen	-	APBD		1	dokumen	200.000.000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu		3,52	Persen	2.360.000.000			3,52	Persen	1.500.000.000
		Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi		98,57	Persen				98,57	Persen	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya		13	Jenis	210.000.000			13	Jenis	450.000.000
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	12	laporan	100.000.000	APBD	Penguatan Sinkronisasi dan Ketersediaan Bapokting LPG 3 kg Pada Tingkat Pangkalan Dan Pengecer	1	laporan	150.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	4	laporan	50.000.000	APBD	Penguatan koordinasi dengan daerah produksi Bahan pokok	1	laporan	150.000.000
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	4	laporan	60.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya		75,00	Persen	1.800.000.000			75,00	Persen	600.000.000
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	12	laporan	200.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	12	laporan	100.000.000	APBD	Peningkatan Koordinasi Dengan Penyedia sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok	1	laporan	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	100	laporan	1.500.000.000	APBD	Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah	1	laporan	300.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan		89.091	Ton	350.000.000			89.091	Ton	450.000.000
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	20	dokumen	100.000.000	APBD	Penguatan Pengawasan Legalitas Perizinan Pada Distributor, Agen, Dan Kios	18	dokumen	150.000.000
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	4	laporan	100.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kukar	4	laporan	150.000.000	APBD	Penguatan PengawasanPenyaluran Penggunaan Pupuk Pada Agen dan Kios Penyalur	1	laporan	150.000.000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan		100,00	Persen	850.000.000			100,00	Persen	1.000.000.000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor		15	MoU	850.000.000			15	MoU	1.000.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.05.2.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	0	Pelaku Usaha	-	APBD		15	Pelaku Usaha	300.000.000
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jakarta	8	Pelaku Usaha	400.000.000	APBD		6	Pelaku Usaha	300.000.000
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samboja,Kota Muara Badak	8	Pelaku Usaha	200.000.000	APBD		8	Pelaku Usaha	250.000.000
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	6	Pelaku Usaha	100.000.000	APBD	Misi Dagang produk ekspor dalam rangka menjalin kerjasama yang menghasilkan transaksi bisnis antar pelaku usaha dengan pihak pengusaha	3	Pelaku Usaha	250.000.000
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kukar	6	Produk	150.000.000	APBD		10	Produk	200.000.000
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab Kukar	4	Pelaku Usaha	-	APBD		40	Pelaku Usaha	250.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga		31,00	Persen	1.200.000.000			31,00	Persen	550.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		20,00	Persen	1.200.000.000			20,00	Persen	550.000.000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18 Kecamatan	1.500	unit	850.000.000	APBD	Peningkatan peralatan kemetrologian dan fasilitasi tera tera ulang	1.500	unit	350.000.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	18 Kecamatan	500	orang	350.000.000	APBD	Peningkatan Pengawasan Metrologi Legal/Barang Dalam kemasan	1000	orang	200.000.000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern		99,04	persen	550.000.000			99,04	persen	650.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi		90,00	persen	550.000.000			90,00	persen	650.000.000
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	20	UMKM	400.000.000	APBD			UMKM	200.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab Kukar	10	UMKM	150.000.000	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"	20	UMKM	450.000.000
3.30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	0	dokumen	-	APBD		1	dokumen	200.000.000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri		1,00	dokumen	1.450.000.000			1,00	dokumen	3.950.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra		1,00	Sentra IKM	1.450.000.000			1,00	Sentra IKM	3.950.000.000
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1	dokumen	100.000.000					
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	-	dokumen	0	APBD		1	dokumen	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	-	dokumen	0	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian"Diperlukan penambahan pagu dalam rangka penyelesaian pabrik minyak makan merah terintegrasi berbahan baku kelapa sawit dan peralatan.	1	dokumen	1.950.000.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	2	dokumen	1.150.000.000	APBD	2 dokumen mengakomodir pelaksanaan 700.000.000 Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) dan 750.000.000 mengakomodir usulan pelatihan,bantuan peralatan dan fasilitasi sertifikasi Halal dari masyarakat	2	dokumen	1.800.000.000
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	1	dokumen	200.000.000	APBD		4	dokumen	200.000.000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri		-	Persen	-			100	Persen	400.000.000
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah		-	Persen	-			98,25	Persen	400.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		-	Persen				0,01	Persen	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		-	Persen				0,01	Persen	
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab Kukar	-	dokumen	-	APBD		10	dokumen	150.000.000
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	-	dokumen	-	APBD		20	dokumen	250.000.000
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dalam SIINAS		7,74	Persen	400.000.000			7,74	Persen	525.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini		56	IKM	400.000.000			56	IKM	525.000.000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	1	dokumen	200.000.000	APBD		1	dokumen	275.000.000
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Kukar	-	dokumen	0	APBD		1	dokumen	250.000.000
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	1	dokumen	200.000.000	APBD	Fasilitasi perijinan bagi pelaku IKM dalam rangka percepatan kepatuhan pelaporan IKM pada aplikasi SIINAS	1	dokumen	250.000.000
		Jumlah				65.440.997.518					54.575.634.769

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana RKPD tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD tahun anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Daerah maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan PD, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya disebut DPMPTSP) ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan PD untuk memasukkan Program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, subkegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan dimana:

1. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan Program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
2. Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja-PD harus selaras dengan Program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja Program *(outcome),* indikator kinerja kegiatan *(output),* indikator kinerja subkegiatan *(output)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Renja-PD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja-PD

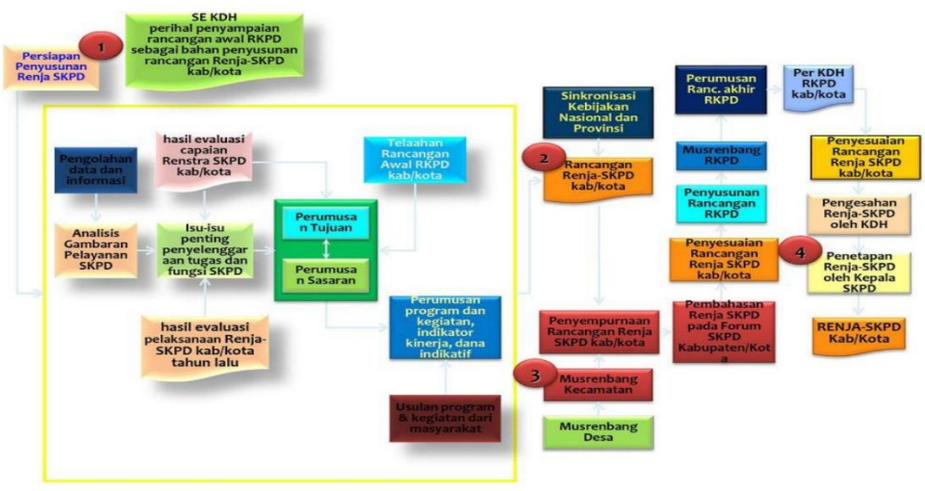

Kewajiban bagi setiap PD untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap PD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD serta berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja-PD ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara tahun 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja sebagai pedoman acuan perencanaan Progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP, yaitu:

a. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional diberbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
b. Menyusun Program dan kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Tersedianya seluruh informasi dalam rencana kerja dan diharapkan dokumen rencana kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah

dan rencana jangka panjang, selain itu dengan rencana kerja tahun 2026 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber–sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan Program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUAN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini menguraikan kebijakan terhadap kebijakan Program nasional, tujuan dan sasaran PD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP.

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan PD yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Sebagai bagian dari proses ini, setiap PD menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pada tahun anggaran 2024, DPMPTSP telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp23.352.398.850,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasinya sebesar Rp19.414.613.701,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus satu rupiah) atau 83,01% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program DPMPTSP Tahun 2024:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program DPMPTSP.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	7,35	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	16,42	83,14	223
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,25			92,91		105,28
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)*	*Nilai*	*74*	*16.453.909.214,00*	*14.662.779.021,00*	*74,13*	*89,11*	*100,18*
2	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA*	*Proyek*	*640*	*1.150.000.000,00*	*1.148.040.385,00*	*3085*	*99,83*	*473,16*
3	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Investor (PMA/PMDN)*	*Investor*	*310*	*1.081.660.000,00*	*1.077.936.018,00*	*281*	*99,66*	*90,65*
4	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Penerbitan Izin*	*izin*	*10.000*	*894.053.636,00*	*839.436.788,00*	*12.757*	*93,89*	*127,57*
5	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi*	*%*	*30,68*	*1.229.923.000,00*	*885.676.489,00*	*11,99*	*72,01*	*35,37*
6	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Aplikasi*	*Aplikasi*	*3*	*2.542.853.000,00*	*800.745.000,00*	*3*	*31,49*	*100,00*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja input sebesar 89,11% (delapan puluh sembilan koma sebelas persen) dan kinerja *output* sebesar 100,18% (seratus koma delapan persen), pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, indikator kegiatan: jumlah dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi kinerja dengan capaian kinerja input sebesar 96,92% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dan kinerja *output* 100% (seratus persen), pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - indikator subkegiatan:
        jumlah dokumen perencanaan PD.
      - capaian kinerja:
        kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 97,37 % (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      - indikator subkegiatan:
        Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.
      - capaian kinerja :
        Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 88,94 % (delapan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      - indikator subkegiatan :
        jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD dan lapaoran hasil koordinasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD.

- capaian kinerja :

  kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,23% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja *output* yaitu :

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur yang memahami teknik perencanaan dan evaluasi menjadi kendala utama.
2. Masih adanya ketidakakuratan data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut PD melakukan :

1. Dukungan dan arahan dari Kepala DPMPTSP mendorong pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang lebih baik.
2. Bimbingan dari instansi terkait seperti Bappeda, Inspektorat, dan BPKAD meningkatkan kualitas dokumen dan pelaksanaan evaluasi kinerja.
3. Fokus kegiatan pada hasil *(outcome)* yang berdampak langsung kepada masyarakat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang jelas dan terukur.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan:
   Cakupan Administrasi Keuangan dengan capaian kinerja *input* sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dan Kinerja *Output* sebesar 100% (seratus persen) pada kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, antara lain:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      - indikator sub kegiatan:

        Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN.

      - capaian kinerja:

        kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 86,53% (delapan puluh enam koma lima puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - indikator subkegiatan:
     jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN.
   - capaian kinerja:
     kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.
   - capaian kinerja: kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester PD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan bulanan/triwulan/semester PD.
   - capaian kinerja:
     kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 99,16% (sembilan puluh sembilan koma enam belas persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah dokumen laporan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran.
   - capaian kinerja:
     kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 95,83% (sembilan puluh lima koma delapan puluh

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tiga persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator kegiatan: cakupan administrasi BMD dengan capaian kinerja *input* sebesar 90,89% (sembilan puluh koam delapan puluh sembilan persen) dan kinerja *output* sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:
   a. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah PD.
      - indikator sub kegiatan :
        jumlah rencana kebutuhan barang milik Daerah.
      - capaian kinerja : kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 74,51% (tujuh puluh empat koma lima puluh satu persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).
   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD.
      - indikator subkegiatan :
        jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada PD.
      - capaian kinerja :
        kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 98,07% (sembilan puluh delapan koma nol tujuh persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Administrasi BMD dengan capaian kinerja input sebesar 98,10% (sembilan puluh delapan koma sepuluh persen) dan Kinerja output sebesar 100 % (seratus persen) pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - indikator sub kegiatan :
        jumlah paket pakaian dinas beseta atribut kelengkapannya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- capaian kinerja : kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 92,01% (sembilan puluh dua koma nol satu persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah dukungan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.
   - capaian kinerja :
     kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 95,76% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
   - capaian kinerja : kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 98,89% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
   - capaian kinerja :
     kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% (seratus persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Adminstrasi Umum dengan capaian kinerja *input* sebesar 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) dan kinerja *Output* sebesar 100% (seratus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

persen) pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
   - capaian kinerja : kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 97,89% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
   - capaian kinerja :
     kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,63% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - indikator subkegiatan :
     jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan.
   - capaian kinerja :
     kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 100% seratus persen yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
   - capaian kinerja :
     kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 66,30% (enam puluh enam koma tiga puluh persen)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
   - indikator sub kegiatan:
     jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD.
   - capaian kinerja : kinerja *input,* telah tercapai kinerja input sebesar 99,05% (sembilan puluh sembilan koma nol lima persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD
   - indikator sub kegiatan :
     jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada PD.
   - capaian kinerja : kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 100% (seratus persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Pengadaan BMD dengan capaian kinerja *input* sebesar 88,01% (delapan puluh delapan koma nol satu persen) dan kinerja *output* sebesar 100 % (seratus persen) pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, antara lain:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - indikator sub kegiatan :
        jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan.
      - capaian kinerja :
        kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 88,01% (delapan puluh delapan koma nol persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Penyediaan Jasa dengan capaian kinerja input sebesar 100% dan Kinerja Output

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - indikator subkegiatan :
     jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan.
   - capaian kinerja :
     kinerja *input,* telah tercapai kinerja *input* sebesar 98,09% (sembilan puluh delapan koma nol sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - indikator sub kegiatan:
     jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan.
   - capaian kinerja :
     kinerja *input,* telah tercapai kinerja input sebesar 90,07% (sembilan puluh koma nol tujun persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - indikator sub kegiatan:
     jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
   - capaian kinerja : kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,41% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh satu persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator Kegiatan Cakupan Pemeliharaan BMD. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 68,84% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. pada kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, antara lain:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- indikator subkegiatan:
  jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
- capaian kinerja:
  kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 100% (seratus persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- indikator subkegiatan:
  jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- capaian kinerja :
  kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 98,53% (sembilan puluh delapan koma lima puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

indikator sub kegiatan:
jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi.
capaian kinerja :
kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 50% (lima puluh persen).

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator Program jumlah pertumbuhan proyek PMDN/PMA. Capaian kinerja *input* sebesar 99,83 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dan kinerja *output* sebesar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

473,16% (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam belas persen), pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, antara lain :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Kegiatan Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,61% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 1 (satu) sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.
      - indikator subkegiatan:
        jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar.
      - capaian kinerja:
        kinerja *input,* telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,61% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
   Indikator Kegiatan Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi, Capaian Kinerja: Kinerja *Input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen). Dengan 2 (satu) subkegiatan :
   a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
      - indikator subkegiatan:
        jumlah peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota.
      - capaian kinerja:
        kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).
   b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- indikator subkegiatan:
  jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota.
- capaian kinerja:
  kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program promosi penanaman modal dengan indikator program jumlah investor (PMA/PMDN). Capaian kinerja *input* sebesar 99,66% dan kinerja *output* sebesar 90,65%, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

   Indikator kegiatan Jumlah Investor (PMA/PMDN), Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,66% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 2 (dua) sub Kegiatan:

   a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
      - indikator subkegiatan:
        jumlah peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota.
      - capaian kinerja:
        kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 98,77% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).
   b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
      - indikator sub kegiatan:
        jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- capaian kinerja:
  kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,73% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program pelayanan penanaman modal dengan indikator program jumlah penerbitan Izin. Capaian kinerja *input* sebesar 93,89% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen) dan kinerja *output* sebesar 127,57% (seratus dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen), pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

   Indikator kegiatan indek kepuasan masyarakat, capaian kinerja : kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 93,89% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 106,05% (seratus enam koma nol lima persen). dengan 4 (empat) subkegiatan :

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
      - indikator subkegiatan:
        jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
      - capaian kinerja:
        kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100%.
   b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
      - indikator subkegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- Capaian Kinerja:
  kinerja input, telah tercapai kinerja *input* sebesar 99,49% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
   - indikator subkegiatan
     jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
   - capaian kinerja:
     kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 82,27% (delapan puluh dua koma dua puluh tujuh persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

d. Pemantauan Pemenuhuan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
   - indikator subkegiatan
     jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan penanaman modal.
   - capaian kinerja:
     kinerja *input,* telah tercapai kinerja *input* sebesar 100% (seratus persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100% (seratus persen).

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator program kenaikan/penurunan nilai realisasi invetasi. Capaian kinerja *input* sebesar 72,01% (tujuh puluh dua

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koma nol satu persen) dan kinerja *output* sebesar 35,37% (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh persen) pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

   Indikator kegiatan jumlah pengendalian PMA/PMDN, capaian kinerja : kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 90,88% (sembilan puluh koma delapa puluh delapan persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 72,01% (tujuh puluh dua koma nol satu persen). Dengan 3 (tiga) subkegiatan :

   a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.
      - indikator subkegiatan:
        jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
      - capaian kinerja:
        kinerja *input*, telah tercapai kinerja *input* sebesar 57,62% (lima puluh tujuh koma enam puluh dua persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 2% (dua persen).

   b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
      - indikator sub kegiatan:
        jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implemtasi perizinan berusaha berbasis resiko.
      - capaian kinerja:
        kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 83,20% (delapan puluh tiga koma dua puluh persen), yaitu dari target dan kinerja output sebesar 598,67% (lima ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh persen).

   c. Pengawasan Penanaman Modal
      - Indikator SubKegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi dilapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

- capaian kinerja:
  kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 66,64% (enam puluh enam koma enam puluh empat persen).

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator program kenaikan/penurunan nilai realisasi invetasi. Capaian kinerja input sebesar 31,49% (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan persen) dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen), pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Kegiatan Pengembangan dan *Maintance* Aplikasi, Capaian Kinerja : kinerja *input*, telah tercapai kinerja input sebesar 31,49% (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja *output* sebesar 100%. Dengan 1 (satu) sub Kegiatan :
   a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
      - indikator sub kegiatan
        jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- capaian kinerja: kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 31,49% (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan persen) yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100% (seratus persen).

Adapun hasil capaian kinerja PD yang telah kami hitung berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.2 HASIL CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Nilai realisasi investasi PMDN/PMA*	*7,35*	*triliun Rupiah*	*23.352.398.850,00*	*19.414.613.701,00*	*16,42*	*83,14*	*223,40*
			Indeks Kepuasan Masyarakat	*88,25*	*Nilai*			*92,91*		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	74	Nilai	16.453.909.214,00	14.662.779.021,00	78,50	89,11	100,18
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja*	*16*	*Dokumen*	*786.959.126,00*	*762.735.913,00*	*16*	*96,92*	*100,00*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4	Dokumen	275.961.000,00	268.693.832,00	4	97,37	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	85.000.000,00	75.601.900,00	4	88,94	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9	Laporan	425.998.126,00	418.440.181,00	9	98,23	100,00
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Administrasi Keuangan*	*100*	*%*	*10.718.011.530,00*	*9.324.570.313,00*	*83,13*	*87,00*	*83,13*
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	66	Orang/Bulan	10.312.681.530,00	8.923.235.209,00	66	86,53	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	65.000.000,00	64.677.799,00	1	99,50	100,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Dokumen	24.330.000,00	24.306.900,00	5	99,91	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Tindak Lnjut Pemeriksaan							
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	24	Laporan	286.000.000,00	283.600.000,00	24	99,16	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	30.000.000,00	28.750.405,00	1	95,83	100,00
3	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Administrasi BMD*	*100*	*%*	*100.664.000,00*	*91.496.725,00*	*100*	*90,89*	*100,00*
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1	Dokumen	30.664.000,00	22.846.972,00	1	74,51	100,00
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	laporan	70.000.000,00	68.649.753,00	4	98,07	100,00
4	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Admintrasi Kepegawaian*	*100*	*%*	*802.000.000,00*	*786.777.803,00*	*100*	*98,10*	*100,00*
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	127.000.000,00	116.852.000,00	2	92,01	100,00
12	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Dokumen	100.000.000,00	95.761.802,00	100	95,76	100,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	75.000.000,00	74.164.001,00	15	98,89	100,00
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	150	Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	150	100,00	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Adminstrasi Umum*	*100*	*%*	*1.150.238.545,00*	*1.130.291.765,00*	*100*	*98,27*	*100,00*
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	170.000.000,00	166.407.400,00	1	97,89	100,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	250.000.000,00	249.076.000,00	1	99,63	100,00
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2	Paket	88.303.400,00	88.303.400,00	2	100,00	100,00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Paket	30.000.000,00	19.890.000,00	12	66,30	100,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	561.935.145,00	556.614.965,00	12	99,05	100,00
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	500	100,00	100,00
6	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Pengadaan BMD*	*100*	*%*	*387.226.000,00*	*340.806.000,00*	*100*	*88,01*	*100,00*
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	70	Unit	387.226.000,00	340.806.000,00	70	88,01	100,00
7	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Penyediaan Jasa*	*100*	*%*	*1.851.013.649,00*	*1.773.270.751,00*	*100*	*95,80*	*100,00*
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	5.599.000,00	5.492.000,00	3	98,09	100,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	128.144.389,00	116.225.810,00	12	90,70	100,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24	Laporan	1.567.790.260,00	1.502.956.941,00	24	95,86	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Umum Kantor yang Disediakan							
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	149.480.000,00	148.596.000,00	12	99,41	100,00
8	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Cakupan Pemeliharaan BMD*	*100*	*%*	*657.796.364,00*	*452.829.751,00*	*100*	*68,84*	*100,00*
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	Unit	316.930.000,00	316.930.000,00	48	100,00	100,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	Unit	75.866.364,00	74.747.800,00	60	98,53	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	2	Unit	265.000.000,00	61.151.951,00	1	23,08	50,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	652	Proyek	1.150.000.000,00	1.148.040.385,00	3085	99,83	473,16
9	*Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*1*	*Perda*	*200.000.000,00*	*199.223.310,00*	*1*	*99,61*	*100,00*
29	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30	Dokumen	200.000.000,00	199.223.310,00	30	99,61	100,00
10	*Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi*	*3*	*Dokumen*	*950.000.000,00*	*948.817.075,00*	*3*	*99,88*	*100,00*
30	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000,00	299.279.786,00	1	99,76	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	650.000.000,00	649.537.289,00	1	99,93	100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310	Investor	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	281	99,66	90,65
11	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Investor (PMA/PMDN)*	*310*	*Investor*	*1.081.660.000,00*	*1.077.936.018,00*	*281*	*99,66*	*90,65*
32	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2	Dokumen	81.660.000,00	80.659.600,00	2	98,77	100,00
33	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.000.000.000,00	997.276.418,00	4	99,73	80,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	10.000	Izin	894.053.636,00	839.436.788,00	12757	93,89	127,57
12	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Indek Kepuasan Masyarakat*	*87,75*	*Nilai*	*894.053.636,00*	*839.436.788,00*	*92,91*	*93,89*	*105,88*
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12	Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	12	100,00	100,00
35	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	275.000.000,00	273.587.450,00	500	99,49	100,00
36	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan	100	Pelaku Usaha	300.000.000,00	246.795.702,00	100	82,27	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan							
37	Pemantauan Pemenuhuan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300	Pelaku Usaha	279.053.636,00	279.053.636,00	300	100,00	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi	30,68	%	1.229.923.000,00	885.676.489,00	10,85	72,01	35,37
13	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Pengendalian PMA/PMDN*	*1020*	*Pelaku Usaha*	*1.229.923.000,00*	*885.676.489,00*	*927*	*72,01*	*90,88*
38	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	150	Kegiatan Usaha	251.437.000,00	144.871.674,00	3	57,62	2,00
39	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150	Pelaku Usaha	535.734.000,00	445.753.895,00	898	83,20	598,67
40	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	150	Kegiatan Usaha	442.752.000,00	295.050.920,00	26	66,64	17,33

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00
14	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Pengembangan dan Maintance Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*2.542.853.000,00*	*800.745.000,00*	*3*	*31,49*	*100,00*
41	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00

Bersadarkan reviu hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (Tabel T-C . 29) menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian nya yaitu pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.3 TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
Tujuan					Meningkatnya Daya Saing Investasi	Tingkat Pertumbuhan Investasi	30,9	Persen	51,38	Persen	30,6	10,85	35,46	30,7	10,85	35,11
Sasaran					Meningkatnya Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	Nilai realisasi Investasi PMDN/PMA	7,4	Triliun rupiah	14,81	Triliun rupiah	7,35	16,42	223,40	7,4	16,42	221,89
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat	89,52	nilai	91,93	Nilai	88,25	92,91	105,28	89,52	92,91	103,79
2	*18*	*1*			*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*	*88*	*Nilai*	*94,9*	*Nilai*	*73*	*74,13*	*101,55*	*94,9*	*74,13*	*84,24*
2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraph	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	*12*	Dokumen	17	Dokumen	16	16	100	15	49	408,33
2	18	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12	Dokumen	4	Dokumen	5	5	100	5	12	100
2	18	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	4	4	100	4	6	600
2	18	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200
2	18	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200
2	18	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan	9	Laporan	9	9	100	1	24	400
2	18	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0	Data	0	Data	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	*100*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100,00
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	98	Orang/Bulan	150	Orang/Bulan	66	66	100	66	282	287,76

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	2	Laporan	1	1	100	4	7	700,00
2	18	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	1	100	4	7	140,00
2	18	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3	Laporan	48	Laporan	24	24	100	3	75	2500,00
2	18	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2	Dokumen	1	1	100	4	7	700,00
2	18	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	*15*	Dokumen	10	Dokumen	5	5	100	16	49	326,67
2	18	1	02.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Dokumen	5	Dokumen	2	2	100	7	14	1400
2	18	1	02.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	0	laporan	0	laporan	0	0	0	0	0	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.03	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	Dokumen	8	Dokumen	4	4	100	12	24	1200
2	18	1	02.03	05	Penata Usaha Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	0	0	0	0	0
2	18	1	02.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang Milik SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0
2	18	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Presentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	*0*	Persentase	0	Persentase	0	0	0	100	100	0
2	18	1	02.04	01	Rencana Pengelolaan retribusi Daerah	Jumlah dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	1	0
2	18	1	02.04	02	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	1	0
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	*100*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	300	paket	133	paket	127	127	100	260	520	173,33
2	18	1	02.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	200	Dokumen	4	4	100	204	408	40800
2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	30	Orang	15	15	100	45	90	600,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	75	Orang	172	Orang	150	150	100	322	644	859
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	*100*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	paket	140	paket	1	70	7000	1	211	602,86
2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	paket	80	paket	1	40	4000,00	1	121	484,00
2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	22	paket	44	paket	2	22	1100,00	2	68	309,09
2	18	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	500	Dokumen	2	Dokumen	12	1	8,33	12	15	3,00
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Laporan	800	Laporan	12	400	3333,33	12	1.212	606,00
2	18	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500	Dokumen	1000	Dokumen	500	500	100,00	500	2.000	400,00
2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	*100*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	10	Unit	92	Unit	70	70	100	152	314	3140
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	*100*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	Laporan	4	Laporan	3	3	100,00	2	9	0,36
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	24	Laporan	12	12	100	12	48	400
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	Laporan	6	Laporan	24	24	100	24	54	108
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Laporan	24	Laporan	12	12	100	12	48	97,96
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	*108*	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	unit	48	unit	48	48	100	48	48	100
2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	unit	60	unit	60	60	100	60	60	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabitiasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	2	1	50	1	1	0
2	*18*	*2*			*PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL*	*Jumlah Proyek (PMA/ PMDN)*	*3267*	*Proyek*	*640*	*Proyek*	*640*	*1703*	*266,09*	*652*	*2.995*	*91,67*
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	*1*	Dokumen	3	Dokumen	3	3	100	1	7	700
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	3	Dokumen	3	3	100	1	7	700
2	*18*	*3*			*PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL*	*Jumlah Investor (PMA/PMDN)*	*350*	*Investor*	*260*	*Investor*	*260*	*284*	*109,23*	*310*	*854*	*244*
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	*1460*	Investor	260	Investor	260	284	109,23	310	854	58,49
2	18	2	02.02	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100	1	5	500
2	18	2	02.02	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	5	Dokumen	5	4	80	4	13	325
2	*18*	*4*			*PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL*	*Jumlah Penerbitan Izin*	*4750*	*Izin*	*1000*	*Izin*	*850*	*12.796*	*1279,6*	*950*	*14.746*	*310,44*
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	*92*	Nilai	88	Nilai	87,75	92,91	101,53	88,25	266	288,7

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
					yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	2000	2000	100	500	4.500	900
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500	Kegiatan Usaha	300	Kegiatan Usaha	300	300	100	500	1.100	220
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	500	Orang	100	Orang	100	100	100	100	300	60
2	18	4	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	500	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	12	12	100	12	36	7,2
2	*18*	*5*			*PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL*	*Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi*	*2*	*Persentase*	*30,5*	*Persentase*	*30,47*	*51,38*	*168,62*	*30,68%*	*61,25*	*3062,34*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	*2240*	Pelaku Usaha/Kegiatan	550	Pelaku Usaha/Kegiatan	550	550	100	1020	2.120	94,64
2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha YangMelakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	550	Kegiatan usaha	100	Kegiatan usaha	100	100	100	100	300	54,55
2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500	Pelaku Usaha	300	Pelaku Usaha	300	300	100	100	700	140
2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	250	Kegiatan usaha	100	Kegiatan usaha	100	100	100	100	300	120
2	*18*	*6*			*PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL*	*Jumlah Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*3*	*4*	*133,33*	*3*	*10*	*333,33*
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	*15*	Aplikasi	3	Aplikasi	3	4	133,33	3	10	66,67
2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	80	Dokumen	4436	Dokumen	4436	4436	100	3	8.875	11093,75

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

DPMPTSP merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka DPMPTSP menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal.

Selanjutnya dibentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada DPMPTSP. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 2 (Dua) diatas yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif”. Misi 3 (Tiga) “Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif” selain itu, DPMPTSP merupakan salah satu PD pengampu Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Capaian kinerja DPMPTSP dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja Program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

instansi. Dalam sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun 2024 nilai capaian kinerjanya sebesar 101,53 % (seratus satu koma lima puluh tiga persen) dengan kategori Sangat Baik, hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 92,91 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh satu) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87,75 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima). Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah dilakukan oleh DPMPTSP, salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha utamanya UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui kegiatan Pilot untuk UMKM pada 20 (dua puluh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam sasaran kedua meningkatnya nilai investasi daerah tahun 2024 nilai capaian kinerjanya sebesar 223% (dua ratus dua puluh tiga persen). Capaian nilai investasi Daerah tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp16.415.888.215.433,00 (enam belas triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dari target nilai investasi daerah sebesar Rp7.355.178.519.952,00 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dengan persentase sebesar 223% (dua ratus dua puluh tiga persen). Nilai realisasi investasi daerah pada tahun 2024 sebesar Rp16.415.888.215.433,00 (enam belas triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) diperoleh dari nilai investasi yang dirilis oleh BKPM RI dengan rincian nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp8.069.017.988.494,00 (delapan triliun enam puluh sembilan miliar tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp8.346.870.226.939,00 (delapan triliun tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki capaian kinerja sebesar 101,55% (seratus satu koma lima puluh lima persen). Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Tabel TC 30 dibawah ini

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC-30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			7	7,2	7,35	7,4	7,45	16,42	16,74	17,08	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,12	87,75	88,25	89,52	91,73	92,91	94,78	96,68	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

DPMPTSP memiliki peran strategis dalam mengelola investasi serta menyelenggarakan layanan perizinan di Daerah. Dengan meningkatnya dinamika pembangunan dan tuntutan investasi yang semakin kompetitif, berbagai tantangan muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas layanan, mendorong pertumbuhan investasi, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun untuk tahun 2026 ini Pemerintah Daerah mengangkat isu-isu strategis yaitu :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
4. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
5. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
6. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan; dan
7. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi).

Dimana DPMPTSP memiliki peran dan fungsi yaitu:

1. Penataan Regulasi dan Reformasi Perizinan
   a. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam perizinan investasi.
   b. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem OSS.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.

2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah
   a. Penyediaan fasilitas investasi yang kompetitif.
   b. Insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor.
   c. Promosi investasi berbasis sektor unggulan daerah.
3. Pemerataan Infrastruktur Penunjang Investasi
   a. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air.
   b. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk distribusi barang dan jasa.
   c. Fasilitas pendukung industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Perizinan
   a. Digitalisasi layanan perizinan dengan sistem yang lebih terintegrasi.
   b. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kepatuhan regulasi.
   c. Implementasi sistem pelayanan terpadu berbasis online yang ramah pengguna.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai DPMPTSP.
   b. Penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
   c. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perizinan dan investasi.

6. Sinergi dengan OPD dan Stakeholder
   1. Kolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam penyelenggaraan layanan.
   2. Meningkatkan koordinasi dengan dunia usaha dan komunitas bisnis.
   3. Pendekatan multi-sektoral untuk mendorong investasi berkelanjutan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2026 ini yaitu :

1. Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur Perizinan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Mengintegrasikan sistem OSS dengan regulasi daerah.
   2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan berbasis digital.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Memastikan kepatuhan terhadap standar perizinan nasional dan daerah.

2. Optimalisasi Infrastruktur dan Fasilitas Investasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Pembangunan kawasan industri dan pusat ekonomi baru.
   2. Peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung investasi.
   3. Pengembangan kebijakan berbasis kebutuhan investor dan potensi daerah.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Digitalisasi layanan melalui pengembangan aplikasi dan platform online.
   2. Implementasi sistem antrian online untuk efisiensi pelayanan.
   3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan melalui mekanisme feedback.
4. Strategi Promosi dan Peningkatan Investasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Menyelenggarakan forum investasi dan *business matching.*
   2. Mengembangkan paket insentif yang menarik bagi investor.
   3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM.
5. Penguatan SDM dan Kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan.
   2. Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
   3. Penerapan budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima.
6. Kolaborasi dan Sinkronisasi Kebijakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
   2. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi investasi.
   3. Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang berbasis data.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Dokumen RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail pada dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Mengacu pada rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut disusun dalan rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Misi 1 (Satu) diatas yaitu “Memantapkan Birokrasi yang bersih, Efektif, efisien dan Melayani”. dan Misi 3 (Tiga) “Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif”. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 6 (enam) program, antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
2. Program Promosi Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mengelola investasi dan pelayanan perizinan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP umumnya berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat, LSM, asosiasi pengusaha, akademisi, Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota. Namun, ada beberapa kondisi di mana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas ini tidak didasarkan pada usulan langsung dari para pemangku kepentingan.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya regulasi yang mengharuskan program tertentu dijalankan, kebutuhan administrasi pemerintahan dan inisiatif internal dari DPMPTSP sendiri berdasarkan evaluasi dan analisis kebijakan sebelumnya.

Adapun beberapa sebab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak ada mencantumkan usulan masyarakat yaitu:

a. Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Beberapa program/kegiatan yang dijalankan oleh DPMPTSP bersifat wajib dan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak membutuhkan masukan dari pemangku kepentingan daerah. Contohnya adalah implementasi sistem perizinan berbasis online melalui *Online Single Submission* (OSS) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Evaluasi dan Analisis Internal DPMPTSP

Dinas sering kali melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya serta menyusun kebijakan yang dianggap strategis tanpa harus menunggu usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, program peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan perizinan yang merupakan kebutuhan internal dinas.

c. Kurangnya Partisipasi dari Pemangku Kepentingan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Beberapa kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, atau akademisi mungkin kurang aktif dalam memberikan usulan atau tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan program/kegiatan lebih banyak ditentukan secara internal oleh DPMPTSP.

d. Agenda Strategis Pemerintah Daerah

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah memiliki agenda pembangunan tertentu yang harus dijalankan tanpa menunggu usulan dari pemangku kepentingan. Contohnya adalah program percepatan investasi yang diarahkan langsung oleh kepala daerah untuk menarik investor ke sektor-sektor prioritas.

Berikut adalah beberapa contoh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak berasal dari usulan pemangku kepentingan:

a. Implementasi Sistem Perizinan Berbasis Elektronik (OSS)

OSS merupakan sistem perizinan terintegrasi yang wajib diterapkan di seluruh Indonesia sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Program ini tidak bergantung pada usulan pemangku kepentingan daerah karena telah menjadi regulasi nasional.

b. Penyederhanaan Proses Perizinan dan Non-Perizinan

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyederhanakan proses perizinan guna meningkatkan daya saing investasi. Program penyederhanaan ini dilaksanakan secara top-down tanpa melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan daerah.

c. Monitoring dan Evaluasi Investasi

DPMPTSP memiliki kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi investasi yang telah masuk ke daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas serta dilakukan secara rutin tanpa perlu menunggu masukan dari pihak luar.

d. Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Perizinan

Pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai merupakan kebutuhan internal dinas yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja tanpa perlu ada usulan dari pemangku kepentingan.

e. Penyesuaian Kebijakan dengan Regulasi Baru

Ketika ada perubahan regulasi, DPMPTSP harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur kerja mereka. Misalnya, ketika ada perubahan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait investasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan perizinan, DPMPTSP harus menyesuaikan sistem dan prosedurnya tanpa menunggu usulan dari pihak luar.

f. Digitalisasi Layanan Perizinan

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan inisiatif strategis yang sering kali ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat. DPMPTSP dapat mengembangkan aplikasi atau sistem layanan online tanpa perlu usulan dari pemangku kepentingan.

g. Promosi Investasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di Kutai Kartanegara, DPMPTSP dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi, seperti pameran investasi, roadshow ke investor, atau penyusunan profil investasi daerah tanpa harus menunggu masukan dari pemangku kepentingan.

Adapun usulan rencana kerja awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2026 dapat dilihat pada TC 31 dibawah ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T - C. 31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 DPMPTSP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	10,85 Persen	20.433.370.644,00	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	11,07 Persen	23.534.440.481,00	
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*	*74,13 Nilai*	*15.583.370.644,00*	*Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*	*77,94 Nilai*	*16.934.440.481,00*	
1	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD*	*13 Dokumen*	*285.000.000,00*	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	753.671.500,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	150.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	85.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	135.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	50.000.000,00	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	60.343.200,00	
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita acara	50.000.000,00	
8	Penyusunan Dokumen Perencanan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			Penyusunan Dokumen Perencanan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	293.328.300,00	
2	*Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Administasi Keuangan*	*100 Persen*	*11.494.932.823,00*	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,96 Persen	11.850.949.029,00	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	66 orang/bulan	11.094.932.823,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	104 Orang/bulan	11.381.533.629,00	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43 Dokumen	33.750.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	33.750.000,00	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	20.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.703.800,00	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	285.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan /semester SKPD	2 Laporan	299.461.600,00	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	33.750.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Realisasi Anggaran								
3	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Administasi Barang Milik Daerah*	*100 Persen*	*54.999.000,00*	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	100 Persen	164.999.000,00	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	14.999.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	14.999.000,00	
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
18	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	40.000.000,00	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	40.000.000,00	
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	50.000.000,00	
20	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000,00	
21	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah			
22	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah		-	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	
5	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Administrasi Kepegawaian*	*100 Persen*	*350.000.000,00*	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 Persen	175.000.000,00	
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	3 paket	-	
24	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	25.000.000,00	
25	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tugas dan Fungsi										
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	50.000.000,00	
6	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Administrasi umum*	*100 Persen*	*1.284.435.145,00*	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.175.000.000,00	
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	155.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	300.000.000,00	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	300.000.000,00	
29	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 paket	250.000.000,00	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	691.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	200.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	
33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	72.500.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita			
7	*Penataan Organisasi*	*Kutai Kartanegara*	*Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana*	*100 Persen*	-	*Penataan Organisasi*	*Kutai Kartanegara*	*Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana*		-	
34	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
8	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100 Persen*	*361.000.000,00*	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan			
9	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS*	*100 Persen*	*1.430.153.676,00*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	1.639.110.952,00	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.995.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.550.000,00	
37	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.766.216,00	
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.089.678.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.333.373.536,00	
39	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	149.480.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.421.200,00	
10	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan*	*100 Persen*	*322.850.000,00*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.155.710.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemerintah daerah								
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	263.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	23 Unit	565.710.000,00	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	59.230.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	120 Unit	90.000.000,00	
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	
2	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA*	*665 Proyek*	*1.200.000.000,00*	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Realisasi total terhadap target investasi*	*17,16 Triliun Rupiah*	*2.500.000.000,00*	
11	*Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*350.000.000,00*	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Draf regulasi (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	*1 Dokumen*	450.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
43	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	350.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	70 Dokumen	450.000.000,00	
12	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	850.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian Peta Peluang Investasi Non ekstratif yang terukur (Dokumen IPRO)	3 Dokumen	2.050.000.000,00	
44	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000,00	
45	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.800.000.000,00	
3	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Investor (PMA/ PMDN)*	*340 Investor*	*950.000.000,00*	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase peningkatan investor yang berinvestasi*	*78 persen*	*1.050.000.000,00*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Investor (PMA/ PMDN)*	*340 Investor*	*950.000.000,00*	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan promosi Investasi sektor non-ekstraktif yang diselenggarakan	*4 kegiatan*	1.050.000.000,00	
46	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahPeraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	
47	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	750.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	750.000.000,00	
4	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Penerbitan Izin*	*10.000 Izin*	*1.100.000.000,00*	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan*	*100 Persen*	*1.300.000.000,00*	
14	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*91,96 Nilai*	*1.100.000.000,00*	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP berdasarkan peraturan perundang-undangan	2458 izin	1.300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
48	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00	
49	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 kegiatan usaha	500.000.000,00	
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Dokumen	100.000.000,00	
5	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)*	*30.90 Persen*	*900.000.000,00*	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha*	*100 Persen*	*750.000.000,00*	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Pengendalian PMA / PMDN*	*300 Pelaku usaha/kegiatan usaha*	*900.000.000,00*	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, dilakukan Bimbingan teknis dan di lakukan Pengawasan	150 pelaku usaha/kegiatan usaha	750.000.000,00	
52	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			
53	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	400 Pelaku usaha	450.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	
6	*Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Aplikasi*	*3 Aplikasi*	*700.000.000,00*	*Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal*	*100 persen*	*1.000.000.000,00*	
16	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah Aplikasi*	*3 Aplikasi*	*700.000.000,00*	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*Jumlah data dan informasi perizinan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	*10 Laporan*	*1.000.000.000,00*	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	700.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan jangka panjang nasional di bidang investasi tahun 2025-2045 menuju indonesia emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dimana negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradapan bahari sebagai poros maritim dunia. Bererdaulat itu sendiri terdiri dari ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman bagi para investor. Maju dimana berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil bagi semua pihak baik itu masyarakat maupun investor. Berkelanjutan dimana investasi yang ditawarkan merupakan investasi yang lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. 5 (lima) sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

a. pendapatan per kapita setara negara maju;
b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Untuk mendukung lima misi tersebut terdapat 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan 2045 yaitu:

a. transformasi sosial;
b. transformasi ekonomi;
c. transformasi tata kelola;
d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia;
e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
h. kesinambungan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Indonesia emas tahun 2045 Kementerian Investasi/BKPM membuat arah kebijakan investasi yaitu:

1. Investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transpormasi digital, moderenisasi dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;

2. Investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global;
3. Investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau terutama percepatan transisi, energi, implementasi ekonomi sirkular, pengembangan transpormasi hijau dan adopsi teknologi hijau;
4. Investasi dalam infrastruktur konektifitas dan logika untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global;
5. Invetasi yang berorientasi riset dan inovasi;
6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi pusat-Daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal dan pembiayaan;
7. Iklim investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
8. Efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah;
9. Fasilitas investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia.

Untuk mendukung arah kebijakan nasional tersebut DPMPTSP akan melakukan :

1. Mendorong investasi yang mengembangkan industri prioritas, mendukung transpormasi digital, moderenisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Membuat peta potensi berstandar IPRO untuk *green investment* dan *blue investment*;
3. Meningkatkan iklim investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Mendorong percepatan Peraturan Daerah pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
5. Meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengciptakan inovasi-inovasi baru sehingga mempermudah pelaku usaha dan *stakeholder* dalam pengurusan perizinan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Meningkatkan SDM Aparatur pada DPMPTSP dan Mall Pelayanan Publik (MPP);
7. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan selaras terhadap kebijakan pemerintah Daerah. koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan dinas / instansi teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati tahun 2025 – 2030, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 2 dan 3:

- Misi 2 “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif”.
- Misi 3 “Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara“.

Keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah pada Rencana Kerja 2026 DPMPTSP berdasarkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal Daerah, berdasarkan misi 2 dan 3 Bupati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP tahun 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstratktif
			Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya DPMPTSP bersumber dari dana APBD, oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada Program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan realisasi investasi dan peningkatan pelayanan perizinan berbasis risiko dan nonperizinan serta digambarkan dalam bentuk Program dan kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan Program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja PD, dan kegiatan administrasi keuangan. Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Daerah. Hasil Rencana Kerja 2026 DPMPTSP dari kegiatan dalam Program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuruan kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di Daerah. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

DPMPTSP tahun 2025-2030, untuk tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) subkegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp23.534.440.481,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan sumber dana dari APBD untuk melakukan paket-paket pekerjaan penunjang pencapaian *outcome* DPMPTSP. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan					Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	11,07 Persen	23.534.440.481,00	*APBD*		*11,29 Persen*	35.746.230.336
Sasaran					Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstratktif		39,73 persen		*APBD*		39,93 persen	
Sasaran					Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu		93,81 Nilai		*APBD*		*94,75 Nilai*	
2	*18*	*1*			*Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*77,94 Nilai*	*16.934.440.481,00*	*APBD*		*77,94 Nilai*	*23.580.653.480*
2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	753.671.500,00	APBD		100 Persen	1.464.935.850
2	18	1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD		2	292.852.000
2	18	1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		4	57.881.250
2	18	1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 laporan	50.000.000,00	APBD		7	376.728.800

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	60.343.200,00	APBD		2	61.550.000
2	18	1	02.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	53.060.400
2	18	1	02.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	100.000.000,00	APBD		1	265.302.000
2	18	1	02.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita acara	50.000.000,00	APBD		1	58.366.500
2	18	1	02.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	293.328.300,00	APBD		2	299.194.900
2	18	1	02.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	84,96 persen	11.850.949.029,00	APBD		88,39 persen	11.806.871.629
2	18	1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	104 orang/bulan	11.381.533.629,00	APBD		104 orang/bulan	11.381.533.629
2	18	1	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	43 Dokumen	33.750.000,00	APBD		43	34.728.750
2	18	1	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	33.750.000,00	APBD		1	34.728.750

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1	115.762.500
2	18	1	02.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	18.703.800,00	APBD		1	57.881.250
2	18	1	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	299.461.600,00	APBD		2	147.508.000
2	18	1	02.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	33.750.000,00	APBD		1	34.728.750
2	18	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Persentase Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	164.999.000,00	APBD		100 Persen	355.000.000
2	18	1	02.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	14.999.000,00	APBD		2 Dokumen	30.000.000
2	18	1	02.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		2 Laporan	50.000.000
2	18	1	02.03	0005	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 laporan	40.000.000,00	APBD		6 laporan	30.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	225.000.000
2	18	1	02.03	0007	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.000,00	APBD		2 Dokumen	20.000.000
2	18	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	20.000.000,00	APBD		100 Persen	58.940.625
2	18	1	02.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		1	30.000.000
2	18	1	02.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12	28.940.625
2	18	1	02.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	*100 Persen*	*175.000.000,00*	APBD		*100 Persen*	*2.500.000.000*
2	18	1	02.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		3 Unit	150.000.000
2	18	1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		3 Paket	900.000.000
2	18	1	02.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Dokumen	150.000.000
2	18	1	02.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	25.000.000,00	APBD		4 Laporan	150.000.000
2	18	1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	100.000.000,00	APBD		160 Orang	750.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	50.000.000,00	APBD		75 Orang	400.000.000
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.175.000.000,00	APBD		100 Persen	2.801.000.000,00
2	18	1	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		1 paket	115.000.000
2	18	1	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	APBD		1 paket	400.000.000
2	18	1	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	300.000.000,00	APBD		1 paket	450.000.000
2	18	1	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD		2 Paket	350.000.000
2	18	1	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	25.000.000,00	APBD		12 Dokumen	25.000.000
2	18	1	02.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		12 laporan	200.000.000
2	18	1	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	250.000.000,00	APBD		12 laporan	961.000.000
2	18	1	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	APBD		8500 Dokumen	300.000.000
2	18	1	02.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		100 Persen	1.060.718.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	02.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		72	557.628.000
2	18	1	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		20	503.090.000
2	18	1	02.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.639.110.952,00	APBD		100 Persen	2.032.087.376
2	18	1	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	2.550.000,00	APBD		2 Laporan	5.000.000
2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	APBD		12 Laporan	266.766.216
2	18	1	02.09	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	36.421.200,00	APBD		12 Laporan	150.000.000
2	18	1	02.09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.333.373.536,00	APBD		12 Laporan	1.610.321.160
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.155.710.000	APBD		100 Persen	1.351.100.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2	18	1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	23 Unit	565.710.000,00	APBD		4 Unit	201.720.000
2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		20 Unit	212.520.000
2	18	1	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit	90.000.000,00	APBD		189 unit	106.620.000
2	18	1	02.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Unit	262.120.000
2	18	1	02.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		4 Unit	200.000.000
2	18	1	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	500.000.000,00	APBD		1 Unit	50.000.000
2	18	1	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Unit	318.120.000
2	18	1	02.13		Penataan Organisasi	Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		100 Persen	150.000.000
2	18	1	02.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		12 Laporan	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	*1 8*	*2*			*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Realisasi total terhadap target investasi*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*17,16 Triliun Rupiah*	*2.500.000.000,00*	*APBD*		*5,50%*	*3.278.973.846*
2	1 8	2	02.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Draf regulasi (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	450.000.000,00	APBD		100 Persen	1.178.973.846
2	1 8	2	02.0 2	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	1 8	2	02.0 2	000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kutai Kartanegara	70 Dokumen	450.000.000,00	APBD		133	1.178.973.846
2	1 8	2	02.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Peluang Investasi Non ekstratif yang terukur (Dokumen IPRO)	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	2.050.000.000,00	APBD		4 Dokumen	2.100.000.000,00
2	1 8	2	02.0 2	000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 dokumen	300.000.000,00
2	1 8	2	02.0 2	000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD		3 Dokumen	1.800.000.000,00
2	*1 8*	*3*			*Program Promosi Penanaman Modal*	*Persentase peningkatan investor yang berinvestasi*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*78 persen*	*1.050.000.000,00*	*APBD*		*83%*	*2.363.928.710,00*
2	1 8	3	02.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Investasi sektor non-ekstraktif yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	4 kegiatan	1.050.000.000,00	APBD		5	2.363.928.710,00
2	1 8	3	02.0 1	000 3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	750.000.000,00	APBD		5	1.403.582.672,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota							
2	18	3	02.01	0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		2	960.346.038,00
2	*18*	*4*			*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100 persen*	*1.300.000.000,00*	*APBD*		*95,69 Nilai*	*2.509.576.500,00*
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP berdasarkan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	2458 izin	1.300.000.000,00	APBD		100 Persen	2.509.576.500,00
2	18	4	02.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	APBD		5 Pelaku Usaha	Rp 276.020.200
2	18	4	02.01	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100Pelaku Usaha	300.000.000,00	APBD		1104Pelaku Usaha	Rp 636.724.800
2	18	4	02.01	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00	APBD		1082 Pelaku Usaha	550.000.000
2	*18*	*4*	02.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Pelaku Usaha	500.000.000,00	APBD		1149 Kegiatan Usaha	1.046.831.500

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							
2	*1 8*	*5*			*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100 persen*	*750.000.000,00*	*APBD*		*79 Persen*	*1.307.017.400*
2	1 8	5	02.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, dilakukan Bimbingan teknis dan di lakukan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	150 pelaku usaha/kegi atan usaha	750.000.000,00	APBD		100 Persen	1.307.017.400
2	1 8	5	02.0 1	000 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		61 Kegiatan Usaha	200.000.000
2	1 8	5	02.0 1	000 5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku usaha	450.000.000,00	APBD		463 Pelaku Usaha	707.017.400
2	1 8	5	02.0 1	000 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi	Kab. Kutai Kartanegara	150 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	APBD		33 Kegiatan Usaha	400.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
2	*18*	*6*			*Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100 persentase*	*1.000.000.000,00*	*APBD*		*100 Persen*	*2.706.080.400,00*
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	10 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		10 Dokumen	2.706.080.400,00
2	18	6	02.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		10 Dokumen	2.706.080.400

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan daya saing investasi Daerah serta dengan indikator pertumbuhan investasi, DPMPTSP telah merancang Program kerja yang lebih komprehensif dan strategis untuk tahun mendatang. Sebagai bagian dari rencana penguatan kebijakan dan optimalisasi pelayanan, terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan.

Kenaikan anggaran dari Rp20.433.370.644,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp23.534.440.481,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau meningkat sebesar Rp3.101.069.837,00 didasarkan pada beberapa faktor utama:

1. Peningkatan Target Capaian Investasi

   Untuk memastikan realisasi pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, diperlukan penyesuaian anggaran guna mendukung infrastruktur, promosi investasi, serta fasilitasi kemudahan berusaha di Daerah.

2. Penguatan Sistem dan Digitalisasi Layanan

   Investasi dalam sistem pelayanan berbasis digital menjadi salah satu prioritas utama guna mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi dalam layanan kepada investor.

3. Peningkatan Kapasitas dan SDM

   Dengan adanya peningkatan target dan perubahan regulasi yang dinamis, diperlukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan global serta meningkatkan kualitas pelayanan investasi.

4. Penyediaan Insentif Investasi

   Untuk menarik investor strategis ke Daerah, alokasi anggaran tambahan digunakan untuk berbagai skema insentif, baik dalam bentuk fasilitas fiskal maupun non-fiskal, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Adapun rencana tindak lanjut dari peningkatan anggaran pada DPMPTSP tahun anggaran 2026, DPMPTSP melakukan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran.

   Memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala.

   Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

   Menguatkan kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah Daerah, serta pihak terkait lainnya guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif.

4. Peningkatan Pelayanan Terpadu

   Melanjutkan inovasi dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan investor.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen hasil evaluasi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan hasil pembahasan atas usulan Program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Daerah dengan tetap mengacu pada Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, dalam hal ini Renstra tahun 2021-2026.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan Daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptilamlkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menegah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RJPMD), perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan PD tahunan yang dituangkan dalam Renja-PD.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tentunya memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (*vertical* dan *horizontal*) maupun hubungan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Di dalam Rencana Kerja diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun ke depan, visi dan dan misi bagi penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan diberbagai aspek pembangunan.

Penyusunan Renja-PD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoensia Nomor P.60/MELHKSetjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoensia Noor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2026;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan Program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2026 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluruh *stakeholder* terkait pada tahun 2026 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Daerah pada tahun 2026 di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup; dan
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan dengan pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. *Review* terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran PD

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi PD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026 dan tahun berjalan (tahun 2025) juga harus dilakukan evaluasi.

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan 2021-2026. Berikut ini adalah realisasi keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Program/Kegatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Presentase Realisasi Keuangan (%)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.733.593.442	25.667.716.652	22.246.815.197	3.420.901.455	86,67
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.380.000	418.380.000	366.835.279	51.544.721	87,68
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.380.000	198.380.000	196.785.823	1.594.177	99,20
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	220.000.000	170.049.456	49.950.544	77,30
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.212.065.972	17.381.516.534	15.070.171.345	2.311.345.189	86,70
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.007.065.972	17.176.516.534	14.888.011.345	2.288.505.189	86,68
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	205.000.000	205.000.000	182.160.000	22.840.000	88,86
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.880.000	70.860.000	66.860.000	4.000.000	94,36
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.880.000	70.860.000	66.860.000	4.000.000	94,36
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	785.010.000	886.010.000	665.885.906	220.124.094	75,16
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	334.460.000	435.460.000	329.093.000	106.367.000	75,57
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.550.000	50.550.000	33.169.500	17.380.500	65,62
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	400.000.000	303.623.406	96.376.594	75,91
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.416.000.000	1.420.370.000	1.248.414.904	171.955.096	87,89
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	40.000.000	39.896.500	103.500	99,74
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.000.000	135.655.700	14.344.300	90,44
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	27.015.000	2.985.000	90,05
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	28.000.000	26.378.600	1.621.400	94,21
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	7.995.500	4.500	99,94
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	100.000.000	84.325.100	15.674.900	84,33
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	549.000.000	479.399.044	69.600.956	87,32
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250.000.000	250.000.000	189.549.460	60.450.540	75,82
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350.000.000	265.370.000	258.200.000	7.170.000	97,30
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	914.822.950	2.169.043.440	2.015.297.000	153.746.440	92,91
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	839.250.000	827.740.000	11.510.000	98,63
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	600.000.000	600.000.000	522.511.000	77.489.000	87,09
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.822.950	617.993.440	561.680.000	56.313.440	90,89
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	111.800.000	103.366.000	8.434.000	92,46
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.434.520	2.711.536.678	2.279.565.282	431.971.396	84,07
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.052.000	429.980.108	326.985.162	102.994.946	76,05
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.943.382.520	2.281.556.570	1.952.580.120	328.976.450	85,58

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.746.000.000	610.000.000	533.785.481	76.214.519	87,51
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000	273.627.000	209.901.500	63.725.500	76,71
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.136.000.000	1.373.000		1.373.000	0,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	29.920.000	5.080.000	85,49
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	293.963.981	6.036.019	97,99
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	960.000.000	909.609.060	805.346.753	104.262.307	88,54
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	400.000.000	349.609.060	335.968.580	13.640.480	96,10
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	400.000.000	349.609.060	335.968.580	13.640.480	96,10
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	560.000.000	560.000.000	469.378.173	90.621.827	83,82
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	560.000.000	560.000.000	469.378.173	90.621.827	83,82
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.375.000.000	2.387.501.719	1.630.927.842	756.573.877	68,31
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.375.000.000	2.387.501.719	1.630.927.842	756.573.877	68,31
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	635.000.000	35.000.000	6.006.000	28.994.000	17,16
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.060.000.000	1.460.000.000	1.061.175.406	398.824.594	72,68
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	680.000.000	892.501.719	563.746.436	328.755.283	63,16
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	375.000.000	375.000.000	340.730.367	34.269.633	90,86
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	75.000.000	45.780.000	29.220.000	61,04
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	75.000.000	45.780.000	29.220.000	61,04
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	294.950.367	5.049.633	98,32
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	300.000.000	300.000.000	294.950.367	5.049.633	98,32

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	85.435.981.808	87.391.180.586	81.966.066.542	5.425.114.044	93,79
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	85.435.981.808	87.391.180.586	81.966.066.542	5.425.114.044	93,79
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	400.000.000	263.766.000	136.234.000	65,94
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.400.000.000	3.400.000.000	3.191.533.831	208.466.169	93,87
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	39.006.709.808	39.006.709.808	36.060.217.685	2.946.492.123	92,45
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	380.000.000	380.000.000	358.651.000	21.349.000	94,38
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	27.749.272.000	29.704.470.778	28.580.480.386	1.123.990.392	96,22
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	14.300.000.000	14.300.000.000	13.323.136.320	976.863.680	93,17
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	200.000.000	200.000.000	188.281.320	11.718.680	94,14
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.354.920.000	3.767.991.447	3.263.366.778	504.624.669	86,61
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.446.920.000	2.657.421.447	2.220.542.439	436.879.008	83,56
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	643.920.000	518.920.000	432.947.946	85.972.054	83,43
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	365.000.000	365.000.000	291.816.534	73.183.466	79,95
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.438.000.000	1.773.501.447	1.495.777.959	277.723.488	84,34
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	122.000.000	122.000.000	100.960.000	21.040.000	82,75
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.000.000	45.000.000	26.090.000	18.910.000	57,98
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	77.000.000	77.000.000	74.870.000	2.130.000	97,23
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	786.000.000	988.570.000	941.864.339	46.705.661	95,28
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	300.000.000	300.000.000	289.593.325	10.406.675	96,53
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	165.000.000	165.000.000	139.488.829	25.511.171	84,54
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	321.000.000	523.570.000	512.782.185	10.787.815	97,94

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**702.000.000**	**491.770.940**	**442.788.873**	**48.982.067**	**90,04**
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**702.000.000**	**491.770.940**	**442.788.873**	**48.982.067**	90,04
	2.11.06.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	**102.000.000**	**-**	**-**	**-**	0,00
	2.11.06.2.01.0005	**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**350.000.000**	**241.770.940**	**213.170.000**	**28.600.940**	88,17
	2.11.06.2.01.0007	**Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup**	**250.000.000**	**250.000.000**	**229.618.873**	**20.381.127**	91,85
	2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**75.000.000**	**75.000.000**	**20.532.000**	**54.468.000**	**27,38**
	2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**40.000.000**	**40.000.000**	**-**	**40.000.000**	0,00
	2.11.07.2.01.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH**	**40.000.000**	**40.000.000**	**-**	**40.000.000**	0,00
	2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**35.000.000**	**35.000.000**	**20.532.000**	**14.468.000**	58,66
	2.11.07.2.02.0001	**Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH**	**35.000.000**	**35.000.000**	**20.532.000**	**14.468.000**	58,66
	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**240.000.000**	**342.000.000**	**308.120.097**	**33.879.903**	**90,09**
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**240.000.000**	**342.000.000**	**308.120.097**	**33.879.903**	90,09
	2.11.08.2.01.0002	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**	**80.000.000**	**182.000.000**	**161.346.261**	**20.653.739**	88,65
	2.11.08.2.01.0003	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**	**80.000.000**	**80.000.000**	**71.626.904**	**8.373.096**	89,53
	2.11.08.2.01.0005	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat**	**80.000.000**	**80.000.000**	**75.146.932**	**4.853.068**	93,93
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**650.000.000**	**650.000.000**	**439.399.380**	**210.600.620**	**67,60**
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**650.000.000**	**650.000.000**	**439.399.380**	**210.600.620**	67,60
	2.11.09.2.01.0001	**Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**650.000.000**	**650.000.000**	**439.399.380**	**210.600.620**	67,60
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**288.000.000**	**288.000.000**	**202.141.600**	**85.858.400**	**70,19**
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**288.000.000**	**288.000.000**	**202.141.600**	**85.858.400**	70,19
	2.11.10.2.01.0004	**Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	**100.000.000**	**75.842.000**	**24.158.000**	75,84
	2.11.10.2.01.0006	**Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**	**188.000.000**	**188.000.000**	**126.299.600**	**61.700.400**	67,18
TOTAL KESELURUHAN			**119.339.495.250**	**122.692.770.404**	**111.716.391.632**	**10.976.378.772**	**91,05**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target

Terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai berikut :

1. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; dan
2. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2.1.2. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target

Adapun beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target diantaranya :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Program perencanaan lingkungan hidup;
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; dan
10. Program pengelolaan persampahan.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja Program/kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya beberapa Program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. kegiatan Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH belum ada penetapan dan masih proses menunggu Peraturan Daerah oleh DPRD;
2. perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan;
3. target yang terlalu tinggi yang tidak dapat dikendalikan; dan
4. proses penetapan TAHURA yang memakan waktu lama, terkait administrasi dan penebitan SK penetapan di TAHURA.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra-PD sebagai berikut :

1. Terhadap Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Bagi program/ kegiatan yang tercapainya target berimplikasi kepada:
   a. menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air maupun lahan; dan
   b. semakin banyak pelaku usaha yang tertib terhadap perturan perundang/undangan lingkungan hidup, terlihat dari PROPER.
3. Terhadap Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan PD;
4. Tidak tercapainya target kinerja Program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC 29

REALISASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA

No	Sasaram/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %	Target Program, kegiatan dan Realisasi capaian sub kegiatan s/d tahun berjalan Semester 1 (tahun 2025)	Tingkat capaia Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**63,56 Nilai**	**60,53**	**62**	**60,04**	**95,9**	**60,53**	**85**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh**	**11 Dokumen**	**11**	**8 Dokumen**	**8**	**95,5**	**11 Dokumen**	**95**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	2	2	100	2	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4	5	5	91.25	5	100
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	-	-	-	1	100
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	-	-	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12 Laporan**	**12**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/Bulan	1040	1204	1395	100	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	14	16	16	100	14	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	Laporan	-	-	-	-	1	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**2 Laporan**	**2**					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	11	12	12	100	7	100
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	**1**	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	**1**	100
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**3 Dokumen**	**3**			**100**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stell	-	410	410	100	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	2	2	2	100	2 Dokumen	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	19	20	20	100	20	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Jenis	2	3	3	100	35 Paket	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	1	1	100	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 Jenis 2.150 Kotak 3.80 Kotak	6 Paket	2642 Paket	2642 Paket	100	252 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1. 3 jenis 2. 5.000 Lembar	1 Paket	5003 Paket	5003 Paket	100	5000 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528 Exampler	4 Dokumen	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100	5 Paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Orang	40	85 Laporan	85 Laporan	100	85 Laporan	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20	20	100	-	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	1	100	1	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2	1	100	1	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	75	20	20	100	56 Unit	100
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	2	2	100	0	100
	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	-	148	148	100	0	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	1	100	0	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**12**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12	12	12	100	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12	12	12	100	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**66,5 Persen**	**60**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1 Unit	11	1	1	100	1	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	9	1	0	0	57	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	2	20	16	80	2	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	uni	-	1	1	100	0	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**100 Persen**	**60**					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya RPPLH**	**4 Dokumen**	**1**					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3	2	2	100	3	100
	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya KLHS**	**1 Dokumen**	**1**					
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1 Dokumen	2	1	1	100	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**	**200000 Pohon**	**2000**					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**2 Dokumen**	**4**					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2	2	2	100	2	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1 Lpaoran**	**1**					
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	1	1	1	100	1	100
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	5 Lokasi	34	25	26	100	25	100
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Lokasi	43	-	-	-	50	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1 dokumen**	**1**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	1	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	2	1	1	100	1	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	-	-	-	-	2	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	-	-	-	-	5	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20 Persen**	**20**					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota**	**24,19 Pesen**	**2**					
		Tercapainya penanaman dan pemeliharan pengelolaan keanekaragaman hayati	**Dokumen**						
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	0	-	-	-	1	100
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13 Hektar	18	27	54	100	1 Unit	100
	pengelolaan kebun raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Hektar	0	5	0	0	2 Ha	50
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25 Hektar	10	8,5	11	100	25 Ha	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	15 Unit	12	-	-	-	15	100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara**	**3 Dokumen**	**4**					
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah pelaku usaha**	**50 Pelaku Usaha**	**50**					
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	4	50	29	58	50	100
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3**	**50 Pelaku Usaha**	**50**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	40 Laporan	4 Dokumen	2	2	100	3 Dokumen	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**19,32 Persen**	**19,32**					
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan**	**20 Persen**	**20**					
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9 Orang	9	9	20	100	9	100
	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	-	-	-	-	3	100
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	120	75	108	100	75	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20 Dokumen	20	0	-	-	0	100
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120 Dokumen	0	0	-	-	0	100
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75 Persen**	**75**					
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**70 Persen**	**75**					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	5	6	0	0	5	50
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat**	**70 Persen**	**70**					
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	1	1	2	100	1	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan**	**35 Lembaga**	**35**					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**	**35 kali**	**35**					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	**2 Lembaga**	2	2	2	100	2	100
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	**53 Dokumen**	53	30	30	100	30	100
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	**325 Orang**	241	300	300	100	325	100
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama**	**5 Desa/Keluaran**	**5**					
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	**129 Penghargaan**	**126**					
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya**	**2 jenis**	**2**					
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	124 Entitas	178	131	131	100	124	100
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani**	**98 Persen**	**96**					
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**	**50 Laporan**	**50**					
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	28	20	36	100	20	100
	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	Perkara	-	20	37	100	20	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	25 Dokumen	18	-	-	-	10 Pekara	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun**	**1 Lokasi**	**2**					
		2. Timbulan sampah	**99,52 Persen**	**94.84**					
	Pengelolaan Sampah	**1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani**	**70 Persen**	**50**					
		2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	**28,30 Pesen**	**72**					
		3. Persentase cakupan area pelayanan	**72,22 Persen**	**21**					
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	3	3	3	100	4	100
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	4	14 Ton	14 Ton	100	47 Ton	100
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994 Ton	59,00	80 Unit	80 Unit	100	3247 Unit	100
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5 Kelompok	5	5	5	100	5	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	5	5	5	100	5	100
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	3	2	2	100	2	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	19 Unit	3,748	11,676	11,676	100	2856	100
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)**	**0 Dokumen 1 Kegiatan**	**16,67**					
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	**Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura**	**Dokumen**	**1**					
	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	15	-	-
	PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA HABITATNYA DI TAHURA KABUPATEN/KOTA	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Hektar	-	-	-	-	3.261	85
	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	85
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	-	-	-	-	1	85
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Dokumen	-	-	-	-	2	85

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbukan atas kinerja pelayanan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program dan kegaitan seuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel TC 30 berikut

IKU	SATUAN	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.32	57,42	57.52	53.08	50,53	52,05
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.78	88,89	88.89	88.78	91,53	92,73
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	71.38	72,49	73.89	71.38	74,62	75,17
Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.640	19640	19.531	18640,78	22.940	497.371

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungna hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d. Tercapaianya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentngan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development)* bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauh mana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Envirinmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyogyanya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalah tersebut karena menyangkut lintah ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sektor/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penetuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil *metaplan*, teridentifikasi 13 (tiga belas) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut:

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan;
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang;
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi;
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam meberikan layanan kebersihan dbandingkan dengan timbulan sampah;
5. Fenomena iklim yang tidak menetu akibat terjadinya perubahan iklim secara global;
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu;
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*);
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan;
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan;
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati; dan
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasaahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu priorotas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

2.4. *Review* terhadap rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan langkah penyempurnaan terhadap rancangan kerja bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan tahunan yang berisi Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2024, Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi perubahan nomenklatur Program dan kegiatan menyesuikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja tahun 2026 akan disinkronisasi dengan rancangan RKPD sehingga menjadi rumusan Program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan Rencana Kerja tahun 2026.

Berikut ini adalah tabel *review* Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC 31

Review Terhadap Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

UPD. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rancangan Akhir Renja 2026							
No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**61,9**	**Nilai**	**23.341.593.838,00**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11**	**Dokumen**	**500.000.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	150.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	100.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	100.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12**	**Laporan**	**19.253.323.219,00**	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	18.973.323.219,00	Disesuaikan dengan pagu Gaji tahun 2024, Penambahan ASN peralihan dari Perkim sebanyak 33 Orang , Proses Rekon Gaji dilakukan di pertengahan tahun
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000,00	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**2**	**Laporan**	**135.000.000,00**	
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	50.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasi lKoordinas iPenilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	Laporan	50.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.4	***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Prosentase Wajib Retribusi Daerah yang diadministrasikan *(Jlh yang diadministrasikan : Jlh Potensi Wajib Retribusi)***	**100**	**Prosentase**	**100.000.000**	
15	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	25.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
16	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	JumlahDataObjek,SubjekdanWajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	50.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
17	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	25.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**3**	**Dokumen**	**275.000.000,00**	
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	25.000.000,00	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tidak ada perubahan dengan rancangan awal
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	200.000.000,00	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun, Bimtek Arsip dinamis, bimtek Pengelolaan keuangan, Renstra, Pengelolaan Aset daerah,
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	50.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**Dokumen**	**735.000.000,00**	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25	Jenis	15.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.000.000,00	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000,00	Penambahan pagu Bahan Logistik Kantor di karena adanya peningkatan kebutuhan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	40.000.000,00	Penambahan Pagu untuk Peningkatan Kwalitas Cetakan Map berwarna , untuk Penggandaan SK PHL per triwulan dan Cetak Baliho Untuk Event
25	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	laporan	250.000.000,00	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2023, kebutuhan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi tidak mencukupi dengan adanya undangan rapat , rakor dsb nya yang di laksanakan di dalam dan dii luar provinsi , di tambah dengan jumlah ASN pelimpahan dari Opd perkim
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000,00	Untuk Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	100.000.000,00	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fiture update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium
1.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**			**455.790.000,00**	
29	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75	Unit	350.000.000,00	Masih Kurang nya Meja Kerja, Kursi serta Lemari Arsip yang layak untuk mencukupi Kebutuhan seluruh karyawan serta rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yng tidak sebanding di tambah dengan peralihan 33 ASN dari OPD perkim dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	105.790.000	Pengadaan AC, PC Unit, Printer, CCTV, laptop
1.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**708.150.569,00**	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.037.954	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk suplay listrik, Air ,Internet dan TV kabel di bangunan Gedung Perkim yang di alihkan ke DLHK
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	208.112.615	Penambahan 16 orang tenaga THL pelimpahan dari OPD perkim dan Belanja Pihak Ketiga untuk Cleaning Service
1.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**64,5**	**Persen**	**879.330.050,00**	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	224.330.050	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Pagu Kebutuhan Pagu anggaran untuk Biaya operasional sebanyak 5 unit
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	10.000.000	Untuk Pemelihraan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit
35	Pemeliharaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah unit yang dipelihara	30	Unit	20.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
36	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Unit	25.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer dan Genset

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	4	Unit	500.000.000	Pemintaan pagu untuk kebutuhan rehab gedung sekretariat dan ruang rapat dlhk
1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Produk Layanan Yang Terakreditasi**	**1**	**Produk**	**300.000.000**	
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	300.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**4**	**Dokumen**	**800.000.000,00**	
1.11	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Tersusunnya RPPLH**	**3**	**Dokumen**	**650.000.000,00**	
40	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200.000.000	Untuk Pengendalian RPPLH, DIKPLH dan IKLH 2025
41	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	Dokumen	150.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
42	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1	Dokumen	300.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.12	**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Terselenggaranya KLHS**	**1**	**Dokumen**	**150.000.000,00**	
43	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	150.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**	**200000**	**Pohon**	**4.882.611.000,00**	
1.13	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**4**	**Dok**	**2.725.000.000,00**	
44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Dokumen	400.000.000	
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	350.000.000	
46	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Kutai Kartanegara	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19	Lokasi	250.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
47	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	3	Unit	175.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
48	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Dokumen	1.550.000.000,00	Penambahan untuk Pemeliharaan alat AAS, Spektrofotometri, Aquadest dan kalibrasi alat serta pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter (pengadaan Mikroskop dan Furnace).
1.14	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1**	**Laporan**	**223.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

49	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	50.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
50	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	88.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
51	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	25	Titik	85.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
1.15	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1**	**Dokumen**	**1.934.611.000,00**	
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	760.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	20	Kegiatan	50.000.000,00	Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan
54	Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Luas daerah Penanaman dan Jumlah Bibit yang ditanam	5	Ha	604.146.000,00	Penambahan untuk pembelian Bibit,Ongkos Tanam,dan Pemeliharaan, Melaksanakan Rehabilitasi Terkait sanksi terhadap DLHK pada tahun 2023 yang belum dapat di selesaikan karena terkedala anggara yang tidak mencukupi, serta mengakomodir Usulan Musrenbang yang telah menjadi Prioritas
55	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	15	Kegiatan	75.000.000,00	Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan Penbahan pagu untuk koordinasi ke BWS, BPDAS, P3EKA, DLH Prov, Rakor
56	Pelaksanaan Restorasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	445.465.000,00	Pagu Penambahan di butuhkan untuk membersihkan Gulma di sungai mangkurawang Tenggarong karena akses masuk ke dalam sungai sudah tertutup oleh banyak nya gulma dan pohon-pohon yang tumbang, serta untuk mengkomodir Usulan Musrenbang Kecamatan yang telah menjadi prioritas
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20**	**Persen**	**9.198.506.000,00**	
1.16	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota**	**1**	**Dokumen**	**9.198.506.000,00**	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	**Tercapainya penanaman dan pemeliharan pengelolaan keanekaragaman hayati**	**50**	**Persen**		
57	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	250.000.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020
58	pengelolaan kebun raya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Ha	300.000.000,00	Akan melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kebun Raya, sisa pagu akan di alihkan Ke Sub Kegiatan lainnya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

59	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	15	Ha	7.898.506.000	Berdasarkan data yang dimiliki bahwa luas RTH Publik, Privat, Taman Bermain dan Hutan Kota termasuk RTH di Pemakaman di Kecamatan Tenggarong seluas 150,140 ha. Untuk Kecamatan Tenggarong Seberang, pengelolaan RTH hanya pada median jalan jalur 2 menuju ke Samarinda seluas 1,6 ha serta untuk Pemelihraan Taman yang baru di serahakan kepada DLHK di akhir tahun 2024 serta belum teranggarakan yaitu Taman K0ta Raja, Taman EXs Tanjung dan Landscave Diponegoro (TS Sekda).
60	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	30	Orang	100.000.000,00	Penentuan Lokasi di sesuaikan dengan kelompok ternak kelulut yang sudah mendapatkan bantuan di tahun2020- 2023, Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Peningkatan Kapasitas Peternak madu kelulut, Penambahan pagu di karenakan menyesuaikan dengan materi peningkatan kapasitas
61	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1	Unit	650.000.000,00	Penyesuaian Target capaian dari belanja pupuk, bibit dan sebagainya menjadi rencana pembangunan Gazebo dan Pos kemamanan
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara**	**4**	**Dokumen**	**475.000.000,00**	
1.17	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah pelaku usaha**	**50**	**Pelaku usaha**	**100.000.000,00**	
61	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Usaha	100.000.000	Bahwa Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan tidak hanya pada Permohonan Baru tetapi dilakukan Verifikasi pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang sudah Beroperasi di dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara
1.18	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3**	**50**	**Pelaku usaha**	**375.000.000,00**	
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	40	Dokumen	375.000.000,00	Kegiatan Koordinasi dengan Propinsi dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup) dalam Pengelolaan dan Kebijakan skala Propinsi dan Nasional

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**19,32**	**Persen**	**180.000.000,00**	
1.19	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan**	**20**	**Persen**	**180.000.000,00**	
63	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PNS yang dibentuk dandiangkat menjadi Fungsional PPLHD	1	Orang	30.000.000,00	Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
64	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	120	Badan Usaha	150.000.000,00	Target Menyesuaikan dengan pemutakhiran Perhitungan Target Ikk Lppd Tahun 2024
VII	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75**	**Persen**	**75.000.000,00**	
1.20	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75**	**Persen**	**40.000.000,00**	
65	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	Dokumen	40.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
1.21	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat**	**70**	**Persen**	**35.000.000,00**	
66	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	35.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
IX	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan**	**35**	**Lembaga**	**480.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.22	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**	**35**	**kali**	**480.000.000,00**	
67	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	24	Lembaga	80.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
68	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20	Dokumen	100.000.000,00	Perlunya insentif bagi sekolah yang berprestsi dalam melaksanakan program Gerakan Peduli dan Berbudaya(GPB) LH
69	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150	Orang	300.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi Sebelumnya
X	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama**	**5**	**Desa/Kelurahan**	**200.000.000,00**	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	**2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan**	**128**	**Penghargaan**		
1.23	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya**	**2**	**Jenis**	**200.000.000,00**	
70	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100	Entitas	200.000.000,00	Penambahan dialokasikan untuk membiaya insentif bagi desa/kelurahan yang mendapatkan predikat DESA/KELURAHAN IDAMAN dan tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK
XI	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani**	**97**	**Persen**	**280.000.000,00**	
1.24	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**	**50**	**Laporan**	**280.000.000,00**	
71	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang di tindaklanjuti/ditangani	15	Pengaduan	50.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

72	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	15	Sanksi	50.000.000,00	Meyesuaikan dengan Evaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya
73	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	180.000.000,00	Perubahan, Pemutakhiran Sub Kegiatan daria 2 sub kegiatan menjadi 1 Sub Kegiatan
XII	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun**	**1**	**Lokasi**	**171.906.000.000,00**	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	**2. Timbulan sampah**	**97.64**	**Persen**		
1.25	**Pengelolaan Sampah**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani**	**72**	**Persen**	**171.906.000.000,00**	
			2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	**12,73**	**Persen**		
			3. Persentase cakupan area pelayanan	**61,11**	**Persen**		
74	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	950.000.000,00	1. Kesesuaian Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan oleh Pihak Tenaga Ahli, Perbub Pengelolaan sampah dan Laporan Capaian Kebijakan Pengelolan Sampah, Penambahan 1 peraturan bupati
75	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	21	Ton	30.030.000.000	Pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya , pembangunan TPS3R belum ada di Tenggarong dan ini sifatnya wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten, serta mengakomodir Usulan Musrenbang yang telah menjadi SUPER PRIORITAS (TPS3R) di 5 Kecataman
76	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpeliharadengan baik	1252	Unit	6.000.000.000	1. Berdasarakan evaluasi tahun 2024 penambahan pagu terdapat penganggaran gaji PHL untuk pemenuhan 19 kecamatan masing2 10 orang per kecamatan, untuk pemenuhan Sapras 2. renc memindahlan anggaran pembangunan
77	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	150.000.000,00	Penambahan pagu untuk Melaksanakan event agen lingkungan dan memberikan penghargaan serta menentukan duta sampah, pembuatan dokumenter iklan layanan masyarakat
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dokumen	1.900.000.000,00	Penambahan lokasi Penyusunan Fsdan Dokumen DED, UKL-UPL pada 7 Kegiatan (Penyusunan FS dan DED TPST PDU samboja, Anggana,muara kaman, tenggarong, penyusunan dokumen UKL-UPL Amdal Kec tenggarong, DED Kec Tenggarong, UKL-UPL amdal TPA Bekotok)
79	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11411	Unit	102.326.000.000,00	Penambahan pagu untuk Penambahan peralatan kebersihan , pakaian PHL, landasan bak kontainer, tps 3 warna

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

80	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	25	Dokumen	150.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
81	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	41	Persentase	30.400.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
XIII	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Muara Kamam, Muara Siran**	**Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)**	**16,67**	**Persen**	**2.775.000.000,00**	
1.24	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Muara Kamam, Muara Siran**	**1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura**	**1**	**Dokumen**	**2.775.000.000,00**	
82	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	250.000.000,00	Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
83	Kerja Sama Penyelenggaraaan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	75.000.000,00	Menyesuaikan dengan Evaluasi Kegiatan Sebelumnya
84	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1	Desa	200.000.000,00	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan
85	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	25	Hektar	250.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
86	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	LuasKawasanTAHURAKabupaten/Kota yang diamankan	3261	Ha	1.500.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
87	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
						217.443.710.838,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelahaan usulan Program dan kegiatan masyarakat

Semakin kompleksnya permasalahan di bidang lingkungan hidup memerlukan berbagai masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan masyarakat ini diperoleh dari musyawarah rencana pembangunan kecamatan, dan forum PD yang dilakukan di Daerah.

HASIL VERIFIKASI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2026

No	Kamus usulan		Jumlah Usulan	Super Prioritas	Prioritas	Belum Prioritas	Ditolak	Di Kembalikan
1	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Kulu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Samboja Barat, Sebulu, Tabang, Tenggarong,	41	-	40	1	-	-
2	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Loa Janan, Muara Badak Muara Muntai, Muara Wis, Sanga-sanga, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	13	5	2	6	-	-
3	Penanaman Pohon/Penghijauan Untuk Pelindung Kampung	Kota Bangun Darat, Marang Kayu Muara Jawa, Muara Kaman Muara Muntai, Muara Wis, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	8	-	7	-	1	-
4	Pencacah Sampah Organik	Kota Bangun, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Kaman, Muara Muntai, Tenggarong	12	-	6	5	1	-
5	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Kembang Janggut, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman Muara Muntai, Samboja, Sanga-sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	32	-	12	19	1	-
6	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Janan , Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja Barat, Sanga-sanga, Sebulu, Tenggarong	37	-	8	14	15	-
7	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up),	Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Kulu, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Sebulu , Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	33	-	5	17	11	-
8	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	Kota Bangun, Marang Kayu, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	11	-	11			-
9	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Samboja, Tenggarong	12	-	7	4	1	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadaan Pohon Ulin Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	400 Batang Pohon	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
2.	Pengadaan Bibit Durian Kelompok Tani Maju Sejahtera	Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Tanaman	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
3.	Pengadaan Bibit Buah	Desa Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Buah	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
4.	Pengadaan Tanaman Jenis Buah dan Planter Bag Kelompok PKK RT 002 Desa Bukit Raya	RT 002 Desa Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Buah	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
5.	Pengadaan Madu Kelulut KUPS Mutiara Tanjung	Desa Muhuran. Taman KUPS Mutiara Tanjung, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
6.	Pengadaan Madu Kelulut Kelompok Masyarakat Untung Bersama	Jl. M. Siddiq RT. 017 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
7.	Pengadaan Madu Kelulut	LPM Desa Santan Tengah, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
8.	Pengadaan Madu Kelulut	RT 7 Dusun Wira III, Desa Santan, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
9.	Pengadaan TPS3R	Loa Sakoh, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
10.	Pengadaan TPS3R	SDN 017 Kota Bangun, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
11.	Pengadaan TPS3R	RT 24 Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
12.	Pengadaan TPS3R	Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
13.	Pengadaan TPS3R	Dusun Telaga Kencana, Desa Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
14.	Pengadaan Bibit Buah dan Buah Endemik serta Bibit Pohon Kayu	Desa Kota Bangun II, Kec. Kota Bangun	1872 Bibit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
15.	Pengadaan Bibit Buah dan Buah Endemik serta Bibit Pohon Kayu	Loa Sakoh, Kec. Marangkayu	1878 Bibit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Demikain usulan Musrenbang yang akan diakomodir Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kegiatan super prioritas dan prioritas melalui rapat forum lintas PD yang di laksanakan tanggal 11 Maret 2025 bersama PD Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kebijakan Daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun arah pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020- 2024, yaitu :

a. Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum;
b. Pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri;
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hiduo dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulanan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut;
d. Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mmendukung Program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata); dan
e. Penguatan pendidikan vokasional dan penguatan Program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Tujuan dan peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai berikut :

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Memanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan tidak bertolak belakang dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023	
Tujuan : Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan	
Arah Kebijakan	**Strategi**
1. Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;
	b. Perwujudan polaruang yang mampu mendukung pengembangan sector ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
	c. Pengembangan kawasan strategis industry turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing dan investasi
	d. Membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting
2. Pengembangan sector unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sector pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energy wilayah dan nasional	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
	b. Perwujudan pola ruang yang mampumendukung pengembangan komoditas unggulan sector pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
	c. Pengembangan kawasan strategis *agroindustry* sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
	d. Pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan *energy* terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan *energy* wilayah dan nasional
3. Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau	a. Penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
	b. Penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan
	c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau
4. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi	a. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
	b. Pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
	c. Pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
	d. Pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI
5. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi,investasi, social dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan	a. Pengendalian pembangunan melalui upaya tindak anantisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan;
	b. Peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
	c. Penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakterstik, kesesuian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan social budaya; dan
	d. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secaras elektif.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu " Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Pada misi ke 5 yaitu : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup".

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51
2		Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	497.371
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	52.05
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	92,73
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	75,17

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2026 akan melaksanakan 12 (Dua belas) Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 87 (delapan puluh empat) sub kegiatan, dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini kegiatan dilakukan dalam dua urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Adapun Program dan kegiatan yang dimaksud

Beberapa usulan penambahan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Masih akan melajutkan Progam prioritas Idaman yang Di amanahkan pada 4 (Empat) Program, yaitu Program pengelolaan sampah kegiatan pengelolaan sampah dan Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan nama Program Kutai Kartanegara perduli lingkungan dan Program dunia usaha ramah lingkungan, Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat pelaksanaan dan Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dengan nama Program desa ramah lingkungan dan program dunia usaha ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2026 pelaksanaan kegiatan tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Keseluruhan pelaksanaan Program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rencana Program kegiatan, lokasi, pagu anggaran kebutuhan dan sumber pendanaan sebagaimana berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Program Penunjang Dedikasi Kukar IDAMAN 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU SUB KEGIATAN	PROGRAM DEDIKASI
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	15 Kegiatan	50.000.000,00	Desa Ramah Lingkungan
			Pelaksanaan Rehabilitasi	5 Ha	604.146.000,00	
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	1 Dokumen	100.000.000,00	Dunia Usaha Ramah Lingkungan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	120 Badan Usaha	150.000.000,00	Dunia Usaha Ramah Lingkungan
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 entitas	200.000.000,00	Desa Ramah Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kelompok	150.000.000,00	Kukar Peduli Lingkungan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2 Dokumen	3.400.000.000,00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	11411 Unit	102.326.000.000,00	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	950.000.000,00	
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	1252 Unit	6.000.000.000	
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	21 Ton	30.030.000.000,00	
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	25 Dokumen	150.000.000,00	
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	41 Persentase	30.400.000.000,00	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun perumusan Program, kegiatan dan subkegiatan Rencana Kerja tahun 2026 Program, secara besar telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, akan tetapi dari segi pagu indikatif tidak sesuai dan mengalami pengurangan pagu secara signifikan yaitu Analisis Kebutuhan Anggaran pada rancangan Rencana Kerja sebesar Rp346.372.234.783,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), setelah RPKD pagu anggaran menjadi Rp214.593.710.838,00 (dua ratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp131.778.523.945,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau 21,45% (dua puluh satu koma empat puluh lima persen), adalah Program pengelolaan sampah yang juga pengampu Program prioritas Kukar Idaman dengan Program Kukar Peduli Lingkungan, akan tetapi untuk Program kegiatan dan sub kegiatan yang lain juga mengalami pengurangan dan penambahan yang tidak signifikan.

Beberapa subkegiatan juga mengalami penambahan baik di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta urusan kehutanan bidang tata lingkungan, semua subkegiatan tersebut telah disesuaikan dengan peraturan yang ada, pelaksanaan kegiatan tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Keseluruhan pelaksanaan Program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan bidang sekretariat baik di bidang Program dan di umum tatalaksana dan kepegawaian, mengalami peningkatan pagu dan penambahan subkegiatan baru yaitu *mandatory* pada tahun 2025, untuk mengoptimalkan kegaiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah *output* pekerjaan berkaitan dengan upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam Program penunjang urusan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintahan daerah kabupaten /kota.

Terhadap hasil Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat beberapa evaluasi yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 2025 antara lain :

- Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan penambahan sub kegiatan baru. Pada Rencana Kerja 2025, terdapat beberapa subkegiatan baru yang sebelumnya pada rancangan awal belum dianggarkan antara lain :
  a. Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah, pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  b. pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  c. Pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD, Pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sub kegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  e. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, pagu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD, pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  g. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah PD, pagu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah PD, pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Pemanfaatan barang milik daerah PD, pagu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah, pagu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subkegiatan *mandatory* langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pagu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subkegiatan mandatory langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

l. Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi, pemutakhiran yang sebelumnya subkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

m. Pelaksanaan rehabilitasi pemutakhiran yang sebelum nya subkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, pagu Rp604.146.000,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh enam ribu), sudah termasuk anggaran aspirasi masyarakat;

n. Koordinasi dan sinkronisasi restorasi, pemutakhiran dari sub koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi, pagu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

o. Pelaksanaan restorasi , pemutakhiran dari sub koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi, pagu Rp445.465.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk termasuk anggaran aspirasi masyarakat;

p. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keanekaragaman hayati, akan di laksanakan kembali di tahun 2025 dengan pagu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan akan menyusun dokumen rencana pengelolaan kehati menjelaskan tentang pengelolaan kehati di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen profil kehati di tahun 2020;

q. Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup, dengan pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan;

r. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pagu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

s. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melanjutkan dari tahun sebelumnya;

t. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota, pagu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

u. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah, pagu Rp30.400.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratsu juta rupiah);

v. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di tahura Kabupaten/Kota, Pagu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subkegiatan pemutakhiran dengan tujuan akan agar dapat mengitung indeks kehati di Kabupaten Kutai Kartanegara;

w. Perencanaan pengelolaan tahura, pagu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan penetapan dan penataan batas luar tahura pada tahun 2024 maka akan dilakukan penyusunan peta blok tahura yang membagi tahura menjadi beberapa blok pengelolaan dan pembuatan peta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penataan wilayah kerja pengelolaan tahura.

x. Pengamanan kawasan tahura kabupaten/kota , pagu Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), penyusunan dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat tentang Program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*, sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, partisipasi masyarakat dan pokok- pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Lingkugann Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan lebih optimal.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pada tahun 2026, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung indikator kinerja utama sesuai dengan RPJMD, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan. Selain itu pemenuhan target indikator kinerja kunci (IKK) yang melekat pada masing-masing Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2026 sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Terhadap Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, asas efektifitas serta asas

akuntabilitas dan juga tetap berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan terget sasaran yang sudah ditetapkan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Renstra PD dan sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan Program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2026 dan perencanaan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026.

Sedangakan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB V: PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam Program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh PD yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam proses pencapaiannya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun n-2 dan capaian Renstra tahun 2024 sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Serta Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79	1,300	410	1,440	351%	79	2,819	3568%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	18	14	30	214%	30	78	260%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	3	9	300%	8	23	288%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	5	4	80%	10	24	240%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	3	4	133%	4	10	250%
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3	-	1	1	100%	3	4	133%
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah	Data	4	-	1	10	1000%	4	14	350%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah									
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	-	1	2	200%	1	3	300%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Orang Bulan	281	960	95	1,023	1077%	284	2,267	807%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	217	935	81	1,008	1244%	220	2,163	997%
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	12	-	-	0%	50	62	124%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	2	200%	1	4	400%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	-	1	1	100%	1	2	200%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	-	1	5	500%	24	29	967%
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	-	-	-	0%	1	1	50%
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	0%	3	3	0%
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	-	1	5	500%	20	25	2500%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	59	17	96	565%	147	302	0%
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	-	-	-	0%	15	15	0%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	4	-	-	0%	4	8	0%
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	-	-	-	0%	4	4	0%
1.05.01.2.05.0004	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	-	-	-	0%	4	4	0%
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5	10	6	60%	10	21	0%
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	0	50	-	-	0%	100	150	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		Peraturan Perundang-Undangan									
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	7	90	1286%	10	100	0%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	82	142	142	142	100%	113	397	484%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	100%	10	30	300%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	20	20	20	100%	15	55	0%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	6	6	6	100%	2	14	700%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10	10	10	100%	2	22	1100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12	12	12	100%	1	25	2500%
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	6	6	6	100%	10	22	220%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	-	-	-	0%	10	10	200%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	70	70	70	100%	50	190	422%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	3	3	3	100%	3	9	300%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	5	5	5	100%	10	20	500%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	178	10	10	10	100%	177	197	111%
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	150	-	-	-	0%	5	5	3%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	-	-	-	0%	6	6	120%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	5	5	5	100%	10	20	333%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	Unit	5	3	3	3	100%	2	8	160%
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	-	-	-	0%	150	150	1500%
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	Unit	0	-	-	-	0%	1	1	0%
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	2	2	100%	3	7	350%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	Laporan	60	24	24	24	100%	61	109	182%
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	-	-	0%	1	1	0%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100%	48	72	150%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	91	87	107	110	103%	610	807	887%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	20	23	115%	5	28	0%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau llapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40	55	55	55	100%	45	155	388%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	30	30	30	100%	60	120	240%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara / direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	100%	0	4	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	0	-	-	-	0%	0	-	0%
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	1	-	-	-	0%	0	-	0%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi (m2)	Meter	0	-	-	-	0%	500	500	0%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persen	100	7,235	746	819	110%	100	8,154	8154%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,846	704	61	140	230%	412	1,256	18%
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	10	26	-	-	0%	1	27	270%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	60	60	60	100%	60	180	300%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	80	12	1	80	8000%	70	162	203%
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	-	-	0%	10	10	500%
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	-	-	-	0%	1	1	100%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	88	424	-	-	0%	22	446	507%
1.05.04.2.01.0007	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiiki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau	Desa/ Kelurahan	6	-	-	-	0%	12	12	200%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahunnya), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa / kelurahan setiap tahunnya									
1.05.04.2.01.0007	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah Laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	20	120	-	-	0%	22	142	710%
1.05.04.2.01.0007	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penangguangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (RISPKP)	Dokumen	1	-	-	-	0%	5	5	500%
1.05.04.2.01.0007	Pemutakhiran Rencana Induk Sistme Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	-	-	-	-	0%	1	1	0%
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	0%	3	3	0%
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil kegiatan jabatan Fungsional Pemadam Kebakarn	Dokumen	-	-	-	-	0%	5	5	0%
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	6373	55	-	-	0%	70	125	2%
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah	Dokumen	5	7	-	-	0%	30	37	740%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran									
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap kebakaran Rumah Tangga	Orang	200	-	-	-	0%	100	100	50%
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Dokumen	58	-	20	10	50%	22	32	55%
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	10	-	10	5	50%	10	15	150%
1.05.04.2.02.0001	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	48	-	10	5	50%	12	17	35%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dokumen	1	-	-	-	0%	1	1	100%
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	-	-	-	0%	1	1	100%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah dokumen Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	7177	5,604	310	315	102%	5815	11,734	163%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		dalam pencegahan kebakaran									
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	7100	5,507	300	300	100%	5800	11,607	163%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahana Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	45	69	5	5	100%	5	79	176%
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	32	28	5	10	200%	10	48	150%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Laporan	4078	927	355	354	100%	354	1,635	40%
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	300	12	350	350	100%	300	662	221%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
						Target Renja-PD Tahun -2025	Realisasi Renja-PD Tahun -2025	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2026	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1	-	-	-	0%	1	1	100%
1.05.04.2.05.0003	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal	Laporan	210	840	-	-	0%	3	843	401%
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	3567	75	5	4	80%	50	129	4%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2024 berdasarkan sasaran RPJMD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-11		-12	-13	-14
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			0	0	0	71	0	0	0	79	80	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	9	0	0	0	30	30	
3	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0	48	0	0	0	284	284	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	24	8	
5	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			0	0	0	175	0	0	0	147	147	
6	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	14647	0	0	0	113	113	
7	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	106	0	0	0	191	174	
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			0	0	0	1114	0	0	0	61	60	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-11		-12	-13	-14
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
9	Jumlah Barang Milik Daerah			0	0	0	120	0	0	0	611	112	
10	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SPM		0	0	0	100	0	0	0	100	100	
11	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM		0	0	0	164	0	0	0	429	5127	
12	Jumlah dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	SPM		0	0	0	20	0	0	0	22	58	
13	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	SPM		0	0	0	1	0	0	0	1	1	
14	Jumlah dokumen Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	SPM		0	0	0	92	0	0	0	5830	7180	
15	Jumlah laporan Penyelenggaraan	SPM		0	0	0	167	0	0	0	354	2816	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-11		-12	-13	-14
	Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana, hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hendaknya dapat bekerja secara profesional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar pastisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka Pelayanan dasar bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebkaran dan Penyelamatan. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam operasional di Daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

1. Belum terpenuhinya tingkat waktu tanggap *(Respon Time Rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).
2. Belum maksimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
4. Belum maksimalnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu penyesuaian terhadap Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan pagu anggaran PD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	68,281,977,233			Nilai	79	40,363,016,166
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	755,000,000			Dokumen	28	600,000,000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	220,000,000	.		Dokumen	2	150,000,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	150,000,000	.		Laporan	2	50,000,000.00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	120,000,000	.		Laporan	1	100,000,000.00
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3	120,000,000	.		Dokumen	3	50,000,000.00
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Data	4	70,000,000	.		Data	19	200,000,000.00
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	75,000,000	.		Berita Acara	1	50,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Orang Bulan	284	13,822,284,072			Orang Bulan	136	27,760,051,630
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	220	13,032,284,072	.		Orang/ Bulan	72	27,465,051,630.00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	120,000,000	.		Dokumen	50	50,000,000.00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50,000,000	.		Laporan	1	50,000,000.00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	580,000,000	.		Laporan	12	180,000,000.00
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	40,000,000	.		Dokumen	1	15,000,000.00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	24	95,000,000			Dokumen	24	85,000,000
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30,000,000	.		Dokumen	1	30,000,000
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	30,000,000	.		Dokumen	3	30,000,000
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	20	35,000,000	.		Laporan	20	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	147	1,220,000,000			Dokumen	38	210,000,000
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	15	300,000,000	.		Unit	10	40,000,000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	550,000,000	.		Paket	-	-
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	50,000,000	.		Dokumen	4	25,000,000
1.05.01.2.05.0004	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	50,000,000	.		Dokumen	4	20,000,000
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100,000,000	.		Orang	10	100,000,000
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	70,000,000	.		Orang	-	-
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000	.		Orang	10	25,000,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	113	2,005,000,000			Layanan	86	600,000,000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	20,000,000	.		Paket	6	10,000,000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	750,000,000	.		Paket	1	200,000,000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	55,000,000	.		Paket	2	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	55,000,000	.		Paket	2	55,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	.		Paket	1	50,000,000
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	350,000,000	.		Paket	3	50,000,000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	100,000,000	.		Laporan	10	30,000,000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	350,000,000	.		Laporan	50	100,000,000
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	125,000,000	.		Dokumen	1	30,000,000
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	150,000,000	.		Dokumen	10	50,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	191	41,839,693,161			Unit	174	2,520,000,000
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	2,150,000,000	.		Unit	-	-
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	2,399,000,000	.		Unit	2	830,000,000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	.		Unit	5	10,000,000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	Unit	2	10,611,038,611	.		Unit	-	-
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	150	1,500,000,000	APBD		Unit	1	500,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan								
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	Unit	1	100,000,000	.		Unit	2	180,000,000
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	3,000,000,000	.		Unit	1	1,000,000,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	Laporan	61	6,225,000,000			Laporan	61	7,167,964,536
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	APBD		Laporan	1	5,000,000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	720,000,000	APBD		Laporan	48	720,000,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5,500,000,000	APBD		Laporan	12	6,442,964,536
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	611	2,320,000,000			Unit	109	1,420,000,000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	200,000,000	APBD		Unit	5	200,000,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau llapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	45	1,200,000,000	APBD		Unit	40	500,000,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	60,000,000	APBD		Unit	60	60,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara / direhabilitasi	Unit	-	-	APBD		Unit	4	660,000,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	-	-	APBD		Unit	-	-
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	-	-	APBD		Unit	-	-
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi (m2)	Meter	500	700,000,000	APBD		Meter	-	-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Kutai Kartanegara		Persen	100	10,774,732,343			Persen	100	6,018,500,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	429	7,746,727,343			Dokumen	389	4,943,500,000
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	55,000,000	SPM		Dokumen	1	30,000,000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	400,000,000	SPM		Laporan	60	400,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	70	300,000,000	SPM		Dokumen	70	300,000,000
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	200,000,000	SPM		Dokumen	10	50,000,000
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	75,000,000	SPM		Dokumen	1	30,000,000
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	22	302,000,000	SPM		Orang	79	675,000,000
1.05.04.2.01.0007	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiiki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahunnya), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa / kelurahan setiap tahunnya	Desa/ Kelurahan	12	75,000,000	SPM		Desa/ Kelurahan	6	75,000,000
1.05.04.2.01.0007	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam	Laporan	22	235,000,000	SPM		Laporan	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran		kebakaran dan analis kebakaran								
1.05.04.2.01.0007	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penangguangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (RISPKP)	Dokumen	5	250,000,000	SPM		Dokumen	1	150,000,000
1.05.04.2.01.0007	Pemutakhiran Rencana Induk Sistme Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1	100,000,000	SPM		Dokumen	-	-
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	3	22,500,000	SPM		Dokumen	3	10,000,000
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil kegiatan jabatan Fungsional Pemadam Kebakarn	Dokumen	5	37,500,000	SPM		Dokumen	5	37,500,000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	70	1,000,000,000	SPM		Unit	23	3,036,000,000
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	30	350,000,000	SPM		Dokumen	30	50,000,000
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap kebakaran Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap kebakaran Rumah Tangga	Orang	100	100,000,000	SPM		Orang	100	100,000,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Dokumen	22	300,000,000			Dokumen	22	145,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	10	150,000,000	APBD		Dokumen	10	85,000,000
1.05.04.2.02.0001	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	150,000,000	APBD		Dokumen	12	60,000,000
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dokumen	1	100,000,000			Dokumen	1	50,000,000
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	100,000,000	APBD		Dokumen	1	50,000,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Dokumen	5830	1,470,005,000			Dokumen	5821	450,000,000
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	5800	500,000,000	SPM		Orang	5800	200,000,000
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahana Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	5	100,000,000	SPM		Desa/ Kelurahan	20	200,000,000
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	Dokumen	10	100,000,000	SPM		Dokumen	1	50,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Tersedia Dukungan Sapras Damkar								
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Laporan	354	1,158,000,000			Laporan	791	430,000,000
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	300	250,000,000	SPM		Laporan	300	150,000,000
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1	50,000,000	SPM		Dokumen	1	5,000,000
1.05.04.2.05.0003	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal	Laporan	3	258,000,000	SPM		Laporan	3	75,000,000
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	50	600,000,000	SPM		Unit	487	200,000,000
Total						79,056,709,576					46,381,516,166

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat untuk tahun 2026 hasil dari Musrenbang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyepakati usulan Kegiatan dari Kecamatan yaitu

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)						
1	Ardiansyah Kembang Janggut	ID SIPD: 2248612 Pelatihan relawan pemadam kebakaran (Redkar) melibatkan pembekalan peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merespons dan menanggulangi kebakaran Pelatihan ini mendukung relawan pemadam kebakaran dalam menjadi sumber daya yang berharga dalam komunitas, siap untuk bertindak dalam situasi darurat kebakaran. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
2	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373586 Perlu nya peningkatan kapasitas/pelatihan tim Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Liang Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Menambah pengetahuan tim Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Liang Ulu	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
3	Yusuf Kota Bangun Seberang	ID SIPD: 2372501 Belum adanya Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Kota Bangun Seberang #OPD: Dinas	Jln. Awang Long Rt. 006 Desa Kota Bangun Seberang, Kab. Kutai	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kartanegara	• Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Menambah pengetahuan tentang penanganan Bencana tim relawan		Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
4	M Arsyad Loa Duri Ulu	ID SIPD: 2271594 masih banyak relawan pemadam yang perlu penyegaran dalam membantu masyarakat #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pelatihan REDKAR	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
5	MURSALIN Santan Ilir	ID SIPD: 2264682 kurangnya pemgetahuan tentang penganggulamgan kebakaran di desa masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman atau keterampilan yang memadai tentang cara menangani kebakaran dengan dengan benar sebelu tugas pemadam kebakaran datang pelatihan ini penting untuk memberikan keterampilan dasar seperti cara menggunakan alat pemadam apa (APAR) atau cara evakuasi #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	desa santan ilir , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
6	JUSMAN Kersik	ID SIPD: 2260938 Minimnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merespon dan menanggulangi kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
7	DENY MARTADINATA Benua Puhun	ID SIPD: 2286711 Pelatihan Warga dan Pemerintah Desa Serta Lembaga Desa dalam Menghadapi Bencana Kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Benua Puhun Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Diusulkan	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
8	ERIK ARDIANTO Lebaho Ulaq	ID SIPD: 2279410 peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran desa #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	desa lebaho ulaq, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				Kabupaten Keterangan: Upload Proposal Permohonan dan SK Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)		diupayakan untuk pemenuhan anggaran
9	JUAIDI Sebemban	ID SIPD: 2209038 Belum terlaksananya Kegitan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Sebemban #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Relawan Peduli Api Desa	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
10	MISPAN, S. Sos., M. Si Sanga-Sanga Muara	ID SIPD: 2201967 Perlunya pelatihan relawan pemadam #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	sangasanga muara, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya pelatihan relawan pemadam	1	Belum Prioritas Catatan : Akan dilaksanakan di tahun 2025
11	MUHAMAD SUFIAN, S.Sos Senoni	ID SIPD: 2293617 perlu Pelatihan Lagi Sehingga Menambah Wawasan Bagi Teman-Teman Damakar #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	jl.Ansyar RT 13 Dusun Rambutan Desa Senoni, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
12	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190458 Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat. Keahlian relawan dalam menangani situasi darurat sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko kebakaran dan memastikan keselamatan warga. Namun, dalam pelaksanaannya, pelatihan REDKAR masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	JALAN AHMAD YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU KODE POS 75552, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
13	ZULHAIDIR Sebulu Ulu	ID SIPD: 2302115 Pelatihan Pemadam kebakaran bagi generasi muda Desa Sebulu Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sebulu ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	3	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
						pemenuhan anggaran
14	ABDUL KHAIR Melayu	ID SIPD: 2196246 PERLUNYA PENINGKATAN RESPONSIF BALAKARCANA KELURAHAN MELAYU DALAM MENGHADAPI MUSIBAH KEBAKARAN #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PELATIHAN REDKAR KELURAHAN MELAYU KACAMATAN TENGGARONG (BALAKARCANA KELURAHAN MELAYU), Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
15	SOPIAN Teluk Dalam	ID SIPD: 2178416 BELUM ADA NYA PENINGKATAN SKILL REDKAR AKAN MENGAKIBATKAN KEBINGUNAN SEMISALNYA ADA KEJADIAN KEBAKARAN #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DESA TELUK DALAM, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Lanjut	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
Penyediaan Hidran Di Kawasan Padat Penduduk						
1	Sis Budinyoto Loa Sakoh	ID SIPD: 2219120 ketika terjadi kebakaran kesulitan dalam mengambil air sehingga perlu dibangun atau disediakan hidran setiap RT #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Loa Sakoh RT 01-04, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Antisipasi kekurangan air di pemukiman pada saat kebakaran	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
2	CAWAL, SE Kelekat	ID SIPD: 2307637 Penyediaan Hidran di Desa Kelekat Yang Termasuk Dalam Kawasan Desa Padat Penduduk #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kelekat.Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Titik sumber air dalam penanganan bencana Kebakaran	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
3	Bahruni Kahala Ilir	ID SIPD: 2262944 jauhnya akses sungai untuk antisipasi apabila terjadinya kebakaran maka diperlukannya hidran untuk memudahkan mendapatkan air #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jalan Inpres RT.01 - RT08 Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: penyediaan hidran juga akan mempermudah tugas petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api, sehingga dapat mencegah penyebaran api yang lebih luas.	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
4	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2151160 kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran	Desa Kota Bangun Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		#OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran		Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
5	Yusuf Kota Bangun Seberang	ID SIPD: 2013640 SAAT TERJADI BENCANA KEBAKARAN SEHINGGA MUDAH MEMADAMKAN API #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	JL.PATEH KOTA RT.014, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran	2	Prioritas Catatan : Lebih efektif jika menggunakan mesin portable
6	Rodiani Liang	ID SIPD: 2334193 Memudahkan ketika terjadi kebakaran di kawasan penduduk #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Awang Long RT. 001 s/d RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Memudahkan ketika terjadi kebakaran di kawasan penduduk	3	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
7	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373568 Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10 Desa Liang Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Ulin RT. 09 , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10 Desa Liang Ulu	4	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
8	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373564 Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06 Desa Liang Ulu,. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Ulin RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06 Desa Liang Ulu	5	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
9	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373558 Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 01 dengan RT. 02 Desa Liang Ulu,. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya hidran di kawasan padat penduduk terutama di antara RT. 01 dengan RT. 02 Desa Liang	6	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				Ulu		
10	M Arsyad Loa Duri Ulu	ID SIPD: 2291859 belum ada #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pengadaan hidran	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
11	Sukirno Loh Sumber	ID SIPD: 2337695 Seringnya Terjadi Musibah Kebakaran diKawasan Padat Penduduk #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jalan Mulyo Pranoto RT 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu pembangunan hydrant	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
12	RISDIANTO Muara Kaman Ilir	ID SIPD: 2317049 Belum ada hidran di Desa Muara Kaman Ilir sebagai antisipasi kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Upload Proposal dan SK Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
13	Mawardi Pulau Harapan	ID SIPD: 2132359 Permohonan Pengadaan Pembangunan Hidran Desa #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	jln. Pangeran Hidayatullah , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, desa Pulau Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penyediaan hidran di kawasan padat penduduk di Desa Pulau Harapan sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan kebakaran, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.	1	Super Prioritas Catatan : Diupayakan untuk dialokasikan anggarannya
14	EDI SURIYONO Lebak Mantan	ID SIPD: 2287271 BELUM ADANYA HIDRAN UNTUK PENUNJANG APABILA TERJADI KEBAKARAN #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DUSUN TANAH HARAPAN DAN DUSUN MEKAR SARI, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Sarana Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1	Prioritas Catatan : Disarankan pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran berupa Peralatan Pemadam Kebakaran
15	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190481 SERING TERJADI KEAJDIAN KEBAKARAN DENGAN KONDISI KEKURANGAN SUMBER	JALAN MELATI RT 12 SEBULU ILIR, Kab. Kutai	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada	1	Belum Prioritas Catatan : Pada kecamatan sebulu sudah terdapat 5 unit

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		AIR UNTUK PEMADAMAN #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kartanegara	• Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat		mobil pemadam kebakaran
16	HUSNIYANSYA H, SE Tanjung Batu	ID SIPD: 2300113 Kurangnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	1	Belum Prioritas Catatan : Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bukan merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm)						
1	CAWAL, SE Kelekat	ID SIPD: 2307822 Belum adanya Peralatan Perlengkapan Pemadam yang memadai sehingga di butuhkan peralatan Pemadam Api untuk Kelompok MPA " Kelompok Maram Apui Kelekat" #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kelekat,Kab,. Kutai Kartanegara, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Upaya penanggulang bahaya kebakaran di kawasan pemukiman penduduk	1	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
2	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2109110 belum memadai nya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah RT. 004 Desa Kota Bangun Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Mulawarman II RT. 004 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	1	Prioritas Catatan : Desa Kota Bangun Ulu masih bisa dijangkau Respon Timenya oleh Unit di Pos Sektor Kota Bangun
3	Suhaimi Sangkuliman	ID SIPD: 2193943 Belum Terpenuhinya Peralatan Pemadam Kebakaran Bagi Relawan di Desa Sangkuliman #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Sangkuliman , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
4	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2137310 Minimya sarana prasarana pemadam kebakaran didesa #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Di RT 01 -14, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang	3	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan		peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
5	AKHMAD NUR Muhuran	ID SIPD: 2211463 Kami Memiliki kelompok Masyarakat Peduli Api, namun dengan perlengkapan yang sangat terbatas #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	MPA Desa Muhuran, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	4	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
6	Rodiani Liang	ID SIPD: 2302134 seringnya terjadi kebakaran di kawasan pemukiman dan lahan kosong atau hutan #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Panglima Suta Kanan RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	5	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
7	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2109158 belum memadai nya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah RT. 005 Desa Kota Bangun Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Mulawarman II RT. 005 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	6	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu per Desa/Keluraha n, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
8	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2108725 belum memadai nya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah RT. 017 Desa Kota Bangun Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. M. Siddiq RT. 017 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran dan untuk kelangkapan tim relawan	7	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu per Desa/Keluraha n, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
9	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2108800 belum memadai nya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah RT. 015 Desa Kota Bangun Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. H.M Aini H RT 015 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD	8	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu per Desa/Keluraha

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan		n, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
10	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2108850 belum memadai nya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah RT. 016 Desa Kota Bangun Ulu #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. H.M Aini H RT. 016 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penunjang penyelamatan pertama saat terjadi bencana kebakaran dan lengkapi dokumen persyaratan pendukung usulan	9	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu per Desa/Keluraha n, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
11	Yusuf Kota Bangun Seberang	ID SIPD: 2372562 Peralatan pemadam kebakaran belum lengkap #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jln. Awang Long Rt. 006 Desa Kota Bangun Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Peralatan pemadam kebakaran belum lengkap	10	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
12	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373609 Perlunya Sapras pemadam kebakaran menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Sapras pemadam kebakaran menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran.	11	Prioritas Catatan : Desa Liang Ulu masih bisa dijangkau Respon Timenya (15 Menit) oleh Unit di Pos Sektor Kota Bangun
13	LILIK HENDRAWAN T O Kota Bangun III	ID SIPD: 2269328 Pengadaan Unit Mobil Pemadam Kebakaran Desa Kota Bangun III #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: dikarenakan merupakan daerah padat penduduknya namun belum memiliki mobil pemadam	1	Prioritas Catatan : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Gedung, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Personil)
14	SAHARUDDIN Kota Bangun I	ID SIPD: 2274457 DESA KOTA BANGUN I BELUM MEMILIKI ALAT - ALAT PEMADAM KEBAKARAN SAMA SEKALI #OPD: Dinas Pemadam	DESA KOTABANGU N I, KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT, Kab.	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD	2	Prioritas Catatan : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		Kebakaran dan Penyelamatan	Kutai Kartanegara	Kabupaten Keterangan: Dipelukan pelatihan dan sarana pemadaman		(Gedung, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Personil)
15	H. Fakhri Arsyad Loa Duri Ilir	ID SIPD: 2292838 TANGGAP DARURAT BENCANA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RT 24, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	3	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
16	JUSMAN Kersik	ID SIPD: 2260953 Relawan Pemadam Kebakaran belum memiliki sarana dan prasarana penunjang #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: belum memiliki peralatan pemadam kebakaran	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
17	Ruslan Efendi Muara Badak Ulu	ID SIPD: 2238985 Pengadaan Mesin Portable Damkar untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran kr daerah pemukiman tdg bisa dilewati mobil (Jembatan Kayu) #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kp. Jawi-jawi RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: P	1	Super Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
18	DRS.AHMAD YANI RAHIM Dondang	ID SIPD: 2317417 sebagai bukti kepedulian masyarakat untuk memadamkan api apa bila ada kebakaran Pembangunan Posko Balakarcana Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RT. 13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	1	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan dukungan pos pemadam tingkat desa/kelurahan
19	Drs.H.Hasbih, M M Muara Jawa Ulu	ID SIPD: 2283573 Pengadaan Peralatan Relawan BPDP #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Ir. Sokearno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	2	Belum Prioritas Catatan : Usulan dapat disampaikan kepada BPBD
20	RIYANTO Cipari Makmur	ID SIPD: 2296857 Belum tersedia nya Sarana dan Prasarana	RT. 003 Dusun Cipari, Kab.	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada	1	Super Prioritas Catatan : Sangat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		yang memadai #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kutai Kartanegara	(Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Upload Proposal permohonan		mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
21	ERIK ARDIANTO Lebaho Ulaq	ID SIPD: 2277692 Kurangnya alat penunjang pemadam kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	desa lebaho ulaq, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Upload Proposal Permohonan dan SK Relawan Kebakaran (REDKAR)	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran serta adanya Mobil Pemadam Kebakaran
22	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 2032202 Tidak Adanya Pemadam Kebakaran Air (Speed boot) #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Desa Muara Aloh membutuhkan sarana prasarana pemadam kebakaran untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kebakaran.	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
23	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2297478 pembangunan Pos Induk Pemadam Kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Dewi Sartika RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran di Jl. Dewi Sartika RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi kebakaran, melindungi masyarakat dan aset, serta mendukung pembangunan Pos Induk Pemadam Kebakaran yang efektif dan efisien.	2	Super Prioritas Catatan : Perlunya pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Gedung, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Personil)
24	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2295981 Lingkungan Pemukiman kekurangan sumber Air untuk kegiatan waspada api maka perlunya Pembangunan Jaringan Hidran Dikawasan Pemukiman #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Muara Leka Dusun Leka Induk, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran di Desa Muara Leka, Kab. Kutai Kartanegara sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan	3	Belum Prioritas Catatan : Sudah terdapat Pos Sektor Pemadam kebakaran di Desa Muara Leka

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. Kekurangan sumber air untuk kegiatan pemadam kebakaran merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian. Pembangunan jaringan hidran di kawasan pemukiman dapat membantu meningkatkan kemampuan pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran seperti mesin pompa, selang, nozzle, dan peralatan lainnya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani kebakaran.		
25	MASRUM, SP Perian	ID SIPD: 2365159 Belum ada nya kendaraan pemadam kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Perian RT 005, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: "Masyarakat Desa Perian memerlukan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, karena belum adanya fasilitas pemadam kebakaran yang memadai di Desa Perian."	4	Prioritas Catatan : Disarankan untuk pemenuhan peralatan pemadam kebakaran yang dikelola oleh Relawan Kebakaran (Redkar)
26	MUHDIDI ASWANDI Muara Wis	ID SIPD: 2172783 Masih Kurangnya Perlengkapan Antisipasi Pemadam Kebakaran Di Desa Muara Wis #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jln. Patin RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlengkapan Pemadam Kebakaran Desa	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
27	JUAIDI Sebemban	ID SIPD: 2319990 Belum Terpenuhinya Peralatan Pemadam Kebakaran Relawan Desa Sebemban. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlengkapan Pemadam Kebakaran Desa	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
28	Yudiansyah,S. So s Kampung Lama	ID SIPD: 2288592 Area Parkir Kantor Pemadam Sektor Samboja yang masih	Jl.Raya Balikpapan Handil II RT 005	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan)	1	Prioritas Catatan : Kantor Pos Sektor Samboja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
		belum memenuhi standartd Pembangunan dan Peningkatan Area Parkir Pemadan Kebakaran dan Penyelamat Sektor Kecamatan Samboja #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kelurahan Kampung Lama, Kab. Kutai Kartanegara	• Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Hasil Musrenbang		bukan merupakan aset dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
29	BADRIANSYAH, S. Sos Jawa	ID SIPD: 2097438 Perlu selang pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bencana kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kel. Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu selang pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bencana kebakaran	1	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
30	MISPAN, S. Sos., M. Si Sanga-Sanga Muara	ID SIPD: 2201997 Perlunya pengadaan alat pemadam #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	sangasanga muara, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya pengadaan alat pemadam	2	Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
31	BADRIANSYAH, S. Sos Jawa	ID SIPD: 2097409 Perlu mesin pemadam kebakaran portabel untuk mengantisipasi timbulnya bencana kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kel. Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu mesin pemadam kebakaran portabel untuk mengantisipasi timbulnya bencana kebakaran	3	Belum Prioritas Catatan : Sudah terakomodir di usulan nomor urut 37
32	BADRIANSYAH, S. Sos Jawa	ID SIPD: 2083731 Perlu peralatan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kelurahan Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu peralatan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran	4	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
33	BADRIANSYAH, S. Sos Jawa	ID SIPD: 2097425 Perlu perlengkapan APD damkar untuk petugas pemadam #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kel. Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu perlengkapan APD damkar	5	Belum Prioritas Catatan : Sudah terakomodir di usulan nomor urut 37

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
				untuk petugas pemadam		
34	BADRIANSYAH, S. Sos Jawa	ID SIPD: 2097391 Perlu mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bencana kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kel. Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlu mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bencana kebakaran	6	Belum Prioritas Catatan : Desa Jawa masih bisa dijangkau Respon Timenya oleh Unit di Pos Sektor Sanga-sanga
35	HENDI, A.md Tanjung Harapan	ID SIPD: 2269349 Saat terjadi kebakaran lahan dan sebagainya, pemerintah desa masih kurangan sarana untuk hal tersebut #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RT.02 Desa Tanjung Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat	1	Belum Prioritas Catatan : Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi tugas dan fungsi DLHK
36	ZULHAIDIR Sebulu Ulu	ID SIPD: 2219260 Desa Sebulu Ulu juga memiliki 2 jalan utama yang berada di pinggir makaham dan di tengah perkampungan (Jalan lapis dua). Dengan memperhatikan hal tersebut jika terjadi musibah kebakaran terutama jika terjadi di jalan lapis dua akan sangat sulit dipadamkan karena sumber air yang jauh dari pinggir sungai Mahakam #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat	2	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
37	H.BADRUN Selerong	ID SIPD: 2114631 Sehubungan dengan seringnya terjadi Kebakaran Rumah dan Lahan diwilayah Desa Selerong dan Sekitarnya dan kami atas nama Tim Relawan Kebakaran selalu waspada dini apabila terjadi musibah diwilayah Desa Selerong dan sekitarnya. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Desa Selerong, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat	3	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
38	SYAIBE Sanggulan	ID SIPD: 2383890 semakin padatnya pemukiman penduduk serta bahan bangunan yang terbuat dari kayu, membuat rawan kebakaran, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, diperlukan kesiap siagaan, dan didukung dengan peralatan yang memadai #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat	4	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
39	andi handayani	ID SIPD: 2327780 Kurang Tersedianya	DESA MUARA	Disepakati • Proposal / Dok.	1	Prioritas Catatan : Perlu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
	Muara Ritan	Penunjang Sarana Prasarana #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RITAN, Kab. Kutai Kartanegara	Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: sangat dibutuhkan desa ma ritan		pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
40	HENDRI GUNAWAN Muara Tuboq	ID SIPD: 2343593 Belum adanya Pemadam Kebakaran #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jalan desa Muara tuboq, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: diperlukanya alat pemadam kebakaran berupa mesin untuk desa mauar tuboq tabang sebagai sarana antisipasi musibah kebakaran	2	Prioritas Catatan : Perlu pembentukan relawan kebakaran (Redkar) terlebih dahulu, setelahnya diberikan peralatan pendukung dalam pemadaman kebakaran
41	moh.munawarul insan Sidomulyo	ID SIPD: 2345064 belum adanya penyediaan Prasarana PMK di wilayah Desa Sidomulyo #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: dibutuhkanya sarana prasarana safety bagi petugas kebakaran untuk keamanan petugas	3	Super Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
42	Isnaniah S, SH., MH Panji	ID SIPD: 2149560 Balakarcana kel. Panji Masih sangat membutuhkan alat penunjang pencegahan dan pemadam kebakaran seperti Mesin Pompa air selang, Ekndaraan Emergency dan Kendaraan Roda Tiga seperti VIAR untuk menunjang relawan balakarcana membantu memadamkan api atau yang lain. #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Stadion Timur RT.10 Kel.Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	1	Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan diupayakan untuk pemenuhan anggaran
43	M. Zulkifli, S. STP Sukarame	ID SIPD: 2311733 kurang Mesin pompa,Selang dan kelengkapan keselamatan petugas balakar #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	JL.APT.Pranoto RT.003 , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkap) • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	2	Prioritas Catatan : Sangat mendukung Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Arah kebijakan umum Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Mengembangkan basis data informasi kinerja
				2. Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan
	2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengedalian Kebakaran	Membangun sistem dan penguatan kapasitas petugas dan masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengedalian Kebakaran	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran
				2. Melakukan Pembentukan dan pembinaan kepada Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)
				3. Melakukan pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
				4. Menyelenggarakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan	Melindungi masyarakat melalui pengurangan resiko kebakaran serta peningkatan upaya penyelamatan	1. Membangun sistem komunikasi, informasi kebakaran dan penyelamatan
				2. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
				3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
				4. Melakukan pembinaan aparatur pemadam kebakaran
				5. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
				6. Melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				7. Menyelenggarakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				8. Melakukan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
				9. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
				10. Memaksimalkan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				11. Melakukan Penyusunan, kajian dan pemutahiran rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)
	4	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian & Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Melindungi Masyarakat dari Kondisi Membahayakan melalui Penyelenggaraan Operasi Pencarian & Pertolongan	1. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana Pemadaman dan Penyelematan secara berkala
				2. Melakukan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
				3. Mengadakan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
				4. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
				5. Melakukan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non-Kebakaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi "korban kebakaran". Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat melalui Cakupan Penyebaran Informasi dan "Edukasi Rawan Kebakaran", serta cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Daerah dalam kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran”

Maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, dengan sasaran:

a. Meningkatnya waktu tanggap penanggulangan bencana kebakaran.

Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

” Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat”

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam sasaran RPJMD. Dalam sasaran RPJMD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan sasaran RPJMD antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat”.

Sasaran :

1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran; dan
2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi "korban kebakaran”

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Progam yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program rutin dan 1 (satu) Program urusan pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran.

Dari 2 (dua) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk kegiatan dan sub-kegiatan. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dllaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan 71 (tujuh belas) sub-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kegiatan. Kegiatan dan sub-kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program/kegiatan tersebut pada tahun 2026 sebesar Rp79.056.709.576,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

c) Rumusan Program dan kegiatan memiliki beberapa sub-kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain:
   a. Adanya penyesuaian *output* indikator sub kegiatan;
   b. Adanya perubahan sub-kegiatan yang ada di SIPD;
   c. Adanya pemetaan sub-kegiatan yang baru dari sub-kegiatan lama yang ada di Renstra dengan sub-kegiatan baru yang ada di SIPD; dan
   d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan.

d) Tabel rencana Program dan kegiatan sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	68,281,977,233			Nilai	79	75,394,139,629
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	755,000,000			Dokumen	30	755,000,000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	220,000,000	.		Dokumen	8	220,000,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	150,000,000	.		Laporan	10	150,000,000.00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	120,000,000	.		Laporan	4	120,000,000.00
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3	120,000,000	.		Dokumen	3	120,000,000.00
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Data	4	70,000,000	.		Data	4	70,000,000.00
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka	Berita Acara	1	75,000,000	.		Berita Acara	1	75,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Orang Bulan	284	13,822,284,072			Orang Bulan	284	28,205,051,629
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	220	13,032,284,072	.		Orang/ Bulan	220	27,465,051,629.48
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	120,000,000	.		Dokumen	50	150,000,000.00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50,000,000	.		Laporan	1	90,000,000.00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	580,000,000	.		Laporan	12	450,000,000.00
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	40,000,000	.		Dokumen	1	50,000,000.00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	24	95,000,000			Dokumen	8	165,000,000
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30,000,000	.		Dokumen	1	30,000,000
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	30,000,000	.		Dokumen	6	100,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	20	35,000,000	.		Laporan	1	35,000,000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	147	1,220,000,000			Dokumen	147	1,180,000,000
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	15	300,000,000	.	Peningkatan Kedisiplinan Pegawai menggunakan Fingerprint	Unit	15	300,000,000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	550,000,000	.		Paket	4	550,000,000
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	50,000,000	.		Dokumen	4	30,000,000
1.05.01.2.05.0004	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	50,000,000	.		Dokumen	4	30,000,000
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100,000,000	.		Orang	10	100,000,000
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	70,000,000	.		Orang	100	70,000,000
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000	.		Orang	10	100,000,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	113	2,005,000,000			Layanan	113	2,015,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	20,000,000	.		Paket	10	30,000,000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	750,000,000	.		Paket	15	750,000,000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	55,000,000	.		Paket	2	55,000,000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	55,000,000	.		Paket	2	55,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	.		Paket	1	50,000,000
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	350,000,000	.		Paket	10	350,000,000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	100,000,000	.		Laporan	10	100,000,000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	350,000,000	.		Laporan	50	350,000,000
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	125,000,000	.		Dokumen	3	125,000,000
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	150,000,000	.		Dokumen	10	150,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	191	41,839,693,161			Unit	174	28,850,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	2,150,000,000	.		Unit	5	2,250,000,000
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	2,399,000,000	.		Unit	6	3,000,000,000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	.		Unit	10	200,000,000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	Unit	2	10,611,038,611	.		Unit	2	1,200,000,000
	ID SIPD 2219120		Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut	Unit	1	1,537,999,482					
	ID SIPD 2307637		Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	Unit	1	1,835,296,319					
	ID SIPD 2262944		Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan	Unit	1	1,847,245,719					
	ID SIPD 2151160		Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	Unit	1	2,123,103,771					
	ID SIPD 2334193		Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun	Unit	1	2,021,131,932					
	ID SIPD 2373568		Desa Liang Ulu RT. 07 – RT. 10 Kec. Kota Bangun	Unit	1	798,196,633					
	ID SIPD 2373564		Desa Liang Ulu RT. 03 – RT. 06 Kec. Kota Bangun	Unit	1	798,196,633					
	ID SIPD 2373558		Desa Liang Ulu RT. 01 – RT. 02 Kec. Kota Bangun	Unit	1	798,196,633					
	ID SIPD 2291859		Desa Loa Duri Kec. Loa Janan	Unit	1	1,820,750,821					
	ID SIPD 2337695		Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu	Unit	1	1,963,353,422					
	ID SIPD 2317049		Desa Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman	Unit	1	1,835,327,919					
	ID SIPD 2132359		Desa Pulau Harapan Kec. Muara Muntai	Unit	1	1,958,014,346					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	ID SIPD 2300113		Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Seberang	Unit	1	1,542,840,919					
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	150	1,500,000,000	APBD		Unit	150	1,500,000,000
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	Unit	1	100,000,000	.		Unit	1	100,000,000
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	3,000,000,000	.		Unit	8	20,600,000,000
	ID SIPD 2297478		Jl. Dewi Sartika RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara Kayu Batu	Unit	1	1,000,000,000					
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	Laporan	61	6,225,000,000			Laporan	60	7,724,088,000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	APBD		Laporan	-	-
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	720,000,000	APBD		Laporan	48	900,000,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5,500,000,000	APBD	Diasumsikan Pengangkatan P3K dibulan Maret 2026	Laporan	12	6,824,088,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	611	2,320,000,000			Unit	112	6,500,000,000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	200,000,000	APBD		Unit	5	200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau llapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	45	1,200,000,000	APBD		Unit	45	2,200,000,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	60,000,000	APBD		Unit	60	100,000,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara / direhabilitasi	Unit	-	-	APBD		Unit	2	4,000,000,000
	ID SIPD 2374442		Damkar Sangasanga, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	160,000,000					
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	0	-	APBD		Unit	-	-
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabillitasi	Unit	0	-	APBD		Unit	-	-
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi (m2)	Meter	500	700,000,000	APBD		Meter	-	-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Kutai Kartanegara		Persen	100	10,774,732,343			Persen	100	70,634,967,969
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	429	7,746,727,343			Dokumen	5,127	44,527,135,969
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	Dokumen	1	55,000,000	SPM		Dokumen	10	159,158,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya								
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	400,000,000	SPM		Laporan	60	400,000,000
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	70	300,000,000	SPM		Dokumen	80	350,000,000
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	200,000,000	SPM		Dokumen	2	50,000,000
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	75,000,000	SPM		Dokumen	1	210,000,000
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	22	302,000,000	SPM		Orang	101	2,019,180,000
1.05.04.2.01.0007	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiiki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang	Desa/ Kelurahan	12	75,000,000	SPM		Desa/ Kelurahan	6	77,812,500

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahunnya), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa / kelurahan setiap tahunnya								
1.05.04.2.01.0007	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	22	235,000,000	SPM		Laporan	40	656,400,000
1.05.04.2.01.0007	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penangguangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (RISPKP)	Dokumen	5	250,000,000	SPM		Dokumen	1	150,000,000
1.05.04.2.01.0007	Pemutakhiran Rencana Induk Sistme Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1	100,000,000	SPM		Dokumen	1	250,000,000
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	3	22,500,000	SPM		Dokumen	-	-
1.05.04.2.01.0007	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil kegiatan jabatan Fungsional Pemadam Kebakarn	Dokumen	5	37,500,000	SPM		Dokumen	-	-
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	70	1,000,000,000	SPM		Unit	4505	39,589,680,469
	ID SIPD 2193943		Desa Sangkuliman, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	173,850,637					
	ID SIPD 2372562		Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara Liang Ulu	Paket	1	170,478,536					
	ID SIPD 2274457		Desa Kota Bangun, Kec. Kota Bangun Darat	Paket	1	309,758,091					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	ID SIPD 2292838		RT 24, Kab. Kutai Kartanegara Loa Duri Ilir	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2260953		Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu	Paket	1	173,850,637					
	ID SIPD 2238985		Kp. Jawi-jawi RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak Ulu	Paket	1	149,294,101					
	ID SIPD 2296857		RT. 003 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2277692		desa lebaho ulaq, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	180,594,839					
	ID SIPD 2172783		Jln. Patin RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara Muara Wis	Paket	1	269,519,212					
	ID SIPD 2319990		Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2097438		Kel. Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2114631		Desa Selerong, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2383890		desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	309,758,091					
	ID SIPD 2345064		desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2149560		Jl. Stadion Timur RT.10 Kel.Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	163,734,334					
	ID SIPD 2373734		desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Paket	1	304,944,680					
	ID SIPD 2375018		RT.04, Kab. Kutai Kartanegara Batu- batu	Paket	1	209,276,105					
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	30	350,000,000	SPM		Dokumen	20	400,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap kebakaran Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap kebakaran Rumah Tangga	Orang	100	100,000,000	SPM		Orang	300	214,905,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Dokumen	22	300,000,000			Dokumen	58	346,320,000
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	10	150,000,000	APBD		Dokumen	10	150,000,000
1.05.04.2.02.0001	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	150,000,000	APBD		Dokumen	48	196,320,000
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dokumen	1	100,000,000			Dokumen	1	50,000,000
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	100,000,000	APBD		Dokumen	1	50,000,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Dokumen	5830	1,470,005,000			Dokumen	7180	1,263,957,000
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	5800	500,000,000	SPM		Orang	7100	459,930,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahana Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	5	100,000,000	SPM		Desa/ Kelurahan	49	494,027,000
	ID SIPD 2248612		Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut	Paket	1	87,069,000					
	ID SIPD 2372501		Desa Liang Ulu	Paket	1	54,419,000					
	ID SIPD 2372501		Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota bangun	Paket	1	54,469,000					
	ID SIPD 2373586		Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	Paket	1	50,419,000					
	ID SIPD 2271594		Desa Loa Duri Ulur Kec. Loa Janan	Paket	1	56,419,000					
	ID SIPD 2264682		Desa Santan Ilir Kec. Marangkayu	Paket	1	57,519,000					
	ID SIPD 2260938		Desa Kersik Kec. Marangkayu	Paket	1	43,894,000					
	ID SIPD 2286711		Desa Benua Puhun Kec. Muara Kaman	Paket	1	43,494,000					
	ID SIPD 2279410		Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman	Paket	1	59,169,000					
	ID SIPD 2209038		Desa Sebemban Kec. Muara Uwis	Paket	1	52,669,000					
	ID SIPD 2293617		Desa Senoni Kec. Kota Bangun	Paket	1	52,669,000					
	ID SIPD 2190458		Desa Sebulu Ilir Kec. Sebulu	Paket	1	45,019,000					
	ID SIPD 2302115		Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu	Paket	1	45,019,000					
	ID SIPD 2196246		Kel. Melayu Kec. Tenggarong	Paket	1	33,879,000					
	ID SIPD 2178416		Desa Telluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang	Paket	1	33,879,000					
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	Dokumen	10	100,000,000	SPM		Dokumen	31	310,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan th 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		
				Satuan	Target	Rp	Sumber Dana		Target Capaian		Pagu Indikatif
									Satuan	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Tersedia Dukungan Sapras Damkar								
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Laporan	354	1,158,000,000			Laporan	2816	24,497,555,000
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	300	250,000,000	SPM		Laporan	300	250,000,000
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membayaakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1	50,000,000	SPM		Dokumen	1	210,000,000
1.05.04.2.05.0003	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal	Laporan	3	258,000,000	SPM		Laporan	150	366,675,000
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	50	600,000,000	SPM		Unit	2365	23,670,880,000
Total						79,056,709,576					146,029,107,598

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, RPJMD tahun 2021-2026, RPJPN tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari RPJPD tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari RKPD.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025, yang mengacu kepada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan RPJMD 2021-2026. Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada Program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra-PD, Renja-PD, RKPD tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. PD dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026;
4. PD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, kegiatan pokok dan

unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas Program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD tahun 2021-2026 ke dalam Renstra, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, pelaksanaan RPJMD, pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja Program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja tahun 2026 berlaku sejak tanggal di tetapkan. Adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, sehingga Satpol PP dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan sumber daya masyarakat, peran Satpol PP sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satpol PP selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Satpol PP merupakan rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun 2026. Rencana Kerja Satpol PP tahun 2026 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang–Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhlran Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan Progam dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun 2026, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja Satpol PP pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satpol PP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu (tahun n-2/2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

BAB IV RENCANA PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana Program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui Program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026. Pada Rencana Kerja Satpol PP tahun 2024, Satpol PP melaksanakan 2 (dua) Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan.

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp555.278.000		Rp498.421.051		89,76%	
1	1.05.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp378.592.004		Rp329.209.444		86,96%	
2	1.05.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp17.917.513.282		Rp17.556.615.384		97,99%	
3	1.05.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	Orang/Bulan	336	Orang/Bulan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp120.000.000		Rp105.778.897		88,15%	
4	1.05.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp424.182.000		Rp398.122.051		93,86%	
5	1.05.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp11.270.600		Rp11.266.000		99,96%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6	1.05.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp15.550.566		Rp14.890.000	95,75%	
7	1.05.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp251.345.753		Rp242.066.000	96,31%	
8	1.05.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	Paket	67	Paket	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp135.972.000		Rp117.978.600	86,77%	
9	1.05.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	Paket	21	Paket	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp46.526.300		Rp33.212.000	71,38%	
10	1.05.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	7	Paket	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp793.620.390		Rp743.605.219	93,70%	
11	1.05.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	Laporan	95	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp425.926.600		Rp393.189.404	92,31%	
12	1.05.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp10.222.200		Rp10.220.000	99,98%	
13	1.05.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp141.582.071		Rp64.334.039	45,44%	
14	1.05.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp44.950.000		Rp43.435.000	96,63%	
15	1.05.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.813.789.300		Rp6.773.712.500	99,41%	
16	1.05.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp1.038.938.300		Rp905.358.550	87,14%	
17	1.05.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81	Unit	81	Unit	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp33.030.000		Rp0	0,00%	
18	1.05.01.2.09.0008.01 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp123.053.200		Rp101.755.200	82,69%	
19	1.05.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100,00%	100,00%
1.05.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman		Rp64.652.000		Rp64.652.000	100,00%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
20	1.05.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp15.726.456.396		Rp15.257.374.742		97,02%	
21	1.05.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp647.558.440		Rp427.708.520		66,05%	
22	1.05.02.2.01.0005.01 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	200	Orang	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp28.515.000		Rp28.270.000		99,14%	
23	1.05.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13	Dokumen	13	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Rp160.000.000		Rp117.377.800		73,36%	
24	1.05.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Rp399.419.000		Rp399.244.000		99,96%	
25	1.05.02.2.01.0015.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.484	Laporan	1.484	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp233.379.000		Rp194.733.800		83,44%	
26	1.05.02.2.02.0010.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	20	Laporan	20	Laporan	100,00%	90,00%
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp187.464.000		Rp161.354.000		86,07%	
28	1.05.02.2.02.0012.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150	Laporan	150	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp119.761.000		Rp112.700.645		94,10%	
29	1.05.02.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	Laporan	3	Laporan	100,00%	100,00%

2. Realisasi Program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan/Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Rp304.389.000		Rp270.179.206		88,76%	
27	1.05.02.2.02.0011.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali KotaJumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dit	100	Laporan	95	Laporan	95,00%	95,00%
Target 100 tindakam TIPIRING tidak berhasil karena proses kerjasama dengan pihak kejaksaan tidak berjalan dengan maksimal							

Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dengan pencapaian Renstra-PD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan		Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)				Target program dan kegiatan (RenjaD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)		
								Target RENJA tahun (2024)	Realisasi RENJA Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4		5		6	7		8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat														
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	5000	angka										
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	9610	angka	510	Dokumen	1484	1484	Kasus	100%	1484	3478	Kasus	36%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Presentase peningkatan gangguan trantibum	100	Persen	0	Persen	100	0	Persen	0%	0	0	Persen	0%
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	20	Kali	0	dokumen	4	0	dokumen	100%	4	4	kali	20%
	4	Pemberdayaan perlilndungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125	regu	25	regu	25	25	regu	100%	25	75	Regu	60%
	5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah satpol yang bersertifikat	1000	orang	0	orang	200	0	Orang	80%	160	160	Orang	16%
	6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama	25	dokumen	5	Dokumen	5	5	Dokumen	100%	5	15	Dokumen	60%
	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	150	unit	18	Unit	30	18	Unit	60%	18	54	Unit	36%
	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP trantibum	3	dokumen	1	persen	1	1	Persen	100%	1	3	Persen	100%
	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Persentase layanan dampak penegakan perda	100	persen	100	Dokumen	100	100	Dokumen	100%	100	300	Dokumen	100%
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota		Jumlah perda yang ditegakkan	14	angka										
	10	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	20	kali	4	Kali	4	4	Kali	100&	4	12	kali	60%
	11	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	500	pelanggaran	0	objek	150	150	Kasus	100%	150	300	Kasus	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	12	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti	500	kali	0	Penegakan perda	150	0	Penegakan perda	47%	70	70	Kasus	14%
	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota		Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota yang dibina	5	orang										
	13	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikat PPNS	5	orang	1	Orang	1	1	Orang	100%	1	3	Orang	60%
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130	dokumen										
	14	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	55	dokumen	11	dokumen	11	11	Dokumen	100%	11	33	Dokumen	60%
	15	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	Dokumen	15	dokumen	15	15	Dokumen	86%	12	42	Laporan	56%
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	85	dokumen										
	16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	9900	orang	12	Orang/bulan	1980	12	Orang/bulan	67%	1338	1362	Orang	14%
	17	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD	9900	orang	1	dokumen	1	1	Dokumen	100%	1	3	Dokumen	3%
	18	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	dokumen	15	dokumen	15	15	Dokumen	86%	13	43	Laporan	17%
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian	62	dokumen										
	19	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Junlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	125	stel	0	buah	1	0	buah	100%	1	1	Paket	80%
	20	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	50	dokumen	1	dokumen	10	1	Dokumen	100%	10	12	Dokumen	24%
	21	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	40	orang	20	orang	20	20	Orang	100%	20	60	orang	100%
	22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan-undangan	250	orang										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Administrasi umum perangkat daerah			Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	30	layanan										
23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	335	jenis	61	Rim/ buah/ kotak	67	61	Rim/ buah/ kotak	100%	67	189	Paket	56%
24	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	105	jenis	38	jenis	5	38	jenis	100%	5	81	Paket	77%
25	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan penggandaan yang disediakan	35	jenis	24.340	paket	7	24.340	Paket	28%	2	48.682	Paket	100%
26	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	300	exemplar										
27	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang diselenggarakan	1125	orang	56	orang	167	56	orang	80%	135	247	Laporan	22%
28	Penatausahaan arsip dinamis pada OPD		Jumlah arsip pada unit pencipta pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan	1671	Berkas	0	arsip								
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen										
29	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	2	unit	1	Unit								
30	pengadaan mabel		jumlah mabel kantor yang tersedia	6	unit	3	unit								
31	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	2	paket										
32	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	24	unit	0	unit	28	0	unit	100%	28	28	Unit	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	bulan										
33	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat menyurat	60	Bulan	715	lembar	12	715	Lembar	100%	12	1.442	Lembar	100%
34	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	rekening	12	12	rekening	100%	12	36	Bulan	50%
35	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	6	bulan	12	6	Bulan	100%	12	24	Bulan	40%
36	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		1.jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2.penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	1.bulan 2. bulan	11	bulan	1. 12 2. 12	11	bulan	75%	1. 9 2. 9	31	bulan	19%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah	425	unit										
	37	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	405	unit	78	unit	81	78	Unit	100%	81	237	Unit	58%
	38	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	10	unit	2	Unit	2	2	Unit	100%	2	6	Unit	60%
	39	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	2	gedung	2	2	gedung	100%	2	6	Unit	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pelayanan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator :

1. IKU (Kinerja Utama),
2. SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
3. IKK (Indikator Kinerja Kunci) .

Target pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target IKU :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2026	2026
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	100	100	100	100	100
Keterangan : Kinerja SATPOL PP meningkat jika terjadi penurunan angka sebesar 100 kasus dalam setiap tahunnya memalui penindakan TIPIRING.								

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Target 2025
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	100	95	100
Analisis : Target penurunan angka pelanggaran adalah 100 kasus setiap tahunnya, pada tahun 2024, SATPOL PP hanya mampu melakukan tindakan TIPIRING sebabyak 395 kasus, sehingga target 100 kasus tidak tercapai. Hal disebabkan antara lain : 1. kerjasama antar instansi vertikal yaitu SATPOL PP, Kejaksaan dan Kehakiman belum terjalin dengan maksimal. 2. Keterlambatan melaksanakan kegiatan yustisial TIPIRING, sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup banyak.						

2.2.2. SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Target SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2024 :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Target 2025
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100
Analisis : Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATPOL PP selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2024 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.						

2.2.3. IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Target dan Realisasi IKK :

No	IKK Outcome	IKK Output	Target	Rumus	Realisasi 2024	
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		100%	1. Jumlah Pengaduan Yang ditangani	16	
				2. Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	16	
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1484		1484	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	2795		2795	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	60		37	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3		10	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7		7	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	554		554	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		64	1. Jumlah Perda/Perkadayang Memuat Sanksiyang Ditegakkan	37	61
				2. Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuatsanksi	60	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Daerah dengan ruang lingkup pembinaan dan pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan penindakan preventif non-yustisial (surat teguran). Dibidang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ruang lingkupnya meliputi pengamanan, tempat, aset Daerah, pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, terlaksananya pengawalan dan pengamanan penjabat negara, Daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan Daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak Daerah, sumber PAD, serta objek vital Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13
1	jumlah pelanggaran produk hukum daerah			100	100	100	100	35	95	100	100	
4		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Tahun 2024 100% karena tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan akibat penegakan hukum perda/perkada
5			(IKK Outcome) Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan Yang ditangani (16) Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk (16)
6			(IKK) 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1484	1484	1484	1849	1484	1484	1484	1849	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7			2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	Na	Na	Na	Na	Na	2795			
8			3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		49	60	60	17	37	60	60	
9			4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS					3	3	3	3	
10			5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal			4064	4064	554	7 554	4064	4064	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD

Tupoksi Satpol PP adalah menegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan. Secara umum, setiap tahun kinerja pelayanan trantibum selalu bernilai 100% (seratus persen), hal ini berarti Satpol PP selalu melakukan tugasnya dengan maksimal. Namun demikian keeberhasilan tersebut tidak menyebabkan angka pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) di Daerah berkurang, ini berarti tugas pelayanan trantibum oleh Satpol PP tidak membawa dampak yang optimal.

Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain adalah mutu pelayanan trantibum anggota dalam penegakan trantibum masih rendah, sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal, lokasi pelanggaran trantibum sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi mengenai K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) di masyarakat dan kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal.

Isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang harus disikapi Satpol PP untuk perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah antara lain Kutai Kartanegara memiliki 108 (seratus delapan) peraturan Daerah yang memuat sanksi, cakupan luas wilayah Kutai Kutai Kartanegara yang sangat besar. Antar kecamatan harus ditempuh dengan waktu sampai lebih dari dua jam, di setiap kecamatan terdapat seksi ketentraman dan ketertiban, akan tetapi tugas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan hanya berfungsi secara koordinasi dengan Satpol PP, disamping itu sangat perlu untuk melakukan analisis pendidikan dan pelatihan yang mendukung ke arah pelayanan penegakan ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada penurunan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan Daerah.

Langkah-langkah yang harus diambil Satpol PP dalam menyikapi isu strategis, tantangan dan peluang tersebut adalah percepatan langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satpol PP di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satpol PP.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhlran Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka berpengaruh juga terhadap perencanaan kegiatan dan penganggaran Satpol PP. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2021, maka program Satpol PP menjadi satu Program utama yaitu Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator dan target SPM Satpol PP yang terdapat pada peraturan tersebut adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 (*Review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026) berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43	persen	1.182.476.700	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43%	2.843.086.000	
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100	persen					Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%		
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	kasus	702.186.800	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	1.993.086.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	1		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1849	kasus	325.698.000	1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	800.000.000	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan-Pengawalan Bupati dan Pejabat Penting Daerah-Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan
	2		1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	kasus	50.000.000	2	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	3		1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan KoordinasiPenyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota	4	Dokumen	17.478.000	3	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan KoordinasiPenyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota	4	100.000.000	
	4		1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Dokumen	75.527.500	4	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	382.694.000	penambahan target
	5		1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	100.000.000	5	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	6		1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	23.483.300	6	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	-	kerjasama dengan 12 Instansi terkait penegakan perda1 forum kerjasama antar OPD terkait pengakan perda
	7		1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30	Unit	100.000.000	7	1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24	150.392.000	
	8		1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	Laporan	10.000.000	8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	10.000.000	perubahan target
2			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	angka	420.289.900		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	700.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	9		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Laporan	97.767.500	9	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	25	150.000.000	sosialisasi perda dilaksanakan di 20 kecamatan
	10		1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	Laporan	120.000.000	10	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240	200.000.000,00	peningkatan target
	11		1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	Laporan	202.522.400	11	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	240	350.000.000	peningkatan target

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	orang	60.000.000	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	150.000.000	
	12	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	60.000.000	12 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4	150.000.000	menambahan target menjadi 3 orang PPNS
2	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			nilai SAKIP Perangkat Daerah	76		#REF!	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	36.836.573.345	
4		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dokumen	140.000.000	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	500.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	13		1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	70.000.000	13	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	150.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	14		1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	70.000.000	14	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	15		1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan		15	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100.000.000	
	16		1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	31	Data			1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	31	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	dokumen	15.120.160.065	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	27.375.581.153	
	17	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980	dokumen	14.998.354.465	17	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4488	26.875.581.153	
	18	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	21.805.600		1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	19	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	laporan	100.000.000		1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	450.000.000	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang
6		1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		25.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	20	1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen		1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000	
7		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahh	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	dokumen		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahh	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		219.580.000	
	21	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	-	
	22	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	19.580.000	
	23	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	24		1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	150.000.000	
8	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	layanan	196.096.500	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	1.055.000.000	
	25		1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	paket	80.000.000	25	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	135.000.000	perubahan target
	26		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	paket	44.600.000	26	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	550.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	27		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	6.031.500		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	20.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	28		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	laporan	65.465.000		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	300.000.000	penyesuaian target dan anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	29		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	50.000.000	Dengan memperhatikan tingkat urgensi, kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD yang sempat dihilangkan dalam 2 tahun anggaran, diusulkan kembali di APBD TA 2024.
9	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	7.285.987.192	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5.861.412.192	
	30		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.015.000		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	20.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	31		1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	100.000.000	31	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	32		1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	25.000.000	32	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	69.440.000	penyesuaian target dan anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	33		1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	7.156.972.192		1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.621.972.192	penyesuaian target dan anggaran
10			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	22%	unit	452.409.000		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	21,87 %	1.700.000.000	
	34		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	unit	354.355.000	34	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	1.170.000.000	- pengurangan target unit kendaraan berdasarkan evaluasi BPKAD - penyesuaian kenaikan harga BBM dan perawatan kendaraan
	35		1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	unit	20.000.000	35	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	30.000.000	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)
	36		1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	78.054.000	36	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	500.000.000	penyesuaian anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kantor SATPOL PP	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor SATPOL PP	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		100.000.000	
	37		1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	-	- pengurangan target unit kendaraan berdasarkan evaluasi BPKAD - penyesuaian kenaikan harga BBM dan perawatan kendaraan
	38		1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	100.000.000	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)
														39.679.659.345	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sebagai pengemban amanat penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tahun 2023 Satpol PP tidak memiliki Program dan kegiatan yang bersifat usulan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap SATPOL PP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2026 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas *(upper-middle income countries)* yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2026, sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2021-2026 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(SDGs)* beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2021-2026 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satpol PP merupakan bagian dari pada Satpol PP yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri mampu Menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa", dan Misi ke-2 yaitu Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, sebagai pelaksana dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satpol PP yang didalamnya juga terdapat penyidik pegawai negeri sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satpol PP. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2012, Satpol PP merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada warga negara. SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan SPM menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan APBD, belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait SPM.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator dan target SPM Satpol PP yang terdapat pada peraturan tersebut adalah :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis dalam Renstra 2021-2026 Satpol PP adalah pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak, sehingga dengan target tersebut, ketentraman, ketertiban dan keindahan dapat diwujudkan di Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan Satpol PP dalam menyikapi isu strategis tersebut adalah percepatan langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satpol PP di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satpol PP. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satpol PP.

Tabel III.5

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satpol PP

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	melaksanakan penegakan perda/perkada (tipiring) bekerjasama dengan Instansi terkait (TNI POLRI KEJAKSAAN KEHAKIMAN)	melaksanakan penegakan perda/perkada melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS sampai ke tahap persidangan tipiring
					melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada
				Melaksanakan patroli dan deteksi dini	melaksanakan pengawasan pelanggaran perda dan perkada
					membentuk regu-regu kesiap-siagaan dini.
					Membuat aplikasi layanan SATPOL PP siaga
				Melaksanakan peingkatan kapasitas aparatur SATPOL PP	melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Visi RPJMD tahun 2021-2026 “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia“. Selanjutnya Visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani “, dengan Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun *mindset* dan *culturset* tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektil efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

b. Pada perencanaan untuk tahun 2026, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, maka Satpol PP merencanakan 2 (dua) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan. Sebagai PD yang bertanggungjawab terhadap penegakan peraturan daerah, maka kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertiban jalur hijau serta jalan utama dari PKL di Kecamatan Tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan peraturan daerah seperti peraturan daerah KTP, Peratauran daerah minuman keras dan peraturan daerah prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban perijinan baik itu IMB maupun ijin usaha yang terfokus di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. Satpol PP juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3). Disamping itu, Satpol PP juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana. Kebutuhan anggaran Satpol PP pada tahun 2026 adalah sebesar Rp39.679.659.345,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

c. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiflkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan indikator pada Renstra 2021-2026 Satpol PP sudah tidak sesuai lagi. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian pada renja 2026. Beberapa diantaranya adalah :

1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, satuan target pada Renstra adalah kasus, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) kasus menjadi 12 (dua belas) laporan dengan pagu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, satuan target pada Renstra adalah regu, menjadi dokumen, sehingga targetnya berubah dari 25 (dua puluh lima) regu menjadi 4 (empat) dokumen dengan pagu sebesar Rp382.694.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kemampuan dasar anggota satuan perlindungan masyarakat (Pendidikan dan Pelatihan Dasar) dengan jumlah 60 (enam puluh) orang perkecamatan di 7 (tujuh) kecamatan, pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana, mendeteksi rawan bencana di 20 (dua puluh) kecamatan, pengadaan seragam satuan perlindungan masyarakat di 20 (dua puluh) kecamatan yang berjumlah 3112 (tiga ribu seratus dua belas) orang, melakukan pembinaan anggota satuan perlindungan masyarakat yang ada di 20 (dua puluh) kecamatan berupa: apel , piket linmas dan patroli keliling.
3) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota, satuan target pada Renstra adalah kali, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 4 (empat) kali menjadi 25 (dua puluh lima) laporan dengan pagu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), prioritas pada kegiatan ini adalah memaksimalkan pelaksanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perda/perkada yang mengandung sanksi baik ke masyarakat sosialisasi langsung ke masyarakat di 225 (dua ratus dua puluh lima) desa/kelurahan maupun dengan PD terkait.

4) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah , satuan target pada renstra adalah pelanggaran, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 4 (empat) pelanggaran menjadi 240 (dua ratus empat puluh) laporan dengan pagu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), prioritas pada kegiatan ini adalah pengawasan berkala dan terstruktur di seluruh kecamatan, dibutuhkan pelibatan personel tambahan, peningkatan intensitas patroli.

5) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah satuan target pada renstra adalah kali, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 50 (lima puluh) kali menjadi 240 (dua ratus empat puluh) laporan dengan pagu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), prioritas pada kegiatan ini adalah peningkatan intensitas operasi penegakan hukum (razia, penertiban), penguatan kapasitas personel dalam penindakan.

Berikut disajikan Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SATPOL PP Tahun 2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		43	persen	2.843.086.000			43	persen	1.082.476.700
		Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)		100	persen				100	persen	
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum		1100	kasus	1.993.086.000	APBD		1100	kasus	602.186.800
	1 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartane-gara	12	Laporan	800.000.000	APBD	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawalan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan	1484	kasus	325.698.000
	2 1.05.02.2.01.0016 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kutai Kartane-gara	12	Laporan	50.000.000	APBD		12	kasus	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	3	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	4	Dokumen	100.000.000	APBD		4	Dokumen	17.478.000
	4	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	2	Dokumen	382.694.000	APBD		25	Dokumen	75.527.500
	5	1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	21	Orang	500.000.000	APBD		200	Orang	100.000.000
	6	1.05.02.2.01.0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kutai Kartanegara	5	Dokumen	-	APBD	kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda	5	Dokumen	23.483.300
	7	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketnteraman dan Ketertiban Umum		Satpol PP	24	Unit	150.392.000	APBD		1	Dokumen	-
	8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	100	Laporan	10.000.000	APBD		100	Laporan	10.000.000
2	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah perda yang ditegakkan	Kab Kukar	3	angka	700.000.000	APBD		3	angka	420.289.900
	9	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab Kukar	25	Laporan	150.000.000	APBD	sosialisasi perda dilaksana-kan di 20 kecamatan	4	Laporan	97.767.500

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	10	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	240	Laporan	200.000.000	APBD	Penambah-an honor anggota Cipkon	100	Laporan	120.000.000
	11	1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab Kukar	240	Laporan	350.000.000	APBD	Penambah-an Honor Tim Tipiring, penambah-an SPPD	100	Laporan	202.522.400
3	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		1	orang	150.000.000	APBD		1	orang	60.000.000
	12	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kantor SATPOL PP	4	Laporan	150.000.000	APBD	Menambah-an target menjadi 3 orang PPNS	1	Laporan	60.000.000
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah		76		36.836.573.345			76		23.384.652.756
4	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26	dokumen	500.000.000	APBD		26	Doku-men	520.000.000
	13	1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	31	Data	200.000.000	APBD	penguatan pelaksana-an satudata KUKAR	16	Doku-men	230.000.000
	14	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	6	dokumen	150.000.000	APBD	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemelihara-an Sarana dan Prasarana Ketentram-	11	Doku-men	70.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									an dan Ketertiban Umum			
	15	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	12	laporan	50.000.000	APBD	Bertambah-nya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambah-an rapat-rapat baik internal dan mengun-dang narasumber	15	laporan	70.000.000
	16	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	1	laporan	100.000.000	APBD	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja	1	laporan	150.000.000,00
5	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17	dokumen	27.375.581.153	APBD		17	dokumen	15.120.160.065
	17	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	4488	Orang/Bulan	26.875.581.153	APBD		1980	dokumen	14.998.354.465
	18	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	50.000.000	APBD	Bertambah-nya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambah-an rapat-rapat baik internal dan mengun-dang narasumber	1	laporan	21.805.600
	19	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kantor SATPOL PP	12	laporan	450.000.000	APBD	honorarium PA, Bendahara,	15	laporan	100.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang			
6		1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah				25.000.000					
	20	1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000
7		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	dokumen	219.580.000	APBD		13	dokumen	63.290.066
	21	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5	Paket	-	APBD		50	Paket	160.000.000
	22	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	10	dokumen	19.580.000	APBD		10	dokumen	19.580.000
	23	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25	Orang	50.000.000					20.000.000
	24	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	50	Orang	150.000.000	APBD		50	Orang	23.710.066
8		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	layanan	1.055.000.000	APBD		6	layanan	196.096.500
	25	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	1	paket	135.000.000	APBD		67	paket	80.000.000
	26	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	6	paket	550.000.000	APBD		21	paket	44.600.000
	27	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. KUKAR	2	paket	20.000.000	APBD		7	paket	6.031.500

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	28	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	laporan	300.000.000	APBD		225	laporan	65.465.000
	29	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3	dokumen	50.000.000	APBD			dokumen	
9		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	bulan	5.861.412.192	APBD		12	bulan	7.095.987.192
	30	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	20.000.000	APBD		12	laporan	4.015.000
	31	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	150.000.000	APBD		12	laporan	100.000.000
	32	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	69.440.000	APBD		12	laporan	25.000.000
	33	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	laporan	5.621.972.192	APBD		12	laporan	6.966.972.192
10		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		21,87 %	unit	1.700.000.000	APBD		22 %	unit	452.408.999
	34	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor SATPOL PP	84	unit	1.170.000.000	APBD	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak	81	unit	354.355.000
	35	1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kantor SATPOL PP	1	unit	30.000.000	APBD	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)	2	unit	20.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	36	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor SATPOL PP	1	unit	500.000.000	APBD	Dengan jumlah pagu awal yang tersedia (Rp. 78.054.000) , masih dirasa belum mencukupi pmbiayaan. Oleh karena itu diperlukan tambahan anggaran Rp. 45.000.000 untuk biaya pengerjaan.	2	unit	78.053.999
11		1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Kantor SATPOL PP	100	persen	100.000.000	APBD		100	persen	250.000.000
	37	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8	Unit	-	APBD				250.000.000
	38	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6	Unit	100.000.000					
							39.679.659.345					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2021 - 2026.

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :
   1) Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja.
   2) Penguatan peran dan fungsi Satpol PP.
   3) Peningkatan kualitas bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi anggota Satpol PP.
   4) Peningkatan peran serta PD pemangku peraturan daerah/peraturan kepala daerah dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

b. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :
   1) Rencana Kerja Satpol PP tahun 2026 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, tetapi juga memuat rancangan kerangka pelayanan publik yang membawa dampak penurunan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
   2) Seluruh bidang dan seksi di dalam tubuh Satpol PP berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja tahun 2026 ini dengan sebaik–baiknya.
   3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

pemerintah Daerah), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-13708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perubahan kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

c. Rencana Tindak Lanjut :

1) Menyusun KAK pelaksanaan kegiatan.
2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan kegiatan.
3) Melakukan kegiatan pendampingan, pengawasan, evaluasi dan monitoring berkala atas pelaksanaan kegiatan.

Meskipun Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satpol PP, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia“ dapat tercapai.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, dokumen tersebut berisi perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Rencana prioritas Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (RSUD AM. Parikesit) yang tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 berisi tujuan, sasaran, Program dan kegiatan yang disusun secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis dan non-medis serta manajemen. Penjabaran Renstra setiap tahun disusun dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan penjabaran detil dari Program dan kegiatan kedalam subkegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mensinkronisasi antara pedoman kebijakan pembangunan tahun 2026 dalam kerangka pencapaian target-target rumah sakit yang ada didalam Renstra tahun 2021-2026.
b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit tahun 2026 adalah :
    1. Menjabarkan tujuan pembangunan kedalam Program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2026;

2. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD AM. Parikesit.
3. Renstra RSUD AM. Parikesit tahun 2021-2026 dalam rencana Program dan kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit tahun anggaran 2026;
4. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD AM. Parikesit dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada tahun anggaran 2026;
5. Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di RSUD AM. Parikesit dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun anggaran 2026 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
6. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan Program kegiatan bidang kesehatan dengan seluruh *stakeholder*;
7. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksana Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra RSUD AM. Parikesit
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD AM. Parikesit
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD AM. Parikesit

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD AM. Parikesit

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD AM. Parikesit

Evaluasi Pelaksana Rencana Kerja ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD AM. Parikesit tahun 2024. *Input* yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*. Sementara itu *input* lain seperti sumber daya manusia, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan RSUD AM. Parikesit dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
        - Dana yang disediakan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
        - Realisasi Keuangan Rp103.430.000,00 (serratus tiga persen atau 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen)

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Dana yang disediakan Rp24.872.238.969,-
- Realisasi Keuangan Rp16.454.989.883,- (66,16%)

c. Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
   - Dana yang disediakan Rp448.778.470.076,-
   - Realisasi Keuangan Rp416.406.616.094,- (92,79%)

Program Pemenuhan UKP dan UKM

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
      - Dana yang disediakan Rp51.365.575.028,-
      - Realisasi Keuangan Rp43.118.897.742,-(83.95%)
   2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
      - Dana yang disediakan Rp2.000.000.000,-
      - Realisasi Keuangan Rp1.925.191.287,-(96,26%)
   3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
      - Dana yang disediakan Rp2.216.036.474,-
      - Realisasi Keuangan Rp2.143.661.900,-(96,73%)
   4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
      - Dana yang disediakan Rp204.865.406.350,-
      - Realisasi Keuangan Rp197.146.043.515,- (96,23%)
   5. Pengembangan Rumah Sakit
      - Dana yang disediakan Rp26.500.000.000,-
      - Realisasi Keuangan Rp26.020.971.626,- (98,19%)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit dan Pencapaian Renstra RSUD AM. Parikesit s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra-PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				Kesehatan									
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota	Nilai SAKIP	A 80	AA 96,10	BB 75	76,75	132	BB 75	BB 75	100
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	1	1	1	100	1	1	100
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341	349	349	-	-	-	-	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	1	1	100	1	1	100
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra-PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	1	100
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67,00	65,17	65	65,73	101,12	65	65	100
						2. Angka Kematian Ibu	4	6	6	6	100	8	8	100
						3. Angka Kematian Bayi	68	76	76	80	94,74	76	76	100
						4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1	0,8	0,8	0,8	100	0,8	0,8	100
						5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100	100	100	100	100	100	100	100
						6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	5	1	1	1	100	1	1	100
						7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	5	1	1	1	100	1	1	100
						8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)	83,00	86,49	82,50	82,50	100	82,00	82,00	100
						9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	23,00	22,25	22,00	24,50	100	22,00	22,00	100
						10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	1.534.550.400.065	243.575.266.365	303.121.462.731	254.398.198.086	101,84	383.638.101.269	383.638.101.269	100
						11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	90,00	82,00	82,00	92,57	109	82,5	82,5	100
						12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	50,00	94	75	100	376	35	35	100
						13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra-PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100	1	1	100
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS*	90,50	88,06	89,5	88,06	100	89,5	89,5	100
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial*	80	63,27	78	63,27	82	78	78	100
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	546	400	396	99	46	46	0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Hasil Penilaian Kinerja BLUD	89	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan pasin	96.800	-	-	-	-	-	-	-

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD AM. Parikesit

RSUD AM. Parikesit telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja RSUD AM. Parikesit tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu PD. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Indikator Kinerja

No.	**Interval Nilai**	**Kriteria Penilaian**	**Kode**
1.	90 >	Sangat Baik	Biru
2.	76 ≤ 90	Baik	Hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh RSUD AM. Parikesit dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis RSUD AM. Parikesit beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Capaian Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KATEGORI
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD AM Parikesit	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD AM Parikesit	Nilai	83,55	95,01	113,72	Sangat Baik
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	73	83,64	114,58	Sangat Baik
2.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
3.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
4.	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada	Persen	100	100	100	Sangat Baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KATEGORI
		aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun					
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	Sangat Baik
6.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah yang akan diadakan	Persen	100	100	100	Sangat Baik
7.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100	Sangat Baik
8.	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
9.	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
10.	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Baik
11.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik	Persen	100	100	100	Sangat Baik
12.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir.	Persen	100	100	100	Sangat Baik
13.	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100	Sangat Baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KATEGORI
14.	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100	Sangat Baik
15.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Perubahan PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100	Sangat Baik
16.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	92,21	131,79	Sangat Baik
17.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100	Sangat Baik
18.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	133,33	133,33	Sangat Baik
19.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	140,97	140,97	Sangat Baik
20.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	101,03	101,03	Sangat Baik
21.	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Baik
22.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Baik
23.	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	100	133,33	Sangat Baik
24.	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sangat Baik
25.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	14,64	95,43	Sangat Baik
26.	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100	Sangat Baik
27.	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	100	100	Sangat Baik
28.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,11	86,49	Baik
29.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30	Sangat Baik
30.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif,	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,94	Sangat Baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KATEGORI
	akuntabel, bersih dan melayani						
31.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,20	Sangat Baik
32.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	5,00	4,35	87,00	Baik
33.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Baik
34.	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100	Sangat Baik
35.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100	Sangat Baik
36.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	Sangat Baik
37.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Baik
38.	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	Sangat Baik
39.	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	Sangat Baik

RSUD AM. Parikesit pada tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun pada tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah menetapkan seluruh PD untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan Daerah, sehingga pada tahun 2024, RSUD AM. Parikesit memiliki 39 (tiga puluh sembilan) sasaran dan 41 (empat puluh satu) indikator sasaran.

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan (Sangat Baik) dan 2 (dua) indikator dengan kriteria “Baik”.

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp701.631.765.469,58 (tujuh ratus satu miliar enam ratus tiga puluh satu jita tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan rupiah) atau 92,21 % (sembilan puluh dua

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koma dua puluh satu persen) dari total anggaran Rp760.897.726.897,00 (tujuh ratus enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh utjuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang dialokasikan dari APBD dan BLUD. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola RSUD AM. Parikesit tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Rincian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Tingkat Efisiensi
1.	Belanja Operasi	299.279.423.493,00	267.648.671.432,58	89,43 %	10,57 %
2.	Belanja Modal	461.618.303.404,00	433.983.094.037,00	94,01 %	5,99 %
Jumlah		760.897.726.897,00	701.631.765.469.58	92,21 %	7,79 %

Tabel Belanja Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Tingkat Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	473.950.709.045,00	433.464.499.403,58	91,46 %	8,54 %
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	286.947.017.852,00	268.167.266.067,00	93,46 %	6,54 %
Jumlah		760.897.726.897,00	701.631.765.469.58	92,21 %	7,79 %

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% (serratus persen) menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 mencukupi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD AM. Parikesit

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Tercapai
	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit		≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	1 menit	1 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	Tercapai
	Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	82,79%	85,73%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
	Kematian pasien kematian < 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)		≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	5,79	1,75	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	Tercapai
	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
2	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Min Kes. Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, dan Bedah		Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah terpenuhi	Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah terpenuhi	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Min Kes. Anak, Peny. dalam, Kebidanan, dan Bedah	Tercapai
	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	94,98%	99,49%	100%	100%	Tidak tercapai
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	85 menit	70 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Tidak tercapai
	Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	89,10 %	90,40 %	≥ 80 %	≥ 80 %	tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	79,72 %	76,21 %	≥ 60 %	≥ 60 %	Tercapai
	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
3	Pemberi pelayanan rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Minimal Anak, IPD, Bedah, Obgyn		Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Anak, Bedah Obgyn, IPD	Tercapai
	Jam visite dokter spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100%	81.68%	73.92%	100%	100%	Tidak tercapai
	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1.5 %		≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	0%	0%	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	Tercapai
	Angka kejadian infeksi nosocomial	≤ 1.5 %		≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	1.44%	0.73%	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	Tercapai
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99.99%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kematian pasien > 48 jam	NDR ≤ 25 per mill		≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	18.36‰	20.22‰	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	Tercapai
	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %		≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	1.82%	1.47%	≤ 5 %	≤ 5 %	Tercapai
	Kepuasan pasien rawat inap	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	88.48%	90.66%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tidak tercapai
	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥60 %		≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	58.47%	76.50%	≥60 %	≥60 %	Tidak Tercapai
	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	100%	100%	≥ 60 %	≥ 60 %	Tercapai
4	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1 hari	1 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Tercapai
	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	≤ 1 %	≤ 1 %	Tercapai
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %		≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	0%	0%	≤ 6 %	≤ 6 %	Tecapai
	Angka tunda operasi	5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Tercapai
	Angka kematian ibu	215 per 100.000 kelahiran hidup								235	≤ 1 %	≤ 1 %	Tidak Tercapai
	Angka kematian bayi	13 per 1000 kelahiran hidup								27	≤ 30 %	≤ 30 %	Tidak Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan normal (dr. Sp. OG, dr. Umum, bidan)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEX)	Tim PONEX yang terlatih		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Dokter Sp.A		100%	100%	100%	100%	100%	97,22%	94,78%	100%	100%	Tidak Tercapai
		Dokter Sp.An		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%		100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.04%	100%	100%	Tidak tercapai
	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	50%	27.95%	≤ 20%	≤ 20%	Tidak tercapai
	a. Keluarga Berencana b. Konseling KB Manta c. Gakin KB Pembiayaan 100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	89%	89.88%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
6	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	0.09%	0.0%	≤ 3 %	≤ 3 %	Tercapai
		100 % (Dokter)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Pemberi pelayanan unit intensif	50% (Perawat)		50%	50%	50%	50%	50%	43.14%	39.94%	50%	50%	Tidak Tercapai
7	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	≤ 3 jam		≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	77 mnt	92 mnt	≤ 3 jam	≤ 3 jam	Tercapai
	Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan	100% (IGD)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	70.80%	100%	100%	Tidak tercapai
		100% (IRJA)		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	Tidak tercapai
		100% (IRNA)		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	Tidak tercapai
	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %		≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	0.62%	1.58%	≤ 2 %	≤ 2 %	Tercapai
	Kepuasan pelanggaN	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	84.11%	83.56%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
8	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit (manual)		≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	97 mnt	88 mnt	≤ 140 menit	≤ 140 menit	Tercapai
	Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	91.39%	86.85%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
9	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50%		≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	0%	0%	≤ 50%	≤ 50%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	87.29%	88.84%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
10	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	24 mnt	23 mnt	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	34 mnt	37 mnt	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Tercapai
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	81%	82.15%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
	Penulisan resep sesuai formularium	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.95%	99.95%	100 %	100 %	Tercapai
11	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	96.69%	99.26%	≥ 90 %	≥ 90 %	Tercapai
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %		≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	8.80%	11.82%	≤ 20 %	≤ 20 %	Tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	99.67%	100 %	100 %	Tidak Tercapai
12	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %		≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	1.30%	0.42%	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	Tidak Tercapai
13	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Data tidak tersedia
14	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	97.42%	95.98%	100%	100%	Belum tercapai
	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75%	93.13%	100 %	100 %	Belum tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	6 mnt	11 mnt	≤ 10 menit	≤ 10 menit	Belum tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	7 mnt	7 mnt	≤ 15 menit	≤ 15 menit	Tercapai
15	Baku mutu limbah cairBOD< 30 mg/l	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	9.15	10.12	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai
	Baku mutu limbah cairCOD<80mg/l	< 80 mg/l		< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	21.39	21.73	< 80 mg/l	< 80 mg/l	Tercapai
	Baku mutu limbah cairTSS<30mg/l	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	16.31	11.66	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai
	Baku mutu limbah cairPH 6-9	PH 6 – 9		PH 6 – 9	PH 6 – 9	PH 6 – 9	PH 6 – 9	PH 6 – 9	7.24	6.96	PH 6 – 9	PH 6 – 9	Tercapai
	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84.62%	96.84%	100 %	100 %	Belum Tercapai
16	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%		≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	94.15%	38.28%	≥60%	≥60%	Belum Tercapai
	Cost recovery	≥ 65%		≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	78,11%	66.45%	≥ 65%	≥ 65%	Tercapai
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	100%	≤ 2 jam	≤ 2 jam	Tercapai
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
17	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	100%	100%	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (sesuai kebutuhan berlaku	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	5 mnt	5 mnt	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
18	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	6 menit	6 menit	≤ 2 jam	≤ 2 jam	Tercapai
19	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	88%	88.11%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 % (Alkes)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
		100 % (Non Alkes)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
20	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99.74%	99.81%	100%	100%	Belum Tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang IRNA	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
21	Ada anggota Tim PencegahanPenanggulangan Infeksi	75%		75%	75%	75%	75%	75%	97%	100%	75%	75%	Tercapai
	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%		60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	Tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD AM. Parikesit

Sebagai tahap awal penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan analisis aspirasi *stakeholder* kunci rumah sakit. *Stakeholder* kunci adalah berbagai pihak utama yang berkepentingan atas pencapaian visi RSUD AM. Parikesit. Analisis aspirasi ini didahului oleh kompilasi mengenai harapan dan kekhawatiran *stakeholder* kunci. Adapun yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah Pemerintah Daerah termasuk dewan pengawas, *Customer* (pasien), peserta didik, mitra (ikatan kerja sama pelayanan kesehatan, kerjasama operasional, *supplier*), SDM (karyawan).

Setelah dilakukan analisis aspirasi *stakeholder* kunci, rumah sakit menentukan isu strategis yang tengah terjadi, yang akan menentukan pencapaian visi serta realisasi misi rumah sakit. Dapat disimpulkan menjadi beberapa tema isu strategis yaitu:

a. Penguatan organisasi dan manajemen rumah sakit dalam rangka perbaikan tata kelola;
b. Kesiapan rumah sakit dalam transformasi budaya akreditasi;
c. Persepsi seluruh pegawai terhadap perubahan budaya organisasi;
d. Kompetensi dan keterampilan (*Soft Skill* dan *Hard Skill*) sumber daya manusia kesehatan dan manajemen;
e. Tuntutan ekspansi dan diversifikasi pelayanan rumah sakit sesuai dengan dinamika lingkungan dan masyarakat;
f. Pengembangan jejaring dan kemitraan strategis;
g. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pemerintah Daerah;
h. Persepsi *stakeholder* eksternal rumah sakit; dan
i. Kepercayaan pelanggan yang masih kurang.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat perubahan pagu anggaran dan penambahan subkegiatan pada hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD pada fase rancangan Rencana Kerja tahun 2026. Perubahan tersebut meliputi adanya pengalihan/penambahan pagu pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pengembangan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan subkegiatan yang bertambah adalah subkegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

operasional rumah sakit yang saat ini sangat diperlukan dalam hal keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

Penjelasan proses penambahan pagu anggaran dan bertambahnya subkegiatan antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pengalihan pagu yang semula berada di RSUD AM. Parikesit dialihkan ke Dinas Kesehatan, dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Perubahan standar gaji berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD dan Non ASN RSUD. Adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah pada saat penyusunan RPJMD, sehingga terjadi penurunan pada alokasi anggaran THL.

c. Pengembangan Rumah Sakit.

Penambahan pagu pada subkegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Pelayanan Bidang Perumahsakitan.

- renovasi ruang perawatan Punai;
- pembangunan gedung KRIS Punai;
- pembangunan gedung gizi; dan
- Pengadaan sarana, prasraana gedung bangunan

d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pada subkegiatan ini pagu pada rancangan akhir Rencana Kerja ditiadakan, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang medik tidak dilakukan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C-31.

Review Terhadap Rancangan AWAL RKPD Tahun 2026

RSUD AM. Parikesit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					437.970.806.444	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				349.716.238.698	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD AM. Parikesit	Nilai SAKIP RSUD Aji Muhammad Parikesit	80	432.970.806.444	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD AM. Parikesit	Nilai SAKIP RSUD Aji Muhammad Parikesit	76,25	257.269.899.949	Adanya perubahan format penilaian SAKIP, sehingga diperlukan penyesuaian target
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Laporan	39.734.032.832	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Laporan	300.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	349 Orang/Bulan	39.434.032.832	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/Bulan	0	Pagu sub kegiatan beralih ke Dinas Kesehatan sebagai pengampu sub kegiatan ini untuk Rumah Sakit.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	300.000.000	Sesuai
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.598.672.343	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.429.899.949	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.598.672.343	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.429.899.949	Adanya penyesuaian besaran gaji berdasarkan Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD.
c	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67	383.638.101.269	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67	237.540.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Angka Kematian Ibu	4				2. Angka Kematian Ibu	4		
			3. Angka Kematian Bayi	68				3. Angka Kematian Bayi	68		
			4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1				4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1		
			5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100				5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100		
			6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	1				6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	1		
			7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	1				7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	1		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)	83				8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)	83		
			9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	23				9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	23		
			10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	383.638.101.269				10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	383.638.101.269		
			11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	87,5				11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	87,5		
			12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	45				12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	45		
			13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100				13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100		
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	383.638.101.269	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	237.540.000.000	Adanya penurunan pagu belanja bersumber BLUD, dengan alasan penyesuaian terhadap tren pendapatan yang dipengaruhi oleh

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											kebijakan BPJS, belanja modal dalam rangka pengembangan rumah sakit serta efisiensi belanja.
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AM. Parikesit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	90,50%	5.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AM. Parikesit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	90,50%	92.446.338.749	
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AM. Parikesit	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	80%	5.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AM. Parikesit	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	80%	92.446.338.749	
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	2.000.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150 Unit	0	Pagu pada sub kegiatan ini ditiadakan
	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis	1 Unit	3.000.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar	1 Unit	92.446.338.749	Pengembangan Rumah Sakit diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan, adapun rencana pengembangan pada tahun anggaran 2026 antara lain : - Renovasi Ruang Perawatan Punai - Pembangunan Gedung KRIS Punai - Pembangunan Gedung Gizi - Pengadaan Sarana Prasarana Gedung yang dibangun.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pada RSUD Aji Muhammad Parikesit. Dari hasil musrenbang yang telah dilaksanakan tidak ada usulan program atau kegiatan masyarakat pada Tahun 2026.

Tabel C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RSUD AM. Parikesit Kabupaten seharusnya mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan termasuk kebijakan nasional mengenai kesehatan. Arah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh RSUD AM. Parikesit Kabupaten berpedoman pada permasalahan dan mempertimbangkan tantangan kedepan.

Pada dasarnya RSUD AM. Parikesit Kabupaten telah melakukan apa yang menjadi kebijakan nasional dibidang kesehatan dan melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan, salah satu contoh misalnya menekan angka kematian ibu dan bayi, pengobatan pasien TB, dan program *Suistanable Development Goals (SDG's)* dan melayani peserta JKN, kemudian dari pada itu RSUD AM. Parikesit juga harus mampu menterjemahkan sasaran-sasaran strategis Dinas Kesehatan ke dalam Program dan kegiatan di RSUD AM. Parikesit Kabupaten agar tujuan yang lebih besar dapat dicapai secara bersama-sama.

RSUD AM. Parikesit memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelayanan Bidang Perumahsakitan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit pada tahun 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD AM. Parikesit adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit pada tahun 2024 adalah “Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit” dengan indikator sebagai berikut :

1. Peringkat Penilaian Akreditasi; dan
2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit 2026 mengacu pada program prioritas dalam Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program maka diperlukan parameter/ indikator kinerja setiap program dan pendanaan indikatif. Berikut ini 2 rencana program RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2026 yaitu ;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya:

a. RSUD AM. Parikesit mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna sesuai aturan perundang-undangan;
b. RSUD AM. Parikesit merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan;
c. RSUD AM. Parikesit sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian serta merupakan organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
d. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD AM. Parikesit Tahun 2021-2026.

4.1.2. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD AM. Parikesit pada tahun 2026 merencanakan 2 (dua) Program, 4 (empat) kegiatan, dan 4 (empat) subkegiatan yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Program ini mencakup 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

i. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan:
   a) sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;

ii. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
   a) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

iii. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
   a) sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program ini mencakup 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   i. kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
      a) subkegiatan pengembangan rumah sakit

Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit memiliki rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD AM. Parikesit untuk kurun waktu selama 2026 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T.C-33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02				RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT				349.716.238.698				707.595.111.785
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD AM. Parikesit	76,25%	257.269.899.949		Adanya perubahan format penilaian SAKIP, sehingga diperlukan penyesuaian target	76,25%	437.571.306.769
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	RSUD AM. Parikesit	*1 laporan*	300.000.000			*1 laporan*	*300.000.000*
1	02	01	2.02	0007	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 laporan*	*300.000.000*	*APBD*	*Sesuai*	*1 laporan*	*300.000.000*
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*RSUD AM. Parikesit*	100%	19.429.899.949		Adanya penyesuaian besaran gaji berdasarkan Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD.	100%	24.872.238.969

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	01	2.08	0004	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 Laporan*	*19.429.899.949*	*APBD*		*1 Laporan*	*24.872.238.969*
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	*RSUD AM. Parikesit*	67	237.540.000.000			67	363.468.749.996
						2. Angka Kematian Ibu		4				4	
						3. Angka Kematian Bayi		68				68	
						4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD		1				1	
						5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan		100				100	
						6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan		1				1	
						7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)		1				1	
						8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)		83				83	
						9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD		23				23	
						10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit		*383.638.101.269*				*363.468.749.996*	
						11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS		87,5				87,5	
						12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun		45				45	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan		100				100	
1	02	01	2.10	0001	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*RSUD AM. Parikesit*	*1*	*237.540.000.000*	*BLUD*	*Adanya penurunan pagu belanja bersumber BLUD, dengan alasan penyesuaian terhadap tren pendapatan yang dipengaruhi oleh kebijakan BPJS, belanja modal dalam rangka pengembangan rumah sakit serta efisiensi belanja.*	*1*	*363.468.749.996*
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	RSUD AM. Parikesit	100%	92.446.338.749			100%	270.023.805.015
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	RSUD AM. Parikesit	89%	92.446.338.749			89%	270.023.805.015
1	02	02	2.01	0014	*Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit*	*Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan*	*RSUD AM. Parikesit*	*1*	*92.446.338.749*	APBD	Pengembangan Rumah Sakit	*1*	186.321.733.585

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan, adapun rencana pengembangan pada tahun anggaran 2026 antara lain : - Renovasi Ruang Perawatan Punai - Pembangunan Gedung		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											- KRIS Punai - Pembangunan Gedung Gizi - Pengadaan Sarana Prasarana Gedung yang dibangun.		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit merupakan dokumen rencana operasional yang merumuskan Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026. Terdapat beberapa catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini, terdapat beberapa catatan penting sebagai berikut :

1. Adanya rencana pengurangan pagu pada tahap rancangan akhir Rencana Kerja 2026;
2. Pengembangan Rumah Sakit masih sangat diperlukan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit yang merumuskan Program, kegiatan, indikator dan anggaran. Untuk tahun 2026 Rencana Kerja RSUD AM. Parikesit terdiri dari 2 (dua) Program, 4 (empat) kegiatan dan 4 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp349.716.238.698,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Rencana Kerja ini menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD tahun 2026

5.3. Rancana Tindak Lanjut

Rencana Kerja tidak hanya disusun sebagai pedoman dalam perencanaan tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi kinerja tahunan RSUD AM. Parikesit.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026.

Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026. Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2024 dan prognosa kinerja tahun 2025, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021.

Rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021 dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang diarahkan pada pengembangan; (i) layanan unggulan yaitu layanan Hemodialisa, layanan *trauma center level* III, layanan *Medical Check-Up*, layanan pusat jantung terpadu, dan (ii) layanan *advance* yaitu PONEK (pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif). Demikian pula rencana pengadaan peralatan

kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan, dan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (BLUD).

Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui Program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;

18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
19. Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1383/065.11/BAPP/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 memiliki maksud yaitu:

a. mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perencanaan kinerja;
b. sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode 1(satu) tahun; dan
c. sebagai pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 memiliki tujuan yaitu:

a. menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
b. menyediakan pedoman pelaksanaan Program kerja yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026;
c. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan dewan pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP, berisi tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaannya, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. *lnput* yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, dan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah penghitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi merupakan indikator kinerja utama RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (*good corporate governance and good clinical governance*). Tolok ukur sasaran meningkatnya kinerja tata kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu; (i) peringkat penilaian akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan (ii) Persentase indikator SPM yang mencapai target. Hal ini terkait dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp153.699.916.707,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rp139.021.697.161,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh seratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 90,45% (sembilan puluh koma empat puluh lima persen). Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp76.856.722.567,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp67.938.513.300,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 88,40% (delapan puluh delapan koma empat puluh persen). Anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

   Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	16.959.300.657	14.038.065.821	82,78
BLUD	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99
Total	76.856.722.567	67.938.513.300	88,40

   APBD tahun 2024 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti penggunaannya terbatas pada kegiatan penatausahaan keuangan, dan penyediaan tenaga nonASN.

   Berdasarkan tabel di atas, anggaran BLUD memiliki alokasi yang lebih besar, hal ini merupakan bentuk nyata komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mandiri secara keuangan, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rumah sakit meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan operasional rumah sakit, serta belanja modal/investasi sesuai kemampuan rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp74.845.053.140,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp69.273.747.313,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 92,56% (sembilan puluh dua koma lima puluh enam persen). Program ini memfasilitasi beberapa kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Rumah Sakit, meliputi:

1) Pengadaan Alat Penunjang Promosi Kesehatan

Alat yang diadakan berupa Videotron, Video Wall, Digital Signage, dan Interactive Panel yang digunakan dalam upaya menunjang pelaksanaan promosi kesehatan.

2) Pengadaan Hydrant

Alat yang diadakan berupa Instalasi Proteksi Kebakaran yang digunakan dalam upaya pemenuhan standar keselamatan.

3) Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan

Pelaksanaan tahap 1 dari pembangunan gedung Instalasi Rawat Jalan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

b. Pengadaan Alat Kesehatan, meliputi:

1) Alat Kedokteran Umum.

Alat yang diadakan berupa Hospital Bed 5 Unit.

2) Alat Kedokteran Gigi.

Alat yang diadakan berupa Dental Unit 1 Unit.

3) Alat Kedokteran Bedah.

Alat yang diadakan berupa Surgical Instrument Set 1 Unit dan Manual Operating Table 1 Unit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.998.141.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.809.436.548,00 (satu miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 90,56% (sembilan puluh koma lima puluh enam persen). Capaian kinerja output dihitung berdasarkan jumlah karyawan rumah sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun yaitu sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang, yang pada tahun 2024 ditetapkan targetnya sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang atau tercapai sebesar 98,93% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga persen). Pengembangan kompetensi karyawan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diprioritaskan pada bidang keahlian dan keterampilan yang menunjang pelayanan. Ini adalah salah satu bentuk nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00 Sangat Baik / BB	77,27 Sangat Baik / BB	105,85	76.856.722.567	67.938.513.300	88,40
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	100	483.390.000	483.311.200	99,98
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100	483.390.000	483.311.200	99,98
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	16.475.910.657	13.554.754.621	82,27
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	16.475.910.657	13.554.754.621	82,27
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	80,65 Nilai	107,53	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	74.845.053.140	69.273.747.313	92,56
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	100	74.845.053.140	69.273.747.313	92,56
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100	1.287.703.140	1.190.509.770	92,45
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar	1 Unit	1 Unit	100	73.557.350.000	68.083.237.543	92,56

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
		Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit						
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	55 Persen	55,62 Persen	100	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	280 Orang	277 Orang	98,93	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
						153.699.916.707	139.021.697.161	90,45

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 / Sangat Baik (BB)	77,00 / Sangat Baik (BB)	73,00 Sangat Baik / BB	77,27 Sangat Baik / BB	105,85	73 / Sangat Baik (BB)	73 / Sangat Baik (BB)	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	80,65	75	80,65	107,53	75	75	100
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	83 Persen	47,62 Persen	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	82 Persen	82 Persen	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	100	4 Kategori	4 Kategori	100
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	206 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	-	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	85,30 Persen	55 Persen	55,62 Persen	100	65 Persen	65 Persen	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	367 Orang	280 Orang	277 Orang	98,93	300 Orang	300 Orang	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pada Tabel T-C.29 jika dicermati terdapat beberapa kolom yang kosong, hal ini menunjukan bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026 atau tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, karena kebijakan pada masa tersebut, untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien, namun tetap menunjang pencapaian kinerja.

Pada Tabel T-C.29 juga bisa dilihat pada kolom 4, terdapat beberapa subkegiatan baru, yang sebelumnya tidak ada pada Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026. Hal ini terjadi karena kondisi tertentu, dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

   Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.

2. 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit.

   Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan dihapus. Oleh karena itu, sub kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna, kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator dari sasaran Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu meningkatnya kinerja tata kelola RSUD Aji Batara Agung

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dewa Sakti, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

   Indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

   Berdasarkan survey akreditasi rumah sakit pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memperoleh tingkat kelulusan paripurna, yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT
Nomor : 00416/U/X/2023

Diberikan Kepada
RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti
Alamat :
Jl Balikpapan - Handil II, RT 01 Kelurahan Sungai Seloang , Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 75271

Tingkat Kelulusan
Paripurna
Berlaku Sampai : 25 Oktober 2027
Jakarta, 30 Oktober 2023

Mengetahui,

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target.

   Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemenuhan indikator SPM menunjang pencapaian standar mutu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2024

Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Standar	Jumlah Indikator yang Tercapai	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Gawat Darurat	8	6	75,00
Rawat Jalan	7	6	85,71
Rawat Inap	12	12	100,00
Kamar Operasi	7	7	100,00
Persalinan, perinatologi, dan KB	9	6	66,67
Rawat Intensif	3	3	100,00
Radiologi	4	2	50,00
Laboratorium Patologi Klinik	5	5	100,00
Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
Farmasi	5	4	80,00
Gizi	3	2	66,67
Transfusi Darah	2	1	50,00
Rekam Medis	5	3	60,00
Pengelolaan Limbah	7	7	100,00
Administrasi dan Manajemen	11	8	72,73
Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	4	0	0,00
Laundry	2	2	100,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7	7	100,00
CSSD	2	1	50,00
Jumlah	110	89	80,91

Pada tabel capaian SPM, dari 21 (dua puluh satu) jenis pelayanan, 10 (sepuluh) pelayanan telah berhasil memenuhi SPM 100% (serratus persen). Pelayanan yang belum berhasil memenuhi SPM 100% (seratus persen) menjadi fokus untuk perbaikan, yang menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dan komite mutu serta kepala instalasi/unit terkait, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menetapkan kebijakan peningkatan layanan yang dituangkan dalam Program kerja unit.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar, dibuktikan melalui status akreditasi rumah sakit dan hasil capaian SPM rumah sakit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti													
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	Tercapai
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	81,63	80,91	80,91	77,00	Tercapai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan, yang memiliki peran dalam pencapaian visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.

2.3.1 Kinerja OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam Rencana RPJMD tahun 2021-2026, dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Keluarga Peduli di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah.

Pelaksanaan misi kedua tersebut diamanatkan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi juga mengacu pada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	114,51	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Targe	Persen	73,50	80,91	110,08	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% Paling Lambat Akhir Bulan Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta Pengumuman Paket Pengadaan pada Aplikasi SIRUP per Akhir Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan Waktu Input e-Pantau dan Telah Diverifikasi 100% Per Tanggal 10 Setiap Bulan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% Sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang Akan Diadakan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling Lambat Bulan April untuk Tahun Anggaran Berikutnya	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah Paling Lambat Akhir Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Per Tanggal 24 Januari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKM dan Laporan RTL Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I Paling Lambat Akhir Bulan Juni dan Semester II Akhir Bulan Oktober Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
12	Menyelesaiakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK Atas Audit LKPD 5 Tahun Terakhir	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD Ditetapkan)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang Diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang Terbit	Persen	70,00	90,75	129,64	Sangat Tinggi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75,00	100,00	133,33	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia Sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting Sesuai dengan Target Nasional	Persen	14,00	14,00	100,00	Sangat Tinggi
26	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Pengganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
27	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN Per Tanggal 25 Setiap Bulan	Persen	40,00	40,00	100,00	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,6	100,00	Sangat Tinggi
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	77,27	105,85	Sangat Tinggi
30	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	64	100,00	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,44	Sangat Tinggi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	4,35	48,60	Sangat Rendah
33	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00	Sangat Tinggi
34	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape Adalah Area atau Ruang yang Dinyatakan Dilarang untuk Aktivitas Merokok atau Mempromosikan Produk Tembakau	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
38	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	Sangat Tinggi
39	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	SK	1	1	100,00	Sangat Tinggi
					Rata-rata	101,47	Sangat Tinggi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja OPD

Pada perjanjian kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 bisa dilihat bahwa rumah sakit selain tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, juga diharapkan dapat berkinerja baik dari segi tata kelola klinis maupun tata kelola nonklinis, dengan kompleksitas permasalahan yang ada karena rumah sakit adalah layanan yang padat dengan sumber daya manusia, padat tindakan/intervensi baik medis maupun tindakan keperawatan, padat sarana penunjang, padat administratif, dan padat akan kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara internal maupun eksternal.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi maka untuk mengatasi hal-hal tersebut, dilakukanlah identifikasi semua permasalahan baik yang bersifat mayor maupun minor. Pencermatan (*scanning*) kondisi lingkungan internal organisasi berupa, kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta kondisi lingkungan eksternal organisasi yaitu, peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian dilakukan analisa SWOT (*strength*, *weakness*, *oppprtunity*, dan *threat*) untuk mengetahui gambaran bisnis dan posisi strategis organisasi.

Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT

No.	Bobot	Keterangan
1	0,20	Sangat Kuat
2	0,15	Di Atas Rata-rata
3	0,10	Rata-rata
4	0,05	Di Bawah Rata-rata

Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT

No.	*Rating*	Keterangan
1	4	*Major Strenght*
2	3	*Minor Strenght*
3	2	*Minor Weakness*
4	1	*Major Weakness*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (*Strenght*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
STRENGTHS				
1	Kelengkapan jenis pelayanan yang tersedia sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C	0,10	3	0,30
2	Ketersediaan SDM dokter	0,20	4	0,80
3	Ketersediaan peralatan medik	0,20	4	0,80
4	Memiliki *captive market* BPJS	0,15	3	0,45
5	Status rumah sakit sebagai PPK BLUD	0,10	3	0,30
6	Ketersediaan lahan milik pemerintah dengan luasan yang memadai untuk pengembangan ke depan	0,10	3	0,30
7	Lokasi rumah sakit strategis berada di tepi jalan raya dan merupakan perlintasan antar kota	0,05	3	0,15
8	Petunjuk informasi di rumah sakit	0,05	3	0,15
9	Kinerja pelayanan rumah sakit meningkat tiap tahunnya	0,05	3	0,15
	Skor *Strenght*	1,00		3,40

Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
WEAKNESSES				
1	Zonasi dan sirkulasi rumah sakit	0,10	-3	-0,30
2	Ketersediaan SDM organik	0,15	-4	-0,60
3	SIM & IT rumah sakit belum optimal mendukung integrasi pelayanan	0,10	-4	-0,40
4	*Maintenance* fasilitas dan alat kesehatan belum optimal	0,10	-4	-0,40
5	Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan promosi rumah sakit belum optimal	0,05	-3	-0,15
6	Penataan parkir	0,05	-3	-0,15
7	Ketersediaan fasilitas umum di rumah sakit	0,05	-3	-0,15
8	Belum tersedia produk unggulan rumah sakit	0,05	-3	-0,15
9	Kemudahan akses dan ketersediaan transportasi umum menuju rumah sakit	0,05	-3	-0,15
10	Komunikasi dan koordinasi internal rumah sakit kurang lancar	0,15	-4	-0,60
11	Pengaturan sistem antrian pasien belum semuanya secara digital	0,05	-3	-0,15
12	Penggunaan teknologi peralatan medik belum optimal	0,10	-4	-0,40
	Skor *Weakness*	1,00		-3,65

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (*Opportunities*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
OPPORTUNITIES				
1	Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan	0,15	4	0,60
2	Pasar yang tersedia masih terbuka lebar	0,10	4	0,40
3	Jaringan komunikasi yang cepat dalam era digital 4.0 yang berkembang secara global	0,10	3	0,30
4	Belum adanya rumah sakit sekitar yang memiliki peralatan canggih yang komplit	0,10	4	0,40
5	Transisi demografi dan epidemologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan	0,10	3	0,30
6	Pengembangan potensi wisata di Samboja	0,05	3	0,15
7	Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	0,05	3	0,15
8	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui kerjasama pihak ketiga	0,10	3	0,30
9	Kesadaran masyarakat atas kesehatan dan pelayanan rumah sakit tinggi	0,15	4	0,60
10	Kemitraan dengan perusahaan dan sarana kesehatan lain dalam membina jejaring guna pengembangan pelayanan yang spesifik/ rujukan	0,10	4	0,40
	Skor *Opportunities*	1,00		3,60

Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (*Threats*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
THREATS				
1	Perubahan kebijakan *stakeholder* dan kompleksitas regulasi	0,20	-4	-0,80
2	Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat dan ada batasan terutama pasien BPJS, kurang kompetitif	0,10	-3	-0,30
3	Perkembangan *advanced technology* dan *medical equipment* diikuti biaya tinggi	0,15	-3	-0,45
4	Penggunaan media sosial untuk mengkritisi layanan rumah sakit mempengaruhi *brand image*	0,10	-3	-0,30
5	Pengembangan teknologi kedokteran yang pesat sehingga perlu pembaharuan pada beberapa peralatan medik	0,15	-3	-0,45
6	Rumah sakit kompetitor swasta yang menjalin kemitraan dengan unggulan dan pasar yang sama, lebih inovatif	0,05	-3	-0,15
7	Globalisasi era MEA/ ACTA sebagai sarana perpindahan SDM muncul rumah sakit pesaing yang memberikan kesejahteraan lebih	0,10	-3	-0,30

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8	Berkembangnya medikolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit	0,15	-4	-0,60
	Skor *Threats*	1,00		-3,35

Skor Faktor Internal dan Faktor Eksternal Analisa SWOT

No.	Posisi SWOT	
1	Skor Faktor Internal (x)	
	Strengths + *Weaknesses*	3,40 + (-3.65) = -0,25
2	Skor Faktor Eksternal (y)	
	Opportunities + *Threats*	3,60 + (-3,35) = 0,25

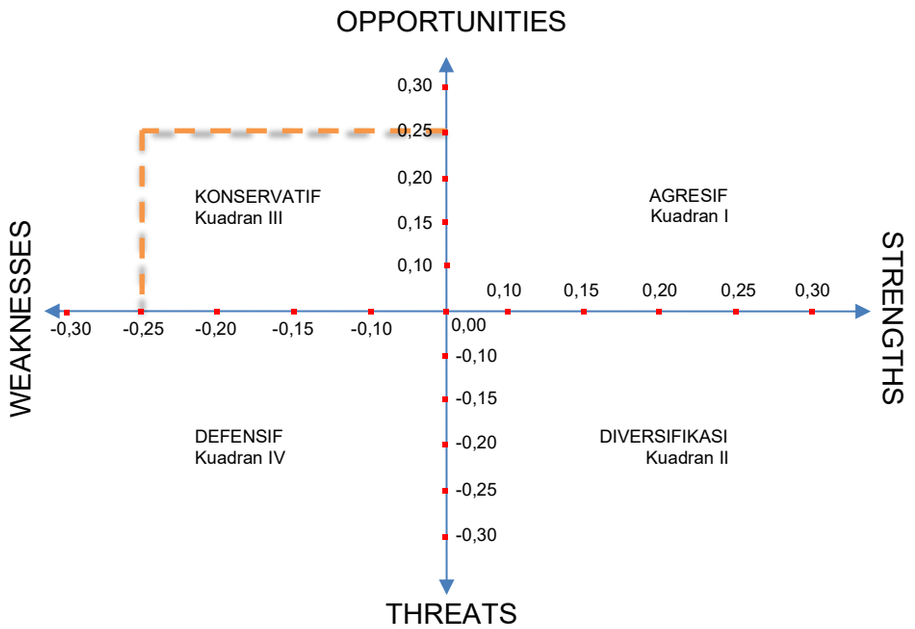

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT menunjukkan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berada di Kuadran III. Dalam hal ini, skor nilai kelemahan masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. Organisasi rumah sakit mengalami kelemahan internal sehingga sulit untuk meraih peluang yang menguntungkan.

Strategi yang tepat untuk kondisi ini adalah konsolidasi, melakukan perbaikan dan mengubah cara pandang terhadap beberapa hal yang dapat digali dari hasil *survey* kepuasan pelanggan. Pada dasarnya masalah yang ada perlu diselesaikan agar rumah sakit secara internal kuat dan solid, mampu menghadapi tantangan/ancaman dari luar.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3.3 Isu Strategis Daerah Terkait Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Daerah tahun 2021-2026, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait tugas dan fungsinya memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah

No.	Isu Strategis Daerah	Peran OPD
(1)	(2)	(3)
1	Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh	-
2	Peningkatan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Secara Paripurna
3	Pemulihan Dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Pasien COVID-19 dan Pasien Gizi Buruk Serta Stunting
4	Pengembangan Perekonomian Berkelanjutan	-
5	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Agar Mampu Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Kawasan Pembangunan IKN
6	Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Untuk Penguatan Wilayah	-
7	Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	-
8	Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)	-

Berdasarkan peran PD dalam isu strategis Daerah, maka prioritas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Rencana Kerja tahun 2026, yaitu:

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.

   Hal ini diperlukan guna menambah layanan klinik spesialis guna meningkatkan layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

   Hal ini diperlukan guna menambah kapasitas ruang rawat inap dalam mengakomodir tempat tidur pasien, yang saat ini berjumlah 104 (seratus empat), akan ditingkatkan menjadi 200 (dua ratus).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 dan Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemampuan keuangan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dipandang sudah mampu membiayai kegiatan operasional rumah sakit.
2. Instruksi Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait penggunaan APBD hanya untuk gaji pegawai dan belanja investasi. Hal ini menyebabkan beberapa subkegiatan yang bersifat operasional yang pada rancangan awal RKPD tahun 2026, semula dianggarkan pada APBD, anggarannya menjadi Rp0 karena pelaksanaannya dialihkan ke BLUD.
3. Pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, anggarannya menjadi Rp0 karena alokasinya berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pada rancangan awal RKPD Tahun 2026 dan Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026, belum terakomodir anggaran untuk peningkatan infrastruktur dalam rangka menjadi salah satu fasilitas kesehatan penyangga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga akan memunculkan sub kegiatan baru, yaitu:
   a. pengembangan rumah sakit; dan
   b. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Pada subkegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, yang mengakomodir peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 100 (seratus) orang, setelah dilakukan analisa terhadap indikator kinerjanya oleh Komite Mutu RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dinyatakan kurang untuk memenuhi indikator SPM terkait peningkatan kompetensi pegawai yaitu 60% (enam puluh persen) dari jumlah total pegawai di rumah sakit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	85.909.574.197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,00 Sangat Baik / BB	83.054.023.520	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	297.295.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	50.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	277.835.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Lihat Tabel 15
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	17.688.615.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	335.000.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	17.019.375.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Lihat Tabel 15
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	313.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-	50.000.000	Lihat Tabel 15

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	260.000.000	Lihat Tabel 15
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Lihat Tabel 15
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	50.000.000	
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Lihat Tabel 15
D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Lihat Tabel 15
9	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	Lihat Tabel 15
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100.000.000	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD ABADI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD ABADI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Lihat Tabel 15
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	50.000.000	Lihat Tabel 15
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Lihat Tabel 15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14	Pengadaan Mebel	RSUD ABADI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	RSUD ABADI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.249.023.520	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1.800.000.000	Lihat Tabel 15
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.449.023.520	Lihat Tabel 15
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.500.000.000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	300.000.000	Lihat Tabel 15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.200.000.000	Lihat Tabel 15
J	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	75 Nilai	53.267.752.813	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	75 Nilai	61.300.000.000	
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	53.267.752.813	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	61.300.000.000	Lihat Tabel 15
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	700.000.000	
K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	100 Persen	700.000.000	
20	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
21	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	1 Unit	500.000.000	Lihat Tabel 15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
22	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	200.000.000	Lihat Tabel 15
H	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan			
15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Kompeten			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Kompeten			
i	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya			
16	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
				Total	85.909.574.197				Total	83.754.023.520	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	83.054.023.520	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp277.835.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp0
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp19.460.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp0
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	335.000.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp313.025.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp.50.000.000. Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	260.000.000	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp356.215.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp.260.000.000. Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Pendapatan dan Realisasi Bulanan, Laporan SP2B BLUD Triwulanan, Laporan Kinerja Keuangan Semesteran)
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.243.140.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.243.140.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.249.023.520	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.655.910.656	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Tenaga Penunjang Rumah Sakit)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.500.000.000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penunjang Pelayanan (Mesin Lift)
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Jalan (500 M), Jaringan Listrik IBS, Gedung Rawat Jalan (Lama), Gedung UGD, Gedung Rawat Inap, Gedung Instalasi Penunjang)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.300.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.300.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan operasional rumah sakit meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal/Investasi Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini digunakan dalam upaya pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Permenkes No 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, untuk memenuhi standar kelengkapan yang ditentukan • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sub Kegiatan ini juga digunakan dalam pelaksanaan amanat implementasi kinerja reformasi birokrasi tematik, yaitu: • Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, dalam bentuk penyuluhan oleh Tim Medis yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Gizi, Perawat, Bidan, dan Ahli Gizi • Penanggulangan Kemiskinan, dalam bentuk pembebasan biaya bagi pasien tidak mampu yang ketika dirawat di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ternyata tidak memiliki BPJS, tidak terdata sebagai warga tidak mampu, dan tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial dan/atau Kecamatan Samboja
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	700.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	Sub Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Persentase kelengkapan alat kesehatan pada Aplikasi ASPAK masih di bawah standar, sehingga perlu melakukan pemenuhan standar kelengkapan Alat Kedokteran.
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2 Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini memfasilitasi pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Dalam upaya pemenuhan indikator SPM RS indikator “Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun” sehingga dilakukan penambahan anggaran
		83.754.023.520	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja didiskusikan pada pembahasan forum PD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti baik dari kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan dari PD lain di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel membuat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk terus berbenah, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanannya. Hal ini tergambar dari nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang tiap tahunnya meningkat.

Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sedangkan strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan.
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.
3. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan nasional bidang kesehatan dan telah melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 berdasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026, yaitu:

1. Tujuan

   Tujuan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

   Sasaran Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 adalah "Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti" dengan indikator sebagai berikut:

   a. Peringkat penilaian akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
   b. Persentase indikator SPM yang mencapai target.

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	82,50%	82,50%
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	76,00%	76,50%	77,00%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Dedikasi yaitu Program Keluarga Peduli di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

   RSUD Aji Batara Agung Dewa melaksanakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian ibu dan bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pada hakekatnya SPM rumah sakit merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan.

4.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Tahun 2026 terdapat 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 17 (tujuh belas) subkegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp83.754.023.520,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD ABADI	77,00 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	APBD, BLUD		77,50 Sangat Baik / BB	82.655.000.000
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	150.000.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI					2 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI					1 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	RSUD ABADI	100 Persen	335.000.000	APBD		100 Persen	335.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI						
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	2 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	3 Laporan	260.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	3 Laporan	260.000.000
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	1 Laporan	25.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	25.000.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	20.000.000	APBD		100 Persen	20.000.000
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	10.000.000
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	10.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI					100 Persen	700.000.000
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RSUD ABADI					1 Paket	600.000.000
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	450.000.000	APBD		-	1.200.000.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	12 Laporan	450.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	1.200.000.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	100 Persen				100 Persen	1.000.000.000
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	RSUD ABADI					1 Paket	1.000.000.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	RSUD ABADI	12 Bulan	15.249.023.520	APBD		12 Bulan	16.500.000.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	RSUD ABADI	12 Laporan	1.800.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	1.800.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD ABADI	12 Laporan	13.449.023.520	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	14.700.000.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	5.500.000.000	APBD		100 Persen	1.500.000.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	RSUD ABADI	1 Unit	300.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	500.000.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	RSUD ABADI	1 Unit	5.200.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	1.000.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	100 Persen	61.300.000.000	BLUD		100 Persen	61.400.000.000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	RSUD ABADI	1 Unit kerja	61.300.000.000	BLUD	Lihat Tabel 15	1 Unit kerja	61.400.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Penunjang Pelayanan							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	RSUD ABADI	50 Persen	700.000.000	APBD		50 Persen	171.000.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	RSUD ABADI	100 Persen	700.000.000	APBD		100 Persen	171.000.000.000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD ABADI					10 Unit	10.000.000.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD ABADI	1 Unit	500.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio	RSUD ABADI	1 Unit	200.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	160.000.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000							
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	RSUD ABADI					100 Persen	1.000.000.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD ABADI					60 Persen	1.000.000.000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD ABADI					300 Orang	1.000.000.000
					83.754.023.520				254.655.000.000

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

1. Pengembangan jenis layanan tingkat lanjut rawat jalan dalam rangka menjadi rumah sakit tipe B.
2. Peningkatan kapasitas rawat inap dalam rangka menjadi rumah sakit tipe B.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2026.
2. Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2026 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan Program dan kegiatan. Fungsi Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja adalah sebagai acuan dalam penyenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membantu pemerintah membangun Daerah dalam hal bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat Program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan berpedoman pada Renstra RSUD Dayaku Raja tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan akhir RKPD dan surat edaran dari Kepala Daerah, perihal penyampaian rancangan akhir RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja PD dengan berdasarkan *review* hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang berdasarkan Renstra PD. Hasil dari rancangan Renja PD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan nasional sebagai bahan penyusunan RKPD.

RSUD Dayaku Raja memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagaian urusan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, dengan Visi RPJMD tahun 2021- 2026

adalah " Mewuiudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang SeJahtera dan Berbahagia". Adapun misi RPJMD tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan lnfrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RSUD Dayaku Raja sebagai salah satu PD perlu untuk menyusun Rencana KerjaTahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja PD dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
19. Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1383/065.11/BAPP/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
    1. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaksanaan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Daerah.
    2. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/kegiatan.

b. Tujuan
    1. Untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan Daerah.
    2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Terdapat ada 4 (empat) Program yang dilaksanakan di dalam Renstra RSUD Dayaku Raja termasuk didalamnya yang mengakomodir kegiatan BLUD. Dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Begitu juga dengan Program dan kegiatan pada tahun 2024 secara fisik rata-rata sudah mencapai target kinerja, namun masih ada Program yang belum mencapai 100% (seratus persen) dari target kinerja dan keuangan mencapai 72,2 % (tujuh puluh dua koma dua persen).

Program-program yang realisasi fisiknya hampir mencapai 100 % antara lain :

No.	Program/ Indikator	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
a	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	42 Nilai
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
a	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	88 Persen	83 Persen
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
a	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	40 Persen	20 Persen
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
a	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100 Persen	100 Persen

Jika menelaah realisasi Program dan kegiatan yang di laksanakan oleh RSUD Dayaku Raja Kabupaten sampai dengan tahun 2024 ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mengalami peningkatan, namun demikian keluhan-keluhan yang lain akan tetap menjadi perhatian khusus yang harus ditangani secara baik oleh RSUD Dayaku Raja, dengan adanya hasil survey kepuasaan dengan nilai 87,52 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh dua persen) dari target 84,38 % (delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen) pasien puas terhadap pelayanan RSUD Dayaku Raja, ini merupakan bukti masyarakat sudah mulai memberikan rasa kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dayaku Raja sehingga secara tidak langsung dapat juga menumbuhkan daya saing yang sehat serta pertumbuhan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ekonomi. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan, dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan hal yang paling utama untuk belanja-belanja yang sifatnya operasional RSUD Dayaku Raja.

Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 secara langsung telah mampu mengelola pendapatannya sehingga hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memerlukan penanganan yang cepat dan sifat darurat dapat ditangani secara langsung menggunakan dana BLUD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)				Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2026)	
							Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Nilai	42	Nilai	80	Nilai	20	Nilai	25%	80 Nilai	142	167%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	120	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24 Dokumen	72	60%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	8	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	8	20%
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	20%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	20%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*5*	Laporan	*1*	Laporan	*1*	Laporan	*0*	Laporan	0%	*1* Laporan	2	40%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	0	0%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Dokumen	1	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	8%	12 Laporan	14	280%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1	Dokumen				1 Dokumen		
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*5*	Dokumen	*1*	Dokumen	*1*	Dokumen	*0*	Dokumen	0%	*1* Dokumen	2	40%
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	Dokumen	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 Laporan	3	60%
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang Milik daerah SKPD					1	Dokumen				1 Dokumen		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja - PD Tahun (2024)	Realisasi Renja -PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.01.2.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*250* Orang		*80* orang			*80* orang	80	32%
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250 Orang						0	0%
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Dokumen	Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	50	40%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*35* Layanan	*7* Layanan	*7* Layanan	*7* Layanan	100%	*7* Layanan	21	60%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 Jenis	11 Paket	11 Paket	11 Paket	100%	11 Paket	33	55%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	60%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	145 Jenis	30 Paket	30 Paket	30 Paket	100%	30 Paket	90	62%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	25000 Kotak	5000 Paket	5000 Paket	5000 Paket	100%	5000 Paket	15000	60%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 Kali	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36	60%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 paket	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	90	600%
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	15 Berkas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	20%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	60%
1.02.01.2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang di sediakan	50 Unit		500 unit			500 unit	500	1000%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)				Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2026)	
							Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	4	Bangunan			1	unit				1 unit	1	25%
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	500	M2	2	unit	1	unit	2	unit	200%	1 unit	5	1%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*60*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	100%	*12* Bulan	36	60%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	5000	Materai	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	36	1%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	36	60%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	36	60%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	60	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	36	60%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	350	Persen	12	bulan	58	Unit	12	bulan	21%	58 Unit	82	23%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	25	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5 Unit	15	60%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	60	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100%	16 Unit	48	80%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48	Kali	6	Unit	12	Unit	6	Unit	50%	12 Unit	24	50%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	60	Gedung	13	Gedung	13	Unit	13	Unit	100%	13 Unit	39	65%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				Kali	12	Unit		Kali		12 Unit	12	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	5	Nilai	1	Nilai	1	Nilai	1	Nilai	100%	1 Nilai	3	60%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien	135000	Pasien	12	unit kerja	12	unit kerja	12	unit kerja	100%	12 unit kerja	36	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja - PD Tahun (2024)	Realisasi Renja -PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	425 Persen	83 Persen	90 Persen	23 Persen	26%	90 Persen	196	46%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	350 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	100%	70 Persen	210	60%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di Bangun	2 Bangunan		1 unit			1 unit	1	50%
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun	15 Bangunan		3 unit			3 unit	3	20%
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	2 Bangunan	2 Unit	1 unit	2 unit	200%	1 unit	5	250%
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Ruangan		1 unit			1 unit	1	50%
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruangan yang di rehab	5 Ruangan		1 unit	Ruangan		1 unit	1	20%
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan yang di Rehab	5 Bangunan		1 unit			1 unit	1	20%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun	5 Bangunan		Bangunan	Bangunan		Bangunan		0%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia	5 Unit	2 Bangunan	Bangunan	Bangunan		Bangunan		0%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit	5 Paket		25 Unit	14 Unit	56%	25 Unit	39	780%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan	10 Paket		Jenis	Jenis		Jenis		0%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis dan Non Medis	30 Paket		Jenis	Jenis		Jenis		0%
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Luas Taman yang Dipelihara	28875 M2		M2	M2		M2		0%
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60 Kali		Bulan	Bulan		Bulan		0%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu Alat Kesehatan yang dipelihara	60 Kali	12 Bulan	12 unit	12 bulan	100%	12 unit	36	60%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		7 paket	7 paket	7 paket	7 paket		7 paket	21	300%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)				Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2026)	
							Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	375	Persen	75	Persen	75	Persen	75	Persen	100%	75 Persen	225	60%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	60	Bulan				Bulan		Bulan		Bulan		0%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	60	Kali	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	36	60%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi RS	5	Sertifikat	1	unit	1	unit	1	Dokumen	100%	1 unit	3	60%
1.02..02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	80	Persen	80	Persen	80	Persen	100%	80 Persen	240	240%
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	4	Kegiatan				Unit		Unit		Unit		0%
1.02.02.2.01.0022	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	3	300%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	80	Persen	20	Persen	60	Persen	15	Persen	25%	20 Persen	55	69%
1.02.03.2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	0%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	0%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	80	Persen	50	Persen	50	Persen	50	Persen		50 Persen	150	188%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	200	Orang	200	Orang		Orang	200	Orang		Orang	#VALUE!	#VALUE!
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	500	Persen	100	Persen	100	Persen	25	Persen	25%	100 Persen	225	45%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	5	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	100%	1 Jenis	3	60%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	210	Orang	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	6	3%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2018 ada 20 (dua puluh) jenis pelayanan yang wajib dilaksanakan rumah sakit dengan 160 (seratus enam puluh) indikator. Dengan capaian standar pelayanan minimal RSUD Dayaku Raja Indikator atau rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat, ada 8 (delapan) indikator yaitu ;
   a. Kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa (100%);
   b. Pemberian pelayanan gawat darurat bersertifikat yang masih berlaku (100%);
   c. Ketersediaan tim penanggulangan bencana (1 tim);
   d. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam;
   e. Waktu tanggap pelayanan dokter digawat darurat (respon time ≤ 5 menit);
   f. Tidak adanya keharusan membayar uang muka (100%);
   g. Kematian pasien di IGD ≤ 8 jam (≤ 2 perseribu); dan
   h. Kepuasan Pelanggan (≥70%).
2. Pelayanan Rawat Jalan, ada 10 (sepuluh) indikatoryaitu :
   a. Ketersediaan pelayanan (sesuai kelas RS);
   b. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis (sesuai kelas RS);
   c. Jam buka pelayanan dengan ketentuan 07.30 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat : 07.30-10.00 (100%);
   d. Waktu tunggu rawat jalan (≤ 60 menit);
   e. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis (100%);
   f. Pasien rawat jalan TB yang ditanganidengan strategi DOTS (100%);
   g. Ketersediaan Pelayanan VCT (tersedia dengan tenaga terlatih);
   h. Peresepan obat sesuai formularium (100%);
   i. Pencatatan dan pelaporan TB di RS (≥ 60%); dan
   j. Kepuasan pasien (≥ 90%).
3. Pelayanan Rawat Inap, ada 11 (sebelas) indikator yaitu :
   a. Ketersediaan pelayanan (Sesuai Kelas RS);
   b. Pemberian pelayanan di rawat inap (100%);
   c. Tempat tidur dengan pengaman (100%);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan (100%);
e. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap (100%);
f. Jam visit dokter spesialis 08.00 s/d 14.00 (≥80%);
g. Kejadian infeksi pasca operasi (≤1,5%);
h. Kejadian infeksi nosocomial (≤9%);
i. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian (100%);
j. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan Strategi DOTS (100%);
k. Pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit (≥ 60%);
l. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh (≤5%);
m. Kematian pasien ≥ 48 jam (≤24 perseribu); dan
k. Kepuasan pelanggan (≥ 90%).

4. Pelayanan Bedah Sentral, ada 16 (enambelas) indikator yaitu :
   a. Ketersediaan tim bedah (sesuai dengan kelas RS);
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi (sesuai dengan kelas rumah sakit);
   c. Kemampuan melakukan tindakan operatif (100%);
   d. Waktu tunggu operasi elektif (≤2 hari);
   e. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi (100%);
   f. Tidak adany akejadian operasi salah orang (100%);
   g. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi (100%);
   h. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi (100%);
   i. Komplikasi anestesi karena over dosis reaksi anestesi dan salah penempatan *endotracheal tube* (≤6%);
   j. Kejadiankematian di meja operasi (≤1%); dan
   k. Kepuasan pelanggan (≥ 90%).
5. Pelayanan Rawat Inap Persalinan dan Perinatologi, ada 15 (lima belas) indicator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan persalinan normal (100%);
   b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK terlatih);
   c. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (100%);
   d. Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gr (100%);
   e. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia (100%);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. Pertolongan persalinan melalui seksi ocaesaria nonrujukan (≤20%);
g. Pelayanan kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten (100%);
h. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih (100%);
i. Kematian ibu karena persalinan (a. perdarahan ≤ 1%; b. preklampsia ≤30%, c. Sepsis ≤0,2%); dan
j. Kepuasan pasien (≥80%).

6. Pelayanan Intensif, ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
   a. Pemberipelayanan (sesuai kelas RS);
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU (sesuai kelas RS);
   c. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator (sesuai kelas RS);
   d. Kepatuhan terhadap *hand hygiene* (100%);
   e. Kejadian infeksi nosocomial (≤9%);
   f. Pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam (≤ 3%); dan
   g. Kepuasan pelanggan (≥ 80 %).
7. Pelayanan Instalasi Radiologi, ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan radiologi (dokter spesialis radiologi, radiografer);
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai dengan kelas RS);
   c. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax (≤ 3 jam);
   d. Kerusakanfoto (≤ 2%);
   e. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (100%);
   f. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi (100%); dan
   g. Kepuasan pelanggan (≥80%)
8. Pelayanan Instalasi Laboratorium, ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik (dokter Sp.PK dan analis);
   b. Fasilitas dan peralatan (sesuai kelas RS);
   c. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik (≤120 menit);
   d. Tidak adanya kejadian tertukar specimen (100%);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

e. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS (tersedia tenaga, peralatan, dan reagen);
f. Kemampuan Mikroskopis TB Paru (tersedia);
g. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium (100%);
h. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium (100%);
i. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal (100%); dan
j. Kepuasan pelanggan (≥80%).

9. Pelayanan Instalasi Farmasi, ada 8 (delapan) indikator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan farmasi (Sesuai Kelas RS);
   b. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi (sesuai kelas rumah sakit)
   c. Ketersediaan formularium (tersedia dan *updated* paling lama 3 tahun);
   d. Waktu tunggu pelayanan obat jadi (≤ 30 menit);
   e. Waktu tunggu pelayanan obat racikan (≤ 60 menit);
   f. Tidak adanya kejadian kesalahanpemberian obat racikan (100%); dan
   g. Kepuasan pelanggan (≥80%).
10. Pelayanan Gizi, ada 6 (enam) indikator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan gizi (Sesuai kelas RS);
   b. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi (Sesuai kelas RS);
   c. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥ 90%);
   d. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (100%);
   e. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien (≤ 20%); dan
   f. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).
11. Pelayanan Transfusi Darah ada 4 (empat) indikator yaitu :
   a. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit (sesuai standar BDRS);
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit (sesuai standar BDRS);
   c. Kejadian infeksi transfuse (≤ 0,01%)
   d. Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit (100%); dan
   e. Kepuasan pelanggan (≥80%).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12. Pelayanan Rekam Medik, ada 6 (enam) indikator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan rekam medik (sesuai kelas RS);
    b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan (≤ 10 menit);
    c. Waktu penyediaan rekam medis pelayanan rawat inap (≤ 15 menit);
    d. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pelayanan (100%);
    e. Kelengkapan *informed concent* setelah mendapatkan informasi yang jelas (100%); dan
    f. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).
13. Pengelolaan Limbah, ada 4 (empat) indikator yaitu :
    a. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit (sesuai kelas RS);
    b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit (sesuai kelas RS);
    c. Pengelolaan limbah cair (sesuai kelas RS);
    d. Pengelolan limbah padat (sesuai kelas RS); dan
    e. Baku mutu limbah cair :
        1) BOD < 30 mg/l.
        2) COD < 80 mg/l.
        3) TSS < 30 mg/l.
        4) PH 6-9.
14. Administrasi dan Manajemen ada indikator yaitu :
    a. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi (≥ 90%);
    b. Adanya peraturan internal rumah sakit (sda);
    c. Adanya peraturan karyawan rumah sakit (ada);
    d. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan (ada);
    e. Adanya perencanaan strategis bisnis rumah sakit (ada);
    f. Adanya perencanaan pengembangan SDM (ada);
    g. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi (100%);
    h. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (100%);
    i. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala (100%);
    j. Pelaksana rencana pengembangan SDM (≥90%);
    k. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan (≥90%);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

l. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap (≤ 2 jam);
m. Cost recovery (≥ 60%);
n. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja (100%);
o. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun (≥ 60%); dan
p. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu (100%).

15. Ambulance ada 3 (tiga) indikator yaitu :
    a. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah (24 Jam);
    b. Penyedia pelayanan ambulas dan mobil jenazah (supir ambulans terlatih);
    c. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah (mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah);
    d. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit (≤ 30 menit);
    e. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan (≤ 30 menit);
    f. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian (100%); dan
    g. Kepuasan pelanggan (≥ 80%)
16. Pemulasaran Jenazah:
    a. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah (24 Jam);
    b. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah (sesuai kelas rumah sakit);
    c. Ketersedian tenaga di intstalasi perawtan jenazah (sesuai kelas rumah sakit);
    d. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah (100%);
    e. Perawatan jenazah sesuai standar *universal precaution* (100%);
    f. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (100%); dan
    g. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).
17. Pelayanan *Laundry* ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
    a. Ketersediaan pelayanan laundry (tersedia);
    b. Adanya penanggung jawab pelayanan *laundry* (SK direktur);
    c. Ketersediaan fasilitas dan peralatan *laundry* (sesuai kelas RS);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan (100%);
e. Ketepatan pengelolaan linen infeksius (100%);
f. Ketersediaan linen (2,5-3 set x jumlah tempat tidur); dan
g. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi (100%).

18. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ada 6 (Enam) indikator yaitu:
    a. Adanya penanggung jawab IPSRS (SK direktur):
    b. Ketersediaan bengkel kerja (tersedia);
    c. Waktu tanggap kerusakan ≤ 15 menit (80%);
    d. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan (100%);
    e. Ketepatan waktu kalibrasi alat (100%); dan
    f. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu (100%).
19. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) ada 6 (Enam) indikator yaitu :
    a. Adanya anggota tim PPI yang terlatih (Anggota tim PPI yang terlatih 75%);
    b. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen (≥ 75%);
    c. Rencana Program PPI (ada);
    d. Pelaksanaan Program PPI sesuai rencana (ada);
    e. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas (100%);
    f. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ *Healthcare Associated Infection* (HAI) di rumah sakit (≥75%).
20. Pelayanan Keamanan ada 6 (Enam) indikator yaitu :
    a. Petugas keamanan bersertifikat (100%);
    b. Sistem pengamanan (100%);
    c. Petugas keamanan melakukan keliling rumah sakit (100%);
    d. Evaluasi terhadap sistem pengamanan (100%);
    e. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (100%); dan
    f. Kepuasan pelanggan (≥ 90%).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C. 30

Pecapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dayaku Raja

NO	INDIKATOR SPM		SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		Catatan Hasil Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	PELAYANAN IGD	Kemampuan menangani life saving			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 TIM	0	1 Tim	1 Tim	
		Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 JAM	24 Jam	24 Jam	24 Jam	
		Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (respon time)			≤5 menit dilayani setelah pasien datang	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	4, 18 menit	1,98 menit	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	
		Tidak adanya keharusan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)			≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	0,009	0.0014	≤ 2 perseribu	≤ 2 perseribu	
		Kepuasan Pasien			≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	75%	85%	≥70%	≥70%	
2		Ketersediaan Pelayanan			sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	100%	-	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	
		Pemberi Pelayanan di Rawat Inap Dewasa							Dokter Residen	Dokter Residen			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PELAYANAN RAWAT INAP DEWASA				Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	
					a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	
					b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	
					d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	
									c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang			
									d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		Tempat tidur dengan Pengaman			100%	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%	
		Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan			100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Jam visit Dokter spesialis			08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	99%	-	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi			≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	-	≤1,5%	≤1,5%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤9%	≤9%	≤9%	≤9%	0%	-	≤9%	≤9%	
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pasien rawat inap tubercolocis yang ditangani dengan strategi DOTS			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	
		Pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	100%	100%	≥60%	≥60%	
		Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	4%	-	≤5%	≤5%	
		Kematian pasien ≥ 48 jam			≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	1%	-	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	
		Kepuasan pasien			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	82%	70%	≥90%	≥90%	
		Ketersediaan Pelayanan			sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	100%	-	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	
									Dokter Residen	Dokter Residen			
					Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3	PELAYAN-AN RAWAT INAP ANAK	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap Anak			a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	
					b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	
					d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang			d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	
									Dokter Spesialis	Dokter Spesialis			
									c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang			
									d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		Tempat tidur dengan Pengaman			100%	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%	
		Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan			100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Jam visit Dokter spesialis			08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	98%	-	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi			≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	-	≤1,5%	≤1,5%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤9%	≤9%	≤9%	≤9%	0%	-	≤9%	≤9%	
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pasien rawat inap tubercolocis yang ditangani dengan strategi DOTS			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	
		Pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	100%	100%	≥60%	≥60%	
		Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	7%	-	≤5%	≤5%	
		Kematian pasien ≥ 48 jam			≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	0,0013	-	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	
		Kepuasan pasien			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	84%	63%	≥90%	≥90%	
4		Pemberi pelayanan persalinan normal			Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	dokter spesialis	dokter spesialis	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	
					2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	dr Sp. Obgyn: 10rang dokter residen dr Sp. Obgyn: 10rang	dr Sp. Obgyn: 10rang dokter residen dr Sp. Obgyn: 10rang	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit			100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PELAYAN-AN RAWAT INAP KEBIDAN-AN	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi			Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, DokterResiden Sp.An, Dokter Residen Sp.A	Dokter SpOG, DokterResiden Sp.An, Dokter Residen Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	
		Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan			≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	16%	-	≤20%	≤20%	
		Pelayanan kontrasepsi mantap yang Dilakukan oleh tenaga kompeten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Kematian ibu karena persalinan			a. perdarahan ≤ 1%	a. perdarahan ≤ 1%	a. perdarahan ≤ 1%	a. perdarahan ≤ 1%	0%	-	a. perdarahan ≤ 1%	a. perdarahan ≤ 1%	
					b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	0%	-	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	
					c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	0%	-	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	
		Kepuasan pasien			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	85%	80%	≥80%	≥80%	
		Ketersediaan pelayanan			sesuai jenis dan klarifikasi RS	sesuai jenis dan klarifikasi RS	sesuai jenis dan klarifikasi RS	sesuai jenis dan klarifikasi RS	100%	100%	sesuai jenis dan klarifikasi RS	sesuai jenis dan klarifikasi RS	
		Pemberi pelayanan			Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Residen:	Dokter Residen:	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	PELAYAN-AN RAWAT JALAN				a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	
					b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 2 Orang	
					d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	
									Dokter Spesialis	Dokter Spesialis			
									a. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	a. dr.Sp. Bedah: 1 Orang			
									b. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	b. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		jam buka pelayanan dengan ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		waktu tunggu rawat jalan			≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	94,02 Menit	-	≤ 60 menit	≤ 60 menit	
		penegakkan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6	PELAYAN-AN LABORATOR IUM	Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)			tersedia dengan tenaga terlatih	tersedia dengan tenaga terlatih	tersedia dengan tenaga terlatih	tersedia dengan tenaga terlatih	100%	100%	tersedia dengan tenaga terlatih	tersedia dengan tenaga terlatih	
		peresepan obat sesuai formularium			100%	100%	100%	100%	94,64%	-	100%	100%	
		pencatatan dan pelaporan TB di RS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan Pasien			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	83,36%	88,60%	≥90%	≥90%	
		Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik			dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	100%	67%	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	
		Fasilitas dan peralatan			Sesuai kelas RS	Sesuai kelas RS	Sesuai kelas RS	Sesuai kelas RS	94%	47,81%	Sesuai kelas RS	Sesuai kelas RS	
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik			≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	71,69 Menit	68,77 Menit	≤120 menit	≤120 menit	
		Tidak adanya kejadian tertukar specimen			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kemampuan memeriksa HIV-AIDS			Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	100%	100%	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	
		Kemampuan Mikroskopis TB Paru			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium			Dokter spesialis:	Dokter spesialis:	Dokter spesialis:	Dokter spesialis:	100%	100%	Dokter spesialis:	Dokter spesialis:	
					1 dr Sp. Patologi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik			1 dr Sp. Patologi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	84,65%	-	≥80%	≥80%	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
7	PELAYAN-AN TRANSFU-SI DARAH	Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit			Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	100%	100%	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit			Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	95%	63,64%	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	
		Kejadian infeksi transfuse			≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	0%	0%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	
		Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit			100%	100%	100%	100%	98%	98,80%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	85%	-	≥ 80%	≥ 80%	
8	PELAYAN-AN FARMASI (Apotek rawat inap dan Apotek rawat jalan)	Pemberi pelayanan farmasi			Apoteker dan Asisten Apoteker	Apoteker dan Asisten Apoteker	Apoteker dan Asisten Apoteker	Apoteker dan Asisten Apoteker	100%	100%	Apoteker dan Asisten Apoteker	Apoteker dan Asisten Apoteker	
		Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi			Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	100%	100%	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	
		Ketersediaan formularium			Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Tersedia	Tersedia	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	
		Waktu tunggu pelayanan obat jadi			≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	10,5 menit	10,23 Menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan			≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	18,76 Menit	22,43 Menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	83%	98,28%	≥80%	≥80%	
9	PELAYANAN INTENSIF	Pemberi pelayanan			dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	Residen dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan (dari 12 Orang perawat 1 orang yang telah mengikuti pelatihan ICU)	Residen dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU			Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	100%	100%	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	
		Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator			Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	100%	100%	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	
		Kepatuhan terhadap *hand hygiene*			100%	100%	100%	100%	78%	80%	100%	100%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤21%	≤21%	≤21%	≤21%	0%	10,66%	≤21%	≤21%	
		Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam			≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0%	0%	≤ 3%	≤ 3%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	84%	-	≥ 80 %	≥ 80 %	
10	PELAYANAN GIZI	Pemberi pelayanan gizi			S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 gizi, tenga lain/juru masak	S1 Gizi dan tenaga lain/Juru masak	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

					yang terlatih								
		ketersediaan Fasilitas dan peralatan pelayanan Gizi			Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	43%	43%	Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	
		Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	89%	100%	≥90%	≥90%	
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien			≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	33%	0,33%	≤ 20%	≤ 20%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	82%	-	≥ 80%	≥ 80%	
11	Pemiliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Adanya penanggung jawab IPSRS			Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	
		Ketersediaan bengkel kerja			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Waktu tanggap kerusakan			≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	92%	80%	≥80 %	≥80 %	
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan			100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu kalibrasi alat			100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
		Alat ukur dan alat laboratorium yang dkalibrasi tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12	PELAYAN-AN RADIOLO-GI	Pemberi pelayanan radiologi			Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis Radiologi Dan radiografer	Dokter Residen Radiologi Dan radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi			Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	100%	59%	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	
		Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	32,72 Menit	1,35 Menit	≤ 3 jam	≤ 3 jam	
		Kerusakan foto			≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	7,67%	2,46%	≤ 2%	≤ 2%	
		Tidak terjadinya kesalahan pemberian label			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi			Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	100%	100%	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	
		Kepuasan pelanggan			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	89%	96,69%	≥80%	≥80%	
13	PENGO-LAHAN LIMBAH	Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit			Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Adanya SK direktur penang-gung jawab	Adanya SK direktur penang-gung jawab	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	RUMAH SAKIT	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit : padat, cair			Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan permenkes No.1204 Tahun 2005	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan permenkes No.1204 Tahun 2006	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan permenkes No.1204 Tahun 2007	60%	60%	60%	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan permenkes No.1204 Tahun 2007	60%	
		Pengelolaan limbah cair			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengelolaan limbah padat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Baku mutu limbah cair :											
		a. BOD < 30 mg/l			a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	27,32 mg/l	-	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	
		b. COD < 80 mg/l			b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	45,23 mg/l	-	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	
		c. TSS < 30 mg/l			c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	3,68 mg/l	-	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	
		d. PH 6-9			d. PH 6-10	d. PH 6-11	d. PH 6-12	d. PH 6-13	PH 6,97	-	d. PH 6-12	d. PH 6-13	
14	PELAYAN-AN LAUNDRY	Ketersediaan pelayanan laundry			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Adanya penanggung jawab pelayanan laundry			Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan pengelolaan linen infeksius			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
		Ketersediaan linen			2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	100%	100%	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	
		ketersediaan linen steril untuk kamar operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	PELAYANAN KAMAR OPERASI	Ketersediaan tim bedah			Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter spesialis bedah 1 orang	Dokter spesialis bedah 1 orang	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	
					dr.Sp.Bedah 2 orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	dr.Sp.Be-dah 2 orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	-	Dokter Residen Bedah 1 Orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	
		Ketersediaan Fasilitas Dan Peralatan Operasi			Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	100%	51,60%	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	
		Kemampuan Melakukan Tindakan Operatif			Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	100%	100%	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	
		Waktu tunggu operasi elektif			≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	1 Hari	1 Hari	≤2 hari	≤2 hari	
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Komplikasi anestesi karena overdosis reaksi anestesi dan salah penenempatan endotracheal tube			≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	0%	0,32%	≤6%	≤6%	
		Kejadian kematian di meja operasi			≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	0%	0%	≤1%	≤1%	
		Kepuasan Pelanggan			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	87%	-	≥80%	≥80%	
16	PELAYAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH	Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
		Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah			Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	Belum Terlatih	Belum Terlatih	Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	
		Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah			Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Tersedia	Tersedia	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulans /mobil jenazah di rumah sakit			≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	13,15 Menit	-	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan			≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	13,73 Menit	-	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	74,74%	-	≥ 80%	≥ 80%	
17	PELAYANAN KAMAR JENAZAH	Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
		Ketersediaan fasilitas kamar jenazah			Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Tersedia	Tersedia	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	
		Ketersediaan tenaga di Instalasi perawatan jenazah			Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Adanya SK direktur	Adanya SK direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	
		Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah			100%	100%	100%	100%	91%	-	100%	100%	
		Perawatan jenazah sesuai *standar universal precaution*			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	76,15%	-	≥ 80%	≥ 80%	
18	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	Adanya anggota tim PPI yang terlatih			Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	65%	65%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	
		Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%	
		Rencana program PPI			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Pelaksanaan program PPI sesuai rencana			100%	100%	100%	100%	50%	67%	100%	100%	
		Penggunaan APD saat melaksanakn tugas			100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ *Healthcare Associated Infection* (HAI) di rumah sakit			75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
19	PELAYANAN KEAMANAN	Petugas keamanan bersertifikat pengamanan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Sistem pengamanan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Petugas keamanan melakukan keliling RS			Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	
		Evaluasi terhadap sistem pengamanan			Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	
		Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pasien			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	-	-	≥ 90%	≥ 90%	
20	MANAJE-MEN	Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	92,85%	-	≥ 90%	≥ 90%	
		Adanya peraturan internal rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya peraturan karyawan rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya perencanaan pengembangan SDM			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pelaksana rencana pengembangan SDM			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	-	-	≥ 90%	≥ 90%	
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	-	-	≤ 2 jam	100%	
		Cost Recovery			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	100%	≥ 60%	100%	
		Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Karyawan mndapat pelatihan minimal 20 jam pertahun			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	5,62%	-	≥ 60%	100%	
		Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	PELAYANAN REKAM MEDIK	Pemberi pelayanan Rekam Medik			Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	50%	50%	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	
		Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan			≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	5,59 Menit	-	≤ 10 menit	≤ 10 menit	
		Waktu penyediaan rekam medik pelayanan rawat inap			≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	7,17 Menit	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	

		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	100%	66%	-	100%	100%	
		Kelengkapan *Informed Concent* setelah mendapatkan informasi yang jelas			100%	100%	100%	100%	70%	-	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	82,39%	-	≥ 80%	≥ 80%	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kinerja RSUD Dayaku Raja secara umum bisa dikatakan baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja Renstra maupun kinerja SPM, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

RSUD Dayaku Raja adalah rumah sakit tipe D yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dan penataan, baik sistem maupun sarana prasarananya. Pengembangan yang dilakukan saat ini berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan dan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Jika dilihat dari perkembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana banyak bermunculan perusahaan-perusahaan pertambangan, menuntut rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang berorientasi terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, maupun penyakit akibat kerja. Dari hasilidentifikasipermasalahan yang ada di RSUD Dayaku Raja, maka ada beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Dayaku Raja, meliputi :

1. Upaya pencapaian standar pelayanan minimal melalui evaluasi kepuasan pasien terkait dengan respon time pelayanan.
2. Terbatasnya peralatan rumah sakit. Dengan adanya renovasi gedung-gedung pelayanan dikarenakan adanya perubahan dari rumah sakit tanpa kelas menjadi rumah sakit yang terbagi menjadi beberapa kelas di RSUD Dayaku Raja terdapat beberapa peralatan yang harus di penuhi, termasuk juga penggantian peralatan yang rusak.
3. Belum standarnya jumlah SDM pelayanan rumah sakit, terutama tentang ketersediaan dokter spesialis yang merupakan standar rumah sakit tipe D. Untuk itu perlu melakukan kerjasama dokter spesialis, pemberian insentif yang besar, dan memenuhi fasilitas pendukungnya.
4. RSUD Dayaku Raja sebagai rumah sakit rujukan dari 8 (delapan) kecamatan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini memiliki ruang perawatan yang belum sesuai dengan standar dari Kementrian Kesehatan, serta alat kesehatan dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. RSUD Dayaku Raja sebagai rumah sakit mulai beroperasi tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2025 dan perubahan status dari PD menjadi UOBK dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara masih dalam tahap persiapan untuk melengkapi baik dari segi SDM, sarana dan prasarana, perangkat manajemen sehingga membutuhkan alokasi dana untuk pendidikan dan pelatihan, peralatan kesehatan, dan bangunan yang cukup tinggi.
6. Rendahnya kemampuan rumah sakit dalam upaya optimalisasi kerjasama dengan BPJS kesehatan dikarenakan minimnya sumber daya rumah sakit, terutama ketersediaan SDM kesehatan dokter spesialis.
7. Upaya dari rumah sakit yang harus memenuhi standarisasi rumah sakit yang sudah terakreditasi, maka banyak memerlukan perubahan-perubahan ruangan, kelengkapan fasilitas dan alat kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia yang telah memiliki sertifkasi, serta alur standar pelayanan minimal yang sesuai.

Selain itu sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa tema isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persepsi seluruh pegawai terhadap tuntutan budaya akreditasi.
2. Kompetensi dan keterampilan *(Soft Skill dan Hard Skill)* SDM kesehatan dan SDM manajemen.
3. Pengembangan layanan dan pengembangan jejaring kemitraan strategis.
4. Kepercayaan pelanggan yang masih kurang.
5. Rencana BPJS Kesehatan mengenai penerapan kelas standar BPJS Kesehatan, yaitu rawat inap kelas standar dalam program BPJS Kesehatan ini nantinya akan menghapus system kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) sehingga kelas standa hanya akan terbagi menjadi dua kriteria yakni, kelas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas untuk peserta Non-PBI. Hal ini membuat perubahan besar dalam tata kelola pelayanan rumah sakit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD Dayaku Raja telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja RSUD Dayaku Raja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

RSUD Dayaku Raja, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Dayaku Raja. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Dayaku Raja.

Dalam pengajuan jumlah pagu anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan pagu final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga PD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2026. Maka untuk merespon isu-isu strategis yang telah teridentifikasi, dituangkan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, yang tertuang dalam Sub Kegiatan pada Tabel TC- 31.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD 2026 (Sesuai E-RPJMD)					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB) Nilai	44,628,521,953	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB) Nilai	23,112,566,073	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	24 Dokumen	250,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	24 Dokumen	150,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	50,000,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	100,000,000	
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	1	Laporan	4,181,271,953		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	1	Laporan	181,271,953	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	4,000,000,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan		
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	181,271,953		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	181,271,953	
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	1	Dokumen	50,000,000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	1	Dokumen	50,000,000	
1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	50,000,000		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	50,000,000	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

IV		Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	80	Orang	300,000,000		Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	80	Orang	300,000,000	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	Orang	250,000,000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	Orang	250,000,000	
2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	50,000,000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	50,000,000	
V		Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7	Layanan	1,237,500,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7	Layanan	852,500,000	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	Jenis	100,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	Jenis	100,000,000	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Jenis	200,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Jenis	200,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	Jenis	250,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	Jenis	100,000,000	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	5,000	Orang	150,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	5,000	Orang	150,000,000	
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	kali	290,000,000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	kali	150,000,000	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Orang	135,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Orang	100,000,000	
7		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1	Berkas	112,500,000		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1	Berkas	52,500,000	
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	2,000,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	1	Bangunan/ Gedung	1,000,000,000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	1	Bangunan/Gedung		
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	100	Meter Persegi	1,000,000,000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	3	Unit		
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	12	Bulan	23,009,750,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	12	Bulan	7,278,794,120	
1		Penyediaan Jasa surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9,750,000		Penyediaan Jasa surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9,750,000	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1,000,000,000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1,000,000,000	
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	200,000,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	200,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dayaku Raja	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	12	Bulan	21,800,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dayaku Raja	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	12	Bulan	6,069,044,120	
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Barang Milik Daerah	58	Unit	1,600,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Barang Milik Daerah	41	Unit	2,300,000,000	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	Unit	100,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1	Unit	100,000,000	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	16	Unit	600,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	16	Unit	500,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	kali	200,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	kali	1,200,000,000	
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	13	unit	200,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	0	unit	-	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	12	kali	500,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	12	kali	500,000,000	
IX		Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	1	Nilai	12,000,000,000		Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	1	Nilai	12,000,000,000	
1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	Unit Kerja	12,000,000,000		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	Unit Kerja	12,000,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Dayaku Raja	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85	Persen	21,290,264,030		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Dayaku Raja	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85	Persen	5,500,000,000	
I		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD Dayaku Raja	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	70	Persen	17,870,264,030		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD Dayaku Raja	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	70	Persen	5,500,000,000	
1		Pembangunan Fasilitas kesehatan lainya	RSUD Dayaku Raja	jumlah Fasilitas Kesehatan yang di bangun	1	Bangunan/ Gedung	500,000,000		Pembangunan Fasilitas kesehatan lainya	RSUD Dayaku Raja	jumlah Fasilitas Kesehatan yang di bangun	1	Bangunan/Gedung	5,500,000,000	
2		Pembangunan Rumah dinas tenaga kesehatan	RSUD Dayaku Raja	jumlsh rumah dinas dokter spesialis yang di bangun	3	Bangunan/ Gedung	1,000,000,000		Pembangunan Rumah dinas tenaga kesehatan	RSUD Dayaku Raja	jumlsh rumah dinas dokter spesialis yang di bangun	0	Bangunan/Gedung	-	
3		Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk	1	Bangunan/ Gedung	500,000,000		Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk	2	Bangunan/Gedung		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit							minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				
4		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainya	1	Ruang	500,000,000		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Ruang		
5		Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Ruangan yang di rehab	1	Ruang	200,000,000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Ruangan yang Direhab	14	Ruang		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	Unit	250,000,000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	Unit		
7		Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan yang di bangun	1	Bangunan/ Gedung	500,000,000		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan yang di bangun			-	
8		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Prasarana pendukung Rumah Sakit yang tersedia	2	Bangunan/ Gedung	350,000,000		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Prasarana pendukung Rumah Sakit yang tersedia			-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

9		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	Unit Pelayanan	1,000,000,000		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	Unit Pelayanan		
10		Pengadaan Obat Vaksin,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Obat - obatan dan Perbekalan Kesehatan	2	Jenis	5,500,000,000		Pengadaan Obat Vaksin,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Obat - obatan dan Perbekalan Kesehatan	5	Paket		
12		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Luas taman yang di Pelihara	5775	Meter Persegi	770,264,030		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Luas taman yang di Pelihara			-	
13		Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu pemeliharaan Perasarana	12	Bulan	1,000,000,000		Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu pemeliharaan Perasarana			-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

14		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu pemeliahraan Alat Kesehatan yang Di pelihara	12	Bulan	800,000,000		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu pemeliahraan Alat Kesehatan yang Di pelihara	12	Bulan		
II		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	75	Persen	3,270,000,000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	75	Persen	-	
1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	12	Bulan	2,270,000,000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	12	Bulan	-	
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	12	Bulan	800,000,000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	12	Bulan		
3		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Sertifikat Akreditasi RS	1	Dokumen	200,000,000		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Sertifikat Akreditasi RS	1	Dokumen		
III		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RSUD Dayaku Raja	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80	Persen	100,000,000		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RSUD Dayaku Raja	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80	Persen	-	

1		Pengadaan Alat/perangkat Sistem informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	1	Kegiatan	100,000,000		Pengadaan Alat/perangkat Sistem informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	0	Kegiatan	-	
									Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen		
IV		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	1	Dokumen	50,000,000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	1	Dokumen	-	
1		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	50,000,000		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	
C		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	20	Persen	100,000,000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	20	Persen	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	50	Persen	100,000,000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	50	Persen	-	
1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	50	Orang	100,000,000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	50	Orang		
D		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100	Persen	2,500,000,000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100	Persen	1,500,000,000	
I		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1	Jenis	2,500,000,000		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1	Jenis	1,500,000,000	
1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	2	Dokumen	2,500,000,000		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	2	Dokumen	1,500,000,000	
Total							63,518,785,983		Total					30,112,566,073	-38,406,219,910

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini tidak ada terhadap Program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di RSUD Dayaku Raja. Dari hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan tidak ada usulan Program atau kegiatan masyarakat dari pemangku kepentingan di Tahun 2026 yang langsung tertuju pada PD RSUD Dayaku Raja.

Tabel T-C. 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Dayaku Raja seharusnya mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan termasuk kebijakan nasional mengenai kesehatan. Arah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh RSUD Dayaku Raja berpedoman pada permasalahan dan mempertimbangkan tantangan kedepan.

Pada dasarnya RSUD Dayaku Raja telah melakukan apa yang menjadi kebijakan nasional di bidang kesehatan dan melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan, salah satu contoh misalnya menekan angka kematian ibu dan bayi, pengobatan pasien TB, dan Program *Suistanable Development Goals (SDG's)* dan melayani peserta jaminan kesehatan nasional. RSUD Dayaku Raja harus mampu menterjemahkan sasaran-sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ke dalam Program dan kegiatan di RSUD Dayaku Raja agar tujuan yang lebih besar dapat dicapai secara bersama-sama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan (*performance indicator*). Tujuan dan sasaran dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua Program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 didasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Dayaku Raja 2021-2026. Tujuan Rencana Kerja RSUD Dayaku

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Raja tahun 2026 yaitu, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja ”, sedangkan sasaran Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 yaitu, “Peningkatan Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja”.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaian pada periode tahun tertentu. Dimana setiap indikator pencapaian tujuan dan sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Selanjutnya penetapan indikator tujuan dan sasaran RSUD Dayaku Raja secara menyeluruh, diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas sehingga seluruh kebijakkan dan Program pilihan yang akan dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi Program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah, dan prioritas PD dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 direncanakan melaksanakan 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan total belanja sebesar Rp30.112.566.073,00 (tiga puluh miliar seratus dua belas lima ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
   1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026.
   2. Mempedomani RKPD tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026.
   3. Mempedomani Renstra RSUD Dayaku Raja tahun 2021-2026 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
   4. Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis RSUD Dayaku Raja berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan.
6. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal RSUD Dayaku Raja yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja tahun 2025 sebanyak 4 (Empat) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapisitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja tahun 2026 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan
3. Jumlah subkegiatan akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja tahun 2026 sebanyak 24 (dua puluh empat) subkegiatan.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/kegiatan/subkegiatan pada Rencana Kerja tahun 2026 sebesar Rp30.112.566.073,00 (tiga puluh milyar seratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam tujuh puluh tiga rupiah) yang bersumber dari dana APBD dan BLUD RSUD Dayaku Raja.

c. Rumusan Program dan kegiatan memiliki beberapa subkegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya tambahan pagu anggaran pada beberapa subkegiatan berdasarkan analisa kebutuhan belanja dan hasil evaluasi tahun 2024.

d. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana Program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja tahun 2026 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 3.3.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel -C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026(N)					Catatan Penting	Rencana Tahun 2027 (+N)		
			Lokasi Detail	Target capaian kinerja (%)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5		6	9	10	11		12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	80 (BB)	Nilai	23,112,566,073	APBD		80 (BB)	Nilai	23,112,566,073
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	RSUD Dayaku Raja	24	Dokumen	150,000,000	APBD		24	Dokumen	150,000,000
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	4	Dokumen	50,000,000	APBD		4	Dokumen	50,000,000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	12	Dokumen	100,000,000	APBD		12	Dokumen	100,000,000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	RSUD Dayaku Raja	1	Laporan	181,271,953	APBD		1	Laporan	181,271,953
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	12	Laporan	181,271,953	APBD		12	Laporan	181,271,953

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	RSUD Dayaku Raja	1	Dokumen	50,000,000	APBD		1	Dokumen	50,000,000
1.02.01.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	RSUD Dayaku Raja	1	Laporan	50,000,000	APBD		1	Laporan	50,000,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	RSUD Dayaku Raja	80	Orang	300,000,000	APBD		80	Orang	300,000,000
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	50	Orang	250,000,000	APBD		50	Orang	250,000,000
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Dayaku Raja	25	Orang	50,000,000	APBD		25	Orang	50,000,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	RSUD Dayaku Raja	7	Layanan	852,500,000	APBD		7	Layanan	852,500,000
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	RSUD Dayaku Raja	11	Jenis	100,000,000	APBD		11	Jenis	100,000,000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	RSUD Dayaku Raja	1	Jenis	200,000,000	APBD		1	Jenis	200,000,000
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	RSUD Dayaku Raja	30	Jenis	100,000,000	APBD		30	Jenis	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	RSUD Dayaku Raja	5,000	Orang	150,000,000	APBD		5,000	Orang	150,000,000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	RSUD Dayaku Raja	12	kali	150,000,000	APBD		12	kali	150,000,000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	30	Orang	100,000,000	APBD		30	Orang	100,000,000
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	RSUD Dayaku Raja	1	Berkas	52,500,000	APBD		1	Berkas	52,500,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*		12	Bulan	7,278,794,120	APBD		12	Bulan	7,278,794,120
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	12	Bulan	9,750,000	APBD		12	Bulan	9,750,000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Dayaku Raja	12	Bulan	1,000,000,000	APBD		12	Bulan	1,000,000,000
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	12	Bulan	200,000,000	APBD		12	Bulan	200,000,000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	RSUD Dayaku Raja	12	Bulan	6,069,044,120	APBD		12	Bulan	6,069,044,120
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	RSUD Dayaku Raja	41	Unit	2,300,000,000	APBD		41	Unit	2,300,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	RSUD Dayaku Raja	1	Unit	100,000,000	APBD		1	Unit	100,000,000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	RSUD Dayaku Raja	16	Unit	500,000,000	APBD		16	Unit	500,000,000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	RSUD Dayaku Raja	12	kali	1,200,000,000	APBD		12	kali	1,200,000,000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi		12	kali	500,000,000	APBD		12	kali	500,000,000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	Nilai	12,000,000,000	BLUD		1	Nilai	12,000,000,000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Dayaku Raja	5	Unit Kerja	12,000,000,000			5	Unit Kerja	12,000,000,000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	RSUD Dayaku Raja	85	Persen	5,500,000,000			85	Persen	5,500,000,000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	RSUD Dayaku Raja	70	Persen	5,500,000,000	APBD		70	Persen	5,500,000,000
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas kesehatan lainya	jumlah Fasilitas Kesehatan yang di bangun	RSUD Dayaku Raja	1	Bangunan/Gedung	5,500,000,000	APBD		1	Bangunan/Gedung	5,500,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	RSUD Dayaku Raja	100	Persen	1,500,000,000	APBD		100	Persen	1,500,000,000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	RSUD Dayaku Raja	1	Jenis	1,500,000,000	APBD		1	Jenis	1,500,000,000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	RSUD Dayaku Raja	2	Dokumen	1,500,000,000	APBD		2	Dokumen	1,500,000,000
total						30,112,566,073					30,112,566,073

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 merupakan hasil usaha para pemangku kepentingan dalam hal ini unit kerja bidang dan bagian. Renacana Kerja ini pun tidak luput dengan memperhatikan Renstra RSUD Dayaku Raja tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2026. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dapat tersusun dari hasil dari monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dayaku Raja.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Rencana Kerja tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2026. Guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

5.1 Catatan dalam Penyusunan Rencana Kerja

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 antara lain :

a. Rencana Kerja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi RSUD Dayaku Raja.
b. Perumusan Program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah.
c. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 berpedoman pada Renstra RSUD Dayaku Raja tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2065 perlu dilakukan penyesuaian, terutama

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029.

d. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja juga berpedoman pada RKPD tahun 2026 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

e. Rencana Kerja Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, siknronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target PD serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA RSUD Dayaku Raja tahun Anggaran 2026.

b. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

d. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Daerah jangka menengah, maka diperlukan langkag-langkah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya.
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam perubahan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2026.
d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
e. Seluruh aparatur RSUD Dayaku Raja berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

f. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Dayaku Raja, seluruh aparatur RSUD Dayaku Raja secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN TENGGARONG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat Program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) PD, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, Renja-PD berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan jangka menengah (Renstra) dan penganggaran tahunan (RAPBD).

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, penyusunan Renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tenggarong dilaksanakan melalui pendekatan:

1. Teknokratis, berbasis analisis kinerja tahun sebelumnya, kondisi eksisting, peluang dan tantangan, tujuan, strategi, serta prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja.
2. Partisipatif, melalui keterlibatan pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta menjamin keterwakilan kelompok rentan, perempuan, dan masyarakat marjinal.
3. Politis, yang mencerminkan sinergi antara visi, misi, dan janji kepala daerah terpilih dengan aspirasi masyarakat, termasuk hasil penyerapan aspirasi oleh DPRD.
4. *Top-down* dan *Bottom-up*, untuk memastikan konsistensi perencanaan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan, selaras dengan visi misi daerah, RPJMD, RKPD, dan RTRW, sekaligus mengakomodasi kebutuhan prioritas yang muncul dari masyarakat.

Renja Kecamatan Tenggarong Tahun 2026 juga memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan baik melalui program dan kegiatan PD maupun melalui dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan ini, dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi panduan yang komprehensif, terukur, partisipatif, serta akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042; 17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;

14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Tenggarong.
2. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tenggarong sesuai tugas pokok dan fungsi.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan Kecamatan Tenggarong Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
4. Menyediakan acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan.
5. Menjadi dasar evaluasi kinerja dan perencanaan bagi pelaksanaan tugas Kecamatan pada periode berikutnya.

Tujuan Rencana Kerja ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas Kecamatan Tenggarong dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu “mewujudkan masyarakat kutai kartanegara yang sejahtera dan bahagia”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Tenggarong telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat

desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan Musrenbang Daerah.

b. Menyusun Renja-PD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tenggarong ditunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan perangkat daerah dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	357	Nilai	133,6	Nilai	70	Nilai	70,33	Nilai	100%	75	278,93	78%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Dokumen	14	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	7	28	80%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	8	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	470	Dokumen	251	Dokumen	94	Dokumen	94	Dokumen	100%	94	439	93%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75	Laporan	30	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100%	15	60	80%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	48	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	180	Laporan	72	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100%	36	144	80%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750	Orang/bulan	700	Orang/bulan	350	Orang/bulan	350	Orang/bulan	100%	350	1400	80%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	8	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	48	80%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5	unit	2	unit	1	unit	1	unit	100%	1	4	80%
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	4	80%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	76	orang	19	orang	19	orang	19	orang	100%	19	57	75%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76	Paket	19	Paket	19	Paket	19	Paket	100%	19	57	75%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	35	Layanan	14	Layanan	7	Layanan	7	Layanan	100%	7	28	80%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Paket	26	Paket	13	Paket	13	Paket	100%	13	52	80%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125	Paket	50	Paket	25	Paket	25	Paket	100%	25	100	80%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	15	75%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	365	Paket	146	Paket	73	Paket	73	Paket	100%	73	292	80%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	6	Paket	3	Paket	3	Paket	100%	3	12	80%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	10	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	20	80%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	12	80%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	480	Unit	192	Unit	96	Unit	96	Unit	100%	96	384	80%

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30	Unit	12	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	24	80%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	3	75%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	15	75%
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	4	80%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	48	80%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	4	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	400	Laporan	160	Laporan	80	Laporan	80	Laporan	100%	80	320	80%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	48	80%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1030	Laporan	412	Laporan	206	Laporan	206	Laporan	100%	206	824	80%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	175	Unit	70	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	140	80%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	175	Unit	70	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	140	80%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	175	Unit	70	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	140	80%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100%	7	21	75%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	3	75%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	3	75%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	400	Persen	160	Persen	80	Persen	80	Persen	100%	80	320	80%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	Kegiatan	4	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	2	8	80%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	48	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	4	80%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	500	Presen	200	Presen	100	Presen	100	Presen	100%	100	400	80%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	180	Kegiatan	72	Kegiatan	36	Kegiatan	36	Kegiatan	100%	36	144	80%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	3	75%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	120	Kegiatan	48	Kegiatan	24	Kegiatan	24	Kegiatan	100%	24	96	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4125	Lembaga Kemasyarakatan	1650	Lembaga Kemasyarakatan	825	Lembaga Kemasyarakatan	825	Lembaga Kemasyarakatan	100%	825	3300	80%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	500	Unit	200	Unit	100	Unit	100	Unit	100%	100	400	80%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2120	Pokmas / Ormas	848	Pokmas / Ormas	424	Pokmas / Ormas	424	Pokmas / Ormas	100%	424	1696	80%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1440	Lembaga	576	Lembaga	288	Lembaga	288	Lembaga	100%	288	1152	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6640	Lembaga Kemasyarakatan	2656	Lembaga Kemasyarakatan	1328	Lembaga Kemasyarakatan	1328	Lembaga Kemasyarakatan	100%	1328	5312	80%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1200	Lembaga Kemasyarakatan	480	Lembaga Kemasyarakatan	240	Lembaga Kemasyarakatan	240	Lembaga Kemasyarakatan	100%	240	960	80%
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	60	Unit	24	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	48	80%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	500	Persen	200	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	400	80%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	4	Desa	2	Desa	2	Desa	100%	2	8	80%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
											Target Renja-PD tahun (2024)		Realisasi Renja-PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	3	75%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat Program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa Program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Rencana Kerja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Kecamatan Tenggarong, merupakan PD sebagai unsur penunjang PD dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat Daerah, sehingga Daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat di Daerah. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tenggarong, namun secara umum,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelayanan di Kecamatan Tenggarong dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong selama kurun waktu tahun 2022 - 2026 cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tenggarong, yaitu : (Tabel T-C 30)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-		75	75	80	80	85	79,06	89,39	-	85	-	-
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-		75	68	65	60	50	100	100	100	50	-	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		75	76	78	79	80	Tidak ada penilaian dari inspektorat	70,33	70,55	80	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah di kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku pelayanan publik camat juga menerima tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang di limpahkan oleh Bupati, menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Sebagaimana yang dimaksud di atas kecamatan juga merupakan PD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sedangkan fungsi kecamatan sebagai berikut :

1. Menyusun Program dan rencana kegiatan kecamatan.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh kelurahan dan desa dalam menyusun rencana pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, keamanan dan ketertiban kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pelayanan terpadu (paten) yang akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tenggarong.
4. Melakukan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat seperti, lembaga adat, posyandu, karang taruna, PKK, RT, LPM, dan linmas.
5. Meningkan Sumber Daya Manusia untuk kader posyandu dan meningkatkan kemampuan anggota linmas dengan mengadakan pelatihan.

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

I. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan:

- Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan
- Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata secara sistematis
- Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait
- Pemahaman masyarakat tentang dokumen adminitrasi kependudukan dan standar operasional pelayanan masih minim

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Kapasitas aparatur pemerintah belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas
- Lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah
- Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

II. Tantangan dan Peluang

Kecamatan Tenggarong masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal;
4. Kapasitas kelembagaan kelurahan belum optimal; dan
5. Peningkatan infrastruktur masih kurang dan belum merata.

Sedangkan peluang dalam melaksanakan pelayanan di Kecamatan Tenggarong, antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2. Membenahi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
3. Melaksanakan dan mengikuti pelatihan dalam pelayanan publik sehingga terjadi peningkatan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

III. Isu strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan melalui multi stakeholder yang ada di wilayah kecamatan
5. Melakukan Sosialisasi Kepada warga Kelurahan dan Desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga.
6. Mengundang pihak perusahaan yang ada diwilayah Kecamatan Tenggarong dalam kegiatan musrenbang kelurahan dan desa serta musrenbang kecamatan dalam rangka melakukan singkronisasi rencana Program kegiatan yang ada di kelurahan dan desa yang dapat dibantu oleh pihak perusahaan.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 *review* Rancangan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. (Tabel T-C 31)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C-31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
KECAMATAN TENGGARONG						91.822.790.520						77.990.000.700	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TENGGARONG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	42.287.541.899	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TENGGARONG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	50.157.759.879	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	230.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	270.000.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	40.000.000	Dokumen Renja dan Renja Perubahan
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	0	0	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	30.000.000	Laporan Manajemen Resiko; Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau); Dan LKJIP
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TENGGARONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	0	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TENGGARONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	200	200.000.000	BECIK; Kecamatan Sebagai Pusat Data
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	36	35.760.526.292	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	36	45.917.985.841	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	350	34.831.839.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	350	44.939.298.557	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	878.687.284	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	978.687.284	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	1	51.604.584	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	1	101.604.584	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	1	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	1	0	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TENGGARONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TENGGARONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	769.311.405	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	374.380.456	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	234.905.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	25.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	73	121.542.457	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	73	125.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TENGGARONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	84.193.954	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TENGGARONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	39.365.482	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	117.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	50.000.000	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	74.014.980	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	12	543.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	12	88.680.000	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	0	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	TENGGARONG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	Pengadaan Mebel	TENGGARONG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	0	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	203.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	150.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	88.680.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	4.285.639.914	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	3.145.108.998	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.510.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	720.317.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	836.220.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	206	3.540.743.636	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	206	2.286.320.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	35	627.459.704	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	35	260.000.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	84.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	60.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	44.059.704	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	100.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	86.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	0	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	375.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	100.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	38.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	TENGGARONG	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	80	41.285.999.848	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	TENGGARONG	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	80	13.050.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	350.000.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	200.000.000	Fasiltasi Kegiatan Erau; Stunting (Rembuk, Operasional Tpps Kecamatan)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	150.000.000	Hut RI Di Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	1	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	100.000.000	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal); Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	TENGGARONG	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	41.285.999.848	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	TENGGARONG	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	12.600.000.000	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	205.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	200.000.000	Fasilitasi Paten; Penanganan Darurat Bencana
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	41.080.999.848	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	60	12.400.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TENGGARONG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	8.169.248.773	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TENGGARONG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	14.387.240.821	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	TENGGARONG	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	36	35.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	TENGGARONG	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	75.000.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	35.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	75.000.000	Evaluasi Kinerja Pelayanan Kelurahan Dan Pemerintah Desa; Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	1.735.499.946	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	541.640.821	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	12	100.499.946	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	12	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	332	1.635.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12	491.640.821	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	288	6.398.748.827	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	288	13.770.600.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1045	4.181.825.831	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1045	13.570.600.000	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK; Operasional PKK; Linmas; Jambore Paud; Pengurus RT; LPM; Lembaga Adat; Operasional Posyandu; Lomba Posyandu di kecamatan dan kelurahan; Honor Kader Posyandu
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	240	856.922.996	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	12	100.000.000	
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	12	1.360.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	12	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase	0	0	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase	80	175.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	175.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	50.000.000	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	125.000.000	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Safari Ramadhan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	80	195.000.000	

BerAKHLAK Bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TENGGARONG	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TENGGARONG	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2	195.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	140	180.000.000	Fasilitasi Kegiatan MTQ
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persentase	80	80.000.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persentase	0	25.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	2	80.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	2	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	80.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	0	0	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	25.000.000	Fasilitasi Tim Evaluasi APBDES
KELURAHAN JAHAB						1.980.000.000						1.865.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	JAHAB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	75.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	JAHAB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	35.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JAHAB	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	60.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JAHAB	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	25.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JAHAB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	15.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JAHAB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JAHAB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JAHAB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	JAHAB	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.905.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	JAHAB	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.830.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.315.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	730.000.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	10.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	270.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	590.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.100.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	590.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	22	1.100.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN SUKARAME						1.530.000.000						1.401.926.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SUKARAME	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SUKARAME	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	41.926.000	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUKARAME	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	115.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUKARAME	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	26.926.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.926.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SUKARAME	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.400.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SUKARAME	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.360.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	870.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	620.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	650.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	175.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	530.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	740.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	440.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	13	650.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN LOA IPUH DARAT						1.580.000.000						1.430.275.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	LOA IPUH DARAT	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	55.275.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	LOA IPUH DARAT	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	20.275.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
	Daerah Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH DARAT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH DARAT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.524.725.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.410.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	915.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	700.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	270.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	609.725.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	700.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	609.725.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	14	700.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN MELAYU						3.230.000.000						3.070.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MELAYU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	45.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MELAYU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	10.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MELAYU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MELAYU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MELAYU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	3.185.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MELAYU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	3.060.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.580.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	2.350.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	255.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	605.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.350.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	605.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	47	2.350.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN BUKIT BIRU						2.180.000.000						2.075.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BUKIT BIRU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BUKIT BIRU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	65.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	95.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	35.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	10.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	30.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BUKIT BIRU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BUKIT BIRU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	30.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BUKIT BIRU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.080.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BUKIT BIRU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.010.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.530.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	255.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	550.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.300.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	550.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	24	1.300.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN LOA TEBU						1.930.000.000						1.780.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA TEBU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	55.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA TEBU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA TEBU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	55.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA TEBU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	20.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA TEBU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA TEBU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA TEBU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.875.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA TEBU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.760.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.265.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.050.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	270.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	610.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.050.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	610.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	21	1.050.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN PANJI						1.830.000.000						1.659.253.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PANJI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	109.021.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PANJI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	39.253.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PANJI	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	104.021.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PANJI	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	32.253.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PANJI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PANJI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PANJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.021.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PANJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.253.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PANJI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PANJI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	10.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PANJI	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PANJI	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	7.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PANJI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PANJI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	7.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PANJI	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.720.979.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PANJI	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.620.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.190.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	655.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	190.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	530.979.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	965.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	510.979.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	19	950.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	
KELURAHAN MANGKURAWANG						1.880.000.000						1.720.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	MANGKURAWANG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	50.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	MANGKURAWANG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	10.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
	Daerah Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MANGKURAWANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MANGKURAWANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	0	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MANGKURAWANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MANGKURAWANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MANGKURAWANG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.830.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MANGKURAWANG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.710.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.215.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	440.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKURAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	270.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MANGKURAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	615.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MANGKURAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.000.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	615.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	20	1.000.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN TIMBAU						2.680.000.000						2.545.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIMBAU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	77.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIMBAU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	35.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TIMBAU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	77.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TIMBAU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	35.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TIMBAU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.603.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TIMBAU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.510.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.020.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	17.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.800.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	268.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	583.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.800.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	583.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	36	1.800.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN BARU						1.730.000.000						1.645.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BARU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	125.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BARU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	35.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BARU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	120.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BARU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.214.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	68.456.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12.330.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BARU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BARU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BARU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.605.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BARU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.610.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.070.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	500.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	195.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	850.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	0	535.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.110.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	310.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	17	900.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	225.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	210.000.000	
KELURAHAN MALUHU						2.080.000.000						1.805.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MALUHU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	105.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MALUHU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	80.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MALUHU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	100.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MALUHU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MALUHU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MALUHU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	10.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MALUHU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MALUHU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	35.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MALUHU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MALUHU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	35.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MALUHU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.975.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MALUHU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.725.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MALUHU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.420.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MALUHU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	525.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MALUHU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MALUHU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	340.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	165.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	0	555.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	1	1.200.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	555.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	24	1.200.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
KELURAHAN LOA IPUH						4.730.000.000						4.570.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	45.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	10.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2026						Hasil Analisa Kebutuhan 2026						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/ Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	4.685.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	4.560.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	4.050.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	425.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	3.850.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	285.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	635.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	3.850.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	635.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	77	3.850.000.000	Program Dedikasi 50Jt/RT
	Jumlah					119.182.790.520						103.556.454.700	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Renstra Kecamatan Tenggarong tahun 2021–2026. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tenggarong Kabupaten dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tenggarong dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang): (Tabel T-C 32)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan RKPD diaktualisasikan melalui penyusunan Renja-PD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tenggarong tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan; dan
2. Meningkatnya kinerja dan tata kelola PD;

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAREAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Tenggarong tahun 2026. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Kantor Camat Tenggarong merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Kabupaten maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong kepada masyarakat.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1) Pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Perumusan Program dan kegiatan di Kecamatan Tenggarong diarahkan untuk mencapai visi dan misi. Sehingga Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Daerah nantinya.

2) Pencapaian *SDGs (Sustainable Development Goals)*.

Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelajutan dimana kesepakan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani *SDGs*, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani Program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target *SDGs* ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong diimplentasikan untuk mencapai target-target *SDGs* itu dalam lingkup kecamatan.

3) Pengentasan Kemiskinan.

Sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Daerah dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tenggarong. Program dan kegitan yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4) Pencapaian SPM.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan standar pelayanan minimal setiap unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan kegiatan di Kecamatan Tenggarong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program pelayanan administrasi kantor dan Program peningkatan sarana dan prasarana.

4) Pendayagunaan potensi ekonomi Daerah.

Kecamatan Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil berupa UKM (Usaha Kecil Menengah), di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan juga obyek-obyek pariwisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli Daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tenggarong melalui penyusunan berbagai Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

5) Program Stunting

Program ini merupakan prioritas Daerah untuk menurunkan angka stunting khususnya di wilayah Kecamatan Tenggarong. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang kurang memadai, terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tingginya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

angka stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam hal ini Kecamatan Tenggarong memiliki peran:

- Mengkoordinasikan lintas sektor (Puskesmas, desa/kelurahan, PKK, posyandu) untuk percepatan penurunan stunting.
- Memastikan sasaran prioritas (ibu hamil, bayi, dan balita) terjangkau program intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- Memfasilitasi edukasi gizi, kesehatan, dan sanitasi.

Selain peran tersebut program stunting juga bertujuan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Kecamatan Tenggarong melalui intervensi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1) Jumlah Program dan jumlah kegiatan.

Jumlah Program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong pada tahun 2026 adalah 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan.

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tenggarong yang melingkupi 2 (dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan.

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong sebesar Rp 107.920.481.032,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBD.

4) Terdapat beberapa Program/kegiatan/subkegiatan yang target dan pagu anggarannya tidak sesuai dengan Renja PD, hal tersebut dikarenakan dalam berjalannya waktu terdapat hal-hal yang mengakibatkan adanya bebrapa subkegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak sesuai dengan target sehingga perlu untuk diadakan perubahan.

Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 Kecamatan Tenggarong sesuai tabel berikut:(Tabel T-C 33)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
KECAMATAN TENGGARONG						77.990.000.700					77.990.000.700
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	TENGGARONG	70	NILAI	50.157.759.879			70	NILAI	50.157.759.879
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	7	dokumen	270.000.000			7	dokumen	270.000.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	2	dokumen	40.000.000	APBD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2	dokumen	40.000.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	0	dokumen	0	APBD		0	dokumen	0
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TENGGARONG	2	dokumen	0	APBD		2	dokumen	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	1	laporan	30.000.000	APBD	Laporan Manajemen Resiko; Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau); Dan LKJIP	1	laporan	30.000.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	0	laporan	0	APBD		0	laporan	0
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	TENGGARONG	200	data	200.000.000	APBD	BECIK; Kecamatan Sebagai Pusat Data	200	data	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	25	Berita Acara	0	APBD		25	Berita Acara	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	TENGGARONG	36	laporan	45.917.985.841			36	laporan	45.917.985.841
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	350	Orang/bulan	44.939.298.557	APBD		350	Orang/bulan	44.939.298.557
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	1	Laporan	0	APBD		1	Laporan	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENGGARONG	12	Laporan	978.687.284	APBD		12	Laporan	978.687.284
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TENGGARONG	1	Laporan	0	APBD		1	Laporan	0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	TENGGARONG	1	unit	101.604.584			1	unit	101.604.584
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1	Dokumen	0	APBD		1	Dokumen	0
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1	Laporan	0	APBD		1	Laporan	0
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TENGGARONG	1	Laporan	51.604.584	APBD		1	Laporan	51.604.584
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	TENGGARONG	1	orang	0			1	orang	0
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TENGGARONG	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	TENGGARONG	1	unit	374.380.456			1	unit	374.380.456
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	13	Paket	52.999.994	APBD		13	Paket	52.999.994
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	25	Paket	25.000.000	APBD		25	Paket	25.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TENGGARONG	5	Paket	8.000.000	APBD		5	Paket	8.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	73	Paket	125.000.000	APBD		73	Paket	125.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	TENGGARONG	3	Paket	39.365.482	APBD		3	Paket	39.365.482
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	5	Laporan	50.000.000	APBD		5	Laporan	50.000.000
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	1	Dokumen	74.014.980	APBD		1	Dokumen	74.014.980

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	TENGGARONG	12	Unit	88.680.000			12	Unit	88.680.000
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	TENGGARONG	6	Unit	0	APBD		6	Unit	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TENGGARONG	1	Unit	0	APBD		1	Unit	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TENGGARONG	5	Unit	0	APBD		5	Unit	0
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	TENGGARONG	12	Unit	88.680.000	APBD		12	Unit	88.680.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	TENGGARONG	12	bulan	3.145.108.998			12	bulan	3.145.108.998
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	1	Laporan	2.500.000	APBD		1	Laporan	2.500.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TENGGARONG	12	Laporan	836.220.000	APBD		12	Laporan	836.220.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	12	Laporan	20.068.998	APBD		12	Laporan	20.068.998
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	206	Laporan	2.286.320.000	APBD		206	Laporan	2.286.320.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	TENGGARONG	35	unit	260.000.000			35	unit	260.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TENGGARONG	16	unit	60.000.000	APBD		16	unit	60.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TENGGARONG	16	unit	100.000.000	APBD		16	unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TENGGARONG	7	unit	0	APBD		7	unit	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TENGGARONG	1	unit	100.000.000	APBD		1	unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TENGGARONG	1	unit	0	APBD		1	unit	0
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	TENGGARONG	80	Persentase	13.050.000.000			80	Persentase	13.050.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	TENGGARONG	2	Kegiatan	350.000.000			2	Kegiatan	350.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	2	Laporan	200.000.000	APBD	Fasiltasi Kegiatan Erau; Stunting (Rembuk, Operasional Tpps Kecamatan)	2	Laporan	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	1	Dokumen	150.000.000	APBD	Hut RI Di Kecamatan	1	Dokumen	150.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	TENGGARONG	1	SPM	100.000.000			1	SPM	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	1	Laporan	100.000.000	APBD	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal); Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan	1	Laporan	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	TENGGARONG	2	Kegiatan	12.600.000.000			2	Kegiatan	12.600.000.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	TENGGARONG	0	Dokumen	0	APBD		0	Dokumen	0
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	TENGGARONG	2	Laporan	200.000.000	APBD	Fasilitasi Paten; Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	200.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	60	Laporan	12.400.000.000	APBD		60	Laporan	12.400.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	TENGGARONG	100	Presentase	14.387.240.821			100	Presentase	14.387.240.821
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	TENGGARONG	0	Kali	75.000.000			0	Kali	75.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	2	Laporan	75.000.000	APBD	Evaluasi Kinerja Pelayanan Kelurahan Dan Pemerintah Desa; Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	2	Laporan	75.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TENGGARONG	24	Kegiatan	541.640.821			24	Kegiatan	541.640.821
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	12	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	APBD		12	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	TENGGARONG	3	Unit	0	APBD		3	Unit	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	12	Pokmas / Ormas	491.640.821	APBD		12	Pokmas / Ormas	491.640.821
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	TENGGARONG	2	Laporan	0	APBD		2	Laporan	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	288	Lembaga	13.770.600.000			288	Lembaga	13.770.600.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	TENGGARONG	1045	Lembaga Kemasyarakatan	13.570.600.000	APBD	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK; Operasional PKK; Linmas; Jambore Paud; Pengurus RT; LPM; Lembaga Adat; Operasional Posyandu; Lomba Posyandu di kecamatan dan kelurahan; Honor Kader Posyandu	####	Lembaga Kemasyarakatan	13.570.600.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	TENGGARONG	12	Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	APBD		12	Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	TENGGARONG	12	Unit	100.000.000	APBD		12	Unit	100.000.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	TENGGARONG	80	Persentase	175.000.000			80	Persentase	175.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	2	Kegiatan	175.000.000			2	Kegiatan	175.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	2	Laporan	50.000.000	APBD	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	2	Laporan	125.000.000	APBD	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Safari Ramadhan	2	Laporan	125.000.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	80	Persentase	195.000.000			80	Persentase	195.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	TENGGARONG	2	Kegiatan	195.000.000			2	Kegiatan	195.000.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	140	Orang	180.000.000	APBD	Fasilitasi Kegiatan MTQ	140	Orang	180.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	TENGGARONG	1 Dokumen	15.000.000	APBD	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	TENGGARONG	0 Persentase	25.000.000			0 Persentase	25.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	TENGGARONG	2 Desa	25.000.000			2 Desa	25.000.000
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	TENGGARONG	2 Laporan	25.000.000	APBD	Fasilitasi Tim Evaluasi APBDES	2 Laporan	25.000.000
KELURAHAN JAHAB					1.865.000.000			0 0	1865000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	JAHAB	70 NILAI	35.000.000			70 NILAI	35.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	JAHAB	1	unit	25.000.000			1	unit	25.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	JAHAB	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	JAHAB	1	Paket	15.000.000	APBD		1	Paket	15.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	JAHAB	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	JAHAB	1	Unit	10.000.000	APBD		1	Unit	10.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	JAHAB	100	Presentase	1.830.000.000			100	Presentase	1.830.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	JAHAB	1	Kegiatan	730.000.000			1	Kegiatan	730.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JAHAB	3	Unit	450.000.000	APBD		3	Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	1	Pokmas / Ormas	270.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	270.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	JAHAB	1	Kegiatan	1.100.000.000			1	Kegiatan	1.100.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	JAHAB	22	Lembaga Kemasyarakatan	1.100.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	22	Lembaga Kemasyarakatan	1.100.000.000
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	JAHAB	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
KELURAHAN SUKARAME						1.401.926.000			0	0	1401926000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SUKARAME	70	NILAI	41.926.000			70	NILAI	41.926.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	SUKARAME	1	unit	26.926.000			1	unit	26.926.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUKARAME	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUKARAME	1	Paket	6.926.000	APBD		1	Paket	6.926.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUKARAME	1	Laporan	10.000.000	APBD		1	Laporan	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUKARAME	1	unit	15.000.000			1	unit	15.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUKARAME	1	unit	15.000.000	APBD		1	unit	15.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	SUKARAME	100	Presentase	1.360.000.000			100	Presentase	1.360.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	SUKARAME	1	Kegiatan	620.000.000			1	Kegiatan	620.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SUKARAME	1	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SUKARAME	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	1	Pokmas / Ormas	175.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	175.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	SUKARAME	1	Kegiatan	740.000.000			1	Kegiatan	740.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	SUKARAME	13	Lembaga Kemasyarakatan	650.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	13	Lembaga Kemasyarakatan	650.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SUKARAME	1	Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
KELURAHAN LOA IPUH DARAT						1.430.275.000			0	0	1430275000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	70	NILAI	20.275.000			70	NILAI	20.275.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA IPUH DARAT	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA IPUH DARAT	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LOA IPUH DARAT	1	unit	10.275.000			1	unit	10.275.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LOA IPUH DARAT	1	unit	10.275.000	APBD		1	unit	10.275.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA IPUH DARAT	100	Presentase	1.410.000.000			100	Presentase	1.410.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA IPUH DARAT	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1	Pokmas / Ormas	270.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	270.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1	Kegiatan	700.000.000			1	Kegiatan	700.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA IPUH DARAT	14	Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	14	Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
KELURAHAN MELAYU						3.070.000.000			0	0	3070000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MELAYU	70	NILAI	10.000.000			70	NILAI	10.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MELAYU	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MELAYU	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	MELAYU	0	Paket	0	APBD		0	Paket	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MELAYU	0	Laporan	0	APBD		0	Laporan	0
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MELAYU	100	Presentase	3.060.000.000			100	Presentase	3.060.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MELAYU	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MELAYU	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MELAYU	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	1	Pokmas / Ormas	255.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	255.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MELAYU	1	Kegiatan	2.350.000.000			1	Kegiatan	2.350.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MELAYU	47	Lembaga Kemasyarakatan	2.350.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	47	Lembaga Kemasyarakatan	2.350.000.000
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	MELAYU	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
KELURAHAN BUKIT BIRU						2.075.000.000			0	0	2075000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	70	NILAI	65.000.000			70	NILAI	65.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	BUKIT BIRU	1	unit	35.000.000			1	unit	35.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BUKIT BIRU	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BUKIT BIRU	1	Paket	15.000.000	APBD		1	Paket	15.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	1	Laporan	10.000.000	APBD		1	Laporan	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	BUKIT BIRU	1	unit	30.000.000			1	unit	30.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BUKIT BIRU	1	Unit	30.000.000	APBD		1	Unit	30.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	BUKIT BIRU	100	Presentase	2.010.000.000			100	Presentase	2.010.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BUKIT BIRU	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BUKIT BIRU	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BUKIT BIRU	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	1	Pokmas / Ormas	255.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	255.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BUKIT BIRU	1	Kegiatan	1.300.000.000			1	Kegiatan	1.300.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	BUKIT BIRU	24	Lembaga Kemasyarakatan	1.300.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	24	Lembaga Kemasyarakatan	1.300.000.000
KELURAHAN LOA TEBU						1.780.000.000			0	0	1780000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA TEBU	70	NILAI	20.000.000			70	NILAI	20.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA TEBU	1	unit	20.000.000			1	unit	20.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA TEBU	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA TEBU	1	Laporan	10.000.000	APBD		1	Laporan	10.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA TEBU	100	Presentase	1.760.000.000			100	Presentase	1.760.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA TEBU	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA TEBU	1	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA TEBU	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	1	Pokmas / Ormas	270.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	270.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA TEBU	1	Kegiatan	1.050.000.000			1	Kegiatan	1.050.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA TEBU	21	Lembaga Kemasyarakatan	1.050.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	21	Lembaga Kemasyarakatan	1.050.000.000
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	LOA TEBU	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
KELURAHAN PANJI						1.659.253.000			0	0	1659253000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PANJI	70	NILAI	39.253.000			70	NILAI	39.253.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	PANJI	1	unit	32.253.000			1	unit	32.253.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PANJI	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PANJI	1	Paket	12.253.000	APBD		1	Paket	12.253.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PANJI	1	Laporan	10.000.000	APBD		1	Laporan	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	PANJI	1	unit	7.000.000			1	unit	7.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PANJI	1	Unit	7.000.000	APBD		1	Unit	7.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	PANJI	100	Presentase	1.620.000.000			100	Presentase	1.620.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	PANJI	1	Kegiatan	655.000.000			1	Kegiatan	655.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PANJI	1	Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PANJI	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	1	Pokmas / Ormas	190.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	190.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	PANJI	1	Kegiatan	965.000.000			1	Kegiatan	965.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	PANJI	19	Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	19	Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PANJI	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD		0	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	PANJI	1	Unit	15.000.000	APBD		1	Unit	15.000.000
KELURAHAN MANGKURAWANG						1.720.000.000			0	0	1720000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	70	NILAI	10.000.000			70	NILAI	10.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MANGKURAWANG	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MANGKURAWANG	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	MANGKURAWANG	1	unit	0			1	unit	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	MANGKURAWANG	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MANGKURAWANG	100	Presentase	1.710.000.000			100	Presentase	1.710.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MANGKURAWANG	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKURAWANG	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD		0	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MANGKURAWANG	3	Unit	440.000.000	APBD		3	Unit	440.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKURAWANG	1	Pokmas / Ormas	270.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	270.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MANGKURAWANG	1	Kegiatan	1.000.000.000			1	Kegiatan	1.000.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MANGKURAWANG	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	MANGKURAWANG	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD		0	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	MANGKURAWANG	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
KELURAHAN TIMBAU						2.545.000.000			0	0	2545000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	TIMBAU	70	NILAI	35.000.000			70	NILAI	35.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	TIMBAU	1	unit	35.000.000			1	unit	35.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TIMBAU	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TIMBAU	1	Paket	25.000.000	APBD		1	Paket	25.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	TIMBAU	100	Presentase	2.510.000.000			100	Presentase	2.510.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TIMBAU	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	1	Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	TIMBAU	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	1	Pokmas / Ormas	268.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	268.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TIMBAU	1	Kegiatan	1.800.000.000			1	Kegiatan	1.800.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	TIMBAU	36	Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	36	Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	TIMBAU	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
KELURAHAN BARU						1.645.000.000			0	0	1645000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BARU	70	NILAI	35.000.000			70	NILAI	35.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	BARU	1	unit	25.000.000			1	unit	25.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BARU	0	Paket	0	APBD		0	Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BARU	1	Paket	25.000.000	APBD		1	Paket	25.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	0	Laporan	0	APBD		0	Laporan	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	BARU	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BARU	1	Unit	10.000.000	APBD		1	Unit	10.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	BARU	100	Presentase	1.610.000.000			100	Presentase	1.610.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BARU	1	Kegiatan	500.000.000			1	Kegiatan	500.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BARU	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BARU	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	1	Pokmas / Ormas	50.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BARU	1	Kegiatan	1.110.000.000			1	Kegiatan	1.110.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	BARU	17	Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	17	Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	BARU	1	Lembaga Kemasyarakatan	210.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	210.000.000
KELURAHAN MALUHU						1.805.000.000			0	0	1805000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MALUHU	70	NILAI	80.000.000			70	NILAI	80.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MALUHU	1	unit	45.000.000			1	unit	45.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MALUHU	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	MALUHU	1	Paket	25.000.000	APBD		1	Paket	25.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	1	Laporan	10.000.000	APBD		1	Laporan	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	MALUHU	1	unit	35.000.000			1	unit	35.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	MALUHU	1	Unit	35.000.000	APBD		1	Unit	35.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MALUHU	100	Presentase	1.725.000.000			100	Presentase	1.725.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MALUHU	1	Kegiatan	525.000.000			1	Kegiatan	525.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MALUHU	1	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	APBD		1	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MALUHU	3	Unit	340.000.000	APBD		3	Unit	340.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	1	Pokmas / Ormas	165.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	165.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	1	Lembaga	1.200.000.000			1	Lembaga	1.200.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MALUHU	24	Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	24	Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000
KELURAHAN LOA IPUH						4.570.000.000			0	0	4570000000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA IPUH	70	NILAI	10.000.000			70	NILAI	10.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA IPUH	1	unit	10.000.000			1	unit	10.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA IPUH	1	Paket	10.000.000	APBD		1	Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA IPUH	0	Laporan	0	APBD		0	Laporan	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LOA IPUH	0	unit	0			0	unit	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LOA IPUH	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA IPUH	100	Presentase	4.560.000.000			100	Presentase	4.560.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH	1	Kegiatan	710.000.000			1	Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA IPUH	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD		0	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA IPUH	3	Unit	425.000.000	APBD		3	Unit	425.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	1	Pokmas / Ormas	285.000.000	APBD		1	Pokmas / Ormas	285.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH	1	Kegiatan	3.850.000.000			1	Kegiatan	3.850.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA IPUH	77	Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000.000	APBD	Program Dedikasi 50Jt/RT	77	Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000.000
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	LOA IPUH	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
						103.556.454.700					103.556.454.700

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Tenggarong tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tenggarong.

Rencana Kerja tahun 2026 Kecamatan Tenggarong merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh kecamatan, penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tenggarong.

4.1 Hal – Hal Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

4.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada serta mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2026 agar pelaksanaan Program kegiatan SKPD Kecamatan Tenggarong di tahun 2026 ini bisa sesuai dengan apa yang telah

direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kecamatan Tenggarong berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD.
b. Kecamatan Tenggarong berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tenggarong tahun 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 dan RKPD tahun 2026.
c. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tenggarong. Untuk dapat merealisasikan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubaha, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan Daerah disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja suatu PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan kinerja dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya.Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja *Output*

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (*output performance*) hampir 100% (seratus persen) menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% (seratus persen) jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll).

B. Analisis Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per Program.

C. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	95	95	95	100%	98	98	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	-	-	-	100%	200	-	0%
7.01.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	-	-	-	100%	25	2	8%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	85	85	85	100%	86	86	86%
		Tersedianya gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	4	4	4	100%	-	-	0%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah	1	1	-	-	100%	1	1	100%
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	-	100%	1	1	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	85	85	85	100%	85	85	85%
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100	85	85	85	100%	95	95	95%
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	80	60	60	60	100%	65	65	81%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	98	98	98	100%	98	98	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	300	60	60	60	100%	60	180	60%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
		Jumlah Makanan dan Minuman	4.800	960	960	960	100%	960	2.880	60%
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	876.940	175388	175388	175388	100%	175.388	526.164	60%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1.800	360	360	360	100%	360	1.080	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	475	95	95	95	100%	95	285	60%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	400	80	80	80	100%	80	240	60%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	2.315	463	463	463	100%	463	1.389	60%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125	25	25	25	100%	25	75	60%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	67	67	67	67	100%	67	67	100%
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	0	0	0	100%	2	2	20%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	100	100	100	100		100	100	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	500	100	100	100	100%	100	300	60%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	45	9	9	9	100%	9	27	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30	0	0	0	100%	5	5	17%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	-	-	-	-	2	2	17%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	-	-	-	-	2	2	17%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	-	-	0%	100	85	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Jumlah Output urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan secara amanah dan bermanfaat	100	-	-	-	0%	2	2	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100	90	90	90	100%	90	90	90%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	90	0	0	0	0%	18	18	20%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	0	0	0	100%	0	-	0%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	90	18	18	18	100%	18	54	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai SAKIP PD.
- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP.
- Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan.
- Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan;
- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Persentase desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan; dan
- Desa dalam kategori baik.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal:

   Kekuatan :

   - Visi dan misi organisasi yang jelas.
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
   - Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
   - Adanya sarana dan prasarana.

   Kelemahan:

   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
   - Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintahan Daerah dan instansi teknis lainnya
   - Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
   - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJMD tahun 2021 – 2026;
- Agenda pembangunan tahunan Daerah;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan ;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram;

Ancaman:

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
- Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanTenggarong seberang

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			95	95	98	100	100	98	98	98	98	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	9	9	9	9	9	36	36	36	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			85	85	86	100	100	86	86	86	86	
4	Tersedianya gaji dan tunjangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100	100	100	100	100	85	85	85	85	
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			75	85	85	95	100	95	95	95	95	
8	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			75	85	95	95	100	65	65	65	65	
9	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan			55	60	65	70	75	98	98	98	98	
10	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			98	98	98	98	98	100	100	100	100	
11	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			100	100	100	100	100	67	67	67	67	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

14	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			65	67	67	67	67	67	67	67	67	
15	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			85	85	85	85	85	100	85	85	85	
20	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85	85	85	85	100	85	85	85	
21	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			90	90	90	90	100	90	90	90	90	
22	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Tenggarong Seberang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal;
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal;
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang pada Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2025 dan yang akan datang tahun 2026.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu PD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Ssnergitas antara instansi PD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan peran kecamatan;
2. Otonomi desa yang bersinergi;
3. Masyarakat yang aktif dan religius.

II.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.
Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	12.089.540.654	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	9.095.207.359	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	390.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	320.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	40.000.000	Perbaikan pagu menjadi 40.000.000, penambahan pagu 10.000.000 untuk kegiatan penyusunan dokumen renja 2027
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	-	Pagu awal Rp 5000000. Perbaikan pagu menjadi 0 (masuk dalam penyusunan dokumen renja)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	-	Pagu awal Rp 5000000. Perbaikan pagu menjadi 0 (masuk dalam penyusunan dokumen renja)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	30.000.000	menyesuaikan kebutuhan dokumen yang di buat
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Data	250.000.000	Penyesuaian Pasca Evaluasi Prov Menjadi : Rp. 200.000.000 untuk kegiatan data statistik sektoral
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		18	Laporan	9.344.551.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		18	Laporan	7.424.563.599	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Orang/Bulan	9.234.551.994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Orang/Bulan	7.314.563.599	Data BPKAD : 7,314,563,599.33 Semula : 9,234,551,994.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	10.000.000	sesuai
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	100.000.000	sesuai
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		3	Dokumen	110.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		3	Dokumen	90.800.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	50.000.000	sesuai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	-	Pagu awal Rp 20000000 . Perbaikan pagu menjadi 0 (masuk dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	40.800.000	sesuai
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian		60	orang	161.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian		60	orang	15.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tenggarong Seberang	60	Paket	114.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tenggarong Seberang	60	Paket	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	60	Dokumen	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	60	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Orang	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Orang	15.000.000	sesuai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		9	Layanan	745.256.260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		9	Layanan	338.261.360	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	29.413.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	29.413.760	sesuai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	50.000.000	Pagu awal Rp 85000000 . Perbaikan pagu menjadi 5000000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Paket	130.000.000	Tambahan Pasca Evaluasi Prov Menjadi : Rp. 130.000.000
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	70.155.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	31.698.000	Pagu awal Rp 70.155.000 . Perbaikan pagu menjadi 31.698.000 sesuai dengan anggaran pada tahun 2025 (e pantau)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Paket	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Paket	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	20.000.000	Pagu awal Rp 5000000 . Perbaikan pagu menjadi 20000000 (bisa mendapat suport anggaran dari Penyediaan Bahan logistik)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	307.087.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	50.000.000	Pagu awal Rp 307087500 . Perbaikan pagu menjadi 50000000 (wilayah tengah maksimal Rp 50 jt)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	50	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	50	Dokumen	20.000.000	Pagu awal Rp 50000000 . Perbaikan pagu menjadi 20000000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Dokumen	7.149.600	Pagu awal Rp 50000000 . Perbaikan pagu menjadi 7149600 sesuai dengan anggaran pada tahun 2025 (e pantau)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	719.557.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	418.457.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	2.000.000	Pagu awal Rp 5100000 . Perbaikan pagu menjadi 2.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	344.457.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	344.457.400	sesuai
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	11	Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	11	Laporan	72.000.000	pengurangan Pagu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		48	Unit	618.375.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		48	Unit	488.125.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggarong Seberang	18	Unit	190.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggarong Seberang	10	Unit	60.000.000	pengurangan Pagu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggarong Seberang	20	Unit	128.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggarong Seberang	10	Unit	128.125.000	sesuai
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	30	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	14	Unit	25.000.000	sesuai
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	25.000.000	sesuai
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Unit	150.000.000	sesuai
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	100.000.000	sesuai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		80	Persen	10.038.900.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		80	Persen	24.863.900.000	
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan		100	persen			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan		100	persen		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efek		2	Kegiatan	400.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efek		2	Kegiatan	400.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tenggarong Seberang	6	Laporan	150.000.000	sesuai
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Dokumen	250.000.000	sesuai

BerAKHLAK
banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1	Paket	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1	Paket	100.000.000	
7.01.02.2.04.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5	Laporan	100.000.000	sesuai
7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	9.538.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	24.363.900.000	
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggarong Seberang	3	Laporan	788.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	788.900.000	sesuai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		114	Laporan	8.750.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		122	Laporan	23.575.000.000	Penambahan pagu PASCA PROVINSI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100	persen	486.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100	persen	436.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan		2	Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan		2	Kegiatan	100.000.000	
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	sesuai
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	19	Laporan	50.000.000	sesuai
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	kegiatan	386.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	kegiatan	336.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	386.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	336.000.000	pengurangan Pagu
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan		100	persen	225.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan		100	persen	175.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan						ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ganguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani		100	Persen	225.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ganguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani		100	Persen	175.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000	sesuai
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	laporan	175.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	laporan	125.000.000	PERBAIKAN PAGU
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Persen	220.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Persen	195.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan		1	Kegiatan	220.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan		1	Kegiatan	195.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tenggarong Seberang	30	Orang	180.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tenggarong Seberang	30	Orang	180.000.000	sesuai
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	15.000.000	PERBAIKAN PAGU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan		90	Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan		90	Persen	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Desa Dalam Kategori Baik						Desa Dalam Kategori Baik					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi		18	Desa	75.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi		18	Desa	75.000.000	
7.01.06.2.01.08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	75.000.000	sesuai
J U M L A H						23.134.440.654						34.840.107.359	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2026 hasil dari Musrenbang tingkat desa yang diawali dari gagasan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, LPM, karang taruna, KPM, RT, sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang.
2. Di forum Musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum Musrenbang tingkat kecamatan.
3. Hasil Musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut adalah tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kecamatan Tenggarong Seberang

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Normalisasi Saluran Drainase rt 11 dusun berambai desa bukit pariaman (1462862)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	Volume 1,2 KM	POKIR
2	semenisasi jalan pong tiku rt 05 desa loa ulung (1462936)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2010 - Loa Ulung	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR
3	pengaspalan jalan agatis dusun bangun rejo II (1463015)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR
4	pengaspalan jalan dusun bangun rejo I (1463031)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR
5	pengaspalan jalan dusun karang rejo desa bangun rejo (1463050)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Vol. 0,6 KM	POKIR
6	semenisasi jalan rt 33 desa bangun rejo (1464033)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Vol. 0,6 KM	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	pembangunan parit jalan rt 01 desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
8	pembangunan parit jalan rt 02 desa bangun rejo (1464480)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
9	pembangunan parit jalan rt 03 Bangun Rejo I desa bangun rejo (1464500)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
10	pembangunan parit jalan rt 04 dusun bangun rejo I desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
11	pembangunan parit jalan rt 07 ds. bangun rejo II desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
12	pembangunan parit jalan rt 08 dusun bangun rejo II desa bangun rejo (1464632)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
13	pembangunan parit jalan rt 13 dusun putuk rejo desa bangun rejo (1464654)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
14	pembangunan parit jalan rt 15 desa bangun rejo (1464694)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
15	pembangunan parit jalan rt 17 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464708)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
16	pembangunan parit jalan rt 18 desa bangun rejo dusun sumber rejo desa (1464723)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
17	pembangunan parit jalan rt 19 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464737)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
18	pembangunan parit jalan rt 20 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464749)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
19	pembangunan parit jalan rt 21 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464761)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
20	pembangunan parit jalan rt 23(depan h mansur) desa bangun rejo (1466095)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
21	pembangunan parit jalan rt 26 desa bangun rejo (1466144)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
22	pembangunan parit jalan rt 29 desa bangun rejo (1466189)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
23	Pengerasan Agregat Jalan Fajar Lestari RT.03 Desa Manunggal Jaya (1239800)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

24	Pengerasan Jalan RT.22 Desa Manunggal Jaya (1239802)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
25	Pengerasan Jalan Mekarsari RT.10 Desa Manunggal Jaya (1239824)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
26	Pengerasan Jalan Dwi Karya Desa Manunggal Jaya (1239834)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
27	Pembuatan Badan Jalan Murni Desa Manunggal Jaya (1239836)	Jalan masih terlihat sempit	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
28	Pembuatan Badan Jalan Kemangi Desa Manunggal Jaya (1239840)	Jalan masih terlihat sempit	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
29	Penurapan Parit RT.10 Desa Manunggal Jaya (1239854)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang Parit	vol 0,6 km	POKIR
30	Penurapan Parit RT.22 Desa Manunggal Jaya (1239856)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang Parit	vol 0,6 km	POKIR
31	Pembuatan Parit Jalan Daud RT.02 Desa Embalut (1239861)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

32	Pembuatan Parit Samping Kuburan RT.13 Desa Embalut (1239866)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
33	Pembangunan Slab Dacker Jalan Cut Nyak Dien RT.03 Desa Loa Pari (1239885)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
34	Pembangunan Pagar Kuburan RT.13 Desa Embalut (1240055)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang pagar	vol 250 m	POKIR
35	Pembuatan Parit Jalan Jendral Sudirman RT.02 dan RT.03 Desa Loa Pari (1240166)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang parit	vol. 0,6 km	POKIR
36	Pembuatan Parit RT.03 Desa Loa Lepu (1268051)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang parit	vol. 0,6 km	POKIR
37	Pengurukan Gang Husein RT.06 Desa Loa Lepu (1268066)	Gang sering terkena banjir	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
38	Pengurukan Jalan Manggis RT.06 Desa Loa Lepu (1268078)	Jalan sedikit rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

39	Pembuatan Slab Dacker Jalan A.M. Idris Desa Loa Lepu (1268106)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
40	Pengurukan Jalan Langsat RT.01 Desa Loa Lepu (1274856)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
41	Penurapan Jalan AP.Mangkunegara Gang Berkah RT.01 Desa Loa Lepu (1274877)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
42	Penurapan Gang Pinang RT.01 Desa Loa Lepu (1274896)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	Vol. 0,6 km	POKIR
43	Pengurukan Jalan Salak RT.06 Desa Loa Lepu (1275033)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol 0,6 km	POKIR
44	Pemasangan Paving Halaman Gedung BPU Desa Loa Lepu (1275078)	Halaman BPU rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	.	POKIR
45	Pembuatan Parit Jalan Semangka RT.03 Desa Loa Lepu 1275119	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

46	Pengerasan Jalan Langsat RT.07 Desa Loa Pari (1275246)	Jalan berbahaya bagi masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang drainase	Vol 0,6 Km	POKIR
47	Penurapan Jalan Kresno 1 Desa Manunggal Jaya (1278911)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol 0,6 km	POKIR
48	Pemasangan Paving Jalan Gang Cilik 3 RT.01 Desa Bangun Rejo (1278960)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang drainase	vol 700 m2	POKIR
49	Pembuatan Slab Dacker RT.03 Desa Perjiwa (1278968)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 1 unit	POKIR
50	Pembuatan Slab Dacker RT.05 Desa Perjiwa (1278975)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol 1 unit	POKIR
51	Pembuatan Parit RT.02 Desa Perjiwa (1278981)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
52	Pembuatan Parit Jalan Gunung Kyai Desa Perjiwa (1278988)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

53	Pembuatan Badan Jalan RT.03 Desa Perjiwa (1278994)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
54	Pengurukan Badan Jalan Asari RT.06 Desa Loa Lepu (1443561)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
55	Pengaspalan Gang Keluarga 1 Desa Loa Raya (1443582)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2011 - Loa Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
56	Pengurukan Jalan Lampiri RT.19 Desa Bukit Raya (1443605)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
57	Pengurukan Jalan Timbul RT.16 Desa Bukit Raya (1443617)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
58	Pembuatan Jembatan Jalan Mekarsari RT.22 Desa Manunggal Jaya (1239804)	Penghubung jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jembatan	Vol. 1 unit	POKIR
59	Pembuatan Slab Dacker Jalan Jendral Sudirman RT.02 dan RT.03 Desa Loa Pari (1239886)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang jalan	Vol. 1 unit	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

60	Pengerasan Jalan Rondong Jambu RT.02 Desa Perjiwa (431970)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang jalan	Vol. 0,6 km	POKIR
61	Pembangunan Drainase RT. 03 Desa Kertabuana (1335946)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2005 - Kerta Buana	Panjang drainase	Vol. 0,6 km	POKIR
62	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 05 Desa Suka Maju (1424497)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2015 - Suka Maju	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
63	Pembangunan Drainase RT. 10 Desa Manunggal Jaya (1424754)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
64	Lanjutan Pembangunan Drainase RT. 06 dan RT.07 Desa Kerta buana (1481607)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2005 - Kerta Buana	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
65	Lanjutan Pembangunan Drainase RT.34 Desa Bukit Pariaman (1481718)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
66	Lanjutan Pembangunan Drainase RT. 26 Desa Bukit Pariaman (1481880)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

67	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Desa Bukit Pariaman RT. 05 (1481926)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
68	Normalisasi Saluran Drainase / Pembersihan Sedimentasi Saluran Desa Bhuana Jaya RT. 17 (1481965)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
69	Normalisasi Saluran Drainase (Pembangunan drainase) Desa Segihan RT. 09 (1482054)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2006 - Segihan	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
70	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Bhuana Jaya RT. 09 (1482076)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
71	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Mulawarman RT. 04 (1482125)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2009 - Mulawarman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
72	Pengurukan jalan di RT. 06 Jalan Asari RT.06 DESA LOA LEPU, (1428906)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
73	Pemasangan batu terpot Jalan Bengsang 1 RT. 05 Jalan Bengsang 1 RT. 05 DESA LOA LEPU, (1428952)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	Vol. 0,12 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

74	Pengurukan Jalan Bengsang 3 RT. 05 Jalan Bengsang 3 RT. 05 DESA LOA LEPU, (1428973)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
75	Pembuatan Parit Pasang Batu Rt.09 Desa Karang Tunggal (1456967)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
76	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT 03 GIRI AGUNG (1483363)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
77	SEMENISASI RT 02 ARGOMULYO GIRI AGUNG (1483378)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
78	DRAINASE RT 04 GIRI AGUNG (1483386)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
79	DRAINASE RT 09 DESA BHUANA JAYA (1483597)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
80	DRAINASE RT 23 DESA BHUANA JAYA (1483603)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vo. 0,06 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

81	DRAINASE RT 01 DESA BHUANA JAYA (1483616)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
82	DRAINASE RT 17 DESA BHUANA JAYA (1483625)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
83	DRAINASE RT 05 DESA BHUANA JAYA (1483633)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
84	DRAINSE RT 14 DESA BHUANA JAYA (1483643)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
85	PENIGKATAN JALAN RT 23 DESA BHUANA JAYA (1483655)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
86	PENIGKATAN JALAN RT 10 DESA BHUANA JAYA (1483663)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
87	PENIGKATAN JALAN RT 17 DESA BHUANA JAYA (1483689)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

88	DRAINASE RT 16 DESA BHUANA JAYA (1483693)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
89	DRAINASE RT 02 DESA BHUANA JAYA (1483704)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
90	TURAP RT 02 DESA BHUANA JAYA (1483733)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
91	SEMENISASI PARIT POROS P MARSUDI RT 02 DESA KARANG TUNGGAL (1485773)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
92	TURAP RT 14 DESA KARANG TUNGGAL, (1485783)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
93	REHABILITASI GORONG-GORONG JLN KARANG TUNGGAL RT 06/07 DESA KARANG TUNGGAL, (1485913)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang gorong -gorong	vol. 0.06 km	POKIR
94	SEMENISASI PARIT RT 08 DESA KARANG TUNGGAL, (1485952)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

95	SEMENISASI PARIT RT 09 DESA KARANG TUNGGAL, (1485966)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
96	LANJUTAN PENURAPAN LAPANGAN BOLA MEKAR JAYA RT 10 , (1486056)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2014 - Mekar Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
97	SEMENISASI JL KURMA I DAN KURMA II DESA KARANG TUNGGAL,(1486135)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
98	PENINGKTAN JLN RT 17 DESA BUKIT RAYA (1486670)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
99	Lanjutan Pengaspalan Jl. Ahmad Muksin RT 6 Desa Loa Lepu (1117357)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
100	Pembuatan Turap Parit jalan RT 10 Desa Manunggal Jaya (1479816)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang turap	vol. 0.06 km	POKIR
101	Pembuatan Semenisasi Parit RT 13 Desa Manunggal Jaya,(1491402)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang parit	vol. 0.06 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

102	Normalisasi Parit Kelompok Tani Murni RT 10 Desa Manunggal jaya , (1491405)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR
103	Pembuatan Semenisasi Parit RT 07 Desa manunggal jaya, (1491411)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR
104	Turap Parit RT 13 dan RT 21 Desa Manunggal daya, (1491449)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR
105	Turap Parit RT 07 Desa Manunggal daya, (1491455)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
106	Pengurukan badan jalan di Kelompok Tani Muda Sejahtera Desa Manunggal daya, (1491458)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
107	Semenisasi Parit RT 22 Desa Manunggal Jaya, (1491475)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
108	Pembuatan Parit jalan Mangga RT 24, (1491496)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16 - Tenggarong Seberang	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

109	Semenisasi Gang Jeruk RT 24, (1491500)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16 - Tenggarong Seberang	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
110	Pembuatan Parit RT 22 Desa Manunggal Jaya., (1491508)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang parit	vol. 0.06 km	POKIR
111	ID SIPD: 2316786 Semenisasi Parit Lingkungan RT 014 Desa Bukit Raya	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang parit		
112	ID SIPD: 2322671 Semenisasi Jalan Gang Pawuh RT 015 Desa Bukit Raya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan		
113	ID SIPD: 2308328 Pembangunan Turap Desa Jalan H.Awang Saleh dibantaran sungai Palajawan Desa Tanjung Batu	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2018 - Tanjung Batu	Panjang turap		
114	ID SIPD: 2140738 Pembangunan Turap Sungai Alam RT.04 Desa Bangun Rejo	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang turap		
115	ID SIPD: 2140214 Pembangunan Jembatan Beton Buk Petung RT.01 Desa Bangun Rejo	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang turap		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

116	ID SIPD: 2319515 Pembangunan Turap Dusun Rejo Makmur RT 014 Desa Karang Tunggal	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang turap		
117	ID SIPD: 2310800 Pembangunan Turap Jalan Dusun Sumber Jaya RT 19 Desa Manunggal Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang turap		
118	ID SIPD: 2315236 Pembuatan Drainase RT 021 Dusun Sidomakmur Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase		
119	ID SIPD: 2316157 Peningkatan jalan RT 03 Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan		
120	ID SIPD: 2210485 Pembangunan Jembatan Jalan Bhirawa RT.008 Desa Suka Maju	Penghubung jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2015 - Suka Maju	Panjang jembatan		
121	ID SIPD: 2311696 Semenisasi Jalan Lampiri RT 019 Desa Bukit Raya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan		
122	ID SIPD: 2311709 Penurapan jalan RT 03 Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINSI 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang turap		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama satu tahun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi PD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan visi PD; dan
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD.

3.2.2 Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Untuk selanjutnya dirumuskan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja	
				Satuan	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan Tenggarong Seberang.	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan Tenggarong Seberang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Persen	80
			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	80
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan baik	Persen	80

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Seberang tahun 2024 mencerminkan rencana Program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Seberang tahun 2025-2029. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Kantor Camat Tenggarong Seberang merencanakan beberapa Program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Seberang maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong Seberang kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam Musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Pengolahan data menyangkut Program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan bahkan ketersediaan dana sebagai pendukung dari program kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila kondisi lapangan kesiapan sumber daya dan anggaran tidaka ada keseuaian maka program kegiatan yang telah direncanakan bisa saja belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau bahkan gagal. Adapun Program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	9.095.207.359			80	Nilai	11.142.635.011
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	320.000.000			7	Dokumen	510.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	40.000.000	APBD	sesuai	2	Dokumen	140.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	30.000.000	APBD	sesuai	2	Dokumen	70.000.000
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Data	250.000.000	APBD	sesuai	2	Data	300.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		18	Laporan	7.424.563.599			18	Laporan	8.351.268.439
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Orang/Bulan	7.314.563.599	APBD	sesuai	12	Orang/Bulan	8.226.268.439
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	10.000.000	APBD	sesuai	1	Laporan	25.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	100.000.000	APBD	sesuai	4	Laporan	100.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		3	Dokumen	90.800.000			3	Dokumen	239.336.520
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	50.000.000	APBD	sesuai	1	Dokumen	188.160.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	40.800.000	APBD	sesuai	1	Laporan	51.176.520
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian		60	orang	15.000.000			60	orang	18.816.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Orang	15.000.000	APBD	sesuai	8	Orang	18.816.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		9	Layanan	338.261.360			9	Layanan	930.333.612
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	29.413.760	APBD	sesuai	12	Paket	36.896.620
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	50.000.000	APBD	sesuai	12	Paket	106.624.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Paket	130.000.000	APBD	sesuai	8	Paket	125.440.000
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Paket	31.698.000	APBD	sesuai	12	Paket	88.002.432
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	20.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	62.720.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	50.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	385.210.560

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	50	Dokumen	20.000.000	APBD	sesuai	50	Dokumen	62.720.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Dokumen	7.149.600	APBD	sesuai	8	Dokumen	62.720.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	418.457.400			12	Bulan	527.000.440
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	2.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	6.397.440
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12	Laporan	344.457.400	APBD	sesuai	12	Laporan	81.563.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	11	Laporan	72.000.000	APBD	sesuai	11	Laporan	439.040.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		48	Unit	488.125.000			48	Unit	565.880.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggarong Seberang	18	Unit	60.000.000	APBD	sesuai	10	Unit	14.560.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggarong Seberang	20	Unit	128.125.000	APBD	sesuai	10	Unit	175.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	30	Unit	25.000.000	APBD	sesuai	14	Unit	31.360.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	25.000.000	APBD	sesuai	2	Unit	31.360.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Unit	150.000.000	APBD	sesuai	1	Unit	188.160.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Unit	100.000.000	APBD	sesuai	2	Unit	125.440.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		80	Persen	24.863.900.000			80	Persen	2.128.000.000
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan		100	persen		APBD		100	persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efek		2	Kegiatan	400.000.000			2	Kegiatan	122.000.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	150.000.000	APBD	sesuai	6	Laporan	87.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Laporan	250.000.000	APBD	sesuai	12	Dokumen	35.000.000
7.01.02.2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1	Paket	100.000.000			1	Paket	1.023.000.000
7.01.02.2.04.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	100.000.000	APBD	sesuai	5	Laporan	1.023.000.000
7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	24.363.900.000			2	Kegiatan	983.000.000
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggarong Seberang	3	Laporan	788.900.000	APBD	sesuai	2	Laporan	953.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		122	Laporan	23.575.000.000		prioritas aspirasi musrenbang	9	Laporan	30.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100	persen	436.000.000			100	persen	540.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan		2	Kegiatan	100.000.000			2	Kegiatan	140.000.000
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	APBD	sesuai	8	Lembaga kemasyarakatan	100.000.000
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Laporan	50.000.000	APBD	sesuai	19	Laporan	40.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	kegiatan	336.000.000			1	kegiatan	400.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	336.000.000	APBD	sesuai	5	Lembaga kemasyarakatan	400.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	persen	175.000.000			100	persen	851.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ganguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani		100	Persen	175.000.000			100	Persen	851.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	laporan	50.000.000	APBD				50.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	laporan	125.000.000	APBD	sesuai	12	laporan	801.000.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Persen	195.000.000			100	Persen	420.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan		1	Kegiatan	195.000.000			1	Kegiatan	420.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tenggarong Seberang	30	Orang	180.000.000	APBD	sesuai	30	Orang	380.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	15.000.000					40.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik		90	Persen	75.000.000			90	Persen	75.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi		18	Desa	75.000.000			18	Desa	75.000.000
7.01.06.2.01.08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	75.000.000	APBD		1	Dokumen	75.000.000
J U M L A H						34.840.107.359					15.156.635.011

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Komunikasi/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan Program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN LOA KULU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Loa Kulu tahun 2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Loa Kulu tahun 2026 untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kantor Camat Loa Kulu tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Kulu tahun 2021-2026 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat serta disenergikan Program dan kegiatan PD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Loa Kulu, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu Tahun 2026 sebagai satu bagian yang utuh dari manajeman kerja dilingkungan Pemerintah Daerah. Secara substansial Rencana Kerja Kantor Kecamatan Loa Kulu memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, Program dan kegiatan dengan indikator yang akan dijalankan, dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

a. Bahwa usulan Program/kegiatan yang dibahas di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun /lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan Program yang di bawa ke forum Musrenbang desa.
b. Forum Musrenbang desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa/kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di forum Musrenbang kecamatan.
c. Hasil Musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing PD yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas Kecamatan Loa Kulu selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Renstra kecamatan.

2. Tujuan :

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Loa Kulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta uraian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Loa Kulu di Tahun 2026.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Gerbang Raja Jilid II yaitu “KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Loa Kulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinyadan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan

pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan RKPD tahun 2026, mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan Musrenbang Daerah.
b. Menyusun Renja-PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Kulu ditunjang 5 (lima) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC.29

REKAFITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan IV 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Nilai	65		70		70		100		80		123.08
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	5	Dokumen	10	Doku men	10	Dokumen	50		15	Dokumen	150
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dok umen	2	Doku men	2	Dokumen	100		4	Dokumen	400
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Doku men	1	Dokumen	100		1	Dokumen	100
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Doku men	1	Dokumen	100		1	Dokumen	100
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Doku men	1	Dokumen	100		1	Dokumen	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		1	Dokumen	100
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100		10	Dokumen	250
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100		24	Laporan	200
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100		12	Laporan	100
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100		2	Laporan	100
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100		3	Laporan	200
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100		24	Laporan	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	695	Unit	692	BMD	693	BMD	693	BMD	100		1385	BMD	199
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	1	Dokumen	1	Laporan	2	Laporan	100		3	Laporan	300
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	%	80	Persen	80	Persen	82	Persen	na		162	Persen	191
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	na	Stel	na	Stel	0	Stel	0		na		na	Stel	139
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	na		0	Orang	0
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	na		0	Orang	0
7	01	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	6	Layanan	5	Layanan	5	Lembar	5	lembai	0		16	lembar	266.7
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	1	Jenis	0		0	Paket	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III (2024)		Tingkat Realisasi (%)	Catatan Penting	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	Unit	15	Unit	15	Jenis	15	Jenis	100		30	Paket	200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang disediakan	10	Unit	15	Unit	15	Jenis	15	Jenis	100		1	Paket	10
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4500	Lembar	4960	Lembar	4500	Lembar	24570	Lembar	110		1	Paket	0
7	01	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	0	kali	0	kali	0	Unit	0	Unit	0		0	Laporan	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	150	kali	150	kali	150	kali	150	kali	100		300	Laporan	200
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Lembar	500	Lembar	500	Lembar	500	Lemb ar	100		1000	Dokumen	200
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100		2	unit	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100		2	Unit	200
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	0	Unit	6	Unit	0	Unit	0	Unit	0		6	Unit	0
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	0	Unit	48	Unit	0	Unit	0	Unit	0		48	Unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bula n	12	Bulan	100		24	Laporan	200
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	200	Lembar	300	Lembar	180	Lembar	180	Lembar	167		480	Laporan	240
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132	Rekening	132	Rekening	132	Rekening	133	Rekening	100		265	Laporan	201
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bula n	12	Bulan	12	Bula n	12	Bulan	100		24	Laporan	200

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2025)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	Orang/ Bulan	120	Orang/ Bulan	120	Orang/ Bulan	120	Orang / Bulan	100		240	Laporan	2000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	Unit	24	Unit	32	Unit	32	Unit	75		56	Unit	233.33
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100		24	Unit	200
7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0	Jenis	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100		40	Unit	0
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0		1	Unit	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	40	Persen	37	Persen	38	Persen	38	Persen	100		39	Perse n	97.50
						Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	89	Pers en	86	Persen	87	Persen	87	Persen	100		88	Perse n	98.88

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II (2024)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	10	Kegiatan	5	Kegiatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	50		15	Kegiatan	150
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	100		28	Laporan	200.00
9	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	100		10	Laporan	200
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	Kegiatan	5	Kegiatan	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100		10	Kegiatan	200
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100		4	Kegiatan	200
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Kegiatan	12	Kegiatan	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100		24	Laporan	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III		Tingkat Realisasi (%)	Catatan Penting	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	228	Kegiatan	230	Kegiatan	228	Kegiatan	99	Kegiatan	158		163	Laporan	296.36
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100	%	100	%	100	%	100	%	100		100	%	100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	14	kali	14	kali	14	kali	14	kali	100		28	kali	200
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Orang	100	Orang	100	Orang	100	Orang	100		300	Lembaga Kemasya-rakatan	200
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100		8	Laporan	266.7
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	100	%	100	%	100	%	100		100	%	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	100		28	Kegiatan	200

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegaiatn s/d dengan Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)		
											Target Renja PD Tahun (2024)		Realisasi RENJA-PD Triwulan III		Tingkat Realisasi (%)	Catatan Penting	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100		10=(5+7+9)		11=10/4*100
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80	orang	80-	orang	0	orang	0	orang	0		0	orang	0
7	01	07	05	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Kegiatan	0	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	0		1	Laporan	20
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	60	%	36	%	40	%	57.14	%	143		50	%	83
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	14	Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	100		28	Desa	200

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	100		28	Dokumen	200
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Kegiatan	0	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiata n	0		14	Dokumen	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan memenuhi target.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Loa Kulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan srategis pemerintah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perijinan dan nonperijinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipata pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Loa Kulu melakukan jenis pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan standar pelayanan minimal. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamata Loa Kulu cukup memuaskan, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Loa Kulu , yaitu :

1. Nilai SAKIP PD.
2. Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dilaksanakan sesuai SOP.
3. Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan.
4. Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan.
5. Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan.
7. Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa presentase, ketepatan waktu pelayanan perjinan dan nonperijinan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Loa Kulu

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Sakip Perangkat Daerah											
I	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			376.892.000	168.927.943	173.927.943	173.927.943	45.650.500	31.867.000	37.027.500	170.000.000	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.575.000	9.975.000	10.000.000	20.000.000	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.750.300	9.879.500	10.000.000	20.000.000	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.500.000	4.474.000	10.000.000	20.000.000	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.396.000	5.356.000	10.000.000	20.000.000	
5	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.900.000	5.900.000	10.000.000	20.000.000	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			93.927.943	93.927.943	103.927.943	103.927.943	5.000.000	4.980.000	103.927.943	20.000.000	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5.000.000	4.967.000	30.000.000	50.000.000	
II	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.075.000	7.027.432.312	6.977.432.312	6.977.432.312	6.973.001.888	6.851.376.888	6.958.398.320	6.565.152.051	
1	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia			0	6.917.432.312	6.917.432.312	6.917.432.312	6.746.636.888	6.746.636.888	6.753.338.320	6.395.152.051	
2	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	-	
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	226.365.000	4.740.000	5.060.000	20.000.000	
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000		0	100.000.000	150.000.000	
III	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	90.000.000	70.000.000	70.000.000	0	404.750.000		61.200.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan			0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	4.750.000	5.000.000	20.000.000	
IV	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			135.190.000	0	0	0	133.650.000	3.200.000	-	200.000.000	
1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			135.190.000	na	na	na	133.650.000	3.200.000	0	200.000.000	
V	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.830.200	379.307.000	348.307.000	154.307.000	236.392.100	203.786.540	316.820.000	847.000.000	
	Jumlah Komponen Listrik (Unit)			0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.485.000	2.500.000	15.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan			143.072.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.844.000	44.126.140	25.000.000	100.000.000	
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia			78.795.900	40.000.000	40.000.000	46.000.000	78.586.800	59.123.500	40.000.000	100.000.000	
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia			16.962.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.961.300	11.999.900	15.000.000	25.000.000	
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			0	6.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.400.000	5.500.000	7.000.000	
	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan			0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	10.172.000	0	50.000.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara			0	25.307.000	25.307.000	25.307.000	0	67.530.000	25.000.000	200.000.000	
	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan			0	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2.950.000	3.820.000	50.000.000	
	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	250.000.000	
VI	Jumlah Barang Milik Daerah			0	0	0	0	0	0		304.524.000	
	Jumlah Mebel yang diadakan			0	0	0	0	0	0	0	104.524.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara			0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	
	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan			0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	
	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
VII	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			893.596.180	586.791.400	586.791.400	586.791.400	844.719.099	1.011.611.274	947.724.552	1.057.724.552	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.989.000	2.000.000	5.000.000	
	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			133.506.564	115.500.000	115.500.000	115.500.000	114.116.419	149.711.184	115.000.000	185.000.000	
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			744.659.616	469.291.400	469.291.400	469.291.400	715.172.680	815.784.950	832.724.552	832.724.552	
	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.430.000	0	0	0	13.430.000	44.126.140	-	35.000.000	
VIII	Jumlah Barang Milik Daerah			687.582.000	315.000.000	215.000.000	215.000.000	373.335.000	801.431.000		644.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan			239.702.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	236.687.000	182.731.000	0	569.000.000	
	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	18.450.000	0	25.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			422.880.000	0	0	0	136.648.000	600.250.000	0	50.000.000	
IX	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan			3.005.135.866	0	0	0	36.002.680.354	28.937.989.022			
X	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	efektif											
XIII	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	9.185.662.082	35.000.000	100.000.000	
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			0	0	0	0	0	4.762.005	0		
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	96.751.100	5.000.000	175,000,000	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	9.084.148.977	30.000.000	100.000.000	
XIV	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			2.905.135.866	20.299.960.000	31.859.550.000	14.325.000.000	36.002.680.354	19.752.326.940	31.844.550.000	15.773.409.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0	0	0	0	0	2.925.000	0	15.000.000	
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			2.905.135.866	20.284.960.000	31.844.550.000	14.310.000.000	36.002.680.354	9.749.401.940	31.844.550.000	15.743.409.000	
XIV	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			87.390.600	15.000.000	15.000.000	15.000.000	65.208.000	8.230.000	15.000.000	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			923.283.868	5.000.000	5.000.000	5.000.000	526.296.140	9.084.148.977	0	300.000.000	
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	25.000.000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	
XV	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		50.000.000	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

XVI	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	0	0	0	0	0			
XVII	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	
XVIII	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000	
XIX	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	150.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	
					27.434.683.130	23.047.458.655	23.412.458.655	38.798.839.693	30.489.093.696	40.627.914.663	27.398.009.603	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang bupati /wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Loa Kulu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
   a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
   b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa *point* pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk tekhnis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Permasalahan Eksternal:
   a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
   b. Jarak antara desa-desa dan ibukota kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
   c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat.
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
6. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan dalam rangka singkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkai tuntuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadilokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.
8. Potensi perkebunan kelapa sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT. Niaga Mas Gemilang yang berlokasi di desa Jonggon dan PT. Kota Bangun Play station yang berlokasi di Desa Sungai Payang potensi pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah dan padi ladang di desa hampir disemua 15 (lima belas) Desa.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

1. *Review* terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025;
2. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, pada tahun anggaran 2026 *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp) 2025	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74 Nilai	300.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74 Nilai	132.936.150	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,peng a nggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		300.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,pengan ggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		132.936.150	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Loa Kulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	300.000.000		Loa Kulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	132.936.150	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan 56 Persen-70 Persen	12.801.296.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan 56 Persen-70 Persen	12.801.296.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	550.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	434.101.500	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	150,000,000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	110,787,450.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	250,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	106.263.300	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Laporan	101.554.770	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	46,556,950.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	54,997,820.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		33.361.296.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		33.214.442.614	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Laporan	5,466,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Jumlah Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	811.296.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Jumlah Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	795,258,306.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	32,540,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	32,413,718,308	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1 Laporan	190.882.750	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	200.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	190.882.750	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Jumlah Kelenmbagaan yang aktif Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	150.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Jumlah Kelenmbagaan yang aktif Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	141,386,800.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	49,495,950.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Loa Kulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Kelembagaan	486,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Loa Kulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Kelembagaan	335,726,870.	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75 Persen	180.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64 Persen	57.203.100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	75 Persen	180.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	75 Persen	57.203.100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	175,000,000.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	52,203,100.	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	74 Nilai		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	74 Nilai		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67 Persen	330.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67 Persen	475.436.080	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Loa Kulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	250,000,000.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	Loa Kulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	229,230,570.	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	280,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	246,205,510.	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	72 Persen	75,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	72 Persen	40,090,500	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	15 Desa	75,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Loa Kulu	40,090,500	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	75,000,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	40,090,500.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74 Nilai	305.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74 Nilai	136.939.560	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,peng a nggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Desa	305.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,penga nggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Desa	136.939.560	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	74 Nilai	140,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	64.149.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	2,405,000.	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	2,315,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	70,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	36,102,100.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	60,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	19,658,800.00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	Loa Kulu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25,000,000.00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	Loa Kulu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	12,309,360.00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	7,521,102,622	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang	1 Dokumen	7,521,102,622	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	354,311,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	354,311,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10,606,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	4 Dokumen	49.990.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.746.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		289.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		241.432.308	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12,052,000.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamanakan	1 Laporan	150,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamanakan	1 Laporan	141,992,308.	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapat Penilaian	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapat Penilaian	1 Laporan	23.188.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	64,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	64,200,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Laporan	2,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Laporan	2,500,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	25,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	40 Jenis	46,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	46,000,000.00	.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	5,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedia Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5,500,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	24.110.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	163.087.261	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	98,422,800	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	20,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	13,670,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	20,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	15,615,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100		
	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan	0	0	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	0	0.00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	469,291,400.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang	600 Lembar	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang	600 Lembar	2,000,000.00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Tersedia					Tersedia			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	248,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	248,400,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832,724,552.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	248,400,000.	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	20,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	22 Laporan	75.000.000 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	22 Laporan	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	17 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	17 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	25.000.000	
					44,781,273,817			44,781,273,817		24,058,196,215.	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional sesuai Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

   a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
   b. Penerapam standar pelayanan minimal pelayanan publik; dan
   c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

   Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

   a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction;*
   b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
   c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur; dan
   d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
   b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi; dan
   c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah kebijakan Daerah.

RPJMD ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan Daerah sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan Program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dalam bidang pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel.TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	73 Persen	
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	63 Persen	
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	53 Persen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		
1	Rehabilitasi Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Loa Kulu)1119442	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
2	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Loa Kulu)1148120	Rempanga	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
3	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Loa Kulu1148154	Jembayan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03 Jembayan Gang Ayil Kecamatan Loa Kulu 1151145	Jembayan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
5	Rehabilitasi Jembatan Lingkungan RT 13/14 Loa Kulu 1151635	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
6	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Loh Sumber RT 06 Loa Kulu 1157517	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
7	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Loa Kulu Kota RT. 14 Kecamatan Loa Kulu 1157944	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
8	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Loa Kulu Kota RT. 19 Kecamatan Loa Kulu 1317221	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
9	Pembangunan Turap Desa Jembayan RT. 002 Kecamatan Loa Kulu 1325990	Jembayan	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
10	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Desa Jembayan RT. 23 Kecamatan Loa Kulu 1326886	Jembayan	Jumlah Panjang Drainase	1 Laporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Loa Kulu Kota RT. 19 Gang Purba Kecamatan Loa Kulu 1346613	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
12	Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 Jembayan Kecamatan Loa Kulu 1347035	Jembayan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
13	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sepakat RT. 01 Kecamatan Loa Kulu 1475924	Sepakat	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
14	Pembangunan Turap Jalan Desa Ponoragan RT. 06 Kecamatan Loa Kulu 1358931	Ponoragan	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
15	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Rt. 20 Kelesan Dusun Beroak, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu 1451993	Sungai Payang	Jumlah Panjang Drainase	1 Laporan	
16	Pembangunan Turap Jalan Cepitan Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1386343	Sumber Sari	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
17	Pembangunan Turap Jalan Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu1487453	Margahayu	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
18	Normalisasi Sungai Besar RT. 01 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1413874	Jongkang	Panjang Sungai dinormalisasi	1 Laporan	
19	Normalisasi Sungai Lempening RT. 01 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1413897	Jongkang	Panjang Sungai dinormalisasi	1 Laporan	
20	Rehabilitasi Jalan Beringin Jaya RT. 07 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1413904	Jongkang	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
21	Rehabilitasi Jalan Gg. Mumus RT. 05 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu 1416870	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
22	Rehabilitasi Jalan Losok I RT. 04 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1416844	Jongkang	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
23	Rehabilitasi Jalan Suaka RT. 03 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1414104	Jongkang	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
24	Rehabilitasi Lapangan Bola RT. 03 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1416836	Jongkang	Luas Lapangan Bola	1 Laporan	
25	Rehabilitasi Jalan Ex Gudang Dinamit Blok A RT. 03 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu 1416847	Jongkang	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
26	Rehabilitasi Jalan Anjas- Jalan Nanas RT. 12 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu 1416911	Margahayu	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
27	Rehabilitasi Jalan Anjas- Jalan Nanas RT. 12 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu 1416911	Margahayu	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
28	Rehabilitasi Jalan Nanas RT. 12 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu 1416907	Margahayu	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
29	Pembangunan Turap Jalan Makmur RT. 16 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu 1419697	Margahayu	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
30	Pembangunan Turap Jalan Pisang RT. 10 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu 1419867	Margahayu	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
31	Pembangunan Badan Jalan Buah RT. 04 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1419887	Sumber Sari	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
32	Rehabilitasi Jalan Keluarga RT. 010 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1419913	Sumber Sari	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
33	Pembangunan Turap RT 05 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420471	Sumber Sari	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
34	Rehabilitasi Gg Selamat RT 09 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420199	Sumber Sari	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
35	Pembangunan Turap RT 08 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420294	Sumber Sari	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
36	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan RT 03 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420494	Sumber Sari	Jumlah Bangunan/Unit	1 Laporan	
37	Pembangunan Turap RT 010 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420300	Sumber Sari	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
38	Normalisasi Saluran Drainase RT 09 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu 1420559	Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Laporan	
39	Rehabilitasi Jalan Gg. Iman Tembus Jalan Padat Karya RT. 015 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 1405616	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
40	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Gedung BPU Jawa Baru Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 1405692	Loa Kulu Kota	Jumlah Bangunan/Unit	1 Laporan	
41	Pembangunan Saluran Gorong-gorongGg. Iman RT. 015 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 1407968	Loa Kulu Kota	Panjang Goron-gorong	1 Laporan	
42	Rehabilitasi Gedung BPU Desa Loa Kulu Kota RT. 03 Kecamatan Loa Kulu 1408581	Loa Kulu Kota	Jumlah Bangunan/Unit	1 Laporan	
43	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkunganJalan H. Masdamsi RT. 01 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 1408646	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
44	Pemasangan Paving Blok Taman Literasi RT. 01Desa Loa Kulu Kota 1408684	Loa Kulu Kota	Luas Taman Literasi	1 Laporan	
45	Rehab Balai Dusun 5 Loa Gagak RT.20Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 1490798	Loa Kulu Kota	Jumlah Bangunan	1 Laporan	
46	Pengurukan Lahan SMP RT. 03 Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu 1409563	Jembayan Tengah	Luas Lahan Halaman	1 Laporan	
47	Pengurukan Jl Rumbia RT. 03 Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu 1409584	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
48	Pengurukan Jl. Gg. Lombok Marangan RT. 07 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu 1416879	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
49	Pengurukan Badan Jalan RT. 08 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu 1416897	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
50	Normalisasi Parit RT 06 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu 1419621	Sepakat	Jumlah Panjang Parit	1 Laporan	
51	Pengurukan Gg Ahya RT 06 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu 1419662	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
52	Pengurukan Jl. RT. 07 Menuju RT. 06 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu 1420146	Ponoragan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
53	Pembangunan Parit RT. 07 Desa Ponorogan Kecamatan Loa Kulu	Ponoragan	Jumlah Panjang Parit	1 Laporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
54	Peningkatan Badan Jalan Gunung Ore RT. 02 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu 1420267	Ponoragan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
55	Penurapan Jalan Kartini RT. 02 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu 1420312	Ponoragan	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
56	Pengurukan Badan Jalan Kartolo RT. 02 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu 1420825	Ponoragan	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
57	Pengurukan Jalan Arbasib RT. 06 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 1421304	Rempanga	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
58	Pengurukan Jalan Ihau RT. 06 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 1421397	Rempanga	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
59	Pengurukan Jalan Duku RT. 06 Kecamatan Loa Kulu 1421415	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
60	Lanjutan Pengurukan Jl. Asan RT. 08 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 1421577	Rempanga	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
61	Pengurukan Jl. Erham RT. 08 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 1421606	Rempanga	Jumlah Panjang Jalan	1 Laporan	
62	ID SIPD: 2216146 pembangunan parit beton rt 10 dusun mukti jaya desa jonggon jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jonggon Jaya	Jumlah Panjang Parit	1 Laporan	
63	ID SIPD: 2220949 Normalisasi Saluran Drainase rt 09 dusun mukti (kelompok Mekar Sari) Desa Jonggon Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jonggon Jaya	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
64	ID SIPD: 2009367 Normalisasi Saluran Drainase Desa Jembayan Tengah	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
65	ID SIPD: 2016740 Normalisasi Saluran Drainase Desa Jembayan Tengah	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
66	ID SIPD: 2029596 Normalisasi Saluran Drainase Desa Loh Sumber	Loh Sumber	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
67	ID SIPD: 2229778 pembuatan parit beton rt 12 dusun tama mulya desa jongggon jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jonggon Jaya	Jumlah Panjang Parit	1 Laporan	
68	ID SIPD: 2016907 Normalisasi Saluran Drainase • Lempatan Baru RT 008, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
69	ID SIPD: 2017121 Normalisasi Saluran Drainase Desa Jembayan Tengah	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
70	ID SIPD: 2177052 Normalisasi Saluran Drainase • Jalan Rukun Makmur/Tudungan, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
71	ID SIPD: 2177052 Pembangunan Normalisasi Saluran Drainase • RT 004 Al -Hidayah, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
72	ID SIPD: 2308037 normalisasi saluran drainase Jalan Poros Jembayan RT.006, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan	Jumlah Panjang Saluran Drainase	1 Laporan	
73	ID SIPD: 2229778 pembuatan parit beton rt 12 dusun tama mulya desa jongggon jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jonggon Jaya	Jumlah Panjang Parit	1 Laporan	
74	ID SIPD: 2340503 Pembangunan fasilitas umum MCK Jalan Poros RT.019, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,	Desa Jonggon	Jumlah Fasilitas Umum/Unit	1 Laporan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Jonggon Desa, Kab. Kutai Kartanegara				
75	ID SIPD: 2030261 Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Loa Kulu) Jalan Sumber Rezeki RT 09, Kab. Kutai Kartanegara	Loh Sumber	Jumlah Panjang Jaringan	1 Laporan	
76	ID SIPD: 1976487 Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Loa Kulu) Jalan Ali Husein Dusun 2 Tudungan, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Jaringan	1 Laporan	
77	ID SIPD: 2233204 pergantian saluran gorong-gorong yang kecil menjadi BOX CULVERT Jalan Rapak Nyamuk RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Sepakat	Jumlah Panjang Gorong-gorong	1 Laporan	
78	ID SIPD: 1978545 pembangunan Saluran Gorong-gorong Jalan R Ismanun RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Loh Sumber	Jumlah Panjang Gorong-gorong	1 Laporan	
79	ID SIPD: 2178727 pembangunan Saluran Gorong-gorong Jln Rukun Makmur Tudungan, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Gorong-gorong	1 Laporan	
80	ID SIPD: 2183777 pembangunan Saluran Gorong-gorong Jalan Rochi RT 006 Tudungan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Gorong-gorong	1 Laporan	
81	ID SIPD: 2322850 Pembangunan Saluran Gorong-gorong Jl. Padat Karya RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jembayan Tengah	Jumlah Panjang Gorong-gorong	1 Laporan	
82	ID SIPD: 2230640 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Loa Kulu) RT 04 Panjang 200 meter Tinggi 2 meter, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Kulu Kota	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
83	ID SIPD: 2215399 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Loa Kulu) Alamat RT 10 Dusun Mukti Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jonggon jaya	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
84	ID SIPD: 1975216 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Loa Kulu) Jalan Mulyo Pranoto RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Loh Sumber	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
85	ID SIPD: 1978172 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Loa Kulu) di lahan kuburan Jalan R Ismanun RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Loh Sumber	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	
86	ID SIPD: 2016862 Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Loa Kulu) Jalan Mulyo Pranoto RT 05, Kab. Kutai Kartanegara	Loh Sumber	Jumlah Panjang Turap	1 Laporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan, Kecamatan Loa Kulu telah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's).* Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. PD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten tahun 2026 dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Loa Kulu dapat menyentuh sasaran yang tepat

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berupa perumusan tujuan strategis *(strategis goal)* organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah : Meningkatkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
2. meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3. meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; dan
4. meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Marang Kayu dalam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I.1 Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

I.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

I.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

I.4.1 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

I.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

I.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

I.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I.5.1 Pengadaan mebel

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

I.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

I.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

I.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

I.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

I.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

II.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

II.1.1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat daerah dan Instansi Terkait

II.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

II.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Usaha

II.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan

II.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

III.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

III.1.1 Evaluasi Kelurahan

III.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

III.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM

IV.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

IV.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

V.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

V.1.1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Loa Kul tahun 2026, rencana Program dan kegiatan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan:

a. Pencapaian visi dan misi Bupati 2025-2029; khususnya pada Program kesejahteraan sosial;
b. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Kulu mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan dan termuat dalam Renstra Kecamatan Loa Kulu 2025-2029.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang direvisi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.
d. Pencapaian pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, SPM, pendayagunaan potensi ekonomi desa/kecamatan, pertumbuhan PAD desa/kecamatan.
e. Proses analisis data hasil evaluasi.
f. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Dalam upaya penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan guna mendukung program kesejahteraan sosial, berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki kecamatan, kebijakan penguatan data, optimalisasi koordinasi dan monitoring menjadi prioritas.

Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu tahun 2026 sesuai dengan Program dan kegiatan yang direncanakan. Terdapat 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Loa Kulu untuk tahun 2026.

Pendanaan untuk pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 yang besarannya awalnya menyesuaikan dengan pagu indikatif yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Loa Kulu tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja tahun 2026 Kantor Kecamatan Loa Kulu tahun 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Loa Kulu yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Loa Kulu sesuai arahan operasional dalam RKPD.

Rencana Kerja tahun 2026 Kantor Kecamatan Loa Kulu disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan Daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Camat Loa Kulu Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara sesama PD di Pemerintahan Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN LOA JANAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubaha, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan Daerah disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Loa Janan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

2. Tujuan

   Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Janan selama tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistem Matika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

B Analisis Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program

C Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Kecamatan Loa Janan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	95	95	95	100%	98	98	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	-	-	-	100%	200	-	0%
7.01.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	-	-	-	100%	25	2	8%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	85	85	85	100%	86	86	86%
		Tersedianya gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	4	4	4	100%	-	-	0%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah	1	1	-	-	100%	1	1	100%

7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	-	100%	1	1	100%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	85	85	85	100%	85	85	85%
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100	85	85	85	100%	95	95	95%
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	80	60	60	60	100%	65	65	81%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	98	98	98	100%	98	98	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	300	60	60	60	100%	60	180	60%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
		Jumlah Makanan dan Minuman	4.800	960	960	960	100%	960	2.880	60%

7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	876.940	175388	175388	175388	100%	175.388	526.164	60%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1.800	360	360	360	100%	360	1.080	60%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	475	95	95	95	100%	95	285	60%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	400	80	80	80	100%	80	240	60%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	2.315	463	463	463	100%	463	1.389	60%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125	25	25	25	100%	25	75	60%

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	67	67	67	67	100%	67	67	100%
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	0	0	0	100%	2	2	20%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	100	100	100	100		100	100	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	500	100	100	100	100%	100	300	60%

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30	0	0	0	100%	5	5	17%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	-	-	-	-	2	2	17%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	-	-	-	-	2	2	17%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	-	-	0%	100	85	100%

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Jumlah Output urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan secara amanah dan bermanfaat	100	-	-	-	0%	2	2	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100	90	90	90	100%	90	90	90%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	90	0	0	0	0%	18	18	20%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	0	0	0	100%	0	-	0%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	90	18	18	18	100%	18	54	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Loa Janan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
- Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan;
- Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan;
- Desa dalam kategori baik;

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Loa Janan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal:

   Kekuatan :

   - Visi dan misi organisasi yang jelas;
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
   - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
   - Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
   - Adanya sarana dan prasarana.

   Kelemahan :

   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
   - Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;
   - Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
   - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kutai Kartanegara;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram;

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
- Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD KecamatanLoa Janan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			95	95	98	100	100	98	98	98	98	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	9	9	9	9	9	36	36	36	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			85	85	86	100	100	86	86	86	86	
4	Tersedianya gaji dan tunjangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100	100	100	100	100	85	85	85	85	
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			75	85	85	95	100	95	95	95	95	
8	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			75	85	95	95	100	65	65	65	65	
9	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan			55	60	65	70	75	98	98	98	98	
10	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			98	98	98	98	98	100	100	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			100	100	100	100	100	67	67	67	67	
14	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			65	67	67	67	67	67	67	67	67	
15	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			85	85	85	85	85	100	85	85	85	
20	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85	85	85	85	100	85	85	85	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

21	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			90	90	90	90	100	90	90	90	90	
22	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Loa Janan.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Kecamatan Loa Janan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Loa Janan masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal;
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal;
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang pada Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan tahun 2025 dan yang akan datang tahun 2026.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Janan, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu PD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi *stakeholder* yang ada di Kecamatan Loa Janan.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan sinergitas antara instansi PD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang aktif dan religius.

II.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	30.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42	dokumen	5.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42	dokumen	5.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42	dokumen	5.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	266,885,086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	266.885.086	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Janan	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Janan	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	5,830,646,472	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	5.830.646.472	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	dokumen	100.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	25.000.000	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Loa Janan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Loa Janan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	52,060,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	52.060.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Loa Janan	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Loa Janan	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Loa Janan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Loa Janan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Loa Janan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Loa Janan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	jenis	7,997,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	jenis	7.997.700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70	jenis	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70	jenis	40.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30	jenis	38,060,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30	jenis	38.060.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	jenis	10,871,350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	jenis	10.871.350	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			-	Penyediaan Bahan/Material	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			-	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Janan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	peserta	85,860,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Janan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	peserta	85.860.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	sistem	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	sistem	50.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Janan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Mebel			-	Pengadaan Mebel	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Mebel			-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	jenis	128,843,220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	jenis	128.843.220	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	jenis	10,350,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	jenis	10.350.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288	orang	341,295,336	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288	orang	341.295.336	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	unit	228,495,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	unit	228.495.000	
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Loa Janan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Mebel			-	Pemeliharaan Mebel	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Mebel				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	232,951,714	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	232.951.714	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Loa Janan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				
7.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**						**Penataan Organisasi**						
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Loa Janan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	desa	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	desa	200.000.000.000	1.Kegiatan Erau (50.000.000),2.Kegiatan Pramuka (50.000.000),3.Kegiatan stunting (utk Rembuk dan Opr. TPPS) (100.000.000)
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**						**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			-	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1000	berkas	15,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1000	berkas	15.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	unit	402,915,290	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	unit	4.768.287.035	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	200	peserta	56,555,100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	200	peserta	56.555.100	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125	peserta	400,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125	peserta	400.000.000	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Janan	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Janan	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**						
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Loa Janan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Loa Janan	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Loa Janan	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila			-	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Loa Janan	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila				
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			-	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			-	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			-	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			-	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga			-	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga				
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Loa Janan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Janan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Janan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				
Total Pendanaan:					**8,453,786,268**						**212.744.158.013**		

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2026 hasil dari Musrenbang tingkat desa yang diawali dari gagasan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, LPM, karang taruna, KPM, RT, sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang.
2. Di forum Musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum Musrenbang tingkat kecamatan.
3. Hasil Musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut adalah tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Kantor Camat Loa Janan

No	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Parit RT.24 Dusun Tani Jaya (2223900)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Batuah	Panjang drenase	Na	
2	Perlunya Saluran Aliran Air Hujan Di Wilayah RT.37 Dusun karya baru (2224346)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Batuah	Panjang drenase	Na	
3	Pembangunan Parit RT 10 Dusun Batuah (2224528)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Batuah	Panjang drenase	Na	
4	Semenisasi Jalan RT 11 (jalan di kawasan tersebut mengalami kerusakan berat saat ini dan sangat membahayakan pengguna jalan yang akhirkan sangat menghambat aktifitas warga (2282737)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tani Harapan	Panjang Jalan	Na	
5	(Perkerasan Jalan Usaha Tani Rusdianto) Jalan Usaha Tani Merupakan Salah satu akses warga kekebun untuk hasil pertanian (2282986)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tani Harapan	Panjang Jalan	Na	
6	Pembangunan jalan di Gang Marta Kondisi pembangunan tereputus, letak jalan berada disekitaran rawa sehingga badan jalan potensi digenangi air jika dalam keadaan/ setelah hujan (2274759)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bakungan	Panjang Jalan	Na	
7	Pembuatan Drainase di Dusun II Tepian Manggis kondisi jalan sering terjadi genangan air pada musim hujan dan hal tersebut sanggat mengganggu pengguna jalan setempat (2275138)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bakungan		Na	
8	Parit Kiri kanan Jl.Ex PT hima terletak di area yang variatif menanjak dan menurun.Oleh karena itu perlu adanya pembuatan parit yang cukup mumpuni agar aliran air dapat mengalir lancar. (2306503)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Duri Ilir	Panjang Jalan	Na	
9	Di Loa Duri Ilir terdapat jalan yang mulai terkikis dari badan jalan yang membahayakan jika tidak segera diturap Arah Jalan Taruna (2309103)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Duri Ilir	Panjang Jalan	Na	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

10	Jalan yang masih terus mengalami pengikisan yang mengakibatkan polusi udara sehingga perlunya pengaspalan jalan Sriwarga (2320543)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	Na	
11	jalan sangat rusak dan susah dilewati kendaraan di RT.12 ke RT.13 (2321485)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	Na	
12	jalan masih rusak berlubang dan jalan tanjakan di Gg. Solata (2321545)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	Na	
13	Belum terselesaikan semenisasi Jalan yang rusak dan masih tanah menuju pemukiman warga di gang Kasturi (2310024)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tani Bhakti	Panjang Jalan	Na	
14	Terdapat jalan poros warga yang dilalui oleh warga sekitar setiap hari yang kondisi jalannya rusak di Jln. Pondo Ore (2310047)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tani Bhakti	Panjang Jalan	Na	
15	Kondisi Jalan yang masih tanah bila hujan jalan akan menjadi licin di Gang Ahim (2310107)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tani Bhakti	Panjang Jalan	Na	
16	Sehubungan Dengan Terdapat Jalan yang Rusak Dan Berlumpur di Jalan Tanjung Sari 3 Rt.24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu, Sehingga Kami mengajukan Peningkatan Jalan Tanjung Sari 3 Rt.24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu (2282131)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	Na	
17	Turap Sungai Loa Janan Ulu karena Tanah Tergerus Air Dan Terjadi Longsor (2324179)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan Ulu	Panjang turap	Na	
18	Sehubungan Dengan Terdapat Jalan yang Rusak Dan Berlumpur di Jalan Gg.Sawit 1,2,3 RT.31 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu, Sehingga Kami mengajukan Peningkatan Jalan Gg.Sawit 1,2,3 Rt.31 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu (2331936)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	Na	
19	dimana gang belum terbangunnya parit sehingga ketika hujan air mengalir di halamanan rumah warga sehingga mengalami banjir maka perlu dilakukan Pembangunan parit kanan kiri gang mangga (1968786)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Purwajaya	Panjang gang	Na	
20	kondisi jalan masih tanah ketika hujan turun mengakibatkan jalan becek dan mengalami banjir sehingga jalan perlu di tinggikan dan diSemenisasi jalan depan rumah pak lasmo (1970850)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Purwajaya	Panjang Jalan	Na	
21	kondisi gang mengalami rusak berat sehinga perlu di tingkatkan dan diSemenisasi gang kenari (1970991)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Purwajaya	Panjang gang	Na	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Loa Janan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama satu tahun.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi PD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan visi PD; dan
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD.

3.2.2 Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lao Janan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja	
				Satuan	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan Tenggarong Seberang.	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan Tenggarong Seberang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Persen	80
			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	80
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan baik	Persen	80

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Loa Janan tahun 2024 mencerminkan rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Loa Janan tahun 2025-2029. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Kantor Camat Loa Janan merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Janan maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Janan kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam Musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Pengolahan data menyangkut Program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan bahkan ketersediaan dana sebagai pendukung dari Program kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila kondisi lapangan kesiapan sumber daya dan anggaran tidaka ada keseuaian maka program kegiatan yang telah direncanakan bisa saja belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau bahkan gagal.

Adapun Program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Loa Janan sesuai tabel berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Janan	1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	30.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Janan	20 dokumen	10.000.000		Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	20 dokumen	10.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Janan	42 dokumen	5.000.000		Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	42 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Janan	42 dokumen	5.000.000		Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	42 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loa Janan	42 dokumen	5.000.000		Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	42 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Janan	4 dokumen	266.885.086			4 dokumen	266.885.086
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Janan						
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Janan	12 bulan	5.830.646.472			12 bulan	5.830.646.472
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Janan	1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	100.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Janan	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	25.000.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Loa Janan						
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Loa Janan						
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan	1 laporan	52.060.000			1 laporan	52.060.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Loa Janan						
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Loa Janan						
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Janan						
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Loa Janan						
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Loa Janan						
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Loa Janan						
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Loa Janan						
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan						
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan						
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Janan	7 jenis	7.997.700			7 jenis	7.997.700
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	70 jenis	40.000.000			70 jenis	40.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Janan	30 jenis	38.060.000			30 jenis	38.060.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Janan	5 jenis	10.871.350			5 jenis	10.871.350
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Janan	50 peserta	85.860.000			50 peserta	85.860.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Janan	1 sistem	50.000.000			1 sistem	50.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Janan		-				-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan		-				-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Janan	2	jenis	128.843.220			2	jenis	128.843.220
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Janan	5	jenis	10.350.000			5	jenis	10.350.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Janan	288	orang	341.295.336			288	orang	341.295.336
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loa Janan	3	unit	228.495.000			3	unit	228.495.000
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Loa Janan								
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Loa Janan								
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Loa Janan								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Janan								
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Loa Janan								
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Loa Janan								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Loa Janan	1 unit	232.951.714			1 unit	232.951.714
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan						
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Janan						
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Loa Janan						
7.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**								
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Loa Janan						
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Janan						
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Janan						
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Loa Janan						
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	8 desa	100.000.000			8 desa	100.000.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Loa Janan						
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Loa Janan						
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Janan	1000 berkas	15.000.000			1000 berkas	15.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Janan	2 unit	402.915.290			2 unit	402.915.290
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Janan	200 peserta	56.555.100			200 peserta	56.555.100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Janan		-				-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Janan	125 peserta	400.000.000			125 peserta	400.000.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Janan						
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Loa Janan						
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Loa Janan						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Loa Janan						
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Loa Janan						
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Loa Janan						
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan						
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Loa Janan						
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Loa Janan						
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Janan						
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Janan						
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Loa Janan						
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Janan						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Loa Janan						
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Loa Janan						
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Loa Janan						
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Loa Janan						
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Janan						
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Loa Janan						
Total Pendanaan:					**8.478.786.268**				**8.478.786.268**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Komunikasi/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan Program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA KAMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja-PD. Penyusunan Renja-PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Renja-PD Kecamatan Muara Kaman merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 melalui proses Teknokratik, Politik, Partisipatif dan *Top Down-Bottom Up* dan secara Substansi bersifat Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial serta mengacu pada pendekatan *"Money Folllow Program"* berbasis tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman serta visi dan Misi Rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 adalah :

1. Landasan Idieologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minumum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan & keuangan daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
20. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247 / SK - BUP / HK /2021 Tentang pelaksanaan tugas Camat dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Muara Kaman tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN,
berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,
berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKKAT DAERAH,
berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
berisi tentang : Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA MUARA KAMAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Renja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2024 memuat 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub-kegiatan dengan jumlah pagu Rp35.887.460.477,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Muara Kaman 2024 adalah sebagai berikut :

1. realisasi keuangan sebesar Rp34.224.307.722,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau tercapai 95,37% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dengan menyisakan SILPA sebesar Rp1.663.152.755,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
2. realisasi fisik kegiatan rata-rata mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen)

Capaian kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2024 cukup baik, namun demikian masih terdapat SILPA. Terdapat beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai factor penyebab adanya silpa Kecamatan Muara Kaman, seperti tidak terealisasinya pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan, serta juga ketidakcermatan dalam pengalokasian gaji dan tunjangan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra Kecamatan Muara Kaman dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel TC.29 :

Tabel TC.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Kaman Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Muara Kaman S/D Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)			10=(5+7+9)		11=(10/4)
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1					KECAMATAN															
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Nilai	68,88	Nilai	70	Nilai	70	Nilai	100	72,5	Nilai	73	Nilai	85.3
7	1	1	02	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Dokumen	10	Dokumen	4	Dokumen	5	Dokumen	125	16	Dokumen	31	Dokumen	103.3
7	1	1	02	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	3	Dokumen	9	Dokumen	90.0
7	1	1	02	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	5	Dokumen	50.0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	02	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	200	2	Laporan	7	Laporan	70.0
7	1	1	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	61	Laporan	26	Laporan	13	Laporan	30	Laporan	231	15	Laporan	71	Laporan	116.4
7	1	1	02	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	Orang/Bulan	61	Orang/Bulan	61	Orang/Bulan	61	Orang/Bulan	100	61	Orang/Bulan	61	Orang/Bulan	100.0
7	1	1	02	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	18	Laporan	150	12	Laporan	54	Laporan	90.0
7	1	1	02	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	800	Unit	639	Unit	640	Unit	639	Unit	100	639	Unit	640	Unit	80.0
7	1	1	02	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	7	Laporan	70.0
7	1	1	02	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	6	Layanan	2	Layanan	-	Layanan	-	Layanan	-	1	Layanan	3	Layanan	50.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	02	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	2	Paket	-	Paket	-	Paket	-	1	Paket	3	Paket	50.0
7	1	1	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	35	Kegiatan	14	Kegiatan	7	Kegiatan	7	Kegiatan	100	7	Kegiatan	28	Kegiatan	80.0
7	1	1	02	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	30	Paket	1	Paket	3	Paket	300	1	Paket	34	Paket	68.0
7	1	1	02	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	15	Paket	2	Paket	2	Paket	100	1	Paket	18	Paket	72.0
7	1	1	02	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	5	Paket	1	Paket	2	Paket	200	2	Paket	9	Paket	36.0
7	1	1	02	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	6	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	8	Paket	32.0
7	1	1	02	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	24	Laporan	4	Laporan	12	Laporan	300	12	Laporan	48	Laporan	80.0
7	1	1	02	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	170	Laporan	35	Laporan	70	Laporan	200	100	Laporan	340	Laporan	113.3
7	1	1	02	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	4	Dokumen	80.0
7	1	1	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	8	Unit	129	Unit	-	Unit	-	Unit	-	11	Unit	140	Unit	1750.0
7	1	1	02	07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	Unit	11	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	11	Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
7	1	1	02	07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	3	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	3	Unit	-
7	1	1	02	07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Paket	2	Paket	-	Paket	-	Paket	-	2	Paket	4	Paket	-
7	1	1	02	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	6	Unit	-	Unit	-	Unit	-	1	Unit	7	Unit	87.5
7	1	1	02	07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	4	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	4	Unit	-
7	1	1	02	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	103	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	103	Unit	-
7	1	1	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	48	Bulan	80.0
7	1	1	02	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	4	Laporan	80.0
7	1	1	02	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	13	Laporan	108	12	Laporan	49	Laporan	81.7
7	1	1	02	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	4	Laporan	80.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
							dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
7	1	1	02	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	48	Laporan	80.0
7	1	1	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	93	Unit	38	Unit	33	Unit	41	Unit	124	31	Unit	110	Unit	118.3
7	1	1	02	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	7	Unit	16	Unit	16	Unit	100	11	Unit	34	Unit	141.7
7	1	1	02	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	25	Unit	10	Unit	10	Unit	100	1	Unit	36	Unit	60.0
7	1	1	02	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	4	Unit	-	Unit	3	Unit	-	3	Unit	10	Unit	200.0
7	1	1	02	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	4	Unit	100.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	90	Persen	60	Persen	60	Persen	60	Persen	100	60	Persen	70	Persen	77.8
							Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	90	Persen	60	Persen	70	Persen	60	Persen	86	60	Persen	70	Persen	77.8
7	1	2	02	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	18	SP	3	SP	-	SP	1	SP	-	2	SP	6	SP	33.3
7	1	2	02	02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	18	Laporan	2	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	-	2	Laporan	5	Laporan	27.8
7	1	2	02	02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	3	Laporan	-	2	Laporan	6	Laporan	#DIV/0!
7	1	2	02	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5	Unit	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	2	Unit	40.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	2	02	03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	5	Unit	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	2	Unit	40.0
7	1	2	02	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3,164	Kegiatan	168	Kegiatan	102	Kegiatan	127	Kegiatan	125	55	Kegiatan	350	Kegiatan	11.1
7	1	2	02	04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	45	Laporan	10	Laporan	2	Laporan	7	Laporan	350	5	Laporan	22	Laporan	48.9
7	1	2	02	04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	164	Laporan	209	Laporan	100	Laporan	120	Laporan	120	50	Laporan	379	Laporan	231.1
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100.0
7	1	3	02	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	500	Koordinasi	50	Koordinasi	4	Koordinasi	20	Koordinasi	500	20	Koordinasi	90	Koordinasi	18.0
7	1	3	02	01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	50	Lembaga	12	Lembaga	-	Lembaga	6	Lembaga	-	10	Lembaga	28	Lembaga	56.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa														
7	1	3	0 2	0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35	Laporan	11	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75	2	Laporan	16	Laporan	45.7
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100.0
7	1	4	0 2	0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	Kegiatan	6	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	4	Kegiatan	10	Kegiatan	62.5
7	1	4	0 2	0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	2	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	2	Laporan	4	Laporan	80.0
7	1	4	0 2	0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Laporan	4	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	4	Laporan	8	Laporan	80.0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100.0
7	1	5	02	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	10	Urusan	4	Urusan	2	Urusan	2	Urusan	100	2	Urusan	8	Urusan	80.0
7	1	5	02	01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,000	Orang	200	Orang	200	Orang	700	Orang	350	200	Orang	1,100	Orang	110.0
7	1	5	02	01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	5	Dokumen	100.0
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	75	Persen	45	Persen	55	Persen	55	Persen	100	55	Persen	55	Persen	73.3

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	6	02	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	20	Desa	20	Desa	20	Desa	20	Desa	100	20	Desa	20	Desa	100.0
7	1	6	02	01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	Dokumen	40	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100	20	Dokumen	80	Dokumen	80.0
7	1	6	02	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	Laporan	20	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	20	Laporan	40	Laporan	40.0

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara Tahun 2024 disampaikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun anggaran 2024 cukup baik, namun diharapkan kedepannya bagi sub kegiatan yang belum atau kurang mendapatkan alokasi anggaran (Program, kegiatan dan sub kegiatan non urusan/generik) dapat menjadi perhatian secara bersama dalam pengalokasian ataupun penambahan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara menyelenggarakan urusan unsur kewilayahan bidang urusan kecamatan, penyelenggaran pembangunan Kecamatan Muara Kaman seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2024, memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan” diukur dari 4 (empat) indikator kinerja :

1. persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. persentase capaian ketenteraman dan ketertiban umum;
3. pertumbuhan pendapatan asli desa; dan
4. pertumbuhan pendapatan asli Daerah kewenangan kecamatan.

Capaian kinerja pada indikator persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai 100% (seratus persen) dari target 85% (delapan puluh lima persen) jumlah keluhan yang ditindaklanjuti. Sesuai dengan Skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menunjukkan nilai “Sangat Tinggi”. Angka capaian kinerja didasarkan pada data penyelenggaraan PATEN Kecamatan Muara Kaman periode Januari sampai desember 2024, dimana tidak terdapat keluhan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Muara Kaman. Penegasan tidak adanya keluhan terhadap layanan publik Kecamatan Muara Kaman tercermin dalam Surat Pernyataan Camat Muara Kaman Nomor : B. 406/Kec. MK/Pelum.600/01/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.2

Surat pernyataan Camat tidak adanya keluhan terhadap layanan publik.

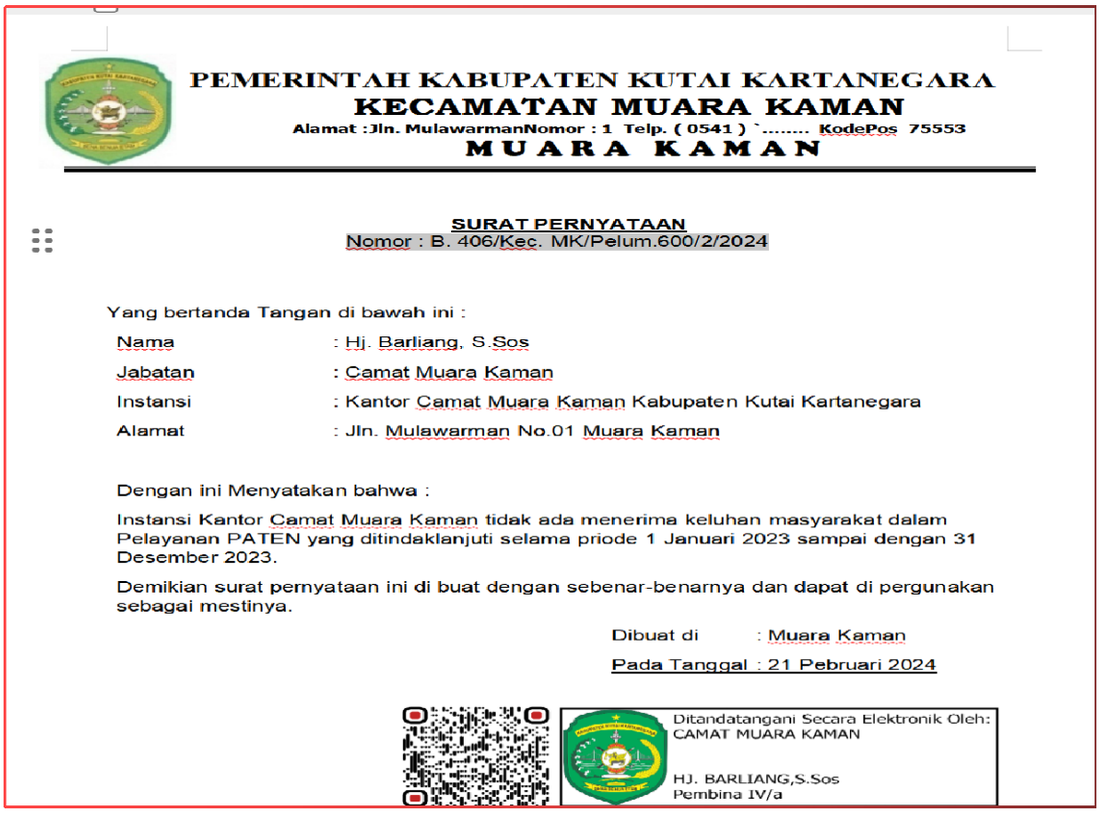

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA KAMAN
Alamat :Jln. MulawarmanNomor : 1 Telp. (0541) `..... KodePos 75553
MUARA KAMAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B. 406/Kec. MK/Pelum.600/2/2024

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Barliang, S.Sos
Jabatan : Camat Muara Kaman
Instansi : Kantor Camat Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jln. Mulawarman No.01 Muara Kaman

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Instansi Kantor Camat Muara Kaman tidak ada menerima keluhan masyarakat dalam Pelayanan PATEN yang ditindaklanjuti selama priode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pergunakan sebagai mestinya.

Dibuat di : Muara Kaman
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
CAMAT MUARA KAMAN

HJ. BARLIANG,S.Sos
Pembina IV/a

Angka capaian ini relatif sama dengan capaian pada periode tahun 2023 yang juga mencapai 100% (seratus persen). Hal ini mengindikasikan 2 (dua) kemungkinan, bahwa pelayanan publik di Kecamatan Muara Kaman terselenggara dengan baik atau masyarakat yang mengakses layanan apatis dalam memberikan penilaian. Untuk menjaga kualitas layanan pada periode yang akan datang, diperlukan langkah kongkrit agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi memberikan masukan dan koreksi terhadap setiap jasa layanan di Kecamatan Muara Kaman, sehingga pengukuran capaian kinerja menjadi lebih objektif dan berkualitas.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke dua : Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tabel 3.2. mencapai 100% (seratus persen) menunjukkan nilai “Sangat Tinggi”**.** Data capaian didasarkan pada persentase jumlah kasus yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum diselesasikan dari total jumlah kasus yang terjadi pada periode Januari sampai Desember 2024. Berdasarkan laporan hasil koordinasi dengan instansi vertikal beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama, tidak terdapat kasus yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menggangu ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Muara Kaman. Terselenggaranya koordinasi dengan instansi vertikal (Kepolisian dan TNI), tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perangkat desa lingkup Kecamatan Muara Kaman menjadi kunci keberhasilan pencapaian ini.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga memberi andil dalam pencapaian ini. Capaian ini mengindikasikan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang semakin baik, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dimana terdapat satu kasus yang dianggap menggangu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk masa yang akan datang, Kecamatan Muara Kaman optimis dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan koordinasi dan edukasi.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke tiga : pertumbuhan pendapatan asli desa 1% (satu persen), jauh dibawa target sebesar 100% (seratus persen). Dari nilai Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp1.112.529.503,75 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga koma tujuh puluh lima rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp962.529.503,75 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Merujuk pada skala nilai peringkat kinerja, masuk kategori “sangat rendah”. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, pengelompokan terhadap jenis Pendapatan Desa berdampak pada penerimaan PADes. Pemerintah Kecamatan Muara Kaman melalui seksi PMD melakukan mediasi dan koordinasi guna mendorong percepatan peningkatan pendapatan asli desa.

Tabel 2.2 PADes Kecamatan Muara Kaman

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN MUARA KAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**1.112.529.503,75**	**962.529.503,75**	**150.000.000,00**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	31.091.945,00	31.091.945,00	0,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	1.000.000.000,00	850.000.000,00	150.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	56.937.558,75	56.937.558,75	0,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**58.354.973.300,00**	**41.884.926.576,00**	**16.470.046.724,00**
1.2.1.	Dana Desa	17.590.461.000,00	14.116.612.079,00	3.473.848.921,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.163.598.000,00	445.370.720,00	718.227.280,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	26.943.866.800,00	18.500.999.777,00	8.442.867.023,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	900.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	11.757.047.500,00	8.321.944.000,00	3.435.103.500,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**189.102.066,30**	**189.527.728,66**	**(425.662,36)**
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	188.403.117,00	188.403.117,00	0,00
1.3.6.	Bunga Bank	698.949,30	1.124.611,66	(425.662,36)
	JUMLAH PENDAPATAN	**59.656.604.870,05**	**43.036.983.808,41**	**16.619.621.061,64**

Sumber : Aplikasi Siskeudes

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke empat : pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan 0% (nol persen) artinya tidak ada realiasi. Angka realisasi ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan tidak tersedianya data realisasi PAD di Kecamatan Muara Kaman. Keadaan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan perangkat desa di Kecamatan Muara Kaman, serta juga kebijakan terhadadp kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap objek PAD tertentu. Pada masa yang akan datang diperlukan penguatan koordinasi agar PAD dari kecamatan muara kaman dapat dilaporkan

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Kaman

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Indikator Tujuan													
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			83,77	86,87	86,97	87,07	87,17	89,41	89,7	89,9	90,2	Realisasi capaian tahun 2025 Merupakan Angka Proyeksi Optimis.
Indikator Sasaran													
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			80	85	90	95	100	90	95	95	97	
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80	85	90	95	100	90	95	95	95	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			100	100	100	100	100	1	5	5	7	
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	0	0	0	0	Data Tidak Tersedia, Pungutan PAD Bukan Kewenangan Kecamatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Kaman pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Daerah, yaitu:

1. implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh;
2. peningkatan pemerataan kualitas sumber daya manusia;
3. pengembangan perekonomian berkelanjutan;
4. kemandirian pangan;
5. pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah; dan
6. transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan.

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Daerah periode 2025-2029 tersebut di atas, serta hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun-tahun sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Muara Kaman meliputi :

1. keterjangkauan dan kemudahan akses pelayanan publik;
2. ketenteraman dan ketertiban umum;
3. efektifitas tata kelola pemerintahan desa;
4. sumber daya aparatur yang cakap dan berkualitas;
5. infrastruktur dasar yang tersebar dan optimal (jaringan listrik, internet dan jalan);
6. satu data dan terintegrasi;
7. kelembagaan yang berperan aktif; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. pemberdayaan masyarakat berbasis pootensi wilayah.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja-PD. Dalam proses penyempurnaan melaui analisis dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Muara Kaman, dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Teknokratik 2025-2029 serta urusan unsur kewilayahan yang diselenggarakan Kecamatan Muara Kaman. fungsi dan tugas Kecamatan Muara Kaman terkait erat dengan pencapaian misi ke 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**.**

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal PD/ Renstra PD dapat dilihat pada Tabel TC.31.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7						Unsur Kewilayahan						Unsur Kewilayahan						
7	1					Kecamatan						Kecamatan						
						Non Urusan						Non Urusan						
								Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan.	89,9	Nilai				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan.	89,9	Nilai		
								Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.	72,7	Persen				Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.	72,7	Persen		
7	**1**	**1**				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68	Nilai	10,408,500,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68	Nilai	11,739,917,658	
7	**1**	**1**	2	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	42	Dok.	590,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	16	Dok.	420,000,000	
7	**1**	**1**	2	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok.	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok.	40,000,000	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Dokumen Renja						*Dokumen Renja*						
						Dokumen Perubahan Renja						*Dokumen Perubahan Renja*						
						Dokumen Renstra						*Dokumen Renstra*						
7	**1**	**1**	2	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok.	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran.
						Dokumen RKA SKPD						*Dokumen RKA SKPD*						
7	**1**	**1**	2	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	70,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	30,000,000	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Laporan Capaian Kinerja						*Laporan Capaian Kinerja*						
7	**1**	**1**	2	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	60,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	50,000,000	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Laporan Evaluasi Kinerja						*Laporan Evaluasi Kinerja*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	**1**	**1**	2	1	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	42	Data	300,000,000	Perbaikan Volume Target Kinerja Berdasarkan Jenis dan Jumlah Data yang diperlukan.
						Satu Data (Becik)						*Satu Data (Becik)*						
7	**1**	**1**	2	1	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Berita Acara Hasil Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	BA	25,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Berita Acara Hasil Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	BA	-	PD Kecamatan Tidak Menyelenggarakan Forum PD melainkan hanya sebagai peserta yang kebutuhan pengangarannya melalui Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Forum Perangkat Daerah						*Forum Perangkat Daerah*						
7	**1**	**1**	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Kec. Muara Kaman	38	Laporan	7,935,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Kec. Muara Kaman	25	Laporan	9,859,917,658	
7	**1**	**1**	2	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	61	Orang / Bulan	7,650,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	90	Orang / Bulan	9,649,917,658	Penambahan anggaran menyesuaikan dengan hasil Rekon Gaji.
						Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						*Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*						
7	**1**	**1**	2	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok.	50,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						*Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	**1**	**1**	2	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10,000,000	
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						*Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*						
7	**1**	**1**	2	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	200,000,000	
						Laporan Keuangan Bulanan						*Laporan Keuangan Bulanan*						
7	**1**	**1**	2	2	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	1	Dok.	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran						*Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran*						
7	**1**	**1**	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada		Jumlah Laporan Administrasi Barang	18	Laporan	195,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik	4	Laporan	105,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Perangkat Daerah.		Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman				Perangkat Daerah.		Daerah Pada Kec. Muara Kaman				
7	**1**	**1**	2	3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Rencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok.	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Rencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok.	25,000,000	
						Dokumen RKBMD						*Dokumen RKBMD*						
7	**1**	**1**	2	3	02	Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Dokumen Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	1	Dok.	100,000,000	Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Dokumen Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	1	Dok.	50,000,000	
						Dokumen Pengamanan Aset.						*Dokumen Pengamanan Aset.*						
7	**1**	**1**	2	3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	Laporan	30,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	Laporan	30,000,000	
						Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD						*Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD*						
7	**1**	**1**	2	3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12	Laporan	40,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	Laporan	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Honorarium Pengelola BMD						*Honorarium Pengelola BMD*						
7	**1**	**1**	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	7	Laporan	400,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	-	Laporan	-	
7	**1**	**1**	2	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Pengadaan Pakaian Dinas.						*Pengadaan Pakaian Dinas.*						
7	**1**	**1**	2	5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok.	50,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Dokumen Kepegwaian SKPD						*Dokumen Kepegwaian SKPD*						
7	**1**	**1**	2	5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dok.	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
																		Bappeda.
						Dokumen Administrasi Kepegawaian						*Dokumen Administrasi Kepegawaian*						
7	**1**	**1**	2	5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	1	Dok.	25,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (E-Kinerja)						*Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (E-Kinerja)*						
7	**1**	**1**	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.						*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.*						
7	**1**	**1**	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	159	Laporan	485,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	55	Laporan	330,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	**1**	**1**	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	1	Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	-	Paket	-	Diperlukan untuk pengadaan/penggantian Bola Lampu dan Instalasi Listrik.
						Paket Instalasi Listrik Kantor						*Paket Instalasi Listrik Kantor*						
7	**1**	**1**	2	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	3	Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	5	Paket	150,000,000	Penambahan anggaran untuk pemenuhan Kebutuhan PC Kantor.
						Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PC, Laptop, Smart Board, etc)						*Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PC, Laptop, Smart Board, etc)*						
7	**1**	**1**	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	Paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	-	Paket	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Paket Peralatan Rumah Tangga						*Paket Peralatan Rumah Tangga*						
7	**1**	**1**	2	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan.	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan.	1	Paket	50,000,000	
						Paket ATK						*Paket ATK*						
7	**1**	**1**	2	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	1	Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	1	Paket	20,000,000	
						Paket Barang Cetakan dan Penggandaan						*Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*						
7	**1**	**1**	2	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	15,000,000	
						Jamuan Tamu (Makan Minum dan Akomodasi)						*Jamuan Tamu (Makan Minum dan Akomodasi)*						
7	**1**	**1**	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	75,000,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.						*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.*						
7	**1**	**1**	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	Dok.	25,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	Dok.	20,000,000	Penambahan anggara untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
																		penyediaan Kotak Arsip.
						Dokumen Penatausahaan Arsip.						*Dokumen Penatausahaan Arsip.*						
7	**1**	**1**	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Disediakan	2	Unit	200,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Disediakan	1	Unit	25,000,000	
7	**1**	**1**	2	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan.	1	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan.	1	Unit	25,000,000	Pengalokasian anggaran untuk pengadaan Mesin Pemotong Rimput.
						Pengadaan Genset, Mesin Rumput, etc						*Pengadaan Genset, Mesin Rumput, etc*						
7	**1**	**1**	2	7	10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	1	Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	-	Unit	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Pembangunan Lahan Parkir, Pagar dan Sarana						*Pembangunan Lahan Parkir, Pagar dan Sarana*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Gedung lainnya.						*Gedung lainnya.*						
7	**1**	**1**	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	Laporan	300,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27	Laporan	300,000,000	
7	**1**	**1**	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	270,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	270,000,000	
						Pembayaran jasa Penyedia AIR, istrik dan Internet.						*Pembayaran jasa Penyedia AIR, istrik dan Internet.*						
7	**1**	**1**	2	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15	Laporan	30,000,000	
						Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor.						*Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor.*						
7	**1**	**1**	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumah Unit Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	20	Unit	303,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumah Unit Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	19	Unit	700,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	**1**	**1**	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	228,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	60,000,000	
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.						*Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.*						
7	**1**	**1**	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.						*Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.*						
7	**1**	**1**	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	1	Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	1	Unit	15,000,000	Pengalokasian Anggaran Untuk Perawatan Genset dan Mesin Rumput.
						Pemeliharaan Genset, Mesin Rumput, etc)						*Pemeliharaan Genset, Mesin Rumput, etc)*						
7	**1**	**1**	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	3	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	2	Unit	500,000,000	Pengalokasian anggaran untuk Rehab Rumah Dinas.
						Rehab Gedung Kantor						*Rehab Gedung Kantor*						
7	**1**	**1**	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	1	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi.	1	Unit	50,000,000	Pengalokasian anggaran untuk perawata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						n pagar dan tempat parkir.
						Perawatan Pagar, Parkir Gedung Kantor						*Perawatan Pagar, Parkir Gedung Kantor*						
						URUSAN						URUSAN						
7	1	2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai SOP	81,25	Persen	1,788,889,217	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai SOP	81,25	Persen	5,812,202,000	
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Laporan	400,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Laporan	450,000,000	
7	1	2	2	1	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150,000,000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	200,000,000	Penambahan Anggaran Untuk Memaksimalkan Kegiatan Stunting.
						Koordinasi Stunting (Rembuk						*Koordinasi Stunting (Rembuk*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Operasional TPPS Kecamatan)						*Operasional TPPS Kecamatan)*						
						Fasilitasi Kegiatan ERAU.						*Fasilitasi Kegiatan ERAU.*						
7	1	2	2	1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1	Dok.	250,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1	Dok.	250,000,000	
						Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan.						*Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan.*						
7	1	2	2	2		Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	
7	1	2	2	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	
						Operasional POKJANAL Posyandu						*Operasional POKJANAL Posyandu*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Pelaksanaan Kegiatan Pramuka						*Pelaksanaan Kegiatan Pramuka*						
7	1	2	2	3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	Laporan	25,000,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	Laporan	25,000,000	
7	1	2	2	3	01	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dok.	25,000,000	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dok.	25,000,000	
						Dokumen Koordinasi Antar PD / Instansi Vertikal Dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum						*Dokumen Koordinasi Antar PD / Instansi Vertikal Dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	2	2	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	205	Laporan	1,263,889,217	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	39	Laporan	5,237,202,000	
7	1	2	2	4	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan Pada Urusan Pemerintahan.	5	Laporan	750,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan Pada Urusan Pemerintahan.	17	Laporan	1,052,202,000	Penambahan anggaran untuk meningkatkan jangkauan pengelolaan sampah.
						Pemeliharaan LPJU						*Pemeliharaan LPJU*						
						Pengelolaan Sampah						*Pengelolaan Sampah*						
						Pemeiharaan Situs Muara Kaman						*Pemeiharaan Situs Muara Kaman*						
						Penanganan Darurat Bencana						*Penanganan Darurat Bencana*						
						Fasilitasi PATEN.						*Fasilitasi PATEN.*						
												Honor Tenaga Kebersihan dan Pengamanan						
7	1	2	2	4	03	Pelaksanaan Urusan Pemerinta-han Yang	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	200	Laporan	513,889,217	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	22	Laporan	4,185,000,000	Penambahan anggaran untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan						Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan						meningkatkan / memenuhi kebutuhan infratruktstur masyarakat Desa.
						Pembangunan / Peningkatan Jalan, Turap Jalan, etc.						*Pembangunan / Peningkatan Jalan, Turap Jalan, etc.*						
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keurahan		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Sesuai SOP	70	Persen	825,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keurahan		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Sesuai SOP	70	Persen	406,000,000	
7	1	3	2	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	Laporan	75,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	Laporan	100,000,000	
7	1	3	2	1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Beerpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	10	Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Beerpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	10	Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
						Fasilitasi Musrenbang Kecamatan						*Fasilitasi Musrenbang Kecamatan*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	3	2	1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50,000,000	
						Fasilitasi Lomba Desa						*Fasilitasi Lomba Desa*						
						Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)						*Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)*						
7	1	3	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11	Laporan	550,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16	Laporan	306,000,000	
7	1	3	2	3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang Diselenggarakan	36	Lembaga Kemasyarakatan	350,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang Diselenggarakan	36	Lembaga Kemasyarakatan	306,000,000	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Pembayaran Honor LINMAS						*Pembayaran Honor LINMAS*						
						Fasilitasi Kegiatan HKG PKK						*Fasilitasi Kegiatan HKG PKK*						
						Operasional PKK						*Operasional PKK*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Pelaksanaan Forum Anak						*Pelaksanaan Forum Anak*						
						Fasilitasi Jambore PAUD						*Fasilitasi Jambore PAUD*						
7	1	3	2	3	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Penambahan anggaran untuk meningkatkan jumlah peserta Pelatihan.
						Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan						*Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan*						
7	1	3	2	3	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	2	Unit	100,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	-	Unit	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan.						*Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan.*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	3	2	6		Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga Tingkat Kecamatan.	4	Laporan	200,000,000	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga Tingkat Kecamatan.	-	Laporan	-	
7	1	3	2	6	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga	50,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	Keluarga	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasilitasi Distribusi Pangan Keluarga Pra Sejahtera.						*Fasilitasi Distribusi Pangan Keluarga Pra Sejahtera.*						
7	1	3	2	6	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100	Keluarga	50,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	Keluarga	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Identifikasi dan Updating Data RTLH.						*Identifikasi dan Updating Data RTLH.*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	3	2	6	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Keuarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Keluarga	50,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Muara Kaman	Jumah Keuarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	Keluarga	-	Penambahan anggaran untuk meningkatkan jumlah peserta/ keluarga.
						Sosialisasi Buang Sampah Pada Tempat Pembuangan Sampah.						*Sosialisasi Buang Sampah Pada Tempat Pembuangan Sampah.*						
7	1	3	2	6	08	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	50	Keluarga	50,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	-	Keluarga	-	Penambahan anggaran untuk meningkatkan jumlah peserta/ keluarga.
						Sosialisasi Manfaat Kooperasi.						*Sosialisasi Manfaat Kooperasi.*						

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Sesuai SOP	90	Persen	100,000,000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Sesuai SOP	90	Persen	150,000,000	
7	1	4	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Laporan	100,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	Laporan	150,000,000	
7	1	4	2	1	01	Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1	Laporan	25,000,000	Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	2	Laporan	25,000,000	
						Rapat Koordinasi Forkopimcam.						*Rapat Koordinasi Forkopimcam*.						
7	1	4	2	1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	75,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	125,000,000	Penambahan Anggaran untuk menduk ung Kegatan Safari

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
																		Ramadan.
						Pelaksanaan FKUB						*Pelaksanaan FKUB*						
						Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan						*Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan*						
						Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.						*Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.*						
												Safari Ramadan						
7	1	5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65	Persen	350,000,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65	Persen	180,000,000	
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	Laporan	350,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Laporan	180,000,000	
7	1	5	2	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	200	Orang	300,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	200	Orang	180,000,000	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional						Bappeda.
						Fasilitasi MTQ Tingkat Desa						*Fasilitasi MTQ Tingkat Desa*						
						Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan.						*Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan.*						
7	1	5	2	1	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Konflik Sosial Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	50,000,000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Laporan Konflik Sosial Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	Laporan	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasiitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial.						*Fasiitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial.*						
								Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	70	Persen				Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	70	Persen		
7	1	6				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa Dengan Kategori Pengelolaan Keuangan yang baik	60	Persen	180,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa Dengan Kategori Pengelolaan Keuangan yang baik	60	Persen	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	6	2	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4	Laporan	180,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Laporan	-	
7	1	6	2	1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dallam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	1	Dok.	25,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dallam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasilitasi Penyusunan PerDes dan Perkades.						*Fasilitasi Penyusunan PerDes dan Perkades.*						
7	1	6	2	1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dok.	25,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa.						*Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa.*						

BerAKHLAK banggamelayanibangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja.	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	6	2	1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok.	100,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasilitasi Verifikasi RKA Desa						*Fasilitasi Verifikasi RKA Desa*						
7	1	6	2	1	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dok.	30,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	Dok.	-	Efisiensi Anggaran didasarkan analisis bersama Bappeda.
						Fasilitasi Pemilihan Kades.						*Fasilitasi Pemilihan Kades.*						
						JUMLAH					13,652,389,217	JUMLAH					18,288,119,658	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan RKPD Kecamatan Muara Kaman, terdapat koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman memberi ruang untuk mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui(anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, maupun lintas PD melalui mekanisme musrenbang, baik pada tingkat desa selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan musrenbang, forum PD maupun musrenbang Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan usulan dari hasil musrenbang PD di tingkat kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kaman maupun PD lain yang terkait, seperti yang tercermin pada Program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan Program kerja dari Kecamatan Muara Kaman tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Daerah yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara, disampaikan dalam table TC.32 di bawah.

Tabel TC.32. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Rencana 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait Kewenangan lain yaang Dilimpahkan.	20 Desa	Jumlah Laporan Kegiatan	94	Laporan	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 001, Desa MENAMANG KANAN.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2151376

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 06 dan RT. 07, Dusun Danau Lipan Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2151943
3	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	RT. 02, Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2152762
4	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 015, Dusun Aji Bidara Putih, Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2153560
5	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 015, Dusun Aji Bidara Putih, Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2153625
6	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 015, Dusun Aji Bidara Putih, Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2153699
7	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 15, Dusun Aji Bidara Putih, Desa Muara Kaman Ulu.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2153904
8	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 18, Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2177918
9	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2178097
10	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 16, Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2179003
11	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 17, Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2179095
12	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 18, Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2179164
13	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 19, Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2179246
14	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Jl. Teluk Sepinggan RT 001 Desa Muara Siran, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2202118
15	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi	Desa Muara Kaman Ilir RT.9, Kab.	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2232545

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
	Sederhana (Muara Kaman)	Kutai Kartanegara				
16	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Jln. Reformasi III (Tambak III) Desa Benua Puhun.	Jumlah Unit Saluran Gorong Gorong dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2307659
17	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Kaman)	Desa Benua Puhun Kec. Muara Kaman KUKAR, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Tempat Sampah dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2307693
18	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Menamang Kiri RT004, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2309835
19	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Menamang Kiri, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2310681
20	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Kaman)	RT. 003 Dusun Cipari, Desa Cipari Makmur	Jumlah Lokasi Pembersihan Rumput dan sedimentasi lumpur dibersihkan	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2311546
21	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Kaman)	Kawasan Pertanian Terpadu, RT. 001 Dusun Cipari, Desa Cipari Makmur	Jumlah Lokasi Pembersihan Rumput dan sedimentasi lumpur dibersihkan	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2311558
22	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Kaman)	Jalan Perkutut, RT. 010 Dusun Kumpa Makmur, Desa Cipari Makmur	Jumlah Lokasi Pembersihan Rumput dan sedimentasi lumpur dibersihkan	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2311564
23	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Jalan Pandai Besi, Desa Panca Jaya	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2311980
24	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Jalan Tambak Malang, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2312429
25	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 13 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2312681
26	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2312791
27	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Jalan Perkebunan, RT. 009 Dusun Kumpa	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2312972

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
		Makmur, Desa Cipari Makmur				
28	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	RT. 010 Dusun Kumpa Makmur, Desa Cipari Makmur	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2313019
29	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Jalan Tambak Malang, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2313031
30	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 009 Dusun Kumpa Makmur, Desa Cipari Makmur	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2313203
31	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 11, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2314115
32	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2314257
33	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 7, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2314458
34	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Mulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2314719
35	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun SUmber Agung RT. 17, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2314941
36	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Agung RT. 18, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2315090
37	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Agung RT. 19, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2315446
38	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara KAman Ilir Dusun Sumber Agung RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2315587
39	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Menamang Kiri RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2316025
40	Pembangunan Saluran Gorong-gorong	Desa Muara Kaman ilir Jalan Tambak	Jumlah Unit Saluran Gorong Gorong dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2316094

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
	Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Malang, Kab. Kutai Kartanegara				
41	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Mulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2316411
42	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Dusun Sumber Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2316502
43	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Bukit Jering, Jln M Yusuf rt 02 , Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2317540
44	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2319136
45	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2319632
46	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit MCK Umum dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2320432
47	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Menamang Kanan RT 001.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2321522
48	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Bukit Jering rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2322906
49	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Rantau Hempang.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2329738
50	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Jln. Musosalim , Desa Sidomukti	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2350753
51	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Kaman)	Desa Menamang Kiri ,RT.004 Dusun Danau Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pembersihan Rumput dan sedimentasi lumpur dibersihkan	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2352990
52	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2356243
53	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Desa Muara Siran, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2356669

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
54	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara SIran, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2356721
55	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Muara Siran RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Saluran Gorong Gorong dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2356966
56	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Kaman)	Desa Muara Sira RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Tempat Sampah dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2357022
57	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Kaman)	RT 06 S/d RT 01 Dusun Liang Tupai dan Dusun Telok Mendeman Desa Puan Cepak.	Panjang Jaringan pipa air bersih dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2357763
58	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2357964
59	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2361702
60	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir RT. 15, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2361717
61	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Kaman)	RT. 013 dan RT. 025, Desa Bunga Jadi	Panjang Jaringan pipa air bersih dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2362878
62	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Kaman)	Desa teratak kec.muara kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan pipa air bersih dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2368801
63	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Kaman)	Jalan awang Long, Desa Panca Jaya.	Jumlah Unit MCK Umum dibangun.	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2402842
64	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Lebaho Ulaq RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2409366
65	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Gang Jl Penghubung RT. 002 ke RT. 012, Desa Cipari Makmur	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2409683
66	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	Desa Menamang Kanan RT 001.	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan Musrenbang, ID 2413298
67	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Rt.6 Desa Sabintulung	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID 1322652

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
68	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Rt. 01 Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID 1322672
69	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Rt. 01 Desa Teratak Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1338748
70	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Jumlah Unit MCK Umum dibangun.	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1338885
71	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jaringan pipa air bersih dibangun.	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1338902
72	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1352425
73	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara.	Panjang Jembatan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1352460
74	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Desa Teratak Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Kamaruzaman, ID1352482
75	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	Jalan Blekok RT 14 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman , Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Muhammad Idham, ID1378353
76	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 4 DESA MANAMANG KIRI KECAMATAN MUARA KAMAN, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1427221
77	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	jl. Lebak Pompong Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428048
78	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	jl. Tambak Malang Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428071
79	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Kaman)	jl. Rawa Indah Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Turap dibangun	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428089
80	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	jl. RT. 18 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428203

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		ID USULAN
81	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 17 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428226
82	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 19 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428262
83	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	jl. awang long Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428316
84	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	jl. RT. 20 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428350
85	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 13 dan RT. 14 Desa Muara Kaman Ulu , Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428728
86	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 15 Desa Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1428758
87	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN.	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1437990
88	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 009 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN.	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1438039
89	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 010 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN.	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1438068
90	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 011 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN.	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1438076
91	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT 012 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN.	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1438086
92	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 05 DESA MANAMANG KIRI , Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1452358
93	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 06 DESA MANAMANG KIRI , Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Jalan lingkungan di Pelihara	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1452359
94	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Kaman)	RT. 05 DESA MANAMANG KIRI , Kab. Kutai Kartanegara, ,	Panjang Saluran Drainase dinormalisasi.	1	Paket	Usulan POKIR_Hendra, ID1452364

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional merupakan bagian penting untuk diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman. agenda pembangunan nasional tercermin dari visi presiden yaitu : Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 9 (sembilan) misi pembangunan, dengan 2 (dua) misi menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan misi Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. pengelolaan pemerintah yang bersif, efektif dan terpercaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman.

Mencermati tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman, serta mengacu pada target kinerja pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Muara Kaman, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan.		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan.	89,09
		Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan.	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.	72,7 Persen
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	70 Persen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026, rencana Program dan kegiatan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan :

a. Pencapaian visi dan misi Bupati 2025-2029; khususnya pada Program kesejahteraan sosial**.**
b. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kaman mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan dan termuat dalam Renstra Kecamatan Muara Kaman 2025-2029.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang direvisi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.
d. Pencapaian pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi desa/kecamatan, pertumbuhan PAD desa/kecamatan.
e. Proses analisis data hasil evaluasi.
f. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Dalam upaya penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan guna mendukung program kesejahteraan sosial, berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki kecamatan, kebijakan penguatan data, optimalisasi koordinasi dan monitoring menjadi prioritas.

Program dan kegiatan pada tahun 2026 berjumlah 5 (lima) Program, 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub-kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp18.288.119.658,00. (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2026, secara rinci disampaikan dalam tabel berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kaman Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten kutai Kartanegara.

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7						Unsur Kewilayahan										
7	1					Kecamatan										
						Non Urusan										
							Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan.		89,9	Nilai				90,2	Nilai	
							Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.		72,7	Persen				77,3	Persen	
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.	Nilai Sakip Perangkat Daerah		68	Nilai	11,739,917,658			70	Nilai	11,566,378,362
7	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	Kec. Muara Kaman	16	Dok.	420,000,000			17	Dok.	640,000,000
7	1	1	2	1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	2	Dok.	40,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Dok.	150,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
						Dokumen Renja									
						Dokumen Perubahan Renja									
7	1	1	2	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok. 35,000,000
						Dokumen RKA SKPD									
7	1	1	2	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Muara Kaman	12	Lapor-an	30,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		12	Laporan 70,000,000
						Laporan Capaian Kinerja									
7	1	1	2	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	1	Lapor-an	50,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Laporan 60,000,000
						Laporan Evaluasi Kinerja									

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7	1	1	2	1	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	42	Data	300,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		42	Data	300,000,000
						Satu Data (Becik)										
7	1	1	2	1	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	-	BA	-			25	BA	25,000,000
						Forum Perangkat Daerah										
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Kec. Muara Kaman	Kec. Muara Kaman	25	Lapor-an	9,859,917,658			38	Laporan	8,292,878,362
7	1	1	2	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	Kec. Muara Kaman	90	Orang / Bulan	9,649,917,658	Dana Bagi Hasil / APBD	Penamba han anggaran menyesu aikan	90	Orang / Bulan	8,007,878,362

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
												Kab. Kukar	dengan hasil Rekon Gaji.			
						Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN										
7	1	1	2	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			12	Dok.	50,000,000
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
7	1	1	2	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Lapor-an	10,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Laporan	10,000,000
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
7	1	1	2	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan	Kec. Muara Kaman	12	Lapor-an	200,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		12	Laporan	200,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD									
						Laporan Keuangan Bulanan / Honor Pengelola Keuangan.										
7	1	1	2	2	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	25,000,000
						Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran										
7	1	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman	Kec. Muara Kaman	4	Lapor-an	105,000,000			16	Laporan	245,000,000
7	1	1	2	3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Dok.	25,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Dok.	25,000,000
						Dokumen RKBMD										
7	1	1	2	3	02	Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Jumah Dokumen	Kec. Muara Kaman	1	Dok.	50,000,000	Dana Bagi		1	Dok.	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD					Hasil / APBD Kab. Kukar				
						Dokumen Pengamanan Aset.										
7	1	1	2	3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Muara Kaman	2	Lapor-an	30,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Laporan	30,000,000
						Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD										
7	1	1	2	3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Muara Kaman	-	Lapor-an	-			12	Laporan	40,000,000
						Honorarium Pengelola BMD										
7	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	Kec. Muara Kaman	-	Lapor-an	-			5	Laporan	475,000,000
7	1	1	2	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Kaman	-	Paket	-			1	Paket	200,000,000
						Pengadaan Pakaian Dinas.										
7	1	1	2	5	03	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	50,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
						Dokumen Kepegwaian SKPD										
7	1	1	2	5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	25,000,000
						Dokumen Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian										
7	1	1	2	5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monintoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	50,000,000
						Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (E-Kinerja)										
7	1	1	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Muara Kaman	-	Orang	-			25	Orang	150,000,000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Kec. Muara Kaman	55	Lapor-an	330,000,000			156	Laporan	535,000,000
7	1	1	2	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Kec. Muara Kaman	5	Paket	150,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Penambahan anggaran untuk pemenuhan Kebutuhan PC Kantor.	3	Paket	150,000,000
						Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PC, Laptop, Smart Board, etc)										
7	1	1	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	-	Paket	-			1	Paket	25,000,000
						Paket Peralatan Rumah Tangga										
7	1	1	2	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan.	Kec. Muara Kaman	1	Paket	50,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Paket	50,000,000
						Paket ATK										
7	1	1	2	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Kec. Muara Kaman	1	Paket	20,000,000	Dana Bagi Hasil /		1	Paket	20,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Penggandaan Disediakan.					APBD Kab. Kukar				
						Paket Barang Cetakan dan Penggandaan										
7	1	1	2	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Muara Kaman	1	Lapor-an	15,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Laporan	15,000,000
						Jamuan Tamu (Makan Minum dan Akomodasi)										
7	1	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Kaman	50	Lapor-an	75,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		150	Laporan	250,000,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.										
7	1	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Dok.	20,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Penambahan anggaran untuk penyediaan Kotak Arsip.	1	Dok.	25,000,000
						Dokumen Penatausahaan Arsip.										
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah	Kec. Muara Kaman	1	Unit	25,000,000			2	Unit	225,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Daerah Disediakan									
7	1	1	2	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan.	Kec. Muara Kaman	1	Unit	25,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Pengalokasian anggaran untuk pengadaan Mesin Pemotong Rimput.	1	Unit	25,000,000
						Pengadaan Genset, Mesin Rumput, etc										
7	1	1	2	7	10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	Kec. Muara Kaman	-	Unit	-			1	Unit	200,000,000
						Pembangunan Lahan Parkir/ Pagar/Taman										
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Muara Kaman	27	Lapor-an	300,000,000			27	Laporan	300,000,000
7	1	1	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kec. Muara Kaman	12	Lapor-an	270,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD		12	Laporan	270,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Air dan Listrik Yang Disediakan					Kab. Kukar				
						Pembayaran jasa Penyedia AIR, istrik dan Internet.										
7	1	1	2	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	15	Lapor-an	30,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		15	Laporan	30,000,000
						Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor.										
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumah Unit Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Kec. Muara Kaman	19	Unit	700,000,000			18	Unit	853,500,000
7	1	1	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Muara Kaman	11	Unit	60,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		11	Unit	228,500,000
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Jabatan (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.										
7	1	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Muara Kaman	4	Unit	75,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		4	Unit	75,000,000
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Spare Part, Oli, BBM, Jasa Service) dan Pembayaran Pajak Kendaraan.										
7	1	1	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	Kec. Muara Kaman	1	Unit	15,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Pengalokasian Anggaran Untuk Perawatan Genset dan Mesin Rumput.	-	Unit	-
						Pemeliharaan Genset, Mesin Rumput, etc)										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7	1	1	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	Kec. Muara Kaman	2	Unit	500,000,000		Pengalokasian anggaran untuk Rehab Rumah Dinas.	2	Unit	500,000,000
						Rehab Gedung Kantor										
7	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi.	Kec. Muara Kaman	1	Unit	50,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Pengalokasian anggaran untuk perawatan pagar dan tempat parkir.	1	Unit	50,000,000
						Perawatan Pagar, Parkir Gedung Kantor										
						URUSAN										
7	1	2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai SOP		81,25	Persen	5,812,202,000			87,5	Persen	41,825,000,000
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Muara Kaman	3	Laporan	450,000,000			3	Laporan	400,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7	1	2	2	1	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Muara Kaman	2	Lapor-an	200,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Laporan	150,000,000
						Koordinasi Stunting (Rembuk Operasional TPPS Kecamatan)					100,000,000					
						Fasilitasi Kegiatan ERAU.					100,000,000					
7	1	2	2	1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kec. Muara Kaman	1	Dok.	250,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Dok.	250,000,000
						Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan.										
7	1	2	2	2		Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan	Kec. Muara Kaman	2	Lapor-an	100,000,000			2	Laporan	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Daerah Yang Ada di Kecamatan	Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan									
7	1	2	2	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Kaman	2	Lapor-an	100,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Laporan	100,000,000
						Operasional POKJANAL Posyandu					50,000,000					
						Pelaksanaan Kegiatan Pramuka					50,000,000					
7	1	2	2	3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Kaman	1	Lapor-an	25,000,000			1	Laporan	25,000,000
7	1	2	2	3	01	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	Kec. Muara Kaman	1	Dok.	25,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		1	Dok.	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
						Dokumen Koordinasi Antar PD / Instansi Vertikal Dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum										
7	1	2	2	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Muara Kaman	39	Lapor-an	5,237,202,000			217	Laporan	41,300,000,000
7	1	2	2	4	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan Pada Urusan Pemerintahan.	Kec. Muara Kaman	17	Lapor-an	1,052,202,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Penambahan anggaran untuk meningkatkan jangkauan pengelolaan sampah.	17	Laporan	1,300,000,000
						Pemeliharaan LPJU					64,000,000					
						Pengelolaan Sampah					568,202,000					
						Pemeiharaan Situs Muara Kaman					175,000,000					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Penanganan Darurat Bencana					100,000,000					
						Fasilitasi PATEN.					25,000,000					
						Honor Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor.					120,000,000					
7	1	2	2	4	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kec. Muara Kaman	22	Lapor-an	4,185,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Penambahan anggaran untuk meningkatkan / memenuhi kebutuhan infratruk stur masyarakat Desa.	200	Laporan	40,000,000,000
						Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jln. Musosalim		Sidomukti			200,000,000					
						Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan		Bunga Jadi			200,000,000					
						Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan		Teratak			200,000,000					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Desa Menamang Kanan RT 001		Menamang Kanan		200,000,000				
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Menamang Kiri RT004		Menamang Kiri		200,000,000				
	lanjutan semenisasi drainase desa sido mukti rt 16 (1467826)		Sidomukti		150,000,000				
	pembangunan turap jalan kuburan rt 16 desa sido mukti (1467869)		Sidomukti		150,000,000				
	pembangunan turap desa sido mukti rt 21 (1467897)		Sidomukti		175,000,000				
	Lanjutan Jalan Jembatan Ulin RT.01 Desa Lebaho Ulaq (1266038)		Lebaho Ulaq		200,000,000				
	Pembuatan Parit RT.02 Desa Lebaho Ulaq (1266253)		Lebaho Ulaq		200,000,000				
	Peningkatan Jalan Walet RT.22 Desa Sidomukti 431998		Sidomukti		200,000,000				
	Semenisasi Jalan Gelatik RT.33 Desa Sidomukti (432003)		Sidomukti		200,000,000				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Normalisasi Saluran Drainase Dusun Rondong Besar, Desa Rantau Hempang, (1311329)		Rantau Hempang		200,000,000				
	Pembangunan Turap jalan RT. 02 Desa Benua Puhun (1481402)		Benua Puhun		200,000,000				
	Pembangunan Turap Jalan Reformasi 2 Desa Benua Puhun (1481418)		Benua Puhun		200,000,000				
	Normalisasi Saluran Drainase (Sungai) RT. 26 Desa Panca Jaya (1504282)		Panca Jaya		200,000,000				
	Semenisasi Jalan Kerek Rt.6 Desa Sabintulung (1322652)		Sabintu-lung		150,000,000				
	Semenisasi Jalan Gang Rt. 01 Desa Sabintulung (1322672)		Sabintu-lung		150,000,000				
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Umum Program Penyediaan Air Minum Desa Muara Kaman Ilir (1338902)		Muara Kaman Ilir		200,000,000				
	Pembersihan Danau Lipan dari Rt. 01 s/d Rt. 10 Desa Muara Kaman Ilir (1352425)		Muara Kaman Ilir		200,000,000				
	Rehab Jembatan menuju SDN 011		Muara Kaman		200,000,000				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
						Muara Kaman (1352460)									
						Semenisasi Jalan Jembatan Menuju Kantor Desa Teratak (1352482)		Teratak			210,000,000				
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Sesuai SOP		70	Persen	406,000,000			75	Persen	710,000,000
7	1	3	2	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Muara Kaman	3	Laporan	100,000,000			3	Laporan	100,000,000
7	1	3	2	1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Beerpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kec. Muara Kaman	10	Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.	10	Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000
						Fasilitasi Musrenbang Kecamatan									
7	1	3	2	1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Muara Kaman	2	Laporan	50,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD		2	Laporan	50,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Masyarakat Di Wilayah Kecamatan					Kab. Kukar				
						Fasilitasi Lomba Desa					40,000,000					
						Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)					10,000,000					
7	1	3	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Muara Kaman	16	Laporan	306,000,000			19	Laporan	610,000,000
7	1	3	2	3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang Diselenggarakan	Kec. Muara Kaman	36	Lembaga Kemasyarakatan	306,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		36	Lembaga Kemasyarakatan	310,000,000
						Pembayaran Honor LINMAS					186,000,000					
						Fasilitasi Kegiatan HKG PKK					50,000,000					
						Operasional PKK					50,000,000					
						Pelaksanaan Forum Anak					10,000,000					
						Fasilitasi Jambore PAUD					10,000,000					
7	1	3	2	3	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat Yang	Kec. Muara Kaman	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Dana Bagi Hasil / APBD	Penambahan anggaran untuk meningk	2	Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Ditingkatkan Kapasitasnya					Kab. Kukar	atkan jumlah peserta Pelatihan .			
						Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan										
7	1	3	2	3	0 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	-	Unit	-	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Unit	100,000,000
						Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan.										
7	1	3	2	3	0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Muara Kaman	-	Lapor-an	-	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana bagi UMKM.	1	Laporan	100,000,000
						Pengadaan Sarana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.										
7	1	4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman		90	Persen	150,000,000			90	Persen	225,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							dan Ketertiban Umum Yang Sesuai SOP									
7	1	4	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecc. Muara Kaman	6	Lapor-an	150,000,000			6	Laporan	200,000,000
7	1	4	2	1	01	Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Kecc. Muara Kaman	2	Lapor-an	25,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		2	Laporan	25,000,000
						Rapat Koordinasi Forkopimcam.										
7	1	4	2	1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecc. Muara Kaman	4	Lapor-an	125,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		4	Laporan	175,000,000
						Pelaksanaan FKUB					25,000,000					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
						Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan					25,000,000				
						Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.					25,000,000				
						Safari Ramadan					50,000,000				
7	1	4	2	2		Koordinasi Perenapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Perenapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecc. Muara Kaman	-	Lapor-an	-			1 Laporan	25,000,000
7	1	4	2	2	01	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Repubik Indonesia.	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Repubik Indonesia.	Kecc. Muara Kaman	-	Lapor-an	-	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar	Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan koordinasi.	1 Laporan	25,000,000
						Rapat Koordinasi dengan Pihak Kepolisian / Kejaksanaan.									

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
7	1	5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecc. Muara Kaman	65	Persen	180,000,000			70	Persen	250,000,000
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecc. Muara Kaman	1	Lapor-an	180,000,000			2	Laporan	250,000,000
7	1	5	2	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan ainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecc. Muara Kaman	200	Orang	180,000,000	Dana Bagi Hasil / APBD Kab. Kukar		200	Orang	200,000,000
						Fasilitasi MTQ Tingkat Desa					-					
						Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan.					180,000,000					
7	1	5	2	1	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai	Jumlah Laporan Konflik Sosial Yang Ditangani	Kecc. Muara Kaman	-	Lapor-an	-	Dana Bagi Hasil /		1	Laporan	50,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					APBD Kab. Kukar				
						Fasiitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial.										
							Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Kec. Muara Kaman	70	Persen				75	Persen	
7	1	6				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Kategori Pengelolaan Keuangan yang baik		60	Persen	-			70	Persen	200,000,000
7	1	6	2	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	Lapor-an	-			28	Laporan	200,000,000
7	1	6	2	1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dallam Rangka	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa									
						Fasilitasi Penyusunan PerDes dan Perkades.										
7	1	6	2	1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	25,000,000
						Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa.										
7	1	6	2	1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			1	Dok.	100,000,000
						Fasilitasi Verifikasi RKA Desa										
						Fasilitasi Tim Evauasi APBDES										
7	1	6	2	1	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam	Kec. Muara Kaman	-	Dok.	-			5	Dok.	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
							Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
						Fasilitasi Pemilihan Kades.									
7	1	6	2	1	17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintu-lung, Tunjungan, Liang Buaya,	-	Lapor-an				20	Laporan	25,000,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program / Kegiatan, / Sub Kegiatan.	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp).
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri						
						Fasilitasi Tim Evauasi APBDES				-				
						J U M L A H				18,288,119,658				54,776,378,362

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 merupakan tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan rencana strategis periode 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih seperti tercantum dalam RPJMD 2025-2029 dan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Muara Kaman.

1. Optimalisasi pada aspek waktu dan alokasi anggaran dalam proses pelaksanaan merupakan tantangan utama Rencana Kerja 2026. Keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi fokus utama penanganan sehingga target kinerja tetap mampu direalisasikan. Keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan Rencana Kerja 2026 terutama dalam hal mengkalkulasi target utama dan prioritas yang harus direalisasikan.
2. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja Renstra 2025-2029, yang pencapaiannya secara periodik tetap terjaga dengan baik, berdasarkan hasil evaluasi.
3. Rumusan rencana Program dan kegiatan pada periode selanjutnya akan lebih memperhatikan program prioritas Dedikasi Kepala Daerah, pencapaian standar pelayanan, penunjang Program propinsi dan nasional serta capaian kinerja yang belum maksimal agar konsistensi pencapaian kinerja sejalan dengan target kinerja Renstra.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 ini merupakan pedoman/acuan bagi Kecamatan Muara Kaman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta cerminan dari RKPD tahun 2026 dalam mewujudkan visi dan misi kepala Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh peran dan tanggungjawab seluruh komponen organisasi pada Kecamatan Muara Kaman, serta *stakeholder* yang terkait.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN SEBULU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebulu tahun anggaran 2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja-PD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Rencana Kerja ini berpedoman pada rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025- 2029 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat serta disenergikan Program dan pegiatan PD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Sebulu, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Sebulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajeman kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara substansial Rencana Kerja Kecamatan Sebulu memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, Program dan kegiatan dengan indikator yang akan dijalankan, dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Rencana Kerja Kecamatan Sebulu adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.

a. bahwa usulan Program / kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun / lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangdes;
b. selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat kecamatan; dan
c. hasil musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045; dan
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

   Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Sebulu selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Renstra kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Sebulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulsan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.3 *Review* terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PD
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Sebulu tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2030 dengan filosofi

“Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”,

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pokok Visi

“Maju Sejahtera Berkelanjutan”

Fokus

“Ekonomi, Tata Kelola, Infrastruktur, SDM dan Budaya, Lingkungan Hidup”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Sebulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen RKPD tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan musrenbang Daerah; dan
b. Menyusun Renja-PD.

Berdasarkan hasil evaluasi rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Sebulu Tahun 2026, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sebulu Kabupaten ditunjang 6 (enam) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinai Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T – C.29.

REKAFITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAERAH s/d TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65		59.95		70		64.64		92.34	80		80		133.4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	10	Doku men	10	Dokumen	10	Doku men	10	Dokumen	100	10	Doku men	10	Dokumen	100.0
7.01.01.2.01.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	50
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JumlahDokumenRKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JumlahDokumenDPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPDdanLaporanHasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	PerubahanDPA-SKPD	Dokumen PerubahanDPA-SKPD														
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	100
7.01.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0							1.00	Laporan	1	Laporan	0
7.01.01.2.01.0007	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			0							1.00	Data	1	Data	0
7.01.01.2.01.0011	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0							1.00	Berita Acara	1	Berita Acara	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JumlahlaporanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Bulan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Lapor an	12	Lapora n	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrangyang mendapatkanGaji dan Tunjangan	574	Orang	468	Orang/Bulan	444	Orang/Bulan	444	Orang/ Bulan	100	432	Orang/Bulan	432	Orang/ Bulan	92.3
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JumlahlaporanAkuntansi SKPD	1	LAPO RAN	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					0
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah LaporanKeuangan Akhir	1	Lapor an	1	Lapor an	1	Lapor an	1	Laporan	100	1	Lapor an	1	Lapora n	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD														
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JumlahLaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12	Bulan	12	Lapor an	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Lapor an	12	Lapora n	100
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	1.00	dokumen												
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JumlahBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	692	BMD	692	BMD	983	BMD	693	BMD	100	693	Unit	693	Unit	134
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										1.00	dokumen	1.00	dokumen	0
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										1.00	Laporan	1.00	Laporan	0
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	JumlahlaporanBarang Milik Daerah pada SKPDyang direkonsiliasi	1	Doku men	2	Lapor an	2	Lapor an	2	Laporan	100	2	Lapor an	2	Lapora n	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.03.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentasePemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	PERS EN	80	Perse n	80	Perse n	75	Persen	94	85	Perse n	85	Persen	106
7.01.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JumlahPakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	41	Stel	5	Paket									Stel	0
7.01.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JumlahPegawai yang mendapatkanPendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	Orang	4	Orang									Orang	0
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlahpeserta Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	Orang	11	Orang	8	Orang	72.72727	6	Orang	6	Orang	0
7.01.01.2.05.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JumlahAdministrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5	Layan an	5	Layan an	5	lembar	5	lembar	100	6	lemb ar	6	lembar	120
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahpaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Jenis	1	Paket										
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor	JumlahPeralatandan PerlengkapanKantor yang disediakan	15	Unit	1	Paket	2	Paket	2	Paket	100	1	Paket	1	Paket	100
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumlahjenisLogistik Kantor yang disediakan	10	Unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	450	Lemb ar	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	100
7.01.01.2.06.0007	Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	200	kali			1	Laporan	1	Laporan	100					0
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat	150	kali	100	Lapor an	100	Lapor an	100	Laporan	100	12	Lapor an	12	Lapora n	12

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
		Koordinasi dan konsultasi SKPD														
7.01.01.2.06.0009	Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Lembar	100	Dokumen	100	Laporan	100	Laporan	100	1	Dokumen	1	Dokumen	1
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang padaperangkat daerah	1	unit	61	unit	5	unit	5	unit	100	1	unit	1	unit	2
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	1	Unit	5	Unit						5	Unit	5	Unit	100
7.01.01.2.07.0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	0	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100	1	Paket	1	Paket	25
7.01.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya Yang Diadakan	0	Unit	21	Unit	3	Unit	3	Unit	100					0
7.01.01.2.08.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										1	Unit	1	Unit	0
7.01.01.2.08.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	0	Unit								0	Unit	0	Unit	#DIV/0!
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahwaktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	100
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	330	Lembar	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Lapor an	12	Laporan	100
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132	Rekening	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Lapor an	12	Laporan	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	4	Laporan	4	Lapor an	4	Laporan	100	4	Lapor an	4	Lapora n	100
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	Orang/Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100		Lapor an		Lapora n	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	Unit	24	Unit	32	Unit	32	Unit	100	27	Unit	27	Unit	113
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlahdanjeniskendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100	16	Unit	16	Unit	100
7.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	JumlahPeralatandanMesin Lainnya yangdipelihara	12	Unit	5	Unit	12	Unit	12	Unit	100	11	Unit	12	Unit	240
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahGedungKantor dan Bangunan Lainnyayang dipemelihara/direhabilitasi	1	Unit	8	Unit	1	Unit	1	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
7.01.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasepelayanan perijinan dannon perijinan yang dilaksanakansesuai SOP	37	Persen	37	Persen	40	Persen	38	Persen	100	41	Persen	41	Persen	111
		Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	86	Persen	86	Persen	89	Persen	87	Persen	100	90	Persen	90	Persen	105
7.01.01.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang	10	Kegiatan	5	Kegiatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100	2	Kegiatan	2	Kegiatan	40

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
		dilaksanakan secara Efektif														
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										2	Laporan	2	Laporan	0
7.01.01.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	Desa	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokumen	100	1	Doku men	1	Dokum en	100
7.01.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	0	Fasilit asi	5	Fasili tasi	1	Fasili tasi	1	Fasilitasi	100	1	Fasili tasi	1	Fasilita si	20
7.01.02.2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di WilayahKecamatan	JumlahLaporanFasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di WilayahKecamatan	0	Kegia tan	1	Laporan	1	Lapor an	1	Laporan	100	0	Lapor an	0	Lapora n	0
7.01.02.2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										1	Laporan	1	Laporan	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Jumlahpelaksanaankegiatan pemerintahan yang menjadi kewenanganKecamatan	2	Kegia tan	2	Kegia tan	2	Kegia tan	2	Kegiatan	100	2	Kegia tan	2	Kegiata n	100
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non	5	Kegia tan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Lapor an	12	Lapora n	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	yangterkait dengan Nonperizinan	Perizinanpada Urusan Pemerintahan														
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait denganKewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	87	Kegia tan	214	Laporan	112	Laporan	112	Laporan	100	140	Lapor an	140	Lapora n	65
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahanyang Aktif	100	PERS EN	100	PERS EN	100	PERS EN	100	PERSEN	100	100	PERS EN	100	PERSEN	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan	14	kali	14	kali	2	Layanan	2	Layanan	100	14	kali	14	kali	100
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamForum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JumlahLembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalamForum	100	Orang	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	100	7	Lemb aga	7	Lemba ga	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JumlahLaporanPeningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	4	Lapor an	3	Lapor an	5	Laporan	5	Laporan	100	2	Lapor an	2	Lapora n	67
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberday aan Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan										5.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.00	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan										5.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.00	Lembaga Kemasyarakatan	0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan										100.00	Persentase	100.00	Persentase	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										1.00	Kegiatan	1.00	Kegiatan	0
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										2.00	Laporan	2.00	Laporan	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	100	PERS EN	100	PERS EN	100	PERS EN	100	PERSEN	100	100	PERS EN	100	PERSEN	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	14	Kegia tan	14	Kegia tan	14	Kegia tan	14	Kegiatan	100	1	Kegia tan	1	Kegiata n	7
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan AntarsukudanIntrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan KerukunanAntar Sukudan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	0	orang	85	orang	85	orang	85	orang	100	80	orang	80	orang	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	KeamananLokal, Regional, dan nasional	KeamananLokal, Regional, dan Nasional														
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan TugasForum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	JumlahDokumenTugasForum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Kegia tan	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokum en	100	0	Doku men	0	Dokum en	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	36	PERS EN	36	PERS EN	60	PERS EN	60	PERSEN	100	0	PERS EN	0	PERSEN	0
7.01.04.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	14	Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	100	0	Desa	0	Desa	0
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Desa	1	Dokumen1	1	Doku men	1	Dokum en	100	0	Doku men	0	Dokum en	0
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	Kegia tan	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokum en	100	0	Doku men	0	Dokum en	0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Sebulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan srategis pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perijinan dan non perijinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakt, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sebulu melakukan jenis *PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.*

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu cukup memuaskan, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Sebulu, yaitu :

1. cakupan layanan administrasi perkantoran;
2. cakupan layanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
3. jumlah pelanggaran disiplin aparatur;
4. rata-rata nilai kinerja skp;
5. tingkat konsistensi renstra dan renja;
6. ketepatan waktu laporan keuangan dan aset;
7. presentase penurunan temuan audit;
8. presentase ketepatan waktu pelayanan perjinan dan non perijinan;
9. tingkat partisipasi masyarakat;
10. cakupan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik; dan
11. cakupan infrastruktur di wilayah kecamatan/kelurahan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T – C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	9	7	11	8		13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			83	84	85	86	87	90,47	90,47	86	87	88	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70	80	80	80	80	64.6	64.6	65	65	65	
3	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP			38	39	40	41	41	39.0	40.0	41	41	40	
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan			87	88	89	90	91	94.8	94.8	90	91	89	
4	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang melibatkan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal, serta tokoh agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	14	
6	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40	50	60	70	80	50	60	70	60	60	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isi-Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah memperhatikan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak di manfaatkanakan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dalam pasal 224 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dan dalam pasal 225 Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan antara Pemerintahan lain :

1. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan dan desa; dan
7. masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan Pemerintah Daerah.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sebulu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
    a. kurangnya kualitas sdm aparatur pemerintah di kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
    b. kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan kurangnya kesadaran masyarakat menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

serta dokumen yang harus dimilikai oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan; dan

c. permasalahan status lahan di desa yang berstatus kawasan budidaya kehutanan (KBK) sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemegang ijin pengekolaan lahan (KBK) tersebut.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   a. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; dan
   b. cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   a. kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; dan
   c. tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
   b. masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
   c. masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan masyarakat desa; dan
   e. belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa.
5. Seksi Pelayanan Umum
   a. kurangnya kualitas/ kualifikasi asn yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
   b. masih rendahnya penguasaan teknologi.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf;
2. melaporkan kepada pihak diskominfo untuk bias memperbaiki jaringan internet dan menganggarkan penyediaan jaringan internet kecamatan sebulu;
3. melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan;
4. melakukan pembinaan kepada aparatur desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang memang harus dimiliki warga masyarakat;
5. melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam rangka singkronasi rencana kegiatan pemerintah desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan;
6. mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan aparatur.
7. menganggarkan sarana prasarana, termaksud penyediaan jaringan internet;
8. melakukan pembinaan kepada aparatur desa tetang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan uang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarkat yang termaksud dalm lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

Dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B- 1383/065.11/BAPP/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijabarkan Permasalah Pokok dan Isu Strategis RKPD Tahun 2026 Kab Kutai Kartanegara :

PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor

	ekonomi non-ekstraktif
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi
Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal
Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata dan kesejahteraan yang berkeadilan	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera
Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya
Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

Adapun prioritas, fokus dan PD Pelaksana tahun 2026 pada Lampiran IV Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara sebagai Berikut :

No		Prioritas	Fokus	OPD Pelaksana
1		Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;	Penyediaan SDM Tenaga Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DP2KB, DPMD
2		Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD- SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perustakaan
3		Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan;	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan.	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan DPMD; Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Diskop-UKM.
4		Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;	Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.	Sekretariat Daerah; Inspektorat; BKPSDM; Seluruh OPD Teknis Pelaksana Program Prioritas.
5		Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan/non perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.	DPMPTSP; Diskominfo; Kecamatan; Setda (Bag. Pemerintahan)
6		Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini;	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekraf
7		Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan	Inspektorat; DPMD; Dinas PU; Dinas Perkim; DLHK; Dinas

	pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;	perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa.	Pertanahan dan Tata Ruang, Kecamatan;

2.4 *Review* terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2026 Rencana Kerja berdasarkan Renstra dapat disampaikan sebagai lampiran/Tabel berikut:

Tabel TC - 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN				16,846,107,836	KECAMATAN				14,390,770,195	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sebulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	6,765,889,191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sebulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	7,599,668,195	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	138,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	370,000,000	
1.1.1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250,000,000	
						Satu Data (Becik)			1 Data	50,000,000	
						Kecamatan sebagai pusat data			1 Data	200,000,000	
1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	
						Dokumen RENJA 2026 PD			1 Dokumen	30,000,000	
						Dokumen RENJA Perubahan 2026			1 Dokumen	10,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	68,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30,000,000	
						Dokumen LKjIP SKPD			1 Laporan	20,000,000	
						Dokumen PK			1 Laporan	5,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Dokumen PK Perubahan			1 Laporan	5,000,000	
1.1.8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	
						Laporan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah			1 Dokumen	50,000,000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	5,352,621,779	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	5,767,689,438	
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	574 Orang/ Bulan	5,266,242,379	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	574 Orang/bulan	5,652,689,438	
						Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sebulu			574 Orang/Bulan	5,652,689,438	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10,839,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1 Laporan	25,000,000	
						Dokumen Laporan Keuangan Kecamatan Sebulu			1 Laporan	25,000,000	
1.2.3	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	75,540,000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	90,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD			
						Honor Keuangan			12 Laporan	90,000,000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1 Laporan	33,600,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	694 Unit	83,600,000	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD		-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Dokumen Pengamanan BMD PD				50,000,000	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33,600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33,600,000	HONOR BMD
						Dokumen Semesteran BMD PD				33,600,000	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		68,500,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	100,000,000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	76 Stel	61,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			
1.4.2	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 Orang	7,000,000	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	20 Orang	100,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Bimtek ASN				100,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		173,076,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88	309,824,800	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
						Perbaikan Jaringan Listrik dan Pembelian Lampu				50,000,000	
1.5.2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	50,000,000	
						Peralatan Kantor				50,000,000	
1.5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	22,500,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	130,000,000	
						Penyediaan ATK dan Makan Minum Rapat				130,000,000	
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10,576,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	4,824,800	
						Cetak Penggandaan				4,824,800	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	
						Fasilitasi Penyediaan Makan Minum Tamu				10,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000	
						Perjalanan Dinas				50,000,000	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	15,000,000	
						Fasilitasi Penataan Arsip				15,000,000	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	182,760,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	10 Unit	160,000,000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	182,760,000	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Adanya Kasi yang belum mempunyai Kendaraan Dinas
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan			Perlunya Kendaraan Lapangan Untuk Linmas
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 Unit	100,000,000	Perlunya Peningkatan Sarana Prasarana
						Pengadaan PC, AC, dan Laptop			10 Unit	100,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.4	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebulu				Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Mebel untuk Sekretariat PKK
						Pengadaan Mebel			1 Paket	60,000,000	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	638,811,412	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	628,553,957	
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,200,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
						Penyediaan materai			1 Laporan	2,000,000	
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	449,094,204	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	616,553,957	
						Pembayaran Listrik , Air, LPJU			12 Laporan	616,553,957	
1.7.3	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000	
						Servis PC, Laptop dan Printer			1 Laporan	10,000,000	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182,517,208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	178,520,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	180,000,000	
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	170,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	170,000,000	
						Pembayaran Pajak kendaraan, Biaya Bahan Bakar, Servis Roda Dua dan Empat			16 unit	170,000,000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	8,520,000	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	10,000,000	
						servis AC			10 Unit	10,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	41 Persen	9,597,076,219	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	41 Persen	5,796,102,000	
			Tingkat Aksebilitasi	91 Persen					91 Persen		
2.1	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	2 Kegiatan	15,000,000	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	2 Kegiatan	400,000,000	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	150,000,000	Kegiatan Erau Tifaf, Fasilitasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Aksi Konversi Stunting Kecamatan
						Fasilitasi Kegiatan Erau dan TIFAF			1 Laporan	50,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Perecepatan Penurunan Stunting			1 Laporan	100,000,000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250,000,000	
						Fasilitasi Kegiatan HUT RI			1 Dokumen	250,000,000	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	-	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	100,000,000	
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100,000,000	
						Fasilitasi Kegiatan Pokjanal			1 Laporan	50,000,000	
						Fasilitasi Kegiatan Pramuka			1 Laporan	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	9,582,076,219	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	5,296,102,000	
2.3.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	25,000,000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	896,102,000	Fasilitasi Kegiatan PATEN, Pengelolaan Sampah, Pemeliharaan LPJU dan Logistik
						Fasilitasi Paten			3 Laporan	70,000,000.00	
						Fasilitasi Penanganan Darurat Bencana			3 Laporan	50,000,000.00	
						Fasilitasi Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Kecamatan			3 Laporan	596,102,000.00	
						Fasilitasi Pemeliharaan LPJU Kecamatan			3 Laporan	180,000,000.00	
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	9,557,076,219	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45 Laporan	4,400,000,000	
						pengurukan jalan tanah di area bekas logpond di desa Senoni Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, (1308193)			1 Laporan	200,000,000.00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Jalan Mawar RT. 02, Desa Mekar Jaya, (1311191)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Semeniasi Jalan "Jembatan di RT. 12 Dusun Ngadang, Desa Beloro, (1311245)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Peningkatan Jalan Tani Sumber Rejeki di RT. 01 Dusun Antai Desa Sebulu Modern,(1324311)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembuatan parit di Jalan Blitar RT 03 Desa Sumber Sari (1329514)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembuatan parit di Jalan Pelajar RT 09 Desa Sumber Sari (1329525)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembuatan parit di Batavia RT 12 Desa Sumber Sari (1329548)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembuatan badan jalan tani KM 04 Desa Sanggulan (1347334)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Sumber Sari Rt. 23			1 Laporan	200,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kecamatan Sebulu, (1482107)					
						Pengurukan lapangan serbaguna di depan kantor Desa Tanjung Harapan RT. 02 Desa Tanjung Harapan (1440916)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pelebaran Bahu Jalan RT 15 Desa Sebulu Ulu (1451249)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pelebaran Bahu Jalan RT 01 Desa Sebulu Ulu (1451258)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pengurukan Gang Hj. Imaniah Desa Sebulu Ulu (1451269)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembuatan Gorong - Gorong Jl. Isman Desa Sebulu Ulu , (1451282)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Semenisasi Jalan Unikarta, RT. 5 Desa Sebulu Ulu (1451296)			1 Laporan	200,000,000.00	
						PEMBANGUNAN WC UMUM LAPANGAN SERBA GUNA DESA SEGIHAN , (1451460)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Normalisasi Saluran Drainase / Parit di RT 3 Desa Selerong (1117377)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Lanjutan semenisasi Jalan Ulin RT 11 Sebulu Ulu, (1206192)			1 Laporan	200,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih desa Selerong Kecamatan Sebulu (1229100)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pembukaan Jalan dari KM 4 menuju Desa Teratak hingga Desa Tanjung Harapan (1311443)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pengurukan Alun-Alun Desa Tanjung Harapan (1311657)			1 Laporan	200,000,000.00	
						Pengurukan Badan Jalan H. Bahtam RT. 006 Desa Sebulu Ilir (1323244)			1 Laporan	200,000,000.00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen	243,142,426	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen	300,000,000	
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	243,142,426	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	100,000,000	
3.1.1	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	18,142,426	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Kecamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kegiatan Musren Tingkat Kecamatan			7 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	225,000,000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50,000,000.00	Fasilitasi Kegiatan Lomba Desa dan BBGRM
						Fasilitasi Kegiatan Lomba Desa			1 Laporan	25,000,000.00	
						Fasilitasi Kegiatan BBGRM			1 Laporan	25,000,000.00	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	-	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	1 Kegiatan	200,000,000	
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	200,000,000	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK, Operasional PKK, Forum Anak, Jambore Paud
						Fasilitasi Kegiatan HKG			1 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
						Fasilitasi Kegiatan PKK			1 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
						Fasilitasi Kegiatan Jambore			1 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Fasilitasi Kegiatan Forum Anak			1 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	175,000,000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	175,000,000	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Kegiatan Patroli di Wilayah Kecamatan
						Fasilitasi Kegiatan Patroli di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	50,000,000.00	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	125,000,000	Forum kerukunan umat beragama, Forum Pembaura

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											n Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Safari Ramadhan
						Fasilitasi Kegiatan Forum (FPK, FKUB, FKDM)			1 Laporan	75,000,000.00	
						Safari Ramadhan			1 Laporan	50,000,000.00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	195,000,000	
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	200,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	14 Kegiatan	195,000,000	
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	195,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	180,000,000	Fasilitasi Kegiatan MTQ

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Fasilitasi Kegiatan MTQ			85 Orang	180,000,000.00	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	
						Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	15,000,000.00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Sebulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	40,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Sebulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	80 Persen	325,000,000	
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	1 Dokumen	40,000,000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	1 Dokumen	325,000,000	
6.1.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	75,000,000	Tim Verifikasi ADD dan DD
						Fasilitasi Tim Evaluasi APBDES			1 Dokumen	75,000,000.00	
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	15,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	250,000,000	Honor Linmas dan Fasilitasi Kegiatan Trantib

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Fasilitasi Kegiatan Trantib dan Honor Linmas			1 Dokumen	250,000,000.00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebulu merupakan hasil dari musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang desa yang menjadi bahan penyusunan rencana kerja awal kecamatan.
- prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh warga desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di desa setempat.
- prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari Pemerintah Daerah
- prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD provinsi.
- menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di desanya di forum musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang RKP-Desa dari 14 (empat belas) desa di wilayah Kecamatan Sebulu tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Daerah. Usulan Program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebulu tahun 2026.

Tabel TC – 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		
	Sub Kegiatan :				
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	189 Laporan	
1	pengurukan jalan tanah di area bekas logpond di desa Senoni Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, (1308193)	64.02.07.2010 - Senoni		1 Lporan	
2	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Jalan Mawar RT. 02, Desa Mekar Jaya, (1311191)	64.02.07.2014 - Mekar Jaya		1 Lporan	
3	Semeniasi Jalan "Jembatan di RT. 12 Dusun Ngadang, Desa Beloro, (1311245)	64.02.07.2003 - Beloro		1 Lporan	
4	Peningkatan Jalan Tani Sumber Rejeki di RT. 01 Dusun Antai Desa Sebulu Modern,(1324311)	64.02.07.2011 - Sebulu Moderen		1 Lporan	
5	Pembuatan parit di Jalan Blitar RT 03 Desa Sumber Sari (1329514)	64.02.07.2007 - Sumber Sari		1 Lporan	
6	Pembuatan parit di Jalan Pelajar RT 09 Desa Sumber Sari (1329525)	64.02.07.2007 - Sumber Sari		1 Lporan	
7	Pembuatan parit di Batavia RT 12 Desa Sumber Sari (1329548)	64.02.07.2007 - Sumber Sari		1 Lporan	
8	Pembuatan badan jalan tani KM 04 Desa Sanggulan (1347334)	64.02.07.2012 - Sanggulan		1 Lporan	
9	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Sumber Sari Rt. 23 Kecamatan Sebulu, (1482107)	64.02.07.2007 - Sumber Sari		1 Lporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
10	Pengurukan lapangan serbaguna di depan kantor Desa Tanjung Harapan RT. 02 Desa Tanjung Harapan (1440916)	64.02.07.2002 - Tanjung Harapan		1 Lporan	
11	Pelebaran Bahu Jalan RT 15 Desa Sebulu Ulu (1451249)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
12	Pelebaran Bahu Jalan RT 01 Desa Sebulu Ulu (1451258)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
13	Pengurukan Gang Hj. Imaniah Desa Sebulu Ulu (1451269)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
14	Pembuatan Gorong - Gorong Jl. Isman Desa Sebulu Ulu , (1451282)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
15	Semenisasi Jalan Unikarta, RT. 5 Desa Sebulu Ulu (1451296)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
16	PEMBANGUNAN WC UMUM LAPANGAN SERBA GUNA DESA SEGIHAN , (1451460)	64.02.07.2006 - Segihan		1 Lporan	
17	Normalisasi Saluran Drainase / Parit di RT 3 Desa Selerong (1117377)	64.02.07.2001 - Selerong		1 Lporan	
18	Lanjutan semenisasi Jalan Ulin RT 11 Sebulu Ulu, (1206192)	64.02.07.2004 - Sebulu Ulu		1 Lporan	
19	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih desa Selerong Kecamatan Sebulu (1229100)	64.02.07.2001 - Selerong		1 Lporan	
20	Pembukaan Jalan dari KM 4 menuju Desa Teratak hingga Desa Tanjung Harapan (1311443)	64.02.07 - Sebulu		1 Lporan	
21	Pengurukan Alun-Alun Desa Tanjung Harapan (1311657)	64.02.07.2002 - Tanjung Harapan		1 Lporan	
22	Pengurukan Badan Jalan H. Bahtam RT. 006 Desa Sebulu Ilir (1323244)	64.02.07.2005 - Sebulu Ilir		1 Lporan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya pembangunan yang dilakukan di Daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional, sehingga penyusunan dokumen RPJMD harus selaras dengan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun Target Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2026 Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : B-1383/065.11/BAPP/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target 2025*	Target 2026*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,57	76,85	77,12
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,28	6,95	6,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,11	4,01	3,94
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,52*	5,4-5,8	5,7-6,0
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	270,72	304.07*	320.80	337.53
6	Indeks Gini	0,284	0.278	0.276	0.274
7	Tingkat Inflasi (sister city Samarinda)	3,37	1,50“”	2.12	1.90

Sumber: BPS, *Angka proyeksi, “”Sister City Samarinda

Pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. *Terbaik* dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. *Terbaik* dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. *Terbaik* dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. *Terbaik* dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. *Terbaik* dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra- PD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra-PD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan kebijakan, sera program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun Renstra-PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) dan Rencana Kerja Awal Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan dilenkgapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2030 setiap tahun dijabarkan kedalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas Program dan kegiatan yang dibahas dalam musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Daerah.

Kecamatan Sebulu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan selaras dengan Misi 3 (ketiga) RPJMD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, yaitu : *"Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara "*. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu.

Untuk menjalankan Misinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih periode 2025-2030 memdedikasikannya dengan Program Dedikasi.

Tabel 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik :

NO	PROGRAM DEDIKASI	MISI
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;	*Misi#1. Terbaik* dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik	
4	Program Etam Sejahtera	
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera	Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif
6	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	
10	Program Pelayanan Publik Cerdas	*Misi#3.* Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
11	Program ASN Kukar Terbaik	
12	Program RT Ku-Terbaik	Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
16	Program Internet Desa Gratis.	
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renja-PD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

depan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang maka, Berikut tujuan dan sasaran beserta indikator dalam pembangunan Kecamatan Sebulu.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Sebulu Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
		Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Sebulu tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa Program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC – 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KECAMATAN SEBULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	KECAMATAN				14.390.770.195				21.281.693.208
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	80	7.599.668.195	APBD		65 Nilai	8.736.693.208
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Sebulu	12 Dokumen	370.000.000	APBD		5 Dokumen	603.000.000
7.01.01.2.01.0001	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	1 Data	250.000.000	APBD		1 Data	300.000.000
	Satu Data (Becik)			1 Data	50.000.000				
	Kecamatan sebagai pusat data			1 Data	200.000.000				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Dokumen	40.000.000	APBD	(6.890.923.013)	1 Dokumen	140.000.000
	Dokumen RENJA 2026 PD			1 Dokumen	30.000.000				
	Dokumen RENJA Perubahan 2026			1 Dokumen	10.000.000				
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu			APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu					1 Dokumen	5.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu			APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu					1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sebulu	3 Laporan	30.000.000	APBD		4 laporan	68.000.000
	Dokumen LKjIP SKPD			1 Laporan	20.000.000				
	Dokumen PK			1 Laporan	5.000.000				
	Dokumen PK Perubahan			1 Laporan	5.000.000				
7.01.01.2.01.0009	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
	Laporan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah			1 Laporan	50.000.000				
7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kecamatan Sebulu			APBD		1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kecamatan Sebulu	12 Bulan	5.767.689.438	APBD		12 Bulan	6.425.500.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Sebulu	574 Orang/bulan	5.652.689.438			492 Orang/Bulan	6.300.000.000
	Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sebulu			574 Orang/Bulan	5.652.689.438				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							1 Laporan	5.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	25.000.000			1 Laporan	25.000.000
	Dokumen Laporan Keuangan Kecamatan Sebulu		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	
7.01.01.2.02.0005	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD		12 Laporan	90.000.000			12 Laporan	85.500.000
	Honor Keuangan		Kecamatan Sebulu	12 Laporan	90.000.000	APBD			
7.01.01.2.02.0007	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1 Dokumen	10.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		694 Unit	83.600.000				258.600.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu			APBD		1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
7.01.01.2.03.01	Dokumen Pengamanan BMD PD		Kecamatan Sebulu		50.000.000				
7.01.01.2.03.02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kecamatan Sebulu	1 Laporan		APBD		1 Laporan	50.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		1 Laporan	33.600.000				33.600.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah pada SKPD							
7.01.01.2.03.03			Kecamatan Sebulu		33.600.000	APBD			
7.01.01.2.03.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	83	100.000.000	APBD		1 Laporan	161.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan						41 Paket	61.500.000
7.01.01.2.03.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sebulu			APBD		6 Orang	50.000.000
7.01.01.2.05.0001	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sebulu	20 Orang	100.000.000	APBD		6 Orang	50.000.000
7.01.01.2.05.0002	Bimtek ASN		Kecamatan Sebulu		100.000.000				
7.01.01.2.05.0011	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	88	309.824.800	APBD		89 Persen	380.576.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000			5 Unit	50.000.000
7.01.01.2.05.11	Perbaikan Jaringan Listrik dan Pembelian Lampu		Kecamatan Sebulu		50.000.000	APBD			
7.01.01.2.06.0001	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebulu	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.0002	Peralatan Kantor		Kecamatan Sebulu		50.000.000	APBD			
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	130.000.000			1 Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan ATK dan Makan Minum Rapat		Kecamatan Sebulu		130.000.000	APBD			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	4.824.800			1 Paket	10.576.000
7.01.01.2.06.0005	Cetak Penggandaan		Kecamatan Sebulu		4.824.800	APBD			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	10.000.000				
7.01.01.2.06.0007	Fasilitasi Penyediaan Makan Minum Tamu		Kecamatan Sebulu		10.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	50.000.000			12 Laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.0008	Perjalanan Dinas		Kecamatan Sebulu		50.000.000	APBD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.06.0009	Fasilitasi Penataan Arsip		Kecamatan Sebulu		15.000.000	APBD			
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah		10 Unit	160.000.000				
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Kecamatan Sebulu	10 Unit	100.000.000	APBD			
	Pengadaan PC, AC, dan Laptop		Kecamatan Sebulu	10 Unit	100.000.000	APBD			
7.01.01.2.07.0004	Pengadaan Mebel			1 Paket	60.000.000				
	Pengadaan Mebel			1 Paket	60.000.000	APBD			
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	628.553.957				727.517.208
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	2.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan materai		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	2.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	616.553.957			12 Bulan	520.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08.0002	Pembayaran Listrik , Air, LPJU		Kecamatan Sebulu	12 Laporan	616.553.957	APBD			
	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.08.0003	Servis PC, Laptop dan Printer		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	10.000.000	APBD			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	197.517.208
7.01.01.2.08.0004	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Layanan	180.000.000	APBD		2 Layanan	180.000.000
7.01.01.2.09	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Sebulu	16 unit	170.000.000	APBD		16 Unit	170.000.000
7.01.01.2.09.0002	Pembayaran Pajak kendaraan, Biaya Bahan Bakar, Servis Roda Dua dan Empat		Kecamatan Sebulu	16 unit	170.000.000	APBD			
	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara		10 Unit	10.000.000			12 Unit	10.000.000
7.01.01.2.09.0003	servis AC		Kecamatan Sebulu	10 Unit	10.000.000	APBD			
7.01.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		41 Persen	5.796.102.000			40	11.130.000.000
		Tingkat Aksebilitasi	Kecamatan Sebulu	91 Persen		APBD		89	
	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif		2 Kegiatan	400.000.000			2 Kegiatan	400.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah di tingkat Kecamatan								
7.01.01.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	150.000.000	APBD		3 Laporan	150.000.000
7.01.01.2.01.0001	Fasilitasi Kegiatan Erau dan TIFAF		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000	APBD			
	Fasilitasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Perecepatan Penurunan Stunting			1 Laporan	100.000.000				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	250.000.000
7.01.01.2.01.0002	Fasilitasi Kegiatan HUT RI		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	250.000.000	APBD			
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1 SPM	100.000.000				130.000.000
7.01.02.2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 SPM	15.000.000
7.01.02.2.0001	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
7.01.02.2.0002	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000			1 Dokumen	
7.01.02.2.0003	Fasilitasi Kegiatan Pramuka		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000	APBD	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal, Pramuka	1 Dokumen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di								15.000.000
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		2 Kegiatan	5.296.102.000			2 Kegiatan	10.600.000.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	896.102.000			12 Laporan	600.000.000
	Fasilitasi Paten		Kecamatan Sebulu	3 Laporan	70.000.000,00	APBD			
	Fasilitasi Penanganan Darurat Bencana		Kecamatan Sebulu	3 Laporan	50.000.000,00	APBD			
	Fasilitasi Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Kecamatan			3 Laporan	596.102.000,00				
	Fasilitasi Pemeliharaan LPJU Kecamatan			3 Laporan	180.000.000,00				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		45 Laporan	4.400.000.000			50 Laporan	10.000.000.000
	pengurukan jalan tanah di area bekas logpond di desa Senoni Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, (1308193)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Jalan Mawar RT. 02, Desa Mekar Jaya, (1311191)		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	200.000.000,00	APBD			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Semeniasi Jalan "Jembatan di RT. 12 Dusun Ngadang, Desa Beloro, (1311245)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Peningkatan Jalan Tani Sumber Rejeki di RT. 01 Dusun Antai Desa Sebulu Modern,(1324311)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembuatan parit di Jalan Blitar RT 03 Desa Sumber Sari (1329514)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembuatan parit di Jalan Pelajar RT 09 Desa Sumber Sari (1329525)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembuatan parit di Batavia RT 12 Desa Sumber Sari (1329548)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembuatan badan jalan tani KM 04 Desa Sanggulan (1347334)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Sumber Sari Rt. 23 Kecamatan Sebulu, (1482107)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pengurukan lapangan serbaguna di depan kantor Desa Tanjung Harapan RT. 02 Desa Tanjung Harapan (1440916)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pelebaran Bahu Jalan RT 15 Desa Sebulu Ulu (1451249)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pelebaran Bahu Jalan RT 01 Desa Sebulu Ulu (1451258)			1 Laporan	200.000.000,00				

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengurukan Gang Hj. Imaniah Desa Sebulu Ulu (1451269)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembuatan Gorong - Gorong Jl. Isman Desa Sebulu Ulu , (1451282)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Semenisasi Jalan Unikarta, RT. 5 Desa Sebulu Ulu (1451296)			1 Laporan	200.000.000,00				
	PEMBANGUNAN WC UMUM LAPANGAN SERBA GUNA DESA SEGIHAN , (1451460)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Normalisasi Saluran Drainase / Parit di RT 3 Desa Selerong (1117377)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Lanjutan semenisasi Jalan Ulin RT 11 Sebulu Ulu, (1206192)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih desa Selerong Kecamatan Sebulu (1229100)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pembukaan Jalan dari KM 4 menuju Desa Teratak hingga Desa Tanjung Harapan (1311443)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pengurukan Alun-Alun Desa Tanjung Harapan (1311657)			1 Laporan	200.000.000,00				
	Pengurukan Badan Jalan H. Bahtam RT. 006 Desa Sebulu Ilir (1323244)			1 Laporan	200.000.000,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif		100 Persen	300.000.000			1 Laporan	550.000.000
7.01.03.2.01	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		2 Kegiatan	100.000.000			2 Kegiatan	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sebulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000
	Kegiatan Musren Tingkat Kecamatan		Kecamatan Sebulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	APBD			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	50.000.000,00	APBD		2 Laporan	50.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Desa			1 Laporan	25.000.000,00				
	Fasilitasi Kegiatan BBGRM		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	25.000.000,00	APBD			
7.01.03.2.03	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		1 Kegiatan	200.000.000			1 Kegiatan	350.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000			4 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000
	Fasilitasi Kegiatan HKG		Kecamatan Sebulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	APBD			
	Fasilitasi Kegiatan PKK		Kecamatan Sebulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	APBD			
	Fasilitasi Kegiatan Jambore			1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00				
	Fasilitasi Kegiatan Forum Anak			1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00				
'7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 Persen	175.000.000			14%	180.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	175.000.000			1 Kegiatan	180.000.000
7.01.04.2.01.0001	Fasilitasi Kegiatan Patroli di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000	APBD		2 Layanan	
			Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000,00			1 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	125.000.000	APBD			180.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Forum (FPK, FKUB, FKDM)			1 Laporan	75.000.000,00				
	Safari Ramadhan		Kecamatan Sebulu	1 Laporan	50.000.000,00	APBD			180.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	195.000.000			100 Persen	420.000.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kecamatan Sebulu	14 Kegiatan	195.000.000	APBD		2 Layanan	420.000.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang engikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras,dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kecamatan Sebulu	85 Orang	180.000.000	APBD		85 Orang	410.000.000
	Fasilitasi Kegiatan MTQ		Kecamatan Sebulu	85 Orang	180.000.000,00	APBD			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	10.000.000
	Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		80 Persen	325.000.000				265.000.000
7.01.04.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	325.000.000	APBD			265.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kecamatan Sebulu	1 Dokumen	75.000.000	APBD			50.000.000
	Fasilitasi Tim Evaluasi APBDES		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	75.000.000,00	APBD	Tim Verifikasi ADD dan DD	1 Dokumen	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	250.000.000				195.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Trantib dan Honor Linmas		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD	Honor Linmas dan Fasilitasi Kegiatan Tranrib	1 Dokumen	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD	Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	20.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu.

Rencana Kerja Kecamatan Sebulu Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Sebulu.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja-PD tahun 2026 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah.

Dalam Proses Penyusunan Renja-PD tahun 2026, PD harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain:

a. Memastikan sinkronisasi substansi dan proses dengan penyusunan RKPD tahun 2026;
b. Memperhatikan kategori penyusunan RKPD tahun 2026, menyesuaikan proses dan substansinya, serta mengaplikasikannya pada sipd.kemendagri.go.id.
c. Hasil pengendalian dan evaluasi Renja-PD tahun 2021-2026 dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sektoral;
d. Memastikan data yang digunakan memenuhi kriteria standar data yang baik;
e. Penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil *(outcome)* berdasarkan hasil pemutahiran *cascading*.

f. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangka Daerah Kecamatan Muara Badak tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2026 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ke 5 (lima) RPJMD 2021 – 2026. Dokumen ini disusun mengacu kepada Renstra Kecamatan Muara Badak tahun 2021-2026 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 “mewujudkan masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera “. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Kabupaten tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berisikan penjabaran Renstra merupakan salah satu bahan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Selain dari itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2026 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi di tahun pelaksanaan Rencana Kerja. Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2026 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya

seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja-PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja-PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja-PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra-PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2026;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan Program/kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Menyinkronkan dan menyinergikan Program dan kegiatan Kecamatan Muara Badak tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD ahun 2021-2026.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara Badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V: PENUTUP

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja Program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan : tidak ada Program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

b) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :
   1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
   2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik;
   3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
   4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
   5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan: tidak ada Program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncakanan Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dari 5 (lima) Program / kegiatan yang keluarannya mencapai rata-rata 96 % (sembilan puluh enam persen).

Sedangkan untuk tahun anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp57.896.066.526,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau sesuai DPPA tahun 2025 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp51.266.140.037,00 dan belanja modal sebesar Rp3.359.245.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan tersusun dalam 6 (enam) Program , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % (seratus persen).

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksakan Kecamatan Muara Badak sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas Program/kegiatan;
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kecamatan Muara Badak menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

d) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan Program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e) Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut:

- Melakukan monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manuasia. Dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya Program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Kecamatan Muara Badak akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KECAMATAN MUARA BADAK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
										Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	38,324,916,589		4,599,041,122		6,466,282,159		1,119,967,578	17.32		46,713,331,791	54,409,148,410	141.97
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	1,071,735,005	18	199,346,000	6	224,790,000	6	49,643,000	22	7	125,236,150	374,225,150	34.92
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	6	239,280,000	3	25,125,000	1	25,000,000	1	7,050,000	28.20	2	74,654,000	106,829,000	44.65
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	5	55,000,000	3	15,000,000	1	15,000,000	1	1,765,000	11.77	1	7,671,720	24,436,720	44.43
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	5	55,000,000	3	39,888,000	1	40,000,000	1	39,888,000	99.72	1	8,352,230	88,128,230	160.23
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	47,600,000	3	9,520,000	1	9,520,000	1	0	0.00	1	10,000,000	19,520,000	41.01
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	51,350,000	3	35,135,000	1	35,270,000	1	0	0.00	1	-	35,135,000	68.42
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	623,505,005	3	74,678,000	1	100,000,000	1	940,000	0.94	1	24,558,200	100,176,200	16.07
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	23,563,368,277	3	2,231,918,360	3	3,413,693,001	3	2,393,492,228	70.11	1	44,557,811,509	49,183,222,097	208.73

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	325	22,692,058,877	25	2,143,169,460	25	3,285,188,101	25	2,331,312,228	70.96	26	44,425,013,309	48,899,494,997	215.49
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	171,109,400	1	20,234,900	1	25,184,900	1	1,640,000	6.51	1	10,823,200	32,698,100	19.11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	700,200,000	1	68,514,000	1	103,320,000	1	60,540,000	58.59	1	121,975,000	251,029,000	35.85
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	11	409,840,000	1	20,400,000	1	65,761,100	2	11,371,000	17.29	2	186,300,000	218,071,000	53.21
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	165,040,000	0	0	1	24961100.00	1	571,000	2.29	1	145,500,000	146,071,000	88.51
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	6	244,800,000	1	20,400,000	1	40,800,000	1	10,800,000	26.47	25/org	40,800,000	61,200,000	25.00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	125	245,000,000	25	74,999,209	25	29,092,500	25	5,022,000	17.26	25	30,112,896	110,134,105	44.95
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	25	60,000,000	0	0	0	0	25	0	#DIV/0!	0	0	0	0.00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125	185,000,000	0	0	25	29,092,500	0	5,022,000	17.26	25 Orang	30,112,896	35,134,896	18.99
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan administrasi Kepegawaian	1	56,700,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	0.00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	74,999,209	25	74,999,209	0	0			#DIV/0!	0	0	181,302,780	241.74
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	3,340,819,565.00	100	291,232,510.00	100	479,804,808.00	100	106,303,571.00	22.16		475,941,600.00	873,477,681	26.15

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	71,607,300.00	6	2,576,000	6	10,000,000	0	10,618,470	106.18	6	17,919,800	20,495,800	28.62
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150	216,961,000.00	30	31,829,500	30	20,000,000	0	1,954,000	9.77	30	20,927,200	52,756,700	24.32
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	579,959,745.00	2	67,073,000	1	97,289,000	0	9,590,000	9.86	3	67,254,700	134,327,700	23.16
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	143,734,900.00	2	7,316,800	2	30,000,000	0	3,500,000	11.67	4	66,431,000	73,747,800	51.31
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	355,000,000.00	0	-	0	32,469,000	0	26,052,301	80.24	1	67,405,000	67,405,000	18.99
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	1,534,470,000.00	1	173,562,210	1	224,728,000	0	54,588,800	24.29	1	212,804,400	386,366,610	25.18
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	419,086,620.00	200	8,875,000	200	65,318,808	0	-	0.00	1	23,199,500	32,074,500	7.65
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	-	0	0.00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	37	1,931,740,920		691,718,000		1,123,130,970		-	0.00	-	64,545,000	756,263,000	39.15
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	251,740,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	11	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya	2	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0.00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	621,732,920	1	19,250,000	1	450,662,970	0	0	0.00	0	0	19,250,000	3.10

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	737,468,000	1	672,468,000	1	672,468,000	9	0	0.00	1	64545000	737,013,000	99.94
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4,160,188,731	100	590,229,799	100	621,481,100	100	395,946,619	63.71	100	801,789,876	1,787,966,294	42.98
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	20,700,000	1	5,500,000	1	19,898,000	0	33,000,000	165.85	1	3,300,000	41,800,000	201.93
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	2,459,133,401	1	340,597,356	1	318,970,000	0	233,690,369	73.26	1	623,124,661	1,197,412,386	48.69
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	75,410,400	1	5,090,000	1	12,568,400	0	6,800,000	54.10	1	12,568,400	24,458,400	32.43
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1,604,944,930	1	239,042,443	1	270,044,700	0	122,456,250	45.35	1	162,796,815	524,295,508	32.67
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	3,602,224,091	15	499,197,244	15	508,528,680	15	134,997,079	26.55	15	471,594,760	1,105,789,083	30.70
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	2,456,670,500	1	270,260,244	1	336,806,000	0	114,917,079	34.12	4	276,560,000	661,737,323	26.94
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	345,000,791	2	38,837,000	1	49,560,000	0	20,080,000	40.52	20	89,249,400	148,166,400	42.95
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	740,552,800	1	190,100,000	1	122,162,680	0	-	0.00	1	105,785,360	295,885,360	39.95
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0	-	0	0.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	9,424,738,605	3	6,313,095,700	3	593,522,000	3	18,060,000	2.73	1	251,781,000	6,582,936,700	69.85
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	15	9,424,738,605	-	6,313,095,700	-	593,522,000	-	18,060,000	3.04	1	251,781,000	6,582,936,700	69.85
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1500	332,607,900	300	14,146,900	64	75,000,000	26	16,180,000	21.57	300	148,238,400	178,565,300	53.69
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	363,000,000	1	0	0	39,525,000	13	0	0.00	13	72,600,000	72,600,000	20.00
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	8,729,130,705	1	6,298,948,800	0	478,997,000	13	1,880,000	0.39	6	30,942,600	6,331,771,400	72.54
1	3			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100	29,352,666,765		12,585,271,000		12,649,497,046		259,289,975	0.00	100	38,369,224,120	51,213,785,095	174.48
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	1	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	132,751,900	132,751,900	442.51
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	132,751,900	132,751,900	442.51
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	65	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	35	68,795,000	68,795,000	52.92
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase efektifitas pelayanan kepada masyarakat	100	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	2	68,795,000	68,795,000	52.92

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Aksesibilitas Wllayah Kecamatan	100	29,192,666,765	100	12,585,271,000	100	12,649,497,046		259,289,975	2.05	100	38,167,677,220	51,012,238,195	174.74
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	30,533,353	0	0	0	0	0	61,325,975	0.00	6	869,596,000	930,921,975	3,048.87
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	29,162,133,412	1	12,585,271,000	1	12,649,497,046	1	197,964,000	1.56	198	37,298,081,220	50,081,316,220	171.73
1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh	100	98,770,000	2	31,200,000	2	32,000,000	2	31,200,000	0.00	2	32,000,000	39,508,000	40.00
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,770,000		19,754,000		19,754,000		0	0.00		19,754,000	39,508,000	40.00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	98,770,000	1	19,754,000	1	19,754,000	1	0	0.00	1	19,754,000	39,508,000	40.00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65 Persen	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0.00	65	23,420,000	23,420,000	46.84
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	23,420,000	23,420,000	46.84

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	23,420,000	23,420,000	46.84
1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	80	173,396,250	100	40,188,400	100	43,803,750	100	0	0.00	100	0	40,188,400	23.18
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	80	173,396,250		40,188,400		43,803,750		0	0.00		0	40,188,400	23.18
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	-	1	22,810,900	1	22,811,250		0	0.00	1	0	22,810,900	#DIV/0!
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	13	41,985,000	6	17,377,500	6	20,992,500		0	0.00	0	0	17,377,500	41.39
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	43,803,750	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	87,607,500	0	0	0	0	100	0	0.00	1	0	0	0.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak yang telah tertuang Renstra Kecamatan Muara Badak tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Muara Badak telah menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2021-2026 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak yang dapat terealisasi Anggaran dua tahun terakhir 2023 sebesar 96,86% (sembilan puluh enam koma delapan puluh enam persen) dan tahun 2024 sebesar 94,3 % (sembilan puluh empat koma tiga persen) dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Badak, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan
b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
c. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Muara Badak

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 2.1 & tabel 2.2 berikut, dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring & evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran dan capaian kinerja prosentase indek kepuasan masyarakat dan prosentase desa dengan administrasi desa yang baik. Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari Tabel T-C.30:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MUARA BADAK

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	71.00%	72.00%	72.70%	73.00%	74.00%	87.72%	90,42%	93.00%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Persentase Keluhan Masyarakat	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
4	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Presentase Capaian Ketentraman	65.00%	71.00%	74.00%	78.00%	80.00%	100.00%	100%	100.00%	Peningkatan Kinerja dan Jumlah ASN
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Persentase Peertumbuhan PADes	92.00%	28.00%	30.00%	35.00%	40.00%	76.73%	30%	35.00%	Perlu adanya review nilai target kinerja
6	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Nilai Pertumbuhan	68.00%	74.00%	82.00%	89.00%	95.00%	0%	0%	0%	Surat Pernyataan Camat tentang Kewenangan Pungutan PAD tidak ada karena sudah menjadi kewenangan OPD Teknis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Badak tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh factor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Badak berikut.

a. Peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dan sering mengalami perubahan penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut seringkali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi). Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta Musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
c. Keberadaan sumber daya yang meliputi sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Muara Badak :

1. Belum memadainya sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

daya manusia (SDM) yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan SDM yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya berbasis kinerja. Keterbatasan anggaran dibeberapa Program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.
3. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada Program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per Program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan reformasi dan birokrasi.
b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Langkah-langkah strategis yang baik disetiap Program dan kegiatan prioritas di masing-masing PD yaitu :

a) Penguatan kolaborasi pembiayaan pembangunan Daerah baik melalui pemerintah maupun nonpemerintah.
b) Kesetaraan antara para pemangku *kepentingan* dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
c) Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.

d) Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta Prioritas program.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Rencana Awal RKPD.

Review Renja-PD adalah perbandingan antara Program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kuota/hasil analisis kebutuhan PD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam *review* rancangan awal RKPD terdapat rumusan Program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan antara Program dan kegiatan berbeda besaran anggarannya. *Review* secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel TC.31 berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	6,496,338,265	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	6,539,770,657	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	279,790,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	370,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	40,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,520,000				-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,270,000				-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	30,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Dokumen	3,980,878,304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Dokumen	4,720,315,557	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,810,653,404	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,550,275,557	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,184,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	145,040,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	145,040,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Dokumen	65,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Dokumen	115,800,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Dokumen	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Dokumen	50,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	40,800,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	180,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26 Orang	180,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26 Orang	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	598,261,349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	279,126,700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,927,200	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,707,349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	130,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262,554,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23,199,500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 unit	80,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	80,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	728,430,352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	714,528,400	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	395,707,209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	432,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,568,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,568,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269,854,743	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	267,960,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Laporan	583,178,260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Laporan	340,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	452,986,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	300,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90,191,360	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 persen	4,720,533,353	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 persen	9,814,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 kegiatan	200,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 kegiatan	400,000,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1 Kegiatan	150,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	30,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	100,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	202 Kegiatan	4,490,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	202 Kegiatan	9,314,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	50,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	924,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	198 Laporan	4,440,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	198 Laporan	8,390,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	78 Persen	955,645,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	78 Persen	659,045,900	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	305,645,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	323,045,900	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	72,600,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	75,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	158,045,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	158,045,900	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	650,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	336,000,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	336,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81 Persen	50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81 Persen	175,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76 Persen	50,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76 Persen	175,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74 persen	295,650,542	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74 persen	195,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	295,650,542	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	125 Orang	245,650,542	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	125 orang	180,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			150,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	150,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	75,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	Evaluasi APBDes (13 Desa) dan Aset Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	100,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	75,000,000	Lomba Desa Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
	JUMLAH			12,668,168,060				17,457,816,557	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musrenbang tingkat desa dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan serta infrastruktur kecamatan

Dalam Deskripsi yang disajikan tentang bagaimana usulan Program dan kegiatan wilayah usulan pemangku kepentingan dapat di peroleh dan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumber daya pedukung lainnya. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusunan prioritas Program kegiatan.

Prioritas Program pembangunan Kecamatan Muara Badak tahun 2026 mengacu pada Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, yang secara umum sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur berdasarkan standard kerja.
c. Peningkatan dispilin, kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan.
d. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
e. Penerapan standar pelayanan PATEN kecamatan secara menyeluruh.
f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam prosen perencanaan dan pembangunan wilayah kecamatan.
g. Peningkatan kualitas saran dan prasarana fisik dan jalan lingkungan Kecamatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

h. Peningkatan sarana dan parsarana umum bagi kepentingan publik di wilayah Kecamatan.

Program kegiatan yang menjadi prioritas adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan pada kelompok tani dan budi daya ikan air tawar, sementara itu, terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan melaksanakan pembangunan skala kecil, menetapkan prioritas pembangunan pada penanganan masalah faktor sosial masyarakat yang akan mempengeruhi keberhasilan kinerja kecamatan Muara Badak. Adapun usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan Muara Badak dilihat pada tabel TC.32 berikut

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Badak			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Badak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
1	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa				
1.1	Banjir sehingga perlu adanya Normalisasi Parit #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. Am Tahir Rt. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.2	Kondisi drainase parit utama Jl. Rachmat menuju Badak 8 yang semakin dangkal sehingga perlu dilakukan kegiatan normalisasi	Jl. Rachmat & Jl. RA. Kartini, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.3	saluran drainase sering meluap hingga permukaan tanah sehingga menyebabkan banjir pada saat musim hujan	Jl. AMD RT. 01 , Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.4	Pembuatan Drainase Jalan Kuburan (500 M)	RT.02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.5	APABILA TERJADI HUJAN AIR TERGENANG DI KE JALAN	SALO CELLA RT 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.6	Normalisasi Sungai (2000 M)	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.7	Pembuatan Drainase Jalan 1000 M	Jl. Darma Mulia RT. 05, Kab. Kutai		200,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kartanegara			
1.1.8	Pembuatan Drainase Jalan 5000 M	Jl. Padaidi RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.9	Pembuatan Drainase (1000 M)	RT. 03 & RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.10	Jika Terjadi Hujan Air Tergenng Kejalan	Bulu Kessi RT 007, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.11	Jika terjadi hujan air tergenang ke jalan #OPD: Kecamatan Muara Badak	Bulu Kessi RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.12	Pembangunan drainase di kawasan pemukiman warga sangat diperlukan guna mengendalikan aliran air dari sungai maupun limbah rumah tangga	RT. 005, Kilo 3, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.13	PENGURUKAN DRAINASE RT.031	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.14	Banjir sehingga perlu adanya Normalisasi Parit #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.15	Pembuatan Drainase Jalan 1000 M	Jl. Sandang Rukun RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.16	Normalisasi Sungai 6000M #OPD: Kecamatan Muara Badak	Sungai Padaidi RT. 05, 06 & RT. 09, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.17	Bajir sehingga perlu adanya Normalisasi Parit	Salopareppa RT. 12, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.18	Banjir sehingga perlu adanya Normalisasi Parit #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. Airport Badak 2 RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.19	Normalisasi Sunagi 1500 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	Sungai Darma Mulia RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.20	Pembuatan Drainase Jalan 1000 M	Jl. Al-Khair RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.21	Pembuatan Parit Jl. Makam #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.22	pembuatan Drainase Jl. Padaidi	RT.03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.23	Perlunya Pembuatan Parit Beton di Gg. Ternak RT.009 dengan volume P= 335m, karena masih belum lancarnya saluran air akibat masih buntunya parit yg ada	RT.009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.24	Sungai yang semakin dangkal perlu adanya normalisasi	Jl. M. Jafar Saleh RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.25	Jika Terjadi Hujan air tergenang ke jalan #OPD: Kecamatan Muara Badak	Bulu Kessi RT 12, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
1.1.26	Agar memperlancar saluran air ketika hujan turun, sehingga tidak menggenangi halaman rumah warga masyarakat #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT. 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
2	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Badak)				
2.1.1	PEMBANGUNAN MCK DESA BADAK BARU	Jl. M. Jafar Saleh, RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
2.1.2	Perlu adanya WC umum #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. M. Jafar Saleh, RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
	Sebagian besar warga tidak memiliki septi tank dimasing-				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.3	masing rumah #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. Dagang, RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara				
3.1.1	Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pipanisasi air PDAM disebagian wilayah desa Gas Alam Badak I belum ada	Gas Alam Badak I, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.2	Perlunya Penambahan Jaringan PIpa Air Bersih #OPD: Kecamatan Muara Badak	Dusun Utara RT.001, RT.004, RT.006 dan RT.008 Desa Tanah Datar, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.3	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH RT.032	RT.032, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.4	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH RT.28	RT.028, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.5	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH RT.011	RT.011, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.6	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH RT.015	RT.015, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
3.1.7	Pemukiman di jl.H.Mahmud dan Jl. Kayu Ara blm masuk PDAM/Air besih	RT. 20 dan RT. 35 Desa Muara Badak Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Desa/Kelurahan				
4.1.1	PEMBANGUNAN POSKAMLING DESA BADAK BARU	DESA BADAK BARU, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.2	Pembuatan Poskamling di Wilayah RT. 04	Jl. M. Jafar Saleh, RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.3	Beberapa RT di Desa Gas Alam Badak I belum memiliki poskamling #OPD: Kecamatan Muara Badak	Gas Alam Badak I, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.4	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi			200,000,000	
4.1.5	Pembuatan Gorong gorong (1 Paket)	Jl. Perintis RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.6	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Menuju pemakaman Muslim #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.32, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.7	Pembangunan Saluran Gorong-gorong RT.028 #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.028, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.8	Pembuatan Gorong gorong Jalan 4 Buah	Jl. Sepakat RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.9	Penungkatan Gorong gorong 1 Paket	Jl. Sungai Sungan RT. 09, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.10	Pembuatan Gorong Gorong Jalan 3X4 M	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.11	#OPD: Kecamatan Muara Badak	jln.modang Rt.05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.12	Gorong-gorong pada perbatasan RT. 001 dan RT. 002 sudah turun dan aliran air tidak dapat mengalir dengan lancar	RT. 001 dan RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
	Kondisi gorong-gorong di wilayah RT. 002, telah rusak dan				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.1.13	berlubang, selain membahayakan pengguna jalan, juga air sudah tidak mengalir dengan rancar ketika pasang dan surut air sungai	RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.14	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara			200,000,000	
4.1.15	pembangunan dan pengurukan turap parit RT.031	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.16	Perlunya kegiatan lanjutan penurapan RT 03 untuk meminimalisir terjadinya longsor	RT 03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.17	Antisipasi Terjadinya Longsor	Sambera Tengah RT 004, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.18	Pembuatan Turap Bronjong Jalan Sandang Rukun 100 M	RT 004, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.19	PEMBANGUNAN TURAP RT.033	RT.033, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.20	Tidak adanya turap sepanjangan sungai di RT. 01	Jl. AMD, RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.21	PEMBANGUNAN TURAP PARIT RT.025	RT.025, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.22	Kondisi lahan pemukiman warga RT 06 rawan longsor #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 06, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.23	Antisipasi Terjadinya Longsor	Salo Cella RT 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.24	#OPD: Kecamatan Muara Badak	Pangempang Rt. 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.25	Banjir sehingga perlu adanya Pembuatan Turap #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. Pelabuhan RT 21, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.26	Banjir sehingga perlu adanya Pembuatan Turap #OPD: Kecamatan Muara Badak	Kampung sidodadi RT. 11, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.27	Turap Timbunan RT. 16 untuk pembuatan badan jalan	Jl. Kapitan, RT. 16, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.28	Pembuatan Turap Gang Mandar 100 M	RT 001, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.29	Perlu lanjutan Pembuatan Turap menuju lapangan olahraga Di RT.005 #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.30	Banjir sehingga perlu adanya Pembuatan Turap #OPD: Kecamatan Muara Badak	Pangempang RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.31	Perlu adanya turap untuk penahan derasnya arus air karena akan mengikis tanah pemukiman warga	Jl. Dagang RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.32	Penurapan bahu jalan poros sangat diperlukan, guna menjaga kualitas jalan lebih baik, dan juga mencegah kerusakan badan jalan karena kikisan dari air hujan atau air sungai #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.33	Potensi lahan Longsor perlunya Turap dan Timbunan untuk penahan derasnya air sungai yang mengalir	Jl. Kapitan, RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.34	Penurapan badan jalan poros depan rumah bapak sayuti dianggap perlu, karena telah terjadi abrasi kecil oleh air sungai	RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	ketika pasang terjadi				
4.1.35	Pembangunan turap pada badan jalan ke pelabuhan wisata dianggap sangat perlu mengingat wilayah tersebut merupakan rawa, dan juga ketika air sungai pasang, maka wilayah tersebut juga akan tergenang oleh air sungai #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.36	Pembangunan Kantor Desa Baru	Jln.anyeq apui RT.01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.37	Pembuatan Turap Kantor Desa Baru	Jln.Anyeq Apui RT.01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.38	Banjir jika air pasang sehingga perlu adanya Pembangunan Penahan Abrasi Pantai	Jl. Am Tahir Rt. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.39	PEMBANGUNAN TURAP PARIT RT.011	RT.011, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.40	PEMBANGUNAN TURAP PARIT RT.031	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.41	PEMBANGUNAN TURAP PARIT RT.023	RT.023, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.42	Penurapan Pinggir Laut #OPD: Kecamatan Muara Badak	Rt. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.43	Wilayah RT 21 berbatasan langsung dengan laut sehingga perlu adanya turap untuk mengurangi abrasi	RT 21, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.44	Bangunan sekolah dasar 009 termasuk dalam wilayah pesisir rentan terhadap abrasi air laut, maka perlu adanya pembuatan turap di wilayah sekolah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan gedung sekolah #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 15 Desa Gas Alam Badak I, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.45	Pembuatan Turap Jalan 200 M	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.46	Pembuatan Turap Jembatan Jl. Sepakat 40 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
4.1.47	Pembuatan Turap Jalan Manakarra 200 M	RT 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa				
5.1.1	Jika Terjadi Hujan Jalan Becek	Sambera 5 RT 008, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.2	PENINGKATAN JALAN MENUJU KUBURAN MUSLIM RT.32	RT.032, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.3	Kondisi jalan berlubang dan tergenang air ketika hujan #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.4	Pengerasan Jalan Warga 2000 M	RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.5	APABILA TERJADI MUSIM HUJAN JALAN SANGAT RUSAK DAN JALAN TERSEBUT SANGAT DI BUTUKHAN OLEH MASYARAKAT,ANAK SEKOLAH	JALAN RT 02 MENUJU RT 10, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.6	Lanjutan Pengerasan Jalan Kuburan 200 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.7	Pembukaan dan penimbunan Badan Jalan #OPD: Kecamatan Muara Badak	Rt. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.1.8	Peningkatan Jalan Gang Bugis 1000 M	RT 009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.9	PENINGKATAN JALAN GANG INAYA RT.018	RT.018, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.10	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.031	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.11	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.30	RT.30, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.12	Peningkata Jalan 2000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	Jl. Al-Mukmin RT.01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.13	PENGASPALAN JALAN RT.018	RT.018, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.14	PENGASPALAN JALAN RT.033	RT.033, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.15	PENGASPALAN JALAN RT.034	RT.034, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.16	Perbaikan Jalan Gang Al-Amin	RT 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.17	Peningkatan Badan Jalan 1500 M	Jl. Perkebunan RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.18	Peningkatan Badak Jalan 2000 M	Jl. Pemuda Pancasila RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.19	Lanjutan Semenisasi 100 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	Gang Mandar RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.20	Peningkatan Jalan Usah Tani 1000 M	Jl. Usaha Tani RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.21	Peningkatan Jalan Gang Buntu (100 M)	Gang Buntu RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.22	Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani alam indah 1000 M	Jalan Kelompok Tani alam indah RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.23	Peningatan Jalan Idaman Bersama 2000 M	RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.24	Peningkatan Jalan Batua Temindung 2000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.25	Peningkatan Jalan Al-Jabar 200 M	RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.26	Peningkatan Jalan Alam Indah 800 M	RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.27	Pengerasan Jalan Perintis 2 (1500 M)	RT 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.28	Peningkatan Jalan Persatuan 1000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.29	Peningkatan Jalan Perintis 1 (1500 M)	RT 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.30	Peningkatan Jalan Sandang Rukun 50 M	RT 004, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.31	Pembuatan Badan Jalan Tembus Badak Mekar to Suka Damai 2000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 004, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.32	Peningkatan Jalan Sepakat 2000 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.33	Peningkatan Jalan Darma Mulia 2000 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.34	Lanjutan Semenisasi Jalan Padaidi 2000 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.35	Peningkata Jalan Suadaya 1000 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.1.36	Peningkatan Jalan Gunung Batu 2000 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.37	Pembuatan Jembatan Padaidi 5 M	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.38	Peningkatan Jalan Sungai Sungan 1000 M	RT 009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.39	Tambal Sulam Jalan Desa 2 Paket	RT 09, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.40	Peningkatan Badan Jalan Kebangsaan 2000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 010, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.41	Peningkatan Badan Jalan Al-Mukmin 1000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 010, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.42	Peningkatan Badan Jalan Sepakat 2 KM	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.43	Peningkatan Jalan Gotong royong 1000 M	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.44	Rehab Jalan Halamang 200 M	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.45	Tambal Sulam Jalan 2000 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.46	PENGASPALAN JALAN RT.001 DESA BADAK BARU	RT.001, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.47	PENGASPALAN JALAN RT.002	RT.002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.48	PENGASPALAN JALAN RT.003	RT.003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.49	PENGASPALAN JALAN RT.004	RT.004, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.50	PANGASPALAN JALAN RT.005	RT.005 , Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.51	PENGASPALAN JALAAN RT.006	RT.006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.52	PENGASPALAN JALAAN RT.007	RT.007, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.53	PENGASPALAN JALAAN RT.008	RT.008, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.54	PENGASPALAN JALAAN RT.009	RT.009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.55	#OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.010, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.56	PENGASPALAN JALAAN RT.011	RT.011, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.57	PENGASPALAN JALAAN RT.012	RT.012, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.58	PENGASPALAN JALAAN RT.013	RT.013, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.59	PENGASPALAN JALAN RT.014	RT.014, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.60	PENGASPALAN JALAN RT.015	RT.015, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.61	PENGASPALAN JALAN RT.016	RT.016, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.62	PENGASPALAN JALAN RT.017	RT.017, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.63	PENGASPALAN JALAN RT.019	RT.019, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.64	PENGASPALAN JALAN RT.020	RT.020, Kab. Kutai		200,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Kartanegara			
5.1.65	PENGASPALAN JALAN RT.021	RT.021, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.66	PENGASPALAN JALAN RT.022	RT.022, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.67	PENGASPALAN JALAN RT.023	RT.023, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.68	PENGASPALAN JALAN RT.024	RT.024, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.69	PENGASPALAN JALAN RT.025	RT.025, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.70	PENGASPALAN JALAN RT.027	RT.027, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.71	PENGASPALAN JALAN RT.026	RT.026, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.72	PENGASPALAN JALAN RT.028	RT.028, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.73	PENGASPALAN JALAN RT.029	RT.029, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.74	PENGASPALAN JALAN RT.030	RT.030, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.75	PENGASPALAN JALAN RT.031	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.76	PENGASPALAN JALAN RT.032	RT.032, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.77	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.031 #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT.031, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.78	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.011	RT.011, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.79	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.023	RT.023, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.80	PENINGKATAN JALAN PERINTIS DESA BADAK BARU	DESA BADAK BARU, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.81	PENINGKATAN JALAN S. HASANUDDIN DESA BADAK BARU	DESA BADAK BARU, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.82	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.012	RT.012, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.83	PENINGKATAN JALAN GANG MASJID AT TAQWA MENUJU RT.011	RT.026 DAN RT.011, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.84	PENINGKATAN JALAN GANG RT.017	RT.017, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.85	Kondisi jalan saat ini rusak #OPD: Kecamatan Muara Badak	Salo cella RT 009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.86	Kondisi jalan saat ini rusak #OPD: Kecamatan Muara Badak	Salo cella RT 002 menuju Desa Tanjung Limau, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.87	Kondisi jalan saat ini rusak #OPD: Kecamatan Muara Badak	Salo cella menuju Desa Batu Batu, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.88	Jalan Pengubung antara RT 01 Menuju RT 05 Sangat Di butuhkan Anak sekolah dan masyarakat	Salo Cella RT 01 Menuju RT 05, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.1.89	Apabila Hujan Jalan Becek #OPD: Kecamatan Muara Badak	Sambera 5 RT 008 JALAN PERKEBUNAN PATTOJO, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.90	Kondisi Jalan Saat Ini Rusak #OPD: Kecamatan Muara Badak	Salo Cella RT 002 Menuju DesaTanjung Limau, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.91	Kondisi Jalan Saat Ini Rusak #OPD: Kecamatan Muara Badak	Salo Cella RT 001 Menuju Desa Batu Batu, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.92	Kondisi Jalan Saat INI RUSAK	Sambera 009 RT 009, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.93	Apabila Terjadi Hujan JALAN Becek	Sambera Atas RT 10, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.94	PENINGKATAN JALAN RT.032 DESA BADAK BARU	RT.032, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.95	PENINGKATAN JALAN MENUJU KUBURAN MUSLIM DESA BADAK BARU	RT.032, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.96	PENINGKATAN JALAN KI HAJAR DEWANTARA DESA BADAK BARU	DESA BADAK BARU, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.97	Perbaikan Jalan Desa 7000 m	Dusun Madu, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.98	Pembuatan Jembatan Beton Jalan Sepakat 4X8 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.99	peningkatan jembatan ulin RT.006	RT.006, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.100	Lanjutan Rehab dan Semenisasi Jembatan Rt. 01 karena tiang Jembatan sudah tergantung, gelagar banyak yang patah, papan banyak yang pecah sehingga diperlukan rehab kemudian semenisasi agar tidak menimbulkan suara ribut jika dilewati kendaraan.	Kp. Jawi-jawi Rt. 01, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.101	Kondisi Jembatan Sudah mulai Rusak	Salo Cella RT 001, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.102	Perbaikan Jembatan Perintis 2 (1 Paket) #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 003, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.103	Pembuatan Jembatan Beton Jalan Gunung Batu 4X5 M #OPD: Kecamatan Muara Badak	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.104	Pembuatan Jembatan Beton Jl. Sepakat 6 M	RT 005, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.105	Pembuatan Jembatan Ulin Jalan Baru 200 M	RT 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	
5.1.106	Kondisi Jembatan Sudah Mulai Rusak	Salo Cella RT 002, Kab. Kutai Kartanegara		200,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan RKPD diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja-PD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedudukan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai kartanegara.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran :

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			Sasaran		2021	2022	2023	2024	2026	2026
1.	Meningkat-kan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	%	60	65	70	75	80	90
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	%	90	92	28	30	35	40
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	%	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	%	63	65	71	74	78	80

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penetapan Program dan kegiatan atau sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kantor Camat Muara Badak dengan RPJMD, maka Program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2021-2026 bentuk sinkronisasi dengan Program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD.

Penyusunan rancangan awal rencana RKPD tahun 2026 tidak terlepas dari Visi kepala Daerah terpilih “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” hal ini sesuai dengan arah pembangunan Daerah berfokus pada tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup, emonomi unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, ariwisata dan ekonomi kreatif.
4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah.
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Tema pembangunan Kutai kartanegara tahun 2026 yaitu memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan berbasis potensi kewilayahan dan komoditi unggulan Daerah.

Adapun yang menjadi penekanan dalam perumusan rencana program dan kegiatan Daerah tahun 2026 yaitu :

1. Penguatan modal sosial dalam mendukung upaya penyediaan kebutuhan dasar dan penurunan kemiskinan Daerah.
2. Pengembangan potensi sektor ekonomi terbarukan dalam menopang perekonomian daerah dalam jangka panjang.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Penguatan kompetensi birokrasi yang handal dan melayani.

Ketiga pokok permasalahan tersebut diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026, serta menjadi kebijakan umum dalam penyusunan RKPD merupakan penguatan terhadap potensi ekonomi terbarukan dalam rangka pembangunan potensi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, hal ini ditetapkan pertanian pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. Serta meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan Daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayh, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasa, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

a) pemantapan percepatan penyelenggaraan reformasi dan birokrasi
b) peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c) peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Badak tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 akan disajikan pada tabel TC-33 di bawah ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kecamatan Muara Badak

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RKPD Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Badak	74 Nilai	6,496,338,265		74 Nilai	6,891,338,265
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Badak	11 Dokumen	279,790,000		11 Dokumen	624,790,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Muara Badak	3 Dokumen	40,000,000		3 Dokumen	60,000,000
	Penyusunan Dokumen renstra		Muara Badak		20,000,000			
	Penyusunan Dokumen RENJA		Muara Badak		10,000,000			30,000,000
	Penyusunan Dokumen Renja P		Muara Badak		10,000,000			30,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	9,520,000		1 Dokumen	9,520,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Badak	1 Dokumen	10,270,000		1 Dokumen	10,270,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3 Laporan	100,000,000		3 Laporan	100,000,000
	Penyusunan Laporan e-Pantau, Laporan Manajemen Risiko dan LKJIP							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	100,000,000
	Evaluasi Renja				100,000,000			100,000,000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Muara Badak	2 Data			2 Data	300,000,000
	Satu Data (Becik)		Muara Badak					**250,000,000**
	Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)		Muara Badak					**50,000,000**
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara			1 Berita Acara	25,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renja)							25,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4 Dokumen	3,980,878,304		4 Dokumen	4,030,878,304
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Badak	26 Orang/bulan	3,810,653,404		26 Orang/bulan	3,810,653,404
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Badak	1 Laporan	25,184,900		1 Laporan	25,184,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Badak	1 Laporan	145,040,000		1 Laporan	145,040,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		4 Dokumen	65,800,000		4 Dokumen	65,800,000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen			1 Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Badak	1 Laporan			1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Muara Badak	1 Laporan	40,800,000		1 Laporan	40,800,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Muara Badak	1 Laporan	180,000,000		1 Laporan	180,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Badak	26 Orang	180,000,000		26 Orang	180,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Muara Badak	90 Persen	598,261,349		90 Persen	598,261,349

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	10,000,000		1 Paket	10,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	35,000,000		1 Paket	35,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	150,707,349		1 Paket	150,707,349
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	50,000,000		1 Paket	50,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Badak	1 Laporan	40,000,000		1 Laporan	40,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Badak	1 Laporan	262,554,000		1 Laporan	262,554,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 unit	80,000,000		12 unit	80,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	80,000,000		7 Unit	80,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Badak	90 Persen	728,430,352		90 Persen	728,430,352
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	50,300,000		1 Laporan	50,300,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	395,707,209		12 Laporan	395,707,209
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	12,568,400		1 Laporan	12,568,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	269,854,743		12 Laporan	269,854,743

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		30 Laporan	583,178,260		30 Laporan	583,178,260
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	452,986,900		11 Unit	452,986,900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Badak	20 Unit	40,000,000		20 Unit	40,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Badak	1 Unit	90,191,360		1 Unit	90,191,360
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Muara Badak	100 persen	4,720,533,353		100 persen	5,520,533,353
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Badak	3 kegiatan	200,000,000		3 kegiatan	250,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Badak	1 Dokumen	200,000,000		1 Dokumen	250,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	HUT RI DI KECAMATAN		Muara Badak		200,000,000			250,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Badak	80	30,000,000		80	80,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Badak	2 Laporan	30,000,000		2 Laporan	80,000,000
	OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU		Muara Badak					50,000,000
	PRAMUKA		Muara Badak		30,000,000			30,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		202 Kegiatan	4,490,533,353		202 Kegiatan	5,190,533,353
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4 Laporan	50,000,000		4 Laporan	750,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN		Muara Badak					500,000,000
	FASILITASI PATEN		Muara Badak		50,000,000			50,000,000
	PENANGANAN DARURAT BENCANA							
	PEMELIHARAAN LPJU KECAMATAN							200,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Badak	198 Laporan	4,440,533,353		198 Laporan	4,440,533,353
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	Muara Badak	78 Persen	955,645,900		78 Persen	970,645,900
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		-	305,645,900		-	320,645,900

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		65 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000		65 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000
	Bupati Caup		Muara Badak					
	Musrenbang				75,000,000			90,000,000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1 Dokumen	72,600,000		1 Dokumen	72,600,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	158,045,900		2 Laporan	158,045,900
	FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA				108,045,900			108,045,900
	BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)				50,000,000			50,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1 Laporan	650,000,000		1 Laporan	650,000,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000		5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000
	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK				155,000,000			155,000,000
	Operasional PKK				200,000,000			200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	FORUM ANAK				50,000,000			50,000,000
	Honor LINMAS				195,000,000			195,000,000
	Jambore PAUD				50,000,000			50,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		81 Persen	50,000,000		81 Persen	150,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		76 Persen	50,000,000		76 Persen	150,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	50,000,000		1 Laporan	50,000,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	-		2 Laporan	100,000,000
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat							
	SAFARI RAMADHAN							100,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		74 persen	295,650,542		74 persen	400,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		2 Kegiatan	295,650,542		2 Kegiatan	400,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		125 Orang	245,650,542		125 Orang	350,000,000
	Fasilitasi Kegiatan MTQ				245,650,542			350,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				150,000,000			300,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		68 persen	150,000,000		68 persen	300,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							150,000,000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	100,000,000		1 laporan	100,000,000
	JUMLAH				12,668,168,060			14,232,517,518

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2026 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Muara Badak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Daerah maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MARANG KAYU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin komplek tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan Daerah. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas Daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja-PD.

Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi "KUKAR IDAMAN" yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2022-2026 serta keberhasilan *(success story)* pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042; 17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Marangkayu selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD dan Renstra kecamatan.

b. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Marangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan Program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2022 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu "BERGERAK SEARAH MENUJU KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA" dengan misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Marangkayu telah melaksanakan kegiatan yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan.

Proses yang pertama yaitu menyusun RKPD, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan musrenbang tingkat Daerah. Kemudian evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan PD belanja langsung urus wajib dan pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kecamatan Marang Kayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2025)			Target program / kegiatan (Renja- PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2025)	Realisasi Renja-PD tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran								
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	480	384	100	100	100%	240	480	100%
01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur	60	40	100	100	100%	0	30	60%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	17	100	100	0%	17	102	100%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	30	5	25	25	100%	30	30	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah/Jenis	132	22	22	22	100%	40	132	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	8400	1400	1400	1400	100%	1400	3300	100%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah staf pendukung	120	100	100	100	58%	100	120	87%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	54188	24094	10047	10047	100%	10047	44188	82%
01.012	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Kegiatan	215	90	80	80	100%	102	272	127%
	Penataan Arsip Perangkat	Jumlah berkas	1500		1000	1000	100%	500	1500	100%
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur kondisi baik								
02.001	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah/item	53	44	6	6	100%		50	94%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah/item	23	19	19	19	100%	19	19	100%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	5	3	1	2	200%	2	7	140%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	85	17	17	100%	17	100	100%
02.031	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah/item	37	24	30	30	100%	0	37	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

0000.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	21	0	21	21	100%		21	100%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	12	0	10	10	100%	2	12	100%
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur								
	Fasilitasi Tim BEKIAS		1	1	0	0	0%	0	1	100%
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	3175	1905	545	485	89%		2390	75%
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah personil	1116	1116	0	0	0%	0	1116	100%
46.004	Fasilitasi Pelayanan Linmas	Jumlah personil	744		372	372	100%	372	744	100%
46.003	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah lembaga	15	9	3	3	100%		12	80%
46.002	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	jumlah peserta	300	180	60	0	0%	0	180	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

46.001	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG	jumlah peserta	500	300	100	100	100%	100	500	100%
46.005	Fasilitasi Pelaksanaan HUT RI	Jumlah peserta	500	300	10	10	100%	100	410	82%
0103.52	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasasarana Umum Kecamatan	cakupan Sarana prasarana kondisi baik	169	156	4	4	100%	0	160	95%
52.002	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah Unit	29	16	4	4	100%		20	69%
0103.54	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Jalan jembatan Kecamatan dalam kondisi Baik	14521	6188	4936	5923	120%		12111	83%
	Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	1926	1926			0%		1926	100%
	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	jumlah unit	1	1			0%		1	100%
54.001	Pembangunan Jalan Kecamatan	panjang jalan	267		267	267	100%		267	100%
	Pembangunan Turap	Jumlah unit	5		5	5	100%		5	100%
54.003	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	12317	4259	4653	5640	121%		9899	80%
54.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan	Jumlah unit	1		9	9	100%		9	900%
54.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	Jumlah unit	4	2	2	2	100%		4	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

0103.55	Program Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- gorong Kecamatan	cakupan saluran gorong-gorong kecamatan kondisi baik	773	323	200	200	100%		523	68%
55.001	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang saluran drainase yang dibangun	773	323	200	200	100%		523	68%
	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan		10	8	0	0	0%		8	80%
	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	jumlah unit	10	8	0	0	0%		8	80%
0103.57	Program Pembangunan Turap Kecamatan	pembangunan turap kecamatan kondisi baik	1886	867	0	0	0%		867	46%
	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	253	0	0	0%		253	27%
57.001	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	614	0	0	0%		614	65%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat Program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun Program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan; dan
b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Rencana Kerja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah :

a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Marangkayu merupakan PD sebagai unsur kewilayahan dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat Daerah, sehingga Daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marangkayu selama kurun waktu tahun 2023-2024 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Marangkayu, yaitu :

a. Nilai SAKIP PD;
b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;
c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Cc								
	Jumlah Dokumen			0	9	9	9	0		9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	10		2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10		10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah				5	5	5			5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10		10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			11	11	11	11	11		11	11	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4		4	4	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			11	11	11	11	11		11	11	

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. dan bagaimana dampaknya terhadap percapaian visi dan misi, target Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan PD.

Pelayanan di Kecamatan Marangkayu pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Marangkayu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Marangkayu masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi perlindungan masyarakat;
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan;
3. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan;
4. Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan;
5. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan; dan
6. Belum optimalnua kinerja dan tata kelola kecamatan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
2. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Meningkatnya penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
5. Meningkatkan pemeiliharaan prasarana dan layanan umum;
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perrangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Meningkatkkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah. Adapun Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf;
2. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa; dan
3. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi di bidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan;
2. Potensi perkebunan kelapa sawit di Desa Santan Ulu dan karet di beberapa Desa; dan
3. Banyak pelaku usaha kecil menangah di 11 (sebelas) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra PD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KECAMATAN MARANG KAYU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	230,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	265,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		40,000,000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2 Dokumen	40,000,000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		40,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	65,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	65,000,000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,396,102,700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	4,396,102,700	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang/ Bulan	4,241,102,700	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang/bulan	4,241,102,700	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1 Laporan	50,000,000	
1.2.4	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseter	12 Laporan	65,000,000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran	12 Laporan	65,000,000	
1.2.5	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	koordinasi dan Penyusunan Prognosis	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1 Laporan	122,400,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2 Laporan	122,400,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	SKPD										
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		603,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,025,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	25,000,000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	75,000,000	
1.5.4	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	75,000,000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	170,000,000	
1.5.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		170,000,000	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		400,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				85,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	430,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	350,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah sarana dan Prasarana	15 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Kecamatan Marangkayu	15 Unit	50,000,000	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	40 laporam	763,234,996	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	853,996,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.7.3	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450,738,996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540,000,000	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	180,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	190,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.8.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	150,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Marangkayu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	150,000,000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	12 Unit	40,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1 Kegiatan	8,016,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	8,755,000,000	
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,016,000,000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,755,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	315,000,000	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	435,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
3.1.1			250 Peserta	35,000,000	85,000,000	
3.1.2			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	350,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi Daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan Program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusu mulai dari rencana tata ruang wilayah, RPJPD, RPJMD, dan Renstra, sedangkan rencana kerja pembanguna Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja-PD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi PD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Marangkayu sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dam misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Marangkayu dalam mencapai tujuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Marangkayu;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan; dan
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi Daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan PD tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Marangkayu sesuai tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD KECAMATAN MARANGKAYU

TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	6,481,780,443.00	6,481,780,443.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62 dokumen	62 dokumen	210,000,000.00	210,000,000.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 laporan	2 laporan	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	4,341,102,700..00	4,341,102,700..00	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5 unit	5 unit	168,800,000.00	168,800,000.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	12 laporan	128,000,000.00	128,000,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40,800,000.00	40,800,000.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Jenis	518,642,747.00	518,642,747.00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	18,000,000.00	18,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1210 porsi	1210 porsi	75,000,000.00	75,000,000.00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20.047 Lembar	20.047 Lembar	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 kali	150 kali	275,642,747.00	275,642,747.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	10 Unit	205,197,120.00	205,197,120.00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199,991,922.00	199,991,922.00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	390,587,000.00	390,587,000.00	
			Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 kali	8 kali	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musrenbang	100 orang	100 orang	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	8,390,000.000.00	9,016,600.000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11 Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			JUMLAH						

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Marangkayu tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu.

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Marangkayu.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA JAWA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang- undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam Renja-PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat Pprogram, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari: a) evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan

tahun lalu; b) rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja; d) rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan; e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana; f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja; g) tolok ukur dan target kinerja capaian Program dan kegiatan; h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui: a) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah; c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; d) berperan aktif pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; e) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas Program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendekatan *top down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat

koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *global MDGs.* Pendekatan ini tercermin pada: a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah; b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Jawa, konsisten dengan dokumen RTRW Daerah; c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui Musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum PD.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;

16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Muara Jawa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PD
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan, Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa adalah :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi **:**

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kecamatan Muara Jawa beserta tergetnya adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
TUJUAN							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	61	62	64	65
SASARAN							
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	65	60	65	70
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	82.35	83	84	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	15	20	25	30

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Formulasi perhitungan indikator kinerja utama Kecamatan Muara Jawa tahun 2022-2026, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5
Tujuan				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	Nilai IKM diperoleh dari hasil perhitungan atas Survey yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Acuan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

Komponen Penilaian berupa:

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan
U2	Prosedur Pelayanan
U3	Kecepatan Pelayanan
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya
U5	Kesesuaian Pelayanan
U6	Kompetensi Petugas
U7	Perilaku Petugas Pelayanan
U8	Penanganan Pengaduan
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNGJAWAB
Sasaran					
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	Hasil perbandingan jumlah keluhan yang ditangani/ditindaklanjuti atas ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan terhadap total aduan yang disampaikan	Laporan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Muara Jawa / Kasi Pelayanan Umum
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Hasil perbandingan banyaknya kasus gangguan keamanan yang ditangani dan difasilitasi oleh pihak kecamatan terhadap jumlah kasus gangguan keamanan yang dilaporkan di Kecamatan	Laporan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Jawa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (N) dikurangi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dikali 100	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Menyusun dokumen perencanaan RKPD tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan Musrenbang Daerah.
b. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Kecamatan tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Rencana Kerja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2025 terhadap target di tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2021- 2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Muara Jawa 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut T.C-29:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T-C.29

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2025 KECAMATAN KOTA BANGUT DARAT

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					URUSAN : KECAMATAN									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**95**	**89,73**	**85**	**97**	**114,12**	**85**	**97**	**102,11**
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	**87,5**	**100**	**87,5**	**100**	**114,29**	**87,5**	**100**	**114,29**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**10**	**4**	**2**	**2**	**100,00**	**2**	**8**	**80,00**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	25000	5000	5000	5000	100	5000	15000	60,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	426	86	85	85	100	85	256	60,09
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**480**	**84**	**84**	**84**	**100**	**84**	**252**	**52,50**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2600	1040	520	520	100	520	2080	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun	230	92	46	46	100	46	184	80,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan	1410	564	282	282	100	282	1128	80,00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti Lomba	40	16	8	8	100	8	32	80,00
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**348**	**348**	**348**	**348**	**100**	**348**	**348**	**100,00**
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1740	696	348	348	100	348	1392	80,00
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta	80	32	16	16	100	16	64	80,00
7	01	03	2,03	03	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana/prasarana	320	128	64	64	100	64	256	80,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0,00**
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2	0	0	0	0	1	1	50,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**44**	**0**	**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**9,09**
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	0	5	2	40	2	4	20,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	0	6	6	100	0	6	25,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					URUSAN : NON URUSAN									
X	**XX**	**01.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67 (B)**	**61 (B)**	**62 (B)**	**69,2 (B)**	**69,2 (B)**	**64 (B)**	**64 (B)**	**62 (B)**
X	**XX**	**01.**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107**	**40**	**20**	**20**	**100**	**3**	**63**	**58,88**
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60,00
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0	1	1	0,00
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	0	0	0	0	1	1	0,00
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	18	16	16	100	16	50	55,56
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	2	2	50,00
X	XX	01.	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	0	0	0	0	200	200	100,00
X	XX	01.	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	0	0	0	0	25	25	100,00
X	**XX**	**01.**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**56**	**18**	**14**	**14**	**100**	**14**	**46**	**82,14**
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	86	86	86	86	100	86	86	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	4	1	1	1	0	0	2	50,00
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80,00
X	XX	01.	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	2	1	1	100	0	3	60,00
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	34	17	17	100	17	68	80,00
X	XX	01.	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100	1	3	60,00
X	**XX**	**01.**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah BMD yang dikelola**	**1017**	**1017**	**1017**	**1017**	**100**	**1017**	**1017**	**100,00**
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	0	0	0	1	1	50,00
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	5085	2034	1017	1017	100	1017	4068	80,00
X	XX	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	2	0	0	0	0	1	1	50,00
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	0	0	0	0	1	1	50,00
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5085	2034	1017	1017	100	0	3051	60,00
X	**XX**	**01.**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian**	**86**	**86**	**86**	**86**	**100**	**86**	**86**	**100,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	5	2	1	1	100	0	3	60,00
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	545	109	268	268	100	162	539	98,90
X	XX	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	10	10	10	100	15	35	70,00
X	XX	01.	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700	280	140	140	100	140	560	80,00
X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	20	20	20	100	15	55	55,00
X	**XX**	**01.**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64**	**11**	**11**	**11**	**100**	**11**	**33**	**51,56**
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	340	136	68	68	100	68	272	80,00
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1450	580	290	290	100	290	1160	80,00
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	10	5	5	100	5	20	80,00
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50	20	10	10	100	10	40	80,00
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	840060	336.024	168.012	168.012	100	168.012	672048	80,00
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	4	1	1	100	0	5	100,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	25	10	5	5	100	5	20	80,00
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	20	8	4	4	100	4	16	80,00
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2110	844	422	422	100	422	1688	80,00
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	5000	2000	1000	1000	100	1000	4000	80,00
X	XX	01.	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan	5	2	1	1	100	1	4	80,00
X	**XX**	**01.**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**400**	**80**	**85**	**85**	**100**	**85**	**250**	**62,50**
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	6	1	1	1	100	1	3	50,00
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	40	8	8	8	100	8	24	60,00
X	XX	01.	2,07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20	66	66	66	100	66	198	990,00
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
X	**XX**	**01.**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100,00**
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	60	24	12	12	100	12	48	80,00
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100	12	36	60,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan Renja- PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun	
									Target Renja- PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60,00
X	**XX**	**01.**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara**	**973**	**177**	**177**	**177**	**100**	**177**	**531**	**54,57**
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1	0	0	0	0	1	1	0,00
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	110	44	22	22	100	22	88	80,00
X	XX	01.	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	4	1	1	1	100	1	3	75,00
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	475	190	95	95	100	95	380	80,00
X	XX	01.	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	250	100	50	50	100	50	200	80,00
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	40	16	8	8	100	8	32	80,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel T.C-29 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa Program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan; dan
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Rencana Kerja.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
2. Mengurangi dan menghapus beberapa subkegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja PD Tahun Lalu

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Muara Jawa sebagai salah satu PD yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenengan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Muara Jawa tahun 2024 sebesar 91,76% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam persen) melebihi target 64 % (enam puluh empat persen). Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran Program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan Muara Jawa sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2021-2026 yaitu nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 49,32 (empat puluh sembilan koma tiga puluh dua) yang jauh berada di bawah target sebesar 64 (enam puluh empat). Penyebab tidak tercapainya target tersebut sesuai Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat adalah sistem dan tatanan dalam SAKIP kurang dapat diandalkan, manajemen kinerja belum terimplementasi dengan baik, penyampaian LKJIP tahun 2023 yang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesulitan mengumpulkan bukti dukung kinerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dalam Keputusan tersebut camat melaksanakan 9 (sembilan) keputusan yang termuat dalam surat keputusan tersebut dan pelaksanaannya Kecamatan Muara Jawa melakukan jenis pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta melaporkan kegiatan setiap bulannya sesuai lampiran surat keputusan tersebut.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamata Jawa cukup memuaskan , terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Jawa, yaitu :

a. Nilai SAKIP PD;
b. Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
c. Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan;
d. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif;
e. Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dimana indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Muara Jawa sebagaimana uraian tugas camat diatas. Pencapaian kinerja Kecamatan Muara Jawa, tabel T.C-30 berikut ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Muara Jawa

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*11*	*12*	*13*	*14*
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:												
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			61	62	64	65	67	69,2	91,76	65	67	
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):												
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			55	60	65	70	75	100	100	70	75	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			82,35	83	84	84	85	100	100	84	85	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			15	20	25	30	35	N/A	N/A	N/A	N/A	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui apliaksi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Muara Jawa adalah terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Muara Jawa sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa .
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Development Goals)*.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

   Tantangan :

   a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras *(Software dan hardware)* sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
   b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
   c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

   Peluang :

   a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
   b. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
   c. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran pelayanan PATEN Kecamatan Muara Jawa ;
   d. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Muara Jawa terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
   a. Urusan kepemudaan dan olah raga.
      Kecamatan Muara Jawa mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.
   b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
      Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Muara Jawa melalui Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Muara Jawa dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasaran yang mendukung.
6. Isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Muara Jawa semenjak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 adalah wacana bahwa Kecamatan Muara Jawa akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni 2023. Hal ini tentu saja membutuhkan banyak penyesuaian rencana kerja guna mempersiapkan Kecamatan Muara Jawa sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara. Hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk adalah:
   a. Kemantapan sarana dan prasarana guna memperlancar proses mobilitas manusia dan barang serta arus pertumbuhan ekonomi.
   b. Kesiapan sumber daya alam dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
   c. Kesiapan penduduk Kecamatan Muara Jawa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang timbul dengan adanya pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara, serta agar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tidak kalah saing dengan tenaga kerja yang banyak didatangkan dari luar Kalimantan Timur.

d. Kesiapan ASN Kecamatan Muara Jawa untuk mengimbangi perubahan- perubahan dinamis dalam lingkup pekerjaan yang standarnya akan semakin naik menyesuaikan dengan standar kinerja ASN dari pusat, serta dinamisnya lingkup tigas dan fungsi yang dihadapi.

e. Kesiapan aparat keamanan dalam menangani dampat buruk baik keamanan, soial, budaya, serta RAS dari banyaknya proses perpindahan penduduk ke area Ibu Kota Nusantara dan wilayah- wilayah terdekat termasuk Kecamatan Muara Jawa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 adalah perbandingan antara Program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan Program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD. *Review* secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel T.C-31 berikut ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN	**Kecamatan Muara Jawa**				**53.215.342.882,00**	**KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN**	**Kecamatan Muara Jawa**				**54.412.725.138,00**	
	KECAMATAN MUARA JAWA	**Kecamatan Muara Jawa**				**37.374.002.882,00**	**KECAMATAN MUARA JAWA**	**Kecamatan Muara Jawa**				**40.026.957.638,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**23.248.961.299,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**20.140.307.638,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36**	**Dokumen**	**605.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9**	**Dokumen**	**340.000.000,00**	
7.01.01.2.01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**140.000.000,00**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**40.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	30.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Renja - P	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Renja - P	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**1**	**Dokumen**	**5.000.000,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**0**	**Dokumen**	**-**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-	
7.01.01.2.01.03	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1**	**Dokumen**	**5.000.000,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**0**	**Dokumen**	**-**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-	
7.01.01.2.01.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3**	**Laporan**	**70.000.000,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3**	**Laporan**	**30.000.000,00**	
	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	70.000.000,00	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.01.07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Laporan**	**60.000.000,00**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Laporan**	**20.000.000,00**	
	LHE SAKIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	30.000.000,00	LHE SAKIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	10.000.000,00	
	Evaluasi Renstra	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	30.000.000,00	Evaluasi Renstra	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.09	**Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah**	**200**	**Data**	**300.000.000,00**	**Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah**	**200**	**Data**	**250.000.000,00**	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	250.000.000,00	
7.01.01.2.01.10	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**25**	**Berita Acara**	**25.000.000,00**	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**0**	**Berita Acara**	**-**	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita Acara	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**14**	**Laporan**	**15.431.672.901,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**14**	**Laporan**	**16.217.892.420,00**	
7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**924**	**Orang/bulan**	**14.920.272.901,00**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**924**	**Orang/bulan**	**15.731.492.420,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	924	Orang/bulan	14.920.272.901,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	924	Orang/bulan	15.731.492.420,00	
7.01.01.2.02.05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	**Laporan**	**25.000.000,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	**Laporan**	**25.000.000,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00	
7.01.01.2.02.07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**14**	**Laporan**	**461.400.000,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**14**	**Laporan**	**461.400.000,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	14	Laporan	461.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	14	Laporan	461.400.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan PD
7.01.01.2.02.08	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**0**	**Dokumen**	**-**	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen	-	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan**	**1017**	**Unit**	**280.200.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan**	**1017**	**Unit**	**130.200.000,00**	
7.01.01.2.03.01	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	
7.01.01.2.03.02	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**150.000.000,00**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**50.000.000,00**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	150.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	50.000.000,00	
7.01.01.2.03.03	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Laporan**	**50.000.000,00**	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**0**	**Laporan**	**-**	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	-	
7.01.01.2.03.05	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	**Laporan**	**55.200.000,00**	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	**Laporan**	**55.200.000,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	Honorarium Pengelola Barang PD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**170**	**Orang**	**705.511.992,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**170**	**Orang**	**50.000.000,00**	
7.01.01.2.05.01	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**0**	**Unit**	**-**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**0**	**Unit**	**-**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	
7.01.01.2.05.02	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**149**	**Paket**	**162.000.000,00**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**0**	**Paket**	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	149	Paket	162.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	
7.01.01.2.05.09	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**15**	**Orang**	**200.000.000,00**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**0**	**Orang**	**-**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	15	Orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	0	Orang	-	
7.01.01.2.05.10	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**120**	**Orang**	**143.511.992,00**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**10**	**Orang**	**50.000.000,00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	143.511.992,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	50.000.000,00	
7.01.01.2.05.11	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**20**	**Orang**	**200.000.000,00**	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**0**	**Orang**	**-**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**11**	**Layanan**	**1.119.200.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**11**	**Layanan**	**400.518.500,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**50.000.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**170.000.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**25.000.000,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	170.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**25.000.000,00**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**300.000.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**125.000.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	125.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**20.569.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.569.000,00	
7.01.01.2.06.07	**Penyediaan Bahan/Material**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**25.000.000,00**	**Penyediaan Bahan/Material**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**0**	**Paket**	**-**	
	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**1**	**Laporan**	**26.560.000,00**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**1**	**Laporan**	**20.000.000,00**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	26.560.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	426	**Laporan**	**350.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	91	**Laporan**	**75.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426	Laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91	Laporan	75.000.000,00	
7.01.01.2.06.10	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**5000**	**Dokumen**	**70.000.000,00**	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**5000**	**Dokumen**	**39.949.500,00**	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	70.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	39.949.500,00	
7.01.01.2.06.11	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**1**	**Dokumen**	**52.640.000,00**	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**1**	**Dokumen**	**35.000.000,00**	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	52.640.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**30**	**Unit**	**571.820.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**3**	**Unit**	**150.000.000,00**	
7.01.01.2.07.01	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.02	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**1**	**Unit**	**183.440.000,00**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**1**	**Unit**	**100.000.000,00**	
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin operasional Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	183.440.000,00	Sewa Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin operasional Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	100.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin untuk kendaraan patroli/operasional Trantibmas	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin untuk kendaraan patroli/operasional Trantibmas	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**15**	**Unit**	**90.000.000,00**	**Pengadaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**2**	**Unit**	**50.000.000,00**	
	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	90.000.000,00	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**13**	**Unit**	**98.380.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	98.380.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**1**	**Unit**	**200.000.000,00**	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**3.480.556.406,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**2.261.696.718,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**2.500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**1.462.920.394,00**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**1.462.920.394,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.462.920.394,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.462.920.394,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**1.967.636.012,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**796.276.324,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.967.636.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	796.276.324,00	Pagu anggaran dapat berkurang menunggu penerbitan SK P3K
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**430**	**Unit**	**1.055.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**63**	**Unit**	**590.000.000,00**	
7.01.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**8**	**Unit**	**390.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**8**	**Unit**	**225.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	390.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	225.000.000,00	
7.01.01.2.09.03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.05	**Pemeliharaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**50**	**Unit**	**65.000.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**50**	**Unit**	**65.000.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**367**	**Unit**	**300.000.000,00**	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	367	Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2**	**Unit**	**200.000.000,00**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2**	**Unit**	**200.000.000,00**	
	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**1.949.650.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**1.919.650.000,00**	
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	**87,5**	**Persen**	**4.190.690.081,00**			**Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan**	**87,5**	**Persen**	**10.730.000.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2**	**Kegiatan**	**450.000.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2**	**Kegiatan**	**450.000.000,00**	
7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**2**	**Laporan**	**150.000.000,00**	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**2**	**Laporan**	**200.000.000,00**	
	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00	
	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00	
7.01.02.2.01.02	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**1**	**Dokumen**	**300.000.000,00**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**1**	**Dokumen**	**250.000.000,00**	
	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	300.000.000,00	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000,00	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**2**	**Kegiatan**	**5.690.340.081,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**2**	**Kegiatan**	**12.199.650.000,00**	
7.01.02.2.04.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**	**4**	**Laporan**	**1.499.650.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**	**4**	**Laporan**	**1.469.650.000,00**	**30.000.000,00**
	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	800.000.000,00	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	800.000.000,00	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	529	Unit	449.650.000,00	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	529	Unit	449.650.000,00	
	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	12	Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	12	Laporan	70.000.000,00	
	Penanganan Darurat Bencana	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	150.000.000,00	Penanganan Darurat Bencana	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	150.000.000,00	
7.01.02.2.04.03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**193**	**Laporan**	**4.190.690.081,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**60**	**Laporan**	**10.730.000.000,00**	
	Lanjutan Pembuatan Drainase Parit Padat Karya RT. 18)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 18	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Lanjutan Pembuatan Drainase Parit Padat Karya RT. 18)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 18	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 1405225
	Peningkatan Jalan Nusantara Pole 1 RT. 1	Kelurahan Tama Pole RT. 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Peningkatan Jalan Nusantara Pole 1 RT. 1	Kelurahan Tama Pole RT. 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 1406314

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	Peningkatan Jalan Hasan Jagau RT. 3	Kelurahan Tama Pole RT. 3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	Peningkatan Jalan Hasan Jagau RT. 3	Kelurahan Tama Pole RT. 3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 1427015
	Lanjutan Parit Gang Kembar RT. 12	Kelurahan Dondang RT. 12	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Lanjutan Parit Gang Kembar RT. 12	Kelurahan Dondang RT. 12	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 1383058
	Pembuatan Drainase Gg. Julak RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8 Gg. Julak , Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	Pembuatan Drainase Gg. Julak RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8 Gg. Julak , Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2113465
	Peningkatan Badan Jalan (Lanjutan Semenisasi) Gg. Rukun RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.007 Jl. M. Hatta Gg.Rukun Handil 8, Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan (Lanjutan Semenisasi) Gg. Rukun RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.007 Jl. M. Hatta Gg.Rukun Handil 8, Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2112724
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Pepaya RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 28	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Pepaya RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 28	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2261653
	Lanjutan Pembuatan Parit Gang Kontrak Menuju Gang Bahagia RT. 29)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 29	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Lanjutan Pembuatan Parit Gang Kontrak Menuju Gang Bahagia RT. 29)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 29	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 1416972
	Perbaikan Tugu Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Perbaikan Tugu Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2281242
	Peningkatan Gang Pondok Timun RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	Peningkatan Gang Pondok Timun RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	
	Semenisasi cor beton jalan poros Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Semenisasi cor beton jalan poros Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2264411
	Peningkatan Jalan Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Peningkatan Jalan Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2282006
	Peningkatan Badan Jalan Gang Buntan Kel. Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gang Buntan Kel. Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2268448
	Pembuatan Drainase Gang Abimanyu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Pembuatan Drainase Gang Abimanyu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00	Musrenbang ID SIPD 2257338
	Usulan aspirasi Anggota DPRD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	179	Laporan	1.590.690.081,00	Pembangunan Turap (Pemasangan Batu) Gang Lumba Lumba RT. 003 Kel.Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (ID 1467984)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	120.000.000,00	Pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Gang Nusa Indah RT. 012 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa (ID 1468122)	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	220.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.001 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (ID 1469148)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	220.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (PENINGKATAN JALAN) GG. SEJAHTERA RT. 28 KELURAHAN MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1456894)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (PENINGKATAN JALAN) GANG. BAHAGIA RT. 11 KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457139)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan GANG. PUSBAN 1 RT. 03 MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457176)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan GANG. 17 AGUSTUS RT. 9 KELURAHAN MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457222)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan Turap Jalan Martadinata RT.07 ke RT.12 Kelurahan Muara jawa ilir, Kec.Muara Jawa (ID 1463428)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.017 HANDIL 9 KELURAHAN MUARA JAWA ILIR, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1463439)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.06 Kelurahan Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1464839)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) RT.06 Kelurahan Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1464919)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
							Pembangunan Turap Parit RT.01 Depan SD.005 Kel.Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1465017)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan ratu syifa rt 13 kel dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1465114)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jalan Imaman RT.15 Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kec. Muara Jawa (ID 1474156)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jalan Handil Petinggi Kelurahan Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1474196)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan Turap Gang Qiah Kel.Muara Jawa Ilir RT.20, Kec. Muara Jawa (ID 1318233)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan gg bungalang rt 24 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1342767)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan tahir rt 24 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1342911)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan m hatta, gang onthel, rt 18 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1371237)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan kelurahan muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1372685)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan kelurahan muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1376151)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan (pembuatan paret beton gang bersatu) rt 37 kel muara jawa ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1377544)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan (rehab jembatan wa sudong) jalan tahir rt 19 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1377629)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan (pembuatan jenbatan ulin) rt 07 kel Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1379709)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (semenisasi gang padaidi rt 15) kel Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1379788)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Normalisasi Saluran Drainase lingkungan (pemasangan turap batu rt 07) kel Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa (ID 1383472)	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (peningkatan jalan gang manunggal) rt 13 kel Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa (ID 1385139)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (peningkatan jalan gang Abadi) rt 10 kel Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa (ID 1385171)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan/Rehabilitasi balai pertemuan warga rt 02 jln muslimin rt 02 kel muara jawa pesisir, kec muara jawa (ID 1456904)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	170.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Toha RT.01 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482114)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan Turap (Parit Beton) Jalan Delima Gang Pusban RT.02 Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482120)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (Pengaspalan) Jl.ir. Soekarno Gang Nawawi Rt.15 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muar Jawa (ID 1482143)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							Pembangunan Turap Jl. Ir.Soekarno RT.19 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482156)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	100.000.000,00	pemenuhan infrastruktur dasar
							ID SIPD 2398341 - Peningkatan Jalan gg Qobilah Rt 32	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
							ID SIPD 2247678 - Pembuatan Jembatan kayu Gg Bule Rt 31 Muara Jawa	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2282670 - Pembuatan Jembatan Kayu Gg Udang Rt 4 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2279755 - Peningkatan Jalan Gg Harga Junior Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2246592 - Pembuatan Turap Gg Palem Rt 12 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2278491 - Peningkatan Badan jalan Gg Saliman Rt 29 Mjp	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2255003 - Lanjutan Pembuatan parit Beton antara Rt 16 & 20 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2254349 - Pembuatan Parit Beton gg Anyelir Rt 15 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2255530 - Normalisasi Parit antara parit Rt 16,27,20 Muara jawa pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2255109 - Peningkatan Badan Jalan gg swakarya Rt 21 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2291907 - Pembuatan Turap Beton halaman masjid Al Falah Rt 2Teluk Dalam	Kelurahan Teluk dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Teluk dalam
							ID SIPD 2288586 - Pembuatan Parit Beton Rt 01 Teluk Dalam	Kelurahan Teluk dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Teluk dalam
							ID SIPD 2268657 - Peningkatan Jalan Gg SMK Rt 23 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 1227964 - Normalisasi Drainase G Hebrida Rt 7 Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	175.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawailir
							ID SIPD 1228093 - Pembuatan Jembatan Gg STM Rt 14 Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Ulu
							ID SIPD 2254974 - Lanjutan Peningkatan Jalan Gg Rawa Indah Blok A	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2255509 - Pembersihan Badan Jalan Teluk ladang Rt 1 sd Rt 27	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 1229419 - Pembuatan Turap Gg Amah Rt 7 Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Kembang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
							ID SIPD 1226800 - Peningkatan adan Jalan Kelurahan Tamapole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Tama Pole
							ID SIPD 2255003 - Pembuatan Parir Gg Rawa Indah Rt 20 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 679042 - Pembuatan Drainase Gg Assalam Rt 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2398435 - Pemasangan Paving Pompes Darud Tahfitd Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2232575 - Pembuatan Turap Jln Mahakam Tengah Rt 3 Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Kembang
							ID SIPD 2247526 - Bantuan Sapras Kecamatan UMKM Keluran Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2247698 - Pembuatan Parit Gg Vetran Rt 28 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	185.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 2248079 - Pemasangan Pipa 4" PDAM Gg Rawa Indah Blok A Rt 20	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
							ID SIPD 1222713 - Pembuatan Parit Gg Haga Junior Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00	#PASCAPROVINSI Muara Jawa Pesisir
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**7.277.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**6.857.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**130.000.000,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**45**	**Lembaga masyarakat**	**160.000.000,00**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**40**	**Lembaga masyarakat**	**60.000.000,00**	
	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	
	Fasilitasi BUPATI CUP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga masyarakat	100.000.000,00	Fasilitasi BUPATI CUP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga masyarakat	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**0**	**Unit**	**-**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**1**	**Pokmas/Ormas**	**80.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**0**	**Pokmas/Ormas**	**-**	
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara JawaKelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	80.000.000,00	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara JawaKelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas/Ormas	-	
	Evaluasi Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**2**	**Laporan**	**100.000.000,00**	**Evaluasi Kelurahan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**2**	**Laporan**	**70.000.000,00**	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	75.000.000,00	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	45.000.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**402**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.937.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**403**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.727.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**400**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.737.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**401**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.627.000.000,00**	
	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	150.000.000,00	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	
	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	100.000.000,00	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	
	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	20.000.000,00	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	20.000.000,00	
	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148	Lembaga	3.907.200.000,00	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148	Lembaga	4.065.600.000,00	Penambahan jumlah RT menjadi 154

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	Operasional LPM Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	Operasional LPM Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	Nilai berubah bila terbit Perbup ttg pemberian honor bulanan bagi pengurus LPM
	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	555.000.000,00	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	393.600.000,00	
	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	
	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	111	Orang	666.000.000,00	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	111	Orang	666.000.000,00	
	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	55	Posyandu	223.800.000,00	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	56	Posyandu	227.400.000,00	Penambahan jumlah posyandu menjadi 56
	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Kegiatan	50.000.000,00	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Kegiatan	74.400.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-
	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	275	Orang	825.000.000,00	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	280	Orang	840.000.000,00	Penambahan jumlah kader posyandu menjadi 280
	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	
	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	30.000.000,00	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	30.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**2**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**200.000.000,00**	**Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**2**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**100.000.000,00**	
	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	Pelatihan bagi pengurus kelembagaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	Pelatihan bagi pengurus kelembagaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**100**	**Persen**	**175.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**100**	**Persen**	**125.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**Kegiatan**	**175.000.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**Kegiatan**	**125.000.000,00**	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**4**	**Kegiatan**	**175.000.000,00**	**Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**4**	**Kegiatan**	**125.000.000,00**	
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	3	Kegiatan	75.000.000,00	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	3	Kegiatan	75.000.000,00	
	Safari Ramadhan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	100.000.000,00	Safari Ramadhan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	50.000.000,00	Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan adalah Rp.150.000.000,- (makan minum kegiatan dan bingkisan Safari Ramadhan di 8 kelurahan/9 Lokus, Safari Ramadhan Tk. Kecamatan)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan Muara Jawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**532.701.502,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**255.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**532.701.502,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**255.000.000,00**	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**400**	**Orang**	**532.701.502,00**	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**400**	**Orang**	**180.000.000,00**	
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	532.701.502,00	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	180.000.000,00	Pagu anggaran yang dibutuhkan sesuai hasil rapat Pengurus LPTQ Kecamatan dengan Bidang Kesra dan Sekda per Kecamatan membutuhkan minimal Rp.500.000.000,- baik untuk MTQ Tk. Kecamatan maupun Tk. Kabupaten
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**0**	**Dokumen**	-	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**2**	**Dokumen**	**75.000.000,00**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25.000.000,00	
	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**				**2.100.000.000,00**	**KELURAHAN MUARA JAWA ILIR**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**				**1.940.004.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**130.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**74.004.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**63.180.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**43.794.000,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.150.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.150.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.590.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	**-**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.590.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**3.120.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.644.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.120.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.644.000,00	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**98**	**Laporan**	**38.320.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**46**	**Laporan**	**30.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Laporan	38.320.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**6**	**Unit**	**33.160.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**4**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**2**	**Unit**	**23.160.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	23.160.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**16.470.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**1.950.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.950.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**26**	**Unit**	**17.190.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**15**	**Unit**	**15.190.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**5**	**Unit**	**8.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**25**	**Unit**	**7.190.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**10**	**Unit**	**7.190.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	7.190.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	7.190.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.960.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.856.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**960.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**5**	**Lembaga**	**10.000.000,00**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**23**	**Lembaga**	**6.000.000,00**	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga	10.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**5**	**Unit**	**650.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**	
	Pembuatan Halaman Paving Blok Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Pembuatan Halaman Paving Blok Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2281934
	Pembuatan WC Umum Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	50.000.000,00	Pembuatan WC Umum Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	50.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2281821
	Pembangunan Gudang dan Gedung Arsip Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Pembangunan Gudang dan Gedung Arsip Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2281739
	Pembuatan badan Jalan RT.001 tembus RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Pembuatan badan Jalan RT.001 tembus RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2282154
	Pembangunan Turap Satu Sisi Sungai handil 9 RT.006 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200.000.000,00	Pembangunan Turap Satu Sisi Sungai handil 9 RT.006 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2087104
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**16**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**16**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.050.200,00	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.050.200,00	
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	5.180.000,00	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	5.180.000,00	
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	3.700.000,00	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	3.700.000,00	
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	16.769.200,00	PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	16.769.200,00	
	Pengadaan Mebelier Kelembagaan (PKK,LPM,Karang Taruna,Lembaga Adat,KPM)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	50.500.000,00	Pengadaan Mebelier Kelembagaan (PKK,LPM,Karang Taruna,Lembaga Adat,KPM)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	50.500.000,00	
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	18.525.300,00	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	18.525.300,00	
	Biaya Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda usia 16-30 tahun (babershop)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	9.815.300,00	Biaya Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda usia 16-30 tahun (babershop)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	9.815.300,00	
	Biaya Pelatihan UMKM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.550.000,00	Biaya Pelatihan UMKM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.550.000,00	
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	125.000.000,00	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	125.000.000,00	
	Honorarium PPTK	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OB	4.230.000,00	Honorarium PPTK	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OB	4.230.000,00	
	Honorarium PBJ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OP	680.000,00	Honorarium PBJ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OP	680.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**236**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**236**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**22**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	22	Lembaga/RT	1.100.000.000,00	Penambahan jumlah RT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah				1.890.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah				1.835.315.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Nilai	130.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Nilai	75.315.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	Layanan	66.780.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	Layanan	46.295.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.295.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.295.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**13.220.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**1.100.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**12.120.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.120.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**15.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**14.000.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**5.000.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**4.000.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.750.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.750.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**950.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	-	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	-	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**5**	**Unit**	**650.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**	
	Peningkatan Badan Jalan Gg.Pupuk RT.03 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gg.Pupuk RT.03 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2266330
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Ramania RT.017 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gg. Ramania RT.017 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2266341
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Sepakat RT.04 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gg. Sepakat RT.04 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2266343
	Pembuatan Parit Beton RT.20 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Pembuatan Parit Beton RT.20 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2266350
	Turap Parit Besar Jalan Ruhui Rahayu 2 Kelurahan Muara Jawa Tengah (DAU)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200.000.000,00	Turap Parit Besar Jalan Ruhui Rahayu 2 Kelurahan Muara Jawa Tengah (DAU)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2266357
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	1. Belanja Kegiatan PKK Kel.muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	19.779.500	1. Belanja Kegiatan PKK Kel.muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	19.779.500	
	2. Belanja Baju Seragam PKK Kel.Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	14.098.000	2. Belanja Baju Seragam PKK Kel.Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	14.098.000	
	3. Belanja Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	40.042.500	3. Belanja Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	40.042.500	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	4. Pelatihan Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.000.000	4. Pelatihan Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.000.000	
	5. Pelatihan dan Sertifikasi Basic Safety Training (BST)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	61.080.000	5. Pelatihan dan Sertifikasi Basic Safety Training (BST)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	61.080.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**16**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**800.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**16**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**800.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16	Lembaga/RT	800.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00	Penambahan jumlah RT
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	
	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**				**3.099.720.000,00**	**KELURAHAN MUARA JAWA ULU**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**				**2.884.520.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**83.720.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**68.520.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**49.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**39.000.000,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.000.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.000.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**2**	**Paket**	**9.000.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**2**	**Paket**	**9.000.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.000.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.000.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**27**	**Laporan**	**27.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**27**	**Laporan**	**27.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.720.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**1.200.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**27**	**Unit**	**19.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**	**14.500.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**4**	**Unit**	**8.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**26**	**Unit**	**9.000.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**10**	**Unit**	**6.500.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	9.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	6.500.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**3.006.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**2.806.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**956.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**50**	**Lembaga**	**6.000.000,00**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**50**	**Lembaga**	**6.000.000,00**	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**5**	**Unit**	**650.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**3**	**Unit**	**450.000.000,00**	
	Semenisasi Jalan Gg. Reformasi RT.13	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Semenisasi Jalan Gg. Reformasi RT.13	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2233566
	Seminisasi Gg Sukamto RT 34	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Seminisasi Gg Sukamto RT 34	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2233721
	Pembuatan Drainase Gg Masykur 4 RT 19	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Pembuatan Drainase Gg Masykur 4 RT 19	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2246230
	Semenisasi/perbaikan tembusan Gang Central RT.07	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Semenisasi/perbaikan tembusan Gang Central RT.07	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2265057
	Lanjutan semenisasi Gg Shalom RT.11	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Lanjutan semenisasi Gg Shalom RT.11	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2233523
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00	
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00	
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.400,00	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.400,00	
	Pelatihan Kepemudaan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	27.340.300,00	Pelatihan Kepemudaan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	27.340.300,00	
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00	
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.390.000,00	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.390.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**25**	**Orang**	**10.000.000,00**	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**25**	**Orang**	**10.000.000,00**	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**				**2.696.000.000,00**	**KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**				**2.437.290.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**130.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**77.290.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**68.360.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**45.450.000,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**13.000.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**15.902.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**12.492.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.902.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.492.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.958.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.958.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**35**	**Laporan**	**35.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**40**	**Laporan**	**30.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**2**	**Unit**	**29.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**2**	**Unit**	**29.000.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.820.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**1.300.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**16.820.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**16.820.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**6.820.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**6.820.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**2.556.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**2.350.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**956.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**36**	**Lembaga**	**6.000.000,00**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	**-**	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	Lembaga	6.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**5**	**Unit**	**650.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**	
	Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2233817

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2227914
	Peningkatan Jalan Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Peningkatan Jalan Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2231747
	Pembuatan Parit Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.000.000,00	Pembuatan Parit Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2233791
	Cor beton parit dari Gang H. Ramli menuju Parit induk jln Muslimin RT. 17 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200.000.000,00	Cor beton parit dari Gang H. Ramli menuju Parit induk jln Muslimin RT. 17 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 1425526
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**33**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**33**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	
	Partisipasi MTQ	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	Partisipasi MTQ	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas/Ormas	190.000.000,00	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas/Ormas	190.000.000,00	
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	45.000.000,00	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	45.000.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN TELUK DALAM	**Kelurahan Teluk Dalam**				**1.439.620.000,00**	**KELURAHAN TELUK DALAM**	**Kelurahan Teluk Dalam**				**1.182.120.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**121.620.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**66.120.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**44.700.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**32.700.000,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**12.000.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	**-**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**8**	**Paket**	**8.000.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**8.000.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**26**	**Laporan**	**21.700.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**27**	**Laporan**	**21.700.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	21.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	21.700.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**7**	**Unit**	**41.400.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**7**	**Unit**	**41.400.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	41.400.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**17.120.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**2.600.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**9**	**Unit**	**18.400.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**	**18.400.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**6**	**Unit**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**8**	**Unit**	**8.400.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**8**	**Unit**	**8.400.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.308.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.106.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**958.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**11**	**Lembaga**	**8.000.000,00**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**11**	**Lembaga**	**6.000.000,00**	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	8.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**8**	**Unit**	**650.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**6**	**Unit**	**450.000.000,00**	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.07	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.07	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2286601
	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.01	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.01	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2287114
	Lanjutan Pembuatan Parit beton Rt.04	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Lanjutan Pembuatan Parit beton Rt.04	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 1421720
	Turab Depan Mesjid Al- Fallah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Turab Depan Mesjid Al- Fallah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2288777
	Lanjutan Pembangunan langgar As-Salam Rt.06	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Lanjutan Pembangunan langgar As-Salam Rt.06	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 1427782
	pembuatan Parit beton Rt. 03	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	pembuatan Parit beton Rt. 03	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2292103
	Lanjutan Parit beton Rt.02	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Lanjutan Parit beton Rt.02	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2288404
	Lanjutan Turab beton Rt .05	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Lanjutan Turab beton Rt .05	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2295639
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00	
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00	
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00	
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.700,00	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.700,00	
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	72.730.000,00	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	72.730.000,00	
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00	
	HUT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	120.000.000,00	HUT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	120.000.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN DONDANG	Kelurahan Dondang				1.760.000.000,00	KELURAHAN DONDANG	Kelurahan Dondang				1.532.800.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dondang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	100.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dondang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	72.800.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Layanan	50.240.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Layanan	39.240.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	11.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	11.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.760.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.020.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	Unit	18.540.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	13	Unit	18.540.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	8.540.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	8.540.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Dondang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.650.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Dondang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.450.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	950.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	750.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	650.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	
	Lanjutan Pembuatan Parit kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Lanjutan Pembuatan Parit kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2034617
	Lanjutan Turap Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Lanjutan Turap Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2034762
	Pembuatan Pagar Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Pembuatan Pagar Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2035207
	Pembuatan cor beton Parit RT.010 Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200.000.000,00	Pembuatan cor beton Parit RT.010 Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2290352
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	
	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	40.000.000,00	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	40.000.000,00	
	Partisipasi MTQ	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Partisipasi MTQ	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	130.000.000,00	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	130.000.000,00	
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Dondang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Dondang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
	KELURAHAN TAMA POLE	**Kelurahan Tama Pole**				**1.015.000.000,00**	**KELURAHAN TAMA POLE**	**Kelurahan Tama Pole**				**988.420.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Tama Pole**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**125.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Tama Pole**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**78.420.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**65.480.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**45.400.000,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**12.990.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**12.990.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.900.000,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.900.000,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**3.000.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**3.000.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**42**	**Laporan**	**35.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**42**	**Laporan**	**30.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**5**	**Unit**	**25.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**5**	**Unit**	**25.000.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**16.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**2.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**19**	**Unit**	**18.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**17**	**Unit**	**18.000.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**4**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**6**	**Unit**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**15**	**Unit**	**8.000.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**11**	**Unit**	**8.000.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	8.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Tama Pole**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**880.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Tama Pole**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**900.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**730.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**	
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	**-**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	**-**	
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**5**	**Unit**	**430.000.000,00**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**	
	Peningkatan Jln Ketapi menuju jln Pole 2	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Peningkatan Jln Ketapi menuju jln Pole 2	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2112453
	Peningkatan jalan suka damai menuju jalan pole 3	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Peningkatan jalan suka damai menuju jalan pole 3	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2200750
	Peningkatan Badan Jalan danau Kering	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	130.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan danau Kering	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	130.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2222402
	Rehab Atap Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Rehab Atap Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2276147
	Peningkatan jalan Borboun	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200.000.000,00	Peningkatan jalan Borboun	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2306061
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**13**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**13**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**	
	Lomba desa	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00	Lomba desa	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00	
	HUT RI	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	HUT RI	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Pelatihan Perbaikan mesin perahu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Pelatihan Perbaikan mesin perahu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Pelatihan Pertukangan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	Pelatihan Pertukangan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Pelatihan Pembuatan perahu fiber	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Pelatihan Pembuatan perahu fiber	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Pelatihan Perbengkelan (motor)	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	35.000.000,00	Pelatihan Perbengkelan (motor)	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	35.000.000,00	
	Pelatihan Service perabotan rumah tangga	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	Pelatihan Service perabotan rumah tangga	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	
	Oprasional MTQ	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	Oprasional MTQ	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Pelatihan managemen pemasaran UMKM	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	Pelatihan managemen pemasaran UMKM	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Pelatihan budi daya ikan air tawar	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Pelatihan budi daya ikan air tawar	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Pelatihan pengolahan hasil laut	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	Pelatihan pengolahan hasil laut	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	
	Oprasional Pusyandu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00	Oprasional Pusyandu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00	
	Operasional PKK	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00	Operasional PKK	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**3**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**150.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**3**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**150.000.000,00**	
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**3**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**150.000.000,00**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**3**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**150.000.000,00**	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga/RT	150.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga/RT	150.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Tama Pole**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Tama Pole**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA KEMBANG	**Kelurahan Muara Kembang**				**1.841.000.000,00**	**KELURAHAN MUARA KEMBANG**	**Kelurahan Muara Kembang**				**1.585.298.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**121.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**69.298.500,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**64.880.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**39.278.500,00**	
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**4.000.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**4.000.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**14.400.000,00**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**12.403.000,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**6.201.500,00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.403.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	6.201.500,00	
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.077.000,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.077.000,00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**40**	**Laporan**	**32.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**40**	**Laporan**	**27.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	32.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	27.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**2**	**Unit**	**25.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**2**	**Unit**	**25.000.000,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**16.120.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**	
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**1.600.000,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00	
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**8**	**Unit**	**15.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**8**	**Unit**	**15.000.000,00**	
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**7**	**Unit**	**5.000.000,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**7**	**Unit**	**5.000.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Kembang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.710.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Kembang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.506.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	960.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	756.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	6.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	650.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	450.000.000,00	
	Pembagunan Jembatan RT.13 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Pembagunan Jembatan RT.13 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2229630
	Pembuatan Gorong-Gororng RT.14 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	Pembuatan Gorong-Gororng RT.14 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2229644
	Peningkatan Badan Jalan GG. Salasiah RT.10 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan GG. Salasiah RT.10 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2229668
	Peningkatan Badan Jalan GG . Handil Setia RT.15 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan GG . Handil Setia RT.15 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2229672
	Peningkatan Badan Jalan. Baharan RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan. Baharan RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.000.000,00	Musrenbang ID SIPD 2229702
	Pembuatan Gorong-Gororng RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.000.000,00	Pembuatan Gorong-Gororng RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	DAU. Musrenbang ID SIPD 2229731
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Kegiatan PKK Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Kegiatan PKK Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00	
	Pelatihan Pengolahan Makanan Bergizi	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	100.000.000,00	Pelatihan Pengolahan Makanan Bergizi	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	100.000.000,00	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	
	Pelatihan Supir Bagi Pemuda	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	40.000.000,00	Pelatihan Supir Bagi Pemuda	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	40.000.000,00	
	Pelatihan Desain Grafis	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	Pelatihan Desain Grafis	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	15	Lembaga Kemasyarakatan	750.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	15	Lembaga Kemasyarakatan	750.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Kembang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Kembang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musrenbang kelurahan. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musrenbang Kecamatan secara partisipatif. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada PD yang berwenang sebagai dasar penyusunan RKPD pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa dokumen rencana pembangunan kecamatan serta masukan untuk Rencana Kerja Kecamatan.

Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, sebagaimana Tabel T.C-32

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
1	Alat Panen Tanaman Perkebunan (Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Lada)	Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347277 Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
2	Alat Pemeliharaan Perkebunan (Handsprayer, Chainsaw, Mesin Pemotong Rumput)	RT. 016 Jl.Maju Sejahtera Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346914 Pengadaan pupuk Mutiara Kelompok Tani Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
3		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266159 Pengadaan Hand Sprayer Elektrik #OPD: Dinas Perkebunan
4	Bantuan Belanja Hibah Untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah	RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285175 Lanjutan Pembangunan Mushola RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
5		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277689 Rehab Menara Masjid Bitaqwa Kel. Tama Pole #OPD: Sekretariat Daerah
6		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277641 Rehap atap rumah kaum masjid Bittaqwa Kel. Tama Pole #OPD: Sekretariat Daerah
7		Jalan Diponegoro RT.006 Kel. Dondang Lat 0.525044, Long. 9912981 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2230375 Pembangunan Renovasi Langgar Al Kautsar Kelurahan Dondang Pembangunan Renovasi Masjid Al Kautsar RT.06 Kelurahan Dondang + rumah Imam Masjid #OPD: Sekretariat Daerah
8		Jalan Ahmad Sifa Rt.13 Kel. Dondang Lat 0.773134, Long 117.228729 P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2230342 Belum adanya Mushola untuk kantor kelurahan dondang (Pembangunan Mushola Al-Istiqomah Kantor Kelurahan Dondang) #OPD: Sekretariat Daerah
9		Handil 2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2235603 Lanjutan Pembangunan Mesjid Besar Darussalam Kecamatan Muara Jawa #OPD: Sekretariat Daerah
10		Jalan Pelita RT.04 Kel Dondang Lat 0.792700, Long 117.228095 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2230179 perlu adanya perbaikan dan penataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Rehap Berat langgar Nur'Ain #OPD: Sekretariat Daerah
11		Jalan Air panas RT.003 Kelurahan Dondang Lat.0.77722° - Long. 117.23474° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2225536 perlu adanya perbaikan dan penataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Rehap langgar AN'Nur #OPD: Sekretariat Daerah
12		Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah/Mushola Darul Amin RT.5 Kelurahan Muara Jawa Tengah (X =524346 Y =9905911) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304923 Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Ibadah #OPD: Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
13		Jalan Mahakam Ulu RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229759 Atap Mushola AT-TAQWA RT.0 ulus bangunan 12 x 6 banyak yang rusak sehingga menyebabkan kebocoran #OPD: Sekretariat Daerah
14		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284479 Pembuatan Pintu Besi Mesjid Ijabturahman Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
15		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291816 Kondisi atap Mushola rusak/bocor (Rehab atab Mushola As-salam Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Sekretariat Daerah
16		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291907 Kondisi Masjid saat belum memiliki Gapura (Pembuatan Gapura Masjid Al-Fallah Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Sekretariat Daerah
17		RT.13 Gang Mulyo Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat0.828246, Long 117.234959, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2248117 Pembangunan Langgar Gang Mulyo Darrul Muttaqin RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Sekretariat Daerah
18		JL JALUR RT 25, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259963 Renovasi atap Mushollah Babussalam Jl Jalur #OPD: Sekretariat Daerah
19		Jl. Husni Tamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264151 Bangunan Mesjid Nursa' adah banyak rusak sehingga perlu dibangun baru #OPD: Sekretariat Daerah
20		Jalan handil Sulawesi RT.04, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264213 Bangunan Mushola Darul Iman mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki #OPD: Sekretariat Daerah
21		Muara Ulu Besart RT.13, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264250 Bangunan Mushola Muara Ulu Besar RT.13 belum selesai sehingga perlu dilanjutak pembangunannya #OPD: Sekretariat Daerah
22		Jalan Karya Bersama RT.09, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264276 Musholah Al Azhar belum selesai sehingga perlu dilanjutkan kembali pembangunannya #OPD: Sekretariat Daerah
23		Handil 2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268366 Pembangunan gedung Gereja Toraja Filadelfia Handil 2 #OPD: Sekretariat Daerah
24		RT 25, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267863 Pembangunan Sekertariat KKNTT Kec Muara Jawa #OPD: Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
25		Jl. M. Hatta RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir/0.506324, 117.1345918 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268588 Kondisi Mushola saat ini membutuhkan rehab dinding dan atap, (Pemeliharaan/ Rehab Mushola Al-Mubaroq RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Sekretariat Daerah
26		Kel. Muara Jawa Ilir RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281398 Pembangunan Menara Masjid Al-Mutaqin Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
27		HANDIL, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272220 Renovasi Rumah Ibadah Gereja Bethany #OPD: Sekretariat Daerah
28		HANDIL 2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272256 Renovasi Lanjutan Gereja Oikoumene Handil 2 MJU #OPD: Sekretariat Daerah
29		RT.009 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346838 Rehab Langgar Al- Amin RT.009 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
30		RT.012 Jl. M. Hatta Handil 8 Gg. Veteran, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2339714 Lanjutan Pembangunan Mushola RT.012 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
31		Jl. Teluk Ladang Gang Muslim RT.032 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2369252 Belum tersedianya kamus belanja untuk pengadaan Multimedia Majelis Ta'lim (Pengadaan Alat Multimedia Majelis Ta'lim Raudhatut Thalibin) #OPD: Sekretariat Daerah
32	Belanja Bantuan Hibah untuk Operasional Pondok Pesantren	RT 21, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267718 Pengadaan Perlengkapan Media Broadcast Majelis Muhyin Nufuus RT 21 #OPD: Sekretariat Daerah
33	Belanja Bantuan Hibah untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Pondok Pesantren	Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2244376 Pembangunan Pondok Pesantren Darul Wafa Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
34		Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8 RT.004, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347112 Pembuatan Gedung Kantor TK RA RT.004 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
35		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283529 Pembangunan Gedung Madrasah RT.006 Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah
36		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283515 Rehab Madrasah Tarbiatul Atfal Handil 8 RT.011 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
37		RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2311320 Perlu Penambahan Ruang Baru (Pengadaan Bahan Bangunan Pondok Pesantrena AL-ISLAMI DAARUL QUR'AN WATTARBIYYAH Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Sekretariat Daerah
38		Rt 32 Kelurahan muara Jawa pesisir Lat 0.83635, Long 117.23476, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2398435 Halaman Becek (Pemasangan paping Ponpes daruttahfidz Rt 32 Kelurahan muara Jawa pesisir) #OPD: Sekretariat Daerah
39	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282178 Drainase Parit Sepanjang Jalan A. Yani #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40		RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.837586 , Long 117.228277, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284251 Parit Buntu Membuat aliran air tidak lancar dan membuat banjir (Pembuatan Parit Beton Gg. H. Ramli RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41		Jl. Tahir RT.24, Lat 0.8346, Long 117.247506 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270376 Kondisi drainase/parit sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Turap Parit Perbatasan RT.24 dan RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42		RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.81752 , Long 117.232241, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321427 Parit Belum Di Cor (Cor beton parit induk jln Muslimin RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
43		Jl. M. Hatta RT. 016 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306142 Pembuatan DRAINASE GG JULAK RT 16 Handil 8 muara jawa ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
44		RT.03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296265 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan parit beton Gang Famili Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45		RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346800 Pembuatan Drainase Jl. Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46		RT.017 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284943 Pembuatan parit Beton RT.017 Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
47		Jl. M. Hatta Gang Onthel RT. 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°50'37"S Long 117°13'33"E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272998 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Cor Beton Parit dari Gang Ketapi s/d gang Onthel RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48		Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.826976°, Long 117.236898°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246484 Aliran Air Tidak Lancar (Cor beton Parit Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
49		Jl. Teluk Ladang Gang As- Salam RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0.836513, 117.235524 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279479 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Cor beton Parit Gang As-Salam RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
50		Jl. Delima Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282237 Drainase Parit Gang Abimanyu Kel. Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
51		RT. 01 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2310434 Belum adanya Parit Sekolah Pembuatan Parit SDN 005 Dondang #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52		Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321803 Cor beton parit Jalan Teluk Ladang Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
53		RT. 06 kelurahan Dondang Lat 0.78742, Long 117.22504 p.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256830 Parit dikala hujan akan terjadi banjir karena buntunya saluran paret Pembuatan Draenase Langgar AL- Kautsyar RT.06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54		RT. 10 kelurahan Dondang lat 0.776476, long 117.231252 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290352 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Pembuatan Parit gang Ibrahim RT.10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55		Jl. Ir. Soekarno RT. 012 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306011 Lanjutan Pembuatan Drainase Parit Padat Karya Kelurahan Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
56		Jl. Ir. Sokaerno RT. 029 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306043 Lanjutan pembuatan parit gang kontrak menuju gang bahagia #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
57		Gg kontrak RT 29 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266288 Pembuatan drainase parit sambungan gg kontrak RT 29 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
58		RT 11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266141 Pembuatan Parit Gg Baru RT 11 Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
59		RT 18 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266303 Normalisasi PARIT PADAT KARYA RT 18 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
60		RT. 02 & 03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288559 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Batas Rt. 02 & 03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
61		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296773 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit beton Belakang masjid Kelurahan Teluk Dalam0 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
62		Rt.06 Kel.Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296848 Kondisi sisi jalan tergerus air pada saat hujan (Turab Beton Rt.06 Kel.Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
63		RT,03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292103 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Rt,03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
64		Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295639 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Drainase Beton Rt/05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
65		RT.01 Kelurahan Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291865 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit beton Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
66		Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296529 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Parit beton jalan Pelita Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
67		RT.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301488 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Lanjutan Drainase Jalan RT.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
68		Rt.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288623 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Rt.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
69		RT.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288586 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit beton RT.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
70		RT.02 dan RT.03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301453 Kondisi parit kurang memadai sehingga dapat tergerus air saat musim hujan (Peningkatan Parit Sisi Jalan Poros RT.02 & 3 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
71		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301568 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Pinggir Jalan Poros RT.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
72		RT.04 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287240 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Lanjutan Pembuatan Paret Beton RT.04 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
73		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301603 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Sisi Jalan KaryaT.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
74		Rt.02 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288404 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (pembuatan Parit beton Rt.02 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
75		Rt.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287275 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Rt.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
76		RT,05 Kelurahan Teluk Dalam), Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287263 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton Rt,05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
77		Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287250 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Drainase Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
78		RT.02/03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301685 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Beton batas RT.02/03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
79		Jalan Handil Buhari RT.02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274378 Lokasi Kuburan Muslimin Muara Kembang mengalami abrasi, karena terletak dipinggir sungai mahakam #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
80		GG. anggrek RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264783 Pembuatan saluran air gg. anggrek RT.08 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
81		Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284169 Parit Buntu Membuat Aliran Air Tidak Lancar (Normalisasi Parit Sepanjang jalan A.Yani Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
82		RT. 13 kelurahan Dondang lat 0.776476, long 117.231252 P.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256853 Belum adanya Parit pembuangan, air tergenang dan merendam lingkungan warga Pembuatan Parit Gang Saudara Rt 13 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
83		RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.827328°, Long 117.237643°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246495 Alirfan Air Tidak lancar (Cor beton Parit Perbatasan Gang Nusa Indah dan Gang Persatuan RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
84		RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.828576°, Long 117.237222°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246548 Aliran air tidak lancar (Cor beton Parit Perbatasan Gang Nusa Indah dan Gang Mawar Indah RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
85		Gg Palem Rt 12 Kelurahan Muara Jawa PesisirLat 0.82683, Long 117.23681, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246592 Aliran Air Tidak Lancar (Pembuatan Turap Gg Palem Rt 12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
86		Rt 16 dan Rt 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83497,Long 117.23445, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246625 Aliran Air Tidak Lancar (Lanjutan Pembuatan Parit antara Rt 16 dan Rt 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
87		Gg Vetran Rt 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.84286, Long 117.224374, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247698 Parit Longsor dan Membuat aliran air tidak lancar (Pembuatan Parit Gg Vetran Rt 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
88		RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.828422, Long 117.23524, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2248536 Aliran air tidak lancar (Cor Beton Parit Antara gg mulyo dan gg mulyo blok A RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
89		RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.827816 , Long 117.235525, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2248586 Jalan Masih Perlu Perbaikan (Peningkatan jalan gg darmo RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
90		Gang anyelir RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.832512, Long 117.234098, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254349 Belum Tersedia Parit Sehingga Aliran Air Tidah lancar (Cor Beton parit Gang anyelir RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
91		Gang Alqudus RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.831855, Long 117.234075, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254438 Parit belum di cor beton (Cor beton parit Gang Alqudus RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
92		S Gg. Rawa Indah Blok A. RT. 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.8331 , Long 117.235028, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255003 Aliran air tidak lancar (Semenisasi Parit Gg. Rawa Indah Blok A. RT. 20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
93		RT.21 dan RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255217 Parit Perbatasan (Drainase Parit Antara RT.21 dan RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
94		Rt 27 dan Rt 16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83578, Long 117.23282, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255530 Aliran Air Tidak Lancar (Normalisasi Parit Antara Rt 27 dan Rt 16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
95		Jl.A.Yani Gang Al-hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.827841°, Long 117.246233° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266617 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Cor Beton Parit dari blok 2 gang alhikmah menuju parit induk jalan A. Yani Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
96		, Jl. A. Yani Gang Al-Hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,Lat-0.828047°, Long 117.246768°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266653 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Cor Beton Parit dari blok 4 gang alhikmah menuju gang josch RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
97		Jl. A.Yani RT.09 Gang Al Hikmah Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.828013°, Long 117.247313° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266672 Kondisi Drainase/Parit sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Parit dranaise gang Josh menuju parit induk PHM RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
98		Jl. A. Yani Gang Al-Hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat-0.827611°,Long 117.247518° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266959 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Parit Drainase Dari Gang Alqodiri Menuju Parit Induk JL.A.Yani RT 09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
99		Gang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,0°49'37"S 117°14'03"E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267230 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar(Pembuatan Parit Gang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
100		Jl. Teluk Ladang Gang SMK RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir/0°50'05"S 117°13'47"E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267735 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Semenisasi parit Gang Nol Ke Gang SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
101		Jl. Teluk Ladang Gang SMK RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0°50'10"S 117°13'46"E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267910 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Semenisasi Parit Gang Emel ke Gang SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
102		Jl. Tahir Gang Ketapang ke GangBungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.834921, Long 117.245108 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270227 Kondisi drainase/parit sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Cor Beton Parit Perbatasan gang Ketapang dan gang Bungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
103		Gang Wahyu s/d Gang Anugerah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.832732, 117.232042 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272479 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Rehab Parit Beton Gang Wahyu s/d Gang Anugerah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
104		Jl. Tahir Gang Jasa Bakti RT. 30 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.830311 Long 177.249034, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278918 Kondisi drainase sebagian tertutup tanah dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Gang Jasa Bakti RT. 30 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
105		Gang Langgar dan Gang Restu RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.829985 Long 117.247395, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279395 Kondisi drainase sebagian tertutup lumpur dan rumput, sehingga aliran airnya tidak lancar (Pembuatan Parit Antara Gg. Langgar dan Gg.Restu RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
106		Blok 2 RT.10 gang Al-Hikmah Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283242 Parit Belum ada (Cor Beton Parit Blok 2 RT.10 gang Al-Hikmah Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
107		blok 3 dan 5 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.827956, Long 117.244828, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283292 Parit belum ada (Pembuatan parit antara blok 3 dan 5 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
108		RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.82947,Long 117.245667, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283313 Parit Belum ada (Pembuatan parit antara blok 8 dan 10 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
109		RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.829048, Long 117.245283, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283344 Parit Belum ada (Pembuatan parit antara blok 9 dan 7 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
110		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.836513, Long 117.235524, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283959 Parit Longsor dan Membuat Aliran air tidak lancar (Cor beton Parit Gang As-Salam RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
111		Pembuatan Parit Beton RT.20 (-0,8576543 117,2224375) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266350 Tidak ada Parit #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
112		Turap Parit Besar Jalan Ruhui Rahayu 2 (-0.860462 117.215546°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266357 Tidak ada Turap #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
113		Peningkatan Parit Beton Belakang SD.011 RT.01 Kel.Muara Jawa Tengah (524627.73 - 9906313.92) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266842 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
114		Pembuatan Parit Gg.Pasar RT.05 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271534 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
115		Penutupan Atas Parit Gg.Pasar RT.05 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272693 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
116		Pembuatan Saluran Drainase Gg.Nangka P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274288 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
117		Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gg.Ruhui Rahayu RT.08 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275438 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
118		Peningkatan Parit Beton Gg.Ruhui Rahayu 2 RT.08 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275499 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
119		Peningkatan Drainase Sindang Jaya RT.09 Kel.Muara Jawa Tengah (0.848134° 117.193257°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276270 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
120		Pembuatan Turap Jalan Sindang Jaya RT.09 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276378 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
121		Perbaikan Gorong-gorong RT.11 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277212 Kondisi Gorong-gorong Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
122		Peningkatan Drainase Parit Sindang Jaya RT.12 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278342 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
123		Turap Parit Besar Sindang Jaya RT.12 Kel.Muara Jawa Tengah P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279936 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
124		Peningkatan Drainase Parit Gg.Kuburan Sindang Jaya RT.12 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279976 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
125		Drainase Gang Sekumpul RT.13 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280054 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
126		Drainase Gang RT.13 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280080 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
127		Turap Parit Besar depan Mushola RT.13 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280104 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
128		Pembuatan Turap Jalan Darul Ilmi RT.13 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280232 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
129		Pembuatan Parit RT.14 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280296 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
130		Peningkatan Parit Beton Gg.Darma RT.16 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291244 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
131		Peningkatan Parit Beton Gg.PLN RT.16 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291248 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
132		Peningkatan Parit Beton RT.18 Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291631 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
133		Peningkatan Parit Beton RT.19 Kel.Muara Jawa Tengah (0.861172° 117.213715°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291698 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
134		Peningkatan Parit Beton Gg.Sejahtera RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292351 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
135		Penurapan Sungai Jl.Darusalam P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292435 Kondisi Turap Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
136		Turap Sungai Jalan Darul Amin Handil 5 RT.03 (Titik Koordinat : X =524346 Y =9905911) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308194 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
137		Turap Sungai Jalan Darussalam Handil 6 (X =525091 Y =9905309) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308208 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
138		Gg Masykur 4 RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246230 Pembuatan Drainase Gg Masykur 4 RT 19 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
139		Jln Damai Kalitan RT 02 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256772 Pembuatan Parit Jln Damai Kalitan RT 02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
140		Jalan Delima, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266129 Peninggian Parit Beton Kanan Kiri Jalan Tingkat Dua di Jalan Delima Kel Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
141		Gang Bersatu RT.003 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266172 Pembuatan Parit Beton Gang Bersatu RT.003 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
142		RT 33, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266153 Pembangunan Drainase jl. Soekarno hatta dari RT. 33 & 18 tembus ke Sungai Galendrong #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
143		Gg Pusban 1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266170 Pembuatan Gorong2 Gg Pusban 1 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
144		RT 06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266178 Sambungan Parit ke aliran pintu air RT 06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
145		Gang Swadaya RT 06 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266181 Pembuatan parit rumah tangga Gang Swadaya RT 06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
146		Gg Swadaya RT 06 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266186 Peninggian parit Gg Swadaya RT 06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
147		Gang Merpati RT 07 MJU , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266190 Pembuatan paret Gang Merpati RT 07 MJU #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
148		Gang Kasmir RT 07 MJU. , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266193 Perbaikan paret Gang Kasmir RT 07 MJU. #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
149		Gang Central RT 07 MJU , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266196 Pembuatan paret Gang Central RT 07 MJU #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
150		Gang 17 blok 3 RT 09 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266198 Parit Gang 17 blok 3 RT 09 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
151		RT 08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266201 Parit Gang Melati Menuju Gg Anggrek #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
152		Gg. DDI Sebelah barat RT. 010 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266207 Pembuatan Parit Gg. DDI Sebelah barat RT. 010 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
153		RT 10, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266213 Pembuatan Parit Jl, Darussalam RT.10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
154		RT 11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266217 Semenisasi parit Gg Baru RT.11 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
155		Gg Suri , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266221 Pembuatan parit Gg Suri #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
156		GG. Reformasi.RT.13 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266225 Drainase GG. Reformasi.RT.13 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
157		Gg Putri RT 14 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266228 Pembuatan Parit Gg Putri RT 14 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
158		Gg STM RT 14 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266236 Pembuatan Parit Gg STM RT 14 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
159		Gg Sumber Air RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266239 Pembuatan Drainase Gg Sumber Air RT 19 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
160		Gg Masykur RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266242 Pembuatan Drainase Gg Masykur RT 19 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
161		RT 20, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266247 Pembuatan parit/drainase RT. 20 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
162		RT 20, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266250 Lanjutan parit/drainase GG. Rahmad RT.20 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
163		Gg. Husni RT.22 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266269 Pembuatan Parit Gg. Husni RT.22 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
164		Jalan M.Hatta RT.21 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266254 Lanjutan Pembuatan Parit Jalan M.Hatta RT.21 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
165		RT 22, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266261 Pembuatan Paret Samping Gg. Pandawa dan tutup Menhol RT.22 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
166		Gunung Butun RT.22 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266273 Pembangunan Parit Gunung Butun RT.22 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
167		RT 23, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266278 Pembuatan Drainase RT 23 Perbatasan Muara Jawa Ulu dan Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
168		RT 24, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266280 Pembuatan Drainase RT .24 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
169		Gg Palakka RT 26 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266285 Pembuatan Parit Kiri Kanan Gg Palakka RT 26 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
170		Gg Palakka 2 RT 27 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266287 Pembuatan Parit Gg Palakka 2 RT 27 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
171		Gg. Benua RT. 30 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266291 Lanjutan Pembuatan Parit Gg. Benua RT. 30 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
172		Jl Damai RT. 30 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266295 Lanjutan Pembuatan Parit Beton Jl Damai RT. 30 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
173		RT 35 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266297 Lanjutan Pembuatan drainase gang bersama s/d gang elektro RT 35 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
174		Gang Bersatu Blok E lanjutan RT.37 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266299 Drainase Gang Bersatu Blok E lanjutan RT.37 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
175		Gang RAHMAH RT.38 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266300 Lanjutan Pembuatan DRAINASE Gang RAHMAH RT.38 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
176		Jalan A Yani , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266306 Normalisasi Drainase Jalan A.Yani #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
177		Gang Pandawa Blok A RT 41 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266310 Pembuatan Parit Gang Pandawa Blok A RT 41 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
178		Jalan Jalur, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266307 Pembangunan Drainase Jalur Pipeline dari Jalur tembus ke Drainase PHM #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
179		RT 40, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266309 Pembuatan Parit Beton dan Pemasangan Gorong2 Jl Silambanan RT 40 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
180		JL DAMAI RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271926 Lanjutan Pembuatan Parit Beton Jl Damai RT. 30 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
181		GG MELATI, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272138 Parit Gang Melati Menuju Gg Anggrek #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
182		Gg Merpati.RT 06 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266175 Peninggian parit Gg Merpati.RT 06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
183		Gg Al Mukarramah RT 23 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266275 Pembuatan Drainase Gg Al Mukarramah RT 23 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
184		RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271888 Lanjutan Pembuatan Parit Gg. Benua RT. 30 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
185		RT.006 Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270776 Pembangunan Turap Ulin Sungai handil 9 RT.006 Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
186		RT.002 Jl. Martadinata Gg. palem Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271263 Pembuatan Parit Beton Belakang Gg. Palem RT. 002 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
187		RT.002 Jl. Martadinata Gg. Mahkota Dewa Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271456 Pembuatan Parit Beton Belakang Gg. Mahkota Dewa RT. 002 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
188		HANDIL 3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272937 Pembuatan Parit Kuburan Handil 3 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
189		RT.018 Jl. Martadinata Gg.Keramat Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2049506 Pembuatan Parit Beton Gg. Keramat RT.018 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
190		RT.016 Jl. M. Hatta JHandil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086367 Pembuatan Drainase Paret lanjutan Bawah Jembatan RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
191		RT.010 Jl. Martadinata Gg. Cempaka Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2294247 Pembuatan Parit Beton Gg. Cempaka RT. 010 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
192		RT.018 Jl. Martadinata Gg.Melati Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280741 Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gg. Melati RT.018 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
193		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281105 Pembuatan Talud Jl. Sukarelaewan RT.006 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
194		Jl. M. Hatta handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284496 Pembuatan Drainase di lingkungan kantor lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
195		Peningkatan Parit Beton Handil Gembira RT.20 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291892 Kondisi Parit Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
196		RT.004 Handil 8 Kampung Jawa, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347227 Pembuatan Parit Jl. Martadinata Kampung Jawa RT.004 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
197	Fasilitasi Pelatihan Olahan Pangan dan Sertifikasi Halal Bagi IKM	GUNUNG PASIR, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270867 Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif untuk Promosi Media Online #OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
198	Fasilitasi Pemasangan Tapal batas desa (Patok, Gapura)	Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295379 Saas ini belum memiliki Gapura yang memadai (Pembuatan Gapura SDN.004 Muara Jawa) #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
199		Rt.04 Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295933 Pelestarian budaya Nusantara (Pembuatan Lamin Pasukan Merah Mahkota Tatau Rt.04 Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
200		Jalan Pelita RT.001 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2224188 Belum adanya Gapura Sekolah (pembuatan Gapura SDN 005 Dondang) #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
201		Jalan Dondang Tama PoleLat 0.777047, Long 117.237780 P.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256013 Belum adanya Tugu Perbatasan antara Kelurahan Dondang dan kelurahan Tama Pole #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
202	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT.011 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2244023 Pembangunan Posyandu Baronang Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
203		RT.020 Jl. Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2244090 Pembangunan Posyandu Belanak Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
204		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2220964 Pembangunan Pagar Posyandu kakap Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
205		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2222324 Pengadaan Meubeler Posyandu Lansia #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
206		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221050 Pengadaan Kilometer Lampu Posyandu Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
207		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221081 Pengurukan Halaman Belakang Posyandu Kakap Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
208		RT. 06 kelurahan Dondang lat 0.787165, Long 117.225975 P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246733 Belum adanya Fasilitas Puskesmas Pembantu yang memadai bagi masuarakat agar kalau berobat tidak jauh Puskesmas Pembantu Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
209		RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246396 belum memiliki bangunan (Pembangunan Gedung Posyandu bandeng 2 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
210		Jalan M. Hatta RT. 028 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347309 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan posyandu Bandeng 2 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
211		RT 36, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270457 Rehab pagar dan lantai beton posyandu patin jalur RT.36 #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
212		RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2315918 Pembangunan PUSBAN di RT 30 MJU #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
213		Kel. Muara Jawa Ilir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347456 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu (Posyandu Belanak,Tenggiri,Pesut dan baronang) Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
214		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347668 Pengadaan peralatan Makan PMT Posyandu Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
215	Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/ Nomor Induk Berusaha)	Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277925 Bantuan Sarana Dan Prasarana Kecamatan UMKM Kelurahan tama Pole #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
216		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277984 Pelatihan Pengolahan Hasil Laut (UMKM) #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
217	Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)	Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246528 Fasilitsai Pembuatan Sertifikat Halaj dan PIRT Bagi Pelaku Usaha Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
218		Sarana dan Prasarana pendukung UMKM Kelurahan Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2305550 Kurangnya Sarana Pendukung Pelaku Usaha UMKM #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
219	Fasilitasi Promosi Produk UMKM	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2222837 Pelatihan Pengolahan Hasil Laut (UMKM) Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
220		Jalan Masid RT.002 Kelurahan Dondang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2338799 Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi Bantuan Sarana dan Prasarana Kecamatan Muara Jawa Untuk UMKM Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
221		Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246518 Belum memiliki Pasilitas Tersebut (Pengadaan Tenda Kerucut Bagi UMKM Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
222		Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247526 Bantuan sarana Prasaran kecamatan UMKM Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
223		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283899 Pengadaan Sarana Prasarana Kecamatan UMKM Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
224	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221764 Pengadaan Pupuk NPK (Petani RT.1) #OPD: Dinas Perkebunan
225		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272289 Pengadaan Pupuk NPK #OPD: Dinas Perkebunan
226		KWT Nauli dan Keluarga Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272488 Bantuan Penanaman Lombok di Polybag #OPD: Dinas Perkebunan
227		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272338 Pengadaan Pupuk POC #OPD: Dinas Perkebunan
228		RT. 001 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285206 Pengadaan Pupuk dan Saprodi Kelompok Tani Gunung Pelita Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
229	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272578 Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah RT. 30 #OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
230	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Jawa)	Gang Bahagia RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.834526, Long 117.245155 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228210 Sering terjadi banjir saat hujan karn aliran air tisak lancar (Pembuatan parit Gang Bahagia RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
231		Jalan Ahmad Syifa Rt.13 lat. 0.772947° - long 117.228593° P.1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2034617 Air Selalu Meluap Ke halaman Kantor Lurah dan mengikis halaman yang sudah di timbun/uruk Lanjutan Pembuatan Parit kantor Kelurahan Dondang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
232		Gang Bintang RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.833532, Long 117.249026, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228183 Aliran air tidak lancar (Pembuatan parit Gang Bintang RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
233		Jl. Muslimin RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.833846, Long 117.248955 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228196 Aliran air tidak lancar dan sering terjadi banjir saat hujan (Cor Beton parit Jl. Muslimin RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
234		Gg. Padaidi tembus Gg. Bosowa RT 03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.832775, Long 117.249221 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228268 Aliran air tidak lancar (Normalisasi Parit Gg. Padaidi tembus Gg. Bosowa RT 03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
235		Gang Jumran RT.04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.831214, Long 117.248662 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228324 Parit belum tersedia (cor Beton parit Gang Jumran RT.04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
236		Gg. Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231783 Aliran air tidak lancar (Semenisasi Parit Beton Gg. Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
237		RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.4947 ,Long 117.1450525, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231800 Aliran Air tidak lancar (Semenisasi Parit PHM RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
238		Gang Merak RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.82916, Long 117.248175, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231842 Belum ada Parit (Pembuatan parit beton Gang Merak RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
239		Gang Camar RT.06 Kelurahan Muara Jawa PesisirLat 0.828719, Long 117.250128, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231849 belum ada parit (Pembuatan Parit Beton Gang Camar RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
240		RT.004 Jl. Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2044636 Pembuatan Drainase Jl. Pelita Handil 8 RT.004 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
241		RT. 004 Jl. Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2044795 Pembuatan Drainase RA Nurul Hikmah Handil 8 RT.004 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
242		RT.014 Jl. Pelita Gg.Geria Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086966 Pembuatan Drainase Gg. Ceria RT. 014 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
243		RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8 Gg. Julak , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2113465 Pembuatan Drainase Gg. Julak RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
244	Normalisasi Sungai di Kawasan Pertanian	kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306163 Normalisasi Parit Jalan Hasan J kel. tama pole (P2) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
245		rt 03 kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306018 Normalisasi Parit Jalan Pole 1 kelurahan tama pole (P2) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
246	Pelatihan Akuntansi Koperasi	jalan Ahmad Sifa RT 13 Kelurahan Dondang Lat .0.7731255° , Long 117.2287015° p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2326409 pelatihan Pengurus Koprasi kelurahan Doindang Pelatihan Administrasi Pengurus Koprasi kelurahan Dondang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
247	Pelatihan Kelompok Tani (Padi, Jagung, Sayur-sayuran, Buah-buahan & Peternakan)	RT.03 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277873 Pelatihan Budidaya ikan di Kelompok yang ada di Kelurahan Muara Kembang #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
248		Jl. Mahakam Ilir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278030 Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan Ikan bagi kelompok nelayan dimuara kembang #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
249		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270506 Pelatihan Dinamika Kelompok Tani #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
250		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270596 Pelatihan Pembuatan Jamur Trico Derma #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
251		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270738 Pelatihan Pembuatan POC Tinggi Nutrisi #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
252		Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270787 Pelatihan Pengendalian H & Penyakit Tanaman secara terpadu #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
253	Pelatihan Keselamatan dan Keamanan Pada Objek Wisata Alam Bagi POKDARWIS	Muara pegah RT.11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270921 Wisata Kampung Pelangi di RT. 11 Muara Pegah #OPD: Dinas Pariwisata
254	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda usia 16-30 tahun - perbengkelan, sablon, barista, babershop, laundry	Jl. Mahakam Ilir RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276185 Masih minimnya keahlian pemuda pemuda yang ada di Kelurahan Muara Kembang sehingga perlu adanya pelatihan. #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
255		GUNUNG PASIR, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270954 Peningkatan Kapasitas SDM Kepemudaan Muara Jawa (Pelatihan Perbengkelan dan Sablon #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
256		GUNUNG PASIR MJU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271046 Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan (peralatan perbengkelan) #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
257		JL IR SOEKARNO, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271648 Pelatihan Membordir PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
258		Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2316364 Pelatihan Sablon Karang Taruna Kel Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
259		Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2324881 Pelatihan Perbengkelan Karang Taruna Kel MJU #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
260	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Jalan Mahakam Ilir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276060 Masih minimnya mekanik alat berat bagi pemuda pemuda muara kembang #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
261	Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan	Jl. Mahakam Tengah RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278602 Pelatihan Budidaya Rumput Laut bagi Kelompok Nelayan Muara Kembang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
262		Jl. Mahkam Tengah RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279364 Pelatihan Budidaya ikan air tawar bagi kelompok nelayan air tawar muara kembang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
263		Jl. Mahakam Tengah RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278530 Pelatihan Budidaya Udang Windu bagi Kelompok Nelayan Di Kelurahan Muara Kembang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
264		Jalan Mahakam tengah RT.03 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279498 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan bagi Kelompok Perikanan Muara Kembang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
265		Jl . Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279823 Pelatihan Diversifikasi Usaha nelayan #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
266		Jl. Mahakam tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279557 Pelatihan pembuatan Perahu Fiber Muara kembang #OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
267	Pembagunan Toilet PAUD/TK	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219769 Pembangunan WC Paud Mekar Sari Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
268	Pembangunan Dam Parit skala kecil di kawasan pertanian	Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321634 Pembuatan Embun untuk pertanian dan pengaliran air bersih untuk masyarakat Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
269	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau/Dermaga Desa/Kelurahan	Rt.02 Kelurahan Teluk Dalam ,0.80422, 117.19101 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2302170 Belum tersedianya pelabuhan untuk sandaran perahu nelayan yang memadai (Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Nelayan Rt.02 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perhubungan
270		RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.827096, Long 117.250475, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2300342 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Belum memiliki Dermaga (Pembangunan Dermaga Umum RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) . #OPD: Dinas Perhubungan
271		Kelurahan Teluk Dalam, 0.80425, 117.19153 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2342046 Belum tersedianya Dermaga Kapal/Perahu untuk Nelayan (Pembuatan Dermaga Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perhubungan
272	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301210 Kondisi Pembangunan Kantor Lurah belum selsesai (Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam) #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
273		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295690 Belum tersedianya sarana UMKM (Pembangunan Sarana Prasarana UMKM Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
274		Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281739 Pembangunan Gudang dan Gedung Arsip Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
275	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282154 Pembuatan badan Jalan RT.001 tembus RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
276		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283268 Peningkatan badan jl Ruhui Rahayu 3 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
277		Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284563 Lanjutan pembuatan Badan Jalan Tani RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
278		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321153 Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani Ruhui Rahayu 1 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
279		Jl. Ruhui Rahayu 2 Handil 8 RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321521 Pengaspalan Jl.Ruhui Rahayu 2 RT.16 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
280	Pembangunan Kandang dan Pagar Ternak	HANDIL 3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277305 Pembuatan Pagar Kuburan Handil 3 #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
281	Pembangunan Pagar PAUD/TK	RT. 10 kelurahan Dondang Lat.0.471443876° - Long. 117.132041968° p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253368 Belum selesainya Pemagaran kantor Pembuatan Pagar Kantor SPNF-SKB Muara Jawa Kel. Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
282		GG. Nursa'adah RT.15, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264104 Paud/Melati belum memiliku pagar #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
283		Pembangunan Pagar TK Gelatik 3 Kel.Muara Jawa Tengah (524088,26 – 9905424,03) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304789 Kondisi Pagar Kurang Memadai #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
284		RT. 03 kelurahan Dondang p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290408 Belum adanya Pagar Sekolah Pemagaran PAUD Mujair RT.003 Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
285		Jalan Diponegoro RT.06 Lat.0.471675104° - Long. 117.134074528° P.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2303747 Belum adanya Pagar Sekolah Pemagaran TK Bhinneka Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
286	Pembangunan Pagar SD	Jalan Handil Petinggi RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263856 Pagar SMPN 3 belum ada, sehingga perlu dibangun pagar smpn 3 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
287		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219443 Pembuatan Pagar dan Gapura SD. 015 Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
288		Jl. Handil Petinggi RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263946 SDN 009 belum memiliki pagar sehingga perlu dibangun pagar. #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
289		Jl. Husni Thamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263876 SDN. 002 Belum memiliki pagar. segingga perlu dibangun pagar #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
290		Jalapoan Pelita RT.001 Kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2223931 Demi keamanan dan ketertiban sekolah (pembuatan Pagar SDN 005 Dondang) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
291		Pembangunan Tempat Parkir SDN 012 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274826 Tidak ada Tempat Parkir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
292		Jl. A. Yani Gang Brunei Handil Dua, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307639 Pembangunan Pagar Sekolah SDN 018 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
293	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Jawa)	Jalan Sulawesi RT 12 Kel, dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2230125 Belum adanya Sarana Air Bersih yang memadai yang menjadi kebutuhan penting bagi warga Lanjutan pemanfaatan Sarana air bersih dengan pemasangan pipa primer 6" pipa tersier 4" dan pipa sekunder 2" - 3" #OPD: Kecamatan Muara Jawa
294	Pembangunan Pintu air Kebun	RT.003 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2124992 Pembuatan Pintu Air Kebun Kelapa RT.003 (6 Unit) Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
295		RT.003 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270375 Pembuatan Pintu Air Kebun Kelapa RT.003 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
296		RT.019 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282570 Pembuatan Pintu Air Kebun Kelapa RT.019 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perkebunan
297	Pembangunan Pintu Air pada saluran tersier di Kawasan Pertanian	RT.009 Jl. Martadinata Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321135 Pembuatan Pintu Air Handil 8 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
298		Kel. Muara Jawa Ilir Jl. Martadinata Handil 8 RT.009, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2332713 Pembuatan Pintu Air Handil 8 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
299		Kel. Muara Jawa Ilir Jl. Sukarelawan Handil 9 RT.006, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2332926 Pembuatan Pintu Air Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
300		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321113 Pembuatan Pintu Air Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
301	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Desa/Kelurahan (Muara Jawa)	Rt. 03 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2201470 Pembuatan Pos Kamling #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
302		Kelurahan Dondang Rt.1 sd RT.14 Lat 0.774554, Long 117.227924 --lat 0.788516, long 117.219614 p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2320361 Kebutuhan Keamana Lingkungan Masyarakat Kelurahan Dondang Pembangunan Pos Kamling 14 RT Kelurahan Dondang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
303	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Jalan Handil Petinggi RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263806 Gedung RKB SMPN 3 masih kurang 3 lokal sehingga perlu di bangun baru 3 lokal #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
304		Jalan Sutomo RT.07 Lat.0.472920668° - Long. 117.133981972° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085054 unyuk meningkatkan efesian keaktifan guru pengajar dikelurahan dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
305		Jalan Sutomo RT. 07 kelurahan Dondang Lat.0.472920668° - Long. 117.133981972° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085100 Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar RKB SMP N.2 Muara Jawa Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
306		Jalan Sutomo RT. 07 kelurahan Dondang Lat 0.776161, Long 117.229001 sd lat 0.791448, Long 117.228919 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085112 Belum adanya Aula Pertemuan SMPN.2 Muara Jawa Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
307		Jalan Sutomo RT.07 Kelurahan Dondang at 0.776161, Long 117.229001 sd lat 0.791448, Long 117.228919 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085126 Belum adanya Pos Penjagaan Keamanan SMPN.2 Muara Jawa Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
308		Pemasangan Kanopi Madrasah Diniyah Miftahussalam RT.11 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278181 Tidak Ada Kanopi #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
309		HANDIL 2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270080 Pembuatan Pagar SMP DDI Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
310		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280425 Pembangunan Kantor /Ruang Guru MTs. Baitul Aman Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
311		Muara Jawa Ilir Jl. Martadinata Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2294751 Pengadaan Komputer/Laptop MTs. Baitul Aman Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
312		Kelurahan Muara Jawa Ilir Jl. Martadinata RT.007 Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2331029 Pengadaan Komputer/Laptop MTs. Baitul Aman Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
313		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274595 Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs. baitul Aman Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
314	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Jawa)	Jalan Handil Petinggi RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229644 Badan Jalan Handil Petinggi masih kurang gorong gorong sehingga pada saat musim hujan banyak kebun warga kebanjiran. #OPD: Kecamatan Muara Jawa
315		Jalan Petinggi Bahran RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229731 Badan Jalan Petinggi Bahran Belum ada gorong- gorongnya sehingga halaman rumah warga tergenang air #OPD: Kecamatan Muara Jawa
316	Pembangunan Sumur Bor Untuk Air Baku	RT.04 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281722 Sumur air bersih yang ada dimuara kembang mulai mengalami pendangkalan, sehingga perlu di bor lagi #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
317		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308970 Masyarakat saat kesulitan mendapatkan air bersih (Pengadaan Sumur Bor dan Penyedot Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
318	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran Di Kelurahan (Muara Jawa)	RT. 01 KEL. TAMA POLE, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2112579 Semenisasi Halaman TPQ Ar Rahman #OPD: Kecamatan Muara Jawa
319	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD	RT.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284087 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam rangka pemerataan pendidikan pada setiap daerah (Pembangunan WC Sekolah dasar Negeri 014 Muara jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
320	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Jawa)	Rt. 03 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2201550 Pembuatan Turap parit Menuju danau kering RT 03 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
321		rt 01 kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2113035 Pembuatan Turap saluran air Jln Nusantara rt. 01 kel. tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
322		Jalan Handil Surya RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229783 Badan Jalan Handil surya mulai terkikis sehingga bisa menyebabkan longsor #OPD: Kecamatan Muara Jawa
323		Jalan Handil Gemuk RT.01, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229597 Badan Jalan Handil Gemuk RT.01 Mulai longsor dan perlu diturap #OPD: Kecamatan Muara Jawa
324		Jalan Ajhmat Sifa Rt.13 lat. 0.776268° - long 117.228665° P.1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2034762 Menahan Derasnya arus dari aliran air yang bisa mengikis tanah Lanjutan Turap Kantor Kelurahan Dondang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
325		RT.020 Jl. Mawar Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2045534 Pembuatan Turap Parit Jl. Mawar RT.020 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
326		RT.020 Jl. Mawar Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2045198 Lanjutan Turap jalan Jl. Mawar (Jalan Ke Kuburan) RT.020 Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
327		RT.006 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2087104 Pembangunan Turap Ulin Sungai handil 9 RT.006 Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
328		RT.007 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2114113 Lanjutan Turap Beton Jl. Martadinata RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
329		RT. 018 Jl. Martadianata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2049063 Pembuatan Turap Sungai Jl. Martadinata Handil 8 RT.018 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
330	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2332042 Peningkatan Gg. Selamat Riady Kel. Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
331		Gang Family RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.839568 , Long 117.228386, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254700 jembatan belum tersedia (Pembuatan Jembatan Gang Family RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
332		Gang Belanak RT.29 Kel.Muara Jawa Pesisir, 0.839158, 117.247997 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278237 Kondisi Jembatan rusak berat, sangat tidak memadai, (Pembuatan Jembatan Ulin Gang Belanak RT.29 Kel.Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
333		Gg. H. Ramli 2 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.839633 , Long 117.230495, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254584 Jalan Banjir (Peningkatan Jalan Gg. H. Ramli 2 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
334		rt 03 kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306380 Pembuatan jembatan nelayan rt 03 kelurahan tama pole #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
335		Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296671 Kondisi jembatan yang kurang memadai (Pelebaran Jembatan Rt.01 Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
336		Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296620 Belum tersedia Jembatan RT.03 yang memadai (Pembuatan Jembatan Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
337		RT.06 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295200 belum tersedia jembatan yang memadai (Pembuatan Jembatan Gg,IKN RT.06 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
338		jl. Husni Tamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264754 Jembatan Keburuan RT.08 sudah mengalami kerusakan #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
339		RT. 02 kelurahan Dondang lat 0.781891, Long 117.235600 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256330 Jembatan yang menuju jalan nelayan karena memalui akses jalan pertamina makanya dibangun jembatan untuk jalan alternatif Jembatan Serong Nelayan RT.02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
340		Rt 31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.8304, Long 117.24992, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247678 Jembatan Rusak banyak Bolong-bolong (Pembuatan Jembatan kayu Gg Bule Rt 31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
341		Gang Belat RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.835975 , Long 117.245395, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254806 Jembatan Banyak Yang bolong (Rehab Jembatan Gang Belat RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
342		Gg. Bersatu RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254603 Jalan Becek Sulit dilalui kendaraan (Peningkatan Jalan Gg. Bersatu RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
343		RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.835947 , Long 117.247811, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254929 Jembatan Perlu perbaikan (Pembuatan Jembatan Gang. Jira Tembus Ke Jalur PHM RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
344		RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.836582 , Long 117.248865, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254951 Jembatan Perlu perbaikan (Rehab Jembatan Gang Nelayan RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
345		Jl. Tahir Gang Bungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270499 Kondisi Jembatan Rusak berat dan tidak layak untuk dilalui, , (Pembuatan Jembatan Gang Bungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
346		Jl. Tahir Gang Ketapang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.835158, Long 117.245101 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270643 Kondisi Jalan terendam saat pasang air laut (Pembuatan Jembatan Gang Ketapang RT. 24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
347		Gang Berlian RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0.838263, 117.248388 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278393 Kondisi Jembatan Rusak, sehingga perlu perbaikan (Peningkatan Jalan Gang BERLIAN RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
348		Jl. Tahir GG Restu RT 31 Kel.Muara Jawa Pesisir Lat-0.830071 Long 117.249452, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279226 belum tersedia jembatan, (Pembuatan jembatan kayu jln Tahir GG Restu RT 31 Kel.Muara Jawa Pesisir panjang kurang lebih 20 meter) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
349		RT 04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83104 , Long 117.24981, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282670 Jembatan Rusak (Pembuatan Jembatan kayu Gg Udang Rt 4 Muara Jawa) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
350		RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°841503, Long 117.229644, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283590 Jembatan Belum ada (Pembuatan Jembatan Jalan Juslimin RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
351		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.838379, Long 117.232534, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283868 Jalan Masih panjang yang harus perbaiki (Peningkatan Jalan Gang Tunas Kelapa RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
352		Pembuatan 3 buah Jembatan RT.11 Jl.Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah (0.858615° 117.235985°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276927 Jembatan Tidak Ada #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
353		Pembuatan Jembatan Kebun Jalan Pesantren RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291199 Tidak Ada Jembatan #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
354	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Jl. Nusantara Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2303701 Peningkatan Jalan Penghubung Kelurahan Tama Pole Menuju Kelurahan Muara Kembang Kec. Muara Jawa #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
355		Peningkatan Badan Jalan Gg.Buntan RT.03 Kel.Muara Jawa Tengah (0.84963° 117219493°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268448 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
356		Peningkatan Badan Jalan Gg.Mangga RT.14 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270892 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
357		Jl. Teluk Ladang Gang Aulia RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268314 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan jalan Gang Aulia RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
358		Peningkatan jalan gang tunas muda RT.07 Kel.Muara Jawa Tengah (0.861065° 117.213456°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275125 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
359		Rt.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0841828, Long 117.228544, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321236 Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang H.Matnor Rt.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
360		Jl. M. Hatta Gang Onthel RT. 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.842223° , Long 117.227322°E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2273565 Kondisi Jalan belum pengerasan, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gang Onthel Blok Kai Masir RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
361		Gang Famili 1 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.839339 , Long 117.228109, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254650 Jalan rusak dan berlubang (Peningkatan Jalan Gang Famili 1 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
362		RT 27 sd RT 1 muara jawa pesisir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83595, Long 117.23365, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247760 Jalan Banyak Yang Berlubang (Peningkatan Jalan Teluk Ladang Rt 27 sd rt 1 muara jawa pesisir Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
363		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.836513,Long 117.235524, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283792 Jalan Rusak dan Becek (Peningkatan Jalan Gang As-Salam RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
364		Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.81752 , Long 117.232241, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321824 Cor beton parit Jalan Teluk Ladang Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
365		Peningkatan Badan Jalan Gg.Ruhui Rahayu 2 RT.08 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292387 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
366		lanjutan Semenisasi Jalan Darussalam RT.11 Kel. Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292409 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
367		Peningkatan Badan Jalan Darul Ilmi 2 Handil 7 Kel.Muara Jawa Tengah (X = 523824 Y =9904626) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304696 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
368		Jl. Abdul Rasyid Kel. Muara Jawa Ulu - Kel. Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281062 Peningkatan Jalan Penghubung Kelurahan Muara Jawa Ulu - Kelurahan Teluk Dalam #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
369		Jl. Ir. SOkarno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2376524 Peningkatan Jalan Sepanjang Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
370		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284201 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Martadinata Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
371		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284215 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Sukarelawan Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
372		Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282006 Peningkatan Jalan Simpang Tiga Kec. Muara Jawa #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
373		RT 04, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256712 Pengaspalan badan jalan panjang RT.04 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
374		Gg. Sahar RT. 10 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257158 Semenisasi Gg. Sahar RT. 10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
375		RT 11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257220 Semenisasi Gg Simon anan RT.11 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
376		RT 23, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259919 Pengerasan Badan Jalan Gg Manunggal RT 23 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
377		Jalan Air panas RT.003 Lat.0.77693° - Long. 117.23495° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2245818 Jalan Menuju Tama Pole Rusak dan susah dilalui Kendaraan untuk Masyarakat Dondang Dan tama Pole Lanjutan Semenisasi Jalan Air Panas RT.03 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
378		Gang Abimanyu RT 13 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257338 Semenisasi Gang Abimanyu RT 13 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
379		Gang Sayang RT 21, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2258189 Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Sayang RT 21 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
380		Gg Bambu RT 27 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261623 Semenisasi Gg Bambu RT 27 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
381		Gang Palaka 3 Blok A RT 26 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261408 Semenisasi Gang Palaka 3 Blok A RT 26 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
382		RT.28 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261661 Peningkatan badan jalan gg puskesmas RT.28 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
383		Jalan Ardian 2 RT 31, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261860 Peningkatan Jalan Ardian 2 RT 31 Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
384		GG Perpustakaan RT.36 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264409 Pembuatan badan jalan GG Perpustakaan RT.36 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
385		Handil 1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266137 Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Handil 1 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
386		RT 24, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266139 Pembuatan Badan Jalan Tani RT 24 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
387		Gang Silambanan RT.40 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264970 Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Silambanan RT.40 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
388		RT.020 Jl. Mawar Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2045791 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Mawar RT.020 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
389		Rt. 03 kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306061 Peningkatan Jalan Bourbon kelurahan tama pole (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
390		Jl. M. Hatta RT. 007 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306171 Semenisasi sambungan GG RUKUN RT 7 handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
391		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2320303 Peningkatan jalan Pole 1 Kelurahan tama Pole #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
392		Rt. 01 Kel. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306097 Peningkatan Jalan Hasan J kel. tama pole (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
393		kelurahan tama pole rt 02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306189 Peningkatan Jalan Suka Damai (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
394		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306229 Peningkatan Jalan Pole 2 Kelurahan Tama Pole (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
395		Jalan Mahakam Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264326 Jalan Pemukiman yang menghubungkan RT.1.RT.2 dan RT. 14 sepanjang 1,5 Km banyak yang rusak sehingga perlu diaspal #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
396		Jalan Abdul Rasyid Kel.Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301143 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Abdul Rasyid Kel.Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
397		Kelurahan Teluk Dalam, 0.85303, 117.21672 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2342065 Kondisi Jalan Rusak Berat, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Semenisasi Jalan Menuju Jembatan Idaman Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
398		RT,06 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2302101 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Handil Hayung Rt,06 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
399		RT.03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301645 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Lingkar RT.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
400		Kelurahan Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301291 Kondisi jalan tidak rata dan berlubang, (Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
401		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301166 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Kuburan Muslimin Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
402		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301245 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Usaha Tani RT.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
403		RT.003 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2302018 Belum tersedia jembatan yang memadai untuk penyebrangan jalan masyarakat (Pembuatan Jembatan Penyeberangan Jalan Usaha Tani II RT.003 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
404		Jalan Pelita RT.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2286601 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Pengaspalan Jalan Pelita RT.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
405		RT,04 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287156 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Rt,04 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
406		Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296372 Kondisi Jalan rusak,tidak rata dan berlubang, (Pengaspalan Jalan Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
407		RT.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287147 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Kuburan Muslimin RT.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
408		Gang Abu hasan Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295311 Kondisi saat ini belum memiliki badan jalan (Badan Jalan GG,Abu hasan Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
409		Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295564 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Pengaspalan Jalan Sempati Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
410		Jl.Swadaya Rt,04 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295518 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Semenisasi Jl.Swadaya Rt,04 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
411		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2295477 Belum tersedia badan jalan (Pembuatan Badan Jalan Gg,Hasan Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
412		RT.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2286622 Kondisi Jalan sempit, sehingga diperlukan pelebaran jalan (Pelebaran badan jalan RT.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
413		RT.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287105 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Semenisasi Jalan Pelabuhan Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
414		Jalan Pelita Rt.01 Keurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287114 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Pengaspalan Jalan Pelita Rt.01 Keurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
415		Gang ar haman Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2286649 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Pembuatan badan Jalan Gang ar haman Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
416		RT.04 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287130 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Semenisasi Gang Rt.04 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
417		Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296005 Belum tersdianya jalan untuk para petani (Pembuatan Badan jalan Usaha Tani Rt.06 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
418		RT.03 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2286585 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan badan Jalan Rt.03 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
419		RT.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296206 Kondisi pembangunan jalan belum selesai (Lanjutan Jalan Kuburan RT.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
420		Kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306327 Peningkatan Jalan Petani Rt 03 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
421		kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306298 Peningkatan Jalan Nusantara rt 02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
422		Jl. Handil Petinggi RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264362 Jalan Lingkungan Handil Petinggi Masih Berupa tanah sepanjang 2 Km sehingga perlu semenisasi cor beton #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
423		Jl. Husni Thamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275646 Badan Jalan GG. Papadaan RT.08 Masih Berupa Tanah sehingga perlu ditingkatkan #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
424		Jl. Handil Petinggi atas RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275032 Jalan Handil Petinggi Atas masih berupa tanah sehingga perlu ditingkatkan badan jalannya #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
425		Jalan Palima RT.10, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272682 Jalan Palima RT.10 masih berupa tanah sehingga perlu disemenisasi cor beton #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
426		Jl. Husni Tamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275948 Badan Jalan GG. Keluarga RT.08 Masih berupa tanah. #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
427		RT.02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264674 Badan jalan GG. iman RT.02 masih lecil sehingga perlu pelebaran #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
428		Jalan handil Sulawesi RT.04, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264576 Jalan Handil Sulawesi RT.4 masih berupa tanah sehingga perlu disemeinasi cor beton sepanjang 2 KM lebar 5 M #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
429		RT. 013 kelurahan Dondang lat 0.776476, long 117.231252 P.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256848 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Semenisasi Gang Saudara Rt 13 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
430		RT. 01 kelurahan Dondang Lat 0.786914, Long 117.229283 P.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256839 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Semenisasi jalan Gang Hatta RT.01 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
431		RT. 010kelurahan Dondang Lat 0.776707, Long 117.232177 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290357 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjutan semenisasi Gang Keluarga RT.10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
432		RT. 10 kelurahan Dondang Lat 0.787991, Long 117.223057 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290334 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjutan Semenisasi gang Rasyid RT.10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
433		RT. 008 kelurahan Dondang Lat 0.791504, Long 117.227626 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290381 Jalan yang dilalui semennya sudah terkikis dan susah dilewati kendaraan Pengaspalana Gang Imran dan jalan Gang 45 RT.008 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
434		RT. 012 kelurahan Dondang Lat 0.776620, Long 117.231700 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256868 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjutan Semenisasi Gang Kembar Rt 12 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
435		RT. 02 kelurahan Dondang Lat 0.781940, Long 117.234955 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256835 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjutan Semenisasi jalan masjid RT.02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
436		RT. 02 kelurahan Dondang Lat.0.781770, Long 117.235706 p.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256826 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Semenisasi Jalan Nelayan RT.02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
437		RT. 06 kelurahan Dondang Lat.0.79208° - Long. 117.22654° p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255094 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Peningkatan Jalan H. Jahri Rt.06 ,jalan tembusan menuju jalan raya Pelita dan tembusan jalan jalur Vico RT.01 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
438		RT. 012 kelurahan Dondang Lat 0.776707, Long 117.232177 p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256866 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjutan Semenisasi Gang Hasan Basri Rt 12 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
439		RT. 06 -11 kelurahan Dondang Lat 0.785048, Long 117.226540 p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2320448 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Semenisasi Jalan Antasari Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
440		jalan pelita Rt.02 Kel.Dondang Lat.0.781770, Long 117.235706 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2245592 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Peningkatan jalan nelayan Jalan nelayan RT.002 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
441		Jalan Diponegoro Rt.06 Kel. Dondang Lat.0.79208° - Long. 117.22654° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2245579 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan Peningkatan Jalan H. Jahri Rt.06 ,jalan tembusan menuju jalan raya Pelita dan tembusan jalan jalur Vico RT.01 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
442		Jalan Ahmad sifa Rt.13 Kel. Dondang Lat 525672 Long 9917702 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2245562 Keperluan yang sangat signifiakan bagi setiap daerah untuk penanggulangan sampah Peningkatan Badan Jalan dan Peningkatan Lokasi Tempat (TPST3R)) Sampah) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
443		RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.829682 , Long 117.245853, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2324120 Jalan Rusak dan Berlubang (Peningkatan badan jalan blok 10 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
444		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.838172, Long 117.233178 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321889 Jaln Becek dan Berlubang (Peningkatan Jalan GG. Taruna RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
445		Gang Zainuddin RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.8269838, Long 117.239216, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246436 Jalan rusak Susah Dilalui Kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Zainuddin RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
446		Gang Hasanuddin RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.826845, Long 117.239688, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246476 Jalan Rusak dan Susah di Lalui kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Hasanuddin RT.11) Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
447		Gang Persatuan RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.827371°, Long 117.23774°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246488 Jalan Rusak susah di lalui kendaraan (Peningkatan Badan Jalan Gang Persatuan RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
448		Gg Jeruk muara jawa pesisir Rt 16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83439, Long 117.23353, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247722 Jalan Rusak (Peningkatan badan jalan Gg Jeruk muara jawa pesisir Rt 16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
449		Gang Belimbing RT.16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.833782°S , Long 117.233549°E, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254541 Peningkatan Jalan Gang Belimbing RT.16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
450		RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2248007 Jalan Rusak dan Berlubang Parah (Peningkatan badan jalan gg Al hikmah rt 10 blok 10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
451		Gang Sepakat RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.838381 , Long 117.227529, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254622 Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Sepakat RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
452		Gang Famili 2 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.839427 , Long 117.227203, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254668 Jalan Becek dan berlubang (Peningkatan Jalan Gang Famili 2 RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
453		Gang Rawa Indah Blok A RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.835488 , Long 117.2346, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254974 Jalan masih tanah (Peningkatan Jalan Gang Rawa Indah Blok A RT.20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
454		Gang Rawa Indah Blok B RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat -0.836082 , Long 117.234993, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254990 Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Rawa Indah Blok B RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
455		Gang Swakarya RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.826972, Long 117.243355, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255109 Jalan banjir saat hujan (Peningkatan Jalan Gang Swakarya RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
456		Gang Nikmat RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.829007, Long 117.243023, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2255205 Jalan becek dan berlubang Peningkatan Jalan Gang Nikmat RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
457		Jl. A. Yani Gang Al-Hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,Lat-0.828815°, Long 117.246985° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266876 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Semenisasi jalan blok 6 gang alhikmah RT 09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
458		Jl. A. Yani Gang Al-Hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.828815°, Long 117.246985° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266916 Kondisi Jalan rusak, berlubang, tergenang saat musim hujan #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
459		Jl. A. Yani Gang Al-Hikmah RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat-0.828321°, Long 117.246941° , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267022 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang JOSH Ujung RT 09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
460		Gang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0°.828340, 117.234237, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267149 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
461		Jl. Teluk Ladang Gang Abdul Razak RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.835422 , 117.231762 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268179 Kondisi jalan tidak rata , (Peningkatan Jalan Gang Abdul Razak (samping kantor Lurah) RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
462		Jl. Teluk Ladang Gang SMK RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir/0.508466, 117.1350502 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268657 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang SMK RT 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
463		Jl. Tahir Gang Bungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.834806, Long 117.247918 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269926 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gang Bungalang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
464		Jl. Tahir Gang Ketapang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,Lat 0.835263, Long 117.248078 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270015 Kondisi Jalan rusak, tertutup Rumput, tergenang saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gang Ketapang RT.24 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
465		Jl. A. Yani Gang Pusaka Blok 2 RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.4945272, 117.1436595 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271461 Peningkatan Badan Jalan Blok 2 Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
466		Jalan A. Yani Gang Al-qodiri RT 26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.827629, 117.248078 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271724 Kondisi Jalan rusak, berlubang, tergenang saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Al-qodiri RT 26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
467		Jl. A.Yani Gang Al-Qodiri Blok C RT.26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.827631, 117.248178 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271922 Kondisi Jalan rusak, berlubang, tergenang saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gang Al-Qodiri Blok C RT.26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
468		Jl. M. Hatta Gang Wahyu tembus Gang Anugrah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.832687, 117.232128 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272329 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Wahyu tembus ke Gang Anugrah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
469		Gang Suwito RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.831934, 117.232088 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272404 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan gang Suwito RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
470		Gang Onthel Rt.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°841425, Long 117.225885, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283388 Jalan rusak dan Berlubang (Peningkatan Jalan Gang Onthel Rt.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
471		Jl. M. Hatta Gang Ketapi RT. 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 5038, Long 117.1332 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274021 Kondisi badan Jalan berupa tanah, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Ketapi RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
472		Jl. M. Hatta Gang Nangka RT. 28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 5036 , Long 117.1330 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274384 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan badan jalan Gg. Nangka RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
473		Jl. Jalur Gang Syamsu RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.8408, 117.248362 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278013 Kondisi Jalan msih setapak,permukaan masih tanah, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Syamsu RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
474		Gang Saliman RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0.837647, 117.248377 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278491 Kondisi permukaan jalan masih tanah, sehingga berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Saliman RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
475		Jl. Jalur Gang Bandeng RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.840017, 117.248383 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278132 Kondisi Jalan masih setapak, permukaan jalan masih tanah, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan jalan Gang Bandeng RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
476		Jl. Jalur Gang IMAN RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0.838998, 117.246263 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278589 Kondisi Jalan rusak, berlubang, sebagian berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang IMAN RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
477		Jl. Tahir Gang Tiung Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.830559 Long 117.247622 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278826 Kondisi Permukaan Gang Masih Tanah, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang, Tiung Menuju Gang Al Hikmah RT. 30 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
478		Jl. Tahir Gg. Restu RT. 31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.830071 Long 117.249452, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279300 Kondisi permukaan jalan masih tanah, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gg. Restu RT. 31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
479		Jalan Haga Junior RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0.836399 Long 117.236198, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279755 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Haga Junior RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
480		Jalan Teluk Ladang Gg Amanah RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat.0.836399 Long 117.236198, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279810 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Badan Jalan Gg Amanah RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
481		Jalan Teluk Ladang Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat 0.835939, Long 117.232709 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279870 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
482		Jalan Teluk Ladang Gang Tunas Kelapa RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, 0.838379, 117.232534 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279916 Kondisi Jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan (Peningkatan Jalan Gang Tunas Kelapa RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
483		RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.829315, Long 117.247017, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283164 Jalan Rusak dan Berlubang (Peningkatan badan jalan blok 8 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
484		Gang Onthel RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°841425, Long 117.225885, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283428 Jalan Rusak (Pembuatan Parit Beton Gang Onthel RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
485		RT. 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.83598, Long 117.232892, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283728 Jalan Rusak dan berlubang (Semenisasi Jalan Gang Setia Kawan RT. 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
486		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.836424,Long 117.237201, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283821 Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gg Amanah RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
487		RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.836399, Long 117.236198, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283921 Jalan Belum ada (Peningkatan Jalan Haga Junior RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
488		Peningkatan Badan Jalan Gg.Pupuk RT.03 (0.852907°S, 117.219613°E) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266330 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
489		Peningkatan Badan Jalan Gg. Ramania RT.017 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266341 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
490		Peningkatan Badan Jalan Gg. Sepakat RT.04 (P1), Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266343 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
491		Peningkatan Parit Beton Gg.Hikmah RT.01 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266812 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
492		Peningkatan Badan Jalan Gg.Zakky RT.01 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266894 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
493		Peningkatan Badan Jalan Gg.AL RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266906 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
494		Peningkatan Badan Jalan Gg.Abimanyu RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah (-0.847342° 117.223666°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268126 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
495		Peningkatan Badan Jalan Gg.Bima RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268211 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
496		Peningkatan Badan Jalan Gg.Arjuna RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268279 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
497		Peningkatan Parit Beton Gg.AL RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268360 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
498		Lanjutan Semenisasi Gg.Pupuk RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2268561 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
499		Lanjutan Semenisasi Gg.Gemilang RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269232 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
500		Lanjutan Semenisasi Gg. Hidayah RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269336 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
501		Semenisasi Gg. Sekumpul RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269609 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
502		Peningkatan Badan Jalan Gg. Cahaya RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269761 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
503		Peningkatan Badan Jalan Gang Mata Air RT.4 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269890 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
504		Peningkatan Badan Jalan Gang Djarwo RT.4 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270105 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
505		Peningkatan Badan Jalan Gang Sepakat RT.4 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270191 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
506		Peningkatan Badan Jalan Gang Sedulur RT.4 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270364 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
507		Peningkatan Badan Jalan Gang H.Yaran RT.4 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270507 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
508		Peningkatan Badan Jalan Gg.Pasar Blok.B RT.05 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270650 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
509		Peningkatan Badan Jalan Gg.Pasar Blok.C RT.05 Kel.Muara Jawa Tengah (0.853812° 117.218022°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271055 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
510		Pengaspalan Gg.Pasar RT.05 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271157 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
511		Pembuatan Badan Jalan Gg.Pinang (0.854556° 117.219707°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274079 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
512		Pembuatan Badan Jalan Gg.Rambutan (0.854552° 11/7218742°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274230 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
513		Peningkatan Badan Jalan Gg.Al-Hikmah Handil 6 RT.07 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275360 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
514		Lanjutan Semenisasi Gang Aman RT.09 Kel.Muara Jawa Tengah (0.848134° 117.193257°), Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275770 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
515		Semenisasi Jalan Gang Sindang Jaya RT.09 Kel.Muara Jawa Tengah (0.848134° 117.193257°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275922 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
516		Peningkatan Badan jalan Gg.Budiman RT.10 Kel. Muara Jawa Tengah P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276708 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
517		Peningkatan Badan Jalan Gg.Hair RT.10 Kel. Muara Jawa Tengah (0.863966° 117.213236°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276507 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
518		Peningkatan badan jalan Gg.Abadi RT.10 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276763 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
519		Semenisasi Badan Jalan Gembira RT.10 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276816 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
520		Lanjutan semenisasi Gg.Darul Falah RT.11 Jl.Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah (0,85823° 117,226944°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277135 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
521		Semenisasi Gang Shafa Sindang Jaya RT.12 Kel.Muara Jawa Tengah (0.849557° 117.194604°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278297 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
522		Peningkatan Badan Jalan Gang Manunggal RT.13 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280026 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
523		Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg.Keluarga P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280283 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
524		Peningkatan jalan gang tunas muda RT. 07 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280323 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
525		Peningkatan Badan Jalan Gg.Sudaya RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280547 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
526		Peningkatan Badan Jalan Gg.Family RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280576 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
527		Peningkatan Badan Jalan Gg.Sedulur RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280590 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
528		Peningkatan Badan Jalan Gg.Hikmah RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah (12.17.150°51'45S 117°12'53"E6°N) P1 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280757 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
529		Semenisasi Gg.Budiutomo 3 RT.16 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291227 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
530		Semenisasi Gg.Rawan RT.16 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291258 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
531		Lanjutan Semenisasi Gg.Arjuna RT.17 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291269 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
532		Semenisasi Gg.Abd.Gofur RT.17 Kel. Muara Jawa Tengah (06.40.15 50M 523511 9904628 207° SW) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291582 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
533		Lanjutan semenisasi Gg.Ramania RT.17 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291595 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
534		Perbaikan Jalan RT.18 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291614 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
535		Peningkatan Badan Jalan RT.19 Kel.Muara Jawa Tengah (0.861177° 11.213694°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291742 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
536		Semenisasi Badan Jalan RT.19 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291764 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
537		Pemasangan Paving Blok Jalan Handil Gembira RT.20 Kel.Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291796 Kondisi Halaman Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
538		Semenisasi Jalan Gg.Inayah RT.20 Kel.Muara Jawa Tengah (-0,8576543 117,2224375) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291857 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
539		Peningkatan Badan Jalan Gg.Mulia RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292181 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
540		Peningkatan Badan Jalan Gg.Sari Hidayah RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292223 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
541		Peningkatan Badan Jalan Gg.Berkah RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292261 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
542		Peningkatan Badan Jalan Gg.Sejahtera RT.02 Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292319 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
543		Lanjutan Semenisasi Gg.Hidayah RT.15 Kel. Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292482 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
544		Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman (X =525966 Y =9905126) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304466 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
545		Permohonan Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg. Fadliyah RT. 03 (-0.852752° 117.220434°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308029 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
546		Permohonan Peningkatan Badan Jalan Gg. Hidayah 2 RT. 03 (-0.852572° 117.22044°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308070 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
547		Permohonan Peningkatan Parit Beton Gg.Hidayah 2 RT.03 (-0.85257° 117.220432°) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308082 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
548		Permohonan Peningkatan Badan Jalan Gg. TK.TPA RT. 03 (-0.852442° 117.221536°) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308098 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
549		Peningkatan Badan Jalan Pesantren RT.15 (17.36.47 0°51'8,022"S 117° 11'27,902"E220° SW) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308134 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
550		Peningkatan Badan Jalan Darul Amin Handil 5 RT.03 (X =524346 Y =9905911) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308154 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
551		Peningkatan Badan Jalan Darul Ilmi Handil 7 P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308184 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
552		Pelebaran Jalan Darul Hijrah (-0.863076° 117.211851°) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308236 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
553		Lanjutan Semenisasi Gg.Husna RT.3 RT.06 (-0.85361° 117.219817°) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2308262 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
554		Lanjutan Semenisasi Jalan Darul Fath RT.06 Kel.Muara Jawa Tengah (524344.13 - 9905370.75) P1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327380 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
555		Pengaspalan Jalan Gg.Abadi RT.10 Kel.Muara Jawa Tengah (524344.13 - 9905370.75) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327407 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
556		Peningkatan Badan Jalan Gg.Rambutan RT.06 Kel.Muara Jawa Tengah (526156.19 - 9905091.31) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327444 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
557		Jalan Damai RT.02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246225 Pengaspalan Jalan Damai RT.02 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
558		Gg Jambu RT 003, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256704 Peningkatan Badan Jalan Gg Jambu RT 003 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
559		RT 05 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256713 Pengaspalan Gang Central RT 05 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
560		Gang Murni RT 05 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256749 Semenisasi Gang Murni RT 05 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
561		Gg Merpati RT 06 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2256752 Semenisasi Jalan Gg Merpati RT 06 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
562		Gg. Jamiabul RT. 10 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257165 Semenisasi Gg. Jamiabul RT. 10 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
563		Gg Suri 3 RT.11 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257210 Pengerasan jalan Gg Suri 3 RT.11 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
564		Gg Suri 4 RT.11 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257226 Semenisasi Gg Suri 4 RT.11 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
565		Gang Madinah RT 012 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257331 Semenisasi Gang Madinah RT 012 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
566		Gg. Rajawali RT.13 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257337 Peningkatan Badan Jalan Gg. Rajawali RT.13 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
567		RT 15 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257572 Pengaspalan Gg Nawawi/Gg Hendriyani RT 15 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
568		Semenisasi Gg. Belimbing RT 16 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257587 Semenisasi Gg. Belimbing RT 16 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
569		RT 16, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257582 Semenisasi Gg. Toto raharjo RT.16 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
570		Gang H. Ardian RT 16 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257595 Semenisasi Jalan Gang H. Ardian RT 16 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
571		Gang Usaha RT.17 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257603 Pengaspalan Gang Usaha RT.17 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
572		Gang Badingsanak RT.17 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257615 Semenisasi Gang Badingsanak RT.17 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
573		RT.17 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257643 Peningkatan Badan Jalan Gang Usaha RT.17 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
574		Gg. Damai RT. 17, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2257633 Peningkatan Badan Jalan di Gg. Damai RT. 17 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
575		Gg Bersama RT 14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2258035 Semenisasi Jalan Gg Bersama RT 14 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
576		Gg pinang RT.18 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2258056 Semenisasi Gg pinang dari depan RT.18 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
577		RT 20, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2258098 Semenisasi Gang Tower RT.20 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
578		RT 23, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259904 Semenisasi Jalan Gang Berahim RT 23 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
579		RT 25, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259932 Peningkatan badan jalan Gg Keong RT.25 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
580		Gg Salimang RT.25 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259947 Pengurukan Jalan Gg Salimang RT.25 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
581		Gg Rinjani RT 25, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2259941 Semenisasi lanjutan Gg Rinjani RT.25 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
582		Gang Sehe RT. 26 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261400 Semenisasi Gang Sehe RT. 26 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
583		RT 08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261556 Lanjutan semenisasi gang Anggrek RT.08 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
584		RT 08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261561 Semenisasi dari GG,Anggrek RT.08 ke GG. Kasmir RT. 07 25m x4m #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
585		Gg durian RT.18 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261590 Lanjutan Semenisasi Gg durian ujung RT.18 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
586		Gg Darma bakti RT.18 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261600 Lanjutan Semenisasi Gg Darma bakti RT.18 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
587		Gg Sumber Air RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261605 Pembuatan Badan Jalan Gg Sumber Air RT 19 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
588		Gg Masykur RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261613 Pengaspalan Gg Masykur RT 19 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
589		Gg Supinah RT 27 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261617 Semenisasi Gg Supinah RT 27 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
590		RT 28, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261628 Peningkatan sambungan badan jalan gg. Hidayah RT.28 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
591		Gg pepaya RT.28 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261653 Peningkatan badan jalan gg pepaya RT.28 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
592		Gg. Murhum RT.28, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261671 Peningkatan badan jalan tembusan gg. Murhum RT.28 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
593		RT 29, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261676 Semenisasi Gg Restu RT 29 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
594		RT 29, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261681 Pembuatan Badan Jalan Tembusan Gg Restu ke Gg Rahmad #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
595		RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261688 Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Abd Razak RT. 30 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
596		Gang hijrah RT.31 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261745 Semenisasi gang hijrah RT.31 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
597		RT 31, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261843 lanjutan semenisasi gang H.Ardian RT.31 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
598		Gang Alpukat 1 RT.31 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261851 Semenisasi Jln gang Alpukat 1 RT.31 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
599		Gang H.Abdul Hamid RT,31 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261723 Pembuatan badan jalan gang H.Abdul Hamid RT,31 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
600		Gg Sejahtera RT 32 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261872 Peningkatan Jalan Gg Sejahtera RT 32 Kelurahan Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
601		RT 32, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261878 Semenisasi Gg Sepakat Rt 32 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
602		Gg Nauli RT 32 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261900 Semenisasi Gg Nauli RT 32 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
603		Gg Nauli II RT 32 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261918 Semenisasi Gg Nauli II RT 32 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
604		RT 32, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261913 Semenisasi Gg Sido Makmur RT 32 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
605		GG MANGGA RT 33, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261935 Peningkatan Badan Jalan Gg Mangga #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
606		Gg Surl RT 34 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264050 Seminisasi Gg Surl RT 34 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
607		Gg Masykur RT 33 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2261939 Semenisasi Gg Masykur RT 33 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
608		Seminisasi Gg Suseno RT 34 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264060 Seminisasi Gg Suseno RT 34 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
609		Gg Triana RT 34 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264070 Seminisasi Gg Triana RT 34 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
610		Gang sambi Rt 35 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264118 Lanjutan semenisasi gang sambi Rt 35 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
611		Gang Solehan RT 35 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264100 Semenisasi Gang Solehan RT 35 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
612		Gang Kurihing RT 35 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264135 Lanjutan semenisasi Gang Kurihing RT 35 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
613		RT 36, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264289 Pembuatan badan jalan dr jalan Delima ke gang Dewi RT.36 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
614		Gang RAHMAH RT.38 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264317 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang RAHMAH RT.38 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
615		GG amelia RT.36 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264352 semenisasi badan jalan GG amelia RT.36 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
616		RT 35, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264396 Pengurukan Gg tembusan Gg. Rinjani ke Gg. Randu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
617		RT 37, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264564 Semenisasi Gang Bersatu poros RT.37 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
618		Gang Bersatu Blok E RT.37 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264581 Semenisasi Gang Bersatu Blok E RT.37 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
619		Gang Bersatu Blok C RT37 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264594 Semenisasi Gang Bersatu Blok C RT37 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
620		Gang Bersatu Blok D RT.37 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264607 Semenisasi Gang Bersatu Blok D RT.37 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
621		RT 20, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264737 Semenisasi Jalan Baru RT. 20 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
622		Jln.A.Yani Gg.Permai RT.39 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264854 Lanjutan Semenisasi Jln.A.Yani Gg.Permai RT.39 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
623		Jl.A.Yani Gg. Raudah RT 39 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264871 Lanjutan Pengerasan Jl.A.Yani Gg. Raudah #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
624		Jln. Delima Gg. Assalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264882 Lanjutan Pengerasan Jln. Delima Gg. Assalam #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
625		Gang Global RT.40 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264935 Semenisasi Gang Global RT.40 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
626		Gang Pandawa Blok A RT 41 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264981 Semenisasi Jalan Gang Pandawa Blok A RT 41 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
627		RT.07 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2265057 Semenisasi/perbaikan tembusan Gang Central RT.07 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
628		Jalan Delima , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266132 Pengaspalan Badan Jalan Tingkat Dua di Jalan Delima Kel Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
629		Gang Suri RT.34 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266144 Peningkatan Badan Jalan Gang Suri RT.34 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
630		RT 17, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266146 Peningkatan Badan Jalan Gang Usaha RT.17 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
631		Semeru RT 34 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266151 Pembangunan badan Jalan wakaf jl. Inpres padat karya dari semeru ke handil Nol #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
632		RT 01 MJU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304127 Semenisasi Jalan Bina Karya RT 01 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
633		RT 39, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266154 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang Setiawan RT.39 #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
634		RT.010 Jl. Martadinata Gg. Cempaka Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2294172 Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Cempaka (Aspal) RT. 010 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
635		RT.015 Jl. Martadianata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2330302 Peningkatan Badan jalan Gg. Rambutan Handil 8 Rt.015 Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
636		RT.015 Jl. Martadinata Gg. Kasturi Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2330342 Lanjutan Semenisasi Gg. Kasturi Handil 8 RT.015 Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
637		RT.017 Jl. Sukarelawan Gg.Etam Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2330432 Pengerasan Jalan Gg. Etam RT. 017 Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
638		RT.007 Jl. M. Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2331419 Peningkatan Badan Jalan Gg. H. Daiman RT.007 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
639		RT.002 Gg. Mahkota Dewa Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270615 Lanjutan Semenisasi Gg. Mahkota Dewa RT.002 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
640		RT.009 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271719 Peningkatan Badan jalan Martadinata Handil 8 RT.009 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
641		RT.013 Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2273230 Lanjutan Semenisasi Jl. Kelapa Gading RT. 013 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
642		RT.008 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2273585 Peningkatan Badan Jalan Pelita 2 (Pengerasan dengan batu Latrit) RT.008 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
643		RT. 012 Jl. M. Hatta Gg. Veteran Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274138 Lanjutan Semenisasi Jalan Veteran RT.012 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
644		RT.001Jl. Ruhui Rahayu 1 Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2044447 Lanjutan Peningkatan Badan jalan Ruhui Rahayu 1 RT.001 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
645		RT.004 Jl. Pelita Gg. Sedulur Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086853 Peningkatan Badan Jalan (Pengecoran) Gg. Sedulur RT.014 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
646		RT.011 Jl. Martadinata Gg. Langsat Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2340396 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg. Langsat RT. 011 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
647		RT.015 Jl. Martadinata Gg. Semar Wangi Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2339933 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg. Semar Wangi RT.015 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
648		RT.015 Jl. Martadinata Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2340279 Pengingkatan Badan Jalan Gg. Abi RT.005 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
649		RT.012 Jl. M. Hatta Gg. Veteran Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2335699 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gg. Veteran RT.012 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
650		RT.007 Jl. M. Hatta Gg. Rukun Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086749 Peningkatan Badan Jalan (Lanjutan Semenisasi) Gg. Rukun RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
651		RT.001 Gg. Belimbing Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270160 Peningkatan Badan jalan Gg. Belimbing RT.001 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
652		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281865 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT.006 Tembus RT.003 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
653		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281893 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg, Ceria RT.014 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
654		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2282475 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gg. Mawar RT.020 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
655		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283245 Peningkatan badan jl Handil Resident Rt 16 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
656		RT.015 Jl. Kelapa Gading Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2335818 Peningkatan Badan Jalan Kelapa Gading RT.015 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
657		RT. 005 Jl. Sukarelawan Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346947 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gg. Saudara tembus RT.005 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
658		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283401 Lanjutan Peningkatan badan Rt 16 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
659		RT.005 Jl. Gelora/ Merdeka Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283587 Lanjutan Semenisasi Jl. Gelora (Merdeka) RT.005 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
660		RT.32 Kelurahan muara Jawa pesisir Lat 0.8364, Long 117.23476, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2398341 Jalan Becek dan Berlubang (Peningkatan badan jalan gg Qobilah Rt 32 Kelurahan muara Jawa pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
661	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281598 Pembuatan Percetakan Sawah Kelompok Tani Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Ketahanan Pangan
662	Pembangunan/Rehabilitasi RKB PAUD/TK	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2220300 Pengadaan Perlengkapan Peralatan PAUD Mekar Sari Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
663		Jl. Husni Tamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264033 TK PGRI 3 belum memiliki gedung layak sehingga perlu dibangun gedung yang baru #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
664		Jalan Petinggi Bahran RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264012 TK PGRI 2 belum memiliki gedung yang layak #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
665		GG. Nursa adah RT.15, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263982 Gedung paud Melati ada yang rusak, sehingga perlu ada pembanguna gedung paud melati #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
666		RT. 06 kelurahan Dondang Lat.0.471675104° - Long. 117.134074528° p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304268 Bangunan Rusak Parah apabila Hujan Bocor Pembuatan Kanopi TK Bhinneka Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
667		RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.82763, Long 117.25039, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246416 Bangunan tersebut tidak memiliki atap (Pengadaan Atap TK TPA Al-Qadar Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
668		Muara Jawa Ilir Jl. Pelita Handil 8 RT.014, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2331187 Pembangunan Gedung Kantor TK Paud Ceria Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
669		Muara Jawa Ilir Jl. Pelita RT.014, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2331241 Pembangunan Gudang TK Paud Ceria Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
670		Muara Jawa Ilir Jl. Pelita Handil 8 RT.014, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2331306 Pembuatan Kanopi TK Paud Ceria Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
671		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285214 Pembuatan Sarana UKS TK. PGRI Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
672	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Jalan Handil Petinggi RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263728 Banguan RKB SDN. 009 banyak yang rusak parah sehingga perlu dibangun baru sebanyak 6 RKB #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
673		Jl. Husni Thamrin RT.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263757 Gedung RKB SDN 002 sebanyak 6 Kelas rusak parah sehingga perlu dibangun yang baru #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
674		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2320347 Rehab Total Sd 015 Kelurahan Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
675		Jl. Pelita Kel. Dondang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347620 Permohonan Lanjutan Pembangunan SDN 005 Kel. Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
676		Jalan Mahakam Tengah RT.05, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264073 Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqamah memiliki kekurangan gedung RKB sehingga perlu dibangun baru #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
677		JHlana Pelita RT.001 Kelurahan Dondang Lat.0.788083° - Long. 117.229873° p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2339107 Bangunan Geedung RKB sekolah yang setingkat dengan SD dan perlu perhatian banyak dari instansi terkait Pembangunan RKB SDN 005 Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
678		jalan Pelita RT.002 kelurahan Dondang Lat.0.47283128° - Long. 117.13511240° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2224569 Bangunan Gedung MI sekolah yang setingkat dengan SD dan perlu perhatian banyak dari instansi terkait (Pembuatan Gedung MI DARUL MUTTAQIN) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
679		Jalan pelita Rt.001 Kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2224390 Belum adanya Parit Sekolah (Pembuatan Parit SDN 005 Dondang) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
680		jalapan pelita Rt.001 Kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2224276 Bangunan Tidak Begitu Layak Untuk di Gunakan Mengajar (Rebah 2 RKB SDN 005 Dondang) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
681		Jalan Pelita RT. 01 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2223841 Penahan Abrasi air untuk Tidak Longsornya parit (Pembuatan Turap SDN 005 kelurahan Dondang) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
682		Jl. Pelita Kel. Dondang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347579 Rehab Total Raung Belajar, Kantor dan Toilet MI Darul Mutaqin #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
683		Jalan Pelita RT.001 Lat.0.788083° - Long. 117.229873° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085254 Belum adanya bangunan Ruang Guru yang Memadai #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
684		RT.1 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.5012809 ,Long 117.1450794, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2235965 Pembangunan Ruang Kelas Baru (Pembuatan Gedung MI Al-Irsyad) RT.1 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
685		RT.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284052 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam rangka pemerataan pendidikan pada setiap daerah (Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah dasar Negeri 014 Muara jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
686		RT.009 Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321993 Penambahan Ruang Belajar Baru SD.008 Kelyurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
687		Jalan A. Yani RT. 009 Kel. Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2332699 Pembangunan Kelas Bertingkat (12 Lokal) SD Negeri 008 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
688		Pembangunan Ruang Lab Komputer SDN 012 P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274908 Tidak Ada Ruangan #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
689		Jl. A. Yani Gang Brunei Handil Dua, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307696 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 018 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
690		Jl. A. Yani Gang Brunei Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307685 Pembangunan RKB SDN 018 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
691		Jl. A. Yani Gang 17 Handi Dua , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307654 Pembangunan RKB SDN 017 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
692		Jl. A. Yani Gang Brunei , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307712 Pembangunan Kantin SDN 018 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
693		Jl A Yani Gang 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307604 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD 017 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
694		Jl A Yani Gang 17 Handil 2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307595 Pembangunan Ruang UKS SD 017 #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
695		MI Alhuda Muara Jawa , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266318 Bantuan Sarana dan Prasarana MI Alhuda Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
696		HANDIL 2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269919 Ruang Belajar Lantai Atas SD DDI Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
697		HANDIL DUA, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269968 Partisi (Pembatas Kelas/Roling Door) SD DDI Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
698		HANDIL DUA, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270023 Papan Nama Sekolah SD DDI Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
699		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274208 Rehab Total Bangunan Kantor SDN.007 Jadi bertingkat Ruang Guru (Lantai 1) dan Ruang Pertemuan (Lantai 2) Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
700		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274297 Rehab Total Bangunan Ruang Kelas SDN.007 Jadi bertingkat (Lantai 1, terdiri dari 3 RKB) dan (Lantai 2, terdiri dari 3 RKB) Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
701	Pembekalan Menjahit	Pembekalan Menjahit Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327500 Kurangnya Pembekalan Menjahit di Kelurahan #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
702		Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2323783 Pengadaan Mesin Jahit untuk Rumah Jahit Family Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
703	Pembekalan Tata Boga	Jl. Mahakam Ilir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276308 Pelatihan Pembuatan Kue bagi ibu ibu PKK #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
704		Pembekalan Tata Boga di Kelurahan Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327487 Kurangnya Pembekalan Tata Boga Di Kelurahan #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
705	Pembekalan Tata Rias	Pembekalan Tata Rias Kelurahan Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2327471 Kurangnya Pembekalan Tata Riasa yang ada di Kelurahan #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
706	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Jawa)	rt. 01 kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2113400 Normalisasi Saluran air Jl. Nusantara rt 01 kel. tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
707		Rt. 01 Kel. Tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2113547 Normalisasi saluran air Jl. Hassan G rt. 01 Kel. Tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
708		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2199944 Normalisasi Handil / Sungai Jln Suka Damai Rt. 02 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
709		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200600 Pembersihan drainase dan Gorong-gorong dari Suka Damai menuju Pole 2 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
710	Pencacah Sampah Organik	Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287330 Belum tersediaanya tempat Pembuangan Sampah (Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah) #OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
711	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253073 kendaraan yang sangan di perlukan saat adanya kebakaran yang jauh dari jangkauan masyarakat Mobil Pemadam Kebakaran/Fire Truck-JA 4000 L #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
712	Pengadaan Alsintan berupa Traktor Roda Empat Pengadaan Alsintan berupa Power Threser (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266156 Pengadaan Mini Traktor pertanian #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
713		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284153 Pengadaan Alat Pembajak sawah Kelompok Tani Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
714	Pengadaan Ambulans Desa (Darat dan Air)	kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221585 Pengadaan Mobil Ambulance Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Kesehatan
715		kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246753 untuk kegiatan yang sangat penting bagikebersihan lingkungan ke;urahan dondang Mobil Ambulance Lengkap dengan Fasilitas P3K Emergency Merk Suzuki APV #OPD: Dinas Kesehatan
716		Pengadaan Mobil Ambulance Kelurahan Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2305100 untuk meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat Rukun Kematian dan kesehatan #OPD: Dinas Kesehatan
717		Pengadaan Mobil Ambulan Sindang Jaya Kel.Muara Jawa Tengah P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292598 Tidak ada #OPD: Dinas Kesehatan
718	Pengadaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Jaring)	RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281288 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Insang KUB Muara Kembang Amanah RT.07 Muara Kembang #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
719		RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281227 Pengadaan Alat tangkap ikan jaring insang KUB Handil Setia RT.07 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
720		RT.03 Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281527 Pengadaan Alat tangkap (jaring insang) KUB Sinar Nilam RT.03 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
721		Jl. Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280029 Pengadaan alat tangkap ikan jaring untuk KUB Sinar Laut Jaya #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
722		Jalan Mahakam Ilir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281596 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Jaring Insang KUB Amanah Rakyat Kembang Jaya RT.03 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
723		Jl.Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279877 Pengadaan Perlataan Perikanan Bagi KUB Sinar Laut Jaya #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
724		Jl. Mahakam tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279749 Pelatihan Moderenisasi alat tangkap nelayan Muara kembang #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
725		RT.01 Kelurahan Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281059 Pengadaan alat tangkapa jala untuk kelompok tunas Karya RT.01 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
726		RT.02 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281131 Pengadaan Alat tangkap ikan jala untuk KUB Batuah RT.02 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
727		RT.07 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281175 Pengadaan Alat Tangkap ikan Jaring Insang untuk KUB Kembang Makmur Bersama RT.07 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
728		RT.11 Muara Pegah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281653 Pengadaan Alat tangkap nelayan jaring insang KUB Muara Pegah Jaya Abadi RT.11 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
729	Pengadaan Benih (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Jalur Mulyo RT.09, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346321 Optimalisasi Lahan Sawah Kelompok Tani Jalur Mulyo 25 Hektar #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan
730	Pengadaan bibit Ternak Sapi	Pengadaan Sapi Ternak dan Kandang Poktan Mandiri Raya RT. 09 Sindang Jaya (-0.86307° 117.211851°) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2305986 Menurunnya tingkat Produktifitas Ternak Sapi #OPD: Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
731	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347350 Pengadaan Bibit Durian Kelompok Tani Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
732	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Kabupaten/Jalan Poros (Kecamatan, Kelurahan, Desa)	Jalan Mahakam Tengah RT.3, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2278420 Masih kurangnya LPJU di Kelurahan Muara Kembang #OPD: Dinas Perhubungan
733		kelurahan Dondang Lanjutan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246788 perlu adanya penerangan jalan yang sangat penting karena di sepanjang jalan kelurahan dondang gelap dimalam hari Lanjutan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan #OPD: Dinas Perhubungan
734		Kelurahan Dondang Lat 0°46'49.6° Long 117°13'18.9° F4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253008 perlu adanya penerangan jalan yang sangat penting karena di sepanjang jalan kelurahan dondang gelap dimalam hari Pemasangan Penerangan Lampu 1. Jalan Kabaena RT.01 2. Jalan Masjid RT.02 3. jalan Dermawan, RT>011 Jalan Ahmad Syifa Rt.13 4. Jalan Air Panas RT.03 5. Jalan Gerbang Dayaku RT.14 #OPD: Dinas Perhubungan
735		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2342105 Kondisi Wilayah menuju Kelurahan Teluk Dalam yang masih jarang pemukiman warga, sehingga gelap gulita disaat malam hari (Lanjutan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 25 Titik Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Perhubungan
736	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306214 Pengadaan Lampu Jalan (LPJU) + TIANG (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
737		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221914 Pengadaan Tiang Lampu + Lampu Jln Suka Damai #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
738		Kelurahan Dondang Lat 0°46'49.6° Long 117°13'18.9° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253045 perlu adanya penerangan jalan yang sangat penting karena di sepanjang jalan kelurahan dondang gelap dimalam hari Lanjutan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
739		Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321727 Pemasangan Lampu LPJU & Tiang Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
740		Rawa Indah Blok A RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247855 Jalan Gelap Karna tidak ada LPJU (Pemasangan Lampu LPJU & Tiang Gg rawa Indah Blok A Rt 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
741		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285130 Pengadaan Solar Cell Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
742		Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347757 Pengadaan Lampu LED Step Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
743		Pemasangan Lampu Jalan di RT.18 Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2372364 Kurangnya Penerangan Lampu Jalan Di Wilayah Kelurahan Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
744	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2245685 untuk kegiatan yang sangat penting bagikebersihan lingkungan ke;urahan dondang Mobil Angkutan Sampah PS 120 dan Izusu Elp #OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
745	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	HANDIL MUARA JAWA ULU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2273016 Rehab Bangunan dan Pemasangan Paping Kekraf Muara Jawa #OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
746	Pengadaan Mesin Pompa khusus untuk Sarana Air Besih	Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2266166 Pengadaan Mesin Alkon #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
747	pengadaan perlengkapan olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	GUNUNG PASIR MJU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271077 Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kecamatan Muara Jawa (Basket, Bola, Voly, Panahan, Takraw, Futsal, Tenis Meja, Bulu Tangkis) #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
748		RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2243569 Pembangunan Gor Mini Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
749		RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2243903 Pengadaan Alat Olahraga Karang Taruna Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
750	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	Kel. Muara Jawa Tengah Pelatihan Penjernihan Air Bersih Lingkungan RT.15 P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292671 Kindisi Air Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
751	Pengadaan Sarana dan Prasarana perpustakaan digital Untuk Desa/Kelurahan	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2222872 Bantuan Sarana Dan Prasarana Kecamatan UMKM Kelurahan tama Pole #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
752		jalan Ahmad Sifa RT.143 lat. 0.772657° - long 117.228629° Dondang .P.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2326459 Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi Pengadaan Saarana dan Prasarana Perpustakaan kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
753	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Gapoktan Maju Sejahtera , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272373 Pengembangan Cabe #OPD: Dinas Perkebunan
754	Peningkatan, Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Jalan Mahakam ULU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264411 Semenisasi cor beton jalan poros Muara kembang sepanjang 1 Km #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
755	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Pengadaan Bibit Ikan Gapoktan Berkah Usaha Bersama RT.02 (-0.84963° 117.219493°) P2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2306270 Kurangnya Pengembangan Bibit Ikan #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
756		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346445 Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Mattirowalie #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
757		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346432 Pengadaan Benur dan nener Pokdakan Mekar Buana mandiri #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
758		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346423 Pengadaan Benur dan Nener Pokdakan Makmur sungai rambe #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
759		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346417 Pengadaan Benur dan Nener Pokdakan Karya Bersama Pagar Batu #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
760		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346397 Pangadaan Benur dan Nener Pokdakan Pagar Batu Jaya #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
761		Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346408 Pengadaan Benur dan Nener Pokdakan Makmur Jaya #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
762	Penyediaan Induk Ikan dan Udang Unggul	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2346387 Pengadaan Benur dan Nener Pokdakan Sipakaraja #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
763	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. Mahakam Ilir RT,03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281453 Pengadaan Bodi Kapal (1-3 GT) untuk KUB Sinar Cahaya Kembang RT.03 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
764		KUB Sungai Hantimun Muara Jawa Ulu , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307554 Pengadaan Perahu ketinting #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
765	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. Mahakam Tengah RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2279986 Pengadaan Mesin Cas 13 PK bagi Kelompok KUB Sinar Laut Jaya #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
766		kelurahan Dondang Lat 0°78607° Long 117.23124° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253131 usulan kelompok Nelayan yang sudah memiliki legalitas Kelompok nalayan dan membutuhkan sarana dan prasarana tangkapan ikan Pengadaan Perahu Ketinting , Panjang 7 meter,Pengadaan Mesin (13 PK) dan Pengadaan Coolbox Ikan 80 kg 7 KUB. Se kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
767		KUB Sungai Hantimun Muara Jawa Ulu , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307561 Pengadaan Mesin Ketinting #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
768	Penyediaan Pupuk untuk Kolam dan Tambak	RT.02 Kelurahan Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2302214 Bantuan Pembuatan Tambak /Keramba RT.02 Kelurahan Teluk Dalam #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
769	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Mixer, Sealer, Blender, Mesin Pengering)	Bantuan Sarana Prasarana UMKM Kelurahan Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292026 Kurangnya Sarana dan Prasarana UMKM #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
770		KUB Sungai Hantimun Muara Jawa Ulu , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2307584 Pengadaan Coolbox Ikan #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
771		RT 36, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267327 pembuatan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar kolam terpal RT.36 #OPD: Dinas Kelautan dan Perikanan
772	Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm)	RT. 13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2317417 sebagai bukti kepedulian masyarakat untuk memadamkan api apa bila ada kebakaran Pembangunan Posko Balakarcana Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
773		Jl. Ir. Sokearno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283573 Pengadaan Peralatan Relawan BPDP #OPD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
774	Penyediaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan usia 16-30 - penyediaan peralatan perbengkelan, sablon, barista, babershop, loundry	Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247585 Bantuan sarana Prasaran kecamatan Klinik Bersama Pelatihan kerja #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
775		Handil Dua Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2315465 Pelatihan Barista Coffe Kel Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
776		HANDIL, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271753 Pengadaan Perlengkapan Alat Dapur UMKM RT. 30 #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
777		JL IR SOEKARNO, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271405 Bantuan Sarana dan Prasarana Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Muara Jawa #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
778		HANDIL MJU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271318 Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM Kelurahan Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
779		HANDIL, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271121 Penyediaan Sarana Prasaran Kelembagaan Kepemudaan Muara Jawa (KNPI Muara Jawa) #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
780		RT 30, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2271792 Pengadaan Perlengkapan LINMAS Warga RT. 30 #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
781	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	Jl. Petai Kelurahan Dondang, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347709 Pembangunan Stadion Mini Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
782		Pengurukan lapangan sepak bola Handil 6 RT.07 Kel.Muara Jawa Tengah (524120.02 - 9905100.98) P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2275250 Kondisi Lapangan Kurang Baik #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
783		RT.008 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2273337 Pembuatan Jembatan Lapangan Bola Handil 9 RT.008 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
784		RT.016 Jl. M.Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2243773 Pembangunan Gor Mini Kelurahan Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
785		RT.008 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347016 Lanjutan Pengurukan Lapangan Sepak Bola Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
786		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2283381 Pembuatan Panggung di Lapangan Sepak Bola Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
787	Rehab/pembangunan gedung/tempat olahraga tradisional dan rekreasi (Olahraga Perahu Naga, perahu ces, begasing, belogo, mancing dll)	RT.07 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296100 Belum tersedianya Tambatan perahu yang memadai untuk Nelayan (Pembuatan Tambatan Perahu Rt.07 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
788		RT.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287387 Belum tersedianya tambatan perahu yang memadai (Lanjutan Pembuatan Tambatan Perahu Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
789		RT. 07 kelurahan Dondang lat 0.790189, long 117.229362 p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254988 Belum adanya pasar yang bisa menampung baginwarga untuk usaha dilingkungan kel. Dondang Pembangunan Pasar Dondang berseri Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
790		RT. 02 kelurahan Dondang Lat 0.781849, Long 117.235888 P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246690 beluma adanya pendopo untuk poenyimpanan barang nelayan yang aktif kelaut sebagai tempat yang aman untuk meninggal batang tangkapan Pendopo Nelayan KUB Dondang Tepian #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
791	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan, BPU Kecamatan)	Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281934 Pembuatan Halaman Paving Blok Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
792		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276147 Rehab Atap Kantor Kelurahan tama pole (P1) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
793		Jalan Petinggi Bahran RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264825 Pembangunan Gedung BPU Kelurahan Muara Kembang #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
794		jalan ahmad sifa rt.13 Kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085335 Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun Pembuatan Ruang Pertemuan Kantor Lurah Dondang #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
795		Kelurahan Teluk Dalam, 0.80411, 117.1918, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301541 Kondisi Gedung BPU terlihat kumuh, atap dan diniding perlu direhab (Rehab Berat Gedung BPU Kelurahan) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
796		Kelurahan Tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2277747 Rehab Gedung Serba Guna (BPU) Kel. Tama pole #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
797		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288709 Kondisi Kantor LPM saat ini perlu direhabilitasi (Rehab Kantor LPM Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
798		Jalan Teluk Ladang RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Lat-0,835218, Long: 117,231824, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269552 Kondisi Pagar Retak dan Gapura terlihat kumuh (Rehab Pagar dan Gapura Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
799		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2291997 Kondisi Kantor LPM saat ini Rusak Ringan dibeberapa bagian (Rehab Kantor LPM Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
800		Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2298550 Study Kelayakan Pembangunan Pasar Muara Jawa #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
801		Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2296915 Kondisi lapangan Voly kurang memadai (Rehab Lapangan Voly Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
802		Jalan Ahmad Sifa Rt.13 Kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2085295 Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun Pembuatan Toilet Ruang Pertemuan Kantor Lurah Dondang #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
803		Jalan Ahmad Sifa Rt.13 lat. 0.772657° - long 117.228629° P.1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2035207 Pagar belum selesai di bangun Lanjutan Pembuatan Pagar kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
804		RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2247656 Lanjutan Pembuatan Balai Pertemuan KUB Penjahit Saqinah Rt 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
805		RT.07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°82838, Long 117.250066, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254272 Pembuatan Gedung Pertemuan Warga RT.07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
806		RT.14 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°83167, Long 117.232527, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254291 Pembangunan Aula RT.14 Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
807		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280914 Pembuatan Pagar Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
808		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281039 Pembuatan Halaman Paving Blok Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
809		Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284800 Pembuatan Tempat Parkir Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
810		Kel. Muara Jawa Ilir Jl. M. Hatta Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2340987 Pembuatan Tempat Parkir Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
811		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284182 Pembangunan Pagar Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
812	Rehabilitasi Jembatan/Box Culvert/Gorong gorong di Jalan Poros Kabupaten	Jl. Mahakam Ulu RT.05, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264468 Jembatan Handil Sulawesi merupakan jembatan yang ada di jalan porors muara kembang yang kondisi sudah sangat rusak parah panjang 12 M, lebar 5 meter #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
813		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280461 Pembuatan Jembatan Beton Jl. Martadinata Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
814		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2280512 Pembuatan Jembatan Beton Jl. Sukarelawan Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
815		Handil Surya RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264507 Jembatan handil Surya merupakan jembatan yang ada di jalan poros yang mengalami kerusakan sehingga perlu dibangun jembatan beton Panjang 16 lebar 5 #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
816		Jalan . handil Buhari RT.02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272370 Jembatan Handil Buhari Rusak Parah sehingga perlu dibangun jembatan beton RT.2 #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
817		RT.01 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301859 Kondisi gorong-gorong sebagian tertutup tanah (Pembuatan Gorong gorong Jalan RT.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
818		RT.02 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2301920 Kondisi gorong-gorong sebagian tertutup tanah (Pembuatan Gorong gorong Jalan RT.02 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
819		Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2287431 Kondisi gorong-gorong tersebut rusak, sehingga aliran airnya tidak lancar (Rehab 2 buah gorong 2 Jalan sempati Rt.05 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
820		Gang Bugis Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288731 Kondisi Gorong-Gorong Rusak sehingga dibutuhkan pembangunan yang baru (Pembangunan Gorong - gorong Gang Bugis Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
821		RT.01 Kelurahan Teluk Dalam , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2292070 Kondisi saat ini belum memiliki gorong-gorong yang memadai (Pembuatan Gorong -gorong Rt.01 Kelurahan Teluk Dalam) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
822		RT. 03 kelurahan Dondang Lat 0.776620, Long 117.231700 p.2 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2290373 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan pembuatan Gorong-Gorong Jln Air Panas RT.003 #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
823		Jl. Teluk Ladang Gang SMK RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir 0°50'06"S 117°13'52"E , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2267636 Kondisi Gorong-Gorong Saat ini Rusak, sehingga aliran airnya tidak lancar (Penggantian Goroing-Gorong Gg. SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
824		RT.011 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2272706 Pembangunan Jembatan Beton Jl. Martadinata RT.011 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
825		jl. Mahakam Ilir RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2276425 Pembuatan Box Culvert jalan Mahakam ilir RT.14 #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
826		RT. 003. RT. 009, RT. 011, RT. 015, RT. 019 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2048109 Pembuatan Jembatan Beton Jalan Martadinata Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
827		jL.Sukarelawan Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2324635 Pembuatan Jembatan Beton Jl. Sukarelawan Handil 9 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
828		RT.005 Jl. Sukarelawan Handil 9, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2293882 Pembangunan Jembatan Gg. Miftahul Ulum RT.005 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
829		RT.003 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270591 Pembangunan Jembatan Beton Jl. Martadinata RT.003 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
830	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2220752 Rehab Atap Pusban Tama Pole #OPD: Dinas Kesehatan
831		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2220831 Pengurukan Halaman Pusban Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Kesehatan
832		RT. 06 kelurahan Dondang lat 0.787165, Long 117.225975 p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2321074 Belum adanya Fasilitas Puskesmas Pembantu yang memadai bagi masuarakat agar kalau berobat tidak jauh Puskesmas Pembantu Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kesehatan
833		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2220791 Pengadaan Pagar Pusban Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
834		Kelurahan Muara Jawa Ilir Jl. Pelita Handil 8 RT.0120, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2330923 Pemasangan Paving Blok halaman Pusban Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kesehatan
835		RT.020 Jl. Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2244223 Pemasangan Paving Blok halaman Pusban Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Kesehatan
836	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Jawa)	Jalan Ahmad Sifa Rt.13 lat. 0.772657° - long 117.228629° p.1 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2035453 Beluma adanya selesainya Pemasangan Paving Halam kantor Lurah Dondang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
837		RT 01 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2196325 Penimbunan bahu Jalan Hasbullah (kiri kanan) Rt. 01 Kelurahan Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
838		RT 1 GANG KETAPI, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2112453 Peningkatan Jln Ketapi menuju jln Pole 2 (P1) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
839		RT. 01 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2196447 Peningkatan badan jalan simpang 4 handil gemuk menuju pole 2 Rt. 01 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
840		Peningkatan Jalan Gang Bahagia RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.834836° , Long 117.245131°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227864 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Bahagia RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
841		Rt. 03 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2201267 Peningkatan Jln. Nusantara Pole 3 kel. tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
842		rt. 01 kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2113215 Peningkatan Jln Gg. Gilingan Padi rt. 01 kel. tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
843		Rt. 01 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2112754 Pembuatan Gang Kuburan Muslimin RT 01 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
844		Rt. 01 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2196705 Pebuatan Gang Pesantren #OPD: Kecamatan Muara Jawa
845		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2196890 Peningkatan Jln Pole 2 menuju Jln Pole 3 Rt. 02 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
846		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2197331 Pembuatan Gapura Tapal Batas antara Kel.Tama Pole RT 2 menuju Handil Batuah Kel. Muara Kembang #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
847		Rt. 01 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2196525 Peningkatan badan jalan Hassan G menuju jalan handil gemuk Rt. 01 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
848		rt 02 kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2199033 Rehab Jembatan menuju ke Pelabuhan Tama Pole rt. 02 Kel. tama pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
849		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200750 Peningkatan jalan suka damai menuju jalan pole 3 Rt. 02 Kel. Tama Pole (P1) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
850		rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200051 Peningkatan Badan Jalan Kanal rt 02 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
851		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200267 Peningkatan Badan Jalan Sungai Sawa Rt. 02 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
852		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200439 Lanjutan Peningkatan Jalan Pole 3 menuju Pole 2 rt. 01 Kel. Tama Pole #OPD: Kecamatan Muara Jawa
853		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2222402 Lanjutan Turap & Pengurukan Jalan danau Kering RT 03 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
854		Rt. 02 Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2200550 Lanjutan Peningkatan Jalan Pole 3 menuju Jln, Suka Damai #OPD: Kecamatan Muara Jawa
855		Jalan Gerbang Dayaku Rt.14 Kelurahan Dondang Lat 0.788321, Long 117.219777 P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2226595 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjutan Semenisasi Jln Gerbang Dayaku Rt.014) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
856		Jalan Dermawan RT.11 kelurahan dondang lat 0.781503, Long.117.222864 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229275 Jalan yang dilalui untuk kepamakaman rusak parah dan susah dilewati kendaraan Lanjuta Semenisasi Jalan Dermawan Kelurahan Dondang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
857		Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.8269158, Long 117.240117, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227897 Jalan Rusak,Becek Susah Dilalui (Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) P1 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
858		P Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.826976°, Long 117.236898°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227914 Jalan Licin dan Banjir Saat hujan ,(Peningkatan Badan Jalan Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) P1 #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
859		Gang Hidayah RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat '0.836382° , Long 117.239057°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227934 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Hidayah RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
860		gg. Annisa RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat '0.836825° ,Long 117.240441°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227945 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (peningkatan badan jalan gg. Annisa RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
861		jalan pesisir raya RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesis Lat '0.839921° , Long 117.248186°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227955 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (peningkatan badan jalan pesisir raya RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesis) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
862		Gang Bersama RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.835518° , Long 117.245643°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2227967 Jalan rusak parah dan susah dilewati kendaraan (peningkatan Jalan Gang Bersama RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
863		Gang Bintang RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.833539, Long 117.249319 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228219 Jalan Becek susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Bintang RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
864		Jalan Muslimin RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.833722, Long 117.249233 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228229 Jalan rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Muslimin RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
865		Gang Bahagia RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.834029, Long 117.24891 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228238 Jalan rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Bahagia RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
866		Gg.Samudera RT 03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.831717, Long 117.249577 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228291 parit buntu membuat aliran air tidak lancar (Semenisasi Gg.Samudera RT 03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
867		Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.835939, Long 117.232709, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231747 Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) P1 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
868		Gang Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231812 Jalan Rusak dan Becek susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
869		RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.829524, Long 117.247604, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231821 Jalan Rusak dan susah d lewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Merak RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
870		Gang Camar RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231840 Jalan rusak dan berlubang (Peningkatan Jalan Gang Camar RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
871		Gang Garuda RT. 07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0°828402, Long 117.250183, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2231860 Jalan Berlubang (Peningkatan Jalan Gang Garuda RT. 07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
872		Gang Sulawesi RT.08 Kel.Muara Jawa Pesisir Lat 0.827785, Long 117.250365, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232077 Jalan Berlubang susah d lewati kendaraan (Peningkatan Jalan Gang Sulawesi RT.08 Kel.Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
873		Gang Alqodiri Blok D RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232079 Jalan Rusak dan Berlubang (Peningkatan Badan Jalan Gang Alqodiri Blok D RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
874		Gang Alqodiri Blok E RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.828217, Long 117.249071, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232082 Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Alqodiri Blok E RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
875		Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Lat 0.8269158, Long 117.240117, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2233817 Jalan Rusah dan Berlubang (Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
876		Gang Shalom RT 11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2233523 Lanjutan semenisasi Gg Shalom RT.11 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
877		Gg. Reformasi RT.13, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2233566 Semenisasi Jalan Gg. Reformasi RT.13 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
878		Gg Sukamto RT 34, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2233721 Seminisasi Gg Sukamto RT 34 #OPD: Kecamatan Muara Jawa
879		RT.014 Jl. Pelita Gg. Sedulur Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086994 Peningkatan Badan Jalan (Pengecoran) Gg. Sedulur RT.014 Kel. Muara jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
880		RT.006 Jl. Sukarelawan Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2087129 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Tembus RT. 006 Handil 9 ke Handil 8 Kel. Muara jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
881		RT.007 Jl. M. Hatta Gg.Rukun Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2112724 Peningkatan Badan Jalan (Lanjutan Semenisasi) Gg. Rukun RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
882		RT.018 Jl. Martadinata Gg.Pelita Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2125668 Pengerasan Latrit Gg. Pelita RT.018 Kel. Mara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
883		RT.01 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229575 Jalan Kearah Handil Betuah Masih Berupa Tanah dan Becek pada saat hujan dai air pasang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
884		Jalan Handil Gemuk RT.01, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229587 Jalan Handil Gemuk RT.01 masih berupa tanah sehingga perlu di semenisasi #OPD: Kecamatan Muara Jawa
885		GG.Salasiah RT.10, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229668 Jalan GG. Salasih RT.10 Masih Berupa Tanah #OPD: Kecamatan Muara Jawa
886		GG. Handil Setia RT.15, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229672 Badan Jalan GG. handil setia RT.15 masih berupa tanah #OPD: Kecamatan Muara Jawa
887		Jalan Petinggi Baharan RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229702 Badan jalan Petinggai Bahran RT.03 Masih berupa tanah #OPD: Kecamatan Muara Jawa
888		Jl. Surya Bahagia RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229766 Badan Jalan GG. H. Mursalim RT.06 Masih Berupa tanah #OPD: Kecamatan Muara Jawa
889		Jalan Handil Surya RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229775 Badan Jalan Handil Surya RT. 06 masih berupa tanah sehingga perlu ditingkatkan lagi #OPD: Kecamatan Muara Jawa
890		RT.05, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232435 Badan Jalan GG. Amal Masih Berupa Tanah sehingga becek dan licin #OPD: Kecamatan Muara Jawa
891		RT.07, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232650 Badan Jalan GG.Amanah RT.07 masih berupa tanah sehinga perlu disemenisasi #OPD: Kecamatan Muara Jawa
892		Jalan Mahakam Ilir RT.02, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232658 Penurupan dan Pengurukan Lokasi Kuburan di RT. 02 Kelurahan Muara Kembang #OPD: Kecamatan Muara Jawa
893		RT.009 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2046431 Peningkatan Badan jalan Martadinata Handil 8 RT.009 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
894		RT.001 Jl. Ruhui Rahayu 1 Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2124156 Lanjutan Peningkatan Badan jalan Ruhui Rahayu 1 RT.001 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
895	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Jawa)	RT.003 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2125385 Pembangunan Jembatan Beton Jl. Martadinata RT.003 (6 Unit) Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
896		Jl. Darussalam Handil 6 RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2334596 Pembuatan Jembatan Beton Gg Pasar tembus Handil 6 bawah RT. 006 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Kecamatan Muara Jawa
897		Jl. handil Sulwesi RT.05, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232465 Jembatan Handil Sulawesi rusak parah, sehingga perlu di ganti dengan jembatan beton, jembatan handil sulawesi merupakan urat nadi masyarakat muara kembang karena terletak di jalan poros #OPD: Kecamatan Muara Jawa
898		Gang Ismail RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Let 0.836317°, Long 117.239072°, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2228095 Jembatan Masik terbuat dari kayu (Pembuatan Jembatan Beton Gang Ismail RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir) #OPD: Kecamatan Muara Jawa
899		RT.007 Jl. Martadinata Gg. Hibrida Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2121120 Peningkatan / Perbaikan Jembatan Jln Hibrida RT.007 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
900		RT.01, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229584 Jembatan RT.01 rusak parah dan perlu diperbaiki #OPD: Kecamatan Muara Jawa
901		GG. Handil Surya RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2229792 Jembatan GG. handil surya sudah banyak yang rusak #OPD: Kecamatan Muara Jawa
902		RT.11 Muara Pegah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232685 Jembatan RT.11 Muara Pegah banyak yang rusak sehingga perlu direhabilitasi #OPD: Kecamatan Muara Jawa
903		Muara Pegah RT.11, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2232667 Jembatan diatas air rt.11 Muara Pegah banyak rusak sehingga perlu direhabilitasi #OPD: Kecamatan Muara Jawa
904		RT.009 Jl. Martadinata Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2046222 Rehab atau Pembuatan Jembatan jalan Poros RT.009 Handil 8 menuju handil 7 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Kecamatan Muara Jawa
905	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Handil Surya RT.06, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2264544 Jalan handil surya merupakan jalan kebun untuk mengangkut hasil kebun kelapa sawit yang kondisinya sangat rusak parah, sehingga perlu diperbaiki #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
906		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281272 Peningkatan Badan Jalan Kelapa Gading RT.015 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
907		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281461 Peningkatan badan jl Kelompok Tani Ruhui Rahayu 2 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pekerjaan Umum
908	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara PAUD/TK	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219708 Pemasangan atap kanopi PAUD Mekar Sari Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
909		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219613 Pemasangan Paving Blok PAUD Mekar sari kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
910		RT. 10 kelurahan Dondang Lat.0.471443876° - Long. 117.132041968° p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253353 Halaman Kantor Perlu Nya pengurukan/ Penimbunan Karena Lokasi Masih Blm Maksimal Penimbunan Halaman SKB #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
911		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285091 Pengadaan Alat Permainan TK Ceria Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
912		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285224 Pemasangan Kanopi APE TK. PGRI Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
913		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285110 Pengadaan Alat Permainan TK RA Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
914	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219504 Pemasangan Paving Blok SD.015 Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
915		Jalan Pelita Rt.001 Kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2224318 Halan Pas Musim Hujan Becek dan tergrng AIR (Peningkatan Halaman Sekolah Semenisasi,penimbunan Tanah, Pemasangan Paving SDN 005 Dondang) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
916		Jalan Handil Petinggi RT.03, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263927 Halaman SDN 009 masih berupa tanah sehingga pada saat hujan menjadi becek dan licin #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
917		Jl. Husni Thamrin Rt.08, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263898 Halaman SDN 002 belum disemenisasi sehingga becek dan licin pada saat hujan #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
918		Kel. Muara Jawa Ilir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2274519 Pembuatan Rest Area dan Halte Sekolah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
919	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SMP	Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2309006 Kondisi Pagar SMPN 004 belum selesai terbangun keliling sekolah (Pembuatan Pagar Beton SMPN.004 Muara Jawa) #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
920		Jalan Handil Petinggi RT.14, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2263836 Halaman SMPN 3 masih berupa tanah sehingga pada saat hujan becek dan licin #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
921	Workshop Manajemen produksi seni pertunjukkan (Seni Tari)	GUNUNG PASIR, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270255 Pengadaan Alat Gamelan Kesenian Tari Tradisional Paguyuban TURONGGO DERGI JENOWO #OPD: Dinas Pariwisata
922		GUNUNG PASIR MJU, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270307 PESPARAWI KUKAR KONTINGEN KEC MUARA JAWA #OPD: Dinas Pariwisata
923		RT 31, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270331 Pengadaan sound system dan Alat Seni Budaya Sekretariat Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) RT 31 #OPD: Dinas Pariwisata
924		Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2284557 Pengadaan alat Kesenian Kuda Lumping Kel. Muara Jawa Ulu #OPD: Dinas Pariwisata
925	Workshop pengolahan kreasi Kriya (Kerajinan Tangan)	GUNUNG PASIR, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2270920 Workshop Kerajinan Tangan untuk Pelaku Ekraf Kuliner dan Kriya #OPD: Dinas Pariwisata
926	Bantuan Belanja Hibah Untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah	RT. 09 kelurahan Dondang Lat.0.78177° - Long. 117.22140° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246765 untuk angkutan gratis masyarakat kelurahan dondang untuk berobat Pembuatan Pagar Pemakaman Muslimin Kelurahan Dondang 600 Meter #OPD: Sekretariat Daerah
927	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2086667 Pembuatan Drainase Gg. Julak RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
928		Jl. Maju Sejahtera Handil 8, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2285027 Pembuatan Drainase Jl. Maju Sejahtera Kel. Muara Jawa Ilir #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
929	Fasilitasi Pelatihan Olahan Pangan dan Sertifikasi Halal Bagi IKM	Jalan Ahmad Sifa RT.13 Kelirahan Dondang lat. 0.772947° - long 117.228593° p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2325982 Belum adanya Pengetahunanyang sesuai dengan PKK RT Pelatihan PKK RT kelurahyan Dondang #OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
930	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jalan M. Hatta RT. 028 Kel. Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2347280 Pembangunan posyandu bandeng 2 kelurahan muara Jawa pesisir #OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
931	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2288673 Kondisi Pembangunan Kantor belum selesai, (Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam) #OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
932	Pembangunan Pagar SD	RT. 01 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2310318 Demi keamanan dan ketertiban sekolah pembuatan Pagar SDN 005 Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
933	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2305921 Pengingkatan Jalan Pole 1 kelurahan tama pole (P2) #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
934		Lanjutan Semenisasi Gg. Hidayah RT. 3 Kel. Muara Jawa Tengah P1, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2269439 Kondisi Jalan Kurang Baik #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
935		Jl. Handil Gemuk Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2281151 Peningkatan Jalan Penghubung Kelurahan Tama Pole - Kelurahan Muara Kembang #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
936	Pembangunan/Rehabilitasi RKB PAUD/TK	Jlan Diponegoro RT.006 Kelurahan Dondang Lat.0.471675104° - Long. 117.134074528° p.2, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2304232 Bangunan Rusak Parah apabila Hujan Bocor Rehab Aula TK Bhinneka Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
937	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Rt 01 Kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219342 Rehab Atap SD 015 Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
938		RT. 02 kelurahan Dondang Lat.0.47283128° - Long. 117.13511240° p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2339175 Bangunan Gedung MI sekolah yang setingkat dengan SD dan perlu perhatian banyak dari instansi terkait Pembuatan Gedung MI DARUL MUTTAQIN #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
939		RT. 01 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2310344 Bangunan Tidak Begitu Layak Untuk di Gunakan Mengajar Rebah 2 RKB SDN 005 Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
940		Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2219394 RehabTotal Kantor Kepala Sekolah SD.015 Kel. Tama Pole #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
941	Pengadaan Ambulans Desa (Darat dan Air)	Jalan Ahmad Sifa RT.13 Lat.0.77543° - Long. 117.22656° p.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2350473 untuk kegiatan yang sangat penting bagikebersihan lingkungan ke;urahan dondang Mobil Ambulance Lengkap dengan Fasilitas P3K Emergency Merk Suzuki APV #OPD: Dinas Kesehatan
942	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Kel. Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2221722 Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan (LPJU) + Tiang #OPD: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
943	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	RT. 07 kelurahan Dondang Lat 0.791142, Long 117.226653 P.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246648 Belum adanya Stadion Mini untuk meningkatkan prostifitas anak muda dalam bidang olah raga Pembangunan Stadion Mini Kelurahan Dondang 13.000 m2 #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
944		Jalan Petai RT.005 Kelurahan Dondang Lat 0.791142, Long 117.226653np.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2339682 Belum adanya Stadion Mini untuk meningkatkan prostifitas anak muda dalam bidang olah raga Pembangunan Stadion Mini Kelurahan Dondang 13.000 m2 #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
945	Rehab/pembangunan gedung/tempat olahraga tradisional dan rekreasi (Olahraga Perahu Naga, perahu ces, begasing, belogo, mancing dll)	RT. 07 kelurahan Dondang lat 0.790189, long 117.229362 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2246635 Belum adanya pasar yang bisa menampung baginwarga untuk usaha dilingkungan kel. Dondang Pembangunan Pasar Dondang berseri Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
946	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	RT. 06 kelurahan Dondang lat 0.787165, Long 117.225975 p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2254945 Belum adanya Fasilitas Puskesmas Pembantu yang memadai bagi masuarakat agar kalau berobat tidak jauh Puskesmas Pembantu Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kesehatan
947		RT. 06 kelurahan Dondang lat 0.787165, Long 117.225975 P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2314085 Belum adanya Fasilitas Puskesmas Pembantu yang memadai bagi masuarakat agar kalau berobat tidak jauh Puskesmas Pembantu Kelurahan Dondang #OPD: Dinas Kesehatan
948	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara PAUD/TK	RT. 10 kelurahan Dondang Lat.0.471443876° - Long. 117.132041968° p.4 , Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2253362 Halaman Kantor Perlu Nya pengurukan/ Penimbunan Karena Lokasi Masih Blm Maksimal Penimbunan Halaman SKB dan pemasangan Paving #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
949	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD	RT. 01 kelurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P.4, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2310362 Halan Pas Musim Hujan Becek dan tergrng AIR Peningkatan Halaman Sekolah Semenisasi,penimbunan Tanah, Pemasangan Paving SDN 005 Dondang #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
950	Pembangunan Pagar SD	Jl. A. Rahman Hakim Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384420 Pembangunan Pagar keliling SDN 011 Kec. Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
951	Pembangunan/Rehabilitasi RKB PAUD/TK	Jl. Ir. Soekarno Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2383623 Peningkatan Kapasitas Guru PP PAUD Kecamatan Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
952	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Jl. A. Rahman Hakim Kel. Muara JAwa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384463 Pembangunan Ruang UKS SDN 011 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
953		Jl. A. Rahman Hakim Kel. Muara JAwa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384502 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 011 Kec. Muara Jawa #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
954		Jl. A. Rahman Hakim Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384525 Pembangunan RKB 3 Lokal SDN 011 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
955		Jl. Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384789 Pembangunan Ruang UKS SDN 012 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
956		Jl. Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384817 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 012 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
957		Jl. Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384838 Pembangunan Kantin Sehat 2 Lokal SDN 012 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
958		Jl. Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384879 Pembangunan Gazebo dan Panggung Sekolah SDN 012 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
959		Jl. Darussalam Kel. Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2384896 Pembangunan RKB SDN 012 Kel. Muara Jawa Tengah #OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
960	Pembekalan Menjahit	Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara			ID SIPD: 2398554 Pemohonan Pelatiha Menjahit dan Sablon Kelompok Usaha Bersama MULYA JAYA Kelurahan Muara Jawa Pesisir #OPD: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan RKPD diwujudkan melalui Penyusunan Renja-PD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Muara Jawa dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah, dimana secara teknokratis prioritas Daerah telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Muara Jawa mempunyai tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”, yang artinya meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan Daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas Daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”, yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya interkoneksitas antar-wilayah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang -undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, sertapelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kecamatan sebagai PD juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan PD lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memnberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalamupaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Daerah.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rumusan Program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Perumusan Program dan kegiatan di Kecamatan Muara Jawa diarahkan untuk mencapai visi dan misi Daerah, sehingga Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Daerah nantinya.

- Pencapaian *SDGs*

  Sustainable Development Goals merupakan sebuah Program pembangunan berkelanjutan dimana kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar-negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani *SDGs*, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target *SGDs*. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target *SDGs* ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengetasan Kemiskinan

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Muara Jawa. Program dan kegitan yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Berdasarkan standar pelayanan minimal setiap unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan kegiatan di Kecamatan Muara Jawa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program pelayanan administrasi kantor dan program peningkatan sarana dan prasarana.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Muara Jawa memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil berupa UKM (Usaha Kecil Menengah), di bidang peternakan, perikanan, pertanian obyek-obyek pariwisata kota juang dan migas. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Muara Jawa melalui penyusunan berbagai Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

   a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

      Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 adalah 5 (lima) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan.

   b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

      Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Jawa dan melingkupi 8 (delapan) kelurahan.

   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Kebijakan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan kewenangan yang dilimpahkan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2026 dalam tabel T.C-33 sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
1	2	3	4	5		6	7	12	5		6
	KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN	**Kecamatan Muara Jawa**				**54.412.725.138,00**					**90.899.972.854,00**
	KECAMATAN MUARA JAWA	**Kecamatan Muara Jawa**				**40.026.957.638,00**					**74.454.632.854,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**20.140.307.638,00**			**67**	**Nilai**	**25.872.982.854,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9**	**Dokumen**	**340.000.000,00**			**36**	**Dokumen**	**575.000.000,00**
7.01.01.2.01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**40.000.000,00**			**3**	**Dokumen**	**140.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	-			1	Dokumen	100.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	30.000.000,00			1	Dokumen	30.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Renja - P	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	10.000.000,00			1	Dokumen	10.000.000,00
7.01.01.2.01.02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**0**	**Dokumen**	**-**			**1**	**Dokumen**	**5.000.000,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-			1	Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.03	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**0**	**Dokumen**	-			**1**	**Dokumen**	**5.000.000,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-			1	Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3**	**Laporan**	**30.000.000,00**			**3**	**Laporan**	**70.000.000,00**
	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	30.000.000,00			3	Laporan	70.000.000,00
7.01.01.2.01.07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Laporan**	**20.000.000,00**			**2**	**Laporan**	**30.000.000,00**
	LHE SAKIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	10.000.000,00			1	Laporan	30.000.000,00
	Evaluasi Renstra	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	10.000.000,00			1	Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.01.09	**Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah**	**200**	**Data**	**250.000.000,00**			**200**	**Data**	**300.000.000,00**
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	250.000.000,00			200	Data	300.000.000,00
7.01.01.2.01.10	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**0**	**Berita Acara**	**-**			**25**	**Berita Acara**	**25.000.000,00**
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita Acara	-			25	Berita Acara	25.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**14**	**Laporan**	**16.217.892.420,00**			**14**	**Laporan**	**17.571.252.456,00**
7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**924**	**Orang/bulan**	**15.731.492.420,00**			**924**	**Orang/bulan**	**17.059.852.456,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	924	Orang/bulan	15.731.492.420,00			924	Orang/bulan	17.059.852.456,00
7.01.01.2.02.05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	**Laporan**	**25.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**25.000.000,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00			1	Laporan	25.000.000,00
7.01.01.2.02.07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**14**	**Laporan**	**461.400.000,00**			**14**	**Laporan**	**461.400.000,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	14	Laporan	461.400.000,00		Honorarium Pengelola Keuangan PD	14	Laporan	461.400.000,00
7.01.01.2.02.08	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**0**	**Dokumen**	-			**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen	-			1	Dokumen	25.000.000,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan**	**1017**	**Unit**	**130.200.000,00**			**1017**	**Unit**	**280.200.000,00**
7.01.01.2.03.01	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00			1	Dokumen	25.000.000,00
7.01.01.2.03.02	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	**50.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**150.000.000,00**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	50.000.000,00			1	Dokumen	150.000.000,00
7.01.01.2.03.03	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**0**	**Laporan**	-			**1**	**Laporan**	**50.000.000,00**
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	-			1	Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.03.05	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	**Laporan**	**55.200.000,00**			**12**	**Laporan**	**55.200.000,00**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00		Honorarium Pengelola Barang PD	12	Laporan	55.200.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**170**	**Orang**	**50.000.000,00**			**170**	**Orang**	**705.511.992,00**
7.01.01.2.05.01	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-			0	Unit	-
7.01.01.2.05.02	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**0**	**Paket**	-			**149**	**Paket**	**162.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-			149	Paket	162.000.000,00
7.01.01.2.05.09	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**0**	**Orang**	-			**15**	**Orang**	**200.000.000,00**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	0	Orang	-			15	Orang	200.000.000,00
7.01.01.2.05.10	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**10**	**Orang**	**50.000.000,00**			**120**	**Orang**	**143.511.992,00**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	50.000.000,00			120	Orang	143.511.992,00
7.01.01.2.05.11	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**0**	**Orang**	-			**20**	**Orang**	**200.000.000,00**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-			20	Orang	200.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**11**	**Layanan**	**400.518.500,00**			**11**	**Layanan**	**1.119.200.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**50.000.000,00**			**1**	**Paket**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00			1	Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**25.000.000,00**			**1**	**Paket**	**170.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00			1	Paket	170.000.000,00
7.01.01.2.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.000.000,00**			**1**	**Paket**	**25.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00			1	Paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**125.000.000,00**			**1**	**Paket**	**300.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	125.000.000,00			1	Paket	300.000.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**20.569.000,00**			**1**	**Paket**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.569.000,00			1	Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.07	**Penyediaan Bahan/Material**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**25.000.000,00**
	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**1**	**Laporan**	**20.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**26.560.000,00**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	20.000.000,00			1	Laporan	26.560.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	91	**Laporan**	**75.000.000,00**			426	**Laporan**	**350.000.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91	Laporan	75.000.000,00			426	Laporan	350.000.000,00
7.01.01.2.06.10	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**5000**	**Dokumen**	**39.949.500,00**			**5000**	**Dokumen**	**70.000.000,00**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	39.949.500,00			5000	Dokumen	70.000.000,00
7.01.01.2.06.11	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**1**	**Dokumen**	**35.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**52.640.000,00**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00			1	Dokumen	52.640.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**3**	**Unit**	**150.000.000,00**			**31**	**Unit**	**1.086.262.000,00**
7.01.01.2.07.01	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.02	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**1**	**Unit**	**100.000.000,00**			**2**	**Unit**	**697.882.000,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin operasional Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	100.000.000,00			1	Unit	183.440.000,00
	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin untuk kendaraan patroli/operasional Trantibmas	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	-			1	Unit	514.442.000,00
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**2**	**Unit**	**50.000.000,00**			**15**	**Unit**	**90.000.000,00**
	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	50.000.000,00			15	Unit	90.000.000,00
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**13**	**Unit**	**98.380.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			13	Unit	98.380.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**1**	**Unit**	**200.000.000,00**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			1	Unit	200.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**2.261.696.718,00**			**12**	**Bulan**	**3.480.556.406,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**2.500.000,00**			**12**	**Laporan**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000,00			12	Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**1.462.920.394,00**			**12**	**Laporan**	**1.462.920.394,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.462.920.394,00			12	Laporan	1.462.920.394,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**796.276.324,00**			**12**	**Laporan**	**1.967.636.012,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	796.276.324,00		Pagu anggaran dapat berkurang menunggu penerbitan SK P3K	12	Laporan	1.967.636.012,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**63**	**Unit**	**590.000.000,00**			**430**	**Unit**	**1.055.000.000,00**
7.01.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**			**1**	**Unit**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00			1	Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**8**	**Unit**	**225.000.000,00**			**8**	**Unit**	**390.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	225.000.000,00			8	Unit	390.000.000,00
7.01.01.2.09.03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya**	**1**	**Unit**	**50.000.000,00**			**1**	**Unit**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00			1	Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.09.05	**Pemeliharaan Mebel**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**50**	**Unit**	**65.000.000,00**			**50**	**Unit**	**65.000.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00			50	Unit	65.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**			**367**	**Unit**	**300.000.000,00**
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-			367	Unit	300.000.000,00
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2**	**Unit**	**200.000.000,00**			**2**	**Unit**	**200.000.000,00**
	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00			1	Unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00			1	Unit	100.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**1.919.650.000,00**			**100**	**Persen**	**1.999.650.000,00**
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	**87,5**	**Persen**	**10.730.000.000,00**			**87,5**	**Persen**	**38.440.000.000,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2**	**Kegiatan**	**450.000.000,00**			**2**	**Kegiatan**	**500.000.000,00**
7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**2**	**Laporan**	**200.000.000,00**			**2**	**Laporan**	**150.000.000,00**
	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00			1	Laporan	100.000.000,00
	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00			1	Laporan	50.000.000,00
7.01.02.2.01.02	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**1**	**Dokumen**	**250.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**350.000.000,00**
	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000,00			1	Dokumen	350.000.000,00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**2**	**Kegiatan**	**12.199.650.000,00**			**2**	**Kegiatan**	**39.939.650.000,00**
7.01.02.2.04.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**	**4**	**Laporan**	**1.469.650.000,00**		**1.499.650.000,00**	**4**	**Laporan**	**1.499.650.000,00**
	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	800.000.000,00			1	Laporan	800.000.000,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	529	Unit	449.650.000,00			529	Unit	449.650.000,00
	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	12	Laporan	70.000.000,00			12	Laporan	100.000.000,00
	Penanganan Darurat Bencana	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	150.000.000,00			1	Laporan	150.000.000,00
7.01.02.2.04.03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**60**	**Laporan**	**10.730.000.000,00**			**220**	**Laporan**	**38.440.000.000,00**
	Lanjutan Pembuatan Drainase Parit Padat Karya RT. 18)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 18	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Peningkatan Jalan Nusantara Pole 1 RT. 1	Kelurahan Tama Pole RT. 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Peningkatan Jalan Hasan Jagau RT. 3	Kelurahan Tama Pole RT. 3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Lanjutan Parit Gang Kembar RT. 12	Kelurahan Dondang RT. 12	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Pembuatan Drainase Gg. Julak RT.016 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.016 Jl. M. Hatta Handil 8 Gg. Julak , Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Peningkatan Badan Jalan (Lanjutan Semenisasi) Gg. Rukun RT.007 Handil 8 Kel. Muara Jawa Ilir	RT.007 Jl. M. Hatta Gg.Rukun Handil 8, Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Pepaya RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 28	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Lanjutan Pembuatan Parit Gang Kontrak Menuju Gang Bahagia RT. 29)	Kelurahan Muara Jawa Ulu RT. 29	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Perbaikan Tugu Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Peningkatan Gang Pondok Timun RT. 28	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Semenisasi cor beton jalan poros Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Peningkatan Jalan Simpang Tiga	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Peningkatan Badan Jalan Gang Buntan Kel. Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Pembuatan Drainase Gang Abimanyu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	Laporan	0,00					
	Pembangunan Turap (Pemasangan Batu) Gang Lumba Lumba RT. 003 Kel.Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (ID 1467984)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	120.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Gang Nusa Indah RT. 012 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa (ID 1468122)	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	220.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.001 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (ID 1469148)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	220.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (PENINGKATAN JALAN) GG. SEJAHTERA RT. 28 KELURAHAN MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1456894)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (PENINGKATAN JALAN) GANG. BAHAGIA RT. 11 KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457139)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan GANG. PUSBAN 1 RT. 03 MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457176)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan GANG. 17 AGUSTUS RT. 9 KELURAHAN MUARA JAWA ULU, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1457222)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Pembangunan Turap Jalan Martadinata RT.07 ke RT.12 Kelurahan Muara jawa ilir, Kec.Muara Jawa (ID 1463428)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.017 HANDIL 9 KELURAHAN MUARA JAWA ILIR, KECAMATAN MUARA JAWA (ID 1463439)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan RT.06 Kelurahan Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1464839)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025		CATATAN PENTING	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) RT.06 Kelurahan Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1464919)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Pembangunan Turap Parit RT.01 Depan SD.005 Kel.Dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1465017)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan ratu syifa rt 13 kel dondang, Kec. Muara Jawa (ID 1465114)	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jalan Imaman RT.15 Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kec. Muara Jawa (ID 1474156)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jalan Handil Petinggi Kelurahan Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1474196)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Pembangunan Turap Gang Qjah Kel.Muara Jawa Ilir RT.20, Kec. Muara Jawa (ID 1318233)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan gg bungalang rt 24 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1342767)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan tahir rt 24 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1342911)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan jalan m hatta, gang onthel, rt 18 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1371237)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan kelurahan muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1372685)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan kelurahan muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1376151)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan (pembuatan paret beton gang bersatu) rt 37 kel muara jawa ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1377544)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan (rehab jembatan wa sudong) jalan tahir rt 19 kel muara jawa pesisir, Kec. Muara Jawa (ID 1377629)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan (pembuatan jenbatan ulin) rt 07 kel Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1379709)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (semenisasi gang padaidi rt 15) kel Muara Kembang, Kec. Muara Jawa (ID 1379788)	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan (pemasangan turap batu rt 07) kel Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa (ID 1383472)	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (peningkatan jalan gang manunggal) rt 13 kel Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa (ID 1385139)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (peningkatan jalan gang Abadi) rt 10 kel Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa (ID 1385171)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	Pembangunan/Rehabilitasi balai pertemuan warga rt 02 jln muslimin rt 02 kel muara jawa pesisir, kec muara jawa (ID 1456904)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	170.000.000,00					
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Toha RT.01 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482114)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Pembangunan Turap (Parit Beton) Jalan Delima Gang Pusban RT.02 Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482120)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan (Pengaspalan) Jl.ir. Soekarno Gang Nawawi Rt.15 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muar Jawa (ID 1482143)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	Pembangunan Turap Jl. Ir.Soekarno RT.19 Kelurahan Muarajawa Ulu, Kec. Muara Jawa (ID 1482156)	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	100.000.000,00					
	ID SIPD 2398341 - Peningkatan Jalan gg Qobilah Rt 32	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2247678 - Pembuatan Jembatan kayu Gg Bule Rt 31 Muara Jawa	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2282670 - Pembuatan Jembatan Kayu Gg Udang Rt 4 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2279755 - Peningkatan Jalan Gg Harga Junior Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2246592 - Pembuatan Turap Gg Palem Rt 12 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	ID SIPD 2278491 - Peningkatan Badan jalan Gg Saliman Rt 29 Mjp	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2255003 - Lanjutan Pembuatan parit Beton antara Rt 16 & 20 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 2254349 - Pembuatan Parit Beton gg Anyelir Rt 15 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 2255530 - Normalisasi Parit antara parit Rt 16,27,20 Muara jawa pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 2255109 - Peningkatan Badan Jalan gg swakarya Rt 21 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 2291907 - Pembuatan Turap Beton halaman masjid Al Falah Rt 2Teluk Dalam	Kelurahan Teluk dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 2288586 - Pembuatan Parit Beton Rt 01 Teluk Dalam	Kelurahan Teluk dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 2268657 - Peningkatan Jalan Gg SMK Rt 23 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00					
	ID SIPD 1227964 - Normalisasi Drainase G Hebrida Rt 7 Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	175.000.000,00					
	ID SIPD 1228093 - Pembuatan Jembatan Gg STM Rt 14 Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2254974 - Lanjutan Peningkatan Jalan Gg Rawa Indah Blok A	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2255509 - Pembersihan Badan Jalan Teluk ladang Rt 1 sd Rt 27	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 1229419 - Pembuatan Turap Gg Amah Rt 7 Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	ID SIPD 1226800 - Peningkatan adan Jalan Kelurahan Tamapole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2255003 - Pembuatan Parir Gg Rawa Indah Rt 20 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 679042 - Pembuatan Drainase Gg Assalam Rt 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2398435 - Pemasangan Paving Pompes Darud Tahfitd Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2232575 - Pembuatan Turap Jln Mahakam Tengah Rt 3 Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	180.000.000,00					
	ID SIPD 2247526 - Bantuan Sapras Kecamatan UMKM Keluran Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	150.000.000,00					
	ID SIPD 2247698 - Pembuatan Parit Gg Vetran Rt 28 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	185.000.000,00					
	ID SIPD 2248079 - Pemasangan Pipa 4" PDAM Gg Rawa Indah Blok A Rt 20	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	ID SIPD 1222713 - Pembuatan Parit Gg Haga Junior Rt 32 Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	190.000.000,00					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**6.857.000.000,00**			**100**	**Persen**	**7.292.000.000,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**130.000.000,00**			**2**	**Kegiatan**	**415.000.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**40**	**Lembaga masyarakat**	**60.000.000,00**			**45**	**Lembaga masyarakat**	**160.000.000,00**
	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	Lembaga masyarakat	60.000.000,00			40	Lembaga masyarakat	60.000.000,00
	Fasilitasi BUPATI CUP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga masyarakat	-			5	Lembaga masyarakat	100.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**0**	**Pokmas/Ormas**	-			**1**	**Pokmas/Ormas**	**80.000.000,00**
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara JawaKelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas/Ormas	-			1	Pokmas/Ormas	80.000.000,00
	Evaluasi Kelurahan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**2**	**Laporan**	**70.000.000,00**			**2**	**Laporan**	**175.000.000,00**
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	45.000.000,00		Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-	1	Laporan	150.000.000,00
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00			1	Laporan	25.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**403**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.727.000.000,00**			**403**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.877.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**401**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.627.000.000,00**			**401**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**6.627.000.000,00**
	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00			1	Lembaga	50.000.000,00
	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00			1	Lembaga	50.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	20.000.000,00			1	Lembaga	20.000.000,00
	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148	Lembaga	4.065.600.000,00		Penambahan jumlah RT menjadi 154	148	Lembaga	4.065.600.000,00
	Operasional LPM Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00		Nilai berubah bila terbit Perbup ttg pemberian honor bulanan bagi pengurus LPM	8	Lembaga	80.000.000,00
	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	393.600.000,00			8	Lembaga	393.600.000,00
	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00			8	Lembaga	80.000.000,00
	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	111	Orang	666.000.000,00			111	Orang	666.000.000,00
	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	56	Posyandu	227.400.000,00		Penambahan jumlah posyandu menjadi 56	56	Posyandu	227.400.000,00
	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Kegiatan	74.400.000,00		Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-	2	Kegiatan	74.400.000,00
	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	280	Orang	840.000.000,00		Penambahan jumlah kader posyandu menjadi 280	280	Orang	840.000.000,00
	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00			1	Lembaga	50.000.000,00
	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	30.000.000,00			1	Lembaga	30.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**2**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**100.000.000,00**			**2**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**250.000.000,00**
	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00			1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00
	Pelatihan bagi pengurus kelembagaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00			1	Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Muara Jawa**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**100**	**Persen**	**125.000.000,00**			**100**	**Persen**	**225.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**Kegiatan**	**125.000.000,00**			**1**	**Kegiatan**	**225.000.000,00**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**4**	**Kegiatan**	**125.000.000,00**			**4**	**Kegiatan**	**225.000.000,00**
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	3	Kegiatan	75.000.000,00			3	Kegiatan	75.000.000,00
	Safari Ramadhan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	50.000.000,00		Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan adalah Rp.150.000.000,- (makan minum kegiatan dan bingkisan Safari Ramadhan di 8 kelurahan/9 Lokus, Safari Ramadhan Tk. Kecamatan)	1	Kegiatan	150.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan Muara Jawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**255.000.000,00**			**100**	**Persen**	**625.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**255.000.000,00**			**11**	**Kegiatan**	**625.000.000,00**
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**400**	**Orang**	**180.000.000,00**			**400**	**Orang**	**550.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	180.000.000,00		Pagu anggaran yang dibutuhkan sesuai hasil rapat Pengurus LPTQ Kecamatan dengan Bidang Kesra dan Sekda per Kecamatan membutuhkan minimal Rp.500.000.000,- baik untuk MTQ Tk. Kecamatan maupun Tk. Kabupaten	400	Orang	550.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kecamatan Muara Jawa**	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**2**	**Dokumen**	**75.000.000,00**			**2**	**Dokumen**	**75.000.000,00**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25.000.000,00			1	Dokumen	25.000.000,00
	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00			1	Dokumen	50.000.000,00
	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**				**1.940.004.000,00**					**2.296.000.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**74.004.000,00**			**67**	**Nilai**	**130.000.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**43.794.000,00**			**5**	**Layanan**	**63.180.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.150.000,00**			**1**	**Paket**	**1.150.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00			1	Paket	1.150.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**10.590.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	10.590.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**10.000.000,00**			**3**	**Paket**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00			3	Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.644.000,00**			**1**	**Paket**	**3.120.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.644.000,00			1	Paket	3.120.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**46**	**Laporan**	**30.000.000,00**			**98**	**Laporan**	**38.320.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Laporan	30.000.000,00			98	Laporan	38.320.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-			**6**	**Unit**	**33.160.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**4**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-			4	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**2**	**Unit**	**23.160.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			2	Unit	23.160.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**16.470.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.950.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.950.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**15**	**Unit**	**15.190.000,00**			**26**	**Unit**	**17.190.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**5**	**Unit**	**8.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	8.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**10**	**Unit**	**7.190.000,00**			**25**	**Unit**	**7.190.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	7.190.000,00			25	Unit	7.190.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.856.000.000,00**			**100**	**Persen**	**2.156.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**			**3**	**Kegiatan**	**1.056.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**23**	**Lembaga**	**6.000.000,00**			**23**	**Lembaga**	**6.000.000,00**
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23	Lembaga	6.000.000,00			23	Lembaga	6.000.000,00
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**			**5**	**Unit**	**750.000.000,00**
	Pembuatan Halaman Paving Blok Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2281934			
	Pembuatan WC Umum Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	50.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2281821			
	Pembangunan Gudang dan Gedung Arsip Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2281739			
	Pembuatan badan Jalan RT.001 tembus RT.016 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2282154			
	Pembangunan Turap Satu Sisi Sungai handil 9 RT.006 Kel. Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2087104			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**16**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**16**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.050.200,00					
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	5.180.000,00					
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	3.700.000,00					
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	16.769.200,00					
	Pengadaan Mebelier Kelembagaan (PKK,LPM,Karang Taruna,Lembaga Adat,KPM)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	50.500.000,00					
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	18.525.300,00					
	Biaya Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda usia 16-30 tahun (babershop)	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	9.815.300,00					
	Biaya Pelatihan UMKM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.550.000,00					
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	125.000.000,00					
	Honorarium PPTK	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OB	4.230.000,00					
	Honorarium PBJ	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	OP	680.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**236**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**			**236**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ilir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**22**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**			**22**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.100.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	22	Lembaga/RT	1.100.000.000,00		Penambahan jumlah RT	22	Lembaga/RT	1.100.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00			100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	10.000.000,00			1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00			100	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00		Perlu tambahan anggaran sekitar Rp.200.000.000 untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2026	100	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah				1.835.315.000,00					2.090.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Nilai	75.315.000,00			67	Nilai	130.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	Layanan	46.295.000,00			4	Layanan	66.780.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			0	Paket	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	20.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	20.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00			3	Paket	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00			3	Paket	15.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.295.000,00			1	Paket	1.780.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.295.000,00			1	Paket	1.780.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	30.000.000,00			36	Laporan	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	30.000.000,00			36	Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0	Unit	-			6	Unit	35.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-			0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			6	Unit	35.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			6	Unit	35.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			0	Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**13.220.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.100.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.100.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**12.120.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	12.120.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**14.000.000,00**			**6**	**Unit**	**15.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**4.000.000,00**			**5**	**Unit**	**5.000.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	4.000.000,00			5	Unit	5.000.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.750.000.000,00**			**100**	**Persen**	**1.950.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**			**2**	**Kegiatan**	**950.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	**-**			**0**	**Lembaga**	**-**
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**			**5**	**Unit**	**650.000.000,00**
	Peningkatan Badan Jalan Gg.Pupuk RT.03 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2266330			
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Ramania RT.017 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2266341			
	Peningkatan Badan Jalan Gg. Sepakat RT.04 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2266343			
	Pembuatan Parit Beton RT.20 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2266350			
	Turap Parit Besar Jalan Ruhui Rahayu 2 Kelurahan Muara Jawa Tengah (DAU)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2266357			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	1. Belanja Kegiatan PKK Kel.muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	19.779.500					
	2. Belanja Baju Seragam PKK Kel.Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	14.098.000					
	3. Belanja Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	40.042.500					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	4. Pelatihan Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.000.000					
	5. Pelatihan dan Sertifikasi Basic Safety Training (BST)	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	61.080.000					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**			**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**			**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1.000.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00		Penambahan jumlah RT	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Tengah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**			**50**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00			50	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**				**2.884.520.000,00**					**3.099.720.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**68.520.000,00**			**67**	**Nilai**	**83.720.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**39.000.000,00**			**5**	**Layanan**	**49.000.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.000.000,00**			**1**	**Paket**	**2.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00			1	Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**2**	**Paket**	**9.000.000,00**			**2**	**Paket**	**9.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00			2	Paket	9.000.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.000.000,00**			**1**	**Paket**	**1.000.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00			1	Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**27**	**Laporan**	**27.000.000,00**			**27**	**Laporan**	**27.000.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00			27	Laporan	27.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**15.720.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.200.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.200.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**	**14.500.000,00**			**27**	**Unit**	**19.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**4**	**Unit**	**8.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	8.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**10**	**Unit**	**6.500.000,00**			**26**	**Unit**	**9.000.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	6.500.000,00			26	Unit	9.000.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**2.806.000.000,00**			**100**	**Persen**	**3.006.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**			**3**	**Kegiatan**	**956.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**50**	**Lembaga**	**6.000.000,00**			**50**	**Lembaga**	**6.000.000,00**
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00			50	Lembaga	6.000.000,00
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**3**	**Unit**	**450.000.000,00**			**4**	**Unit**	**650.000.000,00**
	Semenisasi Jalan Gg. Reformasi RT.13	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2233566			
	Seminisasi Gg Sukamto RT 34	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2233721			
	Pembuatan Drainase Gg Masykur 4 RT 19	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2246230			
	Semenisasi/perbaikan tembusan Gang Central RT.07	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2265057			
	Lanjutan semenisasi Gg Shalom RT.11	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2233523			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00					

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00					
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00					
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.400,00					
	Pelatihan Kepemudaan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	27.340.300,00					
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00					
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	165.390.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**			**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**			**41**	**Lembaga/RT**	**2.050.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00		Program Dedikasi	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Ulu**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**25**	**Orang**	**10.000.000,00**			**25**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00			25	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**				**2.437.290.000,00**					**2.690.000.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**77.290.000,00**			**67**	**Nilai**	**130.000.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**45.450.000,00**			**5**	**Layanan**	**68.360.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**1.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**13.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	13.000.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**12.492.000,00**			**3**	**Paket**	**15.902.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.492.000,00			3	Paket	15.902.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.958.000,00**			**1**	**Paket**	**2.958.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00			1	Paket	2.958.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**40**	**Laporan**	**30.000.000,00**			**35**	**Laporan**	**35.000.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	30.000.000,00			35	Laporan	35.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**2**	**Unit**	**29.000.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**2**	**Unit**	**29.000.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			2	Unit	29.000.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**15.820.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.300.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.300.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**6**	**Unit**	**16.820.000,00**			**6**	**Unit**	**16.820.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**5**	**Unit**	**6.820.000,00**			**5**	**Unit**	**6.820.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00			5	Unit	6.820.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**2.350.000.000,00**			**100**	**Persen**	**2.550.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**			**3**	**Kegiatan**	**950.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	**-**			**0**	**Lembaga**	**-**
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-			0	Lembaga	-
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**			**5**	**Unit**	**650.000.000,00**
	Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2233817			

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Peningkatan Badan Jalan Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2227914			
	Peningkatan Jalan Gang H.Sanusi RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2231747			
	Pembuatan Parit Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2233791			
	Cor beton parit dari Gang H. Ramli menuju Parit induk jln Muslimin RT. 17 Kel.Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 1425526			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**33**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**33**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00					
	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00					
	Partisipasi MTQ	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	20.000.000,00					
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas/Ormas	190.000.000,00					
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	45.000.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**			**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**			**32**	**Lembaga/RT**	**1.600.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00		Program Dedikasi	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Jawa Pesisir**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**			**50**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00			50	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN TELUK DALAM	**Kelurahan Teluk Dalam**				**1.182.120.000,00**					**1.437.620.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**66.120.000,00**			**67**	**Nilai**	**121.620.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**32.700.000,00**			**5**	**Layanan**	**44.700.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**			**1**	**Paket**	**1.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00			1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	**-**			**3**	**Paket**	**12.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			3	Paket	12.000.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**8.000.000,00**			**8**	**Paket**	**8.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	8.000.000,00			8	Paket	8.000.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**			**1**	**Paket**	**1.500.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00			1	Paket	1.500.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**27**	**Laporan**	**21.700.000,00**			**26**	**Laporan**	**21.700.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	21.700.000,00			26	Laporan	21.700.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-			**7**	**Unit**	**41.400.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**7**	**Unit**	**41.400.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			7	Unit	41.400.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**17.120.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**2.600.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	2.600.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**	**18.400.000,00**			**9**	**Unit**	**18.400.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**6**	**Unit**	**10.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	10.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**8**	**Unit**	**8.400.000,00**			**8**	**Unit**	**8.400.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00			8	Unit	8.400.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.106.000.000,00**			**100**	**Persen**	**1.306.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**3**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**			**3**	**Kegiatan**	**956.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**11**	**Lembaga**	**6.000.000,00**			**11**	**Lembaga**	**6.000.000,00**
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	6.000.000,00			11	Lembaga	6.000.000,00
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**6**	**Unit**	**450.000.000,00**			**7**	**Unit**	**650.000.000,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.07	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2286601			
	Pengaspalan Jalan Pelita Rt.01	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2287114			
	Lanjutan Pembuatan Parit beton Rt.04	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 1421720			
	Turab Depan Mesjid Al- Fallah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2288777			
	Lanjutan Pembangunan langgar As-Salam Rt.06	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 1427782			
	pembuatan Parit beton Rt. 03	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2292103			
	Lanjutan Parit beton Rt.02	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2288404			
	Lanjutan Turab beton Rt .05	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	70.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2295639			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**7**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Kegiatan Posyandu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	17.575.300,00					
	Lomba Tingkat Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.625.300,00					
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.042.700,00					
	PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	28.175.700,00					
	Pelatihan Sertifikasi untuk tenaga kerja	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	72.730.000,00					
	Operasional dan Akomodasi Kegiatan MTQ	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.851.000,00					
	HUT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	120.000.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**			**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**			**7**	**Lembaga/RT**	**350.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00		Program Dedikasi	7	Lembaga/RT	350.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Teluk Dalam**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**60**	**Orang**	**10.000.000,00**			**60**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00			60	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN DONDANG	**Kelurahan Dondang**				**1.532.800.000,00**					**1.760.000.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Dondang**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**65**	**Nilai**	**72.800.000,00**			**65**	**Nilai**	**100.000.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Dondang**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Layanan**	**39.240.000,00**			**4**	**Layanan**	**50.240.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**0**	**Paket**	-
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**11.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**11.000.000,00**			**1**	**Paket**	**11.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	11.000.000,00			1	Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.000.000,00**			**1**	**Paket**	**2.000.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00			1	Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**32**	**Laporan**	**26.240.000,00**			**32**	**Laporan**	**26.240.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00			32	Laporan	26.240.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-			**2**	**Unit**	**15.460.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**2**	**Unit**	**15.460.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			2	Unit	15.460.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**15.760.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.240.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.240.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**13**	**Unit**	**18.540.000,00**			**15**	**Unit**	**18.540.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**12**	**Unit**	**8.540.000,00**			**14**	**Unit**	**8.540.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	8.540.000,00			14	Unit	8.540.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Dondang**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.450.000.000,00**			**100**	**Persen**	**1.650.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**0**	**Kegiatan**	**750.000.000,00**			**0**	**Kegiatan**	**950.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**0**	**Lembaga**	-			**0**	**Lembaga**	-
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**3**	**Unit**	**450.000.000,00**			**4**	**Unit**	**650.000.000,00**
	Lanjutan Pembuatan Parit kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2034617			
	Lanjutan Turap Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2034762			
	Pembuatan Pagar Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2035207			
	Pembuatan cor beton Parit RT.010 Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2290352			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**29**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**29**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Operasional PKK DAN POSYANDU	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00					
	Partisipasi HUT RI	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	40.000.000,00					
	Partisipasi MTQ	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	130.000.000,00					
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Non ASN	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/Ormas	50.000.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**14**	**Lembaga/RT**	**700.000.000,00**			**14**	**Lembaga/RT**	**700.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**14**	**Lembaga/RT**	**700.000.000,00**			**14**	**Lembaga/RT**	**700.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00		Program Dedikasi	14	Lembaga/RT	700.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Dondang**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**11**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Dondang**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**25**	**Orang**	**10.000.000,00**			**25**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00			25	Orang	10.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
	KELURAHAN TAMA POLE	**Kelurahan Tama Pole**				**988.420.000,00**					**1.235.000.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Tama Pole**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**78.420.000,00**			**67**	**Nilai**	**125.000.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5**	**Layanan**	**45.400.000,00**			**5**	**Layanan**	**65.480.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1.500.000,00**			**1**	**Paket**	**1.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00			1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	-			**1**	**Paket**	**12.990.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	12.990.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**10.900.000,00**			**1**	**Paket**	**12.990.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.900.000,00			1	Paket	12.990.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**3.000.000,00**			**1**	**Paket**	**3.000.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00			1	Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**42**	**Laporan**	**30.000.000,00**			**42**	**Laporan**	**35.000.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	30.000.000,00			42	Laporan	35.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	-			**5**	**Unit**	**25.000.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**5**	**Unit**	**25.000.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			5	Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**16.520.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**2.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**17**	**Unit**	**18.000.000,00**			**19**	**Unit**	**18.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**6**	**Unit**	**10.000.000,00**			**4**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	10.000.000,00			4	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**11**	**Unit**	**8.000.000,00**			**15**	**Unit**	**8.000.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	8.000.000,00			15	Unit	8.000.000,00
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	-			**0**	**Unit**	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tama Pole	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	900.000.000,00			100	Persen	1.100.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	750.000.000,00			3	Kegiatan	950.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-			0	Lembaga	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	450.000.000,00			5	Unit	650.000.000,00
	Peningkatan Jln Ketapi menuju jln Pole 2	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2112453			
	Peningkatan jalan suka damai menuju jalan pole 3	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	110.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2200750			
	Peningkatan Badan Jalan danau Kering	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	130.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2222402			
	Rehab Atap Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2276147			
	Peningkatan jalan Borboun	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2306061			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Pokmas/Ormas	300.000.000,00			13	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Lomba desa	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00					
	HUT RI	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00					
	Pelatihan Perbaikan mesin perahu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Pelatihan Pertukangan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00					
	Pelatihan Pembuatan perahu fiber	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Pelatihan Perbengkelan (motor)	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	35.000.000,00					
	Pelatihan Service perabotan rumah tangga	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00					
	Oprasional MTQ	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00					
	Pelatihan managemen pemasaran UMKM	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00					
	Pelatihan budi daya ikan air tawar	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Pelatihan pengolahan hasil laut	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00					
	Oprasional Pusyandu	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.000.000,00					
	Operasional PKK	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00			3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00			3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga/RT	150.000.000,00		Program Dedikasi	3	Lembaga/RT	150.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Tama Pole	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00			100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00			1	Kegiatan	10.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**			**50**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00			50	Orang	10.000.000,00
	KELURAHAN MUARA KEMBANG	**Kelurahan Muara Kembang**				**1.585.298.500,00**					**1.837.000.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Nilai**	**69.298.500,00**			**67**	**Nilai**	**121.000.000,00**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Layanan**	**39.278.500,00**			**5**	**Layanan**	**64.880.000,00**
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**4.000.000,00**			**1**	**Paket**	**4.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00			1	Paket	4.000.000,00
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**0**	**Paket**	**-**			**1**	**Paket**	**14.400.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-			1	Paket	14.400.000,00
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3**	**Paket**	**6.201.500,00**			**1**	**Paket**	**12.403.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	6.201.500,00			1	Paket	12.403.000,00
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**2.077.000,00**			**1**	**Paket**	**2.077.000,00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00			1	Paket	2.077.000,00
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**40**	**Laporan**	**27.000.000,00**			**40**	**Laporan**	**32.000.000,00**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	27.000.000,00			40	Laporan	32.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**2**	**Unit**	**25.000.000,00**
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**2**	**Unit**	**25.000.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-			2	Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**15.020.000,00**			**12**	**Bulan**	**16.120.000,00**
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12**	**Laporan**	**500.000,00**			**12**	**Laporan**	**1.600.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000,00			12	Laporan	1.600.000,00
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**			**12**	**Laporan**	**14.520.000,00**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00			12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**8**	**Unit**	**15.000.000,00**			**8**	**Unit**	**15.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	**Unit**	**10.000.000,00**			**1**	**Unit**	**10.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00			1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**7**	**Unit**	**5.000.000,00**			**7**	**Unit**	**5.000.000,00**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00			7	Unit	5.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	RENCANA TAHUN 2026						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025			TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2026
7.01.01.2.09.07	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**0**	**Unit**	**-**			**0**	**Unit**	**-**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**100**	**Persen**	**1.506.000.000,00**			**100**	**Persen**	**1.706.000.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**0**	**Kegiatan**	**756.000.000,00**			**0**	**Kegiatan**	**956.000.000,00**
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**19**	**Lembaga**	**6.000.000,00**			**19**	**Lembaga**	**6.000.000,00**
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	6.000.000,00			19	Lembaga	6.000.000,00
7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**4**	**Unit**	**450.000.000,00**			**5**	**Unit**	**650.000.000,00**
	Pembagunan Jembatan RT.13 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2229630			
	Pembuatan Gorong-Gororng RT.14 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2229644			
	Peningkatan Badan Jalan GG. Salasiah RT.10 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	100.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2229668			
	Peningkatan Badan Jalan GG . Handil Setia RT.15 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2229672			
	Peningkatan Badan Jalan. Baharan RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.000.000,00		Musrenbang ID SIPD 2229702			
	Pembuatan Gorong-Gororng RT.03 Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-		DAU. Musrenbang ID SIPD 2229731			
7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**			**6**	**Pokmas/Ormas**	**300.000.000,00**
	Kegiatan PKK Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Kegiatan HUT RI	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.000.000,00					
	Pelatihan Pengolahan Makanan Bergizi	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	100.000.000,00					
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00					
	Pelatihan Supir Bagi Pemuda	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	40.000.000,00					
	Pelatihan Desain Grafis	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	50.000.000,00					
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**15**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**750.000.000,00**			**15**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**750.000.000,00**
7.01.03.2.03.01	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kelurahan Tama Pole**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**15**	**Lembaga/RT**	**750.000.000,00**			**15**	**Lembaga/RT**	**750.000.000,00**
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00		Program Dedikasi	15	Lembaga/RT	750.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**			**100**	**Persen**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**			**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Kelurahan Muara Kembang**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**50**	**Orang**	**10.000.000,00**			**50**	**Orang**	**10.000.000,00**
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00			50	Orang	10.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa.

A. Catatan Penting

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui APBD-P tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi

maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

B. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan kegiatan mengacu kepada Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa dan DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD serta berpegang pada hal sebagai berikut:

1. Kecamatan Muara Jawa berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 serta diselaraskan dengan RPJMD tahun 2021-2026.
2. Kecamatan Muara Jawa berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 dan RPJMD tahun 2021-2026.
3. Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap Program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana tindak lanjut

Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan, 42 (empat puluh dua) subkegiatan sesuai dengan Program yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2026.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Samboja yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Samboja. Muatan RKA meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*, sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan Daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Samboja tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari: a) evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja; d) rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan; e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana; f) rumusan dan prioritas Program dan kegiatan berbasis kinerja; g) tolok ukur dan target kinerja capaian Program dan kegiatan; h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; i) kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui: a) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah; c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; d) berperan aktif pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunanan (Musrenbang) RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; e) kKonsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas Program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Musrenbang kecamatan dan Daerah termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD).

Pendekatan *top down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan Musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *global MDGs*. Pendekatan ini tercermin pada:

a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan Daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Samboja, Konsisten dengan dokumen RTRW Daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum PD.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Samboja;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan Program/kegiatan Kecamatan Samboja.

1.3.2 Tujuan

1. Menyinkronkan dan mensinergikan Program dan kegiatan Kecamatan Samboja tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam RKPD tahun 2026;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Samboja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Samboja tahun 2026 secara garis besar disusundengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 *Review* Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
4.1 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA TAHUN LALU

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah pada Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Samboja adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun Program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta LembagaKemasyarakatan

C. Indikator Kinerja Utama

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan oleh Kecamatan Samboja adalah pengukuran dalam bentuk indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja Kecamatan Samboja secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun target atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini terdapat IKU dengan target 0 (Nol) karena pada indikator tersebut telah di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 dan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	80	90	90
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	75	75	75
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	75	75	75	75	75
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	0	0	0	0

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Samboja tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga anggaran dapat direlisasikan sesuai dengan target, dan diperlukan komitmen pimpinan dalam mengarahkan tim penyusunan Program dan kegiatan dan bersama-sama dengan seksi yang lain.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi anggaran Kecamatan Samboja tahun lalu (2024) secara rincian dapat dilihat ada Tabel 2.1 / Tabel T-C.29 dibawah ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC .29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

KODE					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	68	70	68	0%	77	70	116,67%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	2	5	5	100%	3	10	333%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	3	3	100%	3	8	400%
7	01	01.	2.01	09	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	51	0	0	0	0%	51	51	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2.01	10	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kepmen 050 5889	Berita Acara	50	0	0	0	0%	50	50	100%
7	01	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	2	2	100%
7	01	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	0	0	0	0%	2	2	100%
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	0	2	2	100%	3	5	250%
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	0	0	0	0%	2	2	100%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	21	21	14	21	150%	14	56	267%
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	168	1876	98	80	101%	98	2054	1223%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	0%	1	3	300%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	laporan	20	20	20	20	100%	20	60	300%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
7	01	01.	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	1	1	100%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	1030	1030	1030	1030	0%	9863	11923	1158%
7	01	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	6	2	2	100%	6	14	233%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	20	232	20	20	100%	0	252	1260%
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	85	212	0	0	0,00%	0	212	0%
X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	20	20	20	100%	0	40	200%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	6	6	100%	6	6	100%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	162	125	59	162	100%	17	304	188%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	367	424	107	367	100%	11	802	219%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	102	20	25	100%	1	128	512%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	202	20	100%	40	80	400%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	268.695	399995	79	268.695	100%	13	668703	249%
X	XX	01.	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1655	1681	718	1665	100%	719	4065	246%
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	96	245	52	96	100%	0	341	355%
X	XX	1	0,09	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	7	0	0	0%	0	7	100%
X	XX	01.	2,07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	6	1	1	100%	0	7	700%
X	XX	1	0,09	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	5	0	0	0%	0	5	100%
X	XX	01.	2,07	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	95	227	51	95	100%	0	322	339%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100%	12	36	300%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	150	122	96	100	67%	89	311	207%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	2	8	2	25%	8	12	150%
X	XX	01.	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	133	107	85	100	75%	63	270	203%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	10	3	9	100%	11	30	375%
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	0	0	0	0	2	100%
X	XX	01.	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	0	1	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	85	75	0	0,0%	75	75	100%
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	2	0	0	0	0%	2	2	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	2	0	0	0	0%	2	2	100%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	3	0	0	0	0%	3	3	100%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	1	1	0	0	0%	0	1	100%
7	01	02	2.02	01	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	1	1	0	0	0%	0	1	0%
7	1	2	0,08	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	379	98	21	14%	98	498	332%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Berkas	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Berkas	400	404	12	400	100%	12	816	204%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kegiatan	149	378	97	149	154%	95	622	417%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	72,7	72,7	72,7	100%	72,7	72,7	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	2	2	0	0	0	0	2	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	50	50	0	0	0	0	50	100%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	2	0	0	0	0	2	100%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	202	80	70	87,50%	80	352	440,0%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	750	557	100	130	18,57%	10	697	92,93%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	159	198	159	159	100%	82	439	276,10%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang/Unit	356	264	356	356	100%	2	622	174,72%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kegiatan	4	2	5	4	100%	3	9	225,00%
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	470	468	53	448	100%	12	928	197%
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	467	467	50	448	100%	10	925	198,07%
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0	0	0	0%	0	0	0,00%
7	1	3	203	3	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	3	62	3	3	100%	4	69	2300%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Samboja namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Samboja dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan kepada pemerintahan kelurahan dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase capaian ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
3. Pertumbuhan pendapatan asli Daerah kewenangan kecamatan;
4. Pertumbuhan pendapatan asli desa;

Untuk indikator sasaran poin 4 pertumbuhan pendapatan asli Daerah kewenangan kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja, dapat dilihat pada tabel 2.2 / Tabel T-C.30 dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			80	80	83	90	90	75	89,45	90	90	Untuk Tahun 2025 masih berjalan
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			75	75	75	75	75	92,12	75	80	85	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			75	75	75	75	75	8261%	83,61	75	75	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Samboja dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, aset pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya anggaran pembangunan skala kecil kecamatan; dan
d. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Samboja secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

a. Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-eL;
b. Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai, dan tidak terdata sebagai penduduk setempat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu menyampaikan akan pentingnya hal tersebut, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga sudah mempunyai KK dan KTP Elektronik.

Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia aparatur kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap Program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

efisien;

b. Sistim administrasi kependudukan dan urusan pemerintahan belum tercapai dengan baik sehingga perlu adanya pembenahan pada teknis data penduduk.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di kecamatan;
2. Anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi belum maksimal penganggarannya;

B. Bidang Pertanahan dan Aset, Permasalahan:

1. Masih banyak kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
2. Banyaknya tanah yang masuk wilayah tahura, tanah milik perusahaan, sehingga masyarakat banyak menuntut atas tanah tersebut untuk di buatkan surat atas tanah tersebut.
3. Banyak masyarakat yang memiliki SKPT bukan penduduk setempat sehingga bilamana ada pembuatan surat atas tanah yang berbatasan dengan warga tersebut akan menjadi kendala dalam proses pembuatan surat tanah.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan, permasalahan :

1. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
2. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupundari lembaga lain;
3. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berada di tingkat desa atau kelurahan maupun kecamatan dengan *stakeholder* atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada di wilayah Kecamatan Samboja.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga danlingkungan;
b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
c. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi di Kecamatan Samboja.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Meningkatkan peran serta lembaga dengan organisasi kepemudaan di Samboja lebih maksimal agar lebih baik kedepannya.

F. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat,

Permasalahan:

1. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawabbersama;
2. Masih tingginya penggunaan miras dan narkoba;

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan koordinasi satgas yang lain, untuk meningkatkan SDM agar memahami tentang hak dan kewajiban dan dapat melindungi masyarakat.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan RKPD Kecamatan Samboja adalah perbandingan antara Program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan dengan hasil analisis kebutuhan PD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel 2.3/T-C 31 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Samboja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	26.407.555.678	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Samboja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	21.945.362.697	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	380.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	320.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	40.000.000	Pengurangan Pagu
	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec Samboja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	300.000.000	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec Samboja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	250.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	30.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	18.061.901.467	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	16.351.803.619	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	98	17.399.181.467	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1148	15.689.083.619	Pengurangan Pagu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	652.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	12	652.720.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	9863	110.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	9863	90.800.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	50.000.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	20.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	0	-	Pengurangan Sub Kegiatan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	40.800.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	100	155.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	20	35.000.000	Pengurangan Pagu
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	120.440.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	Pengurangan Pagu
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	2.015.551.075	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	800.713.130	Pengurangan Pagu
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	59	131.871.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	131.871.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	10.457.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.457.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	71	556.016.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	214.387.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	115.287.075	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	63.997.630	pengurangan pagu anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	718	1.196.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	719	375.000.000	Pengurangan pagu anggaran
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	53	1.327.735.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	2	270.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	513.762.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	53	643.973.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	Pengurangan pagu anggaran

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	170.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	170.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	4.056.675.136	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	3.800.218.148	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	35.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	7.500.000	Pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.634.335.036	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.634.335.036	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.387.340.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.158.383.112	Pengurangan pagu anggaran
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	150	299.452.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	96	276.827.800	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	51.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	51.250.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	81.802.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	77	81.802.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	11	166.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	11	143.775.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Samboja	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	5.993.746.350	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Samboja	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	18.950.108.250	
			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100				Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100		
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	500.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	450.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	200.000.000	Penambahan Anggaran Kegiatan faslitasi kegiatan erau
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	350.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	250.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	1	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	2	100.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	100.000.000	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Samboja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	5.393.746.350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Samboja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	18.400.108.250	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	980.108.250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	980.108.250	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	97	4.413.638.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	92	17.420.000.000	Penambahan Pagu Anggaran
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Samboja	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	20.512.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Samboja	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	20.457.400.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	1	25.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	1	25.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	25.000.000	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	10	7.006.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	10	7.001.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Samboja	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	50.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Samboja	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	84	4.505.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	52	4.505.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	2.401.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	31	2.401.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	50.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	45.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	13.481.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	13.431.400.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	13.431.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	13.381.400.000	Jumlah RT Awal Kel Sanipah (18 RT) menjadi (19 RT) Perlu penambahan Anggaran karena Penambahan RT (1 RT) Rp.50.000.000
	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	4	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Samboja	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Presentase	100	225.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Samboja	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Presentase	100	175.000.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Samboja	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	225.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Samboja	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	175.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	50.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	175.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	125.000.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Samboja	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase	100	790.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Samboja	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase	100	470.000.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Samboja	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	790.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Samboja	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	470.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	331	750.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	800	430.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	40.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	40.000.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Samboja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	70	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Samboja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	70	75.000.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Samboja	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	3	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Samboja	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	3	75.000.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	50.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	75.000.000	
	JUMLAH					53.978.702.028	JUMLAH					62.072.870.947	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang Program pembangunan terakomodir dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih difokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan, gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan Program dan kegiatan wilayah Kecamatan Samboja yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumber daya pedukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masayarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas Program pembangunan Kecamatan Samboja Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten kutai kartanegara, yang secara umum sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan.
b. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan/mikro.
c. Peningkatan fungsi kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan kecamatan.
d. Hasil musrenbang kecamatan di tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja di tahun 2026,
e. Usulan pada Musrenbang kecamatan berjumlah 1366 (seribu tiga ratus enam puluh enam), berdasarkan skala prioritas dan lintas PD, adapun dari jumlah tersebut dipertimbangkan dari skala prioritas kewenangan Kecamatan melalui usulan tersisa 420 (empat ratus dua puluh) paket judul.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat nonfisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenyakecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T.C 32 dibawah ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kamus Usulan	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Samarinda - Handil II Gunung Tambi	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pusban Handil Baru Darat Gang Kembar	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehabilitasi Pembangunan Menara Masjid Jami' Nurul Huda	1.500.000.000	Dinas Sosial
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Total Bangunan Sekolah Dasar (SDN 014 Kelurahan Handil Baru Darat)	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Komputer Kantor Kel Wonotirto (I5 6 Unit)	100.000.000	Dinas PMD
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Printer Kantor Kel Wonotirto (L3110 6 Unit)	35.000.000	Dinas PMD
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Ketik Manual (2 Unit) Kantor Kel Wonotirto	10.000.000	Dinas PMD
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lemari Arsip (6 Unit) Kantor Kel Wonotirto	25.000.000	Dinas PMD
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pemagaran Kantor Kel Wonotirto	200.000.000	Dinas Perkim
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Lapangan Voly Kantor Kel Wonotirto	100.000.000	Dinas Kepemudaan dan olahraga
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Kawat Permanen Lapangan Voly Kantor Kel Wonotirto	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan olahraga
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kursi Rapat Kantor Kel Wonotirto	80.000.000	Dinas Perkim
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Baju Dinas Pegawai Kantor Kel Wonotirto	40.000.000	Dinas Perkim
14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Baju Olah Raga Kantor Kel Wonotirto	25.000.000	Dinas Perkim
15	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Ac Rapat Kantor Kel Wonotirto	35.000.000	Dinas Perkim

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Kantor Kel Wonotirto	30.000.000	Dinas Perkim
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parkiran Kendaraan / Sepeda Motor Depan Kuburan Muslimin (Lantai Papan Ulin + Atap Spardex)	150.000.000	Dinas Perkim
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Cctv	20.000.000	Dinas Sosial
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Gapura Simpang	50.000.000	Dinas Perkim
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Muslim	150.000.000	Dinas Perkim
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar Tembok Kuburan Muslim	200.000.000	Dinas Perkim
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tenda / Taruf	75.000.000	Dinas PMD
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kursi Plastik	25.000.000	Dinas PMD
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Meja Plastik	30.000.000	Dinas PMD
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase Belakang Rumah HGyanto	100.000.000	Dinas Perkim
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Jalan Provinsi	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembutan Gorong Gorong Jalan Provinsi	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tong Sampah / Drum Plastik	10.000.000	Dinas PMD
29	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Sumur Bor	90.000.000	Dinas Perkim
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Gg Bpp	150.000.000	Dinas Perkim
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Family Ii	90.000.000	Dinas Perkim
32	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Longsoran Depan H Rondon	150.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

33	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Surya Tani A & Urukan	150.000.000	Dinas Perkim
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Surya Tani A	70.000.000	Dinas Perkim
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Paret Pasangan Batu Gg Ramania	150.000.000	Dinas Perkim
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Kwanyi	180.000.000	Dinas Perkim
37	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Langgar Baiturohim	150.000.000	Dinas Perkim
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Paret Pasangan Batu Gg Sudian	150.000.000	Dinas Perkim
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Lapangan Olahraga Pikle Ball	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Tk Negeri I	200.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tenda & Perlengkapan (Meja&Kursi)	150.000.000	Dinas PMD
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Dan Pengecoran Halaman Langgar Al Muslimin Rt 03 Wonotirto	500.000.000	Dinas Perkim
43	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong-Gorong Dan Lanjutan Pelapisan Pengecoran Badan Jalan Gg Rohani	300.000.000	Dinas Perkim
44	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Dan Pengecoran Badan Jalan Jl Peta Karya	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
45	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pelapisan Pengecoran Badan Jalan Gg Famili (Jalan Menuju Mi Al-Ishlah)	1.500.000.000	Dinas Perkim
46	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Beton Cor Jalan Usaha Tani	800.000.000	Dinas Perkim
47	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Rt 03 Wonotirto	200.000.000	Dinas Perkim
48	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
49	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung Mushollah Mi Al Ishlah	1.000.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

50	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai Serayu	5.000.000.000	Dinas Perkim
51	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Lahan Lokasi Bangunan Sekolah Mi Al- Ishlah	400.000.000	Dinas Perkim
52	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Badan Jalan Rawa Guna	2.000.000.000	Dinas Perkim
53	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Badan Jalan Rawa Guna	1.000.000.000	Dinas Perkim
54	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Usaha Tani	100.000.000	Dinas Perkim
55	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani	100.000.000	Dinas Perkim
56	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Dan Pengerasan Badan Jalan Rawa Guna	1.000.000.000	Dinas Perkim
57	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Badan Jalan Parit Rawa Guna	1.000.000.000	Dinas Perkim
58	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Bangunan Langgar Al Muslimin	1.000.000.001	Dinas Perkim
59	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Jalan Usaha Tani	800.000.000	Dinas Perkim
60	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan (Pengerasan Dan Pengecoran) Jalan Usaha Tani	1.000.000.000	Dinas Perkim
61	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Pinggir Jalan Raya Balikpapan - Handil 2	125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
62	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit Pasangan Di Gg Rohani	250.000.000	Dinas Perkim
63	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit Pasangan Gg Famili (Jalan Menuju Mi Al-Ishlah)	400.000.000	Dinas Perkim
64	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Dilingkungan Rt 03 Kel Wonotirto	400.000.000	Dinas Perkim
65	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gorong-Gorong Gg Famili	250.000.000	Dinas Perkim
66	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gg Rohani	100.000.000	Dinas Perkim
67	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gg Famili	100.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

68	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Kayu Ulin Jalan Usaha Tani	500.000.000	Dinas Perkim
69	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gg Karetan	500.000.000	Dinas Perkim
70	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Jalan Wonotirto - Tanjung Harapan	150.000.000	Dinas Perkim
71	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Dan Semenisasi Halaman Mushola Janatul Firdaus Rt 004 Kel Wonotirto	100.000.000	Dinas Perkim
72	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Drainase Pak Mulko Rt 004 Kel Wonotirto	180.000.000	Dinas Perkim
73	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Rt 04	150.000.000	Dinas Perkim
74	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jln Karya Raga Rt 004 Kel Wonotirto	150.000.000	Dinas Perkim
75	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Karya Tani Bpk Mugio Rt 004 Kel Wonotirto	600.000.000	Dinas Perkim
76	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Karya Tani	150.000.000	Dinas Perkim
77	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Pasangan Batu Gang Karya Tani	180.000.000	Dinas Perkim
78	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Pasangan Batu Rt 04	150.000.000	Dinas Perkim
79	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Gang Yoyon	120.000.000	Dinas Perkim
80	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Gereja Rt 004 Kel Wonotirto	50.000.000	Dinas Perkim
81	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Sungai Tirtosari Rt 004 Kel Wonotirto	200.000.000	Dinas Perkim
82	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Wc Posyandu	50.000.000	Dinas PMD
83	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Ringan Mushola Janatul Firdaus Rt 004 Kel Wonotirto	75.000.000	Dinas Perkim
84	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Pasangan Batu Jl Karya Raga	150.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

85	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Sumur Lapangan Bola Rt 004 Kel Wonotirto	60.000.000	Dinas Perkim
86	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Sumur Ibu Sugiem Rt 004 Kel Wonotirto	60.000.000	Dinas Perkim
87	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Halaman Sdn 003 Kel Wonotirto	300.000.000	Dinas Perkim
88	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Drainase Depan Bpk Sapon Rt 004 Kel Wonotirto	75.000.000	Dinas Perkim
89	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peninggian Tanggul Sungan Tirtosari Rt 004 Kel Wonotirto	175.000.000	Dinas Perkim
90	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Halaman Gereja	100.000.000	Dinas Perkim
91	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Kenopi Gereja	100.000.000	Dinas Sosial
92	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lcd	50.000.000	Dinas Sosial
93	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Soundsistem Lengkap	150.000.000	Dinas Sosial
94	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Laptop	30.000.000	Dinas Sosial
95	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sumur Bor Lengkap Dengan Tandon 9000 Liter Dan 1200 Liter Sebanyak 2 Units Yaitu 1 Unit Berada Di Lokasi Aula Paud Dan 1 Unit Lagi Di Masjid Babussalam	100.000.000	Dinas Perkim
96	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Nurdin]	100.000.000	Dinas Perkim
97	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Suparman]	100.000.000	Dinas Perkim
98	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Usaha Tani (Samping Kanan Rumah Bpk Lukman Sampai Parit Saluran Tirtasari)	100.000.000	Dinas Perkim
99	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu (Parit Samping Barat Lapangan Bola)	100.000.000	Dinas Perkim
100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Belakang Musholla Anur]	100.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

101	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Agus Sunaryo]	100.000.000	Dinas Perkim
102	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Pikolin]	120.000.000	Dinas Perkim
103	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Sarmin]	100.000.000	Dinas Perkim
104	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Mck Masjid Babbussalam	300.000.000	Dinas Perkim
105	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Di Rt05	500.000.000	Dinas Perkim
106	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mebeler Untuk Ruang Kelas Tk Tpa Paud (Meja Guru Kursi Lemari Kipas Angin Meja Belajar Siswa Siswi	50.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
107	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Tk Tpa Musholla Anur	150.000.000	Dinas Sosial
108	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Parlan]	150.000.000	Dinas Perkim
109	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi Posyandu	50.000.000	Dinas PMD
110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Genset 8000 Watt Lengkap Dengan Gardunya Di Masjid Babussalam	45.000.000	Dinas Sosial
111	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Instalasi Biogas Untuk Meminimalisir Bau Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu Bpk Parlan	60.000.000	Disperindag
112	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Pagar Stanlees Style Depan Masjid Babussalam Rt05	70.000.000	Dinas Perkim
113	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Kamar Mandi Baru Untuk Jamaah Laki Laki Di Masjid Babussalam Rt05	150.000.000	Dinas Perkim
114	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Profesional Sound System Merk Toa Untuk Mqsjid Babussalam Rt05	75.000.000	Dinas Sosial
115	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Sungai Di Saluran Tirtasari Gang Anwaruddin	120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
116	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gudang Lengkap Dengan Rak Barang Nya Untuk Menyimpan Barang Barang Sabilillah Masjid Babussalam	150.000.000	Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

117	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Lapangan Bola Bagian Sebelah Utara Tepi Sungai Saluran Tirtasari	80.000.000	Dinas Perkim
118	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Merehab Posyandu Lama Untuk Tempat Anak Anak Bermain	30.000.000	Dinas PMD
119	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sarana Lapangan Futsal Dan Pengadaan Peralatan Tenis Meja Complete	100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
120	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk Lukman]	100.000.000	Dinas Perkim
121	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Kanopy Masjid Annur Rt05	100.000.000	Dinas Perkim
122	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Green House Ukuran 8 X 20 Meter Untuk Petani Milenial	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
123	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Bakalan Sebanyak 75 Ekor Untuk 3 Kelompok Tani Yang Ada Di Rt05	750.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
124	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran / Semenisasi Jalan Depan Rumah Satiman Sampai Depan Wisma Tamu Rt05	50.000.000	Dinas Perkim
125	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Ke Arah Kebun Sawit Rt05	150.000.000	Dinas Perkim
126	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Lampu Penerangan Di Lapangan Sepakbola Rt05 Sebanyak 8 Titik / Tiang	80.000.000	Dinas Perhubungan
127	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sarana Prasarana Biogas Untuk Warga Yang Memelihara Ternak Sapi	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
128	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan 50 Biji Tiang Dan Lampu Lengkap Untuk Penerangan Jalan Rt05 Sepanjang 850 Meter	100.000.000	Dinas Perhubungan
129	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Bunker Di Lokasi Antara Kebun Sawit Dan Antena Radio Repeater Rt05	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
130	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bibit Buah Buahan Varitas Unggul Untuk Di Budidayakan Dan Di Kembangkan Pada 3 Kelompok Tani Yang Ada Di Rt05	40.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
131	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit BpArbani	80.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

132	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Batu Di Parit Dekat Rumah BpSlamet Mujiono	100.000.000	Dinas Perkim
133	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Arah BpMunir	150.000.000	Dinas Perkim
134	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Dekat Masjid Al Muttaqin	125.000.000	Dinas Perkim
135	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Masuk Langgar Miftakhul Jannah	50.000.000	Dinas Perkim
136	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lampu Jalan	15.000.000	Dinas Perhubungan
137	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Ilham	100.000.000	Dinas Perkim
138	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Belakang Rumah BpkGiman	125.000.000	Dinas Perkim
139	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sumur Bor	70.000.000	Dinas Perkim
140	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Samping BpkParno	100.000.000	Dinas Perkim
141	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Samping BpkPaiman	200.000.000	Dinas Perkim
142	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Parit Depan Bpk Misman	75.000.000	Dinas Perkim
143	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Poros Tengah Rt 07 Kel Wonotirto (Lanjutan)	125.000.000	Dinas Perkim
144	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Canopy Teras Posyandu Anggrek Bulan Rt 07 Kel Wonotirto	45.000.000	Dinas PMD
145	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Km/Wc Posyandu Anggrek Bulan Rt 07	45.000.000	Dinas PMD
146	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sumur Bor Dalam & Tandon Air	125.000.000	Dinas Perkim
147	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Blok H - I Rt 07 Kel Wonotirto	270.000.000	Dinas Perkim
148	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Blok G - H Rt 07 Kel Wonotirto	270.000.000	Dinas Perkim
149	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Blok G Rt 07 Kel Wonotirto	255.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

150	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gudang Musholla Ainur-Rahmah	84.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
151	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Peng-Imaman Musholla Ainur-Rahmah	140.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
152	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tenda Tarup	60.000.000	Dinas PMD
153	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kursi Plastik / Kursi Pertemuan	30.000.000	Dinas PMD
154	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Meja Plastik / Meja Pertemuan	10.000.000	Dinas PMD
155	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah / Viar	50.000.000	Dinas Sosial
156	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tanaman Hidroponik	45.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
157	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	27.500.000	Dinas PMD
158	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tempat Sampah Basah/Kering	20.000.000	Dinas PMD
159	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sarana Prasarana Tpq (Meja Kursi Dll)	50.000.000	Dinas PMD
160	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Kaligrafi Dan Kelengkapan Prasarananya	25.000.000	Dinas PMD
161	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Lantai 2 Pembuatan Kelompok Paud "Budi Ahli Mandiri" Rt 008	225.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
162	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Dan Badan Jalan Siabdullah	425.000.000	Dinas Perkim
163	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Belakang Rumah Bapak Imam Syafi'I Rt 008	90.000.000	Dinas Perkim
164	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tanggul Penanggulangan Banjir Samping Rumah Bapak Ladiyono Rt 008	215.000.000	Dinas Perkim
165	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit Pasangan Batu Dari Rumah Bapak Agim Kanan Dan Kiri Rt 088	205.000.000	Dinas Perkim
166	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Gunung Jl Gang Barokah Rt 008	265.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

167	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang Kabel Jalan Penerangan Umum (Jpu)	150.000.000	Dinas Perhubungan
168	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang Barokah Rt 008	140.000.000	Dinas Perkim
169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kanan Kiri Jalan Karya Rt 008	120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
170	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Pasangan Batu Gunung Di Samping Rumah Bapak Desetyo	85.000.000	Dinas Perkim
171	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Gang Ramania Rt002 Kel Wonotirto	150.000.000	Dinas Perkim
172	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sumur Bor Kelompok Tirto Sari	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
173	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Laptop Dan Printer	20.000.000	Dinas Sosial
174	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengembangan Budidaya Bawang Merah	250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Halaman	50.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
176	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Gedung Sekretariat Pkk	150.000.000	Dinas PMD
177	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Lapangan Volly Rt 03 (Samping Halaman Parkiran Kantor Lurah)	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
178	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Kawat Permanen Lapangan Voli	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
179	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Studio Band (Halaman Kantor Lurah Lama Rt 04)	150.000.000	Dinas sosial
180	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lapangan Tenis Meja (2 Unit)	50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
181	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pasangan Batu (Turap) Di Lapangan Sepak Bola Rt 04	100.000.000	Dinas Perkim
182	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Jasa Potong Rambut (Barbershop)	15.000.000	Dinas PMD
183	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tempat Pengolahan Pupuk Kompos Dan Pelatihan Pengolahan Pupuk Kompos	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

184	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sumur Bor Lengkap Dengan Tandon Dan Bangunannya	75.000.000	Dinas sosial
185	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sekretariat Kelompok Ternak Tirto Sari	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
186	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bibit Ikan Lele	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
187	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pakan Ikan Lele	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
188	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pondok Pertemuan Pembudi Daya Iakn	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
189	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
190	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
191	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Teras Posyandu	100.000.000	Dinas PMD
192	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Toilet Posyandu	100.000.000	Dinas PMD
193	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Berat Kelas 1 S/D 6 & Kantor	200.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
194	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Lapangan Madrasah	175.000.000	Dinas pendidikan dan kebudayaan
195	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Seragam Untuk Petugas Dan Seluruh Kader Posyandu	100.000.000	Dinas PMD
196	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Usaha Tani Poktan Surya Bakti Rt 006 Kelurahan Wonotirto	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
197	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gudang Kompos Poktan Surya Bakti Rt 006 Kelurahan Wonotirto	150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
198	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Gapoktan Surya Bakti Rt 006 Kelurahan Wonotirto	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
199	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Green House Petani Millenial Rt 005	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Handtractor	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
201	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pupuk Npk Phonska	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

202	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pupuk Orea	20.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
203	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Herbisida Gempur	20.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Herbisida Starmin	20.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
205	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Kelompok Tani Gajah Tani B	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
206	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Ulin Kelompok Tani Gajah Tani A	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
207	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
208	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Rumput	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
209	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pondok Pertemuan	70.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
210	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Karya Tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
211	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Karya Tani	300.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
212	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Ruang TIK SDN018 Samboja	500.000.000	Dinas Pendidikan
213	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Musholla Sekolah SDN018 Samboja	500.000.000	Dinas Pendidikan
214	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemavingan Halaman Sekolah SDN018 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
215	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan Belakang Kantor Lurah Tanjung Harapan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
216	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan Pelatihan Posyandu	100.000.000	Dinas Kesehatan
217	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT	100.000.000	DPMD
218	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan Pelatihan ECOPRINT	100.000.000	Dinaskertrans
219	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Meubelair PKK Kelurahan Tanjung Harapan	30.000.000	DPMD

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

220	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Soundsystem Karang Taruna	200.000.000	Dispora
221	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Posyandu Dahlia III Jl Wisata RT 01	60.000.000	DPMD
222	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg Tenggiri Jl Nelayan RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
223	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit Pos Pantai Wisata Jl Wisata RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
224	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan GgTrakulu Jl Nelayan RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
225	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pengadaan bedah rumah jl nelayan gang tanjung pude rt 01	100.000.000	Dinas Sosial
226	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang Listrik Gg Tanjung Pude Jl Nelayan RT 01	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
227	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Jl Nelayan RT 01	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
228	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Samping Rumah Mang M Yasin Dan Parno Jl Nelayan RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
229	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pusban Tanjung Harapan		Dinas Pekerjaan Umum
230	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Fasilitas Umum Jl Wisata RT 01	300.000.000	Dinas Perkim
231	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tenda Pemandian Jenazah dan Perlengkapannya RT 01	200.000.000	Dinas Sosial
232	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Perbatasan RT 01 dan RT02 Jalan Pasiran	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
233	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan dan pengerasan jalan di samping musholla at taqwa RT 001	200.000.000	Dinas Sosial
234	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan Gang Tanjung Pude	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
235	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan badan jalan Gang Tanjung Pude	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
236	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Keramik Dinding Langgar At Taqwa	100.000.000	Dinas Sosial
237	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan Gang Pak Saepullah	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

238	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Gang samping kost-kost an Pak Nana / Gang Ki Sa'an	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
239	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit RT 001	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
240	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan bantuan budidaya ikan (perahu dan mesin ketinting)	300.000.000	Dinas Perikanan
241	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turab Tanah Merah RT 001	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
242	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pendopo Tanah Merah RT 001	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
243	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Kakap	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
244	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Samping Rumah Pak Tolani Jl Nelayan RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
245	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Paret arah Rumah Pak Nana	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
246	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tenda ukuran 6 x 12 dan perlengkapannya	200.000.000	Dinas Sosial
247	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan Lapangan Sepak Bola	300.000.000	Dispora
248	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Perbatasan RT01	200.000.000	Dispora
249	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Lapangan	100.000.000	Dispora
250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gudang Musholla At-Taqwa dan Toilet	100.000.000	Dinas Sosial
251	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Samping Rumah Pak Kasman RT 01	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
252	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Muin	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
253	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gudang RT 01	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
254	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Saluran Menggunakan Pipa tembusan Parit cwc arah laut sepanjang 40 M	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

255	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Batu Paret Belakang Rumah Sadio Gang Semangat RT 02	60.000.000	
256	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang H Slamet RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
257	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pengaspalan jalan gg semangat rt 02	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
258	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Lanjutan Perbatasan RT 01 dan RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
259	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Pondasi Mushola Zainal Mutaqin Jl Pasiran RT 02	300.000.000	Dinas Sosial
260	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan 3 (tiga titik) Gorong-Gorong Gang Semangat rt 2	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
261	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase depan SDN 018 RT02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
262	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Insani RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
263	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penurapan parit lanjutan gg semangat rt 02	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
264	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penurapan parit samping rumah hari s tembus serayu rt 2	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
265	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penurapan belakang rumah safii tembus serayu rt 02	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
266	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pengadaan tiang pln dan pengadaan lampu jalan gg semangat rt 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
267	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan drainase 4 (empat titik) Gang Semangat rt 02	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
268	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Parit Gang Insani RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
269	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang pasiran depan rumah Topatudin RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
270	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penurapan Parit Belakang Rumah Amirudin RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
271	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	penurapan Parit Belakang Rumah Mujiono RT 02	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
272	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan mesin rumput steel kelompok makmur tani jaya	100.000.000	Dinas Pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

273	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan KHAhmadi RT03	60.000.000	
274	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang dan Lampu Jalan Habib Masyir RT03	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
275	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang dan Lampu Jalan M Jaeni RT03	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
276	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Habib Masir RT03	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
277	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan M Jaeni RT 003	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
278	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Parit Jalan M Jaeni RT 003	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
279	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Perbatasan RT 02 dan RT 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
280	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit drainase belakang rumah sahlan rt 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
281	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit Jalan MJaeni RT 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
282	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit perbatasan sahlan dan arifin	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
283	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Penggemukan sapi kelompok tani lestari RT 03	200.000.000	Dinas Peternakan
284	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Perbatasan aripin dan abdul mukti RT 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
285	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Perbatasan M halimi dan Sadio RT 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
286	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perehapan Pintu air dan penambahan tanggul parit cacing	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
287	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gg ruslan rt 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
288	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan pintu air + Jembatan samping rumah sutikno rt 03	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
289	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Perbatasan sabarudin dan pujiono	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
290	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Rumah Jahit Rembulan	100.000.000	Dinaskertrans

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

291	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Belakang rumah parwoto	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
292	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Jaring 25 in Kelompok KUB Pantai Harapan RT 03	100.000.000	Dinas Perikanan
293	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Sodikin RT 04	60.000.000	
294	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Sodikin RT 04	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
295	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Serayu RT 04	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
296	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu GG Sandam RT 04	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
297	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu GG Kuswan RT 04	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
298	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bedah Rumah RT04	100.000.000	Dinas Perkim
299	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan Gang Pun Pun RT04	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Pun Pun RT04	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
301	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tapiang RT04	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
302	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Supardi RT 04	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
303	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi Gang Rambutan Jl Pasiran RT 005	60.000.000	
304	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran pengaman tepi sungai serayu RT 005	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
305	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit pasangan batu gang Rambutan RT 005	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
306	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pemagaran dan pembuatan tempat wudu musholla musholihul Muslimin RT 005	250.000.000	Dinas Sosial
307	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan paving halaman musholla musholihul muslimin RT 005	100.000.000	Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

308	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Dari Sungai Serayu ke Kuburan Gunung Geulis RT005	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
309	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Deker Saluran air RT 005	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
310	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Selokan Pembuangan air Limbah Gang Flamboyan RT 005	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
311	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lampu Jalanan Gang Rambutan dan Gang Flamboyan RT 005	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
312	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Convex Mirror persimpangan Gang Rambutan dengan jlnpasiran RT 005	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
313	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pemasangan Turap Abrasi dan Penahan Banjir ROB	75.000.000	
314	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai Irian Jl Wisata RT 06	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
315	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Jl Gg Buntu RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
316	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang Satria RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
317	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Drainase Dari Gg TK s/d Depan Rumah Pak Poniman RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
318	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Ruang Belajar TK Al-Hidayah Terpadu RT6	200.000.000	Dinas Pendidikan
319	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penambahan Tinggi Turap dari Jembatan s/d Pintu Air	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
320	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Gang Satria	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
321	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase RT06	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
322	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong-Gorong RT06	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
323	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Pintu Air RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
324	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu Parit Jl Pasiran Gang Irian RT 07	60.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

325	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pemagaran dan Pintu Kuburan Muslimin Anak- anak Jl Pasiran RT 07	85.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
326	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Udin RT 07	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
327	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Encur RT 07	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
328	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit RT07	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
329	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Bakri	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
330	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
331	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan RT 07	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
332	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Badan Jalan Waidi	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
333	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pelebaran Gang Langgar Jl Handil Wajar RT 08	60.000.000	
334	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Ali JlHandil Wajar RT08	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
335	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Darto RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
336	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Tawirja JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
337	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Gg Manan Jl Handil Wajar RT 08	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
338	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Lena JlHandil Wajar RT08	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
339	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Saprudin JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
340	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Gojali Jl Handil Wajar RT 08	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
341	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Langgar JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
342	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Terang Bulan JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

343	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Selamet JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
344	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Muslim JlHandil Wajar RT08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
345	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung MTs Al-Hidayah	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
346	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Blok Halaman Bermain JlHandil Wajar RT 8	200.000.000	Dinas Pendidikan
347	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Halaman Bermain JlHandil Wajar RT8	200.000.000	Dinas Pendidikan
348	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Jalan Gg Manan RT 08	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
349	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan WC dan Tempat Wudhu Langgar Syiaruddin RT08	100.000.000	Dinas Sosial
350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun JlHandil Wajar RT8	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
351	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit jl Handil Wajar RT8 Gang Langgar	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
352	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit Handil Wajar RT8	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jl Handil Wajar RT08 – RT11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
354	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Aliman RT9	50.000.000	
355	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong-Gorong Perbatasan Dengan Kampung Lama RT9	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
356	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Sedulur	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
357	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Gang Isro RT09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
358	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi RT09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
359	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Gang Rambe Jl Handil bangun RT 009	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
360	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan gang Rambe 2 Jl Handil Bangun RT 09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

361	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Rahmat RT09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
362	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Mingun RT09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
363	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan gang Jambu RT 09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
364	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan gang Nangka RT 09	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
365	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit RT10	55.000.000	
366	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan TPQ Qiyamudin	100.000.000	Dinas Sosial
367	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gang Sabar RT 010	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
368	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Parit Gang Buntu	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
369	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Lukman	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
370	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar Musholla Qiyamuddin RT10	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
371	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan jalan gang Reog RT 010	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
372	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan menara musholla Qiyamudin	200.000.000	Dinas Sosial
373	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Mulia RT11	50.000.000	
374	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Gg Melati RT 11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
375	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Jalan Handil Bangun RT 11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
376	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Kenangan RT 11	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
377	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Mulia RT 11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
378	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Handil Bangun RT 11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

379	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Gg Pandan Sari RT11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
380	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gg Pandan Sari RT11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
381	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Gg Melati RT 11	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
382	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang Listrik Lampu Jalan Gang RT 11	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
383	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehap Jembatan Kayu ulin (Semenisasi) RT 007 Kuala Samboja	650.000.000	Dinas PU
384	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Beton (lanjutan) RT 010 Kuala Samboja	600.000.000	Dinas PU
385	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Kayu Ulin RT016 Kuala Samboja	650.000.000	Dinas PU
386	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan (Mesin DompengAs KapalKipasPellen)	500.000.000	Dinas Perikanan
387	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seminisasi Samping Gedung RT001	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
388	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Seminisasi RT001	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
389	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan ulin ke laut RT 001	180.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
390	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan RT01 gang Harapan IV dan Gang Margo RT 001	190.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
391	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Paret /Drainase gang tower RT 001	180.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
392	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Ronda RT 001	10.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
393	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehap WC Mushola Atap dan Tempat berwudhu RT 001	90.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
394	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Batas RT antar RT 01 RT 02 dan RT 14	10.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
395	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehap WC Gang Harapan IV RT 001	20.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
396	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi GG Tower RT 001	180.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

397	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan RT 002	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
398	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Pembatas Madrasah RT 002	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
399	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengaspalan Jalan Gang Damai RT 003	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bangunan Rumah Kaum	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
401	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Gudang Bank Sampah	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan gang NurAli RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
404	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Gang Ponde RT 004	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
405	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang H Asnawi RT 004	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
406	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang A Riduan RT 004	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
407	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Belankang SMA Islam RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
408	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Saddang RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
409	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan Gang Saddang RT 004	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
410	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainage Gang Saddang RT 004	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
411	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Gang Hatta	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
412	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang Hatta	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
413	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Gang Maperappi	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
414	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Belakang Ex Puskesmas Lama RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

415	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembentukan Badan Jalan Gang Maperappi RT 004	300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
416	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/pembuangan drainage Gang Service RT 004	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
417	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Nelayan Gang Service RT 004	300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
418	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembentukan Badan Jalan Gang H Abd Gani RT 004	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
419	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembentukan Badan Jalan Gang H Abd Rahman RT 004	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
420	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Drainage/Saluran Air RT 004	20.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
421	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung PAUD HARAPAN BUNDA Kel Sanipah	200.000.000	Dinas Pendidikan
422	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman PAUD HARAPAN BUNDA	100.000.000	Dinas Pendidikan
423	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan pagar keliling PAUD HARAPAN BUNDA	150.000.000	Dinas Pendidikan
424	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bedah Rumah	200.000.000	Dinas Sosial
425	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gapura RT	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
426	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lampu Jalan	160.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
427	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Ridwan	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
428	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Sekarwangi	350.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
429	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pagar Kuburan Muslim Sariwangi	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
430	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Gg Gn Pasir	300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
431	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Jl Gn Sariwangi	400.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
432	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Gg Spontan	400.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

433	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Baru Belakang Kuburan Kristen	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
434	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lahan Parkir Kuburan Muslim Sariwangi	60.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
435	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Baru Jl Gn Pasir	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
436	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gg Buntu	360.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
437	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Gg Buntu	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
438	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan GG Pembangunan RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
439	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit GG Pembangunan RT 06	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
440	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Warga RT 06	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
441	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi GG Judding RT 06	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
442	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang RT 06	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
443	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang RT 06	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
444	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Ulin Sungai RT 06	300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
445	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pintu Sungai RT 06	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
446	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Jembatan Kayu	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
447	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lampu Jalanan Solar Cell	30.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
448	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Turap Penahan ombak	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
449	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Dan Penimbunan gang Nurussalam	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
450	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecoran Badan Jalan Gang Adil Mulya	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

451	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecoran Badan Jalan Gang Musa	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
452	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Mesjid Nurusalam	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
453	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Sembek Pinggir Laut	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
454	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bibit Sapi Untuk Ternak Tani	200.000.000	Distanak
455	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit Gang H Darwis RT 008	250.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
456	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit depan Jalan Gang Masjid RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
457	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Famili RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
458	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalang Gang H Darwis RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
459	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Sariwangi RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
460	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Sariwangi RT 008 Tembus Kampung Kamal	400.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
461	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Jalan Poros Jalan Sariwangi RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
462	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Jalan Gang Masjid Jabal Nur RT 008	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
463	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pos Kambling	7.000.000	
464	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bor Air	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
465	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lapangan olahraga/Serbaguna	25.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
466	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Semenisasi	500.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
467	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Semenisasi	1.000.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
468	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paret	300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

469	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Treid Mild	13.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
470	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tenis Meja	4.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
471	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bola Volli	200.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
472	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Raket & cock	1.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
473	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paret Semenisasi Jalan perjuangan	350.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
474	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gg Mawar	115.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
475	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Mudek	122.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
476	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paret Semenisasi Jalan Sulaeman	500.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
477	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Jalan Sulaeman	750.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
478	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Ggsentosa	112.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
479	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemangkasan Badan Jalan Teletubis	750.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
480	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pasangan Batu/Penimbunan Jalan Kenangan RT 011	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
481	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Melati RT 011	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
482	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Amanah RT 011	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
483	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Mawar RT 011	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
484	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit RT 011	170.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
485	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Pasangan Batu Jalan Melati RT 011	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
486	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paving Masjid Hijrotul M RT 011	160.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

487	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Jalan Gang Anggrek RT 011	60.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
488	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Green House RT 011	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
489	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Posyandu Matahari RT 011	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
490	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Pemakaman RT 012	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
491	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Nelayan RT 012	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
492	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Lapangan Voly RT 012	50.000.000	Dispora
493	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pemakaman RT 012	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
494	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
495	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Kamling RT 012	30.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
496	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Pemakaman	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
497	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu Gerbang SD IT Pesisir RT 012	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
498	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan RKB 2 Lokal SD IT Pesisir RT 012	350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
499	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penyiringan Parit deket Tugu Perbatasan RT 013	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penyiringan Parit Perbatasan Teluk Pemedas RT 013	85.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
501	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan jalan Gg Harapan 1	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
502	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap pantai perbatasan antara RT 14 dan kel Teluk Pemedas	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
503	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Lanjutan Gang Melati 1 RT 015	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
504	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Lanjutan GG Tapeng RT 016	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

505	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Semenisasi Jalan GG Nurdin RT 016	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
506	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit GG Tapeng RT 016	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
507	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Pasar RT 017	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
508	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit tembusan Rumah Amrullah RT 017	120.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
509	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Rumah Mama Desi RT 017	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
510	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Mama Desi RT 017	50.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
511	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit depan Rumah Rifai RT 017	160.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
512	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penggalian Sungai tembusan ke Laut RT 017	250.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
513	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Rumah Belajar QUR'AN AL-Bayyinah RT18	800.000.000	Dinas Sosial
514	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan jlHandil wajo RT18	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
515	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan turab beton RT018	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
516	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan di pondok manu RT18	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
517	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	semenisasi jalan Rizaldi RT18	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
518	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	semenisasi jalan RT18	120.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
519	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan Usaha tani RT18	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
520	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan turab beton jlUsaha tani RT018	150.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
521	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bedah rumah warga Data DTKS RT18	200.000.000	Dinas Sosial
522	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan kapal nelayan KUB Muara Indah Sanipah RT18	117.000.000	Dinas Perikanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

523	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan kapal nelayan KUB Berkah Muara Sanipah RT18	135.000.000	Dinas Perikanan
524	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi paret RT18	130.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
525	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Manual paret RT18	125.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
526	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan beton RT18	110.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
527	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Paret beton RT018	120.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
528	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tandon penampung air bersih	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
529	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin jahit RT18	100.000.000	Dinas Sosial
530	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat Pertukangan kayu RT18	115.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
531	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan ternak sapi jantan & betina POKTAN AL-HIKMAH	200.000.000	Distanak
532	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PEMBUATAN DERMAGA UNTUK NELAYAN	150.000.000	Dinas Perikanan
533	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sarana Dan Prasana Olah Raga Kelurahan	500.000.000	Dispora
534	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan kapal /sampan petani rumput laut	300.000.000	Dinas Perikanan
535	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan Alat Tangkap Kel Nelayan RT 04(Rakkang & Rengge)	200.000.000	Dinas Perikanan
536	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan Perahu/Kapal Kel Nelayan RT 04	100.000.000	Dinas Perikanan
537	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan Bibit tanaman Sawit bagi petani	100.000.000	Distanak
538	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Training (BNSP)	100.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
539	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN SARANA DAN PRASANA DIKWT	40.000.000	Dispora
540	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN SARANA OLAHRAGA(MEJA TENIS MEJA	8.000.000	Dispora

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

541	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENINGKATAN SDM(PELATIHAN TENAGA KERJA/SERTIFIKAT MIGAS	50.000.000	Dinakertrans
542	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan Alat Tangkap (Rengge) Kelompok Nelayan Sumber Harapan	100.000.000	Dinas Perikanan
543	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantuan Perahu Viber Kelompok Nelayan Sumber Harapan	130.000.000	Dinas Perikanan
544	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dinding Penahan Tanah / Turap RT 6	500.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
545	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dinding Penahan Tanah RT 07	1.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
546	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dinding Penahan Tanah Jalan Usaha Tani /Siring Ulin	450.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
547	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Seminisasi Jalan Swadaya	1.300.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
548	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Semenisasi Jalan Usaha Tani	200.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
549	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Semenisasi Jalan Desa / Jalan Pembangunan RT 03 sampai RT 2	4.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
550	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung SDN 024	2.500.000.000	Dinas Pendidikan
551	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 001	75.000.000	Dinas Perkim
552	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Jalan Poros Rt 001	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
553	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 002	75.000.000	Dinas Perkim
554	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 002	250.000.000	Dinas Perkim
555	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 003	350.000.000	Dinas Perkim
556	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 003	75.000.000	Dinas Perkim
557	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Jalan Rt 004	75.000.000	Dinas Perkim
558	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 004	85.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

559	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 005	85.000.000	Dinas Perkim
560	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 006	85.000.000	Dinas Perkim
561	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase Rt 006	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
562	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi Jalan Rt 007	80.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
563	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 007	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
564	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 008	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
565	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase Rt 009	90.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
566	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Jalan Rt 009	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
567	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 010	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
568	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 010	200.000.000	Dinas Perkim
569	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sarana Prasarana Kesenian	600.000.000	Dinas Pendidikan
570	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gedung Sekolah Smpn 05	5.000.000.000	Dinas Pendidikan
571	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Halaman Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan
572	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Keliling Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan
573	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Gedung Ra Al Isra	200.000.000	Dinas Pendidikan
574	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Lapangan Olahraga	250.000.000	Dispora
575	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Poros	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
576	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan Gang	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

577	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penerangan Lampu Jalan	300.000.000	Dinas Dpmd
578	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan RT001 GnHabang	200.000.000	Dinas PU
579	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan RT001 GnHabang-ke Handil Idum RT003	200.000.000	Dinas PU
580	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan Gang Paud RT002 Handil Penghulu	200.000.000	Dinas PU
581	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Penyebrangan RT002 Handil Penghulu	200.000.000	Dinas PU
582	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan RT003 Handil Idum	200.000.000	Dinas PU
583	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Ke Mushola/ Langgar RT003 Handil Idum	100.000.000	Dinas PU
584	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Ke Pusban RT004 Handil Idum	200.000.000	Dinas PU
585	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Beton RT 004 Handil Idum Kel Muara Sembilang	1.500.000.000	Dinas PU
586	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan / Cor Beton Jalan Poros Handil Idum RT004	2.000.000.000	Dinas PU
587	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan gang nyompa RT005 TjSembilang Kel Muara Sembilang	2.000.000.000	Dinas PU
588	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan gang Arsyad RT005 TjSembilang Kel Muara Sembilang	2.000.000.000	Dinas PU
589	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan jembatan penyebrangan RT005 TjSembilang Kel Muara Sembilang	2.000.000.000	Dinas PU
590	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan RT006 TjSembilang Kel Muara Sembilang	150.000.000	Dinas PU
591	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembanguan Gedung Serbaguna TjSembilang	1.000.000.000	Dinas PU
592	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab total Jalan jembatan RT007 TjSembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas PU

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

593	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan RT008 TjSembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas PU
594	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan GgPada Idi RT009 TjSembilang Kel Muara Sembilang	100.000.000	Dinas PU
595	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jalan jembatan GgWahyudi RT009 TjSembilang Kel Muara Sembilang	150.000.000	Dinas PU
596	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan jembatan RT010 TjSembilang	100.000.000	Dinas PU
597	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan Gang Langgar RT011 GnHabang	200.000.000	Dinas PU
598	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan Gang Manis RT011 GnHabang	200.000.000	Dinas PU
599	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Beton RT 0RT011 GnHabang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas PU
600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi jalan RT 012 Handil Penghulu	200.000.000	Dinas PU
601	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan turap pasangan batu RT 012 Handil Penghulu	200.000.000	Dinas PU
602	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan badan jalan RT 012 Handil Penghulu	1.500.000.000	Dinas PU
603	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Penyebrangan gang Bani RT013 Handil Idum	100.000.000	Dinas PU
604	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan badan jalan gang tursina RT013 Handil Idum	150.000.000	Dinas PU
605	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan badan jalan gang Makmur RT013 Handil Idum	150.000.000	Dinas PU
606	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gang RT014 Handil Idum	150.000.000	Dinas PU
607	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan ke Langgar/Mushola RT014 Handil Idum	100.000.000	Dinas PU
608	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renovasi/Rehab Total Mushola/ Langgar RT003 Handil Idum	300.000.000	Dinas Perkim
609	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab total Posyandu Mawar 2 RT07 Tj Sembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

610	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab total TK Harapan Bangsa RT07 Tj Sembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas Pendidikan
611	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan halaman sekolah SDN 021 TjSembilang KelMuara Sembilang	200.000.000	Dinas Pendidikan
612	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Ternak RT 002 Kel Muara Sembilang	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
613	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Ternak RT 012 Kel Muara Sembilang	150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
614	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Ternak RT 013 Kel Muara Sembilang	370.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
615	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bantuan Rengge / Jaring dan Nilon KUB Harapan Sejahterra RT006 Tj Sembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas Perikanan
616	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin KUB"Tanjung Berkah" RT009 Tj Sembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	Dinas Perikanan
617	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan TK-TPA Miftakhul Ulum At-Taqwa RT10 TjSembilang Kel Muara Sembilang	200.000.000	KESRA
618	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Jaringan Air Bersih RT 04 013 03 Kel Muara Sembilang	1.000.000.000	PDAM
619	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Rumah Ibadah (Musholla)	300.000.000	KESRA
620	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan di Rt03 (ggDarlan)	100.000.000	
621	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan ggMekar di Rt03	200.000.000	
622	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan gg Murhani di Rt03	200.000.000	
623	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan ggHibah I di Rt03	200.000.000	
624	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan ggHibah II di Rt03	200.000.000	
625	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan di Rt03	200.000.000	
626	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan di Rt03 (ggKarya)	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

627	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan di Rt03 (ggMardiansyah)	200.000.000	
628	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan di Rt03 (ggBuana)	200.000.000	
629	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan di Rt03 (ggSuraji)	200.000.000	
630	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan penghubung Rt03 – Rt02	200.000.000	
631	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan beton Parit Rt03	200.000.000	
632	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan Kuburan Rt03	200.000.000	
633	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan beton dan pintu air parit induk handil surya di Rt03	200.000.000	
634	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit beton di Rt03 (gang mekar)	200.000.000	
635	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan parit beton di Rt03 (gangMardiansyah)	200.000.000	
636	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan parit beton di Rt03 (gangSuraji)	200.000.000	
637	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit beton di Rt03 (didepan pak sunoto)	200.000.000	
638	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan dan penurapan Parit beton di Rt03 (didepan HMuliadi)	200.000.000	
639	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit beton di Rt03 (gang Murhani)	200.000.000	
640	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan dan penurapan beton di Rt03 (wandi-iwan)	200.000.000	
641	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan beton parit di Rt03	200.000.000	
642	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Beton Parit Induk Handil Surya 2 di Rt03	200.000.000	
643	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit di Rt 03	200.000.000	
644	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pagar dan Gapura Masjid Nurul Hidayah RT03	200.000.000	Dinas Sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

645	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Menara Masjid Nurul Hidayah RT03	200.000.000	Dinas Sosial
646	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi teras masjid Nurul Hidayah RT 03	200.000.000	Dinas Sosial
647	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecoran lantai halaman masjid nurul hidayah	200.000.000	Dinas Sosial
648	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar SDN 019 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
649	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paving Block Halaman SDN 019	200.000.000	Dinas Pendidikan
650	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ruang Kelas Baru (RKB) SD 019 Samboja		Dinas Pendidikan
651	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ruang guru SD 019 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
652	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ruang Kantor Kepala Sekolah SD 019 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
653	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ruang Perpustakaan SD 019 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
654	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ruang Laboratorium SD 019 Samboja	200.000.000	Dinas Pendidikan
655	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan dan Pemagaran Kuburan Muslim rt03	200.000.000	
656	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengurugan halaman parkir Rt03	200.000.000	
657	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Jahit	200.000.000	
658	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan alat tangkap dan kapal	200.000.000	Dinas perikanan dan Kelautan
659	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pengadaan Alat Pertanian	200.000.000	
660	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pagar Taman bermain RT 08	270.000.000	Kecamatan
661	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap parit satu sisi jalan poros RT 08	195.000.000	
662	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan RT 08	400.000.000	Dinas Perkim

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

663	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Dinding Jembatan RT 08	180.000.000	Dinas Perkim
664	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Canopy teras taman baca	180.000.000	
665	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pagar TK Al-Ikhlas RT 08	190.000.000	Dinas Pendidikan
666	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Canopy TK Al-Ikhlas	190.000.000	Dinas Pendidikan
667	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Jaringan Listrik Taman Baca	5.000.000	
668	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gudang Rukun Kematian	180.000.000	
669	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan tenda RT 08	175.000.000	
670	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sound System	500.000.000	
671	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Blok Taman bermain RT 08	150.000.000	
672	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Posyandu RT 08	120.000.000	
673	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Pagar Posyandu RT 08	125.000.000	
674	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Tarmuji RT 01	60.000.000	
675	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan jalan Handil Husu	100.000.000	
676	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Jembatan Ulin Gang Sabar	200.000.000	
677	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu Gang Tarmuji	150.000.000	
678	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Posyandu dan Balai RT 01	200.000.000	Dinas PMD
679	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penambahan Tiang Lampu		Dinas Perhubungan
680	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan perahu dan mesin Komplit KUB Berkat Saudara RT 01	250.000.000	Dinas perikanan dan Kelautan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

681	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan perahu dan mesin Komplit KUB Mitra Bahari RT 01	270.000.000	Dinas perikanan dan Kelautan
682	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sapi Ternak Kelompok Tani Pelita Jaya II RT 01	280.000.000	Dinas Peternakan
683	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembanguan Masjid 2 Lantai Nurul Falah	3.000.000.000	Dinas Sosial
684	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Lanjutan Gg Sahabat	200.000.000	
685	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gg Laundry	200.000.000	
686	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Gang Masnah Rt 02	150.000.000	
687	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan Kuburan Muslimin Rt02	150.000.000	
688	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Area Masjid Nurul Falah	300.000.000	
689	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan HTatam	300.000.000	Dinas Perkim
690	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Laundry	200.000.000	
691	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pemagaran Makam Muslimin Rt02	200.000.000	
692	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Dan Turap Batu Rt02	200.000.000	
693	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mobil Ambulance		Dinas Kesehatan
694	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Gg Padaidi	100.000.000	
695	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Jembatan Dermaga Nelayan RT 07	150.000.000	
696	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGASPALAN JALAN GG HUNAIN	150.000.000	
697	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	SEMENISASI GGSELAMAT	150.000.000	
698	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengalian Pembuatan Parit GgHUNAIN	100.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

699	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan turap parit Ggm Monro RT04 Family	100.000.000	
700	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gang Monro Family RT 04 Teluk Pemedas	300.000.000	Dinas Perkim
701	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gedung TPA/TPQ Nurul Istiqomah Gang Monro Family RT04 Teluk Pemedas	200.000.000	
702	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi jalan Gang monro Family RT 04 Teluk Pemedas	400.000.000	Dinas Perkim
703	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit Irfan Teluk Pemedas RT 04	60.000.000	
704	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit Gg Garuda Teluk Pemedas RT04 Gg Garuda	200.000.000	
705	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan Teluk Pemedas RT04 Gotong royong	200.000.000	
706	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan Teluk Pemedas RT 04 Gg Selamat	80.000.000	
707	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan Teluk Pemedas RT 04 Gg Gg Tahang family	40.000.000	
708	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit handil surya Teluk pemedas RT 04	200.000.000	
709	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap paritnTeluk Pemedas RT 04 Handil Surya 2	150.000.000	
710	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Beton U Ditch Teluk Pemedas RT 04	300.000.000	
711	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar Kuburan Teluk Pemedas RT04	200.000.000	
712	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gg Sadri Teluk Pemedas RT 04	100.000.000	
713	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Paret Gg H Palipe Teluk Pemedas RT 04	150.000.000	
714	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peniingkatan Badan jalan Gotong royong Teluk Pemedas RT04 Jln Gotong Royong	1.000.000.000	Dinas PU
715	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan gotong royong Teluk Pemedas RT 04 Jln Gotong Royong	3.000.000.000	Dinas PU

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

716	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuat Plat Deker jalan Gotong royong Teluk Pemedas RT04 Jl Gotong royong	100.000.000	
717	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuuatan Paret jalan gotong royong Teluk Pemedas RT 04 Jln Gotong Royong	250.000.000	Dinas Perkim
718	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gg Handil surya Teluk Pemdas RT 04 Gg Handil Surya	220.000.000	
719	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan smenisasi Jln Gg Garuda Teluk Pemedas RT04 Gg Garuda	150.000.000	
720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gg Garuda Teluk Pemedas RT04 Gg Garuda	170.000.000	
721	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gg Sultan Jamil Teluk Pemedas RT04 Gg Sultan Jamil	150.000.000	
722	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gg Irfan Teluk Pemedas RT 04 Gg Irfan	200.000.000	
723	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penggandan Jaringan Listrik / Tiang Listrik Teluk Pemedas RT 04 Gg Nurul Istiqomah	120.000.000	Dinas Perhubungan
724	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan perahu Fiber Kelompok Usaha Bersama " Makmur Sentosa"	260.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan
725	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan kapal fiber 3 gt dan mesin kelompok nelayan mattiro walie Teluk Pemedas RT04	325.000.000	
726	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan mesin rumput dan mesin sinso kecil kelompok tani cahaya tani makmur Teluk Pemedas RT 04	97.500.000	
727	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Paret Gg Hj jabe Teluk Pemedas RT 04 Gg Hj jabe	200.000.000	
728	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit patimah Teluk Pemedas RT 04	70.000.000	
729	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan GgLippu Teluk Pemedas RT04 Gg Lippu	400.000.000	
730	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit blok H (tikungan) RT 09	75.000.000	
731	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pembuatan parit di blok FF RT 09	100.000.000	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

732	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit di blok GG RT 09	200.000.000	
733	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit di blok HH RT 09	200.000.000	
734	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit di blok F RT 09	100.000.000	
735	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit arah blok FF ke HH RT 09	150.000.000	
736	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gudang RT 09	200.000.000	
737	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan di area bundaran (pemasangan trotoar dan taman) RT 09	100.000.000	
738	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan penurapan parit induk RT010	120.000.000	
739	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Blok M RT010	100.000.000	
740	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Blok N RT010	100.000.000	
741	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pembuatan badan jalan Gg service (penurapan & penimbunan)	150.000.000	
742	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit Masjid Rt05(prioritas 2)	250.000.000	
743	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi jalan Gg mutiara	56.000.000	
744	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan badan jalan Gg Bekapai	75.000.000	
745	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan jalan Gg Dava	150.000.000	
746	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan pagar makam Taman abadi	240.000.000	
747	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan tarub punggung dan kelengkapan	50.000.000	
748	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan taman bermain TPA Albina unit 069 Gg Mutiara Rt05	40.000.000	Dinas Sosial
749	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan lahan TPA Albina Unit 069 Gg Mutiara Rt05	30.000.000	Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

750	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan lapangan sepak takraw SDN 030	40.000.000	Dispora
751	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan lapangan Bola Volly SDN 030	50.000.000	Dispora
752	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving SDN 030	50.000.000	
753	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi Gg Mawar RT 06	100.000.000	
754	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan dan perbaikan siring parit batas RT 6&5	150.000.000	
755	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pembuatan Drainase Gang Sepakat RT 06	150.000.000	
756	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pembuatan Drainase Gang Merapi RT 06	150.000.000	
757	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan dinding luar bangunan dan pergantian atap POSYANDU MPV	100.000.000	
758	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lanjutan Semenisasi jalan Gg sepakat RT 06	150.000.000	
759	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Pinggir Jalan Pantai Teluk Pemedas RT 06	200.000.000	
760	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan drinease tambak & pintu air RT 06	100.000.000	
761	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan tambat kapal pantai Gg Merapi RT 06	200.000.000	
762	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lanjutan pembuatan jembatan dermaga nelayan RT 06	200.000.000	
763	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat tangkap ikan jaring rawai dan rakang kelompok nelayan (Sigagu Berkah) RT 06	200.000.000	Dinas perikanan dan Kelautan
764	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kapal Dompeng kelompok Nelayan (Sigagu Berkah) RT 06	200.000.000	Dinas perikanan dan Kelautan
765	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Teluk Pemedas	1.500.000.000	Dinas Kesehatan
766	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah Teluk Pemedas	70.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

767	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan Halaman Kantor Lurah Teluk Pemedas	100.000.000	
768	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Kantor Lurah Teluk Pemedas	150.000.000	
769	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Lurah Teluk Pemedas	200.000.000	
770	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit dan Normalisasi Parit RT 05 Teluk Pemedas	200.000.000	
771	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Kuburan RT 05 Kel Teluk Pemedas (Kayu Ulin dan kawat)	200.000.000	
772	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembersihan Lahan Kuburan RT 05 Kel Teluk Pemedas	200.000.000	
773	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pendopo Kuburan RT 05 Kel Teluk Pemedas	200.000.000	
774	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sumur Gorong-gorong Kel Teluk Pemedas	10.000.000	
775	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan menuju TK Mawar Putih Teluk Pemedas	100.000.000	
776	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Sekolah TK Mawar Putih (Atap dan Palfond)	150.000.000	
777	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Poros Desa Bukit Raya - Sungai Seluang	15.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
778	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Drainase lingkungan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
779	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Jalan Usaha Tani	15.000.000.000	Dinas Pekerjaa Umum
780	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
781	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Penahan Badan Jalan	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
782	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Beton	200.000.000	Dinas Pu
783	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
784	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

785	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan /Semenisasi Jalan	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
786	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan /Semenisasi Jalan	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
787	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan 2 Jembatan Beton	200.000.000	Dinas Pu
788	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
789	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
790	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
791	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Beton	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
792	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
793	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dibutuhkan Bantuan Alat Pertanian/Perkebunan Pupuk Serta Bibit	100.000.000	Dinas Pertanian
794	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
795	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
796	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
797	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Batu	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
798	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Gorong-Gorong	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
799	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Muara	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Manual	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
801	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bedah Rumah	100.000.000	Disperkim
802	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bedah Rumah	100.000.000	Disperkim

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

803	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lampu Jalan Tenaga Surya	200.000.000	Dinas Perhubungan
804	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Serta Alat Perlengkapan Bibit Budidaya Madu Klenceng/Kelulut	100.000.000	Dinas Peternakan
805	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong Perbatasan Jl Handil Bangun	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
806	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gang Samiasih	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
807	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gang Sejahtera	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
808	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Handil Bangun (Kanan Jalan)	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
809	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Gg Masjid (Sebelah Kiri)	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
810	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Gg Mesjid Sampai Jl Handil Bangun	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
811	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gg Barokah	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
812	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Ternak Sapi 50 Ekor	200.000.000	Dinas Peternakan
813	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Alat Jahit Kain	100.000.000	Dinas Sosial
814	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sahabat Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
815	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Diperbatasan Bapak Suraji Dan Ibu Sulastri Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
816	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
817	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Agus Salim Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
818	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bantaran Sungai Hitam Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
819	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Amanah Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
820	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Padaelo Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

821	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Saudara Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
822	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Bakau Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
823	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Ketapang Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
824	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Wisata Sungai Hitam Lestari Rt 003 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Dinas Perhubungan
825	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Pengerjaan Parit Jalan Gang Kampung Lama Rt004	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
826	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Ajid Rt004	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
827	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Kuburan Muslim Rt004	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
828	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jembatan Kampung Lama Yg Hampir Roboh	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
829	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Harapan2	120.000.000	Kelurahan Kampung Lama
830	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelabuhan Sei Kampung Lama	100.000.000	Dinas Perhubungan
831	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pendopo Kuburan Rt004	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
832	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Sei Hitam Rt004	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
833	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Sukur	70.000.000	Kelurahan Kampung Lama
834	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pupuk Keperluan Tanaman Rt004	150.000.000	Dinas Pertanian
835	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melanjutkan Semenisasi Jalan Lempahung	250.000.000	Kelurahan Kampung Lama
836	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Pos Kamling Warga Rt004	12.000.000	Kelurahan Kampung Lama
837	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Area Belakang Sd 037	150.000.000	Dinas Pendidikan
838	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pokja Tp Pkk Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

839	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Sekretariat Karang Taruna	250.000.000	Dinas Pu
840	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Laptop Dan Printer Untuk Karang Taruna	20.000.000	Kelurahan Kampung Lama
841	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Tk	150.000.000	Pokir Dewan
842	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Gunung Bahalang	200.000.000	Pokir Dewan
843	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Gerbang Raja	175.000.000	Pokir Dewan
844	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Kaum	150.000.000	Pokir Dewan
845	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Masjid	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
846	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Kaum	150.000.000	Pokir Dewan
847	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Beriman	150.000.000	Pokir Dewan
848	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Bubuhan	150.000.000	Pokir Dewan
849	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Lingkungan Gang Damai	100.000.000	Pokir Dewan
850	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Lingkungan Gang Masjid	100.000.000	Pokir Dewan
851	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang Gerbang Raja	100.000.000	Pokir Dewan
852	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Poskamling	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
853	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Rumah Kaum	300.000.000	Pokir Wakil Bupati
854	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung Olahraga	3.000.000.000	Dispora
855	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyelesaian Pembangunan Masjid	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
856	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Tiang Lampu	200.000.000	Dinas Perhubungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

857	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Pagar Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan
858	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Kanopi Samping	100.000.000	Dinas Pendidikan
859	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Kanopi Halaman	100.000.000	Dinas Pendidikan
860	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Tk	100.000.000	Dinas Pendidikan
861	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Bkb)	854.500.000	Opd Dppkb Kukar
862	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bkb)	150.000.000	Opd Dppkb Kukar
863	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas	675.300.000	Opd Dppkb Kukar
864	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berkuakitas	325.000.000	Opd Dppkb Kukar
865	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Orientasi Pencatatan Dan Pelaporan Bagi Nakes Dan Penyuluh Kb	35.000.000	Opd Dppkb Kukar
866	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Harapan Baru Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
867	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Harapan Bersama Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
868	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Mawar I Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
869	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Mawar Ii Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
870	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Ternak I Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
871	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Pamili Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
872	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Kebun I Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
873	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Kebun Ii Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

874	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Korpri I Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
875	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
876	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
877	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Harapan Bersama Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
878	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Harapan Baru Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
879	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Harapan Bersama Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
880	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sepakat I Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
881	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sepakat Ii Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
882	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sepakat Iii Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
883	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sepakat Iv Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
884	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Sepakat V Rt 06 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
885	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
886	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
887	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Bapak Miskun Rt 007 Kel Urahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
888	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Biawan Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
889	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl Gang Gotong Royong Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
890	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong Ii Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
891	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong 6 Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

892	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong 7 Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
893	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbatasan Antara Rt 007 Dan Rt 006 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
894	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl Gang Gotong Royong Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Dinas Pu
895	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Dinas Perhubungan
896	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl Gang Gotong Royong Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
897	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong Iii Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
898	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
899	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Karetan Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Biawan Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
901	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Biawan Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
902	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
903	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Dinas Perikanan
904	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gang Gotong Royong 5 Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	200.000.000	Kelurahan Kampung Lama
905	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
906	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rt 007 Kelurahan Kampung Lama	100.000.000	Kelurahan Kampung Lama
907	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret Depan Rumah Jupe RT08	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
908	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengaspalan Jalan gang BTN RT08	180.000.000	Kelurahan Kampung Lama
909	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan / Latrik gang Muhajir RT08	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Samping gang Muhajir RT08	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
911	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Draenase Depan Rumah Ketua RT08	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
912	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Semenisasi gang Marsuki RT08	150.000.000	Kelurahan Kampung Lama
913	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Berat Jembatan Gang Mad isa	150.000.000	
914	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gg Cipto Santoso	150.000.000	
915	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gg Saaludin	90.000.000	
916	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg Mad Isa	200.000.000	Dinas PU
917	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Arin	90.000.000	
918	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gg Aas Husaini	200.000.000	Dinas PU
919	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Masjid At Tagwa	250.000.000	
920	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lanjutan Peningkatan Jl gang AEP	200.000.000	Dinas PU
921	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap jalan gang AEP Kiri/Kanan	185.000.000	Dinas PU
922	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	100.000.000	
923	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang AEP	150.000.000	
924	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Saef	90.000.000	
925	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Jarkasi 2	90.000.000	
926	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Sidomukti	90.000.000	
927	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Jarkasi 1	90.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

928	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan gang Jarkasi 1	125.000.000	
929	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bedah Rumah An Adiansyah Sumiati	85.000.000	
930	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Badan Jalan Gang Ahmad Maritja18	185.000.000	Dinas PU
931	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Kantor Sekertariat PC Muhamadiyah Samboja	185.000.000	Perkim
932	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Parit Kanan Kiri Jalan	90.000.000	
933	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim	80.000.000	
934	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pendopo Kuburan Muslim	75.000.000	
935	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan	175.000.000	
936	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jalan poros Handil II-balikpapan (PU)	250.000.000	Dinas PU
937	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit perbatasan antara RT11 dan RT 02 (PU)	250.000.000	Dinas PU
938	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Wisata	500.000.000	Dinas PU
939	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jln Kelompok Tani	250.000.000	Dinas PU
940	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Kampung Lampe	150.000.000	
941	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Kelompok Tani	90.000.000	
942	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Posyandu MM 4	75.000.000	
943	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renovasi Pondok Kuburan	75.000.000	
944	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi gang Rahmat	75.000.000	
945	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Pepaya	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

946	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Paret Jalan Pelajar/Said Usman SDN 008	125.000.000	
947	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gorong gorong Makam Pahlawan	75.000.000	
948	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Taman TMP RT004	125.000.000	
949	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu Gerbang	45.000.000	
950	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Poros RT005	110.000.000	
951	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Tepi Jalan Gang Longsor RT005	125.000.000	
952	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Pipa PDAM	65.000.000	
953	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Langgar Al Ikhsan (TPA dan WC)	200.000.000	Dinas pu
954	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Jalan Alternatif	100.000.000	
955	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi Jalan Poros	185.000.000	
956	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Paret RT006	100.000.000	
957	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan Permanen	100.000.000	
958	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan samping musholla nur hidayah	85.000.000	
959	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Taman Kanak-kanak al'quran Al Miftah	65.000.000	
960	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tugu Batas RT	65.000.000	
961	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Rt006	110.000.000	
962	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Halaman Panggung Agustusan	65.000.000	
963	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Mushola Nur Hidayah RT06	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

964	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gudang Musholla Nurhidayah	65.000.000	
965	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Tiang Lampu Jalan Gang Rumah Warga	150.000.000	dinas Perhubungan
966	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Soundsistem di Musholla Nur hidayah	15.000.000	
967	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Perumahan	85.000.000	
968	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Turap Batu	125.000.000	
969	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatatan jln Gg kakau	125.000.000	
970	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Bubuhan	110.000.000	
971	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Julak	85.000.000	
972	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Gang Fauji	75.000.000	
973	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Gang Basyuni	85.000.000	
974	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Pertanian	150.000.000	
975	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jln Perum Pinus	125.000.000	
976	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit pasangan Batu Perum Pinus	125.000.000	
977	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jln Gg Junaed	125.000.000	
978	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jln Gg Emang	75.000.000	
979	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit Gang Sukimin	75.000.000	
980	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit baru Gang Rohana	175.000.000	
981	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan penurapan Gang Cimangu	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

982	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit Gg Sepeda	75.000.000	
983	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	250.000.000	
984	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Gang Cimanggu	200.000.000	
985	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jln Cimanggu Dalam	125.000.000	
986	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang rohana	75.000.000	
987	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan Gang Sukimin	75.000.000	
988	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Surip	150.000.000	
989	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang Rohani	100.000.000	
990	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi gang Rohani	75.000.000	
991	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Pipa Air pdam	75.000.000	
992	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PeningkatanJalan MI	85.000.000	
993	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Langgar Nurul Ilmi	85.000.000	
994	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan posyandu MM 6	85.000.000	
995	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Badan Jalan Gang Rohani	75.000.000	
996	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Saluran Air Belakang Asrama Sub Polsek	150.000.000	
997	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Samping Rumah Pak RT	150.000.000	
998	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tempat Wudhu Langgar	55.000.000	
999	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Sulaiman	75.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Lapangan Voly	75.000.000	
1001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pemotongan Sapi	120.000.000	
1002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Gereja	95.000.000	
1003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Jembatan	75.000.000	
1004	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penerangan/Pengadaan lampu Jalan	150.000.000	dinas Perhubungan
1005	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai	90.000.000	
1006	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Pagar Musholla	75.000.000	
1007	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan gudang Mushola Rt 10	85.000.000	
1008	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit gang Anen	95.000.000	
1009	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan CCTV untuk 3 Titik di Simpang	150.000.000	
1010	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Pagar Gereja	75.000.000	
1011	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit di belakang Pak Khoiri	175.000.000	
1012	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sarana dan prasarana PKK RT (Termos Water Jug)	25.000.000	
1013	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan TPA Miftahul Jannah	95.000.000	
1014	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Balai Pertemuan (keramik dan Knopi)	85.000.000	
1015	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Pinggir Jalan	75.000.000	
1016	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Halte	75.000.000	
1017	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit pasangan kanan kiri jln gg Aman	180.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1018	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan parit pasangan batu kiri kanan jalan rt 11	195.000.000	
1019	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit pasangan batu dan bak kontrol air jln said usman rt 11	190.000.000	
1020	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pembuatan parit pasangan batu RT 11	100.000.000	
1021	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	175.000.000	
1022	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit pasangan batu kiri kanan(Lanjutan RT 11)	199.000.000	
1023	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit pasangan batu kiri kanan jalan asrama RT 11	200.000.000	Dinas PU
1024	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Asrama	200.000.000	Dinas PU
1025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab posyandu	75.000.000	
1026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Jalan Asrama Sebelah kiri	180.000.000	
1027	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan jembatan Gg Sariman	80.000.000	
1028	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Langgar Al-Ikhlas Gn Malang	80.000.000	
1029	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Stan Parkir Langgar Al-Ikhlas	90.000.000	
1030	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit Samping Pak Suadi	80.000.000	
1031	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit gang Amman Kanan kiri Jalan	85.000.000	
1032	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit RT 12 Kelurahan Sungai Seluang	90.000.000	
1033	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Passah RT 12	90.000.000	
1034	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Gang Beringin RT12	90.000.000	
1035	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Perusahaan 1	135.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1036	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Mansah RT012	125.000.000	
1037	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan parit Samir	90.000.000	
1038	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Simpang Tiga Langgar Assakinah	90.000.000	
1039	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Perusahaan II	125.000.000	
1040	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Tunu	125.000.000	
1041	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Parit RT 12	90.000.000	
1042	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Disamping langgar	90.000.000	
1043	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan gang buntu 2 kiri kanan jalan	150.000.000	
1044	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Saluran air di Belakang BPU dan Kantor Lurah	100.000.000	
1045	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jln gang buntu	190.000.000	
1046	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Samping Kantor Lurah	100.000.000	
1047	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Halte Di persimpang Jalan Waduk	75.000.000	
1048	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Mad Isa	125.000.000	
1049	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Rehab BPU Kelurahan Sungai Seluang	200.000.000	
1050	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penebalan Jalan Gang Buntu	150.000.000	
1051	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lanjutan Peningkatan Jalan RT 13	90.000.000	
1052	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan	85.000.000	
1053	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Parit	90.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1054	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Poskamling	75.000.000	
1055	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Posyandu	150.000.000	
1056	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Parit	150.000.000	
1057	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret kanan kiri gang buntu	100.000.000	
1058	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang M Ali	125.000.000	
1059	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Bakri 2	185.000.000	
1060	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang kampung Baru	90.000.000	
1061	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Paret Kampung Baru	90.000.000	
1062	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan TK/TPA Al Maarif	150.000.000	
1063	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Mes Koramil	150.000.000	
1064	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan WC Mushola KpBaru RT014	50.000.000	
1065	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Wisata Lakeview	80.000.000	
1066	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gg As salam	80.000.000	
1067	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan TPA	80.000.000	
1068	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Pertanian	175.000.000	
1069	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gang HArsul	150.000.000	
1070	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit kiri kanan jalan RT 015	130.000.000	
1071	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan RT 015	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1072	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan arah ke TPA Al Hidayah	125.000.000	
1073	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan GangDjura RT016	85.000.000	
1074	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Veteran	85.000.000	
1075	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Gang Elisabeth	85.000.000	
1076	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit pasangan kanan kiri Gg Djura	125.000.000	
1077	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan badan jalan Gg Elisabeth	150.000.000	
1078	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit pasangan batu RT 016	110.000.000	
1079	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang Elizabeth	110.000.000	
1080	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Rumah An Elizabeth MBasir Dedi Wahyudi	200.000.000	Dinas Perkim
1081	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paret TK Tunas Melati	85.000.000	
1082	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Paret Gang Buntu	90.000.000	
1083	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan gang Jamal	150.000.000	
1084	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Paret Posyandu MM 2	90.000.000	
1085	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Sekolah PAUD Aflah Cendikia	90.000.000	
1086	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan TK Tunas Melati		
1087	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Puskesmas Samboja	20.000.000	Dinas Kesehatan
1088	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Rumah Dinas	350.000.000	Dinas Kesehatan
1089	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tempat Parkir	200.000.000	Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1090	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Depan Puskesmas	250.000.000	Dinas Kesehatan
1091	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGAJUAN KEBUTUHAN KAPUR DOLUMETE 1 TON / HA	2.250.000.000	Dinas Pertanian
1092	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGAJUAN BENIH PADI 30 X 25 KG	22.500.000	Dinas Pertanian
1093	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KULTIVATOR 5 UNIT (5 POKTAN)	125.000.000	Dinas Pertanian
1094	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	EXSAFATOR INI	650.000.000	Dinas Pertanian
1095	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	HAND SPAYER	150.000.000	Dinas Pertanian
1096	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PEMBANGUNAN GREEN HOUSE UK 10 X 50 MTR	400.000.000	Dinas Pertanian
1097	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	BANTUAN BIBIT TOGA	50.000.000	Dinas Pertanian
1098	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	BANTUAN BIBIT CABAI	50.000.000	Dinas Pertanian
1099	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- PELATIHAN CARA MEMBUAT KOMPOS (Semua Poktan)	30.000.000	Dinas Pertanian
1100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- PELATIHAN PERTANIAN ORGANIK (Semua Poktan)	30.000.000	Dinas Pertanian
1101	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- PELATIHAN DINAMIKA PERTANIAN (Semua Poktan)	30.000.000	Dinas Pertanian
1102	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PEMBUATAN JALAN KELOMPOK TANI TUNAS BARU	150.000.000	Dinas Pertanian
1103	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENINGKATAN JALAN POKTAN DWI TUNGGAL DAN SEJAHTERA	200.000.000	Dinas Pertanian
1104	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN TERNAK SAPI POKTAN DWI TUNGGAL	1.000.000.000	Dinas Pertanian
1105	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN TERNAK KAMBING POKTAN DWI TUNGGAL	250.000.000	Dinas Pertanian
1106	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN IKAN AIR TAWAR POKTAN DWI TUNGGAL	75.000.000	Dinas Pertanian
1107	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PEMBUATAN SALURAN AIR SAWAH POKTAN TUNAS BARU	400.000.000	Dinas Pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1108	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENGADAAN / BANTUAN LEBAH KELULUT POKTAN DWI LESTARI	60.000.000	Dinas Pertanian
1109	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	BANTUAN BIBIT AREN 10 HA POKTAN DWI LESTARI	20.000.000	Dinas Pertanian
1110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemeliharaan Ruang TPA AS-Shibyan RT 01 Sungai Seluang	250.000.000	Dinas Pendidikan
1111	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Pinggir jalan RT04 SMPN 1 Samboja	250.000.000	Dinas Pendidikan
1112	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Ruang Kesenian SMPN 1 Samboja	3.000.000.000	Dinas Pendidikan
1113	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Lahan yang longsor SMPN 1 Samboja	250.000.000	Dinas Pendidikan
1114	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Pondasi Bangunan Sekolah SDN 002	250.000.000	Dinas Pendidikan
1115	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuangan Tanah Uruk di depan Laboratorium MTSN 4 KUKAR	150.000.000	Dinas Pendidikan
1116	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit Halaman Sekolah MTSN 4 KUKAR	250.000.000	Dinas Pendidikan
1117	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Jebatan MTSN 4 KUKAR Samping KUA	250.000.000	Dinas Pendidikan
1118	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Block untuk Halaman Sekolah SDIT Al Fatih	250.000.000	Dinas Pendidikan
1119	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan tempat wudhu masjid Darul Hijrah Samboja	150.000.000	Dinas Pendidikan
1120	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan masuk Sekolah Darul Hijrah	250.000.000	Dinas Pendidikan
1121	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Ruang Kelas Pondok pesantren Bilal Bin Robah (3 Lokal)	250.000.000	Dinas Pendidikan
1122	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Pesantren Bilal Bin Robah	250.000.000	Dinas Pendidikan
1123	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renovasi Tempat wudhu Mushola Pondok Pesantren Bilal Bin robah	150.000.000	Dinas Pendidikan
1124	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Pagar Sekolah SDN 012	150.000.000	Dinas Pendidikan
1125	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Ruang Guru SDN 012	150.000.000	Dinas Pendidikan

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1126	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan WC dan Kamar Mandi SMK Al Jabalnur	250.000.000	Dinas Pendidikan
1127	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Mushola SMA Harapan	250.000.000	Dinas Pendidikan
1128	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaa Meja dan Kursi (3 Lokal)	150.000.000	Dinas Pendidikan
1129	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Pagar SMA Harapan	250.000.000	Dinas Pendidikan
1130	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar SDN 008	250.000.000	Dinas Pendidikan
1131	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Ruang UKS SDN 008	200.000.000	Dinas Pendidikan
1132	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu Gerbang SDN 008	150.000.000	Dinas Pendidikan
1133	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Nelayan	150.000.000	
1134	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Sungai	100.000.000	
1135	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan Pintu Air	25.000.000	
1136	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Langgar Al-Fajar	50.000.000	
1137	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pintu Air Parit Kebun	100.000.000	
1138	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun	200.000.000	
1139	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Kayu Ulin	75.000.000	
1140	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Jembatan Kayu Ulin Nelayan	70.000.000	
1141	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sayap Pintu Air Kiri Kanan	80.000.000	
1142	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi Langgar Al-Fajar	19.000.000	
1143	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai Induk	400.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1144	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun Kelapa	200.000.000	
1145	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecatan Dinding Langgar Al-Fajar	35.000.000	
1146	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tarup Rukun Kematian	45.000.000	
1147	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kursi	5.500.000	
1148	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bak Air / Cor Besi Semen	50.000.000	
1149	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembersihan Samping Sungai Kiri Kanan	180.000.000	
1150	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penggalian Manual Sungai Bawah Jembatan	180.000.000	
1151	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Sei Tanggi	75.000.000	
1152	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun Menggunakan Excavator	200.000.000	
1153	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun Secara Manual	150.000.000	
1154	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Sungai	100.000.000	
1155	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Penyeberangan Cor Beton	100.000.000	
1156	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Usaha Tani	100.000.000	
1157	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gg Rindang	75.000.000	
1158	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Widia	150.000.000	
1159	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Langgar	150.000.000	
1160	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Manual	150.000.000	
1161	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap RT 03	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1162	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gang H Jamhari	150.000.000	
1163	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Turap Pintu Air	150.000.000	
1164	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Makam Sungai Tanggi	100.000.000	
1165	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pendopo Makam	100.000.000	
1166	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Paret Batu dan Sungai	100.000.000	
1167	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan paret – paret batu	100.000.000	
1168	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Gg Keluarga	100.000.000	
1169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Ulin ke Laut untuk Nelayan	100.000.000	
1170	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Sungai Tanggi	150.000.000	
1171	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar dan Teralis Langgar Raudhatul Jannah	100.000.000	
1172	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
1173	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Kamling	50.000.000	
1174	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Sirip Turap Air	150.000.000	
1175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi paret-paret Kebun Kelapa	170.000.000	
1176	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Faping Block Halaman Depan Langgar Raudhatul Jannah	80.000.000	
1177	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi TK Kasih Bunda	100.000.000	
1178	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu – pintu Air paret – paret	150.000.000	
1179	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gedung Serbaguna	175.000.000	

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1180	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan RT 03	200.000.000	
1181	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kursi untuk Rapat	50.000.000	
1182	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan paret – paret Batu Gang RT 03	200.000.000	
1183	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai Besar Laut RT 03	150.000.000	
1184	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan RT 03	150.000.000	
1185	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Baru RT 03	150.000.000	
1186	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan CCTV Langgar	15.000.000	
1187	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat Tangkap dan Perahu Nelayan	100.000.000	
1188	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Genset	50.000.000	
1189	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Jahit	10.000.000	
1190	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mobil Ambulance Rukun Kematian	200.000.000	
1191	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Jembatan Nelayan 1	350.000.000	
1192	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan KH Ahmad Marzuki	150.000.000	
1193	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Gg Perdana	100.000.000	
1194	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase	150.000.000	
1195	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Jembatan Nelayan 2	200.000.000	
1196	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Perdana	200.000.000	
1197	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Paret Kebun	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1198	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Pintu Air	100.000.000	
1199	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penggalian Sungai Perbatasan RT 04 dan RT 05 arah laut	200.000.000	
1200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Dermaga Nelayan Sei Raden	150.000.000	
1201	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lampu Jalan (Solar Sel)	50.000.000	
1202	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Gellnet KUB Karya Bersama	50.000.000	
1203	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Perahu KUB Karaya Bersama	100.000.000	
1204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tempat Sampah	10.000.000	
1205	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu Air	100.000.000	
1206	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Daun Pintu Air	100.000.000	
1207	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Ulin Nelayan Gang Malinau	200.000.000	
1208	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang H Andara	130.000.000	
1209	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang H Andara	90.000.000	
1210	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang H Markasi	60.000.000	
1211	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang Ajo	90.000.000	
1212	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Fajar	200.000.000	
1213	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Nelayan	200.000.000	
1214	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Sungai Gang Ajo	200.000.000	
1215	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Saluran Pembuangan Air Kuburan Muslimin	25.000.000	

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1216	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret	200.000.000	
1217	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Nelayan	150.000.000	
1218	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembersihan Parit Manual	15.000.000	
1219	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Penyeberangan Sungai	100.000.000	
1220	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Block	100.000.000	
1221	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Kuburan Muslimin	40.000.000	
1222	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Fajar	150.000.000	
1223	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Turap Sungai	100.000.000	
1224	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang H Markasi	150.000.000	
1225	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Lampu Penerangan Gang	25.000.000	
1226	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit RT 05	200.000.000	
1227	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gg Fajar	200.000.000	
1228	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan	200.000.000	
1229	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalur Taluk-Gang Fajar	200.000.000	
1230	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pintu Air	20.000.000	
1231	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tanah Uruk sebelah Pintu Air	100.000.000	
1232	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Listrik Pos Kamling 450 amper	10.000.000	
1233	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Lampu Jalan	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1234	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Nelayan	200.000.000	
1235	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pondok Nelayan	100.000.000	
1236	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jembatan Gang	300.000.000	
1237	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bendungan Tepi Laut	500.000.000	
1238	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lampu Jalan	100.000.000	
1239	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Artco	20.000.000	
1240	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Lukman	150.000.000	
1241	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Gang Sektor	200.000.000	
1242	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan H Rasidi	250.000.000	
1243	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecoran Jalan H Basrah	200.000.000	
1244	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai Handil Baru	75.000.000	
1245	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengurukan Gang Polisi	40.000.000	
1246	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gang Rayhan	100.000.000	
1247	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Kamling Non Permanen	30.000.000	
1248	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Pengadaan Baju Sar'i		
1249	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Pengadaan Gendang Rebana	50.000.000	
1250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Pengadaan Sound System		
1251	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Saluran Air Handil Baru	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1252	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Pandai	150.000.000	
1253	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Gang H Murni	100.000.000	
1254	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Drainase	150.000.000	
1255	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang H Hasan	100.000.000	
1256	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Al-Ghazali	100.000.000	
1257	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Pertanian	100.000.000	
1258	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Pandai	60.000.000	
1259	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang Pandai	80.000.000	
1260	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Langgar Darul Ikhsan	70.000.000	
1261	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Amin	70.000.000	
1262	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Hand Tractor quick 1000 Boxer	100.000.000	
1263	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang Kabul	150.000.000	
1264	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang Sabrina	100.000.000	
1265	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Alex Bahri	100.000.000	
1266	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah	300.000.000	
1267	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani	175.000.000	
1268	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Sabrina	50.000.000	
1269	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Harun	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1270	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Kabul	100.000.000	
1271	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Bahri	100.000.000	
1272	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Usaha Tani	100.000.000	
1273	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Paret	100.000.000	
1274	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret / Sungai	100.000.000	
1275	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Agregat Jalan KhAkhmad Marjuki (Gunung Rahmat)	350.000.000	
1276	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Sungai	350.000.000	
1277	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pagar Pengaman Jembatan	50.000.000	
1278	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Langgar At-Taqwa	100.000.000	
1279	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	180.000.000	
1280	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Gang Mulawarman	100.000.000	
1281	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Lampu Jalan	15.000.000	
1282	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Turap Depan Posyandu Tulip	20.000.000	
1283	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kanopi Halaman Posyandu Tulip	45.000.000	
1284	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	350.000.000	
1285	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat Olahraga (Lapangan Tenis Meja)	12.000.000	
1286	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Sekolah	500.000.000	
1287	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Turap	350.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1288	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Total Gedung Madrasah Miftahul Huda	350.000.000	
1289	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan	180.000.000	
1290	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Joglo Tani	Rp 115000000-	
1291	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Kebun	250.000.000	
1292	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pintu Gerbang RT 12	65.000.000	
1293	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Joglo Tani	120.000.000	
1294	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengolahan Lahan Pertanian Joglo Tani	112.000.000	
1295	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Embung Joglo Tani	200.000.000	
1296	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Turap Batu	100.000.000	
1297	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Sudirman	50.000.000	
1298	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Sungai RT12	150.000.000	
1299	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Abdul Manan	75.000.000	
1300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Langgar	100.000.000	
1301	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Gang Halipah	150.000.000	
1302	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun	150.000.000	
1303	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Makam	150.000.000	
1304	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Gang Papadaan	50.000.000	
1305	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang Fajar	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1306	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alsintan (Traktor) Untuk Pertanian	100.000.000	
1307	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret Sungai Raden	75.000.000	
1308	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Gang H Imlan	120.000.000	
1309	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengerasan Gang Berkah	50.000.000	
1310	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Pintu Air Utama	150.000.000	
1311	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Jl Poros Semenisasi Jl KH MARZUKI	150.000.000	
1312	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pintu Gerbang / Tapal Batas Wilayah antar RT	300.000.000	
1313	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	APAR Portabel	25.000.000	
1314	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Penyebrangan RT 13 Ke RT 05	200.000.000	
1315	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang H Ahmad	200.000.000	
1316	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecoran Pinggir Jalan (Simpang)	25.000.000	
1317	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang H Juhri	50.000.000	
1318	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tugu Batas RT	20.000.000	
1319	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Langgar Miftahul Jannah	20.000.000	
1320	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengajuan Pengerukkan Parit	140.000.000	
1321	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat Olahraga (Tenis Meja)	3.000.000	
1322	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tempat Sampah Di Masing- Masing Rumah Warga	2.800.000	
1323	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Lampu Jalan	6.300.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1324	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Urukan Halaman Belakang Sekolah	50.000.000	
1325	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Parit Sekolah Bagian Belakang Dan Samping		
1326	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengecatan Dinding Sekolah		
1327	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kanopi Halaman Sekolah		
1328	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Toilet / WC		
1329	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan TK Merpati		
1330	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana	60.000.000	
1331	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Posyandu Rose	50.000.000	
1332	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Posyandu Dahlia	50.000.000	
1333	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi Depan dan Samping Posyandu	150.000.000	
1334	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan WC Posyandu	100.000.000	
1335	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Kanopy	100.000.000	
1336	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pagar Halaman	100.000.000	
1337	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Sedang Atap Gedung TK PGRI	75.000.000	
1338	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paving Pondok Pesantren Al-Arsyadi	200.000.000	
1339	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Traktor Quick 1000	50.000.000	
1340	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pompa Air Honda	25.000.000	
1341	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pendopo Pertanian	70.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1342	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Perontok Padi	100.000.000	
1343	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Paret	100.000.000	
1344	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pupuk	100.000.000	
1345	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Racun Rumput	100.000.000	
1346	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Mesin Rumput	100.000.000	
1347	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Alat Semprot Rumput	100.000.000	
1348	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Pupuk dan Herbisida	100.000.000	
1349	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan	200.000.000	
1350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani Kelapa Karya Bina Bersama	200.000.000	
1351	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Pagar Sekolah		
1352	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Paving Halaman Sekolah		
1353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan ruang UKS		
1354	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Cor Depan Sekolah		
1355	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Mushola Sekolah		
1356	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Kantor LPM / Rumah Pintar	200.000.000	
1357	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Keluarga	45.000.000	
1358	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Rahmatika	100.000.000	
1359	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Hijau Zamrud	250.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1360	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Kolam Ikan Tawar Hijau Zamrud	25.000.000	
1361	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pencetakan Sawah Hijau Zamrud	30.000.000	
1362	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Lokasi Hijau Zamrud	20.000.000	
1363	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Keramik Madrasah Darul Ulum	21.600.000	
1364	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Peralatan UMKM Kantong Semar	100.000.000	
1365	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Vertical Rescue Pemuda/i Se-Kelurahan Handil Baru	30.000.000	
1366	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Sound System/Speaker Group Habsyi Asy-Syafaah	20.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan RKPD diaktualisasikan melalui penyusunan Renja-PD 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam rancangan APBD) tahun 2026. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Samboja tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Samboja dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah, dimana secara teknokratis prioritas telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah Daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) yang menyebutkan : Bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Samboja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Samboja tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Samboja mempunyai tujuan yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel“ yaitu meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dari segi kelembagaan,profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan Daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas Daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelaksanaan musrenbang kecamatan meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu *"Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan"*, yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Samboja merupakan salah satu PD sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Samboja sebagai PD pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi: menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa; pembinaan ketentraman dan ketertiban; pembinaan pemberdayaan masyarakat; pembinaan kesejahteraan rakyat; dan pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan bidang sarana dan prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan dan peningkatan sarana posyandu memalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Samboja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Perumusan Program dan kegiatan di Kecamatan Samboja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun 2021-2026. Sehingga Program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Samboja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Samboja. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2026 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberantasan kemisikinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2 (dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi PD. Selanjutnya yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Samboja.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi pelayanan minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

  Berdasarkan standar pelayanan minimal setiap unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan kegiatan di Kecamatan Samboja diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, dan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Samboja sebagai sebuah Kecamatan di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Samboja terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga tambang batu bara, perikanan yang ada di desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Samboja dan ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Samboja melalui penyusunan berbagai Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja tahun 2026 adalah 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) subkegiatan.

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Samboja dan melingkupi 3 (tiga) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 pada tabel 4.1 /T.C 33 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2026 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					URUSAN : NON URUSAN										
7	01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Samboja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	21.945.362.697	APBD		Nilai	77	33.045.018.589
7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	320.000.000	APBD		dokumen	11	480.000.000
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	40.000.000	APBD	Pengurangan Pagu	dokumen	1	100.000.000
7	01	01.	2.01	09	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec Samboja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	250.000.000	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran	Data	51	350.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	30.000.000	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran	laporan	2	30.000.000
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	16.351.803.619			laporan	14	21.534.512.402
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1148	15.689.083.619		Pengurangan Pagu	orang/ bulan	98	20.675.472.402
7	01	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	10.000.000			laporan	1	50.000.000
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	12	652.720.000			laporan	5	809.040.000
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	9863	90.800.000			unit	9863	288.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	50.000.000			dokumen	1	160.000.000
7	01	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	0	-		Pengurangan Sub Kegiatan	laporan	1	60.000.000
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	40.800.000			laporan	6	68.000.000
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	20	35.000.000		Pengurangan Pagu	orang	100	470.000.000
7	01	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-		Pengurangan Pagu	Paket	10	320.000.000
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000			Orang	25	150.000.000
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	800.713.130		Pengurangan Pagu	Layanan	6	4.091.123.075
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	131.871.000			Paket	162	131.871.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000			Paket	367	477.865.000
7	01	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.457.000			Paket	100	326.457.000
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	214.387.500			Paket	20	513.831.000
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	63.997.630		pengurangan pagu anggaran	Paket	120	141.099.075
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	719	375.000.000		Pengurangan pagu anggaran	Laporan	1655	2.500.000.000
7	01	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	2	270.000.000			unit	53	1.593.000.000
7	01	01.	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	100.000.000			unit	1	513.000.000
7	01	01.	2,07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-		Pengurangan pagu anggaran	Unit	1	780.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	170.000.000			unit	120	300.000.000
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	3.800.218.148			Unit	1	4.193.383.112
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	7.500.000		Pengurangan pagu anggaran	bulan	12	35.000.000
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.634.335.036			laporan	12	2.000.000.000
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.158.383.112		Pengurangan pagu anggaran	Laporan	12	2.158.383.112
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	96	276.827.800			Laporan	12	395.000.000
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	51.250.000			unit	150	85.000.000
7	01	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	77	81.802.800			unit	8	110.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	11	143.775.000			unit	70	200.000.000
					URUSAN : URUSAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Samboja	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	18.950.108.250			Persen	100	19.905.670.750
							Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100				Persen	100	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	450.000.000			Kegiatan	2	700.000.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	200.000.000		Penambahan Anggaran Kegiatan faslitasi kegiatan erau	Laporan	2	200.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	250.000.000		Pengurangan Pagu Anggaran	Dokumen	3	500.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	2	100.000.000			SPM	1	120.000.000
7	1	2	0,08	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	100.000.000			laporan	1	120.000.000
7	01	02	2.01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Samboja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	18.400.108.250			Kegiatan	150	19.085.670.750
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	980.108.250			Laporan	12	1.470.670.750
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	92	17.420.000.000		Penambahan Pagu Anggaran	Laporan	150	17.615.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Samboja	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	20.457.400.000			Persen	72,7	30.793.230.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	1	25.000.000			Kali	1	25.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	25.000.000			Laporan	1	25.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	10	7.001.000.000			Kegiatan	10	20.929.996.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Samboja	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	50.000.000			Lembaga Kemasyarakatan	10	100.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	52	4.505.000.000			Unit	84	13.979.996.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	31	2.401.000.000			Pokmas/ Ormas	2	6.750.000.000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	45.000.000		Pengurangan Pagu Anggaran	Laporan	3	100.000.000
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	13.431.400.000			Kali	12	9.838.234.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	03	2.02	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasya-rakatan	10	13.381.400.000		Jumlah RT Awal Kel Sanipah (18 RT) menjadi (19 RT) Perlu penambahan Anggaran karena Penambahan RT (1 RT) Rp.50.000.000	Lembaga Kemasya rakatan	10	9.768.234.000
7	1	3	2.02	03	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	4	50.000.000			Unit	2	70.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Samboja	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Presentase	100	175.000.000			Presentas e	100	275.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Samboja	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	175.000.000			Kegiatan	4	275.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	50.000.000			Laporan	4	75.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	125.000.000			Laporan	4	200.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Samboja	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase	100	470.000.000			Presentase	100	925.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Samboja	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	470.000.000			Kegiatan	11	925.000.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	800	430.000.000			Orang	331	850.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	40.000.000			Dokumen	4	75.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Samboja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	70	75.000.000			Persen	70	75.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Samboja	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	3	75.000.000			Laporan	3	75.000.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	75.000.000			Laporan	3	75.000.000
					JUMLAH					62.072.870.947					84.943.919.339

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Samboja ahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Samboja tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Periode tahun 2026. Bahwa Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2026 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2026 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGGANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai social cultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa,pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas danefesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin komplek tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara

cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan,pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalampelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadayamasyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah harus menetapkan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja-PD.

Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi “KUKAR IDAMAN” yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periodesebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045; dan
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud danTujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Anggana selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Anggana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud danTujuan
- 1.4 SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan Program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA” dengan misi 1: memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani, serta misi 4: meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bias dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra-PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Anggana telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. menyusun dokumen perencanaan RKPD tahun 2026, mulai dari

proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan musrenbang tingkat Daerah; dan

b. menyusun RKPD.

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2/2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PDtahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra- PD. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan perangkat daerah belanja langsung urus wajib dan pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	10	10	10	100%	10	40	80%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	70	14	14	14	100%	14	56	80%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadministrasikan	1655	331	331	331	100%	331	1324	80%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8	8	8	100%	8	32	80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	82	10	18	18	100%	18	72	87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	48	80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang dipelihara	115	10	115	115	100%	115	115	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Camat	10	2	2	2	100%	2	8	80%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	16	0	16	16	100%	16	16	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	0	8	8	100%	8	8	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat Program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

a. perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan; dan
b. nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Rencana Kerja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

a. melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
b. mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Anggana merupakan PD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat Daerah, sehingga Daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggana selama kurun waktu tahun 2021-2022 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Anggana, yaitu:

a. nilai SAKIP PD;
b. persentase jumlah kegiatan pemberdayaan desa; dan
c. persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut:

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK		Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				B	B	B	B			B	B	
	Jumlah Dokumen			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			331	331	331	331	331	331	331	331	331	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	115	115	115	115	115	115	115	115	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2	2	2	2	2	8	10	10	10	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			8	8	8	8	8	8	8	8	8	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan PD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD dan bagaimana dampaknya terhadap percapaian visi dan misi, target Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan PD.

Pelayanan di Kecamatan Anggana pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Anggana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Anggana masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. belum optimalnya koordinasi linmas;
2. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan;
3. belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan;
4. belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan;
5. belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan; dan
6. belum optimalnua kinerja dan tata kelola kecamatan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
2. meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. meningkatnya penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

peraturan Bupati;

5. meningkatkan pemeiliharaan prasarana dan layanan umum;
6. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan PD di tingkat kecamatan; dan
7. meningkatkkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf;
2. memaksimalkan rapat koordinasi per-triwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa; dan
3. melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. potensi dibidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan;
2. potensi perkebunan kelapa sawit di Desa Kutai Lama; dan
3. banyak pelaku UKM di 8 (delapan) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2025, *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**	**6.380.939.586**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Anggana	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**	**6.380.939.586**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 dokumen**	**320.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Anggana	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 dokumen**	**320.000.000**	
	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	250.000.000	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	250.000.000	
	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	0	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	**1 Dokumen**	0	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	0	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	1 dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan Capaian Kinerja	2 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan Capaian	2 DOkumen	30.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Dokumen	5.124.732.900	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Dokumen	5.124.732.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Anggana	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 orang/12 Bulan	5.021.412.900	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Anggana	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang/12 Bulan	5.021.412.900	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis program SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis program SKPD	1 Dokumen	0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	2 Dokumen	103.320.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasian Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	103.320.000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	331 unit	80.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	331 unit	80.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Anggana	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	0	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Anggana	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	0	
	Sub Kegiatan Pengaman barang milik daerah	Kec. Anggana	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pengaman barang milik daerah	Kec. Anggana	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Angga na	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Angga na	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Paket	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Paket
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Anggana	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	2	unit	-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Anggana	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	2	unit

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Anggana	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1	Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Anggana	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1	Paket	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	jenis	230.304.986	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	jenis	230.304.986	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	5.304.986	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	5.304.986	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	unit	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	unit	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	130.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	130.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Anggana	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	5,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Anggana	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	5,000,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Anggana	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60	kali	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Anggana	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60	kali	0	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	55	Laporan	75.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	55	Laporan	75.000.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500	Dokumen	15,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500	Dokumen	15,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 unit	75.830.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 unit	75.830.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	25.830.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	25.830.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104 Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104 Unit	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilita si	1 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabili Tasi	1 Unit	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	-	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	26 Unit	50.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	26 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 unit	50,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 unit	50,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1 unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1 unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	500.071.700	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	500.071.700	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Anggana	Jumlah surat menyurat	12 Bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Anggana	Jumlah surat menyurat	12 Bulan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik	Kec. Anggana	Jumlah waktupenyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	12 bulan	436.801.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik	Kec. Anggana	Jumlah waktupenyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	12 bulan	436.801.700	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	63.270.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	63.270.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Anggana	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	14.868.290.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Anggana	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	14.868.290.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Laporan	14.241.065.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Laporan	14.241.065.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Anggana	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	0 Berkas	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Anggana	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	0 Berkas	-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	0 Laporan	768.290.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	0 Laporan	768.290.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	13.600.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	13.600.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Anggana	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	370.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Anggana	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	370.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	16 kali	370.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	16 kali	370.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Anggana	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Anggana	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	50.000.000	
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 kegiatan	-	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan OlehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 giatan	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 giatan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 rsen	185.000.000 -	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 rsen	185.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500 orang	195.000.000 -	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500 orang	195.000.000-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	500 Orang	180.000.000 -	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	500 Orang	180.000.000 -	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec. Anggana**	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec. Anggana**	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Kegiatan	15,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Kegiatan	15,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Kec. Anggana	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Anggana	100	Persen		-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Kegiatan	-	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	2	Kegiatan		-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Anggana	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Anggana	100	Persen		0	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	Desa	0	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	Desa	0	
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Anggana	Jumlah desa yang difasilitasi	8	Desa	0	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Anggana	Jumlah desa yang difasilitasi	8	Desa	0	
	Sub Kegiatan Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Anggana	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah diterapkan	8	Peraturan	-	Sub Kegiatan Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Anggana	8		Peraturan		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades	8 Desa	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades	8 Desa	-	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	8 kegiatan	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	8 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	1 Dokumen	0	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	400.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	400.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	150.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	250.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	270.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	270.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	270.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	270.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kec. Anggana	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan	1 Kegiatan	180.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Kec. Anggana	Jumlah Penyelenggaraan	1 Kegiatan	180.000.000	
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketertiban Umum			dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	125.000.000	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	125.000.000	
	JUMLAH				22.064.229.586	JUMLAH				22.064.229.586	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Anggana pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Berikut tabel telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Anggana maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL T.C -32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	PANGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIOROTAS
1	MAULLIDIN	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan rusak parah	desa kutai lama dusun 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	1
2	MAULLIDIN	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	rusak parah	Desa Kutai Lama Dusun 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	2
3	MAULLIDIN	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	jalan berlubang	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait dokumentasi foto serta tinjauan lokasi/lapangan	3
4	MAULLIDIN	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Kabupaten/Jalan Poros (Kecamatan, Kelurahan, Desa)	jalan gelap	Rt.10, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan (unit/titik LPJU), titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi)	4

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5	MAULLIDIN	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak ada drianase	Dusun 1, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat dan foto lokasi	5
6	MAULLIDIN	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	terdapat retakan lebar di jalan jembatan	Rt.10, Kab. Kutai Kartanegara		6
7	MAULLIDIN	pengadaan perlengkapan olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	tidak perlengkapan olahraga bulutangkis untuk anak usia dini	RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu mengoordinasikan dengan Pengusul untuk dilengkapi terkait surat permohonan data dukung lainnya dan disesuiakan dengan kamus usulan RKPD 2026	7
8	MAULLIDIN	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Jalan masih tanah	Dusun 1, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : surat keterangan/volume pekerjaan/status ketersediaan lahan/dokumentasi (foto lokasi), titik koordinat	8
9	H. NORJALI. SH	Fasilitasi Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	Belum Tersedianya Sarana Olahraga	Jl.Sarimas RT.12 Dusun 3, Kab. Kutai Kartanegara	-	9
10	H. NORJALI. SH	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Belum Ada Drainase	Jl.Provinsi, Kab. Kutai Kartanegara	-	10
11	NORDIANSYAH	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau/Dermaga Desa/Kelurahan	tidak adanya sarana dan prasarana untuk bersandarnya jetty	jalan masjid RT.13 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara		11

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12	NORDIANSYAH	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Anggana)	belum adanya turap	jalan mulawarman RT.11, Kab. Kutai Kartanegara		12
13	NORDIANSYAH	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Anggana)	tidak adanya talud	jalan veteran RT. 03 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait pembangnan turap atau drainase, lengkapi foto dokumentasi dan titik koordinat, tinjauan lokasi/lapangan,	13
14	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan saat ini rusak ketika hujan licin dan berlumpur sehingga mengganggu para pengguna jalan terutama para anak sekolah dan masyarakat .	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait titik koordinat, proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan dan tinjauan lokasi/lapangan	14
15	AGUS HARIYANTO	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	kondisi puskesmas pembantu saat ini sudah rusak berat dan tidak bisa ditempati,sementara pelayanan masyarakat bergabung di PolinDes .	Jalan Diponegoro ,RT 12,Dusun 2,desa sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan agar melakukan analisis teknis terkait usulan, sesuai dengan kamus usulan dan agar menjadi prioritas OPD	15
16	H. NORJALI. SH	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Tidak ada nya Drainase	Jl.Provinsi, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat dan cek lokasi/lapangan	16

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

17	H. NORJALI. SH	Fasilitasi Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	Tidak Tersedia Sarana Olahraga	Jl.Sarimas RT.12 Dusun 3, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu mengoordinasikan dengan Pengusul terkait surat permohonan disesuiakan dengan kamus usulan RKPD 2026	17
18	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	kondisi jalan saat ini rusak berat dan sebagian sudah di aspal dan mohon dilanjutkan peningkatan jalan dan di Aspal ,panjang jalan 800 meter.	Jalan Sutomo,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat keterangan/volume pekerjaan, titik koordinat, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	18
19	AGUS HARIYANTO	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	Kondisi lapangan bola saat ini tidak memadai ,ketika hujan lapangan becek dan tidak bisa dipakai untuk kegiatan turnamen sepak bola,mohon untuk dilakukan Rehab lapangan tersebut.	Jalan Diponegoro , Sidomulyo RT12, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu mengoordinasikan dengan Pengusul terkait surat permohonan disesuiakan dengan kamus usulan RKPD 2026	19
20	H. NORJALI. SH	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Jalan Lingkungan Rusak	Jl.Padat Karya, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk cek lokasi/lapangan	20

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

21	AGUS HARIYANTO	Fasilitasi Pemasangan Tapal batas desa (Patok, Gapura)	saat ini desa sidomulyo kecamatan anggana belum memiliki Gapura pembatas desa /gapura selamat datang.	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo , Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, Koordinasikan dengan pengusul, Prioritaskan Sesuai lokus dan Fokus kamus usulan aspirasi RKPD 2026. Hitung Volume dan Pagu anggarannya.(lengkapi surat Usulan, Foto, status lahan dan Titik Kordinat)	21
22	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	kondisi jalan saat ini rusak dan satu satunya jalan menuju sekolah Paud milik desa,panjang jalan 150 meter ,	Jalan Teratai Rt 12,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait titik koordinat, proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan dan tinjauan lokasi/lapangan	22
23	AGUS HARIYANTO	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Desa Sidomulyo saat ini memiliki 4 (empat) sekolah dasar yang nmamna setiap tahunya meluluskan 120 lulusan sekolah dasar ,yang mana setelah lulus harus sekolah diluar desa sidomulyo yang jaraknya 6 km.mohon dibangunkan gedung sekolah baru SMP dan lokasi sudah diperisiapkan oleh pemerintah desa sidomulyo yang siap di hibahkan ke dinas pendidikan kab,Kutai kartanegara	Jalan Diponegoro ,,Desa Sidomulyo RT 12, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	23
24	H. NORJALI. SH	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Jembatan Rusak	Jl.Sarimas RT.25, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	24

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

25	H. NORJALI. SH	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Jembatan Rusak	Jl.Sarimas RT.12, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	25
26	AGUS HARIYANTO	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	saat ini drainase di jalan dermaga belum ada sehingga mengakibatkan jalan ceapt rusaak ,karena tergenang air .	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	26
27	H. NORJALI. SH	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Masih Jalan Setapak	Jl.Sarimas RT.25 Dusun 3 dan Dusun 5, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	27
28	H. NORJALI. SH	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Jalan Rusak	Jl.Sarimas RT.12, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	28
29	AGUS HARIYANTO	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Desa/Kelurahan (Anggana)	Kurangnya fasilitas pos kamling di desa sidomulyo mengakibatkan penjagaan /ronda malam kurang maksimal ,perlu adanya pembamgnan pos kamling di desa,	Desa Sidomulyo ,Dusun 1- 4, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : surat keterangan/volume pekerjaan/status ketersediaan lahan/dokumentasi (foto lokasi), titik koordinat	29
30	AGUS HARIYANTO	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Anggana)	belum memadainya fasilitas MCK di desa sidomulyo,sehingga ketika ada kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak kesulitan untuk mencari fasilitas mck	Jalan Diponegoro , No.10,RT 12 ,Desa Sidomulyo , Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk tinjauan lokasi/lapangan	30

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

31	H. NORJALI. SH	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan rusak	RT.16,15,13,14,1,3,4,5,7,8,26,27, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	31
32	H.EDI	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	Perlunya Pembuatan Pelataran Dikarenakan Tenggelam Ketika Pasang Naik	RT 11 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu mengkoordinasikan ke Pengusul terkait Permohonan dan disesuaikan dengan kamus usulan RKPD 2026	32
33	NURDIN	Peningkatan, Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Jalan Berlumpur	RT.06 Dan RT 07 Dusun 2, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : volume pekerjaan, titik koordinat dan foto lokasi	33
34	NURDIN	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan perlu ditingkatkan karena berlumpur dan licin	Jalan Putra Lembah Dusun 2, Kab. Kutai Kartanegara	-	34
35	NURDIN	Bantuan Belanja Hibah Untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah	Mesjid Tidak Muat Menampung Jemaah, Dan Atap Bocor	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, koordinasi dengan pihak pengusul utk melengkapi terkait proposal, foto, titik koordinat sbg data pendukung, sesuaikan dengan lokasi prioritas tahun 2026.	35
36	NURDIN	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Jalan perlu Penurapan Karena Jalan Masuk Air Sungai	Dusun 1, , Kab. Kutai Kartanegara	-	36

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

37	H.EDI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Perlunya rehab berat dan semenisasi jalan jembatan Di RT 03 ke RT 10 dikarenakan Jalan Jembatan Tersebut Rusak parah dan sudah banyak pengendara yang jatuh	RT 03 ke RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan, dan cek lokasi/lapangan	37
38	H. NORJALI. SH	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau/Dermaga Desa/Kelurahan	Melanjutkan pembangunan Dermaga TPI Kecamatan di Desa Sungai Mariam	RT.08 Dusun 2, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	38
39	H. NORJALI. SH	Bantuan Belanja Hibah Untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah	melanjutkan pembangunan Masjid Kecamatan	Jalan Poros Propinsi RT.25 Dusun 3, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, lakukan cross chek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada. Sesuaikan Target Lokasi Prioritas . Volume dikaji sesuai dengan Pagu anggaran yang ada.	39
40	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan yang rusak sehingga akses kendaran tidak bisa masuk	Handil A RT 08 Dusun 2 Desa Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	40
41	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan jembatan yg sudah sangat parah	Handil B RT 07 Dusun 2 Desa Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	41

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

42	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Kondisi bangunan yang sudah rusak berat	Handil A RT 08 Dusun 2 Desa Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	42
43	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi Jl yang sangat becek	Handil B RT 12 Dusun 2 Desa Handil Terusana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	43
44	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	jl jembatan yg rusak berat	Handil C RT 06 Dusun 2 Desa Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	44
45	ACHMADI, A.Md	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Menuju Akses Wisata	infrastrukut wisata yang belum memadai	Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	45

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

46	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	akses jalan saat ini menggunakan jalan perusahaan	Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	46
47	ACHMADI, A.Md	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	masyarakat kesulitan mencari air bersih	Handil Nilam, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait pipanisasi jaringan air bersih, titik koordinat, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	47
48	ACHMADI, A.Md	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	pamsimas saat ini belum bisa d operasikan karna masih bnyak kekurangan	Handil Terusan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan ke pihak pengusul terkait Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Pamsimas, titik koordinat dan cek lokasi/lapangan	48
49	ACHMADI, A.Md	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Jalan Rusak	Handil D Dusun 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	49
50	H.EDI	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan, BPU Kecamatan)	Plapon Gedung BPU Belum Ada, Pintu dan jendala rusak sehingga banyak barang-barang yang disimpan dalam gedung itu hilang	RT 06 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	50

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

51	H.EDI	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Bangunan Puskesmas Kurang Memadai	RT 09 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan agar melakukan analisis teknis terkait usulan dan koordinasikan dengan Pengusul (Karena Tidak melampirkan Foto Lokasi), sesuai dengan kamus usulan dan verifikasi usulan berdasarkan tingkat prioritas OPD	51
52	H.EDI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Perlunya rehab dan seminisasi jalan RT 11	RT 11 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	52
53	H.EDI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Perlunya rehab dan semenisasi RT 08 (Depan Rumah Erika)	RT 08 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait kesesuaian kegiatan terhadap kamus usulan, kelengkapan proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	53

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

54	H.EDI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Perlunya Rehab dan Semenisasi RT 8 (Depan Rumah Om Iwan)	RT 08 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait kesesuaian kegiatan terhadap kamus usulan, kelengkapan proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	54
55	H.EDI	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan, BPU Kecamatan)	Perlunya rehab dan semenisasi jalan RT 18	RT 18 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	55
56	H.EDI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Produksi Pertanian atau Perkebunan Kabupaten/Kecamatan	Perlunya rehab dan semenisasi RT 03	RT 03 Desa Muara Pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait kesesuaian kegiatan terhadap kamus usulan, kelengkapan proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, aset jalan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	56
57	H. NORJALI. SH	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	jembatan rusak	rt 10, Kab. Kutai Kartanegara	-	57

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

58	H. ILYAS	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Peningkatan keselamatan Nelayan jika cuaca buruk yang tidak bisa diprediksi	Muara Ilo Barat RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : Proposal beserta kelengkapannya serta dokumentasi (titik koordinat) bisa berupa kondisi sarana prasarana yang ada saat ini, sebagai bukti pendukung untuk memohon bantuan sarpras yang dimaksud.	58
59	H. ILYAS	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Penambahan Mesin pada perahu nelayan untuk meningkatkan Hasil Tangkapan	Muara Ilo Barat RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung : Proposal beserta kelengkapannya serta dokumentasi (titik koordinat) bisa berupa kondisi sarana prasarana yang ada saat ini, sebagai bukti pendukung untuk memohon bantuan sarpras yang dimaksud.	59
60	H. ILYAS	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Saat Air Pasang tinggi lantai terendam Air	Muara Ilo Selatan RT 17, Kab. Kutai Kartanegara	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan agar melakukan analisis teknis terkait usulan dan koordinasikan dengan Pengusul (Karena Tidak melampirkan Foto Lokasi), sesuai dengan kamus usulan dan verifikasi usulan berdasarkan tingkat prioritas OPD	60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

61	H. ILYAS	Pembagunan Toilet PAUD/TK	belum ada Toilet di Paud/TK	Muara Ilo Selatan RT 17, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	61
62	H. ILYAS	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan, BPU Kecamatan)	Atap dan dinding bocor, saat hujan, air masuk sedalam ruangan	Tani Baru Tengah RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	62
63	H. ILYAS	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Saat air Pasang terendam dan banyak papan jembatan yang patah	Tani Baru Tengah RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	63

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

64	H. ILYAS	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	penghubung RT 1 dan 2 serta fasilitasi akses pelajar dan pengajar menuju sekolah	Tani Baru dalam RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	64
65	H. ILYAS	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	belum adanya jembatan penyebrang dan meningkatkan keselamatan warga terhadap hewan buas di perairan	Salo Pusa RT 19, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	65
66	H. ILYAS	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	Penampungan Air bersih yang ada belum difungsikan	Muara Ilo Barat RT 4, Muara Ilo Selatan RT 17 dan Muara Ilo Timur RT 5, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait kesesuaian usulan kegiatan dengan kamus usulan, kelengkapan proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	66

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

67	H. ILYAS	Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	Fasilitasi Petani tambak dalam ketersediaan Bibit Ikan Baramundi (Kakap Putih)	Muara Ilo Barat RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	- Lengkapi data pendukung : Proposal beserta kelengkapannya serta dokumentasi (titik koordinat) sebagai bukti pendukung untuk memohon bantuan sarpras yang dimaksud. - Sesuaikan usulan dengan kamus usulan	67
68	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	banyak kerusakan pada jalan	jalan padat karya RT.09 desa anggana(perbatasan antara sungai mariam-anggana), Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	68
69	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	untuk melanjutkan peningkatan badan jalan	jalan suka lima RT.05 , Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	69
70	RAHMAYANTI	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	untuk melanjutkan peningkatan alun-alun anggana	RT. 06 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Mengkoordinasikan ke Pengusul terkait Permohonan,dokumentasi titikkoordinat dan disesuaikan dengan kamus Usulaln RKPD 2026	70

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

71	RAHMAYANTI	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Menuju Akses Kesehatan	akses jalan yang masih berupa tanah belum di cor beton	jalan cendana RT. 08 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	71
72	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang masih berupa tanah merah	jalan gang marhaban rt. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	72
73	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	melanjutkan semenisasi jalan	jalan kasturi RT. 06 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	73
74	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	saluran yang buntu	jalan kasturi Rt.06 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	74

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

75	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang rusak menyebabkan genangan air dijalan saat hujan	jalan mawar RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	75
76	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	belum adanya drainase	RT.07 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	76
77	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	belum adanya talud	RT.10 desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	77
78	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang masih berupa tanah	gang Mawar RT.14 desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	78
79	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	belum adanya drainase	gang cahaya RT.14 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	79

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

80	RAHMAYANTI	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	jembatan rusak di beberapa tempat	RT.03 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	80
81	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang masih berupa tanah menyebabkan becek saat hujan	gang barokah RT.14 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	81
82	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	masih berupa turap kayu	RT.11 desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	82
83	RAHMAYANTI	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak adanya drainase	jaan masjid RT.07 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	83
84	RAHMAYANTI	Fasilitasi Promosi Produk UMKM	pemasangan kanopi untruk kekraf	jalan masjid RT.08 Desa Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	1. sesuaikan usulan dengan kamus usulan 2. pemasangan konopi bukan wewenang dinas koperasi	84

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

85	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang masih tanah menyebabkan becek saat hujan	jalan dermaga RT.01 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	85
86	RAHMAYANTI	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	untuk melanjutkan pembuatan jogging track desa anggana	RT.06 desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Mengkoordinasikan ke Pengusul terkait Permohonan,dokumentasi titikkoordinat dan disesuaikan dengan kamus Usulaln RKPD 2026	86
87	RAHMAYANTI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	jalan yang tidak rata	gang syukur RT.14 Desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan/lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	87
88	RAHMAYANTI	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	untuk penyangga kabel listrik	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	koordinasikan dengan PD pengusul,cek lokasi dan sesuaikan denga Rencana Kerja PD	88
89	RAHMAYANTI	Rehab/ pembangunan gedung/tempat olahraga prestasi (futsal, Bulutangkis, sepakbola, stadion mini, basket, lapangan panahan)	belum adanya lapangan takraw dan tenis meja	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Mengkoordinasikan ke Pengusul terkait Permohonan,dokumentasi titikkoordinat dan disesuaikan dengan kamus Usulaln RKPD 2026	89

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

90	RAHMAYANTI	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	kurangnya fasiilitas	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, Koordinasikan dengan pengusul, Prioritaskan Sesuai lokus dan Fokus kamus usulan aspirasi RKPD 2026. Hitung Volume dan Pagu anggarannya.(lengkapi Surat Usulan, Foto, status lahan dan titik koordinat)	90
91	RAHMAYANTI	Pengadaan Ambulans Desa (Darat dan Air)	kurangnya sarana ambulan di desa	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan agar melakukan analisis teknis terkait usulan, sesuai dengan kamus usulan dan verifikasi usulan berdasarkan tingkat prioritas OPD	91
92	AGUS HARIYANTO	Pengadaan Alsintan Hand Traktor Rotary (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Kurangnya Alsintan berupa mesin panen padi (Combain Harvester) untuk para petani akan mempengaruhi hasil pruduksi panen terutama padi diwilayah desa sidomulyo	Gapoktan Mandiri Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung (Proposal beserta kelengkapannya serta dokumentasi, titik koordinat) sebagai bukti pendukung untuk memohon bantuan sarpras yang dimaksud.	92
93	H.EDI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan kurang memadai,	Muara Pantuan RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	93

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

94	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Kondisi ruang kelas SD 008 Sidomulyo ,Anggana saat ini rusak berat ,dan akan membahayakan para siswa yang sedang melakukan proses belajaar mengajar di kaelas	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo RT 12, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	94
95	H. NORJALI. SH	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Menuju Akses Kesehatan	Halaman Puskesmas Kecamatan Banjir	Jl.Mulawarman RT.01 Dusun 01, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul untuk cek lokasi	95
96	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Kurangnya lantai jemur di desa sidomulyo ,sehingga para petani kesulitan untuk menjemur padi nya pada saat musin panen tiba.	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo RT 12, Kab. Kutai Kartanegara	1. Lengkapi Proposal 2. Koordinasikan lebih lanjut ke OPD yang bersangkutan	96
97	H. NORJALI. SH	Pemeliharaan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Saluran Irigasi Sudah Tertutup Rumput	Jl.Provinsi RT.18 Dusun 5, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal dengan lokasi kegiatan, tinjauan lokasi/lapangan	97
98	H. ILYAS	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Jalan penghubung saat ini rusak berat dan menghalangi aktivitas siswa/siswi ke sekolah	Tani Baru tengah RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	98

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

99	H. NORJALI. SH	Pengadaan Alsintan berupa Traktor Roda Empat Pengadaan Alsintan berupa Power Thresher (Padi, Jagung, Bawang Merah dan Cabai)	Kurang nya Sarana Prasarana Kelompok Pertanian	Jl.Provinsi RT.20 Dusun 5, Kab. Kutai Kartanegara	- Pastikan syarat administrasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku - Koordinasikan lebih lanjut dengan OPD terkait perihal bantuan yang dimaksud	99
100	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Kondisi ruang keas saat ini di SD 009 Sidomulyo Anggana rusak berat sehingga membahayakan bagi anak anak yang sedang melakukan proses belajar mengajar di sekolah.	Jalan Paimin ,Desa Sidomulyo,RT 12, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	100
101	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Rehabilitasi RKB PAUD/TK	Kondisi ruang kelas TK/Paud Dahlia 4 saat ini rusak dan tidak layak untuk proses belajar mrngajar bagi anak anak TK .	Jalan Paimin ,Desa Sidomulyo ,RT b12, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu Koordinasi dengan Pengusul untuk tindak lanjut. Pastikan Sesuai dengan Kamus Usulan 2026 dan merupakan Program Prioritas 2026. Lengkapi Dokumen dan berkas Pendukung serta Rincian Volume, Target, Foto dan Lokus Usulan	101

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

102	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan saat ini rusak parah,banyak berlobang sehingga masyarakat yang melintas kesulitan,dan satu satunya jalan menuju lokasi lahan 2 desa sidomulyo.	Jalan Dermaga RT 11,Desa sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	102
103	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan saat ini dengan panjang 150 meter dan lebar 4 meter rusak berat dan banyak berlobang,sehingga masyarakat kesulitan dalan melakukan aktivitas sehari hari.	Jalan Bunga Sepatu ,RT 07,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	103
104	AGUS HARIYANTO	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Kondisi drainase saat ini belum memadai dan masih berupa tanah ,sehingga saluran tidak lanjar dan ketika nhujan terh=jadi penyumbatan dimana mana.	Jalan Dermaga RT 11,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	104

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

105	AGUS HARIYANTO	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Posyandu yang ada saat ini kurang memadai karena ukuranya belum standar dengan jumlah Balita yang ada.	Jalan Paimin RT 11,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, Koordinasikan dengan pengusul, Prioritaskan Sesuai lokus dan Fokus kamus usulan aspirasi RKPD 2026. Hitung Volume dan Pagu anggarannya.(lengkapi Surat Usulan, Foto, status lahan dan titik koordinat)	105
106	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	kondisi jalan jembatan rusak dan rendah rentan terhadap banjir	Jalan Jembatan RT 01 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	106
107	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	jalan jembatan dengan kondisi tidak layak	Pembangunan jalan Jembatan Rt.07 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	107
108	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Jalan jembatan mengalami rusak berat dan terendam air disaat air pasang	Semenisasi Jalan Jembatan RT 1 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	108

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

109	ARIANTO JUANDA	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau/Dermaga Desa/Kelurahan	Masyarakat belum memiliki dermaga untuk sarana prasarana bongkar muat, dan sarana perekonomian rakyat, dan transportasi air	Pembangunan Dermaga RT 09 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	109
110	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Jalan jembatan kondisi rusak dan dapat membahayakan masyarakat yang melintas di jalan	Semenisasi jalan Jembatan RT 12 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	110
111	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Kondisi jalan jembatan berbahan kayu yang telah lapuk/ rusak sebagai sarana penghubung terhambat dan membahayakan warga	Semenisasi jalan jembatan RT 13 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	111
112	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Kondisi jalan jembatan rusak berat	Peninggian jalan jembatan Jalan Kuburan RT 12 Desa Sepatin, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	112
113	ARIANTO JUANDA	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau/Dermaga Desa/Kelurahan	belum memiliki dermaga/ Pelabuhan Tambat untuk nelayan	Pembangunan Dermaga RT 09. 1, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset lahan foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	113

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

114	ARIANTO JUANDA	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Kondisi jalan rusak, sehingga membutuhkan seminiasi jalan ulin,	Seminiasi jalan jembatan gang ulin RT 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan, aset jalan jembatan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	114
115	ARIANTO JUANDA	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Mixer, Sealer, Blender, Mesin Pengering)	Kurang nya sarana dan prasarana yang memadai,	Penyedia sarana dan parasarana budidaya perikanan Desa Sepatin , Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi data pendukung (Proposal beserta kelengkapannya serta dokumentasi, titik koordinat) sebagai bukti pendukung untuk memohon bantuan sarpras yang dimaksud.	115
116	H.EDI	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Anggana)	kurangnya persediaan dan pendistribusian air bersih	muara pantuan, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait aset dan tinjauan lokasi/lapangan	116
117	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jalan Darma RT 06,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	117

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

118	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.karya bakti Pasundan.RT 16,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	118
119	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Cempaka RT 07,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	119
120	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jalan Diponegoro ,Desa Sidomulyo RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	120

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

121	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Sukalima RT 08,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	121
122	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Aggrek,RT 09,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	122
123	AGUS HARIYANTO	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Drainase di lingkungan Rt 11 saat nini masih berupa parit biasa dan belum ada pasangan batu ,sehinga pada saat hujan jadi tersumbat dan banjir.	JLln.Dermaga Dusun 2,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	123

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

124	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Gabus RT 13,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	124
125	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 200 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Layang RT 14,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	125
126	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Jelawat,RT 16,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	126
127	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 400 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Lele Dumbo RT 15,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	127

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

128	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 200 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Tongkol,RT 13,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	128
129	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 400 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melakukan aktivitas sehari hari.	Jln.Sepat RT 16 ,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	129
130	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 300 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jln.Nusa Indah RT 05,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	130
131	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 200 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jalan Manggis RT 02,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	131

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

132	AGUS HARIYANTO	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Dilingkungan RT 12 saat ini banyak yang belum ada Drainasenya ,sehingg pada saat hujan turun terjadi banjir dan saluran banyak yang tersumbat.	Jln.Paimin RT 12,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi/volume pekerjaan, titik koordinat, aset jalan/drainase, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	132
133	AGUS HARIYANTO	Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)	saat ini banyak UMKM di desa sidomulyo yang belum memiliki sertifikasi pruduk,sehingga banyak pruduk UMKM yang hanya di jual dan dipasarkan di lingkungan desa dan sekitarnya saja.	UMKM Mentari Pgi Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	pastikan kelengkapan administrasi untuk usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (proposal. Foto, Dan lain lain)	133
134	AGUS HARIYANTO	Pembekalan Tata Rias	Kurangnya pelatihan dan pembekalan Tata Rias di Desa Sidomulyo sehingga banya tata rias dari luar yang merias didesa sidomulyo.	Desa Sidoulyo, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, koordinasi dengan pihak pengusul utk melengkapi terkait proposal, foto, titik koordinat sbg data pendukung, sesuaikan usulan kegiatan dengan kamus usulan tahun 2026.	134
135	AGUS HARIYANTO	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kondisi jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 400 meter yang ada saat ini banyak yang rusak,banyak berlobang dan licin pada saat hujan ,sehngga menyulitkan masyarakat yang akan melaukan aktivitas sehari hari.	Jalan Makam RT 11 ,Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait proposal/surat rekomendasi, titik koordinat, aset jalan/lahan, foto lokasi dan cek lokasi/lapangan	135

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

136	AGUS HARIYANTO	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	Saat ini banyak sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang ada di desa Sidomulyo,belum bisa di angkut ke TPA karena belum adanya alat angkutan berupa kendaraan sampah (Dump Truck)	Desa Sidomulyo., Kab. Kutai Kartanegara	koordinasikan dengan OPD bersangkutan, ikutimperaturan yang berlaku	136
137	AGUS HARIYANTO	Pengadaan perlengkapan olahraga tradisional dan rekreasi (Olahraga Perahu Naga, perahu ces, begasing, belogo, mancing dll)	Desa sidomulyo adalah satu satunya desa di kecamatan anggan yang masih memelihara dan mempertahankan olah raga tradisional,akan tetapi karena belum adanya sarana perlengkapan olahraga tradisional,sehingga para pecinta olah raga tradisional belum maksimal dalam meraih prestasinya.	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	PD pengampu mengkoordinasikan ke Pengusul terkait kelengkapan permohonan dan lainnya disesuaikan dengan Kamus usulan RKPD 2026	137
138	AGUS HARIYANTO	Pengadaan bibit Ternak Sapi	Banyak peternak sapi yang saat ini belum maksimal untuk mengembangbiakkan ternak sapinya karena kekurangan modal untuk membeli bibit sapinya,	Poktan Pamuji Sejahtera, Kab. Kutai Kartanegara	Lengkapi Proposal beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang berlaku	138
139	NORDIANSYAH	Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm)	perlunya peralatan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran	desa anggana, Kab. Kutai Kartanegara	PD Pengampu, prioritaskan sesuai target kinerja dan lokasi prioritas PD tahun 2026,	139
140	H. NORJALI. SH	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Normalisasi Jaringan Irigasi Pertanian sudah ditumbuhi rumput	Jl.Provinsi RT.18, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait aset dan tinjauan lokasi/lapangan	140
141	H. NORJALI. SH	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana)	Halaman Depan Puskesmas Kecamatan Rusak Parah	Jl.Mulawarman RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait aset dan tinjauan lokasi/lapangan	141

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

142	MUSTAMIN	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Lingkungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Belum adanya fasilitas Jaringan Listrik 24 Jam	Dusun 2 RT.15 Tanjung Berukang , Kab. Kutai Kartanegara	Koordinasikan dengan pihak pengusul terkait volume pekerjaan (jumlah titik LPJU/panjang jalan), kewenangan pekerjaan dan cek lokasi/lapangan	142
143	MASJID DARUL AMIN AR-RASYIDI	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	Penambahan / Perluasan Sarana Prasarana Jamaah Masjid Darul Amin Ar-Rasyidi	Jalan Sarimas RT.25 Gang Darul Amin Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	143
144	Majelis Ta''lim NURUL FADHILAH	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	Melengkapi Prasarana Majelis Ta'lim Nurul Fadhilah	Jalan Batara Agung Dewa Sakti / Jalan Poros Kutai Lama RT.02, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	144
145	MAJELIS TALIM DAN SHOLAWAT AL-MAGHFIROH	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	Pengadaan Sarana Buat Kegiatan Majelis Ta'lim Al-Maghfiroh	Jalan Padat Karya RT.11 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	145
146	MASJID AL-MAGHFIRAH	Hibah sarana peribadatan	Permohonan Bantuan / Perluasan Masjid Al-Maghfirah	Jalan Mulawarman RT.11 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	146
147	MASJID AL-IHSAN	Hibah sarana peribadatan	Melanjutkan Pembangunan Tingkat atas Pada Masjid Al - Ihsan dan Juga Melengkapi Sarana yang masih belum ada.	Jalan Samarinda-Anggana RT.12 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	147
148	YAYASAN MIFTAHUL ULUM ANGGANA	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	Permohonan Bantuan Dana Untuk Membangun Asrama Siswa/i Pada Yayasan Miftahul Ulum Sebagai Persiapan Pelaksanaan Boarding School	Jalan Saamarinda No.194 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	148

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

149	MASJID BAITUL HIKMAH	Hibah sarana peribadatan	Permohonan Bantuan Dana Rehab Masjid Baitul Hikmah	Jalan Pembangunan RT.14 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	149
150	LUKMANUL HAKIM	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan	Permohonan Dana untuk Sarana dan Prasarana Majelis Ta'lim Permata Al - Hikmah	Jalan Pembangunan RT.14 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	PROSES LEBIH LANJUT KE BIRO KESRA	150
151	KELOMPOK TANI TERNAK"SEBARA UTAMA FARM"	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Indukan Ternak Sapi	Sidomulyo RT.09 Desa Sidomulyo, Provinsi Kalimantan Timur	DIPROSES LEBIH LANJUT SESUAI KETENTUAN untuk usulan pengadaan Bibit SAPI.	151
152	LKSA BAITUL HIKMAH	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	Kebutuhan Sandang dan Pangan	JL.Pembangunan RT 14 Desa Anggana Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	-	152
153	LKSA BAITUL HIKMAH	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	Permohonan Bantuan Sosial Kebutuhan Sandang dan Pangan di LKSA Bitul Hikmah Anggana	Jl.Pembangunan Rt 14 Desa Anggana Kec.Anggana Kab.Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	-	153
154	LKSA BAITUL HIKMAH	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	Permohonan Bantuan Sosial Kebutuhan Sandang dan Pangan di LKSA Baitul Hikmah Anggana	Jl.Pembangunan RT 14 Desa Anggana Kec.Anggana Kab.Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	-	154
155	Sy Vanesa Vilna SIS, SE., MM.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Desa Kutai Lama Belum memiliki fasilitas TPA maupun sistem pengelolaan sampah terpadu TPS3R akan menjadi solusi strategis berbasis masyarakat, untuk memilah dan mengolah sampah organik dan anorganik, serta mengurangi beban ke lingkungan secara signifikan.	kutai lama, anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Diproses Lebih Lanjut	155

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

156	GEREJA GPDI FILADELFIA SUNGAI MARIAM	Hibah sarana peribadatan	Untuk keperluan pembangunan rumah pastori Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Filadelfia Sungai Mariam yang mana sampai saat ini, rumah pastori yang dipakai sudah sering terganggu dengan air hujan dan percikan-percikan hujan yang masuk ke dalam rumah pastori sehingga mengganggu proses kegiatan dan acara gereja.	Jln. Padat Karya No.34-35 RT.09 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Proses Lebih Lanjut ke BIRO KESRA	156
157	LKSA BAITUL HIKMAH	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	Permohonan Bantuan Sosial Kebutuhan Sandang dan pangan di LKSA Baituk Hikmah Anggana	Jl.Pembangunan RT 14 Desa Anggana Kec.Anggana Kab.Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Diteruskan ke Dinas Sosial	157

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedang akan Rencana Kerja pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui penyusunan Renja-PD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.`

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yng selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi PD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Anggana sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dam misi pembangunan. Strategisnya dapat diukur, maka setiap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana;
2. meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan; dan
3. meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Anggana adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Anggana tahun 2026 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Anggana pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; dan
4. peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan musyawarah pimpinan kecamatan, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Anggana maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Anggana dengan demikan berikut ini yang tergambar pada tabel dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Anggana	6.380.939.586	APBD		80	6.380.939.586
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Anggana	320.000.000	APBD		80	320.000.000
7.01.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Anggana	250.000.000	APBD		6 Dokumen	250.000.000
7.01.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Anggana	0	APBD		1 Dokumen	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Anggana	40.000.000,00	APBD		2 Dokumen	40.000.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Anggana	0	APBD		1 Dokumen	0
7.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Anggana				1	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perangkat Daerah	Dokumen		0	APBD		Dokumen	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD		Anggana	0,00	APBD			0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Anggana	30.000.000,00	APBD		2 Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Anggana	0	APBD		1 Laporan	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		Anggana	5.124.732.900	APBD			5.124.732.900
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	34 Orang/Bulan	Anggana	5.021.412.900	APBD		34 Orang/Bul an	5.021.412.900
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Anggana	0	APBD		1 Laporan	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	Anggana	103.320.000,00	APBD		2 Laporan	103.320.000,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	1 Laporan	Anggana	0	APBD		1 Laporan	0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	4 Laporan	Anggana	80.000.000,00	APBD		4 Laporan	80.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	1 Laporan	Anggana				1 Laporan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.03.01	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	APBD			0
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Anggana	0	APBD		1 Laporan	0
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Anggana	30.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Anggana	-	APBD			-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang diadakan	1 Paket	Anggana	0	APBD		1 Paket	0
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket	1 Paket	Anggana	0	APBD		1 Paket	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Anggana	230.304.986	APBD		Jenis	230.304.986
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		Anggana	5.304.986	APBD			5.304.986

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		disediakan	1 Paket					1 Paket	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Anggana	130.000.000	APBD		1 Paket	130.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Anggana	5.000.000,00	APBD		1 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 Laporan	Anggana	75.000.000	APBD		102 Laporan	75.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 Arsip	Anggana	15.000.000	APBD		500 Arsip	15.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		Anggana	50.000.000	APBD			50.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	1 Unit	Anggana	0	APBD		1 Unit	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	1 Paket	Anggana	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	1 Gedung	Anggana	0,00	APBD		1 Gedung	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	APBD			0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Anggana	500.071.700	APBD	Penambah an Pagu Anggaran	12 Bulan	500.071.700
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Anggana	436.801.700	APBD	Penambah an Pagu Anggaran	12 Bulan	436.801.700
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Anggana	63.270.000	APBD	Penambah an Pagu Anggaran	12 Bulan	63.270.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	331 Unit	Anggana	75.830.000,00	APBD		331 Unit	75.830.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	12 Unit	Anggana	25.830.000,00	APBD		12 Unit	25.830.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Gedung	50.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	Anggana	400.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	400.000.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	Anggana	150.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	150.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Anggana	250.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	250.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Anggana	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Anggana	0	APBD			0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Anggana	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Anggana	14.368.290.000	APBD		100%	14.368.290.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Anggana	0	APBD			0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Anggana	768.290.000	APBD		1 Laporan	768.290.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Anggana	13.600.000.000	APBD		3 Laporan	13.600.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 Desa	Anggana	100.000.000,00	APBD		8 Desa	100.000.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta	150 Orang	Anggana	50.000.000,00	APBD		150 Orang	50.000.000,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Anggana	0	APBD			0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Anggana	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Aktif yang diberdayakan	5 Lembaga	Anggana	270.000.000	APBD		5 Lembaga	270.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Anggana	270.000.000	APBD		1 Kegiatan	270.000.000
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya		Anggana					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan		175.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	175.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Anggana	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	Anggana	125.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	125.000.000,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan	100%	Anggana	195.000.000,00	APBD		100%	195.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	Anggana	195.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	195.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Anggana	180.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	180.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Anggana	15.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	15.000.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	75.000.000	APBD			75.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			0

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Fasilitasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan		Anggana	—	APBD			—
	Evaluasi TIM APBDes	Jumlah Kegiatan		Anggana	75.000.000	APBD			75.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan		Anggana	~~0,00~~	APBD			
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan		Anggana	0	APBD			
Jumlah					22.064.229.586				22.064.229.586

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Anggana tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Anggana tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana.

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Anggana.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN LI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN SANGASANGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja-PD didasari atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang di junjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *Rule of Law Profesionalisme*, Efektifitas dan Efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki

peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugas.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja tahun 2026 yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Sangasanga untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga tahun 2026 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakataan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sangasanga guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga tahun 2026 adalah :

1. Sebagai masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Sangasanga.
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan.
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat yang akan datang.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangasanga. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sangasanga selama tahun 2024 dan perkiraan tahun berjalan 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai pelaksanaan kinerja Kecamatan Sangasanga ditunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan PD dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL.T-C29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_x005f PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)		
										Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7 / 6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
X	XX	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah														
X	XX	01.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100%	7	doku men	21	doku men	70%
X	XX	01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	70	laporan	14	laporan	14	laporan	14	laporan	100%	14	laporan	42	lapora n	60%
X	XX	01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	280	unit	45	Unit	56	Unit	45	Unit	80%	50	Unit	140	unit	50%
X	XX	01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	Layanan	10	Layanan	10	Layanan	10	Layanan	100%	10	Layanan	30	Layan an	60%
X	XX	01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	jenis	40	Jenis	25	jenis	40	jenis	160%	25	jenis	105	jenis	105%
X	XX	01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	bulan	60%
X	XX	01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	152	unit	32	unit	32	unit	10	unit	31%	36	unit	78	unit	51%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_x005f PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)		
										Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7 / 6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7	01	02		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	sesuai SOP														
					Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan														
7	01	02	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		Kegiat an	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!	13	Kegiatan	13	Kegiatan	#DIV/0!
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	umlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5	Fasilit asi	1	Fasilitasi	1	Fasilitasi	1	Fasilitasi	100%	1	Fasilitasi	3	Fasilitasi	60%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	20	Lapora n	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%	3	Kegiatan	9	Kegiatan	45%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif														
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	20	Kali	0	Kali	20	Kali	0	Kali	0%	20	Kali	20	Kali	100%
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	1035	Kegiat an	207	Kegiatan	207	Kegiatan	207	Kegiatan	100%	207	Kegiatan	621	Kegiatan	60%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Lembaga Masyarakat	25	Kegiat an	5	Kegiatan	5	Kegiatan	5	Kegia tan	100%	5	Kegiatan	15	Kegiatan	60%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_x005f PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)		
										Target Renja - PD Tahun (2024)		Realisasi Renja -PD Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7 / 6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan														
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Kegiat an	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	3	Kegiatan	75%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	Kegiat an	4	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	2	Kegiatan	10	Kegiatan	63%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sangasanga masih terdapat kendala-kendala, yang mana berimbas pada pelaksanaan Program/kegiatan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini dapat dllihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2024, berdasarkan Hasil Capaian Target Kinerja terdapat Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target 5 (lima) kegiatan dibawah 100 % (seratus persen), sabagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56	45	80 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	10	31 %

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan:

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Sangasanga tahun anggaran 2024 yang memenuhi target kinerja 10 (sepuluh) kegiatan 100% (seratus persen), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	10	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	1	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3	3	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	207	207	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5	5	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4	4	100%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Sangasanga Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 5 (lima) Program 1 (satu) kegiatan, terdapat Program yang melebihi target kinerja.

No	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	40	160

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;

Tercapainya dan tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten disebabkan oleh :

- Realisasi Program/Kegiatan pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten Tahun Anggaran 2024 yang memenuhi target 100% (seratus persen) sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan disebabkan realisasi anggaran sesuai dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan target yang telah ditetapkan.
- Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan disebabkan antara lain :
  1. Adanya 1 (satu) kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tidak memenuhi targer di sebapkan kan adanya kenaikan harga barang yang menyebapkan volume target jadi berkurang.
  2. Adanya 1 (satu) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tidak memenuhi targer di karena kan tidak adanya perbaikan / pemeliharaan printer dan mengakibat kan dana yang ada tidak terserap.
- Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target anggaran yang direncanakan, Kecamatan Sangasanga Program / kegiatan yang melebihi target anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan Kesalahan dalam Perencanaan Pengadaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kebutuhan menyebab

- kan kebutuhan pengadaan melebihi target.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Sangasanga.

Implikasi yang timbul atas capaian Program/kegiatan Renstra Kecamatan Sangasanga antara lain adalah :

a. Kecamatan Sangasanga dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan;
b. Aparat Kecamatan dituntut bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
c. Pola kerja di Kecamatan Sangasanga yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil Kecamatan Sangasanga.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Kecamatan Sangasanga antara lain :

a. Perencanaan Program kegiatan Kecamatan Sangasanga secara konsisten mengacu pada Renstra PD yang telah tersusun selama 5 (lima) tahun anggaran kecuali ada kegiatan atau Program yang sangat urgent dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam Renja-PD tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sangasanga yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2021- 2026;
b. Proses penganggaran program/kegiatan Perangkat Daerah diupayakan efesien, efektif, berpedoman pada regulasi-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD sesuai dengan kebutuhan kinerjanya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sangasanga dalam pelaksanaannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sangasanga tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sangasanga pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Paten Kecamatan Sangasanga tentang pelayanan perijinan dan nonperijinan dengan melalui :
   - Melaksanakan pelayanan sesuai SOP.
   - Menugaskan petugas-petugas pelayanan yang lebih interaktif dan informatif serta ramah, sopan juga santun.
   - Mengupayakanpelayanan PATEN Kecamatan Sangasanga dengan berbasis Teknologi dan Informasi.
   - Menyediakan fasilitas sarana-sarana tempat untuk difabel, laktasi dan zona permainan edukatif.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung Zona Integritas (ZI) dengan Pelayanan Bebas Pungli dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
4. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan, kecamatan adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat, serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu camat juga berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Disamping itu pula Camat adalah merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh PD di tingkat Kecamatan;
f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Susunan Organisasi Kantor Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahi
    1. Sekretaris
    2. Seksi Pemerintahan
    3. Seksi Pembangunan
    4. Seksi Sosial
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM Kecamatan Sangasanga sehingga semakin profesional dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*, berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sangasanga dapat dilihat pada table :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sangasanga

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentra - Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			60	70	80	90	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60	70	80	90	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	-	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis OPD

Secara umum, tingkat kinerja pelayanan PD di Kecamatan Sangasanga sudah berjalan sesuai dengan prosedur, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dicermati:

a. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Layanan dasar seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial masih bisa ditingkatkan dari segi kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Warga seringkali mengeluhkan proses yang memakan waktu lama dan persyaratan yang kurang jelas

b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM): Kapasitas dan kompetensi SDM di beberapa PD masih belum merata. Beberapa pegawai mungkin belum sepenuhnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menguasai teknologi informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan digital, sehingga menghambat proses administrasi.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang sering muncul dalam menjalankan tugas dan fungsi PD adalah

a. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas: Alokasi anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti komputer, jaringan internet, atau kendaraan operasional

b. Koordinasi Antar-OPD: Terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program antara OPD di tingkat kecamatan dengan OPD di tingkat kabupaten. Hal ini bisa menyebabkan tumpang tindih program atau sebaliknya, ada program yang tidak terakomodasi dengan baik.

c. Regulasi yang Dinamis: Perubahan regulasi dari pusat atau provinsi yang tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai seringkali membingungkan OPD di tingkat kecamatan dalam implementasinya.

3. Dampak Terhadap Visi-Misi Daerah dan Program Nasional. Isu-isu di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Jika pelayanan publik tidak optimal, maka visi kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional akan sulit tercapai.

b. Target SPM dan SDGs: Keterlambatan dalam pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan dapat berdampak pada target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, hambatan dalam penyaluran bantuan sosial atau program pemberdayaan masyarakat bisa mengganggu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan.
   a. Tantangan: Tantangan utama adalah perubahan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi layanan menuntut OPD untuk beradaptasi dengan cepat, yang memerlukan investasi besar pada infrastruktur dan pelatihan SDM.
   b. Peluang: Adanya teknologi digital seperti aplikasi pelayanan online merupakan peluang besar untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui forum konsultasi publik dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan layanan.
5. Formulasi Isu Penting : Rekomendasi Strategis untu Renja 2026. Berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis yang dapat ditindaklanjuti:
   a. Penguatan Kapasitas SDM: Alokasikan anggaran untuk pelatihan pegawai, khususnya dalam hal pelayanan prima, penggunaan teknologi informasi, dan pemahaman regulasi baru.
   b. Digitalisasi Layanan Terpadu: Kembangkan platform pelayanan publik terpadu yang dapat diakses secara online oleh masyarakat, seperti aplikasi perizinan atau pengaduan.
   c. Optimalisasi Koordinasi: Bentuk forum koordinasi rutin antar-OPD di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk menyelaraskan program kerja dan mengatasi hambatan bersama.
   d. Penyederhanaan Prosedur: Tinjau kembali prosedur layanan yang ada dan sederhanakan prosesnya. Buat alur pelayanan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kecamatan Sangasanga tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk mengarahkan pembangunan di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

wilayah kecamatan. Dokumen ini diharapkan mampu merumuskan Program dan kegiatan yang strategis, relevan, dan solutif terhadap isu-isu krusial yang dihadapi. Berikut adalah *review* terhadap rancangan awal tersebut, yang mencakup aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan rekomendasi perbaikan.

1. Kekuatan *(Strengths).*
   - ✓ Kesesuaian dengan Arah Kebijakan Pusat dan Daerah: Rancangan ini sudah menunjukkan upaya untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi-misi Kepala Daerah serta program prioritas nasional. Hal ini terlihat dari adanya alokasi kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dan SDGs
   - ✓ Fokus pada Pelayanan Dasar: Dokumen ini tampaknya sudah memprioritaskan sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
   - ✓ Keterlibatan Lintas Sektor: Adanya rencana program yang melibatkan koordinasi antar-OPD dan lembaga terkait menunjukkan komitmen untuk membangun sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kelemahan *(Weaknesses).*
   - ✓ Kurangnya Detail Indikator Kinerja: Beberapa Program dan kegiatan dalam rancangan masih terlalu umum. Indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) masih belum terlihat jelas. Hal ini akan menyulitkan dalam proses monitoring dan evaluasi di kemudian hari.
   - ✓ Identifikasi Isu dan Masalah yang Kurang Mendalam: Rancangan ini belum sepenuhnya mencerminkan analisis yang mendalam terhadap isu-isu strategis di Kecamatan Sangasanga. Isu-isu seperti tingkat pengangguran, masalah lingkungan, atau potensi ekonomi lokal perlu diuraikan lebih rinci dengan data yang akurat.
   - ✓ Alokasi Anggaran yang Kurang Jelas: Rincian alokasi anggaran untuk setiap program/kegiatan masih terlihat global. Belum ada proyeksi yang detail mengenai sumber

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pendanaan, apakah dari APBD Kabupaten, provinsi, atau sumber lainnya.

3. Peluang (Opportunities)
   - ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi: Terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik. Rancangan ini bisa diperkuat dengan memasukkan program digitalisasi, seperti aplikasi perizinan *online, e-governance*, atau platform informasi publik.
   - ✓ Partisipasi Masyarakat yang Lebih Luas: Rancangan ini dapat diperkaya dengan membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui forum musyawarah atau konsultasi publik, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik.
   - ✓ Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Dunia Usaha: Potensi kerja sama dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Kecamatan Sangasanga dapat dimanfaatkan, terutama dalam program CSR *(Corporate Social Responsibility)* untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Rekomendasi Perbaikan

   Berdasarkan *review* di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan Rancangan Awal RKPD Renja Kecamatan Sangasanga Tahun 2026:
   - ✓ Perkuat Analisis Isu Strategis: Lakukan kembali analisis yang lebih mendalam terhadap isu-isu penting di Kecamatan Sangasanga. Gunakan data statistik dan hasil survei untuk mengidentifikasi masalah, akar penyebabnya, dan dampaknya.
   - ✓ Rumuskan Indikator Kinerja yang SMART: Setiap program dan kegiatan harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Misalnya, jika programnya adalah "Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan," indikatornya bisa berupa "penurunan waktu tunggu layanan sebesar X%.
   - ✓ Jelaskan Sumber Pendanaan: Rincikan alokasi anggaran dan sumber pendanaan untuk setiap program. Hal ini akan memudahkan OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Anggaran (RKA) dan memastikan program dapat dieksekusi.

- ✓ Integrasikan Program Berbasis Inovasi: Masukkan program-program yang memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- ✓ Perluas Ruang Partisipasi: Libatkan stakeholder terkait, seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, pemuda, dan sektor swasta, dalam forum pembahasan rancangan ini untuk mendapatkan masukan yang komprehensif.

Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga Tahun 2026 sudah merupakan langkah awal yang baik, namun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa aspek, terutama dalam hal pendalaman analisis isu, perumusan indikator kinerja yang terukur, dan kejelasan alokasi anggaran. Dengan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi di atas, diharapkan dokumen ini dapat menjadi panduan yang lebih solid dan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Sangasanga. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat Daerah sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel *Review* terhadap Renja-PD tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.1.03.0.00. 17	Kecamatan Sanga Sanga				23.543.63 5.535	Kecamatan Sanga Sanga				26.824.812.88 5	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	10.539.670 .448	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	12.499.716.88 5	
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	155.000.00 0	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	340.000.00 0	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40.000.000	
	Penyusunan Dokumen Renja	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Renja	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Renja- P	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Renja - P	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	10.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0,00	
	Penyusunan Dokumen RKA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	0 dokumen	0,00	Penyusunan Dokumen RKA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	0 dokumen	0,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	0,00	
	Penyusunan Perubahan DPA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Perubahan DPA	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	0 dokumen	0,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	110.000.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	30.000.000	
	Laporan Manajemen Resiko, Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau), LKJIP	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 laporan	110.000.00 0	Laporan Manajemen Resiko, Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau), LKJIP	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 laporan	30.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	2 Laporan	20.000.000	
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250.000.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Satu Data (BECIK)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data	0 Data	0,00	Satu Data (BECIK)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data	42 Data	50.000.000	
	Kecamatan sebagai Pusat Data	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data	0 Data	0,00	Kecamatan sebagai Pusat Data	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Data	2 Data	200.000.00 0	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 laporan	8.109.224. 920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 laporan	10.657.764. 125	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang	7.691.414. 920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 orang	10.265.684. 125	
	Gaji dan Tunjangan ASN	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang	714 orang	7.691.414. 920	Gaji dan Tunjangan ASN	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang	1.512 orang	10.265.684. 125	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Semester Prognosis	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	2 laporan	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Semester Prognosis	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	2 laporan	25.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	402.810.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	367.080.00 0	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengelola BMD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	341.830.00 0	Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	367.080.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Keuangan dan Honorarium Pengelola BMD					
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	10 unit	100.000.00 0	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	50.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	25.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	25.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah pada SKPD					Daerah pada SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	0 unit	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 unit	50.000.000	
7.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	50.000.000	
	Bimtek Penataan Batas Wilayah RT dan Kelurahan Serta Penomoran Rumah (Peserta Kasi Pem dan RT)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang		0,00	Bimtek Penataan Batas Wilayah RT dan Kelurahan Serta Penomoran Rumah (Peserta Kasi Pem dan RT)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Orang	66 Orang	50.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	593.077.00 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	297.000.00 0	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor (Bola Lampu)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	4.500.000	Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor (Bola Lampu)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	7.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.844.00 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	158.844.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.953.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.00 0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	92.953.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	1 Paket	125.000.00 0	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Laporan	0,00	
	Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket	1 Paket	12.000.000	Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket	1 Paket	0,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Sangasanga Muara	-	Jumlah Laporan	1 Laporan	14.660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu kantor Camat Sangasanga	-	Jumlah Laporan	1 Laporan	20.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173 Laporan	260.120.00 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an dan 5 Keluraha n	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	75.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	70 Laporan	260.120.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Camat Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Paket	93 Laporan	75.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	21 Unit	140.664.00 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	21 Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	140.664.00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Keluraha n	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Unit	21 Unit	140.664.00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Unit	2 Unit	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.193.563. 528	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	965.712.76 0	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Keluraha n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.597.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	
	Pembelian Materai	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.597.000	Pembelian Materai	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	2.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.724.50 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	317.780.00 0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Air)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	24.030.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Air)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	44.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Listrik)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	309.454.50 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Listrik)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	201.000.00 0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Rekening Internet)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	57.240.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	72.380.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembayaran Rekening Internet)					
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	799.242.02 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	645.432.76 0	
	Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Sangasanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	799.242.02 8	Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Sangasanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	645.432.76 0	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31 unit	323.141.00 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31 unit	89.240.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	269.282.00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	60.000.000	
	Sewa Kendaraan Operasional Camat. Biaya Pemeliharaan 1 Kendaraan Roda Empat dan 5 Kendaraan Roda Dua	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit	269.282.00 0	Penyediaan bahan bakar, pemeliharaan dan pajak kendaraan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas	15 Unit	60.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	21.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	29.240.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Camat Sangasanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Peralatan	10 unit	21.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Camat Sangasanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Peralatan	10 unit	29.240.000	
7.01.01.2.09.01 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	32.659.000	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	10 unit	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di pelihara	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.659.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di pelihara	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	1.368.696.0 00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	6.000.000. 000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	8.220.000.0 00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Fasilitasi	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Fasilitasi	450.000.00 0	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	200.000.00 0,00	
	Fasiltasi Kegiatan Erau	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Fasiltasi Kegiatan Erau	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	100.000.00 0,00	
	Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Perecepatan Penurunan Stunting	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Perecepatan Penurunan Stunting	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	100.000.00 0,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	0 Dokumen	0,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	1 Dokumen	250.000.00 0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
	Hut RI Di Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0,00	Hut RI Di Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	250.000.00 0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	5 Kegiatan	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	100.000.00 0	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000 ,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	15.000.000 ,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	0,00	
	Minimal di Wilayah Kecamatan					Minimal di Wilayah Kecamatan					
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan	0,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	100.000.00 0,00	
	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000, 00	
	Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000, 00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Kegiatan	6.000.000. 000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Kegiatan	9.038.696.0 00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	818.696.00 0,00	
	Fasilitasi Paten	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Paten	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	12 Laporan	70.000.000	
	Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Kecamatan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	598.696.00 0	
	Penanganan Darurat Bencana	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Penanganan Darurat Bencana	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35 Laporan	5.990.000. 000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8.220.000.0 00,00	
1	Semenisasi Jalan / gang dijalan Corong RT. 16, Kel Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	75.000.000	Pembuatan Turap Pemasangan Batu RT.004 Kel. Jawa Kec. Sanga Sanga,(1469212)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	120.000.00 0	Pokir_Budiman
2	Semenisasi jalan / Gang pembatasan RT. 12B, Kel.Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	200.000.00 0	Peningkatan Jalan Gang Rt.09 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam (1463230)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	200.000.00 0	Pokir_Masniyah
3	Pengurukan Kiri dan Kanan Jalan Gang Sukur Kel.Sanga-Sanga Muara	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	Normalisasi Parit Rt.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, (1463240)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	125.000.00 0	Pokir_Masniyah
4	Semenisasi Jalan Sucipto RT. 07, Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	Pembuatan Drainase Jalan Kawasan Rt.09 Kelurahan Jawa (1463251)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	125.000.00 0	Pokir_Masniyah
5	Semenisasi Jalan Ampera RT. 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	peningkatan badan jalan gang keluarga RT 09 kel sanga sanga Muara, (1394538)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	Pokir_Sa'b ir
6	Semenisasi Jalan Kuburan RT. 10, Kel. Pendingin	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-1. Peningkatan jalan komplek exspan - ID SIPD : 2097292	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Semenisasi Jalan / Gang Arjuna RT. 06, Kel. Pendingin	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-2. Peningkatan jalan DAM RT. 09 - ID SIPD : 2097272	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
8	Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Gang Arjuna RT. 06, Kel. Pendingin	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	130.000.00 0	D-3. Peningkatan Jalan Habibah RT.04 - ID SIPD : 2097137	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
9	Pembangunan Jembatan RT. 10, Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	200.000.00 0	D-4. Pembangunan Turap Jalan Diponegoro RT.06 - ID SIPD : 2096869	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
10	Pembangunan Jembatan jalan somel RT.05, Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-5. Pembangunan Turap Jalan Komplek Exspan RT.02 - ID SIPD : 2096959	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
11	Pembangunan Jembatan jalan Dagang RT. 11, Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-6. Normalisasi Saluran Drainase Gang Bantu RT.05 - ID SIPD : 2096489	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
12	Perbaikan Jembatan jalan Madrasah RT. 12 A, Kel, Sanga- Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-7. Normalisasi Saluran Drainase Jalan Simpang Tani RT.01 - ID SIPD : 2096432	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
13	Pembangunan Saluran Drainase jalan Bakaran RT. 06, Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000.00 0	D-8. Rehabilitasi Gang Suraji RT.09 - ID SIPD : 2095785	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
14	Pembangunan Saluran Drainase Gang dijalan Corong RT. 16, Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	75.000.000	D-9. Normalisasi Saluran Drainase Jalan Simpang Tani RT.02 - ID SIPD : 2083553	Jawa	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
15	Pembangunan Saluran Drainase RT,07 Kel. Sarijaya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-10. Peningkatan Jalan Jembatan Ulin Rt.01 - ID SIPD : 2224141	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
16	Pembangunan Saluran Drainase RT,08 Kel. Sarijaya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-11. Rehabilitasi Langgar Fathul Jannah RT.08 - ID SIPD : 2223578	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
17	Pembangunan Saluran Drainase RT,09 Kel. Sarijaya	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-12. Pembangunan Turap RT.03 - ID SIPD : 2222898	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
18	Pembangunan Saluran Drainase RT. 1 Kelurahan Sanga Sanga	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000.00 0	D-13. Drainase Jalan Lingkungan RT.10 - ID SIPD : 2212360	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Pembangunan Saluran Drainase RT. 19 Kelurahan Sanga Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000.00 0	D-14. Pembangunan Turap RT.09 - ID SIPD : 2212170	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
20	Pembangunan Saluran Drainase RT.04, Kel. Sanga-Sanga Dalam	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	D-15. Peningkatan Jalan Gang Dahlia RT.08 - ID SIPD : 2210851	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
21	Pembangunan Saluran Drainase RT. 12A, Kel. Sanga-Sanga Muara	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	200.000.00 0	D-16. Pembuatan Drainase Pasangan Batu RT.07 - ID SIPD : 2209751	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
22	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Masjid RT. 07, Kel. Pendingin	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000.00 0	D-17. Drainase Jalan Lingkungan RT.02 - ID SIPD : 2191204	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
23	Pagu Kegiatan Fisik Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Laporan	5 Laporan	2.910.000. 000	D-18. Pembangunan Turap RT.01 Dan 02 - ID SIPD : 2191170	Sarijaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-19. Pembuatan Drainase RT.24 - ID SIPD : 411742	Sangasan ga	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-20. Peningkatan Jalan Wisata DKM RT.24 - ID SIPD : 2391018	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-21. Pembangunan Jembatan RT.12A - ID SIPD : 2273793	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-22. Drainase Jalan Pangeran Hidayat RT.15 - ID SIPD : 2272732	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-23. Drainase Parit Rumaga2 RT.12 - ID SIPD : 2269725	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-24. Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Lama RT.07 Dan RT.08 - ID SIPD : 2269073	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-25. Rehab Jalan Titian RT.07 - ID SIPD : 2268897	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-26. Drainase Beton RT.06 - ID SIPD : 2268842	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-27. Pembuatan Drainase Gang	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Salim RT.05 - ID SIPD : 2268035					
						D-28. Drainase Jalan Gajah Mada RT.03 - ID SIPD : 2267956	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-29. Peningkatan Jalan Kuburan Kristen RT.04 - ID SIPD : 2267862	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-30. Drainase Jalan Shomil RT.02 - ID SIPD : 2267688	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-31. Pembangunan Turap Jalan Usaha Tani RT.01 - ID SIPD : 2211215	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.00 0	
						D-32. Peningkatan Jalan Al Misbah RT.01 - ID SIPD : 2211224	Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-33. Peningkatan Jalan Ulin RT.02 - ID SIPD : 2222788	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-34. Normalisasi Parit Jalan Astina RT.06 - ID SIPD : 2192871	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-35. Peningkatan Jalan Purwojoyo RT.04 - ID SIPD : 2192759	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-36. Pembangunan Turap Jalan Setia Bakti RT.08 - ID SIPD : 2090898	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-37. Peningkatan Jalan Jadi Makmur RT.09 - ID SIPD : 2090480	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-38. Peningkatan Jalan Gang Usaha Tani Sentosa RT.12 - ID SIPD : 2090657	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-39. Peningkatan Jalan Gang Sajahtra RT.11 - ID SIPD : 2090642	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						D-40. Peningkatan Jalan Gang Raudah RT.03 - ID SIPD : 2090010	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-41. Peningkatan Jalan Gang Keluarga Ke Rumah Lamin RT.12 - ID SIPD : 2195917	Pendingi n	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-42. Pembuatan Parit RT.02 - ID SIPD : 2196901	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-43. Rehab Jembatan Ulin RT.05 - ID SIPD : 2197806	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-44. Pembuatan Jembatan Titian RT.06 - ID SIPD : 2198217	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-45. Pembuatan Jembatan Titian Gang Damai RT.07 - ID SIPD : 2198735	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-46. Rehab Jalan Jembatan Layang RT.09 - ID SIPD : 2199227	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-47. Peningkatan Jalan Jembatan Layang RT.11 - ID SIPD : 2199509	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-48. Drainase Parit RT.06 - ID SIPD : 2199786	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-49. Pembuatan Parit RT.07 - ID SIPD : 2199746	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
						D-50. Rehab Monumen Perjuangan - ID SIPD : 2201798	Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5 Keluraha n	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	6.310.860. 000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5 Keluraha n	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	3.706.400.0 00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	50.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Keluraha n	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Keluraha n	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Pelayanan Kelurahan Dan Pemerintah Desa	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Evaluasi Kinerja Pelayanan Kelurahan Dan Pemerintah Desa	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	25.000.000, 00	
	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	0 Laporan	0,00	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	25.000.000, 00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	4 Kegiatan	3.935.000. 000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	1 Kegiatan	50.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	5 Lembaga Kemasyara katan	90.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	
	Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	5 Lembaga Kemasyara katan	90.000.000	Musrenbang	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370.000.00 0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pagu 5 Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	370.000.00 0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3.475.000. 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pagu 5 Kelurahan
	Pagu Dedikasi RT.50 Jt (66 RT)	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Pokmas / Ormas	66 Pokmas / Ormas	3.300.000. 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	
	Kegitan Sosialisasi / Pelatihan di Kelurahan	64.02.15 - Sanga Sanga	Jumlah Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	175.000.00 0						
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	2.375.860. 000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	3.606.400.0 00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	207 Lembaga Kemasyara katan	2.375.860. 000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	207 Lembaga Kemasyara katan	3.606.400.0 00	
1	Pembayaran Honorarium 66 RT, 81 Linmas, 5 LPM Perkelurahan dan 30 Posyandu Perkelurahan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	207 Lembaga Kemasyara katan	2.375.860. 000	PROGRAM DEDIKASI 50 JT/RT	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyara katan	0,00	Pagu 5 Kelurahan
2						HONORARIUM PENGURUS RT	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyara katan	1.742.400.0 00	
3						Honor Linmas	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	81 Lembaga Kemasyara katan	486.000.00 0	
4						FASILITASI POSYANDU HONOR	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	256 Lembaga Kemasyara katan	768.000.00 0	
5						Operasional Posyandu	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyara katan	201.000.00 0	
6						Operasional PKK	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	
7						Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8						OPERASIONAL KARANG TARUNA	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
9						KEGIATAN PENUNJANG (Lomba Posyandu di kecamatan dan kelurahan)	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
10						Forum Anak	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	
11						Jambore PAUD	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
12						Fasilitasi Kegiatan Pesparawi	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.000.000	
13						Operasional LPM	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.00 0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	50.000.000			Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	175.000.00 0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	1 Laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	50.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	instansi vertikal di wilayah kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Pelatihan dan Pembekalan Linmas	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Patroli di Wilayah Kecamatan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.00 0	
	-	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	75.000.000	
	-	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Safari Ramadhan	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	628.105.08 7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	855.000.00 0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	4 Kegiatan	628.105.08 7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	855.000.00 0	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1500 Orang	528.105.08 7	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0,00	
	Fasilitasi Kegiatan Peringatan Merah Putih (Kecamatan Sanga-Sanga)	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	1500 Orang	500.000.00 0	-	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	0 Orang	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HUT RI 17 Agustus	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	1500 Orang	28.105.087	-	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	0 Orang	0,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	830.000.00 0	
	Fasilitasi Kegiatan MTQ	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	100 Orang	50.000.000	Fasilitasi Kegiatan Peringatan Merah Putih (Kecamatan Sanga-Sanga)	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	1400 Orang	650.000.00 0	
						Fasilitasi Kegiatan MTQ	64.02.15. 1004 - Sari Jaya	Jumlah Orang	100 Orang	180.000.00 0	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	
	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	
7.01.1.03.0.00. 17.0001	KELURAHAN JAWA	Kel. Jawa			-	KELURAHAN JAWA	Kel. Jawa			1.269.520.0 00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	69.520.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 laporan	14.520.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 laporan	14.520.000	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	-	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel. Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel. Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		55.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	30.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	1.200.000.0 00	
			Desa/Kelurahan Yang Aktif					Desa/Kelurahan Yang Aktif			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.00 0	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	450.000.00 0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.00 0	
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Jawa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Jawa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	9 Kali	450.000.00 0	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	450.000.00 0	
7.01.1.03.0.00.17.0002	KELURAHAN PENDINGIN	Kel. Pendingin			-	KELURAHAN PENDINGIN	Kel. Pendingin			1.427.120.0 00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Pendingin	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Pendingin	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	77.120.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 laporan	12.120.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 laporan	12.120.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pendingin	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pendingin	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.350.000.0 00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.00 0	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.00 0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.00 0	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pendingin	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pendingin	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Kali	600.000.00 0	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyara katan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyara katan	600.000.00 0	
7.01.1.03.0.00. 17.0003	KELURAHAN SANGASANGA DALAM	Kel. Sangasanga Dalam			-	KELURAHAN SANGASANGA DALAM	Kel. Sangasan ga Dalam			2.025.100.0 00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sangasanga Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sangasan ga Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	75.100.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		10.100.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 laporan	10.100.000	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasan ga Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.950.000.0 00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.00 0	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.00 0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	300.000.00 0	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	24 Kali	1.200.000.0 00	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	24 Lembaga Kemasyara katan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasan ga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Lembaga Kemasyara katan	1.200.000.0 00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.1.03.0.00.17.0004	KELURAHAN SANGASANGA MUARA	Kel. Sangasanga Muara			-	KELURAHAN SANGASANGA MUARA	Kel. Sangasan ga Muara			1.377.120.0 00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sangasanga Muara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sangasan ga Muara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	77.120.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12.120.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 laporan	12.120.000	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 laporan	30.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Muara	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasan ga Muara	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.300.000.0 00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.00 0	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.00 0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	300.000.00 0	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	11 Kali	550.000.00 0	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyara katan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasan ga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyara katan	550.000.00 0	
7.01.1.03.0.00. 17.0005	KELURAHAN SARIJAYA	Kel. Sarijaya			-	KELURAHAN SARIJAYA	Kel. Sarijaya			1.327.120.0 00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sarijaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kel. Sarijaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	77.120.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12.120.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah yang akuntabel								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 laporan	12.120.000	
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	65.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 laporan	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sarijaya	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sarijaya	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.250.000.0 00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.00 0	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	-	Pembangunan Sarana dan	Kel. Sarijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	450.000.00 0	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	300.000.00 0	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	10 Kali	500.000.00 0	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyara katan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyara katan	500.000.00 0	
				JUMLAH	23.543.635.535				JUMLAH	34.250.792.885	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menyaring, memprioritaskan, dan memastikan bahwa usulan yang diajukan benar-benar relevan, realistis, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.

1. Identifikasi dan Klasifikasi Usulan

Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh usulan dari berbagai sumber, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan/desa, aspirasi anggota DPRD, hingga forum-forum komunikasi lainnya. Usulan-usulan ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang pembangunan:

- Bidang Fisik dan Infrastruktur: Meliputi pembangunan jalan, jembatan, drainase, fasilitas air bersih, dan penerangan jalan.
- Bidang Ekonomi: Terkait dengan pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha.
- Bidang Sosial dan Budaya: Mencakup kegiatan pendidikan, kesehatan (Posyandu, sosialisasi), revitalisasi fasilitas ibadah, serta pelestarian seni dan budaya.
- Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik: Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, dan penataan administrasi.

2. Analisis Kebutuhan dan Dampak Usulan

Setelah diklasifikasikan, setiap usulan dianalisis berdasarkan kriteria berikut:

- Tingkat Kebutuhan dan Urgensi: Sejauh mana usulan tersebut menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat luas. Usulan yang berdampak pada keselamatan publik atau hajat hidup orang banyak, seperti perbaikan jalan yang rusak parah atau pembangunan tanggul penahan banjir, akan menjadi prioritas utama.
- Dampak dan Manfaat: Penelaahan ini mengukur dampak yang akan dihasilkan jika usulan tersebut direalisasikan. Usulan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ekonomi, kualitas hidup, dan daya saing masyarakat akan mendapat bobot penilaian lebih tinggi.

- Kesesuaian dengan Visi-Misi Daerah: Usulan harus selaras dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3. Evaluasi Kelayakan Usulan

Aspek kelayakan menjadi penentu apakah suatu usulan dapat ditindaklanjuti.

- Kelayakan Teknis: Apakah usulan tersebut dapat diimplementasikan secara teknis dengan sumber daya yang ada di Kecamatan Sangasanga? Misalnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geologis dan lingkungan setempat.
- Kelayakan Anggaran: Ketersediaan alokasi anggaran merupakan faktor penentu. Usulan yang memerlukan biaya besar perlu dikaji ulang untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana CSR perusahaan atau bantuan dari pemerintah provinsi.
- Potensi Duplikasi Program: Penelaahan ini juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dengan program atau kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh OPD di tingkat kabupaten atau lembaga lainnya.

4. Penyusunan Prioritas Program dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, usulan-usulan tersebut disusun menjadi daftar prioritas:

- Usulan Prioritas Tinggi: Program yang memiliki urgensi tinggi, dampak luas, dan kelayakan yang kuat. Usulan ini akan direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga tahun 2026. Contoh: Program perbaikan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Usulan Prioritas Menengah: Program yang penting, namun bisa ditunda pelaksanaannya atau memerlukan kajian lebih dalam. Usulan ini dapat dipertimbangkan untuk Rencana Kerja tahun berikutnya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Usulan Prioritas Rendah: Program yang dianggap kurang relevan, tidak mendesak, atau tumpang tindih dengan program lain. Usulan ini biasanya akan direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan.

Penelaahan ini memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program- program yang paling dibutuhkan masyarakat, sehingga pembangunan di Kecamatan Sangasanga dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Bahwa usulan Program / kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan, LPM, Karang Taruna, KPM, RT, sehingga mengahislkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang. Di Form Musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TABEL ; T-C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
3	Sub Kegiatan Pegasean Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
1	Pembuatan Turap Pemasangan Batu RT.004 Kel. Jawa Kec. Sanga Sanga,(1469212)	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	120.000.000	Pokir_Budiman
2	Peningkatan Jalan Gang Rt.09 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam (1463230)	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	200.000.000	Pokir_Masniyah
3	Normalisasi Parit Rt.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, (1463240)	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	125.000.000	Pokir_Masniyah
4	Pembuatan Drainase Jalan Kawasan Rt.09 Kelurahan Jawa (1463251)	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	125.000.000	Pokir_Masniyah
5	peningkatan badan jalan gang keluarga RT 09 kel sanga sanga Muara, (1394538)	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	Pokir_Sa'bir
6	D-1. Peningkatan jalan komplek exspan - ID SIPD : 2097292	Jawa	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
7	D-2. Peningkatan jalan DAM RT. 09 - ID SIPD : 2097272	Jawa	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	
8	D-3. Peningkatan Jalan Habibah RT.04 - ID SIPD : 2097137	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
9	D-4. Pembangunan Turap Jalan Diponegoro RT.06 - ID SIPD : 2096869	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
10	D-5. Pembangunan Turap Jalan Komplek Exspan RT.02 - ID SIPD : 2096959	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
11	D-6. Normalisasi Saluran Drainase Gang Bantu RT.05 - ID SIPD : 2096489	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
12	D-7. Normalisasi Saluran Drainase Jalan Simpang Tani RT.01 - ID SIPD : 2096432	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	4	5	6
	13 D-8. Rehabilitasi Gang Suraji RT.09 - ID SIPD : 2095785	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	14 D-9. Normalisasi Saluran Drainase Jalan Simpang	Jawa	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	Tani RT.02 - ID SIPD : 2083553					
	15 D-10. Peningkatan Jalan Jembatan Ulin Rt.01 - ID SIPD : 2224141	Sarijaya	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	16 D-11. Rehabilitasi Langgar Fathul Jannah RT.08 - ID SIPD : 2223578	Sarijaya	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	17 D-12. Pembangunan Turap RT.03 - ID SIPD : 2222898	Sarijaya	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	
	18 D-13. Drainase Jalan Lingkungan RT.10 - ID SIPD : 2212360	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	19 D-14. Pembangunan Turap RT.09 - ID SIPD : 2212170	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	20 D-15. Peningkatan Jalan Gang Dahlia RT.08 - ID SIPD : 2210851	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	21 D-16. Pembuatan Drainase Pasangan Batu RT.07 - ID SIPD : 2209751	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	22 D-17. Drainase Jalan Lingkungan RT.02 - ID SIPD : 2191204	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	23 D-18. Pembangunan Turap RT.01 Dan 02 - ID SIPD : 2191170	Sarijaya	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	24 D-19. Pembuatan Drainase RT.24 - ID SIPD : 411742	Sangasanga	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	25 D-20. Peningkatan Jalan Wisata DKM RT.24 - ID SIPD : 2391018	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	26 D-21. Pembangunan Jembatan RT.12A - ID SIPD : 2273793	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	27 D-22. Drainase Jalan Pangeran Hidayat RT.15 - ID SIPD : 2272732	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	4	5	6
	28 D-23. Drainase Parit Rumaga2 RT.12 - ID SIPD : 2269725	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	29 D-24. Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Lama RT.07 Dan RT.08 - ID SIPD : 2269073	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	30 D-25. Rehab Jalan Titian RT.07 - ID SIPD : 2268897	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	31 D-26. Drainase Beton RT.06 - ID SIPD : 2268842	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	32 D-27. Pembuatan Drainase Gang Salim RT.05 - ID SIPD : 2268035	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	33 D-28. Drainase Jalan Gajah Mada RT.03 - ID SIPD : 2267956	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	34 D-29. Peningkatan Jalan Kuburan Kristen RT.04 - ID SIPD : 2267862	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	35 D-30. Drainase Jalan Shomil RT.02 - ID SIPD : 2267688	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	36 D-31. Pembangunan Turap Jalan Usaha Tani RT.01 - ID SIPD : 2211215	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	37 D-32. Peningkatan Jalan Al Misbah RT.01 - ID SIPD : 2211224	Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	
	38 D-33. Peningkatan Jalan Ulin RT.02 - ID SIPD : 2222788	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	39 D-34. Normalisasi Parit Jalan Astina RT.06 - ID SIPD : 2192871	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	40 D-35. Peningkatan Jalan Purwojoyo RT.04 - ID SIPD : 2192759	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	41 D-36. Pembangunan Turap Jalan Setia Bakti RT.08 - ID SIPD : 2090898	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	42 D-37. Peningkatan Jalan Jadi Makmur RT.09 - ID SIPD : 2090480	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	43 D-38. Peningkatan Jalan Gang Usaha Tani Sentosa RT.12 - ID SIPD : 2090657	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	4	5	6
	44 D-39. Peningkatan Jalan Gang Sajahtra RT.11 - ID SIPD : 2090642	Pendingin	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	45 D-40. Peningkatan Jalan Gang Raudah RT.03 - ID SIPD : 2090010	Pendingin	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	46 D-41. Peningkatan Jalan Gang Keluarga Ke Rumah Lamin RT.12 - ID SIPD : 2195917	Pendingin	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	47 D-42. Pembuatan Parit RT.02 - ID SIPD : 2196901	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	
	48 D-43. Rehab Jembatan Ulin RT.05 - ID SIPD : 2197806	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	49 D-44. Pembuatan Jembatan Titian RT.06 - ID SIPD : 2198217	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	50 D-45. Pembuatan Jembatan Titian Gang Damai RT.07 - ID SIPD : 2198735	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	51 D-46. Rehab Jalan Jembatan Layang RT.09 - ID SIPD : 2199227	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	52 D-47. Peningkatan Jalan Jembatan Layang RT.11 - ID SIPD : 2199509	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	200 Meter	150.000.000	
	53 D-48. Drainase Parit RT.06 - ID SIPD : 2199786	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	250 Meter	150.000.000	
	54 D-49. Pembuatan Parit RT.07 - ID SIPD : 2199746	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
	55 D-50. Rehab Monumen Perjuangan - ID SIPD : 2201798	Sangasanga Muara	Jumlah Laporan	150 Meter	150.000.000	
		TOTAL			**Rp 8.220.000.000**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026, Kecamatan Sangasanga melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai kebijakan nasional yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PD. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Kebijakan nasional yang menjadi acuan utama mencakup :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Kebijakan ini menekankan pada pentingnya birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Sangasanga merespons kebijakan ini dengan memprioritaskan program-program yang mempercepat dan mempermudah layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan publik lainnya.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah nasional terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program yang berfokus pada peningkatan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial. Kecamatan Sangasanga mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam Renja dengan merancang kegiatan yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan: Kebijakan ini mengarahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Terkait hal ini, Kecamatan Sangasanga akan fokus pada koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya berjalan lancar, serta mendukung program kebersihan lingkungan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sangasanga berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan Misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang sesuai Visi yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sangasanga adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sangasanga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
MISI	TUJUAN		SASARAN	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Sangasanga dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sangasanga adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel.

B. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sangasanga, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangasanga Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
1,	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	70	80	90	100
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	70	80	90	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen					

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan PD.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sangasanga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sangasanga

VISI (RPJMD)	: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"			
MISI (RPJMD)*	: 1, Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
		3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		6	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Sangasanga merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sangasanga sebagai PD pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan Pelayanan Umum.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Penyusunan rancangan Program dan kegiatan Kecamatan Sangasanga untuk tahun 2026 didasarkan pada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan selaras dengan visi pembangunan Daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Program dan kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, khususnya dalam aspek peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sangasanga.Kartanegara nantinya.

- Pencapaian SDGs

  Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, program kerja dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

- Pengetasan Kemiskinan

  Pengentasan Kemiskinan: Sejumlah program difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran.Berikut beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk penurunan angka stunting dan kemiskinan Kecamatan Sangasanga :

  ✓ Arah Kebijakan Penurunan Angka Stunting

  1. Peningkatan Gizi Ibu dan Anak: Meningkatkan akses ke layanan gizi yang memadai untuk ibu hamil dan anak-anak.
  2. Pemberian Suplemen Gizi: Memberikan suplemen gizi yang tepat untuk ibu hamil dan anak-anak.
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak-anak.
  4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan untuk mencegah stunting.
  5. Pemantauan Pertumbuhan Anak: Melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara teratur untuk mendeteksi stunting sejak dini.

  ✓ Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan

  1. Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja.
  2. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil: Mendukung

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengembangan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

3. Peningkatan Akses ke Layanan Keuangan: Meningkatkan akses ke layanan keuangan yang inklusif dan terjangkau untuk masyarakat miskin.
4. Program Bantuan Langsung: Menyediakan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, seperti bantuan tunai, makanan, dan shelter.
5. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan kesempatan ekonomi dan kualitas hidup.

✓ Integrasi Kebijakan

1. Koordinasi antar Dinas atau Lembaga Terkait untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting dan kemiskinan.
2. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting dan kemiskinan.
3. Penggunaan Data dan Informasi: Menggunakan data dan informasi yang akurat untuk memantau dan mengevaluasi program penurunan stunting dan kemiskinan.
4. Keberlanjutan: Mengembangkan program penurunan stunting dan kemiskinan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

➢ Pencapaian SPM

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM): Prioritas diberikan pada program yang bertujuan memenuhi SPM di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketenteraman serta ketertiban umum.

➢ Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah: Program-program diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain :

- Secara garis besar, rancangan Renja Kecamatan Sangasanga tahun 2026 mencakup 5 (lima) Program yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan
- Penyebaran Lokasi : Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sangasanga sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sangasanga dan melingkupi semua Kelurahan.
- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana untuk seluruh program dan kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp [Jumlah Pagu Indikatif]. Kebutuhan pendanaan ini dirinci berdasarkan sumber pendanaan, yaitu:
  - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara : Rp34.250.792.885,-
  - ✓ Sumber Pendanaan Lain DAU : Rp. 0,-
  - ✓ Sumber Pendanaan Lain DAK : Rp. 0,-

C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Pada tahap ini, dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan antara rumusan program dan kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja dengan rancangan awal RKPD. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

- ✓ Perubahan Kebijakan: Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat atau daerah yang harus diakomodasi.
- ✓ Hasil Evaluasi: Temuan dari hasil evaluasi program tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya perubahan prioritas atau metode pelaksanaan
- ✓ Penyesuaian Pagu Indikatif: Perubahan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sehingga mempengaruhi alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

D. Tabel rencana program dan kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel.T-C 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Tahun 2026 Dan Prakiran Maju Pada Tahun 2027

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	85 Nilai	12.499.716.885			72 Nilai	13.972.638.781
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	7 Dokumen	340.000.000			7 Dokumen	513.780.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	2 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	73.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	5.390.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	5.390.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	70.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	60.000.000
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	64.02.15 - Sanga Sanga	2 Data	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Data	300.000.000

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	64.02.15 - Sanga Sanga	14 Laporan	10.657.764.125			14 Laporan	10.521.568.781
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	64.02.15 - Sanga Sanga	756 Orang	10.265.684.125	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		756 Orang	10.129.488.781
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Laporan	367.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	367.080.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Diadministrasikan	64.02.15 - Sanga Sanga	50 Unit	100.000.000			50 Unit	175.000.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	75.000.000
7.01.01.2.03.03	Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 Laporan	50.000.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	6 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	64.02.15 - Sanga Sanga	50 Unit	50.000.000			50 Unit	495.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	45.000.000
7.01.01.2.05.009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	64.02.15 - Sanga Sanga	Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Orang	50.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.02.15 - Sanga Sanga	Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Orang	50.000.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.02.15 - Sanga Sanga	66 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		66 Orang	350.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	64.02.15 - Sanga Sanga	69 Jenis	297.000.000			69 Jenis	537.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Paket	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	7.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	100.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Paket	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	135.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	20.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	227 Jumlah	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		227 Jumlah	175.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	2 Unit	-			2 Unit	210.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Unit	160.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	2 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Unit	50.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Bulan	965.712.760			12 Bulan	691.380.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.02.15 - Sanga Sanga	1 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	3.600.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Laporan	317.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	317.780.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	64.02.15 - Sanga Sanga	12 Laporan	645.432.760	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	370.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	64.02.15 - Sanga Sanga	31 Unit	89.240.000			31 Unit	828.910.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	64.02.15 - Sanga Sanga	8 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		8 Unit	299.670.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	64.02.15 - Sanga Sanga	10 Unit	29.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	29.240.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	64.02.15 - Sanga Sanga	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	500.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP	Kec. Sanga - Sanga	100 Persen	1.368.696.000			100 Persen	550.000.000
		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	100 Persen	8.220.000.000			100 Persen	7.818.696.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Melibatkan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait Yang Dilaksanakan Secara Efektif	Kec. Sanga - Sanga	1 Laporan	450.000.000			1 Laporan	450.000.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	150.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	1 Dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	300.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Difasilitasi	Kec. Sanga - Sanga	5 Kegiatan	100.000.000			5 Kegiatan	100.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Camat	Kec. Sanga - Sanga	5 Kegiatan	9.038.696.000			5 Kegiatan	7.818.696.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan	Kec. Sanga - Sanga	14 Laporan	818.696.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		14 Laporan	818.696.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kec. Sanga - Sanga	8 Laporan	8.220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7 Laporan	7.000.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kec. Sanga - Sanga	100 Persen	3.706.400.000			100 Persen	4.436.400.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan.	Kec. Sanga - Sanga	5 Kali	50.000.000			5 Kali	200.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	200.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	15 Kegiatan	50.000.000			15 Kegiatan	50.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kec. Sanga - Sanga	5 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	5 Pokmas / Ormas	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	5 Kegiatan	3.606.400.000			5 Kegiatan	4.186.400.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	Kec. Sanga - Sanga	207 Lembaga Kemasyarakatan	3.606.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		207 Lembaga Kemasyarakatan	4.036.400.000
7.01.03.2.03.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Sanga - Sanga	Lembaga Kemasyarakatan	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal; Serta Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	100 Persen	175.000.000			100 Persen	225.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kec. Sanga - Sanga	1 Kegiatan	175.000.000			1 Kegiatan	225.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	175.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Sanga - Sanga	100 Persen	855.000.000			100 Persen	880.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	4 Kegiatan	855.000.000			4 Kegiatan	880.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	1500 Orang	830.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1500 Orang	830.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
7.01.1.03.0. 00.17.0001	KELURAHAN JAWA		Kel. Jawa		1.269.520.000				1.330.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Jawa	85 Nilai	69.520.000			72 Nilai	130.000.000
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kel. Jawa		14.520.000				14.520.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	12 Laporan	14.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	14.520.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Diadministrasikan		50 Unit	-			50 Unit	19.335.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Jawa	1 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	19.335.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa		55.000.000				96.145.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kel. Jawa	1 Paket	-			1 Paket	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kel. Jawa	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	49.945.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	60 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		60 Laporan	46.200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Jawa	100 Persen	1.200.000.000			100 Persen	1.200.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Jawa	15 Kegiatan	750.000.000			15 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kel. Jawa	3 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kel. Jawa	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Jawa	5 Kegiatan	450.000.000			5 Kegiatan	450.000.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kel. Jawa	9 Lembaga Kemasyara katan	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		9 Lembaga Kemasyara katan	450.000.000
7.01.1.03. 0.00.17.0002	KELURAHAN PENDINGIN		Kel. Pendingin		1.427.120.000				1.480.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	85 Nilai	77.120.000			72 Nilai	130.000.000
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kel. Pendingin		12.120.000				12.120.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar	Kel. Pendingin	12 Laporan	12.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	12.120.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	SKPD	Realisasi Kinerja SKPD							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin		65.000.000				117.880.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kel. Pendingin	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	36.968.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kel. Pendingin	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	33.942.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	61 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		61 Laporan	46.970.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Pendingin	100 Persen	1.350.000.000			100 Persen	1.350.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Pendingin	15 Kegiatan	750.000.000			15 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kel. Pendingin	5 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kel. Pendingin	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pendingin	5 Kegiatan	600.000.000			5 Kegiatan	600.000.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kel. Pendingin	12 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000
7.01.1.03. 0.00.17.0003	KELURAHAN SANGASANGA DALAM		Kel. Sangasan ga Dalam		2.025.100.000				2.080.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Dalam	85 Nilai	75.100.000			72 Nilai	130.000.000
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kel. Sangasan ga Dalam		10.100.000				10.100.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasan ga Dalam	10 Laporan	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Laporan	10.100.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Dalam		65.000.000				119.900.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kel. Sangasan ga Dalam	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	48.569.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kel. Sangasan ga Dalam	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	29.751.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasan ga Dalam	54 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		54 Laporan	41.580.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sangasan ga Dalam	100 Persen	1.950.000.000			100 Persen	1.950.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	15 Kegiatan	750.000.000			15 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kel. Sangasan ga Dalam	5 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasan ga Dalam	5 Kegiatan	1.200.000.000			5 Kegiatan	1.200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Dalam	24 Lembaga Kemasyara katan	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		24 Lembaga Kemasyara katan	1.200.000.000
7.01.1.03. 0.00.17.0004	KELURAHAN SANGASANGA MUARA		Kel. Sangasan ga Muara		1.377.120.000				1.430.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Muara	85 Nilai	77.120.000			72 Nilai	130.000.000
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kel. Sangasan ga Muara		12.120.000				12.120.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasan ga Muara	12 Laporan	12.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	12.120.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasan ga Muara		65.000.000				117.880.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kel. Sangasan ga Muara	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	52.706.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kel. Sangasan ga Muara	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	29.754.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasan ga Muara	46 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		46 Laporan	35.420.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sangasan ga Muara	100 Persen	1.300.000.000			100 Persen	1.300.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	15 Kegiatan	750.000.000			15 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kel. Sangasan ga Muara	5 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	450.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasan ga Muara	5 Kegiatan	550.000.000			5 Kegiatan	550.000.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kel. Sangasan ga Muara	11 Lembaga Kemasyara katan	550.000.000			11 Lembaga Kemasyara katan	550.000.000
7.01.1.03. 0.00.17.0005	KELURAHAN SARIJAYA		Kel. Sarijaya		1.327.120.000				1.380.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	85 Nilai	77.120.000			72 Nilai	130.000.000
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kel. Sarijaya		12.120.000				12.120.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	12 Laporan	12.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	12.120.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya		65.000.000				117.880.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kel. Sarijaya	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	35.004.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kel. Sarijaya	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	29.236.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	70 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		70 Laporan	53.640.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sarijaya	100 Persen	1.250.000.000			100 Persen	1.250.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sarijaya	15 Kegiatan	750.000.000			15 Kegiatan	750.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kel. Sarijaya	5 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kel. Sarijaya	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sarijaya	5 Kegiatan	500.000.000			5 Kegiatan	500.000.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kel. Sarijaya	10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000
		TOTAL			34.250.792.885				35.582.734.781

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B A B V
PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga tahun 2026 ini merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius:

1. Fleksibilitas Anggaran : Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dapat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu disiapkan skala prioritas yang jelas. Program dan kegiatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pelayanan dasar masyarakat dan pencapaian visi-misi daerah harus diprioritaskan.
2. Sinergi dan Kolaborasi : Pelaksanaan Program tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara seluruh PD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial. Tanpa kolaborasi yang kuat, efektivitas Program akan menurun.
3. Penguatan Kapasitas SDM : Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terutama dalam mengelola program berbasis teknologi, perlu menjadi perhatian. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM harus menjadi investasi utama.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan : Rencana Kerja ini bukanlah dokumen statis. Pelaksanaan program perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan kondisi di lapangan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026 harus berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut untuk mencapai hasil yang optimal :

1. Efektivitas dan Efisiensi: Setiap Program dan kegiatan harus dilaksanakan dengan prinsip efektivitas (mencapai tujuan yang ditetapkan) dan efisiensi (menggunakan sumber daya seminimal mungkin).
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh tahapan pelaksanaan, dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilakukan secara

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi ini akan memastikan Program tepat sasaran dan berkelanjutan.
4. Inovasi dan Adaptasi: Mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan program pembangunan. Kaidah ini juga menuntut kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik dari sisi teknologi maupun regulasi.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Setiap PD harus menyusun RKA secara detail dan realistis, berlandaskan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini.
2. Sosialisasi dan Komunikasi: Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengendali: Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan Renja agar berjalan sesuai rencana.
4. Koordinasi dengan PD terkait: Mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala dengan PD untuk memastikan sinergi dan dukungan anggaran yang memadai.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN LIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA WIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat Program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja-PD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Muara Wis secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Muara Wis menyusun Renja-PD tahun 2026 yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis. Rencana Kerja Kecamatan Muara WisTahun 2026 mengacu pada RKPD tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja-PD tahun 2026 ini adalah untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Wis selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Wis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 dan capaian Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayaan									
7.01	Urusan Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	49	63	NA	NA	64	NA	NA
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	16	8	8	100	8	32	80.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	225	90	45	45	100	45	180	80.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	62	31	31	100	31	124	80.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	26	13	13	100	13	52	80.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	80	32	16	16	100	16	64	80.00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	8	4	4	100	4	16	80.00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	198	79	41	39	95.12	41	159	80.30
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43	15	10	8	80	10	33	76.74
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155	64	31	31	100	31	126	81.29
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	164	65	33	33	100	33	131	79.88
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	180	72	36	36	100	36	144	80.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	160	64	32	32	100	32	128	80.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	20	10	10	100	10	40	80.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	40	20	20	100	20	80	80.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	120	48	24	24	100	24	96	80.00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	60	24	12	12	100	12	48	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	35	14	7	7	100	7	28	80.00
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	10	5	5	100	5	20	80.00
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	4	2	2	100	2	8	80.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25	10	5	5	100	5	20	80.00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	20	8	4	4	100	4	16	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	2	1	1	100	1	4	80.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70	28	14	14	100	14	56	80.00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	24	12	12	100	12	48	80.00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	4	2	2	100	2	8	80.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(inputs)*, keluaran *(outputs)*, hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefits)* dan dampak *(impacts)*. Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Muara Wis sebagai salah satu PD yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja *output* yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Wis berdasarkan indikator kinerja sasaran akan disampaikan dengan tabel sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	5,5	6	6,5	195,09	-7,2	21,07	6,5	7	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Pasal 3 peraturan bupati tersebut menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD diuraikan sebagai berikut:

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
b. meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. meningkatkan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
f. meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
g. meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis serta mengacu kepada RKPD. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Wis disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja-PD.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Muara Wis diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan Program, kegiatan dan subkegiatan. Dalam rangka

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mewujudkan keseimbangan pelaksanaan Program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 akan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	2.030.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	6.741.202.000	
			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	78,5	Persen				Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	78,5	Persen		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	0	kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	0	kegiatan	400.000.000	
01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Rembuk Stunting dan Fasilitasi ERAU
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi HUT RI
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	SPM	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	SPM	100.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Pokjanal Posyandu dan Pramuka

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	2.030.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	6.241.202.000	
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	15	Laporan	841.202.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Pengelolaan Sampah, Pemeliharaan LPJU dan Penanganan Darurat Bencana
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	Laporan	2.000.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9	Laporan	5.400.000.000	Tambahan Anggaran pembangunan di Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	Persen	125.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	Persen	436.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	125.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	100.000.000	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.000.000	Efisiensi Anggaran
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	Kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	336.000.000	
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000	Fasilitasi HKG PKK, Fasilitasi PKK, Forum Anak, Jambore PAUD

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	130.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	130.000.000	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Patroli Kecamatan
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Laporan	-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	80.000.000	Fasilitasi Safari Ramadhan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	Persen	180.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	Persen	195.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	16	Kegiatan	180.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	16	Kegiatan	195.000.000	
04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	4	Orang	180.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	60	Orang	180.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Forkopimcam
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	385.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	75.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7	Desa	385.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7	Desa	75.000.000	
03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	Dokumen	85.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	Dokumen	-	Pindan Ke Sub Kegiatan Lain
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2	Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	Laporan	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	Laporan	75.000.000	Anggaran Untuk Pendampingan APBDes
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai	7.719.813.220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai	7.210.585.259	
	Perencanaan, Penganggaran, dan		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan	17	dokumen	170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	dokumen	320.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	40.000.000	Efisiensi Anggaran
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	30.000.000	Efisiensi Anggaran
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	-	Efisiensi Anggaran
07	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Muara Wis	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Muara Wis	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	250.000.000	Anggaran Untuk Satu Data Indonesia
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	laporan	4.008.107.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	laporan	5.332.275.259	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396	Orang/bulan	3.897.467.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372	Orang/bulan	5.221.635.259	Penambahan Anggaran Untuk Gaji PPPK
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	95.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	95.640.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	16	unit	70.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	16	unit	90.800.000	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Pindahan Dari Sub Kegiatan Lain
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	40.800.000	Pindahan Dari Sub Kegiatan Lain
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	Pindah Sub Kegiatan Lain
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	40.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	Pindah Sub Kegiatan Lain
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	50	orang	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	50	orang	50.000.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	Efisiensi Anggaran
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	-	Efisiensi Anggaran
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	jenis	959.578.146	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	jenis	331.000.000	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	Efisiensi Anggaran
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	94.978.146	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	130.000.000	Tambahan Untuk Penyediaan ATK
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	8.000.000	Efisiensi Anggaran
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	20.000.000	Efisiensi Anggaran
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	375.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	75.000.000	Efisiensi Anggaran
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Efisiensi Anggaran
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	23.000.000	Efisiensi Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	60	unit	1.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	60	unit	-	
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Efisiensi Anggaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	541.327.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	296.510.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	284.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	291.510.000	Kenaikan Daya
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	251.927.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-	Tidak ada lagi honorarium THL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47	unit	790.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47	unit	790.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	120.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20.000.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	650.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	650.000.000	
						10.439.813.220						14.787.787.259	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang mulai tingkat Desa/Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Daerah, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan PD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan Program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum PD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum PD dan tentunya menyesuaikan prioritas Program dan kegiatan PD Kecamatan Muara Wis, seperti yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Wis)	Belum Adanya Sarana air Bersih di Dusun Ketibeh	Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Enggelam	-	-	-
2	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Wis)	Belum adanya tempat sampah	Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Enggelam	-	-	-
3	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Wis)	Belum adanya saluran Drainese	Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Enggelam	-	-	-
4	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Wis)	Belum Meratanya WC di setiap Rumah, Maka Oleh Sebab itu mengajukan WC Umum setiap RT. 001 s/d RT. 007	Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Enggelam	-	-	-
5	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	jalanan masih banyak yang belum di semenisasi	Lebak cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Lebak Cilong	-	-	-
6	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	kecil nya aliran drainase pembuangan air	Lebak Cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Lebak Cilong	-	-	-
7	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Wis)	tidak ada nya gorong - gorong pembuangan air hujan jadi mengakibatkan banjir	Desa lebak cilong RT 01 jalan Sampah, Kab. Kutai Kartanegara	Lebak Cilong	-	-	-
8	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Memerlukan Semenisasi	Jln. Patin RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Wis	-	-	-
9	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman	Diperlukan semenisasi agar jembatan titian ulin awat dan nyaman	Jln. Jelawat RT. 002 Gang. Merintis, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Wis	-	-	-
10	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Memerlukan Pembangunan/Rehab Drainase	Jln. Poros Desa Muara Wis, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Wis	-	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Normalisasi Saluran Sungai Ebos dikarenakan Masih dangkal sehinggga menyulitkan Mata Pencarian Para Nelayan 3 KM	Sebemban RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
12	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Wis)	Peningkatan Jalan Tempt Pembuangan Akhir Sampah (Dengan Ukuran 20 x 40 Meter..	Sebemban Dusun Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
13	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Belum terpenuhinya Normalisasi Saluran Sungai Keliran Jambu	Sebemban RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
14	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Jembatan Samping Kantor Desa Sebemban..	Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
15	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Wis)	Belum Terpenuhinya Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum	Sebemban dan Dusun Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
16	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Wis)	Belum Terbangunnya Tempat sampah Di Dusun Kuyung	Dusun Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
17	Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Wis)	Belum terpeliharanya Jalan Poros Penghubung ke Dusun Kuyung..	Dusun Kuyung RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
18	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Wis)	Belum Terpenuhinya Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih ke rumah masyarakat sehinga Masyarakat Belum bisa merasakan aliran Air bersih yang telah tersedian	Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
19	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Desa/Kelurahan (Muara Wis)	Belum adanya Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Di Desa Sebemban untuk Kegiatan Posronda Linmas	Sebemban RT. 003, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
20	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Jalan jembatan belum selesai ketempat TPA	Desa Muara Enggelam Pembangunan Jembatan Ulin, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Enggelam	-	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

21	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Muara Wis)	Banyaknya masyarakat yang masih buang BAB di sungai	Desa Muara Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Enggelam	-	-	-
22	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Jalan pada saat Hari hujan para pengendara Sepeda Motor tidak bisa melewati jalan Dusun Kuyung Ke Desa Sebemban.	Sebemban - Ds Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
23	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Jembatan Samping Kantor Desa Sebemban.	Sebemban RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-
24	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Wis)	Belum Terpenuhinya Pemeliharaan Jalan lingkungan Dari Sebemban Ke Kecamtan Muara Wis dan Jalan Dusun Kuyung Ke Desa Sebemban, Agar Mempermudah Akses Warga Memenuhi Perokonomian Mereka	DESA SEBEMBAN - MUARA WIS, Kab. Kutai Kartanegara	Sebemban	-	-	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembanguan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembanguan nasional sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025. Oleh sebab itu penyusunana RPJMD selain memuat visi, misi dan Program prioritas Bupati/Wakil Bupati masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam rangka mewujudkan Misi Daerah, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel"

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Muara Wis Tahun 2026 adalah : "Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan"

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Wis sebagai PD pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi: Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Sehingga Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

2) Pencapaian SPM.

Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Muara Wis belum terlaksana, sehingga perlu dimasukan Program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian SPM di Kecamatan Muara Wis.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, kegitan dan subkegiatan, antara lain meliputi:

1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis tahun 2026 adalah 5 (lima) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh satu) subkegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2) Sifat penyebaran lokasi Program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Wis dan melingkupi semua Desa.

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis sebesar Rp14.787.787.259,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

C. Tabel rencana Program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100	Persen	6.741.202.000			100	Persen	3.141.202.000
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		78,5	Persen				78,5	Persen	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		0	kegiatan	400.000.000			0	kegiatan	400.000.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	2	Laporan	150.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Rembuk Stunting dan Fasilitasi ERAU	Muara Wis	2	Laporan	150.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	1	Dokumen	250.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi HUT RI	Muara Wis	1	Dokumen	250.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1	SPM	100.000.000			1	SPM	100.000.000
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	2	Laporan	100.000.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Pokjanal Posyandu dan Pramuka	Muara Wis	2	Laporan	100.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	6.241.202.000			2	Kegiatan	2.641.202.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Muara Wis	15	Laporan	841.202.000	Tambahan Untuk Fasilitasi Pengelolaan Sampah, Pemeliharaan LPJU dan Penanganan Darurat Bencana	Muara Wis	15	Laporan	841.202.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	9	Laporan	5.400.000.000	Tambahan Anggaran pembangunan di Desa	Muara Wis	9	Laporan	1.800.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan		100	Persen	436.000.000			100	Persen	486.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan		2	Kegiatan	100.000.000			2	Kegiatan	150.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000		Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	2	Laporan	50.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	2	Laporan	50.000.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	Kegiatan	336.000.000			1	Kegiatan	336.000.000
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000	Fasilitasi HKG PKK, Fasilitasi PKK, Forum Anak, Jambore PAUD	Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	persen	130.000.000			100	persen	225.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan		1	Kegiatan	130.000.000			1	Kegiatan	225.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	1	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Patroli Kecamatan	Muara Wis	1	Laporan	50.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	4	Laporan	80.000.000	Fasilitasi Safari Ramadhan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Muara Wis	4	Laporan	175.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	Persen	195.000.000			0	Persen	220.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		16	Kegiatan	195.000.000			16	Kegiatan	220.000.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Wis	60	Orang	180.000.000		Muara Wis	60	Orang	180.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	1	Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Forkopimcam	Muara Wis	1	Dokumen	40.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100	Persen	75.000.000			100	Persen	75.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		7	Desa	75.000.000			7	Desa	75.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Wis	0	Dokumen	-	Pindan Ke Sub Kegiatan Lain	Muara Wis	0	Dokumen	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	0	Dokumen	-
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	0	Dokumen	-
7	01	06	2.01	12	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Wis	7	Laporan	75.000.000	Anggaran Untuk Pendampingan APBDes	Muara Wis	7	Laporan	75.000.000
7	01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		B	Nilai	7.210.585.259			B	Nilai	8.981.437.965
7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22	dokumen	320.000.000			22	dokumen	380.000.000
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	2	Dokumen	40.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	2	Dokumen	30.000.000
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	9	Laporan	30.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	9	Laporan	50.000.000
7	01	01.	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Muara Wis	200	Data	250.000.000	Anggaran Untuk Satu Data Indonesia	Muara Wis	200	Data	300.000.000
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20	laporan	5.332.275.259			20	laporan	5.243.127.965
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	372	Orang/bulan	5.221.635.259	Penambahan Anggaran Untuk Gaji PPPK	Muara Wis	372	Orang/bulan	5.132.487.965
7	01	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	1	Laporan	15.000.000		Muara Wis	1	Laporan	15.000.000
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Muara Wis	12	Laporan	95.640.000		Muara Wis	12	Laporan	95.640.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		16	unit	90.800.000			16	unit	110.800.000
7	01	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000	Pindahan Dari Sub Kegiatan Lain	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000
7	01	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	1	Laporan	40.800.000	Pindahan Dari Sub Kegiatan Lain	Muara Wis	1	Laporan	20.000.000
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	0	Laporan	-	Pindah Sub Kegiatan Lain	Muara Wis	0	Laporan	40.800.000
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		50	orang	50.000.000			50	orang	180.000.000
7	01	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muara Wis	0	Paket	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	0	Paket	50.000.000
7	01	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muara Wis	0	Orang	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	0	Orang	80.000.000
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	50	Orang	50.000.000		Muara Wis	50	Orang	50.000.000
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		8	jenis	331.000.000			8	jenis	981.000.000
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1	Paket	5.000.000		Muara Wis	1	Paket	5.000.000
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1	Paket	50.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	1	Paket	300.000.000
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Wis	3	Paket	130.000.000	Tambahan Untuk Penyediaan ATK	Muara Wis	3	Paket	85.000.000
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Wis	2	Paket	8.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	2	Paket	8.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Muara Wis	0	Dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	1	Dokumen	8.000.000
7	01	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	5	Laporan	20.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	5	Laporan	100.000.000
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	12	Laporan	75.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	12	Laporan	375.000.000
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	20.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000
7	01	01.	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	23.000.000	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		60	unit	-			60	unit	1.000.000.000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	0	Unit	-	Efisiensi Anggaran	Muara Wis	5	Unit	1.000.000.000
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	bulan	296.510.000			12	bulan	296.510.000
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	1	Laporan	5.000.000		Muara Wis	1	Laporan	5.000.000
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muara Wis	12	Laporan	291.510.000	Kenaikan Daya	Muara Wis	12	Laporan	291.510.000
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muara Wis	0	Laporan	-	Tidak ada lagi honorarium THL	Muara Wis	0	Laporan	-
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		47	unit	790.000.000			47	unit	790.000.000
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muara Wis	13	Unit	120.000.000		Muara Wis	13	Unit	120.000.000
7	01	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Wis	20	Unit	20.000.000		Muara Wis	20	Unit	20.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Wis	4	Unit	650.000.000		Muara Wis	4	Unit	650.000.000
										14.787.787.259					13.128.639.965

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Muara Wis tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan mengacu pada evaluasi RPJMD tahun 2016-2021. Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis yang memuat kebijakan Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Wis.

Pelaksanaan semua Program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD tahun 2026. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2026 dan RKPD tahun 2026. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Wis. Untuk dapat merealisasikan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan Program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis juga memberikan umpan balik *(feed back)* dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi

tercapainya visi dan misi Kecamatan Muara Wis serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN LIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA MUNTAI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Kecamatan Muara Muntai dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Muntai. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari: a) evaluasi menyeluruh tentang kinerja

pembangunan tahun lalu; b) rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja; d) rumusan tujuan, strategi dan kebijakan Pembangunan; e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana; f) rumusan dan prioritas Program dan kegiatan berbasis kinerja; g) tolok ukur dan target kinerja capaian Program dan kegiatan; h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui: a) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah; c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; e) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas Program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang kecamatan dan Daerah termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan *top down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan Daerah juga tujuan *global MDGs*. Pendekatan ini tercermin pada: a)

sinergi dengan Program prioritas nasional dan Daerah; b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Muntai, konsisten dengan dokumen RTRW Daerah; c) penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui Musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum PD. Pada penyusunan Rencana Kerja 2026 ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan Program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Muntai selama

tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Muntai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Muara Muntai tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. *Review* Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Muara Muntai adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun Program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tingkat kecamatan dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang}}{\text{100 Jumlah usulan dalam musrenbang}} \times 100$$

2. Kelancaran proses pelayanan administrasi kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur indeks kepuasaan masyarakat, dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Layanan}}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}} \times 100$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Kelompok Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}} \times 100$$

4. Tingkat capaian pembangunan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan kecamatan dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun}}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}} \times 100$$

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sumber daya manusia Daerah khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi "KUKAR IDAMAN". Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026, Kecamatan Muara Muntai telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan Musrenbang Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Muara Muntai ditunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan PD dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026

Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	76 Nilai	75 Nilai	75 Nilai		76 Nilai	76 Nilai	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75 Dokumen	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	25 Dokumen	25 Dokumen	0,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,00	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	50 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	15 Dokumen	15 Dokumen	0,30
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25 Rapat	15 Rapat	0 Rapat	0 Rapat	#DIV/0!	15 Rapat	15 Rapat	0,60
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	5 Dokumen	5 Dokumen	0,50
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran		75 Lapoaran	75 Lapoaran	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	57 Orang	54 Orang	44 Orang	44 Orang	1,00	54 Orang	54 Orang	0,95
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	1,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,00	4 Dokumen	4 Dokumen	0,50
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	50 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	1,00	25 Laporan	25 Laporan	0,50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	15 Stel	0 Stel	0 Stel	#DIV/0!	15 Stel	15 Stel	0,32
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	#DIV/0!	0 Peraturan	0 Peraturan	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	#DIV/0!	0 Bimtek	0 Bimtek	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,00	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	1,00	25 Porsi	25 Porsi	1,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Exemplar	5 Exemplar	0 Exemplar	0 Exemplar	#DIV/0!	5 Exemplar	5 Exemplar	1,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	5 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	5 Jenis	5 Jenis	1,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	15 Kali	15 Kali	15 Kali	1,00	15 Kali	15 Kali	1,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	1,00	45 Laporan	45 Laporan	1,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1,00	150 Dokumen	150 Dokumen	1,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	1,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	50 Unit	50 Unit	1,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1,00	8 Unit	8 Unit	1,00
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	2 Unit	2 Unit	0,50
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	1,00	336 Rekening	336 Rekening	1,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	0 Jenis	0 Jenis	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit		2 Unit	2 Unit	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,08
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	33 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	#DIV/0!	0 Bidang	0 Bidang	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen		100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali		25 Kali	25 Kali	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan		36 Kegiatan	36 Kegiatan	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Kegiatan	29 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,00	29 Kegiatan	29 Kegiatan	0,81
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		20 Kegiatan	20 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1,00	150 Orang	150 Orang	1,50
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen		25 Persen	25 Persen	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	10 SPM	10 SPM	10 SPM	10 SPM		10 SPM	10 SPM	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	0 Desa	13 Desa	13 Desa		0 Desa	0 Desa	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada Program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa Program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Adanya difisit anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Adanya kegiatan yang salah penganggaran.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas salah penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Muara Muntai , merupakan PD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat Daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Daerah. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Muara Muntai, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Muntai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Daerah;
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai selama kurun waktu tahun 2022-2025 cukup memuaskan. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

a. cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan;
b. rata-rata kinerja kecamatan;
c. cakupan lembaga masyarakat yang aktif;
d. presentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
e. cakupan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik; dan
f. cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, sebagai berikut:

T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN MUARA MUNTAI

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			75	80	85	95	75	0	85	90	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	0	100	100	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Peningkatan kinerja dan tata kelola kecamatan			100	100	100	100	100	0	100	100	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. penyusunan Program dan kegiatan kecamatan.
2. pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
3. pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.`
6. pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Muntai dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
   a. kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
   b. belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Permasalahan Eksternal:
   a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
   b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
   c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
3. melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
4. melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat.
5. memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
6. melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

7. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.
8. potensi perkebunan kelapa sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT. JMS yang berlokasi di desa Muara Leka dan Desa Perian, potensi perikanan yaitu terdapatnya danau jantur dan danau melintang yang sebagian wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Muara Muntai.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

1. *Review* terhadap Rencana Kerja PD tahun 2024 berkaitan dengan Program dan kegiatan yangakan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025;
2. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, pada tahun anggaran 2025 *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran tabel berikut ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	25 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	8 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggaraka n	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	75.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	0 Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	4 Dokumen	35.000.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Laporan	5.723.906.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Laporan	7.045.906.956	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	468 OB	5.635.731.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	492 OB	6.935.731.014	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2025)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwula nan/semestera n SKPD	4 Laporan	73.175.942	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD	4 Laporan	85.175.942	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	28.256.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	30.256.100	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	28.256.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	30.256.100	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	8 Layanan	343.309. 974	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	8 Layanan	815.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
			Daerah Yang Tersedia					Tersedia			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	5 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	5 Jenis	15.000.000	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	55.000.000	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	50.000.000	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	20.809.974	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	100.000.000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	85.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	400.000.000	
			SKPD								

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	640.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	730.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	180.000.000	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	JumlahPengad aan Mebel	8 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	JumlahPengadaa n Mebel	8 Unit	150.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan	634.029.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 Bulan	638.529.904	
	Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan					Pemerintahan Daerah yang disediakan			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Materai	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Materai	7.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 OB	334.852.192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 OB	334.852.192	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	560.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	575.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	5 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	5 Unit	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Lapangan		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	100.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1 Unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Reha bilitasi	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	125.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	12.650.000.000	
			2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	88,5 Persen				2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	88,5 Persen		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	12.650.000.000	

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	1.550.000.000	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitasi HUT RI 3. Fasilitasi Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP) 8. FKUB 9. Stanting

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	11.100.000.000	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n Yang Aktif	95 Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	830.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	830.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	55.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan	775.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggara an Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	285.520.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	570.520.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	285.520.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	570.520.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	1 Kegiatan	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	306.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	200.520.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	214.520.000	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	2 Kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Renstra Kecamatan Muara Muntai tahun 2022-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Muara Muntai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Muara Muntai dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berikut ini usulan Program dan kegiatan hasil Musyawarah Musrenbang Prioritas I, Prioritas II serta rencana pembangunan yang pembiayaan di lakukan melalui CSR yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2025 di Kecamatan Muara Muntai:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kecamatan Muara Muntai

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2315022	Belum Ada Jaringan Pipa Air PDAM Dari Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Ke Paundana RT. 09 dan RT. 10 Desa Kayu Batu	Puandana RT. 09 dan RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 1984753	Masih Kurangnya Bak Penampungan Air Besih Yang Ada Di Desa Muara Aloh	Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	215.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2128198	Banyak yang belum tersedianya tandon warga	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	215.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Muntai)								
1	ARIFADIN NUR Muara Muntai Ilir	ID SIPD: 2016272	Kondisi pinggiran sungai yang sudah abrasi - banyak rumah yang longsor di pinggir jalan - mengurangi luas lingkungan wilayah pinggir sungai - dikhawatirkan akan memakan badan jalan utama - berbahaya bagi warga masyarakat sekitar tkt terjadi longsoran yang mengakibatkan korban jiwa	jalan gajah mada RT 002 Muara Muntai Ilir , Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220466	Lanjutan Pembangunan Turap Oloy Kayu Batu	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2127841	Tidak Adanya Turap Mesjid yang sangat di Butuhkan Guna mencegah Longsor	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq Harapan	ID SIPD: 2007679	Untuk Membangun pemecah gelombang Desa	Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5	Danhar Jantur Baru	ID SIPD: 2311719	Lanjutan Pembangunan Turap Kubur	Jl. Kampung Baru RT. 09 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 1977112	Tiidak Adanya Tugu/Turap Penahan Gulma Di Danau Desa Muara Aloh	Muara Aloh Di Danau , Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2128074	Tidak adanya Turap Tiang Penahan Gulma/Napung	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq Harapan	ID SIPD: 2216072	Pembangunan turap untuk pemecah gelombang	TANJUNG BATUQ HARAPAN RT 001, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
							kepada Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 2058018	Penurapan Badan Jalan Menuju Kantor Desa	Desa Muara Aloh RT 06, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						dan Pelayanan Publik	Dilimpahkan kepada Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Muntai)								
1	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2209056	Akses Jalan Kurang Memadai untuk menuju Tempat Kubah Selimau.	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.001 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2222041	Normalisasi Luah Kayu Batu	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2209071	Pelebaran Halaman Kubah Selimau.	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2349177	Surutnya jalan akses menuju kubah selimau sehingga masyarakat sulit untuk menuju kubah selimau, sehingga mohon pendalaman alur sungai	JL.RAYA RT.001 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Muntai)								
1	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2200509	Dengan bertambahnya penduduk maka bertambah pula sampah yang dihasilkan, Desa Muara Leka mempunyai lahan untuk pembuangan sampah namun belum mempunyai bangunan penampungan sampah	Desa Muara Leka RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322251	Harap dibuatnya TPS karena masalah sampah merusak lingkungan di desa	Perian, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						dan Pelayanan Publik	Dilimpahkan kepada Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220337	Beberapa bagian jalan rusak dan terendam saat banjir. kondisi jembatan di jalan bahrudin rusak berat tidak bisa dilewati kendaraan dengan beban berat	Jl. Bahrudin Sebrang Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2318199	Jembatan yang sudah tua cenderung mengalami kerusakan struktural. risiko ambruk semakin tinggi. Jembatan yang digunakan untuk beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain dapat mempercepat kerusakan. Erosi di sekitar jembatan yang disebabkan oleh air sungai atau cuaca ekstrem bisa merusak pondasi atau struktur jembatan. Jika jembatan dibangun dengan bahan yang tidak berkualitas atau tidak sesuai standar, kemungkinan ambruk lebih tinggi.	Jalan K.H. Agus Salim RT. 001 (Lebar 6 Meter x Panjang 25 Meter), Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	ARIFADIN NUR Muara Muntai Ilir	ID SIPD: 2018037	Ukuran Jalan 532 x 4 M, membutuhkan Infrastruktur yang memadai, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. karena	Muara Muntai Ilir Seberang, dermaga dinas perhubungan, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			pada saat ini kondisi jalan membutuhkan perbaikan, keadaan jalan sudah tertutup dan tidak dapat di lalui. oleh karena itu kami pemdes muara muntai ilir mengajukan proposal bantuan pembukaan perbaikan jalan penghubung ke kabupaten.					
4	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2031333	Kondisi jalan yang tidak layak sehingga menghambat kegiatan transportasi dan perekonomian warga sekitar terutama kegiatan warga Dusun Leka 1 Rt 07 Jalur 2	desa Muara Leka Dusun Leka 1 RT 07 Jalur 2, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			sepanjang 70m dan lebar 4 meter					
5	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2016114	Desa rebaq rinding masih banyak yang belum di seminisasi untuk jalannya, sehingga masih sering terjadi kerusakan pada jembatan ulin yang sering di lalui, mohon kiranya agar segera diseminisasi untuk jalan di desa rebaq rindingt khususnya di 001 sampai rt 004	Jl. K.H Agus Salim RT.001-004, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2065624	Jalan yang semenisasinya tidak layak untuk di lewati banyak yang rusak gorong gorong yang ada ambruk dan menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir merupakan akses	Desa MUara Leka Rt 03 Jl. Pemuda dengan Ukuran 250m x 4 m, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			transportasi warga menuju ke kebun, TK PAUD, BPU, Mesjid, Dan Lapangan Sepak Bola					
7	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2016097	Desa rebaq rinding masih banyak yang belum di seminisasi untuk jalannya, sehingga masih sering terjadi kerusakan pada jembatan ulin yang sering di lalui, mohon kiranya agar segera diseminisasi untuk jalan di desa rebaq rindingt khususnya di RT 05	Jl. K.H Agus Salim RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220705	Pembangunan Badan Jalan Kayu Batu- Kuyung	Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2102898	Merupakan akses tranportasi, kegiatan perekonomian warga dan mengatasi apabila warga di lingkungan sekitar ada acara sehingga jalan bisa digunakan sebagai alternatif membuka jalan akses jalan lain baik itu warga rt 2 dan warga rt 03 karena apa bila ada acara biasanya jalan utama tertutup membuat warga sukar beraktifitas	Desa Muara Leka RT 02 Menuju RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
10	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2065718	Merupakan akses warga menuju pemakaman karena jalan rusak sehingga diperlukan Semenisasi jalan kuburan non muslim untuk mempermudah kegiatan pemakaman warga	Desa Muara Leka : Dusun Leka 1(Pemakaman Non Muslim), Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			non muslim di dusun leka 1 dengan volume 300 m x 4 m					
11	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2031595	Belum adanya badan jalan menuju akses air bersih sehingga warga susah untuk mengambil air bersih atau pun pemeliharaan air bersih jika ada kendala air bersih sumbat	Desa Muara Leka Dusun Leka 1 RT 07 (Air bersih Benturung), Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 2324676	Tidak Meratanya Kontur Tanah Di Halaman Kantor Desa, Maka Dari itu Diminta Pengerukan Supaya Menjadi Rata	Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
13	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322226	Perluntya disemenisasi jalan tani desa sepanjangn 4 x 100 meter dikarena jalan rusak dan tidak dapat dilalui ketika hujan	PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2221927	4 Jalan Jembatan luah kayu batu tidak bisa di lewati angkutan berat karena mengingat kondisi jalan jembatan tersebut sudah termakan usia dan tanah di samping jembatan sering longsong terkena hujan	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2046439	Semenisasi Jalan Jembatan Gerbang Dayaku masih belum selesai	Jl. Gerbang Dayaku RT. 002 s.d. RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq	ID SIPD: 2092497	Semenisasi Jalan Tanjung Batuq Harapan 6 x 50 Meter	Desa Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Harapan					dan Pelayanan Publik	Dilimpahkan kepada Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2198072	Perlunya rehabilitasi jalan	Jl. gerbang dayaku RT. 002 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2198208	Perlunya rehabilitasi jalan jembatan	Jl. gang Pepaya RT. 10 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2046155	Semenisasi di Gang Kedondong baru separuh sementara sisanya masih lantai papan	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 1956816	Jembatan yang sudah ada masih sempit dan papannya sudah banyak yang rusak	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 008 s.d. RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2044116	Selama ini jembatan masih menggunakan lantai papan yang mudah rusak dan lapuk, sementara jembatan yang ada terasa sempit	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 & RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2044575	Apabila jembatan masih menggunakan lantai papan akan dikhawatirkan cepat lapuk dan rusak	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 007 s.d. RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
10	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2045880	Semenisasi Gang Kuburan masih separuh, sisanya masih memakai lantai papan	Jl. Jend. A. Yani RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
								Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
11	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322845	Perbaikan jalan tani RT 1 berupa semenisasi 4 x 100 meter dikarenakan jalan rusak parah dan tidak dapat dilalui ketika hujan	Perian, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Rencana Kerja 2026 merupakan bagian dari pada penyelesaian permasalahan yang dihadapai, agar tujuan dan sasaran bisa tercapai dibawah ini disajikan rumusan tabel tujuan dan sasaran beserta permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

TUJUAN DAN SASARAN PD 2026

NO	URAIAN			
	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran
1	Belum optimalnya tertib administrasi di Kecamatan	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas		
2	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat		
3	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.		
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah		
4	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN		
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP		
5	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan		
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah		
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial		
6	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan		
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku		
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Muara Muntai tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Muara Muntai tahun 2022-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Muara Muntai pada tahun 2026.

Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, Kantor Camat Muara Muntai merencanakan beberapa Program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Muara Muntai maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Muara Muntai kepada masyarakat. Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan PD Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Muara Muntai sesuai tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				24.455.212.960				36.682.819.440
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Muntai	76 Nilai	10.289.692.960	APBD Kutai Kartanegara		76 Nilai	15.434.539.440
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	5 Dokumen	155.000.000	APBD Kutai Kartanegara		5 Dokumen	232.500.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	4 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	4 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Muara Muntai	25 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	25 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	11.250.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Muara Muntai	8 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	8 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Muara Muntai	8 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	8 Dokumen	11.250.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	75.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	4 Dokumen	112.500.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	4 Dokumen	35.000.000	APBD Kutai Kartanegara	-	4 Dokumen	52.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Muara Muntai	75 Laporan	7.045.906.956	APBD Kutai Kartanegara		75 Laporan	10.568.860.434
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Muara Muntai	492 OB	6.935.731.014	APBD Kutai Kartanegara	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2026)	492 OB	10.403.596.521
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	1 Laporan	25.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	1 Laporan	37.500.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	85.175.942	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	4 Laporan	127.763.913

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Muntai	1 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	Perlu anggaran dikarenakan perlunya untuk melakukan koordinasi dan konsultansi dalam rangka penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Muara Muntai	50 Dokumen	180.256.100	APBD Kutai Kartanegara		50 Dokumen	270.384.150
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Muara Muntai	0 Laporan	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Masih adanya aset yang belum selesai proses pengamanannya terutama aset tanah	0 Laporan	225.000.000
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Muara Muntai	25 Laporan	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	25 Laporan	45.384.150
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	11 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		11 Dokumen	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Muara Muntai	47 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kutai Kartanegara		47 Dokumen	300.000.000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Muntai	15 Stel	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara		15 Stel	300.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Peraturan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Peraturan	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Bimtek	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bimtek	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Muara Muntai	8 Layanan	765.000.000	APBD Kutai Kartanegara		8 Layanan	1.147.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	5 Jenis	15.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan	5 Jenis	22.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	6 Jenis	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	6 Jenis	82.500.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	6 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan	6 Jenis	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	Muara Muntai	25 Porsi	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	25 Porsi	150.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	5 Jenis	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	5 Jenis	15.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Muntai	5 Exemplar	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Exemplar	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Muara Muntai	5 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Jenis	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	15 Kali	85.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	15 Kali	127.500.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	45 Laporan	400.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	45 Laporan	600.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	150 Dokumen	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Dokumen	150.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Muara Muntai	15 Unit	730.000.000	APBD Kutai Kartanegara		15 Unit	1.095.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	1 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		1 Unit	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	0 Unit	180.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	0 Unit	270.000.000
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Muara Muntai	50 Unit	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Untuk kebutuhan Balai Pertemua Umum Kec Muara Muntai	50 Unit	225.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	8 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Untuk Kebutuhan Gedung Arsip, Pelayanan KTP dan Peralatan Penunjang Administrasi pada Seksi dan Bagian	8 Unit	300.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	2 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Unit	300.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Muara Muntai	12 Bulan	638.529.904	APBD Kutai Kartanegara		12 Bulan	957.794.856
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	1000 Materai	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1000 Materai	11.250.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	336 Rekening	296.177.712	APBD Kutai Kartanegara	0	336 Rekening	444.266.568
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	0 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Jenis	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	204 OB	334.852.192	APBD Kutai Kartanegara	0	204 OB	502.278.288
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Muara Muntai	2 Unit	575.000.000	APBD Kutai Kartanegara		2 Unit	862.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	13 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	untuk Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Jabatan R2 dan R4 serta perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan R2 dan R4	13 Unit	300.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	4 Unit	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	untuk Operasional dan Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional R2 dan Kendaraan Operasional air serta perpanjangan STNK Kendaraan Dinas operasional R2	4 Unit	225.000.000
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Pemeliharaan AC kantor, rumah dinas jabatan, Pendopo.	0 Unit	150.000.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	125.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Rehabilitasi Gedung Pendopo Kecamatan	0 Unit	187.500.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Muara Muntai	0 Bidang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bidang	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Muara Muntai	100 Persen	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	18.975.000.000
		2. Tingkat Aksesibilitas WIlayahKecamatan		88,5 Persen				88,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	10 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		10 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	25 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		25 Kali	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kali	-
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	36 Kegiatan	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		36 Kegiatan	18.975.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	7 Laporan	1.550.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitasi HUT RI 3. Fasilitasi Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)	7 Laporan	2.325.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	29 Kegiatan	11.100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.	29 Kegiatan	16.650.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Muara Muntai	95 Persen	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	1.245.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Muntai	20 Kegiatan	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		20 Kegiatan	1.245.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	150 Orang	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Orang	82.500.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	775.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	1.162.500.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	25 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		25 Persen	-
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Muara Muntai	10 SPM	-	APBD Kutai Kartanegara		10 SPM	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	75.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	75.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	75.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Muara Muntai	95 Persen	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	953.280.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Muara Muntai	13 Desa	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		13 Desa	953.280.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	65.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	0 Kegiatan	97.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	1 Kegiatan	306.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Kegiatan	459.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	2 Kegiatan	214.520.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK	2 Kegiatan	321.780.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	75.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan		APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Muara Muntai tahun 2022 - 2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Muara Muntai.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN LVIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah (Ranwal SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Awal Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja ini berpedoman pada sencana strategis (Renstra) Kantor Camat Kota Bangun Darat Tahun 2025-2029 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat serta disenergikan Program dan kegiatan PD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Kota Bangun Darat, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai satu bagian yang utuh dari manajeman kerja dilingkungan Pemerintah Daerah. Secara substansial Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan dengan indikator yang akan dijalankan, dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen Rencana Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.

a. Bahwa usulan Program / kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun / lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
b. Selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat kecamatan.
c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing PD yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

   Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Darat selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan.

2. Tujuan:

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Camat Kota Bangun Darat tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal PD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
BAB IV. PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026 memuat rencana Program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025 – 2030 dengan filosofi

“Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”,

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pokok Visi

“Maju Sejahtera Berkelanjutan”

Fokus

“Ekonomi, Tata Kelola, Infrastruktur, SDM dan Budaya, Lingkungan Hidup”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak

terhadap capain yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026 Kecamatan Kota Bangun Darat telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan RKPD tahun 2026, mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan Musrenbang Daerah.
b. Menyusun Renja-PD.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat ditunjang 6 (enam) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinai Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T – C.29.

REKAFITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAERAH s/d TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65		65		70		64		91	80		209		322
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10	Dokumen	30	Dokumen	300
7.01.01.2.01.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	5	Dokumen	250
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JumlahDokumenDPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	12	Dokumen	300
7.01.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	300
7.01.01.2.01.0007	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Data	1	Data	1	Data	1	Data	100	1	Data	3	Data	300
7.01.01.2.01.0011	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	1	Berita Acara	3	Berita Acara	300
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkanGaji dan Tunjangan	216	Orang	36	Orang/Bulan	36	Orang/Bulan	36	Orang/ Bulan	100	36	Orang/Bulan	108	Orang/ Bulan	300
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	1	LAPORAN	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	2	Dokumen	200
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	KeuanganAkhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD														
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JumlahLaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100		dokumen	2	dokumen	200
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JumlahBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	692	BMD	692	BMD	983	BMD	693	BMD	70	693	Unit	2078	Unit	300
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		dokumen	0	1	dokumen	2	dokumen	200
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	1	Laporan	5	Laporan		Laporan	0	1	Laporan	2	Laporan	200
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	JumlahlaporanBarang Milik Daerah pada SKPDyang direkonsiliasi	1	Dokumen	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	6	Laporan	300
7.01.01.2.03.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentasePemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	PERSEN	80	Persen	80	Persen	75	Persen	94	85	Persen	240	Persen	300

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JumlahPakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	41	Stel	0	Paket	5	Paket	5	Paket	100	5	Paket	10	Stel	#DIV/0!
7.01.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JumlahPegawai yang mendapatkanPendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Orang	10	Orang	15	Orang	15	Orang	100		Orang	25	Orang	250
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlahpeserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	Orang	11	Orang	8	Orang	73	6	Orang	16	Orang	800
7.01.01.2.05.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5	Layanan	5	Layan an	5	lembar	5	lembar	100	6	lemb ar	16	lembar	320
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Jenis	1	Paket	5	Paket	5	Paket	100		Paket	6	Paket	600
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor	Jumlah Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	Unit	1	Paket	2	Paket	2	Paket	100	1	Paket	4	Paket	400
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenisLogistik Kantor yang disediakan	10	Unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	450	Lembar	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300
7.01.01.2.06.0007	Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	200	kali	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	150	kali	100	Lapor an	100	Lapor an	100	Lapora n	100	12	Lapor an	212	Lapora n	212

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.06.0009	Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Lembar	100	Dokumen	100	Laporan	100	Laporan	100	1	Doku men	201	Dokum en	201
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang padaperangkat daerah	18	unit	42	unit	11	unit	11	unit	100	1	unit	54	unit	129
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	15	Unit	13	Unit	2	Unit	2	Unit	100	5	Unit	20	Unit	154
7.01.01.2.07.0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	0	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100	1	Paket	7	Paket	175
7.01.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya Yang Diadakan	0	Unit	21	Unit	3	Unit	3	Unit	100	1	Unit	25	Unit	119
7.01.01.2.08.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100	1	Unit	7	Unit	233
7.01.01.2.08.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	0	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	0	Unit	2	Unit	200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahwaktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	330	Lembar	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132	Reke ning	12	Laporan	12	Lapor an	12	Lapora n	100	12	Laporan	36	Laporan	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	12	Laporan	300
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	Orang/Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100		Laporan	24	Laporan	200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	Unit	24	Unit	32	Unit	32	Unit	100	27	Unit	83	Unit	346
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlahdan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100	16	Unit	48	Unit	300
7.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	Unit	5	Unit	12	Unit	12	Unit	100	11	Unit	28	Unit	560
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahGedungKantor dan Bangunan Lainnyayang dipemelihara/direhabilitasi	1	Unit	8	Unit	1	Unit	1	Unit	100	0	Unit	9	Unit	113
7.01.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasepelayanan perijinan dannon perijinan yang dilaksanakansesuai SOP	37	Persen	37	Persen	40	Persen	38	Persen	95	41	Persen	116	Persen	314
		Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	86	Persen	86	Persen	89	Persen	87	Persen	98	90	Persen	263	Persen	306
7.01.01.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi	10	Kegiatan	5	Kegiatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100	2	Kegiatan	17	Kegiatan	340

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
		Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara Efektif														
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	2	Laporan	4	Laporan	400
7.01.01.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	Desa	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokum en	100	1	Doku men	3	Dokum en	300
7.01.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	0	Fasilitasi	5	Fasilitasi	1	Fasilitasi	1	Fasilitasi	100	1	Fasilitasi	7	Fasilitasi	140
7.01.02.2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di WilayahKecamatan	JumlahLaporanFasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	Kegia tan	1	Laporan	1	Lapor an	1	Laporan	100	0	Laporan	2	Laporan	200
7.01.02.2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	300
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Jumlahpelaksanaankegiatan pemerintahan yang menjadi kewenanganKecamatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegia tan	2	Kegiata n	100	2	Kegia tan	6	Kegiata n	300

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan	5	Kegiatan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	300
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait denganKewenanganLain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	87	Kegiatan	214	Laporan	112	Laporan	112	Laporan	100	140	Laporan	466	Lapora n	218
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahanyang Aktif	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	100	PERS EN	300	PERSEN	300
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan	10	kali	10	kali	2	Layanan	2	Layanan	100	14	kali	26	kali	260
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamForum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JumlahLembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalamForum	100	Orang	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	100	7	Lembaga	21	Lembaga	300
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JumlahLaporanPeningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	4	Lapor an	3	Lapor an	5	Laporan	5	Laporan	100	2	Laporan	10	Laporan	333
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100	5	Lembaga Kemasyarakatan	15	Lembaga Kemasyarakatan	300
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100	5	Lembaga Kemasyarakatan	15	Lembaga Kemasyarakatan	300

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	100	Persentase	300	Persentase	300
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1	Kegiatan	3	Kegiatan	300
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	6	Laporan	300
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	300	persen	300
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	100	1	Kegiatan	29	Kegiatan	207
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan AntarsukudanIntrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan KerukunanAntar Sukudan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	0	orang	85	orang	85	orang	85	orang	100	80	orang	250	orang	294

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan(2025)		
							Target Renja PDTahun (2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=10/5*100
	KeamananLokal, Regional, dan nasional	KeamananLokal, Regional, dan Nasional														
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan TugasForum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	JumlahDokumenTugasForum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Kegia tan	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokum en	100	0	Doku men	2	Dokum en	200
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	36	persen	36	persen	60	persen	60	persen	100	0	persen	96	persen	267
7.01.04.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	10	Desa	10	Desa	10	Desa	100	0	Desa	20	Desa	200
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Desa	1	Dokumen	1	Doku men	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Kota Bangun Darat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan srategis pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perijinan dan non-perijinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakt, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Kota Bangun Darat melakukan jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamata Kota Bangun Darat cukup memuaskan, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat , yaitu :

1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran;
2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik;
3. Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur;
4. Rata-rata nilai Kinerja SKP;
5. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja;
6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset;
7. Presentase Penurunan Temuan Audit;
8. Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan;
9. Tingkat Partisipasi Masyarakat
10. Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik;
11. Cakupan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan/Kelurahan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T – C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	9	7	11	8		13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			N/A	84	85	86	87	90,47	90,47	86	87	88	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	80	80	80	80	64.6	64.6	65	65	65	
3	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP			N/A	39	40	41	41	39.0	40.0	41	41	40	
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan			N/A	88	89	90	91	94.8	94.8	90	91	89	
4	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang melibatkan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal, serta tokoh agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			N/A	50	60	70	80	50	60	70	60	60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isi – Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak di manfaatkanakan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dalam pasal 224 menerangkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dan dalam pasal 225 camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Kota Bangun Darat 5 (lima) tahun ke depan antara pemerintahan lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan dan desa.
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa tentang kebijakan Pemerintah Daerah.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
    a. Kurangnya kualitas SDM aparatur pemerintah di kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
    b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan kurangnya kesadaran masyarakat menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen yang harus dimilikai oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan .
    c. Permasalahan status lahan didesa yang berstatus Kawasan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Budidaya Kehutanan (KBK) sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemegang ijin pengelolaan lahan KBK tersebut.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
   b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa.
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
   c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
   b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan masyarakat desa.
   e. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa.
5. Seksi Pelayanan Umum
   a. Kurangnya kualitas/ kualifikasi ASN yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
   b. Masih rendahnya penguasaan teknologi.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas da fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Melaporkan kepada pihak Dinsa Komunikasi dan Informasi untuk dapat memperbaiki jaringan internet dan menganggarkan wifi kecamatan Kota Bangun Darat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
4. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang memang harus dimiliki warga masyarakat.
5. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronasi rencana kegiatan pemerintah desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
6. Mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan aparatur
7. Menganggarkan sarana prasarana, termaksud pemasangan wifi.
8. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa tetang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan uang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarkat yang termaksud dalm lahan KBK agar dapat dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

Dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B- 1383/065.11/BAPP/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijabarkan Permasalah Pokok dan Isu Strategis RKPD Tahun 2026 Kab Kutai Kartanegara :

PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi
Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal
Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata dan kesejahteraan yang berkeadilan	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera
Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya
Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun prioritas, fokus dan PD pelaksana tahun 2026 pada Lampiran IV Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara sebagai Berikut :

No	Prioritas	Fokus	OPD Pelaksana
1	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;	Penyediaan SDM Tenaga Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DP2KB, DPMD
2	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD- SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perustakaan
3	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan;	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilyah berbasis pendampingan dan kemitraan.	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan DPMD; Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Diskop-UKM.
4	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;	Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.	Sekretariat Daerah; Inspektorat; BKPSDM; Seluruh OPD Teknis Pelaksana Program Prioritas.
5	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan/non perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.	DPMPTSP; Diskominfo; Kecamatan; Setda (Bag. Pemerintahan)
6	Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini;	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekraf
7	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa.	Inspektorat; DPMD; Dinas PU; Dinas Perkim; DLHK; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kecamatan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2026 berkaitan dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2026 Rencana Kerja berdasarkan renstra dapat disampaikan sebagai lampiran/tabel berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC - 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kecamatan Kota Bangun Darat

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN					15.357.167.046	UNSUR KEWILAYAHAN					29.953.825.648	
	KECAMATAN					15.357.167.046	KECAMATAN					29.953.825.648	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kota Bangun Darat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	4.399.609.046	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kota Bangun Darat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	5.832.475.648	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	275.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	570.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	140.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	70.000.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Bangun Darat						Bangun Darat					
1.1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	200.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25	Laporan	3.240.109.046	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25	Laporan	3.792.475.648	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/bulan	3.139.389.046	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/bulan	3.592.475.648	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	90.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	175.000.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	37	Laporan	48.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	37	Laporan	225.000.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	25.000.000	
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	15.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	150.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	28.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	50.000.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	31	Laporan	210.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	31	Laporan	510.000.000	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	25.000.000	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.000.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000	
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	50.000.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Unit	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Unit	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	-	
1.5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	25.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	25	Laporan	310.550.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	25	Laporan	305.000.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	309.550.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Unit	200.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Unit	430.000.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	51.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	100.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kecamatan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	13	Unit	119.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kecamatan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	13	Unit	180.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangun Darat	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangun Darat	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	150.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kota Bangun Darat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	10.026.558.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kota Bangun Darat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	23.110.350.000	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Laporan	400.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Laporan	400.000.000	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan	2	Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan	2	Laporan	100.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Bangun Darat	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Bangun Darat	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100.000.000	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	9.526.558.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	22.610.350.000	
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Laporan	962.478.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Laporan	935.350.000	
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13	Laporan	8.564.080.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13	Laporan	21.675.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kota Bangun Darat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	400.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kota Bangun Darat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	486.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Laporan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Laporan	100.000.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.000.000	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Laporan	300.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Laporan	386.000.000	
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	386.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	100	Persen	261.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	100	Persen	225.000.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	261.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	225.000.000	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12	Laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Kecamatan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12	Laporan	50.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bangun Darat	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bangun Darat	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	211.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	175.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Peyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	100	Persen	195.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Peyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	100	Persen	225.000.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Kegiatan	195.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Kegiatan	225.000.000	
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	180.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	200.000.000	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	Dokumen	25.000.000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kota Bangun Darat	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	75.000.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	Laporan	75.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	Laporan	75.000.000	
6.1.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	Laporan	75.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	Laporan	75.000.000	
						15.357.167.046						29.953.825.648	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari Musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.
2. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di desa setempat.
3. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari Pemerintah Daerah
4. Prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten atau APBD propinsi.
5. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di desanya di forum Musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 14 (empat belas) desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026.

Tabel TC – 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KECAMATAN				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kota Bangun Darat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		
	Sub Kegiatan :				
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	112 Laporan	
1	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II Sarinadi	Semenisasi Parit Desa Kota Bangun II dan Desa Wonosari	2 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
2	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	PEMBANGUNAN PARIT MTS AL'MAARIF KOTA BANGUN	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
3	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II Kota Bangun III	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat
4	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kota Bangun II	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
5	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Semenisasi jalan wonosari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
6	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Semenisasi jalan wonosari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
7	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Semenisasi jalan wonosari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
8	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Semenisasi jalan wonosari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
9	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Peningkatan Jalan Betet	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Peningkatan Jalan Raja Wali	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
11	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Semenisasi Jalan Gang Baru	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
12	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 001	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
13	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Pengerasan Jalan Gang Iklas RT 002	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
14	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 001	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
15	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
16	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
17	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
18	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
19	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
20	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
21	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
22	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
23	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
24	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
25	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
26	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Sumbersari	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
27	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Kedang Ipil	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
28	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Kedang Ipil	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
29	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Kedang Ipil	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
30	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Kedang Ipil	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
31	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Suka Bumi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
32	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Benua Baru	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
33	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa Kota Bangun II	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
34	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 007	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
35	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 002	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
36	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kecamatan	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT 008	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
37	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Wono Sari	Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
38	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
39	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
40	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
41	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
42	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
43	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
44	Bantuan Sarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Kota Bangun II	Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
45	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
46	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pengadaan POS Keamanan Limnas	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
47	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
48	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
49	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
50	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
51	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
52	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
53	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
54	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
55	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
56	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
57	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Pembuatan Gorong-Gorong desa sarinadi	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
58	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA)	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
59	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
60	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
61	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
62	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
63	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
64	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
65	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
66	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
67	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
68	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
69	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
70	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
71	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
72	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
73	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
74	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
75	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun I	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
76	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun I	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
77	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
78	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
79	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
80	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
81	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
82	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
83	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Wono Sari	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
84	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
85	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
86	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sarinadi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
87	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
88	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
89	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
90	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
91	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
92	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
93	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
94	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
95	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
96	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
97	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
98	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
99	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
100	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
101	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
102	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
103	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Suka Bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
104	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
105	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
106	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
107	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
108	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
109	Peningkaran sarana prasarana kewilayahan dikecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
110	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan	Kecamatan	Pembangunan Gedung Karang Taruna	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
111	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan	Kecamatan	Pembangunan Gedung LPM	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat
112	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan	Kecamatan	Pembangunan Gedung PKK	1 Paket	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya pembangunan yang dilakukan di Daerah adalah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Sehingga ketika daerah menyusun dokumen RPJMD harus selaras dengan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan evaluasi pembangunan selama lima tahun sebelumnya. Adapun target makro Daerah tahun 2025-2026 berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : B-1383/065.11/BAPP/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, yaitu:

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target 2025*	Target 2026*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,57	76,85	77,12
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,28	6,95	6,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,11	4,01	3,94
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,52*	5,4-5,8	5,7-6,0
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	270,72	304.07*	320.80	337.53
6	Indeks Gini	0,284	0.278	0.276	0.274
7	Tingkat Inflasi (sister city Samarinda)	3,37	1,50“”	2.12	1.90

Pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Daerah, maka misi pembangunan Daerah tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan kebijakan, sera Program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi Program tahunan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan Program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2030 setiap tahun dijabarkan kedalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas Program dan kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Daerah dari tingkat desa, kecamatan hingga Daerah.

Kecamatan Kota Bangun Darat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan selaras dengan Misi 3 (ketiga) RPJMD tahun 2025-2030, yaitu : “Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara “. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Untuk menjalankan misinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 mededikasikannya dengan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik :

NO	PROGRAM DEDIKASI	MISI
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;	*Misi#1. Terbaik* dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik	
4	Program Etam Sejahtera	
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera	Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif
6	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	
10	Program Pelayanan Publik Cerdas	*Misi#3.* Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
11	Program ASN Kukar Terbaik	
12	Program RT Ku-Terbaik	Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
16	Program Internet Desa Gratis.	
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renja-PD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang maka, berikut tujuan dan sasaran beserta indikator dalam pembangunan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Kota Bangun Darat

Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
		Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Kantor Camat Kota Bangun Darat tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Kota Bangun Darat pada tahun 2026. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis, Kantor Camat Kota Bangun Darat merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Kota Bangun Darat maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Kota Bangun Darat kepada masyarakat.

Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Kota Bangun Darat sesuai tabel berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC – 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN				15.357.167.046				29.953.825.648
	KECAMATAN				15.357.167.046				29.953.825.648
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	62 Nilai	4.399.609.046	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		62 Nilai	5.832.475.648
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Laporan	275.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	570.000.000
7.01.01.2.01.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	140.000.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	4 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	70.000.000
7.01.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	60.000.000
7.01.01.2.01.0007	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Kota Bangun Darat	200 Data	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		200 Data	300.000.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kecamatan Kota Bangun Darat	25 Laporan	3.240.109.046	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Laporan	3.792.475.648
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kota Bangun Darat	19 Orang/ bulan	3.139.389.046	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		19 Orang/bulan	3.592.475.648
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Laporan	90.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	175.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kecamatan Kota Bangun Darat	37 Laporan	48.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		37 Laporan	225.000.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	150.000.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Laporan	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	50.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
7.01.01.2.05.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kecamatan Kota Bangun Darat	31	Laporan	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		31	Laporan	510.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2	Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Paket	25.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Paket	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Paket	75.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2	Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	10.000.000
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	300.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	4	Unit	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	Unit	-
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Unit	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Unit	-
7.01.01.2.08.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	4	Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	Unit	-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	25 Laporan	310.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Laporan	305.000.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Laporan	309.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	300.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	4 Unit	200.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Unit	430.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kota Bangun Darat	13 Unit	51.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13 Unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kota Bangun Darat	13 Unit	119.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13 Unit	180.000.000
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kota Bangun Darat	15 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Unit	150.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kecamatan Kota Bangun Darat	100 Persen	10.026.558.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Persen	23.110.350.000
7.01.01.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	3 Laporan	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Laporan	400.000.000
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	150.000.000
7.01.01.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	250.000.000
7.01.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Kegiatan	9.526.558.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Kegiatan	22.610.350.000

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kota Bangun Darat	4	Laporan	962.478.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	Laporan	935.350.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Kota Bangun Darat	13	Laporan	8.564.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Laporan	21.675.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kecamatan Kota Bangun Darat	100	Persen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100	Persen	486.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	100.000.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	3	Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	Lembaga Kemasyara-katan	50.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2	Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Laporan	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Laporan	386.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kota Bangun Darat	5	Lembaga Kemasyara -katan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5	Lembaga Kemasyara-katan	386.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota Bangun Darat	100 Persen	261.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Persen	225.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	261.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	225.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	12 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Laporan	211.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	175.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kecamatan Kota Bangun Darat	100 Persen	195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Persen	225.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	2 Kegiatan	195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Kegiatan	225.000.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	50 Orang	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	200.000.000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kota Bangun Darat	3	Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	25.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	100	Persen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Persen	75.000.000
7.01.04.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	75.000.000
7.01.06.2.01.0003	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kota Bangun Darat	12	Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	75.000.000
						15.357.167.046				29.953.825.648

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh kecamatan, penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Kota Bangun Darat.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN LIX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Kecamatan Samboja Barat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Muntai. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis

yang tercermin dari: a) evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja; d) rumusan tujuan, strategi dan kebijakan Pembangunan; e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana; f) rumusan dan prioritas Program dan kegiatan berbasis kinerja; g) tolok ukur dan target kinerja capaian Program dan kegiatan; h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui: a) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah; c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; e) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas Program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang kecamatan dan Daerah termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan *top down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan

Daerah juga tujuan *global MDGs*. Pendekatan ini tercermin pada: a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan Daerah; b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Samboja Barat, konsisten dengan dokumen RTRW Daerah; c) penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui Musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum PD. Pada penyusunan Rencana Kerja 2026 ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Samboja Barat;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan Program/kegiatan Kecamatan Samboja Barat.

1.3.2 Tujuan

1. Menyinkronkan dan menyinergikan Program dan kegiatan Kecamatan Samboja Barat Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD tahun 2025;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Samboja Barat dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 sistematika penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencan Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 *Review* Terhadap Rencana Awal PD dan Renstra PD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
4.1 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN LALU

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Samboja Barat adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun Program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan oleh Kecamatan Samboja Barat adalah pengkuruan dalam bentuk indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja Kecamatan Samboja Barat secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun capaian atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		75	75	75	75
		Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen		80	80	80	80
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai		100	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen		100	75	75	75

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Kecamatan Samboja Barat tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran perlu di seduaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Anggaran dapat di relisasikan sesuai dengan target. dan diperlukan komitmen pimpinan dalam mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan dan bersama-sama dengan seksi yang lain.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Kecamatan Samboja Barat baru menyusun rencana kerja per September 2024 sehingga belum ada realisasi kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC- 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

KODE					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	0	0	0	0,0%	75	75	100%
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0,0%	100	100	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
					Vertikal Terkait										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	0	150	21	14%	150	255	170%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Berkas	0	0	0	0	0%	0	0	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Berkas	1	0	1	1	100%	1	2	200%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	0	72,7	72,7	100%	72,7	72,7	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	0	80	70	87,50%	80	150	187,5%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan	1	0	1	1	18,57%	1	1	110,00%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	159	0	159	159	100%	159	318	200%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	132	0	132	132	100%	132	264	200%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	470	0	467	448	100%	410	858	182%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Orang	132	0	132	132	100%	132	264	200%
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	1	3	203	3	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	264	0	264	264	100%	264	528	200%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	0	0	N/A	0	0%	0	0	0%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	0	83,33	0	0%	0%	0	0%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	0	11	0	0%	11	0	0%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	0	80	0	0%	65	65	84,41%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	0	4	4	100%	3	7	233%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	0	2	2	100%	1	3	300%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	0	2	2	100%	2	4	200%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	21	0	21			21		
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	70	70	70	70	100%	70	140	200%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	0	1	0	0%	1	1	100%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	laporan	20	0	20	20	100%	20	40	200%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	20	0	20	6	300%	20	26	130%
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel/Unit	70	0	70	70	100%	70	140	200%

BerAKHLAK banggo melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	20	0	20	0	0%	20	20	100%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	68	0	68	68	100%	68	136	200%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	3769	0	3769	3769	100%	3769	7438	200%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	141	0	141	141	100%	141	282	200%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	1737	0	1737	1737	100%	1737	3474	200%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	230	0	230	230	100%	230	460	200%
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	96	0	96	96	100%	96	192	200%
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	0	2	2	100%	2	4	200%
X	XX	01.	2,07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	0	1	1	100%	1	2	200%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	150	0	150	100	67%	100	200	133%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	0	4	4	75%	4	8	135%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	0	4	4	100%	4	4	100%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi bidang perizinan dan non-perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Samboja Barat, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Samboja Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Daerah;
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja Barat selama kurun waktu tahun 2022-2025 cukup memuaskan. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

a. cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan;
b. rata-rata kinerja kecamatan;
c. cakupan lembaga masyarakat yang aktif;
d. presentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
e. cakupan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik; dan
f. cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat, sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	75	75	75	75	0	0	75	75	Untuk Tahun 2025 masih berjalan
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0	80	80	80	80	0	0	80	80	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	100	100	100	100	0	0	100	100	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			0	75	75	75	75	0	0	75	75	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Samboja Barat dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, aset pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya anggaran pembangunan skala kecil kecamatan;
d. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Samboja Barat secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-eL;
- Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai, dan tidak terdata sebagai penduduk setempat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu menyampaikan akan pentingnya hal tersebut, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga sudah mempunyai KK dan KTP Elektronik.

Pembinaan perangkat memiliki permasalahan:

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- Sistim administrasi Kependudukan dan urusan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemerintahan belum tercapai dengan baik sehingga perlu adanya pembenahan pada teknis data penduduk.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di kecamatan;
2. Anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi belum maksimal penganggarannya;

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

a. masih banyak kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehinggamenimbulkan konflik.
b. banyaknya tanah yang masuk wilayah Tahura, tanah milik perusahaan, sehingga masyarakat banyak menuntut atas tanah tersebut untuk di buatkan surat atas tanah tersebut.
c. banyak masyarakat yang memiliki SKPT bukan penduduk setempat sehingga bilamana ada pembuatan surat atas tanah yang berbatasan dengan warga tersebut akan menjadi kendala dalam proses pembuatan surat tanah.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan.

Permasalahan :

a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
b. Minimnya sosialisasi dari *Stakeholder* yang membidangi baik dari pemerintah maupundari lembaga lain;
c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan dengan *stakeholder* atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada di wilayah Kecamatan Samboja Barat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
c. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi di Kecamatan Samboja Barat.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Meningkatkan peran serta lembaga dengan organisasi kepemudaan di Samboja Barat agar lebih maksimal agar lebih baik kedepannya.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
b. Masih tingginya penggunaan minuman keras dan narkotika dan obat terlarang;

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan perlindungan masyarakat dan koordinasi satuan tugas yang lain, untuk meningkatkan SDM agar memahami tentang hak dan kewajiban dan dapat melindungi masyarakat.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Samboja Barat adalah perbandingan antara Program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan PD atau adanya program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi PD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel TC. 31 dibawah ini :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel TC.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Samboja Barat

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kecamatan Samboja Barat				56,321,705,974					59,384,886,465	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	63 Nilai	27,654,579,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	63 Nilai	20,037,615,715	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	4 Dokumen	605,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	4 Dokumen	340,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	140,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	70,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	300,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Samboja Barat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan	19,578,789,696	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan	15,610,670,715	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Samboja Barat	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	73 Orang/Bulan	18,998,789,696	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Samboja Barat	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	73 Orang/Bulan	15,135,670,715	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi yang di Laksanakan	0	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi yang di Laksanakan	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	475,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	450,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 Unit	330,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 Unit	180,600,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	150,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	0	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	105,600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	105,600,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	20 Orang	422,494,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	20 Orang	50,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	4 Paket	272,494,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	7 Jenis	2,569,181,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	7 Jenis	1,129,629,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	48,497,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	48,497,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	480,422,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	122,455,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	183,097,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 Unit	36,640,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang di Sediakan	12 paket	372,442,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang di Sediakan	16 paket	416,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	311,563,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	141,037,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290 Laporan	1,118,160,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	345,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	2 Dokumen	55,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	2 Dokumen	20,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				930,808,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				384,000,000	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	180,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	204,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	204,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan peralatan mesin yang dilaksanakan	26 Unit	546,808,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan peralatan mesin yang dilaksanakan	-	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bukan	2,204,438,597	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bukan	1,697,188,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	46,449,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	6,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	776,598,777	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	750,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,381,390,820	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	940,688,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	35 Unit	1,013,268,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	35 Unit	645,528,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	467,740,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	85,128,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	85,128,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	310,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	310,400,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	4,664,126,681	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	11,870,750	
			2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	79 Persen				2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	79 Persen		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				750,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				500,000,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Samboja Barat	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	200,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Samboja Barat	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	200,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	2 Dokumen	550,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	2 Dokumen	300,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan rusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	10,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan rusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	10,000,000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	3,904,126,681	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	15,901,870,750	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	917,870,750	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	917,870,750	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	2,986,255,931	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84 Laporan	14,984,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	23,328,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	22,540,400,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	2 Kegiatan	210,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	2 Kegiatan	210,000,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Samboja Barat		0	-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Samboja Barat		0	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	185,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	185,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Kegiatan	7,015,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Kegiatan	7,015,000,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga	155,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga	155,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	4,050,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	4,050,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Pokmas/ Ormas	2,700,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas/Ormas	2,700,000,000	
	Evaluasi Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	110,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	110,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	16,103,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	15,315,400,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148 Lembaga Kemasyrakatan	15,053,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148 Lembaga Kemasyrakatan	14,565,400,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyrakatan	500,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyrakatan	200,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4 Unit	550,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4 Unit	550,000,000	
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN					PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN					
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Samboja Barat		0	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Samboja Barat		0	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec. Samboja Barat		0	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec. Samboja Barat		0	-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Samboja Barat		0	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Samboja Barat		0	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Samboja Barat		0	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Samboja Barat		0	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		175,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		125,000,000	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		175,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		125,000,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	175,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125,000,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)					
	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		270,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		500,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		270,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	500,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	270,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			0	-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			0	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			0	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			0	-	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat memberi ruang untuk mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui DPRD, LSM, akademisi, maupun lintas PD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat desa selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan Musrenbang, forum PD maupun Musrenbang Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan usulan dari hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samboja Barat maupun PD lain yang terkait, seperti yang tercermin pada Program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan Program kerja dari Kecamatan Samboja Barat tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan maupun pada tingkat Daerah yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Kecamatan Samboja Barat, disampikan dalam table TC.32 di bawah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TC. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

KECMATAN SAMBOJA BARAT

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
1	Lanjutan Pasangan Turap Batu Paret jl.Poros RT.01 kel.Amborawang Laut	P.300 M	250,000,000.00
2	Rehab dan Peningkatan Gapura batas kelurahan Amborawang laut-Salok Api laut RT.01	1 Paket	150,000,000.00
3	Pengadaan Lampu jalan RT.01 Kelurahan Amborawang laut	15 Titik	100,000,000.00
4	Lanjutan pembuatan jembatan Dermaga Kelompok Nelayan Sinar Bahari RT.01 Kel.Amborawang laut	P.50 M	250,000,000.00
5	Pembuatan Jembatan di Jalan Jumra 2 RT.01 Kel.amborawang Laut	4 paket (Kayu Ulin)	75,000,000.00
6	Lanjutan Semenisasi jalan jumrta 2 RT.01 kel. Amborawang laut	P.200 M	250,000,000.00
7	Lanjutan Semenisasi Jalan Jumra RT.01 Kel.Amborawang Laut	P.200 M	200,000,000.00
8	Lanjutan Pembuatan Turap Paret Jalan Jumra RT.01 Kel.Amborawang Laut	P.200 M	250,000,000.00
9	Lanjutan Normalisasi Sungai Alam Amborawang Laut RT.01 Kel.Amborawang Laut	2 KM	800,000,000.00
10	Pembuatan Turap Paret Pembuangan RT.01 Kel. Amborawang Laut	800 M	800,000,000.00
11	Normalisasi Paret Jalan Jumra RT.01 Kel.Amborawang Laut	700 M	200,000,000.00
12	Lanjutan Pasangan Batu Turap Jl.KH.Dewantara RT.02 kel.Amborawang laut	P.1000 M , L.0,5 M	800,000,000.00
13	Peningkatan GG.Taman Sari RT.02 Kel.Amborawang Laut	400 M	800,000,000.00
14	Peningkatan Jalan pariwisata RT.02 Kel.Amborawang laut	400 M	1,000,000,000.00
15	Rehab berat jembatan pariwisata RT.02 Kel.Amborawang laut	1 paket	700,000,000.00
16	Pembuatan Pagar BPU RT.02 Kel.Amborawang Laut	1 Paket	200,000,000.00
17	Peningkatan jalan KH. Dewantara RT.02 Kel.Amborawang Laut	P.500 M ,Lb.4,5 M	800,000,000.00
18	Normalisasi paret JL.Pondok putih RT.02 Kel.Amborawang laut	P.500 M	200,000,000.00
19	Lanjutan Pasangan Batu Paret Jalan KH.Dewantara RT.02 Kel. Amborwang Laut	P.60 M	100,000,000.00
20	Lanjutan Turap Jalan Perikanan RT.02 Kel.Amborawang Laut	400 M	400,000,000.00
	Pembuatan Pagar mesjid Ar-Raudah RT.02 Kel. Amborawang laut	1 paket	400,000,000.00
21	Semenisasi jalan patimura RT.03 Kel. Amborawang Laut	P.50 M, Lb.4 M, Tbl. 15 Cm	150,000,000.00
22	Peningkatan Jalan patimura gunung Panjang menuju Argosari RT.03 Kel.Amborawang laut	P.2000 M, L.5 M, Tbl.15 Cm	2,000,000,000.00
23	Pembuatan Turap Paret dan tanah uruk Jl.Patimura gunung Panjang RT.03 Kel.Amborawang laut	P.3000 M	1,000,000,000.00
24	Pembuatan Jembatan Beton kedua menuju kebun jalan Patimura RT.03 Kel. Amborawang Laut	P.5 M , L.4 M	120,000,000.00
25	Normalisasi Paret wilayah Jalan Patimura RT.03 kel. Amborawang laut	P.3000 M	800,000,000.00
26	Pembuatan jalan menuju kebun sayur jalan Patimura GG.Kliwon RT.03 Kel. Amborawang laut	P.1000 M ,	400,000,000.00
27	Pembuatan Jembatan Beton pertama menuju Kebun jalan Patimura RT.03 kel. Amborawang laut	P.4 M, L.5 M	120,000,000.00
28	Lanjutan Batu Paret JL.KH.Agus Salim ke Andi Sindrang RT.04 Kel.Amborawang laut	P.100 M	500,000,000.00
29	Pembuatan jembatan sungai Salok batu RT.04 Kel. Amborawang laut	P.10 M, L.6 M	100,000,000.00
30	Peningkatan jalandi Jl. H.Achmad RT.04 kel. Amborawang laut	P.250 M, L.6M	150,000,000.00
31	Peningkatan Badan jalan Amanah RT.04 Kel.Amborawang laut	P.150 M, L.4 M	100,000,000.00
32	Pembuatan paret RT.04 Kel. Amborawang laut	P.500 M, L.2 M	200,000,000.00
33	Pembuatan pagar Langgar Al-Hijrah RT.04 kel.Amborawang laut	P.25 M, L.25 M	150,000,000.00
34	Normalisasi Sungai Salok batu RT.04 Kel.Amborawang Laut	P.1000 M	100,000,000.00
35	Normalisasi Sungai salok Cempedak RT.04 Kel. Amborawang laut	P.700 M	90,000,000.00
36	Lanjutan Parit Batu jalan YOS SUDARSO RT.04	P.150 M	150,000,000.00
37	Peningkatan badan jalan Firdaus RT.04 Kel.Amborawang Laut	P.100 M	100,000,000.00
38	Turap batu jalan KH. Agus Salim RT.04 Kel. Amborawang laut	P.100 M	150,000,000.00
39	Turap Batu Jalan KABALLAH RT.04 Kel. amborawang laut	P.200 M	150,000,000.00
40	Peningkatan badan jalan Al-Aqsa RT.04 kel. Amborawang laut	P.150 M	100,000,000.00
41	Pembuatan jembatan Jalan Rawa indah RT.04 kel. Amborawang laut	P.4 M, L.5 M	100,000,000.00
42	Sarana dan prasarana hortikultura ESTAT RT.04 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	200,000,000.00
43	Semenisasi Gang Family RT.05nKel. Amborawang Laut	P.100 M	200,000,000.00
44	Pembangunan Pengerasan wilayah Jalan Sri Rejeki RT.05 Kel. Amborawang Laut	P.700 M	250,000,000.00
45	Lanjutan Semenisasi GG.Rahmat 3 RT.05 Kel. Amborawang Laut	P.90 M	100,000,000.00
46	Lanjutan Turap Pasangan batu Drainase saluran air RT.06 Kel. Amborawang laut	P.100 M	200,000,000.00
47	Semenisasi Jalan Pertanian 1 RT.06 Kel. Amborawang Laut	P.100 M	250,000,000.00
48	Normalisasi Paret kebun RT.06 Kel.Amborawang Laut	P.2 KM	300,000,000.00
49	Rehabilitasi Jembatan RT.06 Kel. Amborawang Laut	P.7 M, L.6 M, T.3 M	500,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
50	Turap Pasangan Batu paret RT.06 Kel. Amborawang laut	P.100 M	250,000,000.00
51	Pasangan Batu Paret Jl. Banyuwangi RT.07 Kel. Amborawang Laut	P.300 M	400,000,000.00
52	Perbaikan dan penambahan volume Jembatan 2 Jalan Pertanian 2 RT.07 Kel. Amborawang Laut	P.2,5 M, L.4 M	200,000,000.00
53	Pembuatan Jembatan RT.07 Kel. Amborawang Laut	P.5 M, L. 2 M	80,000,000.00
53	Peningkatan jalan Makam 2 RT.07 Kel. Amborawang Laut	P.200 M, L.4 M, Tbl.20 Cm	600,000,000.00
54	Turap Jalan Banyuwangi -Halima RT.07 Kel. Amborawang Laut	P.300 M, L.30 Cm,T.175 Cm	900,000,000.00
55	Lanjutan Turap Jalan Banyuwangi RT.07 Kel.Amborawang laut	P.200 M	300,000,000.00
56	Pembangunan Posyandu RT.07 Kel. Amborawang laut	Luas 84 M2, P.12 M, L.7 M	500,000,000.00
57	Pemasangan Batu Paret JL. Andi Sindrang RT.08 Kel.Amborawang Laut	P.300 M	400,000,000.00
58	Pemasangan Turap batu jalan Setia Kawan RT.08 Kel. Amborawang laut	P.700 M	600,000,000.00
58	Pembuatan Sumur Bor Posyandu Balita kembang Sepatu 4 dan TPA AR- RAHMAN RT.08 Kel.Amborawang Laut	1 Paket	200,000,000.00
59	Pemasangan Turap beton sungai Salok batu RT.08 Kel.Amborawang Laut	P.1000 M	200,000,000.00
60	Pembuatan Pintu Air JL.Lekuk Seribu RT.08 Kel.Amborawang Laut	P.12 M, L.5 M	150,000,000.00
61	Lanjutan Pemasangan Turap batu Jalan Pariwisata 2 Rt.08 Kel. Amborawang Laut	P.100 M	200,000,000.00
62	Lanjutan Pemasangan batu Paret JL.KH.Agus Salim RT.08 Kel.Amborawang Laut	P.300 M	200,000,000.00
63	Pemasangan Paret Batu Jalan Pariwisata RT.08 sampai RT.02 Kel.Amborawang Laut	P.700 M	400,000,000.00
64	Pembuatan Jembatan Nelayan Jalan Lekuk Seribu RT.08 Kel.Amborawang Laut	P.100 M, L. 2M	100,000,000.00
65	Lanjutan Semenisasi Jl.Perkebunan 1 RT.08 Kel.AmborawangLaut	P.200 M	200,000,000.00
66	Lanjutan Semenisasi JL.Perkebunan 2 RT.08 Kel. Amborawang Laut	P.100 M	250,000,000.00
67	Lanjutan Semenisasi jalan Pariwisata RT.08 Kel. Amborawang laut	P.500 M	300,000,000.00
68	Lanjutan Pemasangan batu paret jalan perkebunan RT.08 Amborawang laut	P. 100 M	100,000,000.00
69	Peningkatan badan jalan Gang Simpang tujuh RT.08 Kel. Amborawang laut	P.300 M	150,000,000.00
70	Peningkatan badan jalan Lekuk Seribu RT.08 Kel. Amborawang laut	P.700 M	200,000,000.00
71	Peningkatan badan jalan gang Persatuan RT.08 Kel. amborawang laut	P.100 M	100,000,000.00
72	Lanjutan Pemasangan pagar Kuburan muslim Jalan Andi Sindrang RT.08 Kel. Amborawang laut	P.500 M	400,000,000.00
73	Lanjutan Semenisasi Jl. Setia Kawan RT.08 kel. Amborawang laut	P.500 M	250,000,000.00
74	Peningkatan badan jalan Kuburan Muslim RT.08 Kel. Amborawang Laut	P.100 M	200,000,000.00
75	Lanjutan Semenisasi Jl.KH. Agus Salim RT.08 Kel. Amborawang laut	P. 1500 M	400,000,000.00
76	Pembuatan lapngan bola Mini Soccer jalan Perkebunan RT.08 Kel. Amborawang laut	P.40 M, L.20 M	200,000,000.00
	POSYANDU		
1	Pengadaan Laptop dan Printer Posyandu Kembang Sepatu 1 RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	35,000,000.00
2	Pengadaan laptop dan printer Posyandu kembang Sepatu 2 RT. 07 Kel. Amborawang Laut	1 paket	35,000,000.00
3	Pengadaaan Sarana dan Prasarana berupa laptop,Printer, dan Kipas Angin Posyandu Kembang sepatu 3 RT.03 Kel. Amborawang laut	1 paket	40,000,000.00
4	Pengadaan Laptop dan Printer Posyandu Kembang Sepatu 4 di RT.08 Kel. Amborawang laut	1 paket	35,000,000.00
5	Pembuatan Lahan Parkir Posyandu Lansia Kaka Tua RT.06 Kel. Amborawang Laut	P.10 M , L. 5 M	50,000,000.00
6	Pengadaan Laptop dan Printer Posyandu Lansia kaka Tua RT.06 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	35,000,000.00
7	Pengadaan Laptop dan Printer Posbindu Kaka Tua RT.06 Kel. Amborawang laut	1 Paket	35,000,000.00
	PKK		
1	Pengadaan Laptop dan printer PKK RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 paket	35,000,000.00
2	Pengadaan Pakaian Miskat PKK RT.02 Kel. Amborawang Laut	20 Pcs	10,000,000.00
3	Pengadaan Tandon beserta tempatnya di sekretariat RT.02 PKK Kel. Amborawang laut	1 Unit	15,000,000.00
4	Pemasangan Kilometer Listrik di Sekretariat PKK RT.02 Kel. Amborawang laut	1 Unit	5,000,000.00
5	Pemasangan Air PDAM Sekretariat PKK di RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 Unit	3,000,000.00
6	Perbaikan Flapon Sekretariat PKK di RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	20,000,000.00
	LEMBAGA ADAT		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
1	Pengadaan Sound Sistem dan Peralatan Kesenian Lembaga Adat RT.02 Kel Amborawang Laut	1 Paket	40,000,000.00
	POKDARWIS		
1	Pengadaan Sound Sistem dan peralatan Kesenian POKDARWIS KARYA AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	36,800,000.00
2	Pengadaan Peralatan Kerajinan POKDARWIS KARYA AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 paket	11,200,000.00
3	Pengadaan Tenda Sarnafil POKDARWIS KARYA AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 paket	102,000,000.00
4	Pengadaan Tenda Tarup dan Tenda Panggung POKDARWIS KARYA AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 paket	99,200,000.00
5	Pengadaan Mobil Pick Up Angkutan sampah RT.08 Kel. Amborawang laut	1 Paket	190,700,000.00
6	Pembuatan Gerbang Jalan masuk Pantai Pantai Ambalat RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 paket	131,650,000.00
7	Pengadaan kapal Wisata Pantai AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 Unit	95,000,000.00
8	Pembuatan Menara Pengawas pantai AMBALAT RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 Unit	225,000,000.00
9	Pembuatan Jembatan Mangrove Pantai Ambalat RT.08 Kel . Amborawang laut	1 Paket	223,000,000.00
10	Pembuatan Turap Pantai AMBALAT RT.08 Kel .Amborawang Laut	1 Paket	1,142,500,000.00
11	Semenisasi Jalan Pantai Ambalat RT.08 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	109,500,000.00
	TK MELATI 2		
1	Rehab total ruang kantor TK. Melati 2 RT.2 Kel. Amborawang laut	P.4.M , L.6 M	60,000,000.00
2	Pembangunan Ruang kelas (RKB) TK. Melati 2 Kel. Amborawang Laut	P.4.M , L.6 M	200,000,000.00
3	Pembangunan Ruang guruTK. Melati 2 Kel. Amborawang laut	P.4.M , L.6 M	200,000,000.00
4	Pengadaan APE luar ruangan TK. Melati 2 Kel. Amborawang Laut	5 unit	20,000,000.00
5	Rehab ruangan kelas dengan tingkat kerusakan sedang TK. Melati 2 RT.02 Kel. Amborawang Laut	P.6 M, L. 8 M	10,000,000.00
6	Pembangunan Ruang UKS TK.Melati 2 RT.02 Kel. Amborawang Laut	P.4 M , L.4 M	150,000,000.00
7	Pengadaan Laptop dan printer TK. Melati 2 RT.02 Kel. Amborawang Laut	2 Unit	11,000,000.00
	SD N. 016		
1	Pembangunan Ruang Kelas SD N. 016 RT.02 Kel. Amborawang Laut	P.7 M, L. 8 M	182,000,000.00
2	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD N. 016 RT.02 Kel. Amborawang Laut	P.6 M, L.6 M	126,000,000.00
3	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N. 016 RT.02 Kel. Amborawang laut	P.8 M, L. 8 M	208,000,000.00
	KARANG TARUNA		
1	Pelatihan Dokumenter dan Multimedia Karang taruna PUTERA AMBALAT RT.02 Kel. Amborawang laut	1 paket	100,000,000.00
2	Pelatihan dan Peralatan Sablon Karang Taruna PUTERA AMBALAT RT.02 Kel.Amborawang laut	1 paket	100,000,000.00
3	Pelatihan BARISTA dan peralatan nya Karang Taruna PUTERA AMBALAT RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 Paket	100,000,000.00
4	Peralatan alat ukir untuk Souvenir Karang Taruna PUTERA AMBALAT RT.02 Kel. Amborawang laut	1 Paket	100,000,000.00
5	Pelatihan dan Perlengkapan alat Desain Grafis karang Taruna PUTERA AMBALAT RT.02 Kel. Amborawang Laut	1 paket	100,000,000.00
6	Pengadaan rumput sintetis untuk lapangan futsal RT.08 Kel.Amborawang Laut	1 Paket	100,000,000.00
	GAPOKTAN		
1	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT.07 Kel. Amborawang Laut	10 KM	400,000,000.00
2	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT.07 Kel.Amborawang Laut	10 KM	400,000,000.00
KELURAHAN AMBORAWANG DARAT			
	USULAN RT.001		
1	Rehab Berat Musholla Al-Qomar RT.001 Kel. Amborawang Darat	120 M2	1,000,000,000
2	*Pengadaan lampu Penerangan jalan umum RT. 001 Kel. Amborawang Darat*	5 Titik	100,000,000
3	*Lanjutan semenisasi jalan Damid Aji (Among Karya RT.001) Kel. Amborawang Darat*	P.150 M / L.3 M	250,000,000
4	*Peningkatan Jalan Gunung Kapur RT.001 Kel. Amborawang Darat*	P. 20.000 M / L. 5 M	5,000,000,000
	USULAN RT.002		
1	Peningkatan Jalan H. SABARUDIN Kel.Amborawang Darat	P.100 M/L.3 M	200,000,000
2	*Lanjutan Peningkatan Jalan Nurul Jadid RT. 002 Kel. Amborawang Darat*	P. 200 M/ L.3 M	300,000,000
3	*Peningkatan Jembatan perumahan H. SABARUDIN RT. 002 Kel. Amborawang Darat*	P. 3M/ L. 5.M	100,000,000
4	*Peningkatan Jembatan Musholla Al-Ikhlas RT. 002 Kel. Amborawang*	P. 3M/ L. 5.M	100,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
	Darat		
5	*Kanopi teras Musholla Al-Ikhlas RT. 002 Kel. Amborawang Darat*	P.6.M/L.3. M	100,000,000
6	*Kanopi teras Musholla Nurul Jadid RT. 002 Kel. Amborawang Darat*	P.8.M/L. 3.M	100,000,000
7	*Lanjutan peningkatan jalan Pancur RT. Kel. Amborawang Darat*	P.50. M/L 3 M	100,000,000
8	*Rehab tempat wudhu Musholla Al-Ikhlas RT. Kel. Amborawang Darat*	P.8.M/L. 3.M	100,000,000
9	*Drainase dan Pengadaan Sumur resapan Perumahan H.SABARUDIN RT. 002 Kel. Amborawang Darat*		
	USULAN RT. 003		
1.	Normalisasi Parit RT.003 Kel.Amborawang Darat	P.250	200,000,000
2.	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu RT.003 Kel. Amborawang Darat*	P. 20 M	100,000,000
3.	*Pembangunan turap Gang Mbah Suradi RT.003 Amborawang Darat*	P.20.M	100,000,000
4.	*Peningkatan jalan Gang Pelita RT.003 Kel. Amborawang Darat*	P.100. M/L 3 M	250,000,000
5.	*Peningkatan Gang Mbah Suradi RT.003 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M/L.3 M	250,000,000
	USULAN RT. 003		
1.	Lanjutan Peningkatan Jalan Kavling RT. 004 Kel. Amborawang Darat	P.100. M/L 3 M	250,000,000
2	*Peningkatan Gang Waluh RT. 004 Kel. Amborawang Darat*	P.100. M/L 3 M	250,000,000
3	*Pembangunan Pendopo Kuburan Muslim RT. 004 Kel. Amborawang Darat*	P. 3 M/L. 2 M	70,000,000
4	*Pembangunan Pagar Kuburan Muslim RT. 004 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	150,000,000
5	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Gang Kavling RT.004 Kel. Amborawang Darat*	P. 200 M	250,000,000
6	*Pembangunan Pagar Kuburan Kristen RT. 004 Kel. Amborawang Darat*	P. 200 M	250,000,000
	USULAN RT.005		
1	Peningkatan Jembatan 1 Jalan Pelita RT.005 Kel .Amborawang Darat	P.4 M/L.3 M	150,000,000
2	*Peningkatan Jembatan 2 Jalan Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat*	P.4 M/L.3 M	150,000,000
3	*Lanjutan peningkatan jalan Pelita RT.005 Kel. Amborawang Darat*	P. 500 M/ L. 3 M	2,000,000,000
4	*Lanjutan Peningkatan Jalan Belinjo RT. 005 Kel. Amborawang Darat*	P. 200 M/ L. 3 M	400,000,000
5	*Pembangunan Drainase Pas Batu Jalan Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	150,000,000
6	*Pembangunan Turap Jalan Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	150,000,000
	USULAN RT.006		
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Care 2 RT.006 Kel. Amborawang Darat	100 M/3M	250,000,000
2	*Lanjutan Peningkatan Jalan Elisa Barur RT.006 Kel. Amborawang Darat*	100 M/ 3.M	250,000,000
3	*Lanjutan Peningkatan Jalan Mawar RT.006 Kel. Amborawang Darat*	150 M/4.M	500,000,000
4	*Lanjutan Peningkatan Jalan Elai RT.006 Kel. Amborawang Darat*	150 M/4.M	500,000,000
5	*Peningkatan Jalan Mbah Miran RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	50 M/3.M	100,000,000
6	*Peningkatan Jalan Teratai RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	100 M/3.M	250,000,000
7	*Peningkatan Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	100 M/3.M	250,000,000
8	*Peningkatan Badan Jalan Suwarso RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	75 M/3.M	200,000,000
9	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Denkav RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	300 M	250,000,000
10	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Care 2 RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	200 M	150,000,000
11	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Elisa Barur RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	200 M	150,000,000
12	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Teratai RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	100 M	100,000,000
13	*Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	100 M	100,000,000
14	*Lanjutan Pembangunan Turap Jl. Elisa Barur RT.006 Kel. Amborawang Darat*	100 M	100,000,000
15	*Pembuatan Jembatan Sungai Jalan Suwarso RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	4 M / 4 M	100,000,000
16	*Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Jalan Denkav RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	10 Titik	300,000,000
17	*Pemasangan Cermin Cembung Lalulintas Jalan Denkav RT. 006 Kel. Amborawang Darat*	1 Titik	1,500,000
18	*Pemasangan Cermin Cembung Lalulintas diPertigaan Jalan Elisa Barur & Jalan Care 2 RT.006 Kel. Amborawang Darat*	1 Titik	1,500,000
19	*Normalisasi Sungai Amborawang Darat RT.006 Kel. Amborawang Darat*	1000 M	1,000,000,000
20	*Normalisasi Sungai Kampung Dayak RT.006 Kel. Amborawang Darat*	1000 M	1,000,000,000
	USULAN RT.007		
1.	Peningkatan Jl.Idar RT.007 Kel. Amborawang Darat	P.100 M X L.3 M	100,000,000
2.	*Normalisasi Sungai Salok Banteng RT. 007 Kel. Amborawang Darat*	500.M	500,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
3.	*Peningkatan Jalan Nanas RT. 007 Kel. Amborawang Darat*	P.500 M / L.3 M	2,000,000,000
4.	*Peningkatan Jalan Besi Tua RT. 007 Kel. Amborawang Darat*	P.200 M / L.3 M	350,000,000
5.	*Pembangunan Badan Jalan Pakis RT. 007 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M / L.3 M	150,000,000
	USULAN RT.008		
1	Lanjutan pembangunan pagar Kuburan Muslimin RT.008 Kl.Amborawang Darat	P.200 M / L.3 M	150,000,000
2	*Pembangunan kanopi Masjid Noto Igomo RT.008 Kel. Amborawang Darat*	P.10.M/L.3.M	100,000,000
3	*Pembangunan tempat wudhu Musholla Yayasan Alfa Salam RT. 008 Kel. Amborawang Darat*	P.4 M/L.3 M	100,000,000
4	*Pengadaan lampu penerangan jalan Waduk RT. 008 Kel. Amborawang Darat*	5 Titik	100,000,000
5	*Penggantian atap Musholla Yayasan Alfa Salam RT. 008 Kel. Amborawang Darat*	112 M2	200,000,000
6	*Peningkatan Jalan gang Al.-Rozak RT.008 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M / L.3 M	150,000,000
7	*Rehab Musholla Yayasan Alfa Salam RT.008 Kel. Amborawang Darat*	112 M2	100,000,000
	USULAN RT. 009		
1	Lanjutan peningkatan jalan RT.009 Kel. Amborawang Darat	P.100 M / L.4 M	250,000,000
2	*Peningkatan jalan Ramis RT.009 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M / L.3 M	250,000,000
3	*Peningkatan jalan Paelori RT.009 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M / L.3 M	250,000,000
4	*Pembangunan Drainase Pas Batu RT.009 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M	150,000,000
5	*Pembangunan Drainase Pas Batu Jalan Ramis RT. 009 Kel. Amborawang Darat*	P.100 M	150,000,000
	USULAN RT.010		
1	Peningkatan Jalan Kambas RT. 010 Kel. Amborawang Darat	P. 500 M/ L. 4 M	1,000,000,000
2	*Peningkatan Jalan UPSA RT. 010 Kel. Amborawang Darat*	P. 500 M/ L. 4 M	1,000,000,000
3	*Lanjutan Pembangunan Drainase Pas Batu Jalan RT. 010 Kel. Amborawang Darat*	p. 100 m	150,000,000
	USULAN RT.011		
1.	Lanjutan Peningkatan Jalan karya tani RT.011 Kel.Amborawang Darat	P.500M/L.4,M	2,000,000,000
2.	*Peningkatan Gang Selamet RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P.50/L.4 M	250,000,000
3.	*Peningkatan Gang Ani RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P.50.M/L. 4 M	250,000,000
4.	*Pembuatan Drainase Pas Batu RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P. 50 M	100,000,000
5.	*Pembuatan pagar kuburan muslimin RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P.50.M	150,000,000
6.	*Pembangunan Turap parkiran Mesjid An'Nur RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P.6 .M/L 4.M	100,000,000
7.	*Pembuatan pagar belakang Mesjid An'Nur RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	P.14.M/L.2M	100,000,000
8.	*Pembangunan Sekolahan TK, RA RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	2 Lokal	150,000,000
9.	*Pemasangan Lampu Jalan RT. 011 Kel. Amborawang Darat*	7 Titik	100,000,000
	USULAN RT.012		
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Care 1 RT.12 Kel. Amborawang Darat	P.400 M/L. 4 M	1,000,000,000
2	*Pembangunan Drainase Jalan Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P.400 M	400,000,000
3	*Pembangunan Drainase Jalan Care 2 RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P.400 M	400,000,000
4	*Peningkatan Jalan Sunkarno (Belakang SMP 2 RT. 012 Kel. Amborawang Darat)*	P.200 .M/L.3.M	250,000,000
5	*Penurapan Lahan kiri jalan Raya RT.12 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	200,000,000
6	*Pembangunan Turap Jalan Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	200,000,000
7	*Rehabilitasi Jembatan jalan Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P.6.M/L.4M	60,000,000
8	*Rehabilitasi pagar Kantor Lurah RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P. 100 M	100,000,000
9	*Peningkatan jalan/gang Makmur RT. 012 Kel. Amborawang Darat*	P.50 M/L.3 M	100,000,000
10	*Peningkatan/ semenisasi halaman Kantor Lurah Amborawang Darat*	300 M2	150,000,000
	USULAN POSYANDU		
1	Pemasangan KWH dan Intalasi Listrik Posyandu Melati 1, Melati 2, Melati 3 Kel. Amborawang Darat	3 Unit	10,000,000
2	*Pemasangan air PDAM Posyandu Melati 1, Melati 2, dan Melati 3 RT. 010 Kel. Amborawang Darat*	1 Jaringan	100,000,000
3	*Peningkatan/semenisasi halaman Polindes dan posyando*	200 M2	100,000,000
4	*Peningkatan / semenisasi jalan Posyandu Melati 2 Kel. Amborawang Darat*	P 10.M/L.5.M	50,000,000
5	*Fasilitas Ranjang Periksa Melati 2 Kel. Amborawang Darat*	1 SET	10,000,000
	USULAN PKK		
1	Permohonan Pengadaan Meubeler Gedung PKK Kel.Amborawang Darat	1 Set	150,000,000
2	*Pengadaan Kipas Angin Besar Gedung PKK Kel. Amborawang Darat*	2 Unit	1,000,000
3	*Pemasangan Instalasi Listrik Gedung PKK Kel. Amborawang Darat*	1 Paket	10,000,000
	USULAN PAUD PERMATA HATI		
1.	Gedung Sekolah Paud Kel. Amborawang Darat	20 M2	200,000,000
2.	*Pengadaan Laptop*	1 Unit	20,000,000
3.	*Pengadaan Meja dan kursi guru Paud*	3 Unit	50,000,000
4.	*Pengadaan Lemari*	1 Unit	5,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
5.	*APE diluar kelas*	1 Paket	50,000,000
	1. Perosotan		
	2. Panjatan		
	3. Putaran		
	USULAN SD. 005 SAMBAR		
1	Banngunan ruang kelas baru SD. 005 Kel.Amborawang Darat	2 Unit	500,000,000
2	*Pembangunan Pagar SD. 005 Kel. Amborawang Darat*	P. 136 M	100,000,000
3	*Pembangunan Turap Halaman Belakang SD. 005 Kel. Amborawang Darat*	P. 50 M	150,000,000
4	*Pemasangan rambu lalu lintas dan Polisi tidur*	1 Paket	100,000,000
	USULAN SMPN.2		
1.	Pembuatan Pagar SMP N 2 Kel. Amborawang Darat	P. 400 M	400,000,000
2.	*Pembuatan Gedung Literasi dan Kesenian SMP N 2 Kel. Amborawang Darat*	P.12.M/L. 8 M	250,000,000
3.	*Pembuatan Gudang peralatan sekolah SMP N 2 Kel. Amborawang Darat*	P.12.M /L. 8 M	250,000,000
	USULAN LEMBAGA ADAT		
1.	Pengadaa Peralatan musik tradisional Kel. Amboeawang darat	1 Paket	100,000,000
	Gendang		
	Gong		
	Gambus		
	Organ		
	Gamelan		
	USULAN KARANG TARUNA		
1	Perataan Tanah Lapangan Bola Baru Kel. Amborawang Darat	8000 m2	200,000,000
2	*Pengadaan Pemotongan rumput lapangan bola Amborawang Darat*	2 Unit	100,000,000
3	*Pengadaan Sound system lengkap Speaker Huper Ak. 15 Karang Taruna Kel. Amborawang Darat*	4 Unit	50,000,000
4	*Pengadaan Mixer Huper*	2 Unit	50,000,000
5	*Pengadaan Basstube Huper*	2 Unit	50,000,000
	USULAN GAPOKTAN		
1.	Mesin pengairan dan selang air Kel.Amborawang Darat	5 Unit	50,000,000
2.	*Modernisasi pertanian Alsintan Cultivator*	2 Unit	60,000,000
	USULAN MI AL FATAH RT .11		
1.	Pembuatan pagar sekolah Kel. Amborawang Darat	1500 M2	100,000,000
2.	*Pembangunan Ruang Kelas Baru 1 Lokal MI AL-FATAH Kel. Amborawang Darat*	5 / 7 M	100,000,000
3.	*Sapras multimedia Laptop MI AL-FATAH Kel. Amborawang Darat*	1 Unit	20,000,000
	USULAN TK KEMUNING		
1.	Renovasi ruang kelas A TK Kemuning Kel. Amborawang Darat	P.6. M/ L.9 M	100,000,000
2.	*Renovasi atap,lantai,dinding,plafon TK Kemuning Kel. Amborawang Darat*	P.6. M/ L.9 M	100,000,000
3.	*Pengadaaan alat permainan luar*	1 Paket	30,000,000
	Jungkat jungkit		
	Prosotan		
4.	*Renovasi WC Tk Kemuning Kel. Amborawang Darat*	P.5 M / P.5 M	80,000,000
5.	*Pembuatan rambu lalu lintas*	1 Buah	80,000,000
6.	*Penyediaan printer bagi pendidik*	2 Unit	10,000,000
7.	*Pembuatan pagar keliling TK Kemuning Kel. Amborawang Darat*	20.M2	100,000,000
	USULAN YAYASAN PENDIDIKAN SYATIBI		
1.	Bangunan Gedung Baru luas tanah 9 m X 21 M Kel. Amborawang Darat	P.21.M/.L 9 M	500,000,000
2.	*Alat prasarana pembelajaran luar (JUNGKAT JUNGKIT, PROSOTAN, AYUNAN)*	3 Jenis	40,000,000
3.	*Prasarana multi media (laptop)*	1 Paket	50,000,000
4	*Printer*	1 Unit	5,000,000
5	*Proyektor*	1 Unit	50,000,000
	JUMLAH		35,914,000,000
KELURAHAN ARGOSARI			
1	Pengadaan bibit kelengkeng	1000 bibit	Rp 200,000,000.00
2	Pengadaan bibit kelengkeng 70 pohon	1000 bibit	Rp 200,000,000.00
16	Pengadaan proyektor	1 SET	Rp 200,000,000.00
17	Pengadaan laptop, printer & Proyektor	1 SET	Rp 200,000,000.00
19	Pengadaan proyektor 1 set & layar	1 SET	Rp 200,000,000.00
20	Pengadaan seragam guru 7 pcs , laptop & printer	1 SET	Rp 200,000,000.00
3	Pengadaan traktor mini dan bibit kelengkeng (poktan Handayani)	2 UNIT & 1000 bibit	Rp 200,000,000.00
4	Pelatihan UMKM	1 Kegiatan	Rp 200,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
5	Penerangan jlan umum	20 UNIT	Rp 200,000,000.00
6	Kostum kuda lumping (KI NOGO KEMBAR)	1 SET	Rp 200,000,000.00
10	Pengadaan portus set	1 SET	Rp 200,000,000.00
11	IUD	1 SET	Rp 200,000,000.00
12	Hacting	1 SET	Rp 200,000,000.00
13	Pengadaan alat tensi	1 SET	Rp 200,000,000.00
14	Pengadaan laptop & printer	1 SET	Rp 200,000,000.00
15	Pengadaan rak buku 1 unit & karpet ambal 6 unit	1 SET	Rp 200,000,000.00
21	Pengadaan timbangan, pengukur tinggi badan & alat chek darrah (easytouch)	1 SET	Rp 200,000,000.00
22	Pengadaan seragam olahraga, tensi,atk, laptop & printer	1 SET	Rp 200,000,000.00
23	Pengadaan kipas angin 2, laptop 1 & printer 1, seragam batik 7 & olahraga 7	1 SET	Rp 200,000,000.00
24	Pengadaan seragam miskat, laptop,printer,papan nama	1 SET	Rp 200,000,000.00
25	Pengadaan laptop, printer, seragam miskat 5, kipas angin 1, & alat bermain edukatif posyandu 1	1 SET	Rp 200,000,000.00
26	Pengadaan pengolahan tanaman TOGA & sound system	1 SET	Rp 200,000,000.00
7	Pengadaan bibit kelengkeng	1000 bibit	Rp 200,000,000.00
8	Pengadaan bibit kelengkeng	1000 bibit	Rp 200,000,000.00
18	Pengadaan meja tenis meja 1 set	1 SET	Rp 200,000,000.00
Bidang Infrastruktur Wilayah			
1	Parit pasangan batu gunung	100 M	Rp 200,000,000.00
2	Lanjutan turap	100 M	Rp 200,000,000.00
3	Pembangunan balai warga	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
4	Pengerasan jalan	100 M	Rp 200,000,000.00
9	Pembangunan lapangan sepak bola kelurahan	100 M	Rp 200,000,000.00
5	Pembuatan gudang penyimpanan barang	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
6	Lanjutan parit dari pos kamling rt 02 ke masjid AN-NAS	100 M	Rp 200,000,000.00
7	Pembuatan Parit dari sungai ke perbatasan rt 03	100 M	Rp 200,000,000.00
8	Pembuatan parit pembuangan air di perbatasan depan rumah bapak winaryo	100 M	Rp 200,000,000.00
9	Renovasi / pembuatan tempat wudhu masjid AN-NAS	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
10	Lanjutan Pembangunan masjid AN-NAS	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
11	Rehab plapon gypsum ukuran 10x20 & atap seng teras gereja ukuran 10x3	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
12	Cor dak pembangunan masjid AN-NAS (baru) ukuran 15x15m	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
13	Pembangunan gedung PAUD BINA ILMU	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
14	Pembangunan pagar sekolah ukuran 200x150m	200 M	Rp 200,000,000.00
15	Lanjutan parit pasangan batu gunung	100 M	Rp 200,000,000.00
16	Rehab plapon musholla AL IKHLAS	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
17	Pembangunan garasi ambulance	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
18	Rehab gedung LPM	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
19	Pengadaan meubelair LPM (meja kerja 6 unit & meja tamu 1 set)	1 SET	Rp 200,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
20	Pembuatan jalan dalam halaman geeja dari depan menuju gua bunda maria sepanjang kurang lebih 700m lebar 4m	700 M	Rp 200,000,000.00
21	Pembangunan pagar teralis halamam sekolah TK MAWAR ukuran 160m	160 M	Rp 200,000,000.00
22	Pembuatan ruang kantor & tempat bermain sekolah TK MAWAR ukuran 5x7	100 M	Rp 200,000,000.00
23	Semenisasi halaman depan TK	100 M	Rp 200,000,000.00
24	Rehab GEDUNG Desa Sehat Mandiri	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
25	Lanjutan pembangunan gedung posyandu cempaka 1	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
26	Pembuatan dapur & WC GEDUNG PKK	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
27	Pembuatan gudang penyimpanan barang inventaris	1 UNIT	Rp 200,000,000.00
28	Penimbunan badan jalan kelompok tani	100 M	Rp 200,000,000.00
29	Lanjutan parit batu gunung	100 M	Rp 200,000,000.00
30	penerangan lampu jalan	20 UNIT	Rp 200,000,000.00
31	Lanjutan Pemagaran TPU (Kuburan)	100 M	Rp 200,000,000.00
32	Lanjutan Penurapan TPU (Kuburan)	100 M	Rp 200,000,000.00
33	Pembuatan parit	100 M	Rp 200,000,000.00
34	Pelapisan jalan	100 M	Rp 200,000,000.00
35	Semenisasi tempat parkir TPU (Kuburan)	100 M	Rp 200,000,000.00
36	Semenisasi jalan tembus RT. 05 - RT. 01	100 M	Rp 200,000,000.00
37	Pembuatan parit jalan menuju TPU	100 M	Rp 200,000,000.00
38	Pelebaran jembatan penghubung	15 M	Rp 200,000,000.00
39	Penurapan jalan	100 M	Rp 200,000,000.00
KELURAHAN BUKIT MERDEKA			
1	Rehab Jalan Gang Rusdi RT 01	3 X 150 M	Rp 200,000,000
2	Lanjutan Pengerasan Jalan Gang Etam RT 01	5 X 1500 M	Rp 200,000,000
3	Semenisasi Jalan Gang H. Anwar RT 01	5 X 130	Rp 150,000,000
4	Lanjutan Semenisasi Gang Sedulur RT 01	5 X 200	Rp 200,000,000
5	Rehab Langgar Nurul Jannah		Rp 150,000,000
6	Normalisasi Parit RT 02		Rp 150,000,000
7	Lanjutan Semenisai Gang Mesjid RT 02	3 X 150 M	Rp 150,000,000
8	Rehab Semenisasi Gang Mesjid RT 02	3 X 70 M	Rp 80,000,000
9	Semenisasi Gang Husin Sangaji	3 X 100 M	Rp 120,000,000
10	Pembuatan Parit RT 02	50 CM X 50 M	Rp 60,000,000
11	Penerangan Jalan RT 02	5 Titik	Rp 150,000,000
12	Pelebaran Jalan Gang Hasbullah		Rp 180,000,000
13	Lanjutan Parit RT 03	150 M	Rp 100,000,000
14	Pengadaan Bak Sampah	30 Buah	Rp 50,000,000
15	Pembuatan Parit Jalan Rawa Indah RT 03	2000 M	Rp 1,000,000,000
16	Pembuatan Turap Sungai RT 03		Rp 200,000,000
17	Penerangan Jalan RT 03	10 Titik	Rp 180,000,000
18	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)		Rp 60,000,000
19	Lanjutan Pengerasan Gang Baru RT 3	5 X 300	Rp 170,000,000
20	Pembuatan Parit RT 04	50 M	Rp 100,000,000
21	Pemeliharaan Pos Kamling		Rp 50,000,000
22	Lanjutan Semenisasi Jalan Bukit Baruga		Rp 200,000,000
23	Pembuatan Parit Jalan Bukit Baruga		Rp 200,000,000
24	Pembuatan Turap Sungai	700 M	Rp 200,000,000
25	Pembuatan Turap Badan Jalan Gang Amanah	50	Rp 200,000,000
26	Pembuatan Pagar Mesjid Jabal Nur	100 M	Rp 150,000,000
27	Pembangunan TPA		Rp 200,000,000
28	Pembuatan Parkir Mesjid		Rp 150,000,000
29	Rehab Lapangan Bulu Tangkis		Rp 50,000,000
30	Lanjutan Semenisasi Jalan Tani Aman RT 08	5 X 800 M	Rp 1,000,000,000
31	Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Tani Aman KM 45 RT 8		Rp 1,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik | Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
32	Pengadaan Multifator / Trak tor Mini Kelompok Tani Aman	30 Unit	
33	Pengadaan Bibit dan Pupuk Tanaman Buah Kelompok Tani Aman	1000	Rp 500,000,000
34	Pengadaan bibit cabe rawit, pupuk dan Mulsa Kelompok Tani Aman		
35	Lanjutan Semenisasi Jalan Mekar Baru RT 09	3 X 100	Rp 150,000,000
36	Pembuatan Parit Jl. Mekar Baru KM 45 RT 09	150 M	Rp 150,000,000
37	Pembuatan Jembatan Jl. Mekar Baru	4 X 4 M	Rp 190,000,000
38	Lanjutan Semenisasi Jalan Rawa Bebek RT 10	3 X 60	Rp 100,000,000
39	Lanjutan Semenisasi Jalan Batu Dinding RT 10	4 X 1000 M	Rp 1,000,000,000
40	Pengerasan Jalan Batu Dinding	4 X 700 M	Rp 500,000,000
41	Semenisasi Gang Harapan	3 X 50 M	Rp 60,000,000
42	Rehab TK. Tunas Perjuangan		Rp 150,000,000
43	Paving Halaman TK. Tunas Perjuangan		Rp 80,000,000
44	Pembuatan Pos Kamling RT 11		Rp 200,000,000
45	Pengadaan Sumur Bor dan Penaampungan Air Bersih RT 11		Rp 200,000,000
46	Pengerasan Jalan Kuburan Katolik		Rp 100,000,000
47	Lanjutan Jalan Semenisasi Jalan Flabomora I		Rp 200,000,000
48	Semenisasi Jalan Flabomora 2		Rp 200,000,000
49	Pembuatan Pagar Gereja Katolik Utuslah Rohmu Ya Kudus		Rp 200,000,000
50	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT 11		Rp 200,000,000
51	Pengadaan Tenda Permanen		Rp 150,000,000
52	Pembuatan Parit Jalan Flabomora I		Rp 180,000,000
53	Semenisasi Lorong Jl. Flabomora I		Rp 180,000,000
54	Pembuatan Gorong-gorong Jalan		Rp 180,000,000
55	Pembuatan Gasebo Kuburan Katolik		Rp 200,000,000
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kuburan Katolik		Rp 130,000,000
57	Semenisasi Belakang Gereja		Rp 150,000,000
58	Semenisasi Halaman Pesantren Tahfiz As Sholihin		Rp 150,000,000
59	Pembuatan Gapura Pesantren Tahfiz As Sholihin		Rp 150,000,000
60	Pengerasan Jl. Swadaya KM 47 RT 12		Rp 150,000,000
61	Semenisasi Jalan Kemakmuran RT 12		Rp 180,000,000
62	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Baru RT 13	4 X 100 M	Rp 200,000,000
63	Pembuatan Pendopo Kuburan Baru RT 13		Rp 150,000,000
64	Pembuatan Penampungan Bak Sampah		Rp 80,000,000
65	Semenisasi Gang Family	3 X 100 M	Rp 190,000,000
66	Pengerasan Gang Kelompok Tani	3 X 100 M	Rp 190,000,000
67	Semenisasi Gang Karet	3 X 100 M	Rp 190,000,000
68	Semenisasi Parkiran Mesjid Istiqlal	40 M X 20 M	Rp 150,000,000
69	Pembuatan Sumur Bor 2 Titik		Rp 100,000,000
70	Bangunan RKB SDN 035		Rp 500,000,000
71	Pembuatan Jalan Gg. Damanhuri	3 X 100 M	Rp 150,000,000
72	Rehab Semenisasi Jalan SDN 035		Rp 150,000,000
73	Pengadaan Lampu Jalan Solar Cell		Rp 150,000,000
74	Pembuatan Parit 01 Kampung Nenas		Rp 200,000,000
75	Pembuatan Sumur Bor Kampung Nenas		Rp 150,000,000
76	Gapura Kuburan Muslimin Km 50		
77	Pagar Keliling Kuburan		
78	Pengerasan Badan Jalan Gang Mandiri RT 16	3 X 100 M	Rp 200,000,000
79	Pembuatan Sumur Bor RT 16		Rp 100,000,000
80	Pembuatan Pagar Mesjid Al-Muttaqien		Rp 200,000,000
81	Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT 17		Rp 200,000,000
82	Pembuatan Pagar Mesjid Al-Ikhlas		Rp 200,000,000
83	Pembuatan Pagar Langgar Nur Ikhlas		Rp 180,000,000
84	Pengadaan Air bersih RT 17		Rp 200,000,000
85	Lanjutan Semenisasi Jalan Ulin		Rp 200,000,000
86	Pengerasan Jalan Ulin		Rp 150,000,000
87	Rehab Jalan Kelompok Tani		Rp 150,000,000
88	Pembuatan Sumur Beton		Rp 190,000,000
89	Semenisasi Jalan Hidup Baru 2	4 X 200 M	Rp 200,000,000
90	Rehab Lapangan Bulu Tangkis		Rp 50,000,000
91	Semenisasi Jalan Gang Al-Musafirin	130 X 2.5 M	Rp 180,000,000
92	Lanjutan Semenisasi Gang Sawit	70 X 2.5 M	Rp 80,000,000
93	Semenisasi Gang Rahman	60 X 2.5	Rp 70,000,000
94	Pengadaan Menara Mesjid Al-Musafirin		Rp 100,000,000
95	Pembuatan Parit RT 19	200 X 1 M	Rp 200,000,000
96	Pembangunan Jembatan 2 RT 20	5 X 10 M	Rp 200,000,000
97	Pembangunan Jembatan 3 RT 20	5 X 8 M	Rp 180,000,000
98	Pemasangan Gorong-gorong Jalan Mitra Berlian		Rp 20,000,000
99	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan KM 51		Rp 300,000,000
100	Lanjutan Semenisasi Jalan Kampung Nenas RT 20		Rp 200,000,000
101	Pemasangan Turap Jembatan 2 RT 20	30 CM X 60 M	Rp 80,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
102	Pembuatan Pos Kamling RT 20	4 X 6 M	Rp 100,000,000
103	Normalisasi Sungai KM 51 Dalam	500	Rp 200,000,000
104	Pembuatan Parit Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20	2 X 200 M	Rp 100,000,000
105	Semenisasi Jalan Swadaya	4 X 500 M	Rp 250,000,000
106	Rehab Langgar Al-Istiqomah		Rp 70,000,000
107	Semenisasi Jalan Beringin Agung	4 X 500 M	Rp 250,000,000
108	Pembuatan Pos Kamling RT 21		Rp 200,000,000
109	Pengadaan Alat Fardu Kifayah dan keranda mayat		Rp 70,000,000
110	Pembuatan Lapangan Senam		Rp 150,000,000
111	Penerangan Lampu Lapangan Bola	6 Tiang	Rp 250,000,000
112	Pembuatan saluran drainase Lapangan Bola	8 X 10	Rp 250,000,000
113	Pembuatan Parit Beton RT 22 A	150 M	Rp 200,000,000
114	Pembuatan Parit Beton RT 22 B	150 M	Rp 200,000,000
115	Semenisasi RT 22	4 X 100 M	Rp 200,000,000
116	Pembuatan Pagar Lapangan Bola Volly	90 M	Rp 200,000,000
117	Pembuatan Pagar Lapangan Bola		Rp 200,000,000
118	Normalisasi	200 M	Rp 200,000,000
	Pendidikan		
119	Pengadaan Mebeleir Mts As-Salam Kel. Bukit Merdeka	50 Pasang	Rp 100,000,000
120	Paving Halaman SD 040		Rp 180,000,000
121	Rehab Atap SD 026		Rp 200,000,000
122	Bangunan RKB SDN 035		250,000,000
123	Pembuatan Pagar TK. Cahaya Bunda		150,000,000
124	Pembuatan Canopy TK. Cahaya Bunda		60,000,000
125	Pembuatan Plafon Ruang Kelas		50,000,000
126	Penambahan Ruang Belajar TK. Cahaya Bunda		150,000,000
127	Pembuatan Gedung Sanggar Tari Karisma Nusantara		Rp 200,000,000
128	Pengadaan Kostum Tari Sanggar Tari Karisma Nusantara		Rp 100,000,000
129	Pengadaan Kostum Tari Sanggar Tari Aksara Nusantara		Rp 100,000,000
130	Pengadaan Proyektor Karang Taruna Anggakara	1 Set	Rp 15,000,000
131	Pengadaan Laptop dan Printer Karang Taruna Anggakara	1 Set	Rp 20,000,000
132	Pembangunan Gedung PAUD Mawar 20		Rp 250,000,000
	Pokdarwis		
132	Pengerasan Jalan Mekar Jaya KM 45 RT 10	3 X 1000 M	Rp 1,000,000,000
134	Penerangan Jalan Mekar Jaya KM 45 RT 10	10 Titik	Rp 100,000,000
	Posyandu		
135	Rehab Posyandu Karya Hidup Baru 2		Rp 80,000,000
136	Pengadaan Listrik Posyandu KHB 2		Rp 50,000,000
137	Pengadaan Tandon Air Posyandu KHB 2		Rp 5,000,000
138	Pengadaan Alat Habsi		Rp 50,000,000
139	Pengadaan Laptop Posyandu Lansia Hidup Sehat 2		Rp 15,000,000
140	Pengadaan Printer Posyandu Lansia Hidup Sehat 2		Rp 5,000,000
141	Pengadaan HP Posyandu Lansia Hidup Sehat 2		Rp 5,000,000
142	Pembuatan Gedung Posyandu Lansia Hidup Sehat 2		Rp 200,000,000
143	Pengadaan Laptop Posyandu Karya Hidup Baru 3		Rp 15,000,000
144	Pengadaan Printer Posyandu Karya Hidup Baru 3		Rp 5,000,000
145	Pengadaan HP Posyandu Karya Hidup Baru 3		Rp 5,000,000
146	Rehab Posyandu KHB 3		Rp 150,000,000
147	Pengadaan Alat Permainan Posyandu KHB 3		Rp 6,000,000
148	Pengadaan Tandon Air Posyandu KHB 3		Rp 5,000,000
149	Pengadaan Listrik Posyandu KHB 3		Rp 10,000,000
150	Pengadaan Kipas Angin Posyandu KHB 3		Rp 5,000,000
151	Pengadaan Laptop Posyandu Karya Hidup Baru 5		Rp 15,000,000
152	Pengadaan Printer Posyandu Karya Hidup Baru 5		Rp 5,000,000
153	Pengadaan HP Posyandu Karya Hidup Baru 5		Rp 5,000,000
154	Pengadaan Alat Permainan Posyandu KHB 5		Rp 6,000,000
155	Pengadaan Tandon dan Pipa KHB 5		Rp 50,000,000
156	Pengadaan Listrik Posyandu KHB 5		Rp 50,000,000
157	Rehab Kantor PKK		Rp 150,000,000
158	Pengadaan Mesin Jahit		Rp 30,000,000
159	Pelatihan Menjahit		Rp 50,000,000
160	Mesin Olahan Makanan		Rp 30,000,000
161	Pengadaan Kipas Angin Sound System, Karpet		Rp 10,000,000
162	Rehab Kantor LPM		Rp 100,000,000
163	Rehab Gedung BPU Kel. Bukit Merdeka		Rp 200,000,000
164	Lanjutan Normalisasi sungai RT 07		Rp 200,000,000
165	Pengerasan Jalan RT 07		Rp 100,000,000
166	Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan	5 X 1500 M	Rp 1,000,000,000
167	Pembuatan Jembatan Produksi Perkebunan	4 X 8 M	Rp 200,000,000
168	Lanjutan Semenisasi Jalan Hidup Baru	4 X 200 M	Rp 200,000,000
169	Semenisasi Jalan Hidup Baru 3	4 X 200 M	Rp 200,000,000
170	Pembuatan Parit Hidup Baru RT 18	300 M	Rp 150,000,000
171	Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan		Rp 2,000,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
172	Normalisasi Sungai Kelompok Tani Hidup Baru RT 6, 7, 18	3500 M	Rp 2,000,000,000
173	Semenisasi Jalan Kelompok Tani Hidup Baru RT 6,7 18	4 X 2500 M	Rp 2,000,000,000
	Kelompok Tani		
174	Jalan Produksi Perkebunan Karya Jidup Baru		Rp 200,000,000
175	Permohonan Green House Karya Jidup Baru		Rp 200,000,000
176	Intens Sawit		Rp 200,000,000
177	Intens Karet		Rp 200,000,000
178	Gapoktan Bukit Merdeka		Rp 300,000,000
179	Permohonan Hand Sprayer		Rp 400,000,000
180	permohonan Hend Traktor		Rp 700,000,000
181	Permohonan Eksa Mini		
182	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kelompok Tani Hidup Baru		Rp 190,000,000
183	Pestisida dan herbisida Kelompok Tani Hidup Baru		Rp 200,000,000
184	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kelompok Tani Bukit Madu		Rp 250,000,000
185	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kelompok Tani Bukit Madu		Rp 150,000,000
186	Pestisida buah naga Kelompok Tani Bukit Madu		Rp 150,000,000
187	Uppo dan sarana alsinta pengembangan tanaman jagung Kel. Tani Tunas Harapan Dua		Rp 200,000,000
188	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel. Tani Tunas Harapan Dua		Rp 180,000,000
189	Pengadaan Bibit Durian Musang King Kel. Tani Berlian Mitra Bersama		Rp 75,000,000
190	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel. Tani Berlian Mitra Bersama		Rp 1,000,000,000
191	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Mekar Sari		Rp 180,000,000
192	Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Mekar Sari		Rp 100,000,000
193	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Berkah Bersama		Rp 500,000,000
194	Pestisida Kel. Tani Bukit Baruga		Rp 50,000,000
195	Pestisida dan herbisida Kel. Tani Bina Bersama		
196	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Gajah Mada A		
197	Pestisida dan herbisida Kel.Tani Gajah Mada A		Rp 200,000,000
198	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel. Tani Gajah Mada B		Rp 190,000,000
199	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Karya nenas		Rp 190,000,000
200	Pestisida dan herbisida Kel.Tani Karya nenas		Rp 100,000,000
201	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Makmur Raya		Rp 180,000,000
202	Pengajuan Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Makmur Raya		Rp 100,000,000
203	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Mekar Jaya		Rp 180,000,000
204	Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Mekar Jaya		Rp 100,000,000
205	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Rawa Indah		Rp 180,000,000
206	Irigasi sawah Kel.Tani Rawa Indah		Rp 300,000,000
207	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Sumber Harapan		Rp 180,000,000
208	Pestisida dan Herbisida Kelompok Tani Sumber Harapan		Rp 100,000,000
209	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Sejahtera		Rp 190,000,000
210	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Sumber Harapan		Rp 180,000,000
211	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Hidup Bersama		Rp 190,000,000
212	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Baru Hidup		Rp 500,000,000
213	Peningkatan Jalan Hamparan Jaya		500,000,000
214	Bantuan pakan ikan dan bibit ikan gurame dan nila untuk kolam tanah Pokdakan Barokah		Rp 60,000,000
KELURAHAN KARYA MERDEKA			
1	PERBAIKAN PLAFON GEDUNG PKK	1 Paket	Rp 150,000,000
2	PEMBUATAN WC GEDUNG PKK	1 Paket	Rp 100,000,000
3	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK PKK	1 Paket	Rp 50,000,000
4	PENGADAAN LAPTOP POSYANDU	1 Paket	Rp 100,000,000
5	PELATIHAN FARDHU KIFAYAH	1 Paket	Rp 100,000,000
6	PEMBUATAN JALAN KHUSUS SMPN-07	1000 METER	Rp 1,000,000,000
7	PEMBUATAN PERPUSTAKAAN SDN 034	1 PAKET	Rp 300,000,000
8	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMP MERDEKA	1 PAKET	Rp 300,000,000
9	SEMENISASI HALAMAN SEKOLAH SMP MERDEKA	5 M X 40 M	Rp 200,000,000
10	PEMBUATAN PAGAR SEKOLAH SMP MERDEKA	260 M	Rp 300,000,000
11	PEMBUATAN PAGAR PASAR KARYA MERDEKA	350 M	
12	PEMBUATAN AKSES JALAN KELUAR PASAR KARYA MERDEKA	1 PAKET	
13	PEMASANGAN LISTRIK PASAR KARYA MERDEKA	1 PAKET	
14	PEMBUATAN PAGAR SEKOLAH TK KARYA MERDEKA	P 100 M X L 3 M	Rp 150,000,000
15	PEMBUATAN PARIT SEKOLAH TK KARYA MERDEKA	P 50 M X L 60 CM	Rp 125,000,000
16	PEMBUATAN CANOPI LENGKUNG BAJA RINGAN SEKOLAH TK KARYA MERDEKA	P 15 M X L 20 M	Rp 300,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
17	PENGADAAN LAPTOP TK KARYA MERDEKA	4 UNIT	Rp 40,000,000
18	PERBAIKAN RUANG KELAS TK KARYA MERDEKA	1 RUANG	Rp 10,000,000
19	PENGADAAN AC DINDING TK KARYA MERDEKA	2 UNIT	Rp 30,000,000
20	PENGADAAN MEJA DAN KURSI TK KARYA MERDEKA	60 PASANG	Rp 7,000,000
21	PENGADAAN LEMARI ARSIP TK KARYA MERDEKA	1 UNIT	Rp 7,000,000
22	PENGADAAN APE LUAR (PROSOTAN) TK KARYA MERDEKA	1 UNIT	Rp 10,000,000
23	PENGADAAN PROYEKTOR TK KARYA MERDEKA	2 UNIT	Rp 20,000,000
24	Pemberdayaan Masjid (mengadakan sarana dan prasana masjid) : Sound system, Ampli, toak dalam, toak luar, microfon, kipas angin, Token listrik masjid,perlengkapan shalat, Alat kebersihan.	10 Unit	Rp 50,000,000
25	Pembiayaan melanjutkan pembangunan TPA/TPQ	1 gedung	Rp 100,000,000
26	Pembangunan Pagar Masjid Assaudah	120 Meter	Rp 250,000,000
27	PEMBUATAN TERAS MASJID AL- MUKAROMAH	1 PAKET	Rp 200,000,000
28	PEMBANGUNAN POSYANDU SEDAP MALAM 7	1 PAKET	Rp 250,000,000
29	PEMBUATAN GAPURA GANG	2 TITIK	Rp 100,000,000
30	SEMENISASI JALAN LANJUTAN	100 Meter	Rp 150,000,000
31	PENINGKATAN BADAN JALAN KARYA BANGUN I	2000 Meter	Rp 2,000,000,000
32	PEMBUATAN PARIT PASANG BATU	200 Meter	Rp 200,000,000
33	TURAP JALAN KARYA BANGUN I	100 Meter	Rp 150,000,000
34	SEMENISASI JALAN JALAN KARYA BANGUN I	200 Meter	Rp 200,000,000
35	NORMALISASI SUNGAI RT.04	1000 Meter	Rp 200,000,000
36	PAVING BLOCK MASJID AT-TAWWAB	450 M2	Rp 150,000,000
37	PENINGKATAN BADAN JL. M. AMIN	3 M X 1200 M	
38	PEMBERSIHAN ALIRAN SUNGAI	1300 M	
39	TURAP JALAN NUR WAHID	200 M	
40	PENINGKATAN BADAN JL. NUR WAHID	3 M X 500 M	
41	PEMASANGAN LAMPU JALAN M. AMIN	5 TITIK	
42	PEMBUATAN JEMBATAN JL. NUR WAHID	4 M X 6 M	
43	PENIMBUNAN JALAN NUR WAHID	500 M	
44	TURAP JALAN M. AMIN	300 M	
45	PEMASANGAN TIANG LISTRIK JL. M. AMIN	1500 M	
46	PEMBUATAN PARIT JL. M. AMIN	200 M	
47	PENGADAAN TENDA	16 M X 16 M	
48	PENGADAAN KURSI PLASTIK	300 BUAH	
49	Semenisasi / Peningkatan badan jalan	4 M x 1000 M	Rp 2,000,000,000
50	Semenisasi / Peningkatan badan jalan	3 M x 150 M	Rp 300,000,000
51	Semenisasi / Peningkatan badan jalan	3 M x 150 M	Rp 300,000,000
52	Pembuatan Jembatan	1 Paket	Rp 150,000,000
53	PEMBANGUNAN MASJID DARUSSALAM	13 x 13 M	Rp 450,000,000
54	LANJUTAN SEMENESASI JALAN KARYA BANGUN II	800 M	Rp 700,000,000
55	SEMENISASI JALAN SMP NEGERI 7 SAMBOJA	1 KM	Rp 900,000,000
56	PEMASANGAN TIANG LISTRIK SEPANJANG 4 KM.	4 KM	Rp 1,000,000,000
57	BANTUAN PENGEMBANGAN SAPI TERNAK.	20 EKOR	Rp 300,000,000
58	PENGERASAN JALAN KELOMPOK TANI KARYA BANGUN II	10 KM	Rp 500,000,000
59	Semensasi Lanjutan JL. Hasanuddin	2000 m x 5 m (10.000 m2)	Rp10,000,000,000
60	Tanah Timbunan untuk Musholah Nur Sakinah	100 Ret	Rp 35,000,000
61	Semensasi Lanjutan	200 m x 3 m (600 m2)	Rp 200,000,000
62	Semensasi Gang. Mawar 4	150 m x 3 m (450 m2)	Rp 150,000,000
63	Semensasi Gang Tani	1500 m x 4 m (6000 m2)	Rp 3,000,000,000
64	Lanjutan Semenisasi Kelurahan Karya Merdeka RT 09	200 meter x 4 meter	Rp 200,000,000
65	Pembuatan Parit Kelurahan Karya Merdeka RT 09	60cm x 100 meter	Rp 199,000,000
66	Lanjutan Parit Kelurahan Karya Merdeka RT 09	60 cm x 100 meter	Rp 199,000,000
67	Rehap Jembatan Kelurahan Karya Merdeka RT 09	L=4 meter x P=3 meter	Rp 150,000,000
68	Pembuatan Jembatan Kelurahan Karya Merdeka RT 09	L=6 meter x P=4 meter	Rp 200,000,000
69	Pembuatan Parit Kelurahan Karya Merdeka RT 09	60 cm x 50 meter	Rp 125,000,000
70	Lanjutan Semenisasi Kelurahan Karya Merdeka RT 09	4 meter x 100 meter	Rp 199,000,000
71	Pembuatan Sumur Bor Kelurahan Karya Merdeka RT09	1 Titik	Rp 150,000,000
72	Pelebaran Badan Jalan Kelurahan Karya Merdeka RT 09	1 meter x 50 meter	Rp 50,000,000
73	Peningkatan Badan Jl. Kelurahan Karya merdekaRT09	1000 m	Rp 250,000,000
74	2 unit sumur bor	1 Paket	Rp 250,000,000
75	2 unit traktor tangan	1 Paket	Rp 50,000,000
76	peningkatan badan jalan	3 m×150 m	Rp 200,000,000
77	pemasangan paping	2 m× 100 m	Rp 120,000,000
78	pembuatan parit	150 m	Rp 175,000,000
79	peningkatan badan jalan dan turap	3 m×35 m	Rp 200,000,000
80	peningkatan badan jalan	4m×3000m	Rp 300,000,000
81	peningkatan badan jalan	4m×130m	Rp 200,000,000
82	pemasangan tiang lampu jalan	12 tiang	Rp 120,000,000
83	Halte sekolah	4m×24m	Rp 200,000,000
84			
85	PENINGKATAN BADAN JALAN KEBUN SAWIT	50 METER	Rp 100,000,000
86	PEMBUATAN JEMBATAN	2 UNIT	Rp 150,000,000
87	PENIMBUNAN AREA JALAN KE KEBUN SAWIT	75 METER	Rp 150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
88	PEMBUATAN PERCETAKAN SAWAH DAN NORMALISASI/ PEMBUATAN PARIT BARU	900 METER	Rp 75,000,000
89	SEMENISASI JALAN AT-TAQWA	4 M X 200 M	Rp 250,000,000
90	SEMENISASI JALAN SAWIT	3 M X 300 M	Rp 300,000,000
91	SEMENISASI JALAN PONDOK TAHFIZ	3 M X 300 M	Rp 300,000,000
92	PEMBUATAN JEMBATAN JL. AT-TAQWA RT.12	1 PAKET	Rp 500,000,000
93	PEMBUATAN JEMBATAN RT.12	1 PAKET	Rp 300,000,000
94	PEMBUATAN SUMUR BOR RT. 12	2 UNIT	Rp 300,000,000
95	PENGADAAN LAMPU JALAN	20 TITIK	
96	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY	1 PAKET	Rp 200,000,000
97	PEMASANGAN TIANG LISTRIK	20 BATANG	
98	PEMBUATAN PARIT PASANG BATU	200 M	Rp 200,000,000
99	PEMBUATAN KANOPI MASJID NURUL FALAH	1 PAKET	Rp 200,000,000
##	SEMENISASI GANG BERSAUDARA	3 M X 100 M	Rp 200,000,000
##	Pembangunan WC dan Tempat Wudhu Musolla Baitul Jannah	1 Paket	Rp 150,000,000
##	Bedah Rumah	3 buah unit rumah	Rp 225,000,000
##	Pengerasan badan jalan	4 x 100 m	Rp 200,000,000
##	Pembuatan parit	100 m	Rp 200,000,000
##	LanjutanSemenisasi	4 M × 200 M	Rp 200,000,000
##	Pembuatan parit pasangan batu	60 CM × 150 M	Rp 180,000,000
##	Pengadan penerangan lampu	50 Titik	Rp 200,000,000
##	Lanjutan semenisasi	3,5 M × 200 M	Rp 200,000,000
##	Lanjutan parit pasangan batu	60 CM × 100 M	Rp 190,000,000
##	Pembuatan Aula SMP Merdeka	4 M x 8 M	Rp 200,000,000
##	SEMENISASI JALAN KELOMPOK TANI	4 M X 200 M	Rp 300,000,000
##	PEMBUATAN PARIT JL. KELOMPOK TANI	150 M	Rp 150,000,000
##	PEMBUATAN SUMUR BOR RT. 15	1 PAKET	Rp 150,000,000
##	RENOVASI MUSHOLLA HIJROTUL KHOIR	1 PAKET	Rp 150,000,000
##	PENGERASAN BADAN JALAN	150 M	Rp 100,000,000
##	Lampu penerangan jalan kampung	1 paket	Rp 80,000,000
##	Pembuatan turap batu gunung	P : 30m, L. A : 25cm, L. B : 60cm, T : 2m - 50cm	Rp 100,000,000
##	Pembuatan Parit	P : 60m, L. A : 50cm	Rp 125,000,000
##	Peningkatan jalan/vaping	P : 85m, L : 3m	Rp 160,000,000
##	Pembuatan sumur bor, tandon, pompa air, KWH listrik	1 PAKET	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Jembatan	P : 6m, L : 4m	Rp 110,000,000
##	Pembersihan Parit Sungai Duri	P : 500m, L : 6m	Rp 225,000,000
##	Normalisasi Sungai Duri	P : 700m, L : 2m	Rp 225,000,000
##	Pelebaran Bahu Jalan	P : 70m, L : 4m	Rp 110,000,000
##	Pembuatan Turap Batu Gunung	P : 150m, L. A : 25cm, L.B : 70cm, T : 150cm	Rp 225,000,000
##	Pos Kampling + KWH	P : 4m, L : 3m	Rp 85,000,000
##	Perbuatan Jembatan Perbatasan RT 16 dan RT 17 Permanen	P : 5m, L : 6m	Rp 500,000,000
##	Peningkatan badan jalan gang Darunnafi	P : 20m, L : 2m	Rp 50,000,000
##	Lanjutan Normalisasi Sungai Duri	P : 750m, L : 2m	Rp 225,000,000
##	Lanjutan Pembersihan Parit Sungai Duri	P : 500m, L : 4m	Rp 220,000,000
##	Semenisasi	100 m X 4 m X 15 cm	Rp 200,000,000
##	Peningkatan Parit	100 m X 80 cm X 20 cm	Rp 200,000,000
##	Peningkatan badan dan Turap	100 m X 20 m X 30 cm	Rp 200,000,000
##	Pagar Masjid Al-Mubarok	60 m X 2 m	Rp 200,000,000
##	PENGADAAN TENDA (Masjid Al-Mubarok)	6 M X 12 M	Rp 30,000,000
##	semenisasi jalan	200M	Rp 425,000,000
##	paret + pasangan batu	100M	Rp 187,000,000
##	sumur bor	1 unit	Rp 150,000,000
##	normalisasi sungai	1 km	Rp 100,000,000
##	rehap posyandu (plapon)	5X10 m	Rp 15,000,000
##	Pengadaan Karpet (Ambal) Masjid Ar'rahim	50 M²	Rp 50,000,000
##	Pengadaan Motor Viar Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3 Unit	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Bak Tempat Sampah Beton	4 Bak	Rp 300,000,000
##	Pengadaan Sumur Bor Serta Tandon Dan Menaranya.	1 Paket.	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Paret	100 Meter,Lebar 30 Cm	Rp 100,000,000
##	Pembuatan Paret Pasang Batu Gunung	100 Meter,Tinggi 60 Cm	Rp 150,000,000
##	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan	Panjang 200 Meter,Lebar 3 Meter, Tebal 15 Cm	Rp 200,000,000
##	Rehap Jembatan	ng 5 Meter,Lebar 3 Meter	Rp 125,000,000
##	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Turap Kanan Kiri Beserta Tanah Timbunan	ang 100 Meter, Tinggi 120 Meter	Rp 200,000,000
##	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Perkebunan	2000 Meter, Lebar 5 Meter	Rp 200,000,000
##	Pembuatan Jembatan	ng 6 Meter, Lebar 3 Meter	Rp 150,000,000
##	Pembangunan Gedung Posyandu Sedap Malam 8	ng 6 Meter, Lebar 6 Meter	Rp 225,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
##	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Turap	100 Meter, Tinggi 60 Cm	Rp 150,000,000
##	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penggerasan Batu Gunung/ Sertu	, 500 Meter, Lebar 3 Meter	Rp 200,000,000
##	Turap Paret Beton	150 Meter, Lebar 40 Cm	Rp 200,000,000
##	Pagar Masjid Al Muhajirin Km 31	100 Meter, Tinggi 3 Meter	Rp 200,000,000
##	Pangadaan Traktor Rotari Mini	1 Unit	Rp 75,000,000
##	Pengadaan AC Duduk Masjid Al Muhajirin Km 31	4 Unit	Rp 120,000,000
##	Pengadaan Mobil Ambulans Masjid Al Muhajirin Km 31	1 Unit	Rp 300,000,000
##	Pembuatan Gapura	1 Paket.	Rp 150,000,000
##	Pemasangan Tiang Listrik	20 Batang	Rp 200,000,000
##	Peningkatan Badan Jalan Semenisasi	Panjang 200 Meter,Lebar 3 Meter, Tebal 15 Cm	Rp 200,000,000
##	Peningkatan Badan Jalan Semenisasi	Panjang 100 Meter,Lebar 3 Meter, Tebal 15 Cm	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin	1 Paket	Rp 200,000,000
##	Pembuatan Sumur Bor Mushola Al Ikhlas	1 Paket	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Badan Jalan di Gang Amin	Panjang 100 m x Lebar 4 m	Rp 220,000,000
##	pemasangan turap	200 meter	Rp 198,000,000
##	peningkatan badan jalan	panjang 100 meter	Rp 200,000,000
##	Peningkatan badan jalan	panjang 500 meter	Rp 200,000,000
##	pembuatan badan jalan	panjang 1500 meter	Rp 400,000,000
##	Pengecoran Parkiran Masjid Jami' Al-Muttaqin	5 M x 25 M = 125 M²	Rp 100,000,000
##	Pembangunan Pos Kamling RT.23	3 M x 4 M = 12 M²	Rp 150,000,000
##	Pembangunan Atap dan Plafon Masjid Jami' Al-Muttaqin	1 Paket	Rp 200,000,000
##	Pengadaan Kubah Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin	1 Paket	Rp 200,000,000
##	Pembuatan Sumur BOR RT.23	1 Paket	Rp 150,000,000
##	Pembersihan Parit RT.23	1 Paket	Rp 225,000,000
##	Pembuatan Badan Jalan Gang Sejahtera 3 RT.23	4 M x 50 M	Rp 100,000,000
##	Pembuatan Jembatan Gang Sejahtera 3 b RT.23	1 Paket	Rp 200,000,000
##	Pembuatan Jembatan Gang Sejahtera 1 RT.23	1 Paket	Rp 200,000,000
##	Lanjutan peningkatan badan jalan Perkebunan RT.23	3 M x 100 M	Rp 150,000,000
##	RENOVASI BALAI GAPOKTAN	8 M x 12 M	Rp 100,000,000
##	GORONG-GORONG / SEMENISASI JALAN GAPOKTAN	20 M	Rp 50,000,000
##	SEMENISASI GANG MELATI 2	100 M	Rp 200,000,000
##	LANJUTAN PENINGKATAN BADAN JALAN SMPN-07	100 M	Rp 150,000,000
##	PERBAIKAN JALAN/GANG	200 meter	Rp 600,000,000
##	PERBAIKAN PARIT LINGKUNGAN	200 meter	Rp 500,000,000
##	SEMENISASI JL. PEPAYA	P : 500 M X L : 4 M	Rp 800,000,000
##	Lanjutan Semenisasi Jl. Kelompok Tani Makmur	P. 250 M X L. 4 M	Rp 500,000,000
##	Pembuatan Badan Jalan / Gang Pos Kamling RT.27	P. 50 M X L. 2 M	Rp 200,000,000
##	Pembuatan Sumur Bor RT.27	1 Paket	Rp 150,000,000
##	Pembuatan Parit Jl. Kelompok Tani Makmur	100 Meter	Rp 200,000,000
##	Pemasangan Paret Batu	Panjang 150M X Lebar 40Cm	Rp 200,000,000
##	Lanjutan Semenisasi	Panjang 100M X Lebar 4M	Rp 150,000,000
##	Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	Rp 100,000,000
##	Lanjutan Semenisasi	Panjang 100M X Lebar 4M	Rp 150,000,000
##	SEMENISASI JALAN GANG AL-HIJRAH	45 m	Rp 112,500,000
##	Pembuatan sumur bor	1	Rp 150,000,000
##	Penyediaan pagar mushola	30 m	Rp 75,000,000
##	Pembangunan Lanjutan jalan semenisasi	35 m3	Rp 150,000,000
##	Pemasangan Titik Lampu	15 Titik	Rp 75,000,000
##	Pembangunan Lanjutan Pos Kambling	24 m2	Rp 100,000,000
##	Pembangunan Rumah-Rumahan Sumur Bor	3 m2	Rp 26,700,000
##	Pekerjaan Lanjutan Derainase	112 m	Rp 129,900,000
##	Pekerjaan Lanjutan Derainase	80 m	Rp 97,600,000
##	parit batu	200 meter	Rp 200,000,000
##	terapi batu	100 meter	Rp 200,000,000
##	semenisasa	50 meter	Rp 150,000,000
##	peningkatan badan jalan	150 meter	Rp 200,000,000
##	lampu jalan	5 buah	Rp 70,000,000
##	cultivator	1 buah	Rp 30,000,000
##	SEMENISASI JALAN	1500 meter	Rp 3,000,000,000
##	PENGADAAN TIANG LISTRIK DAN KABEL LISTRIK	20 UNIT	Rp 300,000,000
##	PEMBUATAN SUMUR BOR	2 PAKET	Rp 300,000,000
##	PENGADAAN HAND TRACTOR	2 UNIT	Rp 75,000,000
KELURAHAN MARGOMULYO			
1	Rehab Tribun Depan Kantor Lurah Margomulyo	32	200,000,000
2	Penurapan Parit Gang Bambu 1 RT.03 Margomulyo	9000	200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
3	Pembuatan Posyandu Terpadu	70	300,000,000
4	Lanjut pembangunan BPU H.Subhan rt 07	135	200,000,000
5	Pembuatan Gapura dan Rehab Paret Masjid Al Mujahiddin RT.03 Margommulyo	8	80,000,000
6	Lanjutan Rehab Lapangan Volly RT.1 Margomulyo	240	200,000,000
7	Pemasangan pipa PDAM	500	100,000,000
8	Pembuatan Gudang Kantor Lurah Margomulyo	100	200,000,000
9	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang Mawar	90	100,000,000
10	Peningkatan Badan Jalan Samping Rumah Ibu Nini Mayah	120	100,000,000
11	Pembuatan Saluran Air Kotor Persawahan RT.03 Margomulyo	200	200,000,000
12	Rehab Balai Desa RT.03 Margomulyo	120	200,000,000
13	Peningkatan Badan Jalan Gang Ali RT.03 Margomulyo	400	200,000,000
14	Lanjutan Penurapan Parit Jln. Gg. Masjid Al Mujahiddin RT. 04 Margomulyo	90	100,000,000
15	Pembuatan gudang penyimpanan perlengkapan RT di belakang posyandu RT 05	24m	80,000,000
16	Peningkatan badan jalan semenisasi jalan dari RT.05 sampai RT.6	4800 meter2	1,200,000,000
17	Lanjutan pembuatan turap paret kanan kiri RT.6 Margomulyo	50	100,000,000
18	Semenisasi jalan Sumber Dalam RT.6 Margomulyo	300 M	350,000,000
19	Penerangan Jalan Raya Kel.Margomulyo	70 titik	175,000,000
20	Peningkatan Badan Jalan Kapling RT,03 Margomulyo	300	200,000,000
21	Pembuatan Bronjong Jembatan Sungai Rt.5	40 m	250,000,000
22	Pemagaran lapangan Bola RT.1	400	200,000,000
23	Pengadaan Tenda / bhoot Festipal	10 buah	50,000,000
24	Pembuatan lapangan Indoor (16 m x 30 M x 12 m)	480	1,000,000,000
25	PengadaanPermainan Anak-Anak Posyandu Seruni 1 ,2 dan 3		50,000,000
26	Pelatihan Seluruh kader Posyandu (Makanan PMT)Posyandu Seruni 1,2 dan 3		100,000,000
27	Pengadaan Meubelair PKK Kel.Margomulyo		75,000,000
28	Rehab Atap dan Flapon 3 Ruang Kelas SDN 007		54,145,000
29	Semenisasi (paving) Halaman Sekolah SDN 007		113,560,000
30	Rehab Balai Desa RT.03 Margomulyo	120	200,000,000
31	Pembuatan Saluran Air Kotor Persawahan RT.03 Margomulyo	200	200,000,000
32	Pemasangan PDAM dan instalasi Listrik Posyandu Seruni 1 , 2 dan Seruni 3		50,000,000
33	Semenisasi di Bawah Tiang Bendera TK restu Ibu	72	100,000,000
34	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) TK Restu Ibu		20,000,000
35	Pemasangan lantai (Tehel) TK restu Ibu	48	100,000,000
36	Pembangunan Gedung Kesenian kelurahan Margomulyo	80	200,000,000
37	Pengadaan Sound System Kelompok Kesenian Mukti Laras		75,000,000
38	Pembangunan Gedung Koperasi (Margomulyo Berkarya)	40	150,000,000
39	Lanjutan Pembuatan Turap parit gang Sufiati	200	200,000,000
40	Pengadaan Bibit Durian	1000 pohon	50,000,000
41	Pembuatan Saluran Air Kotor Persawahan RT.03 Margomulyo	200	200,000,000
42	Peningkatan Badan Jalan Gang Bambu 2 Menuju Aliran RT.03 Margomulyo	200	200,000,000
43	Pembuatan jembatan di rt 04 menuju batas rt 06 margomulyo	36	200,000,000
44	Peningkatan badan jalan di rt 04 menuju batas rt 06 margomulyo	1500	400,000,000
45	Rehab pos ronda (siskamling) rt 04 margomulyo	16	100,000,000
46	Lanjutan Pembuatan parit jl. gg masjid al Mujahiddin menuju gg beringin rt 04 margomulyo	200	200,000,000
47	Normalisasi parit pinggir jalan raya depan rumah Marta Mo	350 meter2	100,000,000
48	Peningkatan badan jalan	300 M	300,000,000
49	Pembuatan Jembatan Alternatif Penghubung RT.06 ke RT.04	36	200,000,000
50	Semenisasi Jalan Gang Suwito	120	150,000,000
51	Normalisasi parit depan Rumah Yadi Sampai Jembatan	500	100,000,000
52	Pengadaan Sound system dan Baju adat beserta aksesoris Kelompok Sanggar Tari Srikandi		25,000,000
53	Pengadaan Sound System dan baju adat beserta Aksesoris Kelompok Sanggar Tari Margo Budoyo		25,000,000
KELURAHAN SELOK API DARAT			
1	Pengadaan Sapi Bali	15 Ekor	150,000,000
2	Pengadaan Bibit Lele	10	200,000,000
3	Pengadaan Cultivator	3	50,000,000
4	Pengadaan Cultivator	3	50,000,000
5	Pengadaan Motor Viar	1	60,000,000
6	Pelatihan Kader Posyandu	20 org	60,000,000
7	Pengadaan Multivator	3	50,000,000
8	Pembuatan Pendopo KWT Lavender Gang Setia Kawan	1 Paket	50,000,000
9	a. Pelatihan BLK		50,000,000
10	b. Pelatihan Pembuatan POCC (Pupuk Organic Cair)		50,000,000
11	c. Pelatihan Menjahit dan Merajut		50,000,000
12	RT 01		
13	1. Lanjutan Semenisasi Jalan Melati RT 1 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
14	2. Bedah Rumah RT 1 Kel Salok Api Darat	3 Rumah	240,000,000
15	3. Turap Jalan Poros Arah Ke Pantai Ambalat Jalan Poros RT 01 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
16	4. Semenisasi Gang Melati II RT 1 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
17	5. Semenisasi Gang Melati III RT 1 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
18	6. Pembuatan Turap Parit Jalan Melati RT 1 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
19	7. Pembuatan Jembatan Jalan Pondok Pinang RT 1 Kel Salok Api Darat	4 M X 12 M	120,000,000
20	RT 02		
21	1.Peningkatan Jalan (Semenisasi) Gang Patria RT 2 Kel Salok Api Darat	4 x 200 M	250,000,000
22	2. Pembuatan Badan Jalan Gang Salak RT 2 Kel Salok Api Darat	4 x 300 M	350,000,000
23	3. Peningkatan Jalan (Semenisasi) Jl. Margorukun RT 2 Kel Salok Api Darat	4 x 1000 M	1,000,000,000
24	4. Pembuatan gorong-gorong Jl. Blitar RT 2 Kel Salok Api Darat	5 buah	200,000,000
25	5. Peningkatan Jalan (Semenisasi) Jl. Blitar RT 2 Kel Salok Api Darat	4 x 2000 M	2,000,000,000
26	6. Pembuatan turap dan parit Jl. Margorukun RT 2 Kel Salok Api Darat	2000 M	2,000,000,000
27	7. Pembuatan Badan Jalan Gang Sumbertirto RT 2 Kel Salok Api Darat	3 x 500 M	500,000,000
28	8. Pembuatan Badan Jalan Gang Family RT 2 Kel Salok Api Darat	4 x 300 M	300,000,000
29	9. Peningkatan Jalan (Semenisasi) Gang Mirin RT 2 Kel Salok Api Darat	3 x 300 M	300,000,000
30	10. Pengadaan Tiang Lampu Jalanan JL. Blitar RT 2 Kel Salok Api Darat	10 Titik	300,000,000
31	RT 03		
32	1. Pembuatan Parit	130 M	180,000,000
33	2. Semenisasi Gang Murni	120 M	170,000,000
34	3. Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Mappadendang	150 M	220,000,000
35	4. Pembuatan Turap Gang Buni Syahran	80 M	130,000,000
36	RT 04		
37	1. Lanjutan Semenisasi jl. Bata Merah menuju JL Margorukun RT 4 Kel Salok Api Darat	4 M X 1.5 KM	2,000,000,000
38	2. Jembatan Kecil Jl. Bata Merah RT 4 Kel Salok Api Darat	3 M X 4 M	120,000,000
39	3.Pembuatan Pagar Kuburan TPU Muslim RT 4 Kel Salok Api Darat	70 M	120,000,000
40	4. Pembangunan banduso/pondok keranda RT 4 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
41	5. Pembuatan Bak Air Kuburan RT 4 Kel Salok Api Darat	200 M	250,000,000
42	6. Peningkatan jalan Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat	200 M	250,000,000
43	7. Pembuatan Badan Jalan Gang Petteran RT 4 Kel Salok Api Darat	80 M	130,000,000
44	8. Pembuatan Saluran Drainase Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat	50 M	80,000,000
45	9. Pembuatan Jembatan Kecil Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat	3 M X 3.5M	100,000,000
46	10. Peningkatan jalan Gang Setia Kawan RT 4 Kel Salok Api Darat	70 M	120,000,000
47	11. Pengecoran Lantai BPU RT 4 Kel Salok Api Darat	20 M	100,000,000
48	12. Pembuatan Saluran Drainase Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat	85 M	135,000,000
49	13. Lanjutan Pengerasan jalan Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
50	14. Rehab WC Mushola Nurul Taqwa RT 4 Kel Salok Api Darat	4 M X 3 M	70,000,000
51	RT 05		
52	1. Semenisasi Jalan Poros JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat	200 M	250,000,000
53	2. Pembuatan Turap Parit Jalan Poros JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat	200 M	200,000,000
54	3.Semenisasi Gang Padaidi RT 5 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
55	4. Pembuatan Posyandu Teratai Putih 2 RT 5 Kel Salok Api Darat	6 M x 12 M	250,000,000
56	5. Pembuatan Jembatan JL Setia Tani RT 5 Kel Salok Api Darat	4 M X 6 M	200,000,000
57	6. Pembuatan Pintu Gerbang JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat	3 Gerbang	150,000,000
58	7. Peningkatan Jalan RT 5,10 dan 3 Tembus Ke Mappadendang Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
59	8. Peningkatan Jalan Gang Laderi RT 5 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
60	9. Pembuatan Parit Jalan Poros RT 5,6 dan 7 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
61	RT 06		
62	1. Lanjutan Semenisasi Jalan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat	4 M X 150 M	150,000,000
63	2. Lanjutan Turap Jalan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat	70 M	90,000,000
64	3. Lanjutan Semenisasi Gang Sambir RT 6 Kel Salok Api Darat	3 M X 80 M	100,000,000
65	4. Semenisasi Gang Langgar RT 6 Kel Salok Api Darat	80 M	100,000,000
66	RT 07		
67	1.Lanjutan Semenisasi JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat	4 M X 200 M	250,000,000
68	2.Semenisasi JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat	80 M	130,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
69	3. Pengadaan Tiang Listrik Jl. Setia Tani RT 7 Kel Salok Api Darat	1.5 KM	200,000,000
70	4. Lanjutan Pembuatan Parit JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat	110 M	160,000,000
71	5. Peningkatan Jalan Gunung Dua Tembus JL Mappadendang RT 7 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
72	RT 08		
73	1.Lanjutan Pembangunan Posyandu Teratai Putih IV RT 8 Kel Salok Api Darat	6 M X 8 M	200,000,000
74	2. Semenisasi Gang Nasar RT 8 Kel Salok Api Darat	80 M	120,000,000
75	3. Pembuatan Parit Gang Family RT 8 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
76	4. Semenisasi Gang Saidir RT 8 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
77	5. Peningkatan Badan Jalan Gang Rahman RT 8 Kel Salok Api Darat	50 M	130,000,000
78	RT 09		
79	1. Lanjutan Pembuatan Turap Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat	300 M	300,000,000
80	2. Pengadaan Lahan Makam Jalan Ambalat RT 9 Kel Salok Api Darat	12500 m2	170,000,000
81	3. Normalisasi Sungai Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat	100 M	100,000,000
82	4. Turap Halaman Belakang SD 032 Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat	50 M	80,000,000
83	RT 10		
84	1. Semenisasi Jalan Barokah RT 10 Kel Salok Api Darat	4 x 80 M	130,000,000
85	2. Semenisasi Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat	3 x 50 M	125,000,000
86	3. Semenisasi Gang SUKARNI dalam RT 10 Kel Salok Api Darat	3 x 50 M	125,000,000
87	4. Semenisasi Gang.Barokah RT 10 Kel Salok Api Darat	3 x 150 mtr	180,000,000
88	5. Semenisasi Gang.Masjid RT 10 Kel Salok Api Darat	2 x 40 mtr	90,000,000
89	6. Semenisasi Gang.Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat	1 x 70 mtr	90,000,000
90	7. Pembuatan Turap gang,sukarni RT 10 Kel Salok Api Darat	1 x 25 mtr	80,000,000
91	8. Pembuatan Parit Jalan Poros RT 10 Kel Salok Api Darat	2 x 50 M	110,000,000
92	9. Pembuatan Parit Jalan Poros RT 10 Kel Salok Api Darat	2 x 70 M	120,000,000
93	10. Lanjutan Pembuatan Parit Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat	0,6 x 80 mtr	130,000,000
94	11.Pembuatan jembatan RT 10 Kel Salok Api Darat	1 x 8 m	25,000,000
95	12. Pembuatan turap jalan.barokkah RT 10 Kel Salok Api Darat	1 x 40 mtr	80,000,000
96	13. Pengadaan air bersih (sumur bor)komplit tandon,mesin air,pln RT 10 Kel Salok Api Darat	4 Buah	100,000,000
97	PKK		
98	1. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja dan Lemari PKK Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
99	2. Pengadaan Papan Data PKK Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
##	3. Pengadaan Kipas Angin PKK Kel Salok Api Darat	1 Paket	8,000,000
##	4. Pengadaan Baju Seragam Kader PKK dan Posyandu Kel Salok Api Darat	1 Paket	40,000,000
##	5. Pengadaan Laptop dan Printer PKK dan Posyandu Kel Salok Api Darat	9 Unit	250,000,000
##	TK Teratai		
##	a. Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru TK Teratai Kel. Salok Api Darat	1 Paket	150,000,000
##	b. Pembuatan WC Guru TK Teratai Kel. Salok Api Darat	1 Paket	30,000,000
##	c. Pengadaan Alat Bermain Luar Ruangan TK Teratai Kel. Salok Api Darat	1 Paket	15,000,000
##	d. Pengadaan Alat Bermain Dalam Ruangan TK Teratai Kel. Salok Api Darat	1 Paket	15,000,000
##	SD 009		
##	a. Pembuatan Pagar SDN 009 Kel Salok Api Darat	100 M	150,000,000
##	b. Pembangunan Musholla SDN 009 Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
##	SD 032		
##	a. Pembuatan Turap Halaman Belakang SDN 032 Kel Salok Api Darat	50 M	150,000,000
##	b. Pembangunan UKS SDN 032 Kel Salok Api Darat	4 M X 6 M	150,000,000
##	Posyandu TP 1		
##	a. Pembuatan Kanopi antara Posyandu dengan BKB Posyandu Teratai Putih 2 Kel Salok Api Darat	1 Paket	100,000,000
##	b. Pembuatan WC Posyandu Teratai Putih 2 Kel Salok Api Darat	2 M X 3 M	80,000,000
##	c. Lanjutan Parit Depan Posyandu Teratai Putih 2 Kel Salok Api Darat	20 M	100,000,000
##	d.Pengadaan APE Posyandu Teratai Putih 2 Kel Salok Api Darat	1 Paket	20,000,000
##	e. Pembuatan Pendopo KWT Lavender Gang Setia Kawan Posyandu Teratai Putih 2 Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
##	Posyandu TP 2		
##	a. Pembangunan Posyandu TP 2 Kel Salok Api Darat	8 M x 12 M	250,000,000
##	Posyandu TP 3		
##	a. Pengadaan Perlengkapan BKB dan APE Teratai Putih 3 Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
##	b. Pembangunan Pagar Posyandu Teratai Putih 3 Kel Salok Api	12 M	60,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
	Darat		
##	c. Pembuatan Wastafel Teratai Putih 3 Kel Salok Api Darat	1 Paket	30,000,000
##	Posyandu TP 4		
##	a. Pengadaan Papan Struktur Teratai Putih 4 Kel Salok Api Darat	1 Paket	20,000,000
##	b. Pembuatan Peta Wilayah kerja TP 1 s.d 4 Kel Salok Api Darat	1 Paket	6,000,000
##	Posyandu Lansia Perkutut 1		
##	a. Pembangunan Gedung Posyandu Lansia Perkutut 1 RT 3 Kel Salok Api Darat	8 M x 12 M	250,000,000
##	b. Pelatihan Kader Posyandu Perkutut Kel Salok Api Darat	1 Paket	60,000,000
##	c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkutut Kel Salok Api Darat	1 Paket	45,000,000
##	Posyandu Lansia Perkutut 2		
##	a. Pembangunan Gedung Posyandu Lansia Perkutut 2 RT 2 Kel Salok Api Darat	8 M x 12 M	250,000,000
##	b. Pelatihan Kader Posyandu Perkutut 2 RT 2 Kel Salok Api Darat	1 Paket	60,000,000
##	c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkutut 2 RT 2 Kel Salok Api Darat	1 Paket	45,000,000
##	Karang Taruna		
##	a. Pengadaan Meja dan Kursi Lipat Karang Taruna Kel Salok Api Darat	50 Buah	50,000,000
##	Lembaga Adat		
##	a. Pengadaan Alat Drumband Kel Salok Api Darat	1 Paket	50,000,000
##	Pusban		
##	a. Pembangunan Rumah Dinas Pusban Kel Salok Api Darat	7 M X 9 M	250,000,000
##	b. Pembuatan Wastafel Pusban Kel Salok Api Darat	6 Unit	50,000,000
##	c. Pembuatan Dapur Pusban Kel Salok Api Darat	2 M X 3 M	50,000,000
##	Poktan		
##	a. Pengadaan Mesin Diesel Penyedot Air (Pompa Air) untuk 10 Poktan Kel Salok Api Darat	10 Unit	200,000,000
##	b. Pembangunan Sumur Bor Poktan Kel Salok Api Darat	10 Titik	250,000,000
##	KWT		
##	a. Pembuatan Rumah Hidroponik beserta Perlengkapannya KWT Kel Salok Api Darat	20 M X 20 M	500,000,000
##			
##	a. Pengadaan Lampu Jalanan Kel Salok Api Darat	11 Titik	200,000,000
##	Peningkatan Jalan Usaha Tani Rapak Manis RT.07 Salok Api Laut	200M	
##	Normalisasi Jalan Usaha Tani Rapak Manis RT.7 Salok Api Laut	200M	
##	Pasangan Turap Batu RT.002 Kel. Salok Api Laut	300M	
##	Turap Batu Jalan Padaidi RT.002 Kel. Salok Api Laut	300M	
##	Normalisasi Parit Perkebunan RT.3 Kel. Salok Api Laut	1.000M	
##	Semenisasi Jl. Antara Jl. Inpres RT.003 Kel. Salok Api Laut	100M	
##	Pembuatan Jembatan Gang Muslih RT.003 Kel. Salok Api Laut	4x6M2	
##	Semenisasi Pelebaran Bahu Jalan Handil III Halima RT.004 Kel. Salok Api Laut	2KM	
##	Pengaspalan Jalan Handil III Halima RT.004 Kel. Salok Api Laut	2KM	
##	Pembuatan Badan Jalan Handil III Halima RT.004 Kel. Salok Api Laut	4x86M	
##	Semenisasi Lanjutan Jl. Rapak Manis RT.004 Kel. Salok Api Laut	2x200M	
##	Peningkatan Jalan Bina Bersama RT.005 Kel. Salok Api Laut	500M	
##	Peningkatan Jalan Gunung Dup RT.005 Kel. Salok Api Laut	1x200M	
##	Turap dan Pengurukan Lapangan Volly Jl. Gunung Dup RT.005 Kel. Salok Api Laut	17x34M	
##	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Gunung Dup RT.005 Kel. Salok Api Laut	12 Titik	
##	Turap Jalan Poros Salok Api Laut RT.005	1.000M	
##	Lanjutan Peningkatan Jalan Tembus RT.005 - RT.004 Kel. Salok Api Laut	200M	
##	Semenisasi Jalan Rapak Manis RT.006 Kel. Salok Api Laut	100M	
##	Turap Batu Jalan Handil III Halima RT.006 Kel. Salok Api Laut	150M	
##	Pembuatan Jembatan Gang Famili RT.006 Kel. Salok Api Laut	3x4M	
##	Pelebaran Jalan Poros Gunung Dup Kanan-Kiri RT.007 Kel. Salok Api Laut	2x200M	
##	Peningkatan Badan Jalan Gang Mulyo RT.007 Kel. Salok Api Laut	200M	
##	Rehab Gorong-gorong Jalan Poros Gunung Dup RT.007 Kel. Salok Api Laut	3x4M	
##	Pelebaran (Pengerasan) Jalan Padaidi RT.002 Arah Pantai Kelurahan Salok Api Laut	3x1500M	
##	Pemasangan Sambungan Baru PLN Pantai Salok Api Laut Indah Kel. Salok Api Laut	Jarak 1500M	
##	Pembangunan Jembatan Jalan Padaidi RT.002 Kel. Salok Api Laut	3x10M	
##	Pemasangan PDAM Pantai Salok Api laut Indah Kel. Salok Api Laut	1 Titik	
##	Pengadaan Laptop dan Printer PKK Kelurahan Salok Api Laut	2 Unit	
##	Pengadaan Moubelair PKK Kel. Salok Api Laut	10 Unit	
##	Pembangunan Gedung Posyandu Lansia Punai Kel. Salok Api Laut	14x10M2	
##	Pengadaan laptop untuk pukesos Kel. Salok Api Laut	2 Unit	
##	Pembuatan tempat Parkir Pusban Kelurahan Salok Api laut	4x10M	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
KELURAHAN SUNGAI MERDEKA			
1	Pembanguan Kantor Kelurahan Sungai Merdeka	7 Unit	7,000,000,000
2	Pembangunan Jembatan Ambulaming RT. 18 Kel. Sungai Merdeka	1 Unit	2,000,000,000
	Pembangunan Jembatan Muara Wali RT. 18 Kel. Sungai Merdeka	P = 8 L= 4	250,000,000
	Pembangunan Jembatan Saka Kanan RT. 11 Kel. Sungai Merdeka	P = 20 L= 5	1,000,000,000
	Peningkatan jalan Rawa Lembur RT 22	P = 1000 L= 6	500,000,000
	Peningkatan Jalan Sangkutu RT 13	P = 2000 L= 6	500,000,000
	Normalisasi Sungai Buluh RT 14	P = 4000 L= 8	2,000,000,000
	Normalisasi Sungai Beras RT 25	P = 4000 L= 8	2,000,000,000
	Jembatan Kelompok Tani makmur RT. 07	P = 8 L= 4	1,000,000,000
	Jembatan Kelompok Tani makmur 2 RT. 07	P = 6 L= 4	1,000,000,000
	lanjutan normalisasi sungai Pondok Gong RT 07	P = 2000 L= 8	2,000,000,000
	Lanjutan Normalisasi Muara Wali RT 22	P = 2000 L= 8	2,000,000,000
	Lanjutan Normalisasi Saka Kanan RT 11	P = 2000 L= 8	2,000,000,000
	Revitalisasi Waduk Kelurahan Sungai Merdeka	64 Ha	100,000,000,000
2	Peningkatan jalan Kantor Kelurahan Sungai Merdeka RT. 02	P = 200 L= 8	500,000,000
	Penurapan jalan Rawa Lembur RT 22	P = 200 L= 5	500,000,000
	Peningkatan jalan Kebun Buah Desa RT 22	P = 200 L= 5	200,000,000
	Peningkatan Jalan Sangkutu RT 13	P = 200 L= 5	200,000,000
	Peningkatan jalan Tani Makmur RT 07	P = 200 L= 5	200,000,000
	Bedah Rumah Kelurahan Sungai Merdeka	10 Rumah	500,000,000
	Pembuatan Jembatan Buah Desa RT 22	1 inut	500,000,000
3	Pembangunan Puskesmas Sungai Merdeka	1 unit	1,000,000,000
	pembangunan Posyandu Melati 7	1 unit	500,000,000
5	Pembangunan Lap. Sepak Bola Mini RT 26	P = 200 L= 5	500,000,000
	Pembuatan Lapangan Voli RT 08	P = 30 L= 15	50,000,000
	Pembuatan Lapangan Voli RT 9	P = 30 L= 15	50,000,000
	turnamen bola voli RT 09	1 paket	50,000,000
	Pembuatan Tribun Lap. Damai		150,000,000
6	Program pelatihan UMKM	1 paket	50,000,000
	Pelatihan peningkatan pemanfaatan perkarangan rumah	1 paket	50,000,000
	Pelatihan Menjahit IBU-Ibu RT 11	1 paket	150,000,000
	Pelatihaan Pembuatan Kue RT 08	1 paket	50,000,000
	Pelatihan Alat Berat RT 11	1 paket	50,000,000
7	Pengadaan alat pemeliharaan tanaman buah lengken Kebun Buah Desa	7 Unit	50,000,000
	Pengadaan Hand Traktor Sawah Kelompok Tani Sumber Usaha	1 Unit	38,000,000
	Pengadaan alat perontok padi (Power Thraser)Kelompok Tani Sumber Usaha	1 Unit	38,000,000
	Pengadaan Hand Traktor Sawah Kelompok Tani Sangkutu	1 Unit	38,000,000
	Pengadaan alat perontok padi (Power Thraser)Kelompok Tani Sangkutu	1 Unit	38,000,000
	Pembangunan lantai jemur Padi Kelompok Tani Sumber Harapan	1 Unit	50,000,000
	Pembuatan saluran sekunder dan tersier areal persawahan Kelompok Tani Sumber Harapan	P = 200 L = 1	150,000,000
	Normalisasi saluran air tersier padi sawah Kelompok Tani Plus Maju	P = 200 L = 1	150,000,000
	Peningkatan jalan usaha tani Plus Maju	P = 200 L = 5	150,000,000
	Pengadaan bibit cangkok buah sawo dan jambu kristal Kelompok Tani Ruhui Rahayu	300 bibit	45,000,000
	Pengadaan bibit buah unggul durian okulasi bawor Tani Semoga Makmur	300 bibit	45,000,000
	Normalisasi saluran air skunder areal sawah Kelompok Tani Bersatu	P = 200 L = 1	150,000,000
	Pengadaan bibit durian unggul okulasi bawor Kelompok Tani Setia Tani	300 bibit	45,000,000
	Peningkatan jalan usaha tani Kelompok Tani Setia Tani	P = 200 L = 5	150,000,000
	Pengadaan alat pengolah tanah Cultivator Kelompok Tani Tani Makmur	1 Unit	45,000,000
	Pengadaan alat pengolah tanah Cultivator Kelompok Tani Muara Wali	1 Unit	45,000,000
	Pengadaan mesin pencacah pakan ternak /kompos Kelompok Tani Sepakat	1 Unit	45,000,000
	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik Gapoktan Tani Merdeka	30 Unit	20,000,000
8	Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani	200 bibit	100,000,000
9	Pengadaan Keramba Kelompok Tani Muara Wali	5 unit	100,000,000
10	Pengadaan indukan sapi bali Kelompok tani ruhui Rahayu	20 Ekor	200,000,000
	Pengadaan indukan kambing unggul Kelompok Tani Sepakat	20 Ekor	200,000,000
	Pengadaan Indukan Sapi Bali Kelompok Tani Sepakat	20 Ekor	200,000,000
	Pengadaan ternak kambing Etawa Kelompok Tani Muara Wali	20 Ekor	150,000,000
	Pengadaan indukan sapi bali Kelompok Tani Semoga Makmur	20 Ekor	200,000,000
11	Pembangunan Posyandu Melati 7	1	400,000,000
	Lanjutan Pembangunan Posyandu Melati 2		
	Lanjutan Pembangunan Posyandu Melati 3		

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
13	Pengadaan jaringan pipa PDAM untuk RT 26, 13, 14, 15, 12, 26, 19 dan rt 25	14 RT	
	Pengadaan jaringan pipa PDAM untuk masyarakat di RT 06, 07, 20 dan 29	4 RT	
14	Pengadaan penerangan jalan lingkungan RT 11	20 Titik	200,000,000
	Pengadaan penerangan jalan lingkungan RT 13	20 Titik	200,000,000
	Pengadaan penerangan jalan lingkungan RT 25	20 Titik	200,000,000
15	Pengembangan objek wisata air panas RT 11	1 unit	500,000,000
	Pengembangan objek wisata waduk Sungai Merdeka	1 Paket	2,000,000,000
16	Penyediaan Penerangan LPJU Simpang 3 Km. 38 Kel. Sungai Merdeka	20 Titik	200,000,000
	Penyediaan penerangan LPJU Jembatan Sungai Merdeka	20 Titik	200,000,000
	Penyediaan penerangan LPJU Jl. Soekarno Hatta Km 39 RT 11	60 Titik	
	Penyediaan penerangan LPJU jalan Batuah RT 06	*30 Tiang*	
	Penyediaan penerangan LPJU jalan Tani Makmur RT 07	*20 Tiang*	
	Penyediaan LPJU jalan Sangkutu RT 13 dan RT 25	*40 Tiang*	
	Penyediaan LPJU Depan SMAN 2 SAMBOJA	*10 Tiang*	
1	*Parit (Drainase) di jalan Rukam*	*L : 50 cm* *T : 50 cm* *P : 500 M*	
	DRAINASE (PARIT)	*80cmX150M*	*200,000,000*
	DRAINASE (PARIT)	*80cmX150M*	*200,000,000*
	DRAINASE (PARIT)	*80cmX150M*	*200,000,000*
	Parit (Drainase) Jalan Gg. Al Munawar	*P : 50 M*	*750,000,000.00*
	lanjutan Normalisasi Rawa Gg. Karya I	*P : 300 M*	*100,000,000.00*
	Lanjutan Normalisasi Sungai Pondok Gong RT 07	p = 3000 M L = 8	*3,000,000,000.00*
	Normalisasi Parit Jalan Masyarakat	p = 250 M L = 2	$ 200,000,000
1	*Pembuatan Parit Jl. Semenisasi*	*p = 3000 M L = 8*	
	Pembuatan Parit Gg Merah Putih RT 15	p = 250 M L = 1	$ 150,000,000
	Pembuatan Parit gg Tqur'an	p = 250 M L = 5	$ 200,000,000
	Pembuatan Parit	p = 250 M L = 1	$ 100,000,000
	Pembuatan Parit RT 18	p = 500M L = 4	$ 200,000,000
	Pembuatan parit Batu RT 18	p = 500M L = 4	$ 200,000,000
	Normalisasi Parit SDN 011	p = 1000 L = 2	$ 170,000,000
	Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan SDN 011	p = 1000 L = 2	$ 250,000,000
	Normalisasi Sawah	*P : 1000 M*	$ 250,000,000
	Pembuatan Parit Sawah	p = 250 L = 1	$ 150,000,000
	Normalisasi Parit Sawah	p = 250 L = 1	$ 150,000,000
	Pembuatan saluran Drainase	p = 150 L = 1	
	Pembuatan Parit Jalan Kuburan	p = 200 L = 1	
1	Peningkatan Badan di Jalan al Jabar	P : 250 M L : 4 M	200,000,000.00
2	Pembuatan Badan Jalan Menuju Sungai Muara wali	L : 4 M P : 500 M	200,000,000.00
3	Pembuatan Badan Jalan Menuju Sungai Muara wali	L : 4 M P : 500 M	200,000,000.00
4	Pelebaran Dan Peningkatan Badan di Jalan Rukam	P : 400 M L : 1 M	150,000,000.00
5	Peningkatan Badan Jalan Padat Karya	P : 250 m L : 4 m T : 20 cm	150,000,000.00
6	Peningkatan Badan Jalan Gang Rukam Permukiman Warga	P : 300 M L : 4 m	200,000,000.00
7	Peningkatan Badan Jalan Karya Bersama	P: 1000 M L : 5 M	200,000,000.00
8	Turap Badan Jalan Rukam	T : 1,5 M P : 100 M	200,000,000.00
9	Peningkatan Badan jalan KARYA BARU	L : 4 M P : 500 M	200,000,000.00
10	Peningkatan Badan Jalan Damai	L : 4 M P : 500 M	200,000,000.00
11	Peningkatan Badan Jalan Karya 2	P : 400 M L : 4 m	150,000,000.00
12	Peningkatan Badan Jalan Panti	L : 4 m P : 150 m	200,000,000.00
13	Pembuatan Badan Jalan Gg. Wana	L : 4 M P : 150 M	150,000,000.00
14	TURAB BATU JL KARYA BARU	1 X 250	150,000,000.00
15	Peningkatan Badan Jalan Gang Ceri	Lebar : 3 M Panjang : 200 M	200,000,000.00
16	Peningkatan Badan Jalan Gg. Al Munawar	Lebar : 3 M Panjang : 200 M	150,000,000.00
17	Peningkatan Badan Jalan Gg. Pratama	Lebar : 4 M Panjang : 500 M	600,000,000.00
18	Semenisasi Gang Karya I	Lebar : 3 M Panjang : 200 M	200,000,000.00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
19	Peningkatan Badan jalan Gang Santri	Lebar : 3 M Panjang : 200 M	100,000,000.00
20	Semenisasi Gang Wana	Lebar : 3 M Panjang : 100 M	150,000,000.00
21	Peningkatan Badan jalan Gg Karya I	Lebar : 6 M Panjang : 500 M	200,000,000.00
22	Pembuatan Turap gg Pratama	T : 1,3 M P : 100 M	200,000,000.00
23	Peningkatan Jalan Rantau	100 M	200,000,000.00
24	Peningkatan Jalan DI Jl. Widya Sari	500 M	1,000,000,000.00
25	Pemasangan Batu Gunung Parit Beton Jl. Widya Sari	2X 500 M	500,000,000.00
26	Peningkatan Kanan Kiri Jalan Batuah	1X2 X 500 M	225,000,000.00
27	Peningkatan Jalan Kelompok Tani Rukun Abadi	500 M	200,000,000.00
28	Peningkatan Jalan Lau Kawar	300 M	225,000,000.00
29	Pemasangan Batu Gunung Parit Beton Jl.	200 M	225,000,000.00
30	Peningkatan Badan di Jalan Tani Makmur I	P : 250 M L : 4 M	200,000,000.00
31	Peningkatan Badan di Jalan Tani Makmur II	P : 250 M L : 4 M	200,000,000.00
32	Peningkatan Jalan Saswoko	P : 150 M L : 4 M	200,000,000.00
33	Pemasangan Parit pasangan batu jlan. Saswoko	2X 500 M	150,000,000.00
34	Peningakatan Jl.Pondok Gong	p = 650 L = 6	$ 200,000,000
35	Peningkatan jalan Kuburan Pondok Gong	p = 150 L = 6	$ 200,000,000
36	lanjutan peningkatan Jalan Gg.Guru Dayak	p = 100 M L = 4	$ 150,000,000
37	Peningkatan Jalan gg Saidi	p = 100 M L = 4	$ 150,000,000
38	Peningkatan Jalan Gg.Cempedak	p = 100 M L = 4	$ 120,000,000
39	Pembuatan parit pasangan batu Gg Langgar	p = 150 M L = 1	$ 200,000,000
40	Pembuatan Parit Pasangan batu Jln. Pasar	p = 400 M L = 1	$ 200,000,000
41	Peningkatan Jalan GG Langgar	p = 200 M L = 4	$ 200,000,000
42	Peningkatan Jalan Gg. Melati 1	p = 150 M L = 3	$ 200,000,000
43	Peningkatan Jalan Gg. Melati 2	p = 150 M L = 2	$ 200,000,000
44	Peningkatan Jalan Gg. Karet	p = 100 M L = 2	$ 200,000,000
45	Peningkatan Jalan Pasar	p = 100 M L = 4	$ 200,000,000
46	Pembuatan Badan Jalan Masyarakat	p = 1000 M L = 5	$ 200,000,000
47	Pelebaran Jalan Akbar RT. 011	L. 5 M X P. 3000 M	
48	Penurapan Jalan Akbar RT. 11	P. 1000 M	
49	Semenisasi Jalan Sang Rapu RT. 13	3 M X 250 M	250,000,000.00
50	Semenisasi Jalan Sangkutu RT. 13 /RT. 25	4 M X 1200 M	1,500,000,000.00
51	Peningkatan Badan jalan Kelompok Tani Sangkutu	4 M X 2000 M	1,500,000,000.00
52	Peningkatan Jalan Pertanian Plus Maju	Lebar : 4 M Panjang : 100 M	200,000,000.00
53	Gorong - Gorong Jalan Pertanian Plus Maju		100,000,000.00
54	Peningkatan Jalan Rumah Ibadah Gereja Adven	Lebar : 4 M Panjang : 50 M	200,000,000.00
55	Peningkatan Jalan Gg.Merah Putih	p = 250 M L = 5	$ 200,000,000
56	Peningkatan jalan kuburan RT 15	p = 250 M L = 5	$ 200,000,000
57	Pembuatan Turap gg Merah pUtih	p = 250 M L = 5	$ 200,000,000
58	Peningkatan Jalan GG Langgar RT 15	p = 250 M L = 5	$ 200,000,000
59	Peningkatan Jalan Gg.T.Quran RT 15	p = 100 M L = 4	$ 150,000,000
60	Penignkatan Jalan Tani RT 15	p = 500 M L = 6	$ 100,000,000
61	Peningkatan jalan RT 18	p = 500M L = 4	$ 200,000,000
62	Peningkatan Badan Jalan Padat Karya	p = 500M L = 4	$ 200,000,000
63	Peningkatan Jalan SDN 011	p = 500 L = 3	$ 165,000,000
64	Pembuatan Badan Jalan gang AWA	p = 70 L = 2	$ 100,000,000
65	Peningkatan Badan Jalan Gg. Perjuangan	L : 4 M P : 150 M	200,000,000.00
66	Peningkatan Badan Jalan Gg. Durian	L : 2,5 M P : 100 M	200,000,000.00
67	Peningkatan Badan Jalan Gg. Rambutan	L : 2,5 M P : 50 M	200,000,000.00
68	Peningkatan Badan Jalan Gg. Kuburan	L : 3 M P : 100 M	200,000,000.00
69	Peningkatan Badan Jalan Gg. Ne Sappo	L : 2,5 M P : 100 M	200,000,000.00
70	Peningkatan Badan Jalan Gg. Suka Damai	L : 3 M P : 50 M	200,000,000.00
71	Pembuatan Turap Parit Gg. Perjuangan	P : 150 M	
72	Peningkatan jalan Makam Al Hayyat	p = 150 L = 4	$ 200,000,000
73	Penurapan dan pelebaran jalan Sejahtera	p = 150 L = 2	$ 150,000,000
74	Penurapan Badan Jalan Gg Sejahtera	p = 300 L = 3	$ 200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
75	Pengerasan Bahu Kiri Kanan jalan Gg Sejahtera	p = 300 L = 1	$ 200,000,000
76	Semenisasi Jalan Muara wali	L : 3 M P : 200 M	200,000,000.00
77	Semenisasi Jalan Muara wali Baru	L : 3 M P : 300 M	200,000,000.00
78	Semenisasi Jalan pompa	L : 3 M P : 500 M	200,000,000.00
79	Semenisasi Jalan Ruhui Rahayu	L : 3 M P : 500 M	200,000,000.00
80	Peningkatan Jalan Muara Wali Lama	p = 300 L = 4	$ 250,000,000
81	Peningkatan jalan Muara Wali Baru	p = 300 L = 4	$ 150,000,000
82	Peningkatan jalan pompa air	p = 12 L = 5	$ 200,000,000
83	Peningkatan Jalan Tani Merdeka	p = 500 L = 4	$ 200,000,000
84	Peningkatan Badan Jalan Bersatu	L. 3 M x 1000 M	$ 200,000,000
85	Peningkatan Jalan Bukit Mandiri	p = 500 L = 4	$ 200,000,000
86	Peningkatan Jalan Mamasa	p = 700 L = 4	$ 300,000,000
87	Peningkatan jalan Damai	p = 200 L = 4	$ 200,000,000
88	Peningkatan jalan Samping Langgar Al Muttaqien RT.26	p = 100 L = 4	$ 150,000,000
89	Peningkatan Jl.Kampung	p = 100 L = 4	$ 150,000,000
90	Peningkatan jalan Abd kadir	p = 400 L = 4	$ 200,000,000
91	Penurapan Jalan gg bubuhan	p = 60 L = 2	$ 200,000,000
92	Peningkatan Jalan Tanggul	p = 150 L = 3	$ 200,000,000
93	Peningkatan jalan gg bubuhan	p = 150 L = 3	$ 200,000,000
94	Peningkatan Jalan Tanggul	p = 150 L = 3	$ 200,000,000
95	Peningkatan jalan rawa makmur RT. 28	p = 150 L = 03	$ 150,000,000
96	Peningkatan Jalan Usaha tani	p = 150 L = 03	$ 150,000,000
97	Semenisasi Jalan Gg. Langgar	Panjang : 437,50 M	150000000
	Pembuatan/ Rehab Jembatan		
1	Pembuatan Badan Jalan Menuju Sungai Muara wali	L : 4 M P : 500 M	
2	Pembuatan Jembatan Aljabar	L : 4 M P : 4 M	
3	Pembuatan Jembatan Parit Normalisasi	L : 2 M P : 4 M	
4	Rehab Jembatan Sungai Ambolaming	L : 4 M P : 12 M	
5	Pembuatan Jembatan di Jalan Rukam	L : 4 M P : 2 M	
6	JEMBATAN KAYU ULIN JL KARYA BARU	L : 4 M P : 8 M	
7	Pembuatan Jembatan gg Pratama	L : 3 M P : 2 M	200,000,000.00
8	Pembuatan Jembatan Beton Tani Makmur	L : 4 M P : 500 M	
9	Pembuatan Jembatan Beton Tani Makmur	L : 4 M P : 4 M	
10	Pembuatan Jembatan Beton Gg Langgar	p = 3 M L = 3	$ 150,000,000
11	Pembuatan Jembatan Sungai Saka Kanan	L. 5 M X P. 25 M	1,000,000,000
13	Rehab Jembatan RT 11	L. 4 M X P. 10 M	$ 150,000,000
	pembuatan Jembatan ambulaming	p = 15 M L = 4	$ 2,000,000,000
14	Pembuatan Jembatan Sungai Muara Wali	p = 10 L = 2	$ 160,000,000
15	Pembuatan Jembatan Muara Wali	L : 3 M P : 5 M	200,000,000.00
16	Rehab jembatan Muara Wali 1	p = 8 L = 5	$ 500,000,000
17	Rehab jembatan Muara Wali 2	p = 300 L = 4	$ 200,000,000
DESA TANI BHAKTI			
1	Jalan Poros Blok A	P : 3000 M, L : 5 M, T : 20 CM	Rp 3,000,000,000
2	Jembatan Jalan Poros Blok A RT 04	P : 4 M, L : 5 M	Rp 200,000,000
3	Jembatan Jalan Poros Blok A RT 06	P : 4 M, L : 5 M	Rp 200,000,000
4	Rehab Atap Gedung Olahraga/BPU	P : 18 M, L :16 M,	Rp 400,000,000
5	Rehab Jembatan RT 07	P : 4M, L :4 M	Rp 150,000,000
6	Jembatan RT 10	P : 4M, L :4 M	Rp 150,000,000
7	Jembatan RT 10	P : 4M, L :4 M	Rp 150,000,000
8	Drainase atau normanisasi	P : 1000 M, L :5 M	Rp 170,000,000
9	Pagar Sekolah	P : 150 M	Rp 200,000,000
10	Vaping Sekolah Ukuran 20X20M	-	Rp 150,000,000
11	WC Sekolah 20 X 20 M	-	Rp 200,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	NAMA USULAN	VOLUME (Panjang/Lebar/ Tinggi/tebal)	ANGGARAN
12	TV Smart 55" Inch	-	Rp 20,000,000
13	Tempat Wudhu Sekolah	-	Rp 150,000,000
14	Lapangan Mini Soccer	P : 60 M, L : 40 M	Rp 4,000,000,000
15	Semenisasi Jalan Warga Blok B	P : 3000 M, L :5 M, T : 20 CM	Rp 3,000,000,000
16	Turap Embung Desa Tani Bhakti	P : 15 M, L : 50 CM, T : 3 CM	Rp 100,000,000
17	Pembebasan dan Pembanguna Jalan Gn.Kacang dampak Tol RT 09 dan RT 011	P : 4000 M	Rp20,000,000,000
18	Pembangunan Pasar Desa	-	Rp10,000,000,000
19	Pembuatan Kantor Desa	-	Rp20,000,000,000
20	Pembuatan Parit RT 01	500 M	Rp 500,000,000
21	Pembuatan Parit RT02 Menuju Rumah Bora	150 M	Rp 300,000,000
22	Pembuatan Parit RT 02 Depan Ruma Pak Warno	150 M	Rp 300,000,000
23	Pembuatan Parit RT 03	500 M	Rp 500,000,000
24	Pembuatan Parit RT 05	300 M	Rp 300,000,000
25	Pembuatan Parit RT 07	100 M	Rp 170,000,000
26	Pembuatan Parit RT 08	600 M	Rp 600,000,000
27	Pembuatan Parit RT 09	100 M	Rp 100,000,000
28	Pembuatan Parit RT 11	600 M	Rp 600,000,000
29	Semenisasi Jalan Gang RT 01 Tembus RT 02	500 m	Rp 1,000,000,000
30	Semenisasi Jalan Belakang MTS	500 M	Rp 1,000,000,001
31	Semenisasi Jalan Depan Rumah Le Jayadi	L : 4 M, P : 150 M	Rp 200,000,000
32	Semenisasi Jalan RT 02 Tembus RT 03		Rp 500,000,000
33	Semenisasi Jalan Gang Pak AKKA	100 M	Rp 150,000,000
34	Semenisasi Jalan Lorong Pak RT	100 M	Rp 160,000,000
35	Semenisasi Jalan RT 02 Tembus RT 01 Pak Aras	100 M	Rp 200,000,000
36	Semenisasi Jalan Depan Rumah Pak RT	100 M	Rp 200,000,000
37	Semenisasi Jalan RT 03 Tembus RT 02	500 M	Rp 500,000,000
38	Semenisasi Jalan Ke Arah Rumah Sabar	L : 3 M, P : 100 M	Rp 260,000,000
39	Semenisasi Jalan Ke Arah Rumah Iwan	L : 3 M, P : 50 M	Rp 100,000,000
40	Semenisasi Jalan Simpang Tiga Tuwo	-	Rp 100,000,000
41	Semenisasi Jalan Poros RT 06	-	Rp 300,000,000
42	Semenisasi Jalan Poros RT 07	-	Rp 300,000,000
43	Semenisasi Jalan Lorong RT 08	-	Rp 500,000,000
44	Semenisasi Jalan Tembus Kuburan	-	Rp 500,000,000
45	Semenisasi Jalan Lorong RT 10	-	Rp 500,000,000
46	Semenisasi Jalan Lorong Pak Majid	-	Rp 500,000,000
47	Semenisasi Penambahan Jalan Lorong RT 11	100 M	Rp 200,000,000
48	Semenisasi Jalan Lorong RT 11	-	Rp 500,000,000
49	Semenissi Jalan Lorong RT 011 Tembus RT 09	-	Rp 500,000,000
50	Pembuatan Jalan Perbatasan Fasum Badan Jalan	-	Rp 500,000,000
51	Pembuatan Jembatan Depan Pak Akka	-	Rp 250,000,000
52	Gorong-gorong Pengganti Jembatan	-	Rp 100,000,000
53	Pembuatan Jembatan	-	Rp 400,000,000
54	Pembuatan Jembatan Tembus Kuburan	-	Rp 500,000,000
55	Rehab Sumur Gali 3 Titik	-	Rp 150,000,000
56	Rehab Sumur Gali 6 Titik	-	Rp 150,000,000
57	Pipanisasi Ke RT 09	-	Rp 200,000,000
58	Rehab Plapon Posyandu	-	Rp 200,000,000
59	Pengecatan Pagar BPD	-	Rp 150,000,000
60	Profi Teras Kantor BPD	-	Rp 100,000,000
61	Turab RT 06	-	Rp 300,000,000
62	Pemeliharaan Aset WTP Desa	-	Rp 300,000,000
63	Pembuatan Pagar dan Jalan Kecil WTP Desa	-	Rp 300,000,000
64	Rehab Pusban Jadi Kantor PKK dan PAUD	-	Rp 300,000,000
65	Pembuatan Halaman Pusban Baru	-	Rp 300,000,000
66	Pembuatan Badan Jalan RT 11	-	Rp 250,000,000
67	Wahana Permainan Taman Edukasi	-	Rp 100,000,000
68	Renovasi Rumah Jaga WTP + Menara Tandon + Saringan WTP	-	Rp 200,000,000
69	Belanja Mesin Sthiil Besar	-	Rp 22,000,000
70	Pembuatan Jalan Embung Desa	-	Rp 500,000,000

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan RKPD diaktualisasikan melalui penyusunan Renja-PD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2026 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Samboja Barat dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah, dimana secara teknokratis prioritas Daerah telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Samboja Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Samboja Barat tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Samboja Barat mempunyai Visi yaitu : Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Samboja Barat Yang Sejahtera “ dan Misi yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Bersih , Efektif,Efesien dan Melayani “ tujuan yaitu meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan Daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas Daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan jangkauan pelayanan publik kecamatan", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapaisasaran tertentu.

Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu PD sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Samboja Barat sebagai PD pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas camat mempunyai fungsi: Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa; pembinaan ketentraman dan ketertiban; pembinaan pemberdayaan masyarakat; pembinaan kesejahteraan rakyat; dan pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Daerah adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah Peningkatan Sarana posyandu memalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Samboja Barat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Perumusan Program dan kegiatan di Kecamatan Samboja Barat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sehingga program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- Pemberantasan Kemiskinan.

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

  Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan penanggunglangan kemiskinan di Kecamatan Samboja Barat. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2026 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

  Pemberantasan kemisikinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara camat kepada Bupati, dimana terdapat 2 (dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi PD. Selanjutnya yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Samboja Barat.

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi pelayanan minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan kegiatan di Kecamatan Samboja Barat diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Samboja Barat sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah. Potensi itu terutama terkait dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Samboja Barat terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga tambang batu bara, perikanan yang ada di desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Samboja Barat dan ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli Daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Samboja Barat melalui penyusunan berbagai Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 adalah 5 (lima) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) subkegiatan.
- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Samboja Barat dan melingkupi semua desa dan kelurahan.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 pada tabel TC. 33 sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel. TC. 33

RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							RGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SAMBOJA BARAT						45.119.082.465,00							69.013.763.302,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						45.119.082.465,00							69.013.763.302,00	
	7.01	KECAMATAN						45.119.082.465,00							69.013.763.302,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Persen	19.296.811.715,00						-	25.827.254.293,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	340.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan	-		140.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	-			12 Laporan	15.610.670.715,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	19.553.789.696,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	15.135.670.715,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		18.998.789.696,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		475.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Semua Kel/Desa			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daera*	-			15 Dokumen	180.600.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	280.600.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	105.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		105.600.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 kegiatan	50.000.000,00			-	7. Peningka tan tata Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Jenis	528.153.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.819.185.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.838.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.838.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.455.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		366.252.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		156.457.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	236.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		266.252.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	115.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		286.386.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		650.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah	Jumlah layanan Administrasi		55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti			yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Umum Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*	-			3 Jenis	384.000.000,00			-	7. 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	384.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		180.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	204.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an	-		204.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bukan	1.693.188.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2.191.739.597,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7 Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		33.750.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		776.598.777,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	940.688.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah	-		1.381.390.820,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti			yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 Unit	510.200.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	877.940.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		467.740.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	60.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an	-		60.200.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			75 PERSEN	16.411.870.750,00						-	32.708.509.009,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 LAPORAN	500.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		550.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disfaslitasi*	-			1 Laporan	10.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Bhakti			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Camat*	-			30 Kegiatan	15.901.870.750,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31.948.509.009,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	917.870.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		917.870.750,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15 Laporan	14.984.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		31.030.638.259,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif*	-			72 Persen	9.015.400.000,00						-	9.803.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan*	-			2 Kegiatan	210.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	210.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga K emasyarakat an	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		185.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa/ Kelurahan*	-			23 Kegiatan	240.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-	-	240.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan*	-			11 Kali	8.565.400.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	9.353.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				13 Lembaga Kemasyarakatan	7.815.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.303.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				4 Unit	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		550.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di*	-			80 Persen	125.000.000,00						-	175.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			wilayah Kecamatan													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			2 Laporan	125.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	-			75 Persen	270.000.000,00						-	500.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan*	-			3 kegiatan	270.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	500.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5000 Orang	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
		KELURAHAN MARGOMULYO						1.166.608.000,00							1.200.089.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.166.608.000,00							1.200.089.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.166.608.000,00							1.200.089.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Persen	66.608.000,00						-	100.089.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	-			5 Laporan	63.108.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	95.989.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan	-		1.380.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Publik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		14.015.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		14.866.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.728.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		64.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 Bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.100.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.100.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			10 Kegiatan	3.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.100.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 Kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			2 Lembaga K emasyarakat	350.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	350.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga K emasyarakat an	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		350.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
		KELURAHAN ARGOSARI						1.088.440.000,00							1.125.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.088.440.000,00							1.125.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.088.440.000,00							1.125.200.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			72 Persen	63.440.000,00						-	100.200.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	61.540.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	98.300.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13.770.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.540.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60.990.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			5 Kegiatan	1.900.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.900.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Penataan dan	-		1.900.000,00	KELURAHAN ARGOSARI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			70 Persen	1.025.000.000,00						-	1.025.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			4 Kegiatan	775.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	775.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			5 Lembaga K emasyarakat	250.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga K emasyarakat an	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		250.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Argosari			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
		KELURAHAN AMBORAWANG DARAT					1.536.373.000,00							1.549.385.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.536.373.000,00							1.549.385.000,00	
	7.01	KECAMATAN					1.536.373.000,00							1.549.385.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Persen	136.373.000,00						-	149.385.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	73.033.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.072.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6.060.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		14.712.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.900.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		3.900.300,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Amborawang Darat			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		42.800.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulan	500.000,00			-	-	-	-	1.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			2 kegiatan	62.840.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	62.840.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2.840.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.400.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		450.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Amborawang Darat			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 Kegiatan	650.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	650.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				13 Lembaga Kemasyarak atan	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		650.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		KELURAHAN AMBORAWANG LAUT						1.376.975.000,00								1.380.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.376.975.000,00								1.380.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.376.975.000,00								1.380.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Persen	126.975.000,00							-	130.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 kegiatan	73.025.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75.659.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.252.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.252.300,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan	-		10.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.260.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11.394.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.512.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		41.240.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	891.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		891.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			2 kegiatan	53.450.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-	53.450.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3.050.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50.400.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.250.000.000,00						-	1.250.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 kegiatan	500.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	500.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		500.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Amborawang Laut			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
		KELURAHAN SALOK API DARAT						1.324.573.000,00							1.340.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.324.573.000,00							1.340.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.324.573.000,00							1.340.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Nilai	74.573.000,00						-	90.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	67.004.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	80.731.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8.527.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.004.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		55.200.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-	2.200.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2.200.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			2 kegiatan	7.069.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.069.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.250.000.000,00						-	1.250.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 Kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			2 Lembaga K emasyarakat	500.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-	500.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	KELURAHAN SALOK API DARAT
		KELURAHAN SALOK API LAUT						1.178.368.000,00							1.189.368.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.178.368.000,00							1.189.368.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.178.368.000,00							1.189.368.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Nilai	78.368.000,00						-	89.368.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	70.799.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	80.599.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		2.400.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Siantan, Salok Api Laut			mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.260.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola	-		5.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.139.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.139.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		54.800.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.700.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah	-		1.700.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

									Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut			yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			2 kegiatan	7.069.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.069.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.100.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			2 kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Pemerintah an dan Pelayanan Publik Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 kegiatan	350.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	350.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		350.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
		KELURAHAN KARYA MERDEKA						2.369.614.000,00							2.389.943.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.369.614.000,00							2.389.943.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.369.614.000,00							2.389.943.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Nilai	69.614.000,00						-	89.943.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Kegiatan	69.114.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	88.843.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.554.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		1.554.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Publik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17.455.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6.060.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7.244.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		55.030.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulkan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.100.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		1.100.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	2.300.000.000,00						-	2.300.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			10 Kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 Kegiatan	1.550.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.550.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				31 Lembaga Kemasyarak atan	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.550.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
		KELURAHAN SUNGAI MERDEKA						2.312.500.000,00							2.340.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.312.500.000,00							2.340.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.312.500.000,00							2.340.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Nilai	62.500.000,00						-	90.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	62.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan	-	-	89.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

											Publik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		62.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	2.250.000.000,00						-	2.250.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 Kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

												1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 Kegiatan	1.500.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.500.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				30 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
		KELURAHAN BUKIT MERDEKA						1.912.353.000,00							1.905.880.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.912.353.000,00							1.905.880.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.912.353.000,00							1.905.880.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			60 Nilai	62.353.000,00						-	55.880.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Kegiatan	61.853.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	55.330.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan	-		5.700.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA

												Publik				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15.677.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.853.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		32.100.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 Bulan	500.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah	-	-	550.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA

												yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		550.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif*	-			72 Persen	1.850.000.000,00						-	1.850.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan*	-			8 Kegiatan	750.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	750.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		450.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA

												1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	-			10 Kegiatan	1.100.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1.100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				22 Lembaga Kemasyarak atan	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penge mbangan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1.100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	J U M L A H							59.384.886.465,00							83.433.628.302,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Samboja Barat tahun 2021-2026 dan merupakan Renja-PD Kecamatan Samboja Barat Periode Tahun 2026. Renja-PD ini dimaksudkan untuk untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan Daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI